BUMN UNTUK INDONESIA

BRI

Transformasi Berkelanjutan untuk Tumbuh Semakin Kuat dan Hebat



Laporan Tahunan 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Transformasi Berkelanjutan untuk Tumbuh Semakin Kuat dan Hebat



2023
Laporan Tahunan

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik yang menciptakan situasi yang menantang dengan risiko tinggi selama tahun 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (yang selanjutnya disebut BRI/Perseroan) berhasil menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja tersebut tidak terlepas dari komitmen BRI untuk terus menjalankan Transformasi Berkelanjutan Untuk Tumbuh Semakin Kuat dan Hebat sehingga dapat terus berkontribusi terhadap penciptaan *economic* dan *social values* dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif. Transformasi berkelanjutan yang dilakukan telah yang memungkinkan BRI untuk memberikan respon strategis yang tepat ditengah situasi perekonomian yang masih jauh dari ideal pasca periode pandemi Covid19.

Perseroan berkomitmen untuk terus tumbuh berkesinambungan dengan tetap fokus pada transformasi di area *culture* dan *digital* untuk mewujudkan visi BRI yaitu menjadi "*Champion of Financial Inclusion*" pada tahun 2025.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan visi Perseroan, BRI mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki, dengan fokus pada periode eskalasi bisnis (*beyond banking*) yaitu dengan optimalisasi sinergi Holding Ultra Mikro (BRI, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani) dengan didukung *customer base* yang besar untuk menjadi *new source of growth* bagi BRI, infrastruktur yang tersebar luas dan produk dan jasa keuangan yang lengkap, serta penguatan retail banking melalui pengembangan bisnis *value chain*, penyempurnaan *digital product*, dan penguatan sinergi dan *cross selling* BRI dan perusahaan anak.

Holding Ultra Mikro sebagai bukti bahwa BRI terus proaktif untuk mendorong inklusi keuangan dengan mempermudah akses pembiayaan dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat. Di tahun kedua setelah pendirian, Holding Ultra Mikro tersebut telah melayani lebih dari 37 juta nasabah dengan produk pembiayaan, simpanan, dan juga asuransi dengan dukungan untuk mempermudah jangkauan dengan tersedianya 15 ribu unit kerja (BRI Unit 6.700, Pegadaian 4.087 dan PNM 4.553), 1.018 SENYUM (Sentra Layanan Ultra Mikro) yaitu unit *co-location*, lebih dari 740 ribu Agen BRILink dan 686 ribu *E-channels*.

Selain itu, BRI terus melakukan inovasi *digital* untuk meningkatkan layanan perbankan. BRImo sebagai *super apps* BRI secara terus menerus dilakukan penyempurnaan. Pada tahun 2023 BRImo telah mengintegrasikan aspek *artificial intelligence* yaitu *chat banking service* (Sabrina) serta meningkatkan kapabilitas *cross border transaction* dan investasi. BRImo telah melayani 31.6 juta *users* (meningkat 32,6% *yoy*), dengan 3,1 miliar transaksi yang bernilai Rp4.159 triliun, yang menghasilkan Rp2.4 triliun *fee based income*.

Konsistensi untuk terus berinovasi serta respon strategis yang tepat berhasil membuat BRI mencatatkan kinerja yang solid dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.965 triliun atau tumbuh 5,3% *yoy*. Untuk total kredit dan pembiayaan BRI mampu tumbuh 11,2% sebesar Rp1.266 triliun. Peningkatan *profitability* dengan manajemen risiko yang baik mampu membuat BRI mencatat rekor baru untuk Laba dengan mencatatkan Laba Bersih sebesar Rp60,4 triliun (meningkat 17,5% *yoy*) di penghujung tahun 2023.

Kesinambungan **Tema**



2022
Laporan Tahunan

Memperluas Jangkauan, Memberi Kemudahan, Semakin Tumbuh & Tangguh

Salah satu visi Perseroan adalah menjadi "*Champion of Financial Inclusion*" pada tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut BRI melakukan penetrasi produk dan layanan keuangan di segmen mikro dan ultra mikro. BRI mengimplementasikan konsep *hybrid bank* yang mengkombinasikan layanan digital dan *physical* (layanan perbankan konvensional) untuk memperluas jangkauan.

BRI terus memacu perkembangan layanan AgenBRILink untuk mendorong inklusi dan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Jumlah AgenBRILink telah meningkat 24,6% *YoY* menjadi 627 ribu agen dengan Nilai transaksi mencapai Rp1.298 triliun atau tumbuh 13,5% *Year on Year (YoY)*. Saat ini layanan AgenBRILink telah menjangkau 58.896 desa di seluruh pelosok Indonesia, atau meng-*cover* setidaknya >77% total desa yang ada di Indonesia.

Komitmen kuat transformasi digital juga terus dilakukan BRI untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan melalui layanan *Super Apps* BRImo yang menuai respon positif masyarakat. Layanan digital *banking* BRI ini terus mengalami pertumbuhan, dimana nilai transaksi finansial telah tumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi Rp2.669 triliun, dengan jumlah transaksi finansial mencapai 1,83 miliar transaksi, dan *users* BRImo pun melesat 68,46% (*YoY*) menjadi 23,85 juta *users*.

Disamping itu, upaya memperluas jangkauan juga dilakukan melalui *Holding* Ultra Mikro antara BRI (sebagai induk) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Satu tahun setelah pendirian, *Holding* Ultra Mikro berhasil mengintegrasikan lebih dari 34 juta nasabah ultra mikro untuk mendapatkan layanan keuangan formal. Layanan *co-location* SENYUM (Sentra Layanan Ultra Mikro) hingga akhir tahun 2022 telah mencapai 1.013 lokasi.

Dengan demikian, melalui strategi *hybrid bank* yang menjadikan layanan BRI semakin luas dan memberikan kemudahan, mendorong bisnis BRI untuk terus tumbuh dan semakin tangguh.



2021
Laporan Tahunan

Digitalisasi: Go Smaller, Go Shorter, Go Faster, Go Cheaper

Di tengah kondisi pemulihan ekonomi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) berhasil menjaga fundamental kinerja dapat tumbuh secara sehat, kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan BRI mencatatkan kinerja cemerlang tersebut merupakan hasil dari strategi transformasi yang telah dipersiapkan sejak 2016 melalui konsep besar BRIvolution 1.0. Program tersebut dimulai pada 2017 dan telah dilaksanakan hingga tahun 2020 lalu.

Sejak terjadinya pandemi, transformasi tersebut dipertajam menjadi BRIvolution 2.0 yang difokuskan pada dua area utama yaitu digital dan culture. Visi besar BRI pun turut diubah menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia*. Selain itu, fokus lainnya adalah menjadi *Champion of Financial Inclusion*. Hal itu untuk mengembalikan fokus BRI pada khittahnya di segmen UMKM termasuk usaha Ultra Mikro (UMi).

Champion of Financial Inclusion dimaksudkan guna menjaga pertumbuhan berkesinambungan perseroan. BRI mencari sumber pertumbuhan baru. Dengan strategi *go smaller*, yaitu menyasar pada segmen usaha yang lebih kecil dari mikro, yakni ultra mikro dengan menyalurkan kredit dengan *ticket size* yang lebih kecil. BRI memberikan tenor pendek sesuai kebutuhan atau *go shorter*. Selain itu, BRI memperkuat digitalisasi layanan jasa keuangannya sehingga layanan dan proses bisnis dapat lebih cepat atau *go faster*. Dengan begitu, BRI dapat melayani masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, lebih mudah, lebih cepat dan lebih terjangkau.

Untuk memberikan layanan perbankan hingga ke berbagai wilayah secara *Go Smaller, Go Shorter & Go Faster*, digitalisasi BRI dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) *framework* utama yaitu pertama *Digitizing Core* atau digitalisasi proses bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan fokus pada efisiensi. Kedua, *Digital Ecosystems* yaitu BRI menyiapkan *platform-platform* digital untuk mendorong BRI masuk ke dalam bisnis ekosistem *value chain* sehingga diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru di sisi CASA, FBI dan Nasabah baru BRI. Ketiga, *New Digital Propositions*, BRI melakukan inovasi teknologi finansial dengan pendekatan digital secara penuh dan bisnis model baru yang dapat memberikan layanan kepada nasabah lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien.

Melalui transformasi serta strategi *go smaller*, *go shorter* dan *go faster* yang didukung oleh digitalisasi, BRI terbukti dapat menunjukkan kinerja yang solid dengan mencatatkan aset konsolidasian mencapai Rp1.678,10 triliun atau tumbuh 4,23% yoy. Sedangkan untuk total kredit dan pembiayaan BRI Group telah menembus seribu triliun rupiah, tepatnya sebesar Rp1.042,87 triliun. Proporsi kredit UMKM BRI pun terus merangkak naik, sebesar 83,86% dari total penyaluran kredit BRI disalurkan kepada segmen UMKM. Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan BRI akan terus meningkatkan proporsi tersebut hingga mencapai 85% pada tahun 2024.



Mengubah Kesulitan Menjadi Ketangguhan

125 tahun sudah BRI mencatatkan perjalanan panjangnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan melayani geliat berkembangnya nasabah dari lapisan masyarakat ekonomi kecil di seluruh pelosok Indonesia. Sepanjang usianya, BRI menunjukkan komitmennya dalam mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI konsisten memberi layanan terbaik pada segmen ekonomi terbesar yang dijalani sebagian besar masyarakat Indonesia dengan membina, memberdayakan dan mendukung mereka untuk mengoptimalkan kompetensi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Konsistensi BRI telah melahirkan sejumlah besar nasabah UMKM yang "naik kelas" dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Bahkan di usianya ke-125 tahun, pandemi melanda dan menjadi periode terberat yang mengubah dinamika kehidupan dan perekonomian seluruh lapisan masyarakat. BRI tegak berdiri di depan, memberikan dukungan terbaik bagi seluruh nasabahnya. Terutama bagi nasabah UMKM yang didera penurunan omset karena pembatasan sosial ekonomi.

Mengusung visi menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*" pada tahun 2025, BRI merealisasikan banyak terobosan brilian dalam mengatasi kondisi usaha yang tertekan, yang membatasi mobilitas seluruh pelaku usaha dalam berinteraksi dan mempromosikan produknya. BRI dengan sigap merealisasikan program restrukturisasi kewajiban dan di saat bersamaan mengoptimalkan keunggulan infrastruktur dan produk-produk layanan berbasis teknologi informasi. BRI dengan gencar membentuk ekosistem bisnis berbasis digital teknologi, yang memungkinkan seluruh nasabah pelaku bisnis terkoneksi dengan para konsumennya di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke berbagai manca negara. BRI telah mengubah kesulitan menjadi peluang mengembangkan usaha dan menjadikan kreativitas dalam mengoptimalkan ekosistem digital sebagai ajang unjuk ketangguhan dalam mengatasi seluruh tantangan berusaha.

Konsistensi dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM, membuat BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.511,81 triliun dan tingkat permodalan yang kuat. BRI, kini dan ke depan, akan tetap konsisten dengan komitmennya untuk mendukung, membina, memberdayakan, dan terus memberi layanan terbaik kepada segmen UMKM. BRI bertekad untuk terus meningkatkan portofolio UMKM agar dapat memberi kontribusi terbaik kepada sebagian besar masyarakat dan memberi ketangguhan bagi daya tahan perekonomian bangsa.



Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri

BRI memiliki sejarah panjang sebagai bank yang telah melayani masyarakat Indonesia berskala ekonomi kecil. Bahkan walau usianya yang telah mencapai 124 tahun pada tahun 2019, BRI senantiasa mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI merupakan satu dari sedikit bank di dunia yang konsisten memberikan yang terbaik pada segmen tersebut untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Jumlah nasabah UMKM BRI yang "Naik Kelas" setiap tahunnya juga terus menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, tema yang diangkat pada laporan tahunan BRI 2019 dan dalam rangka menyambut usia BRI yang akan memasuki 125 tahun di tahun 2020 adalah "Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri".

Dengan meluncurkan visi menjadi *The Most Valuable Bank in Southeast Asia and Home to the Best Talent*, banyak hal yang telah dan akan dilakukan BRI untuk mewujudkannya. Kapasitas BRI menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan dan perantara keuangan tak bisa dipungkiri telah teruji. Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) industri pada tahun 2019, BRI mampu mempertahankan pertumbuhan positif di atas rata-rata industri pada kedua indikator tersebut.

Penuh komitmen menyediakan pelayanan yang prima serta bekerja dengan optimal dan baik telah membawa BRI ke level usaha yang lebih tinggi. Hasilnya, BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan jumlah aset yang mencapai Rp1.416,8 triliun pada tahun 2019. Selain itu, BRI juga sukses meraih banyak penghargaan atas produk dan layanannya dari institusi-institusi independen terkemuka selama tahun 2019. BRI pun proaktif mendukung program Pemerintah seperti peningkatan inklusi keuangan, penyaluran kredit bersubsidi Kredit Usaha Rakyat, dan atau Bantuan Sosial Non Tunai. Pencapaian semua hasil positif ini tak lepas dari kedisiplinan BRI mengedepankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Tentang Laporan Tahunan

Laporan Tahunan ini merupakan laporan terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek Perseroan di masa depan, sehingga diharapkan dapat membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Laporan tahunan ini berisi ikhtisar data keuangan penting selama 5 (lima) tahun terakhir, profil perusahaan, laporan Direksi dan Dewan Komisaris, analisis dan pembahasan manajemen yang meliputi pencapaian kinerja Perseroan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, proyeksi kinerja serta prospek Perseroan. Laporan Tahunan ini juga melaporkan penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi struktur dan proses tata kelola termasuk penerapan sistem manajemen risiko yang di antaranya menggambarkan profil risiko dan pengelolaannya.

Daftar Isi









1 Tema dan Arti Tema
2 Kesinambungan Tema
6 Daftar Isi
9 Sekilas Tentang Perseroan
10 Jejak Langkah
14 Kontribusi Terbaik Kami

Kilas Kinerja

24 Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2023
26 Ikhtisar Data Keuangan Penting
26 Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
32 Ikhtisar Operasional
34 Informasi Saham
35 Aksi Korporasi
35 Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
36 Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
38 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
38 Rating Perusahaan 2023
40 Peristiwa Penting

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

46 Laporan Direksi
60 Laporan Dewan Komisaris
74 Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 2023

Profil Perusahaan

78 Identitas Perusahaan
79 Nama dan Alamat Kantor *Regional Office* Serta Kantor Cabang Luar Negeri
81 *Brand* Perusahaan
82 Riwayat Singkat Perusahaan
84 Keterangan Perubahan Nama
86 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
86 Visi
86 Misi
86 *Review* Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi
87 Budaya Perusahaan
89 Kegiatan Usaha
89 Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
90 Produk dan Jasa
96 Wilayah Operasional
100 Struktur Organisasi
102 Daftar Keanggotaan Asosiasi
104 Profil Direksi
119 Profil Dewan Komisaris
132 Profil Pejabat Eksekutif
137 Profil Pekerja
137 Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
137 Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
137 Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia
138 Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
138 Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian
139 Jumlah Pekerja Berdasarkan Generasi

Analisis dan Pembahasan Manajemen

139 Jumlah Pekerja Berdasarkan Masa Kerja

139 Pemegang Saham Utama dan Pengendali

140 Komposisi Pemegang Saham

141 Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

142 Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

142 Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

144 Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

145 Kepemilikan Saham Senior Manajemen

145 Klasifikasi Pemegang Saham

146 Daftar Perusahaan Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

154 Struktur Grup Perusahaan

155 Informasi Kelompok Usaha Bank

156 Kronologi Penerbitan Saham

160 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

165 Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

166 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

168 Penghargaan dan Sertifikasi

183 Informasi yang Tersedia pada *Website*

186 Tinjauan Perekonomian

186 Analisis Perekonomian Global

193 Analisis Perekonomian Nasional

195 Analisis Industri Perbankan

196 Analisis Posisi BRI Dalam Industri Perbankan

198 Tinjauan Operasional

198 Strategi Bank

201 Aspek Pemasaran

201 Strategi Pemasaran

204 Pangsa Pasar

205 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

206 Segmen Operasi

264 Segmen Geografis

265 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Penugasan Lain

267 Tinjauan Keuangan

267 Kinerja Keuangan

267 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

280 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

289 Laporan Arus Kas Konsolidasian

292 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

295 Suku Bunga Dana

295 Suku Bunga Dasar Kredit

296 Analisis Kualitas Aset Produktif

300 Strategi Peningkatan *Fee Based Income*

300 Struktur Permodalan Bank

301 Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

368 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

368 Investasi Barang Modal

369 Komitmen dan Kontinjensi

369 Perjanjian Signifikan

370 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

370 Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha BUMN

370 Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

372 Pencapaian Target dan Target Ke Depan

377 Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)

377 Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

378 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

379 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

380 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

387 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Bank

389 Perubahan Kebijakan Akuntansi

390 Tingkat Kesehatan Bank

390 Informasi Kelangsungan Usaha

391 Aspek Perpajakan

392 Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

393 Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha

397 Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

397 Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis

400 Sumber Daya Manusia
401 *Framework* Pengelolaan *Human Capital*
402 Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia
402 Rekrutmen
404 Pengembangan Kompetensi
409 Pengembangan Karir
413 Penilaian Kinerja Individu
414 Sistem Remunerasi dan Kompensasi Jangka Panjang
416 Program Pensiun
416 BRILiaN Apps
418 Internalisasi Budaya
422 Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia
422 Rencana Kerja Sumber Daya Manusia 2024
423 Teknologi Informasi
424 Rencana Strategis Teknologi Informasi
426 Pengembangan Layanan Teknologi Informasi
428 Infrastruktur Teknologi Informasi
431 Tata Kelola Teknologi Informasi
435 Struktur Pengelola Teknologi Informasi
436 Rencana Kerja Teknologi Informasi 2024
437 Direktorat Fixed Assets Management & Procurement
438 Direktorat Jaringan & Layanan

Tata Kelola Perusahaan

443 Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dengan Kinerja Perusahaan
444 Tahapan Penerapan GCG
444 Dasar Penerapan Tata Kelola
446 Kerangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan
447 Struktur, Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola
465 Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
465 Pemegang Saham
467 Rapat Umum Pemegang Saham
483 Direksi
504 Dewan Komisaris
545 Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
552 Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris
555 Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
557 Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
636 Organ dan Komite di Bawah Direksi
692 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015
697 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
698 Akuntan Publik
699 Sistem Pengendalian Internal
704 Manajemen Risiko
727 Fungsi Kepatuhan
737 Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
744 Perkara Hukum
748 Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
748 Akses Informasi dan Data Perusahaan
754 Kode Etik
760 *Whistleblowing System*
763 Program Anti Korupsi
768 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
768 Jumlah Penyimpangan (Internal *Fraud*) dan Upaya Penyelesaian
769 Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
769 *Buyback* Saham dan *Buyback* Obligasi
770 Perselisihan Internal
770 Rencana Strategis Bank
770 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
771 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
771 Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)
772 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
772 Pengadaan Barang dan Jasa
772 Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
772 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

788 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
792 **Indeks Referensi OJK**
813 **Laporan Keuangan**

Sekilas
Tentang Perseroan

SEGMEN OPERASI

- Mikro
- Ritel
- Korporasi

TOTAL ASET

Rp 1.965,01 triliun



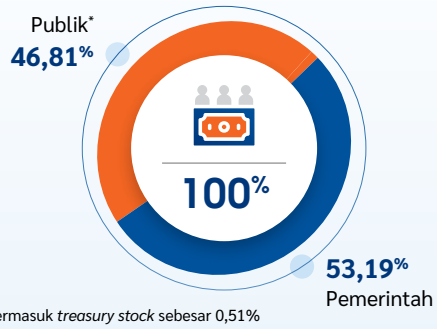
PRODUK DAN JASA UTAMA

- Produk Simpanan
- Produk Pinjaman
- Jasa Perbankan

PERUSAHAAN ANAK

PT Bank Raya Indonesia Tbk **(Raya)**	86,85%
BRI Global Financial Services Co. Ltd. **(BRI Global Financial Services)**	100,00%
PT Asuransi BRI Life **(BRI Life)**	54,77%
PT BRI Multifinance Indonesia **(BRI Finance)**	99,88%
PT BRI Danareksa Sekuritas **(BRI DS)**	67,00%
PT BRI Ventura Investama **(BRI Ventures)**	99,97%
PT BRI Asuransi Indonesia **(BRI Insurance)**	90,00%
PT Pegadaian	99,99%
PT Permodalan Nasional Madani **(PNM)**	99,99%
PT BRI Manajemen Investasi **(BRI MI)**	65,00%

PEMEGANG SAHAM



* Sudah termasuk *treasury stock* sebesar 0,51%

PERUSAHAAN ASOSIASI

PT Bahana Artha Ventura **(BAV)**	15,10%
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **(KSEI)**	3,00%
PT Pemeringkat Efek Indonesia **(Pefindo)**	0,18%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. **(BSI)**	15,38%

Jejak Langkah



1895

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Crediet bank atau Volksbank dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934 berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi Syomin Ginko (1942-1945).

1946

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian.

1960

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1968

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

1969

BRI ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit program Bimbingan Masal (Bimas) dan mulai dibentuknya BRI Unit.

1984

Setelah dihentikannya program Bimas oleh Pemerintah, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial yang disalurkan melalui BRI Unit.

1992

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, terjadi perubahan status badan hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (Persero).

2003

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan *ticker* "BBRI". Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI.

2007

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah.

2009

Interkoneksi *real time online* seluruh jaringan kerja yang pada saat itu berjumlah 6.480 unit kerja.

2011

- Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1: 2.
- Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
- Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

2013

BRI Hybrid Banking merupakan layanan *self- service* banking yang pertama di Indonesia.

2014

- Jaringan ATM BRI terus bertumbuh mencapai 20.792 unit ATM dan EDC menembus angka 131.204 unit, merupakan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.
- BRI telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan *Space System/ Loral* (SSL) dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

2015

- Pada tahun 2015 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Singapura serta mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life)
- Pada tanggal 4 Agustus 2015 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum dapat menikmati layanan perbankan.
- BRI juga meresmikan BRI *Corporate University* sebagai sarana penunjang yang komprehensif bagi pendidikan pekerja.

2016

- Tanggal 18 Juni 2016, pukul 18.38 Waktu Kourou, Guyanan Prancis, satelit milik BRI, BRIsat meluncur dengan sukses. BRIsat menjadi infrastruktur penunjang layanan digital Bank BRI.
- BRI Mengakuisisi BTMU Finance yang bergerak di bidang *multifinance*. BTMU Finance berubah nama menjadi BRI Finance.
- Meluncurkan layanan *full-digital branch* di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan juga program digitalisasi untuk UMKM seperti e-Pasar, Teras BRI Digital. 1 Juta Domain Gratis Untuk UMKM dan Rumah Kreatif BUMN.

2017

- Pada tanggal 14 Maret 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste.
- Pada tanggal 24 Februari 2017 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.

2018

- Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai BRI New Assistance yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.
- Bank BRI mendorong UMKM *Go Digital* dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas.
- BRI menerbitkan beberapa surat berharga berikut:
  - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A, jatuh tempo pada 21 Februari 2023, dengan nilai nominal Rp1.837.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,65%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
  - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B, jatuh tempo pada 21 Februari 2025, dengan nilai nominal Rp605.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,90%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
  - Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, jatuh tempo pada 21 Juni 2023, dengan nilai nominal Rp500.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 7,70%, serta peringkat AA dari Pefindo.
- BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) dan PT BRI Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM). Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 8 (delapan) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRIsyariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures) dan Sekuritas (BRI Danareksa Sekuritas) dan General Insurance (BRI Insurance).
- BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau *National Capacity Building* di segmen UMKM.

2019

- BRI melalui perusahaan anak BRI Agro meluncurkan PINANG, *Digital Lending* Perbankan Pertama di Indonesia. Dengan mengkombinasikan teknologi digital, PINANG mempercepat proses pengajuan sampai dengan pencairan kurang dari 10 menit. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke bank dan tanpa tatap muka secara langsung. Melalui proses yang cepat, murah, dan aman, serta plafon yang bersaing, PINANG akan memberikan kemudahan ekstra kepada nasabah untuk mengajukan pinjaman.
- BRI melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yaitu PT Bringin Sejahtera Artha Makmur (BRINS), akuisisi ini merupakan langkah strategis perseroan untuk menjadi *integrated financial solution* yang akan semakin melengkapi layanan keuangan yang dimiliki oleh BRI Group.
- Pada tanggal 28 Maret 2019 BRI menerbitkan obligasi berkelanjutan (*sustainability bond*) dengan nominal sebesar USD500.000.000 (angka penuh) untuk jangka waktu 5 tahun. Penerimaan dari penerbitan obligasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.
- Guna memberikan kemudahan dan keamanan layanan transaksi perbankan, BRI kembali meluncurkan terobosan digital banking terbarunya. Yang terbaru, BRI meluncurkan aplikasi BRImo, aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX (*user interface/user experience*) dan fitur-fitur terbaru yang dapat digunakan oleh nasabah maupun non nasabah BRI tanpa perlu datang ke kantor cabang dengan pilihan sumber dana giro, tabungan dan Uang Elektronik untuk setiap fitur-fiturnya. BRImo memiliki berbagai keunggulan menarik, yakni kemudahan dalam pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Muda, login aplikasi menggunakan *finger print* maupun *face id Recognition*, cek mutasi rekening hingga 1 tahun kebelakang, penggunaan alias rekening serta akses info promo BRI. Pengguna BRImo hingga Desember 2019 telah mencapai 2,96 juta pengguna.
- Pada 12 Desember 2019, BRI melakukan terobosan inovasi atas produk dan layanan keuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga keuangan terdepan dalam *digital banking* di Indonesia. Yang terbaru, BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA. Melalui peluncuran ini, BRI menjadi bank BUMN pertama yang memiliki aplikasi pinjaman *online*.
- Selain berinovasi dengan mengembangkan berbagai produk *digital banking*, selama periode tahun 2019 BRI juga terus melakukan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran KUR senilai Rp87,9 Triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku UMKM. Dari total KUR yang disalurkan selama tahun 2019 oleh BRI tersebut, Rp75,7 Triliun atau 86,1% diantaranya disalurkan khusus di segmen mikro. Dengan demikian, sejak tahun 2015, BRI telah berhasil menyalurkan KUR dengan total nilai mencapai Rp323,4 Triliun kepada lebih dari 16,6 juta pelaku UMKM diseluruh Indonesia.

2020

BRI secara aktif menjadi mitra utama Pemerintah dalam mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Debitur yang sebagian besar UMKM, tetapi juga bagi Perseroan. Sampai dengan Desember 2020, program PEN yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Penyaluran Kredit UMKM dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp45 triliun (3 kali) dari Penempatan Dana Pemerintah;
2. Penyaluran kredit dengan skema penjaminan pada segmen kecil dan ritel sebesar Rp8,73 triliun kepada lebih dari 14 ribu Debitur;
3. Penyaluran Subsidi Bunga Kredit UMKM sebesar Rp5,47 Triliun kepada lebih dari 8,9 juta penerima;
4. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp18,64 triliun kepada lebih dari 7,7 juta usaha mikro;
5. Penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp8,66 triliun kepada lebih dari 985 ribu debitur;
6. Penyaluran subsidi gaji sebesar Rp6,45 triliun kepada lebih dari 5 juta penerima.

Selain itu, sebagai upaya penyelamatan debitur terdampak COVID-19, Sampai dengan Desember 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi sebesar Rp186,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur, dimana sebesar 95% merupakan debitur segmen Mikro, Konsumer, Kecil dan Menengah.

- Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi di tengah pandemic, BRI menghadirkan inovasi-inovasi digital sebagai berikut:
  - Peluncuran BRImo New Look
  - Peluncuran Pasar.id. Adanya *social distancing* & PSBB menyebabkan aktivitas pasar menjadi terbatas, sehingga pedagang mengalami penurunan omzet. BRI membantu "Survival Mode" Pasar Tradisional dengan memperkenalkan belanja *online* (baik melalui WA, Website, Mobile Apps, maupun kerjasama dengan *start up*).
  - Peluncuran Digital Saving. BRI meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui *Platform Digital Saving* yang dapat diakses melalui *channel* Bank BRI ataupun pihak ketiga yang bekerjasama, dengan menggunakan 2 teknologi yaitu *face recognition* dan *digital signature*, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor Bank untuk bertatap muka dengan petugas.
- Peluncuran lembaga sertifikasi profesi perbankan di Indonesia (BRISLP).
- Peluncuran BRI Micro & SME Index (BMSI). Peluncuran BMSI merupakan kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia untuk menjadi suatu informasi. BMSI menjadi leading indikator pertama di Indonesia yang mengukur aktivitas UMKM yang suatu saat akan bermanfaat bagi kebijakan publik.

2021

- Sepanjang tahun 2021, BRI sukses melakukan 3 (tiga) aksi korporasi besar untuk mendukung pertumbuhan yang berkalanjutan. Tiga aksi korporasi besar tersebut merupakan bagian dari pertumbuhan bisnis BRI yang dilakukan secara anorganik dan proses *value creation*. Adapun 3 (tiga) aksi korporasi tersebut antara lain:
  1. Konsolidasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan peningkatan harga saham BRIS hingga empat kali lipat sejak proses konsolidasi.
  2. Peningkatan valuasi BRI Life melalui *partnership* dengan FWD Financial.
  3. Pembentukan *Holding* Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM dengan total nilai *Right Issue* sebesar Rp95,9 triliun yang terdiri atas Rp54,7 triliun dalam bentuk partisipasi non tunai pemerintah berupa inbreng saham Pegadaian dan PNM, serta Rp41,2 triliun dalam bentuk *cash proceed* dari pemegang saham publik. Pencapaian tersebut menorehkan sejarah sebagai *Right Issue* terbesar di kawasan Asia Tenggara, peringkat ketiga *Right Issue* di Asia, dan nomor tujuh di seluruh dunia.
- Sebagai upaya melanjutkan momentum positif kebangkitan perekonomian nasional, BRI menjadi titling sponsor BRI Liga 1 sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional. Khususnya agar industri sepak bola nasional termasuk UKM, UMKM, dan turunannya seperti perusahaan konveksi jersey sepak bola, penjual souvenir, pernak pernik tim, dan industri sepatu sepak bola akan kembali menggeliat
- BRI membuka unit kerja luar negeri keenam yakni Kantor Cabang di Taipei, Taiwan. yang terletak di No. 166, Sec. 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan. Operasional BRI Taipei Branch (BRITW) ini sudah mulai beroperasi pada Selasa, 30 November 2021. BRI Taipei Branch juga telah mengantongi izin operasional sebagai *Full Retail Foreign Bank Branch Office License* oleh otoritas Taiwan. Dengan lisensi tersebut, BRI Taipei Branch dapat memberikan pelayanan Simpanan, Pinjaman, Remitansi, *Trade Finance*, dan *Treasury* kepada nasabah di Taiwan.

2022

Pada tahun 2022 BRI terus mengembangkan bisnisnya melalui beberapa hal:

1. Mengakuisisi Danareksa Investment *Management* untuk terus menjadikan BRI Group sebagai *one stop financial solution* bagi masyarakat Indonesia.
2. Meluncurkan produk Qlola *by* BRI sebagai *Integrated Corporate Solution Platform* hanya dengan *single sign on login*.
3. Semakin konsisten mendukung inklusi keuangan Indonesia melalui:
   - AgenBRILink yang telah mencapai 627 ribu Agen dan tersebar di >58 ribu desa atau meng-*cover* >78% desa di Indonesia.
   - *Super Apps* BRImo yang telah memiliki 23,85 juta pengguna dan menjadikan BRImo sebagai *banking apps* dengan pengguna terbesar di Indonesia.
   - Menghadirkan >1.000 Gerai Senyum untuk memudahkan akses bagi nasabah Ultra Mikro dalam satu pintu yang telah berhasil mengintegrasikan >34 juta data nasabah.

2023

- **Bukti keberhasilan transformasi Digital yang dilakukan BRI terlihat dari jumlah user BRImo di akhir 2023 mencapai 31,6 juta user meningkat >10 kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun, menjadikan BRImo sebagai mobile banking yang paling banyak di download di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2023 volume transaksi BRImo tumbuh luar biasa mencapai Rp4.159 triliun.**
- **2 tahun pemebentukan Holding Ultra Mikro telah berhasil melayani 37 juta nasabah UMKM dengan total pembiayaan kredit mencapai Rp494,78 triliun melalui 1.018 Gerai SenyuM.**

Kontribusi
Terbaik Kami

Perkembangan Holding Ultra Mikro

Terhitung sejak tanggal 13 September 2021, Holding Ultra Mikro telah berkiprah selama 2 (dua) tahun dengan hasil yang sangat menggembirakan. Holding Ultra Mikro telah berhasil melayani lebih dari 37 juta nasabah UMKM, tumbuh 4,68% secara *year-on-year* (yoy), dengan *outstanding* kredit dan pembiayaan total mencapai Rp611,2 triliun, mengalami peningkatan sebesar 11,10% secara yoy. BRI (fokus di kredit individual nasabah) telah berhasil menyalurkan pinjaman dengan *outstanding* Rp496,69 triliun kepada 14,0 juta Debitur. Di sisi lain, Pegadaian dengan fokus pada Gadainya, berhasil mencatatkan total *outstanding* Rp67,6 triliun kepada 7,7 juta Debitur. Sedangkan PNM dengan Pembiayaan kelompoknya melalui Mekaar berhasil mencatatkan *outstanding* Rp42,0 triliun kepada 15,1 juta Debitur.

Sepanjang perjalanan Holding Ultra Mikro, kualitas pembiayaan telah terjaga dengan baik melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kredit mencakup penerapan proses pemberian kredit dengan melibatkan data *analytics* untuk memperkuat *credit scoring* dan *early warning system*.
2. Peningkatan kapabilitas para tenaga pemasar sebagai *financial advisor* untuk mendampingi nasabah Ultra Mikro.
3. Pemberian edukasi kepada para nasabah Ultra Mikro melalui beberapa program-program pemberdayaan.







Sinergi Holding Ultra Mikro diimplementasikan melalui inisiatif strategis bersama, untuk memperkuat ketangguhan UMKM dan mengakselerasi Literasi serta Inklusi Keuangan dengan *journey* yang lebih lengkap bagi nasabah Ultra Mikro dalam menjangkau layanan keuangan BRI Group. Adapun inisiatif strategis tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Nasabah Ultra Mikro
   Melalui pelaksanaan program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang bekerja sama dengan Pemerintah maupun pihak ketiga dengan tujuan menaik-kelaskan para nasabah Ultra Mikro, antara lain:
   - Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), saat ini telah mencapai 893.248.
   - Inklusi pembukaan rek Simpedes UMi telah mencapai 13,5 juta.
   - BRILINK Mekaar yang berada didalam kelompok Mekaar sebanyak 151 ribu.
2. Implementasi *co-location* Unit Kerja (SenyuM)
   Hingga akhir kuartal empat tahun 2023, telah hadir 1.018 unit kerja SenyuM. Ke depan, BRI berencana akan menambah gerai SenyuM untuk memperluas jangkauan layanan BRI, Pegadaian dan PNM dengan memanfaatkan jaringan kerja 3 (tiga) entitas, dengan tetap mengedepankan efisiensi.
3. Pemanfaatan *Data Analytics*
   Tercatat hingga akhir kuartal empat tahun 2023, sebanyak 34,7 juta nasabah holding Ultra Mikro telah berhasil diintegrasikan dalam *database* BRI dan dimanfaatkan untuk ekspansi bisnis BRI Group. Selanjutnya, *big data* yang terintegrasi tersebut akan terus dioptimalkan melalui data *analytic* dengan penerapan *machine learning* (AI) sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih presisi mengenai produk dan/atau jasa keuangan apa yang tepat untuk ditawarkan kepada nasabah ultra mikro sesuai kebutuhannya.
4. SenyuM Mobile
   SenyuM Mobile merupakan aplikasi *cross selling* yang digunakan para tenaga pemasar (BRI, Pegadaian, dan PNM), Agen BRILink, serta Agen Pegadaian dalam akuisisi dan pemasaran produk-produk 3 (tiga) entitas bisnis. Saat ini, sejak 30 September 2023 SenyuM Mobile juga telah dilakukan *scope-up* sehingga aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh *end user* (SenyuM Mobile Self-Serve) dalam mengakses produk yang lebih lengkap, meliputi produk pinjaman, simpanan, maupun investasi yang ditawarkan ketiga entitas. Aplikasi Senyum mobile telah dirilis, sehingga dapat diakses oleh 77 ribu Tenaga Pemasar 3 (tiga) entitas, 740 ribu Agen BRILink, serta 19 ribu nasabah segmen Ultra Mikro secara langsung, yang dapat diunduh dari Google Play Store.
5. *Business Process Improvement*
   Untuk meningkatkan kualitas bisnis Pegadaian dan PNM, fokus utama ditempatkan pada efisiensi dengan menggunakan digitalisasi dalam alur bisnis proses. Selama tahun 2023, BRI Holding juga telah melakukan digitalisasi proses bisnis dengan mendorong *cashless disbursement*, khususnya pada nasabah PNM. Implementasi *cashless disbursement* tidak hanya akan mendorong inklusi keuangan digital nasabah, namun juga meningkatkan efisiensi bisnis serta menyempurnakan *risk management* perusahaan.
6. Internalisasi *Core Values* BUMN (AKHLAK)
   Melalui Culture Activation Program (CAP) "BRIGADE MADANI", yang merupakan komitmen bersama antara 77 ribu tenaga pemasar di 3 entitas Holding Ultra Mikro untuk mengakselerasi pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Dengan berbagai inisiatif dan *enablers* yang telah disiapkan oleh 3 (tiga) entitas Holding Ultra Mikro tersebut, amanah dari Pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada Holding Ultra Mikro yaitu kontribusi terhadap Target Inklusi Keuangan nasional yang ditargerkan sebesar 90% pada tahun 2025. Sebagai gambaran, Pemerintah menargetkan pada 2024, total pembukaan rekening baru bagi nasabah segmen ultra mikro, sejumlah 7,8 juta rekening tabungan. Per Desember 2023, telah telah terbentuk rekening simpedes UMI sebanyak 13,5 juta. Selain itu, terdapat 1,2 juta nasabah Ultra Mikro yang telah naik kelas, dari sebelumnya nasabah kelompok di PNM Mekaar, menjadi nasabah individual di Pegadaian maupun BRI. Melalui *customer journey* yang komprehensif, UMI Holding, akan terus mendorong graduasi nasabah seiring dengan peningkatan kapabilitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Holding Ultra Mikro mampu menjalankan amanah Pemerintah dengan lebih baik.

Terhadap penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, terdapat tantangan yang dihadapi oleh Holding Ultra Mikro dalam menjangkau Masyarakat Ultra Mikro, antara lain:

a. Aksesibilitas bagi nasabah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
   Holding Ultra Mikro telah menyediakan kekuatan jaringan kerja konvensional dan *e-channel* yang terbesar dan tersebar luas diseluruh Indonesia. Terdiri atas 7,755 Unit Kerja milik BRI, 4.553 PNM dan 4.087 Pegadaian. Kemudian dengan didukung oleh jaringan kerja *e-channel* dari 741 ribu Agen BRILink, lebih 200 ribu EDC Merchants, dan 21 ribu e-channel ATM dan CRM, 73,6 ribu Tenaga Pemasar, serta Aplikasi BRIMO dan Senyum Mobile untuk dapat menjangkau dan melayani nasabah Ultra Mikro. Hal ini perlu Perlu dukungan dari Pemerintah untuk menyediakan infrastruktur di daerah 3T tersebut, sehingga memudahkan nasabah untuk mengakses layanan keuangan yang telah Holding Ultra Mikro siapkan, dan pemerataan akses bagi nasabah segmen Ultra Mikro.
b. *Cost* Efisiensi
   Pengelolaan ekosistem Ultra Mikro, dengan total nasabah puluhan juta tersebut membutuhkan *resource* yang sangat besar. Dengan berdirinya Holding Ultra Mikro ini diharapkan dari Pegadaian maupun PNM dapat bersinergi dengan BRI group, sehingga efisiensi dapat diperoleh dengan tetap mengutamakan layanan kepada nasabah Ultra Mikro.

Terhadap kondisi tersebut, perlu adanya dukungan dari Regulator untuk dapat memberikan relaksasi atas kebijakan-kebijakan terkait sektor keuangan, khususnya dalam melayani nasabah Holding Ultra Mikro.

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)

Sebagai salah satu bentuk dukungan BRI terhadap Keuangan Berkelanjutan, BRI telah memiliki strategi inisiatif di bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) baik pada kegiatan operasional maupun bisnis Perseroan. BRI secara konsisten mempertahankan kinerja Perseroan dengan baik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya percepatan pencapaian hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan strategi korporat, pemenuhan harapan *stakeholder* dan inisiasi LST yang mengacu pada standar nasional, regional, maupun global. Di tahun 2023, BRI memperkuat komitmennya dengan bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC), menentukan *baseline year* dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca perusahaan, serta menentukan *Net Zero Emission Targets* di tahun 2050. Sebagai hasilnya, BRI mempertahankan kinerja ini yang tercermin dalam skor rating ESG dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global, MSCI, dan *Sustainalytics*.

Lingkungan

- **2.045.658** bibit telah ditanam melalui program BRI Menanam.
- **21** Lokasi BRINita (BRI Bertani di Kota).
- **101** Lokasi Program Jaga Sungai Jaga Kehidupan.
- **64.601** Penanaman Pohon/Mangrove.
- Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.



Pendidikan

- **2.190** Beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa.
- **160** Renovasi Sekolah melalui Program Ini Sekolahku.



Pada tahun 2023, BRI telah melaksanakan beberapa program LST antara lain:

1. Menyalurkan kredit ke Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), baik sektor UMKM maupun Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) (L, S).
2. Menerbitkan *Green Bond* senilai Rp6 Triliun (L).
3. Berkomitmen kepada *Science-Based Target Initiatives* (SBTi) berkaitan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (L).
4. Menentukan baseline year dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca perusahaan yaitu tahun 2022 (L).
5. Menentukan *Net Zero Emission Targets* di tahun 2050 (L).
6. Menerbitkan Laporan *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD) (L).
7. Melakukan instalasi panel surya di unit kerja BRI (L).
8. Bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC) (T).
9. Menerbitkan Kebijakan terkait penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Ketenagakerjaan (S).

BRI terus berkomitmen dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. BRI Peduli berfokus pada pemberdayaan UMKM, Lingkungan, Pendidikan, dan Kesehatan.

Kesehatan

- **218** *Ambulance* untuk masyarakat.
- Prasarana Kesehatan.



Pemberdayaan UMKM

- Pengembangan Kelompok Perempuan di Indonesia.
- Pengembangan Infrastruktur, Sarana Prasarana, dan Pelatihan Desa BRILiaN di Indonesia.



Bank dengan Portofolio Bisnis Berkelanjutan terbesar di Indonesia

BRI terus melakukan penguatan terhadap penerapan aspek *Environmental, Social dan Governance* (ESG) secara komprehensif dalam kegiatan bisnis maupun operasionalnya.

Aktivitas Bisnis Berkelanjutan

Portofolio Pendanaan Berkelanjutan

Rp39,6 triliun

Portofolio Obligasi Berbasis ESG

57,9%
Dari total obligasi korporasi yang diterbitkan BRI

Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan

Rp777,28 triliun

Portofolio pembiayaan berkelanjutan yang terdiri dari penyaluran kredit berkelanjutan dan investasi surat berharga korporasi berbasis ESG

67,1%
dari total kredit dan investasi obligasi korporasi BRI

Penyaluran Kredit Berkelanjutan	Investasi Obligasi Korporasi Berbasis ESG
Rp772,74 triliun	**Rp4,54** triliun

BRI *Sustainability Journey*

2013
Published 1st Sustainability Report

2017
- *Issued internal ESG Policies*
- *(General Sustainable Finance & CPO Policy)*
- *First Mover on Sustainable Banking*

2019
- *Issued sustainability bond ($ 500 Mn)*
- *Submitted Sustainable Finance Action Plan 2019-2024*

2020
Conducted Green House Gas (GHG) Emission Calculation

2021
- *Established The Ultra Micro Ecosystem*
- *Established Dedicated ESG Work Unit*
- *Established ESG Committee*
- *Constituent of Indonesia ESG Leader Index*

2022
- *Established ESG Roadmap*
- *Issued Green Bond (IDR 5 Tn)*
- *Signatory of Partnership for Carbon Accounting Financials*
- *New Green office Building*
- *BRI Menanam Program*
- *Pulp & Paper Loan Policy*
- *Conducted Financed Emission, Calculation*

Pemberdayaan dan Pendampingan UMKM

BRI aktif melakukan pemberdayaan kepada UMKM dengan program program pemberdayaan di antaranya:

- **Desa Brilian**
  Desa BRILiaN merupakan Program Pemberdayaan Desa yang berdasarkan pada 4 (empat) pilar yaitu BUMDES, Digitalisasi, Inovasi dan *Sustainability*. Program Desa BRILiaN bertujuan menghasilkan *role model* dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dan semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDG. Objek Pemberdayaan dalam Program Desa BRILiaN terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya, Direktur BUM Desa dan pengurus BUM Desa, Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tokoh Masyarakat, Perwakilan Kelompok Usaha (Klaster) serta Pelaku Usaha Muda (Karang Taruna, Pokdarwis dan sejenisnya). Saat ini terdapat 3.178 Desa BRILiaN tersebar di seluruh Indonesia sebagai bentuk pemberdayaan ekosistem Desa.
- **Rumah BUMN**
  Rumah BUMN merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk *Digital economy ecosystem* melalui pembinaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. UMKM yang menjadi binaan Rumah BUMN akan mendapatkan pemberdayaan yang disesuaikan dengan level *entrepreneurship* UMKM. Kehadiran Rumah BUMN menjadi katalisator UMKM naik kelas menuju *Go Modern* (perubahan pola pikir kewirausahaan), *Go Digital* (penggunaan sosial media), *Go Online* (menggunakan *e-commerce*) dan *Go Global* (siap ekspor). Saat ini BRI memiliki 54 Rumah BUMN yang merupakan tempat pengembangan usaha bagi lebih dari 418 ribu pelaku UMKM BRI dan telah mendapatkan lebih dari 12 ribu kali pelatihan.
- **Klasterku Hidupku**
  Klasterku Hidupku merupakan program pemberdayaan kepada klaster/kelompok usaha melalui pengembangan kelembagaan dan kolaborasi, sehingga dapat meningkatkan kelas usaha dan akses pasar lebih luas. Dari 23.243 klaster usaha binaan BRI, 1.897 telah mendapatkan pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasarana produktif.
- **UMKM EXPO (RT) BRILLIANTPRENEUR 2023**
  UMKM EXPO (RT) BRILLIANTPRENEUR 2023 merupakan kegiatan BRI yang bertujuan untuk membawa pelaku UMKM agar dapat naik kelas dan memperluas bisnis hingga ke pasar Internasional. Kegiatan ini juga sebagai kontribusi BRI dalam meningkatkan Neraca Jam Kerja Nasional, untuk memperkuat Neraca Perdagangan, seiring dengan upaya meningkatkan UMKM padat karya. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 melibatkan pengusaha-pengusaha muda baru yang nantinya mampu menopang dan mendorong ekonomi Indonesia, sekaligus sebagai dukungan BRI dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 menjadikan Indonesia sebagai negara maju berpenghasilan tinggi.

2023

- Menyalurkan kredit ke Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), baik sektor UMKM maupun Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) (L, S)
- Menerbitkan *Green Bond* senilai Rp6 Triliun (L)
- Berkomitmen kepada *Science-Based Target Initiatives* (SBTi) berkaitan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (L)
- Menentukan *baseline year* dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca perusahaan yaitu tahun 2022 (L)
- Menentukan Net Zero Emission Targets di tahun 2050 (L)
- Menerbitkan Laporan *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD) (L)
- Melakukan instalasi panel surya di unit kerja BRI (L)
- Bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC) (T)
- Menerbitkan Kebijakan terkait penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Ketenagakerjaan (S)

Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera melalui Ekosistem UMi

Jumlah Debitur Perempuan

15,1 juta

Melalui PNM Mekaar, ekosistem UMi memberikan akses permodalan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas khusunya kepada ibu rumah tangga.

Account Officer Mekaar	Total Mekaar Outstanding
+41,800	Rp42,0 triliun

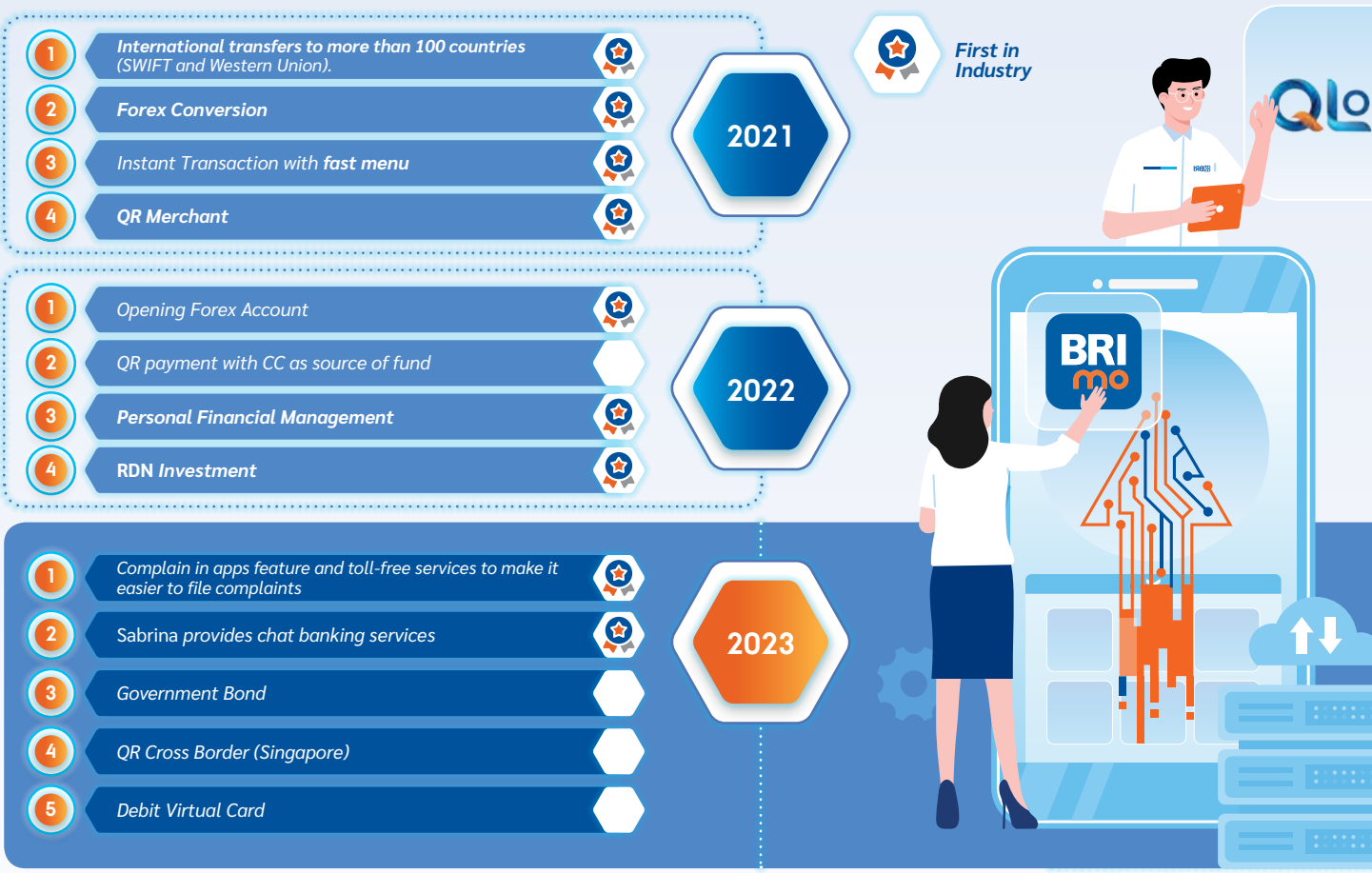
Transformasi Digital

BRImo SuperApps

Perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital telah mengalami lompatan besar dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan yang kuat terhadap inovasi teknologi keuangan telah memicu transformasi signifikan terhadap preferensi nasabah dalam melakukan pembayaran, transfer uang, investasi, serta akselerasi *digital banking*. Dalam mencapai transformasi digitalisasi, BRI terus melakukan inovasi digitalisasi proses bisnis *(business process reengineering)* yang turut mendukung pelestarian lingkungan. Salah satu inisiatif dalam mendukung inovasi digital ialah melalui BRImo *SuperApps.*

Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan dalam setahun terakhir, aplikasi *mobile banking* andalan BRI ini telah menghasilkan 3,1 miliar transaksi. Adapun sampai dengan Desember 2023 nilai transaksi BRImo telah tembus Rp4,16 Triliun atau tumbuh sekitar 55,8% YoY secara tahunan (*Year on Year*) dengan FBI mencapai Rp2,43 Triliun.

Saat ini, BRImo berfokus pada 8 (delapan) segmen kebutuhan nasabah mulai dari *online onboarding*, *finansial superstore, digital lending, lifestyle ecosystem, investment, customer engaggement, subsidiary integration* hingga layanan *branchless*. Melalui fokus tersebut, BRImo telah menghadirkan fitur-fitur unggulan antara lain:



QLOLA by BRI



QLola by BRI merupakan sebuah inovasi produk terbaru berupa *Integrated Corporate Solution Platform* yang akan memudahkan Nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI dengan hanya satu kali *login*.

Single Sign On Access:

- *Cash Management*
- *Trade Finance*
- *Supply Chain Management*
- *Foreign Exchange*
- *Investment Services*
- *Financial Dashboard*
- Layanan Lainnya

Fitur yang tersedia pada Qlola antara lain:

1. *Single Sign On Access*: Memudahkan nasabah untuk mengakses berbagai layanan hanya dengan satu kali *login*.
2. *Consolidated Financial Dashboard* dan *Report*: Fitur yang memudahkan nasabah dalam melakukan *monitoring* keuangan perusahaan, melalui:
   a. *Balance*
      - Menampilkan posisi saldo rekening yang didaftarkan (giro ataupun deposito).

   b. *Balance History*
      - Menampilkan posisi riwayat saldo rekening yang didaftarkan (giro ataupun deposito) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.

   c. Riwayat Transaksi
      - Menampilkan riwayat transaksi dari seluruh rekening yang didaftarkan.
      - Filter berdasarkan tahun dan rekening.

   d. Pendapatan Bunga
      - Menampilkan pendapatan bunga dari seluruh rekening.
      - Filter berdasarkan tahun dan rekening.

   e. Transaksi Teratas
      - Menampilkan 10 (sepuluh) Transaksi Teratas (Pemasukan atau Pengeluaran).
      - Filter berdasarkan tahun, bulan, tanggal dan rekening.
3. *Facility Limit*: Merupakan sebuah fitur dimana nasabah dapat melihat informasi terkait fasilitas kredit yang dimiliki oleh nasabah. Di dalam fitur tersebut terdapat informasi *plafond*, pengguna, persentase penggunaan dan sisa limit.
4. *Cash Management*: Fitur yang berfungsi untuk memperoleh informasi keuangan, melakukan transaksi serta melakukan berbagai aktivitas layanan perbankan seperti cek saldo, transfer, pembayaran tagihan dan pajak, dan lainnya.
5. *Trade Finance*: Mendukung kegiatan bisnis Nasabah dalam melakukan transaksi perdagangan internasional maupun dalam negeri.
6. Bank Garansi: Fitur jasa penerbitan dokumen jaminan (*guarantee*) berupa instrumen dokumen janji bayar secara *online*.
7. IBBIZ *Integration*: Fitur yang digunakan untuk mengintegrasikan Qlola dengan internet banking BRI (Ibbiz), dengan fitur dan limit yang dapat disesuaikan dengan nasabah pemilik usaha di segmen ritel, medium dan *small*.
8. *Supply Chain Management*: Layanan berbasis *invoicing* untuk memenuhi kebutuhan *supply chain* Nasabah dan mengelola tagihan korporasi secara *online*.
9. *Foreign Exchange*: Fitur yang dapat digunakan untuk:
   a. Mengetahui informasi (*real time*) perubahan kurs mata uang asing.
   b. Mengetahui informasi produk *treasury*.
   c. Mengetahui informasi *news* terkini.
   d. Mengetahui informasi harga *bond* ritel.
   e. Melakukan aktivitas jual beli mata uang asing dengan Dealer Profesional Treasury BRI dengan harga kompetitif.
   f. Melakukan kalkulasi *hedging* dan *rate* dengan sub-fitur kalkulator.
10. Open API Services
11. Cash Card
12. PARI *Ecosystem*: Ekosistem Bisnis PARI Corporate mempermudah pelaku ekosistem komoditas korporasi untuk melakukan transaksi dan layanan keuangan sesuai kebutuhan.
13. *Investment Services*: DPLK dan *Custody*.
14. *Activity Notification*: Integrasi berbagai macam notifikasi dari berbagai fitur.
15. *Advanced Search*: Fitur pencarian *advanced*.
16. *Merchant Monitoring*: Fitur *monitoring merchant* transaksi dan *settlement*.
17. *Support System: Complain Handling* bagi Nasabah dikhususkan untuk Qlola.
18. *Online Onboarding* Giro: Pendaftaran Nasabah *new to bank* Giro secara *online*.

Kilas Kinerja



“Pada tahun 2023, BRI menunjukkan pertumbuhan kinerja yang solid. Kinerja BRI juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari pihak eksternal dengan diterimanya penghargaan dalam skala nasional dan internasional”


BRI
BRI mo
BRI SPOT
SenyuM
QLola

Pencapaian Kinerja Penting **Tahun 2023**

LABA BERSIH
Konsolidasi

Rp60,43 triliun

meningkat **17,54%** (YoY)

KREDIT MIKRO

Bank Only

Rp496,55 triliun

meningkat **10,4%** YoY

Konsolidasian

Rp611,22 triliun

meningkat **10,9%** YoY

SME

Bank Only

Rp260,35 triliun

meningkat **9,5%** YoY

Konsolidasian

Rp267,48 triliun

meningkat **8,6%** YoY



Rasio	NIM	CIR
Bank Only	6,84%	37,74%
Konsolidasian	7,95%	41,89%



KREDIT KONSUMER

- *Bank Only*: Rp 182,36 triliun, meningkat **12,8%** YoY
- Konsolidasian: Rp 190,04 triliun, meningkat **13,4%** YoY

KORPORASI

- *Bank Only*: Rp 206,83 triliun, meningkat **14,51%** YoY
- Konsolidasian: Rp 197,69 triliun, meningkat **13,8%** YoY

Rasio	*Bank Only*	Konsolidasian
ROE	18,25%	19,95%
CAR	25,23%	27,27%

Ikhtisar
Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	**31.603.784**	27.407.478	26.299.973	32.274.988	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	**101.909.121**	150.935.150	56.426.573	51.530.969	71.416.449
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	**87.545.335**	91.869.777	73.012.684	80.005.759	127.092.463
Efek-efek, Wesel Ekspor, *Reverse* Repo dan Tagihan Lainnya	**416.176.513**	418.685.107	455.174.902	400.022.060	252.607.675
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	**-**	-	-	-	1.130.306
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	**1.266.429.247**	1.139.077.065	1.042.867.453	1.020.192.968	907.388.986
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	**(85.501.888)**	(93.087.981)	(87.829.417)	(70.394.653)	(39.196.369)
Tagihan Derivatif - Netto	**911.683**	911.405	730.083	1.576.659	210.396
Tagihan Akseptasi - Netto	**9.967.710**	7.031.064	9.066.005	6.271.176	9.346.063
Penyertaan Saham - Netto	**7.305.491**	6.506.903	6.071.727	1.500.329	745.304
Aset Tetap - Netto	**59.678.119**	55.216.047	47.970.187	43.706.632	31.432.629
Aset Pajak Tangguhan - neto	**15.605.462**	18.712.994	16.284.898	9.885.990	4.541.298
Aset Lain-lain - neto	**53.376.453**	42.374.001	32.022.666	33.492.467	19.824.426
TOTAL ASET	**1.965.007.030**	**1.865.639.010**	**1.678.097.734**	**1.610.065.344**	**1.416.758.840**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Simpanan Nasabah**)	**1.358.328.761**	1.307.884.013	1.138.743.215	1.121.102.149	1.021.196.659
Giro	**346.124.372**	349.755.590	220.590.197	193.077.994	174.927.804
Tabungan	**527.945.550**	522.647.920	497.676.739	475.848.207	414.332.525
Deposito	**484.258.839**	435.480.503	420.476.279	452.175.948	431.936.330
Liabilitas Segera	**30.651.807**	24.910.579	18.735.387	15.473.574	7.549.312
Simpanan dari Bank lain	**11.958.319**	9.334.547	13.329.434	23.785.997	17.969.829
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	**19.079.458**	9.997.592	29.408.508	40.478.672	49.902.938
Pinjaman diterima	**98.850.813**	79.371.200	68.458.547	72.164.236	30.921.771
Surat Berharga yang Diterbitkan	**49.637.581**	63.611.761	55.306.697	57.757.028	38.620.837
Liabilitas Lain-lain	**80.028.149**	67.134.001	62.329.142	50.017.029	41.813.158
TOTAL LIABILITAS)	**1.648.534.888**	**1.562.243.693**	**1.386.310.930**	**1.311.893.252**	**1.207.974.504**

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
EKUITAS					
Modal Saham	**7.577.950**	7.577.950	7.577.950	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor	**75.853.127**	75.637.083	76.242.898	3.411.813	2.900.994
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	**20.216.505**	20.267.952	17.006.230	17.099.207	17.099.207
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	**(253.744)**	(127.954)	(115.975)	(54.749)	(14.970)
Cadangan kompensasi atas saham bonus	**287.482**	210.266	210.266	1.228.805	21.796
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain - bersih	**(2.221.745)**	(4.464.483)	1.949.387	4.623.064	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain	**128.230**	139.978	547.026	975.877	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	-	-	-	715.770
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	**(2.134.699)**	(689.473)	(1.423.685)	(1.469.726)	189.519
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	**(3.614.321)**	(2.202.178)	(45.997)	(1.649.076)	(2.106.014)
Opsi saham	**54.769**	16.356	19.255	72.894	22.409
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	**1.758.580**	1.758.580	1.758.580	-	-
Ekuitas *merging entity*		-	-	29.538.484	-
Saldo laba	**213.711.422**	201.169.934	185.009.048	166.972.167	181.327.431
Telah ditentukan penggunaannya	**3.022.685**	3.022.685	3.022.685	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	**210.688.737**	198.147.249	181.986.363	163.949.482	178.304.746
Total Entitas yang dapat diatribusikan	**311.363.556**	299.294.011	288.734.983	226.916.051	206.323.433
Kepentingan non-pengendali	**5.108.586**	4.101.306	3.051.821	2.550.831	2.460.903
TOTAL EKUITAS	**316.472.142**	**303.395.317**	**291.786.804**	**229.466.882**	**208.784.336**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.965.007.030**	**1.865.639.010**	**1.678.097.734**	**1.610.065.344**	**1.416.758.840**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	**178.995.994**	151.874.816	143.523.329	135.764.561	121.756.276
Total Beban Bunga dan Syariah	**(43.812.507)**	(27.277.743)	(29.428.900)	(42.180.448)	(40.048.971)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	**135.183.487**	124.597.073	114.094.429	93.584.113	81.707.305
Pendapatan premi - neto	**2.161.392**	1.577.323	1.043.075	878.710	1.010.728
Pendapatan penjualan emas – neto ***)	**319.644**	299.151	-	-	-
Pendapatan Operasional lainnya	**45.625.785**	39.127.694	41.215.807	38.099.755	28.439.130
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	**(29.523.426)**	(27.384.906)	(35.806.312)	(33.024.492)	(21.556.319)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	**341.994**	543.145	(3.321.266)	(2.157.162)	(608.271)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	**(497.848)**	(137.431)	(163.243)	(98,374)	(595.015)
Beban Operasional lainnya	**(76.782.291)**	(74.316.012)	(75.918.108)	(67.503.849)	(44.965.625)

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
LABA OPERASIONAL	**76.828.737**	**64.306.037**	**41.144.382**	**29.778.701**	**43.431.933**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	**(399.025)**	**290.664**	**(152.317)**	**214.705**	**(67.880)**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**76.429.712**	**64.596.701**	**40.992.065**	**29.993.406**	**43.364.053**
BEBAN PAJAK	**(16.004.664)**	**(13.188.494)**	**(7.835.608)**	**(8,951,971)**	**(8.950.228)**
LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS PENGENDALI	**-**	**-**	**33.156.457**	**21.041.435**	**-**
LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUSISI DENGAN ENTITAS PENGENDALI	**-**	**-**	**(2.400.691)**	**(2.381.042)**	**-**
LABA BERSIH	**60.425.048**	**51.408.207**	**30.755.766**	**18.660.393**	**34.413.825**
Penghasilan komprehensif lainnya:					
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	**(1.787.840)**	902.754	487.841	(2.473.364)	(1.291.782)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	**348.975**	(176.671)	(67.751)	464.563	322.945
Surplus revaluasi aset tetap	**(82.365)**	3.297.304	(92.127)	81.910	3.316.985
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	**(125.790)**	(11.979)	(61.226)	(39.780)	(64.820)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**1.782.067**	(7.946.514)	(3.143.546)	4.633.558	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**(9.105)**	(413.197)	(425.090)	868.462	3.696.914
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	**502.669**	1.509.279	478.796	(698.690)	(895.470)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	**628.611**	**(2.839.024)**	**(2.823.103)**	**2.836.659**	**5.084.772**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS PENGENDALI	**61.053.659**	**48.569.183**	**30.333.354**	**23.878.094**	**-**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI	**-**	**-**	**(2.776.220)**	**(2.120.315)**	**-**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**61.053.659**	**48.569.183**	**27.557.134**	**21.757.779**	**39.498.597**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	**60.099.863**	51.170.312	31.066.592	18.654.753	34.372.609
Kepentingan non-pengendali	**325.185**	237.895	(310.826)	5.640	41.216
TOTAL	**60.425.048**	**51.408.207**	**30.755.766**	**18.660.393**	**34.413.825**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	**60.708.390**	48.333.349	27.855.902	21.727.515	39.403.628

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
Kepentingan non-pengendali	345.269	235.834	(298.768)	30.264	94.969
TOTAL	**61.053.659**	**48.569.183**	**27.557.134**	**21.757.779**	**39.498.597**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)					
Dasar	398	338	238	152	281
Dilusian	398	338	238	151	281
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN					
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI					
Pendapatan yang diterima					
Penerimaan bunga dan investasi	169.068.778	130.501.831	136.283.648	125.439.096	117.464.011
Pendapatan syariah	12.922.019	10.118.043	6.257.927	6.853.944	3.376.547
Pendapatan premi	8.996.516	8.936.995	6.989.783	6.205.775	5.373.757
Pendapatan penjualan emas	7.982.888	8.715.106	-	-	-
Beban yang dibayar					
Beban bunga	(42.461.798)	(25.762.613)	(28.533.680)	(39.883.405)	(38.666.742)
Beban syariah	(1.161.971)	(1.008.042)	(1.293.103)	(2.297.043)	(1.377.133)
Beban klaim	(6.549.595)	(7.359.672)	(5.946.708)	(5.327.065)	(4.363.029)
Beban harga pokok penjualan emas	(7.663.244)	(7.875.955)	-	-	-
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	16.833.578	12.468.321	9.005.760	7.252.17	7.065.981
Pendapatan operasional lainnya	29.267.943	27.534.502	34.345.472	31.580.969	22.213.637
Beban operasional lainnya	(75.776.851)	(70.993.349)	(73.658.162)	(63.609.646)	(46.257.369)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(568.000)	(52.531)	(203.971)	179.491	(68.021)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(14.279.292)	(15.762.408)	(11.164.431)	(5.936.444)	(9.357.307)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	96.610.971	**68.920.228**	**72.082.535**	**60.457.843**	**55.404.332**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penurunan (kenaikan) aset operasi:					
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	(505.646)	(195.110)	945.891	264.550	(2.854.149)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(1.277.298)	(2.114.619)	9.164.531	(12.440.166)	(12.637.154)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(14.828.029)	(9.403.150)	(2.091.221)	6.744.495	(6.172.212)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.419.447	3.900.820	(8.096.930)	(24.236.324)	(13.185.691)
Kredit yang diberikan	(152.128.249)	(106.917.972)	(68.377.027)	(80.715.775)	(74.427.400)
Piutang dan pembiayaan syariah	(3.335.688)	(1.354.828)	39.905.977	(23.299.281)	(6.025.669)
Piutang sewa pembiayaan	(5.720.404)	(9.996.487)	(11.951.573)	(23.148.260)	(803.779)
Aset lain-lain	(16.170.249)	(2.941.947)	1.422.631	23.311.739	6.655.602
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:					
Liabilitas segera	5.741.228	6.175.192	3.261.813	7.924.262	(913.645)
Simpanan:					

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
Giro	(3.631.218)	129.165.393	35.741.846	16.022.216	(9.271.846)
Giro *Wadiah*	-	-	(6.258.078)	4.237.212	(256.984)
Tabungan	5.297.630	24.971.180	37.005.372	55.315.884	25.436.778
Tabungan *Wadiah*	-	-	(9.247.604)	2.295.916	1.349.877
Deposito berjangka	48.778.336	15.004.224	(5.923.271)	13.175.897	55.810.139
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.623.772	(3.994.882)	(10.456.563)	5.816.168	8.838.671
Liabilitas Derivatif	-	-	(208.079)	223.169	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.081.866	(19.410.916)	(11.070.164)	(9.424.266)	12.523.543
Liabilitas lain-lain	7.072.077	5.698.879	235.264	(1.398.837)	1.252.567
Kenaikan (penurunan) dana *syirkah* temporer	-	-	(33.496.976)	8.678.142	3.859.957
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Operasi	(4.971.454)	**97.506.005**	**32.588.374**	**29.804.584**	**44.582.937**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI					
Hasil Penjualan aset tetap	168.975	343.195	51.654	35.214	141
Penyertaan saham	36.137	(145.649)	(315.724)	(284.347)	(228.110)
Penerimaan dividen	75.572	144.069	4.349	5.530	5.857
Perolehan aset tetap	(8.177.296)	(10.538.233)	(8.254.116)	(4.375.066)	(3.695.364)
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	(1.270.825)
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	2.907.520	37.424.578	(64.581.768)	(111.830.687)	-
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Investasi	(4.989.092)	**27.227.960**	**(73.095.605)**	**(116.449.356)**	**(5.188.301)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	19.360.539	11.068.534	(4.229.199)	41.131.054	(9.592.989)
Pembagian laba untuk dividen	(43.494.766)	(26.406.603)	(12.125.589)	(20.623.565)	(16.175.565)
Penerimaan dari surat berharga subordinasi	494.142	-	-	-	-
Pembayaran dari surat berharga subordinasi	(500.000)	-	-	-	-
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	14.112.994	21.739.525	12.547.672	12.619.200	12.102.950
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(28.141.850)	(14.650.023)	(14.608.236)	(11.245.300)	(4.419.500)
Penambahan modal saham	-	-	41.059.206	-	-
Saham yang dibeli kembali	(1.382.284)	(2.187.544)	-	-	-
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan	(39.551.225)	**(10.436.111)**	**22.643.854**	**21.881.389**	**(18.085.104)**
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(49.511.771)	**114.297.854**	**(17.863.377)**	**(64.763.383)**	**21.309.532**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(2.663)	**(30.287)**	**(2.190)**	**(352.878)**	**(160.251)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	268.192.168	**153.924.601**	**171.790.168**	**236.906.429**	**215.757.148**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	218.677.734	**268.192.168**	**153.924.601**	**171.790.168**	**236.906.429**

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:					
Kas	**31.603.784**	27.407.478	26.299.973	32,274,988	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	**101.909.121**	150.935.150	56.426.573	51,530,969	71.416.449
Giro pada bank lain	**22.331.919**	21.488.434	14.065.097	12.266.266	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	**62.678.940**	68.361.106	57.132.958	65.043.738	113.800.580
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	**153.970**	-	-	10.674.207	11.232.450
Total Kas dan Setara Kas	**218.677.734**	**268.192.168**	**153.924.601**	**171.790.168**	**236.906.429**
RASIO KEUANGAN (*BANK ONLY*)					
Likuiditas					
LDR	**84,73%**	79,17%	83,67%	83,66%	88,64%
Kualitas Kredit					
NPL Gross	**3,12%**	2,82%	3,08%	2,94%	2,62%
NPL Nett	**0,76%**	0,73%	0,70%	0,80%	1,04%
NPL Coverage	**215,27%**	291,54%	278,14%	247,98%	166,59%
Profitabilitas					
NIM	**6,84%**	6,80%	6,89%	6,00%	6,98%
BOPO	**64,35%**	64,20%	74,30%	81,22%	70,10%
CER	**38,32%**	41,33%	44,39%	46,60%	40,26%
ROA	**3,93%**	3,76%	2,72%	1,98%	3,50%
ROE – Tier I	**22,94%**	20,93%	16,87%	11,05%	19,41%
Rasio laba (rugi) terhadap Pendapatan	**28,03%**	29,50%	21,19%	13,27%	23,78%
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	**83,72%**	83,23%	81,79%	86,33%	84,84%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	**514,34%**	496,34%	449,11%	631,52%	559,45%
Aset Produktif					
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	**1,95%**	1,72%	1,77%	1,82%	1,74%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	**1,95%**	1,72%	1,77%	1,81%	1,98%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	**5,24%**	6,11%	6,16%	5,42%	3,36%
Permodalan					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	**25,23%**	23,30%	25,28%	20,61%	22,55%
Rasio Kecukupan Modal Tier 1 (CAR Tier 1)	**24,06%**	22,30%	24,27%	19,59%	21,52%
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	**Nihil**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	**Nihil**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	**Nihil**	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Uraian	2023	2022	2021	2020*)	2019
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	8,05%	12,11%	4,47%	3,19%	6,15%
Giro Wajib Minimum (Valas)	4,22%	4,24%	4,13%	4,01%	8,07%
Posisi Devisa Neto	0,62%	0,85%	0,81%	1,07%	1,87%
Rasio Lainnya					
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan)	37,74%	41,95%	43,26%	45,40%	40,03%

*) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38
**) Termasuk simpanan *mudharabah* dan *musyarakah*
***) Pengakuan penjualan emas yang berasal dari PT Pegadaian diakui sejak laba rugi Pegadaian dikonsolidasi sepenuhnya pada tahun 2022

Ikhtisar Operasional

Tabel Kinerja Operasional Segmen Mikro (*Bank only*)

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Bisnis Mikro					
Jumlah Debitur (dalam jutaan)	14,0	14,4	13,3	11,7	10,6
Dana Pihak ketiga (dalam miliar)	373.474	367.657	356.268	335.422	296.563
Pinjaman (dalam miliar)	496.554	449.627	396.959	351.352	307.722
AgenBRILink (dalam jumlah penuh)	740.818	627.012	503.151	504.233	422.160

Tabel Kinerja Operasional Segmen Ritel (*Bank only*)

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Pinjaman Bisnis Kecil dan Menengah	260.348	237.834	224.940	217.219	220.202
Pinjaman Bisnis Kredit Konsumer	182.355	161.722	149.306	143.680	140.499
Dana Pihak Ketiga	488.122	469.091	429.701	410.298	374.453

Tabel Kinerja Operasional Segmen Korporasi (*Bank only*)

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Pinjaman Bisnis Korporasi	206.824	180.620	172.425	168.434	191.135
Dana Pihak ketiga	491.087	464.028	341.879	306.943	298.734

Tabel Kinerja Operasional Segmen Perusahaan Anak

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
PT Bank Raya Indonesia Tbk (Raya)*					
Aset	**12.492,37**	13.949,38	16.927,20	27.966,39	27.067,92
Pendapatan	**1.307,16**	1.642,67	1.774,06	2.002,72	2.128,72
Laba Bersih	**24,71**	10,08	(3.061,36)	(66,92)	51,06
BRI Global Financial Service					
Aset	**24,23**	17,98	13,09	8,48	8,84
Pendapatan	**20,42**	14,22	10,16	8,74	7,81
Laba Bersih	**4,24**	2,75	1,89	0,62	0,14
PT Asuransi BRI Life					
Aset	**23.678,04**	21.627,64	18.334,91	13.042,45	11.085,00
Pendapatan	**8.940,41**	8.971,24	7.282,29	5.889,76	5.198,00
Laba Bersih	**538,75**	360,46	170,88	6,94	329,00
PT BRI Multifinance Indonesia					
Aset	**9.057,07**	7.321,87	5.246,04	4.055,88	4.653,28
Pendapatan	**1.236,43**	974,12	65.501,95	493,28	475,93
Laba Bersih	**102,85**	83,36	41,50	(27,47)	28,11
PT BRI Danareksa Sekuritas					
Aset	**1.059,17**	1.648,17	1.143,64	1.095,48	808,95
Pendapatan	**308,78**	351,57	281,27	136,00	201,96
Laba Bersih	**70,52**	72,97	92,87	(224,51)	(93,00)
PT BRI Ventura Investama					
Aset	**2.672,05**	2.176,79	2.047,89	1.822,75	1.514,49
Pendapatan	**43,69**	148,81	255,74	331,52	28,87
Laba Bersih	**4,36**	39,63	221,74	304,39	11,00
PT BRI Asuransi Indonesia					
Aset	**6.465,61**	4.891,25	3.838,16	3.048,87	2.662,00
Pendapatan	**1.729,65**	1.387,57	1.984,00	1.749,00	1.689,00
Laba Bersih	**479,37**	373,10	289,95	173,88	181,00
PT Permodalan Nasional Madani					
Aset	**51.106,91**	46.744,76	43.797,91	31.664,89	24.906,52
Pendapatan	**15.375,03**	12.838,44	8.292,78	5.776,26	4.924,09
Laba Bersih	**1.686,04**	945,42	845,13	358,59	977,31
PT Pegadaian					
Aset	**82.151,80**	72.920,62	65.156,47	71.469,00	65.324,00
Pendapatan	**24.438,65**	22.869,40	14.131,19	21.964,00	17.694,00
Laba Bersih	**4.377,49**	3.337,75	2.427,38	2.022,00	3.108,00
PT BRI Management Investasi					
Aset	**288,82**	276,52	279,91	-	-
Pendapatan	**172,91**	11,95	158,27	-	-
Laba Bersih	**18,16**	6,27	40,37	-	-

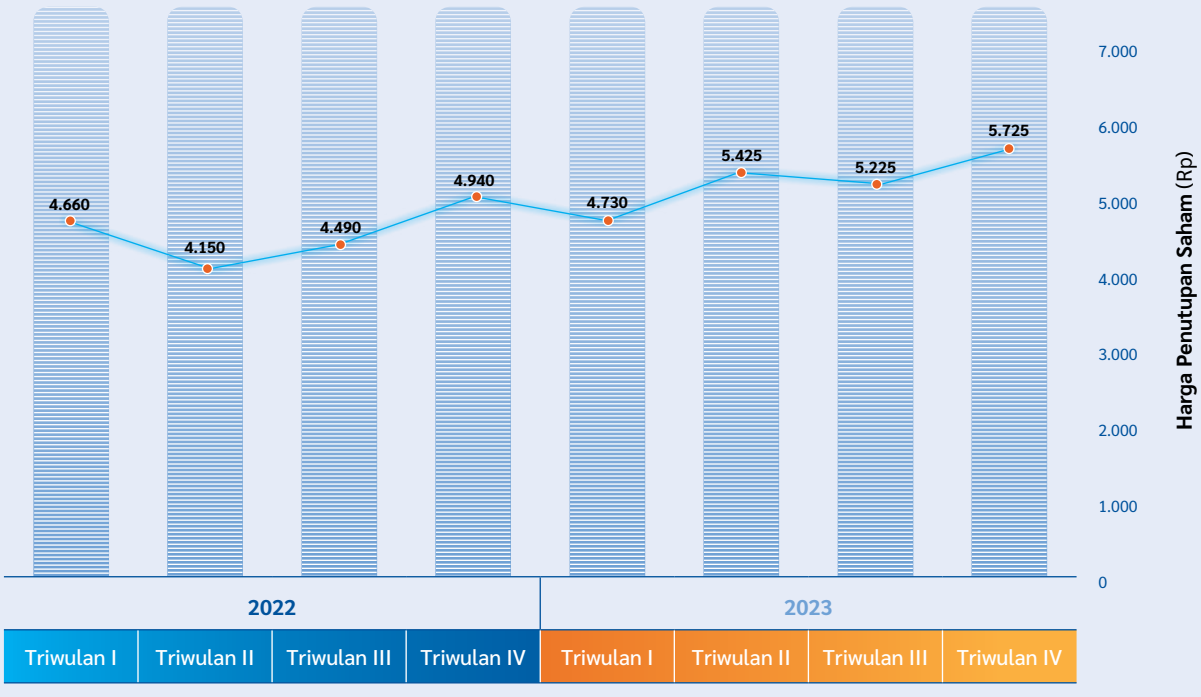
*Sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Informasi
Saham

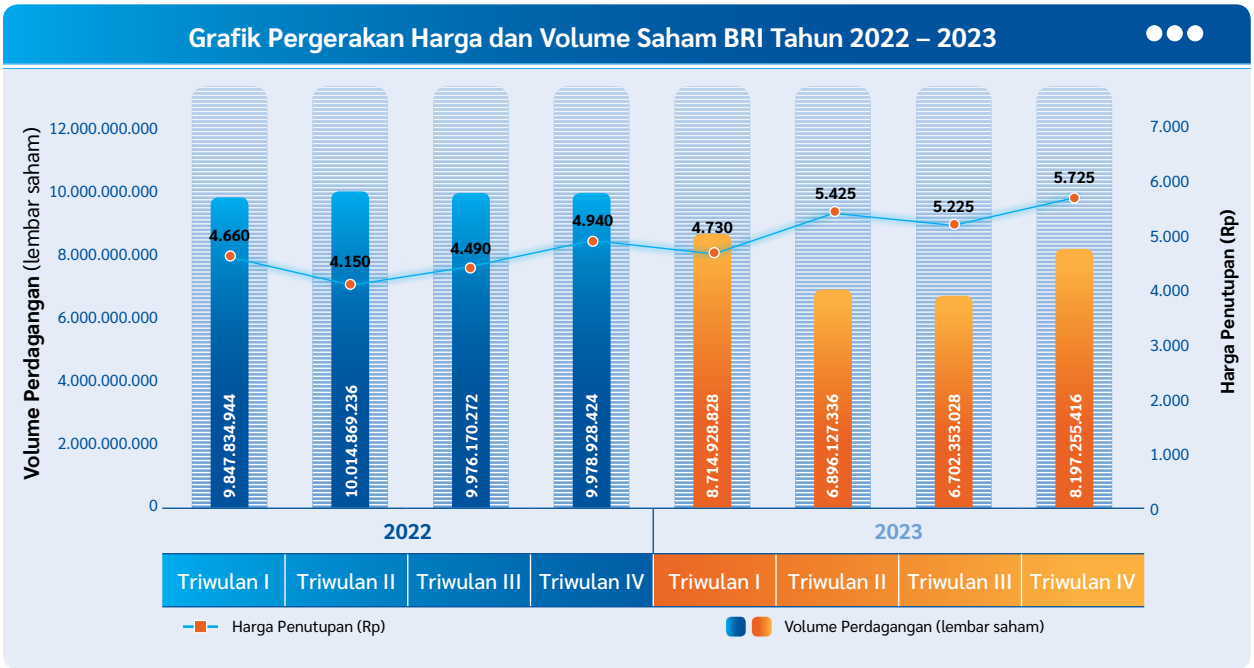
Tabel Informasi Saham BRI 2022-2023

Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (saham)	Volume Perdagangan (saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2023							
Triwulan I	4.940	4.940	4.380	4.730	151.559.001.604	8.714.928.828	716,87
Triwulan II	4.730	5.600	4.730	5.425	151.559.001.604	6.896.127.336	822,21
Triwulan III	5.425	5.700	5.200	5.225	151.559.001.604	6.702.353.028	791,90
Triwulan IV	5.225	5.725	4.830	5.725	151.559.001.604	8.197.255.416	867,68
2022							
Triwulan I	4.110	4.730	4.070	4.660	151.559.001.604	9.847.834.944	706,26
Triwulan II	4.660	4.940	4.150	4.150	151.559.001.604	10.014.869.236	628,97
Triwulan III	4.150	4.610	4.040	4.490	151.559.001.604	9.976.170.272	680,50
Triwulan IV	4.490	4.980	4.270	4.940	151.559.001.604	9.978.928.424	748,70

Grafik Harga Penutupan Saham BRI Tahun 2022-2023







Aksi Korporasi

Pada tahun 2023, BRI tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2023, BRI tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Informasi Obligasi

Tabel Informasi Obligasi Yang Masih Beredar

No.	Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (juta)
1.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01 Desember 2016	7 tahun	IDR	Rp477.000
2.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	IDR	Rp2.350.000
3.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 April 2017	10 tahun	IDR	Rp1.300.500
4.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24 Agustus 2017	7 tahun	IDR	Rp2.517.000
5.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	21 Februari 2018	5 tahun	IDR	Rp1.837.000
6.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21 Februari 2018	7 tahun	IDR	Rp605.000
7.	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	27 Juni 2018	5 tahun	IDR	Rp500.000
8.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07 November 2019	5 tahun	IDR	Rp2.172.800
9.	*Global Bond* 2018	20 Juli 2018	5 tahun	USD	USD500
10.	*Sustainable Bond* 2019	28 Maret 2019	5 tahun	USD	USD500
11.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	20 Juli 2022	370 Hari	IDR	Rp2.500.000
12.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	20 Juli 2022	3 Tahun	IDR	Rp2.000.000
13.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20 Juli 2022	5 Tahun	IDR	Rp500.000
14.	Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	06 Juli 2023	5 tahun	IDR	Rp500.000
15.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri A	17 Oktober 2023	1 Tahun	IDR	Rp1.345.650
16.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	17 Oktober 2023	2 Tahun	IDR	Rp4.154.350
17.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	17 Oktober 2023	3 Tahun	IDR	Rp500.000

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2023, BRI belum menerbitkan sukuk.

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2023	2022	
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2023	8,65%	Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2026	8,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	11 April 2027	8,80%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	24 Agustus 2024	8,25%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2023	6,65%	Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2025	6,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	26 Juni 2023	7,70%	Lunas	idAA oleh Pefindo	idAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	07 November 2024	7,85%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	99,696% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2023	4,625%	Lunas	Baa2 oleh Moody's & BBB- oleh Fitch	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
	99,713% dari jumlah pokok obligasi	28 Maret 2024	3,950%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys	BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys	BNY Mellon
	100% dari jumlah pokok obligasi	30 Juli 2023	3,70%	Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2025	5,75%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2027	6,45%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	06 Juli 2028	6,45%	Belum Lunas	idAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara
	100% dari jumlah pokok obligasi	27 Oktober 2024	6,10%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara
	100% dari jumlah pokok obligasi	17 Oktober 2025	6,35%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara
	100% dari jumlah pokok obligasi	17 Oktober 2026	6,30%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara

Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2023, BRI belum menerbitkan obligasi konversi.

Informasi
Sumber Pendanaan Lainnya

Tabel Informasi *Medium Term Notes* (MTN) yang Masih Beredar

No.	Uraian	Tanggal distribusi MTN secara Elektronik	Tenor	Mata Uang
1.	MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri A	24 November 2022	2 tahun	IDR
2.	MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri B	24 November 2022	3 tahun	IDR

Tabel Informasi *Long Term Notes* (LTN) yang Masih Beredar

No.	Uraian	Tanggal distribusi MTN secara Elektronik	Tenor	Mata Uang
1.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk I Tahun 2022	27 Desember 2022	162 bulan	IDR
2.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023	25 Oktober 2023	159 bulan	IDR

Rating Perusahaan
2023

Lembaga Pemeringkat	Peringkat
Standard & Poor's (S&P)	
Issuer Credit Rating	BBB-
Stand-Alone Credit Profile (SACP)	bbb-
Outlook	*Stable*
Fitch Ratings	
Long Term Rating	BBB
Short Term Rating	F2
Viability Rating	bbb-
Government Support Rating	bbb
National Long-Term Rating	AAA
National Short-Term Rating	F1+
Outlook	*Stable*

	Jumlah MTN (Juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
	Rp2.000.000	100% dari jumlah pokok MTN	24 November 2024	6,60%	Belum Lunas
	Rp3.000.000	100% dari jumlah pokok MTN	24 November 2025	6,98%	Belum Lunas

	Jumlah MTN (Juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
	Rp52.332	100% dari jumlah pokok LTN	27 Juni 2036	0,55%	Belum Lunas
	Rp59.485	100% dari jumlah pokok LTN	25 Januari 2037	0,55%	Belum Lunas

Lembaga Pemeringkat	Peringkat
Moody's	
Long Term Counterparty Risk – Fgn Curr	Baa1
Long Term Deposit – Fgn Curr	Baa2
Long Term Debt – Fgn Curr	Baa2
Short Term Counterparty Risk – Fgn Curr	P-2
Short Term Deposit – Fgn Curr	P-2
Baseline Credit Assessment	Baa2
Adjusted Baseline Credit Assessment	Baa2
Outlook	*Stable*
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	
National Rating	$_{id}$AAA, *Stable Outlook*

Peristiwa Penting

26 Januari 2023

BRI menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2023 terkait Peran Strategis BRI Akselerasi Inklusi Keuangan dan Praktik ESG di Indonesia dengan menghadirkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan *keynote speaker* lainnya.



27 Januari 2023

BRI membagikan Dividen Interim Rp8,63 triliun imbas kinerja cemerlang sepanjang tahun 2022.



8 Februari 2023

BRI menggelar *Analyst Meeting* dan berhasil menutup tahun 2022 dengan kinerja gemilang, yaitu BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dengan mencetak laba Rp51,4 triliun pada akhir tahun 2022 dan menjadi bank pertama di Indonesia yang mendapatkan laba lebih Rp50 triliun.



24 Februari 2023

BRI meraih Penghargaan Internasional The Asset Triple A sehingga penerapan ESG BRI semakin mendapat mengakuan dunia.



13 Maret 2023

BRI membagikan dividen sebesar 85 % dari laba bersih konsolidasian sepanjang tahun 2022 atau senilai Rp43,94 triliun. Pembagian dividen tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023.



14 Maret 2023

Euromoney Trade Finance Award 2023 nobatkan BRI sebagai Market Leader & Best Service di antara seluruh penyedia jasa layanan keuangan di Indonesia (domestik) maupun di Asia Pacific (regional).



10 April 2023

Selama 2 (dua) tahun berturut-turut, BRI dinobatkan sebagai Best Bank in Indonesia oleh Global Finance pada penyelenggaraan 30th Annual Best Bank Awards 2023.



21 April 2023

Semakin memudahkan nasabah, BRI luncurkan fitur temukan lokasi merchant pada Asisten Virtual Pintar Sabrina BRI melalui chat WhatsApp 0812-12-14017.



27 April 2023

BRI menggelar *Analyst Meeting* Triwulan I 2023 dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, BRI berhasil memperoleh laba sebesar Rp15,56 triliun.



5 Mei 2023

BRI dan Pegadaian menggelar Indonesia Coffee Festival (ICF) dan Direktur Utama BRI meyakini potensi kopi di Indonesia.



6 Juni 2023

Pemerintah mempercayai BRI sebagai satu-satunya bank penyalur bonus Atlet dan Pelatih SEA Games 2023.



13 Juni 2023

BRI kembali meraih penghargaan sebagai Perusahaan Terbesar di Indonesia Versi Forbes The Global 2000 di 2023. BRI menjadi peringkat teratas di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia dan secara internasional, BRI menempati peringkat terbaik yakni 307, meningkat dibandingkan pencapaian tahun lalu yakni peringkat 349 dunia.



28 Juni 2023

BRI berhasil menyabet 9 penghargaan internasional pada Finance Asia Awards 2023 di Hong Kong.



1 Juli 2023

BRI kembali menjadi *titling* sponsor kompetisi sepak bola terbesar di Indonesia. BRI yakin BRI Liga 1 lebih dari sepakbola, yaitu menggerakkan perekonomian khususnya industri sepak bola Indonesia.



10 Juli 2023

Danareksa Investment Management berganti nama menjadi BRI Manajemen Investasi setelah resmi menjadi bagian dari BRI Group.



12 Juli 2023

The Banker kembali nobatkan BRI sebagai bank nomor satu di Indonesia dalam daftar Top 1000 World Banks 2023 dan masuk peringkat ke-109 dunia.



30 Agustus 2023

BRI menggelar *Analyst Meeting* Triwulan II 2023 dengan pencapaian Kredit Mikro yang Tumbuh 11,41%, BRI Makin Tangguh dan berhasil mencetak Laba Rp29,56 triliun.



14 September 2023

Selama 2 (dua) tahun terbentuk, Holding Ultra Mikro (BRI-Pegadaian-PNM) hingga akhir 2023 sukses layani 37,7 juta nasabah UMKM dengan total pembiayaan kredit mencapai Rp494,78 triliun.



1 Oktober 2023

BRI kembali menerbitkan *Green Bond* melalui Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan I Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp6 triliun.



25 Oktober 2023

BRI menggelar *Analyst Meeting* Triwulan III 2023 dengan pencapaian Kredit tumbuh 12,5%. BRI semakin kuat dengan mencetak laba sebesar Rp44,21 triliun dalam waktu 9 (sembilan) bulan.



10 November 2023

Memperingati 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia (IPO), saham BBRI telah naik 61,5 Kali.



30 November 2023

BRI menggelar Public Expose Live dengan tema Terus Bertransformasi, BRI Optimis Menutup Tahun 2023 Dengan Kinerja Cemerlang.



10 Desember 2023

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 yang sebelumnya dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, resmi ditutup oleh Direktur Utama BRI Sunarso. *Event* ini berhasil mencatatkan nilai penjualan *business matching* senilai 81,3 juta dolar AS atau sekitar Rp1,26 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS).



16-17 Desember 2023

BRI merayakan Hari Ulang Tahun ke-128 pada tanggal 16 Desember 2023 dan puncaknya pada tanggal 17 Desember 2023 ditandai dengan pergelaran BRILiaN Fest yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Festival yang dimeriahkan band-band ternama tanah air tersebut dihadiri oleh lebih dari 50.000 Insan BRILian (pekerja BRI) dan keluarganya.



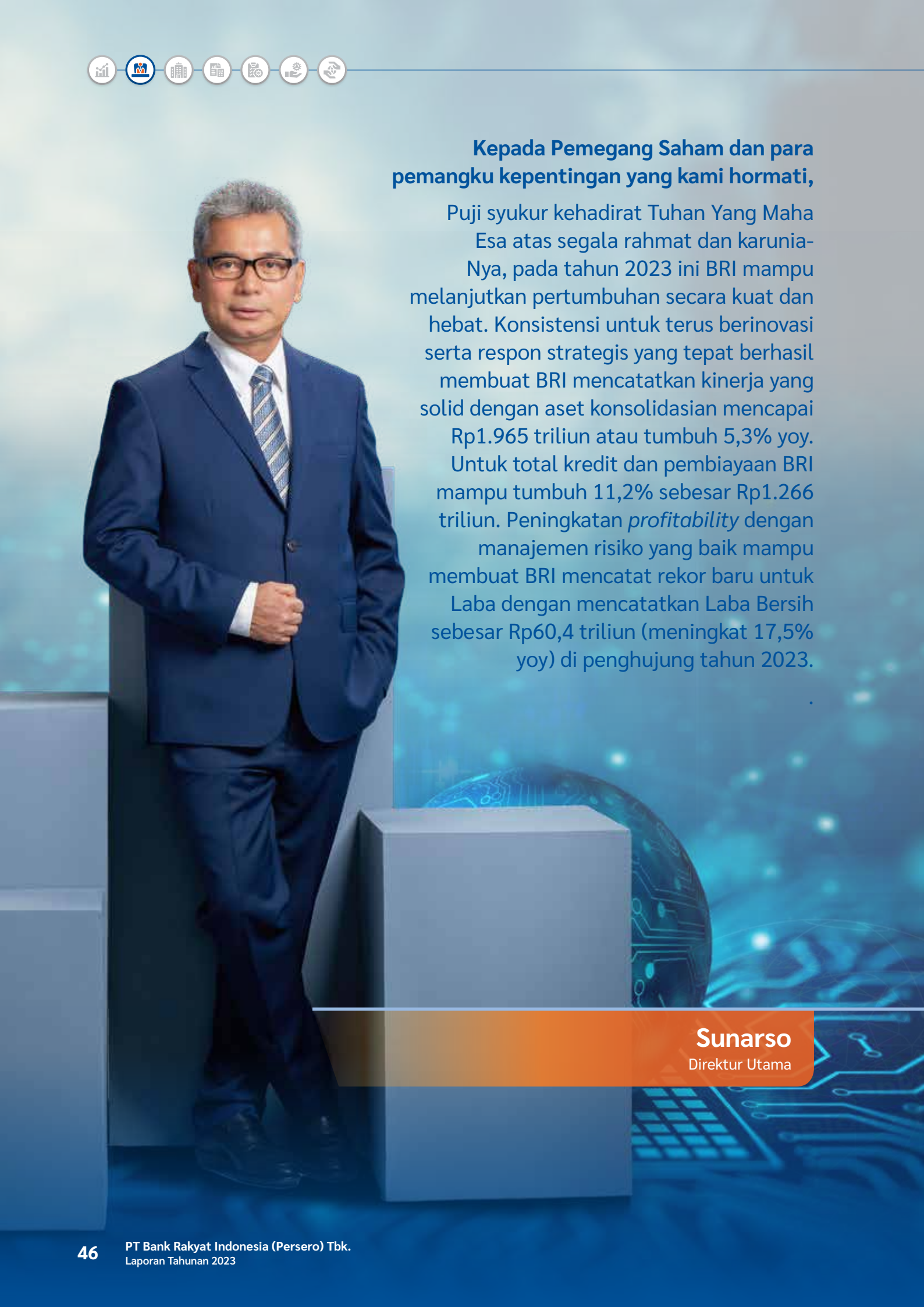

BUMN UNTUK INDONESIA
BRI
Lebih mudah
belanja ini-itu dengan
Tabungan BRI BritAma
Promo Debit BRI
Transaksi Online
Mudah Buka Rekening via BRImo
#BeraniBanyakMau
bbri.id/bukabritamaviabrimo
Tabungan BRI
BritAma
Download
BRI
mo
CONTACT BRI
1500017
Sabrina 0812 12 14017 | www.bri.co.id
BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan **Direksi dan Dewan Komisaris**



Pada tahun 2023, Perseroan memiliki aspirasi untuk terus tumbuh kuat dan hebat dengan tetap fokus tumbuh pada segmen UMKM serta melanjutkan transformasi pada sisi liabilitas untuk dapat mendorong kinerja yang semakin *sustainable* serta terus memberikan *value*, baik *economic* maupun *social value* kepada seluruh *stakeholders*.


BRI
BRI SPOT
QLola
SenyuM
BRI mo



Kepada Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2023 ini BRI mampu melanjutkan pertumbuhan secara kuat dan hebat. Konsistensi untuk terus berinovasi serta respon strategis yang tepat berhasil membuat BRI mencatatkan kinerja yang solid dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.965 triliun atau tumbuh 5,3% yoy. Untuk total kredit dan pembiayaan BRI mampu tumbuh 11,2% sebesar Rp1.266 triliun. Peningkatan *profitability* dengan manajemen risiko yang baik mampu membuat BRI mencatat rekor baru untuk Laba dengan mencatatkan Laba Bersih sebesar Rp60,4 triliun (meningkat 17,5% yoy) di penghujung tahun 2023.

.

Sunarso
Direktur Utama

Bersama ini, izinkan kami sampaikan laporan kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2023. Dalam laporan ini akan kami sampaikan kinerja BRI selama tahun 2023, prospek usaha dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sekilas Profil Perseroan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, aktivitas utama Perseroan adalah melaksanakan fungsinya sebagai *lembaga intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pinjaman atau kredit kembali kepada masyarakat. Selain itu, Perseroan juga menawarkan layanan perbankan *digital* melalui aplikasi *mobile banking*, layanan jasa transaksi, layanan jasa Investasi dan jasa perbankan lainnya.

Sesuai dengan aktivitasnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa di antaranya yaitu, produk simpanan yang meliputi Tabungan BRI BritAma, Tabungan BRI Simpedes, Tabungan BRI Junio beserta turunannya masing-masing. Produk pinjaman yang meliputi Pinjaman Mikro (Kupedes, Kupedes Rakyat, KUR Mikro), Pinjaman Konsumtif (BRIguna, KPR BRI, Kartu Kredit BRI, Ceria), Pinjaman Kecil (KMK, KI, KUR Kecil), Pinjaman Menengah (KI atau KMK), Pinjaman Korporasi (KI atau KMK) serta produk-produk pinjaman lainnya. Produk lainnya antara lain, Asuransi Mikro, Asuransi Jiwa Kredit KPR, dan Agen Penjual Reksadana. Pada jasa perbankan digital, BRI menyediakan aplikasi *mobile banking* (*superapps*) yakni BRIMo untuk memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan, jasa transaksi korporasi melalui *Cash Management System* dan BRICams, Jasa Kelembagaan, Jasa Bisnis dan Keuangan, Agen BRILink, Jasa Layanan Bisnis Internasional, BRIfast Remittance, Jasa Layanan Treasury, Jasa Investment Service, dan BRI Prioritas.

Dalam menghadirkan layanan kepada seluruh nasabahnya, BRI menerapkan konsep *hybrid bank* yang memadukan kehadiran jaringan unit kerja dan *branchless banking* (Agen BRILink) yang tersebar di seluruh Indonesia, ditambah dengan *financial advisor* yang kompeten dengan *digital capabilities*. Perpaduan ketiganya menghadirkan layanan perbankan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sesuai dengan *journey* literasi digital masyarakat Indonesia.

Jaringan kerja BRI dan mitra usaha BRI meliputi berbagai wilayah baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, BRI memiliki 1 Kantor Pusat, 18 Regional Office, 18 Regional Audit Office, 453 Kantor Cabang (termasuk 1 Kantor Cabang Khusus), 7.155 Kantor Cabang Pembantu (termasuk BRI Unit, Kantor Kas, dan Teras BRI), 115 Teras BRI Keliling, dan 4 Teras BRI Kapal yang tersebar di wilayah Indonesia. Sedangkan jaringan kantor di luar negeri BRI memiliki 6 Kantor Cabang Luar Negeri dan 3 Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri yang berada di New York, Cayman Island, Singapore, Taipei, Timor Leste dan Hongkong. Secara keseluruhan, saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 7.764 unit kerja, 686.128 jaringan *e-channel* dan 740.818 agen BRIlink.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BRI memiliki sebanyak 77.739 orang Pekerja dengan rincian tingkat Pendidikan 10 Pekerja berjenjang pendidikan Strata 3, 1.774 Pekerja berjenjang pendidikan Strata 2, 66.079 Pekerja berjenjang pendidikan Strata 1, 8.727 Pekerja berjenjang pendidikan Diploma, dan 1.149 Pekerja berjenjang pendidikan SLTA/Sederajat.

Di sisi teknologi informasi, BRI memiliki infrastruktur *digital* yang handal dengan 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. *Digitizing Core*, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menciptakan layanan nasabah yang handal, melalui *business process reengineering*. Strategi ini mampu menghasilkan produk dan layanan antara lain BRISPOT, BRILink Agent, BRImo dan Qlola.
2. *Digital Ecosystem*, yang bertujuan menciptakan platform berbasis *digital* dan melakukan kolaborasi yang masif dengan ekosistem digital (*Bank as a Platform*) yang mampu menawarkan produk dan layanan baru di luar bisnis utama Bank, antara lain BRI API, Digital Ecosystem Platform (Pasar.id, BRISMART, BRIMOLA, dan lainnya), *Partnership* dengan P2P, *E-Commerce* dan *Ride Hailing*.

Laporan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2023, total aset BRI secara konsolidasi mampu tumbuh 5,3% menjadi sebesar Rp1.965 triliun yang didorong salah satunya dari kredit dan pembiayaan yang telah mencapai Rp1.266 triliun atau tumbuh sebesar 11,2% secara *year on year*.

3. *New Digital Proposition,* yang bertujuan menciptakan *business model* baru melalui *new digital proposition* dengan pendekatan *fully digital* menghasilkan produk dan layanan antara lain Tabungan Digital (*Digital Saving*), Pinjaman Digital (Ceria, Traveloka Paylater) yang didukung *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* (BRIBRAIN).

Kinerja BRI 2023

Secara umum, pada tahun 2023 Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik baik dari sisi operasional dan keuangan. Perseroan telah menerapkan berbagai strategi yang efektif, di antaranya pertumbuhan kredit yang selektif dan fokus pada kualitas, penguasaan ekosistem dana sebagai upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan simpanan, serta optimalisasi sinergi dengan perusahaan anak BRI Group. Pada bagian laporan kinerja ini juga kami sampaikan ulasan tentang kondisi perekonomian baik pada tingkat global, nasional maupun pada industri perbankan di Indonesia. Kinerja perekonomian merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan.

Analisis Perekonomian

Pasca kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, perekonomian global menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk dapat segera kembali dan pulih seperti pada kondisi pre-pandemi. Hingga akhir tahun 2023, paling tidak terdapat empat tantangan yang dihadapi perekonomian dunia, yaitu (1) tren inflasi global yang tinggi, didorong oleh inflasi atas disrupsi rantai pasok, tingginya harga komoditas, serta el-nino yang berdampak pada harga pangan, (2) kondisi geopolitik yang tidak pasti, (3) pengetatan kebijakan moneter global, serta (4) pertumbuhan perekonomian China yang lebih rendah dari perkiraan. Meskipun demikian, di tengah serangkaian guncangan selama empat tahun terakhir sejak Pandemi Covid-19, perekonomian global terbukti masih cukup resilien, terutama negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, cukup adaptif dan *agile* menghadapi tekanan inflasi dan ketatnya kebijakan moneter.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Hal itu telah ditandai oleh tren penurunan *leading economic indicator* (LEI) secara persisten pada berbagai negara utama di dunia, khususnya Amerika Serikat (AS), China, dan Uni Eropa. Paling tidak terdapat tiga tantangan utama yang perlu diwaspadai ke depan, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang masih dinamis dan fluktuatif. Pertama, tren inflasi global yang secara historis masih cukup tinggi. Kedua, kondisi geopolitik yang masih tak menentu, yang bisa memicu kembali disrupsi rantai pasok barang kebutuhan primer dan komoditas energi, sehingga dapat berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketiga, pemulihan ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat aktivitas industri dan permintaan konsumen yang melambat. Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut diperkirakan akan masih berdampak pada perekonomian global di tahun 2024.

Sementara itu di sisi domestik, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2023 tetap kuat, meskipun pertumbuhannya relatif lebih lambat dari tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05%, ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik dan akselerasi investasi, seiring dengan berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional pasca pandemi. Tetap solidnya pertumbuhan ekonomi nasional, juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali, sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Inflasi domestik tercatat menurun pada tahun 2023 sebesar 2,61%, dari tahun sebelumnya sekitar 5,51%. Dari pasar finansial, nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar tetap terjaga dan mencatat apresiasi sebesar 1,1% sepanjang tahun 2023. Kinerja Rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa mata uang negara peers seperti Peso Filipina, Rupee India, dan Ringgit Malaysia.

Tetap kuatnya kondisi perekonomian nasional, juga tercermin dari *robust*-nya kinerja industri perbankan pada tahun 2023. Secara umum, intermediasi perbankan masih cukup baik, meskipun relatif lambat dibandingkan tahun 2022. Secara *year on year*, kredit perbankan tumbuh 9,7% pada bulan November 2023, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 11,3%. Namun demikian, pertumbuhan kredit berada dalam tren yang meningkat sejak Juli 2023 lalu. Sedangkan dari sisi pendanaan, likuiditas industri perbankan tumbuh relatif terbatas dan cenderung mengetat. Secara *year on year*, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,0% pada November 2023, dari 8,9% pada periode yang sama tahun 2022. Sementara itu dari sisi resiliensi, ketahanan perbankan tetap terjaga dengan baik, tercermin dari permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% pada November 2023. Risiko kredit juga tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang rendah sebesar 2,36% (bruto) pada November 2023.

Dengan berbagai kondisi perekonomian dan industri, serta kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2024, BRI menetapkan target pertumbuhan kredit sebesar 11-12%yoy. Tentunya, BRI akan tetap berfokus pada segmen UMKM untuk mencapai aspirasi menjadi T*he Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion* pada tahun 2025. Dengan struktur perekonomian nasional yang didominasi oleh UMKM, pemberian kredit terhadap para pelaku UMKM diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* tinggi, sehingga dapat berdampak positif signifikan pada perekonomian Indonesia.

Kinerja Perseroan

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki aspirasi untuk terus tumbuh kuat dan hebat dengan tetap fokus tumbuh pada segmen UMKM serta melanjutkan transformasi pada sisi liabilitas untuk dapat mendorong kinerja yang semakin *sustainable* serta terus memberikan *value*, baik *economic* maupun *social value* kepada seluruh *stakeholders*.

Dalam merespon kondisi perekonomian global maupun nasional serta kondisi industri perbankan, BRI telah menetapkan strategi dan kebijakan strategis. Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategi Direksi berperan dalam menelaah, mengarahkan dan menyetujui strategi yang ditetapkan. Direksi senantiasa memastikan implementasi strategi melalui berbagai arahan dalam berbagai rapat, persetujuan keputusan-keputusan operasional Perseroan dan telaah atas laporan-laporan Perseroan.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Strengthening Retail Banking Capabilities

Mengusung tema *strengthening retail banking capabilities*, Perseroan memiliki aspirasi untuk melakukan transformasi liabilitas melalui penguatan basis pendanaan dengan fokus pada *low-cost funding* dari CASA. Perolehan CASA akan didorong melalui penguasaan transaksi sehingga akan semakin *sustainable*, selain itu Perseroan akan optimalisasi piramida segmen yang dimiliki mulai dari mikro sampai korporasi untuk dijadikan satu ekosistem dan alur perputaran *funding* melalui penciptaan rantai *value chain* yang terintegrasi.

Mendorong Graduasi Nasabah

Pada tahun 2023, Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan yang kuat pada produk pinjaman komersil di segmen mikro yaitu Kupedes. Pertumbuhan yang kuat pada produk Kupedes sejalan dengan aspirasi perseroan terus mendorong nasabah untuk dapat naik kelas ke segmen yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan kapabilitas bisnisnya.

Strengthen Risk Management

BRI berkomitmen untuk terus menjaga kualitas aset dengan terus menyempurnakan *risk management system* antara lain melalui pengembangan *early warning system* yang lebih komprehensif, penggunaan *Repayment Capacity* (RPC) dinamis, pengembangan kapabilitas *loan officer*, serta penyempurnaan *credit risk scoring* dan *pipeline management* berbasis *value chain* yang terintegrasi dengan BRISPOT untuk mendorong penyaluran pinjaman yang lebih *prudent*.

Sinergi BRI Grup

Penguatan sinergi bisnis dan non-bisnis para entitas yang berada dibawah BRI group, baik antara BRI Induk dengan Perusahaan Anak maupun sesama Perusahaan Anak untuk mendukung peningkatan kinerja perseroan secara keseluruhan. *Cross-selling*, *funding synergy* serta peningkatan kapabilitas *human capital* melalui program *career mobility*.

Di tengah tantangan makro ekonomi, BRI mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis dengan solid sepanjang tahun 2023. BRI tetap dapat memberikan *values* yang optimal, baik *economic* maupun *social values*, bagi seluruh *stakeholder* Perseroan, serta terus berada pada jalur yang tepat untuk mencapai visi Perseroan 2025 menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* dan *Champion of Financial Inclusion.*

Kinerja Keuangan Perseroan

Sampai dengan 31 Desember 2023, total aset BRI secara konsolidasi mampu tumbuh 5,3% menjadi sebesar Rp1.965 triliun yang didorong salah satunya dari kredit dan pembiayaan yang telah mencapai Rp1.266 triliun atau tumbuh sebesar 11,2% secara *year on year*. BRI secara konsisten tetap menyalurkan kredit dan pembiayaan ke segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencapai 84,39% dari total penyaluran kredit dan pembiayaan BRI, atau sebesar Rp1.069 triliun, di mana *flagship segment* BRI, yaitu Mikro dan Ultra Mikro memiliki kontribusi sebesar 48,26% dari total kredit dan pembiayaan. Dalam jangka panjang, BRI akan terus berkomitmen meningkatkan komposisi tersebut menjadi 85%.

Pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan ke segmen UMKM tersebut tidak lepas dari kontribusi utama Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM, dan telah dibentuk sejak September 2021. Kredit Pegadaian mampu tumbuh 14,4% menjadi sebesar Rp67,6 triliun, sedangkan kredit PNM tumbuh 10,6% atau sebesar Rp47,1 triliun. Di sisi lain, kredit segmen Mikro dan Ultra mikro BRI mampu mencatatkan pertumbuhan yang solid sebesar 10,4%, atau menjadi Rp496,6 triliun. Pertumbuhan kredit segmen Mikro BRI tersebut ditopang oleh pertumbuhan produk mikro komersial BRI yaitu Kupedes, yang secara *year on year* mampu tumbuh agresif sebesar 64,3% atau menjadi Rp212,3 triliun. Pertumbuhan Kupedes yang kuat sejalan dengan aspirasi perseroan untuk mendorong graduasi nasabah pada produk komersial seiring dengan peningkatan kapabilitas usahanya, serta menjadikan produk KUR sebagai ujung tombak untuk meningkatkan pembiayaan yang lebih inklusif dengan memberikan akses pembiayaan kepada nasabah yang belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan komersial. Pada tahun 2023, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp163,3 triliun atau turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp252,4 triliun, sejalan dengan penurunan kuota yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp194,4 triliun. Namun demikian, BRI tetap berkomitmen untuk terus menjadi mitra utama Pemerintah dalam penyaluran KUR.

Pertumbuhan pada segmen UMKM juga didukung oleh pertumbuhan yang impresif pada segmen Konsumer yang membukukan kenaikan sebesar 13,4% secara *year on year* hingga mencapai Rp190,0 triliun. Pertumbuhan pada segmen konsumer utamanya didorong oleh produk BRIGUNA dan KPR yang masing-masing tumbuh sebesar 10,5% dan 17,0% *year*

on year. Pengembangan produk dan layanan berbasis digital, termasuk hadirnya BRIGUNA digital yang berkontribusi sebesar 62,75% dari total nasabah baru BRIGUNA. Selain itu, BRI juga terus mendukung program pemerintah untuk mendorong tingkat hunian masyarakat dengan menyalurkan 23.241 unit KPR FLPP pada tahun 2023. Segmen SME juga membukukan momentum yang baik dengan tumbuh 8,6% secara *year-on-year* secara selektif.

Sementara itu, kredit segmen Korporasi BRI mampu tumbuh solid mencapai Rp197,7 triliun, atau tumbuh 13,8% *year on year.* Pertumbuhan segmen Korporasi tersebut difokuskan pada upaya penguatan *wholesale funding* dan *transaction banking* seperti *trade finance*, *cash management* dan transaksi *forex* serta penciptaan *pipeline* untuk segmen UMKM melalui optimalisasi *value chain* bisnis korporasi. Selain itu, pertumbuhan segmen korporasi juga didorong oleh meningkatnya dukungan pendanaan BRI Induk kepada Perusahaan Anak dalam rangka optimalisasi sinergi BRI Group.

Pada tahun 2023, BRI memiliki fokus strategi untuk memperkuat kapabilitas *retail banking* BRI terutama dalam hal penghimpunan *Current Account Saving Account (CASA)* yang lebih stabil dan berkelanjutan. Strategi tersebut membuahkan hasil di mana simpanan BRI secara konsolidasi mampu tumbuh 3,9% atau menjadi Rp1.358 triliun, dengan rasio CASA sebesar 64,35%, lebih tinggi dari periode pre-pandemi. Pertumbuhan pada CASA yang berbiaya murah akan terus menjadi fokus utama sumber pendanaan BRI.

Penghimpunan CASA didukung oleh strategi BRI dalam meningkatkan transaksi nasabah pada segmen Ritel maupun *Wholesale*. Pada segmen Ritel penghimpunan CASA didukung oleh optimalisasi transaksi melalui Agen BRILink, mobile banking (BRImo) dan *digital payment platform* (BRI API), serta perluasan akseptasi *acquiring merchant*. Sementara pada segmen *Wholesale*, penghimpunan CASA dioptimalkan melalui pengembangan *platform digital payment* terintegrasi untuk nasabah korporasi yaitu Qlola yang menyediakan akses menyeluruh terhadap layanan *wholesale banking* BRI seperti layanan *cash management*, *trade finance*, *supply chain management*, *foreign exchange*, *investment service*, dan *financial dashboard*. Penguatan CASA pada segmen ritel juga tercermin dari kenaikan transaksi nasabah pada layanan Agen BRILink dan BRImo yang memberikan kontribusi optimal terhadap kinerja profitabilitas BRI. Selama tahun 2023, Agen BRILink mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 1,1 miliar dengan total nilai sebesar Rp1.427 triliun, tumbuh 10,0% *year on year* dari tahun lalu. Selain itu, BRImo juga mencatatkan peningkatan nilai transaksi sebesar 55,8% *year on year* sehingga mencapai Rp4.159 triliun.

Kinerja yang solid tersebut juga ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% secara *year on year*. Pencapaian kinerja profitabilitas BRI didorong oleh perolehan laba bersih BRI secara *bank only* sebesar Rp53,1 triliun atau tumbuh 11,1%. *Driver* utama pertumbuhan laba BRI berasal dari kemampuan dalam mengelola pertumbuhan pendapatan bunga bersih, pendapatan berbasis *fee*, pendapatan *recovery*, serta efisiensi biaya operasional.

Kinerja *topline* BRI mampu mencatatkan hasil yang impresif. *Net Interest Income* (NII) BRI secara konsolidasi mampu tumbuh *7,4%* secara *year on year*. Pertumbuhan tersebut dihasilkan dari pengelolaan aset kredit dan pembiayaan yang memberikan tingkat suku bunga yang kompetitif serta pengelolaan likuiditas yang optimal. Adapun tingkat suku bunga BRI tercermin dalam Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebagai berikut

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) per 31 Desember 2023

Segmen Kredit	Suku Bunga
Kredit Mikro	14,00%
Kredit Ritel	8,25%
Kredit Konsumsi (KPR)	7,25%
Kredit Konsumsi (Non KPR)	8,75%
Kredit Korporasi	8,00%

Sedangkan tingkat suku bunga yang diberikan atas produk simpanan BRI adalah sebagai berikut:

Tabel *counter rate* simpanan per 31 Desember 2023

Produk	Suku Bunga IDR	Suku Bunga USD
Giro	0,00% - 2,00%	0,05% - 0,15%
Tabungan	0,00% - 1,75%	0,08% - 0,25%
Deposito	2,25% - 4,00%	1,00% - 2,25%

Pendapatan berbasis *fee* dan pendapatan operasional lainnya dapat tumbuh mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 17,3% secara *year on year*, di mana perseroan membukukan pendapatan berbasis *fee* sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 10,3% dari periode yang sama tahun lalu. Pencapaian pendapatan berbasis *fee* tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan *fee* atas jasa *Trade Finance* dan *International Banking* yang tumbuh 34,9% seiring dengan transformasi pada *wholesale banking* yang berfokus pada penguatan *transaction banking* dan *trade finance.*

Di sisi lain, BRI mampu menjaga efisiensi biaya operasional yang terlihat pada pertumbuhan secara *year on year* sebesar 3,3%. Hal tersebut berdampak pada *Cost to Income ratio* (CIR) konsolidasi yang turun menjadi 41,89%.

Dengan pertumbuhan bisnis dan profitabilitas yang kuat tersebut, BRI mampu menjaga rasio keuangan pada level yang baik. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank berada pada level 84,22% secara konsolidasi dan 84,73% secara *bank only*, menunjukkan kondisi likuiditas Perseroan pada kondisi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan. Rasio profitabilitas BRI tercatat positif dan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan dari rasio *Return on Asset* (ROA) *After Tax* dan *Return on Equity* (ROE) *Balance Sheet* masing-masing sebesar 3,24% dan 19,95%.

Dari segi kualitas aset, BRI masih memiliki tantangan untuk menyelesaikan portofolio pinjaman yang direstrukturisasi atas Covid-19. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI tercatat pada 2,95% di bulan Desember 2023, sedikit mengalami peningkatan dari periode yang sama di tahun lalu. Hal tersebut sejalan dengan strategi perseroan untuk mempercepat penyelesaian pinjaman yang direstrukturisasi atas Covid-19. Namun begitu, kami masih memiliki pencadangan yang cukup, hal tersebut terlihat dari rasio *NPL Coverage* yang masih terjaga pada 229,09%, dan rasio *Loan-Loss Reserve* (LLR) yang masih tinggi sebesar 6,75%, di atas periode pre-pandemi sebesar 4-5%. Namun begitu *Loan-at-Risk* (LAR) masih melanjutkan tren penurunan dari 16,54% pada tahun 2022 menjadi 12,47% di tahun 2023, didorong oleh penurunan pada portfolio yang direstrukturisasi atas Covid-19 dari Rp107,2 triliun pada akhir tahun 2022 menjadi Rp54,5 triliun pada akhir tahun 2023.

BRI juga mampu menjaga kondisi permodalan pada level yang kuat dengan CAR mencapai 27,48% (konsolidasi) atau 25,23% (*bank only*) berada di atas minimum ketentuan regulator 17,5% (setelah memperhitungkan implementasi Basel 3) dan *risk appetite* Perseroan sebesar 19%. Dengan rasio kecukupan modal yang sangat memadai tersebut, BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional serta mendukung pertumbuhan bisnis ke depan secara jangka panjang.

Pencapaian Target Perseroan

Secara umum, BRI secara *bank only* mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja 2023 yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Keuangan

(bank only, dalam miliar Rupiah)

Uraian	Desember 2023		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	1.784.070	1.835.249	102,87%
Pendapatan Bunga	145.906	146.918	100,69%
Kredit yang diberikan	1.148.723	1.146.083	99,77%
Dana Pihak Ketiga	1.340.304	1.352.683	100,92%
Laba Bersih	52.209	53.153	101,81%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,72%	25,23%	102,04%
Cost to Income Ratio (CIR)	40,84%	37,74%	107,05%

Kinerja Non Keuangan Perseroan

Pencapaian kinerja keuangan BRI juga didukung oleh transformasi pada aspek Human Capital, Teknologi Informasi, Jaringan, serta program lainnya yang mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Human Capital

Pada tahun 2023, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menetapkan tema strategis *human capital* yang sejalan dengan fokus tahunan perusahaan untuk memperkuat kapabilitas *Retail Banking*. Upaya tersebut terpusat pada peningkatan kapabilitas, produktivitas, sinergi antar unit BRI Group, serta implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *People Analytics*. BRI menekankan penyempurnaan strategi sumber daya manusia, revitalisasi tenaga pemasar melalui Brilian Marketing Specialist Program, peningkatan kapabilitas melalui berbagai pendidikan, serta penyesuaian kebijakan karir. Program-program seperti *onboarding* Pinca Metropolitan dan *performance bootcamp* diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas, sementara Deklarasi *Respectful Workplace Policy* (RWP) mendukung komitmen terhadap ESG. Selain itu, BRI juga terus berusaha melakukan penguatan *Human Capital Management* melalui penilaian maturitas *human capital* di BRI Group yang bertujuan untuk menyusun *roadmap* program kerja yang akan membantu Perusahaan Anak dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif.

Pengembangan kompetensi pekerja juga menjadi hal prioritas utama bagi Perseroan. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui berbagai macam program, termasuk pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi yang dapat dilakukan secara luring maupun daring melalui *digital learning platform* (BRISMART). Pada tahun 2023, telah diselenggarakan program pendidikan yang terdiri dari kelas *offline* dan kelas *online*. BRI berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi seluruh pekerjanya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan tanpa memandang level jabatan, pendidikan, maupun gender dari Pekerja.

BRI berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman. Hal tersebut BRI monitor salah satunya dengan mengukur tingkat keterikatan pekerja terhadap perusahaan melalui *Employee Engagement Survey* (EES) di mana tingkat keterikatan pekerja BRI indeks meningkat menjadi 3,49 (skala 4) pada tahun 2023, dibandingkan tahun 2022 dengan skor 3,48.

Teknologi Informasi

Sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan, BRI telah memiliki teknologi informasi yang berkualitas dan mampu mendukung tujuan bisnis perusahaan khususnya dalam pengembangan bisnis digital. Digital dan Teknologi Informasi BRI kini menjadi *Enabler* dan *Strategic Thought Partner* bagi dunia usaha melalui inovasi dan kolaborasi antara TI dan dunia usaha untuk menciptakan solusi, produk atau layanan yang aman dan responsif sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer centric*). Digital dan Teknologi Informasi BRI juga terus membangun kapabilitas *platform* TI, tata kelola yang *agile*, dan talenta *digital* untuk menjadi organisasi yang inovatif dan berbasis data untuk mencapai strategi Perseroan.

Pada tahun 2023, BRI meraih sejumlah prestasi yang membanggakan dalam implementasi rencana strategis Teknologi Informasi (TI) 2021-2025 dengan menggunakan kerangka kerja "GREAT" (*Grooming breakthrough innovation, Resilient* IT *platform, Excellent data-driven organization, Agile 10x governance*, dan *Transformation of digital talent*). BRI berhasil mencatat pertumbuhan transaksi *digital* yang luar biasa, mencapai 98,95% dari total transaksi melalui platform digital. Aplikasi BRImo menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna baru, total transaksi, dan volume transaksi. Selain itu, pemanfaatan BRIAPI meningkat secara substansial, melayani lebih dari 23 ekosistem digital dengan lebih dari 1.000 mitra. Implementasi kecerdasan buatan (AI), terutama melalui Sabrina, telah membuktikan dirinya sebagai penangan pelanggan yang efektif dengan meningkatnya jumlah pesan yang dilayani dan tingkat kepuasan yang meningkat.

Di bidang infrastruktur, ketiga pusat data BRI telah memperoleh sertifikasi Tier III dari Uptime Institute, menegaskan keandalan pondasi teknologi mereka. BRI juga memperlihatkan komitmen terhadap keamanan informasi dengan kebijakan *cyber security* yang komprehensif, pemantauan ancaman *cyber* secara terus-menerus, dan penilaian kematangan TI yang tinggi sesuai dengan standar COBIT 2019. Ini menegaskan komitmen BRI untuk terus mendukung pertumbuhan bisnis melalui *platform digital* yang andal dan aman.

Selain itu, di tahun 2023 BRI telah melakukan *IT Maturity Assessment* sesuai amanat Kementerian BUMN dengan score 4,66 dari 5,00 poin berdasarkan *best practice* COBIT 2019. BRI juga membuktikan kemampuan maturitas digital dengan capaian Tingkat 2 (skor 80,50 dari total 100), sesuai pedoman asesmen Otoritas Jasa Keuangan.

Kinerja Keberlanjutan

Sebagai salah satu bentuk dukungan BRI terhadap Keuangan Berkelanjutan, BRI telah memiliki strategi inisiatif di bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) baik pada kegiatan operasional maupun bisnis Perseroan. BRI secara konsisten mempertahankan kinerja Perseroan dengan baik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya percepatan pencapaian hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan strategi korporat, pemenuhan harapan *stakeholder* dan inisiasi LST yang mengacu pada standar nasional, regional, maupun global. Di tahun 2023, BRI memperkuat komitmennya dengan bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC), menentukan *baseline year* dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca perusahaan, serta menentukan Net Zero Emission Targets di tahun 2050. Sebagai hasilnya, BRI mempertahankan kinerja ini yang tercermin dalam skor *rating* ESG dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global, MSCI, dan Sustainalytics.

Corporate Social Responsibility

Melalui unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, BRI berkomitmen dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan dengan brand BRI Peduli. Penerapan BRI Peduli TJSL berpedoman pada konsep *Triple Bottom Line*, yaitu *Pro People, Pro Planet*, dan *Pro Profit* yang selaras dengan *social value* dan *business value* perusahaan serta sejalan dengan strategi *Environmental, Social & Governance* (ESG) BRI.

BRI Peduli mengutamakan fokus pada bidang Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dengan kegiatan yang dilakukan yaitu, pembangunan sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, beasiswa kepada putra putri pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Desa BRILiaN, *urban farming* di wilayah padat penduduk (BRInita), pengelolaan sampah di pasar-pasar unggulan dan bank sampah masyarakat (Yok Kita GAS- Gerakan Anti Sampah), penanaman mangrove, pohon produktif dan terumbu karang (BRI Menanam) serta peningkatan kapasitas kelompok usaha perempuan (Women Empowerment). Melalui BRI Peduli kami selalu berupaya untuk melaksanakan program yang terintegrasi, terarah serta terukur dampaknya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Kendala yang Dihadapi Perseroan

Kinerja solid tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kondisi geopolitik yang tak kunjung kondusif, serta suku bunga acuan di sebagian besar bank sentral yang masih tertahan di level tinggi juga mempengaruhi pasar pembiayaan yang pada akhirnya turut menekan laju pertumbuhan ekonomi global. Selain itu peta persaingan yang berubah seiring masifnya perkembangan teknologi finansial serta inovasi kompetitor.

Secara internal, BRI masih menghadapi tantangan optimalisasi kinerja yang terkait dengan kapabilitas perseroan dalam mengakselerasi bisnis ritel dan konsumer, bisnis Perusahaan Anak, serta pengendalian biaya. Kinerja BRI secara umum pun masih ditopang aktivitas kredit, sehingga kemampuan menghasilkan pendapatan non bunga masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selama tahun 2023 BRI melalukan beberapa langkah strategis yaitu sebagai berikut:

1. *CASA Sustainability*
   Meningkatkan pangsa pasar CASA, dengan pengembangan ekosistem melalui penguasaan teritorial & *referral* mengandalkan *transaction tools* & *cash in/cashout capability*;
2. *Focus on Quality of Growth*
   Aset produktif tumbuh dengan kualitas terjaga yang berfokus pada aset dengan imbal hasil tinggi serta akselerasi sumber pertumbuhan baru;
3. Optimalisasi Sinergi Perusahaan Anak
   Akselerasi peningkatan skala bisnis Perusahaan Anak baik melalui sinergi atau secara *independent* dan perluasan cakupan bisnis Entitas Induk, menyelesaikan *Post Implementation Plan* UMI sebagai *source of new growth* seiring dengan implementasi BRI *one culture*;
4. *ESG Principle Implementation*
   Berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan bisnis yang mengikuti nilai-nilai tata kelola usaha yang baik agar berdampak positif bagi lingkungan (*deliver value beyond profit*);
5. *Excellence Enablers*
   Melanjutkan penguatan kapabilitas pekerja, reliabilitas sistem, layanan dan jaringan, serta data analitik untuk memberikan layanan perbankan berkualitas unggul.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Perkembangan ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dan cenderung mengalami tekanan. Proyeksi *International Monetary Fund*/IMF (Oktober 2023) dan *Organization for Economic Cooperation and Development*/OECD (September 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 juga diperkirakan semakin melambat. Perkiraan laju perekonomian yang melambat sebetulnya mulai tercermin dari beberapa indikator makroekonomi global yang mengalami penurunan.

Hingga September 2023, paling tidak terdapat empat indikator yang mencerminkan laju perlambatan ekonomi global, yaitu: (1) Pergerakan *Purchasing Manager Index* (PMI) yang melambat sejak Mei 2023, khususnya PMI manufaktur yang berada dalam zona kontraktif, (2) Penurunan laju ekspor berbagai negara utama seperti China dan AS, yang mengimplikasikan penurunan permintaan dunia, (3) Penurunan lowongan kerja aktif pada berbagai negara, yang mengimplikasikan penurunan aktivitas produksi, dan (4) Laju penurunan *Leading Economic Indicator* (LEI) pada berbagai negara utama di dunia. Dari keempat faktor tersebut, penurunan LEI menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa laju perekonomian global ke depan akan semakin melambat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan masih kuat, namun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut ditunjukkan oleh pergerakan LEI Indonesia yang menurun dan tumbuh kontraktif. Beberapa

tantangan yang akan dihadapi selama tahun 2024 antara lain pertumbuhan perekonomian global yang diperkirakan masih akan melambat, potensi peningkatan inflasi dari disrupsi rantai pasok atas ketidakpastian perekonomian global serta fenomena el-nino yang diperkirakan masih akan hadir hingga pertengahan tahun 2024, serta kebijakan moneter yang diperkirakan masih ketat seiring dengan masih tingginya suku bunga bank sentral di negara-negara maju.

Di lain sisi, dalam jangka pendek terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya potensi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk menopang perlambatan konsumsi masyarakat, berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur yang sempat tertunda akibat pandemi, potensi investasi domestik dan asing di sektor energi dan komoditas, serta pesta pemilihan umum tahun 2024. Dengan berbagai kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,89-5,18% di tahun 2023 dan 4,81-5,10% di tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi perekonomian tersebut, BRI terus berupaya untuk merespons dengan berbagai kebijakan yang akan diterapkan perusahaan guna mendukung pencapaian bisnis yang *sustain*. Penguatan kapabilitas internal BRI *Group* terus dilakukan dengan melakukan transformasi yang berkesinambungan di pilar-pilar strategi pertumbuhan bisnis khususnya segmen Mikro, SME, Konsumer, dan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan *Good Corporate Governance* dan pengendalian risiko.

Kinerja bisnis BRI ke depan masih akan ditopang dari aktivitas kredit sehingga kemampuan menghasilkan pendapatan non bunga masih perlu ditingkatkan. Inovasi dan eksplorasi sumber pertumbuhan baru yang dilakukan BRI berimplikasi pada bisnis perseroan yang kian kompleks. Dinamika internal dan lingkungan usaha menuntut BRI untuk *agile* dalam merespons tantangan agar cermat dalam mengoptimalkan peluang bisnis baik kini maupun di masa-masa mendatang. Maka dengan berorientasi pada aspirasi jangka panjang Perusahaan, BRI akan melanjutkan fokus pada penguatan kapabilitas *retail banking* sebagai prioritas strategi di tahun 2024 dengan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *assets & liabilities* yang lebih produktif
   Meneruskan penghimpunan CASA yang stabil dan berkelanjutan, ekspansi selektif pada aset dengan tingkat imbal hasil tinggi, serta perbaikan kualitas aset di segmen *Micro* dan *Small*.
2. Diversifikasi sumber pertumbuhan
   Mendorong lebih kuat perolehan pendapatan melalui penguatan kapabilitas segmen Ritel (Konsumer, SME), fokus integrasi *holding* UMI, serta penguatan bisnis Entitas Anak sebagai sumber pertumbuhan konsolidasian.
3. Keandalan pendukung operasional
   Fokus kepada penguatan kompetensi *Human Capital* dan kapabilitas digital, peningkatan *customer experience*, pengelolaan risiko dan *data analytics,* serta *operational excellence*.
4. Implementasi prinsip-prinsip ESG
   Berkomitmen dalam pengelolaan bisnis selaras dengan prinsip tata kelola usaha yang baik agar memberi nilai positif bagi lingkungan (*deliver value beyond profit*).

Respon-respon strategis tersebut akan mendorong BRI untuk dapat terus tumbuh berkesinambungan untuk mewujudkan visi BRI sebagai "*Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion*". Hal tersebut menunjukkan prospek usaha yang cerah di masa yang akan datang.

Tata Kelola Perusahaan

Pencapaian kinerja Perseroan merupakan hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien. BRI senantiasa menjaga agar keempat pilar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan *ethical behavior* telah menjadi landasan pelaksanaan usaha Perseroan. Keempat pilar tersebut diimplementasikan melalui pemenuhan kepentingan dan perlakuan yang adil kepada *stakeholders* Perseroan; pengungkapan dan transparansi informasi Perseroan; serta fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

BRI terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dari *Top Management* perusahaan dan seluruh Insan BRILian merupakan *driver* dalam mewujudkan *good corporate governance* di Perseroan. Komitmen BRI terhadap tata kelola dibuktikan melalui evaluasi yang dilakukan secara internal atau pengakuan dari pihak ketiga yang independen. Hasil evaluasi tersebut, merupakan masukan positif bagi perusahaan dalam meningkatkan implementasi tata kelola yang berkelanjutan.

Pemenuhan Hak Pemegang Saham

Perseroan senantiasa berdedikasi untuk memberikan perlindungan, transparansi, dan nilai tambah kepada pemegang saham, sebagai pemilik Perseroan. Untuk itu, Perseroan terus berkomitmen untuk memberikan akses yang adil dan setara terhadap informasi kepada seluruh pemegang saham, menyusun kebijakan dividen yang adil dan konsisten, memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak pemegang saham minoritas, patuh terhadap peraturan dan kewajiban yang berlaku, dan terus berupaya untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan implementasi strategi pertumbuhan berkelanjutan, inovasi produk dan layanan, serta efisiensi operasional untuk mencapai hasil finansial yang optimal.

Perlakuan yang Sama Bagi Seluruh Pemegang Saham

Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan mendukung dan memastikan perlakuan yang adil dan setara guna melindungi hak-hak dasar dari seluruh pemegang saham. Beberapa aspek kebijakan tersebut mencakup pemberian 1 (satu) hak suara untuk setiap kepemilikan saham (*one share one vote*), menyediakan akses yang sama terhadap informasi melalui berbagai saluran, termasuk *Investor Relations*, situs web perusahaan, dan publikasi lainnya, serta kebijakan terkait *insider trading* dan transaksi yang melibatkan pihak terkait.

Tata Kelola Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan paradigma tercapainya kinerja keuangan dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola) yang baik untuk menghasilkan nilai tambah, peningkatan daya saing, dan daya tahan BRI serta berkontribusi pada kemajuan bangsa dan kelestarian lingkungan jangka panjang. BRI menyatakan komitmen terhadap keberlanjutan yang tercermin pada misi BRI yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pemangku kepentingan dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak tahun 2021, BRI telah membentuk struktur dan tata kelola ESG dengan tujuan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kinerja dan pengungkapan ESG perusahaan melalui pembentukan Komite Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG).

Selain itu, guna memperkuat tata kelola ESG, BRI telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.52-DIR/ESG/10/2022 Tanggal 5 Oktober 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Keberlanjutan (Sustainability Policy & Strategy) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penguatan tata kelola ESG BRI didukung dengan adanya struktur organisasi baru yang secara khusus menangani pengelolaan ESG sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP: 575-DIR/PPM/04/2022 tanggal 12 April 2022 dan telah diperbaharui dengan SK Direksi BRI Nokep: 102-DIR/PPM/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Environmental, Social & Governance (ESG) Committee PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pengungkapan dan Transparansi

Untuk memastikan pemberian akses yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan, BRI secara transparan menyampaikan kondisi keuangan dan aspek non-keuangan perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk *Annual Report, Sustainability Report, Corporate Website*, dan *Public Disclosure* lainnya.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris BRI bertindak atas nama seluruh pemegang saham dalam merumuskan kebijakan secara keseluruhan dan melakukan pengawasan untuk memastikan operasional Perseroan berjalan dengan efisien serta tumbuh secara berkelanjutan. Seluruh tanggung jawab Direksi diukur melalui Key Performance Indicators (KPI) yang telah disetujui oleh pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Di sisi lain, fungsi pengawasan yang diemban oleh Dewan Komisaris diuraikan dalam program kerja Dewan Komisaris yang secara reguler dilaporkan dalam pelaksanaan RUPS.

Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko di Konglomerasi Keuangan BRI, dan dengan tujuan meningkatkan mutu penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta menjamin keberlanjutan bisnis entitas keuangan di dalam konglomerasi, BRI menerapkan Tata Kelola yang terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Governance (*Transparency*, *Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*).

Selama tahun 2023, BRI telah melakukan penyempurnaan pada kerangka Tata Kelola Terintegrasi, menetapkan *parenting style* untuk mengelola Perusahaan Anak, dan melakukan evaluasi terhadap tingkat kematangan penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaan tugas di setiap unit kerja yang terintegrasi di dalam Konglomerasi Keuangan BRI.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2023

BRI menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggungjawab, Independensi dan Kewajaran, yang dijalankan dengan berfokus pada aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*. Kebijakan dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BRI mengacu pada regulasi yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara maupun ketentuan perundangan lainnya. BRI selalu memastikan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BRI sesuai dengan standar yang berlaku di industri baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tingkat kematangan tata kelola BRI ditunjukkan melalui pengukuran secara internal dengan metode penilaian maturitas Tata Kelola dan juga penilaian dari pihak independen. Pada Tahun 2023, BRI mendapatkan sejumlah pengakuan terkait penerapan tata kelola dari berbagai lembaga pemeringkat, antara lain di tingkat ASEAN, BRI dinobatkan sebagai Top 3 PLC (Public Listed Company) di Indonesia dan ASEAN Asset Class oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Sementara itu, ditingkat nasional, BRI di antaranya mendapatkan penghargaan sebagai “Most Trusted Company” dalam ajang pemeringkatan Corporate Governance

Perception Index (CGPI). BRI meyakini bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan landasan utama bagi perusahaan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik, meningkatkan *value* BRI, menjamin terpenuhinya hak-hak para *stakeholder* dan juga meningkatkan kepercayaan investor yang pada akhirnya akan menciptakan bisnis BRI yang berkesinambungan.

BRI juga menerapkan *framework* Tata Kelola Terintegrasi yang diimplementasikan di induk dan di perusahaan anak BRI, sebagai upaya untuk membangun pondasi yang kokoh dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BRI Group.

Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha Bank

Manajemen Perseroan selalu menjaga independensi dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepemilikan saham BBRI oleh Direksi dan Dewan Komisaris (Non-Independen) merupakan bagian dari komponen remunerasi, sejalan dengan peraturan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai kinerja yang berkelanjutan. Hingga tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat kepemilikan saham yang bersifat signifikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham di dalam Kelompok Usaha Bank BRI, data tersebut sebagaimana telah disampaikan pada bagian Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris.

Perubahan Penting yang Terjadi pada Bank dan Kelompok Usaha Bank di Tahun 2023

Seiring dengan visi BRI untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*, BRI mempertahankan komitmen untuk melakukan penguatan strategi dan sinergi BRI Grup, guna menciptakan peningkatan nilai bagi para *stakeholder*. Sesuai dengan kesepakatan Pemegang Saham, pada tahun 2023 FWD sebagai *strategic partner* BRI pada BRI Life melakukan tambahan penyertaan pada BRI Life. Porsi kepemilikan BRI berubah dari 59,02% menjadi 54,77%. Selanjutnya BRI juga melakukan penambahan modal kepada PT BRI Ventura Investama (BVI) untuk memperkuat permodalan BVI yang secara porsi kepemilikan BRI di BVI tidak terdapat perubahan kepemilikan yang signifikan. Ke depan, BRI berkomitmen penuh untuk mendorong kinerja dan kontribusi Perusahaan Anak BRI, melalui peningkatan laba bersih dan *fee based income* Perusahaan Anak BRI, sehingga Perusahaan Anak BRI dapat menjadi pendorong pertumbuhan BRI di masa depan secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Perseroan telah membentuk serta menetapkan struktur dan anggota Komite di bawah Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Fungsi Komite-Komite tersebut adalah untuk mempermudah pemantauan dan meningkatkan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dianggap strategis oleh Perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut mencakup:

1. Capital & Investment Committee
2. Human Capital Committee
3. Information Technology Steering Committee
4. Procurement Committee
5. Credit Policy Committee
6. Product Committee
7. Project Management Office Steering Committee
8. Risk Management Committee
9. Environmental, Social & Governance Committee

Untuk mengevaluasi kinerja komite di bawah Direksi dalam mendukung pengelolaan perusahaan, dilakukan penilaian secara berkala oleh Direksi. Pada tahun 2023, Direksi menilai pelaksanaan tugas Komite Direksi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dengan kualitas yang baik. Evaluasi ini mencakup frekuensi pertemuan, materi pembahasan dalam agenda komite, dan tindak lanjut perbaikan atas hasil diskusi komite.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan dalam komposisi Anggota Direksi. Namun, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Maret 2023 telah memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Sunarso sebagai Direktur Utama
   2) Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro
   3) Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   1) Sunarso sebagai Direktur Utama
   2) Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro
   3) Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan

Sehingga komposisi Direksi per 31 Desember 2023 berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur sebagai berikut:

Sunarso	:	Direktur Utama
Catur Budi Harto	:	Wakil Direktur Utama
Viviana Dyah Ayu R.K.	:	Direktur Keuangan
Agus Noorsanto	:	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Supari	:	Direktur Bisnis Mikro
Arga Mahanana Nugraha	:	Direktur Digital & Teknologi Informasi
Amam Sukriyanto	:	Direktur Bisnis Kecil & Menengah
Andrijanto	:	Direktur Jaringan & Layanan
Ahmad Solichin Lutfiyanto	:	Direktur Kepatuhan
Agus Sudiarto	:	Direktur Manajemen Risiko
Handayani	:	Direktur Bisnis Konsumer
Agus Winardono	:	Direktur Human Capital

Penutup

Pada kesempatan ini, jajaran Direksi ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah serta *stakeholder* atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada BRI yang mendukung pencapaian cemerlang BRI selama tahun 2023.

Terima kasih kepada seluruh Insan BRILian yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa. Semangat kerja keras dan profesionalisme adalah kekuatan yang mendorong kesuksesan BRI. Kami sangat menghargai upaya kolektif Insan BRILian dalam mencapai hasil positif dan menjaga reputasi BRI sebagai lembaga keuangan terkemuka.

Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas peran penting dan kerjasamanya dalam memberikan arahan dan pengawasan yang mendukung kesuksesan strategis BRI. Kepemimpinan dan pandangan Dewan Komisaris memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Akhir kata, dengan kolaborasi yang kuat antara Direksi, Dewan Komisaris, Insan BRILian, dan seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan yang terbaik, serta perbaikan secara berkelanjutan demi mewujudkan masa depan yang lebih gemilang bagi Bank Rakyat Indonesia.

Jakarta, Februari 2024
Atas Nama Direksi



Sunarso
Direktur Utama

Direksi

1. Andrijanto (Direktur Jaringan & Layanan)
2. Agus Winardono (Direktur Human Capital)
3. Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Kepatuhan)
4. Handayani (Direktur Bisnis Konsumer)
5. Supari (Direktur Bisnis Mikro)
6. Sunarso (Direktur Utama)



1 2 3 4 5 6

7. Catur Budi Harto (Wakil Direktur Utama)
8. Viviana Dyah Ayu R.K. (Direktur Keuangan)
9. Agus Sudiarto (Direktur Manajemen Risiko)
10. Amam Sukriyanto (Direktur Bisnis Kecil & Menengah)
11. Arga Mahanana Nugraha (Direktur Digital & Teknologi Informasi)
12. Agus Noorsanto (Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan)



7 8 9 10 11 12



Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua mampu menghadapi berbagai macam tantangan di tengah volatilitas makro ekonomi, tensi geopolitik, serta tren suku bunga yang tinggi.

Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk--untuk selanjutnya disebut "Perseroan atau BRI"— mampu membuktikan kemampuan navigasi risiko holistik yang baik terhadap tantangan global, industri serta internal BRI sehingga mampu mencatatkan pencapaian kinerja positif yang berkelanjutan dengan perolehan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh sebesar 17,5%YoY dengan posisi permodalan yang kuat serta kondisi likuiditas dan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian BRI tersebut tidak terlepas dari keberhasilan BRI dalam membangun *value protection* sekaligus *value creation*. Sampai dengan saat ini, BRI telah menjalankan perannya selama 128 tahun sebagai *agent of development* yang turut serta menciptakan nilai sosial dan ekonomi bagi Indonesia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kemampuan BRI menjaga kepercayaan nasabah melalui berbagai upaya penguatan layanan dan produk sehingga dapat terus menjawab kebutuhan pasar dan perkembangan era digital di antaranya melalui transformasi digital maupun budaya BRI yang tertuang dalam *roadmap* BRIVolution.

Secara berkala Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Direksi di sepanjang tahun 2023. Adapun pengawasan dan pemberian nasihat tersebut disampaikan melalui Laporan Dewan Komisaris yang di antaranya mencakup penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan, serta susunan dan perubahan komposisi Dewan Komisaris

Tinjauan Ekonomi dan Perbankan

Gejolak, disrupsi dan dinamika global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi tantangan berat hampir di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis multidimensi yang saat ini telah mereda, namun masih meninggalkan *scarring effect* yang juga diperparah oleh ketegangan geopolitik. Secara keseluruhan, aktivitas perekonomian dunia masih cenderung menunjukkan perlambatan dengan ketidakpastian yang tinggi sebagaimana pertumbuhan ekonomi global di Tahun 2022 tumbuh sebesar 3,5% dan diperkirakan masih akan melambat di Tahun 2023.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat yang masih dapat tumbuh kuat, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan jasa domestik. Di sisi lain, kondisi perekonomian Tiongkok masih mengalami tantangan untuk dapat kembali ke masa pra pandemi.

Tingkat inflasi negara maju masih mengalami tren kenaikan selama 2023 sehingga berpotensi mengalami stagflasi, namun dengan tekanan yang mulai mereda. Merespons hal tersebut, suku bunga kebijakan moneter termasuk The Fed dan Bank Sentral negara maju lainnya masih mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Hal tersebut juga seiring dengan peningkatan *yield* obligasi Pemerintah yang naik cukup tinggi khususnya US *Treasury*, sebagai dampak peningkatan premi risiko jangka panjang guna memenuhi kebutuhan pembiayaan fiskal. Ketidakpastian pasar keuangan tersebut ditranslasi dalam pengetatan pembiayaan eksternal yang terlihat dari masih terus berlanjutnya aksi *capital outflow* pada *emerging market*. Hal tersebut kemudian menyebabkan tekanan keuangan dan ekonomi pada *emerging market*.

Meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,05% YoY, menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan tersebut didukung oleh permintaan domestik yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi di tengah penurunan konsumsi Pemerintah dan kinerja ekspor. Secara sektoral, sektor Keuangan, Konstruksi, dan Pertambangan mencatatkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2023. Namun beberapa sektor masih mengalami perlambatan pertumbuhan seperti Pertanian dan Perikanan, Perdagangan dan Reparasi, dan Transportasi dan Gudang. Sedangkan secara spasial yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah wilayah Sulawesi-Maluku-Papua. Pada tahun 2024, dengan adanya stimulus fiskal

Laporan Dewan Komisaris

Selama tahun buku 2023, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.266 triliun, tumbuh 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.139 triliun.

berupa bantuan sosial, keberlanjutan proyek infrastruktur dan penyelenggaraan pesta demokrasi, diharapkan dapat menjadi sentimen positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengetatan kebijakan moneter dengan tren kenaikan suku bunga The Fed membuat Bank Indonesia (BI) terus menaikkan suku bunga BI 7-*Days Reverse Repo Rate* (BI7DRR) hingga pada level 6% pada akhir tahun 2023. Hal ini memicu pengetatan likuiditas yang ditandai pula dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang lebih tinggi. Pada November 2023, industri perbankan mencatatkan pertumbuhan Kredit sebesar 9,7% YoY, sedikit melambat dari November 2022 yang tercatat sebesar 11,3% YoY. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 3,0% YoY, juga melambat dari November 2022 yang tumbuh sebesar 8,9% YoY. Kualitas kredit mengalami perbaikan, terlihat dari *gross non performing loan* (NPL) yang tercatat di level 2,36% di November 2023, dari sebelumnya sebesar 2,65% pada November 2022.

Dewan Komisaris melihat bahwa kondisi ekonomi global di tahun 2024 masih akan penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan. *Volume* perdagangan internasional diperkirakan akan tumbuh dan *rebound* dengan motor pertumbuhan berasal dari kelompok negara berkembang di wilayah Asia. Sedangkan di negara maju, tekanan inflasi diperkirakan terus mereda setelah melewati puncaknya di tahun 2023 meskipun tingkat inflasi masih tergolong cukup tinggi. Adapun hal tersebut diharapkan terjadi dengan adanya normalisasi harga komoditas yang merupakan dampak pemulihan disrupsi suplai pasca pandemi dan krisis geopolitik. Namun, perekonomian AS diproyeksikan masih dalam tren perlambatan yang terdampak dari kebijakan pengetatan moneter dan inflasi. Sedangkan ekonomi Eropa cukup membaik meskipun masih dalam laju pertumbuhan yang lambat. Di sisi lain, *reopening policy* Tiongkok masih berpotensi mengakibatkan tekanan inflasi global. Untuk itu, kebijakan moneter secara global diperkirakan masih ketat dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.

Berbeda dengan pandangan terhadap kondisi ekonomi dunia, Dewan Komisaris menilai bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2023 relatif terjaga. Mengingat kontribusi komponen rumah tangga yang masih cukup besar terhadap PDB sehingga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tren pelemahan global. Selain itu, pesta demokrasi atau Pemilu tahun 2024 diperkirakan dapat mendorong percepatan pemulihan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui fundamental ekonomi nasional yang baik dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat yang efektif, Dewan Komisaris optimis bahwa perekonomian nasional, industri perbankan, termasuk BRI akan mampu terus menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan kuat.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan bahwa tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat, salah satu metode yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain dengan menyelenggarakan rapat bersama dengan Direksi (Radirkom) sesuai dengan fokus pengawasan Dewan Komisaris maupun Rapat Internal Dewan Komisaris (Rakom) baik secara reguler maupun insidental. Selanjutnya, atas nasehat yang telah disampaikan pada rapat tersebut dituangkan dalam surat Dewan Komisaris kepada Direksi sesuai dengan topik terkait. Pemberian nasehat kepada Direksi Perseroan dapat pula melalui rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris, melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperoleh informasi di lapangan untuk pengawasan implementasi strategi Perseroan di lapangan. Dewan Komisaris juga menyampaikan pendapat, nasehat dan tanggapan atas usulan Direksi yang dituangkan dalam surat kepada Direksi, surat persetujuan maupun surat keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan Radirkom sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan Rakom sebanyak 7 (tujuh) kali, antara lain membahas beberapa isu kritikal Perseroan, pengajuan persetujuan serta mengukuhkan beberapa keputusan dalam surat keputusan Dewan Komisaris. Persetujuan yang dilakukan antara lain terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan serta rencana-rencana strategis lainnya yang tertuang pada Rencana Bisnis Bank Perseroan, persetujuan atas aksi korporasi yang dilakukan Perseroan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris, persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, persetujuan atas penelaahan *Risk Appetite Statement, Recovery Plan*, *Resolution Plan* serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Pandangan Atas Kinerja Direksi

BRI berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif dan cemerlang sepanjang tahun 2023, di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada November 2023, pertumbuhan pinjaman bank umum tumbuh 9,7% YoY. Hal ini menunjukkan permintaan pasar yang masih kuat seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Sejalan dengan kondisi tersebut, peningkatan optimisme UMKM juga tercermin pada BRI MSME *Index* Desember 2023 yang juga meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dewan Komisaris menilai bahwa BRI berhasil mencapai kinerja solid yang membanggakan yang terlihat dari pencapaian realisasi target kinerja.

Selama tahun buku 2023, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.266,4 triliun, tumbuh 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.139,1 triliun. Pertumbuhan kredit ini didominasi oleh segmen mikro, yang mencapai Rp611,2 triliun, tumbuh 10,9%. Kredit mikro BRI memiliki porsi sebesar 48,3% dari total kredit BRI, yang merupakan tertinggi di industri perbankan nasional. Hal ini semakin mengukuhkan komitmen BRI untuk menjadi *agent of development* dan senantiasa memperkuat segmen UMKM sebagai piramida bisnis terbawah untuk menjadi *backbone* perekonomian Indonesia. Selanjutnya, BRI akan terus mengembangkan potensi *new source of growth* baik melalui *retail banking*, segmen Ultra Mikro maupun diversifikasi pertumbuhan segmen lainnya.

Dilihat dari kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) *gross* sebesar 2,95% mengalami peningkatan dari 2,67% pada tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas aset tersebut disebabkan oleh upaya menekan tingkat penurunan restrukturisasi, utamanya yang berasal dari segmen mikro dan kecil. Pencadangan NPL masih cukup memadai dengan rasio NPL *coverage* sebesar 229,09%, dengan *cost of credit* (CoC) yang cenderung membaik menjadi 2,38% di tahun 2023 dari 2,55% di tahun 2022.

Di sisi pengelolaan risiko kredit, BRI masih menjalankan *soft landing strategy* di mana telah dilakukan *downgrade* terhadap kredit yang tidak dapat dilakukan restrukturisasi setelah dilakukan survei/asesmen kembali berdasarkan kondisi bisnis sesungguhnya. Pada tahun 2023, total pinjaman akibat Covid 19 yang direstrukturisasi turun menjadi 4,8% dari total kredit, dari sebelumnya sebesar 10,4% di tahun 2022. Penurunan ini mayoritas berasal dari pembayaran debitur dari segmen kecil dan korporasi. Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi agar dalam upaya pencapaian pertumbuhan kredit, harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang baik.

Sedangkan di sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.358 triliun, atau tumbuh 3,9% YoY, dimana komposisi CASA tercatat sebesar 64,3% di tahun 2023. Meskipun sedikit mengalami penurunan, namun rasio CASA masih cukup terjaga diatas level historis yang secara rata-rata berada di bawah 60%. Hal ini menjadi sentimen yang mengakibatkan peningkatan *Cost of Fund* (CoF) menjadi 3,00% di tahun 2023, dari sebelumnya sebesar 2,06% di tahun 2022. Dewan Komisaris senantiasa menghimbau Direksi agar dapat fokus dalam melakukan transformasi liabilitas BRI antara lain melalui penguatan bisnis berbasis ekosistem, penetrasi *mobile banking* sebagai *digital financial solution* serta mengoptimalkan penetrasi *cash management service* bagi nasabah, sehingga dapat unggul dalam persaingan *transaction banking services.*

Dilihat dari tingkat efisiensi, BRI berhasil menjaga rasio *Cost to Income* Ratio (CIR) sebesar 41,89%, turun dari sebelumnya sebesar 44,87% di Tahun 2022. Penurunan tersebut dikontribusi oleh berbagai upaya efisiensi salah satunya melalui pemanfaatan digitalisasi dalam menjalankan proses bisnis BRI dan utilisasi peran *banking agent*.

Dari sisi pendapatan operasional lainnya, BRI berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp45,6 triliun atau tumbuh 16,6% YoY. Hal ini utamanya didukung oleh *Fee Income* yang tercatat sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 10,3% YoY dan pendapatan *recovery* yang tercatat sebesar Rp16,8 triliun atau tumbuh 35,0% YoY. Dewan Komisaris berpendapat bahwa kontribusi pendapatan *Fee Based* dan Operasional Lainnya BRI Group dapat semakin dioptimalkan melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi antara Perusahaan Anak dan BRI sebagai induk.

Dari sisi profitabilitas, rasio profitabilitas BRI terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari rasio *Return on Asset* (ROA) yang tercatat sebesar 3,24% dari sebelumnya 3,01% di tahun 2022. Peningkatan juga terlihat pada rasio *Return on Equity* (ROE) yang mencapai 19,95% atau tumbuh 232bps dari 17,63% di tahun 2022. Tidak hanya itu, BRI juga mampu meningkatkan rasio *leverage* mencapai 6,2 kali dari 6,1 kali di tahun lalu. Dengan pencapaian yang baik ini, Dewan Komisaris melihat bahwa BRI masih memiliki peluang yang besar untuk mengoptimalkan kondisi permodalan yang besar seiring dengan pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan selama tahun buku 2023, BRI mencatatkan laba bersih sebesar Rp60,4 triliun, tumbuh 17,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp51,4 triliun. Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh pencapaian laba BRI saja sebesar Rp53,1 triliun atau tumbuh 11,1% dibanding tahun 2022 sebesar Rp47,8 triliun. Kontribusi laba Perusahaan Anak juga mengalami peningkatan dari 10,2%, menjadi 12,1% di tahun 2023.

Dewan Komisaris menyadari bahwa kinerja finansial yang positif di tahun 2023 tersebut dapat tercapai tentu tidak terlepas dari perbaikan dan konsistensi dalam menjalankan *transformers*. Di sisi *human capital*, BRI melakukan berbagai upaya dengan fokus utama pada peningkatan kapabilitas, produktivitas, sinergi BRI Group serta *environmental, social, and governance* (ESG) dan *people analytics*. Dukungan teknologi juga tercermin dalam pencapaian di bidang pengembangan digital yang dibuktikan dengan 98,9% dari total transaksi dilakukan melalui *digital channel*. Fokus pengembangan teknologi yang dilakukan terbagi menjadi 3 (tiga) fokus area, yaitu *Composable Resiliency*, *Composable Open Banking, Composable AI/ML,* dan *Excellence Enablers*. Dewan Komisaris senantiasa menghimbau Direksi agar pengembangan talenta tidak hanya dilakukan dalam lingkup BRI saja namun hingga ke Perusahaan Anak. Selanjutnya agar dilakukan pula *alignment* dan integrasi teknologi di dalam BRI Group.

Keberhasilan tersebut juga terwujud melalui dukungan infrastruktur jaringan yang tersebar luas dan berkualitas. Selama tahun 2023, BRI secara *bank only* telah memiliki 7.755 jaringan kantor, 686.128 jaringan elektronik, serta 740.818 Agen BRILink. Melalui infrastruktur tersebut BRI mengembangkan model bisnis *hybrid bank* yang berhasil memadukan pengembangan digitalisasi di perbankan dengan tetap menyediakan layanan konvensional untuk mendekatkan layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Model bisnis ini semakin diperkuat dengan *holding* ultra mikro BRI yang membantu mengoptimalkan peningkatan inklusivitas.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi atas pencapaian yang telah diraih selama tahun 2023. Selanjutnya, Dewan Komisaris berpesan agar Direksi dapat senantiasa menjaga komunikasi yang efektif serta kolaborasi di seluruh level organisasi sehingga dapat menjaga kualitas pertumbuhan yang berkesinambungan sekaligus menciptakan budaya perusahaan yang sehat.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Dewan Komisaris senantiasa melakukan fungsi pengawasan aktif terhadap strategi Perusahaan yang berbasis risiko (*risk-based oversight*) sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris memberikan nasihat, arahan dan rekomendasi secara memadai kepada Manajemen atas dasar hasil pengawasan dimaksud, termasuk terhadap penerapan strategi, implementasi kebijakan Perusahaan dan serta memberikan persetujuan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya. Adapun nasihat, arahan dan rekomendasi yang diberikan antara lain meliputi:

1. Aspek strategis antara lain pengawasan terhadap strategi setiap segmen bisnis di Perseroan, transformasi teknologi informasi dan jaringan kerja, implementasi penguatan fungsi *secondline* dan *thirdline*, riset potensi ekonomi wilayah, sinergi ekosistem ultra mikro, program penguatan *human capital*, tata kelola *product management*, serta *progress* implementasi *Environmental, Social and Governance* (ESG).
2. Aspek perkreditan, antara lain tindak lanjut pengelolaan *Loan at Risk* (LaR), penelaahan atas kondisi debitur-debitur *high risk* dari setiap segmen dan produk, pengawasan terhadap portofolio debitur restrukturisasi, penelaahan kualitas dan portofolio aktiva produktif.
3. Aspek pendanaan antara lain pengawasan terhadap kondisi dan strategi BRI dalam menghadapi posisi likuiditas dan posisi surat berharga, pengawasan atas kondisi dan strategi dalam penghimpunan dana dan *fee-based income* (FBI) .
4. Aspek kebijakan antara lain pengawasan terhadap Kebijakan Umum Perkreditan dan inisiasi peninjauan Kebijakan *Human Capital*, Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Kelola dan Kepatuhan, penelaahan *Risk Appetite Statement* (RAS), *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.
5. Aspek konglomerasi keuangan antara lain pengawasan terhadap implementasi Holding UMi (Ultra Mikro), transformasi yang dilakukan Perusahaan Anak sejalan dengan arah perseroan untuk melakukan penguatan *framework* tata kelola terintegrasi termasuk aspek manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern terintegrasi, reviu portofolio Perusahaan Anak serta pelaksanaan aksi korporasi akuisisi PT BRI Manajemen Investasi.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK pada tiap semester, sebagai berikut:

1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk Semester II Tahun 2022 Nomor R.20-KOM/02/2023, tanggal 21 Februari 2023.
2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk Semester I Tahun 2023 Nomor R.79-KOM/08/2023, tanggal 30 Agustus 2023.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyampaikan tanggapan atas capaian kinerja triwulan Perseroan kepada Direksi termasuk reviu atas implementasi strategi Perseroan, sebagai berikut:

1. Surat Nomor R.19-KOM/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Tanggapan Atas Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan IV Tahun 2022.
2. Surat Nomor R.45-KOM/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 perihal Tanggapan Atas Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan I Tahun 2023.
3. Surat Nomor R.85-KOM/09/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Tanggapan Atas Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan II Tahun 2023.
4. Surat Nomor R.107-KOM/11/2023 tanggal 07 November 2023 perihal Tanggapan Atas Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan III Tahun 2023.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 diperkirakan masih akan mengalami perlambatan. Berbagai tantangan berupa kenaikan suku bunga, keterbatasan ruang stimulus fiskal, dan terbatasnya produktivitas masih menjadi momok. Namun di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global tersebut, masih terdapat faktor pendorong perekonomian nasional, di antaranya potensi peningkatan pengeluaran pemerintah, berlanjutnya proyek infrastruktur serta pesta pemilihan umum tahun 2024.

Dewan Komisaris melihat bahwa secara garis besar prospek usaha yang disampaikan oleh Direksi dalam Rencana Bisnis Bank 2024-2026 telah cukup relevan. Dalam rangka melakukan penguatan kapabilitas internal BRI Group, prospek usaha tersebut juga telah cukup baik, tepat dan selaras dengan *journey* yang telah disusun Perseroan melalui Brivolution 2.0.

Setelah tahun-tahun sebelumnya berfokus pada upaya-upaya memperkuat bisnis utama, selanjutnya pada tahun 2024 Perseroan berfokus untuk meningkatkan skala dan cakupan bisnis BRI Group dengan memperkuat kapabilitas *retail banking* dan optimalisasi kontribusi Perusahaan Anak. Tahun 2024 dicanangkan sebagai periode amplifikasi penguasaan pasar menuju pencapaian aspirasi jangka panjang BRI tahun 2025 dengan: (1) menyempurnakan fundamental bisnis dan *enablers*; (2) memperluas cakupan (*scope up*) bisnis melalui pengembangan bisnis pendukung (*beyond banking*); (3) meningkatkan skala (*scale up*) bisnis mesin-mesin pertumbuhan baru; serta (4) sinergi kohesif antar entitas intra Group sebagai *enabler* keberlanjutan pertumbuhan yang solid.

Dengan dukungan fundamental yang baik serta komitmen yang kuat untuk dapat menghadirkan layanan keuangan dengan kapabilitas yang unggul sehingga mampu menjadi *one-stop digital platform solution* bagi nasabah, Dewan Komisaris meyakini BRI akan mampu memanfaatkan peluang pada industri perbankan dengan baik. Selaras dengan aspirasi tersebut, Dewan Komisaris senantiasa menghimbau untuk mempertajam fokus transformasi pada area utama yaitu digital dan *human capital*.

Dalam upaya membangun fundamental tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi agar seluruh personel BRI khususnya yang berhadapan langsung dengan nasabah, memperoleh pembekalan dan pelatihan yang memadai sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan BRI. Pada aspek *human capital*, Dewan Komisaris mendorong penguatan kualitas *human capital* hingga kepada Perusahaan Anak agar mampu memiliki daya saing dan menjadi pemain utama dalam masing-masing industri di antaranya melalui optimalisasi *talent mobility* sebagai bentuk *transfer knowledge*.

Kemudian komitmen kuat dalam transformasi digital juga dilakukan melalui adaptasi berbagai inovasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis *big data*, dan layanan perbankan digital. Dewan Komisaris menghimbau agar BRI selalu bersifat *costumer centric*, sehingga seluruh inovasi dan upaya perbaikan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan nasabah.

Terhadap prospek usaha yang telah disusun Direksi tersebut, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024 serta Rencana Bisnis Bank 2024-2026 yang telah disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi global maupun domestik, serta asumsi makro ekonomi yang relevan. Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan arahan dan rekomendasi melalui Surat Dewan Komisaris R.111-KOM/11/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan atas Usulan RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP tahun 2024.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Bank

BRI berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) di seluruh level organisasi yang mengacu pada berbagai regulasi dan *best practice* implementasi tata kelola perusahaan yang relevan di industri keuangan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya berupaya memastikan kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memberikan nasihat yang dibutuhkan atas setiap tindakan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. BRI melakukan penyempurnaan aspek tata kelola melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan proses pengelolaan dan optimalisasi hasil yang berdampak pada peningkatan *value* BRI di mata pemangku kepentingan. Penyempurnaan aspek tersebut dibuktikan dengan berbagai pengakuan dari pihak independen terkait dengan implementasi tata kelola di BRI. Pengawasan terhadap tata kelola tercermin melalui pemberian masukan terhadap kebijakan maupun proses yang mencakup antara lain sistem manajemen anti penyuapan, pengelolaan WBS dan efektivitas budaya kepatuhan. BRI juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi melalui *dashboard* digital dan komunikasi efektif dengan setiap penanggung jawab tindak lanjut dari rekomendasi.

Sebagai langkah dalam melakukan evaluasi dan penilaian GCG secara internal, BRI berpedoman pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, SEOJK Nomor 17 tahun 2017 serta peraturan yang berlaku lainnya. Evaluasi dan penilaian dari pihak internal dilakukan secara *self-assessment* setiap semester. Hasil *self-assessment* menjadi bagian penilaian tingkat kesehatan bank yang disampaikan kepada regulator. Di samping itu, BRI juga memperhatikan evaluasi dan penilaian terhadap tata kelola dari pihak eksternal yang dilakukan secara independen.

Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari empat faktor penilaian yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank BRI pada semester II/2023 berada pada peringkat komposit 2 (Sehat) yang artinya kondisi Bank yang secara umum Sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat Komposit tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan semester I/2023. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semester pada periode Juni dan Desember.

Penerapan tata kelola oleh Perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG. Dalam penerapannya, Perseroan melaksanakan penilaian sendiri *(self-assessment)* secara berkala terhadap 11 (sebelas) faktor GCG sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Regulator. Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG Perseroan sudah baik, tercermin pada hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yakni Peringkat 2 (Baik). Penilaian tersebut dilakukan secara berkala dan tidak hanya terbatas di lingkup induk Perseroan, tetapi juga dilakukan bersama dengan Perusahaan Anak dalam konteks konglomerasi keuangan BRI. Adapun hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG Terintegrasi yakni Peringkat 2 (Baik).

Hal ini mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang secara umum dikategorikan Baik.

Pada tahun 2023, penilaian GCG Perseroan juga dilakukan oleh pihak eksternal dengan hasil sebagai berikut:

1. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
   BRI memperoleh penghargaan berupa *Top 3 Public Limited Company* di Indonesia dan ASEAN *Asset Class* dalam pemeringkatan ACGS tahun 2023 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMS).
2. Corporate Governance Perception Index (CGPI)
   Berdasarkan hasil penilaian CGPI tahun 2023 yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), BRI mendapatkan peringkat "Sangat Terpercaya" (*Most Trusted Company*). Komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi di BRI Group dibuktikan melalui keikutsertaan Perusahaan Anak pada CGPI *Award*, di mana terdapat 1 (satu) Perusahaan Anak mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya" dan 4 (empat) lainnya mendapatkan predikat "Terpercaya".
3. S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)
   BRI mendapatkan hasil penilaian S&P Global CSA dengan skor 63 (enam puluh tiga) pada tahun 2023.

Penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Direksi melalui Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan secara rutin melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam rangka untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI baik secara korporasi maupun operasional, telah sesuai dengan ketentuan regulator dan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris bersama Direksi terus mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan semakin baik di semua jenjang organisasi. Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasehat kepada Direksi dan seluruh Insan Brilian untuk terus-menerus memperkuat *Compliance Culture*, selalu memperhatikan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) dan petunjuk teknis operasional, melaksanakan pemantauan dan pengawasan agar pengenaan sanksi denda oleh Regulator dapat ditekan dan diminimalkan. Dewan Komisaris juga menghimbau agar Direksi dapat mengupayakan penyelesaian komitmen dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pihak eksternal dan regulator pada kesempatan pertama. Dewan Komisaris juga meminta agar Direksi senantiasa memonitor dan mendorong pelaksanaan pengkinian data nasabah dan tetap memperhatikan Kebijakan APU dan PPT dalam memberikan layanan digital.

Profil risiko kepatuhan Perseroan berada pada peringkat komposit 2 (*Low to Moderate*). Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan Fungsi Kepatuhan Perseroan sudah berjalan dengan baik dan harus terus ditingkatkan kesadaran dan budaya kepatuhan di seluruh jajaran, Dewan Komisaris juga berpesan kepada Direksi untuk terus melakukan penyempurnaan pada Tata Kelola Perusahaan (GCG) terutama dengan kepatuhan pelaporan dan pengendalian *fraud*.

Strategi *Anti-Fraud*

BRI telah memiliki kebijakan Strategi Anti-Fraud yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bagi Bank Umum yang kemudian dituangkan dalam kebijakan internal Perseroan. Kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen dari manajemen dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam sistem pengendalian *fraud* dan merupakan wujud perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan tidak memberikan toleransi (*zero tolerant*) pada setiap bentuk *fraud* baik internal maupun eksternal.

Selama tahun 2023, masih terjadi berbagai jenis *fraud* baik yang dilakukan oleh oknum internal maupun eksternal. Dewan Komisaris memperhatikan dengan seksama frekuensi kejadian dan kerugian potensial dan sebagai wujud perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *fraud*. Secara berkelanjutan, Manajemen terus melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi *Anti-Fraud* pada setiap pilarnya.

Pada Pilar 1, Pencegahan, Perseroan telah melakukan beberapa hal antara lain: penandatanganan pakta integritas baik dimulai dari Direksi, Dewan Komisaris hingga kepada seluruh Pekerja BRI, menjalankan berbagai kegiatan *employee awareness* dan *customer awareness* baik melalui edukasi maupun sosialisasi, identifikasi kerawanan melalui analisis kelemahan *control* yang telah dan/atau berpotensi menimbulkan *fraud* dari berbagai informasi, penguatan fungsi *Branch Risk Compliance* (BRC)

dan *Unit Risk Compliance* (URC) dan peningkatan *Know Your Employee* (KYE) yang bertujuan mendeteksi Pekerja dengan potensi risiko tinggi melakukan *fraud* berdasarkan parameter tertentu (contoh: judi *online*).

Pada Pilar 2, Deteksi, Perseroan telah menerima beberapa pengaduan antara lain: WBS atas pelanggaran dan indikasi *fraud* melalui berbagai media seperti SMS, Surat, Telepon, *Email, Website*, dan WhatsApp, serta *Enhancement Dashboard* Pengawasan dengan menambahkan beberapa indikator krusial, *Enhancement Rules Fraud Detection System* (FDS), dan lainnya.

Pada Pilar 3, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, Perseroan telah melakukan antara lain: investigasi pelaporan inventarisasi kejadian *fraud* dan laporan insidental atas *fraud* signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Regulator, memberikan sanksi kepada para pelaku *fraud*.

Pada pilar 4, Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perseroan melakukan kegiatan antara lain: pelaksanaan Forum Manajemen Risiko (FMR) yang membahas penanganan *fraud internal* dan eksternal, program *Recovery Fraud* yang mengupayakan penyelesaian *recovery* dari pelaku dan pihak terlibat *fraud*, berkerja sama dengan penegak hukum dalam melakukan penangkapan pelaku *fraud* internal dan eksternal.

BRI senantiasa berupaya untuk menekan dan menurunkan kejadian *fraud* serta mengoptimalkan *recovery* kerugian akibat *fraud* tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melakukan pengembangan sistem dan tata kelola eksekusi pada *Fraud Detection System* (FDS), Penguatan *Governance Risk Compliance Culture* pada seluruh jajaran pekerja, mengoptimalisasikan *Regional Risk Management* (RRM) *Team* dengan menyempurnakan *framework* RRM Team, melakukan peningkatan *recovery fraud* serta secara berkala melakukan top *level review* dan *functional review* terkait Strategi *Anti-Fraud.*

Dewan Komisaris juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Strategi *Anti-fraud* secara semesteran, laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan dan telah memberikan masukan kepada Direksi dalam penguatan Strategi *Anti-Fraud* di setiap pilar, serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan dan upaya *recovery* atas kejadian *fraud*. Dewan Komisaris selalu menghimbau Direksi dan seluruh Insan Brilian untuk senantiasa waspada terhadap seluruh modus *fraud* yang terjadi, menjaga reputasi Perseroan dan kepercayaan masyarakat.

Pengendalian Gratifikasi

Komitmen BRI dalam mengelola pengendalian gratifikasi terus ditingkatkan, antara lain melalui kebijakan mengenai Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan BRI dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan BRI dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai Surat Edaran Direksi Tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi BRI.

Perseroan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi BRI yang menyusun program, memberikan layanan informasi dan pelaporan gratifikasi serta perlu mengembangkan deteksi anti-*fraud* yang berbasis *big data analytics.*

Selama tahun 2023, Perseroan telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain:

1. Komitmen Pengendalian Gratifikasi
   Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh pekerja melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dalam pernyataan kode etik, penandatanganan pakta integritas dan telah dilakukan *self-assessment* anti penyuapan yang dilakukan oleh Pekerja BRI seluruh Indonesia dalam rangka pemetaan titik rawan gratifikasi.
2. Program Pendidikan dan Sosialisasi
   Unit Pengendalian bekerja sama dengan BRI *Corporate University* telah melaksanakan sosialisasi melalui *e-learning* kebijakan gratifikasi kepada seluruh pekerja
3. Pengkinian Kebijakan Gratifikasi
   Telah dilakukan pengkinian kebijakan gratifikasi yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi BRI digantikan dengan Surat Edaran Direksi Kebijakan *Corporate Governance* Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 Buku 3 tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.
4. Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi
   Selama tahun 2023, Unit Pengendalian Gratifikasi menerima jumlah laporan gratifikasi sebanyak 61 (enam puluh satu) laporan.

Dewan Komisaris berpesan bahwa pengendalian gratifikasi internal harus terus menerus memperoleh perhatian serius untuk menjaga agar proses bisnis BRI berjalan sesuai dengan etika bisnis yang berlaku dan untuk menjunjung tinggi nilai integritas.

Whistleblowing System

Dalam implementasi komitmen BRI terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi *Anti-Fraud* yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator maka dilakukan identifikasi untuk menemukan kejadian *fraud*. Oleh karena itu, BRI telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola dengan transparan dan adil melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Proses pelaporan pelanggaran melalui WBS merupakan bagian dari upaya BRI untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perseroan. Dewan Komisaris memandang bahwa WBS dapat membantu meningkatkan implementasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik dan *corporate culture*. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan dan masukan terhadap efektivitas *Whistleblowing System* BRI. Dalam pelaksanaannya, telah diterima 30 (tiga puluh) laporan pengaduan dengan 50 (lima puluh) sub indikasi pelanggaran.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik untuk memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik, dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit terkait lainnya dalam rangka melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum penerapan dan atas tindak lanjut WBS selama tahun 2023 di Perseroan berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kerja sama BRI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengimplementasikan aplikasi *Whistleblowing System* sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan kepada Direksi untuk terus melakukan sosialisasi penerapan WBS dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.

Penerapan Manajemen Risiko

Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global dan risiko multidimensi, Dewan Komisaris meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat tercipta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BRI memiliki kerangka *Governance Risk Management & Compliance* untuk mengendalikan risiko dan memastikan kepatuhan pelaksanaan pilar bisnis serta *support*, sehingga upaya pencapaian target kinerja BRI juga didukung oleh *operational excellence*. Dalam kerangka penerapan manajemen risiko terdapat empat pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan batas risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi pendukung
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Dalam menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantauan Manajemen Risiko untuk memastikan manajemen risiko BRI telah memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko. Pengawasan dilakukan melalui rapat dengan Direktur Bidang Manajemen Risiko maupun Direktur terkait lainnya sesuai dengan topik pembahasan. Forum diskusi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dijalankan secara langsung melakukan penelaahan atas laporan yang disampaikan oleh Direksi. Pada tahun 2023, pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan antara lain yaitu menelaah persetujuan atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko, *Risk Appetite Statement, Recovery Plan, Resolution Plan* dan *Loan Portofolio Guideline,* dan lain sebagainya.

Sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan BRI, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan hal penting untuk mengetahui eksposur risiko yang akan timbul dalam aktivitas konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Untuk itu, pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi perlu dilakukan secara komprehensif di mana pada tingkat pengawasan Dewan Komisaris dibantu Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun pendekatan pengawasan yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko dalam operasional dan bisnis yang meliputi seluruh jajaran organisasi BRI dan anggota Konglomerasi Keuangan. Dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi maupun terintegrasi, BRI telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Direktur atau *Senior Executive Vice President* (SEVP) yang membidangi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko BRI telah diterapkan dengan baik dan dilakukan secara proaktif dengan tetap menjaga tingkat profil risiko selama tahun 2023. Hal tersebut tergambar melalui hasil *self-assessment* atas risiko-risiko utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga pada Triwulan IV/2023 Perseroan tetap menjaga Peringkat Komposit Profil Risiko pada level "*low to moderate*". Selanjutnya, Dewan Komisaris berpesan agar Direksi senantiasa menjaga peringkat profil risiko dengan baik tidak hanya bagi BRI namun juga di level BRI Group.

Sistem Pengendalian Internal

Seluruh Manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab memastikan penerapan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian internal yang andal dan efektif. Dewan Komisaris juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan membentuk budaya pengendalian di BRI yang dalam hal ini dibantu dengan Komite Audit. Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan Dewan Komisaris di antaranya melalui pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan memberikan arahan untuk terus memperkuat pengendalian internal di seluruh aktivitas Perseroan. Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara periodik melaporkan hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal serta hasil tindak lanjutnya.

Pengendalian internal perusahaan dipastikan melalui *third lines model* yang merupakan jajaran audit internal yang memastikan bahwa pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif dan memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal yang berstandar internasional yaitu Sistem Pengendalian Internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pemonitoran.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BRI telah berjalan dengan baik, berfungsi efektif dan memberikan keyakinan yang memadai. Pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian internal, telah dilakukan penguatan melalui implementasi *roadmap Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) sesuai *journey.* Selain bertujuan untuk mencapai keandalan laporan keuangan konsolidasi, lebih menyempurnakan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang berbasis *internal control,* memaksimalkan akurasi data dan informasi, memberikan penguatan kecukupan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menumbuhkan budaya peduli risiko, ICoFR juga bertujuan memberi keyakinan serta sebagai *early warning system* yang memadai. Dengan demikian seluruh jenjang (*lines of defense*) dapat bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan fungsi *combined assurance* sehingga dapat meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris menghimbau manajemen untuk senantiasa meningkatkan sistem pengendalian internal serta memastikan penyelesaian implementasi ICoFR sesuai dengan *roadmap*.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sejalan dengan aspirasi BRIVolution 2.0 menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion*", BRI juga menetapkan aspirasi untuk mencapai "*World Class Sustainable Banking Group*". Dalam rangka membuat program yang terarah dan tepat sasaran, fokus implementasi diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pilar strategi yaitu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Pada aspek Lingkungan, BRI turun mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan *Net Zero Emision* (NZE). Bertujuan mencapai target NZE pada 2050, BRI telah menyusun *journey* melalui berbagai inisiatif dengan berbasis standar *global Science-Based Target Initiative* (SBTi). Salah satu langkah nyata BRI adalah melalui penerapan budaya kerja yang selaras dengan prinsip keberlanjutan antara lain optimalisasi perangkat digital, efisiensi penggunaan kertas dan plastik, budaya hemat energi, hingga implementasi *green network* dengan penggunaan kendaraan listrik bagi operasional dan penggunaan panel surya di unit kerja BRI.

Berkaitan dengan aspek sosial, BRI senantiasa berkontribusi nyata dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi Indonesia melalui keuangan inklusif. Melalui bisnis model *Hybrid Bank* yang mampu mengintegrasikan kehadiran fisik (*physical presence*) lewat agen BRILink, sinergi Ultra Mikro, dan penyuluh digital serta dengan dukungan teknologi dan inovasi digital (*digital capabilities*) yang mumpuni, BRI berhasil menawarkan akses jaringan perbankan mulai lagi wilayah perkotaan hingga daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Sinergi *Holding* Ultra Mikro BRI juga menyediakan konsep pemberdayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang lebih komprehensif dan terstruktur berupa *Ultra Micro Business Journey* sehingga diharapkan pelaku bisnis mikro dan ultra mikro dapat naik kelas.

Komitmen menjalankan proses bisnis berkelanjutan pada aspek tata kelola, dikukuhkan dengan bergabungnya BRI sebagai anggota United Nations Global Compact (UNGC) sejak Maret 2023. UNGC merupakan inisiatif global yang digagas United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki 10 (sepuluh) prinsip universal, antara lain, hak asasi manusia (*human rights*), ketenagakerjaan (*labour*), lingkungan (*environment*), serta anti korupsi (*anti-corruption*). BRI juga menyelenggarakan *stakeholder engagement forum* yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam akan perspektif dan masukan yang membangun dari pemangku kepentingan.

Mendukung konsistensi BRI dalam penerapan *roadmap* ESG, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan baik melalui rapat bersama Direksi maupun melalui kunjungan kerja lapangan, termasuk dalam pemberian persetujuan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BRI tahun 2023, guna memastikan implementasi program *roadmap* ESG telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif sampai dengan unit kerja di level terbawah.

Dewan Komisaris berpesan agar BRI senantiasa fokus dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan termasuk secara konsisten dan sejalan dengan strategi pencapaian visi dan misi Perseroan.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk empat komite yaitu:

1. Komite Audit
   Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit antara lain terhadap efektivitas sistem pemantauan dan evaluasi atas perencanaan serta pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal beserta tindak lanjutnya, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan, pemantauan dan pemberian masukan atas perancangan dan proses implementasi ICoFR serta penerapan pengendalian internal terintegrasi, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berpendapat, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2023, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko
   Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan evaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko di Perseroan, memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko.

   Aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain meliputi: evaluasi dan analisa terhadap profil risiko triwulanan Perseroan, memantau Tingkat Kesehatan Bank semesteran, memberikan rekomendasi atau pendapat atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi oleh Dewan Komisaris, melakukan analisa terhadap *recovery* dan *resolution plan*, melakukan analisa serta rekomendasi terhadap *key issues* BRI, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

   Dewan Komisaris menilai, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2023, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 45 (empat puluh lima) kali.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi
   Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan aktivitas antara lain: memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur nominasi Pengurus dan pemilihan *talent* Pengurus BRI dan Perusahaan Anak, memberikan masukan atas hasil kajian kebijakan strategis *human capital*, mengevaluasi kebijakan *talent pool*, memberikan rekomendasi atas usulan persetujuan Pengurus Perusahaan Anak sesuai dengan kewenangannya, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

   Dewan Komisaris memandang, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2023, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali.

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
   Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan tata kelola yang komprehensif dan efektif yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

   Pemantauan yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi meliputi proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengendalian internal, pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

   Dewan Komisaris melihat, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2023, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

   Adapun pelaksanaan rencana kerja Komite-komite dilakukan antara lain melalui Rapat Komite dengan mengundang Direktorat maupun Perusahaan Anak, forum diskusi dengan Divisi dan Satuan Kerja terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan oleh masing-masing Komite. Hasil penelaahan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, telah terjadi satu kali perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tanggal 13 Maret 2023

Komposisi Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 13 Maret 2023 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 6 (enam) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPST tanggal 13 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Kartika Wirjoatmodjo	:	Komisaris Utama
Rofikoh Rokhim	:	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Hadiyanto	:	Komisaris
Rabin Indrajad Hattari	:	Komisaris
Dwi Ria Latifa	:	Komisaris Independen
Hendrikus Ivo	:	Komisaris Independen
Heri Sunaryadi	:	Komisaris Independen
Agus Riswanto	:	Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda	:	Komisaris Independen
Nurmaria Sarosa	:	Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tanggal 13 Maret 2023

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 13 Maret 2023 yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Hadiyanto sebagai Komisaris Perseroan:
2. Mengangkat Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris Perseroan

Dengan demikian, susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan pada 31 Desember 2023 terdiri 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 6 (enam) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS:

Kartika Wirjoatmodjo	:	Komisaris Utama
Rofikoh Rokhim	:	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Rabin Indrajad Hattari	:	Komisaris
Awan Nurmawan Nuh	:	Komisaris
Dwi Ria Latifa	:	Komisaris Independen
Hendrikus Ivo	:	Komisaris Independen
Heri Sunaryadi	:	Komisaris Independen
Agus Riswanto	:	Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda	:	Komisaris Independen
Nurmaria Sarosa	:	Komisaris Independen

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perseroan dengan baik di tahun 2023. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Insan Brilian atas dukungan dan kontribusi yang diberikan secara optimal. Dewan Komisaris sangat berharap, bahwa seluruh jajaran Perseroan dapat terus merumuskan strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2024
Atas nama Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

Dewan Komisaris

1. Heri Sunaryadi (Komisaris Independen)
2. Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen)
3. Paripurna Poerwoko Sugarda (Komisaris Independen)
4. Kartika Wirjoatmodjo (Komisaris Utama)
5. Agus Riswanto (Komisaris Independen)



1 2 3 4 5

6. Hendrikus Ivo (Komisaris Independen)
7. Rofikoh Rokhim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
8. Awan Nurmawan Nuh (Komisaris)
9. Nurmaria Sarosa (Komisaris Independen)
10. Rabin Indrajad Hattari (Komisaris)



6 7 8 9 10

Tanggung Jawab
Pelaporan Tahunan 2023

Surat Pernyataan Anggota Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2024

Direksi

Sunarso
Direktur Utama

Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama

Viviana Dyah Ayu R.K.
Direktur Keuangan

Supari
Direktur Bisnis Mikro

Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Kecil & Menengah

Handayani
Direktur Bisnis Konsumer

Arga Mahanana Nugraha
Direktur Digital & Teknologi Informasi

Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Kepatuhan

Agus Winardono
Direktur Human Capital

Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko

Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan

Andrijanto
Direktur Jaringan & Layanan

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2024

Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

Rofikoh Rokhim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Hendrikus Ivo
Komisaris Independen

Heri Sunaryadi
Komisaris Independen

Rabin Indrajad Hattari
Komisaris

Awan Nurmawan Nuh
Komisaris

Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen

Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen

Agus Riswanto
Komisaris Independen

Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen

Profil Perusahaan





“Perjalanan bisnis BRI dimulai pada tahun 1895, saat ini BRI memiliki 1 Kantor Pusat serta melayani seluruh nasabah melalui 7.745 unit kerja dalam negeri dan 9 (Sembilan) unit kerja di luar negeri serta jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”


BRI
QIola
SenyuM
BRI SPOT
BRI mo

Identitas **Perusahaan**

Nama Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal Pendirian

16 Desember 1895

Bidang Usaha

Perbankan

Modal Dasar

Rp15.000.000.000.000

Kode Saham

BBRI

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp7.577.950.080.200

Data Jaringan Kantor

- 1 Kantor Pusat
- 18 Regional *Office*
- 18 Regional Audit *Office*
- 453 Kantor Cabang
- 6 Kantor Cabang Luar Negeri
- 7.155 Kantor Cabang Pembantu*
- 3 Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri
- 115 Teras BRI Keliling
- 4 Teras BRI Kapal

* Sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, terdapat penyesuaian untuk jaringan kantor bank hanya terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Per 31 Desember 2023 terdapat, 556 Kantor Cabang Pembantu, 5.117 BRI Unit, 977 Teras BRI, 505 Kantor Kas.

Akses Informasi

Kantor Pusat
Sentra BRI
Jl Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
No. Tel. : (021) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279
No. Fax : (021) 250-0077
Website : www.bri.co.id

Sekretaris Perusahaan
Agustya Hendy Bernadi
Corporate Secretary Division
Gedung BRI 1, Lt.15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Email : humas@bri.co.id
Telp : (021) 5751966
Fax : (021) 5700916

Media Sosial

@BRIofficialpage
@bankbri_id
@kontakBRI
BANK BRI
bankbri_id
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Contact Address

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina Whatsapp : 0812-12-14017

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003.

Komposisi Pemegang Saham

Pemerintah Indonesia : **53,19%**
Publik : **46,81%**

Jumlah Pekerja

77.739 orang per 31 Desember 2023

Nama dan Alamat Kantor *Regional Office* Serta Kantor Cabang Luar Negeri



Regional Office

Yogyakarta

Jl. Cik Di Tiro No. 3 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Telp : (0274) 520270, 510850
Faks : (0274) 514166
Email : h0197@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Bandar Lampung

Jl. Raden Intan No. 51, Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung

Telp : (0721) 259340
Faks : -
Email : j0449@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Bandung

Menara BRI Tower
Jl. Asia Afrika 57 - 59, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung

Telp : (022) 4200356
Faks : (022) 4232038
Email : f0198@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Banjarmasin

Jl. Jend A. Yani KM 3,5 No. 151 Banjarmasin Kec. Banjarmasin Timur, Kel. Kebun Bunga Kalimantan Selatan

Telp : (0511) 3252056
Faks : -
Email : l0204@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Denpasar

Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 1,
Renon Denpasar

Telp : (0361) 228715
Faks : (0361) 234796, 225791, 264858
Email : m0203@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Jakarta 1

Jl. Veteran II No. 8, Kel. Gambir,
Kec. Gambir Jakarta Pusat

Telp : (021) 3840802
Faks : (021) 3854253
Email : e0199@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Jakarta 2

Gedung Menara Mulia Lt. 12
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp : (021) 52920585, 52920581
Faks : -
Email : i0317@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Jakarta 3

Jl. Kapten Soebianto Djojokusumo Kav BSD II No.1, BSD Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan

Telp : (021) 22230155
Faks : -
Email : q0853@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Jayapura

Gedung BRI Lantai 3-5. Jalan Pasific Permai Komplek Ruko Dok 2 Jayapura

Telp : (0967) 524488, 524453
Faks : -
Email : o0856@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Makassar

Jl. Ahmad Yani No. 8 Kel. Pattunuang
Kec. Wajo, Kota Makassar

Telp : (0411) 3613174, 312498
Faks : (0411) 312731
Email : p0202@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Malang

Jl. Laksamana Martadinata No. 80 Kel. Sukoharjo
Kec. Klojen Kota Malang

Telp : (0341) 474949
Faks : -
Email : r0854@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Manado

Jl. Sarapung No 4-6 Kel. Wenang Utara
Kec. Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara

Telp : (0431) 863778, 863592
Faks : -
Email : n0254@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Medan

Jl. Putri Hijau No. 2.A Kel. Kesawan
Kec. Medan Barat Kota Medan

Telp : (061) 45256666
Faks : -
Email : b0201@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Padang

Jl. Bagindo Azis Chan No. 30 Kel. Sawahan,
Kec. Padang Timur Kota Padang

Telp : (0751) 892309, 892310, 892311, 892312
Faks : -
Email : c0205@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No. 15, Kel Sungai
Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang

Telp : (0711) 313411
Faks : -
Email : d0200@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Kel. Tangkerang
Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Telp : (0761) 8011100, 7865018
Faks : -
Email : x0855@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Semarang

Jl. Teuku Umar no 24 Kel. Jatingaleh
Kec. Candisari Kota Semarang

Telp : (024) 8440728, 8440729, 8440730
Fax : (024) 8445632
Email : g0196@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Surabaya

Gedung BRI Tower
Jl. Basuki Rahmat No.122 - 138, Embong
Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya

Telp : (031) 5324225
Faks : -
Email : k0146@corp.bri.co.id
Web : www.bri.co.id

Kantor Cabang Luar Negeri

BRI New York Agency

140 Broadway, 36th Floor
New York, NY 10005

Telp : +1 (212) 379 3840-45
Faks : +1 (212) 379 3850
Email : briny@brinya.com
Web : www.brinya.com

BRI Hong Kong Representative Office

Room 1115, 11/F. Lippo Centre Tower II
89 Queensway, Hong Kong

Telp : +852 2527 1318
Faks : +852 2861 3693
Email : brihk@brihongkong.com
Web : www.brihongkong.com

BRI Cayman Island Branch

190 Elgin Avenue Grand Cayman,
KY1-9005, Cayman Islands

Telp : +1 (212) 379 3840-45
Faks : +1 (212) 379 3850
Email : bri.cayman@bri.co.id
Web : -

BRI Singapore Branch

50 Collyer Quay #08-06, OUE Bayfront,
Singapore 049321

Telp : +65 6805 0680
Faks : +65 6509 1742
Email : bri.sg@bankbri.com.sg
Web : www.bankbri.com.sg

BRI Timor Leste Colmera Branch

BRI Colmera Branch
Grand Diocese Colmera Complex,
Rua Nicolau Doc Reis Lobato Colmera Dili,
Timor Leste

Telp : +670 3311372
Faks : +670 3310198
Email : timorleste@corp.bri.co.id
Web : -

BRI Taiwan Branch

1F, No. 166, Sec. 3, Nanjing East Road,
Zhongshan District, Taipei City 104105,
Taiwan – R.O.C

Telp : +886 2 2721 6330
Faks : +886 2 2721 0320
Email : -
Web : www.britaipei.com

BRI Timor Leste Sub Branch Futuhada

Time Square Complex, Rua Nicolau Doc Reis
Lobato Fatuhada, Timor Leste

Telp : +670 3310436

BRI Timor Leste Sub Branch Hudilaran

Top One Complex, Rua Hudilaran Bairopite,
Timor Leste

Telp : +670 3311378

BRI Timor Leste Sub Branch Audian

Rua 12 De Novembro No. 2, S
anta Cruz - Municipiu, Timor Leste

Telp : +670 3311208

Brand Perusahaan

Dengan makna logo:

THE LEADER OF CHANGE
Sebagai *The Leader of Indonesian Banking Industry*, diperlukan peremajaan sistem komponen visual BRI, penggunaan logo dalam materi komunikasi membutuhkan sedikit penyesuaian demi menunjang ketepatan sistem komponen visual secara keseluruhan.

Penyesuaian logo ketika BRI berdiri sebagai Perusahaan lnduk pun perlu dilakukan terkait dengan relevansi BRI yang juga menaungi berbagai anak perusahaan yang bukan bergerak di bidang perbankan.

Melayani Dengan Setulus Hati

Perubahan *Logotype* "Bank BRI" menjadi "BRI" sebagai statement bahwa BRI sebagai lnduk Perusahaan tidak hanya memiliki berbagai anak perusahaan yang bergerak di dalam bidang perbankan, tetapi jauh lebih luas lagi.

Logogram dengan bentuk segi empat sama sisi menandakan keseimbangan. Sementara garis sudut lengkung menggambarkan dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman.

Garis dan bentuk pada Huruf "BRI" terbentuk dari bentuk garis lurus yang menggambarkan bahwa BRI memiliki ketegasan untuk selalu hadir dan melayani seluruh masyarakat Indonesia, dan garis lengkung yang mencerminkan layanan BRI juga dapat bersifat fleksibel karena selalu mengedepankan keamanan & kenyamanan para nasabah BRI (*Consumer Centric*).

Garis, bentuk, dan pewarnaan (*bold*) secara tegas, sederhana, serta terukur pada logo merupakan cerminan dari sistem manajemen yang baik, kemudahan, maupun keamanan.

Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang mementingkan ketelitian dan ketepatan terkait dengan manajemen modern dalam suatu kegiatan usaha nasional dengan wawasan internasional dan berlandaskan semangat pembaharuan.

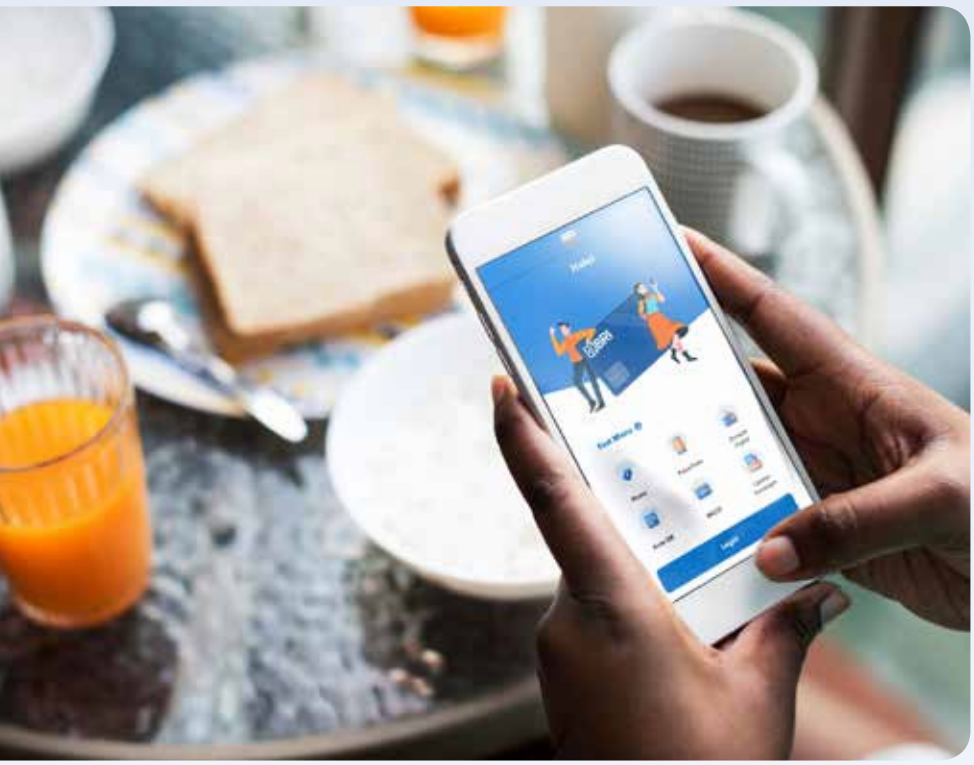
Garis, bentuk, dan pewarnaan ditampilkan secara lugas dan sederhana tetapi mantap mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil dan terpencil sampai yang besar di kota-kota.

Warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan.

Filosofi *Tagline*:

"Melayani Dengan Setulus Hati"
Kalimat ini menggambarkan semangat serta visi dan misi BRI yang selalu dengan tulus memberikan pelayanan terbaik. Kalimat ini adalah komitmen BRI untuk selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Riwayat Singkat Perusahaan



> **"Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI", "Bank", atau "Perseroan") dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana."**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584. HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04. TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.



Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 3 tanggal 09 Maret 2021, mengenai perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta modal disetor.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.



Keterangan Perubahan Nama



16 DESEMBER 1895

De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden

Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen

De Poerwokertosche Hulp Spaaren Landbouw Credietbank atau Volksbank



10 JULI 1912

Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene



3 OKTOBER 1942

Syomin Ginko



11 AGUSTUS 1897

De Poerwokertosche Hulp Spaaren Landbouw Credietbank



19 FEBRUARI 1934

Algemene Volkscredietbank

(AVB)

No.	Perihal	Akta/Peraturan Terkait	Tanggal	Notaris
1.	Pendirian BRI	PP Nomor 1 Tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia	22 Februari 1946	
2.	Pendirian BRI	UU Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia	18 Desember 1968	
3.	Penyesuaian bentuk hukum Persero	PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan	29 April 1992	
4.	Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	Akta Nomor 133 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	31 Juli 1992	Muhani Salim, S.H.
5.	Initial Public Offering	Akta Nomor 7 tentang Status Perusahaan & Penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal	3 Oktober 2003	Imas Fatimah, S.H



22 FEBRUARI 1946

Bank Rakyat Indonesia (BRI)



18 DESEMBER 1968

Bank Rakyat Indonesia (Bank Umum)



10 NOVEMBER 2003

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



24 SEPTEMBER 1960

Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN)

Visi, Misi
dan Budaya Perusahaan



VISI

"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion."

MISI

A. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellence*.

C. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.



REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Visi dan Misi Perseroan telah ditetapkan surat No. R.394-DIR/CDS/06/2021 tanggal 30 Juni 2021. Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi, Perseroan senantiasa melakukan *review* terhadap Visi dan Misi secara berkala. Pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah Perseroan, konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.

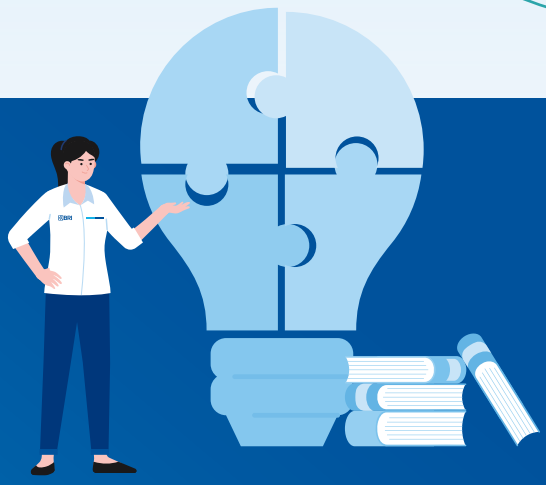
Budaya Perusahaan

BRI One Culture dijadikan pedoman untuk melaksanakan dan membangun *performance driven culture* (budaya perusahaan berbasis kinerja) dalam mencapai visi perusahaan. BRI One Culture terdiri dari *Core Values* Akhlak sebagai perilaku kunci dalam keseharian yang mampu mendorong pencapaian kinerja Perseroan.

BRI
One Culture:



CORE VALUES:
AKHLAK



Core Values **AKHLAK** adalah nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan menjadi pondasi *Corporate Culture* BRI. *Core Values* AKHLAK memiliki 6 (enam) nilai pokok (values) dan diterjemahkan menjadi 6 (enam) kata kunci dan 18 perilaku.



1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan

AMANAH

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

KOMPETEN

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Saling peduli dan menghargai perbedaan

HARMONIS

AKHLAK

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

1. Menjaga nama balk sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BRI juga telah merumuskan dan menetapkan atribut unik yang dapat memberikan visualisasi atau gambaran yang dapat meningkatkan minat talent eksternal terbaik (*Star Talent*) serta membangun loyalitas dan *engagement* pekerja di BRI Group (*Employee Value Proposition*). Adapun *Employee Value Proposition* yang ditetapkan adalah **"Memberi Makna Indonesia"** dimana atribut tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan *living values*, *attractive values*, dan *ideal values* yang hidup dan berkembang di BRI.

Employee Value Proposition BRI Group diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) aspek yaitu:

1) *LEARN:* BRI Group merupakan tempat belajar dan berkembang bagi setiap Insan BRILiaN, membentuk pribadi unggul yang tangguh, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman.
2) *GROW:* Bagi setiap Insan BRILiaN, merancang masa depan bukan hanya sekedar harapan. Peluang meraih karier di BRI terbuka luas bagi setiap Insan BRILiaN yang mampu menunjukkan kinerja unggul secara konsisten.
3) *CONTRIBUTE:* BRI Group menciptakan Insan pembawa perubahan, para bintang kehidupan yang mengubah kehidupan ekonomi masyarakat dengan semangat tanpa menyerah. Bersama, berkarya, membuat hidup lebih bermakna.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021 BRI adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
    1) Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
    2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
    3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
    4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    5) Obligasi;
    6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya.
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang.
q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, BRI dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh BRI.

Produk dan Jasa

Penghimpunan Dana



Deposito BRI

1. DepoBRI Rupiah
2. DepoBRI Valas
3. Deposito On *Call*
4. Deposito On C*All* Valas

Giro BRI

1. Giro BRI Rupiah
2. Giro BRI Valas

Tabungan BRI

1. Tabungan BRI Simpedes
   Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
2. Simpedes TKI
3. Simpedes Impian
4. Simpedes Usaha
5. Simpedes BISA
6. Tabungan BRI Simpel
7. Tabunganku
8. Tabunganku Basic Saving Account
9. Tabungan BRI BritAma Reguler
   Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dana sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan di manapun. Selain itu, tabungan BritAma memiliki Gratis *Cover* asuransi kecelakaan, Fitur *e-banking* dan suku bunga kompetitif.

   Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan di manapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Umum, BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAma Muda, BritAma Mitra, BritAma TKI, BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.
10. Tabungan BRI BritAma X
    Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dana sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan di manapun.
11. Tabungan BRI BritAma Kerjasama
12. Tabungan BRI BritAma TKI
13. Tabungan BRI BritAma Bisnis
    Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang bisnis, disertai dengan pencatatan transaksi yan lebih detail, dan didukung fasilitas *e-banking* dana sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan di manapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki gratis *cover* asuransi kecelakaan, Fitur *E-banking* dan suku bunga kompetitif dan pencatatan transaksi lebih detail pada buku Tabungan dan pengiriman rekening koran melalui *email*.
14. Tabungan BRI BritAma Rencana Flexy
15. Tabungan BRI BritAma Valas
16. BritAma Valas Rencana
17. Tabungan BRI Junio
    Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak- anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.
18. Junio Rencana
    Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak- anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.
19. Tabungan BRI SiMuda
20. Tabungan Haji BRI

Penyaluran Dana



1. **Bank Garansi**
   a. Tender/*Bid Bond*
   b. Advance Payment Bond
   c. Performance Bond
   d. Maintenance Bond
   e. Financial Bond
   f. Bond Payment
   g. Bea Cukai
   h. BG Akhir Tahun
2. **Bank Garansi Atas Dasar Kontra Garansi**
3. **Banker's Acceptance**
4. **Ceria by BRI**
5. **Kredit BRIguna**
   a. BRIguna Karya
   b. BRIguna Karya Talangan
   c. BRIguna Karya Profesi
   d. BRIguna Karya Pendidikan
   e. BRIguna Karya Smart
   f. BRIguna Karya Purna
   g. BRIguna Karya Purna Smart
   h. BRIguna Purna
   i. BRIguna Purna Profesi
6. **Collection Non LC**
   a. Document Against Payment
   b. Document Against Acceptance
7. **Fasilitas Intraday BRI**
8. **Forfaiting (Bank Risk)**
9. **KKB Kerjasama Multifance (*Join Financing*)**
10. **KPR BRI**
    a. KPR BRI
    b. KPR Subsidi
11. **Kredit Kecil**
    a. KI Kecil
    b. KI Angsuran Tetap Kecil
    c. KI SPBU Kecil
    d. KI Dinamis Kecil
    e. KMK Kecil
    f. KMK Angsuran Tetap Kecil
    g. KMK Dinamis Kecil
    h. KMK Konstruksi Kecil
    i. KMK Mitra Kecil
    j. KMK SPBU Kecil
    k. KMK Valas Kecil
    l. KMK Waralaba Kecil
    m. Pinjaman Cash Collateral Kecil
12. **Kredit Korporasi**
    a. KI Korporasi
    b. KI Valas Korporasi
    c. KI Waralaba Korporasi
    d. KMK Korporasi
    e. KMK Buyer Financing
    f. KMK Seller Financing
    g. KMK Valas Korporasi
    h. KMK WA Konstruksi Korporasi
    i. KJP
    j. Pinjaman Cash Collateral Korporasi
13. **Kredit Menengah**
    a. KI Menengah
    b. KI Mitra Menengah
    c. KI SPBU Menengah
    d. KI Valas Menengah
    e. KI Waralaba Menengah
    f. Pinjaman Cash Collateral Menengah
    g. KMK Menegah
    h. KMK Dinamis Menengah
    i. KMK Mitra Menengah
    j. KMK Ekspor Menengah
    k. KMK Impor Menengah
    l. KMK SPBU Menengah
    m. KMK Konstruksi Menengah
    n. KMK Valas Menengah
14. **Kredit Program Non KUR**
    a. S-SRG (Skema Subsidi Resi Gudang)
15. **Kupedes**
    Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perorangan yang memenuhi persyaratan.
    a. Kupedes Rakyat Modal Kerja
    b. Kupedes Rakyat Investasi
    c. Kupedes Rakyat TKI
    d. Kupedes Modal Kerja
    e. Kupedes Investasi
    f. Kupedes Suku Bunga Khusus
    g. Kupedes 500 Juta
    h. KECE
    i. Kupedes Cash Collateral/Kupedes Agunan Kas
16. **KUR**
    a. KUR Supermikro BRI
    KUR Supermikro BRI merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar Rp10 juta per debitur dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.
    b. KUR Mikro KMK BRI
    KUR Mikro KMK BRI merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan pinjaman maksimal sebesar Rp50 juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun. KUR TKI KUR TKI merupakan fasilitas pembiayaan yang berlaku khusus bagi TKI dengan penempatan di

Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp25 juta.

c. KUR Mikro TKI BRI
d. KUR Mikro KI BRI
e. KI KUR Khusus
f. KMK KUR Khusus
g. KUR Kecil KI
h. KUR Kecil KMK

17. Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
a. LC/SKBDN Penerbitan
b. LC/SKBDN Penerimaan

18. Program Kemitraan
a. Program Pendanaan UMK

19. Refinancing LC (BRI as Borrower/ Lender)
a. Refinancing LC (BRI as Borrower)
b. Refinancing LC (BRI as Lender)

20. SBLC/Demand Guarantee
a. Bid Bond Stanby
b. Advance Payment Standby
c. Commercial Standby
d. Performance Bond Standby
e. Direct Pay Standby
f. Counter Standby
g. Financial Standby

21. Shipping Guarantee

22. Supply Chain Financing (SCF)
a. Supply Chain Financing Account Receivable
b. Supply Chain Financing Account Payable
c. Document Against Payment/ Document Against Acceptance Financing
d. Telegrafic Transfer Financing

23. Trade Asset Participation (Bank Risk)

24. ATM

25. *Bancassurance*
a. Asuransi Jiwa Optimal Sejahtera Plus (Asuransi Aurora Plus)
b. Asuransi Dana Investasi Sejahtera (Davestera)
c. Dana Investasi Sejahtera (Davestera) Optima Syariah
d. Dana Investasi Sejahtera (Davestera) Optima
e. Asuransi BRI Life Double Care
f. Asuransi Professional Group Health
g. Asuransi Jiwa Optimal Sejahtera Sejahtera (Asuransi Aurora)
h. Asuransi Life Care
i. Asuransi ACCI Care
j. Griya Proteksi Maksima
k. Asuransi Jiwa Pelita
l. Asuransi Brins Asuransi Asri
m. Asuransi Brins Oto
n. Asuransi Sepeda
o. Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
p. Asuransi Standar Asuransi Kebakaran
q. Oto Proteksi Maksima
r. Asuransi Proteksi Jiwa Terencana (Asuransi Kirana)

26. Bank Reference

27. BRI Money Changer
a. Same Currency
b. Different Currency

28. BRIefx

29. BRIFast Remittance
BRIfast Remittance adalah layanan *remittance* BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan *Remittance* BRI meliputi fitur *outgoing remittance* ke 144 *currency* di seluruh dunia, fitur *incoming remittance credit to* BRI *account* (kiriman masuk ke rekening BRI) dan *credit to other bank account* (kiriman masuk ditujukan ke rekening bank lain), serta fitur *incoming remittance cash pick-up* (kiriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI di Indonesia secara *real time online*.

30. Virtual Account
a. BRIVA (BRI Virtual Account Credit)
b. Cash Card (BRI Virtual Account Debit)

31. BRIZZI

32. Contact BRI
a. SABRINA
b. Video Banking
c. Social Media
d. Call Center

33. CRM

34. *Derivative & Structure Product*
a. FX Forward
b. FX Par Forward
c. FX Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)
d. FX Swap
e. FX Option
f. Cross Currency Swap (CCS)
g. Interest Only Swap (IOS)
h. Principal Only Swap (POS)
i. Forward Rate Agreement (FRA)
j. Interest Rate Swap (IRS)
k. Bond Forward
l. Bond Option
m. Overnight Index Swap (OIS)

35. *Foreign Exchange Product*
a. FX Today
b. FX Tomorrow
c. FX Spot

36. *Interest Rate Product*
a. MTN/MTN Issue (Medium Term Note)
b. LTN/LTN Issue (Long Term Note)
c. Repo/Reverse Repo Surat Berharga
d. Placement/Borrowing
e. Term Deposit
f. Deposit/Lending Facility
g. Club Loan
h. Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)
i. Corporate Bond
j. Foreign Bond
k. Sub Debt



37. Kartu Debit BRI

a. Master Card
b. Private Label
c. Kartu Combo BRI

38. Kartu Kredit BRI

a. BRI Touch
b. BRI Touch Cardless
c. BRI Touch Special Edition
d. BRI Infinite
e. BRI Easy Card
f. BRI Mastercard Platinum
g. BRI World Access
h. BRI Business Card
i. BRI Corporate Card
j. BRI JCB Platinum
k. Cobranding Wonderful Indonesia
l. Cobranding Tokopedia Card
m. Cobranding OVO U Card
n. Cobranding Raya
o. Cobranding Promoter
p. Cobranding Traveloka Paylater Card
q. Cobranding Kartu Emas Pegadaian
r. Cobranding BTN Gold
s. Cobranding BTN Platinum
t. Cobranding Paper.id
u. Cobranding Nex Card
v. Cobranding Paper.Id
w. Kartu Kredit Indonesia
x. Mastercard Corporate KKP
y. KKPD Private Label

39. Layanan Nasabah Prima

a. BRI Prioritas
Merupakan kegiatan pelayanan dan jasa perbankan yang diberikan BRI secara eksklusif kepada Nasabah BRI Prioritas yang bersifat *one stop financial services*, meliputi pelayanan dan jasa perbankan pada umumnya, jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi, maupun perencanaan pensiun.

b. BRI Private
Merupakan kegiatan pelayanan dan jasa perbankan yang diberikan BRI secara eksklusif kepada Nasabah BRI Private yang bersifat *personal* dan *customized*, meliputi pelayanan dan jasa perbankan pada umumnya, jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi (*bancassurance*), perencanaan pensiun maupun konsultasi perencanaan waris.



40. Mitra Distribusi Pemasaran Surat Berharga

a. Agen Penjual Obligasi Retail Indonesia (ORI)
b. Agen Penjual Saving Bonds Retail
c. Agen Penjual Sukuk Retail
d. Agen Penjual Sukuk Tabungan

41. Safe Deposit Box (SDB)

42. Self Service Banking (SSB)

a. SSB Digital Customer Service
b. SSB RCM (Replacement Card Machine)
c. SSB SSPP (Self Service Pastbook Printing)
d. SSB QMS (Queueing Management System)

43. Senyum Mobile Self-Serve

Konsep pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan BRI, Pegadaian, dan PNM di kantor unit BRI yang dilengkapi dengan loket Pegadaian dan PNM, dan Aplikasi Senyum Mobile merupakan perpanjangan jangkauan dari Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) yang kini berada dalam genggaman.

44. Transaksi Otomatis

a. Automatic Fund Transfer (AFT)
b. Automatic Grab Fund (AGF)
c. Account Sweep
d. New Account Sweep (NAS)
e. Autodebet

45. Transfer Antar Bank

a. RTGS
b. Kliring
c. BIFAST
d. Online Transfer Antar Bank

46. *Bancassurance*

a. Telepro Sehat Optima
b. Telepro Jiwa Optima
c. Asuransi Lengkap Ekonomis Nyaman Sejahtera (Lentera)
d. Asuransi Telepro Medicash Optima
e. Asuransi Jiwa Optimal Sejahtera (Asuransi Aurora)
f. Asuransi Dana Investasi dan Proteksi (Davespro)
g. Dana Sehat Sejahtera (Dasetera)
h. Asuransi Mikro Proteksi Aman Sejahtera (PIJAR)
i. Telepro Diri Optima
j. RumahKu
k. UsahaKu
l. Asuransi Mikro-Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AM-KKM)

47. Derivative & Structure Product

a. Call Spread Option (CSO)
b. BRI Swap Deposit

48. Agen Penjual Reksa Dana

a. Bahana Dana Likuid
b. Danareksa Seruni Pasar Uang II
c. Schroder Dana Likuid
d. Trim Kas 2
e. Bahana Liquid USD
f. Danareksa Gamasteps Pasar Uang
g. Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
h. Manulife Pendapatan Bulanan II
i. Bahana Makara Prima
j. Danareksa Melati Pendapatan Utama
k. Schroder USD Bond Fund
l. Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap
m. RD Ganesha Abadi Kelas D
n. Ashmore Dana Obligasi Nusantara
o. Ashmore Dana USD Nusantara
p. Manulife Dana Campuran II
q. Bahana Dana Infrastruktur
r. Danareksa Anggrek Fleksibel

s. Danareksa Syariah Berimbang
t. Schroder Dana Terpadu II
u. Schroder Syariah Balanced Fund
v. Schroder Dana Kombinasi
w. Trim Kombinasi 2
x. Danareksa Balanced Regular Income Fund
y. Ashmore Dana Progresif Nusantara
z. Manulife Dana Saham Kelas A
aa. Dana Ekuitas Prima
bb. Danareksa Indeks Syariah
cc. Danareksa Mawar Konsumer 10
dd. Schroder 90 Plus Equity Fund
ee. Schroder Dana Prestasi
ff. Trim Kapital
gg. Schroder Global Syariah Equity Fund
hh. Danareksa Mawar Fokus 10
ii. Danareksa G20 Sharia Equity Fund Dollar
jj. Trimegah Fixed Income Plan
kk. Danareksa MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A
ll. Reksadana Terproteksi Danareksa Proteksi 93
mm. Trimegah Terproteksi Lestari 23
nn. Trimegah Terproteksi Lestari 27
oo. Trimegah Terproteksi Lestari 29

49. Agen Sindikasi BRI

50. Bank Administrator RDN

51. Bank Pembayaran KSEI

52. BRI Credit Card Mobile

53. BRI Ecopay

54. BRI Future Investment (BRIFine)
a. PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti)
b. Program Manfaat Lain

55. BRI Kustodian
a. Jasa Kustodian Reksadana
b. Jasa Kustodian Efek Beragun Aset
c. Jasa Kustodian General Safekeeping
d. Jasa Kustodian Tapera

56. BRI Kustodian
Jasa Kustodian Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund)

57. BRI Smart Billing

58. BRI Smart Junio

59. BRI Trust

60. AgenBRILink
AgenBRILink merupakan perluasan layanan dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* dengan konsep *sharing fee*. Melalui AgenBRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di unit kerja BRI.

a. EDC BRILink
b. EDC BRILink MPOS
c. BRILink Mobile

61. BRImerchant

62. BRImo

63. BRImola

64. BRIStore

65. Qlola Cash Management
a. Cash Management (CMS) BRI
Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan monitoring dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas *online*. Juga menyediakan fasilitas national *pooling, added value service* dari GiroBRI untuk nasabah grup korporasi, yang menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan *borrowing* berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas *corporate virtual account* berupa layanan tambahan *virtual account* yang memudahkan nasabah dalam melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi (*Integrated Banking Solution*), serta berbagai layanan cash management lainnya.

66. Confirming Bank Business

67. Corporate Billing Management

68. EDC
a. EDC Android
b. EDC Partnership

69. E-Tax

70. iBBIZ BRI

71. Layanan Cash Pick Nasabah

72. Online Acquiring
a. Debit Virtual BRI
b. Credit Card

73. QRIS
a. QRIS MPM
b. QRIS CPM
c. API QRIS Static

74. Stroberi
a. Stroberi Kasir
b. Stroberi Tagihan

75. Wali Amanat BRI




BUMN UNTUK INDONESIA
BRI
BRImo
Mudah & Serba Bisa
QRIS
Transfer Internasional
Buka/Tambah Rekening
Bayar TV Kabel /Internet
Investasi BRI
bbri.id/BRImoMudahDanSerbaBisa
Download BRI mo
Mobile Banking yang Pas Buatmu
CONTACT BRI 1500017
Sabrina 0812 12 14017 | www.bri.co.id
BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Wilayah Operasional

Per 31 Desember 2023, BRI memiliki 1 Kantor Pusat serta melayani seluruh nasabah melalui 7.745 unit kerja dalam negeri dan 9 (sembilan) unit kerja di luar negeri serta jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Tabel Jaringan *E-Channel* selama 5 tahun terakhir

Jaringan *E-Channel*	2023	2022	2021	2020	2019
ATM	12.263	13.863	14.463	16.880	19.184
EDC*	664.801	497.976	203.027	198.785	204.386
CRM	9.007	8.007	7.407	5.809	3.809
E-Buzz	57	57	57	57	57
Total	**686.128**	**519.903**	**224.954**	**221.531**	**227.436**

* Jumlah EDC termasuk EDC Unit Kerja Operasional (UKO).

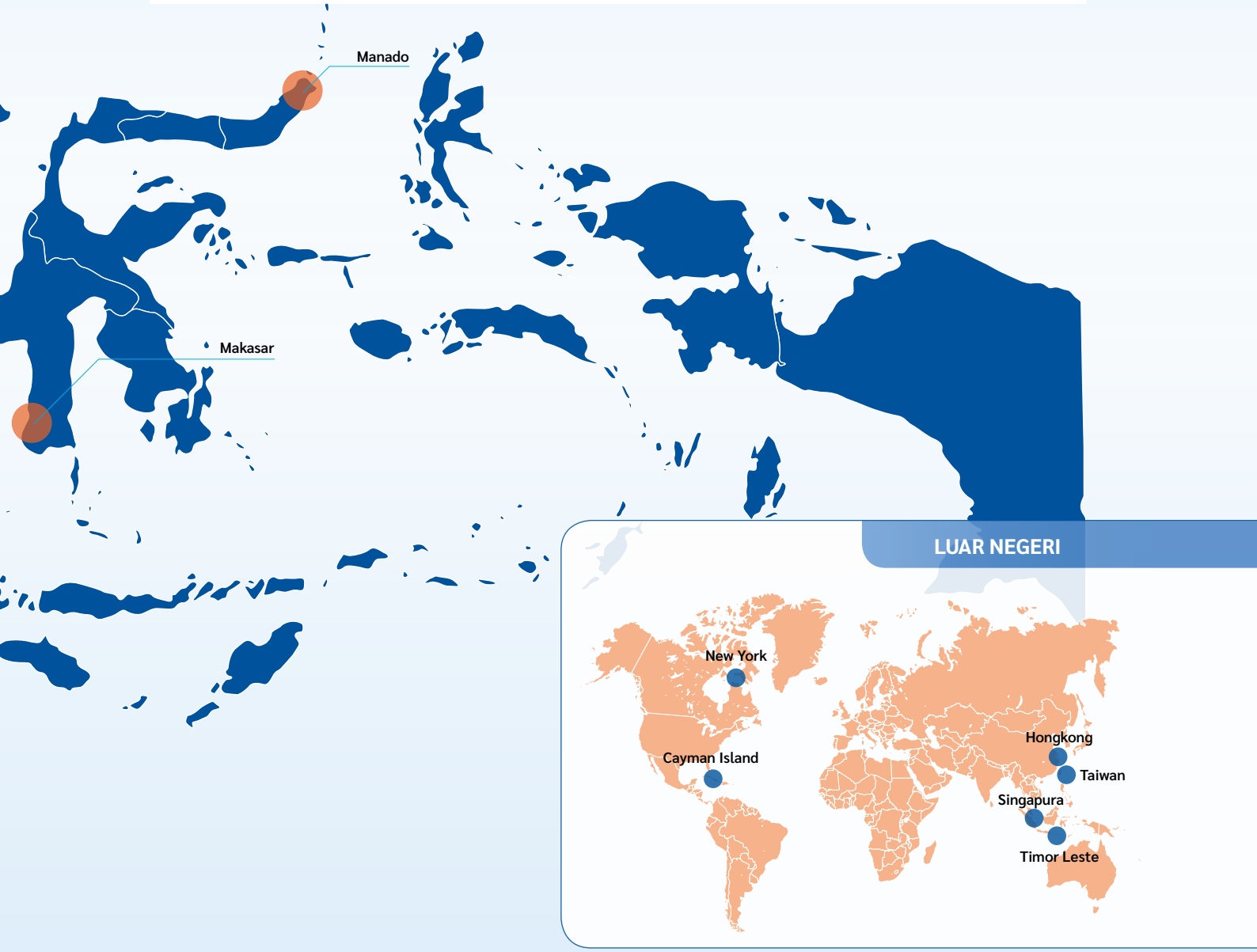
Jenis *E-Channel*	2023	2022	2021	2020	2019
EDC BRILink	122.185	125.926	127.352	124.720	123.295

Tabel Jaringan Kantor Selama 5 Tahun Terakhir

Jaringan Kantor	2023	2022	2021	2020	2019
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Regional *Office*	18	18	18	19	19
Regional *Audit Office*	18	18	18	19	19
Kantor Cabang + KCK (Dalam Negeri)	453	449	451	462	462
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) *	556	579	588	608	608
BRI Unit*	5.117	5.156	5.222	5.382	5.382
Kantor Kas*	505	506	525	547	568
Teras BRI*	977	1.370	1.697	1.867	2.049
Teras BRI Keliling	115	117	132	132	133
Teras BRI Kapal	4	4	4	4	4
Total	7.764	**8.218**	**8.656**	**9.041**	**9.245**

* Sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, disesuaikan bahwa untuk Tipe UKO BRI Unit, Kantor Kas, Teras BRI termasuk dalam status jenis UKO KCP.

Keterangan: Tidak termasuk jumlah Kantor Unit Kantor Luar Negeri.





Tabel Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2023

Wilayah	*Outlet*								
	Regional *Office*	Regional Audit *Office*	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu*				Teras BRI Keliling	Teras Kapal
				Kantor Cabang Pembantu	BRI Unit	Kantor Kas	Teras BRI		
Bandar Lampung	1	1	14	16	188	12	56	-	-
Bandung	1	1	30	34	565	44	45	25	-
Banjarmasin	1	1	31	31	287	19	72	6	-
Denpasar	1	1	32	26	295	20	117	4	1
Jakarta 1	1	1	24	52	93	61	35	-	-
Jakarta 2	1	1	31	65	183	68	48	21	-
Jakarta 3	1	1	36	57	258	35	69	-	1
Jayapura	1	1	13	13	86	10	17	1	-
Makassar	1	1	37	27	348	20	10	-	-
Malang	1	1	24	36	505	15	127	5	-
Manado	1	1	20	15	203	16	42	43	1
Medan	1	1	24	33	267	25	42	1	-
Padang	1	1	14	8	157	11	46	-	-
Palembang	1	1	21	28	223	9	38	-	-
Pekanbaru	1	1	22	20	170	18	35	1	1
Semarang	1	1	22	38	421	38	71	-	-
Surabaya	1	1	25	24	281	30	41	8	-

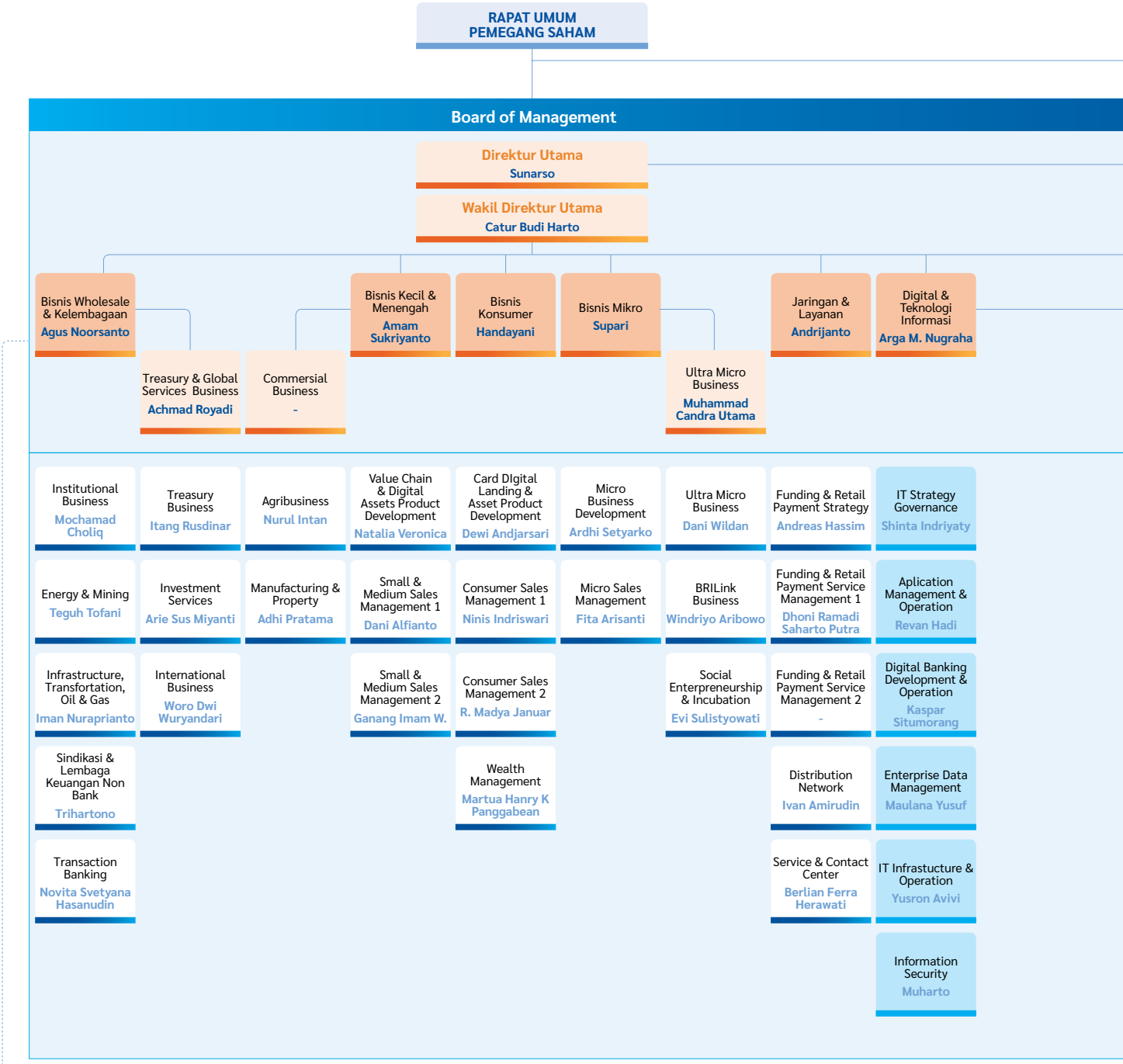
Wilayah	Outlet								
	Regional *Office*	Regional Audit *Office*	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu*				Teras BRI Keliling	Teras Kapal
				Kantor Cabang Pembantu	BRI Unit	Kantor Kas	Teras BRI		
Yogyakarta	1	1	33	33	587	54	66	-	-
Luar Negeri	-	-	6	3	-	-	-	-	-
Total	**18**	**18**	**459**	**559**	**5.117**	**505**	**977**	**115**	**4**

*Sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, disesuaikan bahwa untuk type UKO BRI Unit, Kantor Kas, Teras BRI termasuk dalam status jenis UKO KCP.

Tabel Jaringan *E-Channel* Wilayah Tahun 2023

Regional *Office*	*E-Channel*			
	ATM	EDC	CRM	E-BUZZ
Bandar Lampung	371	6.198	320	2
Bandung	663	14.569	909	4
Banjarmasin	857	8.175	516	3
Denpasar	618	11.405	533	3
Jakarta 1	799	25.919	324	3
Jakarta 2	1.374	21.318	506	6
Jakarta 3	1.372	18.894	487	4
Jayapura	300	2.525	227	1
Makassar	638	6.961	665	3
Malang	753	11.664	638	3
Manado	500	5.190	311	3
Medan	720	8.959	572	4
Padang	287	5.506	256	2
Palembang	549	7.828	362	3
Pekanbaru	405	6.053	414	3
Semarang	575	9.134	650	3
Surabaya	541	10.199	570	3
Yogyakarta	910	11.984	731	4
KCK	31	3.524	16	-
Chain	-	-	-	-
Kanins	-	2	-	-
Kanpus	-	135	-	-
Sendik	-	1	-	-
Program Pemerintah	-	-	-	-
Total	**12.263**	**196.143**	**9.007**	**57**

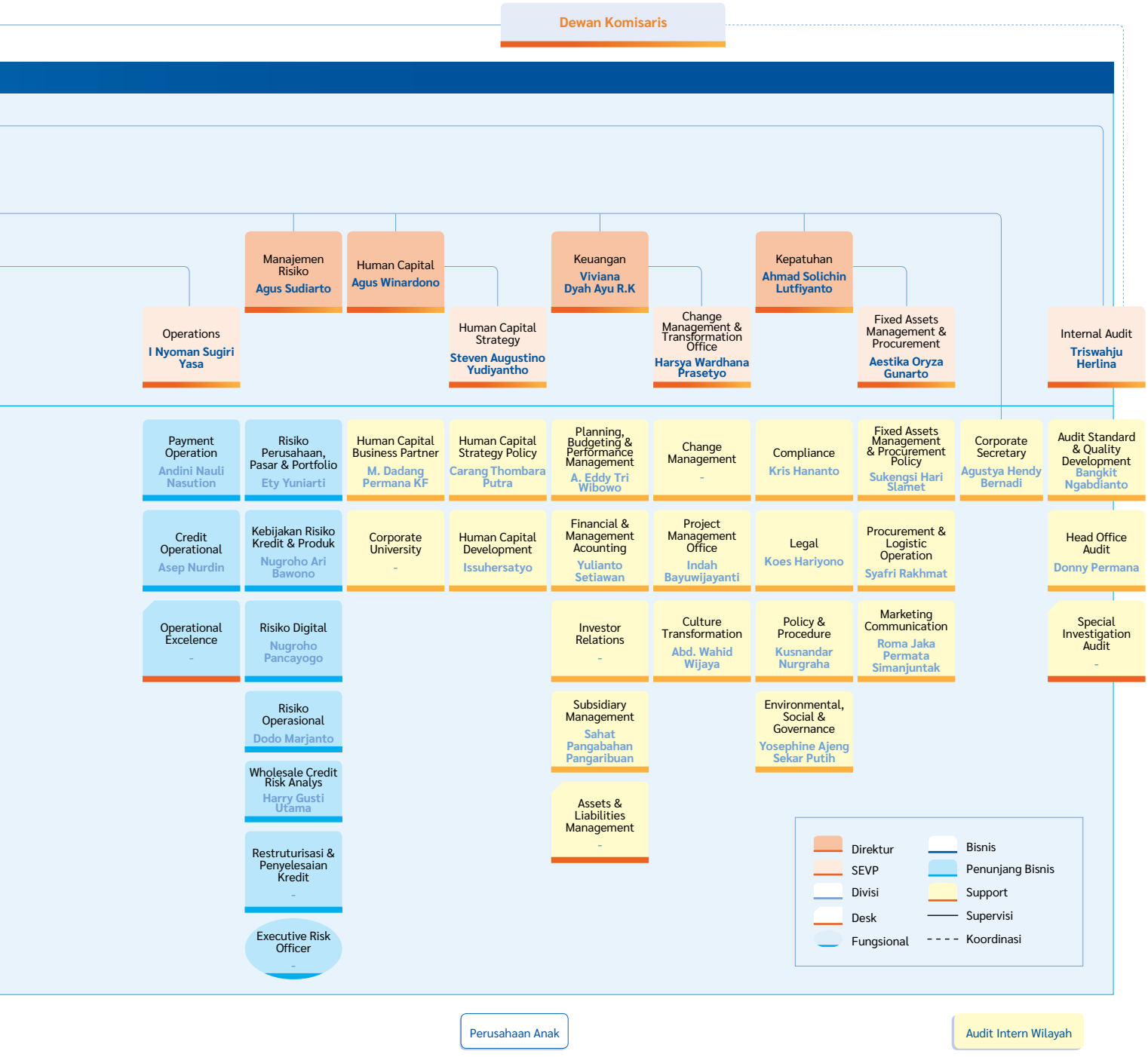
Struktur Organisasi



Komite Dewan Komisaris:

1. Komite Audit: Hendrikus Ivo (Ketua), Rofikoh Rokhim, Heri Sunaryadi, Agus Riswanto, Sahat Pardede, Irwanto dan Duma Riana Hutapea.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi: Heri Sunaryadi (Ketua), Rofikoh Rokhim, Kartika Wirjoatmodjo, Hadiyanto, Rabin Indrajad Hattari, Awan Nurmawan Nuh, Hendrikus Ivo, Dwi Ria Latifa, Nurmaria Sarosa, Agus Riswanto, Paripurna P. Sugarda dan E.R.A. Taufiq.
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko: Rofikoh Rokhim (Ketua), Rabin Indrajad Hattari, Dwi Ria Latifa, Heri Sunaryadi, Nurmaria Sarosa, Awan Nurmawan Nuh, A. Sigid Sudahno dan Sandra Chalik.

Struktur organisasi BRI telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.1630-DIR/PPM/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang tentang Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berikut struktur organisasi BRI per 31 Desember 2023.



4. Komite Tata Kelola Terintegrasi: Rofikoh Rokhim (Ketua), Kartika Wirjoatmodjo, Hendrikus Ivo, Dwi Ria Latifa, Heri Sunaryadi, Paripurna P. Sugarda, Tedi Nurhikmat, Bardiyono Wiyatmojo, Bintoro Nurcahyo, Eko B. Supriyanto, Ayahanita K., Abdul Ghoni, Eko Wahyudi, Mohammad Hidayat, Sumihar Manullang, Sumantri Suwarno, Agoosh Yoosran, Yudi Priambodo Purnomo Sidi, Muhammad Cholil Nafis, Nurhaida, dan Kahlil Rowter.

Komite Direksi : Risk Management and ESG, Credit Policy, Credit, ALCO, Human Capital, IT, Cavital & Investment, Product, Procurement, PMO.

Nama Anggota Komite di Bawah Direksi dapat di lihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Daftar Keanggotaan Asosiasi

BRI secara aktif bergabung dalam sejumlah organisasi dan asosiasi terkait bisnis inti perusahaannya untuk mengikuti perkembangan lingkungan bisnis, memperluas jaringan, serta mengokohkan kontribusi, sinergi, dan eksistensi BRI dalam menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan. Keanggotaan dalam sejumlah organisasi menjadi langkah strategis bagi BRI dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan dengan memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Meskipun begitu, BRI tidak memberikan kontribusi finansial di luar iuran keanggotaan rutin. Hingga akhir tahun 2023, BRI tercatat sebagai anggota dari beberapa asosiasi berikut ini:.

Tabel Keanggotaan Asosiasi

No.	Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi Keanggotaan	Skala
1.	Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)	Mengembangkan pasar modal Indonesia sebagai industri yang mampu mendukung perekonomian nasional.	Ketua	Nasional
2.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Sebagai wadah *sharing knowledge* dan informasi serta kolaborasi terkait HC dengan seluruh fungsi *Human Capital* BUMN di lingkungan BUMN.	Ketua Bidang	Nasional
3.	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Mengembangkan profesi auditor intern bank dalam rangka peningkatan efektivitas dari penerapan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola yang baik dari masing-masing bank, yang pada akhirnya akan menciptakan industri keuangan yang sehat dan kuat di Indonesia.	Dewan Pengawas	Nasional
4.	Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN)	Meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar Surat Utang Negara dan menjadi pionir dalam pengembangan pasar obligasi	Dewan Pengawas	Nasional
5..	Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Merumuskan kebijakan terkait dengan perbankan	Wakil Sekretaris Jenderal	Nasional
6.	Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI)	Bersinergi dengan lembaga penunjang dan profesi jasa penunjang pasar modal lainnya untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan pasar modal. Memupuk kerja sama yang baik diantara para anggota dalam peningkatan pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan layanan Kustodian.	Bendahara	Nasional
7.	Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan	Melakukan update ketentuan terbaru dari Industri Dana Pensiun guna memenuhi kewajiban perundang-undangan dan sebagai sarana menyampaikan masukan ketentuan kepada Regulator.	Bendahara	Nasional
8.	Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	Mewujudkan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia yang berkelanjutan dan bersifat *Industry-Led* dalam aspek *product*, *pricing*, *participant*, dan *infrastructure* sesuai arah pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia.	Bendahara	Nasional
9.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Mengoptimalkan fungsi dan profesionalisme di dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Bendahara	Nasional
10.	Association Cambiste Internationale Financial Market Association (ACI-FMA)	Menjadikan ACI Indonesia sebagai lembaga profesional yang memberikan manfaat bagi industri keuangan Indonesia dan Global, lembaga, individu anggota, dan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan, sosialisasi dan pembentukan Praktik Pasar Pasar Keuangan yang profesional dan bertanggung jawab	Anggota Kehormatan	Nasional
11.	Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)	Sebagai forum untuk membahas isu dan praktek terkait pendalaman dan pengembangan pasar keuangan Indonesia, termasuk dampak dari pasar keuangan internasional	Ad Hoc Repo	Nasional
12.	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Mengetahui Standar Akuntansi terbaru untuk penyusunan Laporan Keuangan BRI	Anggota	Nasional

No.	Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi Keanggotaan	Skala
13.	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern	Meningkatkan fungsi, peranan, mutu, wawasan dan komunikasi pengawasan internal pada lingkungan BUMN, BUMD dan Instansi Pemerintah	Anggota	
14.	Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)	Melakukan pengungkapan *financed emissions*	Anggota	Internasional
15.	United Nations Global Compact (UNGC)	Berkomitmen dalam keberlanjutan serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)	Anggota	Internasional
16.	Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication (SWIFT)	Menggunakan fasilitas SWIFT dalam rangka transaksi lintas negara	Anggota	Internasional
17.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Working Group Anti Pencucian Uang; Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT); Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata; dan Pemusnah Massal Teroris (PPPSPM)	Anggota	Nasional
18.	Public Privat Partnership – INTRACNET PPATK	Forum integrasi kerjasama PPATK, APGAKUM dan Perbankan dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Penipuan skema business email compromise (BEC)	Anggota	Nasional
19.	Compensation & Benefit Club (Comben Club)	Sebagai wadah untuk sharing knowledge dan informasi mengenai remunerasi kepada sesama Bank di Indonesia.	Anggota	Nasional
20.	Industrial Relation (IR) Himbara	Sebagai wadah sharing knowledge dan informasi mengenai kebijakan IR di bank HIMBARA	Anggota	Nasional
21.	Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)	Sebagai forum komunikasi antar lembaga keuangan di Indonesia berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan	Anggota	Nasional

Profil
Direksi



Sunarso

Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tahun 1963.

Usia 60 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1988).
- Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (2002).
- Pendidikan Profesional:
  1. Creative Strategic Thinking for Innovation – Australian Graduates School of Management, University of New South Wales, Sydney Australia (2008).
  2. Market Driving Strategies – London Business School, UK (2009).
  3. Strategic Business Leadership: Engagement, Performance & Execution – University of Chicago – Graduate School of Business, USA (2011).
  4. High Performance Leadership – The IMD – Lausanne, Switzerland (2012).
  5. Leadership, Strategy and Implementation – Kellog School of Management, Northwestern University – Evaston, Illinois – USA (2013).
  6. Decision Making for Leaders – Melbourne University, Australia (2014).
  7. Systemic, Operational, and Infrastucture Risk Management, Universitas Commerciale Luigi Bocconi, Italy and Erasmus University (2016).
  8. Geopolitic Risk Related to Asia, International Risk Management Refreshment Program, National Chengchi University, Taipei Taiwan and IBI and UGM (2018).
  9. Managing Cyber Risk Post Pandemic, Risk Management Refreshment Program, BARa (2020).
  10. International Risk Management Refreshment Program, BARa-MM UGM-IBI (2022).

ACHIEVEMENT

- The Most Influential People in Southeast Asia - Leading Corporate & Commercial Bankers from Alpha Southeast Asia Magazine (2012).
- The Best SME Banker of The Year 2013 in Asia Pacific The Triple A Awards from The Asset Magazine (Hongkong) (2013).
- The Best CEO diberikan oleh Data GovAi Award.
- Most Admired CEO Award 2018 pada kategori Leadership for Digital Transformation of Pawning Business yang diberikan oleh Warta Ekonomi (2018).
- CEO terbaik dan pemimpinperubahan (transformative leader) dalamkategori Tata Kelola Perusahaan dan Pelayanan yang diberikan oleh 7 Sky Media Award 2018.
- The Best CEO Anugerah BUMN Award 2018 kategori Talent Development (2018).
- Indonesia Humane Entrepreneurship Award 2019.
- The Best CEO Talent Development, Anugerah BUMN Award 2020.
- The Best CEO Visioner Perusahaan Tbk, Anugerah BUMN Award 2020.
- The Best CEO & GRC Leader 2020, GRC & Performance Exellence Award 2020.
- CEO InovatifTerbaik, IDX Channel AnugerahInovasi Indonesia 2020.
- The Best CEO, Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2020.
- Best CEO of The Year kategori Sustainable Development Goals Contribution, MetroTV People of The Year 2020.
- The Best CEO in Banking Transformation, CNBC Indonesia Award 2020.
- Top National Banker 2020 (TokohFinansial Indonesia 2020) – Majalah Investor.
- The Best CEO - I News Maker Award 2021 (MNC Televisi Network).
- The Best CEO, Kategori Strategic Orientation Perusahaan (Tbk), 10thAnugerah BUMN 2021.
- The Best CEO perusahaanTbk - 10thAnugerah BUMN 2021.
- Top CEO Award 2021 - Tras n Co.
- The Best CEO - GRC & Performance Excellence Award (2021).
- The Best CEO - Infobank Award 2021.
- The Best CEO CSR of The Year - Nusantara CSR Award 2021 (La Tofi School of CSR).
- The Best CEO In Value Creation - Infobank Top BUMN 2021.
- TokohKeuangan 2021 - Economic Review: Indonesia Finance Award-IV 2021.
- The Most Popular Leader In Social Media 2021 (KategoriPemimpin BUMN Tbk) - PR Indonesia.
- Infobank Bankers of The Year 2021 - Infobank Top 100 CEO 2021.

- Top National Banker 2021 - TokohFinansial Indonesia & BUMN Terbaik 2021 - Majalah Investor, Berita Satu Media Holding.
- Indonesia Most Admired CEO 2021 with Outstanding Leadership in Developing Digital Business Transformation Through Financial Technology - Warta Ekonomi.
- The Best CEO - CNBC Indonesia Award 2021.
- The Best CEO - 11th Anugerah BUMN 2022 (BUMN Track).
- The Best CEO for Corporate Digital Transformation - Digitech Award 2022.
- Business Person of The Year 2021 - Fortune Indonesia 2022.
- The Best 'SME Banker of The Year' 2022 - The Asset Triple A (The Asset Asian Award) Treasury Trade, Sustainable Supply Chain & Risk Management (Singapore, 6th July 2022) from The Asset Magazine (Hongkong).
- Pemenang 'Indonesia DEI & ESG Awards 2022' (KategoriTerpopuler di Media Online 2021) - Humas Indonesia, PR Indonesia Group (5 Agustus 2022).
- TokohPembiayaan dan Pemberdayaan UMKM - Rakyat Merdeka Award 2022 "Untuk Indonesia Pulih dan Bangkit" (28 September 2022).
- Pemimpin/CEO Terpopuler di Media Sosial 2022 untukkategori BUMN Tbk - Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2022, PR Indonesia (28 Oktober 2022).
- Pemimpin/CEO Terpopuler di Media Sosial 2022 untukkategori BUMN Tbk - Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) 2022 (10 November 2022).
- CEO of The Year 2022 - Top 100 CEO MajalahInfobank (23 November 2022).
- The Asian Banker CEO Leadership Achievement for Indonesia Award - Asian Banker Best CEO and Managed Bank Awards 2022.
- The Best Industry Marketing Champion 2022 - Marketeer of the Year Award 2022, MarkPlus, Inc. & Indonesia Marketing Association (8 Desember 2022).
- Best of the Best "Marketeer of The Year 2022" - Marketeer of the Year Award 2022, MarkPlus, Inc. & Indonesia Marketing Association (8 Desember 2022).
- Top State Owned Banker 2022 - TokohFinansial Indonesia Award 2022, Majalah Investor - Berita Satu (9 Desember 2022).
- Leadership Excellence Award - CNBC Indonesia Awards 2022, CNBC Indonesia (12 Desember 2022).
- The Best CEO with Distinction (kategori Company With More Than 1.000 Employees) - Indonesia Best CEO 2022, SWA Media Group & Dunamis Organization Service (1 Maret 2023).
- The Most Admired CEO of State Owned Bank - Indonesia Property & Bank Award 2023, Property & Bank Magazine (20 Maret 2023)
- The Most Reputable Banking CEO in Digital Platform 2023 - 12th Infobank - Isentia Digital Brand 2023, Infobank Magazine (12 April 2023)
- Pemimpin Terpopuler di Media Online 2023 - The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023, PR Indonesia (16 Juni 2023)
- The Best CEO Across All Industries - The 8th Annual SPEx2® DX Award 2023, One GML x Kontan (28 Juni 2023)
- The Best CEO - Asia's Best Companies, FinanceAsia Award 2023 (Hong Kong, 28 Juni 2023)
- Best Performance Chief Executive Officer in Encouraging Corporate Culture Transformation to Maintain Business Growth - CEO Achievement Awards 2023, CEO Business Forum Indonesia & Warta Ekonomi (14 Oktober 2023)
- The Most Committed Chief Executive Officer State-Owned Enterprises in Driving Technological Change - TOP BUMN Awards, Bisnis Indonesia (30 November 2023)
- CEO of the Year - Infobank Top 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023, Majalah Infobank (5 Desember 2023)
- Maestro CEO of The Year - CNBC Indonesia Award 2023, CNBC Indonesia (13 Desember 2023).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7

PENGALAMAN KERJA

- Direktur Comercial & Business Banking Bank Mandiri (2010 – 2015).
- Wakil Direktur Utama BRI (2015 – 2017).
- Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2017 – 2019).
- Wakil Direktur Utama BRI (2019).
- Direktur Utama BRI (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Utama BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 02 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.56/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Maret 2023.

PERIODE MENJABAT

- 2019 - 2023 (Periode Pertama)
- 2023 - 2028 (Periode Kedua)

JABATAN RANGKAP

- Ketua Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2019-sekarang).
- Ketua Risk Management Committee BRI (2019-sekarang).
- Ketua Environmental, Social & Governance (ESG) Committee BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Kebijakan Perkreditan BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Human Capital Bidang Planning & Policy BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Human Capital Bidang Ethics & Discipline 1 BRI (2019-sekarang).
- Ketua Project Management Office Steering Committee BRI (2019-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

3.234.856 lembar



Catur Budi Harto

Wakil Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Demak, pada tahun 1963.

Usia 60 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1986).
- Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya (2002).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Cerfitified Wealth Manager dari The Certified Wealth Managers Association.

PENGALAMAN KERJA

- Senior Executive Vice President (SEVP) BRI (2015-2016).
- Direktur BTN (Persero) Tbk (2016 – 2017).
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan BNI (2017 – 2019).
- Wakil Direktur Utama BRI (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 02 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.57/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.

PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Ketua Pengganti I merangkap anggota tetap Asset and Liability Committee BRI (ALCO) (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti Risk Management Committee BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti Environmental, Social & Governance (ESG) Committee BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti Komite Kebijakan Perkreditan BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap anggota tetap Komite Human Capital Bidang Planning & Policy BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap anggota tetap Komite Human Capital Bidang Ethics & Discipline 1 BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Produk BRI (2019-sekarang).
- Ketua Komite Pengadaan Barang dan Jasa BRI (2019-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.839.057 lembar



Supari

Direktur Bisnis Mikro

Warga negara Indonesia, lahir di Ngawi, pada tahun 1966.

Usia 57 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya (1989).
- Magister Manajemen Agirbisnis, Universitas Gadjah Mada (2005).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PENGALAMAN KERJA

- SEVP UKM Konsumer BRI (2016 – 2017).
- SEVP Manajemen Jaringan BRI (2017).
- SEVP Transformation BRI (2017 – 2018).
- Direktur Bisnis Ritel dan Menengah BRI (2018 – 2019).
- Direktur Bisnis Mikro BRI (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Bisnis Mikro BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: KEP- 34/ KDK.03/2018 tanggal 04 Desember 2018. Kemudian dialihkan penugasannya sebagai Direktur Bisnis Mikro pada RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Bisnis Mikro berdasarkan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Maret 2023.

PERIODE MENJABAT

- 2018 – 2023 (Periode Pertama).
- 2023 - 2028 (Periode Kedua).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2023-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2023-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2023-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2023-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

2.890.914 lembar



Amam Sukriyanto

Direktur Bisnis Kecil & Menengah

Warga negara Indonesia, lahir di Situbondo, pada tahun 1968.

Usia 55 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya (1991).
- Master of Business Administration, the University of Adelaide, Australia (2006).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PENGALAMAN KERJA

- EVP Bisnis Internasional BRI (2018 – 2020).
- EVP Corporate Secretary Division BRI (2020).
- SEVP Fixed Assets Management & Procurement Directorate BRI (2020 – 2021).
- Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI (2021 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: 34/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.

PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2021-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.526.754 lembar



Handayani

Direktur Bisnis Konsumer

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tahun 1965.

Usia 58 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga (1988).
- Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran (2001).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PENGALAMAN KERJA

- Direktur Marketing & Alternate Distribution PT AXA Mandiri (2013 – 2014).
- Direktur Komersial PT Garuda Indonesia Tbk (2014 – 2016).
- Direktur Consumer Banking BTN (2016 – 2017).
- Direktur Konsumer BRI (2017 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Konsumer BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. KEP-44/ D.03/2018 tanggal 14 Maret 2018. Diangkat kembali sebagai Direktur Bisnis Konsumer berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022.

PERIODE MENJABAT

- 2017 – 2022 (Periode pertama).
- 2022 – 2027 (Periode kedua).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2022-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2022-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

3.425.200 lembar



Viviana Dyah Ayu R.K.

Direktur Keuangan

Warga negara Indonesia, lahir di Surakarta, pada tahun 1978.

Usia 45 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2001).
- Master of Business Administration, University of Rochester, USA (2010).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Certified Financial Planner (FPSB).

PENGALAMAN KERJA

- AVP Planning, Corporate Development & Strategy BRI (2016 – 2017).
- AVP Equity Management, Corporate Development & Strategy BRI (2017 – 2018).
- VP Subsidiary Management Desk BRI (2018 – 2019).
- EVP Subsidiary Management Division BRI (2019).
- Direktur Keuangan BRI (2021 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Keuangan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 36/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.

PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Ketua Pengganti II merangkap Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Risk Management Committee BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Environmental, Social & Governance (ESG) Committee BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2021-sekarang).
- Ketua Komite Capital & Investment BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Tata Kelola Data BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2021-sekarang).
- Ketua Komite Human Capital Bidang Job Evaluation BRI (2021-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap Komite Produk BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Pengadaan Barang dan Jasa BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Project Management Office Steering Committee BRI (2021-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.512.800 lembar



Agus Winardono

Direktur Human Capital

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965.

Usia 58 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Krisna Dwipayana (1988).
- Magister Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2001).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Cerfitified Wealth Manager dari The Certified Wealth Managers' Association.
- Qualified Internal Auditor

PENGALAMAN KERJA

- EVP PT Bringin Karya Sejahtera (2016 – 2018).
- Head of Regional Internal Audit BRI (Padang, Lampung, Jakarta 2) (2018 – 2020).
- CEO of PT Prima Karya Sarana Sejahtera (2020).
- Direktur Human Capital BRI (2021 – sekarang)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Human Capital BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 33/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.

PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Risk Management Committee BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bidang Planning & Policy BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Ethics & Discipline BRI (2021-sekarang).
- Ketua Komite Human Capital Bidang Ethics & Discipline 2 BRI (2021-sekarang).
- Ketua Pengganti Komite Human Capital Bidang Job Evaluation BRI (2021-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.503.481 lembar



Andrijanto

Direktur Jaringan & Layanan

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tahun 1974.

Usia 49 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana (Akuntansi), Universitas Airlangga (1998).
- Master (Finance), Indiana University, USA (2012).

SERTIFIKASI

Pendidikan & Uji Kompetensi: Manajemen Risiko Level 5 (BNSP, Jakarta)

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Divisi Corporate Development & Strategy, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021).
- Kepala Divisi Planning, Budgeting & Performance Management, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022).
- Direktur Jaringan dan Layanan BRI (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Jaringan dan Layanan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 1 Maret 2022. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 15/KDK.03/2022 tanggal 22 Juni 2022.

PERIODE MENJABAT

2022 – 2027 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2022-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2022-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi BRI (2022-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap Komite Tata Kelola Data BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2022-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Produk BRI (2022-sekarang).
- Anggota Tetap Project Management Office Steering Committee BRI (2022-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.123.000 lembar



Agus Sudiarto

Direktur Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965.

Usia 58 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1988).
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2004).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PENGALAMAN KERJA

- Group Head Special Asset Management Bank Mandiri (2010 – 2014).
- Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (2014 – 2017).
- SEVP Special Asset Management Bank Mandiri (2017 – 2019).
- Direktur Manajemen Risiko BRI (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.

PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Risk Management Committee BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Environmental, Social & Governance (ESG) Committee BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2019-sekarang).
- Ketua Pengganti merangkap Anggota Tetap Komite Capital & Investment BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi BRI (2019-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2019-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bidang Job Evaluation BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Produk BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Pengadaan Barang dan Jasa BRI (2019-sekarang).
- Anggota Tetap Project Management Office Steering Committee BRI (2019-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.717.400 lembar



Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan

Warga negara Indonesia, lahir di Pandeglang, pada tahun 1964.

Usia 59 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1988).
- Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (1999).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7

PENGALAMAN KERJA

- SEVP Bussiness Small, Medium & Consumer BRI (2016).
- Senior Executive Vice President Jaringan dan Layanan BRI (2016 – 2017).
- Direktur Utama BRI Agro (2017 – 2019).
- Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.

PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2019-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2019-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2019-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

2.071.941 lembar



Arga M. Nugraha

Direktur Digital & Teknologi Informasi

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1980.

Usia 43 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara (2003).
- Master of Science, Carnegie Mellon University, USA (2011).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Certified Trade Specialist For Basic Trade Finance
- CISA Review Course & Certification

PENGALAMAN KERJA

- AVP Cash Management, Transaction Banking Division BRI (2017 – 2018).
- VP E-Banking, Retail Payment Division BRI (2018 – 2020).
- EVP Brilink Network Division BRI (2020 – 2021).
- Direktur Jaringan & Layanan BRI (2021 – 2022).
- Direktur Digital & Teknologi Informasi (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Jaringan & Layanan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 35/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021. Pada RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022 dialihkan tugas menjadi Direktur Digital & Teknologi Informasi.

PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Kredit BRI (2021-sekarang).
- Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi BRI (2021-sekarang).
- Ketua Komite Tata Kelola Data BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2021-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Produk BRI (2021-sekarang).
- Anggota Tetap Project Management Office Steering Committee BRI (2021-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.313.785 lembar



Ahmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Kepatuhan

Warga negara Indonesia, lahir di Malang, pada tahun 1970.

Usia 53 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (1990).
- Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM/Adger Collage University Norway (1999).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PENGALAMAN KERJA

- Wakil Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel BRI (2012 – 2016).
- Kepala Divisi Transaction Banking BRI (2016 – 2017).
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital BRI (2017 – 2018).
- Direktur Kepatuhan BRI (2018 – 2019).
- Direktur Jaringan & Layanan BRI (2019 – 2021).
- Direktur Kepatuhan BRI (2021 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan. Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan BRI berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. SR-94/PB.12/2021 tanggal 1 April 2021. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan RUPS Tahunan pada tanggal 13 Maret 2023.

PERIODE MENJABAT

- 2018 – 2023 (Periode Pertama).
- 2023 – 2028 (Periode Kedua).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Tetap Tanpa Hak Suara Asset and Liability Committee (ALCO) BRI (2018-sekarang).
- Anggota Tetap Risk Management Committee BRI (2018-sekarang).
- Anggota Tetap Environmental, Social & Governance (ESG) Committee BRI (2018-sekarang).
- Anggota Komite Kebijakan Perkreditan BRI (2018-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi BRI (2018-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Tata Kelola Data BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Talent BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Performance Management BRI (2022-sekarang).
- Anggota tetap Komite Human Capital Bidang Ethics & Discipline BRI (2022-sekarang).
- Anggota Tetap Komite Pengadaan Barang dan Jasa BRI (2022-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

3.587.470 lembar

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sunarso	Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Supari	Direktur Bisnis	√		√		√		√		√		√		√	
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil & Menengah	√		√		√		√		√		√		√	
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	√		√		√		√		√		√		√	
Agus Winardono	Direktur Human Capital	√		√		√		√		√		√		√	
Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur Keuangan	√		√		√		√		√		√		√	
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	√		√		√		√		√		√		√	
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	√		√		√		√		√		√		√	
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	√		√		√		√		√		√		√	
Arga M. Nugraha	Direktur Jaringan & Layanan	√		√		√		√		√		√		√	
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	√		√		√		√		√		√		√	

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2023, tidak terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Namun, pada tanggal 13 Maret 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Direksi Perseroan yaitu Sunarso sebagai Direktur Utama, Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan.
2. Mengangkat Sunarso sebagai Direktur Utama, Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro dan Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Sunarso	Direktur Utama	OJK	• RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019 • RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023	20 Desember 2019
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Supari	Direktur Bisnis Mikro	OJK	• RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018 • RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023	4 Desember 2018
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil & Menengah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017	14 Maret 2018
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Agus Winardono	Direktur Human Capital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Andrijanto	Direktur Jaringan & Layanan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	22 Juni 2022
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Arga M. Nugraha	Direktur Digital & Teknologi Informasi	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	OJK	• RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018, diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 • RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023	1 April 2021

Profil
Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tahun 1973.

Usia 50 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (1996).
- Master of Business Administration, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (2001).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PENGALAMAN KERJA

- Direktur Utama Bank Mandiri (2016 – 2019).
- Ketua Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) (2016 – sekarang).
- Anggota APEC Business Advisory Council (ABAC) - Indonesia Member (2017 – sekarang).
- Komisaris Utama Bank Mandiri (2019 – 2020).
- Wakil Ketua Komite Tetap Perbankan Umum BUMN dan BUMD – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2015-2021).
- Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang BUMN – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2021- sekarang).
- Komisaris Utama BRI (2020 – sekarang).
- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Utama BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 46/ KDK.03/2020 tanggal 03 Juli 2020.

PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (2019 – sekarang).
- Komisaris Utama BRI (2020 – sekarang).
- Ketua Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) (2016 – sekarang).
- Anggota APEC Business Advisory Council (ABAC) - Indonesia Member (2017 – sekarang).
- Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang BUMN – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2021- sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 - sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2020 - sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

689.800 lembar



Rofikoh Rokhim

Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Klaten, pada tahun 1971.

Usia 52 tahun Per Desember 2023.

Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1993).
- Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).
- Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris (2000).
- D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2002).
- Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris (2005).
- Pendidikan Profesional:
  - NYU Stern School of Business (2023).
  - Berkeley Executive Education (2023).
  - Kellogg School of Management (2022).
  - Columbia Business School (2022).
  - Institute Management Development (2021).
  - London School of Economics and Political Science (2019) .
  - Chicago Booth School of Business (2019).
  - Said Business School University of Oxford (2018).
  - Stanford Graduate School of Business (2018).
  - Wharton Business School (2018).
  - Harvard Business School (2016).
  - Harvard Kennedy School (2015) .
  - INSEAD (2014).
  - Massachusetts Institute of Technology (2008 - 2009).
  - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (2007).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

PENGALAMAN KERJA

- Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Indonesia (2006 – sekarang).
- Kepala Bisnis Indonesia Intelligence Unit (2008 – 2013).
- Komite Manajemen Risiko dan Audit PT Pos Indonesia (2012-2015).
- Satgas Anti Mafia Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2015).
- Komite Pelayanan dan Kepesertaan serta Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM BPJS TK (2015-2017).
- Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2017).
- Satgas Dana Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2016-2017).
- Komisaris Independen BRI (2017 – 2021).
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI (2021 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017. Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.64 /KDK.03/2021 tanggal 30 November 2021.

PERIODE MENJABAT

- 2017 – 2022 (Periode Pertama).
- 2022 – 2027 (Periode Kedua).

JABATAN RANGKAP

- Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Indonesia (2006 – sekarang).
- Anggota Komite Audit BRI (2017 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2018 – sekarang).
- Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2021 – sekarang).
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2021 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Heri Sunaryadi

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jember, pada tahun 1965.

Usia 58 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1987)
- Pendidikan Profesional : Imperial College Business School (2023), Imperial Business School (2023).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.
- Sertifikasi Dasar Pembiayaan, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI).

PENGALAMAN KERJA

- Direkur utama Bahana sekuritas (2007-2009)
- Direkur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009-2013)
- Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2013 – 2014).
- Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2014 – 2016).
- Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2016 – 2018).
- Dewan Komisaris PT Merdeka Cooper Gold Tbk (2018 – 2021).
- Komisaris Independen BRI (2021 – Sekarang).
- Komisaris Independen Tower Bersama Group (2022-Sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 07 Oktober 2021 berdasarkan hasil keputusan RUPSLB BRI tahun 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. SR-29/PB.12/2022 tanggal 8 Februari 2022.

PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Komisaris Independen – Tower Bersama Group (2022 – sekarang).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2022 – sekarang).
- Anggota Komite Audit BRI (2022 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko (2022 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (2022 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Rabin Indrajad Hattari

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1975.

Usia 48 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi & Matematika, University of Georgia, USA (1996).
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2001).
- Ph.D. in Economics, George Mason University, USA (2008).
- Pendidikan Profesional : Stanford School of Business (2023), Wharton Business School (2023), Harvard Business School (2023).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1

PENGALAMAN KERJA

- Lead Adviser for Australia Indonesia Economic Partnership (2017 - 2018).
- Senior Economist Asian Development Bank (2010 – 2020).
- Staf Khusus V Kementerian BUMN (2020 – 2021).
- Staff Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN (2021-2023).
- Staf Ahli Perencanaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI (2020 - sekarang).
- Komisaris BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Remunerasi dan SDM, Indonesia Investment Agency (INA) (2021 - sekarang).
- Sekretaris Kementerian BUMN (2023 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 54/KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020.

PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Sekretaris Kementerian BUMN (2023 – sekarang).
- Staf Ahli Perencanaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI (2020 - sekarang).
- Anggota Komite Remunerasi dan SDM, Indonesia Investment Agency (INA) (2021 - sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2020 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

620.700 lembar



Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tahun 1957.

Usia 66 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Yogyakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Doktorandus Manajemen, Universitas Islam Indonesia (1984)
- Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada (1986).
- Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (1999)
- Magister Hukum, Universitas Groningen (2008).
- Doctor Hukum, Universitas Gajah Mada (2012).
- Pendidikan Profesional : Harvard Business School (2023).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

PENGALAMAN KERJA

- Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (1988-sekarang).
- Dekan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (2012-2014).
- Head of Asia Pacific Research Center, Universitas Gadjah Mada (2020 - 2022).
- Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Universitas Gadjah Mada (2014 - 2022).
- Komisaris Independen BRI (2022 – Sekarang).
- Komisaris Utama PT Kaltim Methanol Industri (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan Hasil RUPS Tahun 2022. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 28/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

PERIODE MENJABAT

2022 – 2027 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (1988-sekarang).
- Komisaris Utama PT Kaltim Methanol Industri (2022 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2022 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2022 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Hendrikus Ivo

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1958.

Usia 65 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara (1982).
- Magister Manajemen, STIE IPWI (2000).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Kantor Regional 6 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014).
- Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014).
- Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015).
- Deputi Komisioner Penyidikan & APU PPT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016).
- Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017).
- Advisor Senior Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2018).
- Komisaris Independen BRI (2019 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen BRI pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan hasil RUPST BRI Tahun 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK Nokep-41/ KDK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Ketua Komite Audit BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2018 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2018 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tahun 1966.

Usia 57 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Pancasila (1990).
- Alumni Lemhanas-40 (2007).
- Magister of Science, Universitas Gadjah Mada (2012).
- Pendidikan Profesional: Harvard Business School (2023), Northwestern-Kellog Executive Education School of Management (2023).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

PENGALAMAN KERJA

- Pendiri dan Pimpinan Kantor Rialatifa & Partners (1992 – sekarang).
- Anggota DPR RI (2000-2004).
- Anggota DPR RI (2014-2019).
- Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Cairo (2016 – 2020).
- Komisaris Independen BRI (2020 – sekarang).
- Komisaris Utama PT Bersua Utama Indonesia (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 2/ KDK.03/2021 Tanggal 20 Januari 2021.

PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Pendiri dan Pimpinan Kantor Rialatifa & Partners (1992 – sekarang).
- Komisaris Utama PT Bersua Utama Indonesia (2022 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2020 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Nurmaria Sarosa

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965.

Usia 58 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Arsitektur, Institut Teknologi Bandung (1989).
- Pendidikan Profesional: Harvard Business School (2023), Northwestern-Kellog Executive Education School of Management (2023).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

PENGALAMAN KERJA

- Director of Finance and Corporate Affairs, PT Cardig International Support (2017-2020).
- Director of Finance and Corporate Affairs, PT Cardig Express Nusantara (2020-2021).
- Direktur Eksekutif PT Selaras Logistik Indonesia (2021-2022).
- Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 - sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan 2022. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 27/KDK/.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

PERIODE MENJABAT

2022 – 2027 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Nominasi dan Remunerasi BRI (2022 - sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2022 – sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Agus Riswanto

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Delanggu, pada tahun 1962.

Usia 61 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Kristen Satya Wacana University (1986).
- Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (2001).
- Pendidikan Profesional: Imperial Business School (2023).

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Kejaksaan Tinggi, Bangka Belitung (2014-2015).
- Direktur Sandi dan Produksi Intel, Kejaksaan Agung RI (2015-2018).
- Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung RI (2018 - 2022).
- Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Tahun 2022. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 29/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

PERIODE MENJABAT

2022 – 2027 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Anggota Komite Audit BRI (2022 – Sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2022-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Awan Nurmawan Nuh

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1968.

Usia 55 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992).
- Master of Business Taxation, University of Southern California, USA (1997).

SERTIFIKASI

- Chartered Accountant (CA) - 2022.

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (2016).
- Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak (2016 - 2021).
- Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan (2021 - sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas, Ikatan Akuntan Indonesia (2022 - sekarang)
- Komisaris BRI (2023 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Tahun 2023. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. SR-285/PB.02/2023 tanggal 08 Desember 2023.

PERIODE MENJABAT

2023 – 2028 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan (2021 - sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas, Ikatan Akuntan Indonesia (2022 - sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2023-sekarang).
- Anggota Komite Manajemen Risiko BRI (2023-sekarang).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Hadiyanto*

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Ciamis, pada tahun 1962.

Usia 61 tahun Per Desember 2023.
Berdomisili di Jakarta.

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran (1986).
- Master of Law, Harvard University Law School, USA (1993).
- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (2012).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.
- Certificate International Tax Program Harvard University.
- Certificate of Leadership in Challenging World, IMD Business School.
- Certificate of Management Leadership, Wharton Business School.

PENGALAMAN KERJA

- Direktur Jendral Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan (2006 - 2015).
- Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (2007 - 2012).
- Komisaris PT Telkom Tbk (2012 - 2018).
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan (2015 – 2021).
- Ketua Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015 – 2023).
- Ketua Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016 – 2023)
- Komisaris BRI (2018 – 2023).
- Direktur Jendral Perbendaharaan, Kementrian Keuangan (2021 – 2023).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris BRI pada tahun 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan pada tanggal 22 Maret 2018. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 30/KDK.03/2018 tanggal 18 September 2018.

PERIODE MENJABAT

2018 – 2023 (Periode Pertama).

JABATAN RANGKAP

- Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015-2023).
- Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016-2023).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2018-2023).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2021-2023).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2018-2023).

Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.048.700 lembar

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris														
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama		√		√	√			√		√		√		√
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris		√		√	√			√		√		√		√
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Agus Riswanto	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Hadiyanto*	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tanggal 13 Maret 2023

Komposisi Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanan (RUPST) tanggal 13 Maret 2023 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 6 (enam) orang Komisaris Independen dan dua orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	3 Juli 2020
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021	30 November 2021
Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	08 Desember 2023
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	27 Juli 2020
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	20 Januari 2021
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019	29 Agustus 2019
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021	8 Februari 2022
Agus Riswanto	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	8 Agustus 2022
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	8 Agustus 2022
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	8 Agustus 2022

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tanggal 13 Maret 2023

Pada tanggal 13 Maret 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Hadiyanto sebagai Komisaris Perseroan:
2. Mengangkat Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris Perseroan

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 6 (enam) orang Komisaris Independen dan dua orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	3 Juli 2020
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021	30 November 2021
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023	18 September 2018
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	27 Juli 2020
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	20 Januari 2021
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019	29 Agustus 2019
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021	8 Februari 2022
Agus Riswanto	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	8 Agustus 2022
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	8 Agustus 2022
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 1 Maret 2022	8 Agustus 2022

Profil
Pejabat Eksekutif

Senior Executive Vice President (SEVP)



Triswahju Herlina

SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Warga negara Indonesia, lahir di Madiun pada tahun 1968. Usia 55 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Malang.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang (1990).
- Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005).

PENGALAMAN KERJA

- Vice President Regional Office Malang (2012 –2016).
- Vice President Regional Office Yogyakarta (2016 –2018).
- Executive Vice President Divisi Medium Business (2018 – 2019).
- Executive Vice President Divisi Agribusiness (Agustus 2019 - Oktober 2019).
- Executive Vice President Regional CEO BRI Surabaya (2019 - 2022).
- SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Keputusan Direksi No.339-DIR/HCB/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan persetujuan Dewan Komisaris No. R.07-KOM/01/2022 tanggal 25 Januari 2022.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai tanggal 2022 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

686.500 lembar saham



Achmad Royadi

SEVP Treasury & Global Services

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1975. Usia 48 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Padjajaran (1998).
- MBA in Finance, Tulane University USA (2009).

PENGALAMAN KERJA

- Senior Manager Derivatives & Product Development Bidang Global Market Kantor Pusat (2014 – 2016).
- Senior Manager Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat (2016 – 2017).
- Vice President Divisi Bidang Strategy & Business Development Divisi Corporate Development & Strategy Kantor Pusat (2017 – 2019).
- Senior Vice President Divisi Investor Relation Direktorat Strategi & Keuangan Kantor Pusat (2019 – 2021).
- SEVP Treasury & Global Services (2021 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK NOKEP: 410 – DIR/HCB/07/2021 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Treasury & Global Services tanggal 26 Juli 2021.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

928.072 lembar saham



Harsya Wardhana Prasetyo

SEVP Change Management & Transformation Office

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1978. Usia 45 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Bachelor of Eng (Hons), The University of Melbourne (2001).
- Bachelor of Commerce, The University of Melbourne (2001).
- Master of Business Administration, Melbourne Business School, The University of Melbourne (2005).
- CFA (2008).

PENGALAMAN KERJA

- Management Associate to Senior Assistant Manager, Citibank (2001-2004).
- Manager to Director - Retail Investment and Consumer Treasury, Citibank (2005-2013).
- Lecturer Postgraduate Program - International Finance, BINUS Business School (2011-2013).
- Head of Sales and Marketing, PT First State Investments (2013-2014).
- Associate Partner, PT McKinsey Indonesia (2014-2016).
- Director - Retail and Digital Bank Head, Citibank (2016-2019).
- Head of Supervisory Board Dana Pensiun Citibank Indonesia (2017-2019).
- Senior Advisor, PT McKinsey Indonesia (2019-2021).
- Partner, PT McKinsey Indonesia (2021-2022).
- SEVP Change Management & Transformation Office (2022 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Perjanjian Kerja Nomor B.446-HCD/HDR/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai tahun 2022 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

744.500 lembar saham



Muhammad Candra Utama

SEVP Ultra Micro

Warga negara Indonesia, lahir di Palembang pada tahun 1972. Usia 51 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Agribisnis, Universitas Sriwijaya (1995).

PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Cabang Kanca BRI Bitung Kanwil Manado (2010-2011).
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Ubud Kanwil Denpasar (2012-2013)
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Bumi Serpong Damai Kanwil Jakarta 3 (2013-2014).
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Jakarta Krekot Kanwil Jakarta 1 (2014-2015).
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Jakarta Kebayoran Baru Kanwil Jakarta 2 (2015-2017).
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran (2017).
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis, Regional Office Jakarta 1 (2017-2019).
- PJ. Kepala Divisi Kredit Briguna Kantor Pusat (2019-2020).
- Kepala Divisi Institution 1 Kantor Pusat (2020).
- Executive Vice President Divisi Institutional Business Kantor Pusat (2020-2022).
- Division Head Institutional Business Kantor Pusat (2022-2023).
- SEVP Ultra Micro (2023 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: 1612 – DIR/HCB/08/2023 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Ultra Micro tanggal 1 Agustus 2023.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai 01 Agustus 2023 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

1.263.128 lembar saham



Aestika Oryza Gunarto

SEVP Fixed Assets Management & Procurement

Warga negara Indonesia, lahir di Kendal pada tahun 1970. Usia 53 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Sleman.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Atma Jaya (1994).
- Magister Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran (2006).

PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Cabang Kanca BRI Sorong Kanwil Makassar (2008-2010).
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Prabumulih Kanwil Palembang (2010-2011)
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Balaraja Kanwil Jakarta 3 (Januari 2012-Desember 2012).
- Pemimpin Cabang Kanca BRI Jakarta Mangga Dua Kanwil Jakarta 1 (2013-2014).
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Jatinegara (2014-2015).
- PJ. Kepala Biro Direksi Divisi Corporate Secretary Kantor Pusat (2015-2016).
- Wakil Kepala Divisi Corporate Secretary Kantor Pusat (2016-2019).
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis, Regional Office Makassar (2019).
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis, Regional Office Semarang (2019-2020).
- PJ. Executive Vice President Divisi Corporate Secretary Kantor Pusat (2020).
- Executive Vice President Divisi Corporate Secretary Kantor Pusat (2020-2023).
- SEVP Fixed Assets Management & Procurement (2023 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: 1611 – DIR/HCB/08/2023 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Fixed Assets Management & Procurement tanggal 1 Agustus 2023.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai 01 Agustus 2023 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

128.100 lembar saham



I Nyoman Sugiri Yasa

SEVP Operations

Warga negara Indonesia, lahir di Bali pada tahun 1977. Usia 46 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Matematika, Institut Pertanian Bogor (2000).
- MBA, University Of Rochester, USA (2010).

PENGALAMAN KERJA

- PJ. Group Head Divisi Perencanaan & Pengembangan TI Kantor Pusat (2012-2013).
- Group Head Divisi Perencanaan & Pengembangan TI Kantor Pusat (2013-2015).
- PJ. Wakil Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan TI Kantor Pusat (2015-2016).
- Wakil Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan TI Kantor Pusat (2016-2018).
- PJ. Kepala Divisi Kerjasama Teknologi Kantor Pusat (2018-2019).
- Kepala Divisi Kerjasama Teknologi Kantor Pusat (2019).
- Kepala Divisi Application Management & Operation Kantor Pusat (2019-2020).
- Executive Vice President Application Management & Operation Kantor Pusat (2020-2023)
- SEVP Operations (2023 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: 1610 – DIR/HCB/08/2023 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Operations tanggal 1 Agustus 2023.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai 01 Agustus 2023 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

803.684 lembar saham



Steven Augustino Yudiyantho

SEVP Human Capital Strategy

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1973. Usia 50 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996)
- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi (2001).

PENGALAMAN KERJA

- Organization Capability Manager Indonesia Procter & Gamble (1999 – 2002)
- Sales Consultant AchieveGlobal (2002 – 2004)
- Indonesia - Client Professional Resources Dunamis Organization Services (2004 – 2006)
- Group Learning Head PT Bank Danamon Indonesia (2006 – 2009)
- Head of Learning & Development Barclays Bank (2009 – 2010)
- Head of Organization and People Development Bank Permata (2010 – 2013)
- Director of Learning Danone (2013 – 2016)
- Director of Organizational Development Danone (2016 – 2017)
- HR BP Director Danone Aqua (2017 – 2018)
- Chief Learning Officer BUMN Leadership & Management Institute (2021 – 2023)
- Chief Learning Officer Mandiri University (2019 – 2021)
- Senior VP Human Capital Strategy & Talent Management Bank Mandiri (2018 – 2023)
- SEVP Human Capital Strategy (2023 – sekarang).

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Perjanjian Kerja No. B.1538-HCD/HDR/11/2023, tanggal 20 November 2023.

PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai 01 Desember 2023 – SK Perubahan berikutnya.

KEPEMILIKAN SAHAM

28.500 lembar saham

Eselon 1 dan Unit Kerja BRI

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Division Head	
Agustya Hendy Bernadi	Divisi Corporate Secretary
Mochamad Choliq	Divisi Institutional Business
Teguh Tofani	Divisi Energy & Mining
Iman Nuraprianto	Divisi Infrastructure, Transportation, Oil & Gas
Novita Svetyana Hasanudin	Divisi Transaction Banking
Trihartono	Divisi Syndication & FI Non Bank
Woro Dwi Wuryandari	Divisi Internasional Business
Arie Sus Miyanti	Divisi Investment Services
Itang Rusdinar	Divisi Treasury Business
Nurul Intan	Divisi Agribusiness
Adhi Pratama	Divisi Manufacturing & Property
Natalia Veronica	Divisi Value Chain & Assets Product Development
Dani Alfianto	Divisi Small & Medium Sales Management 1
Ganang Imam W.	Divisi Small & Medium Sales Management 2

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Dewi Andjarsari	Divisi Card, Digital & Assets Product Development
Martua Hanry K Panggabean	Divisi Wealth Management
Ninis Indriswari	Divisi Consumer Sales Management 1
R.Madya Januar	Divisi Consumer Sales Management 2
Ardhi Setyarko	Divisi Micro Business Development
Fita Arisanti	Divisi Micro Sales Management
Evi Sulistyowati	Divisi Social Entrepreneurship & Incubation
Dani Wildan	Divisi Ultra Micro Business
Windriyo Aribowo	Divisi BRILink Business
Ivan Amirudin	Divisi Distribution Network
Berlian Ferra Herawati	Divisi Service & Contact Center
Andreas Hassim	Divisi Funding & Retail Payment Strategy
Dhoni Ramadi Saharto Putra	Divisi Funding & Retail Payment Sales Management
Shinta Indriyaty	Divisi IT Strategy & Governance

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Revan Hadi	Divisi Application Management & Operation
Kaspar Situmorang	Divisi Digital Banking Development & Operation
Maulana Yusuf	Divisi Enterprise Data Management
Yusron Avivi	Divisi IT Infrastructure & Operation
Muharto	Divisi Information Security
Andini Nauli Nasution	Divisi Payment Operation
Asep Nurdin	Divisi Credit Operation
Ety Yuniarti	Divisi Market, Portfolio & Enterprise Risk
Nugroho Ari Bawono	Divisi Credit & Product Risk Policy
Dodo Marjanto	Divisi Operational Risk
Nugroho Pancayogo	Divisi Digital Risk
Harry Gusti Utama	Divisi Wholesales Credit Risk Analyst
Vacant	Divisi Credit Restructuring & Recovery
Carang Thombara Putra	Divisi Human Capital Strategy & Policy
Issuhersatyo	Divisi Human Capital Development
M. Dadang Permana KF	Divisi Human Capital Business Partner
Vacant	BRI Corporate University
A. Eddy Tri Wibowo	Divisi Planning, Budgeting & Performance Management
Yulianto Setiawan	Divisi Financial & Management Accounting
Vacant	Divisi Investor Relation
Sahat Pangabahan Pangaribuan	Divisi Subsidiary Management
Indah Bayuwijayanti	Divisi Project Management Office
Vacant	Divisi Change Management
Abd. Wahid Wijaya	Divisi Culture Transformation
Kris Hananto	Divisi Compliance
Koes Hariyono	Divisi Legal
Kusnandar Nurgraha	Divisi Policy & Procedure
Yosephine Ajeng Sekar Putih	Divisi Environmental, Social & Governance
Sukengsi Hari Slamet	Divisi Fixed Assets Management & Procurement Policy
Syafri Rakhmat	Divisi Procurement & Logistic Operation
Roma Jaka Permata Simanjuntak	Divisi Marketing Communication
Bangkit Ngabdianto	Divisi Audit Standard & Quality Development
Donny Permana	Head Office Audit
Nurcholishiana Choirunnisa	Desk Asset & Liabilities Management
Gibbon Mardame Parsaoran Tamba	Desk Operational Excellence
Heddi Sabara	Special Investigation Audit

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
***Regional* CEO**	
Bernadi Kurniawan	Regional Office Bandar Lampung
Sadmiadi	Regional Office Bandung
Novian Supriatno	Regional Office Banjarmasin
Recky Plangiten	Regional Office Denpasar
Yodi Herzaman	Regional Office Jakarta 1
Suyitno	Regional Office Jakarta 2
Nazaruddin	Regional Office Jakarta 3
Hery Noercahya	Regional Office Jayapura
Hendra Winata	Regional Office Makassar
Mochammad Suratin	Regional Office Malang
Luthfi Iskandar	Regional Office Manado
Aris Hartanto	Regional Office Medan
Moh.Harsono	Regional Office Padang
Kusdinar Wiraputra	Regional Office Palembang
Kicky Andrie Davetra	Regional Office Pekanbaru
Hari Basuki	Regional Office Semarang
Setiyarta	Regional Office Surabaya
John Sarjono	Regional Office Yogyakarta
Arief Wibowo	Kantor Cabang Khusus

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Regional Chief Audit	
Gito Wardoyo	Regional Audit Office Bandar Lampung
Arie Wibowo	Regional Audit Office Bandung
Narto Laksono	Regional Audit Office Banjarmasin
Roland Hutagalung	Regional Audit Office Denpasar
Djoko Purwanto	Regional Audit Office Jakarta 1
Mohamad Fikri Satriawan	Regional Audit Office Jakarta 2
Agus Firmansyah	Regional Audit Office Jakarta 3
Yudi Amiarno	Regional Audit Office Jayapura
Wahju Hidajat	Regional Audit Office Makassar
Rustam Maulana	Regional Audit Office Malang
Isman Ardiana	Regional Audit Office Manado
Zainuddin Thalib Burutu	Regional Audit Office Medan
Dhewayani Widyasari	Regional Audit Office Padang
Edi Setiawan	Regional Audit Office Palembang
Emiliana Ririn Purworini	Regional Audit Office Pekanbaru
Dewi Hestiningrum S	Regional Audit Office Semarang
Fajar Prasetyo	Regional Audit Office Surabaya
Endah Nurhayati	Regional Audit Office Yogyakarta

Profil Pekerja

Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2023	2022
Wanita	30.477	28.324
Pria	47.262	46.411
Jumlah	**77.739**	**74.735**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Senior Executive Vice President	1	6	7	1	3	4
Executive Vice President	6	26	32	5	30	35
Senior Vice President	20	58	78	16	54	70
Vice President	31	148	179	27	156	183
Assistant Vice President	322	1.090	1.412	292	1.004	1.296
Senior Manager	744	2013	2757	753	2.066	2.819
Manager	994	3.516	4.510	893	3.359	4.252
Junior Manager	5.434	10.586	16.020	4.504	9.288	13.792
Associates	22.925	29.819	52.744	21.833	30.451	52.284
Jumlah	**30.477**	**47.262**	**77.739**	**28.324**	**46.411**	**74.735**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
20 – 24	3.340	1.465	4.805	113	120	233
25 – 29	7.120	6.879	13.999	4.644	4.455	9.099
30 – 34	7.139	14.616	21.755	9.499	15.923	25.422
35 – 39	6.926	13.571	20.497	7.631	14.272	21.903

Rentang Usia	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
40 – 44	2.849	5.472	8.321	2.942	5.636	8.578
45 – 49	1.362	2.677	4.039	1.414	2.784	4.198
50 – 54	1.414	2.031	3.445	1.453	2.106	3.559
> 54	327	551	878	628	1.115	1.743
Jumlah	**30.477**	**47.262**	**77.739**	**28.324**	**46.411**	**74.735**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
≤ SLTA / Setingkat	640	509	1.149	441	605	1.889
Diploma	4.026	4.701	8.727	3.935	5.026	11.106
Strata 1	25.334	40.745	66.079	23.523	39.615	75.001
Strata 2	477	1.297	1.774	425	1.159	1.679
Strata 3	-	10	10	-	6	6
Jumlah	**30.477**	**47.262**	**77.739**	**28.324**	**46.411**	**74.735**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Pekerja Tetap	20.209	39.875	60.084	19.913	40.296	60.209
Pekerja Kontrak	10.072	7.135	17.207	8.326	6.021	14.347
Trainee	196	252	448	85	94	179
Jumlah	**30.477**	**47.262**	**77.739**	**28.324**	**46.411**	**74.735**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Generasi

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Generasi

(dalam satuan orang)

Generasi	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Baby Boomers	1	7	8	34	56	90
Gen X	4.306	7.370	11.676	5.779	10.309	16.088
Millennials	19.222	35.729	54.951	20.477	34.413	54.890
Gen Z	6.948	4.156	11.104	2.034	1.633	3.667
Jumlah	30.477	47.262	77.739	**28.324**	**46.411**	**74.735**

Jumlah Pekerja Berdasarkan Masa Kerja

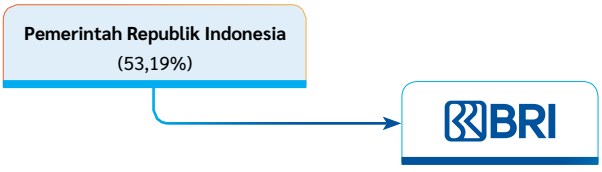
Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2023			2022		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
< 3	11.862	10.312	22.174	8.006	8.133	16.139
3 – 5	4.060	6.398	10.458	5.226	7.009	12.235
6 – 10	7.988	18.633	26.621	8.516	19.643	28.159
11 – 15	1.340	3.721	5.061	925	2.700	3.625
16 – 20	2.284	3.621	5.905	2.626	4.157	6.783
21 – 25	957	1.785	2.742	999	1.959	2.958
26 – 30	1.192	1.923	3.115	1.053	1.571	2.624
> 30	869	794	1.663	973	1.239	2.212
Jumlah	30.477	47.262	77.739	**28.324**	**46.411**	**74.735**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui porsi kepemilikan sebesar 53,19% saham Seri A Dwiwarna. Dengan demikian, tidak terdapat pemegang saham pengendali individu baik langsung maupun tidak langsung.



Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRI Per 1 Januari 2023

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara RI	1	80.610.976.876	53,19%
Publik	343.335	70.948.024.728	46,81%
Pemodal Nasional	340.822	16.788.947.722	11,08%
Perorangan	334.173	2.957.104.958	1,95%
Pekerja	5.677	17.554.870	0,01%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Bank	5	574.143.452	0,38%
Koperasi	15	5.499.904.523	3,63%
Yayasan	36	310.006.083	0,20%
Dana Pensiun	134	1.639.299.706	1,08%
Asuransi	172	2.984.495.074	1,97%
Perseroan Terbatas	276	178.668.823	0,12%
Reksa Dana	332	2.626.166.733	1,73%
Lembaga Pemerintah	1	13.500	0,00%
Pemodal Asing	2.513	54.159.077.006	35,73%
Perorangan	276	38.136.330	0,03%
Badan Usaha Asing	2.237	54.120.940.676	35,71%
Total	**343.336**	**151.559.001.604**	**100%**

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRI Per 31 Desember 2023

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara RI	1	80.610.976.876	53,19%
Publik	331.957	70.948.024.728	46,81%
Pemodal Nasional	329.185	15.538.643.828	10,25%
Perorangan	322.718	2.798.628.116	1,85%
Pekerja	5.448	17.283.092	0,01%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Bank	8	838.354.851	0,55%
Koperasi	16	5.503.290.123	3,63%
Yayasan	42	264.200.118	0,17%
Dana Pensiun	139	1.828.768.004	1,21%
Asuransi	185	2.143.287.956	1,41%
Perseroan Terbatas	312	152.925.873	0,10%
Reksa Dana	316	1.990.315.695	1,31%

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Lembaga Pemerintah	0	0	0,00%
Pemodal Asing	2.772	55.409.380.900	36,56%
Perorangan	369	38.489.189	0,03%
Badan Usaha Asing	2.403	55.370.891.711	36,53%
Total	**331.958**	**151.559.001.604**	**100%**

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BRI Per 1 Januari 2023

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Negara Republik Indonesia	80.610.976.876	53,19%
2.	INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY	Koperasi	5.498.021.834	3,63%
3.	CITIBANK SINGAPORE S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	Badan Usaha Asing	1.926.254.135	1,27%
4.	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	1.146.412.800	0,76%
5.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	925.531.660	0,61%
6.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	919.373.647	0,61%
7.	JPMSE AMS RE AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	Badan Usaha Asing	915.458.290	0,60%
8.	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OP	Badan Usaha Asing	744.588.939	0,49%
9.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Dana Pensiun	715.513.114	0,47%
10.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Badan Usaha Asing	584.652.995	0,39%
11.	BNYMSANV RE BNYM RE PEOPLE'S BANK OF CHINA-2039845393	Badan Usaha Asing	573.267.855	0,38%
12.	JPMCB NA RE-JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	545.403.771	0,36%
13.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	499.690.492	0,33%
14.	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	493.401.169	0,33%
15.	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	Badan Usaha Asing	492.113.500	0,32%
16.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 1	Badan Usaha Asing	481.357.646	0,32%
17.	JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A INVESTMENT FDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	Badan Usaha Asing	477.243.527	0,31%
18.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFDBOARD-2039927326	Badan Usaha Asing	464.428.883	0,31%
19.	PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DYNAMIC EQUITY MONEY RUPIAH	Asuransi	438.347.040	0,29%
20.	JPMCB NA RE-VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL S	Badan Usaha Asing	415.683.909	0,27%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BRI Per 31 Desember 2023

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Negara Republik Indonesia	80.610.976.876	53,19%
2.	INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY	Koperasi	5.498.021.834	3,63%

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
3.	CITIBANK SINGAPORE S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	Badan Usaha Asing	2.407.129.136	1,59%
4.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	Badan Usaha Asing	1.023.446.958	0,68%
5.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	954.975.447	0,63%
6.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	948.514.960	0,63%
7.	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	937.262.700	0,62%
8.	JPMSE AMS RE AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	Badan Usaha Asing	777.845.432	0,51%
9.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Dana Pensiun	722.513.114	0,48%
10.	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND	Badan Usaha Asing	623.075.239	0,41%
11.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Badan Usaha Asing	623.014.195	0,41%
12.	BNYMSANV RE BNYM RE PEOPLE'S BANK OF CHINA	Badan Usaha Asing	580.034.955	0,38%
13.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 1	Badan Usaha Asing	504.559.046	0,33%
14.	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	Badan Usaha Asing	497.384.200	0,33%
15.	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	494.963.577	0,33%
16.	JP MORGAN SECURITIES PLC	Badan Usaha Asing	468.248.893	0,31%
17.	JPMCB NA RE-VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET IT II	Badan Usaha Asing	455.954.209	0,30%
18.	JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A INVESTMENT FDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	Badan Usaha Asing	441.871.732	0,29%
19.	JPMCB NA RE-JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	408.730.371	0,27%
20.	BNYM RE BNYMLB RE BA GIFF POSITIVE CH FD-2039926720	Badan Usaha Asing	391.488.358	0,26%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih BRI Per 1 Januari 2023

Nama Investor	Jumlah Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara Republik Indonesia	1	80.610.976.876	53,19%

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih BRI Per 31 Desember 2023

Nama Investor	Jumlah Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara Republik Indonesia	1	80.610.976.876	53,19%

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% BRI Per 1 Januari 2023

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Pemodal Nasional			
Perorangan	334.173	2.957.104.958	1,95%
Pekerja	5.677	17.554.870	0,01%

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Bank	5	574.143.452	0,38%
Koperasi	15	5.499.904.523	3,63%
Yayasan	36	310.006.083	0,20%
Dana Pensiun	134	1.639.299.706	1,08%
Asuransi	172	2.984.495.074	1,97%
Perseroan Terbatas	276	178.668.823	0,12%
Reksa Dana	332	2.626.166.733	1,73%
Lembaga Pemerintah	1	13.500	0,00%
Sub Total	340.822	16.788.947.722	11,08%
Pemodal Asing			
Perorangan	276	38.136.330	0,03%
Badan Usaha Asing	2.237	54.120.940.676	35,71%
Sub Total	2.513	54.159.077.006	35,73%
Total	**343.335**	**70.948.024.728**	**46,81%**

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% BRI Per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Pemodal Nasional			
Perorangan	322.718	2.798.628.116	1,85%
Pekerja	5.448	17.283.092	0,01%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Bank	8	838.354.851	0,55%
Koperasi	16	5.503.290.123	3,63%
Yayasan	42	264.200.118	0,17%
Dana Pensiun	139	1.828.768.004	1,21%
Asuransi	185	2.143.287.956	1,41%
Perseroan Terbatas	312	152.925.873	0,10%
Reksa Dana	316	1.990.315.695	1,31%
Lembaga Pemerintah	0	0	0,00%
Sub Total	329.185	15.538.643.828	10,25%
Pemodal Asing			
Perorangan	369	38.489.189	0,03%
Badan Usaha Asing	2.403	55.370.891.711	36,53%
Sub Total	2.772	55.409.380.900	36,56%
Total	331.957	70.948.024.728	46,81%

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BRI Per 1 Januari 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Direksi			
Sunarso	Direktur Utama	2.398.156	0,00158%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	1.344.957	0,00089%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	2.423.114	0,00160%
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	1.010.154	0,00067%
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	2.958.600	0,00195%
Agus Winardono	Direktur Human Capital	982.681	0,00065%
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	996.200	0,00066%
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	734.200	0,00048%
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	1.250.800	0,00083%
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	1.401.041	0,00092%
Arga M. Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	847.185	0,00056%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	3.120.870	0,00206%
Dewan Komisaris			
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	442.800	0,00029%
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	-	0,00000%
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	-	0,00000%
Rabbin Indrajad Hattari	Komisaris	398.400	0,00026%
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	-	0,00000%
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	0,00000%
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	-	0,00000%
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	0,00000%
Agus Riswanto	Komisaris Independen	-	0,00000%
Hadiyanto*	Komisaris	1.048.700	0,00069%

* Berhenti menjabat sejak 13 Maret 2023

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BRI Per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Direksi			
Sunarso	Direktur Utama	3.234.856	0,00213%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	1.839.057	0,00121%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	2.890.914	0,00191%
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	1.526.754	0,00101%
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	3.425.200	0,00226%
Agus Winardono	Direktur Human Capital	1.503.481	0,00099%
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	1.512.800	0,00100%
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	1.123.000	0,00074%

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	1.717.400	0,00113%
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	2.071.941	0,00137%
Arga M. Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	1.313.785	0,00087%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	3.587.470	0,00237%
Dewan Komisaris			
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	689.800	0,00046%
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	-	-
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	-	-
Rabbin Indrajad Hattari	Komisaris	620.700	,00041%
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	-	-
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-
Agus Riswanto	Komisaris Independen	-	-
Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	-	-

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris dan Direksi BRI tidak memiliki kepemilikan saham tidak langsung.

Kepemilikan Saham Senior Manajemen

Tabel Kepemilikan Saham Senior Manajemen Per 31 Desember 2023

Nama	Jumlah Lembar Saham	Persentase (%)
Harsya Wardhana Prasetyo	744.500	0,0004912
Aestika Oryza Gunarto	128.100	0,0000845
Achmad Royadi	928.072	0,0006124
Triswahju Herlina	686.500	0,000453
Muhammad Candra Utama	1.263.128	0,0008334
I Nyoman Sugiri Yasa	803.684	0,0005303
Steven Augustino Y	28.500	0,0000188

Sampai dengan 31 Desember 2023, Senior Manajemen BRI tidak memiliki kepemilikan saham tidak langsung.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham BRI Per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Institusi Lokal	1.020	93.333.709.496	61,58%
Institusi Asing	2.403	55.370.891.711	36,53%
Individu Lokal	328.166	2.815.911.208	1,86%
Individu Asing	369	38.489.189	0,03%
Total	**331.958**	**151.559.001.604**	**100,00%**

Daftar Perusahaan Anak, Entitas Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama

Perusahaan Anak

Nama Perusahaan	**PT Bank Raya Indonesia Tbk (Raya)***	
Bidang Usaha	Bank Umum Swasta Nasional	
Tanggal Penyertaan BRI	3 Maret 2011	
Jumlah Aset	Rp12.492.372 juta	
Kepemilikan (%)	86,85%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	27 September 1989/Masih Beroperasi	
Alamat	Menara BRIliaN, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177A, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Telp : (021) 50931300 Faks : (021) 50931494 Email : humas@bankraya.co.id Web : www.bankraya.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	M. Sidik Heruwibowo	Komisaris Utama
	Eko B. Supriyanto	Komisaris Independen
	Johanes Kuntjoro Adi S.**	Komisaris Independen
	Retno Wahyuni Wijayanti	Komisaris Independen
	Achmad F.C. Barir	Komisaris
	Direksi	
	Ida Bagus Ketut Subagia	Direktur Utama
	Bhimo Wikan Hantoro	Direktur
	Rustarti Suri Pertiwi	Direktur
	Danar Widyantoro	Direktur
	Dedy Hendrianto	Direktur

* Sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)
** Menunggu *Fit & Proper*

Nama Perusahaan	**BRI Global Financial Services Co. Ltd. (BRI Global Financial Services)***	
Bidang Usaha	Perusahaan Remittance	
Tanggal Penyertaan BRI	16 Desember 2011	
Jumlah Aset	Rp24.232 juta	
Kepemilikan (%)	100,00%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	7 April 2005/Masih Beroperasi	
Alamat	Park Avenue Tower, Floor 12, Unit 12B, 5 Moreton Terrace, Causeway Bay, Hongkong Telp : (852) 35902875, (852) 34622810, (852) 34622684 WA Call Center (official) (852) 5185 6683 Faks : - Email : info@brchk.com, brc.support@brchk.com Web : www.brchk.com	
Pengurus Perusahaan	Manajemen Eksekutif	
	Wisnu Rimba Pratama	Non-Executive Director
	Dimas Hendrasaputra	Executive Director

*Per tanggal 30 Okotber 2023, BRI Remittance Co. Ltd. berubah nama menjadi BRI Global Financial Services

Nama Perusahaan	**PT Asuransi BRI Life (BRI Life)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Asuransi Jiwa	
Tanggal Penyertaan BRI	29 Desember 2015	
Jumlah Aset	Rp23.678.043 juta	
Kepemilikan (%)	54,77%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	28 Oktober 1987/Masih Beroperasi	
Alamat	Graha Irama Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Telp : (021) 526-1260, 526-1261 Faks : - Email : cs@brilife.co.id Web : www.brilife.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Muhammad Syafri Rozi	Komisaris Utama
	Lau Soon Liang*	Komisaris
	Hari Siaga Amijarso	Komisaris Independen
	Ubaidillah Nugraha	Komisaris Independen
	Eko Wahyudi	Komisaris Independen
	Direksi	
	I Dewa Gede Agung	Direktur
	Yosie William Iroth	Direktur
	Sutadi	Direktur
	Lim Chet Ming	Direktur
	Dewan Pengawas	
	KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua
	M Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS	Anggota
	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota

* Menunggu *Fit & Proper*

Nama Perusahaan	**PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Pembiayaan	
Tanggal Penyertaan BRI	7 Desember 1983	
Jumlah Aset	Rp9.057.071 juta	
Kepemilikan (%)	99,88%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	7 Desember 1983/Masih Beroperasi	
Alamat	Menara BRILiaN Lantai 1, 21 dan 22 Jl. Gatot Subroto No. 177A Kav. 64, Menteng, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Telp : (021) 574 5333 Faks : - Email : - Web : www.brifinance.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Sigit Murtiyoso	Komisaris Utama
	Dhoni Ramadi	Komisaris
	Diah Defawati Ande *	Komisaris Independen
	Direksi	
	Wahyudi Darmawan*	Direktur Utama
	Primartono Gunawan	Direktur
	Ari Prayuwana	Direktur
	Willy Halim Sugiarda	Direktur

* Menunggu *Fit & Proper*

Nama Perusahaan	**PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI DS)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	
Tanggal Penyertaan BRI	21 Desember 2018	
Jumlah Aset	Rp1.059.172 juta	
Kepemilikan (%)	67,00%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	1 Juli 1992/Masih Beroperasi	
Alamat	Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp : (021) 50914100, (021) 1500688 Faks : - Email : callcenter@bridanareksasekuritas.co.id Web : www.BRIDanareksasekuritas.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Achmad Royadi	Komisaris
	R. Muhammad Irwan	Komisaris Independen
	Donsuwan Simatupang	Komisaris Independen
	Direksi	
	Laksono Widito	Direktur Utama
	Fifi Virgantria	Direktur
	Hendra Hermawan	Direktur
	Kevin Praharyawan	Direktur

Nama Perusahaan	**PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Modal Ventura	
Tanggal Penyertaan BRI	20 Desember 2018	
Jumlah Aset	Rp2.672.050 juta	
Kepemilikan (%)	99,97%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	22 Januari 1998/Masih Beroperasi	
Alamat	District 8 Office, Prosperity Tower Lt. 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190 Telp : (021) 5092 8500 Faks : - Email : - Web : www.briventures.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Ety Yuniarti	Komisaris Utama
	Henri*	Komisaris Independen
	Agoosh Yoosran	Komisaris Independen
	Direksi	
	Nicko Widjaja	Direktur Utama
	Indra Bayu Gunawan	Direktur
	Markus Liman Rahardja	Direktur

* Menunggu Fit & Proper

Nama Perusahaan	**PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Asuransi Umum	
Tanggal Penyertaan BRI	26 September 2019	
Jumlah Aset	Rp6.465.609 juta	
Kepemilikan (%)	90,00%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	17 April 1989/Masih Beroperasi	
Alamat	Graha BRI Insurance Jl. Mampang Prapatan Raya No. 18 Jakarta Selatan 12790 Telp : (021) 791 70477/78 Faks : - Email : info@work.brins.co.id Web : www.brins.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Kris Hananto	Komisaris Utama
	Ayahanita K	Komisaris Independen
	Direksi	
	Rahmat Budi Legowo	Direktur Utama
	Sony Harsono W.S.	Direktur
	Heri Supriyadi	Direktur
	Ade Zulfikar	Direktur
	Dewan Pengawas Syariah	
	Hj. Nilmayetty Yusri	Ketua
	Abdul Ghoni	Anggota

Nama Perusahaan	**PT Pegadaian**	
Bidang Usaha	Perusahaan Gadai	
Tanggal Penyertaan BRI	13 September 2021	
Jumlah Aset	Rp82.151.803 juta	
Kepemilikan (%)	99,99%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	1 April 1901/Masih Beroperasi	
Alamat	Jl. Kramat Raya No.162, Kenari Senen, Jakarta Pusat Telp : (021) 3155550 Faks : (021) 80635162 Email : - Web : www.pegadaian.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Loto Srinaita Ginting	Komisaris Utama
	Umiyatun Hayati T.	Komisaris
	Sudarto	Komisaris
	Makmur Keliat	Komisaris Independen
	Rini Widyantini	Komisaris
	Nezar Patria	Komisaris Independen
	Yudi Priambodo P.	Komisaris Independen
	Direksi	
	Damar Latri Setiawan	Direktur Utama
	Elvi Rofiqotul Hidayah	Direktur
	Eka Pebriansyah	Direktur
	Teguh Wahyono	Direktur
	E.R.A Taufiq	Direktur
	Ferdian Timur Satyagraha	Direktur
	Gunawan Sulistyo	Direktur
	Udin Salahudin	Direktur
	Dewan Pengawas Syariah	
	Muhammad Cholil Nafis	Ketua
	Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota

Nama Perusahaan	**PT Permodalan Nasional Madani (PNM)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Pembiayaan	
Tanggal Penyertaan BRI	13 September 2021	
Jumlah Aset	Rp51.106.905 juta	
Kepemilikan (%)	99,99%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	1 Juni 1999/Masih Beroperasi	
Alamat	Menara PNM - Kuningan Center Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan Jakarta 12940 Telp : (021) 2511404 Faks : - Email : info@pnm.co.id Web : www.pnm.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Arif Rahman Hakim	Komisaris Utama
	Nurhaida	Komisaris Independen
	Veronica Colondam	Komisaris Independen
	Parman Nataatmadja	Komisaris
	Iwan Taufiq Purwanto	Komisaris
	Direksi	
	Arief Mulyadi	Direktur Utama
	Prasetya Sayekti	Direktur
	Sunar Basuki	Direktur
	Dewan Pengawas Syariah	
	Didin Hafidhuddin	Ketua Dewan Pengawas Syariah
	Muhammad Syafii Antonio	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama Perusahaan	**PT BRI Manajemen Investasi (BRI MI)**	
Bidang Usaha	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	
Tanggal Penyertaan BRI	20 Desember 2018	
Jumlah Aset	Rp288.820 juta	
Kepemilikan (%)	65,00%	
Mulai Beroperasi/Status Operasi	9 Oktober 1992/Masih Beroperasi	
Alamat	Gedung BRI II Lt. 22 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp : (021) 29555789 Faks : (021) 25198 003 Email : cs@danareksainvestment.co.id Web : www.danareksainvestment.co.id	
Pengurus Perusahaan	**Dewan Komisaris**	
	Tri Hartono	Komisaris Utama
	Kahlil Rowter	Komisaris Independen
	Direksi	
	Ira Irmalia Sjam	Direktur
	Upik Susiyawati	Direktur

Entitas Asosiasi

Nama Perusahaan	**PT Bahana Artha Ventura (BAV)**
Bidang Usaha	Perusahaan Modal Ventura
Tanggal Penyertaan BRI	21 November 2017
Jumlah Aset	Rp1.642.983 juta
Kepemilikan (%)	15,10%
Mulai Beroperasi/Status Operasi	5 Agustus 1992/Masih Beroperasi
Alamat	Wisma Prima Lantai 5 Jl. Kapten P. Tendean No. 34, Jakarta Selatan 12790 Telp : (021) 79182688 Faks : (021) 7918 2687 Email : - Web : www.bahanaventura.com

Nama Perusahaan	**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**
Bidang Usaha	Lembaga Penyelesaian Efek
Tanggal Penyertaan BRI	5 Desember 1997
Jumlah Aset	Rp3.725.101 juta
Kepemilikan (%)	3,00%
Mulai Beroperasi/Status Operasi	11 November 1998/Masih Beroperasi
Alamat	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor JL. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp : (021) 5152855 Faks : (021) 5299 1199 Email : helpdesk@ksei.co.id Web : www.ksei.co.id

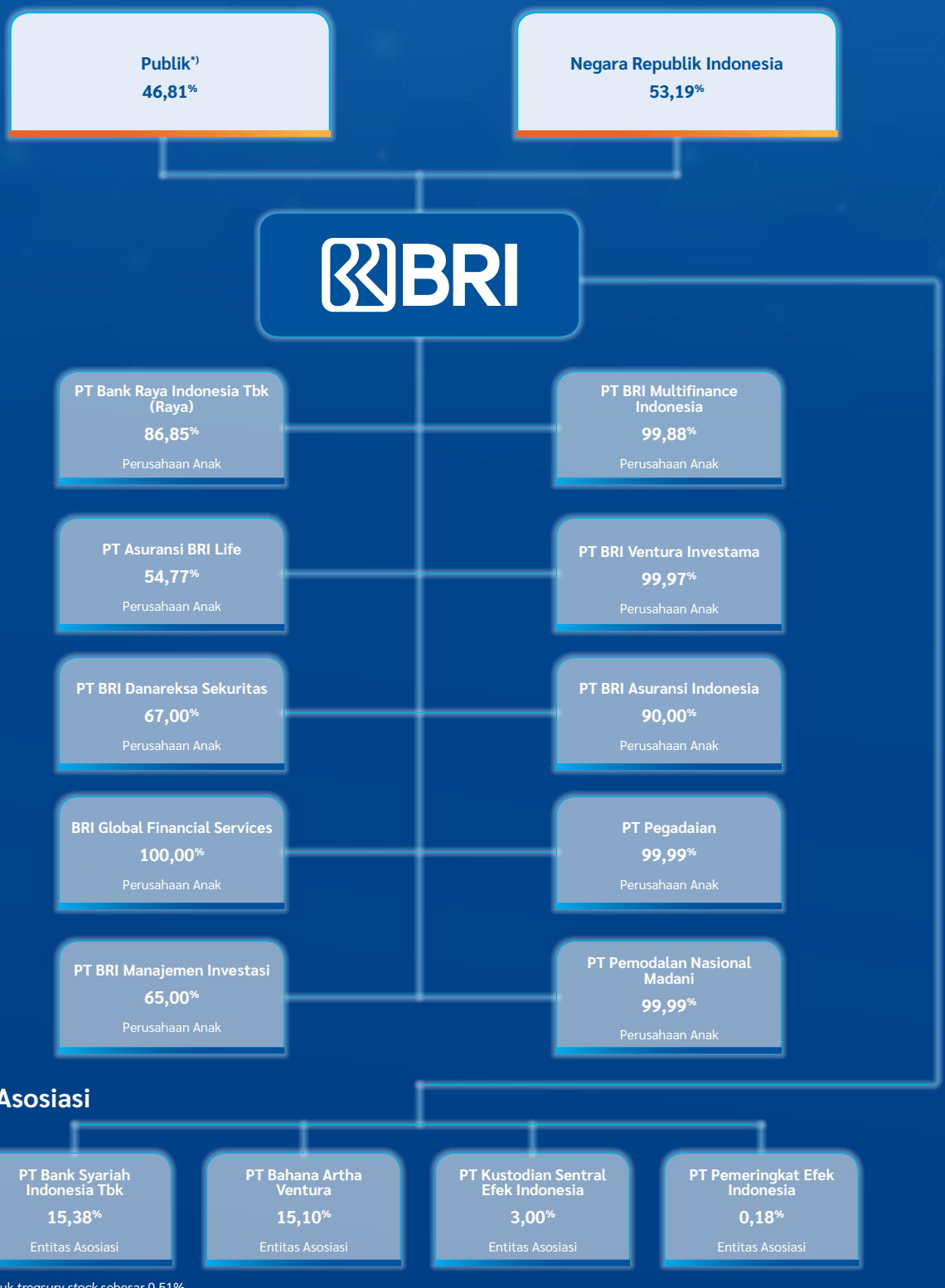
Nama Perusahaan	**PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
Bidang Usaha	Perusahaan Pemeringkat Efek
Tanggal Penyertaan BRI	15 Juni 1995
Jumlah Aset	
Kepemilikan (%)	0,18%
Mulai Beroperasi/Status Operasi	21 Desember 1993/Masih Beroperasi
Alamat	Panin Tower Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot. 19, Gelora, Jakarta 12220 Telp : (021) 50968469 Faks : (021) 50968468 Email : corporate.secretary@pefindo.co.id Web : www.pefindo.com

Nama Perusahaan	**PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI)**
Bidang Usaha	Bank Umum Syariah
Tanggal Penyertaan BRI	19 Desember 2007
Jumlah Aset	Rp326.852.260 juta
Kepemilikan (%)	15,38%
Mulai Beroperasi/Status Operasi	16 Oktober 2008/Masih Beroperasi Keterangan: Per 01 Februari 2021, Efektif bergabung dengan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Alamat	Kantor Pusat Gedung The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 Telp : BSI Call – 14040 Faks : - Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

Perusahaan Ventura Bersama

Sampai dengan 31 Desember 2023, BRI tidak memiliki Perusahaan Ventura Bersama.

Struktur Grup **Perusahaan**



Entitas Asosiasi

* Sudah termasuk *treasury stock* sebesar 0,51%

Sampai dengan tahun 2023, BRI tidak memiliki Entitas Induk, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Informasi
Kelompok Usaha Bank

BRI mempunyai 10 (sepuluh) Perusahaan Anak, yang mana kepemilikan BRI di Perusahaan Anak tersebut adalah lebih dari 50%. BRI sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai hak untuk menominasikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Hak Nominasi
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk.	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
2.	PT Pegadaian	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN No. SKK – 87/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 BRI dapat mengajukan usulan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris.
3.	PT Permodalan Nasional Madani	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN No. SKK – 87/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 BRI dapat mengajukan usulan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris.
4.	PT Asuransi BRI Life	Berdasarkan pada Perjanjian Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life, BRI berhak menominasikan Direktur Utama, Direktur Kepatuhan & Legal dan Direktur Pemasaran. Selanjutnya, BRI berhak untuk menominasikan Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen.
5.	PT BRI Asuransi Indonesia	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
6.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham PT BRI Danareksa Sekuritas, BRI berhak menominasikan Direktur Utama, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko serta Direktur Retail & Information Technology. Selanjutnya, BRI berhak untuk menominasikan Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.
7.	PT BRI Multifinance Indonesia	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
8.	PT BRI Ventura Investama	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
9.	BRI Global Financial Services	BRI berhak menominasikan calon *Executive Director* dan *Non Executive Director.*
10.	PT BRI Manajemen Investasi	Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham PT BRI Manajemen Investasi BRI berhak menominasikan Direktur Utama, Direktur Keuangan. Selanjutnya, BRI berhak untuk menominasikan Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Sehubungan dengan susunan Pengurus Perusahaan Anak BRI, terdapat 4 (empat) Pengurus di Perusahaan Anak BRI yang saat ini juga menjabat di BRI, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nama	Jabatan di BRI	Jabatan di Perusahaan Anak
1.	PT BRI Asuransi Indonesia	Kris Hananto	Division Head Compliance	Komisaris Utama
2.	PT BRI Ventura Investama	Ety Yuniarti	Division Head MPE	Komisaris Utama
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Achmad Royadi	SEVP Treasury & Global Service	Komisaris Utama
4.	BRI Global Financial Services	Wisnu Rimba Pratama	Chief Representative	Non - Executive Director
5.	PT BRI Multifinance Indonesia	Dhoni Ramadi	Division Head Retail Payment	Komisaris
6	PT BRI Manajemen Investasi	Tri Hartono	Division Head SJK	Komisaris Utama

Kronologis Penerbitan Saham

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*/IPO) TAHUN 2003

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000.

Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam – sekarang OJK (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tanggal 31 Oktober 2003). Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp875,00, serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Dengan dilakukannya penawaran saham perdana ini, BRI menerbitkan dua jenis saham; Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Selanjutnya pada 10 November 2003, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan pada 3 Desember 2003 melakukan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi). Divestasi dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI MANAJEMEN (*MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM*/MSOP) TAHUN 2004-2010

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Plan*/ MSOP). Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa *exercise* MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ No.Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek. Saham MSOP yang telah di-*exercise* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan berakhirnya masa *exercise*, masih terdapat 18,3 juta lembar saham yang tidak di-*exercise* yang terdiri dari 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III. Dengan berakhirnya *exercise* MSOP pada tahun 2010 maka komposisi kepemilikan saham pemerintah berubah dari 59.07% di tahun 2004 menjadi 56,75% di tahun 2010.

***STOCK SPLIT* 1:2 TAHUN 2011**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham (Rasio 1:2). Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp9.300,00 pada tanggal 10 Januari 2011 menjadi sebesar Rp4.800 pada penutupan perdagangan 11 Januari 2011. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 11 Januari 2011 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 12.334.581.000 lembar dan 24.669.162.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Pelaksanaan *Stock Split* Tahun 2011

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp	
Sebelum *Stock Split*	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000
Setelah *Stock Split*	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000

STOCK BUY-BACK TAHUN 2015-2016

BRI melakukan *Stock buy-back* selama tiga bulan yaitu dari tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak 221.718.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.419 triliun. Target awal pelaksanaan *buy back* ini direncanakan sebesar Rp2,5 triliun dengan ketentuan jumlah saham *buy back* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih serta opsi penjatahan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Pelaksanaan *Buy Back* Saham di tahun 2015-2016

Total Jumlah saham	Rata-rata Harga Pembelian	Peningkatan Laba per Lembar Saham
221.718.000 lembar	Rp10.910/lembar	Rp9.5/lembar

Keterangan: sebelum *stock split* 1:5

Dalam melaksanakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi, BRI mengikuti kebijakan-kebijakan eksternal yang berlaku diantaranya:
- Undang-undang (UU) RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan OJK (POJK) No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan.
- Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan *buyback* ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan. Seluruh transaksi *buy back* telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja BRI.

STOCK SPLIT 1:5 TAHUN 2017

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5). Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp16.450 pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp3.280 pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.945.810.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*. Kronologi dari pencatatan saham yang terkait dengan aksi korporasi ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan *Stock Split* Tahun 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp	
Sebelum *Stock Split*	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah *Stock Split*	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (*EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM*/ESOP) TAHUN 2019

Berdasarkan Putusan RUPS tanggal 23 Maret 2016 pada Agenda 5 (lima) yakni menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham tresuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna, serta memperhatikan Surat Kementrian BUMN yang berisi bahwa mendukung implementasi kepemilikan saham bagi Pekerja BRI/*Employee Stock Ownership* Program (ESOP), BRI pada tahun 2019 telah melaksanakan ESOP dalam bentuk Bonus Saham untuk tahap I. Saham Tresuri yang telah dipakai untuk ESOP tahap I tersebut dan telah dilimpahkan kepada masing-masing Pekerja pada tanggal 23 dan 24 Mei 2019 dalam bentuk *Script* Saham sebanyak 143.415.500 lembar saham. Pelimpahan saham tresuri untuk ESOP dimaksud telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Mei 2019.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (*EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM*/ESOP) TAHUN 2020

Pada tahun 2020, BRI telah melaksanakan distribusi program kepemilikan saham Pekerja atau *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan total 231.111.000 lembar saham, yang terdiri dari ESA Tahap 1 sebesar 4.396.700 lembar saham dan ESA Tahap 2 sebesar 226.714.300 lembar saham.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*) TAHUN 2020

Pada tahun 2020 BRI melakukan aksi pembelian kembali saham (*buyback*) sebagai respon kebijakan OJK dalam meredam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat pandemi COVID-19. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34. Saat ini sisa *treasury stock* menjadi 750.463.500 lembar saham.

***RIGHT ISSUE* TAHUN 2021**

Pada tanggal 13 September 2021 – 22 September 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan *Rights Issue* atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") I dalam rangka pembentukan *Holding* Ultra Mikro yang terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham atau sebanyak-banyaknya 18,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BRI setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 1.000.000.000 saham lama BRI yang namanya tercatat dalam DPS BRI pada tanggal 9 September 2021 berhak atas 230.128.553 (HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk untuk membeli 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.40- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham. Jumlah dana dan hasil *inbreng* yang diterima BRI dalam PMHMETD I ini sebesar Rp95.924.851.453.600, dimana Rp54.770.595.614.000 berasal dari Pemerintah Republik Indonesia berupa *inbreng* (*non-cash*), dan Rp41.154.255.839.600 berasal dari Publik (*cash*). Setelah *Right Issue*, jumlah saham beredar BRI bertambah sebesar 28.213.191.604 dari 123.345.810.000 menjadi 151.559.001.604 dengan TERP sebesar Rp3.810.

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham BRI

Tahun	Aksi Korporasi	Nilai Nominal	Harga Penawaran	Jumlah Saham yang Diterbitkan
2003	Penawaran Umum Saham Perdana	500	875	3.811.765.000
2004	*Exercise* MSOP	500	-	85.385.500
2005	*Exercise* MSOP	500	-	185.610.000
2006	*Exercise* MSOP	500	-	250.721.000
2007	*Exercise* MSOP	500	-	31.379.000
2008	*Exercise* MSOP	500	-	7.499.000
2009	*Exercise* MSOP	500	1.750	4.553.000
2010	*Exercise* MSOP	500	-	4.728.500
2011	*Stock Split* 1:2 tanggal 11 Januari 2011	250	-	-
2015	*Stock Buy- Back* sebanyak 221.718.000 lembar saham	250	-	-
2016		250	-	-
2017	*Stock Split* 1:5 tanggal 10 November 2017	50	-	-
2019	*Exercise* ESOP 143.415.500	50	2.240	-
2020	*Exercise* ESA 231.111.000	50	-	-
2020	*Stock Buy-Back* sebanyak 16.400.000 lembar saham	50	-	-
2021	Right Issue	50	3.400	28.213.191.604
	Pengalihan Sebagian Saham Milik Pemerintah ke LPI	50	-	-
2022	*Stock Buy- Back* sebanyak 479.454.100 lembar saham	50	-	-

Keterangan:
- MSOP, ESOP dan ESA tidak terdapat harga penawaran dikarenakan Perusahaan langsung memberikan saham kepada Pekerja yang berhak sesuai dengan perhitungan, metode dan asumsi dari laporan pihak ketiga yang kompeten.
- *Stock Buy-Back* tidak terdapat harga penawaran dikarenakan Perusahaan langsung membeli saham melalui mekanisme pasar.

Pelaksanaan *Right Issue* Tahun 2021

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp	
Sebelum *Stock Split*	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000
Setelah *Stock Split*	86.108.998.710	56,82	65.450.002.894	43,18	50	151.559.001.604

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*) 2022 - 2023

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 1 Maret 2022, BRI telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan *Buyback* dengan nilai sebesar-besarnya Rp3 triliun yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), baik secara bertahap maupun sekaligus dan diselesaikan paling lambat selama 18 bulan sejak persetujuan RUPST, yaitu pada 1 Maret 2022 hingga 31 Agustus 2023. Saham hasil *Buyback* akan digunakan untuk program kepemilikan saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan telah menyelesaikan Buyback pada tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 647.385.900 lembar saham dengan jumlah nilai sebanyak 2.999.999.915.000.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*BUYBACK*) 2023 - 2024

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 13 Maret 2023, BRI telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan *Buyback* dengan nilai sebesar-besarnya Rp1,5 triliun yang dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), baik secara bertahap maupun sekaligus dan diselesaikan paling lambat selama 18 bulan sejak persetujuan RUPST, yaitu pada 14 Maret 2023 hingga 14 September 2024. Saham hasil *Buyback* akan digunakan untuk program kepemilikan saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hingga akhir Desember 2023, perseroan telah melakukan buyback sebanyak 118.833.600 lembar saham dengan jumlah nilai sebesar Rp625.555.190.000

	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp Juta)	Komposisi Pemegang Saham setelah Aksi Korporasi			
			Pemerintah		Masyarakat	
			Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%
	11.764.705.000	5.882.353	7.000.000.000	59,50	4.764.705.000	40,50
	11.850.090.500	5.925.045	7.000.000.000	59,07	4.850.090.500	40,93
	12.035.700.500	6.017.850	7.000.000.000	58,16	5.035.700.500	41,84
	12.286.421.500	6.143.211	7.000.000.000	56,97	5.286.421.500	43,03
	12.317.800.500	6.158.900	7.000.000.000	56,83	5.317.800.500	43,17
	12.325.299.500	6.162.650	7.000.000.000	56,79	5.325.299.500	43,21
	12.329.852.500	6.164.926	7.000.000.000	56,77	5.329.852.500	43,23
	12.334.581.000	6.167.291	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25
	24.669.162.000	6.167.291	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25
	24.669.162.000	6.167.291	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25
	24.669.162.000	6.167.291	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	151.559.001.604	7.577.950	86.108.998.710	56,82	65.450.002.894	43,18
	151.559.001.604	7.577.950	80.610.976.876	53,19	70.948.024.728	46,81
	151.559.001.604	7.577.950	80.610.976.876	53,19	70.948.024.728	46,81

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi

Tabel Informasi Obligasi

No.	Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Juta)	Harga Penawaran
1.	Subordinate Notes due 2003	25 September 2003	120 bulan	USD	USD150	-
2.	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	09 Januari 2004	120 bulan	IDR	Rp500.000	-
3.	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	22 Desember 2009	60 bulan	IDR	Rp2.000.000	-
4.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	25 Juni 2015	370 Hari	IDR	Rp655.000	100% dari jumlah pokok obligasi
5.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	25 Juni 2015	36 bulan	IDR	Rp925.000	100% dari jumlah pokok obligasi
6.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	02 Juli 2015	60 bulan	IDR	Rp1.420.000	100% dari jumlah pokok obligasi
7.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	19 Januari 2016	370 Hari	IDR	Rp808.000	100% dari jumlah pokok obligasi
8.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	19 Januari 2016	36 bulan	IDR	Rp1.018.500	100% dari jumlah pokok obligasi
9.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	04 Februari 2016	5 tahun	IDR	Rp2.823.500	100% dari jumlah pokok obligasi
10.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	04 Mei 2016	370 Hari	IDR	Rp1.212.000	100% dari jumlah pokok obligasi
11.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	04 Mei 2016	36 bulan	IDR	Rp2.437.000	100% dari jumlah pokok obligasi
12.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	25 Mei 2016	5 tahun	IDR	Rp701.000	100% dari jumlah pokok obligasi
13.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	02 Desember 2016	370 Hari	IDR	Rp616.000	100% dari jumlah pokok obligasi
14.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	02 Desember 2016	36 bulan	IDR	Rp964.000	100% dari jumlah pokok obligasi
15.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	01 Desember 2016	5 tahun	IDR	Rp193.000	100% dari jumlah pokok obligasi
16.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01 Desember 2016	7 tahun	IDR	Rp477.000	100% dari jumlah pokok obligasi
17.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	IDR	Rp2.350.000	100% dari jumlah pokok obligasi
18.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	12 April 2017	370 Hari	IDR	Rp1.131.000	100% dari jumlah pokok obligasi
19.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	11 April 2017	36 bulan	IDR	Rp1.743.500	100% dari jumlah pokok obligasi
20.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	11 April 2017	5 tahun	IDR	Rp925.000	100% dari jumlah pokok obligasi

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2023	2022	
	30 Oktober 2013	7,75%	Lunas	-	-	-
	09 Januari 2014	13,5%	Lunas	-	-	-
	22 Desember 2014	10,95%	Lunas	-	-	-
	07 Juli 2016	8,4%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	03 Juli 2018	9,2%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	03 Juli 2020	9,5%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	08 Februari 2017	8,5%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	04 Februari 2019	9,25%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	04 Februari 2021	9,60%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	30 Mei 2017	7,5%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	25 Mei 2019	8,2%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	25 Mei 2021	8,70%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	06 Desember 2017	7,25%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	01 Desember 2019	8%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	01 Desember 2021	8,20%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	01 Desember 2023	8,65%	Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	01 Desember 2026	8,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	16 April 2018	7,2%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	11 April 2020	8,1%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	11 April 2022	8,30%	Lunas	-	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia

No.	Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Juta)	Harga Penawaran
21.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	12 April 2017	10 Tahun	IDR	Rp1.300.500	100% dari jumlah pokok obligasi
22.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	25 Agustus 2017	36 bulan	IDR	Rp980.500	100% dari jumlah pokok obligasi
23.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	25 Agustus 2017	5 Tahun	IDR	Rp1.652.500	100% dari jumlah pokok obligasi
24.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	25 Agustus 2017	7 Tahun	IDR	Rp2.517.000	100% dari jumlah pokok obligasi
25.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	22 Februari 2018	5 Tahun	IDR	Rp1.837.000	100% dari jumlah pokok obligasi
26.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	22 Februari 2018	7 Tahun	IDR	Rp605.000	100% dari jumlah pokok obligasi
27.	*Senior Notes due* 2018	28 Maret 2013	60 bulan	USD	USD500	-
28.	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	27 Juni 2018	5 tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi
29.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	07 November 2019	370 Hari	IDR	Rp737.850	100% dari jumlah pokok obligasi
30.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	07 November 2019	3 Tahun	IDR	Rp2.089.350	100% dari jumlah pokok obligasi
31.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07 November 2019	5 Tahun	IDR	Rp2.172.800	100% dari jumlah pokok obligasi
32.	*Global Bond* 2018	16 Juli 2018	5 Tahun	USD	USD500	99,696% dari jumlah pokok obligasi
33.	*Sustainable Bond* 2019	28 Maret 2019	5 Tahun	USD	USD500	99,713% dari jumlah pokok obligasi
34.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	20 Juli 2022	370 Hari	IDR	Rp2.500.000	100% dari jumlah pokok obligasi
35.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	20 Juli 2022	3 Tahun	IDR	Rp2.000.000	100% dari jumlah pokok obligasi
36.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20 Juli 2022	5 Tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi
37.	Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	06 Juli 2023	5 Tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi
38.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri A	17 Oktober 2023	370 Hari	IDR	Rp1.345.650	100% dari jumlah pokok obligasi
39.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	17 Oktober 2023	2 Tahun	IDR	Rp4.154.350	100% dari jumlah pokok obligasi
40.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	17 Oktober 2023	3 Tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2023	2022	
	11 April 2027	8,80%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	24 Agustus 2020	7,6%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	24 Agustus 2022	8%	Lunas	-	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	24 Agustus 2024	8,25%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	21 Februari 2023	6,65%	Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	21 Februari 2025	6,90%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	28 Maret 2018	2,95%	Lunas	-	-	BNY Mellon
	26 Juni 2023	7,70%	Lunas	idAA oleh Pefindo	idAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	17 November 2020	6,5%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
	07 November 2022	7,60%	Lunas	-	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	07 November 2024	7,85%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	20 Juli 2023	4,625%	Lunas	BBB- oleh Fitch	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
	28 Maret 2024	3,950%	Belum Lunas	"BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys"	"BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys"	BNY Mellon
	30 Juli 2022	3,70%	Lunas	-	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	20 Juli 2024	5,75%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	20 Juli 2027	6,45%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	06 Juli 2028	6,45%	Belum Lunas	idAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara
	27 Oktober 2024	6,10%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara
	17 Oktober 2025	6,35%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara
	17 Oktober 2026	6,30%	Belum Lunas	idAAA oleh Pefindo	-	Bank Tabungan Negara

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD)

Tabel Informasi Penerbitan *Negotiable Certificate Deposit* (NCD)

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri A	24 Juni 2020	3 Bulan	IDR	Rp630.000	24 September 2020	5,35% (Diskonto)	Lunas
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri B	24 Juni 2020	6 Bulan	IDR	Rp520.000	23 Desember 2020	5,30% (Diskonto)	Lunas
Negotiable Certificate of Deposit I BANK BRI TAHUN 2020 Seri C	24 Juni 2020	12 Bulan	IDR	Rp850.000	24 Juni 2021	5,75% (Diskonto)	Lunas

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan *Medium Term Notes* (MTN)

Tabel Informasi Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN)

No.	Uraian	Tanggal distribusi MTN secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah MTN (Juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
1.	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	10 Oktober 2014	370 Hari	IDR	Rp300.000	-	15 Oktober 2015	8,75	Lunas
2.	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	10 Oktober 2014	24 Bulan	IDR	Rp60.000	-	10 Oktober 2016	9,25	Lunas
3.	MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	10 Oktober 2014	36 Bulan	IDR	Rp360.000	-	10 Oktober 2017	9,50	Lunas
4.	MTN BRI Tahap II Tahun 2014	24 Desember 2014	12 Bulan	IDR	Rp520.000	-	24 Desember 2015	8,90	Lunas
5.	MTN BRI Tahap I Tahun 2016	16 September 2016	370 Hari	IDR	Rp1.925.000	-	21 September 2017	7,40	Lunas
6.	MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri A	24 November 2022	2 Tahun	IDR	Rp2.000.000	100% dari jumlah pokok MTN	24 November 2024	6,60%	Belum Lunas
7.	MTN Bank BRI Tahun 2022 Seri B	24 November 2022	3 Tahun	IDR	Rp3.000.000	100% dari jumlah pokok MTN	24 November 2025	6,98%	Belum Lunas

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan *Long Term Notes* (LTN)

Tabel Informasi Penerbitan *Long Term Notes* (LTN)

No.	Uraian	Tanggal distribusi MTN secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah MTN (Juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
1.	*Long Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk I Tahun 2022	27 Desember 2022	162 Bulan	IDR	Rp52.332	100% dari jumlah pokok LTN	27 Juni 2036	0,55%	Belum Lunas

No.	Uraian	Tanggal distribusi MTN secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah MTN (Juta)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
2.	*Long Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023	25 Oktober 2023	159	IDR	Rp59.485	100% dari jumlah pokok LTN	25 Januari 2037	0,55%	Belum Lunas

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Nama KAP	**Purwantono, Sungkoro & Surja**
Jaringan Asosiasi	Ernst & Young Global Limited
Alamat KAP	Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Nama AP	Christophorus Alvin Kossim
Periode Penugasan KAP	Tahun ke-8
Periode Penugasan AP	Tahun ke-4
Jasa Audit	1. Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2023, termasuk SA 600 - Pertimbangan Khusus – Audit terhadap Laporan Keuangan Grup untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian internal (PSA 62) tahun 2023. 3. Audit umum atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2023. 4. Asuransi Keyakinan Terbatas atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BRI, posisi 31 Desember 2023.
Jasa Non Audit	1. Prosedur yang disepakati atas perhitungan pencapaian KPI Direksi (kolegial dan individual), posisi 31 Desember 2023. 2. Prosedur yang disepakati atas data yang dikirim BRI untuk Kompilasi Laporan keuangan Kementerian BUMN tahun buku 2023. 3. Prosedur yang disepakati atas ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk pendanaan usaha mikro kecil tahun buku 2023 (apabila diperlukan).
***Fee* Audit**	Total *fee* audit sebesar Rp15.922.000.000 (*Fee* sudah termasuk OPE, PPN 11%, dan pajak-pajak lainnya).
***Fee* Non Audit**	Total *fee* non audit sebesar Rp950.000.000 (*Fee* sudah termasuk OPE, PPN 11%, dan pajak-pajak lainnya).

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Lembaga Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Panin Tower - Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270, Indonesia Telp : (021) 7278 2380 Faks : (021) 7278 2370 Web : www.pefindo.com Email : - Jasa yang diberikan : Pemeringkatan Perusahaan, Pemeringakatan Obligasi Berkelanjutan Bank BRI Tahap II Tahun 2023 dan Obligasi Subordinasi IV *Fee*: Rp1.180.000.000
Fitch Ratings Indonesia	Prudential Tower 20th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910, Indonesia Telp : (021) 5795 7755 Faks : (021) 5795 7750 Web : www.fitchratings.co.id Email : -
Fitch Ratings International	30 North Colonnade London E14 SGN United Kingdom Telp : +44(0)20 3530 1000 Web : www.fitchratings.com Email : lonaccounts.receivable@fitchratings.com
Moody's Investors Service	50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Telp : 65 6398 8339 Faks : 65 6398 8301 Web : www.moodys.com/indonesia Email : clientservices@moodys.com
SnP Global Rating	Singapore 12 Marina Boulevard 018982 Singapura Head of Sales, Asia-Pacific Telp : (0852) 2533-3522

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham

PT Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : (021) 5150515 Faks : (021 5)154153 Web : www.idx.co.id Email : listing@idx.co.id Jasa yang diberikan : Jasa Pencatatan Tahunan Obligasi *Fee* : Rp1.441.559.167

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom	Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp : (021) 3508077 Faks : (021) 350 8078 Web : www.datindo.com Email : dm@datindo.com
	Jasa yang diberikan : Jasa Konsultan Penunjang RUPST (RUPST dan Pembayaran Dividen)
	Fee : Rp1.727.000.000

Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : (021) 5152855 Fax : (021) 52991199 Web : www.ksei.co.id Email : helpdesk@ksei.co.id
	Jasa yang diberikan : Pengelolaan administrasi efek (saham dan obligasi) dan ***Paying Agent***
	Fee : Rp135.974.998 (Termasuk PPN) *Paying Agent Fee* : Rp453.358.136

Notaris

Notaris & PPAT Fathiah Helmi	Graha Irama Lantai 6C Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1& 2, Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
	Jasa yang diberikan : Pembuatan akta keputusan RUPS dan Anggaran Dasar
	Fee : Rp55.000.000

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan

No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
1	Fortune Indonesia: BRI mendapat Peringkat 5 dalam Fortune Indonesia Change The Word	1 Januari 2023 (Desember 2022)	Fortune Indonesia	Banking	Jakarta	Nasional
2	Mother & Beyond Reader's Choice Award 2022 (Peringkat 3): Tabungan anak	19 Januari 2023	MRA Media	Tabungan anak	Jakarta	Nasional
3	Mata Lokal Award (Terbaik): Kampanye Aktivasi Terbaik	27 Januari 2023	Tribunnews	Kampanye Aktivasi Terbaik	Jakarta	Nasional
4	2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard in the category ASEAN Asset Class PLCs	31 Januari 2023	IDX	GCG	Jakarta	Nasional
5	2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard in the category Indonesia Top 3 PLCs	31 Januari 2023	IDX	GCG	Jakarta	Nasional
6	Peringkat ke 5 Transaksi Tertinggi dalam Business Matching Jakarta	Januari 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
7	Euromoney Banking Rangkings: BRI sebagai Market Leader di Bidang CSR	14 Februari 2023	Euro Money	CSR	UK	Internasional
8	Euromoney Banking Rangkings: BRI sebagai Highly Regarded di Bidang Diversity & Inclusion	14 Februari 2023	Euro Money	DEI	UK	Internasional
9	Euromoney Banking Rangkings: BRI sebagai Market Leader di Bidang SME Banking	14 Februari 2023	Euro Money	SME	UK	Internasional
10	Euromoney Banking Rangkings: BRI sebagai Highly Regarded di Bidang Digital Solution	14 Februari 2023	Euro Money	Digital	UK	Internasional
11	Euromoney Banking Rangkings: BRI sebagai Notable di Bidang ESG	14 Februari 2023	Euro Money	ESG	UK	Internasional
12	The Asset Triple A Country Awards 2022: BRI for Best Issuer for Sustainable Finance	23 Februari 2023	The Asset	Banking	Hong Kong	Internasional
13	The Asset Triple A Country Awards 2022: BRI for Best Sustainability-Linked Loan (US$1 billion sustainability-linked loan)	23 Februari 2023	The Asset	Banking	Hong Kong	Internasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
14	Top Brand Award 2023 (Peringkat 2): Produk Tabungan	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
15	Top Brand Award 2023 (Peringkat 1): Tabungan Junior	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
16	Top Brand Award 2023 (Peringkat 2): Tabungan Berjangka	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
17	Top Brand Award 2023 (Peringkat 3): Kartu Kredit	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
18	Top Brand Award 2023 (Peringkat 2): Deposito	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
19	Top Brand Award 2023 (Peringkat 2): Mobile Banking	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
20	Top Brand Award 2023 (Peringkat 2): Internet Banking	23 Februari 2023	Frontier	Brand	Jakarta	Nasional
21	Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2023: Best Public Relation in Company Strategy on MSME Development and Empowerment	24 Februari 2023	Warta Ekonomi	Communication	Jakarta	Nasional
22	SWA 18th Indonesia Best CEO Forum: Direktur Utama BRI Sunarso sebagai "The Best CEO With Distinction"	28 Februari 2023	SWA	CEO	Jakarta	Nasional
23	Obsession Awards 2023: BRI sebagai Best Companies 2023	8 Maret 2023	Men's Obsession	Banking	Jakarta	Nasional
24	BRI sebagai HIMBARA yang concern dalam Penegakan Hukum Perpajakan 2022	8 Maret 2023	DJP Kemenkeu	Banking	Jakarta	Nasional
25	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Best SME Development (Gold Winner)	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Sustainability	Jakarta	Nasional
26	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Best Stakeholder Relation Management (Juara 3)	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Stakeholder Management	Jakarta	Nasional
27	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Best Social Media Ranger Perusahaan BUMN (Juara 1)	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Social Media	Jakarta	Nasional
28	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Aestika Oryza Gunarto sebagai Corporate Secretary of The Year	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Communication	Jakarta	Nasional
29	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Best Satgas Bencana	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Communication	Jakarta	Nasional





No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
30	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Best Exposure of The Year	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Communication	Jakarta	Nasional
31	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023: Best of The Best Communication	9 Maret 2023	Kementerian BUMN	Communication	Jakarta	Nasional
32	Retail Banker International (RBI) Asia Trailblazer Awards 2023: BRI sebagai Winner - Best in Current Accout Offering	9 Maret 2023	Retail Banker International	Product Advance	Singapura	Internasional
33	Retail Banker International (RBI) Asia Trailblazer Awards 2023: Highly Commended - Excellence in Mass Affluent Banking	9 Maret 2023	Retail Banker International	Product Advance	Singapura	Internasional
34	Euromoney's Awards (Rank 1): Market Leader - Indonesia	10 Maret 2023	Euro Money	Banking	Dubai	Internasional
35	Euromoney's Awards (Rank 3): Best Service - Indonesia	10 Maret 2023	Euro Money	Banking	Dubai	Internasional
36	Euromoney's Awards (Rank 1):Best Service - Basic Materials - Asia Pacific	10 Maret 2023	Euro Money	Banking	Dubai	Internasional
37	Euromoney's Awards (Rank 8): Market Leader - Asia Pacific	10 Maret 2023	Euro Money	Banking	Dubai	Internasional
38	PR Indonesia Award 2023: Kanal Digital - Media Sosial Instagram Terbaik	17 Maret 2023	PR Indonesia	Kanal Digital	Bali	Nasional
39	PR Indonesia Award 2023: Laporan Tahunan - Annual Report Terbaik	17 Maret 2023	PR Indonesia	Annual Report	Bali	Nasional
40	PR Indonesia Award 2023: Laporan Tahunan - Sustainability Report Terbaik	17 Maret 2023	PR Indonesia	Annual Report	Bali	Nasional
41	PR Indonesia Award 2023: Program CSR - Community Based Development Terbaik	17 Maret 2023	PR Indonesia	CSR	Bali	Nasional
42	PR Indonesia Award 2023: Program CSR - Sustainability Business Terbaik	17 Maret 2023	PR Indonesia	CSR	Bali	Nasional
43	PR Indonesia Award 2023: Program PR - Corporate PR Terbaik	17 Maret 2023	PR Indonesia	Communication	Bali	Nasional
44	PR Indonesia Award 2023: BRI Terpopuler - Media Massa	17 Maret 2023	PR Indonesia	Communication	Bali	Nasional
45	Indonesia Property&Bank Award XVII 2023 (Best): "The Most Admired CEO of State-Owned Bank"	20 Maret 2023	Majalah Property&Bank dan majalah MyHome (Jurnalist Media Network)	CEO	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
46	Indonesia Property&Bank Award XVII 2023 (Best): "The Best Performance With High Growth of Millennial Mortgage Product".	20 Maret 2023	Majalah Property&Bank dan majalah MyHome (Jurnalist Media Network)	Banking	Jakarta	Nasional
47	BAZNAS Award 2023: BRI sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI	21 Maret 2023	BAZNAS	Banking	Jakarta	Nasional
48	Global Finance 30th Annual Best Bank Awards 2023: Best Bank in Indonesia	21 Maret 2023	Global Finance	Banking	New York	Internasional
49	Asia Private Banking Awards 2023 (Best): Best Domestic Private Bank in Indonesia 2022	30 Maret 2023	Asiamoney	Banking	Hong Kong	Internasional
50	Juara II Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Maret 2023	Kementerian Perindustrian	Product	Jakarta	Nasional
51	Peringkat ke 2 Transaksi Tertinggi dalam Business Matching Jawa Barat	Maret 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
52	Top Digital Corporate Brand Award 2023: BRI sebagai TOP Digital Corporate Brand Award 2023	12 April 2023	Media InfoEkonomi.ID dan Tras N Co Indonesia	Financial Industry	Jakarta	Nasional
53	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The Best Leaders Personal Digital Brand 2023 - Sunarso (Direktur Utama BRI)	12 April 2023	Infobank	CEO	Jakarta	Nasional
54	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Highest Digital Index Deposito Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional
55	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The Highest Digital Index KPR Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional
56	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Highest Digital Index Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional
57	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Highest Digital Index Wealth Management Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
58	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Highest Digital Index E-Money Bank 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional
59	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The Best Bank Umum Konvensional KBMI 4 - 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
60	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Best Deposito Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional
61	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023; The Best KPR Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Digital	Jakarta	Nasional
62	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Best Wealth Management Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
63	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Best Internet Banking Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
64	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The 3rd Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
65	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: Platinum Trophy Bank Umum Konvensional - 10 Years in a Row 2013-2022	12 April 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
66	12th Infobank Digital Brand Recognition 2023: The Highest Digital Index Bank Umum Konvensional 2023	12 April 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
67	LinkedIn Top Companies 2023 in Indonesia	18 April 2023	Linkedin	HR	Jakarta	Nasional
68	Indonesia WOW BRAND 2023: Bronze - Kartu Uang Elektronik	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Brand	Jakarta	Nasional
69	Indonesia WOW BRAND 2023: Bronze - Mobile Banking	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Brand	Jakarta	Nasional
70	Indonesia WOW BRAND 2023: Silver - Bank Pemberi KPR	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Banking	Jakarta	Nasional
71	Indonesia WOW BRAND 2023: Gold - ATM	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Banking	Jakarta	Nasional
72	Indonesia WOW BRAND 2023: Bronze - Kartu Kredit	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Banking	Jakarta	Nasional
73	Indonesia WOW BRAND 2023: Silver - Bank Konvensional	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Banking	Jakarta	Nasional
74	Indonesia WOW BRAND 2023: Silver - Call Center	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Banking	Jakarta	Nasional
75	Indonesia WOW BRAND 2023: Silver - Tabungan	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Banking	Jakarta	Nasional
76	Indonesia WOW BRAND 2023: Bronze - Digital Lounge	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Digital	Jakarta	Nasional
77	Indonesia WOW BRAND 2023: Gold - Branding Campaign – Below The Line	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Campaign Product	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
78	Indonesia WOW BRAND 2023: Silver - Branding Campaign – Below The Line	12 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Campaign Product	Jakarta	Nasional
79	Indonesia WOW BRAND 2023: Gold - Branding Campaign – Public Relation	11 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Campaign Product	Jakarta	Nasional
80	Indonesia WOW BRAND 2023: Bronze - Branding Campaign – Public Relation	12 Mei 2023	MarkPlus, Inc.	Campaign Product	Jakarta	Nasional
81	The Asset Triple A Treasurise Awards 2023: Best in Treasury and Working Capital-SMEs	23 Mei 2023	The Asset	Banking	Hong Kong	Internasional
82	The Asset Triple A Treasurise Awards 2023: Treasury Team of The Year	23 Mei 2023	The Asset	Banking	Hong Kong	Internasional
83	Asia Private Banking Awards 2023: Market Leader Trade Finance (Asian Banks) in Indonesia	24 Mei 2023	Asiamoney	Banking	Hong Kong	Internasional
84	Best Bank 2023: BRI sebagai Bank Terbaik 2023	26 Mei 2023	Investor	Bank BUKU 1	Indonesia	Nasional
85	B-Universe CSR Award 2023: BRI as Economic CSR Initiatives, financial sektor, Outstanding Integrated Corporate CSR Initiatives	31 Mei 2023	Berita Satu Holding	CSR	Jakarta	Nasional
86	Peringkat ke 3 Transaksi Tertinggi (Kategori Seller Nasional) dalam Business Matching Surabaya	Mei 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
87	Peringkat ke 1 Transaksi Tertinggi (Kategori Seller Lokal) dalam Business Matching Surabaya	Mei 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
88	Global Private Banking Innovation Awards 2023: Winner/Outstanding Wealth Management Offering for Affluent Clients	8 Juni 2023	Global Private Banker	Outstanding Wealth Management Offering for Affluent Clients	Singapore	Internasional
89	Top 10 Most Valuable Indonesia Brands 2023: The Most Valuable Brand in Indonesia (Peringkat 1)	9 Juni 2023	Brand Finance	Brand	UK	Internasional
90	The 1st INDONESIA GPR AWARDS (IGA) 2023: Direktur Utama BRI Sunarso sebagai Pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023	16 Juni 2023	Humas Indonesia	CEO	Makassar	Nasional
91	The 1st INDONESIA GPR AWARDS (IGA) 2023: BRI sebagai Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, Sub-Kategori BUMN	16 Juni 2023	Humas Indonesia	Humas	Makassar	Nasional
92	The 1st INDONESIA GPR AWARDS (IGA) 2023: Direktur Utama BRI Sunarso sebagai Pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023	16 Juni 2023	Humas Indonesia	CEO	Makassar	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
94	Infobank 20th Banking Service Excellence Awards 2023 : The 2nd Best Opening Account via Website	20 June 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
95	Infobank 20th Banking Service Excellence Awards 2023 : The 2nd Best Public ATM	20 June 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
96	Infobank 20th Banking Service Excellence Awards 2023 : The 2nd Best Cash Recycling Machine(CRM)	20 June 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
97	Infobank 20th Banking Service Excellence Awards 2023: The 3rd Best Contact Center in Service Excellence	20 June 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
98	Infobank 20th Banking Service Excellence Awards 2023 : The 3rd Best Digital Channel in Service Excellence	20 June 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
99	Infobank 20th Banking Service Excellence Awards 2023 : Golden Recognition - 5 Concecutive years in Service Excellence	20 June 2023	Infobank	Banking	Jakarta	Nasional
100	100 Indonesia Most Powerful Women Business Leader of The Year 2023: Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	27 Juni 2023	SWA	CEO	Jakarta	Nasional
101	Indonesia Most Extraordinary Women Business Leader 2023: Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani	27 Juni 2023	SWA	CEO	Jakarta	Nasional
102	HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2023 and HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2023	27 June 2023	HR Asia	HR		Nasional
103	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best CEO - Sunarso (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	CEO	Hong Kong	Internasional
104	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best CFO - Viviana Dyah Ayu Retno K (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	CFO	Hong Kong	Internasional
105	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best Financial Company (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	Banking	Hong Kong	Internasional
106	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best Corporate ESG Strategy (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	ESG	Hong Kong	Internasional
107	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best DEI Strategy (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	DEI	Hong Kong	Internasional
108	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best Investor Relations (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	Banking	Hong Kong	Internasional
109	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best Large Cap (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	Banking	Hong Kong	Internasional
110	FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Poll: Best Overall Company (Gold)	28 Juni 2023	Finance Asia	Banking	Hong Kong	Internasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
111	FinanceAsia's 23rd Awards Most Progressive DEI (Domestic)	28 Juni 2023	Finance Asia	Banking	Hong Kong	Internasional
112	SPEx2 DX Award 2023: The Best SPEx2® Company Across All Industries	28 Juni 2023	Kontan	Banking	Jakarta	Nasional
113	SPEx2 DX Award 2023: The Best SPEx2® Company for BUMN	28 Juni 2023	Kontan	Banking	Jakarta	Nasional
114	SPEx2 DX Award 2023: The Best SPEx2® Company in Banking Industry	28 Juni 2023	Kontan	Banking	Jakarta	Nasional
115	SPEx2 DX Award 2023: Direktur Utama BRI Sunarso - The Best Chief Strategic Executive Officer (CSEO) Across All Industries	28 Juni 2023	Kontan	CEO	Jakarta	Nasional
116	The 3rd Annual Sustainable Finance Awards 2023: BRI sebagai Best Bank in Indonesia	28 Juni 2023	Global Finance	Banking	London	Internasional
117	Asiamoney Best Bank Awards 2023: Best Domestic Bank In Indonesia	28 June 2023	Asiamoney	Banking	Hong Kong	Internasional
118	The Banker Top 1000 World Banks 2023: Bank Nomor Satu di Indonesia	5 Juli 2023	The Banker	Banking	London	Internasional
119	The 3rd MAW Talk Awards 2023: Roma J P Simanjuntak sebagai Tokoh PR Berpengaruh 2023	7 Juli 2023	MAW Institute	PR	Yogyakarta	Nasional
120	KEHATI ESG Award 2023: Pemenang Emiten di sektor Keuangan	27 July 2023	Kehati	Capital Market	Jakarta	Nasional
121	Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2023 - Silver Rank for Environmental Category	4 Agustus 2023	Humas Indonesia	ESG	Jakarta	Nasional
122	Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2023 - Silver Rank for Social Category	4 Agustus 2023	Humas Indonesia	ESG	Jakarta	Nasional
123	Indonesia Most Reputable Companies 2023: Most Reputable Companies Award 2023 Kategori Bank BUMN	8 Agustus 2023	Majalah SWA dan Business Digest	Banking	Jakarta	Nasional
124	Best Bank Performance of MSMEs Loans 2023 AWARD: Top Kredit UMKM - Bank Umum	15 Agustus 2023	Peluangnews.id	Banking	Jakarta	Nasional
125	HCM Excellence Award 2023: Best Team Development Program (Bronze Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Talent Management	USA	Internasional
126	HCM Excellence Award 2023: Best Advance In Talent Management Technology Implementation (Bronze Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Talent Management	USA	Internasional
127	HCM Excellence Award 2023: Best Advance In High Potential Development (Silver Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Talent Management	USA	Internasional
128	HCM Excellence Award 2023: Best Advance In Interviewing Strategy (Bronze Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Talent Acquisition	USA	Internasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
129	HCM Excellence Award 2023: Best New Hire Onboarding Program, (Gold Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Talent Acquisition	USA	Internasional
130	HCM Excellence Award 2023: Best Advance in Talent Acquistion Process (Gold Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Talent Acquisition	USA	Internasional
131	HCM Excellence Award 2023: Best Use Of Video For Learning (Silver Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Learning & Development	USA	Internasional
132	HCM Excellence Award 2023: Best Use Of Blended Learning (Silver Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Learning & Development	USA	Internasional
133	HCM Excellence Award 2023: Best Approach To Implementing A Learning Experience Platform (LXP) (Bronze Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Learning & Development	USA	Internasional
134	HCM Excellence Award 2023: Best Advance In Business Automation (Gold Award)	17 August 2023	Brandon Hall Group	Future Of Work	USA	Internasional
135	Indonesia Original Brands (IOB) Awards 2023: BRIMO kategori Excellent	31 Agustus 2023	Majalah SWA	Brand	Jakarta	Nasional
136	6th Annual Global Retail Banking Innovation Awards	Agustus 2023	The Digital Banker	Banking	Singapura	Internasional
137	Peringkat ke 2 Transaksi Tertinggi (Kategori Seller Nasional) dalam Business Matching Medan	Agustus 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
138	Peringkat ke 3 Transaksi Tertinggi (Kategori Seller Lokal) dalam Business Matching Medan	Agustus 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
139	The Banker Innovation in Digital Banking Awards 2023: Transformation Project (Agen BRILink)	1 September 2023	The Banker	Banking	London	Internasional
140	Treasury & FX Award Alpha Southeast Asia: The Best FX Bank for Retail Client	7 September 2023	Alpha Southeast Asia	Treasury		Internasional
141	The 4th ASEAN PR Excellence Awards 2023: Best Government Public Relations di Indonesia	8 September 2023	ASEAN PR Network (APRN)	Public Relations	Vietnam	Internasional
142	4th Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN & BUMD	13 September 2023	TRAS N CO Indonesia	Banking	Jakarta	Nasional
143	The Asian Banker Indonesia Awards 2023: Best Wealth Management Bank in Indonesia	14 September 2023	Asian Banker	Banking	Jakarta	Internasional
144	The 14th IICD Corporate Governance Conference and Award: BRI sebagai Top 50 emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs)	18 September 2023	IICD	CGC	Jakarta	Nasional
145	IDX Channel Anugrah Inovasi Indonesia: Nominasi Penghargaa Khusus Kategori Produk Dan Model Bisnis (BRI Digital Transformation)	20 September 2023	Bursa Efek Indonesia	Banking	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
146	The Asset Triple A Private Capital Awards 2023: Best Private Bank for HNWIs, Indonesia	20 September 2023	The Asset	Banking	Hong Kong	Internasional
147	Detik.com Awards 2023: Aplikasi Keuangan Paling Inovatif (BRIMO)	21 September 2023	Detik.com	Brand	Jakarta	Nasional
148	Detik.com Awards 2023: Bank dengan Kinerja Keuangan Terbaik	21 September 2023	Detik.com	Banking	Jakarta	Nasional
149	Detik.com Awards 2023: Strategi Corporate Communication Terbaik di Perbankan	21 September 2023	Detik.com	Public Relations	Jakarta	Nasional
150	ICCA 2023 Contact BRI: Best Technology Innovation - Platinum	26 September 2023	ICCI	Banking	Jakarta	Nasional
151	ICCA 2023 Contact BRI: Best Employee Engagement - Platinum	26 September 2023	ICCI	Human Capital	Jakarta	Nasional
152	ICCA 2023 Contact BRI: Best Digital Media - Gold	26 September 2023	ICCI	Digital	Jakarta	Nasional
153	ICCA 2023 Contact BRI: Best Customer Experience - Gold	26 September 2023	ICCI	Service	Jakarta	Nasional
154	ICCA 2023 Contact BRI: Best People Development - Silver	26 September 2023	ICCI	Human Capital	Jakarta	Nasional
155	ICCA 2023 Contact BRI: Best Scheduling - Platinum	26 September 2023	ICCI	Team Work	Jakarta	Nasional
156	ICCA 2023 Contact BRI: Nilam Putri R - Best Agent Digital Email - Silver	26 September 2023	ICCI	Individual	Jakarta	Nasional
157	ICCA 2023 Contact BRI: Sunatul Fudhlah - BTB Agent Inbound - Bronze	26 September 2023	ICCI	Individual	Jakarta	Nasional
158	ICCA 2023 Contact BRI: Andita Boni B - Best Desk Control - Bronze	26 September 2023	ICCI	Individual	Jakarta	Nasional
159	Peringkat ke 3 Transaksi Tertinggi (Kategori Seller Nasional) dalam Business Matching Manado	30 September 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
160	Peringkat ke 2 Transaksi Tertinggi (Kategori Seller Lokal) dalam Business Matching Manado	30 September 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Regional
161	Marketeer's Editor Choice Award 2023 : BRIMO Transfer Internasional sebagai The Best Remittance Service in Mobile Apps of The Year	10 Oktober 2023	Marketeers	Banking	Jakarta	Nasional
162	CEO Achievement Awards 2023: Best Performance Chief Executive Officer in Encouraging Corporate Culture Transformation to Maintain Business Growth	14 Oktober 2023	CEO Business Forum Indonesia & Warta Ekonomi	Individual	Yogyakarta	Nasional
163	Penghargaan Nasional Bagi Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2023	17 Oktober 2023	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Human Capital	Jakarta	Nasional



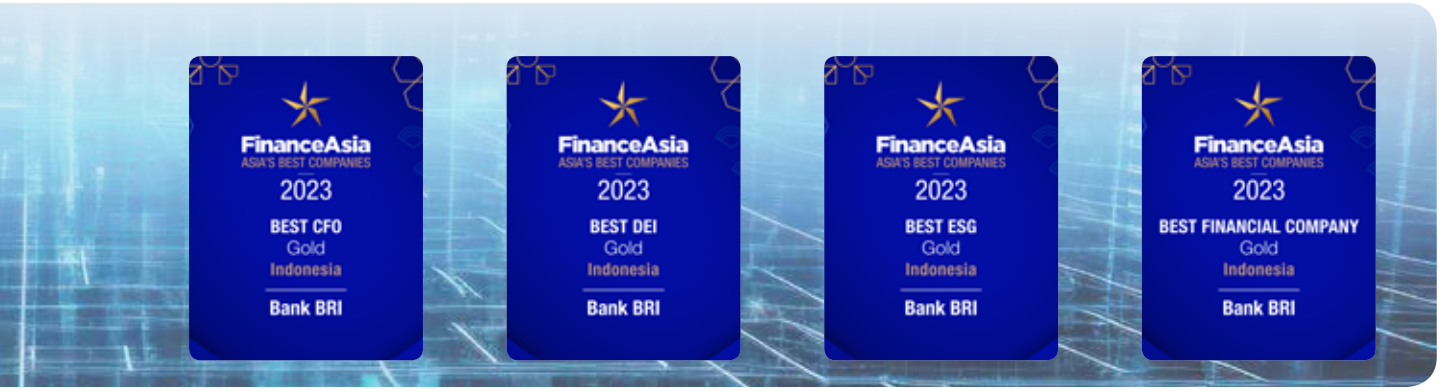
No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
164	Artajasa ATM Bersama Awards 2023: BRI sebagai The Best Issuer ATM Bersama	20 Oktober 2023	ATM Bersama	Banking	Jakarta	Nasional
165	Artajasa ATM Bersama Awards 2023: BRI sebagai The Most Transaction Growth ATM	20 Oktober 2023	ATM Bersama	Banking	Jakarta	Nasional
166	Award CSR Republika 2023: CSR Bidang Infrastruktur (BRI Peduli Ini Sekolahku)	26 Oktober 2023	Republika	Banking	Jakarta	Nasional
167	Keterbukaan Informasi Digital 5.0KIP BUMN Awards 2023: The Most Interact BUMN By Engagement	27 Oktober 2023	BUMN Track	Banking	Bali	Nasional
168	Keterbukaan Informasi Digital 5.0KIP BUMN Awards 2023: Best of All by Audience, Activity, Engagement	27 Oktober 2023	BUMN Track	Banking	Bali	Nasional
169	The Winner of Best Workplace (Top of Mind) Survey 2023 by Korn Ferry Indonesia & SWA	30 Oktober 2023	Korn Ferry Indonesia & SWA	HR	Jakarta	Nasional
170	The Best Investortrust Companies 2023: Kapitalisasi pasar lebih dari Rp25 Triliun	31 Oktober 2023	Investortrust	Banking	Jakarta	Nasional
171	Best in Future of Intelligence award in the IDC Future Enterprise Awards 2023 for Indonesia	31 Oktober 2023	IDC	Banking	Singapore	Internasional
172	Best in Future of Intelligence award in the IDC Future Enterprise Awards 2023 Regional (Asia Pacific)	31 Oktober 2023	IDC	Banking	Singapore	Internasional
173	Lelang Award - Kategori Pemohon Lelang Eksekusi	November 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
174	Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT) 2023: Platinum Rank - Sustainability Report 2022 of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6 November 2023	National Center for Corporate Reporting (NCCR)	Banking	Jakarta	Nasional
175	CNBC Awards 2023: Most Integrated Innovation Platform for Business Solution - Qlola by BRI	7 November 2023	CNBC	Banking	Jakarta	Nasional
176	Stellar Workplace Award 2023: Top 5 Stellar Workplace Program in Social Era 5.0	8 November 2023	GML Performance Consulting & Majalah Kontan	Human Capital	Jakarta	Nasional
177	Stellar Workplace Award 2023: Top 5 Favorite Company to Work for the New Generation	8 November 2023	GML Performance Consulting & Majalah Kontan	Human Capital	Jakarta	Nasional
178	Stellar Workplace Award 2023: Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment	8 November 2023	GML Performance Consulting & Majalah Kontan	Human Capital	Jakarta	Nasional
179	Stellar Workplace Award 2023: Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction	8 November 2023	GML Performance Consulting & Majalah Kontan	Human Capital	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
180	Anugerah Tokoh Motivator dan Inspirasi Negeri 2023: Best Leader Corporate Company 2023	22 November 2023	Sorotnews	Individual	Jakarta	Nasional
181	The Best of Sorot News Golden Award 2023	22 November 2023	Sorotnews		Jakarta	Nasional
182	Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023	22 November 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
183	Certified Securities Analyst (CSA) Awards 2023: The Best BUMN Banking Financial Sector Categorized on The Main Board	23 November 2023	Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community	Banking	Jakarta	Nasional
184	ESG Disclosure Transparency Awards 2023: Leadership AAA	28 November 2023	Investortrust	Banking	Jakarta	Nasional
185	Top 5 Best Partner Engagement 2023 by Universitas Telkom	28 November 2023	Universitas Telkom	HR	Jakarta	Nasional
186	Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards: The Most Committed Chief Executive Officer State-Owned Enterprises in Driving Technological Change	30 November 2023	Bisnis Indonesia	Individual	Jakarta	Nasional
187	Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards: The Best CFO : Excellent in Analytics Data Driven	30 November 2023	Bisnis Indonesia	Individual	Jakarta	Nasional
188	Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards: The Best State Owned Enterprise In 2023	30 November 2023	Bisnis Indonesia	Individual	Jakarta	Nasional
189	BI Award 2023: BRI sebagai Bank Pendukung Keuangan Hijau Terbaik - Bank KBMI 3 dan 4	29 November 2023	Bank Indonesia	Banking	Jakarta	Nasional
190	BI Award 2023: BRI sebagai Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Valas Terbaik	29 November 2023	Bank Indonesia	Banking	Jakarta	Nasional
191	BI Award 2023: BRI sebagai Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif Terbaik - Bank KBMI 3 dan 4	29 November 2023	Bank Indonesia	Banking	Jakarta	Nasional
192	Indonesia Best Digital Finance Awards 2023: BRI sebagai Best Digital Finance 2023 for Equitable and Integrated Banking Access Capabilities Category KBMI 4, SOE	29 November 2023	SWA	Banking	Jakarta	Nasional
193	The Best Contact Center Asia Pasific Tahun 2023 : Medali Silver Kategori Technology Innovation	29 November 2023	Contact Center Asia Pasific	Contact Center	Malaysia	Internasional
194	TOP CEO: BRI sebagai Perbankan dengan Kriteria Top Profit	1 Desember 2023	IDN Financial X TEMPO	Banking	Jakarta	Nasional
195	INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023: CEO of the Year - Sunarso	5 Desember 2023	Infobank	Individual	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
196	INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023: The Next Leader 23: Arga M Nugraha	5 Desember 2023	Infobank	Individual	Jakarta	Nasional
197	INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023: The Next Leader 23: Harsya Wardana	5 Desember 2023	Infobank	Individual	Jakarta	Nasional
198	INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023: The Next Leader 23: Viviana Dyah Ayu	5 Desember 2023	Infobank	Individual	Jakarta	Nasional
199	INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023: The Next Leader 23: Andrijanto	5 Desember 2023	Infobank	Individual	Jakarta	Nasional
200	INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT LEADERS FORUM 2023: Bankers of The Year - Supari	5 Desember 2023	Infobank	Individual	Jakarta	Nasional
201	Apresiasi Mitra BUMN Champion 2023: BRI sebagai BUMN Terbaik 2 Kategori Kreditur/ Investor	5 Desember 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Nasional
202	Apresiasi Mitra BUMN Champion 2023: BRI sebagai BUMN Terbaik 3 Kategori Customer/Buyer	5 Desember 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Nasional
203	LPS Awards 2023: BRI sebagai Bank Teraktif Dalam Sosialisasi Program Penjaminan Simpanan	6 Desember 2023	LPS	Banking	Jakarta	Nasional
204	LPS Awards 2023: BRI sebagai Bank Terinovatif Dalam Sosialisasi Program Penjaminan Simpanan untuk KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) 4	6 Desember 2023	LPS	Banking	Jakarta	Nasional
205	CNBC Indonesia Awards: Maestro CEO of The Year	13 Desember 2023	CNBC	Individual	Jakarta	Nasional
206	CNBC Indonesia Awards: Most Profitable Bank with Best GCG	13 Desember 2023	CNBC	Banking	Jakarta	Nasional
207	Digital Banking Awards 2023: BRI sebagai Best of The Best Kategori Dimensi Data, Dimensi Teknologi, Dimensi Customer Kelompok Bank KBMI 4	14 Desember 2023	Investortrust	Banking	Jakarta	Nasional
208	Digital Financial Excellence Award: Bank Devisa KBMI-2 (Modal Inti Rp70 Triliun ke Atas)	19 Desember 2023	Media Asuransi	Banking	Jakarta	Nasional
209	Digital Financial Excellence Award: Bank BUMN	19 Desember 2023	Media Asuransi	Banking	Jakarta	Nasional
210	Indonesia Good Corporate Governance Award: The Most Trusted Companies 2022	20 Desember 2023	SWA & The Indonesian Institute for Corporate Governance	Banking	Jakarta	Nasional



No	Penghargaan	Waktu	Lembaga	Kategori	Tempat Pelaksanaan	Level
211	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	20 Desember 2023	KIP	Communication	Jakarta	Nasional
212	Annual report Award 2022	Desember 2023	KNKG	Banking	Jakarta	Nasional
213	Peringkat ke 1 BUMN dengan Nilai Belanja Terbesar dalam Business Matching	Desember 2023	Kementerian BUMN	Banking	Jakarta	Nasional
214	Investor Meeting: Dealer Utama Surat Utang Negara Dengan Kinerja Terbaik Tahun 2022	Desember 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
215	Investor Meeting: Dealer Utama Surat Utang Negara Dengan Kinerja Terbaik Di Pasar Perdana Tahun 2022	Desember 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
216	Investor Meeting: Dealer Utama Surat Utang Negara Dengan Kinerja Terbaik Tahun 2022, Kategori Bank Umum Konvensional	Desember 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
217	Investor Meeting: Dealer Utama Surat Utang Negara Dengan Kinerja Terbaik Tahun 2023	December 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
218	Investor Meeting: Dealer Utama Surat Utang Negara Dengan Kinerja Terbaik Di Pasar Perdana Tahun 2023	December 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
219	Investor Meeting: Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara Terbaik Tahun 2023	December 2023	Kementerian Keuangan RI	Banking	Jakarta	Nasional
220	Piagam Penghargaan BRI Telah Memenuhi Standar Indikator Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA)	Desember 2023	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Banking	Jakarta	Nasional
221	The Best State Bank	Desember 2023	LSEG Indonesia Award	Treasury	London	Internasional

Sertifikasi

Tabel Sertifikasi BRI

No	Nama Sertifikasi	Penerbit Sertifikasi	Periode Sertifikasi	Tanggal Penerimaan	Divisi
1	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	KAN (Regional) & ANAB (Internasional) dengan Nomor Sertifikat FS 782968 tanggal 5 Januari 2023	5 Januari 2023 s/d 4 Januari 2026 (Masa Berlaku Sertifikat 3 Tahun)	5 Januari 2023	Compliance Division
2	Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan	British Standard Institution dengan Nomor Sertifikat MSFC 782970 tanggal 16 Januari 2023	16 Januari 2023 s/d 15 Januari 2026 (Masa Berlaku Sertifikat 3 Tahun)	16 Januari 2023	Compliance Division

No	Nama Sertifikasi	Penerbit Sertifikasi	Periode Sertifikasi	Tanggal Penerimaan	Divisi
3	Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I	Juni 2023 (Masa Berlaku Sertifikat 3 Tahun)	09 Juni 2023	Operational Risk Division
4	Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	The British Standards Institution	Januari 2022 - Januari 2025 (3 Tahun)	31 Januari 2022	Enterprise Data Management
5	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	The British Standards Institution	Januari 2022 - Januari 2025 (3 Tahun)	31 Januari 2022	Enterprise Data Management
6	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	LRQA Limited	05 November 2023 s/d 04 November 2026 (3 Tahun)	05 November 2023	Investment Services Division
7	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	LRQA Limited	10 Juni 2022 - 9 Juni 2025 (3 tahun)	10 Juni 2022	Fixed Assets Management & Procurement Policy Division
8	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	KAN (Regional) & UKAS (International)	31 Maret 2021 - 04 Desember 2023	31 Maret 2021	Head Office Audit
9	Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	The British Standards Institution	November 2023 - November 2025	22 November 2023	Information Security Division
10	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	SGS United Kingdom Ltd	5 februari 2021 - 21 Januari 2024	5 februari 2021	Financial & Management Accounting Division
11	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	PT Lloyd's Register Indonesia	23 Oktober 2019 - 22 Oktober 2025	23 Oktober 2019	Divisi Marketing Communication
12	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	The British Standard Institution	8 Januari 2021 – 8 Januari 2024	8 Januari 2024	Digital Banking Development & Operation
13	Sertifikasi ISO 27001:2015 Surveillance Fungsi CAO & Extend Scope BRImo	PT BSI Group Indonesia	18 November 2021 – 17 November 2024	18 November 2021	Application Management & Operation Division
14	Sertifikasi ISO 29119-1:2022 Software & System Engineering - Software Testing (4 Functions)	PT BSI Group Indonesia	8 Oktober 2022 – 07 Oktober 2025	8 Oktober 2022	Application Management & Operation Division
15	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 veillance Brinets Express, Brilink Mobile, & BRImo, Extend Scope Brispot	PT BSI Group Indonesia	November 2022 - November 2024	November 2022	Application Management & Operation Division
16	Sertifikasi ISO 27001:2013 Surveillance 3 Fungsi (NOC, QAN, DCI)	PT BSI Group Indonesia	6 Desember 2021 – 5 Desember 2024	6 Desember 2021	IT Infrastructure & Operation Division
17	Sertifikasi ISO 27001:2013 Initial/Extend Scope 5 Fungsi (QAC, DRM CPO, IDC, IDN)	PT SGS Indonesia	2022 - 2024	2022	IT Infrastructure & Operation Division
18	Sertifikasi ISO 27001:2013 Resertifikasi 4 Fungsi (SCO, GCS, PAC, RGU)	PT SGS Indonesia	14 Desember 2022 – 28 Agustus 2025	14 Desember 2022	IT Infrastructure & Operation Division
19	Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	The British Standard Institution	April 2022 - April 2025	April 2022	Digital Banking Development & Operation

Informasi yang Tersedia pada *Website*



BRI sebagai perusahaan publik memiliki situs web utama Bank yaitu www.bri.co.id. Situs web tersebut dibuat dan dikelola berdasarkan peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang *website* emiten atau perusahaan publik. Situs web Bank dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh *stakeholder*.

Informasi yang terdapat pada situs web Bank dimuat sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015, di mana Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan informasi, yakni:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Informasi pada *web* BRI secara berkala terus dilengkapi dan diperbarui dengan berbagai informasi penting, antara lain:

1. **Beranda**
   Berisi berbagai informasi utama BRI menyajikan fast menu menuju promosi terkini, karir (Life at BRI), pendaftaran BRImo, Info Lelang, GCG, dan CSR. Selain itu terdapat juga informasi kurs valas, harga saham, berita, informasi serta pengumuman terkini, edukasi waspada modus, kalkulator simulasi kredit konsumer (KPR & BRIguna), hingga informasi perusahaan anak BRI.
2. **Tentang Kami**
   Bar menu ini berisi tentang informasi umum terkait BRI (Visi dan Misi, Sejarah BRI, Manajemen, Unit Kerja Luar Negeri, dan lain-lain), Tata Kelola Perusahaan (ACGS, Struktur, Proses, Penilaian, serta hasil Tata Kelola hingga *Whistle Blowing System*), Perusahaan Anak, Edukasi, dan BRI Peduli.
3. **Produk dan Layanan**
   BRI membagi produk dan layanan menjadi 3 kategori (Individu, UMKM, Korporat) untuk memudahkan publik dalam menemukan produk dan layanan sesuai profil serta kebutuhannya. Menu bar ini menyediakan beragam produk dan layanan Bank yang di antaranya meliputi Simpanan (Tabungan, Giro, dan Deposito), Pinjaman komersial dan konsumer, Kartu Kredit, Investasi, Trade Finance & Services, Agen BRILink dan Layanan Perbankan lainnya.
4. **Tata Kelola Perusahaan**
   Beranda Tata Kelola Perusahaan (GCG) ini memuat informasi lengkap terkait Tata Kelola Perusahaan BRI dengan pilihan menu bar Tentang Kami, Manajemen, RUPS, Struktur GCG, Laporan GCG, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Keterbukaan, dan Informasi Lain, yang dapat diakses melalui integrasi microsite (ir-bri.com). Melalui beranda GCG ini, publik dapat mengetahui informasi mengenai praktik GCG yang telah dilakukan oleh BRI, seperti di bawah ini:
   a. ACGS, *website* BRI juga memenuhi standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mencakup:
      - Part A. *Rights of Shareholders*
      - Part B. *Equitable Treatment of Shareholders*
      - Part C. *Role of Stakeholder*
      - Part D. *Disclosure & Transparancy*
      - Part E. *Responsibilities of the Board*
   b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank
   c. Struktur GCG: Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pengawas Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi
   d. Proses GCG: Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, dan hal lainnya seperti: BOD Charter, Directors Succession Policy, Audit Charter, Board of Commissioners' and Board of Directors' Shareholding, dan Dividen Policy
   e. Penilaian GCG: Komitmen Tata Kelola dan Penilaian GCG yang terdiri dari Self Assessment GCG dan Indpendent Party GCG Assessment (Eksternal Auditor & ACGS)
   f. Hasil GCG: Penghargaan dan Hasil Penilaian GCG
   g. Whistleblowing System: Kategori Laporan dan Saluran Pelaporan
   h. Informasi Lainnya: AML & CFT Policy, USA Patriot Act Certification, Board of Commissioners' and Board of Directors' Shareholding, dan lain sebagainya.
5. **Investor**
   Menu bar ini memuat pilihan Informasi Finansial, Informasi Dividen, Informasi Saham/Obligasi, Berita & Peristiwa dan Permintaan Informasi yang dapat diakses melalui integrasi *microsite* (ir-bri.com). Beberapa laporan penting seperti: Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan Kuartal, Laporan Keuangan Bulanan, dan informasi terkait lainnya dapat diakses dalam pilihan menu Informasi Finansial.
6. **BRI Peduli (TJSL)**
   Berisi informasi mengenai pelaksanaan 3 (tiga) pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang telah dilakukan BRI yaitu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
7. **Keberlanjutan**
   Informasi mengenai Keberlanjutan BRI dapat diakses melalui microsite (www.ir-bri.com/esg/home.html) *Microsite* ini berisi informasi mengenai perjalanan ESG (*Environmental*, *Social, and Governance*) BRI, kinerja dan implementasi inisiatif Keberlanjutan BRI, serta informasi *sustainability rating & indices* BRI. *Sustainability Report* juga dapat diunduh melalui *microsite* ini.

Secara keseluruhan, *Website* BRI telah mencerminkan komitmen BRI dalam menjunjung asas keterbukaan dan transparansi.

Analisis dan Pembahasan Manajemen **atas Kinerja Bank**



Laba bersih tahun 2023 berhasil tercapai sebesar Rp60,43 triliun, meningkat 17,54% yoy jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp51,41 triliun. Pertumbuhan laba bersih konsolidasian tersebut didorong oleh pertumbuhan laba bersih Perseroan secara *bank only* yang tercatat sebesar Rp53,15 triliun atau mampu tumbuh sebesar 11,13% yoy dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp47,83 triliun, serta kontribusi positif seluruh Perusahaan Anak sehingga agregasi laba Perusahaan Anak naik 39,65% yoy atau naik Rp2,08 triliun.


BRI
QLola
BRI SPOT

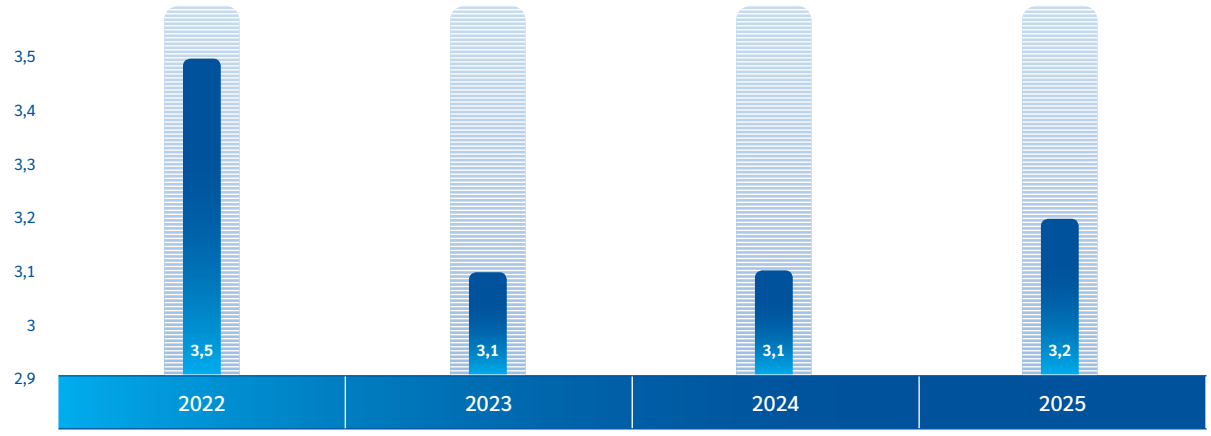


Tinjauan Perekonomian

Analisis Perekonomian Global

Laju pertumbuhan ekonomi global terus mengalami tekanan. Setelah mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, tren pertumbuhan ekonomi global kembali melambat tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi global tercatat sekitar 3,5% tahun 2022, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 6,3% tahun 2021. Hal itu disebabkan oleh kombinasi tekanan inflasi global yang tinggi karena disrupsi rantai pasok dan kenaikan bunga acuan yang sangat signifikan oleh berbagai bank sentral di dunia, khususnya The Fed. Tren pertumbuhan ekonomi global yang melambat diperkirakan berlanjut pada tahun 2023 dan pada tahun 2024. IMF per Januari 2024 memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 3,1% dan 3,1% **(Gambar 1)**.

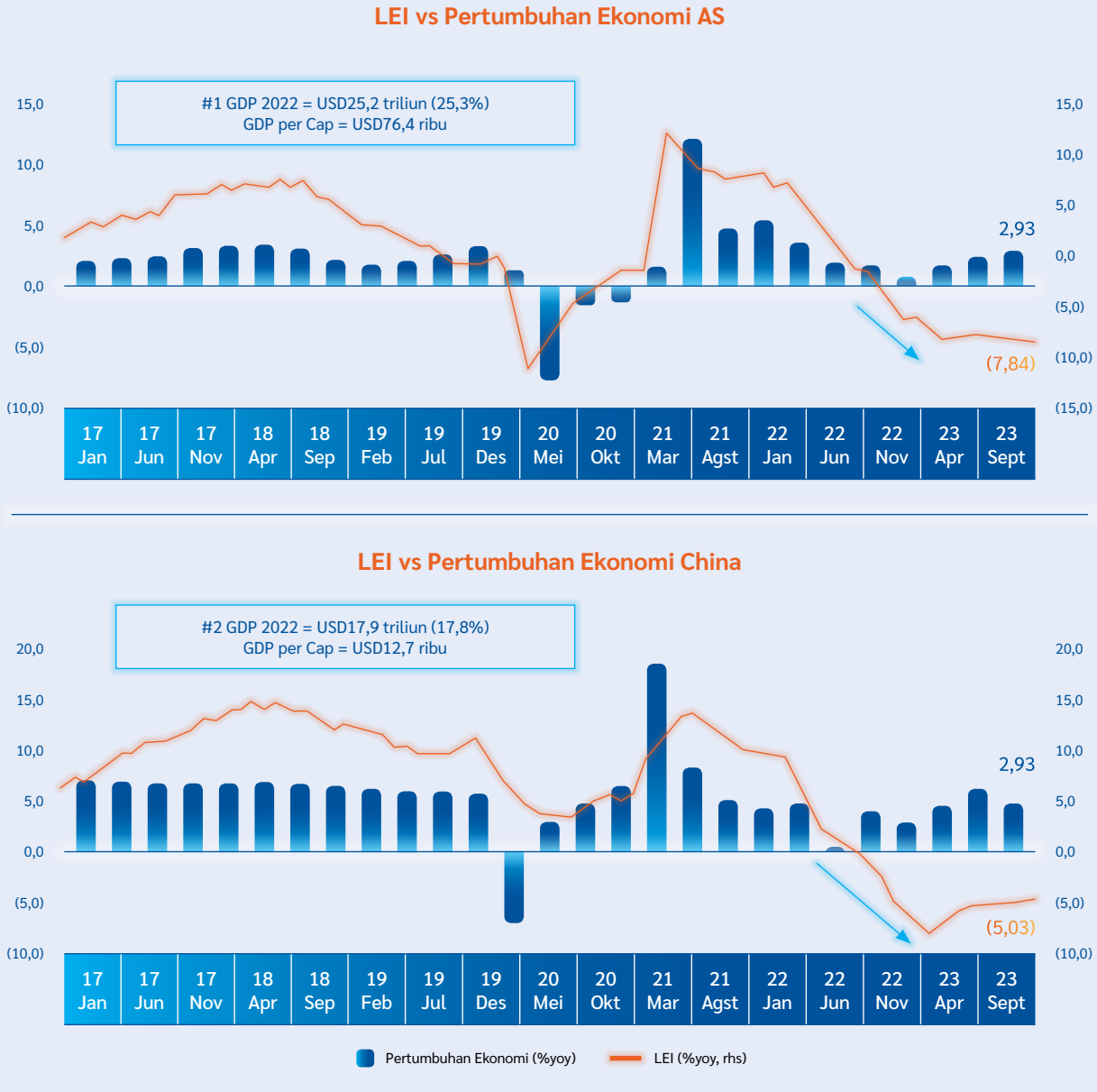
Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)



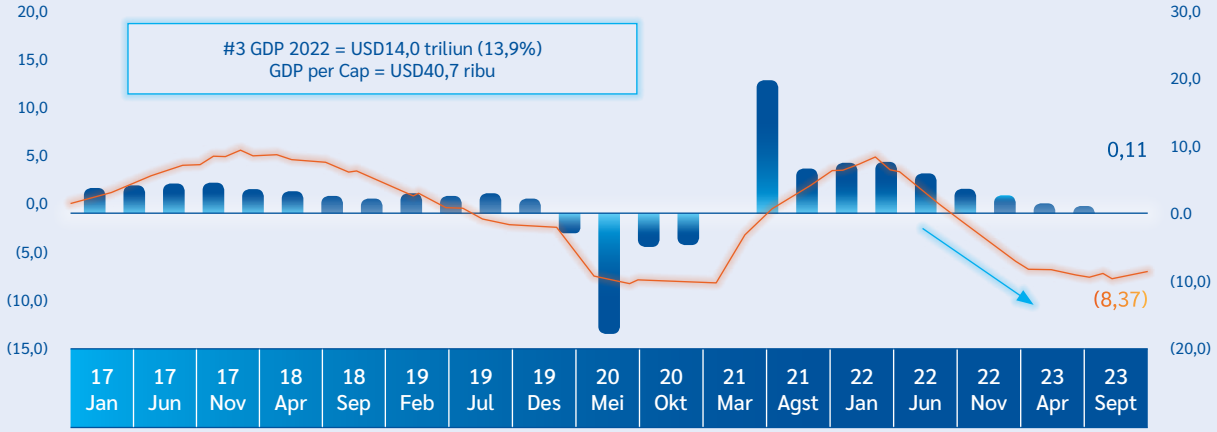
Sumber: International Monetary Fund (IMF), Januari 2024, Data diolah

Hingga Triwulan IV-2023, paling tidak terdapat empat indikator yang mencerminkan laju perlambatan ekonomi global, yaitu: (1) Pergerakan *Purchasing Manager Index* (PMI) yang melambat sejak Mei 2023, khususnya PMI manufaktur, (2) Penurunan laju ekspor berbagai negara utama seperti China dan AS, yang mengimplikasikan penurunan permintaan dunia, (3) Penurunan lowongan kerja aktif pada berbagai negara, yang mengimplikasikan penurunan aktivitas produksi, dan (4) Laju penurunan *Leading Economic Indicator* (LEI) pada berbagai negara utama di dunia. Dari keempat faktor tersebut, penurunan LEI pada berbagai negara utama di dunia (**Gambar 2**) menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa laju perekonomian global ke depan akan semakin tertekan dan melambat.

Gambar 2. Laju Pergerakan *Leading Economic Indicator* (LEI) dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



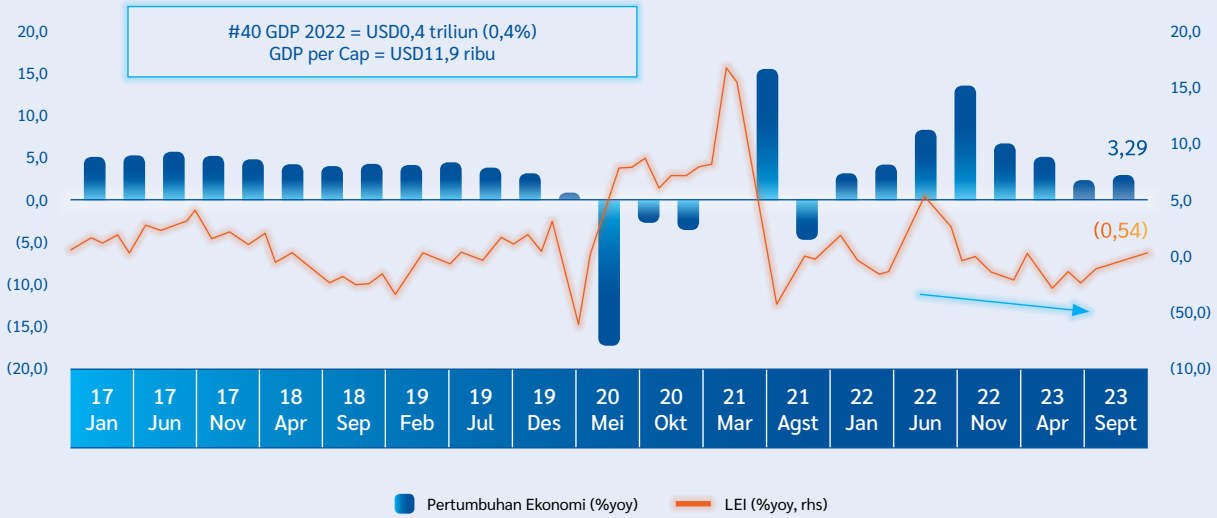
LEI vs Pertumbuhan Ekonomi Uni Eropa

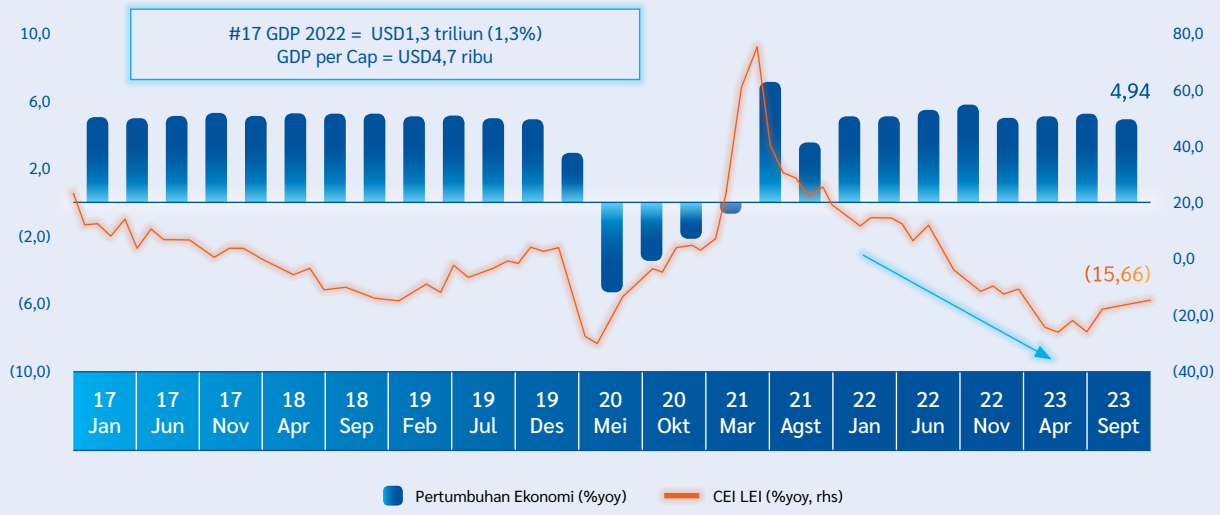


LEI vs Pertumbuhan Ekonomi Jepang



LEI vs Pertumbuhan Ekonomi Malaysia

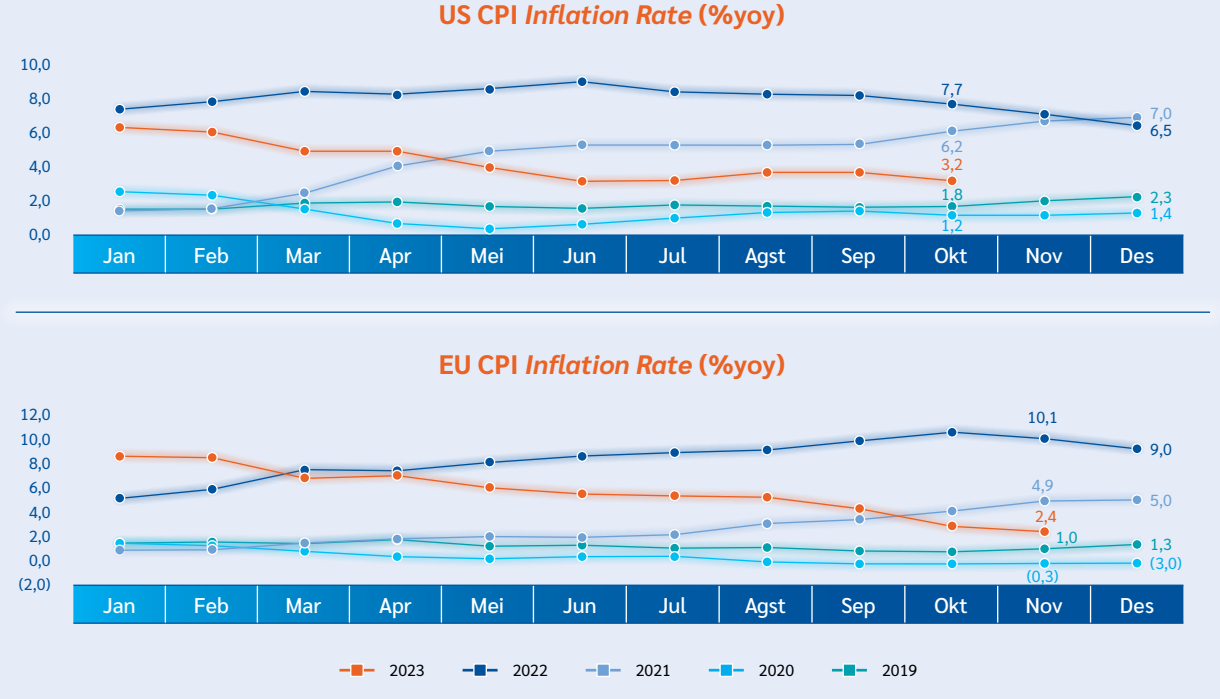




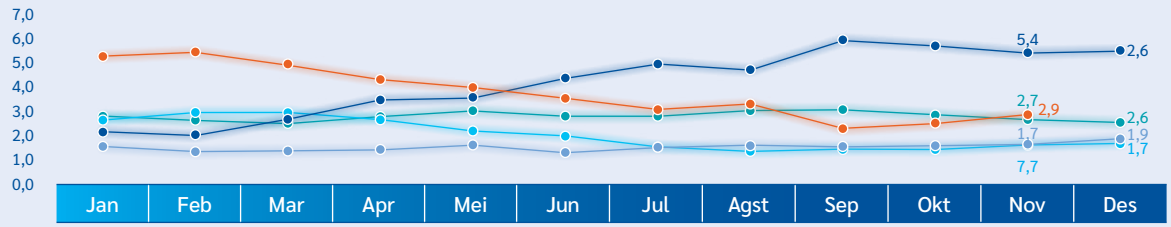
Sumber: CEIC dan Bloomberg, September 2023, Data diolah

Laju penurunan LEI pada berbagai negara disebabkan oleh adanya *downside risk* pemulihan ekonomi global karena masih tingginya suku bunga acuan sebagian besar bank sentral, sejalan dengan masih tingginya inflasi (terutama pada negara maju). Paling tidak terdapat empat tantangan utama yang perlu diwaspadai ke depan, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang masih dinamis dan berfluktuasi. Pertama, tren inflasi global yang secara historis masih cukup tinggi (**Gambar 3**). Laju inflasi pada berbagai negara saat ini memang dalam tren yang menurun, namun nilainya diperkirakan masih akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal (pre-pandemi tahun 2019).

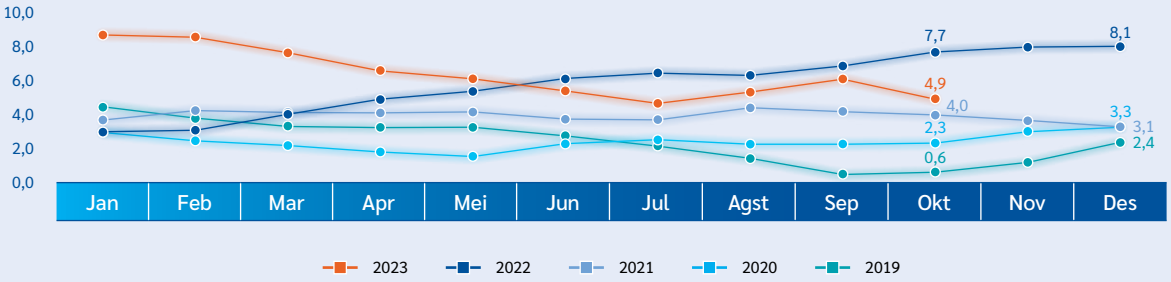
Gambar 3. Pergerakan Tingkat Inflasi Beberapa Negara dan Proyeksinya (%)



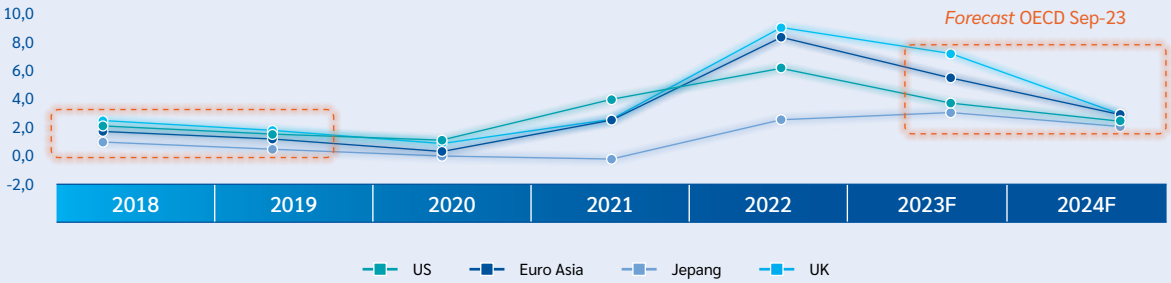
Indonesia CPI *Inflation Rate* (%yoy)



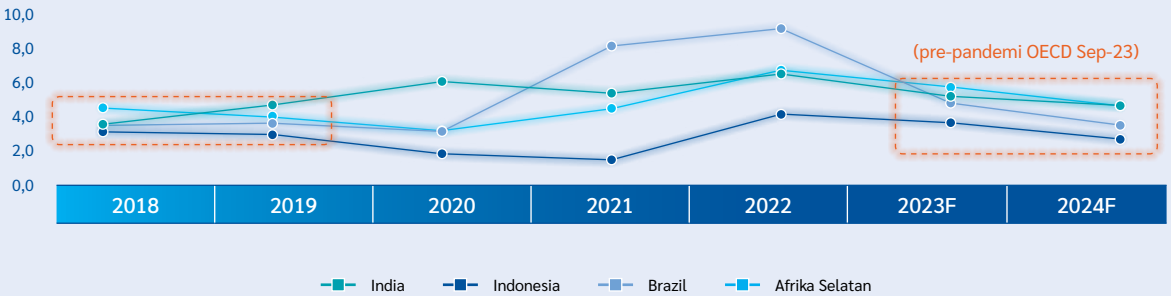
Philippines CPI *Inflation Rate* (%yoy)



Proyeksi Tingkat Inflasi CPI Beberapa Negara Maju dari OECD (%yoy)



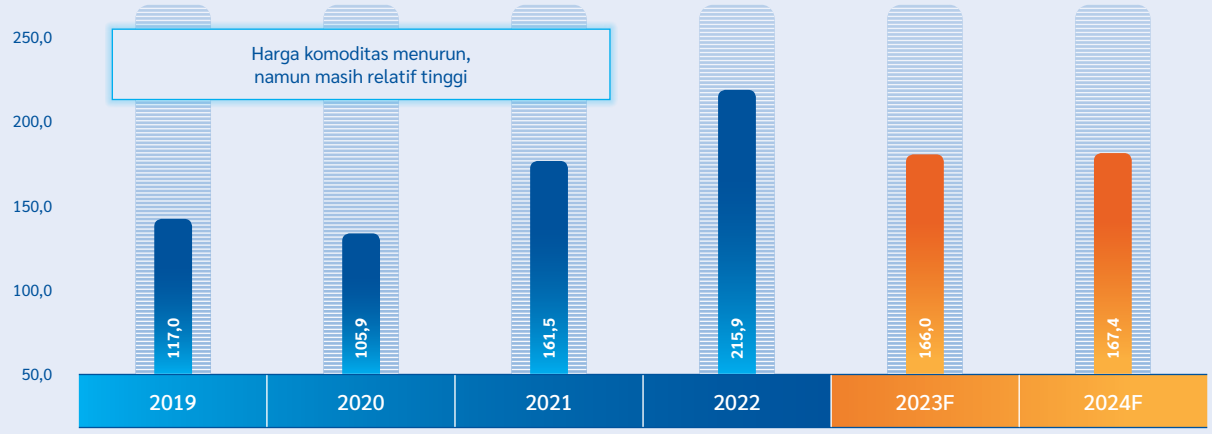
Proyeksi Tingkat Inflasi CPI Beberapa Negara Berkembang dari OECD (%yoy)



Sumber: CEIC dan OECD, September 2023, Data diolah

Tekanan inflasi yang diperkirakan masih tinggi tahun 2024 disebabkan oleh dorongan biaya suplai (*cost push inflation*) karena proyeksi harga komoditas global yang masih cukup tinggi, baik komoditas energi maupun pangan (**Gambar 4**). Dari sisi komoditas energi, harganya diperkirakan masih akan tinggi, khususnya pada minyak mentah karena pemotongan produksi minyak oleh OPEC. Sementara itu, di sisi komoditas pangan, disrupsi cuaca karena fenomena El-Nino diperkirakan akan mengganggu aktivitas produksi bahan pangan dan dapat mendorong kenaikan harga pangan.

Gambar 4. Proyeksi Indeks Harga Komoditas Energi dan Pangan Dunia (2016 = 100)



Sumber: International Monetary Fund (IMF), Oktober 2023

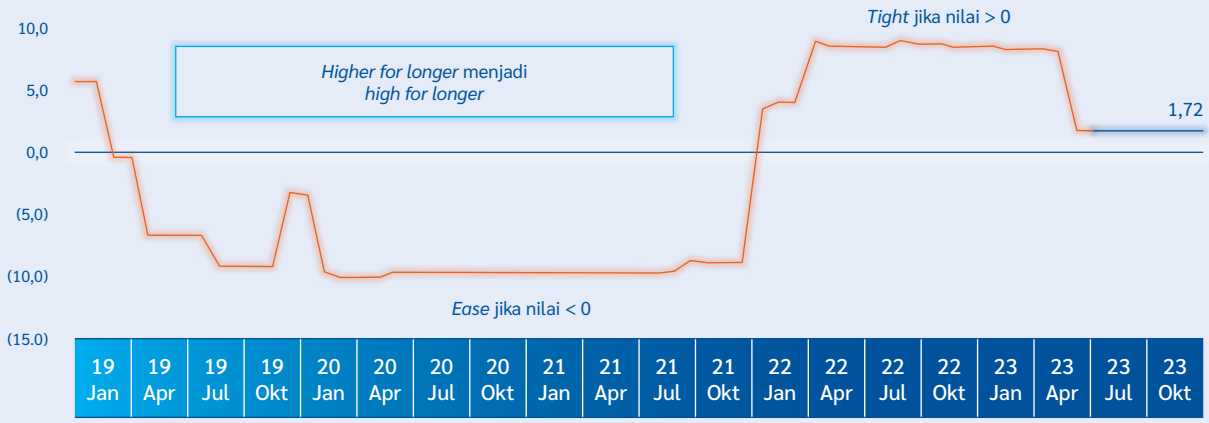
Kedua, kondisi geopolitik yang tidak pasti (**Gambar 5**), dapat memicu kembali disrupsi rantai pasok barang kebutuhan primer dan komoditas energi, sehingga dapat berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketiga, kebijakan moneter oleh berbagai bank sentral di dunia diperkirakan akan bertahan pada waktu yang relatif lebih lama atau disebut sebagai kondisi *high for longer* (**Gambar 6**). Masih ketatnya kebijakan moneter global dapat menekan pertumbuhan kredit, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global secara umum. Di pasar finansial, kebijakan moneter yang tetap ketat dapat mengurangi likuiditas global, yang akhirnya dapat memicu instabilitas sistem finansial global. Keempat, pemulihan ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat aktivitas industri dan permintaan konsumen yang melambat. Hal itu disebabkan oleh masih berlangsungnya krisis properti, lemahnya keyakinan konsumen, dan tingginya angka pengangguran umur produktif.

Gambar 5. Pergerakan Indeks Risiko Geopolitik Global (3M-MA)



Sumber: Caldara *and* Matteo (2022), November 2023

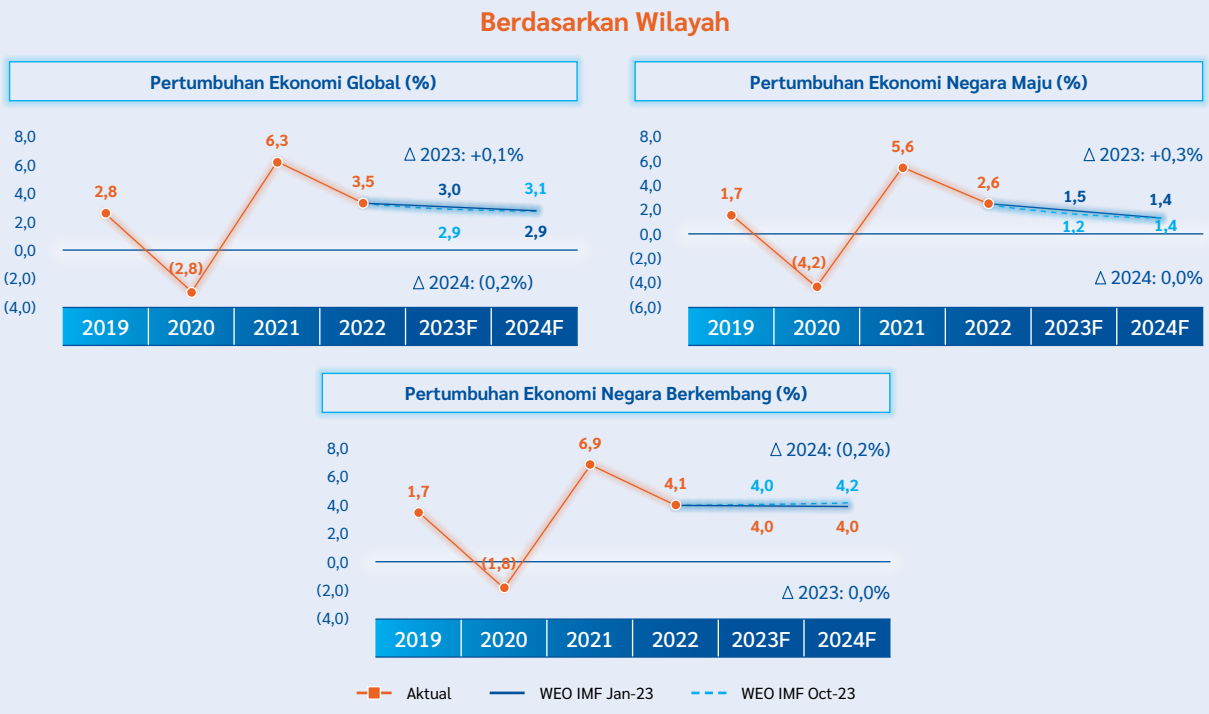
Gambar 6. Pergerakan dan Proyeksi *Global Monetary Policy Tracker Index*

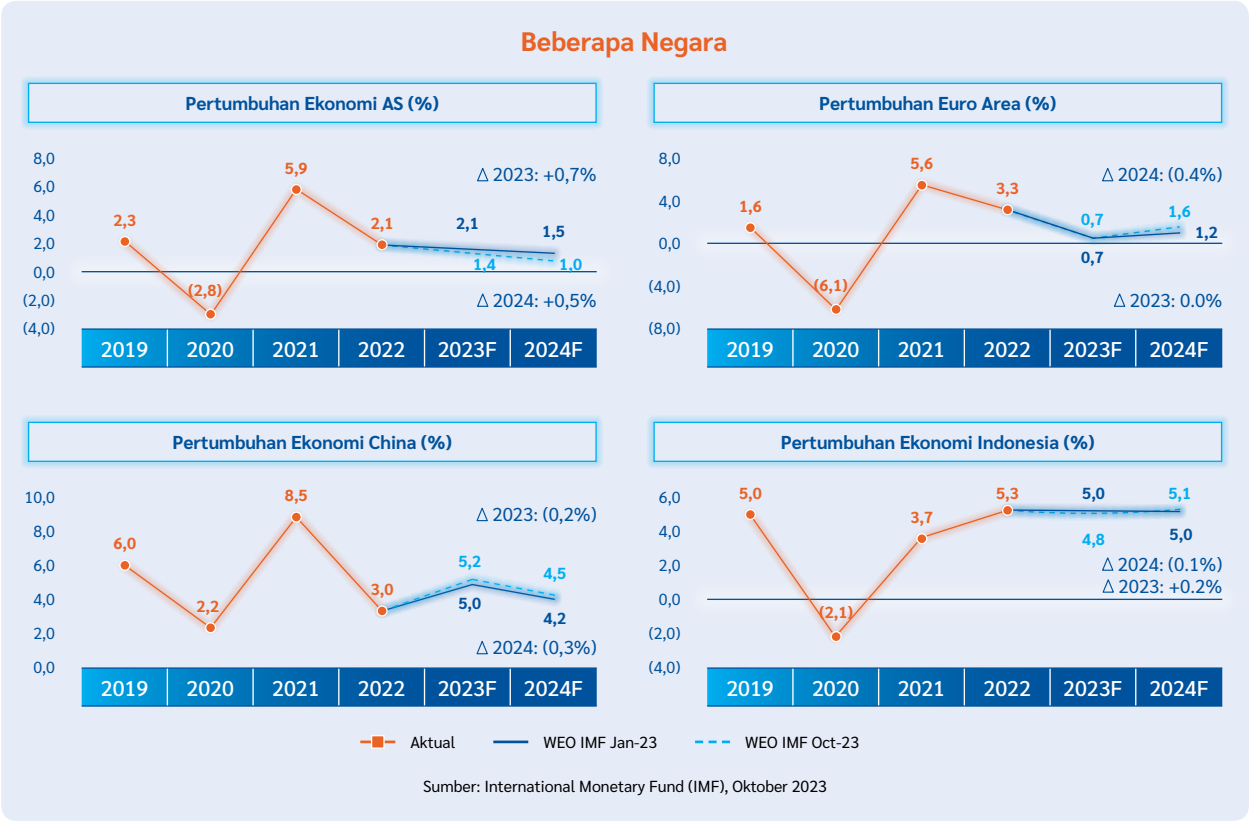


Sumber: Caldara *and* Matteo (2022), November 2023

Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut diperkirakan akan berdampak negatif terhadap laju pemulihan ekonomi global tahun 2023 dan 2024. Lebih rinci, IMF memperkirakan bahwa perlambatan ekonomi tahun 2024 akan terjadi di banyak negara, khususnya AS dan China (**Gambar 7**).

Gambar 7. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara di Dunia (%)



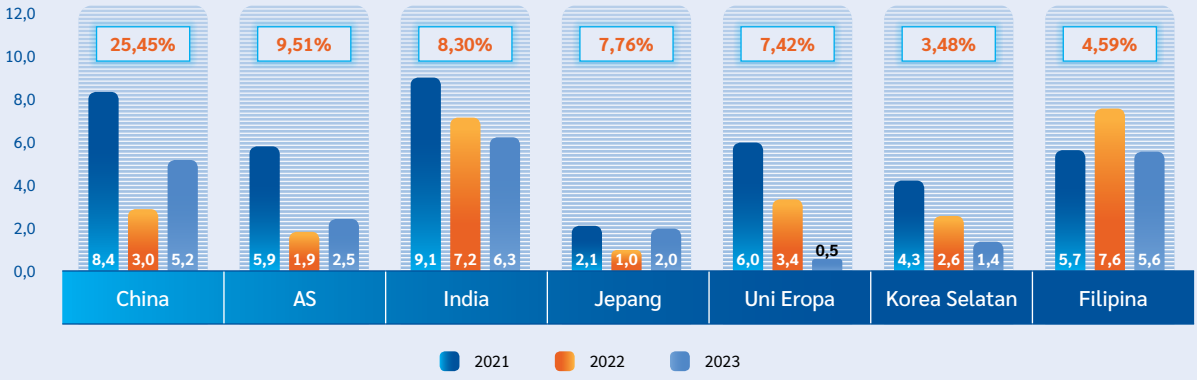


Sumber: International Monetary Fund (IMF), Oktober 2023

Analisis Perekonomian Nasional

Perekonomian global yang melambat mulai berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, perekonomian nasional secara *full year* tumbuh sebesar 5,05% , lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,31%. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi partner dagang utama Indonesia pada periode yang sama, antara lain: India dan Uni Eropa. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi India tercatat sebesar 6,3%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 7,2%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa juga mengalami penurunan dari 3,4%yoy pada 2022 menjadi 0,5% pada 2023 **(Gambar 8)**. Sementara itu pertumbuhan ekonomi China meningkat dari 3,0% di 2022 menjadi 5,2% di 2023 ditopang pelonggaran restriksi pandemi Covid-19 dan berbagai stimulus pemerintah.

Gambar 8. Pertumbuhan Ekonomi Partner Dagang Utama Indonesia

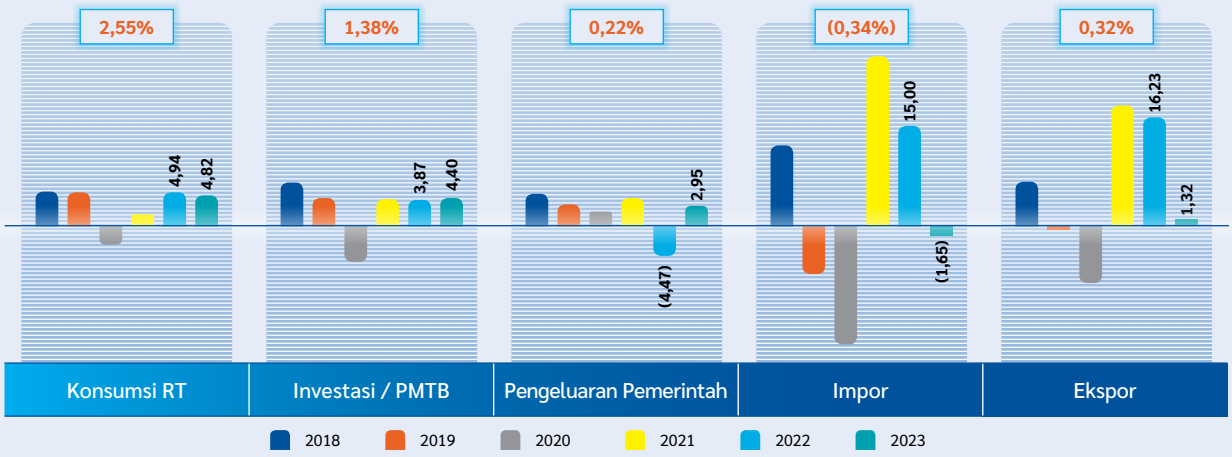


Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2023

Berdasarkan permintaan agregat, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun pada tahun 2023 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga (2023 = 4,82 %; 2022 = 4,94 %) dan perlambatan ekspor (2023 = 1,32 %; 2022 = 16,23%) **(Gambar 9)**. Perlambatan konsumsi domestik sejalan dengan melambatnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari memburuknya pertumbuhan penjualan perusahaan-perusahaan ritel dan menurunnya tingkat inflasi inti. Sementara itu ekspor melambat akibat melambatnya aktivitas ekonomi global, terutama di negara mitra dagang Indonesia.

Di sisi lain, komponen investasi / PMTB meningkat (2023 = 4,40 %; 2022 = 3,87%) ditopang proyek strategis nasional dan pembangunan ibukota baru. Satu lagi komponen pendukung pertumbuhan PDB adalah Pengeluaran pemerintah yang juga meningkat (2023 = 2,95 %; 2022 = -4,47%) seiring mendekatnya momentum pemilu dan bantuan sosial untuk mitigasi perlambatan ekonomi. Sementara itu impor terkontraksi (2023 = -1,65 %; 2022 = 15,00%) seiring melambatnya aktivitas ekonomi dan produksi dalam negeri.

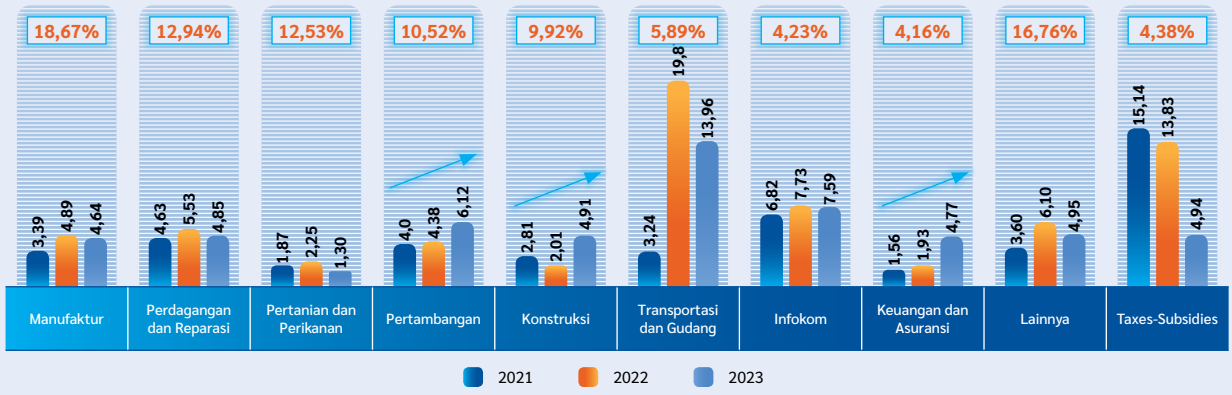
Gambar 9. Pertumbuhan Komponen Permintaan Agregat Indonesia (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Januari 2024; Angka dalam kotak hijau adalah kontribusi variabel tersebut ke pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023

Secara sektoral, hampir seluruh lapangan usaha bertumbuh melambat di tahun 2023. Salah satu penyebab utama adalah perlambatan sektor manufaktur (2023 = 4,64%; 2022 = 4,89%) yang berkontribusi 18,67% terhadap PDB. Selain itu, pertumbuhan sektor perdagangan (2023 = 4,85 %; 2022 = 5,53%) dan pertanian (2023 = 1,30 %; 2022 = 2,25%) juga dalam tren yang melambat. Namun demikian, beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan yang meningkat, yaitu sektor keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara itu secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan ditopang oleh proyek pembangunan ibukota baru.

Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Januari 2024; Angka dalam kotak hijau adalah kontribusi variabel tersebut ke pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan cenderung melambat terbatas. Hal itu ditunjukkan oleh pergerakan LEI Indonesia yang menurun dan tumbuh kontraktif. Selain itu, terdapat ancaman dari fenomena El-Nino yang dapat mendorong peningkatan inflasi domestik. Periode El-Nino menyebabkan kekeringan pada berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada aktivitas produksi pangan, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan inflasi domestik. Kondisi itu tentu akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dalam jangka pendek, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski begitu, dalam jangka pendek terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya adalah potensi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk menopang perlambatan konsumsi masyarakat, berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur yang sempat tertunda akibat pandemi, potensi investasi domestik dan asing di sektor energi dan komoditas, dan pesta pemilihan umum tahun 2024. Dengan berbagai kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,89%-5,18% pada tahun 2023 dan 4,81%-5,10% di tahun 2024.

Dari sisi perbankan, laju pertumbuhan kredit industri secara tahunan mulai mengalami peningkatan pada seluruh sektor ekonomi, namun tetap perlu disikapi secara hati-hati. Pertumbuhan kredit pada November 2023 tercatat mengalami peningkatan ke 9,7% yoy dari 9,0% yoy pada bulan sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar 11,3% yoy. Walaupun pertumbuhan kredit yang masih dalam fase melambat, kualitas kredit masih relatif terjaga dan stabil. Pada Desember 2023, nilai *gross Non-Performing Loan* (NPL) tercatat bergerak stabil dan masih di bawah 3%, yaitu sebesar 2,36%. Sementara itu, likuiditas industri perbankan semakin terbatas dan cenderung mengetat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat ke 3,0% yoy pada November 2023, dari 8,9% yoy pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK diperkirakan akan semakin terbatas karena masih ketatnya kebijakan moneter BI dan kemampuan menabung masyarakat yang cenderung melemah.

Tabel 1. Realisasi Indikator Ekonomi Nasional

Indikator	2023 (*latest data*)	2022	2021
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	**5,05%**	5,31%	3,70%
BI 7 *Days rate*	**6,00%**	5,50%	3,50%
Inflasi (yoy)	**2,61%**	5,51%	1,87%
Nilai Tukar (Rp/USD)	**15.397**	15.568	14.253
Pertumbuhan Kredit Nasional	**9,7%**	11,35%	5,24%
Pertumbuhan DPK Nasional	**3,04%**	9,01%	12,21%
Gross Non-Performing Loan	**2,36%**	2,44%	3,00%

Sumber : Bank Indonesia, CEIC, Bloomberg, SPI OJK Novermber 2023

Analisis Industri Perbankan

Di tengah tingkat suku bunga AS yang tinggi dan keyakinan bahwa kondisi tersebut akan bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya, industri perbankan Indonesia masih tetap stabil dan resilien yang ditopang dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) per November 2023 berada pada level 25,82% naik 2,40% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, menunjukkan kecukupan permodalan industri dalam menghadapi kondisi global yang masih ditandai dengan VUCA, yaitu *Volatility, Uncertainty, Complexity* dan *Ambiguity*. Selain itu, terjadi pengetatan likuiditas di industri perbankan yang ditunjukkan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di November 2023 sebesar 84,78% atau meningkat sebesar 5,18% dibandingkan November 2022.

Pada bulan November 2023, total aset industri perbankan nasional adalah sebesar Rp11.428 triliun atau meningkat 5,1% yoy. Tren yang sama dapat dilihat pada pinjaman bank umum yang tumbuh 9,7% yoy menjadi Rp6.966 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit di Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik saat era pemilu. Jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 juga terus menurun seiring pertumbuhan ekonomi nasional dengan kualitas kredit tetap terjaga dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada November 2023 sebesar 2,36%, yang membaik dibandingkan November 2022 sebesar 2,65%. Kualitas kredit saat ini juga masih di bawah level maksimum sebesar 5% yang telah ditetapkan oleh

regulator. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,0% yoy menjadi Rp8.216 triliun. Dari sisi profitabilitas, industri perbankan nasional mencatat peningkatan profitabilitas ditunjukkan dengan kenaikan ROA. ROA Industri Perbankan di November 2023 mencapai 2,72% lebih baik dibandingkan November 2022 sebesar 2,47%. Adapun Industri perbankan mencatatkan laba bersih November 2023 sebesar Rp221.626 miliar atau naik signifikan sebesar 18,2% dibandingkan bulan November 2022.

Tabel Kinerja Industri Perbankan

Indikator	Nov 2023	Nov 2022	2022	2021	2020	2019
Aset (Rp miliar)	**11.427.957**	10.874.853	11.113.321	10.112.304	9.177.894	8.562.974
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)	**8.216.207**	7.974.132	8.153.590	7.479.463	6.665.390	5.998.648
Kredit (Rp miliar)	**6.965.899**	6.347.472	6.423.564	5.768.585	5.481.560	5.616.992
Laba Bersih (Rp miliar)	**221.626**	187.579	201.187	140.206	104.718	156.487
Capital Adequacy Ratio/CAR (%)	**27,86**	25,47	25,66	25,67	23,89	23,40
Non Perfoming Loan/NPL *Gross* (%)	**2,36**	2,65	2,44	3,00	3,06	2,53
Net Interest Margin (NIM) (%)	**4,83**	4,70	4,71	4,51	4,45	4,91
Return on Assets/ROA (%)	**2,72**	2,47	2,43	1,84	1,59	2,47
Beban Operasional dan Pendapatan Operasional/BOPO (%)	**76,80**	77,51	78,65	83,58	86,58	79,39
Loan to Deposits Ratio/LDR (%)	**84,78**	79,60	78,78	77,13	82,54	94,43

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, November 2023

Analisis Posisi BRI dalam Industri Perbankan

Sebagai perbandingan kinerja BRI terhadap industri perbankan, berikut ini merupakan rincian kinerja pertumbuhan BRI dibandingkan dengan rata-rata industri Perbankan.

Tabel Kinerja Pertumbuhan BRI Dibandingkan Industri Perbankan

(*Bank Only*, dalam % CAGR 2019-2023)

Kinerja	BRI	Industri Perbankan
Aset	**9,15%**	7,96%
Kredit	**8,25%**	5,97%
Dana Pihak Ketiga	**8,75%**	8,41%
Pendapatan Bunga	**6,20%**	4,10%
Beban Bunga	**0,21%**	0,07%
Pendapatan Bunga Bersih	**8,72%**	8,20%
Total Pendapatan Operasional	**7,53%**	6,54%

Kinerja	BRI	Industri Perbankan
Beban Operasional Selain Bunga	**8,32%**	9,47%
Laba Operasional	**11,91%**	11,33%
Laba Bersih	**11,90%**	11,55%

Sumber : Laporan Keuangan BRI November 2023, Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, November 2023

Total kredit yang disalurkan BRI sampai dengan November 2023 mencapai Rp776,6 triliun. Pertumbuhan kredit BRI pada November 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,25% (CAGR 2019-2023) berada di atas pertumbuhan kredit industri sebesar 5,97% (CAGR 2019-2023). NPL BRI pada November 2023 sebesar 3,24% sedikit berada di atas industri sebesar 2,36% sejalan dengan strategi BRI untuk mempercepat resolusi pinjaman yang direstrukturisasi Covid-19 dengan melakukan penilaian terhadap risiko kredit sesuai dengan kondisi debitur dan melakukan *dowgrade* terhadap kredit yang tidak dapat dilakukan restrukturisasi meskipun secara regulasi dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi dan mengakui kualitas kredit yang direstrukturisasi dalam kategori lancar.

Pada November 2023, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencapai Rp1.297 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,75% (CAGR 2019-2023) berada di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang tumbuh sebesar 8,41% (CAGR 2019-2023). BRI masih selektif dalam pertumbuhan DPK dengan fokus pertumbuhan pada CASA sejalan dengan strategi BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dalam rangka menurunkan *Cost of Fund*. Likuiditas BRI masih terjaga dengan baik, terlihat dari LDR BRI November 2023 berada di level 89,56% lebih tinggi dibandingkan LDR Industri 84,78%.

Dalam menjalankan operasionalnya, BRI terus meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas. Efisiensi yang dilakukan tercermin pada rasio BOPO pada November 2023, BOPO BRI berada di level 64,67%, di bawah BOPO secara industri perbankan yang berada pada level 76,80%.

Pencapaian kinerja yang baik mampu mendukung pencapaian laba BRI pada November 2023 sebesar Rp39 triliun atau tumbuh 11,90% (CAGR 2019-2023) di atas pertumbuhan industri sebesar 11,55% (CAGR 2019-2023). Pertumbuhan laba bersih BRI yang lebih baik dibandingkan industri didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga, efisiensi beban bunga serta pertumbuhan pendapatan operasional non-bunga yang lebih baik dibandingkan industri.

Rasio profitabilitas BRI masih lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan secara nasional. Hal ini terlihat dari rasio *Net Interest Margin* (NIM) BRI yang lebih baik yakni sebesar 6,89%, sementara itu NIM Industri Perbankan berada pada 4,83%. Selain itu, *Return on Assets* (ROA) mencapai 3,10% sedangkan secara industri mencapai 2,72%.

Tabel Perbandingan Rasio BRI Dibandingkan Industri Perbankan

(*Bank Only*, dalam %)

Kinerja Rasio	BRI (November 2023)	Industri Perbankan (November 2023)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	**26,13**	27,86
Non Perfoming Loan (NPL) *Gross*	**3,24**	2,36
Net Interest Margin (NIM)	**6,89**	4,83
Return on Assets (ROA)	**3,10**	2,72
Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	**64,67**	76,80
Loan to Deposits Ratio (LDR)	**89,56**	84,78

Sumber : Laporan Keuangan BRI November 2023; Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, November 2023

Tinjauan Operasional

Strategi Bank

Lanskap perbankan Indonesia ke depan akan didefinisikan ulang oleh 7 (tujuh) tren yaitu (1) Perkembangan demografi, (2) Perubahan perilaku pelanggan, (3) Implementasi model bisnis berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) yang meningkat signifikan, (4) Perubahan regulasi, (5) Tren suku bunga rendah yang berkelanjutan, (6) Kemajuan dalam data dan teknologi, dan (7) Pergeseran struktur industri sebagai akibat munculnya penyedia layanan keuangan digital. Ke depan, pendapatan perbankan Indonesia diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan *non-linier* di 4 (empat) segmen (UMi, Mikro, SME, dan kelompok *mass affluent*) serta 3 (tiga) kategori produk (*wealth banking, transaction banking,* dan *multifinance*). Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah secara nyata turut mendisrupsi bisnis industri perbankan nasional. Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator perubahan perilaku konsumen, nasabah semakin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut mendorong kebutuhan layanan perbankan digital menjadi semakin tinggi dan melebur dengan aktivitas dan gaya hidup nasabah.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait pengendalian Covid-19 telah berhasil membawa Indonesia keluar dari kondisi pandemi. Hingga akhirnya pada Juni 2023, Pemerintah Indonesia resmi mencabut status pandemi dan menyatakan Covid-19 sebagai penyakit endemi. Dengan demikian, upaya pemulihan ekonomi yang digalakkan sejak pencabutan secara bertahap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu akan dilakukan lebih akseleratif pada beberapa sektor tanpa pembatasan seperti saat pandemi dulu. Sebagai entitas bisnis milik negara, BRI memiliki peran untuk turut menopang ketahanan ekonomi nasional melalui aktivitas perbankan yang diberikan dengan mendorong percepatan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Di sisi lain, BRI yang juga merupakan Perseroan Terbuka dituntut untuk tetap menjadi entitas bisnis yang mampu tetap menjaga kualitas bisnisnya agar mampu menghasilkan laba yang menjadi salah satu *value generator* bagi para *shareholders*. Dengan mengakomodasi dua kepentingan utama tersebut, BRI kemudian menetapkan aspirasi rencana jangka panjang periode 2021-2025 menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion* dengan parameter sebagai berikut:

1. *Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* (Grup Perbankan Paling Berharga di Asia Tenggara), diindikasikan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai USD75 miliar.
2. *Champion of Financial Inclusion* (Juara Keuangan Inklusif), diindikasikan dengan peran dan kontribusi BRI dalam membantu Indonesia untuk mampu mencapai 90% target keuangan inklusif melalui perluasan layanan perbankan.

Pencapaian aspirasi tersebut diupayakan melalui skenario transformasi bertajuk BRIvolution 2.0. Semangat transformasi yang telah berlangsung sejak tahun 2018 kembali dilanjutkan dengan penguatan dan penajaman beberapa aspek sesuai dengan kondisi eksternal yang mengalami perubahan begitu ekstrem. BRIvolution 2.0 menjadi representasi semangat Perseroan untuk menciptakan eksistensi BRI yang lebih berkualitas, kuat, dan berkelanjutan.

BRIvolution 2.0 diimplementasikan dalam 3 (tiga) fase persisten yang saling terkait satu sama lain. Tahun 2021 dan 2022 menjadi fase awal dari perjalanan di mana dalam periode ini Perseroan fokus pada penguatan internal sebagai bekal untuk melakukan *scale up* dan *scope up* cakupan bisnis di 2023 dan 2024, demi terjaganya kepemimpinan dan penguasaan pasar BRI di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025 dan seterusnya.

Dalam era digitalisasi, dunia perbankan mengalami transformasi mendalam melalui perkembangan teknologi informasi. Kecerdasan buatan (AI), *cloud computing*, dan *cyber security* menjadi pilar utama yang membentuk wajah baru sektor keuangan. Implementasi kecerdasan buatan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat keamanan transaksi dan memungkinkan personalisasi layanan kepada nasabah. Sementara itu, adopsi teknologi *cloud computing* menghadirkan fleksibilitas dan akses data yang lebih cepat, membentuk ekosistem perbankan yang responsif dan dinamis.

Namun, dalam perjalanan transformasi ini, BRI juga memiliki tanggung jawab terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). BRI semakin menyadari pentingnya keberlanjutan dalam strategi bisnis perbankan. Dengan mengintegrasikan prinsip ESG dan TI ke rencana strategis perusahaan BRI tidak hanya memenuhi ekspektasi pasar yang semakin berfokus pada keberlanjutan, tetapi juga menciptakan dasar bisnis yang kokoh untuk masa depan. Keberlanjutan bukan hanya menjadi pilihan, melainkan menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang mandiri dan inklusif.

Di tengah semua inovasi, keamanan *cyber* juga menonjol sebagai aspek utama yang tidak boleh diabaikan. Perbankan digital berhadapan dengan tantangan perlindungan data nasabah dan infrastruktur yang semakin kompleks. Oleh karena itu, strategi BRI kedepan difokuskan pada upaya penguatan bisnis *retail banking* BRI serta meningkatkan kontribusi Perusahaan Anak terhadap profitabilitas BRI Group dengan cara:

1. Pengelolaan *Asset and Liabilities* (CASA, *Selective Expansion, Pengendalian* CoC)
2. Diversifikasi Sumber Pertumbuhan (Segmen Ritel, Perusahaan Anak)
3. Implementasi Prinsip ESG
4. Keandalan Pendukung Operasional (Kapabilitas Digital, Kompetensi HC, *Customer Experience*, Pengelolaan Risiko, *Data Analytics*)

Strategi Jangka Pendek

Strategi jangka pendek BRI merupakan bagian integral dari perjalanan panjang transformasi BRIvolution menuju *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Finansial Inclusion* di tahun 2025. Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, BRI menyadari banyak tantangan yang berasal dari eksternal maupun internal Perseroan, sehingga diperlukan *strategic responses* untuk menyikapi kondisi tersebut melalui beberapa strategi jangka pendek yang ditetapkan pada *destination statements* setiap tahunnya. Di samping itu, BRI juga fokus pada *sustainability finance* melalui implementasi *Environment, Social and Governance* (ESG) sehingga BRI tidak hanya tumbuh tetapi juga peduli pada keberlanjutan usaha serta lingkungan. Dalam jangka pendek, BRI berfokus pada penguatan *retail banking capabilities* guna mendorong peningkatan penguasaan pasar di tengah masifnya persaingan pada industri perbankan. Adapun fokus strategi jangka pendek BRI selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. ***Financial***
   Meningkatkan profitabilitas BRI melalui penguatan bisnis masing-masing segmen, dengan berfokus pada:
   a. *Micro Banking* dengan memperkuat segmen mikro melalui rejuvenasi produk konvensional dan pemanfaatan teknologi dalam bentuk *micro lending* dan *micropayment*, serta melakukan rejuvenasi struktur organisasi mikro untuk meningkatkan efisiensi koordinasi.
   b. *Retail Banking* melalui penguatan segmen ritel berbasis ekosistem, mengoptimalkan potensi *value chain* melalui digitalisasi proses bisnis serta berfokus kepada perbaikan kualitas kredit ritel.
   c. *Wholesale Banking* dengan melakukan digitalisasi proses bisnis yang dapat diandalkan serta menjadi *feeder* kepada segmen lain.

2. ***Product and Services***
   Melakukan digitalisasi proses bisnis untuk menekan *overhead cost* dan sebagai upaya peningkatan layanan kepada nasabah melalui pengembangan *product* yang *customer centric*, penguatan reliabilitas sistem IT, manajemen *complaint handling*, dan menciptakan budaya sadar risiko. Beberapa inisiatif digitalisasi proses bisnis yang telah dilakukan BRI di setiap segmen antara lain adalah:
   a. Mikro melalui penciptaan model bisnis baru melalui skema Mantri memantrikan agen, perluasan bisnis aplikasi PARI, serta peningkatan kapasitas layanan Agen BRILink.
   b. SME melalui penguatan *transaction led business model,* bisnis *value chain,* rejuvenasi *early warning system* penilaian kredit SME.
   c. *Funding* melalui penguatan kapabilitas BRImo sebagai *super App* dan eksekusi *close loop payment ecosystem* untuk mendorong peningkatan *market share* tabungan.
   d. Korporasi dan Kelembagaan melalui penguatan dan peningkatan kinerja *platform* Qlola.
   e. *Treasury and Global Services* melalui digitalisasi *customer driven products* melalui program bisnis *trade asset distribution*, pemutakhiran BRIefx 1.2, digitalisasi transaksi *banknotes* QRIS, dan pengembangan fitur transaksi RDN di BRImo.
   f. Risk melalui peningkatan layanan operasional yang unggul melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan *zero tolerence* untuk *fraud* serta memperkuat tata kelola IT secara *end-to-end* dan pemanfataan *talent mix*.
   g. Operations melalui implementasi *payment hub* untuk integrasi sistem pembayaran dan peningkatan BRISPOT sebagai *powerful sales tools, digital assessment*, dan platform pinjaman.
   h. Jaringan melalui digitalisasi *contact center* dan penguatan *complaint handling*.

3. ***Culture Capabilities***
   Memperkuat *culture* yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan kapabilitas pekerja, penajaman budaya sadar risiko melalui integrasi BRILian *Ways*, integrasi BRI *One Culture* di BRI *Group* untuk mendukung organisasi yang efektif serta penguatan manajemen inovasi. Beberapa inisiatif yang dilakukan BRI untuk memperkuat *culture* di setiap segmen antara lain adalah:
   a. Mikro melalui peningkatan kapabilitas Mantri melalui pendidikan dan pengembangan *tools* pendukung yang andal.

b. SME melalui peningkatan produktivitas RM SME dari sisi pola rekrutmen, penyediaan *tools* dan *model* dalam *planning* maupun *review* kinerja.
c. *Funding* melalui *refocusing* bisnis dan penguatan peran Kantor Cabang (Kanca) area Metro untuk mendukung peningkatan pelayanan dan kapabilitas *retail banking*.
d. Korporasi dan Kelembagaan melalui peningkatan kapabilitas *building* RM baik secara ilmu dan *talent pooling*.
e. *Treasury and Global Services* melalui pengembangan bisnis unit kerja luar negeri melalui penyusunan *feasibility study* dan usulan *overseas network* di Eropa.
f. IT melalui transformasi *digital talent* dalam menghadapi persaingan era digital.
g. Jaringan melalui transformasi petugas operasional bank di unit kerja agar fokus pada aktivitas *sales* melalui peran *frontliner* maupun fungsi lain secara lebih dinamis.

4. ***Network Optimization***
Optimalisasi jaringan kerja BRI dan peningkatan *customer experience* melalui *business process re-engineering*, penataan jaringan kerja, peningkatan peran AgenBRILink untuk memperluas jangkauan kepada nasabah, peningkatan reliabilitas sistem operasional, *competitive merchant solution* serta *optimalisasi alternative channel* untuk mendukung transaksi *self-service.* Beberapa inisiatif yang telah dilakukan BRI untuk mengoptimalisasi jaringan kerja serta memperkuat *customer experience* untuk setiap lini bisnis antara lain adalah:
a. *Retail* melalui peningkatan kapabilitas digital melalui inisiatif *platform* pemasaran kredit konsumer secara digital.
b. *Funding* melalui perbaikan *business process merchant* dan melalui peningkatan *success rate*, perbaikan *unbalanced payment*, *pegembangan merchant*, perbaikan *end of day* EC. pengembangan model bisnis.
c. *Treasury and Global Services* melalui perbaikan proses dan *monitoring* aktivitas bisnis yang lebih efektif melalui *upgrading* Guava versi 3.3, pengembangan *Bank Line Analysis System*, digitalisasi penerapan MR pada sistem kustodian BRI.
d. IT melalui pemanfaatan *open* API untuk mendukung aplikasi *superApps* dan *hyper ecosystem,* peningkatan IT *platform* yang *resilience* untuk mendukung *open banking era*, *data driven organization* untuk mendukung *decision driven* dan analisis data, dan *agile* IT *governance* untuk mendukung maturitas level IT.
e. *Operations* melalui implementasi sentralisasi *operation console*, rekonsiliasi dan pengelolaan kas secara *end to end.*
f. Jaringan melalui kajian potensi wilayah serta *business process re-engineering* dengan menerapkan otomasi dan digitalisasi terhadap transaksi di *banking hall* melalui pengembangan kapabilitas *remote channel* dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan nasabah, serta terhadap proses bisnis operasional.

Strategi Jangka Menengah

Inovasi dan eksplorasi sumber pertumbuhan baru yang dilakukan BRI berimplikasi pada bisnis Perseroan yang semakin kompleks. Di lain sisi, ketidakstabilan pasca pandemi menuntut BRI untuk tetap *agile* dalam merespon tantangan dan peluang bisnis baik kini maupun di masa-masa mendatang. Secara umum, strategi jangka pendek BRI masih mengacu pada kerangka strategi jangka panjang (*Corporate Plan* 2021-2025) yang berfokus kepada 5 (lima) pilar bisnis utama yakni Segmen Mikro, Kecil dan Menengah, Konsumer, Korporasi (termasuk *Treasury and Global Services*), serta Perusahaan Anak. Kelimanya akan didukung dengan kapabilitas teknologi *digital* yang *reliable*, kapasitas *human capital* yang kompeten, serta pengelolaan *distribution channel* yang cermat. Untuk itu, pada tahun 2023-2025 *corporate strategy* yang akan dilakukan BRI adalah sebagai berikut:

1. ***CASA Sustainability***
Meningkatkan *market share* CASA, dengan pengembangan ekosistem melalui penguasaan teritorial dan *referral* dengan mengandalkan *transaction tools and cash in/cash out capability*.
2. ***Focus on Quality of Growth***
Aset produktif BRI tumbuh dengan kualitas terjaga yang berfokus pada aset dengan imbal hasil tinggi serta akselerasi sumber pertumbuhan baru.
3. **Optimalisasi Sinergi Perusahaan Anak**
Akselerasi peningkatan skala bisnis Perusahaan Anak baik melalui sinergi atau secara *independent* dan perluasan cakupan bisnis Entitas Induk, menyelesaikan *Post Implementation Plan* UMI sebagai *source of new growth* seiring dengan implementasi BRI *one culture.*
4. ***ESG Principle Implementation***
BRI Berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan bisnis yang mengikuti nilai-nilai tata kelola usaha yang baik agar berdampak positif bagi lingkungan (*deliver value beyond profit*).
5. ***Excellence Enablers***
Melanjutkan penguatan kapabilitas pekerja, reliabilitas sistem, layanan dan jaringan, serta data analitik untuk memberikan layanan perbankan berkualitas unggul.

Strategi Jangka Panjang

Transformasi digital telah mengubah paradigma perbankan dengan memperkenalkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis *big data*, dan layanan perbankan digital. BRI beralih dari model tradisional ke model terdesentralisasi, menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, layanan yang lebih cepat, dan keamanan yang lebih baik. Seiring perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan pengalaman personal dan instan, perbankan harus menyesuaikan diri dengan memberikan layanan yang responsif dan memprioritaskan keamanan transaksi. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, strategi jangka panjang BRI harus mengintegrasikan kolaborasi lintas batas, diversifikasi portofolio, dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengelola risiko dan menjawab tuntutan keberlanjutan, BRI senantiasa melakukan

evaluasi terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan sebutan BRIvolution untuk tetap menjaga relevansi perusahaan dengan perubahan yang selalu terjadi.

Di tahun 2023, BRI masih menggunakan BRIvolution 2.0 (RJPP 2021 - 2025) dengan visi perusahaan untuk menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champions of Financial Inclusion*" di 2025. BRI mengusung tema *Strengthen Retail Banking Capabilities* di tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahap perluasan dari 3 (tiga) fase transformasi BRI yaitu:

1. Memperkuat bisnis utama (2021-2023)
2. Meningkatkan skala dan cakupan bisnis BRI Group (2024)
3. Mempertahankan status *top Tier* di Asia Tenggara (2025)

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Dalam rangka meningkatkan bisnis BRI baik dari sisi pendapatan, simpanan, maupun pinjaman, diperlukan dukungan aktivitas pemasaran yang terintegrasi antara produk, jasa dan layanan BRI (*integrated marketing communication*). Strategi pemasaran terintegrasi bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dari produk, jasa serta program yang dimiliki oleh BRI, namun juga diperlukan untuk meningkatkan *awareness and consideration, consideration, knowledge*, dan *engagement* kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) dan calon nasabah (meningkatkan *awareness and consideration* dan *purchase intention*) sesuai *life journey* nasabah agar bisnis BRI dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Diharapkan dengan menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi (*integrated marketing communication*) dikombinasikan dengan penggunaan media yang efektif dan efisien, maka akan tercapai *awareness and consideration* yang optimal serta *positioning* yang tepat serta relevan untuk masing-masing target *audience* di tiap segmen sehingga dapat meningkatkan *brand value* bagi BRI.

BRI secara rutin melakukan *Brand Health Tracking* (BHT) untuk memonitor capaian *brand* sehingga ke depan dapat menetapkan target *level consideration* dan *image brand* sesuai dengan kondisi persaingan pasar. BRI dapat mempertahankan peringkat 1 (satu) pada beberapa level *consideration* seperti *brand* Tabungan BRI Simpedes dan Kredit BRIguna. Selain itu, BRI juga dapat mendapatkan level *consideration* untuk *brand* Giro BRI dengan pencapaian peringkat 2 (target peringkat 3), serta mempertahankan posisi *consideration* untuk *brand* Tabungan BRI BritAma dan BRImo. Ke depan BRI akan menambahkan percakapan di media sosial dan *blogs* di peringkat 3 (tiga) besar untuk *brand* KPI .

Adapun dalam rangka menjangkau pasar secara lebih luas, melakukan literasi keuangan dan menjaga engagement dengan nasabah yang dikemas dengan cara yang menarik, berikut beberapa program unggulan BRI di tahun 2023, antara lain:

1. **Pesta Rakyat Simpedes (PRS) 2023**





Pesta Rakyat Simpedes (PRS) merupakan *event* tahunan yang dipersembahkan oleh Tabungan BRI Simpedes sekaligus menjadikan Pesta Rakyat Simpedes sebagai aktivitas *campaign* Tabungan BRI Simpedes dan pemberdayaan nasabah UMKM dengan kemasan menarik dan edukatif. Pesta Rakyat Simpedes di tahun 2023 dikemas dengan metode *hybrid* (*offline* dan *online streaming*), dengan mengusung tema "Pede Raih Peluang" yaitu bersama Tabungan BRI Simpedes hadir untuk mendorong UMKM agar semakin pede memanfaatkan segala peluang bisnis baru untuk menjadi pemenang di masa depan. Pesta Rakyat Simpedes membawa 6 pilar yaitu:

1. Pasar: Merupakan Bazar UMKM yang memberikan kesempatan UMKM dalam mengembangkan bisnis, serta meningkatkan ekosistem transaksi di segmen bisnis Mikro.
2. Panggung: Merupakan konten hiburan dan edukasi dalam event PRS yang dikemas dalam panggung musik serta ilmu dengan konsep edutainment.

3. Pawai: Merupakan rangkaian aktivitas PRS berupa Pawai Internal yaitu kegiatan grebek pasar/Sentra bisnis lainnya dalam periode 1 minggu sebelum *event* PRS diselenggarakan sedangkan Pawal Eksternal yaitu unjuk komunitas serta *cluster* binaan BRI yang diparadekan di jalan utama Kota PRS.
4. Pojok X'sis : Merupakan wadah/ pojok komunitas yang memberikan kesempatan bagi suatu komunitas untuk dapat berekspresi. Tujuannya adalah membuka peluang bagi segmen bisnis mikro BRI untuk masuk dalam ekosistem komunitas.
5. Peduli : Pilar Peduli direalisasikan melalui kegiatan cek kesehatan gratis, donor darah dan aktivitas *charity* lainnya.
6. Panen : Seremonial penyerahan hadiah kepada pemenang Program Panen Hadiah Simpedes yang telah diundi sebelumnya. Berbagi hadiah games dan *doorprize* pada saat *event* PRS berlangsung.

Pesta Rakyat Simpedes 2023 diselenggarakan di 382 titik di seluruh Indonesia mulai dari barat hingga timur Indonesia. Adapun dari 382 titik tersebut merupakan Pesta Rakyat Simpedes Utama dilaksanakan di 5 (lima) Kota, di antaranya Bandung, Denpasar, Makassar, Malang,dan Yogyakarta. Sedangkan Pesta Rakyat Simpedes Teritori dilaksanakan pada 15 Kota yaitu Medan, Bukit Tinggi, Palembang, Tasikmalaya, Purwokerto, Pekanbaru, Pati, Gresik, Lampung, Singkawang, Samarinda, Kendari, Palu, Madiun dan Sorong Serta titik lainnya diselenggarakan di tingkat Kantor Cabang BRI yang tersebar di 382 Kota/Kabupaten/Kecamatan. Gelaran PRS sukses diikuti oleh 4.945 pelaku UMKM dan sebanyak 264.195 pengunjung. PRS 2023 semakin semarak dengan taburan beragam hadiah istimewa dan pengundian Panen Hadiah Simpedes sebagai puncak pesta tahun ini.

2. **UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023**





BRILIANPRENEUR adalah acara tahunan yang diselenggarakan BRI sejak 2019. Tahun ini UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 yang merupakan rangkaian HUT ke-128 BRI, diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 7-10 Desember 2023 dengan tema "*Crafting Global Connection*". BRI mengajak 700 UMKM terkurasi dan terdapat lima kategori UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun ini yang dapat berpartisipasi yakni *home decor and craft, food and beverage, accessories and beauty*, dan fashion dan wastra, serta *healthcare/wellness*. Ajang UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR sendiri diselenggarakan BRI sebagai sarana *business matching* antara UMKM Indonesia dengan konsumen luar negeri, sehingga diharapkan mampu menumbuhkembangkan pelaku UMKM *go global* dan meningkatkan ekspor nasional. Dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 berhasil mencatatkan nilai penjualan *business matching* senilai USD81,3 juta dollar atau sekitar Rp1,26 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.500,- per USD). Nilai kesepakatan melalui *business matching* tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun penyelenggaraan *event* ini. Seperti diketahui pada 2019 nilai *business matching* mencapai sebesar USD33,5 juta, naik pada 2020 menjadi USD57,5 juta dan pada 2021 kembali meningkat menjadi USD72,1 juta. Kemudian pada 2022 lalu nilainya menembus USD76,7 juta. Menteri BUMN RI Erick Thohir mengapresiasi berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 yang telah terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara keseluruhan.

3. **KPR BRI *Property Expo***





KPR BRI *Property Expo* merupakan event pemasaran KPR BRI yang berkolaborasi dengan rekanan developer terpilih. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah BRI maupun calon nasabah dalam proses memilih dan membeli rumah menggunakan KPR BRI. Selama 2023, KPR BRI *Property Expo* telah diselenggarakan sebanyak 4 kota di antaranya Bandung, Medan, Makassar dan Semarang.

Kemudahan juga dapat dinikmati oleh nasabah BRI maupun calon debitur dapat dinikmati melalui *digital platform* HOMESPOT sebagai *mortgage ecosystem engine* yang menjadi *one stop solution digital platform*, yang memungkinkan *end user* atau pengunjung, developer rekanan, *broker* properti, asuransi, kontraktor dapat terhubung di dalam satu ekosistem. *Green Housing Financing* juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan dan langkah nyata BRI pada *green environment development*. BRI berperan sebagai *pioneer* perbankan yang memberikan pembiayaan perumahan berkonsep hijau.

Adapun terdapat beberapa rangkaian KPR BRI *Property Expo* 2023, di antaranya *talkshow, podcast, master class,* berbagai lomba seperti *fashion show, modern dance*, MUA *competition* dan lomba mewarnai, serta sesi konsultasi dengan expert desain interior dari Informa. BRI juga menggandeng *merchant home and living* dari Informa dan Informa *Custom Furniture*. Tak hanya rangkaian acara, beragam promo menarik juga dihadirkan oleh BRI. Mulai dari diskon, potongan langsung dengan menggunakan Kartu Debit BRI, Kartu Kredit BRI dan BRImo.

4. **BritAma Tanam Kebaikan**





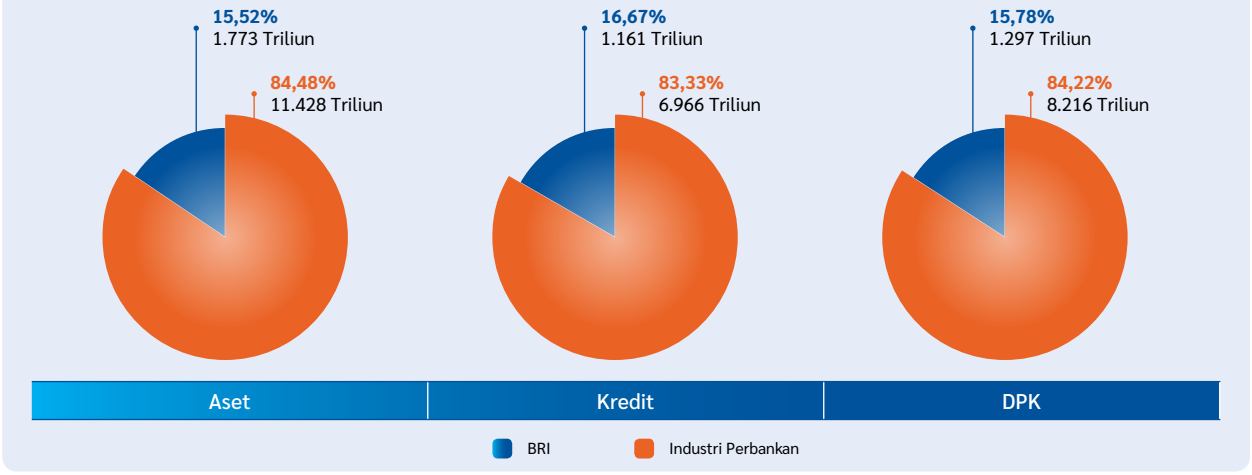
BRI melalui program BritAma Tanam Kebaikan mendorong kelestarian lingkungan. Dalam hal ini BRI mengkonversi nasabah yang melakukan pembukaan rekening Tabungan BritAma secara digital dengan saldo minimum Rp1 juta menjadi 1 pohon mangrove yang akan didonasikan melalui program penanaman mangrove bersama dengan BenihBaik. Program BritAma Tanam Kebaikan merupakan bentuk kolaborasi BRI dengan BenihBaik, sebagai upaya meningkatkan kepedulian nasabah penanaman pohon mangrove, dan diselenggarakan *roadshow* di berbagai daerah mulai dari universitas hingga ke pusat perbelanjaan. Program ini mengajak civitas akademika serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanaman pohon Mangrove. Universitas Indonesia menjadi destinasi pertama dalam *road show* ini, disusul Universitas Gadjah Mada, Trans Studio Mall Bali, Universitas Airlangga, Delipark Mall Medan, Universitas Hasanudin, dan Duta Mall Banjarmasin. Acara dimeriahkan berbagai kegiatan mulai dari kompetisi futsal, bazar UMKM, *Charity*, *talkshow* inspiratif bersama *public figure*, pentas seni hingga hiburan dari artis Ibu Kota. Program BritAma Tanam Kebaikan bersama BenihBaik mengumpulkan 33.000 Pohon Mangrove yang akan ditanam di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya Lampung, Semarang, Makassar, Banjarmasin, Bali, hingga Papua. *Ceremony* penanaman BritAma Tanam Kebaikan dilakukan secara langsung di Tanjung Benoa Bali pada 4 Desember 2023 dan memberikan dampak positif bagi nasabah BRI dan masyarakat Indonesia karena menjadi wujud komitmen BRI untuk senantiasa Memberi Makna Untuk Indonesia. BRI menyadari bahwa langkah menjaga kelestarian bumi perlu digalakkan. Sebab peningkatan polusi udara yang kian meningkat menunjukkan pentingnya penanaman pohon.

Selain program-program di atas, BRI juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan *awareness and consideration*, akusisi dan *loyalty* kepada para *customer* di berbagai segmen, baik dalam bentuk kegiatan *activation*, *sponsorship* maupun melakukan *campaign* melalui media massa, media sosial, media *digital* dan media lainnya untuk menjangkau *target audience* untuk setiap produk.

Pangsa Pasar

Posisi BRI dibandingkan dengan industri perbankan dapat dilihat berdasarkan jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, dan jumlah kredit yang disalurkan.

***Pie Chart* Pangsa Pasar BRI dibandingkan Industri Perbankan November 2023**



Tabel Pangsa Pasar BRI dibandingkan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	November 2023	November 2022	Pertumbuhan yoy (%)
Aset	Industri Perbankan	**11.427.957**	10.874.853	5,1%
	BRI	**1.773.849**	1.679.053	5,6%
	Pangsa Pasar (%)	**15,52%**	**15,44%**	
Kredit	Industri Perbankan	**6.965.899**	6.347.472	9,7%
	BRI	**1.161.218**	1.014.328	14,5%
	Pangsa Pasar (%)	**16,67%**	**15,98%**	
Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	**8.216.207**	7.974.132	3,0%
	BRI	**1.296.541**	1.233.832	5,1%
	Pangsa Pasar (%)	**15,78%**	**15,47%**	

Sumber: Laporan Keuangan BRI November 2023; Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, November 2022

Berdasarkan total aset, pertumbuhan total aset BRI sebesar 5,6% (yoy) atau mencapai Rp1.773 triliun pada November 2023, melampaui pertumbuhan industri perbankan nasional yang tumbuh mencapai 5,1% (yoy). Sehingga pada November 2023, BRI menguasai 15,52% meningkat dibandingkan dengan November 2022 yang sebesar 15,44% dari total aset perbankan nasional sebesar Rp11.428 triliun.

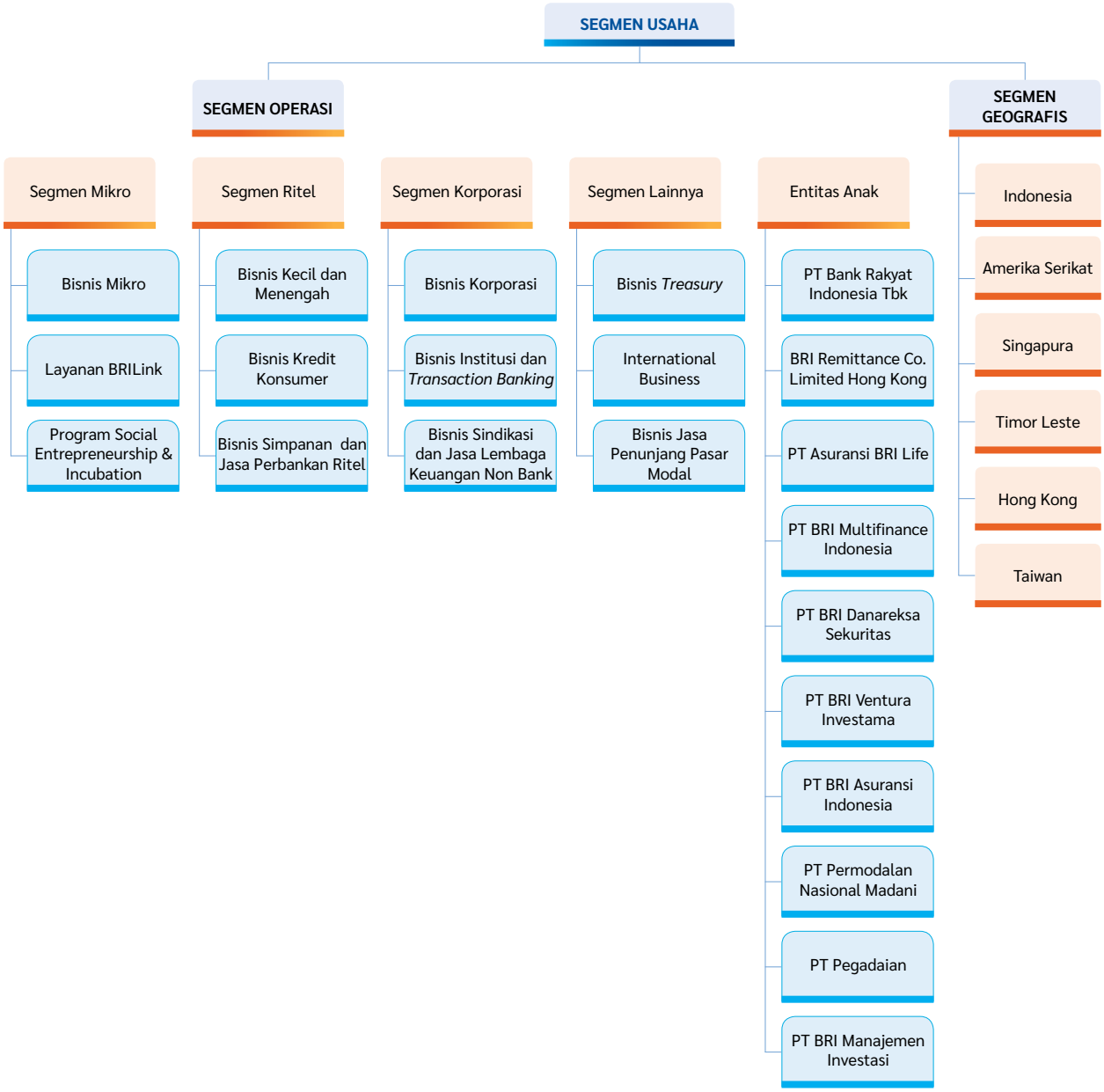
Pada sisi kredit, sampai dengan November 2023 BRI berhasil menumbuhkan kredit 14,5% (yoy) menjadi Rp1.161 triliun. Pertumbuhan kredit BRI berada di atas pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 9,7% (yoy), mencapai Rp6.966 triliun. Sehingga pada posisi November 2023 pangsa pasar kredit BRI terhadap total industri perbankan mencapai 16,67% meningkat dibandingkan dengan November 2022 yang sebesar 15,98%. Strategi pertumbuhan kredit dalam rangka meningkatkan *market share* dilakukan melalui peningkatan kapabilitas tenaga pemasar di setiap segmen yang disertai dengan *tools* yang andal, penyempurnaan struktur organisasi yang meningkat efektivitas dan *business* proses, pemberian kredit secara selektif dengan mengoptimalkan potensi *value chain* serta menjaga kualitas kredit yang optimum dengan pengembangan sistem pendukung.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), total DPK yang dihimpun oleh BRI tumbuh 5,1% (yoy) menjadi Rp1.297 triliun atau mencapai 15,78% meningkat dibandingkan dengan November 2022 yang sebesar 15,47% dari total DPK Industri Perbankan Rp8.216 triliun pada posisi November 2023. Pencapaian tersebut tentu dilaksanakan dengan melakukan

kolaborasi antara segmen untuk meningkatkan *market share* BRI di Industri perbankan melalui Penguatan penguasaan *merchant business* di ekosistem utama BRI, meningkatkan kapabilitas *digital banking* BRI BRImo sebagai SuperApps yang mumpuni, penguatan sinergi BRI Group dalam meningkatkan dana BRI, serta Pengembangan bisnis kemitraan Ultra Mikro dan penguatan akuisisi dana dari ekosistem Mikro.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan Perusahaan Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk pada lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. BRI dan Perusahaan Anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi. BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis. Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI dibagi berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor Leste dan Taiwan.



Segmen Operasi

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Segmen Mikro

Segmen mikro ditujukan untuk melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan nasabah individual dan pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat. Segmen mikro meliputi Bisnis Mikro, Layanan BRILink dan Program *Social Enterpreneurship* dan Inkubasi.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT BISNIS MIKRO

Memasuki tahun 2023, situasi ekonomi dan sosial kembali normal pasca pandemi. Segmen mikro berfokus pada aspirasi perusahaan *"strengthen retail banking"*, dengan menyusun strategi holistik segmen mikro 2023 dengan mendorong kembali pertumbuhan pinjaman komersial dan menguasai dana di ekosistem berbasis konsep *rural saving*. Strategi pertumbuhan pinjaman komersial (Kupedes) merupakan bagian dari *soft landing* KUR, seiring dengan penerapan kebijakan KUR yang baru di 2023 dan berfokus pada pemerataan serta graduasi nasabah. Pertumbuhan segmen komersial (Kupedes) didorong dari *customer base* yang telah dibangun selama masa pandemi dan *recovery* 2020 - 2022 sebanyak 2 juta nasabah. Dengan adanya dukungan kapabilitas *big data* analitik sehingga dapat meng*enerate pipeline* pertumbuhan yang berkualitas. Terhadap hasil dari strategi tersebut, segmen mikro mampu tumbuh yoy sebesar 10,4% dengan kualitas NPL yang terjaga di angka 2,4% dan dikontribusi pertumbuhan pinjaman non KUR yoy sebesar 39,62%.

Di tahun 2023, segmen mikro mulai melakukan penguatan strategi penghimpunan dana pihak ketiga melalui konsep *rural saving* dimana aliran dana dari pelaku usaha diikuti sampai dengan 2-3 *layer* diatasmya (*suplier, distributor*, dan pengepul) sehingga mampu menumbuhkan simpanan mikro sebesar 1,64% dengan rasio dana murah sebesar 87%. Keseluruhan strategi tersebut dapat tercapai dengan adanya keberlanjutan transformasi segmen mikro yang mencakup area penguatan organisasi BRI Unit, perluasan bisnis proses dan bisnis model, penguatan data analitik dan *risk management* serta *shifting business approach* segmen mikro dari *financiang approach* menjadi *empowerment approach*.

Segmen Mikro melakukan penguatan organisasi dengan penyempurnaan revitalisasi mantri, reorganisasi Manajer Bisnis Mikro dan *reploting* Kaunit yang disesuaikan dengan kompetensinya yaitu kuat bersaing di *urban* atau di *rural area*. Perubahan pendekatan bisnis menjadi *Empowerment Approach* juga ditunjukkan melalui perluasan bisnis proses *Rejuvenasi* Kupedes, Simpedes BISA, KECE 2.0, KECEKU (Fitur Suplesi Otomatis), Bisnis Model Mitra Agen UMi dan *enhancement* layanan Agen BRILink. Penguatan data analitik dalam mendukung pengambilan keputusan termasuk manajemen *pipeline* dan aktivitas yang lebih terstruktur, serta penggunaan *customer behaviour profiling* dalam membangun *risk management* yang lebih relevan. Pemberdayaan dengan fokus pada membangun ekosistem dan meningkatkan kapabilitas pelaku usaha melalui program inklusi dan literasi. Memperkuat sinergi bisnis antar entitas dalam *holding* ultra mikro dengan layanan *outlet* Senyum, integrasi data dan *platform* Senyum Mobile. Strategi holistik ini telah diimplementasikan pada tahun 2023 dan akan menjadi pondasi dalam mengembangkan bisnis mikro yang *sustainable* dalam menghadapi tantangan dan persaingan masa depan.

BISNIS MIKRO

Di tahun 2023, kinerja bisnis mikro BRI secara umum tetap mampu mencatat pertumbuhan positif baik dari sisi pinjaman maupun simpanan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mikro BRI mempunyai daya tahan yang kuat dalam masa *recovery* pasca pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada lingkup bisnis dan ekonomi nasional. Selain itu, penerapan program dan strategi yang relevan dengan situasi dan kondisi juga menjadi salah satu kunci BRI dapat melalui tahun 2023 dengan baik. Segmen mikro yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia akan selalu menjadi bisnis utama BRI. BRI telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada segmen mikro sejak tahun 1895, atau sudah 128 tahun per tahun 2023. Memiliki kompetensi profesional di bisnis mikro, BRI konsisten dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro yang diselaraskan dengan perkembangan kebutuhannya.

Keberadaan sektor usaha mikro merupakan bagian penting dari bisnis BRI. Oleh karena itu BRI berkomitmen untuk memperbesar dukungan dan pemberdayaan segmen ultra mikro di tahun 2023, yang dikemas dengan semangat transformasi *digital* yaitu *go smaller, go shorter, go faster*. Sehingga pelayanan keuangan BRI seperti proses penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan biaya yang lebih terjangkau (*affordable*). Melalui hal ini, diharapkan pelaku usaha ultra mikro dapat mempertahankan usahanya dan segera pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Sejak 2020 BRI kini juga telah memiliki indeks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bernama BRI *Micro and SME Index* (BMSI) guna mengukur aktivitas bisnis, sentimen, serta ekspektasi pelaku usaha mikro terhadap kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan data terkini BMSI, terlihat kondisi usaha serta optimisme pelaku UMKM terhadap pemulihan ekonomi ke depannya semakin meningkat.

Terkait sistem transaksi *micropayment*, terdapat beberapa upaya BRI untuk meningkatkan penetrasinya selama tahun 2023 antara lain dengan mengajak dan menjalin kerja sama para pedagang agar bertransaksi secara non tunai (*cashless*) lewat instrumen *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) BRI serta *platform* pasar.id sebagai sarana transaksi untuk mempertemukan pembeli dengan penjual tanpa harus bertatap muka. Selain mempermudah perhitungan arus kas untuk pedagang, hal tersebut juga untuk mendukung program Pemerintah dalam meminimalisir potensi penularan Covid-19 selama pandemi masih berlangsung. BRI akan terus mendorong pengetahuan masyarakat terkait transaksi non tunai khususnya QRIS, agar transaksi menggunakan sistem terpadu ini terus meningkat. BRI meyakini dengan sistem pembayaran yang simpel dan aman melalui QRIS, bisnis para pelaku usaha mikro dapat terbantu untuk semakin tumbuh besar. Pertumbuhan ini akan berujung pada semakin positifnya laju perekonomian nasional, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023, produk-produk pinjaman bisnis mikro yang ditawarkan kepada nasabah mikro adalah Kupedes, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dan KUR Super Mikro. Sedang produk-produk simpanan bisnis mikro yang tersedia yaitu Tabungan BRI Simpedes dengan berbagai varian seperti Simpedes Umum, Simpedes BISA, Simpedes TKI, Simpedes Impian, dan Simpedes Usaha.

Produk dan Layanan Bisnis Mikro

1. **Kupedes**
   Merupakan kredit yang bersifat umum dengan pinjaman sebesar sampai dengan Rp500 juta per debitur dengan jangka waktu maksimum 120 bulan yang dapat digunakan untuk tujuan kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan.
2. **KUR Mikro**
   Merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan pinjaman sebesar Rp10 juta - Rp100 juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.
3. **KUR Super Mikro**
   Merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar Rp10 juta per debitur dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.
4. **BRIguna Mikro**
   Merupakan kredit multiguna mikro yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap.
5. **Tabungan BRI Simpedes**
   Merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari *internet banking* dan *mobile banking*. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes Umum, Simpedes BISA, Simpedes TKI, Simpedes Impian, dan Simpedes Usaha. Selain itu bisnis mikro BRI juga memiliki produk simpanan lainnya yaitu TabunganKu, SimPel (Simpanan Pelajar) dan Deposito.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Mikro

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
***Outstanding* (OS) Kredit (dalam miliar Rupiah)**	**496.554**	**449.627**	**46.927**	**10,44%**
Kupedes	**212.332**	129.216	83.116	64,32%
KUR Mikro	**219.927**	251.498	(31.571)	(12,55%)
BRIguna Mikro	**64.295**	68.912	(4.617)	(6,70%)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Debitur (dalam juta orang)	**13,95**	**14,35**	**(0,40)**	**(2,79%)**
Kupedes	**4,68**	2,84	1,84	64,79%
KUR Mikro	**8,81**	10,89	(2,08)	(19,10%)
BRIguna Mikro	**0,53**	0,61	(0,08)	(13,11%)
Simpanan (dalam miliar Rupiah)	**373.474**	**367.657**	**5.817**	**1,58%**
Giro	**1.339**	1.478	(139)	(9,36%)
Deposito	**48.452**	43.528	4.925	11,31%
Tabungan	**323.682**	322.651	1.031	0,32%
Rekening Simpanan (dalam nilai penuh)	**173.023.568**	**158.129.614**	**14.893.954**	**9,42%**
Giro	**92.817**	96.810	(3.993)	(4,12%)
Deposito	**428.651**	416.891	11.760	2,82%
Tabungan	**172.502.123**	157.615.927	14.886.196	9,44%

Total *outstanding* kredit bisnis mikro tahun 2023 sebesar Rp496,55 triliun, meningkat 10,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp449,63 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pinjaman Kupedes sebesar 64,32% yoy yang sejalan dengan fokus BRI untuk mampu kembali menumbuhkan kredit komersial dan yang menarik hampir sebesar 30% dari komposisi pinjaman Kupedes ini bersumber dari nasabah KUR yang mampu naik kelas baik secara kemampuan perbankan dan kenaikan kapabilitas bisnisnya. Naik kelas nasabah KUR ini sejalan dengan aspirasi Pemerintah dan BRI untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di segmen Mikro. Untuk mendorong percepatan dan peningkatan inklusi keuangan Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait KUR salah satunya adanya target graduasi nasabah KUR, target nasabah baru penerima KUR dan limitasi siklus pinjaman. BRI sebagai bank utama di Indonesia yang bergerak di bidang Mikro selalu berkomitmen untuk tumbuh berkembang bersama dengan nasabah Mikro untuk menciptakan segmen mikro yang kuat dan hebat.

Strategi Bisnis Mikro Tahun 2023

Bisnis mikro telah lama menjadi kompetensi inti bagi BRI. Dengan dukungan sebaran jaringan kantor yang luas dan tenaga pemasar yang kompeten, BRI telah menjangkau dan melayani kebutuhan layanan keuangan bagi para pelaku usaha Mikro hingga pelosok negeri. *Customer base* yang sangat besar menjadi peluang sekaligus tantangan bagi BRI untuk mampu mengoptimalkannya untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis mikro ke depan. Namun demikian, perubahan terjadi dengan cepat dan tak terelakkan. Pandemi yang berlangsung telah mendorong adopsi teknologi secara luas hingga berpengaruh pada perilaku masyarakat, termasuk mengubah pola transaksi dan usaha para pelaku usaha mikro. Adopsi teknologi secara luas telah memberikan opsi bagi para pelaku usaha dan masyarakat mikro secara umum untuk menikmati layanan keuangan dan akses pembiayaan komersial non konvensional dengan tanpa batas (*borderless*). Kondisi demikian mengubah peta persaingan bisnis mikro di masa depan khususnya dengan entitas non perbankan yang menyediakan layanan *financial technology* (P2P *lending*, *Paylater*, Dana Talangan usaha, dan sebagainya).

Oleh karena itu, pengembangan bisnis mikro BRI ke depan akan dilakukan dengan perspektif *beyond banking* melalui inovasi produk serta bisnis proses dan bisnis model yang berkelanjutan. Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM akan dilakukan secara harmonis untuk menciptakan sumber-sumber baru pendapatan (*new source of income*) sebagai penggerak baru bagi pertumbuhan bisnis Perseroan (*new growth engine*). Pengembangan bisnis Mikro BRI difokuskan pada peningkatan kualitas proses bisnis di lini operasional, pertumbuhan dan kualitas kredit komersial serta pengembangan produk dan model bisnis untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Rejuvenasi produk dengan mengembangkan produk berbasis *turn over* (kredit dengan tenor pendek).
2. Meningkatkan kualitas proses bisnis antara lain melalui penyempurnaan kebijakan revitalisasi seluruh tenaga pemasar di segmen mikro, baik kepada Mantri maupun jabatan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) dan Manajer Bisnis Mikro (MBM).
3. Menciptakan model bisnis baru melalui skema bisnis kemitraan Agen UMi, perluasan bisnis (*scope up*) aplikasi Pasar Rakyat Indonesia/PARI dan Senyum Mobile, akuisisi CASA berbasis ekosistem pembayaran mikro (*micropayment ecosystem*), serta pemberdayaan pelaku usaha secara kolektif (klaster usaha, kelompok, arisan).
4. Meningkatkan kapabilitas Mantri dengan pendidikan yang *fit* serta pengembangan *tools* pendukung yang andal untuk memperkuat peran sosialnya sebagai penyuluh digital sekaligus *financial advisor* bagi para pelaku usaha mikro.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Mikro

Peningkatan kinerja kredit dan dana pihak ketiga bisnis mikro selama tahun 2023 tak lepas dari upaya BRI yang telah melakukan berbagai inovasi. Inovasi dimaksud antara lain:

1. ***Commodity Platform (PARI)***
   BRI bekerjasama dengan pihak ketiga memberikan solusi kepada pelaku ekosistem berbasis komoditas untuk lebih mudah dalam mengakses layanan BRI yang terintegrasi secara *digital* melalui *commodity platform* yang bernama Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Tahun 2023 BRI fokus pada ekosistem telur, ikan, bawang merah, kopi, susu, pakan, kacang mete, nanas, singkong, beras, pisang dan mangga dengan jumlah akuisisi 73.716 *user*, dengan transaksi sebanyak 305.655 transaksi, dana talangan sebesar Rp6,9 triliun dan *gross merchandise value* sebesar Rp25,2 triliun dengan jumlah peternak sebanyak 27.647 peternak dan jumlah pengepul sebanyak 15.848 pengepul.
2. **BRI Kodifikasi *Business System* (BRIKODES)**
   Sejalan dengan aspirasi BRIvolution 2.0 yakni "*Champion of Financial Inclusion*", BRI semakin mengukuhkan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Semangat inklusi keuangan ini juga menunjukkan BRI sebagai Bank dengan *customer base* terbesar di Indonesia telah proaktif untuk mendukung perwujudan capaian strategis inklusi keuangan nasional sebesar 90% di tahun 2024. Untuk mewujudkan aspirasi BRI sebagai *Champion of Financial Inclusion* perlu didukung dengan penyediaan *database* berbasis data *analytics* sehingga dapat memberi informasi yang komprehensif. Dengan informasi tersebut maka akan dapat menghasilkan strategi yang *impactful* sehingga bermanfaat untuk kinerja bisnis BRI dengan sebuah inovasi *platform data management* bernama "BRIKODES (BRI Kodifikasi *Business System*)".
3. **New Pasar.id**
   BRI bekerjasama dengan pihak ketiga memberikan solusi kepada pelaku usaha di pasar baik pedagang maupun pembeli melalui *platform e-commerce* bernama *New* Pasar.id guna mendukung pelaku UMKM khususnya pedagang pasar dalam meningkatkan omzet melalui jangkauan penjualan yang lebih luas. Digitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk menggerakkan ekonomi pasar sebagai upaya meningkatkan omzet pedagang pasar, memperluas jangkauan *customer* sehingga memberikan keuntungan bagi pedagang, meningkatkan *engagement* antara BRI dan pelaku UMKM guna mendukung gerakan *cashless* serta meningkatkan kemampuan usaha pedagang melalui permodalan.
4. **Senyum Mobile**
   Holding UMi bertujuan untuk menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro dengan lebih baik. Ekosistem ultra mikro akan membantu *journey* kenaikan kelas masyarakat segmen ultra mikro menuju segmen mikro. Ekosistem ultra mikro akan memainkan peran penting dalam meningkatkan lanskap segmen ultra mikro di Indonesia. Oleh karena itu BRI membuat aplikasi Senyum Mobile yang merupakan suatu *platform digital sales* terintegrasi yang digunakan oleh tenaga pemasar untuk melakukan pemasaran produk lintas entitas (BRI, PNM dan Pegadaian)
5. ***KECEKU (Fitur Suplesi Otomatis)***
   Dalam upaya efisiensi dan akselerasi pinjaman mikro, bisnis mikro BRI berinovasi dengan membuat fitur suplesi otomatis untuk debitur eksisting Kupedes. Fitur ini memudahkan serta menghemat waktu mantri dan debitur dalam hal pengajuan suplesi pinjaman Kupedes untuk kembali ke *plafond* awal, debitur yang terpilih dapat mengajukan proses suplesi melalui ponsel milik debitur sendiri setelah menerima *whatsapp blast* dari BRI Info tanpa perlu datang ke kantor BRI Unit.
6. ***KECE 3.0***
   Pinjaman segmen ultra mikro yang didesain dengan konsep "*go lower, go shorter, go faster*" melalui kemudahan dan kecepatan. Pinjaman KECE 2.0 merupakan pengembangan lebih lanjut dari pinjaman KECE 1.0 yang telah dipasarkan secara *referral* melalui Mitra UMi. Adapun bentuk pengembangan dalam pinjaman KECE 2.0 adalah proses layanan pengajuan pinjaman melalui aplikasi BRISPOT Mitra UMi. Dalam proses layanan KECE 2.0 ini Mitra UMi sebagai kepanjangan tangan mantri yang dapat memprakarsai pinjaman, namun tetap dilakukan verifikasi oleh pihak BRI (Mantri BRI). Pinjaman Kupedes KECE dapat mendorong kinerja dan pertumbuhan Kupedes di BRI Unit melalui potensi nasabah ultra mikro.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Mikro Tahun 2024

Segmen bisnis mikro merupakan segmen dengan portofolio terbesar di BRI dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tercatat sebanyak 99,62% pelaku UMKM di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Dalam beberapa tahun ke depan, demografi Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan cukup pesat (285 juta jiwa di tahun 2025, dengan 67,3% di antaranya merupakan usia produktif). Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk tersebut, jumlah pelaku UMKM pun diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai lebih dari 71,4 pelaku usaha di tahun 2024. Hal tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi bisnis segmen mikro di tahun-tahun mendatang.

Namun demikian, pasar berubah sangat cepat dan berskala besar. Pandemi yang berlangsung lama telah mendorong adopsi teknologi secara luas hingga berpengaruh pada perilaku masyarakat, termasuk mengubah pola transaksi dan usaha para pelaku usaha mikro. Adopsi teknologi secara luas telah memberikan opsi bagi para pelaku usaha dan masyarakat mikro secara umum untuk menikmati layanan keuangan dan akses pembiayaan komersial non konvensional dengan tanpa batas (*borderless*). Kondisi demikian mengubah peta persaingan bisnis mikro di masa depan terlebih dengan hadirnya entitas non perbankan yang menyediakan layanan *financial technology* (P2P *lending*, *paylater*, dana talangan usaha, dan layanan sejenis lainnya).

Dinamika segmen bisnis mikro pun sangat mudah berubah. Adopsi teknologi selama masa pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan perilaku masyarakat segmen mikro yang semakin melek *digital*. Tercatat, sebanyak 90,5% pelaku UMKM di Indonesia telah memiliki *smartphone* dan 75% pendidik Indonesia telah terhubung dengan internet. Namun demikian, indeks digitalisasi rata-rata masih rendah yaitu sebesar 48,7% dan tidak terwujud ke dalam penggunaannya untuk usaha (Riset BRIRINS-British Embassy, 2023). Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan segmen bisnis mikro BRI dalam jangka menengah. Digitalisasi proses bisnis mikro yang telah dilakukan BRI adalah salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Rendahnya indeks digitalisasi usaha pelaku UMKM, merupakan peluang bagi BRI untuk berekspansi bisnis sekaligus melakukan pemberdayaan dengan literasi *digital* mengenai pemanfaatan teknologi *digital* untuk membantu mengembangkan usaha debitur melalui *platform* ekosistem PARI, Pasar.id dan Localoka.

Dalam tiga tahun ke depan (2024-2026), BRI akan memperkuat *positioning* bisnis mikronya dalam masyarakat dengan konsep *ecosystem centric* dan strategi "Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan". BRI akan mulai melakukan monetisasi proses bisnis dan model yang telah dibangun sejak tahun 2020 melalui kemitraan UMi dan *platform* ekosistem sebagai penggerak baru bagi pertumbuhan bisnis. BRI juga melakukan penguatan *human capital* mikro dengan peleburan beberapa fungsi mikro di jajaran *regional office* menjadi fungsi *ecosystem attacker* guna memperkuat penetrasi dalam bisnis *micropayment*. Penguasaan *micropayment* diupayakan dengan pembentukan ekosistem berbasis pemberdayaan. Sehingga selain meningkatkan penghimpunan simpanan masyarakat, diharapkan turut mampu meningkatkan kedalaman inklusi masyarakat yang berdampak pada peningkatan taraf hidup.

Pengembangan bisnis mikro BRI juga berfokus pada peningkatan kualitas kredit, peningkatan pendapatan melalui *unorganic income* (peningkatan *recovery rate* PH), peningkatan daya saing, dan *risk control*. Sejalan dengan itu, maka pengembangan dalam satu tahun berjalan (2024) diupayakan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan *yield* kredit mikro dengan berfokus pada pertumbuhan kredit komersial (Kupedes dan BRIguna) yang berkualitas dan pengembangan produk berbasis *turn over* sebagai sumber pendapatan baru.
2. Meningkatkan daya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan jaringan kerja agar mampu menggali potensi bisnis yang lebih baik, terutama di wilayah *urban*.
3. Meningkatkan kualitas *risk control* dengan melakukan penguatan *control system micro-channel*, pemanfaatan *data analytic*, dan perbaikan kualitas operasional bisnis untuk mereduksi risiko operasional dan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan. Penguatan *risk control* juga dilakukan pada aspek *people* dengan rejuvinasi fungsi *supervisor* BRI Unit untuk mendukung keberlangsungan bisnis mikro yang lebih berintegritas.
4. Memperbaiki struktur LDR dengan penyesuaian KPI yang lebih menitikberatkan akuisisi dana dan penguatan daya saing utamanya di area Urban. Akuisisi dana mikro dilakukan dengan berorientasi pada ekosistem (*ecosystem centric*) yakni melalui penguasaan *micropayment* dan pemberdayaan ekosistem yang telah terbentuk untuk menciptakan *close loop financing*, sehingga dapat meningkatkan transaksi dan perputaran dana usaha di BRI.
5. Optimalisasi *partnership* AgenBRILink sebagai *enabler* untuk meningkatkan produktivitas dan *span of control* mantri sehingga mantri dapat lebih fokus dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan.
6. Mengembangkan model bisnis *digital* dengan *personal scoring* untuk meningkatkan penetrasi dalam pasar pinjaman *digital* secara *prudent*.
7. Memperkuat sinergi BRI Group guna meningkatkan *fee based income* dari penjualan produk *bancassurance* Mikro Perusahaan Anak.
8. Penyempurnaan BRISpot sebagai *channel* untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan tenaga pemasar dengan mengembangkan menu restrukturisasi dan *cross selling* produk Perusahaan Anak.
9. Mengoptimalkan potensi dari model bisnis baru (PARI, Localoka x Agen BRILINK).
10. Memperkuat fungsi petugas administrasi untuk meningkatkan *recovery rate* saldo PH.

LAYANAN BRILINK

AgenBRILink adalah model kemitraan yang ditawarkan oleh BRI kepada masyarakat untuk memperluas layanan keuangan BRI. Model bisnis AgenBRILink menerapkan nilai sosial berupa pemberdayaan masyarakat, inklusi keuangan, pemerataan ekonomi, penyebaran pengetahuan mengenai perbankan dalam perannya pula sebagai Agen Laku Pandai yang diatur oleh OJK. Sementara itu penerapan nilai ekonomi melalui penghasilan tambahan untuk mitra, saling menguntungkan kemitraan ekonomi, diversifikasi usaha mitra, perpanjangan jaringan bank (efisiensi operasional).

Tabel Kinerja (Produktivitas) Layanan BRILink

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
AgenBRILink (Agen)	**740.818**	627.012	113.806	18,15%
Transaksi Finansial (transaksi)	**1.096.611.311**	1.078.046.509	18.564.802	1,72%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Fee Base Income (jutaan Rupiah)	**1.558.327**	1.423.600	134.727	9,46%
CASA (jutaan Rupiah)	**23.390.747**	20.668.150	2.722.597	13,17%
Volume Transaksi (jutaan Rupiah)	**1.427.583.095**	1.297.654.171	129.928.924	10,01%
Referral Simpanan	**118.437**	63.727	54.710	85,85%
Referral Pinjaman	**3.063.826**	937.720	2.126.106	226,73%

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 740.818 AgenBRILink di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 122.185 AgenBRILink EDC dan 618.633 AgenBRILink Mobile, dan tersebar di lebih dari 61,1 ribu desa di seluruh Indonesia. Selain itu 151.950 anggota PNM Mekaar telah menjadi AgenBRILink sebagai bentuk sinergi BRI dengan BRI Grup. AgenBRILink juga dapat melayani kredit UMKM melalui sistem *referral* pinjaman dan dapat melakukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat. Selain melayani *referral pinjaman* melalui mitra UMi BRI, AgenBRILink dapat melayani pembukaan rekening simpanan dengan sistem *referral* untuk jenis tabungan *basic saving account* yaitu Tabunganku. AgenBRILink berperan penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Adapun transaksi finansial tumbuh 1,72% dari 1.078 juta transaksi menjadi 1.096 juta transaksi di tahun 2023. Adanya peningkatan jumlah transaksi finansial ini mencerminkan layanan AgenBRILink yang dekat, aman dan canggih untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan masyarakat. Peningkatan transaksi finansial tersebut, diiringi dengan peningkatan *sales volume* BRILink yang tercatat mencapai Rp1.427 triliun. Dari transaksi yang sudah dilakukan AgenBRILink di seluruh Indonesia, BRI memperoleh *fee based income* sebesar Rp1,56 triliun di akhir Desember 2023. Nilai tersebut tumbuh 9,46% dari periode yang sama di tahun 2022 sebesar Rp1,42 triliun. Selain itu, AgenBRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp23,39 triliun, tumbuh 13,17% dari tahun 2022.

Strategi BRILink Tahun 2023

Pada tahun 2023, BRILink lebih berfokus pada peningkatan produktivitas dan membangun daya saing AgenBRILink melalui penguatan ekosistem mikro dengan adanya *partnership* dengan Mantri sebagai tenaga pemasar BRI untuk segmen mikro. Dengan 740 ribu AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia dan kolaborasi dengan Mantri BRI nantinya diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi mikro yang mandiri, salah satunya dalam penyaluran pinjaman melalui AgenBRILink Mitra UMi. AgenBRILink Mitra UMi adalah Agen yang difokuskan untuk menyalurkan pinjaman Ultra Mikro kepada masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku UMKM dalam hal penyediaan modal usaha untuk menghindari praktek rentenir.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas layanan AgenBRILink terus memberikan inisiatif dan terobosan baru dengan menambah fitur produk/layanan dan memaksimalkan *partnership* dengan BRI Grup yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan penetrasi bisnis *digital* sehingga AgenBRILink dapat memaksimalkan perannya dari sekedar *banking assistance* menjadi *sales*/pemasar. Dalam pembesar jangkauan melalui AgenBRILink, BRI menggunakan *support tools* untuk melakukan Akuisisi AgenBRILink baru menggunakan AI (BRIBrain) dan mempertimbangkan potensi wilayah (BRIKodes) berupa *behaviour scooring* (*profiling*, segmentasi dan *pipeline*) untuk menghasilkan AgenBRILink yang berkualitas.

Jumlah AgenBRILink yang terus bertambah, perlu adanya peningkatan kapabilitas dan *maintenance* loyalitas konsumen AgenBRILink agar lebih kompetitif. Pengetahuan AgenBRILink tentang produk dan *marketing skill* pun perlu dikalibrasi seiring dengan bertambahnya produk dan layanan BRILink. Hal ini akan diakomodir dengan adanya aplikasi BRILinkers sebagai wadah bagi Agen untuk *sharing* produk, layanan dan ide di antara AgenBRILink. Meskipun AgenBRILink dekat dan melayani pasar mikro BRI, AgenBRILink bukan hanya menjadi *enabler* untuk segmen tertentu, namun sebagai *business collaborator* yang melayani bisnis untuk BRI Group dan menjadi *center of community*, menjual produk konsumer dan UKM, dan menyediakan bisnis tambahan untuk AgenBRILink melalui kemitraan Korporasi.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi BRILink

Dengan adanya AgenBRILink yang tersebar lebih dari 740 ribu di seluruh Indonesia dan didukung oleh *customer based* BRI, terdapat keunggulan kompetitif pada AgenBRILink yaitu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan tanpa harus ke Bank bahkan di hari libur sekalipun. AgenBRILink dapat melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan EDC BRILink ataupun BRILink *Mobile* secara *real time online*. Fitur yang terdapat pada BRILink *Mobile* pun juga terus di-*update* disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Inovasi BRILink terus dikembangkan untuk terus bersaing dengan kompetitor lain yang satu per satu bermunculan yaitu dengan dilakukan implementasi EDC berbasis android (MPos) tentunya salah satu terobosan inovasi BRILink untuk terus bertahan dan meningkatkan kinerjanya. Diharapkan dengan adanya implementasi

EDC android ini memudahkan para AgenBRILink untuk *update* fitur terbaru sehingga dapat meningkatkan daya saing AgenBRILink. Kini AgenBRILink juga telah dapat menyalurkan pinjaman ultra mikro kepada masyarakat melalui AgenBRILink Mitra UMi.

Prospek Usaha dan Strategi BRILink Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dalam rangka mewujudkan komitmen Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk terus memperluas layanan AgenBRILink dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia, BRI memandang pentingnya transformasi peran AgenBRILink dari sekadar penyedia transaksi perbankan menjadi "*lifestyle micro provider*" yang lebih menyentuh kebutuhan dan gaya hidup pelanggan di segmen mikro. Transformasi ini adalah bagian dari perjalanan AgenBRILink yang terbagi dalam 3 (tiga) fase. Fase pertama melibatkan AgenBRILink sebagai *payment and banking services provider*, yang memfasilitasi transaksi keuangan. Kemudian dalam fase kedua, AgenBRILink mengambil peran sebagai pemasaran layanan ultra mikro, yang mencakup penyediaan beragam layanan keuangan dan non-keuangan yang relevan dengan kebutuhan segmen Mikro. Fase ketiga, yang merupakan tahap selanjutnya dalam perjalanan AgenBRILink, melibatkan transformasi menjadi "*lifestyle micro provider*" yang lebih komprehensif.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan pelanggan, mempertimbangkan BRI tidak memiliki *platform e-commerce* sendiri, serta jumlah uang beredar yang terkonsentrasi di segmen bisnis *groceries*, terdapat peluang untuk mengambil kesempatan bisnis grosir dengan mengintegrasikan fitur *e-commerce* dalam ekosistem AgenBRILink. Localoka, sebagai *platform e-commerce* yang dikelola oleh BRI, telah menyediakan solusi bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk mereka secara *online*. Integrasi aplikasi BRILink Mobile dengan *e-commerce* diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan potensi penjualan dan keuntungan bagi AgenBRILink. Selain itu, perluasan kerjasama Localoka dengan *merchant* korporasi adalah langkah strategis yang mendukung tujuan awal Localoka sebagai wadah ekosistem lokal dan memberikan nilai tambah bagi nasabah UMKM BRI yang telah dan akan menjadi *merchant* di *platform* Localoka. Kerjasama ini memperluas peluang bisnis dan peningkatan AgenBRILink di Localoka, sehingga AgenBRILink memiliki kesempatan untuk membeli barang secara grosir dengan harga yang lebih kompetitif melalui *merchant* korporasi yang bekerjasama dengan Localoka.

Dengan mengelola *e-commerce*, BRI dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelanggan dan *merchant* saat mereka melakukan transaksi jual beli yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan CASA BRI yang lebih stabil. Dengan tetap mempertahankan integritas Localoka sebagai ekosistem lokal, kerjasama ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi pelanggan, AgenBRILink (sebagai *merchant*) dan BRI sendiri, sejalan dengan misi inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, untuk memperluas jenis layanan yang dapat dilayani oleh AgenBRILink, salah satunya yaitu fitur Gadai yang memungkinkan masyarakat sekitar AgenBRILink untuk melakukan transaksi dan pembayaran Gadai tanpa harus datang ke *Outlet* Pegadaian.

PROGRAM SOCIAL ENTREPRENEURSHIP & INCUBATION

Program Social Entrepreneurship & Incubation meliputi Penyaluran Program pemerintah (antara lain Bantuan Sosial dan Kartu Tani serta program Inkubasi (antara lain program UMKM Naik Kelas, Desa BRILiaN dan BUM Desa, Figur Inspiratif Lokal dan Klaster Usaha. Uraian masing-masing penjelasan layanan diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Bantuan Sosial (Bansos)**
   Merupakan Program Pemerintah kerjasama dengan Kementerian Sosial RI untuk penyaluran dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Terdapat 2 (dua) jenis program bantuan sosial yakni Program PKH dan Program Sembako yang dananya disalurkan secara non tunai melalui sistem perbankan. Dana Bantuan dapat dicairkan oleh penerima bantuan melalui *teller*, *e-channel* BRI maupun Agen BRILink.
2. **Kartu Tani**
   Merupakan Kartu Debit *Co-Branding* kerjasama dengan Kementerian Pertanian yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh Petani di Kios Pupuk Lengkap dan dapat digunakan juga untuk transaksi perbankan umum.
3. **UMKM Naik Kelas**
   BRI mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui serangkaian program sehingga UMKM dapat menaikkan level usahanya dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Untuk membantu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM, BRI memiliki berbagai *platform* yaitu:
   a. ***Link* UMKM**
      Merupakan *platform* pemberdayaan *digital* yang bertujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui program terpadu yang dapat diakses melalui *website* dan aplikasi.
   b. **Rumah BUMN**
      Merupakan salah satu program inisiatif Kementerian BUMN dan BUMN untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah. Rumah BUMN berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM. Sedangkan tujuan utama Rumah BUMN adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas UKM sehingga dapat terwujud UKM Indonesia yang berkualitas.
4. **Desa BRILiaN dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**
   a. **Desa BRILiaN**
      Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa sebagai komitmen BRI dalam mengembangkan potensi desa binaan BRI.

b. **BUM Desa**
BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

5. **Figur Inspiratif Lokal**
Program Figur Inspiratif bertujuan untuk mendapatkan tokoh pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat berkolaborasi dengan Mantri BRI dalam rangka pengembangan bisnis BRI.
6. **Klaster Usaha**
Merupakan kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Program Social Entrepreneurship & Incubation

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Bantuan Sosial (Bansos)				
Program Keluarga Harapan (PKH)				
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	**3.242.819**	3.707.998	(465.179)	(12,55%)
Penyaluran (jutaan Rupiah)	**9.124.063**	8.222.729	901.331	10,96%
Sembako				
Jumlah KPM	**5.405.345**	5.676.292	(191.680)	(3,42%)
Penyaluran (jutaan Rupiah)	**12.652.323**	4.456.840	8.261.715	188,17%
El Nino				
Jumlah KPM	**5.164.353**	-	-	-
Penyaluran (jutaan Rupiah)	**2.065.741**	-	-	-
Total Bansos				
Penyaluran (jutaan Rupiah)	**23.842.128**	12.613.340	11.228.788	89.02%
Kartu Tani				
Jumlah Kartu Tercetak	**6.648.833**	7.398.549	(749.716)	(10,13%)
Jumlah Kios Pupuk Lengkap Terpasang EDC	**9.058**	8.969	89	0,99%
Volume Penebusan Pupuk Bersubsidi (Ton)	**1.102.609**	1.280.705	(178.096)	(13,91%)
Volume Penebusan Pupuk Bersubsidi (Liter) *)	**0**	6.486	(6.486)	(100,00%)
Nominal Penebusan Pupuk Bersubsidi (Rp juta)	**2.502.586**	2.811.677	(309.091)	(10,99%)
Rumah BUMN (RB)				
Jumlah RB	**54**	54	0	0,00%
Jumlah Anggota	**418.588**	386.900	31.688	8,19%
Jumlah Pelatihan	**12.232**	9.608	2.624	27,31%
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Desa BRILiaN				
Jumlah Rekening	**52.091**	36.620	15.471	42,25%
Jumlah Saldo Tabungan BUM Desa (Rp juta)	**753.004**	608.963	144.041	23,65%
Jumlah BRILink BUM Desa	**15.233**	12.908	2.325	18,01%
Jumlah Desa BRILiaN	**3.178**	2.182	996	45,65%
Figur Inspiratif Lokal				
Figur Inspiratif Lokal	**889**	588	301	51,19%
Klaster				
Jumlah Klaster Binaan	**23.243**	15.266	7.977	52,25%
Pemberdayaan (Sarana Prasarana dan Pelatihan)	**657**	595	62	10,42%

*) Pada tahun 2023 penebusan pupuk organik cair tidak disubsidi

Total penyaluran bansos tahun 2023 mencapai Rp21,77 triliun, meningkat 72,65% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp12,61 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pengalihan alokasi penyaluran Program Sembako ke Himbara, yang sebelumnya pada tahun 2022 disalurkan melalui PT Pos.

Demikian pula dengan jumlah Desa BRILiaN yang tumbuh 45,60% dari 2.182 Desa BRILiaN di tahun 2022 menjadi 3.178 Desa BRILiaN di tahun 2023. Klaster usaha dan figur inspiratif lokal berhasil tumbuh masing-masing menjadi 23.243 klaster usaha dan 889 figur inspiratif lokal di tahun 2023. BRI berkomitmen untuk mendukung implementasi SDG melalui program-program pemberdayaan, membentuk *role model* bisnis berkelanjutan. BRI secara aktif menambah klaster usaha, desa BRILIaN dan *Figure* Inspiratif Lokal setiap tahunnya sehingga manfaat dari program pemberdayaan BRI dapat dirasakan Masyarakat yang lebih luas.

Di sisi lain untuk program Kartu Tani, dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022, tanggal 6 Juli 2022, terdapat pengurangan jenis pupuk dan komoditas yang disubsidi, sehingga terjadi penurunan jumlah Kartu Tani tercetak, volume dan nominal penebusan pupuk bersubsidi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Total pencetakan Kartu Tani tahun 2023 mencapai 6.648.833 Kartu, dengan volume pupuk sebesar 1.102.609 Ton, dan nominal transaksi sebesar Rp2,50 triliun.

Strategi Program Social Entrepreneurship & Incubation Tahun 2023

Uraian Strategi Program Social Entrepreneurship & Incubation yang dilakukan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Bansos**
   a. Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Sosial PKH dan Sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan dan Instruksi dari Kemensos RI.
   b. Ikut serta dalam peningkatan inklusi keuangan yang diakses oleh penerima bantuan (keluarga penerima manfaat)
2. **Kartu Tani**
   a. Implementasi pengiriman data transaksi secara harian melalui *secure* FTP ke *database* Kementerian Pertanian untuk kemudahan *monitoring* dan rekonsiliasi data transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani.
   b. Kios Pupuk Lengkap sebagai agen laku pandai yang memudahkan petani mendapatkan layanan transaksi.
3. **UMKM Naik Kelas (Rumah BUMN)**
   Pemberdayaan UMKM Naik Kelas secara *online* melalui *platform* Link UMKM maupun secara *offline* melalui Rumah BUMN, dengan pengajar/mentor baik level lokal maupun nasional yang memiliki spesifikasi dan keahlian di bidangnya dan dengan melibatkan mantri dan RM untuk bisa mendampingi dan membimbing para nasabah binaannya untuk dapat Naik Kelas.
4. **Desa BRILiaN dan BUM Desa**
   a. Mentargetkan minimal 500 desa binaan baru yang akan diberdayakan melalui Program Desa BRILiaN.
   b. Memperdalam inklusi dan literasi keuangan dari desa yang sudah tergabung pada Program Desa BRILiaN dengan meningkatkan pemanfaatan *micropayment* di desa.
5. **Figur Inspiratif Lokal**
   a. Masing-masing unit kerja bisnis (termasuk regional dan KP) mengidentifikasi potensi figur-figur inspiratif lokal yang dapat bersumber dari pihak-pihak yang berperan penting di Desa BRILiaN atau Klaster Usaha.
   b. Pemberdayaan figur inspiratif lokal melalui pelatihan/ sertifikasi, bekerjasama dengan pusat inkubasi bisnis atau universitas.
   c. Menyusun media *plan* untuk publikasi kisah-kisah para Figur Inspiratif Lokal.
6. **Klaster Usaha**
   a. Program akuisisi 1 (satu) Mantri 1 (satu) Klaster.
   b. Program pemberdayaan terhadap 500 Klaster.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Program Social Entrepreneurship & Incubation

Uraian keunggulan kompetitif dan inovasi Program Social Entrepreneurship & Incubation dan Inkubasi adalah sebagai berikut:

1. **Bansos**
   Digitalisasi pendistribusi Kartu (KKS) ke Keluarga penerima Manfaat (KPM) melalui aplikasi berbasis *Web* dan *Mobile* (Aplikasi Makna) sebagai alat yang dapat memonitoring secara *real time* pendistribusian KKS serta pencairan dana bantuan oleh penerima bantuan.
2. **Kartu Tani**
   Dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia, 22 Provinsi di antaranya merupakan wilayah kerja Kartu Tani BRI, sehingga BRI merupakan *market leader* untuk program Kartu Tani.
3. ***Link* UMKM**
   Memaksimalkan fungsi pelatihan *online* melalui Aplikasi LinkUMKM di mana terdapat Fitur *Self Assesment*, yaitu fitur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi UMKM sehingga dapat diketahui kebutuhan pelatihan dari masing-masing UMKM.
4. **Desa BRILiaN dan BUM Desa**
   Program pemberdayaan ekosistem desa ini selaras dengan Revitalisasi Mantri yang juga akan menjadi *new way of working* Mantri BRI yang tujuan utamanya adalah mencari sumber pertumbuhan baru Bisnis Mikro BRI. Keunggulan kompetitif program ini adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan desa dengan berbalut program pemberdayaan (peningkatan kapabilitas perangkat desa, BUM Desa, dan pelaku usaha termasuk klaster usaha binaan BRI). Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan Desa yang bertujuan menghasilkan *role model* dalam pengembangan desa, melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dan juga mengusung semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis *Sustainable Development Goals* (SDG's). Program ini menyasar tidak hanya dampak finansial terhadap BRI yang bersumber dari akuisisi bisnis di desa namun juga dampak sosial kepada masyarakat desa dengan harapan desa-desa binaan ini akan loyal kepada BRI dan mendukung pertumbuhan

bisnis mikro yang berkelanjutan bagi BRI. Desa yang tergabung dalam program ini diharapkan menjadi sumber inspirasi kemajuan desa yang dapat direplikasi di wilayah lain.

5. **Figur Inspiratif Lokal**
   Figur Inspiratif Lokal merupakan inisiatif bisnis mikro dalam hal implementasi partnership pemberdayaan antara BRI dengan tokoh masyarakat/sosok inspiratif untuk meng-influence pelaku usaha mikro agar maju sesuai inisiatif/ inspiratif dari figur-figur inspiratif tersebut. Keunggulan kompetitif dari program FIL adalah kolaborasi antara Mantri BRI dengan figur inspiratif lokal untuk menjalankan fungsi literasi kepada masyarakat/pelaku usaha mikro agar mendapat akses inklusi keuangan dari BRI. Figur inspiratif lokal merupakan implementasi dari konsep "*crowd sourcing*" untuk memperluas akses akuisisi inklusi BRI.
6. **Klaster Usaha**
   a. Efisiensi waktu, biaya dan tenaga yang dikarenakan mantri melayani kebutuhan kolektif.
   b. Efektif dalam proses pemasaran layanan produk dan jasa BRI.
   c. Memudahkan Mantri dalam *monitoring* dan evaluasi pelaku usaha.
   d. Meningkatkan *value added* mantri sebagai pendamping pemberdayaan dan *financial advisor.*

Prospek Usaha dan Strategi Program Social Entrepreneurship & Incubation Tahun 2024

Uraian prospek usaha dan strategi Program Social Entrepreneurship & Incubation yang akan dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bansos**
   a. Pemanfaatan KPM (Penerima Bantuan) Bansos naik kelas untuk dijadikan *pipeline* bisnis.
   b. Sinergi Pemberdayaan pada Program pemerintah dalam memaksimalkan ekosistem bisnis
2. **Kartu Tani**
   Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani terintegrasi dengan sistem e-Alokasi Kementerian Pertanian untuk meminimalisir perbedaan data.
3. ***Link* UMKM**
   a. Target UMKM Naik Kelas sebanyak 1 (satu) juta UMKM dengan menggunakan *platform* LinkUMKM, selain melibatkan mantri dan petugas Rumah BUMN, juga akan melibatkan PAB dan Agen BRILink binaan BRI selindo.
   b. Pembuatan *dashboard* perolehan *self assessment scoring* dengan kode *referral* masing-masing sebagai *tools monitoring* program yang dapat diakses sesuai *level user*.
4. **Desa BRILiaN dan BUM Desa**
   BRI mentargetkan minimal 500 desa binaan baru yang akan diberdayakan melalui Program Desa BRILiaN. BRI akan tetap memperdalam *financial literacy* and *inclusion* dari Desa yang sudah tergabung pada Program Desa BRILiaN dengan meningkatkan pemanfaatan *micropayment* di desa. Idealnya, dari total kurang lebih 74 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia, terdapat 63 ribu yang memiliki status Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri, yang dapat diikutkan program Desa BRILiaN. Masih banyak ruang untuk tumbuh dan akuisisi Ekosistem Desa oleh BRI. Adapun Strategi Desa BRILiaN di tahun 2024, adalah:
   a. Aktif melakukan sosialisasi bersama *regional office*, *booking office*, unit dan mantri terkait program Desa BRILiaN.
   b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mensosialisasikan program Desa BRILiaN dan produk BRI.
   c. Optimalisasi Program Pojok Mantri Desa (kolaborasi dengan Divisi MSM).
   d. Koordinasi dengan Divisi BRILINK untuk optimalisasi Petugas Agen BRILINK (PAB) di uker untuk mensosialisasikan Program Desa BRILiaN kepada BUM Desa dan pendampingan BUM Desa sebagai agen BRILink.
   e. Berkoordinasi dengan Kementerian (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)
   f. Mempromosikan Program Desa BRILiaN melalui sosial media, media cetak maupun maupun media *digital*.
5. **Figur Inspiratif Lokal**
   Program figur inspiratif lokal bisnis mikro BRI dapat dinilai memiliki prospek yang baik untuk mendukung pertumbuhan bisnis mikro BRI (*New source of growth* BRI). Pada Tahun 2024 program figur inspiratif lokal BRI ditargetkan dapat menjaring 50 figur-figur inspiratif lokal di seluruh indonesia untuk dikolaborasikan dengan bisnis mikro BRI dalam menjalankan fungsi literasi dan akuisis inklusi keuangan BRI. Adapun strategi figur inspiratif lokal di tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Cari dan Temukan
      Masing-masing unit kerja bisnis mengidentifikasi potensi figur -figur inspiratif lokal yang dapat bersumber dari:
      - Tokoh Masyarakat seperti Kepala desa, Pengurus BUM Desa, Tokoh Penggerak UMKM yang memiliki kisah inspiratif, semangat dan inisiatif untuk mengembangkan potensi lokal.
      - Inisiator bisnis/ketua klaster usaha yang memiliki dampak positif bagi peningkatan kapasitas usaha ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha.
   b. Berdayakan
      Pemberdayaan figur inspiratif lokal melalui:
      - Peningkatan kompetensi melalui pelatihan/ sertifikasi, bekerjasama dengan *expertise* pusat inkubasi bisnis atau universitas.
      - Pelibatan figur inspiratif lokal sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan atau pemberdayaan UMKM.
   c. Publikasi
      Menyusun media plan untuk publikasi inspirasi-inspirasi figur lokal inspiratif dan program kolaborasi BRI dalam rangka mendukung UMKM Naik kelas.
6. **Klaster Usaha**
   Intensifikasi program pemberdayaan klaster untuk mendukung bisnis mikro berkelanjutan, melalui program antara lain:
   a. Meningkatkan kapasitas bisnis klaster usaha dengan pendampingan produk klaster masuk *marketplace online*.
   b. Pendampingan peningkatan kualitas produk klaster usaha (*packaging*, sertifikasi halal dan sebagainya) agar lebih berdaya saing.

Segmen Ritel

Segmen Bisnis Ritel ditujukan untuk melayani wirausaha kecil dan menengah (UKM) antara lain melalui produk dan layanan perbankan konsumer dan komersial. Segmen Ritel meliputi Bisnis Kecil dan Menengah, Bisnis Kredit Konsumer, Bisnis Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT BISNIS KECIL & MENENGAH

Tema Strategi untuk bisnis SME untuk ekspansi di tahun 2023 adalah "*Expand Selectively, Focus on Transaction Led Business Model BRI*", dengan fokus eksekusi dengan memanfaatkan potensi *value chain* dan fokus pada model bisnis berbasis transaksi (*transaction besed lending*). Di samping itu, strategi untuk melakukan *maintenance* nasabah existing adalah "*Growth and Quality*". Segmen SME melakukan pemetaan secara menyeluruh kepada nasabah untuk mendapatkan potensi yang optimal, sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas antara nasabah yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan nasabah yang segera harus dilakukan *exit strategy*. Melalui strategi tersebut, SME BRI diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendukung *Corporate Strategy* di 2023 "*Strengthen Retail Banking Capabilities*". Strategi tersebut tercermin dari kinerja total *outstanding* kredit SME tahun 2023 sebesar 260,35 triliun, meningkat 9,47% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp237,83 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh kredit *medium* yang tumbuh 54,10% yoy. Dari sisi kenaikan jumlah total nasabah SME, telah terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 15.618 (pertumbuhan 3,3%) dari posisi 461.765 di Desember 2022 menjadi 477.384 nasabah.

Pengembangan bisnis kecil dan menengah diarahkan untuk mencapai visi *The House Bank for SMEs in Indonesia* 2025 yang menawarkan solusi pertumbuhan *end to end business* untuk nasabah SME. Di tahun 2023, hal tersebut diwujudkan melalui pencipataan *new business model* melalui *New* BRISPOT SME, dimana melalui *tools* baru yang dilengkapi dengan teknologi yang membuat proses kredit menjadi lebih *prudent*, akan tercipta pertumbuhan bisnis SME yang lebih sehat dan *sustainable*. Peningkatan kapabilitas tenaga pemasar di segmen SME telah mengedepankan *capability development*, berupa pengembangan *pipeline management skill, hard competencies based on gap competencies*, dan akselerasi RM SME sebagai RM *of the future* yang didukung dengan *digital* dan *artificial intelligence* untuk meningkatkan produktivitas RM SME.

Pada tahun 2024 strategi bisnis SME adalah "*Scaling Up SME Business*", yang akan difokuskan pada segmen *upper small* dan *medium*, serta memperkuat *value chain financing*. Bisnis SME akan didorong fokus pada pertumbuhan yang lebih sehat eksekusi *pipeline* dari *value chain*, memperluas cakupan sumber *pipeline* dari nasabah/ekosistem perdagangan dengan berbasis AI, adanya revitalisasi SME *center* melalui *refocusing* unit kerja (KC Area Metro) sebagai *growth driver*.

Selain itu, juga terdapat program-program, produk pendukung serta *new business model* yang sudah dimulai sejak tahun 2023, diharapkan itu semua dapat menjadi kekuatan SME untuk dapat melewati tantangan bisnis di tahun 2024. Untuk mendukung strategi pencapaian target 2024, tentunya juga harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga pemasar di segmen SME salah satunya melalui rejuvenasi RM, penajaman *skill set marketing* serta penguasaan industri unggulan daerah. Dengan kebijakan strategi tersebut, SME BRI diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendukung *destination statement* BRI di 2024 yaitu "*Strengthening retail Banking Capabilities and Optimization Contribution of Subsidiaries*".

BISNIS KECIL DAN MENENGAH

BRI mengklasifikasikan segmen Bisnis Kecil dan Menengah berdasarkan plafon kredit, dimana Bisnis kecil adalah pinjaman dengan besaran plafond sampai dengan Rp25 miliar dan plafon segmen Bisnis Menengah sebesar >Rp25 miliar-Rp500 miliar. Produk-produk Bisnis Kecil dan Menengah antara lain:

1. **Kredit Modal Kerja**
   Merupakan fasilitas kredit produktif untuk pembiayaan operasional usaha (aktiva lancar) dan/atau menggantikan hutang dagang, dalam rangka proses produksi atau komponen modal kerja lainnya. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya jangka waktu dan pengembalian kredit sesuai dengan karakter bisnis nasabah.
2. **Kredit Investasi**
   Merupakan fasiltas kepada perusahaan dan atau perorangan untuk membiayai kebutuhan dana jangka panjang dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, pembaharuan (renovasi) aktiva tetap produktif beserta biaya-biaya yang menyertainya. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan seperti jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan arus kas debitur.
3. ***Value Chain Financing***
   Value Chain Financing meliputi
   a. ***Project Financing* (KMK *Pre Financing*)**
      Merupakan fasilitas kredit modal kerja kepada *vendor*/ rekanan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam

rangka pembangunan/konstruksi atau pengadaan/ pembelian barang dan/atau jasa suatu proyek atas dasar kontrak atau dokumen sejenis dari Perusahaan Inti.

b. ***Invoice Financing* (KMK *Post Financing*)**
Merupakan fasilitas kredit modal kerja kepada *vendor*/ rekanan untuk membiayai piutang dalam rangka pembayaran atas prestasi penyelesaian proyek baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan *invoice* atau dokumen sejenis.

c. ***Distributor Financing* (KMK *Distributor*)**
Merupakan fasilitas kredit modal kerja kepada distributor/ sub distributor/ agen, dan hanya dipergunakan untuk pembayaran pembelian produk kepada Perusahaan Inti dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali.

d. ***Customer Financing***
Fasilitas kredit yang diberikan kepada *buyer/end user*/ pelanggan dari Perusahaan Inti dan hanya dapat digunakan untuk pembelian produk/barang dan/atau jasa yang dijual Perusahaan Inti dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri sebagai bagian dari modal kerja yang bersangkutan.

e. **Kredit Investasi Mitra**
Merupakan fasilitas kredit investasi dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, pembaharuan (renovasi), termasuk *refinancing* aktiva tetap beserta biaya-biaya yang menyertai untuk menunjang bisnis/ usaha vendor/rekanan kepada Perusahaan Inti.

f. **KMK APBN**
Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada *vendor*/rekanan dari Kementrian/Lembaga Negara dimana sumber pembayaran proyek berasal dari dana APBN. Produk-produk tersebut memiliki keunggulan antara lain:
   a. Suku bunga dan biaya kredit.
   b. Relaksasi agunan dan *sharing* dana sendiri.
   c. Operasionalisasi secara *digital* melalui *corporate billing management*

4. **Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi**
Merupakan kredit modal kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontraktor/*vendor* untuk menyelesaikan proyek jasa konstruksi sesuai dengan kontrak kerja

5. **Kredit Modal Kerja Pengembang**
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan dengan tujuan membiayai kebutuhan modal kerja pengembang dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan pengadaan bangunan yang dimaksudkan untuk dijual.

6. **Kredit Dinamis**
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan baik dalam bentuk KMK maupun KI yang pengenaan suku bunga kreditnya dapat berubah secara otomatis (dinamis) setiap bulannya berdasarkan rasio CASA.

7. **Kredit Dengan Pola Angsuran Tetap**
Merupakan fasilitas kredit produktif untuk tujuan modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi debitur segmen kecil dengan sistem pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga dengan jumlah tetap. Keunggulan produk dengan pola angsuran tetap antara lain:
   a. Plafon bisa sampai dengan Rp1 miliar, masing-masing untuk KMK dan KI sehingga total plafon bisa sampai dengan Rp2 miliar.
   b. Jangka waktu kredit hingga 5 (lima) tahun.
   c. Tarif biaya provisi dan administrasi lebih rendah

8. ***Loan Channeling* via *Fintech Lending***
BRI melakukan kolaborasi dengan *fintech lending* dalam rangka penyaluran pinjaman jangka pendek berbasis transaksi dengan kemudahan tanpa agunan tambahan. Prosedur pelayanan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan SLA yang lebih cepat, biaya OHC yang lebih murah dan margin yang lebih tinggi dibandingkan produk konvensional lainnya.

9. **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil**
Merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun agunan tambahan belum cukup dengan jumlah pinjaman di atas Rp100 juta-Rp500 juta setiap individu, dengan suku bunga rendah dan mendapatkan subsidi dari Pemerintah.

10. **Kredit dengan Jaminan Resi Gudang**
Merupakan fasilitas pembiayaan oleh penyalur resi gudang (bank) kepada penerima resi gudang (nasabah) dengan memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan/agunan yang dapat diberikan dengan skema subsidi bunga dari Pemerintah maupun skema komersial.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Kecil dan Menengah

(dalam jutaan Rupiah)

Outstanding	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kredit Kecil	**183.046.732**	172.296.177	10.750.555	6,24%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	**45.010.265**	44.583.367	426.898	0,96%
Kredit Menengah	**32.291.213**	20.954.266	11.336.947	54,10%
***Small Medium Enterprise* (SME)**	**260.348.210**	**237.833.810**	**22.514.400**	**9,47%**

Total *outstanding* kredit SME tahun 2023 sebesar Rp260,35 triliun, meningkat 9,47% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp237,83 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh Kredit Medium yang tumbuh 54,10%. Pada tahun 2023, penyaluran bisnis dilakukan secara selektif yaitu memanfaatkan potensi *value chain* dan fokus pada model bisnis berbasis transaksi. Strategi tersebut menghasilkan hasil positif pada pencapaian kinerja segmen SME posisi Desember 2023, dengan kenaikan jumlah total nasabah SME sebanyak 15.618 (pertumbuhan 3,3%) dari posisi 461.766 di Desember 2022 menjadi 477.384 nasabah. Adapun *outstanding* pinjaman mengalami kenaikan sebesar Rp22,51 triliun atau 9,47% dari posisi Rp237,83 triliun di Desember 2022 menjadi Rp260,35 triliun di Desember 2023.

Tabel Rincian Kinerja (Produktivitas) Bisnis Kecil dan Menengah

(dalam jumlah penuh)

Jumlah Debitur	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kredit Kecil	227.565	225.652	1.913	0,85%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	248.834	235.350	13.484	5,73%
Kredit Menengah	963	764	199	26,05%
Segmen *Small Medium Enterprise* (SME)	477.384	461.766	15.618	3,38%

Strategi Bisnis Kecil dan Menengah Tahun 2023

Strategi bisnis di 2023 untuk segmen SME akan difokuskan pada segmen *upper small dan medium*, serta memperkuat *value chain financing*. Kondisi ini memberikan tantangan baru dalam pengembangan Bisnis Kecil dan Menengah di tahun 2023, selain harus tetap tumbuh dengan ekspansi bisnis yang dilakukan secara selektif dan hati-hati (*prudent*), Bisnis SME harus dapat tumbuh dengan pemilihan *pipeline* yang tepat (*expand selectively*). Hal ini harus dilakukan mengingat Bisnis SME memiliki peranan dan *market share* yang besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian negara dan mendukung pemberdayaan UMKM.

Mempertimbangkan hal tersebut, strategi pengembangan bisnis SME dalam jangka pendek dan menengah akan diarahkan pada pengembangan bisnis berbasis *transaction based*, pemanfaatan bisnis berbasis ekosistem, optimalisasi potensi *value chain business*, pengembangan aplikasi *digital platform* untuk efisiensi proses bisnis dan layanan, peningkatan *fee based income* dari kredit dan non kredit, peningkatan kapabilitas *Relationship Manager* (RM), peningkatan *monitoring* dan evaluasi pencapaian tenaga pemasar, serta perbaikan kualitas pinjaman.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Kecil dan Menengah

Pengembangan Bisnis Kecil dan Menengah diarahkan untuk mencapai visi The *House Bank for SMEs in Indonesia 2025* yang menawarkan solusi pertumbuhan *end to end business* untuk nasabah SME, sebagai berikut:

1. Digitalisasi proses bisnis loan analysis dan *loan disbursement* serta perbaikan model *credit underwriting* yang berdampak pada perbaikan TAT dan kualitas aset. Digitalisasi tersebut dilakukan melalui inisiatif BRIVOLUTION 2.0 yaitu *New* Brispot S1 untuk prakarsa segmen *small* sampai dengan Rp5 miliar, *power up upper small and medium* melalui pengembangan aplikasi prakarsa Brispot S5, *principal indicator and rating system, value chain observation system*, Link5 with BRIBRAIN, yang diharapkan dapat mempercepat SLA dalam memberikan layanan kepada nasabah dan meningkatkan akurasi terkait data analisis serta memberikan *pipeline source* yang lebih baik. Inisiasi ini juga memberikan *tools* kepada RM untuk dapat memonitor portofolio bisnis kelolaan masing-masing secara *realtime* dan dapat menggali potensi bisnis yang optimal.
2. Mendorong ekspansi Bisnis Kecil dan Menengah melalui *transaction based lending*, bisnis berbasis ekosistem dan optimalisasi *value chain* dari mitra nasabah principal/ korporasi dan nasabah menengah BRI.
3. Peningkatan kapabilitas tenaga pemasar di segmen SME akan mengedepankan *capability development,* berupa pengembangan *pipeline management skill, hard competencies based on gap competencies,* dan akselerasi RM SME sebagai *RM of The Future* yang didukung dengan *digital* dan *artificial intelligence* pada *sales tools* tablet RM.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Kecil dan Menengah Tahun 2024

Pada tahun 2024 strategi bisnis SME adalah "*Scaling Up SME Business*", dengan fokus pada pertumbuhan yang lebih sehat eksekusi *pipeline* dari *value chain*, memperluas cakupan sumber *pipeline* dari nasabah/ekosistem perdagangan dengan berbasis AI, adanya revitalisasi SME *Center* melalui *refocusing* Unit Kerja (KC Area Metro). Selain itu, juga terdapat program-program, produk pendukung serta *new business model* yang sudah dimulai sejak tahun 2023, diharapkan itu semua dapat menjadi kekuatan SME untuk dapat melewati tantangan bisnis di tahun 2024. Untuk mendukung strategi pencapaian target 2024, tentunya juga

harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga pemasar di segmen SME salah satunya melalui rejuvenasi RM, penajaman *skill set marketing* serta penguasaan Industri Unggulan Daerah. Dengan kebijakan strategi tersebut, SME BRI diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendukung *corporate strategy* di 2024 "*Strengthening retail Banking Capabilities and Optimization Contribution of Subsidiaries*".

Untuk mendukung *social value creation*, Direktorat SME tetap berkomitmen melanjutkan program pemberdayaan UMKM di tahun 2023 untuk mendorong peningkatan UMKM naik kelas, mendukung upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional serta dalam menciptakan 1 (satu) juta wirausaha baru pada tahun 2024. Program pendampingan kepada UMKM tersebut antara lain Pengusaha Muda BRILiaN, Growpreneur dan UMKM Export BRILianpreneur.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT BISNIS KONSUMER

Pemulihan ekonomi Indonesia serta perubahan perilaku konsumen pasca pandemi Covid-19 mendorong BRI terus menerus berinovasi guna menghasilkan produk dan layanan perbankan yang selalu memenuhi kebutuhan nasabah. Didukung oleh jaringan unit kerja yang luas, tenaga *financial advisor* yang kompeten, serta infrastruktur *digital* yang mumpuni, BRI memiliki modal yang lebih dari cukup untuk menjadi pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan nasabah.

Fokus utama bisnis konsumer di 2023 ini adalah untuk memperkuat *market share* baik dari sisi aset maupun liabilitas, dengan pertumbuhan yang agresif namun tetap mengedepankan kesehatan portofolio. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Bisnis Konsumer menetapkan strategi utama di tahun 2023 yaitu:

1. Pengembangan produk dan layanan yang berbasis *digital* untuk memberikan kemudahan akses kepada nasabah.
2. Memperkuat hubungan baik dengan nasabah eksisting BRI yang masih besar potensinya. Didukung dengan pemanfaatan data *analytics* dalam mempelajari perilaku nasabah sehingga dapat menawarkan yang produk dan jasa yang *personalized* sesuai kebutuhan nasabah
3. Peningkatan efisiensi dalam setiap proses bisnis, dengan tetap mempertahankan prinsip *customer oriented* dan *good corporate governance*.

Peningkatan kompetensi pekerja dan perubahan bisnis proses berbasis *digital* mendukung produktivitas pekerja menjadi lebih optimal. Melalui penggunaan data *analytics* berbasis AI, penawaran program dan produk juga menjadi lebih tepat sasaran dan meningkatkan efisiensi. Hal-hal tersebut menjadi faktor kunci pertumbuhan kinerja bisnis konsumer di tahun 2023.

Hasilnya dapat dilihat dari kinerja bisnis konsumer BRI yang mampu bertumbuh positif baik dari sisi aset, liabilitas, maupun *fee based income*. Dari sisi aset, pinjaman konsumer mampu tumbuh sebesar 13% yoy, yang disokong oleh pertumbuhan BRIguna sebesar 11% yoy, KPR sebesar 17% yoy, serta *credit card* dan *digital lending* sebesar 28% yoy. Dari sisi liabilitas, *wealth management business* mampu menumbuhkan *Assets Under Management* (AUM) sebesar 20% yoy. Seluruh aktivitas bisnis konsumer tersebut juga mendorong pertumbuhan *fee based income* segmen konsumer sebesar 6% yoy.

BISNIS KREDIT KONSUMER

Bisnis kredit konsumer BRI menawarkan produk yang memudahkan nasabah individu memperoleh berbagai kebutuhan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, *traveling*, pendidikan dan barang konsumsi lainnya. Kredit konsumer BRI memberikan suku bunga yang kompetitif dan proses yang cepat. Produk-produk kredit konsumer BRI yang tersedia di tahun 2023 yaitu:

1. **Kredit BRIguna**
   Merupakan kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/uang pensiun), dengan jenis antara lain BRIguna Karya, BRIguna Pra Purna dan BRIguna Purna.
2. **Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)**
   Merupakan kredit konsumtif perumahan yang digunakan untuk pembelian baru/bekas, ambil alih, pembangunan serta renovasi dengan objek berupa rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan).
3. **Kartu Kredit dan *Digital Lending***
   Kartu Kredit BRI merupakan produk Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) berbasis pinjaman tanpa agunan yang bekerjasama dengan prinsipal dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi pada *merchant-merchant* atau untuk melakukan penarikan tunai yang terintegrasi dengan jaringan *Principal*. Kartu Kredit BRI memiliki berbagai varian produk untuk melayani kebutuhan berbagai segmen mulai dari segmen *mass-market, mass-affluent, affluent*, hingga *commecial*. Kartu Kredit BRI juga telah meluncurkan produk kartu kredit *co-branding* yang bekerjasama dengan *major platform* dengan model kerjasama open banking berbasis API, yaitu Traveloka, BTN, Pegadaian, OVO, Tokopedia, Paper.id dan Nex (Xendit). Untuk meningkatkan kualitas layanan nasabah dan percepatan SLA, BRI telah melakukan digitalisasi proses bisnis kartu kredit mulai dari tahap akuisisi, *underwriting*, *portfolio*

management hingga proses penagihan. Kartu Kredit BRI saat ini juga sudah dapat digunakan untuk transaksi QRIS di aplikasi BRIMO. Selain kartu kredit, BRI juga memiliki produk *digital lending* berbasis aplikasi yakni Ceria yang menawarkan kemudahan untuk bertransaksi di *merchant e-commerce* dengan tenor pinjaman yang fleksibel hingga 12 bulan.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kredit BRIguna	**122.778.228**	111.109.389	11.668.839	10,50%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	**51.500.184**	44.031.244	7.468.940	16,96%
Kartu Kredit dan *Digital Lending*	**7.941.262**	6.204.678	1.736.584	27,99%
Kredit Kendaraan Bermotor*)	**135.783**	376.690	(240.906)	(63,95%)
Total Bisnis Kredit Konsumer	**182.355.458**	161.722.001	20.633.457	12,76%

*) Pengelolaan kredit kendaraan bermotor telah dipusatkan di BRI Finance

Daya beli yang berangsur pulih pasca pandemi Covid-19 memacu peningkatan bisnis konsumer khususnya BRIguna dan KPR tumbuh dan kompetitif, Kredit BRIguna tahun 2023 sebesar Rp122,77 triliun, meningkat 10,50% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp111,11 triliun. Demikian pula dengan KPR yang tumbuh 16,96% dari Rp44,03 triliun di tahun 2022 menjadi Rp51,50 triliun di tahun 2023. Pertumbuhan kredit BRIguna pada 2023 didukung dengan optimalisasi *pipeline* nasabah *payroll* dan digitalisasi proses, pengajuan BRIguna menggunakan ponsel memberikan akses dalam pengajuan secara *fully digital* melalui BRIMO Super Apps tanpa harus mendatangi bank atau unit kerja BRI. Pencairan total kredit BRIguna pada 2023 sebesar Rp46,93 triliun. Sedangkan pertumbuhan KPR karena didukung beberapa hal antara lain *business process re-engineering* berupa implementasi *Consumer Loan Factoring* (CLF), digitalisasi proses pengajuan dan prakarsa kredit melalui BRISPOT dan juga pengembangan *digital platform* HOMESPOT sebagai *mortgage ecosystem engine* serta program pemasaran KPR BRI *Property Expoyang* dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu adanya penyaluran program KPR FLPP sebanyak 23.241 unit dengan total *plafond* Rp3,62 triliun. Secara total pencairan baru KPR pada 2023 sebesar Rp15,52 triliun. Komitmen BRI ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penyaluran KPR BRI selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 12% melebihi rata-rata pertumbuhan industri di angka 6%.

BRI selalu berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan kartu kredit dan *digital lending* yang solid. Tahun 2023, kartu kredit dan *digital lending* tumbuh sebesar Rp1,74 triliun atau 27,99% dari tahun 2022. Peningkatan tersebut di-*generate* dari peningkatan transaksi kartu kredit yang mayoritas berasal dari sektor *retail* dan *e-commerce* pada tahun 2023 serta adanya kejasama baru yaitu paper.id dan next card. Sepanjang tahun 2023 kartu kredit *co-branding* BRI disambut baik oleh masyarakat yang tercermin dari peningkatan transaksi kartu kredit *co-branding* BRI sebesar 157% secara yoy.

Strategi Bisnis Kredit Konsumer Tahun 2023

Transformasi digital secara berkelanjutan dengan memperkuat kapabilitas *retail banking* melalui efisiensi akan dilakukan melalui perbaikan bisnis proses guna mendorong pertumbuhan bisnis konsumer yaitu dengan fokus pada nasabah *payroll* BRI dan memperluas jangkauan BRIguna Digital. Untuk mencapai aspirasi bisnis konsumer, BRI akan tetap fokus meningkatkan *market share* bisnis konsumer dengan tumbuh selektif melalui ekspansi terarah dengan memanfaatkan program-program Kredit BRIguna, pengajuan melalui BRIguna Digital, Kredit Perumahan Rakyat (KPR), KPR BRI Virtual Expo dengan *prudent* dalam risiko yang terkendali guna menghindari pemburukan kualitas kredit dan mendorong perbaikan kolektibilitas dengan *prudent* dalam risiko yang terkendali guna menghindari pemburukan kualitas kredit dan mendorong perbaikan kolektibilitas.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Kredit Konsumer

Peningkatan layanan dan kemudahan menjadi kunci dalam pertumbuhan kredit konsumer, hal ini didukung dengan digitalisasi proses kredit BRIguna dan KPR. Efisiensi akan dilakukan melalui perbaikan bisnis proses guna mendorong pertumbuhan bisnis konsumer, antara lain adalah BRIguna Digital dan *Mortgage Ecosystem*. Dengan *customer base* yang besar dan jaringan tersebar luas di seluruh Indonesia maka digitalisasi proses bisnis menjadi salah satu kunci pertumbuhan yang terjaga ke depannya. Dengan ini diharapkan pelayanan kredit konsumer semakin mudah namun tetap memperhatikan *risk* dan tetap *prudent*. *Market share* BRIguna saat ini merupakan yang tertinggi (*market leader*), sedangkan KPR saat ini merupakan *Top 5 Bank* penyalur KPR terbesar di Indonesia.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Kredit Konsumer Tahun 2024

Bisnis Konsumer BRI yang memiliki jangkauan produk dan layanan yang luas baik dari produk pinjaman (*consumer loan and credit card*), dan produk pengelolaan keuangan (*wealth*

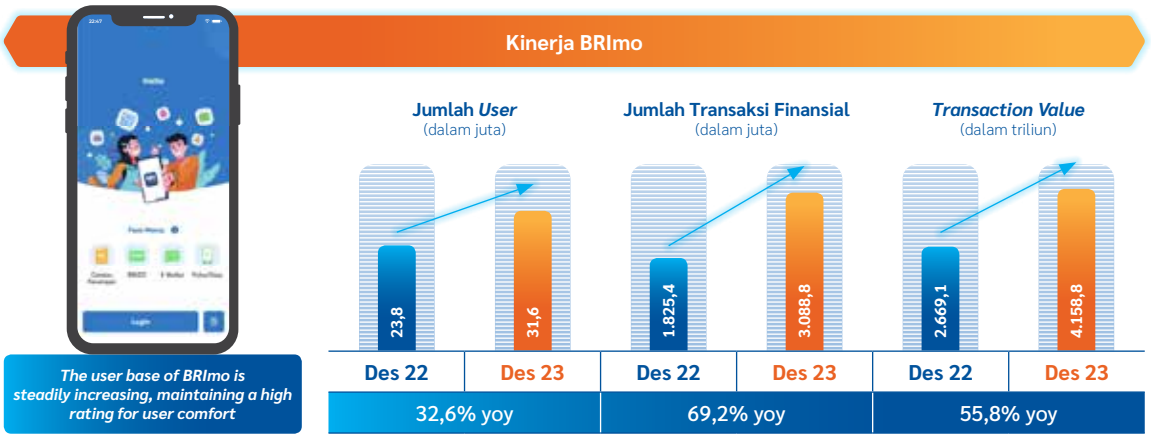
management). Strategi bisnis konsumer BRI diarahkan untuk dapat mencapai aspirasi pada tahun 2025 yaitu *Become The Leading Consumer Bank In Indonesia on The Back of Distinctive Customer Experience and Market Beating Digital Solutions*. Untuk mendukung pencapaian aspirasi tersebut serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal BRI, maka pada tahun 2024 bisnis konsumer BRI akan mengusung tema *Scale Up Alignment* PA untuk dominasi bisnis konsumer yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan *assets and liabilities, scale up* kontribusi *fee based income* pa, dan *revamp business process and policy* berbasis AI dan *data anayltics* yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Adapun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung hal-hal tersebut yaitu mendorong pertumbuhan pinjaman bisnis konsumer secara berkelanjutan melalui peningkatan kapabilitas digital di antaranya dalam bentuk penguatan bisnis *unsecure lending* BRI melalui BRIguna Digital, inisiatif ekspansi KPR melalui BRI *Mortgage Ecosystem* dan integrasi dengan BP Tapera, peningkatan akuisisi *payroll* instansi, BUMN dan swasta, penguatan teknologi sebagai *enabler*, serta peningkatan kapabilitas tenaga *marketing*.

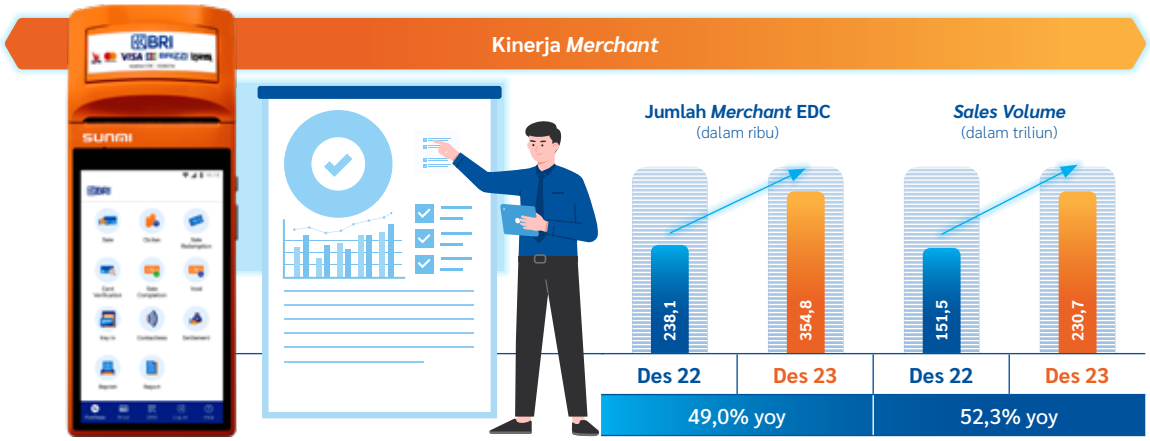
RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT JARINGAN & LAYANAN

Perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital telah melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan yang mantap terhadap inovasi teknologi telah memicu perubahan besar dalam preferensi nasabah dalam bertransaksi serta mempercepat adopsi digital banking. BRI secara konsisten berkomitmen untuk melakukan transformasi *digital* guna memberikan kemudahan akses layanan keuangan, sebagai bagian dari upaya untuk bersaing di bidang *retail banking* dengan tetap berpegang pada pemenuhan kebutuhan nasabah yang nyaman, cepat, dan aman baik bagi nasabah individu maupun bisnis.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil meliputi inovasi melalui SuperApp BRImo, ekspansi jangkauan di berbagai *merchant*, serta penguatan layanan *digital* lain yang sejalan dengan inisiatif BRI di tahun 2023 yaitu "*Strengthen Retail Banking Capabilities*". Transformasi yang dilakukan BRI telah mencatatkan kinerja positif secara bisnis ritel khususnya dalam menghasilkan *fee based income* yang mencapai Rp8,2 triliun dimana Super App BRImo memberikan kontribusi sebesar 30% dan sisanya dihaslkan melalui layanan *digital merchant* dan jasa perbankan ritel lainnya.



BRImo SuperApp semakin populer dan telah digunakan oleh 31,6 juta nasabah mencatatkan lebih dari 3 miliar transaksi sepanjang tahun dengan volume Rp4.159 triliun dan semakin menjadi andalan karena dilengkapi beragam fitur transaksi finansial yang bekerjasama dengan lebih dari 3.000 mitra. Transaksi bersama BRImo pun kini semakin tak terbatas jarak dengan hadirnya fitur untuk transaksi internasional seperti pembukaan rekening menggunakan nomor *handphone* luar negeri, transfer ke lebih dari 100 negara dan pembayaran QR di Singapura. Langkah ini tidak hanya menggambarkan komitmen dalam menyediakan akses mudah terhadap layanan keuangan, tetapi juga menandai komprehensifnya upaya BRI dalam memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari *online onboarding* hingga layanan lintas negara.



BRI juga berfokus pada penguatan ekosistem dengan memperluas akseptasi melalui bisnis EDC, QRIS, serta *online acquiring*. Sejumlah inisiatif dilaksanakan mulai dari kerja sama dengan mitra strategis, penyempurnaan proses akuisisi, peningkatan pengawasan, hingga penambahan fitur-fitur terbaik yang menjadikan BRI sebagai pilihan utama dalam penerimaan pembayaran di *merchant* baik *offline* maupun *online*. Berbagai inisiatif penguatan BRImo dan penguasaan ekosistem itu pun juga didukung dengan adanya peningkatan kapabilitas, kehandalan jaringan elektronik (SSBT, CRM, ATM, EDC) serta *complain handling* yang optimal.

BISNIS SIMPANAN DAN JASA PERBANKAN RITEL

Memenuhi kebutuhan nasabah individu dan bisnis ritel, BRI menyediakan beragam pilihan produk simpanan sebagai berikut:

1. **Tabungan BRI**
   a. **BritAma**
      BritAma merupakan tabungan bagi nasabah individu yang dilengkapi dengan fasilitas perbankan digital serta *online realtime system* yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun serta dilengkapi gratis *cover* asuransi kecelakaan diri (*personal accident*).
      - BritAma Bisnis
        Kebutuhan limit transaksi yang lebih tinggi bagi nasabah bisnis ritel baik individu maupun non individu dapat dipenuhi dengan BritAma Bisnis yang juga memberikan penawaran gratis biaya adminstrasi disetiap bulannya.
      - BritAma Mitra
        Merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perusahaan mitra/kerjasama dengan salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah layanan penyaluran gaji (*payroll*) bagi karyawannya.
      - BritAma Rencana
        Tabungan berjangka bagi nasabah yang memiliki minat investasi atau perencanaan keuangan dengan fitur *automatic fund transfer* (AFT) dimana nasabah dapat menentukan sendiri tanggal dan nominal target dana yang diinginkan serta dilengkapi dengan opsi fasilitas asuransi jiwa.

   b. **BRI Junio**
      Tabungan untuk memperkenalkan budaya menabung dan transaksi digital sejak dini kepada anak-anak yang dibundling dengan kartu debit design khusus yang menarik.

2. **Deposito BRI (Depo BRI)**
   Pilihan investasi bagi nasabah yang tersedia dalam berbagai pilihan mata uang baik Rupiah maupun valas dengan suku bunga yang kompetitif dengan jangka waktu penempatan 1 hingga 36 bulan. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah individu maupun non individu yang menginginkan imbal hasil lebih besar dibandingkan produk tabungan. Pembukaan deposito dapat dilakukan melalui BRImo atau unit kerja BRI dengan dua pilihan mekanisme pemberian bunga yaitu langsung diberikan melalui rekening atau ditambahkan ke dalam komponen pokok deposito (*add on*). Saat ini BRI telah mengembangkan produk *deposito scriptless* untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang memiliki banyak *bilyet* dan bukti kepemilikan deposito *diberikan dalam bentuk email* notifikasi sehingga nasabah dapat mengelola rekening depositonya lebih efektif dan efisien.

Produk simpanan BRI juga dilengkapi dengan fasilitas jasa perbankan yang memudahkan transaksi melalui:

1. **BRImo**
   BRImo merupakan financial SuperApp untuk beragam transaksi nasabah kapanpun dan dimanapun tanpa perlu ke bank. Transaksi yang ditawarkan mulai dari online on boarding baik dari dalam maupun luar negeri, pembayaran, pembelian, investasi, asuransi, hingga pencatatan keuangan. BRImo juga memfasilitasi nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi lintas negara melalui fitur transfer internasional ke lebih dari 100 negara serta pembayaran QR di luar negeri.

2. **BRIZZI**
   Merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran di merchant maupun fasilitas publik seperti parkir, tol, dan transportasi lainnya yang dikerjasamakan. Isi ulang (*top up*) saldo BRIZZI dapat dilakukan menggunakan SuperApp BRImo, *merchant online*, maupun *offline* seperti Tokopedia, Traveloka, Alfa Group, Indomaret, Yomart, dan lain-lain.

3. **Debit BRI**
   Debit BRI adalah kartu debit yang berfungsi sebagai alat transaksi finansial dan non finansial. Kartu Debit BRI dapat digunakan untuk melakukan transaksi *on/off us* secara *offline* menggunakan EDC BRI ataupun Bank lain, serta dapat digunakan untuk transaksi online menggunakan metode debit online (transaksi di *merchant* jaringan Mastercard) dan direct debit (transaksi di *merchant* kerjasma BRI). Selain kartu debit dalam bentuk fisik, saat ini juga telah tesedia kartu debit dimana penerbitan kartunya dilakukan melalui SuperApp BRImo yang dapat digunakan untuk bertransaksi di *merchant*, situs, atau aplikasi *online* yang memiliki jaringan Visa.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Simpanan dan Perbankan Ritel

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Total DPK	488.122.102	469.090.526	19.031.576	4,06%
Total Rekening	39.003.209	37.092.253	1.910.956	5,15%

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel tahun 2023 sebesar Rp488,12 triliun, meningkat 4,06% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp469,09 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan tabungan sebesar 2,15% yoy yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas transaksi nasabah dalam melakukan proses bisnis. Pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan pertumbuhan rekening simpanan ritel di tahun 2023, secara total rekening tahun 2023 berhasil tumbuh sebesar 5,15% yoy, meningkat dari 37.092.253 unit rekening di tahun 2022 menjadi 39.003.209 unit rekening di tahun 2023. Pertumbuhan rekening simpanan ritel tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan rekening tabungan sebesar 5,15% yoy.

Strategi Bisnis Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel Tahun 2023

1. **Simpanan Ritel**
   Strategi bisnis yang telah dilakukan bisnis simpanan ritel di tahun 2023 adalah sebagai berikut:
   a. Menciptakan akuisisi terfokus diantaranya melalui perbanyak titik akseptasi EDC, QRIS, dan *Online Acquiring* BRI dengan komposisi di urban dan rural yang seimbang terutama penguasaan di area *hotspot* bisnis serta pusat perdagangan.
   b. Melakukan pengendalian dana keluar melalui aktivitas *follow the money* nasabah agar perputaran dana dapat terintegrasi dalam satu kesatuan *closed loop ekosistem transaction* di BRI.
   c. Melakukan Optimalisasi data berbasis *analytics* untuk memahami perilaku nasabah dan memberikan solusi produk sesuai kebutuhan.
   d. Meluncurkan program *loyalty* seperti Brimo Festival, BRIPoin, Britama Tanam Kebaikan dan sebagainya.
   e. Mengembangkan *culture* untuk meningkatkan CASA dan Transaksi ritel lingkungan pekerja melalui program CASAVIOR
   f. Melakukan pengembangan berbagai produk dan fitur sebagai solusi transaksi dan ekosistem dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan perluasan *partnership*.

2. **Jasa Perbankan Ritel**

Strategi perbankan ritel tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. ***Customer Acquisition***

Melakukan penetrasi sumber pertumbuhan baru dan leveraging transaksi nasabah. Akselerasi kegiatan akuisisi terfokus khususnya memperluas nasabah *merchant* dan *non merchant* serta melakukan akuisisi BritAma Umum dengan membagi 3 (tiga) fokus HNWI, *mass affluent* dan *mass customer* untuk memudahkan *product solution* bagi nasabah dengan segmen yang spesifik dan terakhir *payroll* berbasis BritAma.

b. ***Organization Transformation***

Melakukan perubahan organisasi yang berfokus kepada *product management* dan *sales management* pengelolaan simpanan dan produk perbankan ritel sebagai bentuk ekselerasi bisnis.

c. ***Product Digitization and Integrated Solution***

Meningkatkan kapabilitas produk melalui layanan digital yang terintegrasi dalam menyediakan solusi transaksi. BRImo sebagai *digital attacker* (upaya peningkatan transaksi BRImo) dan menjadikan BRImo sebagai digital *financial solution superapp for customer*.

d. ***Strategic Partnership***

Melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk perluasan akuisisi nasabah.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel

Transformasi dalam bidang layanan, termasuk di dalamnya produk dan *platform*, diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan standar operasional dan *enhancement platform.* Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan menambah *customer based,* serta diharapkan akan menghasilkan *low cost funding* yang berasal dari transaksi.

Prospek Usaha dan Strategi Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel Tahun 2024

Dalam mencapai visi BRI 2024 yaitu Memperkuat Kapabilitas *Retail Banking* dan Optimalisasi Perusahaan Anak, BRI akan berfokus pada peningkatan penguasaan pasar CASA khususnya pada jenis simpanan tabungan. Dalam upaya mewujudkannya, BRI terus memperkuat kapabilitas *retail banking* melalui pemanfaatan teknologi digital, penguasaan ekosistem transaksi, dan kolaborasi strategis dengan Perusahaan Anak untuk senantiasa menghadirkan solusi atas beragam kebutuhan nasabah dengan *Customer Experience* yang baik.

1. **Simpanan Ritel**

Prospek usaha dan strategi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Akselerasi kegiatan akuisisi terfokus khususnya memperluas nasabah *merchant* dan *non merchant*. Fokus melakukan akuisisi *merchant* di urban area dan menigkatkan penetrasi akuisisi nasabah *affluent* dan *mass affluent*.

b. *Scale up* nasabah dilakukan untuk nasabah-nasabah eksisting yang memang belum maksimal menggunakan fasilitas transaksi nasabah sehingga masih melakukan transfer ke bank lain dengan menawarkan produk yang bisa mem-*boost* peningkatan saldo dari basis transaksi nasabah.

c. Akselerasi untuk menutup kebocoran dana dengan cara *follow the money*, agar dapat mengidentifikasi transaksi kebocoran nasabah dan bisa memberikan produk yang sesuai kebutuhan dengan nasabah.

d. Melakukan profiling nasabah dan peningkatan *product holding* untuk meningkatkan kualitas rekening nasabah.

e. BRImo sebagai *digital attacker* (upaya peningkatan transaksi BRImo) dan menjadikan BRImo sebagai *Digital Financial Solution Superapp for Customer*

f. Perluasan ekosistem dan mengembangkan solusi transaksi untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

g. Memperluas akses pembukaan rekening secara digital pada *platform* Internal BRI, platform Perusahaan anak, dan bekerjasama dengan platform *e-commerce, fintech* dan platform digital pihak ketiga lainnya.

h. Akuisisi B2B yang betujuan untuk menciptakan *closed loop ecosytem* simpanan sehingga BRI akan memperoleh *sustainability fund* yang berbasiskan transaksi di dalam ekosistem tersebut.

2. **Jasa Perbankan Ritel**

Transformasi dalam bidang layanan dengan mengedepankan *client oriented approach*, termasuk di dalamnya produk dan platform seperti penguatan inovasi *Financial Superapps* BRImo yang dikembangkan sebagai *one stop solution* berbagai transaksi finansial nasabah. Tidak hanya itu telah dilakukan juga berbagai macam *enhancement platform digital ecosystem* seperti Brimola, Smartbilling, Ibbiz untuk meningkatkan penetrasi kemudahan pembayaran berbasis ekosistem. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan menambah *customer based,* serta diharapkan akan menghasilkan *low cost funding* yang berasal dari transaksi.

BRI *Digital Saving*

BRI *Digital Saving* merupakan *channel* pembukaan rekening secara *online* melalui aplikasi BRImo ataupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk *launcher*. Proses pembukaannya dilakukan secara *fully digital* sehingga memiliki standar secara metode *Know Your Customer* (KYC), alur pembukaan rekening, dan *user experience*. *Digital saving* dapat dipergunakan untuk perluasan *channel* pembukaan rekening BRI, karena dapat ditempatkan di *website* dan Aplikasi BRI sendiri, Bank Subsidiary, atau pihak ketiga yang bekerjasama seperti Gojek, LinkAja, Dana, Bukalapak dan lain-lain. Adapun pencapaian posisi Desember 2023 adalah sebesar 6,8 juta rekening dengan total saldo Rp15,6 triliun.

Kelebihan *Digital Saving*

Digital Saving mengedepankan 3 (tiga) keuntungan bagi nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui BRI *Digital Saving* ini, yaitu:

1. ***Simple***
   Karena nasabah tidak perlu datang ke unit kerja BRI, cukup unduh aplikasi BRImo di App Store/*Play Store.*

2. ***Efficient***
   Pembukaan rekening dipandang efisien karena dapat dilakukan tanpa perlu menunggu antrian, tidak boros paket data karena tidak dilakukan *video call*, serta proses pembukaan rekening hanya berkisar 5-10 menit. Selain itu, nasabah juga dapat didaftarkan *user* BRImo secara otomatis dan rekening dapat langsung digunakan untuk bertransaksi finansial.

3. ***Secure***
   Pembukaan rekening melalui BRI *Digital Saving* lebih *secure* karena:
   a. *Customer driven data* (menghindari *human error* karena diinput orang lain). Data inputan diverifikasi *secara host to host* ke *database* Dukcapil dan BRI melakukan verifikasi *One Time Password* (OTP) yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan.
   b. *Customer Due Diligence* (CDD) dilakukan dengan engine *face recognition* sehingga objektif dan terukur, karena membandingkan foto nasabah yang diambil dari video 8 (delapan) detik yang telah direkam dengan data biometrik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan *threshold* yang telah ditetapkan oleh pihak BRI.
   c. Menerapkan *liveness detection* yaitu mekanisme pengecekan kedipan mata dan cuap mulut nasabah sehingga tidak memungkinkan proses pembukaan rekening digantikan oleh robot, gambar bergerak atau benda mati lainnya yang bukan pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesungguhnya.
   d. Penerbitan *digital certificate* oleh *Certificate Authority* (CA) yang juga kredibel dan telah diaudit oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sehingga non *repudiation* atau tidak ada potensi tolakan pada pembuktian penandatanganan dokumen pembukaan rekening nasabah.
   e. *Scoring* data pembukaan rekening, untuk pengkategorian nasabah (*low, med, high*) *risk* sehingga dapat dilakukan *filtering* nasabah berdasarkan potensi risikonya.

Pemasaran Produk *Digital Saving*

Selain pemasaran secara *massive* oleh tenaga pemasaran BRI, Divisi Mass Funding juga secara gencar menjalin kerjasama penempatan *Uniform Resource Locator* (URL) BRI *Digital Saving* melalui pihak ketiga. Penempatan ini dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi nasabah ketika mengakses *platform* pembukaan rekening tabungan BritAma secara mudah. BRI *Digital Saving* yang dikembangkan dalam bentuk *web view* dan *mobile view* ini sangat fleksibel untuk dipergunakan di beberapa bentuk kerjasama, yaitu:

1. **Unit Kerja BRI/BRI Grup/Aplikasi BRI**
   Untuk mengurai antrian pembukaan rekening di unit kerja, Divisi Mass Funding telah meminta bantuan Divisi Service Contact Center untuk mensosialisasikan *platform* BRI *Digital Saving* ini dan para *customer service* serta *security* juga telah dilengkapi dengan *cue card* sehingga dapat langsung mengarahkan nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening ke *platform* ini. Selain untuk *walk in customer*, BRI *Digital Saving* juga dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi internal BRI.

2. **Kerjasama dengan *Website* atau Aplikasi Pihak Ketiga**
   Kerjasama ini mencakup seluruh nasabah, baik yang diinisiasi oleh *head office* (*fintech*, *marketplace*, *electronic money*) maupun yang diinisiasi kerjasamanya oleh *regional office* (*website* universitas, instansi atau perusahaan lokal).

3. **Event Akuisisi Unit Kerja**
   Event akuisisi unit kerja atau program pemasaran yang berskala lokal juga saat ini dapat menggunakan BRI *Digital Saving*. Beberapa *event* yang telah berlangsung dan memanfaatkan BRI *Digital Saving* sebagai salah satu syarat registrasinya.

Segmen Korporasi

Segmen Korporasi meliputi Bisnis Korporasi, Bisnis Institusi dan *Transaction Banking*, Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT INSTITUTIONAL & WHOLESALE BUSINESS

Kondisi makroekonomi global maupun domestik yang belum stabil pada 2023 membuat Direktorat Institutional & Wholesale Business terus didorong untuk menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan bisnisnya di tahun 2023 melalui penguatan kapabilitas produk dan *platform* terutama inovasi digitalisasi, peningkatan *exposure* transaksi bisnis nasabah *wholesale* eksisting maupun yang baru secara selektif, serta penyediaan *pipeline value chain* nasabah *wholesale* untuk mendukung penguasaan ekosistem bisnis SME dan Mikro.

Selama tahun 2023 portofolio Direktorat Institutional & Wholesale Business masih menunjukkan pertumbuhan, dimana pada sisi pinjaman segmen korporasi tahun 2023 sebesar Rp206,82 triliun, meningkat sebesar 14,51% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp180,62 triliun, dengan NPL yang tetap terjaga di 3,86%. Dari sisi simpanan tahun 2023 sebesar Rp491,09 triliun, sehingga dari sisi *Intermediary Ratio* (LDR) tahun 2023 tercatat sebesar 42,12%, hal ini sejalan dengan fokus segmen korporasi untuk melakukan optimalisasi sumber dana yang dimiliki. Selain pertumbuhan angka segmen *wholesale*/korporasi tersebut, selama tahun 2023 Direktorat Institutional & Wholesale Business juga melakukan strategi kolaborasi dengan segmen non *wholesale* untuk meningkatkan akuisisi bisnis *value chain* dari nasabah *wholesale*, langkah tersebut menghasilkan peningkatan jumlah transaksi dan volume bisnis *value chain* yang signifikan, baik berupa pemberian fasilitas kredit maupun fasilitas *trade and guarantee* kepada *vendor*, *supplier*, distributor, hingga *retailer,* serta pengendapan CASA dari *value chain* tersebut.

Bisnis *trade finance* dan garansi pada segmen *wholesale*/ korporasi selama tahun 2023 menunjukkan volume pertumbuhan yang cukup signifikan, *trade finance* tumbuh 19,5% yoy (meningkat Rp116,05 triliun), dan bank garansi tumbuh 29,9% yoy (meningkat Rp24,98 triliun). Bisnis Kelembagaan (Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri) selama tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan positif, dimana BRI masih menjadi *market leader* satuan kerja/satker (59,72%) dan *payroll* (62,24%) pada Kementerian dan Lembaga, TNI, dan Polri.

Setelah diluncurkan BRI pada tahun 2022, *Integrated Corporate Solution Platform* BRI yaitu QLola, mengalami peningkatan volume transaksi *cash management* nasabah sebesar 33,9% yoy, dan mencapai Rp6.788 triliun. Peningkatan tersebut terjadi baik di segmen *wholesale* maupun *non-wholesale*, dengan penambahan jumlah *client* QLola yang cukup besar yaitu lebih dari 4.800 *client* baru. Di akhir 2023 telah ditambahkan fitur *Global Cash Management System* pada QLola yang saat ini telah dapat digunakan oleh nasabah BRI cabang luar negeri, antara lain BRI Singapore dan BRI Timor Leste.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, kinerja perekonomian tahun 2024 diperkirakan akan tetap tumbuh positif. Sejalan dengan hal tersebut, segmen bisnis *wholesale* masih akan mengalami pertumbuhan seiring dengan masih meningkatnya kebutuhan pembiayaan di beberapa sektor industri seperti *energy, mining*, kelapa sawit, dan *fast moving consumer goods*. Meskipun harga komoditas diperkirakan masih cenderung *stagnan* bahkan agak menurun, prediksi penurunan suku bunga pada awal semester 2 tahun 2024 serta penguatan nilai tukar Rupiah tentu akan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan bisnis *wholesale* di tahun 2024.

Untuk melanjutkan tren positif pencapaian kinerja yang baik sepanjang tahun 2023 di atas, Direktorat Institutional & Wholesale Business telah menyiapkan strategi yang lebih fokus antara lain sebagai berikut:

a. Transformasi digital tetap menjadi fokus utama khususnya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan digital di bidang *transaction banking*, termasuk penggunaan AI dan *Blockchain*.
b. Kolaborasi dengan Perusahaan *Fintech* untuk meningkatkan layanan transaksi agar dapat tetap kompetitif di pasar, seperti *payment gateway*, dan *e-commerce*. Melalui sinergi ini dapat mengkolaborasikan potensi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan fintech untuk mendukung inovasi dalam layanan transaksi di BRI.
c. Peningkatan *wallet share* di segmen *wholesale* untuk menyiapkan sumber-sumber pertumbuhan bisnis baru melalui penguatan ekosistem bisnis nasabah yang fokus pada sektor-sektor antara lain *e-commerce, telecommunication, oil and gas, energy and mining, food and agriculture, healthcare and pharmacy*, dan *consumer goods*.
d. Menjaga pertumbuhan dana *wholesale* sesuai dengan kebutuhan ekspansi bisnis BRI dengan tetap menjaga *cost of fund* dana *wholesale* yang efisien agar tetap dapat memberikan profitabilitas yang optimal bagi BRI.
e. Memperkuat *positioning* dan *market share* BRI dalam bisnis kelembagaan (Kementerian, Lembaga, TNI dan Polri) antara lain, *payroll, consumer services,* layanan satker, serta kerjasama layanan perbankan lainnya.
f. Peningkatan *capability building* RM dan *product specialist* melalui *internal* maupun *external training* di dalam dan luar negeri maupun proses *coaching* oleh para *expert*.

RINGKASAN KINERJA SUB DIREKTORAT *COMMERCIAL BUSINESS*

Sub Direktorat Commercial Business saat ini tergabung dalam *Small and Medium Directorate*, merupakan bagian dari Bisnis Korporasi BRI yang terdiri dari Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi Non BUMN. Bisnis Korporasi Non BUMN melayani nasabah korporasi Non BUMN dengan klasifikasi *top tier* di masing-masing sektor industri serta memberikan solusi produk dan layanan keuangan terpadu, baik untuk kebutuhan fasilitas pinjaman, maupun penempatan dan pengelolaan dana serta transaksi. Produk dan layanan bisnis yang diberikan meliputi pengelolaan simpanan, pinjaman, serta pelayanan beragam *transaction banking* dan layanan jasa bisnis perbankan. Dalam memberikan fasilitas pinjaman, Divisi Bisnis juga berupaya mengoptimalkan peluang dari sisi *value chain business* dan *cross selling.* Saat ini Sub Direktorat Commercial Business terdiri dari Manufacturing and Property Division dan Division. Manufacturing and Property Division melayani segmen non agribisnis dalam menyalurkan kredit ke sejumlah industri seperti *pulp and paper, consumer goods, otomotif, e-commerce* serta *health industry*. Agribusiness Division merupakan Divisi yang melayani pembiayaan komoditi dari sektor hulu (*upstream*), sektor hilir (*downstream*) serta *supporting services*. Adapun komoditi yang dibiayai meliputi perkebunan kelapa sawit, gula, perdagangan, peternakan, dan sebagainya.

Segmen *agribussiness*, *manufacturing, consumer goods, health industry* serta *e-commerce* merupakan target pasar dari Bisnis Korporasi Non BUMN. Pengembangan kredit *agribussiness* memprioritaskan pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan multiplier effect kepada usaha mikro, dan SME. Sedangkan segmen non *agribussiness* menyalurkan kredit ke sejumlah industri seperti *pulp and paper, consumer goods, otomotif, e-commerce* serta *health industry*. Pelayanan pada nasabah segmen korporasi dilakukan secara *end to end* dengan *tailored proposition* sesuai dengan karakter bisnis klien, termasuk pada pengelolaan simpanan, pemberian berbagai jenis fasilitas pembiayaan, serta pelayanan beragam transaksi mulai dari Qlola *cash management, treasury, investment services* serta layanan jasa bisnis perbankan lainnya. Bisnis Korporasi juga berperan menjadi katalisator pertumbuhan segmen lainnya yakni segmen mikro, konsumer dan SME dengan mengoptimalkan *value chain business* and *cross selling* pada ekosistem bisnis.

BISNIS KORPORASI

Bisnis Korporasi di BRI dikelola oleh dua Direktorat, yaitu Direktorat Institutional & Wholesale Business serta Sub Direktorat Commercial Business. Bisnis Korporasi meliputi Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi Non BUMN. Cakupan produk dan layanan Bisnis Korporasi meliputi pengelolaan simpanan, pemberian berbagai jenis fasilitas pembiayaan, serta pelayanan beragam *transaction banking* dan layanan jasa bisnis perbankan. Untuk lebih fokus dalam mengeksplorasi kebutuhan nasabah dari hulu ke hilir, maka sejak akhir tahun 2021 BRI telah membagi pengelolaan eksposur segmen korporasi berdasarkan sektor industrinya, pada beberapa Divisi. Beberapa Divisi tersebut antara lain, Divisi Agribisnis, Divisi Manufacturing and Property, Divisi Energy and Mining, Divisi Infrastructure, Transportation, Oil and Gas, Divisi Syndication and Financial Institution Non Bank, Divisi Institutional Business serta Divisi Transaction Banking.

Pada tahun 2023, segmen bisnis *wholesale* dan kelembagaan telah menyusun strategi yang inovatif dan adaptif sebagai respons terhadap perubahan dinamis dalam kondisi makro ekonomi. Dalam semangat inovasi yang terus-menerus, BRI memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan bisnis nasabah di segmen ini, dengan mengusung pendekatan proaktif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Strategi yang ditetapkan oleh Direktorat Institutional & Wholesale Business di tahun 2023 adalah:

1. Tumbuh melalui ekspansi bisnis yang dilakukan secara selektif dan hati-hati (*selective growth*).
2. Penguasaan transaksi nasabah untuk meningkatkan pengendapan dana murah (CASA *transaction based*) dan *fee-based income.*
3. Meningkatkan volume transaksi mulai dari *cash management*, *trade and guarantee*, *foreign exchange*, *supply chain financing*, *investment services*, hingga ke pengelolaan *payroll* perusahaan.
4. Menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan di segmen SME dan Mikro.
5. Menawarkan produk dan layanan solusi keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan di sektor *wholesale* dan kelembagaan.
6. Meningkatkan *knowledge* dan *skill* RM serta *product specialist* di *wholesale* dan kelembagaan sesuai dengan sektor industri nasabah.

Strategi-strategi ini telah meningkatkan pencapaian di segmen bisnis *wholesale* dan kelembagaan pada tahun 2023, dan terus dikembangkan guna mempertahankan momentum positif dalam pencapaian kinerja. Langkah-langkah strategis ini terus diperkuat untuk memastikan kelangsungan hasil positif pada segmen segmen bisnis *wholesale* dan kelembagaan di BRI.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Segmen Korporasi

(*bank only*, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Pinjaman	**206.824.678**	180.620.020	26.204.658	14,51%
Simpanan	**491.087.384**	464.028.257	27.059.127	5,83%
Fee Based Income	**4.649.387**	3.207.080	1.442.307	44,97%

Berdasarkan tabel kinerja tersebut di atas untuk pinjaman segmen korporasi tahun 2023 sebesar Rp206,82 triliun, meningkat sebesar 14,51% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp180,62 triliun. Dari sisi simpanan tahun 2023 sebesar Rp491,09 triliun, sehingga dari sisi *Intermediary Ratio* (LDR) tahun 2023 tercatat sebesar 42,12%, hal ini sejalan dengan fokus segmen korporasi untuk melakukan optimalisasi sumber dana yang dimiliki. *Fee based income* tahun 2023 sebesar Rp4,65 triliun, meningkat sebesar 44,97% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3,21 triliun.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Segmen Korporasi Per Sektor

(*bank only*, dalam jutaan Rupiah)

Pinjaman Segmen Korporasi Per Sektor	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Pertanian	**30.265.580**	25.515.870	4.749.710	18,61%
Pertambangan	**28.995.667**	12.408.587	15.587.080	125,62%
Perindustrian	**45.361.102**	47.533.803	(2.172.702)	(4,57%)
Listrik, Gas dan Air	**28.659.200**	34.640.499	(5.981.299)	(17,27%)
Konstruksi	**21.202.421**	20.620.402	582.019	2,82%
Perdagangan, Restoran dan Hotel	**17.066.890**	11.785.946	5.280.944	44,81%
Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi	**14.209.161**	8.228.382	5.980.779	72,68%
Jasa-Jasa Dunia Usaha	**20.092.877**	18.766.103	1.326.774	7,07%
Jasa Pelayanan Sosial	**1.971.114**	1.119.793	851.321	76,02%
Lain-Lain	**667**	635	32	5,03%
Total	**206.824.678**	**180.620.020**	**26.204.658**	**14,51%**

Total kinerja pinjaman segmen bisnis korporasi sebesar Rp206,82 triliun, meningkat sebesar 14,51% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp180,62 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan sektor pertambangan sebesar Rp15,59 triliun atau tumbuh 125,62%, sektor pengangkutan, perdagangan, komunikasi sebesar Rp5,98 triliun atau tumbuh 72,68% serta sektor perdagangan, restoran, hotel yang tumbuh sebesar Rp5,28 triliun atau 44,81%.

Strategi Bisnis Korporasi Tahun 2023

Melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang tepat, Bisnis Korposasi di BRI mencatat pencapaian kinerja yang baik sepanjang tahun 2023. Untuk melanjutkan tren positif tersebut, diperlukan strategi yang lebih fokus antara lain sebagai berikut:

1. **Pengembangan RM *Workbench***
   RM *Workbench* digunakan untuk meningkatkan produktivitas segmen *wholesale* terhadap pencapaian KPI, *collaboration tools, account planning*, serta *value chain tracking* karena selama ini terdapat *gap* dalam melakukan *monitoring* tersebut yang disebabkan oleh keterbatasan *tools*.
2. ***Pengembangan Next Development Phase of* WCWB *on End to End Credit Process***
   BRISpot Korporasi merupakan inisiatif untuk mengakselerasi percepatan proses kredit mulai dari pengajuan fasilitas kredit sampai dengan putusan kredit pada segmen korporasi sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi segmen bisnis korporasi yaitu "*House Bank for Leading Indonesian Corporates and Institutions*".

3. **Implementasi *Client Service Team***
   Untuk mendukung aspirasi BRIvolution 2.0 segmen *wholesale* terkait *pain points* pada proses pemasaran oleh RM segmen *wholesale* diperlukan suatu program kerja untuk memaksimalkan potensi bisnis nasabah korporasi dengan melakukan kolaborasi antar unit kerja yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pada proses bisnis yaitu *setup next gen sales operating model* (CST *Implementation*).
4. **Pengembangan BRITASK**
   Mekanisme pencairan KMK W/A dan KJP yang membentuk limit berupa nomor referensi dan pencairan per rekening.
5. ***Value Chain Tactical Program***
   Value chain tactical program digunakan untuk aktivasi peran *regional office*, dan *branch office* yang jelas dan bersifat *tactical* untuk mem-*boosting* kerjasama *value chain performance.*

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Korporasi

Pengembangan Institutional & Wholesale Business diarahkan untuk mencapai visi *Becoming The House Bank for Leading Indonesian Corporates & Institutional* di 2025. Segmen *Institutional & Wholesale Business* berfokus untuk membangun hubungan strategis jangka panjang dengan nasabah besar. BRI sebagai Bank terbesar di Indonesia yang beroperasi di segmen ini menyediakan beragam layanan keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Ketatnya persaingan bisnis yang saat ini dihadapi oleh para pelaku usaha, membuat pelaku usaha selalu mencari cara agar bisnis yang mereka jalankan menjadi lebih efektif dan efisien, dan tentunya menghasilkan profit yang maksimal untuk kebutuhan ekspansi usaha. Efektif dan efisien menjadi dua kata kunci utama yang di-*deliver* kepada nasabah. Dengan terhubungnya seluruh kegiatan bisnis suatu ekosistem usaha pada satu platform Perbankan, yaitu QLola by BRI, menjadikan seluruh aktivitas bisnis menjadi saling terhubung secara *digital*. Efek dari terhubungnya aktivitas bisnis suatu ekosistem industri pada satu *platform* tersebut, para nasabah BRI pelaku usaha menjadi mudah dalam melakukan aktivitas bisnis seperti pembayaran, penggunaan fasilitas dana talangan, bank garansi, *trade services* sampai dengan manajemen likuiditas. Dengan terintegrasinya semua produk serta terhubungnya aktivitas usaha di QLola by BRI, nasabah BRI juga menjadi mudah dalam melakukan *monitoring* portofolio aset dan liabilitas, melakukan *tracking* proses bisnis yang sedang berjalan sampai kepada perhitungan proyeksi *cash flow* yang harus disiapkan. Maka dari itu kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut yang sangat memudahkan aktivitas bisnis para pelaku usaha, sehingga proses bisnis berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Korporasi Tahun 2024

Sesuai dengan sektor usaha kelolaan Bisnis Korporasi yakni *agribussiness, manufacturing, consumer goods, health industry serta e-commerce,* prospek usaha Bisnis Korporasi masih terus meningkat didukung dengan perbaikan ekonomi setelah penurunan Covid-19 yang mendorong konsumsi masyarakat. Adapun prospek dan strategi bisnis korporasi dijelaskan sebagai berikut:

1. **Prospek Usaha**
   Khusus untuk Bisnis Korporasi Non BUMN sektor Agribusiness masih memiliki prospek yang cukup bagus khususnya pada industri kelapa sawit. Prospek industri kelapa sawit kini semakin cerah baik di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia. Sektor ini akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk lebih berperan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja. Minyak sawit merupakan kebutuhan dasar untuk sejumlah bahan makanan, kebutuhan industri dan bahan bakar minyak nabati. Portofolio sawit di Divisi Agribisnis saat ini sebesar 57%, sehingga ke depannya tidak menutup kemungkinan Divisi Agribisnis untuk merambah ke sektor di luar sawit dengan maksud mitigasi *spreading risk*, tentunya dengan tetap mengutamakan *top ten* debitur di sektor usahanya. Sektor manufaktur masih memiliki prospek yang sangat tinggi seiring dengan banyaknya permintaan dari masyarakat dan sektor manufaktur tiap tahun memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional.
2. **Strategi Bisnis Korporasi**
   Bisnis Korporasi BRI akan fokus beberapa strategi yakni
   a. Optimalisasi transaksi nasabah eksisting.
   b. Mencari sumber pertumbuhan baru, dengan melakukan ekspansi ke nasabah maupun segmen industri baru dengan fokus pada *fee income generation* dan transaction *based business*.
   c. *Selective loan growth* dengan menyasar nasabah dengan kriteria *priority* dan *invest to grow*, terutama penyaluran *loan* terhadap industri-industri baru yang menjadi prioritas pemerintah, antara lain agro teknologi, industri hijau dan pangan, industri berbasis ketahanan energi, dan lain-lain.
   d. Meningkatkan porsi CASA nasabah korporasi agar dapat menjaga *cost of fund wholesale* seefisien mungkin dengan menerapkan prinsip *transaction-based products and services*.
   e. Pengembangan bisnis berbasis ekosistem per masing - masing sektor industri untuk optimalisasi potensi *value chain* dengan berkolaborasi dengan Bisnis SME, Konsumer, Mikro akan menyusun penawaran khusus bagi ekosistem bisnis klien dari hulu hingga hilir dan jasa penunjang yang dapat melayani kebutuhan transaksi, simpanan, dan pinjaman serta mampu mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis klien khususnya terkait finansial. Aktivitas ini sejalan dengan aspirasi Bisnis Korporasi BRI untuk menjadi *catalyst of growth* segmen SME, Konsumer, dan Mikro serta mendukung pembentukan *close loop transaction* pada ekosistem bisnis klien.

BISNIS INSTITUSI DAN *TRANSACTION BANKING*

Bisnis Institusi

BRI memiliki peran besar di bisnis institusi untuk menyediakan produk dan jasa layanan perbankan bagi lembaga atau institusi negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Solusi perbankan yang diberikan meliputi pengelolaan layanan simpanan (giro dan deposito), penyaluran gaji dan tunjangan kinerja ASN, penyaluran bantuan sosial, penerimaan negara (Pajak, PNBP, dan lain-lain), *digital banking* (Qlola, *virtual account*, *marketplace* pemerintah, kolaborasi *platform*/ekosistem, dan lain-lain), *value chain* (pembiayaan *vendor*, pinjaman dalam/luar negeri, bank garansi, dan lain-lain) dan pelayanan jasa perbankan lainnya untuk memenuhi kebutuhan lembaga atau institusi sehingga BRI melayani ekosistem bisnis secara keseluruhan. Nasabah yang di layani bisnis institusi adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah, TNI, Polri, Asuransi Negara, Badan Layanan Umum, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Institusi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Giro	**43.929.571**	36.044.082	7.885.489	21,88 %
Deposito	**88.625.508**	82.186.259	6.439.249	7,83 %

Giro Bisnis Institusi tahun 2023 sebesar Rp43,93 triliun, tumbuh 21,88% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp36,04 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan penghimpunan dana murah berbasis transaksi dengan mengoptimalkan bisnis nasabah *wholesale*. Demikian pula dengan deposito Bisnis Institusi tahun 2023 sebesar Rp88,63 triliun, meningkat 7,83% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp82,19 triliun. Selain itu, bisnis institusi berhasil meningkatkan CASA dari 30,49% di tahun 2022 menjadi 33,14% di tahun 2023 yang berdampak juga pada stabilitas dana dan *efisiensi Cost of Deposit* (COD).

Strategi Bisnis Institusi Tahun 2023

Bisnis Institusi fokus pada pertumbuhan CASA (giro), menjaga *Cost of Deposit* (COD), akselerasi *value chain* nasabah, menjadi jembatan bagi segmen bisnis BRI lainnya dalam menggarap bisnis institusi, dan membangun kerjasama yang bersifat *platform digital banking* dengan nasabah institusi.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Institusi

Bisnis Institusi BRI merupakan *leader* di dalam pengelolaan keuangan negara. Lebih dari 65% simpanan, gaji (*payroll*) dan tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga RI dikelola Bisnis Institusi BRI. Bisnis Institusi telah melakukan digitalisasi layanan keuangan negara melalui berbagai produk seperti migrasi giro Kementerian menjadi *virtual account* yang dilengkapi dengan *platform* layanan transaksi *Qlola*, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan terlibat aktif dalam berbagai proses digitalisasi *platform* keuangan di setiap Kementerian/ Lembaga. Bisnis institusi BRI juga semakin dalam untuk menggarap *value chain* Kementerian/ Lembaga.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Institusi Tahun 2024

Prospek Bisnis dari Kementerian/Lembaga masih sangat baik karena masih banyak peluang yang selama ini belum tergarap. Selama ini, BRI kuat dalam dalam Sektor Belanja Pegawai dan Belanja Bansos Kementerian/Lembaga. Namun masih minoritas dalam sektor belanja barang dan modal. Untuk itu semenjak 2021 dan rencana bisnis ke depan, BRI telah mencanangkan untuk menggarap *value chain* belanja modal dan barang Kementerian/ Lembaga, seperti *vendor financing,* bank garansi, pinjaman pegawai, DPLK, kustodian, *trustee* dan lain sebagainya. BRI juga semakin banyak membangun berbagai kerjasama *platform digital* pemerintah karena merupakan komponen terbesar dalam transformasi pengelolaan keuangan negara. Bisnis institusi BRI juga semakin efisien karena berhasil meningkatkan CASA dan menjaga *Cost of Deposit* (COD) di tengah persaingan ketat suku bunga.

BISNIS *TRANSACTION BANKING*

Bisnis Transaction Banking telah memainkan peran penting sebagai salah satu pilar utama untuk menjaga kelangsungan usaha BRI di tahun 2023 maupun di masa mendatang. Sebab peran besar Bisnis *Transaction Banking* adalah mengakselerasi penghimpunan dana dan meningkatkan perolehan *fee based income*. Sasaran segmen Bisnis *Transaction Banking* yaitu perusahaan dan/atau instansi yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan yang kompleks dan berkaitan erat dengan pengelolaan likuiditas.

Produk dan jasa yang ditawarkan Bisnis *Transaction Banking* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Qlola Cash Management (salah satu produk di dalam *platform* Qlola)**
   Merupakan solusi layanan keuangan perbankan berbasis internet dengan *user interface* maupun berbentuk *web services* yang terhubung dengan sistem milik nasabah. Layanan yang diberikan bisa berbasis *platform* dan *non-platform*. Fitur layanan berbasis *platform* antara lain fitur *receivables, liquidity management, payment, supply chain management, trade finance and guarantee* dengan keunggulan *user friendly, real time* dan memiliki fitur keamanan yang memadai (*hard and soft token*). Adapun fitur-fitur transaksi berbasis non-platform berupa *web services* dan *virtual account* (BRIVA) yang mendukung kebutuhan transaksi keuangan pada umumnya atau dapat disesuaikan (*customized*) terhadap kebutuhan nasabah.
2. **Giro BRI**
   Merupakan produk simpanan yang melayani kebutuhan transaksional nasabah, dengan fasilitas penarikan melalui warkat (cek/bilyet giro) serta dapat dilakukan melalui ATM atau secara *digital* melaui Qlola Cash Management.
3. ***Trade Finance* BRI**
   Merupakan layanan ekspor impor secara komprehensif dan terintegrasi bagi eksportir/importir baik melalui *Letter of Credit* (L/C) ataupun Non L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Berbagai layanan tersebut juga telah terintegrasi secara *end-to-end* dengan *platform* Qlola dengan nama *Digital Trade*.
4. **Bank Garansi BRI**
   Merupakan layanan kebutuhan penjaminan bank (kontinjensi) baik lokal maupun internasional dalam bentuk fasilitas yang diberikan kepada nasabah baik dengan penjaminan asuransi, *non-cash loan*, *cash collateral* hingga *under counter-guarantee*. Berbagai layanan tersebut juga telah terintegrasi secara *end-to-end* dengan *platform* Qlola dengan nama Digital BG.

Tabel Kinerja (Produktivitas) *Transaction Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Volume Trade Finance	**711.928.396**	595.877.310	116.051.086	19,48%
Volume Bank Garansi	**108.703.349**	83.714.386	24.988.963	29,85%
Volume Qlola Cash Management	**6.788.672.110**	5.070.180.009	1.718.492.101	33,89%
Volume BRIVA	**830.293.400**	635.382.770	194.910.630	30,68%

Kinerja *Transaction Banking* di tahun 2023 secara umum menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari *volume trade finance* yang meningkat sebesar 19,48%. Sementara untuk volume bank garansi meningkat sebesar 29,85%. Pertumbuhan *trade finance* dan bank garansi sendiri didukung oleh berbagai perbaikan prosedur operasional, produk, serta *adanya digitalisasi trade* dan *guarantee* di *platform* Qlola. Transaksi nasabah melalui *platform* Qlola *Cash Management* selama tahun 2023 juga mengalami peningkatan. *Volume Qlola Cash Management* mengalami pertumbuhan sebesar 33,89%. Sementara volume BRIVA meningkat sebesar 30,68%.

Strategi Bisnis *Transaction Banking* Tahun 2023

Strategi *Transaction Banking* untuk tahun 2023 adalah *Accelerate to the Future by Developing Best in Class Product* yang terdiri dari:

1. *To be the Value-Added Leader for our Clients in Transaction Banking Market*, yakni menjadi bank pilihan nasabah dengan mengedepankan fitur dan layanan terbaik sehingga memberikan nilai tambah bagi nasabah.
2. *Deepening Client Centric through New Flows and Programs*, melalui fokus pada penetrasi *customer* baru yang akan menjadi fokus segmen baru.
3. *Deliver Superior Value Propositions*, yaitu peningkatan *value proposition* melalui penyediaan *end to end solution* dalam kebutuhan transaksi nasabah (Qlola) yang menggabungkan segala kebutuhan transaksi nasabah dalam satu *platform*.
4. *Develop Best In Class Product Verticals and Horizontally Aligned with Client Needs*, dengan meningkatkan kapabilitas produk melalui layanan digital yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi *Transaction Banking*

Keunggulan kompetitif dan inovasi *Transaction Banking* berfokus pada *product digitization* dan *integrated solution* yang salah satu hasilnya adalah *platform* Qlola. QLola adalah inovasi *Integrated Corporate Solution Platform* yang memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai produk dan layanan BRI dengan hanya satu kali login. Fitur *single sign on access* Qlola terdiri dari produk *cash and trade, supply chain management, foreign exchange, investment services, financial dashboard* dan layanan lainnya. Tujuan dari keunggulan kompetitif produk dan inovasi *Transaction Banking* yang memiliki *superior value propositions* di *market* agar semakin *reliable* untuk meng-*generate fee based income* dan *low cost funding* yang berasal dari transaksi. Kombinasi keunggulan

kompetitif dan inovasi dalam produk dan layanan *Transaction Banking* memberikan nasabah kemudahan, keamanan, dan efisiensi yang meningkat, mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis *Transaction Banking* Tahun 2024

Transaction Banking akan fokus kepada *penetration new source of growth* yang berasal dari industri yang sedang berkembang saat ini seperti *digital, multi national company*, dan FMCG. Selain itu, *Transaction Banking* juga melakukan optimalisasi *value chain* dari nasabah *existing* agar transaksi ekosistem nasabah bisa dilayani menggunakan produk dan layanan BRI. Di samping fokus pada *new source of growth*, *transaction banking* akan memperkuat segmen ritel dengan produk dan layanan seperti *supply chain financing*, BRIVA dan giro ritel. Untuk membantu peningkatan giro ritel, *Transaction Banking* memanfaatkan *data analytics* untuk generate *leads* dan *insight* baru yang akan digunakan oleh tenaga pemasar. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Transaction Banking Division perlu menjaga kualitas layanan, meningkatkan inovasi, dan tetap responsif terhadap perubahan tren pasar dan kebutuhan nasabah untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Syndication and Financial Institution Non Bank Division memiliki dua lini bisnis utama, yaitu:

1. Bisnis jasa sindikasi, meliputi fungsi *arranger*, agen fasilitas, agen penampungan dan agen jaminan.
2. Penyediaan limit fasilitas baik yang bersifat *committed* maupun yang bersifat *uncommitted* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) baik BUMN ataupun Non BUMN.

Sindikasi BRI berpengalaman menangani kredit sindikasi di berbagai sektor usaha, seperti infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, migas, perdagangan/perhotelan/restoran, perkebunan, pertambangan, properti serta proyek lainnya dalam *green businesses*. Financial Institution Non Bank Division memberikan jasa terintegrasi *(one-stop financial solutions)* untuk perusahaan keuangan non bank, baik berupa pemberian fasilitas pendanaan maupun simpanan, dan jasa keuangan lainnya yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan nasabah. Pemberian fasilitas meliputi pemberian fasilitas *security line, forex line,* fasilitas pinjaman jangka pendek, fasilitas *intraday*, bank garansi, dan penjaminan untuk berbagai kebutuhan. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menjadi pasar sasaran BRI meliputi perusahaan pembiayaan (*multifinance*), asuransi, sekuritas, lembaga keuangan khusus dan lembaga keuangan non-bank lainnya.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan *Non Bank*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Fee Based Income	**245.916**	199.487	46.429	23,27%
Outstanding pinjaman	**11.352.705**	8.545.428	2.807.277	32,85%
Instanding simpanan	**46.026.235**	41.434.892	4.591.343	11,08%

Sampai dengan Desember 2023, Syndication and Financial Institution Non-Bank Division (SJK) telah membukukan pendapatan *fee based income* sebesar Rp245,92 miliar, meningkat sebesar 23,27% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp199,49 miliar, peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah volume transaksi, *yield*, pinjaman dan *market share* dari bisnis sindikasi. *Outstanding* pinjaman kelolaan Divisi SJK tahun 2023 sebesar Rp11,35 triliun, meningkat 32,85% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp8,55 triliun yang berasal dari penyaluran kredit kepada perusahaan keuangan, baik anak perusahaan maupun perusahaan keuangan lainnya. Dari sisi total simpanan, meningkat 11,08% dari Rp41,43 triliun di tahun 2022 menjadi Rp46,03 triliun di tahun 2023 yang berasal dari keberhasilan akuisisi ekosistem pada perusahaan keuangan non bank.

Strategi Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank Tahun 2023

Di tahun 2023, Bisnis Sindikasi BRI tetap memprioritaskan penyaluran kredit terutama untuk proyek infrastruktur, agribisnis, dan elektrifikasi yang memiliki prospek tumbuh selama tahun berjalan. Selain itu peningkatan kapabilitas dan spesialisasi tim sindikasi BRI dalam menyusun *Corporate Loan Structure* sesuai dengan standar internasional (*Asia Pacific Loan Market Association*/ APLMA), sehingga dapat meningkatkan fungsi *arranger* dan agensi dalam menangkap peluang bisnis, memperluas jaringan, serta meningkatkan efisiensi transaksi secara keseluruhan. Sedangkan untuk bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank, lebih fokus pada ekosistem FI Non-Bank untuk meningkatkan *wallet share* bisnis FI Non-Bank melalui ekspansi pada *top tier* perusahaan keuangan dan memberikan solusi transaksi yang terintegrasi.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

Jasa Sindikasi BRI menyediakan solusi korporasi bagi Perusahaan maupun Institusi dalam pembiayaan mulai dari fungsi *arranger* sindikasi dan keagenan yang terdiri dari Agen fasilitas, agen *escrow* dan agen jaminan. Fungsi *arranger* dan operasional agen sindikasi didukung dengan SDM yang kompeten dan spesialis di bidangnya. Pemberian fasilitas untuk perusahaan di sektor IKNB juga menyediakan *one stop solutions* bagi nasabah yang integrasi dengan menawarkan Qlola sebagai solusi terpadu bertujuan untuk mendukung transaksi pelanggan dengan lebih baik. Dengan memperkuat transaksi dalam ekosistem, tujuannya adalah untuk menurunkan biaya deposit secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan memperluas dan meningkatkan volume transaksi di dalam ekosistem Qlola sehingga memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank Tahun 2024

Di tahun 2024, Syndication and Financial Institution Non Bank Division akan menerapkan strategi secara selektif dalam penyediaan jasa sindikasi kepada perusahaan yang memiliki prospek baik serta fokus pada operasional bisnis yang mengedepankan aspek *Environment, Social and Governance* (ESG) dan *Sustainability Finance*. Sementara dari bisnis IKNB, Syndication and Financial Institution Non Bank Division akan melakukan kolaborasi dan memberikan dukungan dengan BRI Group (Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, BRI Finance, BRI Danareksa), penetrasi dalam ekosistem pasar modal, asuransi, *multifinance* dan jasa keuangan lainnya.

Segmen Lainnya

Segmen lainnya meliputi Bisnis *Treasury*, *International Business* dan Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT *TREASURY AND GLOBAL SERVICE*

Segmen Treasury and Global Services (TGS) BRI melingkupi tiga pilar bisnis, yaitu *Treasury Business*, *Investment Services* dan *International Business* termasuk di dalamnya adalah *Overseas Channel* yang terdiri dari Unit Kerja Luar Negeri (UKLN) serta *Bank Representative* (BR). TGS terus mengoptimalkan peran dalam hal *liquidity management, profitability center,* pasar modal, penyediaan *bank line and* korespondensi bank, jaringan BRI di luar negeri, solusi transaksi TGS sebagai katalis segmen lainnya.

Sebagai bagian dari strategi pencapaian BRIvolution 2.0, TGS mengusung aspirasi *Market Leading Bank in Treasury and Global Services with Sustainable and Meaningful Contribution to BRI Group* di tahun 2025. Fundamental bisnis dan aktivitas lainnya yang terus ditransformasi semakin solid menopang kinerja segmen TGS di tengah kondisi penuh tantangan di tahun 2023.

Sejalan dengan fokus BRI di 2023 '*Strengthen Retail Banking Capabilities'*, strategi TGS disusun untuk memastikan kontribusi optimum dan *value creation* yang berkelanjutan khususnya melalui intensifikasi transaksi produk-produk TGS untuk nasabah di segmen ritel seperti *foreign exchange* (*forrex*), *cross border payment* (remitansi), *money changer,* surat berharga dan BRIFINE by DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BRI. Formulasi sumber pertumbuhan bisnis baru, bisnis model baru dan *re-engineering* proses bisnis terus dijalankan untuk mendorong BRI mewujudkan visi di tahun 2025 '*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion'*.

Solusi TGS kini hadir lebih dekat dengan nasabah, *at any moment in any place,* melalui *super apps* BRI: BRImo dan QLola. Strategi ini turut mendorong terjaganya kinerja segmen TGS di tengah tekanan tahun 2023, khususnya terkait kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang masih dalam tren meningkat dan likuiditas nasional yang lebih ketat.

Tabel Kinerja Keuangan Treasury and Global Services (TGS)

(dalam miliar Rupiah)

KOMPONEN	2023	2022	2021	2020	2019	CAGR
Total Pendapatan Non Bunga	**3.073**	**3.254**	**5.472**	**4.284**	**2.139**	
Treasury Business	**2.298**	2.610	4.925	3.764	1.599	**9,48%**
International Business	**452**	357	276	282	331	
Investment Services	**323**	287	272	238	209	

KOMPONEN	2023	2022	2021	2020	2019	CAGR
Total Pendapatan Bunga	**16.639**	**16.230**	**14.945**	**12.596**	**11.551**	
Treasury Business	**15.637**	15.839	14.886	12.505	11.500	**9,55%**
International Business	**1.002**	391	59	91	51	
Laba UKLN	**340**	**499**	**467**	**376**	**384**	**(3,00%)**
TOTAL	**20.052**	**20.079**	**20.884**	**17.184**	**14.074**	**9,25%**

Penurunan tahunan pendapatan TGS dari pendapatan non-bunga dipengaruhi aktivitas *treasury business* seiring dengan menipisnya *interest rate differential* antara suku bunga domestik dan global yang berpengaruh pada *forex market.* Pengelolaan risiko pasar atas portofolio kelolaan *treasury business* dan risiko likuiditas menjadi fokus aktivitas utama di tahun 2023 selain perluasan *customer base* yang mendorong kinerja optimum semua lini produk, tercermin dari peningkatan *market share* di industri. Komitmen TGS terhadap kontribusi berkelanjutan diperkuat dengan implementasi pilar ESG (*environment, social, governance*) di berbagai aktivitas, seperti penerbitan *green bond* sebesar Rp6 triliun di tahun 2023. Selain pendapatan, TGS terus meningkatkan transaksi yang dapat menumbuhkan CASA seperti transaksi *cross border payment* dan jasa kustodian.

Dalam meningkatkan kinerja di tahun 2023 serta memperkuat fundamental untuk tahun-tahun berikutnya, implementasi strategi TGS dilakukan melalui tiga landasan yang telah diformulasikan:

1. ***New Source of Growth***
   - Solusi *digital* TGS - Pengembangan akses layanan produk TGS secara *digital* untuk lebih memudahkan nasabah dalam menggunakan produk yang ditawarkan melalui BRImo super apps (DPLK, konversi valas, transfer internasional, RDN, E-SBN); QLola *wholesale super apps* (DPLK, kustodian, konversi valas, transfer internasional); serta iBBIZ (konversi valas)
   - Penambahan koridor Bank Representative di Timur Tengah (Kuwait)
   - Pemanfaatan dana Devisa Hasil Ekspor (DHE) nasabah melalui transaksi Swap dan penempatan pada *Term Deposit* Bank Indonesia.
   - *Connecting Indonesian business to the global market*, melalui *business referral* dan *business matching* dari *overseas channel* dengan nasabah BRI di Indonesia
   - *Human Capital Solution* (*Ecosystem*) melalui produk DPLK, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP); Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca-kerja (PPDKP) dan Program Pensiun Dana Santunan Kesehatan (PPDSK)
2. ***New Business Model***
   - Peningkatan peran dan fungsi *Bank Representative* untuk dapat melayani kebutuhan layanan keuangan Indonesia-*related business* di luar negeri
   - Penambahan *channel* layanan surat berharga untuk nasabah ritel pada aplikasi BRIghts, sinergi dengan PT BRI Danareksa Sekuritas
   - Transaksi penjualan *banknotes* menggunakan QRIS BRI
3. ***Business Process Reengineering***
   - *Bank Line Approval System,* meningkatkan efisiensi proses putusan *bank line* dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian
   - Sertifikasi ISO Manajemen Mutu 9001:2015 untuk jasa kustodian
   - Implementasi ESG pada aktivitas TGS, seperti peningkatan *share ESG-based portfolio* di Treasury dan DPLK; penerbitan *Green Bond* dan obligasi subordinasi berbasis inklusif; serta ESG *assessment* dalam pengambilan keputusan bisnis

Pertumbuhan bisnis dan kontribusi berkelanjutan yang sejalan dengan *mission statement* BRI di tahun 2024 yang fokus pada kapabilitas bisnis ritel dan sinergi dengan Perusahaan Anak menjadi basis dalam penyusunan strategi TGS tahun 2024 sebagai berikut:

1. ***Customer Driven Products***, pengembangan produk dan layanan TGS sesuai kebutuhan nasabah
2. ***Customer Base***, TGS terus meningkatkan penetrasi khususnya di segmen ritel melalui kolaborasi dengan *regional office*. Peningkatan *customer base* juga akan tetap dilakukan melalui optimalisasi fungsi UKLN dan Bank *Representative*
3. ***Product channel,*** sinergi dengan Perusahaan Anak untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah serta *cross-selling* produk dan layanan TGS
4. ***Overseas channel,*** peningkatan *network* BRI di luar negeri melalui penambahan BR
5. **Digitalisasi**, peningkatan akses layanan bagi nasabah dan optimalisasi produktivitas produk TGS melalui transformasi digital baik layanan di dalam negeri maupun di unit kerja luar negeri.

BISNIS *TREASURY*

Produk dan layanan *treasury* menjadi salah satu pilar BRI dalam menjadi *one stop financial solution* memenuhi kebutuhan nasabah baik segmen individu maupun korporasi. BRI terus melakukan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer driven products*) yang mengacu pada regulasi internal dan eksternal serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (*risk management*). Hal tersebut mempertimbangkan tantangan dan kondisi ekonomi selama tahun 2023, sehingga BRI hadir memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan finansial nasabah. Secara umum, keperluan nasabah tersebut di antaranya adalah melakukan transaksi *foreign exchange (forex), money market, fixed income,* dan transaksi terkait produk derivatif.

1. ***Foreign Exchange***
   Perdagangan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan waktu penyerahan pada suatu tanggal tertentu. Adapun produk *foreign exchange* meliputi transaksi TOD, TOM, dan *Spot*.
2. ***Money Market***
   Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.
3. ***Fixed Income***
   Produk investasi dengan tingkat pendapatan tetap dalam bentuk layanan perdagangan surat utang atau obligasi, yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun swasta baik melalui *primary market* maupun *secondary market*.
4. **Produk Derivatif**
   Transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga dan nilai tukar, maupun *forward*, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis *Treasury*

(Bank Only)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Pendapatan Bunga (dalam jutaan Rupiah)	**16.638.984**	16.299.745	339.239	2,08%
Security Gain (dalam jutaan Rupiah)	**1.868.756**	1.591.000	277.756	17,46%
Forex Gain (dalam jutaan Rupiah)	**428.532**	1.018.444	(589.912)	(57,92%)
***Aset Produktif* (dalam triliun Rupiah)**	**485**	**578**	**(93)**	**(16,09%)**
GWM	**86**	150	(64)	(42,67%)
Penempatan Pada BI	**48**	54	(6)	(11,11%)
Penempatan Pada Bank Lain	**13**	14	(1)	(7,14%)
Surat Berharga	**305**	309	(4)	(1,29%)
Reverse Repo	**33**	51	(18)	(35,29%)
Aktivitas *Foreign Exchange* (dalam jutaan USD)	**63.212**	**54.697**	**8.515**	**15,57%**
Client Ritel	**14.415**	11.785	2.630	22,32%
Client Institusi	**48.798**	42.912	5.886	13,72%

Pergerakan pasar keuangan di tahun 2023 yang sangat terpengaruh oleh gejolak ekonomi baik global maupun domestik menjadi tantangan bagi aktivitas *treasury*. Penurunan pendapatan non bunga di tahun 2023 salah satunya didorong oleh penurunan aset *treasury* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas pertumbuhan penyaluran kredit bank. Di tahun 2023, imbal hasil obligasi tenor 10 tahun seri *benchmark* mencapai titik tertingginya di level 7,26% (Desember 2022: 6,94%). Hal tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kinerja yang berasal dari aktivitas transaksi surat berharga di tengah pengelolaan portofolio yang tetap memperhatikan aspek manajemen risiko. Sehingga peningkatan penetrasi produk eksisting dan pemasaran produk baru ke nasabah menjadi fokus utama untuk mendorong kinerja pendapatan non bunga sebagai sumber pendapatan *treasury* yang berkelanjutan.

Peningkatan *market share* dengan fokus pada *client based transaction* maupun pengelolaan portofolio yang optimum termasuk manajemen likuiditas berperan menjadi dua pilar utama dalam menunjang kinerja *treasury* BRI di 2023. *Treasury* BRI

juga akan terus mengoptimalkan fungsi sebagai *market maker* di pasar surat berharga domestik mempertimbangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki dalam pengelolaan portofolio. *Client flow* untuk transaksi valuta asing tumbuh sebesar 15,57% yoy dengan peningkatan terbesar tercatat di segmen ritel sebesar 22,31%. Hal ini sebagai salah satu fundamental yang dibangun untuk mendukung strategi di 2023 dalam memperkuat segmen ritel BRI secara keseluruhan.

Pengembangan bisnis *treasury* di tahun 2024 akan searah dengan salah satu fokus strategi BRI yaitu penguatan kapabilitas *retail banking* dan optimalisasi kontribusi Perusahaan Anak. *Client based transaction* yang juga ditopang oleh pengembangan *customer driven products* sebagai solusi atas kebutuhan nasabah diharapkan dapat menjadi tonggak kinerja *treasury* di tahun 2024 di tengah kondisi pasar dan ekonomi yang masih penuh ketidakpastian. Sehingga *treasury business* dapat terus meningkatkan kontribusinya secara berkelanjutan terhadap kinerja BRI dalam berbagai kondisi likuiditas, pasar dan ekonomi.

Strategi Bisnis *Treasury* Tahun 2023

Pada 2023 strategi bisnis *treasury* berfokus pada beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan *client base* baik domestik maupun global, baik institusi maupun individu dengan melakukan kegiatan pemasaran bersama Unit Kerja dan sinergi BRI Group sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar dan *market share*.
2. Pengelolaan aset dan liabilitas yang dinamis dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko likuiditas, pasar dan kredit yang terukur, serta memperhatikan pertumbuhan *core business* bank.
3. *Enhancement* produk dan layanan bisnis *treasury* melalui digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer driven products*) diimplementasikan melalui program pemutakhiran BRIefx 1.2 dengan tetap memperhatikan aspek pengembangan ESG di dalamnya.
4. Perbaikan bisnis proses serta *monitoring* yang lebih efektif dan menyeluruh serta terotomasi yang didukung sumber daya manusia yang andal, melalui program *upgrading* Guava versi 3.3.
5. *Customer driven products* untuk meningkatkan peran BRI sebagai *one stop financial solutions* dengan tetap menyesuaikan pada regulasi yang berlaku, di antaranya di tahun 2023 BRI sudah dapat melakukan transaksi BSD IDR dengan *client*.
6. Pengelolaan risiko yang komprehensif dalam melaksanakan seluruh aktivitas mempertimbangkan kondisi ekonomi di tahun 2023 yang penuh tantangan. Penurunan sensitivitas portofolio surat berharga (melalui indikator durasi dan DV-01) di tengah tren peningkatan tingkat imbal hasil menjadi salah satu fokus di separuh tahun 2023 sebagai salah satu strategi mitigasi risiko pasar.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis *Treasury*

Keunggulan kompetitif BRI dengan jaringan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia menjadi salah satu kunci peningkatan *client base treasury* khususnya di segmen ritel. Selain itu, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang dilakukan secara terus menerus diharapkan menjadi pondasi aktivitas *treasury* yang optimal. Pada tahun 2023, *Treasury* BRI mendapatkan beberapa penghargaan atas kinerja dan kontribusinya di pasar keuangan, yaitu:

1. *Global Finance – Sustainable Finance Award*
2. *Alpha Southeast Asia - The Best FX Bank For Retail Client*
3. *Euromoney Foreign Exchange Awards* - The Best FX Bank *Rest of The World (Indonesia)*
4. LSEG Indonesia *Award* – Refinitiv - *The Best State Bank*
5. Bank Indonesia - Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Valas Terbaik
6. *The Asset – Triple A – Best in Treasury and Working Capital SMEs in Indonesia*
7. *The Asset – Triple A – The Best Issuer for Sustainable Finance dan Best Sustainability Linked Loan*
8. Kementerian Keuangan - *Dealer* Utama SUN dengan Kinerja Terbaik 2023
9. Kementerian Keuangan - *Dealer* Utama SUN dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana 2023
10. Kementerian Keuangan - *Dealer* Utama SBSN dengan Kinerja Terbaik 2023
11. Kementerian Keuangan - *Dealer* Utama SUN dengan Kinerja Terbaik 2022
12. Kementerian Keuangan - *Dealer* Utama SUN dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana 2022
13. Kementerian Keuangan - *Dealer* Utama SBSN dengan Kinerja Terbaik 2022

BRI terus membangun budaya inovatif termasuk untuk meningkatkan aktivitas *Treasury* yang sesuai dengan visi di tahun 2025 untuk menjadi *Market Leading Bank in Treasury and Global Services with Sustainable and Meaningful Contribution to BRI Group*. Beberapa kegiatan inovasi yang dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BRIEFX 1.2 yang terdiri dari BRIefx *Channel Integrated*, BRIefx *Improvement* dan *costum pricing*. *Deliverable activities* antara lain terintegrasinya seluruh transaksi forex pada BRIefx akan berdampak terhadap *monitoring* PDN BRI secara keseluruhan, sedangkan pemberian *differential rate* untuk sektor nasabah sebagai wujud peningkatan layanan kepada nasabah BRI Private dan BRI Platinum agar mendapatkan kurs lebih baik dibandingkan dengan nasabah normal. Adapun *costum pricing valas* bagi nasabah *private* dan nasabah platinum maka *pricing* tersebut dapat dihubungkan ke berbagai macam *channel* BRI, contohnya BRIMO.
2. Implementasi *Central Counterparty* (CCP) merupakan lembaga kliring yang ditunjuk oleh regulator untuk menjalankan fungsi kliring transaksi *derivative* antar pihak. Implementasi bertujuan untuk menciptakan pasar keuangan

yang likuid, efisien, inklusif dan aman dan sebagai salah satu infrastruktur pasar keuangan untuk mengurangi risiko transaksi *derivative* di Indonesia yang diperkirakan memiliki total volume per hari mencapai eq USD300 juta.

3. BRI *Swap Deposit* (BSD) IDR *to Valas* merupakan *structured product*, dan saat ini BSD hanya melayani transaksi *valas to valas* dikarenakan PBI 18/18/PBI/2016 (sesuai dengan izin OJK untuk Produk BSD). Dengan adanya perubahan baru pada PBI 24/7/PBI/2022 akan ditambahkan fitur *pairing currency* mata uang Rupiah kepada valas dalam produk BSD (*regulatory*).
4. *Upgrading Guava version* 3.3 merupakan *upgrade* hasil *deep dive demo* Guava yang dilakukan pada Bulan September 2022 serta dalam rangka Penerapan FRTB (Regulator Juni 2023), maka dengan diperlukan *upgrade* sistem dari Guava, yang mana setelah dilakukan *upgrade* Guava dapat memenuhi kebutuhan penghitungan FRTB. Adapun penyempurnaan atas penghitungan *daily compunding interest* untuk transaksi Repo menggunakan ARR serta dalam penyempurnaan *treasury system* yang salah satunya penambahan modul pembukuan transaksi reksadana melalui Guava.
5. *Funding Plan* Penerbitan Instrumen non-DPK digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI. Penerbitan *funding* non-DPK dilakukan tentatif dengan tetap memperhatikan pertumbuhan DPK dan pinjaman serta kondisi pasar. Penerbitan non-DPK ini termasuk penerbitan *Long Term Notes* (LTN) dalam rangka pembiyaan kredit Tapera.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis *Treasury* Tahun 2024

Penyusunan strategi bisnis *treasury* tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan utama BRI di tahun 2025 untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion* dengan komitmen untuk terus meningkatkan kontribusi positif bagi BRI. Di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2024 karena risiko terjadinya resesi global, tekanan inflasi yang masih tinggi serta konflik geopolitik. Fokus peningkatan *client flow* dari bisnis ritel dan sinergi Perusahaan Anak akan menjadi fokus utama bisnis *treasury* BRI untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selain aktivitas bisnis, aktivitas investasi dan pemenuhan kebutuhan pendanaan di luar dana pihak ketiga juga diarahkan untuk berfokus pada *Environmental, Social and Governan*ce (ESG) sehingga aktivitas bisnis *treasury* tidak hanya memiliki dampak terhadap kinerja Perseroan namun juga terhadap lingkungan. Peningkatan sinergi baik dengan bisnis lainnya di BRI maupun dengan Perusahaan Anak juga menjadi salah satu fokus *treasury* dalam optimalisasi produk, layanan dan potensi pendapatan.

Pemasaran pada nasabah pinjaman dan simpanan valas serta yang memiliki kebutuhan valas seperti nasabah yang melakukan transaksi ekspor-impor di seluruh *regional office* BRI menjadi fokus strategi peningkatan aktivitas nilai tukar di segmen ritel. Sedangkan di segmen korporasi, akuisisi nasabah baru dan peningkatan penetrasi nasabah eksisting di beberapa sektor potensial menjadi strategi untuk mencapai salah satu misi dalam BRIVolution 2.0 segmen bisnis *Treasury and Global Services* (TGS) yaitu 50% penetrasi produk *treasury*.

INTERNATIONAL BUSINESS

BRI memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam melayani kebutuhan aktivitas keuangan nasabah terkait produk dan jasa di bidang *correspondent banking business*, *remittance business* dan *banknotes business*. Seluruh bidang bisnis tersebut telah berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan pendapatan dari sisi *interest income*, *fee-based income*, termasuk dalam meningkatkan penghimpunan dana maupun sebagai katalis pertumbuhan bisnis BRI lainnya. Layanan *International Business* BRI didukung juga oleh kehadiran Unit Kerja Luar Negeri yang berada di New York - USA, Cayman Island, Singapura, Hongkong, Dili - Timor-Leste, dan Taipei - Taiwan. Selain itu, terdapat pula *Bank Representatives* BRI untuk meningkatkan layanan bisnis Remitansi dan *referral* bisnis BRI di koridor Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Hongkong, Jepang, dan Brunei Darussalam.

International Business BRI turut didukung oleh pekerja profesional yang telah memiliki sertifikasi internasional seperti *Certified Documentary Credit Specialist (CDCS)*, *Certified Specialist for Demand Guarantee (CSDG)*, *Certified International Trade Finance (CITF), Certified Trade Finance Professional (CTFP), Certificate in Principles of Payment (CertPAY)* dan *Certified Trade Finance for Compliance* (*CTFC*) yang terus diperbaharui secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki komitmen penuh untuk menjadi rekan bisnis terpercaya dan bisa diandalkan, guna menyediakan layanan *International Business* yang terbaik dan sejalan dengan perkembangan bisnis nasabah.

International Business BRI telah bekerja sama dengan lebih dari 1.200 Bank Koresponden di seluruh dunia dengan 16 mata uang asing, lebih dari 100 *Remittance Company* di seluruh dunia, serta didukung Unit Kerja Operasional yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. BRI juga melayani transaksi jual beli mata uang asing dalam 22 jenis mata uang asing di seluruh unit kerja operasional secara *real-time online*. Perkembangan *International Business* di BRI didukung oleh keberadaan International Business Division di level Kantor Pusat khususnya International Banking Department, yang terdiri dari *foreign correspondent banking business team*, *domestic and south east asia correspondent banking business team*, *remittance business team*, *remittance product development team, banknotes business team*, serta didukung oleh *overseas channel management and development department*, dan *bank line management department*. Sementara itu, produk dan layanan dari masing-masing *department* dan *team* tersebut terus di-*review* dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan informasi sebagai berikut:

1. ***Correspondent Banking Business Products***
   a. *Bank guarantee issuance under counter guarantee*, yaitu penerbitan bank garansi lokal kepada *bouwheer* yang diterbitkan atas dasar *counter guarantee* yang diterima dari bank koresponden.
   b. LC/SKBDN *refinancing business*, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh BRI kepada Bank (*issuing bank*) atas dasar *underlying trade transaction* berupa LC/SKBDN.
   c. LC /SKBDN *confirmation business*, yakni jaminan tambahan dari BRI yang diberikan kepada *beneficiary* atas LC/SKBDN yang diterbitkan oleh *counterpart bank* (*issuing bank*).
   d. *Trade asset participation business*, adalah pengambil-alihan sebagian atau keseluruhan tagihan (*bank risk* atau *country risk*) dengan *underlying trade* yang mengacu pada ketentuan dalam *Banker's Association Finance and Trade* (BAFT).
   e. *Banker acceptance*, merupakan fasilitas likuiditas jangka pendek yang diberikan BRI sebagai *lender* atau *funding bank* dengan *underlying trade* LC/Non-LC.
   f. *Bank to bank forfaiting business*, adalah pengambilalihan tagihan (*payment claim*) tanpa hak *regress* dengan *underlying Trade Transaction* yang mengacu pada *Uniform Custom Rules for Forfeiting* (URF).
   g. *Bank loan*, merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh BRI kepada bank koresponden dalam rangka pemenuhan likuiditas bagi bank koresponden dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
2. ***Cross Border Payment Business Products***
   Cross border payment (fund transfer) dapat didefinisikan sebagai suatu pergerakan/perpindahan dana secara lintas negara dari pengirim (*the originator of payment*) kepada penerima (*the beneficiary of payment*). Produk ini meliputi BRIfast *inward cross border payment* (kerjasama dan non kerjasama) dan BRIfast *outward cross border payment*.
   a. **BRIfast *Inward Cross Border Payment* (Kerjasama dan Non Kerjasama)**
      - BRIfast *Incoming* Kerjasama merupakan layanan pengiriman dana dari luar negeri ke Indonesia menggunakan aplikasi BRIfast dengan melalui *Channel Counterpart* Kerjasama BRI yang ada di luar negeri, umumnya transaksi ini bersumber dari remitansi PMI (Pekerja Migran Indonesia).
      - BRIfast *Incoming* Non-Kerjasama merupakan layanan pengiriman dana dari luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan platform SWIFT, umumnya transaksi ini merupakan transaksi yang memiliki *underlying trade* (ekspor-impor).
   b. **BRIfast *Outward Cross Border Payment***
      Merupakan layanan transfer dengan tujuan luar negeri menggunakan mata uang valas termasuk *transfer* dana ke dalam negeri menggunakan mata uang valas.
   c. **Layanan Global MT 940 dan MT 101**
      Merupakan fasilitas layanan untuk mengakomodasi kebutuhan layanan SWIFT bagi *multinational company non-bank*, khususnya yang memiliki jaringan unit usaha di Indonesia.
3. ***Banknotes Business Products***
   a. Pembelian dan penjualan *banknotes*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Uang Kertas Asing (UKA) secara fisik melalui transaksi *money changer*, dengan dukungan tenaga pemasar yang telah memiliki sertifikasi terkait bidang tersebut.
   b. Tarik dan setor tunai *banknotes*, yaitu penarikan maupun penyetoran *banknotes* dari dan ke rekening simpanan valas nasabah yang dilayani di unit kerja operasional BRI.
   c. Transaksi *same currency*, yaitu penjualan dan/atau pembelian *banknotes* ke bank/*counterparty* lain dengan pembayaran *currency* yang sama dan *rate* yang kompetitif.
4. ***Overseas Channel Management and Development***
   Daftar Unit Kerja Luar Negeri BRI yaitu sebagai berikut:
   a. BRI New York *Agency*
   Berdiri sejak tanggal 8 April 1988 dengan *Foreign Agency License*, BRI New York Agency merupakan unit kerja luar negeri pertama BRI untuk *follow customer business* dalam memfasilitasi transaksi *loan, trade finance, treasury*, *cross border payment*, serta *payment and settlement* dalam mata uang USD, serta membantu mempromosikan UMKM BRI di pasar Amerika. BRI New York Agency juga dapat menyediakan layanan USD *clearing services* kepada perbankan nasional dan bank lain di luar negeri
   b. BRI Hongkong *Representative Office*
   Berdiri tahun 1989 sebagai unit kerja luar negeri kedua, BRI HKRO memiliki lisensi sebagai *representative office*. Peran BRI HKRO adalah sebagai perwakilan dari Kantor Pusat BRI di Hong Kong dalam melakukan *referral business* atas produk dan layanan BRI kantor pusat, unit kerja luar negeri BRI dan BRI Group serta berkomunikasi dengan seluruh *stakeholders* BRI di Hong Kong (nasabah, pemegang saham, regulator, dan lain-lain). BRI Hong Kong *representative office* turut membantu mempromosikan UMKM BRI di pasar Hong Kong dan Tiongkok.
   c. BRI Cayman Island *Branch*
   Berdiri sejak tanggal 5 November 1992 dengan *Banking License Category B*, BRI Cayman Islands merupakan unit kerja luar negeri ketiga BRI melayani transaksi *loan, trade finance, treasury*, serta transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan terkait Indonesia *related business* khususnya proyek-proyek pemerintah Republik Indonesia.
   d. BRI Singapore *Branch*
   BRISG berdiri pada tahun 2015 dengan *wholesale banking licensed* untuk menjadi *trade finance hub* BRI yang melayani transaksi perdagangan antara Indonesia dan South East Asia. Pembukaan Kantor Cabang BRI di Singapura juga merupakan langkah BRI dalam upaya *follow customer business* yang memiliki bisnisnya di wilayah *South East Asia (SEA).* Aktivitas bisnis BRI Singapore Branch meliputi layanan *loan, trade finance and treasury* terkait Indonesia *related business.*

e. **BRI Timor Leste Colmera *Branch***
BRITL memiliki Lisensi Level B dari Banco Central de Timor-Leste (BCTL) dan resmi beroperasi sejak tanggal 14 Maret 2017. Pendirian BRI Timor Leste ditujukan untuk memperluas *retail market* BRI dengan menawarkan produk berupa pinjaman modal kerja konstruksi, ritel komersial dan konsumer, bank garansi, simpanan (tabungan, giro, deposito), jasa *cross border payment, trade finance*, penyampaian jasa referensi kredit, konsultan finansial. Sampai dengan saat ini BRI Timor Leste telah memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu yaitu Futuhada *sub-branch office*, Hudilaran *sub-branch office* dan Audian *sub-branch office.*

f. **BRI Taipei *Branch***
BRI Taipei *Branch* secara resmi beroperasi pada tanggal 30 November 2021. Dengan *full banking license* BRI Taipei *Branch* dapat memberikan layanan ritel maupun *wholesale* seperti simpanan, pinjaman, *cross border payment* dan *trade finance*. BRI Taipei Branch didirikan untuk mengakomodir potensi transaksi impor dan ekspor antara Indonesia dengan Taiwan dan East Asia serta menjadi *trade finance hub* BRI yang melayani wilayah dimaksud.

5. ***Bank Line Management***
Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:
   a. Analisis kondisi makro dan risiko negara *counterpart.*
   b. Analisis dan rekomendasi pemberian fasilitas *bank line.*
   c. *Due diligence* terhadap *counterpart* dalam rangka pemberian fasilitas *bank line*.
   d. *Monitoring* utilisasi *bank line* untuk mendorong optimalisasi.

Tabel Kinerja (Produktivitas) *International Business*

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
***REVENUE* (DALAM JUTAAN RUPIAH)**				
International Business	**1.454.354**	748.531	705.823	94,29%
***VOLUME* (DALAM MILIAR RUPIAH)**				
Correspondent Banking Business	**60.905**	48.117	12.788	26,58%
Cross Border Payment Business	**2.425.000**	2.012.581	412.419	20,49%
Banknotes Business	**56.423**	42.841	13.582	31,70%

Kinerja Bisnis Internasional mencatatkan pendapatan dengan pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2023. Pendapatan *International Business* mencapai Rp1,45 triliun atau tumbuh sebesar 94,29% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp748,53 miliar. Pertumbuhan tersebut bersumber dari 3 (tiga) *business segment* yaitu *correspondent banking business, remittance business* dan *banknotes business*. Mayoritas atau 72% dari pendapatan ini bersumber dari transaksi *correspondent banking business* dengan total *volume* transaksi sebesar Rp60,91 triliun atau tumbuh sebesar 26,58%. Pencapaian *correspondent banking business* didukung oleh optimalisasi transaksi *bank to bank business* dengan *underlying trade* seperti *trade asset participation, refinancing* LC/SKBDN, *bank to bank forfaiting*, *bankers acceptance, bank loan*, serta penerbitan bank garansi atas dasar kontra garansi dari bank koresponden dan *confirmation* LC/SKBDN.

Penyumbang pendapatan *International Business* selanjutnya bersumber dari *cross border payment business* dengan total volume transaksi sebesar Rp2.425 triliun atau tumbuh sebesar 20,49%. Pencapaian *cross border payment business* didorong *oleh* 2 (dua) sektor utama kontributor pertumbuhan bisnisnya. Pertama, seiring dengan membaiknya perekonomian yang juga mengakibatkan naiknya volume transaksi ekspor impor di BRI. Kedua, kenaikan jumlah transaksi yang diakibatkan oleh akuisisi *partner global* dalam industri *cross border payment* untuk segmen ritel di negara- negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong-Kong, Korea Selatan, Jepang, UAE, dan Saudi Arabia. Pendapatan *International Business* selanjutnya bersumber dari *banknotes business* dengan total *volume* transaksi sebesar Rp56,42 triliun atau tumbuh sebesar 31,70%. Transaksi *banknotes business* tersebut bersumber dari layanan *money changer* di seluruh unit kerja operasional dan gerai *money changer* BRI.

Strategi *International Business* Tahun 2023

Uraian strategi *International Business* Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. ***Cross Border Payment Business Strategy***
Sustaining a Robust Presence in Inbound Cross Border Payment Business and Optimizing Outbound Performance melalui:
   a. Integrasi jaringan sistem dari perusahaan-perusahaan Global *Money Transfer Operator* (MTO) untuk memperluas peningkatan layanan.
   b. Perluasan *channel* Layanan *outward/Transfer internasional* melalui *platform* aplikasi *digital SuperApps* untuk memperluas penetrasi pasar segmen ritel.
   c. Bank *Representative* (BR) sebagai katalis bagi Indonesian *related business* untuk menggunakan jasa atau layanan BRI.

2. ***Banknotes Business Strategy***
   a. Digitalisasi Transaksi *Money Changer*
      Dalam rangka mendukung program *cashless* dari Pemerintah, BRI memfasilitasi pembelian *banknotes* di gerai *money changer*/unit kerja BRI dapat menggunakan QRIS sehingga nasabah tidak perlu menyiapkan uang rupiah secara tunai dalam transaksi pembelian *banknotes*.
   b. Akuisisi Travel Haji dan Umroh
      Melakukan akuisisi travel haji dan umroh untuk memperluas pasar ritel *banknotes* ke calon jamaah yang membutuhkan *banknotes* SAR.
3. ***Correspondent Banking Business Strategy***
   a. Peningkatan transaksi *correspondent banking business* melalui *onboarding* bank koresponden serta bank koresponden eksisting dengan tetap memperhatikan pengelolaan portofolio konsentrasi produk dan tingkat risiko.
   b. Melakukan pengukuran risiko dalam setiap aktivitas *correspondent banking business* dengan tetap memperhatikan kondisi pasar, tingkat kesehatan bank, *rating* bank serta fluktuasi suku bunga acuan guna mengoptimalkan *revenue* bagi BRI.
   c. Peningkatan kapasitas RM *correspondent banking* melalui kerja sama dengan BRI Corporate University dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan sertifikasi *product specialist.*
4. ***Overseas Channel Management and Development Strategy***
   a. Berperan sebagai *business intermediaries* BRI Kantor Pusat, BRI Group dan Unit kerja Luar Negeri lainnya.
   b. Meningkatkan transaksi *international business and treasury business* serta menjadikan BRI New York Agency sebagai USD *clearing service provider* di wilayah *South East Asia*.
   c. Menjadikan BRI Singapore Branch sebagai *Financial and Trade Hub in South East Asia* dengan meningkatkan layanan *trade finance, corporate lending/syndication* dan *treasury products.*
   d. Melakukan digitalisasi layanan perbankan untuk meningkatkan transaksi nasabah dalam mendukung terwujudnya BRI Taipei *Branch* sebagai *Payment gateway for East Asia Market*.
   e. Mendukung kegiatan dan promosi MSMEs Indonesia di luar negeri.
   f. Mengimplementasikan konsep *follow customer business* sebagai upaya meningkatkan bisnis BRI di luar negeri.
5. ***Bank Line Management Strategy***
   a. Pengembangan aplikasi *Bank Line Analysis System* (BLAST) untuk mempercepat prakarsa dan putusan *bank line*.
   b. Dukungan optimal dalam pemberian *bank line* yang mendukung kebutuhan *International Business* dan *Treasury* dengan tetap menjaga kualitas kredit.
   c. Banking *industry update* untuk negara yang memiliki eksposur atau risiko tinggi.
   d. Inisiasi penghitungan *Customer Profitability Analysis* (CPA) *bank line*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi *International Business*

Uraian keunggulan kompetitif dan Inovasi *International Business* dijabarkan sebagai berikut:

1. ***Cross Border Payment Business***
   a. Keunggulan Kompetitif
      - Memiliki *Bank Representative* dan Perusahaan Anak di negara tujuan utama penempatan Pekerja Migran Indonesia (Malaysia, Singapura, Brunei, Hong-Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, UAE, Kuwait, dan Saudi Arabia) dalam rangka memfasilitasi kebutuhan layanan finansial dan perbankan yang unggul.
      - Memiliki jaringan lebih dari 100 perusahaan *counterpart* kerjasama yang tersebar di seluruh dunia sehingga memudahkan akses bagi nasabah yang membutuhkan layanan transfer lintas negara.
   b. Inovasi
      - *Multiple channel* untuk layanan transaksi *outward* / transfer internasional melalui *platform* aplikasi digital SuperApps BRImo yang memberikan kemudahan untuk nasabah bertransaksi dimanapun dan kapanpun melalui *smartphone*.
      - Layanan transaksi pencairan tunai *inward* di Agen BRILink.
      - Aplikasi *inward* bekerjasama dengan *counterpart* BRI.
2. ***Banknotes Business***
   a. Keunggulan Kompetitif
      - Memiliki *rate* transaksi yang bersaing.
      - Jaringan kerja *banknotes* bisnis tersebar luas di seluruh Indonesia dan dapat dilayani di seluruh unit kerja BRI meliputi Kantor Cabang, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit.
      - Melayani 22 *Currency* yaitu USD, EUR, AUD, JPY, SGD, GBP, SAR, THB, HKD, CNY, NZD, AED, MYR, BND, CHF, KRW, PGK, CAD, TWD, PHP, INR dan VND.
   b. Inovasi
      - Dalam rangka *market penetration* dan mitigasi pergerakan nilai kurs, transaksi *banknotes* kepada *customer* bank dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara *same currency*. Transaksi dikenakan provisi atas transaksi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
      - *Cashless* dalam transaksi *money changer* dengan alternatif metode pembayaran melalui QRIS sehingga nasabah tidak perlu menyiapkan uang tunai dalam melakukan pembelian *banknotes* di gerai *money changer*/unit kerja BRI.
3. ***Correspondent Banking Business***
   a. Keunggulan Kompetitif
      Memiliki Jaringan korespondensi yang luas di berbagai Bank di seluruh dunia dengan total jaringan korespondensi lebih dari 1.200 Bank di seluruh dunia.
   b. Inovasi
      - Implementasi produk *correspondent banking* yang variatif dan lengkap untuk melayani pemenuhan kebutuhan likuiditas bank domestik maupun *foreign bank* di Indonesia.

- Tersedia layanan cepat dan tepat (*same day service*) dalam penerbitan *bank guarantee* atas *counter guarantee* yang diterbitkan bank koresponden.

4. ***Overseas Channel Management and Development***
   a. Keunggulan Kompetitif
      - Ketersediaan sumber pembiayaan serta produk dan layanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah termasuk pelaku usaha ekspor-impor di Indonesia dengan negara mitra dagang.
      - Memiliki akses layanan perbankan di US untuk optimalisasi *yield* serta penyediaan layanan USD *Clearing Services* kepada Bank.
      - Ketersediaan layanan *digital* untuk nasabah ritel dan *wholesale* di luar negeri yang *reliable* karena didukung pengelolaan IT yang baik.
      - Menyediakan akses kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya ke pasar internasional.
      - Menjadi *business catalyst* bagi segmen bisnis lainnya dengan melakukan *referral business*.
      - Memiliki hubungan bisnis yang baik dengan instansi bank maupun non-bank di masing-masing negara.
   b. Inovasi
      - Mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah *overseas channel*.
      - Melaksanakan inovasi dalam bentuk digitalisasi produk dan layanan perbankan di seluruh *overseas channel*.
      - Bekerjasama dengan instansi untuk meningkatkan *business matching*, *referral business* dan kerjasama lainnya.

5. ***Bank Line Management***
   a. Keunggulan Kompetitif
      Fungsi prakarsa *bank line* yang terpisah dari fungsi *marketing*, sehingga lebih terfokus dalam pengelolaan *bank line* untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
   b. Inovasi
      Efisiensi proses bisnis melalui otomasi prakarsa *bank line*, digitalisasi penghitungan *customer profitability analysis* (CPA), dan *enhancement dashboard bank line* untuk pengelolaan risiko Bank.

Prospek Usaha dan Strategi *International Business* Tahun 2024

International Business Division BRI terus berupaya meningkatkan produktivitas di tengah gejolak ketidakpastian kondisi global dan menjaga kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah yang dinamis. International Business Division BRI juga berkomitmen meningkatkan kontribusi pendapatan Perseroan melalui peningkatan volume transaksi baik *correspondent banking business*, *cross border payment* maupun *banknotes business*. Untuk mewujudkan hal tersebut, *International Business* BRI tahun 2024 memiliki strategi sebagai berikut:

1. ***Cross Border Payment Business***
   a. Prospek Usaha
      - Bisnis *Inward* PMI yang mulai pulih pasca pandemi Covid-19, ditandai dengan peningkatan pemberangkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia.
      - Perluasan jaringan dengan perusahaan *counterpart* global yang dapat mendorong peningkatan transaksi *inward dan outward.*
      - Penambahan *retail-based customer* untuk transaksi *outward/transfer* International melalui *platform* aplikasi *digital* SuperApps BRImo.
      - Peningkatan transaksi melalui layanan SWIFT MT101 dan MT940 oleh nasabah *multinational company* non-bank yang memiliki jaringan usaha di Indonesia.
      - Peningkatan transaksi *inward* BRIFast Cash (pencairan tunai) oleh *walk-in customer.*
   b. Strategi Bisnis
      - Meningkatkan bisnis *inward* dan penetrasi kuat untuk bisnis *outward*.
      - Integrasi jaringan sistem perusahaan-perusahaan Global Money Transfer Operator (MTO) untuk memperluas peningkatan layanan.
      - Layanan *outward/transfer* internasional melalui *platform* aplikasi digital SuperApps untuk memperluas penetrasi pasar segmen ritel.
      - Perluasan jaringan ke koridor negara baru yang memiliki potensi *inward* oleh PMI.
      - Perluasan layanan remitansi bagi nasabah melalui fitur *inward/outward* dengan *tujuan e-wallet*, Agen BRILink, serta *digital saving.*

2. ***Banknotes Business***
   a. Prospek Usaha
      Seiring dengan dibukanya pintu wisata internasional maupun haji dan umroh membuat prospek bisnis *banknotes* semakin besar. Saat ini diversifikasi segmen bisnis *banknotes* ke segmen ritel semakin berkembang seiring dengan banyaknya wisatawan yang bepergian ke luar negeri dan masuknya wisatawan asing dari berbagai negara.
   b. Strategi Bisnis
      - Digitalisasi transaksi *money changer* melalui QRIS untuk mempermudah nasabah ritel yang hendak melakukan pembelian *banknotes* tanpa membawa uang tunai.
      - Kerjasama dengan Tour and Travel Haji dan Umroh untuk melayani kebutuhan SAR calon jamaah.

3. ***Correspondent Banking Business***
   a. Prospek Usaha
      Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta mendorong pembangunan melalui proyek strategis pemerintah yang membutuhkan peran perbankan dalam penerbitan bank garansi atas *counter guarantee* dari bank koresponden.
   b. Strategi Bisnis
      - Berkontribusi aktif pada proyek strategis pemerintah dalam penyediaan layanan penerbitan bank garansi atas *counter guarantee* dari bank koresponden dan melakukan kolaborasi aktif dengan *regional office* BRI dan *overseas channel* BRI dalam rangka meningkatkan *business referrall* bank garansi atas *counter guarantee.*

- Optimalisasi *yield enhancement* atas transaksi *correspondent banking business* yang menghasilkan *interest income*.
- Aktif berkoordinasi dengan Treasury Business Division dan *Asset and Liabilities* Management Desk BRI terkait likuiditas dan volatilitas suku bunga.

4. ***Overseas Channel Management and Development***
   a. Strategi Bisnis
      - *Sharpen Overseas Channel Strategy*
        Optimalisasi *asset* dan *liabilities* pada *overseas channel* sebagai *source of new growth engine* untuk BRI.
      - Penyusunan Kajian/*Feasibility Study* Pengembangan *Overseas Channel*
      - Penyusunan kajian dalam menetapkan wilayah baru dengan potensi bisnis untuk pengembangan *overseas channel* BRI di luar negeri.
      - Program *Internship* Pekerja BRI Kantor Pusat ke *Overseas Channel*
        Program pengembangan untuk pekerja BRI dalam rangka meningkatkan kapabilitas *human capital* BRI serta membantu *overseas channel* untuk mengembangkan aktivitas bisnis di luar negeri.
      - Digitalisasi layanan *Overseas Channel*
        Pengembangan layanan perbankan digital untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transaksi nasabah di luar negeri.
      - Perluasan jaringan *Overseas Channel* di Timor-Leste Perluasan jaringan *overseas channel* di Timor-Leste melalui pembukaan *sub-branch* baru.
      - Meningkatkan *business referral* dari *Overseas Channel*
      - Meningkatkan *business referral* dari *overseas channel* dengan menjadi *business catalyst* bagi segmen bisnis lainnya.

5. ***Bank Line Management***
   a. Strategi Bisnis
      - *Enhancement* aplikasi *Bank Line Analysis System* (BLAST) untuk mempercepat prakarsa dan putusan *bank line*.
      - Digitalisasi *Customer Profitability Analysis* (CPA) untuk *bank line* untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi penghitungan.
      - Dukungan optimal dalam pemberian *bank line* yang mendukung kebutuhan *International Business* dan *Treasury* dengan tetap menjaga kualitas kredit.
      - Banking *industry update* untuk negara yang memiliki eksposur atau risiko tinggi.

BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal (*Investment Services Business*) fokus pada pengembangan jasa penunjang investasi pada dua ekosistem bisnis, yaitu ekosistem *human resources* bagi nasabah dan ekosistem penunjang investasi pasar modal. Pada ekosistem *human resources*, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui produk BRIFINE (BRI *Future Investment*) membantu nasabah baik korporasi maupun individu untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa purnakarya. Pada ekosistem penunjang investasi pasar modal, BRI memiliki beberapa layanan unggulan yaitu jasa bank kustodian, *trustee* dan wali amanat, serta bank pembayar dan bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Produk dan jasa yang ditawarkan Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal di antaranya sebagai berikut:

1. **DPLK BRI**
   Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) DPLK BRI merupakan suatu organisasi yang berada di bawah naungan pendirinya, dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Direksi BRI bertindak sebagai Pengurus DPLK BRI dan Dewan Komisaris BRI sebagai Dewan Pengawas DPLK BRI. DPLK BRI mulai beroperasi sejak 9 Januari 2006 dan telah mengelola dana Peserta selama kurang lebih 18 tahun dengan aset per Desember 2024 sebesar Rp23,59 triliun. DPLK BRI tidak hanya mengoptimalkan pemasaran pada sektor korporasi namun juga berperan serta dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun yang ada di Indonesia melalui serangkaian kegiatan pemasaran dan sosialisasi kepada nasabah mikro. Salah satu bentuk nyata hal tersebut adalah dengan adanya produk SIMPEDES BISA yang kita peruntukan untuk nasabah mikro, dalam SIMPEDES BISA tersebut terdapat fitur dan produk DPLK BRI sebagai produk Investasi.

   DPLK BRI merupakan DPLK dengan produk terlengkap di Industri, sampai dengan sekarang DPLK dapat mengelola Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dapat diikuti secara Individu maupun Korporat atau kerjasama, Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca Kerja (PPDKP) yang dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pencadangan Dana Pesangon/Dana Pascakerja bagi Perusahaan. Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK) sebagai pencadangan Dana Kesehatan bagi Perusahaan. Selain itu, DPLK BRI memiliki pilihan investasi yang lengkap dan beragam yang dapat dipilih oleh Peserta antara lain BRIFINE Pasar Uang, BRIFINE Pendapatan Tetap, BRIFINE BRI Saham, BRIFINE BRI Pasar Uang Syariah, BRIFINE BRI Berimbang Syariah. Untuk pilihan paket investasi konvensional, DPLK BRI juga memiliki fitur Kombinasi dimana Peserta dapat menentukan sendiri kombinasi yang diinginkan sesuai dengan *risk profile* masing-masing peserta.

2. **Jasa Wali Amanat**
   BRI telah mendapatkan izin untuk bertindak sebagai wali amanat dengan terdaftar di Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No.08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. BRI telah berpengalaman dalam bertindak sebagai wali amanat dan telah mendapat kepercayaan dari berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan

dan korporasi lainnya dalam hal penerbitan obligasi, sukuk dan MTN. BRI memahami betul tugasnya sebagai jasa wali amanat dengan mewakili dan melindungi kepentingan para pemegang obligasi, sukuk atau MTN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian perwaliamanatan.

3. **Jasa *Trustee***
   BRI merupakan Bank Pertama di Indonesia yang memperoleh Persetujuan Prinsip (Surat BI No.15/19/DPB1/PB1-3) dan Surat Penegasan (Surat BI No.15/30/DPB1/PB1-3) dari Bank Indonesia untuk dapat menjalankan layanan jasa *trust* pada bulan Maret 2013. Jasa yang disediakan oleh BRI Trust antara lain *payment agent* (agen pembayaran), *investment agent* (agen investasi) dam *borrowing agent* (agen pinjaman)
4. **Jasa Kustodian**
   BRI telah menjalankan usaha sebagai Bank Kustodian sejak Tahun 1996 dan menjadi lima Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Pelayanan Kustodian BRI adalah jasa penitipan dan administrasi surat-surat berharga. Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah oleh BRI dari jasa kustodian tersebut adalah:
   a. *Customization*, layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah termasuk dalam hal laporan yang dapat diselaraskan dengan kebutuhan.
   b. *One stop service*, layanan terpadu satu pintu melalui *relationship officer* yang memberikan kenyamanan bagi nasabah.
   c. *Reliable*, didukung dengan sistem Teknologi Informasi yang andal oleh tim *accounting, tax and reporting, settlement,* dan *compliance* yang berpengalaman.
   d. *Experienced*, berpengalaman mengelola berbagai jenis efek, reksa dana, unit link, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), efek beragun aset dan *private placement*.
   e. *Global network*, terhubung dengan jaringan in*ternational central securities depository euro clear* untuk transaksi efek global.
   f. *Competitives fees*, imbalan jasa kustodian yang disesuaikan dengan kompleksitas layanan.
   g. Jaringan kerja luas, kustodian BRI bekerjasama dengan MI terpercaya dan juga dengan seluruh jaringan kerja BRI yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri yang siap untuk membantu menemukan solusi kebutuhan investasi nasabah.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Fee Based Income	**322.624**	286.614	36.010	12,56%
Aset Kelolaan Kustodian	**1.288.847.232**	555.527.157	733.320.075	132,00%
Aset Kelolaan DPLK	**23.594.974**	20.038.653	3.556.321	17,75%

Fee based income bisnis jasa penunjang pasar modal tahun 2023 sebesar Rp322,62 miliar, meningkat 12,56% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp286,61 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan penambahan *customer/client* dengan strategi kolaborasi dengan Divisi BRI dan transformasi *digital*.

Strategi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal Tahun 2023

Pada tahun 2023 Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal fokus pada peningkatan digitalisasi dan kualitas proses bisnis melalui pengembangan aplikasi dan sertifikasi bertaraf International sehingga dapat menyediakan *operational excellence* bagi nasabah.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal fokus dalam pengembangan jasa penunjang investasi pada dua ekosistem bisnis, yaitu ekosistem *human resources* bagi nasabah dan ekosistem penunjang investasi pasar modal. Pada ekosistem *human resources*, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui produk BRIFINE (BRI *Future Investment*) membantu nasabah baik korporasi maupun individu untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa purnakarya. Pada ekosistem penunjang investasi pasar modal, BRI memiliki beberapa layanan unggulan yaitu jasa bank kustodian, *trustee* dan wali amanat, serta bank pembayar dan bank administrator RDN.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal Tahun 2024

Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun 2024 karena risiko adanya resesi global, tekanan inflasi yang masih tinggi serta konflik geopolitik. BRI terus berupaya meningkatkan kinerja Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal dengan berfokus pada inistiatif transformasi proses bisnis, menciptakan *new souce of growth* dan *new business model* agar terus berkontribusi terhadap kinerja BRI dengan tetap memperhatikan *governance* dan *risk management*. Peningkatan sinergi baik dengan bisnis lainnya di BRI maupun dengan Perusahaan Anak juga menjadi salah satu fokus dalam optimalisasi produk, layanan dan potensi pendapatan.

Perusahaan Anak

Segmen Bisnis Perusahaan Anak meliputi perbankan konvensional, layanan pembiayaan, layanan remitansi, asuransi jiwa, asuransi umum, modal ventura sekuritas dan manajemen investasi. BRI memiliki 10 (sepuluh) Perusahaan Anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), BRI Global Financial Services Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Limited Hong Kong), PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama, PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur), PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management). Uraian Kinerja Perusahaan Anak BRI disajikan sebagai berikut.

PT BANK RAYA INDONESIA TBK (BANK RAYA)

Sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 telah memberikan Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat (1) melakukan perubahan nama Perseroan, semula "PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk" dengan nama komersial BRI AGRO, menjadi "PT Bank Raya Indonesia Tbk" dengan nama komersial Bank RAYA.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Bank Raya Indonesia Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Total Aset	**12.492.372**	13.494.884	(1.002.512)	(7,43%)
Total Kredit	**6.893.331**	7.766.644	(873.313)	(11,24%)
- *OS* Kredit *Digital*	**1.261.387**	917.893	343.494	37,42%
- Penyaluran Kredit *Digital*	**10.827.192**	5.662.256	5.164.936	91,22%
Total Dana Pihak Ketiga	**8.186.875**	9.817.090	(1.630.215)	(16,61%)
- *Volume* Dana Digital	**1.200.367**	616.066	584.301	94,84%

Pada tahun 2021, Bank Raya memulai transformasi menjadi *bank digital* dengan menyediakan layanan produk *digital* yang memiliki karakteristik *ticket size* kecil (*smaller*), jangka waktu pendek (*shorter*) dan layanan cepat berbasis *digital* (*faster*). Transformasi ini mempunyai tujuan untuk dapat secara optimal menangkap peluang bisnis segmen UMKM di Indonesia, utamanya dengan fokus memberikan layanan perbankan *digital* kepada segmen mikro dan kecil. Dengan adanya proses transformasi yang berfokus pada pengembangan bisnis *digital*, menyebabkan perubahan pada struktur *portfolio* aset dan liabilitas Bank Raya, yaitu komposisi aset dan liabilitas berbasis *digital* semakin meningkat dibandingkan dengan portofolio non *digital*.

Pada tahun 2023, kinerja produk *digital* Bank Raya terus menunjukkan perbaikan. Kredit *digital* Bank Raya secara konsisten terus meningkat dari Desember 2022 sebesar Rp917,89 miliar menjadi sebesar Rp1,26 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 37,42%, sehingga dengan komposisi terhadap total kredit yang juga meningkat dari Desember 2022 sebesar 11,82% menjadi sebesar 18,30% pada Desember 2023. Bahkan apabila dilihat dari nominal penyaluran kredit *digital* juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari Desember 2022 sebesar Rp5,66 triliun menjadi sebesar Rp10,83 triliun atau tumbuh sebesar 91,22%. *Volume* dana *digital*, berhasil meningkat dari Desember 2022 sebesar Rp616,07 miliar menjadi sebesar Rp1,20 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 94,84%, dengan komposisi terhadap total simpanan meningkat dari Desember 2022 sebesar 6,28% menjadi sebesar 14,66% pada Desember 2023.

Pertumbuhan kredit *digital* dan dana *digital* tersebut menunjukkan bahwa transformasi Bank Raya menjadi bank *digital* telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap struktur portofolio bisnis Bank Raya. Namun demikian, proses transformasi yang berfokus pada pengembangan bisnis *digital* membawa perubahan pada total portofolio bisnis Bank Raya. Tercatat total aset Bank Raya turun dari Desember 2022 sebesar Rp13,49 triliun menjadi sebesar Rp12,49 triliun pada Desember 2023 atau turun sebesar 7,43%, penurunan tersebut didorong oleh penurunan kredit non *digital* sehingga Total kredit dari Desember 2022 sebesar Rp7,77 triliun menjadi Rp6,89 triliun pada Desember 2023 atau turun sebesar 11,24%, sedangkan total simpanan menyesuaikan penurunan total kredit dari Desember 2022 sebesar Rp9,82 triliun menjadi sebesar Rp8,19 triliun atau turun sebesar 16,61%.

Strategi PT Bank Raya Indonesia Tbk Tahun 2023

Arah kebijakan Bank untuk mencapai "*The Best Digital Bank by Becoming House of Fintech and Home for Gig Economy*" ditempuh dengan cara:

1. Meningkatkan pertumbuhan *digital lending and digital saving* (*trajectory growth*: *fast exponential*). Dengan metode akuisisi *digital lending* yaitu berbasis *ecosystem partnership* (B2B2C), sedangkan digital *saving* berbasis *ecosystem partnership* (B2B2C) dan akuisisi *end-user* (B2C).
2. *Milestone* seluruh produk *digital* secara *end-to-end*, mengarah kepada layanan *fully digital*.
3. Melakukan pengembangan produk dan fitur secara berkelanjutan, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat setara dengan *bank digital* lokal dan global.
4. Melakukan aktivasi terhadap seluruh nasabah, sehingga dapat meningkatkan *Customer Lifetime Value* (CLTV).
5. Melanjutkan proses *revamp* baik dari sisi portofolio bisnis (pinjaman dan simpanan), unit kerja (*open, close, repurposed, relocate*), *people (re-train dan re-skill)*, serta *corporate culture*. Implementasi proses *revamp* dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan terhadap kinerja keuangan bank.
6. Proses akuisisi nasabah dilakukan melalui dua metode yaitu *Online to Offline* (O2O) melalui dan *ecosystem partnership* dengan menggunakan API. Secara komposisi proses *community branch* akuisisi akan sebagian besar dilakukan melalui metode *ecosystem partnership* oleh *head office*, karena perusahaan akan melakukan *scale up business* berbasis *ecosystem partnership*.
7. Meningkatkan *employee engagement* melalui transformasi *corporate culture*, sehingga dapat menurunkan *turnover* pekerja di luar pekerja yang terdampak proses *revamp* unit kerja.
8. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *digital bank*, utamanya melalui peningkatan di aspek teknologi informasi, data, *talent*, dan organisasi.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Bank Raya Indonesia Tbk

Dalam mengupayakan pencapaian target-target usahanya, Bank Raya memiliki beberapa faktor kekuatan utama sehingga mampu bersaing di industri perbankan Indonesia, yaitu:

1. *Bank digital* dengan jaringan O2O yang kuat di seluruh Indonesia dengan sinergi BRI Group
2. Produk *digital saving* dengan berbagai fitur dan kemudahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta produk *digital lending* yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, dana talangan untuk usaha produktif, *invoice/vendor financing*, serta *supply chain financing* bagi segmen mikro dan kecil.
3. Bank Raya merupakan bagian dari BRI Group, sehingga dapat mengoptimalkan potensi bisnis BRI Group di Segmen UMKM antara lain untuk segmen pinjaman melalui kerjasama pada ekosistem Agen BRILink, Pekerja dari perusahaan yang ber-*payroll* di BRI, *supply chain* dari bisnis BRI Group, serta untuk segmen simpanan melalui kolaborasi Raya dan aplikasi BRImo, transaksi *cash in cash out* melalui *e-channel* BRI dan Agen BRILink.
4. Kapabilitas teknologi dan informasi yang semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang solid antara lain melalui pengembangan *big data technology*, pengembangan *Fraud Detection System* (FDS), pengembangan *credit scoring engine* dengan *automated machine learning*, layanan berbasis IT yang handal dan tersertifikasi ISO 27001 *Certification*, layanan IT dengan fitur dan keamanan berupa *two factor authentication, transaction notification, biometric authentication*, dan limit *monitoring*, serta pengembangan *customer complaint handling* melalui Aplikasi Sapa Raya.

Prospek Usaha dan Strategi PT Bank Raya Indonesia Tbk Tahun 2024

1. **Prospek Usaha**
   a. Dominasi penduduk usia produktif yaitu usia 15 - 64 tahun yang berjumlah 190,98 juta jiwa atau sebesar 69,25% dari total penduduk Indonesia sebesar 275,77 juta jiwa. Dengan jumlah usia produktif yang besar dalam populasi di Indonesia, diharapkan mendorong tingkat permintaan terhadap produk dan jasa keuangan (pengelolaan keuangan, pinjaman, investasi, dan sebagainya) termasuk perbankan *digital*.
   b. Akses internet yang semakin luas ke seluruh Indonesia, saat ini pengguna internet telah mencapai 212,9 juta dari total penduduk Indonesia dan dapat menjadi *driver* bagi pertumbuhan ekonomi *digital*.
   c. Jumlah pengguna *smartphone* Indonesia sebesar 355 juta, atau sekitar 129% dari total populasi masyarakat Indonesia, sehingga dapat membuka peluang luas untuk ekspansi produk-produk *digital* yang berbasis aplikasi dengan *device* utama yaitu *smartphone*.
   d. Jumlah penduduk *unbanked* atau penduduk yang belum memiliki rekening bank sebesar 97,74 juta jiwa atau sebesar 48% dari populasi penduduk dewasa Indonesia, sehingga membuka peluang besar bagi *Bank Digital* untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui teknologi perbankan *digital* yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas tanpa unit kerja fisik.
2. **Strategi**
   Strategi Bank Raya pada tahun 2024 adalah fokus memperkuat fundamental bisnis dan fokus pada perbaikan kualitas aset dan simpanan, melalui optimalisasi ekosistem bisnis internal BRI Group. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan selama periode *strengthening* adalah sebagai berikut:
   a. Memperkuat *value proposition* dari produk *digital saving* melalui pengembangan:
      - *Raya for business* untuk pengelolaan dana, transaksi, dan *payroll* pelaku usaha
      - *Raya for youth* untuk pengelolaan dana dan transaksi generasi muda
      - *Raya for community* untuk pengelolaan dana dan transaksi komunitas

- *Virtual card*
- *Financial wealth management* melalui pengembangan fitur investasi dan DPLK.

b. Memperkuat *Value Proposition* dari Produk *digital lending* melalui *Enhancement* produk *Digital Lending* antara lain:
   - Integrasi produk *digital lending* dengan partner khususnya *digital platform provider.*
   - Perluasan struktur produk *digital lending* sesuai dengan kebutuhan nasabah.

c. Implementasi *hybrid collection* dengan mengkombinasikan teknologi dan manusia.

d. Melanjutkan pengembangan dan pemasaran Raya Open API, *Acquiring* QRIS.

e. Melakukan pengembangan layanan laku pandai untuk meningkatkan inklusi keuangan.

f. Melakukan pengembangan *embedded finance*.

g. Melakukan integrasi antara teknologi dan bisnis melalui pengembangan *fraud detection* untuk seluruh produk *digital*.

h. Melakukan *enhancement* atas *credit scoring engine* melalui utilisasi *machine learning* untuk produk *digital lending*.

i. Melakukan *enhancement* dan pengembangan Infrastruktur teknologi bank.

j. Meningkatkan proses *governance* melalui penyusunan dan evaluasi kebijakan pendukung antara lain *market conduct*, kelayakan kemitraan/*partner*, dan kebijakan lainnya.

k. Penguatan fungsi *second line of defense* dan peningkatan budaya sadar risiko melalui implementasi *risk culture framework*.

BRI GLOBAL FINANCIAL SERVICE COMPANY LIMITED

RUPS BRI Remittance Company Limited tanggal 14 November 2019 telah menyetujui perubahan nama Perusahaan dari "BRI Remittance Company Limited" dengan nama komersial BRI Remittance, menjadi bernama "BRI Global Financial Services Company Limited" dengan nama komersial BRI Global Finance. Perubahan nama perusahaan ini sebagaimana tercantum dalam *Certificate of Change Name* No. 961091 dengan No. Ref. 40021194025 oleh *Company Registry* Hong Kong pada tanggal 30 Oktober 2023. Jeda waktu yang cukup lama antara putusan *shareholder* dengan pelaksanaan putusan dikarenakan adanya aksi protes serta demonstrasi terkait dengan ex*tradition and national security law* pada 2019 serta pandemi dan kebijakan *lockdown* Pemerintah Hong Kong pada 2020-2022 yang menyebabkan beberapa layanan Pemerintah dan otoritas Hong Kong membutuhkan waktu yang lebih lama dari SLA standar.

Tabel Kinerja (Produktivitas) BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset (dalam HKD)	**12.296.119**	9.006.320	3.289.799	36,53%
Aset (dalam miliar Rupiah)	**24,23**	17,98	6,25	34,76%
Jumlah Transaksi	**463.063**	295.686	167.377	56,61%
Nominal *Amount* Transaksi (HKD)	**1.256.912.406**	766.974.922	489.937.484	63,88%

Catatan: Kurs HKD 1 per 31 Desember 2023 = Rp1.970,725

Aset BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong tahun 2023 sebesar Rp24,23 miliar, meningkat 34,76% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp17,98 miliar. Peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari laba yang meningkat yang sepenuhnya ditahan sehingga berdampak pada kenaikan aset. Selain itu, peningkatan aset pada tahun 2023 juga dipengaruhi oleh pencatatan *right-of-use asset* dari *premises* yang disewa oleh BRI Global Financial Services Co Ltd sesuai dengan ketentuan HKFRS16 (PSAK 73) yang berdampak signifikan pada peningkatan aset secara keseluruhan.

Pendapatan BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong tahun 2023 sebesar Rp20,42 miliar, meningkat 43,60% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp14,22 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut adalah bukti kesuksesan transformasi perusahaan sesuai dengan *blueprint* BRIvolution 2.0 dengan objek transformasi yaitu *business model* dan digitalisasi. Pada transformasi *business model*, BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong berhasil menumbuhkan *new source growth engine* dengan melayani transaksi *foreign exchange remittance company* di Hong Kong dan di luar Hong Kong seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Brunei Darussalam, dan UAE. Selain itu perusahaan juga telah memperoleh lisensi *money lender*, sehingga saat ini BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong dapat melayani bisnis pinjaman dan *trade finance*. Sedangkan untuk aspek *digital*, BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong telah melakukan digitalisasi proses bisnis melalui penyediaan portal *digital (webbapp)* serta aplikasi RemitGo! kepada nasabah. Digitalisasi proses bisnis melalui portal *digital* dan aplikasi tersebut semakin meningkatkan frekuensi dan memperlancar *flow* transaksi, meningkatkan kapasitas transaksi, meningkatkan level *user experience* dan kualitas layanan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong.

Laba bersih BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong tahun 2023 tercapai sebesar Rp4,24 miliar meningkat sebesar 52,36% dari 2022 sebesar Rp2,75 miliar. Peningkatan tersebut ditopang pendapatan di 2023 yang semakin meningkat. Selain itu *new source engine growth* untuk produk pinjaman juga berdampak pada *trickle down* produk-produk lainnya, sehingga meningkatkan pendapatan secara signifikan. Digitalisasi juga berdampak pada efisiensi proses bisnis, sehingga BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong mampu menjaga *operational expense* dan level BOPO selama 2023.

Strategi BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong Tahun 2023

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan *money lender license* dari otoritas Hong Kong, sebagai upaya dalam pengembangan bisnis (*new source engine growth*) berupa pelayanan pinjaman (*lending*) bagi perorangan dengan target *market* Pekerja Migran Indonesia, pemberian layanan *short term financing* kepada *remittance companies* yang membutuhkan dana saat hari libur perbankan, serta pemberian layanan *trade financing (invoice financing)* kepada importir *Small Medium Enterprises* (SME) *Indonesian related* di Hong Kong.
2. Melakukan diversifikasi *source of income* dengan menjadi penyedia *dealing forex solution* bagi *counterpart* BRI Global Financial Services dan *counterpart* di BRI.
3. Melakukan kerja sama dengan *counterpart* untuk koridor baru seperti Jepang, Macau, Taiwan, Korea, serta Filipina.
4. Perubahan nama perusahaan dari BRI Remittance Company Ltd menjadi BRI Global Financial Services Co Ltd sebagai salah satu bentuk *corporate* strategi untuk bertransformasi dengan pengembangan bisnis model sesuai dengan aspirasi *shareholder* pada *blueprint* BRIvolution 2.0

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong

BRI Global Financial Services dengan produk *remittance*-nya telah menjadi pilihan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong selama bertahun-tahun untuk mengirimkan uang ke keluarga mereka di Indonesia. Menjadi bagian dari BRI Group merupakan *competitive advantage* dari BRI Global Financial Services, nasabah BRI Global Financial Service juga merupakan nasabah simpanan dari BRI. Jaringan kerja BRI yang menjangkau sampai ke pelosok Indonesia menjadikan BRI Global Financial Services sebagai pilihan utama PMI untuk melakukan pengiriman uang ke Indonesia secara *real time online* ke rekening BRI mereka dan keluarga mereka di Indonesia. Dengan dukungan sistem dan layanan yang terintegrasi dengan Induk (BRI), BRI Global Financial Services dapat memberikan *additional services* kepada para PMI seperti layanan cek saldo, cetak buku rekening, cetak rekening koran, dan layanan lainnya kepada para PMI di Hong Kong. Selain itu, nilai tukar di BRI Global Financial Services adalah salah satu *best rate* (HKD/IDR) di Hong Kong. BRI Global Financial Services ingin memberikan layanan terbaik serta menjadi *one stop solution* bagi PMI di Hong Kong. Perusahaan terus berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan, seperti aplikasi remitGo! untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan telah diperolehnya lisensi *money lender* dari otoritas Hong Kong, maka BRI Global Financial Service juga dapat memberikan layanan pinjaman kepada nasabah perorangan khususnya kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang membutuhkan dana darurat, baik di Hong Kong maupun untuk keperluan remitansi kepada keluarganya di Indonesia. Untuk nasabah non perorangan, saat ini Perusahaan dapat memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha *Small and Medium Enterprise* (SME) *Indonesian related* di Hong Kong. Kombinasi antara bisnis eksisting perusahaan (pengiriman uang atau remitansi) dari Hong Kong ke Indonesia dan bisnis pinjaman dengan target market nasabah *remittance* eksisting, memberikan keunikan keunggulan kompetitif tersendiri.

Prospek Usaha dan Strategi BRI Global Financial Services Co Ltd Hong Kong Tahun 2024

Beberapa ekonom memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7% - 2,9%. *Side effect* dari pandemi Covid-19 selama 2020-2022, serta kebijakan Hong Kong yang sangat konservatif terkait perubahan status pandemi menjadi endemi yang baru diputuskan pada tengah tahun 2023 menjadikan ketidakpastian kondisi saat itu yang berdampak juga terhadap permintaan tenaga kerja di Hong Kong. Secara tidak langsung, kondisi tersebut berpengaruh terhadap permintaan PMI di Hong Kong. Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai upaya optimalisasi serta diversifikasi *market* dan bisnis, maka pada tahun 2024 BRI Global Financial Services akan fokus menggarap *market* eksisting dengan dua produk unggulan yaitu *remittance* dan *new source engine growth* berupa layanan pinjaman melalui *channel digital* BRI Global Financial Services. *Upgrading* fitur dan *security level* pada *channel digital* (aplikasi) menjadi salah satu *strategic initiative* di 2024. Dengan *upgrade* tersebut diharapkan BRI Global Financial Services dapat menjaring lebih banyak potensi *market* di Hong Kong, serta meningkatkan penetrasi pasar dan *market share* di Hong Kong. Pertumbuhan *new customer base* dan fitur baru yang lebih *user friendly* dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah diharapkan dapat menghasilkan *revenue* bagi BRI Global Financial Service Co Ltd yang semakin besar dari *business cross border money transfer* dan *Loan.*

PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

Pada 6 Oktober 2015, BRI menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan pemegang saham PT Asuransi BRI Life (d/h PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera) untuk mengakuisisi 91,001% kepemilikan di BRI Life. Seluruh rangkaian aktivitas akuisisi selesai pada tanggal 29 Desember 2015 sesuai dengan Akta No 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H. sehingga BRI memiliki 91,001% saham BRI Life dan sisanya sebesar 8,999% dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI (YKP BRI). Pada 23 Februari 2017, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera berganti nama menjadi PT Asuransi BRI Life (BRI Life). Pada 2 Maret 2021, BRI Life resmi memiliki pemegang saham baru, yaitu FWD Financial Services Pte Ltd yang melakukan penambahan modal kepada BRI Life sebesar 936.458 lembar saham melalui penerbitan saham baru. Struktur pemegang saham BRI Life setelah transaksi tersebut yaitu: (63,83% atau 2.002.022 lembar saham), FWD (29,86% dengan 936.458 lembar saham), serta YKP BRI (6,31% atau 197.978 lembar saham). Perubahan struktur Pemegang Saham ini sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021. Pada tanggal 13 Oktober 2021, Pemegang Saham menyetujui pengalihan kepemilikan saham milik FWD Financial Services Pte. Ltd. kepada FWD Management Holdings Limited, sehingga struktur Pemegang Saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, YKP BRI 6,31%, dan FWD Management Holdings Limited 29,86%. Perubahan Struktur Pemegang Saham tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat No.S.93/NB.1/2021 tanggal 29 September 2021. Pada tahun 2022, BRI Life menerbitkan 255.549 lembar saham. Saham baru tersebut diambil seluruhnya oleh FWD Management Holdings Limited. Untuk mengambil bagian saham baru tersebut, FWD Management Holdings Limited telah menyetorkan uang sebesar Rp770 Miliar kepada BRI Life. Penerbitan saham tersebut mengubah komposisi kepemilikan pemegang saham menjadi BRI (59,02%), FWD Management Holdings Limited (35,14%) dan YKP BRI (5,84%). Perubahan kepemilikan saham telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 31/NB.11/2022 tanggal 28 Februari 2022.

Pada tahun 2023, BRI Life kembali mengalami perubahan komposisi pemegang saham. BRI Life menambahkan modal disetor sebesar Rp26.358.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp339.200.700.000 menjadi sebesar Rp365.558.700.000 yang diambil bagian oleh FWD Management Holdings Limited. Rencana perubahan kepemilikan PT Asuransi BRI Life telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor S-15/NB.02/2023 tanggal 26 Februari 2023. Penerbitan saham tersebut mengubah komposisi kepemilikan pemegang saham menjadi BRI 54,77%, FWD Management Holdings Limited 39,82% dan YKP BRI 5,42%. Kantor Pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama lt 15, Jl H.R Rasuna Said Blok X-1 No 1 dan 2, Jakarta, BRI Life juga memiliki 26 Kantor Layanan dan 1 Customer Care (Menara BRILiaN).

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Asuransi BRI Life

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**23.678.043**	21.627.641	2.050.402	9,48%
Ekuitas	**9.201.975**	7.866.323	1.335.652	16,98%
Pendapatan Premi	**7.703.536**	8.185.446	(481.910)	(5,89%)

Penambahan modal oleh FWD pada tahun 2023 sebesar Rp770 miliar berdampak pada peningkatan aset maupun ekuitas BRI Life. Pada akhir tahun 2023, ekuitas BRI Life tumbuh 16,98% menjadi Rp9,20 triliun. Selain itu, aset BRI Life mencapai Rp23,68 triliun atau tumbuh 9,48%. Premi Bruto BRI Life mengalami penurunan seiring dengan keberhasilan *shifting product* dari *unit linked* ke tradisional yang dilakukan oleh BRI Life serta penerapan *market conduct* yang semakin *proper* sehingga premi yang dihasilkan merupakan premi yang berkualitas serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi BRI Life.

Strategi PT Asuransi BRI Life Tahun 2023

Beberapa strategi utama BRI Life yang telah dijalankan di tahun 2023 guna mencapai target yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham antara lain:

1. BRI *Centralized Distribution Referral System* merupakan inisiatif strategi yang diambil oleh BRI Life dalam rangka meningkatkan produktivitas BFA. Sepanjang tahun 2023, produktivitas BFA tergolong rendah yang dicerminkan dengan tingkat *closing ratio* dan data *leads* yang cenderung menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya meskipun jumlah BFA telah meningkat. Inisiatif strategi ini telah *piloting* pada akhir tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan data *leads* yang merupakan bahan bakar bagi BFA untuk melakukan produksi agar lebih terpusat dan sistematis dari sumber data di kantor pusat hingga ke tangan BFA.
2. Perbaikan proses bisnis dalam penjualan produk asuransi sehingga produk yang dijual sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan dengan menentukan segmentasi produk yang sesuai dengan segmentasi nasabah yang ada. Sebagai salah satu cara peningkatan *persistency ratio*, BRI Life mengeluarkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan cara pembayaran dibayar di muka. Selain itu, juga dilakukan peningkatan frekuensi

penagihan untuk pembayaran premi lanjutan. Keselarasan produk dan cara bayar sesuai dengan kemampuan nasabah merupakan kunci agar profitabilitas terus bertumbuh dan *persistency ratio* dapat meningkat.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Asuransi BRI Life

BRI Life berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah. Salah satu strategi yang dilakukan pada tahun 2023 adalah pengembangan layanan kepada nasabah, khususnya layanan kesehatan melalui *launching contact center* untuk *third-party administrator* (TPA) sebagai salah satu bagian dari rencana BRI Life untuk membentuk TPA sendiri agar penyelesaian klaim dapat berjalan lebih efektif dan efisien. BRI Life juga meluncurkan produk baru yang menyesuaikan kebutuhan nasabah pada setiap segmentasi nasabah yang ada. Dalam rangka perbaikan proses bisnis, BRI Life melakukan pengembangan pada proses klaim serta *digiform* sehingga SLA Klaim menurun dari 12 - 14 hari kerja menjadi 5 - 8 hari kerja. Fitur profil nasabah juga dikembangkan untuk menjamin kerahasiaan data nasabah dengan merujuk pada regulasi perlindungan data pribadi. Dari segi proses pemasaran produk, BRI Life melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga pemasar dengan program BRI *Centralized Distribution Referral System* yang mengintegrasikan sistem di BRI Life dengan BRI untuk menyediakan data *leads* sebagai bahan bakar tenaga pemasar yang tersistemasi dengan baik. Demi mewujudkan bisnis yang berkelanjutan, BRI Life juga menerapkan kebijakan *green office* yang sesuai dengan regulasi untuk mengurangi penggunaan kertas, listrik, dan bahan bakar minyak. BRI Life juga telah menyusun *roadmap Environmental, Social,* and *Government* (ESG) BRI Life untuk jangka panjang yang mengacu pada nilai Sustainable Development Goals (SDGs).

Prospek Usaha dan Strategi PT Asuransi BRI Life Tahun 2024

Pada tahun 2024 BRI Life menargetkan peningkatan kontribusi berupa FBI dan Laba kepada BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali BRI Life. Untuk itu, BRI Life akan fokus dalam mengoptimalkan pontensi bisnis dari seluruh kanal penjualan. BRI Life menargetkan pertumbuhan premi sekitar 15% serta penjagaan ketat tingkat OPEX/TWPI. Beberapa strategi BRI Life guna mencapai target yang ditetapkan Pemegang Saham pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Potensi Bisnis Seluruh Kanal Pemasaran**
   BRI Life terus berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan demi memberi ketenangan bagi seluruh nasabahnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, BRI Life bertekad mengoptimalkan lima kanal pemasaran BRI Life pada tahun 2024 melalui perbaikan *customer journey* dan peningkatan penjualan produk asuransi digital. BRI Life juga melakukan resegmentasi untuk meningkatkan proporsi penjualan pada segmen prioritas, meningkatkan penetrasi bisnis pada segmen potensial seperti mikro dan ultra-mikro, serta memperkuat pondasi bisnis *telemarketing.*
2. **Peningkatan Pelayanan Prima kepada Nasabah**
   BRI Life terus berkomitmen dalam mewujudkan cita-cita menjadi "*The 1st Service Excellent*" melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Efisiensi dan efektivitas proses bisnis tersebut dimulai dengan digitalisasi dalam proses bisnis dari hulu ke hilir yang dimulai dari proses *underwriting* hingga proses klaim. Sigitalisasi tersebut dibersamai dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
3. **Dukungan Teknologi**
   Penguatan dukungan teknologi dalam pengembangan produk dan operasioal bisnis yang dinamis, gesit, serta tangguh merupakan kunci bagi BRI Life untuk menghadapi tantangan bisnis ke depannya. Kunci tersebut dimulai dari modernisasi arsitektur aplikasi, transformasi infrastruktur IT, penguatan keamanan *cyber,* serta *next generation* untuk manajemen data. Hal tersebut harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik serta budaya sadar akan keamanan teknologi dan informasi.
4. **Dukungan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**
   Pengembangan sumber daya manusia, baik dari segi karir maupun kompetensi, merupakan kunci bagi BRI Life dalam menjalankan operasional bisnis yang tumbuh berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Pengembangan sumber daya manusia tersebut merujuk pada implementasi kebijakan *Talent Mobility* BRI Group 2.0. agar pengembangan karir dapat terlaksana dengan baik dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. BRI Life juga telah menyusun *roadmap environmental, social, and governance* (ESG) untuk memastikan operasional bisnis yang berjalan sesuai dengan koridor yang ada dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahun 2023, BRI Life telah memulai *roadmap* tersebut dengan kebijakan *green office* dan ke depannya akan membentuk fungsi ESG serta Komite ESG untuk melakukan *campaign*.

PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

Aset BRI Finance Desember 2023 sebesar Rp9,06, meningkat 23,70% dibandingkan dengan Desember tahun 2022 yang sebesar Rp7,32 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan positif pada piutang pembiayaan konsumer dengan nilai Rp6,33 triliun naik sebesar 26,80%. Pendapatan BRI Finance Desember tahun 2023 sebesar Rp1,24 triliun, meningkat 38,87% dibandingkan dengan Desember tahun 2022 yang sebesar Rp890,6 miliar. Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari penyaluran pembiayaan baru BRI Finance pada tahun 2023 mencapai Rp5,51 triliun yang terdiri dari pembiayaan bisnis komersial sebesar Rp1,27 triliun, pembiayaan bisnis *Operating Lease* (OPL) sebesar Rp754,18 miliar dan pembiayaan bisnis konsumer sebesar Rp3,48 triliun. Total penyaluran pembiayaan naik sebesar 7,97% yoy khususnya pada penyaluran bisnis konsumer *high yield segment* mobil bekas dan *refinancing* naik sebesar 87,22% dan 95,76% selaras dengan aspirasi dan tujuan BRI Finance untuk meningkatkan proporsi pembiayaan *high yield segment* sebagai langkah untuk meningkatkan profitablitas. Laba bersih BRI Finance Desember tahun 2023 meningkat sebesar

22,68% dari Rp83,84 miliar di Desember tahun 2022 menjadi Rp102,85 miliar di Desember tahun 2023. Peningkatan tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi nasional dan kinerja pembiayaan di industri mulai tumbuh optimal dan strategi BRI Finance untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan *strategic initiatives* di tahun 2023.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Multifinance Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**9.057.071**	7.321.870	1.735.201	23,70%
Pembiayaan (*gross*)	**7.917.078**	6.710.638	1.206.440	17,98%
Pembiayaan Konsumer	**6.330.730**	4.992.586	1.338.144	26,80%

Strategi PT BRI Multifinance Indonesia Tahun 2023

Di tahun 2023, BRI Finance akan meningkatkan pelayanan dengan menambah 9 (sembilan) *point of sales* dan memperkuat 30 titik *captive* di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pelayanan kepada debitur melalui percepatan proses pembiayaan, sehingga penyaluran fasilitas kepada debitur menjadi lebih efektif dan efisien. Pemasaran produk BRI Finance tahun 2023 akan dilakukan melalui *joint marketing campaign* guna mendukung peningkatan pembiayaan dengan penggunaan biaya operasional yang efektif dan efisien. Promosi tersebut dilakukan BRI Finance bersama *dealer* dan *supplier* sekaligus ditujukan untuk perluasan jaringan kerjasama dan meningkatkan *brand awareness* BRI Finance ke seluruh wilayah Indonesia.

Pengembangan sistem pendukung operasional bisnis dari aspek teknologi informasi yang akan dilakukan BRI Finance tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Digital signature* dan *e-contract*, dengan tujuan utama pengembangan fitur *digital signature* and *e-contract* adalah *customer satisfaction,* dan peningkatan produktivitas tenaga pemasar di lapangan. Fitur yang terdapat di dalam aplikasi MyBRIF ini memudahkan proses penandatanganan yang dilakukan debitur pada kontrak *digital* yang teruji keabsahannya, selain itu debitur dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pembiayaannya melalui aplikasi MyBRIF.
2. *New Mobile Order* (NEMO), manfaat yang dirasakan Perusahaan dari pengembangan *tools* ini antara lain yaitu proses percepatan *Service Level Agreement* (SLA), peningkatan aset, fasilitas *leads* yang bersumber dari MyBRIF maupun *marketplace* dan *monitoring* tenaga pemasar dapat diakomodasikan dengan optimal.
3. *Credit risk scoring*, pengembangan dilakukan agar penyaluran pembiayaan multiguna lebih komprehensif untuk mendapatkan model *scoring* berdasarkan jenis aset (*new car and used car*) yang lebih prediktif dan berdaya guna untuk penetapan *risk pricing* dan *portfolio management* strategi Perusahaan.
4. *Collection scoring*, yang bertujuan mempermudah pengklasifikasian prioritas *collection* pada setiap debitur dengan menggunakan *data credit history and installment history* debitur, serta *machine learning*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT BRI Multifinance Indonesia

Sesuai dengan aspirasi pemegang saham, keunggulan kompetitif yang dimiliki BRI Finance yakni sebagai *single gateway auto loan* BRI Group. Selain itu, BRI Finance menjadi *main provider* produk pembiayaan kendaraan listrik, sebagai bentuk komitmen BRI Group dalam mendukung kebijakan Pemerintah mengenai percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Keberlanjutan ekspansi BRI Finance melalui penempatan tenaga pemasar pada jaringan unit kerja BRI, sampai dengan tahun 2023 lebih dari 180 unit kerja telah ditempatkan untuk menjangkau potensi di seluruh Indonesia. Strategi jangka menengah BRI Finance merupakan bagian dari perjalanan panjang transformasi digital menuju "*Empowering Autoloan Financing*" di tahun 2025. Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, BRI Finance menyadari akan menghadapi tantangan digitalisasi yang disertai dengan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi di industri pembiayaan. Pergeseran ekspektasi pelanggan tersebut mengubah pola kerjasama, kemudahan proses, serta layanan yang lebih *seamless* sesuai dengan *customer behavior*. BRI Finance akan meningkatkan investasi di bidang teknologi informasi melalui pengembangan dan *enhancement* berbagai *platform* pendukung aktivitas bisnis internal, antara lain *core financial system* sebagai akomodasi aktivitas BRI Finance, *e-General Ledger* (eGL) yang mendukung penyusunan laporan keuangan BRI Finance, berbagai *tools* akuisisi pembiayaan di semua segmen, serta berbagai *platform* penunjang lainnya. Dalam rangka memperkuat transformasi *digital* yang telah dijalankan, BRI Finance memaksimalkan sinergi induk di berbagai lini terutama ekosistem grup usaha.

Prospek Usaha dan Strategi PT BRI Multifinance Indonesia Tahun 2024

Penyusunan rencana bisnis jangka panjang BRI Finance periode 2024–2026 sesuai aspirasi pemegang saham yaitu menjadi "*Leading Player in Autoloan Financing*", maka perluasan cakupan pasar pembiayaan multiguna tetap menjadi fokus BRI Finance. Inovasi dan eksplorasi sumber pertumbuhan baru yang dilakukan berimplikasi pada bisnis BRI Finance yang semakin kompleks. BRI Finance akan fokus pada sinergi dan *cross selling* yang telah dikembangkan di BRI Group. Selain itu pengembangan juga dilakukan pada *pipeline* dari *repeat order* debitur *existing* dan

debitur *value chain* BRI Group. Perusahaan terus menyalurkan pembiayaan dan ekspansi bisnis secara selektif, serta melakukan eksplorasi *new growth engine* melalui optimalisasi *single gateway autoloan*. Perusahaan akan mempertahankan strategi diversifikasi pendanaan untuk menekan *cost of fund* dan memberikan *offering rate* yang kompetitif bagi debiturnya. Dari sisi layanan, BRI Finance akan memaksimalkan bisnis *value chain* melalui *strategic partnership* dan pengembangan berbagai *platform* untuk mendorong transaksi *digital channel* seperti aplikasi myBRIf, *new mobile order* dan lainnya. Selain itu sebagai bentuk penguatan *excellence enabler* lainnya terutama *human capital*, *culture*, *distribution channel* dan tata kelola risiko. Sebagai salah satu tindakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang maksimal, BRI Finance memperkuat sisi manajemen risiko dan kepatuhan sehingga memastikan penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan tetap *prudent* dan termonitor dengan baik. Sinergi yang dilakukan BRI Finance bersama dengan grup usaha terus dimaksimalkan baik di sisi bisnis maupun non bisnis melalui *sharing resources*, integrasi data dan eksplorasi *new ecosystem segment*.

Untuk mencapai aspirasi BRI Finance yaitu masuk dalam kategori Perusahaan pembiayaan dengan total aset di atas Rp10 triliun di tahun 2024, pengembangan sistem pendukung operasional bisnis dari segi teknologi informasi yang akan dilakukan BRI Finance adalah sebagai berikut:

a. **Pengembangan *Decision Engine***
   Komitmen BRI Finance dalam menjaga kualitas aset dikembangkan melalui *platform digital* untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran pembiayaan kepada debitur terutama dari sisi pengecekan profil debitur. Beberapa pengembangan yang dilakukan berupa otomasi dari beberapa kategori pengambilan keputusan, antara lain Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), *Optical Character Recognition* (OCR) dan *identity verification*, *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), *credit scoring* serta *digital survey*.
b. ***Enhancement* aplikasi Perusahaan (myBRIf)**
   Secara kontinu berkelanjutan, BRI Finance melakukan pengembangan pada aplikasi *digital* BRI Finance yang dapat diakses langsung melalui gawai masing-masing pengguna. Selain itu BRI Finance akan menjadikan myBRIf sebagai *digital lead system/digital lead engine*. Di tahun 2024, pengembangan yang akan dilakukan antara lain: *remapping role* (*guest*, *registered public debitur*, *dealer/showroom*, agen, dan tenaga pemasar), simplifikasi registrasi *dealer* dan *showroom*, serta integrasi myBRIf dan NEMO.
c. **Pengembangan *high yield segment credit scoring***
   BRI Finance terus berupaya menjaga kualitas aset dengan fokus pada pengendalian rasio *non performing financing* serta memperkuat *enabler* dan infrastruktur *risk management*. Seiring dengan strategi rekomposisi pembiayaan konsumer ke *high yield segment*, BRI Finance melakukan pengembangan *credit scoring* untuk segmen *used car* dan *refinancing* sebagai upaya perkuatan *enabler* manajemen risiko.

   Sebagai bentuk pengendalian rasio *non performing financing*, di tahun 2024, BRI Finance akan mengimplementasikan *automatic write off* untuk portofolio konsumer dengan *overdue* > 180 hari.

Sebagai dukungan penuh BRI Finance terhadap kebijakan ekonomi hijau nasional, BRI Finance juga mengarahkan fokus bisnisnya pada *sustainable finance* melalui implementasi *environment, social and governance* (ESG), sehingga Perusahaan tidak hanya tumbuh tetapi juga peduli pada keberlanjutan usaha serta lingkungan. Sampai dengan bulan September 2023, BRI Finance telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 250 unit kendaraan listrik maupun kendaraan *hybrid*. Di tahun 2024, BRI Finance akan menghadirkan program-program unggulan khusus untuk kendaraan listrik dan/atau *hybrid* untuk menggarap pasar penjualan kendaraan ramah lingkungan. Mengulangi kesuksesan strategi pemasaran produk sebelumnya, *joint marketing campaign* akan tetap digunakan oleh Perusahaan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan khususnya pembiayaan multiguna. Kegiatan promosi produk pembiayaan yang dilakukan di tahun 2024 akan diperluas ke jaringan konvensional dan *digital platform* melalui kerjasama dengan beberapa media selain kerjasama promosi *offline* dengan *dealer* dan *supplier*. Melalui jaringan dan ekosistem yang dimiliki oleh grup usaha, BRI Finance akan lebih mudah menjangkau debitur secara lebih luas dan menjaga *engagement* dengan debitur. Komposisi portofolio BRI Finance di tahun 2024 akan tetap didominasi pembiayaan multiguna. Di lain sisi, penyaluran pembiayaan investasi dan modal kerja BRI Finance akan tetap tumbuh secara *prudent* dan sehat dengan memperhatikan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat dan sesuai regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko dan menjaga kualitas aset BRI Finance. Selanjutnya, dengan situasi dan kondisi perekonomian yang lebih menantang di tahun 2024, pembiayaan investasi dan modal kerja akan senantiasa berkontribusi dengan tumbuh sehat, berkualitas dan berkelanjutan melalui strategi inisiatif dan inovasi baik dengan sumber pertumbuhan baru (*new source of growth*) maupun *existing and value chain customer*.

PT BRI VENTURA INVESTAMA (BRI VENTURES)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) adalah Perusahaan Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang modal ventura. Kepemilikan saham oleh BRI pada BRI Ventures adalah sebesar 99.97% dari total saham yang dikeluarkan perusahaan, sementara 0.03% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.BRI Ventures memiliki aspirasi untuk menjadi *Corporate Venture Capital* terdepan yang akan dicapai melalui investasi di perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi (*startup*), dengan potensi pasar yang luas, manajemen risiko yang solid serta *founder* yang memiliki

pengalaman yang cukup dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini selaras dalam membantu BRI Group mengembangkan produk dan layanan yang memudahkan pengguna (*customer-centric*).

BRI Ventures akan melakukan investasi pada perusahaan teknologi baik di dalam lingkup jasa keuangan (*Fintech*) maupun sektor bisnis lainnya (*Non-Fintech*).

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Ventura Investama

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Total Aset	**2.672.050**	2.176.790	495.260	22,75%
Total Investasi	**1.950.988**	1.969.349	(18.361)	(0,93%)
Laba Bersih	**4.364**	39.629	(35.265)	(88,99%)
Non Performing Investment (NPI) (%)	**1,63**	2,38	-	(0,75)

Pada tahun 2023 BRI Ventures membukukan total aset sebesar Rp2,67 triliun, meningkat Rp495,26 miliar atau 22,75% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut berasal dari tambahan modal serta peningkatan total investasi yang terdiri dari penyertaan saham baru (*new deployment)* dan peningkatan nilai penyertaan saham. Total investasi 2023 sebesar Rp1,95 triliun, menurun sebesar 0,93% dibandingkan tahun 2022. Selama tahun 2023, BRI Ventures telah melakukan investasi kepada 4 (empat) *investee* dan mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,36 miliar. Selama tahun 2023, BRI Ventures juga berhasil memperbaiki kualitas aset produktifnya. Hal ini ditunjukkan dengan rasio *Non-Performing Investment* (NPI) tahun 2023 sebesar 1,63%.

Strategi PT BRI Ventura Investama Tahun 2023

Kondisi bisnis *venture capital* sepanjang 2023 diliputi dengan ketidakpastian, hal ini terlihat dari penurunan jumlah pendanaan global sebesar ±40% (yoy). Dengan penurunan pendanaan tersebut, maka upaya efisiensi dilakukan oleh sebagian besar startup melalui kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk dapat bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut, BVI telah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Optimalisasi *opportunity exit* dengan mempertimbangkan target *Internal Rate of Return* (IRR) dan potensi *gain.* Pada tahun 2023, BVI telah berhasil *full exit* untuk *Investee* Nium dengan *total gain* Rp60,63 miliar atau dengan IRR sebesar 44,65%.
2. BVI telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis *startup* Indonesia melalui kesepakatan partisipasi dalam pendanaan Merah Putih *Fund*.
3. Sebagai alternatif sumber pendapatan, BVI telah melakukan *piloting* pembiayaan melalui *venture debut* untuk *investee exsisting* yaitu Andalin sebesar Rp495 juta. Hal ini dinilai cukup prospektif, ditengah kondisi *market* yang belum kembali membaik.
4. Untuk menjaga kualitas portofolio dan memitigasi risiko investasi, BVI telah melakukan *monitoring* kualitas dan *runway investee* serta melakukan audit internal dan menyampaikan laporan pengawasan tersebut kepada pihak regulator secara berkala.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT BRI Ventura Investama

Sampai dengan saat ini, BRI Ventures telah berhasil mengelola 2 (dua) Dana Ventura, yaitu Dana Ventura Nusantara I (DVSN I) dan Dana Ventura Nusantara II (DVSN II). Selama tahun 2023 BRI Ventures telah melakukan penyertaan saham melalui Dana Ventura kepada 2 (dua) investee dan berhasil melakukan fundraising (*capital call*) dari 2 (dua) *Limited Partner*. Selain itu selama periode 2023 BRI Ventures melalui DVSN II telah berhasil melaksanakan program *accelerator* yaitu "Kiqani Labs". Program ini diikuti oleh 14 (empat belas) *startup* Indonesia terpilih yang bergerak di industri *fashion, beauty* dan *food and beverage*.

Prospek Usaha dan Strategi PT BRI Ventura Investama Tahun 2024

Di tahun 2024, BRI Ventures masih memfokuskan kegiatan investasinya pada perusahaan/*startup* di sektor *fintech* maupun *non-fintech* yang berpotensi meningkatkan kapabilitas, berdampak positif terhadap bisnis, dan membuka akses untuk ekosistem baru bagi BRI Group. Dalam berinvestasi pada *startup* dengan kegiatan usaha utama yang tidak berada pada sektor keuangan (*non-fintech*), BRI Ventures menggunakan instrumen dana ventura. Dalam rangka mewujudkan visi BRI Ventures menjadi Perusahaan Modal Ventura terdepan di Indonesia, BRI Ventures melakukan pengembangan produk/instrumen investasi alternatif guna melengkapi *Capital Stack* yang sudah ada yang dapat ditawarkan kepada target investee BRI Ventures. Inisiatif ini diawali dengan dibentuknya Dana Ventura Sembrani Nusantara I yang fokus pada sektor "EARTH" (*education, agro-maritime, ritel, transport, health*). BRI Ventures juga secara aktif melakukan eksplorasi di sektor-sektor oportunis non konvensional seperti *Direct to Consumer* (D2C) melalui Dana Ventura Sembrani Nusantara II bersama Investor dan *partner* strategis lainnya. Selain itu akan terus dikembangkan *fund* baru yang memiliki instrumen pendanaan yang sesuai dengan *appetite* dan tingkat risiko bervariatif seperti *thematic fund*.

PT BRI ASURANSI INDONESIA (BRI INSURANCE)

BRI Insurance menjadi bagian dari Perusahaan Anak pada BRI Group yang bergerak di bidang asuransi memiliki tanggungjawab untuk menciptakan *value* baik dari sisi bisnis maupun peningkatan citra BRI Insurance dengan komitmen memberikan perlindungan asuransi umum melalui beragam produk terpercaya yang didukung inovasi teknologi, GCG yang *prudent* dan *human capital* unggul untuk menghasilkan produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Asuransi Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**6.465.609**	4.891.250	1.574.359	32,19%
Premi Bruto	**1.542.863**	1.267.919	274.944	21,68%
Ekuitas	**2.010.409**	1.622.163	388.246	23,93%

Aset BRI Insurance tahun 2023 sebesar Rp6,47 triliun, meningkat sebesar 32,19% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4,89 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain kenaikan nilai investasi sebesar 11,7% dibandingkan tahun 2022 serta kenaikan cadangan teknis sebesar 34,9% dibandingkan tahun 2022. Pendapatan premi bruto BRI Insurance tahun 2023 sebesar Rp1,54 triliun, meningkat 21,68% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,27 triliun. Hal tersebut karena pertumbuhan premi COB *Credit* sebesar 123,2%, COB *Motor Vehicle* sebesar 42,7%, COB *Property* sebesar 2,6%, *Marine Hull* sebesar 94,1% dan *Engineering* sebesar 34,3%. Ekuitas BRI Insurance tahun 2023 meningkat sebesar 23,93% dari Rp1,622 triliun di tahun 2022 menjadi Rp2,01 triliun di tahun 2023. Peningkatan tersebut karena kenaikan laba tahun berjalan sebesar 28,5% dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp479,4 miliar di tahun 2023.

Strategi PT BRI Asuransi Indonesia Tahun 2023

Kondisi persaingan bisnis yang makin kompetitif dan lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian menuntut BRI Insurance untuk terus mencari terobosan baru dan mengimplementasikan strategi yang sesuai dan selaras dengan perubahan lingkungan bisnis. BRI Insurance harus mampu menciptakan, mengeksploitasi, dan mencapai keunggulan kompetitif dengan cara menciptakan nilai - nilai daya saing yang lebih baik dibandingkan para pesaing. Untuk mencapainya, BRI Insurance harus mampu menerapkan strategi dan nilai - nilai yang berbeda dan tidak dapat ditiru oleh pesaingnya. Salah satu strategi tersebut adalah melalui inovasi. Berikut uraian strategi dan keunggulan kompetitif dan inovasi yang diterapkan BRI Insurance Indonesia tahun 2023 disertai dengan analisa prospek usaha tahun 2024 yaitu:

1. Menjadi *one stop insurance solution* untuk memenuhi kebutuhan asuransi melalui produk, layanan, dan saluran pemasaran yang dapat menjawab kebutuhan nasabah.
2. Mengembangkan produk eksisting dan inovasi produk baru, antara lain produk mikro, ultramikro, produk sesuai prinsip ESG, dan produk asuransi berdasarkan perilaku dan kebutuhan nasabah.
3. Melakukan inovasi saluran distribusi yang produktif antara lain dengan sinergi pemasaran *bancassurance*, peningkatan kerjasama dengan ekosistem bisnis *digital*, dan penguatan bisnis keagenan dan *broker*.
4. Meningkatkan jumlah portofolio nasabah, rasio *renewal*, dan pengembangan bisnis eksisting.
5. Meningkatan rasio penagihan premi dan *claim recovery*.
6. Melakukan peningkatan *after sales service* layanan klaim, perpanjangan polis, dan *customer engagement*.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk efektifitas dan efisiensi proses bisnis.
8. Meningkatkan kapasitas investasi dengan *risk management* yang baik dan melakukan diversifikasi penempatan investasi untuk return yang optimal.
9. Memperkuat pengelolaan *data privacy* dan *data security*.
10. Meningkatkan tata kelola Perseroan serta mendukung Tata Kelola Terintegrasi.
11. Mempersiapkan pra implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 74).
12. Menjalankan *culture activation*, literasi, dan upaya peningkatan inklusi asuransi dalam menghadapi penguatan kompetisi bisnis.
13. Meningkatkan kompetensi pekerja di bidang teknologi, data analitik, dan pengetahuan industri

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT BRI Asuransi Indonesia

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki oleh BRI Insurance Indonesia yaitu:

1. Memiliki jaringan kerja sebanyak 115 (seratus lima belas) yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Merupakan Perusahaan dengan peringkat pertama di kategori premi bruto Rp1 sampai dengan <Rp2,5 triliun versi infobank.
3. Secara konsisten PT BRI Asuransi Indonesia melakukan sertifikasi dengan hasil terbaru *rating* $_{id}$AA dari Pefindo.
4. Sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka PT BRI Asuransi Indonesia memiliki lebih dari 70 (tujuh puluh) produk termasuk produk unggulan dan produk *customized.*

5. Perusahaan asuransi umum yang menguasai *market share* asuransi mikro.
6. CAGR premi bruto (21,21%) laba bersih (35,23%), hasil *underwriting* (20,95%) dan hasil investasi (11,59%) yang positif dalam 3 (tiga) tahun terakhir berada di atas rata-rata industri.
7. Memiliki rasio keuangan yang kuat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan berada di atas rata-rata industri antara lain: *profit margin, ROE, underwriting yield, loss ratio* dan *RBC*
8. Tingkat maturitas (seperti tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko dan audit) BRI Insurance mendapatkan *score* di atas 3 *(defined)*
9. BRI Insurance dengan layanan yang semakin berkembang dengan layanan berbasis digitalisasi dan otomasi (seperti *BRINESIA, BRINSmobile, Claim Centre/ B-Class, Customer Care, E-policy*).
10. Memiliki tenaga ahli yang telah tersertifikasi.

Prospek Usaha dan Strategi PT BRI Asuransi Indonesia Tahun 2024

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% - 5,3% di tahun 2023, dan akan terus meningkat menjadi 4,7% - 5,5% di tahun 2024 yang didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor. Hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan Perseroan dalam industri asuransi karena pertumbuhan ekonomi dan pergerakan kelas ekonomi akan mendorong meningkatnya pengeluaran rumah tangga masyarakat. Dengan kondisi tersebut, BRI Insurance yakin akan dapat bersaing dan terus meningkatkan pendapatan BRI Insurance dengan tetap menjalankan proses bisnis secara *prudent*. Industri asuransi diperkirakan akan mengalami peningkatan pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Para pelaku industri berfokus kepada digitalisasi penguatan ekosistem, pembukaan saluran pemasaran baru, penguatan jumlah pemasar dan penguatan modal. Adapun strategi BRI Insurance di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Fokus portofolio pada lini bisnis dengan tingkat risiko terjaga dan profitabilitas yang baik.
2. Penguatan segmen mikro untuk mendukung inklusi keuangan, salah satunya dengan mengoptimalkan pertumbuhan produksi pada lini bisnis kendaraan bermotor.
3. Optimalisasi produk segmen ritel untuk produksi yang belum optimal khususnya pada lini bisnis asuransi harta benda dan kendaraan bermotor melalui penguatan sinergi.
4. Penguatan pengelolaan reasuransi.
5. Mengupayakan penurunan eksposur pada lini bisnis asuransi kredit dan mengkaji alternatif sumber pertumbuhan baru.
6. Merealisasi potensi penetrasi asuransi pada ekosistem ultra mikro.
7. Perbaikan *pipeline management* untuk meminimalisir fluktuasi kinerja dan deviasi dengan target.
8. Penyusunan rencana tindak lanjut pemisahan Unit Usaha Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Peningkatan pemasaran untuk produk *custom* sesuai dengan segmen dan kebutuhan nasabah untuk mewujudkan aspirasi penyedia *one stop insurance solution yang customer-centric*.
10. Melanjutkan penguatan kapasitas investasi dalam upaya peningkatan hasil investasi untuk optimalisasi *return*, pengelolaan risiko investasi, utamanya dalam mengantisipasi implementasi PSAK 74.
11. Mengkaji potensi produk *cyber risk insurance* dalam merespon risiko baru yang muncul.
12. Penguatan ekosistem digital sebagai saluran distribusi dengan pengembangan produk sederhana, terjangkau dengan jangka waktu yang lebih pendek dan sesuai kebutuhan masyarakat luas searah dengan aspirasi *go smaller dan go faster*.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Pada periode tahun 2023, PT BRI Danareksa Sekuritas berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp70,52 miliar. Pendapatan usaha yang berhasil diperoleh adalah sebesar Rp308,78 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan jasa perantara perdagangan efek sebesar Rp141,0 miliar atau 47%, diikuti oleh pendapatan jasa penasihat keuangan sebesar Rp116,47 miliar atau 39%, dan pendapatan jasa penjaminan emisi sebesar Rp63,83 miliar atau 8% dari total pendapatan yang telah dicatatkan. Dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan PT BRI Danareksa Sekuritas relatif lebih kecil atau menurun sebesar Rp38,73 miliar atau turun 11,14%, penurunan tersebut dikarenakan beberapa *project* penjaminan emisi efek mengalami penjadwalan ulang. Meskipun demikian, untuk lini bisnis lain mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama untuk pendapatan jasa perantara perdagangan efek.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Danareksa Sekuritas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**1.059.172**	1.648.173	(589.001)	(35,74%)
Pendapatan Usaha	**308.777**	347.502	(38.725)	(11,14%)
Laba Bersih	**70.521**	72.970	(2.449)	(3,36%)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Akumulasi Nilai Transaksi *Brokerage*				
Saham	**98.134.258**	106.703.367	(8.569.109)	(8,03%)
Obligasi Pemerintah	**272.950.420**	328.682.560	(55.732.140)	(16,96%)
Obligasi Korporasi	**45.000.210**	45.628.550	(628.340)	(1,38%)

Strategi PT BRI Danareksa Sekuritas Tahun 2023

Pada tahun 2023, BRI Danareksa Sekuritas telah meluncurkan *online trading platform* unggulannya yaitu BRIGHTS EASY yang merupakan alternatif version dari BRIGHTS dengan fitur *simplicity* dan sangat mudah digunakan. BRIGHTS EASY diharapkan dapat memberikan pengalaman terbaik untuk nasabah ritel BRI Danareksa Sekuritas. Kemudian, pengembangan pada sisi bisnis *institution equity brokerage* juga dilakukan dengan mengerjakan perbaikan sistem trading untuk dapat memberikan layanan yang prima dan bisa diandalkan. Untuk memperluas bisnis *retaill brokerage* secara *agressif*, BRI Danareksa Sekuritas melanjutkan program kerjasama dengan BRI terkait pembukaan akun RDN melalui aplikasi BRImo serta menyematkan *launcher* aplikasi BRIGHTS pada aplikasi BRImo. Selain dengan BRI, PT BRI Danareksa Sekuritas menjalankan program kerjasama dengan BRI Group terkait dengan akuisisi akun RDN pegawai. Kemudian, BRI Danareksa Sekuritas terus mendorong ekspansi *cross selling* di antara BRI Dan BRI Group. Sinergi dengan BRI juga diterapkan untuk penguatan bisnis jasa penjamin emisi dan penasihat keuangan, BRI Danareksa Sekuritas melakukan penetrasi kepada nasabah *corporate banking* serta membentuk tim khusus dalam menangani nasabah BRI terkait *loan structuring*. Dalam hal pengembangan produk dan layanan, BRI Danareksa Sekuritas menawarkan kemudahan dalam transaksi margin melalui *Margin Online* (MO) serta kemudahan dalam pengelolaan saldo RDN melalui fitur *autocash withdrawal.* BRI Danareksa Sekuritas juga telah melakukan *brand refinement* untuk memeperoleh *brand identity* sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan dan produk yang dimiliki. PT BRI Danareksa Sekuritas terus melanjutkan penerapan transformasi budaya perusahaan yang menginduk pada BRIone *Culture*.Transformasi budaya pelayanan nasabah juga dilakukan BRI Danareksa Sekuritas dengan optimalisasi *digital asset* terutama dalam kegiatan *marketing* dan literasi untuk nasabah ritel melalui beberapa produk-produk seperti BRI Danareksa *Market Update*, Sapa Mentari, Saham Kramat, *Investalk Series*, Bekal Buat Besok, Ngerondasip, dan BRI Danareksa Eduvest. BRI Danareksa juga melakukan penguatan tatakelola dan manajemen risiko untuk dapat mendukung seluruh kegiatan bisnis. Di tengah persaingan bisnis yang ketat, BRI Danareksa Sekuritas tetap fokus melakukan bisnis yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tatakelola (ESG) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK NO.51/ POJK.03/2017.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT BRI Danareksa Sekuritas

BRI Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas pertama sekaligus merupakan *pioneer* di pasar modal Indonesia. BRI Danareksa Sekuritas juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikasi. BRI Danareksa Sekuritas memiliki produk unggulan *online trading system* yaitu BRIGHTS yang menawarkan *simplicity* melalui BRIGHTS EASY. Selain itu, BRI Danareksa Sekuritas juga merupakan bagian dari Bank Rakyat Indonesia, Bank BUMN dengan kepemilikan aset terbesar. Dengan bekal pengalaman tersebut dan didukung oleh sinergi dengan BRI Grup, BRI Danareksa Sekuritas memiliki akses jangkauan terluas di Indonesia melalui *channel* distribusi Induk.

Prospek Usaha dan Strategi
PT BRI Danareksa Sekuritas Tahun 2024

Menyongsong bisnis dalam tahun politik serta meningkatnya tensi geopolitik di tahun 2024, BRI Danareksa Sekuritas akan terus fokus pada penguatan fondasi bisnis ritel dan institusi dengan memaksimalkan potensi pendapatan berbasis bunga *(interst based)* dan meningkatkan *rank vote* di sisi institusional. Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2024, BRI Danareksa Sekuritas mengambil tema "Peningkatan Kinerja Bisnis Untuk Mencapai Kinerja Keuangan yang Kokoh dengan Berfokus pada Segmen Ritel". Dalam tema besar tersebut, terdapat aspek turunan yang akan dikerjakan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas pada tahun 2024, secara garis besar meliputi peningkatan potensi pendapatan berbasis bunga, peningkatan kerjasama *cross selling* dengan BRI, pengembangan lanjutan sistem institusi dan *online trading system* BRIGHTS, peningkatan skor *rank vote* pada institusional, menjalin kerjasama dengan *foreign broker* terkait *sub-broking,* perbaikan pada efektifitas dan efisiensi proses dalam *back office*, kampanye massif lanjutan untuk meningkatkan *brand awareness*, menerapkan implementasi digital (digitalisasi), melakukan ekspansi bisnis, menjalankan sinergi dengan BRI dan BRI Group, menerapkan *performance driven culture*, serta memperkuat GCG dan implementasi ESG melalui RAKB.

BRI Danareksa Sekuritas akan terus mengoptimalkan kolaborasi dan akselerasi sinergi dengan entitas induk (BRI) terutama untuk untuk mengembangkan bisnis ritel. Beberapa strategi yang akan dilakukan di tahun 2024 di antaranya adalah pengembangan fitur "Yuk Nabung Saham" via aplikasi BRImo yang kemudian akan dilanjutkan menjadi *trading* via BRImo. Kemudian, bekerja sama dengan BRI terkait dengan pemberian fasilitas *early settlement*

pada transaksi ritel *brokerage* serta simplifikasi transaksi obligasi nasabah prioritas BRI yang dikelola *wealth management* melalui integrasi aplikasi BRIGHTS. Selain itu, PT BRI Danareksa Sekuritas akan melanjutkan kerja sama dengan seluruh BRI Group dalam program akuisisi RDN melalui program MESOP untuk Perusahaan Anak dan nasabah BRI. BRI Danareksa Sekuritas juga menjalankan kerja sama eksklusif terkait dengan program edukasi dan marketing untuk nasabah ESA BRI. Kemudian, BRI Danareksa Sekuritas terus mendorong ekspansi *cross selling* di antara BRI Dan BRI Group. Sinergi dengan BRI juga diterapkan untuk penguatan bisnis jasa penjamin emisi dan penasihat keuangan dengan kerjasama *beyond lending partnertship.* Dengan sinergi dengan BRI dan Grup BRI, BRI Danareksa Sekuritas mencanangkan untuk kembali menjadi penjamin emisi berskala besar (*high profile underwriter*) serta memperoleh nasabah jasa penasehat keuangan dari sektor swasta.

Di sisi internal, BRI Danareksa Sekuritas akan melanjutkan *brand campaign and strategy* dalam rangka meningkatkan *brand awareness.* Selain itu, BRI Danareksa Sekuritas akan menjalankan loyalti program untuk dapat memberikan stimulus terhadap nasabah ritel. BRI Danareksa Sekuritas juga akan mengembangankan fitur *gadai efek online* pada BRIGHTS. Dalam rangka menghadapi dinamika bisnis yang akan datang, BRI Danareksa Sekuritas juga melakukan perbaikan sistem layanan *back office*, seperti automasi sistem kustodi, pengembangan dan integrasi data *front dan back office* untuk mencapai proses kerja yang baik, efektif, dan efisien. PT BRI Danareksa Sekuritas juga terus berupaya untuk meningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui *program alligment human capital framework* dengan BRI. Dalam menjalankan bisnis dan strategi di tahun 2024, penguatan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tetap dilakukan terutama dari sisi manajemen risiko, kepatuhan dan internal audit. BRI Danareksa Sekuritas berupaya untuk melakukan implementasi dan mendapat penilaian di *Corporate Governance Perception Index (CGPI).* Selain itu, sesuai dengan NO.51/POJK.03/2017, BRI Danareksa Sekuritas akan terus mendukung penerapan *Environmental, Social Responsibility and Governance* (ESG) melalui program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)

Aset PNM tahun 2023 sebesar Rp51,11 triliun, meningkat 9,33% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp46,74 triliun. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan aset produktif pembiayaan dimana tahun 2023 mencapai sebesar Rp47,09 triliun meningkat 10,58% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp42,59 triliun. Dari sisi pendapatan PNM membukukan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp15,38 triliun, meningkat 19,76% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp12,84 triliun. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan pendapatan pembiayaan PNM Mekaar dan UlaMM dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp41,97 triliun, meningkat 17,18% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp35,81 triliun. Demikian pula dengan laba bersih periode PNM tahun 2023 yang meningkat sebesar 78,34% dari Rp945,43 miliar di tahun 2022 menjadi Rp1,69 triliun di tahun 2023. Peningkatan tersebut ditopang oleh tumbuhnya *outstanding* pembiayaan dengan kualitas aset produktif yang terkendali.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Permodalan Nasional Madani

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**51.106.905**	46.744.758	4.362.147	9,33%
Penyaluran Pembiayaan	**71.016.143**	64.553.172	6.462.971	10,01%
Outstanding	**47.094.856**	42.588.393	4.506.463	10,58%

Strategi PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2023

PNM menetapkan strategi dan kebijakan strategis untuk mencapai target perusahaan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perubahan struktur organisasi PNM yang dilakukan dalam rangka mendukung inisiatif strategi jangka panjang dan keberlangsungan perusahaan.
2. Penetrasi pasar yang secara selektif dan efektif. Dalam hal ini, PNM melakukan pemetaan area yang berpotensi dibiayai, memperluas area layanan melalui pembukaan kantor-kantor unit Mekaar di wilayah potensial dan meningkatkan produktivitas kantor-kantor unit yang ada, merangkul nasabah-nasabah lama melalui peningkatan kualitas pelatihan/pendampingan nasabah melalui program pengembangan kapasitas usaha.
3. Pengembangan produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Peningkatan literasi keuangan dan peningkatan inklusi keuangan para nasabah Mekaar melalui kegiatan pertemuan kelompok nasabah dan sinergi
5. Peningkatan tingkat tata kelola perusahaan melalui pengelolaan manajemen risiko operasional dan kredit serta dilakukannya pengukuran *Corporate Governance Performance Index* (CGPI).

6. Pengembangan sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis di antaranya pengkinian aplikasi pembiayaan Mekaar Digi dan peningkatan kapabilitas perangkat keras serta sistem keamanan IT.
7. Optimalisasi dana kas tersedia serta diversifikasi sumber pendanaan baik dari pasar modal dan perbankan maupun pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah sehingga diharapkan dapat menekan tingkat suku bunga pinjaman secara keseluruhan.
8. Peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia, guna mendukung pemberdayaan nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro dan pelaku usaha mikro kecil, PNM mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara luring dan daring dengan tujuan meningkatkan kompetensi terutama bagi pekerja milenial dan perempuan guna mendukung peningkatan produktivitas pekerja secara keseluruhan dalam mencapai target PNM.

Keunggulan Kompetitif dan
Inovasi PT Permodalan Nasional Madani

PNM yang didirikan pada tahun 1999 dengan visi menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saat ini fokus utamanya adalah pemberdayaan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Pada akhir tahun 2023 melalui 4.552 kantor layanan yang tersebar di 513 kabupaten/kotamadya dan 34 provinsi PNM memberdayakan lebih dari 15 juta nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro dan lebih dari 118 ribu nasabah UMK. Dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas usaha para nasabah, PNM juga menekankan kegiatan pemberdayaan melalui pemberian pendampingan dan pelatihan usaha kepada para nasabah di samping pemberian permodalan. Selain itu, PNM juga mendukung program *Sustainable Development Goals* di antaranya pembiayaan untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih serta pembiayaan untuk renovasi sarana/prasarana usaha para nasabah, serta PNM juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemanfaatan teknologi dan informasi juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan mendukung kegiatan bisnis dan operasional kearah digitalisasi sehingga produktivitas kinerja dapat ditingkatkan, selain itu dengan sinergi *Holding* Ultra Mikro yang ada pelayanan kepada nasabah dapat ditingkatkan.

Strategi Pencapaian Kegiatan Usaha

Guna mencapai target kinerja pada akhir tahun 2024, PNM berencana memperluas jaringan layanan kantor unit Mekaar. Manajemen juga berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM utamanya para *account officer* sehingga dapat mendukung keberlangsungan PNM. Pada tahun 2024, bisnis utama perusahaan tetap difokuskan pada pembiayaan pembiayaan berbasis kelompok kepada para perempuan pelaku usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar, dengan potensi yang masih cukup besar dan belum tergarap secara maksimal. Di sisi lain, adanya *holding* ultra mikro memberikan kesempatan sinergi bisnis yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada nasabah atas diversifikasi produk yang ada serta pencapaian target bisnis perusahaan secara keseluruhan. Selain menyalurkan pembiayaan, PNM juga melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pendampingan usaha, pelatihan kepada nasabah, serta pembentukan klaster usaha nasabah guna membantu nasabah meningkatkan kapasitas usaha mereka, hal ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat retensi nasabah dan persentase jumlah nasabah yang lanjut menjadi pelaku usaha bank. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan retensi nasabah sehingga mendukung peningkatan jumlah nasabah dan pertumbuhan saldo piutang pembiayaan baik konvensional maupun syariah secara keseluruhan. Pada akhir tahun 2024 diproyeksikan pembiayaan PNM masih akan mampu tumbuh *double digit*, dengan semakin fokus pada pembiayaan kelompok *Mekaar* sementara pembiayaan individual *Ulaam* akan dilakukan penyelarasan kepada BRI.

Inisiatif Strategis PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2024

Pada tahun 2024 PT Permodalan Nasional Madani menerapkan beberapa inisiatif strategi utama sebagai berikut:

1. Perusahaan akan melakukan perluasan penerima manfaat produk dengan melakukan pemetaan dan mengakselerasikan unit-unit yang ada dan memperluas jaringan layanan ke wilayah yang memiliki potensi sasaran calon nasabah potensial, serta melakukan inovasi produk dengan meningkatkan produk pendamping.
2. Menguatkan kegiatan pemberdayaan kepada nasabah Mekaar dengan memberikan program literasi *digital* guna meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sosial media untuk peningkatan kapabilitas bisnis nasabah, literasi pengembangan usaha nasabah untuk akselerasi penjualan dan literasi keuangan untuk pembukaan rekening tabungan.
3. Melakukan inovasi proses pertemuan kelompok Mekaar (PKM) guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses bisnis.
4. Melakukan peningkatan indeks kematangan IT dengan membangun arsitektur teknologi yang berbasis *cloud*, membangun data *lake* dan mengaktifkan analitik *use cases* serta penguatan organisasi dan fungsi pengelolaan IT.
5. Memperkuat Tata Kelola Perusahaan dengan pengukuran GCG dan CGPI, Pengukuran Maturitas Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan, dan Digitalisasi Kepatuhan dan Tata Kelola pada *repository* kebijakan dan pelaporan.
6. Peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia, dengan mendukung peran perempuan dan generasi milenial di jabatan strategis dan kaderisasi pimpinan.
7. Memperkuat proses digitalisasi *end to end* dalam proses operasional dan bisnis Mekaar untuk mendorong efisiensi.
8. Memperkuat organisasi dan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk meningkatkan kapabilitas pengawas.

PT PEGADAIAN

Pertumbuhan kinerja aset Pegadaian tahun 2023 mencapai Rp82,15 triliun atau tumbuh secara yoy sebesar 12,66%. Pertumbuhan aset dipengaruhi oleh komponen terbesar yaitu *outstanding loan* yang tumbuh 14,43% dari tahun 2022 yaitu dari Rp59,05 triliun menjadi Rp67,57 triliun seiring pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan juga adanya program pemasaran serta penjualan yang masif. Dari sisi pendapatan, Pegadaian membukukan laba usaha tahun 2023 meningkat sebesar 31,15% dari Rp3,33 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,38 triliun di tahun 2023. Peningkatan laba usaha ini selain didukung dari peningkatan pendapatan, juga diimbangi penghematan yang tercermin dari *marginal revenue* 11,5% yang lebih besar dibandingkan *marginal cost* 2,7%, sehingga Pegadaian dapat membukukan laba dengan pertumbuhan positif.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Pegadaian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**82.151.803**	72.920.622	9.231.181	12,66%
Pembiayaan (*Outstanding Loan*/OSL *Gross*)	**67.573.563**	59.052.916	8.520.647	14,43%
Laba Usaha	**4.377.492**	3.337.756	1.039.736	31,15%

Strategi PT Pegadaian Tahun 2023

Dengan dilatarbelakangi ketidakpastian ekonomi global dan nasional, semangat pemulihan ekonomi di era pandemi, serta sinergi ekosistem ultra mikro, maka pada tahun 2023 Pegadaian mengusung tema "*Growing Stronger*: Peningkatan skala bisnis melalui *Integrated Financial and Gold Ecosystem*", sehingga tahun depan arah Pegadaian adalah bertumbuh secara eksponensial melalui peningkatan skala bisnis *financial* terintegrasi dan sebagai *key player* pondasi ekosistem emas dalam rencana pembentukan *Bullion Bank* di Indonesia. Adapun fokus strategi tahun 2023 akan dititikberatkan pada:

1. *Rapid Growth* sebagai strategi bisnis
   a. *Retention (Rollover)*
      Fokus strategi untuk *scale up* pelanggan menjadi *customer loyalty* dan mencegah mereka beralih ke kompetitor.
   b. *Acquisition (New customer)*
      Fokus strategi untuk mengakuisisi pelanggan melalui *market penetration, market development, product development* atau *diversification*.
   c. *Booster (Scale up B2B)*
      Fokus strategi untuk percepatan bisnis melalui program *cross selling*. Sinergi dengan mitra strategis dan *customer experience*.
2. *Enabler Business* sebagai strategi *supporting* dari bisnis
   a. *Productivity Accelerator*
      Fokus strategi peningkatan produktivitas SDM dan Teknologi Informasi sebagai *accelerator* pertumbuhan bisnis melalui *process improvement*.
   b. *Risk Mitigation*
      Fokus strategi untuk meningkatkan kualitas aset produktif serta sebagai *accelerator* peningkatan peluang bisnis melalui proses identifikasi risiko.
   c. *Sustainable Resilience*
      Fokus strategi prioritisasi keberlanjutan bisnis dengan meningkatkan ketahanan bisnis, lingkungan, sosial dan tata kelola.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Pegadaian

Senantiasa mengedepankan inovasi dalam rangka memperkuat daya saing dan penyediaan produk/layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan penggunaan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, Pegadaian tetap menjaga kualitas layanan dengan penaksir yang handal didukung oleh program-program *marketing* dan penjualan yang beragam, penguatan produk berbasis gadai, optimalisasi peluang produk berbasis emas dan fidusia, penguatan bisnis syariah, serta optimalisasi *digital leads* dan sinergi dengan mitra strategis yang dapat membantu perusahaan untuk tetap tumbuh berkelanjutan sebagai solusi masyarakat dalam mengatasi masalah tanpa masalah.

Prospek Usaha dan Strategi PT Pegadaian Tahun 2024

Dengan dilatarbelakangi atas semangat tumbuh bersama *holding* ultra mikro, semangat transformasi, serta semangat mengemaskan Indonesia, maka pada tahun 2024, Pegadaian mengusung tema: *Going Beyond: Maximizing Financial Ecosystem and Establish New Business Capabilities* dengan strategi yang *inline* dengan *grand strategy* pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2024-2028 yakni G7-STAR:

1. *Grow Core*
   Memperkuat *core business* Pegadaian pada lini bisnis gadai dan mikro melalui pemanfaatan data dan teknologi dalam aktivitas penjualan, modernisasi proses bisnis serta memfasilitasi *multi product customer experience*.

2. *Go Further*
   Meningkatkan kapabilitas jaringan keagenan serta mengoptimalkan kerja sama dengan mitra strategis yang potensial.
3. *Go Together*
   Memperkuat sinergi antara BRI Group dengan Pegadaian Group melalui pemanfaatan bersama jaringan penjualan dan penguatan kapabilitas fungsi *supporting* bisnis.
4. *Grab New*
   Memperluas segmen bisnis dengan peluncuran lini bisnis baru melalui pengembangan *bullion services* dan akselerasi pertumbuhan melalui strategi anorganik dan penguatan Anak Perusahaan.
5. *Groom Talent*
   Mencapai pengelolaan talenta yang terbaik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis.
6. *Gen-Z Tech*
   Memperkuat arsitektur TI yang mendukung implementasi bisnis baru, penguatan aplikasi internal dan eksternal Perusahaan serta menjalankan model operasional berbasis data guna mencapai manfaat yang optimal.
7. *Great Culture and GCG*
   Melakukan peluncuran ulang transformasi budaya, penguatan tata kelola dan manajemen risiko dan Implementasi praktik ESG yang komprehensif.

PT BRI MANAJEMEN INVESTASI

Aset PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp288,82 miliar, meningkat 4,45% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp276,52 miliar. Peningkatan tersebut dari aset tetap sewa, pajak dibayar dimuka dan portofolio efek dikarenakan terdapat transaksi atas pembelian portofolio DIM. Adapun penurunan pada kas setara kas dan aset lain-lain. Untuk transaksi yang telah *settlement* sudah dicatat di dalam kas setara kas namun untuk transaksi yang masih dalam proses *settlement* masuk kedalam pencatatan piutang usaha.

Sedangkan pada sisi kewajiban terdapat peningkatan yang cukup signifikan, mayoritas peningkatan pada utang sewa, hutang usaha atas komisi serta hutang lain-lain atas tagihan biaya afiliasi dengan Danareksa (Persero) yang sebagian sudah dibayarkan pada akhir Desember 2023. Sedangkan terdapat penurunan pada beban akrual (biaya yang masih harus dibayar) atas akrual biaya-biaya operasional yang sebagian besar sudah dibayarkan sebelum akhir Desember 2023 serta utang pajak.

Pendapatan PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp131,20 miliar, menurun 12,36% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp149,52 miliar. Penurunan pendapatan tersebut dikarenakan kinerja pemasaran tahun 2023 yang belum maksimal dan terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang tidak mendapatkan pendapatan atas pengelolaan investasi dikarenakan dalam proses pembubaran atas Reksa Dana tersebut. AUM pada tahun 2023 sebesar Rp40,9 triliun dibandingkan AUM pada tahun 2022 sebesar Rp36,1 triliun. Adapun pada pos biaya terdapat peningkatan atas biaya operasional yang terdiri dari pengembangan usaha (biaya pemasaran dan konsultan), dan biaya penyusutan aset sewa. Sedangkan pada biaya pegawai dan biaya sistem informasi mengalami penurunan.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Manajemen Investasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	**288.820**	276.520	12.300	4,45%
Kewajiban	**62.359**	49.063	13.296	27,10%
Ekuitas	**226.461**	227.457	(996)	(0,44%)
Pendapatan Usaha Bersih Komisi	**131.198**	149.521	(18.323)	(12,25%)

Strategi PT BRI Manajemen Investasi Tahun 2023

Beberapa strategi yang dilakukan oleh BRI Manajemen Investasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Fokus membangun fondasi sinergi grup melalui penyelarasan *product flagship* dan target pemasaran baik dari sisi institusi, APERD Bank (WMG), serta APERD Sekuritas (BRIGHTS).
2. Fokus pemasaran pada produk reksa dana *open end* terutama *product flagship* serta peningkatan dana kelolaan melalui segmen retail utama.
3. Fokus peningkatan kapabilitas dan kualifikasi sumber daya manusia antara lain melalui *talent mobility* dan penguatan kompetensi utama.

4. Fokus optimalisasi proses *back-office* antara lain melalui *upgrading core system* serta pengembangan ERP.
5. Fokus penguatan manajemen risiko dan tata kelola melalui penyelarasan penilaian maturitas risiko dan tata kelola serta pengelolaan profil risiko.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT BRI Manajemen Investasi

BRI Manajemen Investasi berdiri sejak tahun 1992 sebagai Manajer Investasi pertama di Indonesia dan menerbitkan reksa dana pertama di Indonesia pada tahun 1996. Spektrum produk Investasi yang luas yang dimiliki BRI Manajemen Investasi berbasis perencanaan keuangan serta orientasi pelanggan memberikan berbagai pilihan investasi bagi seluruh segmen baik Institusi maupun ritel yang disesuaikan dengan toleransi risiko dan kebijakan investasi nasabah. Sebagai perusahaan yang *knowledge intensive*, BRI Manajemen Investasi mengedepankan pengelolaan bisnis dan operasional ditangani SDM yang profesional dan berpengalaman dalam dunia pasar modal, yang didukung oleh kesiapan infrastruktur dan teknologi dari *front to end*. Secara berkala BRI Manajemen Investasi menyusun rencana pengembangan SDM, memantau, serta mengevaluasi pekerja secara spesifik pada setiap fungsi guna menyesuaikan dan mempersiapkan SDM yang dapat mengikuti perkembangan industri Manajer Investasi. Selama lebih dari 30 tahun dalam Industri Manajer Investasi, BRI Manajemen Investasi menerapkan tata kelola dan manajemen risiko secara konsisten merupakan kunci sukses utama untuk memastikan bisnis dan operasional lancar serta berkesinambungan agar senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi secara jangka panjang.

Dalam mendukung pertumbuhan industri serta tanggap terhadap perkembangan Industri, BRI Manajemen Investasi memiliki spektrum produk investasi yang lengkap yang sesuai dengan berbagai profil risiko nasabah. Pada tahun 2023 BRI Manajemen Investasi mempertajam *existing product* menjadi *flagship product* yang diekspektasi dapat mengikuti perkembangan siklus bisnis serta sesuai dengan karakter segmen ritel, antara lain yakni reksa dana pasar uang seruni pasar uang, reksa dana pendapatan tetap melati pendapatan utama, reksa dana campuran *balanced regular income fund* yang mendistribusikan dividen bulanan, serta reksa dana indeks MSCI Indonesia ESG *Screened*. Upaya pemasaran didukung baik dengan berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan dalam ekosistem grup BRI serta umum yang dilakukan secara intensif maupun melalui fitur produk yang terjangkau untuk segmen ritel. Pada tahun 2023 ini BRI Manajemen Investasi telah resmi berganti nama dari PT Danareksa Investment Management menjadi PT BRI Manajemen Investasi. Pergantian ini seiring dengan telah efektifnya kepemilikan mayoritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada 30 November 2022. Penyelarasan strategi dan kebijakan dalam sinergi Grup mulai dilakukan intensif pada tahun 2023 pada berbagai aspek bisnis dan operasional Perseroan yang diharapkan dapat menjadi kekuatan kompetitif Perseroan dalam meningkatkan kontribusinya bagi Industri Manajer Investasi. Berbagai kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan integrasinya BRI Manajemen Investasi sebagai bagian Grup BRI yang memiliki visi sebagai *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*.

Prospek Usaha dan
Strategi PT BRI Manajemen Investasi Tahun 2024

Pada awal tahun 2023, kita mencermati dua hal yang signifikan yakni potensi perlambatan ekonomi global dan potensi berakhirnya pengetatan kebijakan moneter. Selama tahun 2023, The Fed tercatat menaikkan suku bunga 4x total 100 bps menjadi kisaran 5,25% - 5.50%. Laju kenaikan ini jauh lebih rendah dibandingkan laju kenaikan *Fed Funds Rate* pada tahun 2022 yang sebanyak 7x total 425 bps. Adapun inflasi Amerika Serikat berada pada kisaran 3,1% (November 2023), jauh di bawah posisi 2022 yang sebesar 6,5%. Sinyal pemangkasan suku bunga diperlihatkan oleh *Fed Chairman* pada pidato terakhirnya Desember lalu mempertimbangkan kondisi inflasi yang melandai dan data ketenagakerjaan yang di bawah ekspektasi. Sebagai respon atas kebijakan The Fed, Bank Indonesia tercatat menaikkan BI7DRR hanya 1x selama tahun 2023 di mana BI7DRR ditutup pada level 6,00% pada akhir tahun 2023. Kenaikan tersebut terjadi pada Oktober 2023 yang diperkirakan merupakan langkah BI untuk menjaga stabilitas Rupiah. Adapun level inflasi kita tercatat berada pada level 2.86% (November 2023). Dengan perkembangan yang ada, BI memproyeksikan GDP akan berada pada kisaran 4,5% - 5,3% pada tahun 2023.

Sikap The Fed yang menahan suku bunga berdampak baik pada pasar keuangan domestik yang tercermin pada aliran dana asing ke *emerging market* khususnya Indonesia. Secara keseluruhan, selama 2023, berdasarkan data *settlement* sampai dengan 21 Desember 2023, asing tercatat melakukan beli neto Rp81,40 triliun di pasar SBN, jual neto Rp11,61 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp52,81 triliun di Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Reksa dana tercatat YTD (November 2023) turun 2% dikarenakan penurunan pada reksa dana pasar uang dan saham namun di sisi lain terdapat sejumlah produk yang membukukan pertumbuhan seperti reksa dana campuran, terproteksi, pendapatan tetap, serta ETF dan Indeks. BRI Manajemen Investasi sendiri *similar* dengan Industri juga mengalami penurunan pada kedua jenis reksa dana yang sama tersebut namun mencatat pertumbuhan pada produk reksa dana lainnya. Secara total pertumbuhan reksa dana BRI Manajemen Investasi YTD (November 2023) adalah 9% dengan pangsa pasar sebesar 6,0% dan peringkat 5 (lima) pada Industri Reksa Dana. Sementara terhadap total produk yang diterbitkan oleh manajer investasi yang mencakup KPD dan produk Investasi Alternatif, BRI Manajemen tumbuh sekitar 10% dengan pangsa pasar sekitar 4,7% - 4,9% dan peringkat 8 (delapan).

Memasuki tahun 2024, baik di Amerika Serikat dan Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pada tahun tersebut. BI memproyeksikan inflasi Indonesia tahun 2024 akan berada pada kisaran 1,5%-3,5% sedangkan GDP berada pada level 4,7%-5.5%.

Perputaran uang dalam belanja konsumsi masyarakat selama masa Pemilu 2024 diperkirakan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan lebih stabilnya inflasi dan suku bunga serta proyeksi GDP yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, tahun 2024 diproyeksikan menjadi tahun yang imbang antara reksa dana berbasis suku bunga dengan yang berbasis saham. Riset internal BRI Manajemen menyampaikan bahwa mengingat tahun 2024 akan ada pemilihan presiden di Amerika Serikat, keberhasilan ekonomi menjadi penting sekali untuk presiden yang menjabat saat ini sehingga The Fed diperkirakan akan dapat membawa perekonomian Amerika Serikat *soft landing* pada tahun 2024 mendatang. Selama perekonomian Amerika Serikat melambat secara teratur dan berhasil *soft landing*, hal tersebut bisa menjadi katalis positif untuk aset yang lebih berisiko di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun demikian, terlepas dari sisi positif kemungkinan terjadinya *soft landing* perekonomian Amerika, risiko utama yang harus dimonitor dengan cermat adalah perang di Timur Tengah, di mana kita semua berharap adanya resolusi perdamaian secepatnya.

Pada perkembangannya pasca pandemi berakhir, serangkaian peraturan diterbitkan oleh OJK pada tahun 2023, yang beberapa di antaranya merupakan turunan dari UU No. 4 Tahun 2023 yang mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan. Rangkaian peraturan ini akan mewarnai kegiatan bisnis manajer investasi ke depannya. Dalam Industri manejer investasi, terbit POJK No. 4 Tahun 2023 terkait RD KIK yang antara lain kebijakan strategis OJK dalam menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan reksa dana, kondisi yang mengakibatkan restrukturisasi reksa dana, dan sejumlah upaya pengembangan reksa dana di Indonesia, selain itu juga terbit POJK No. 13 Tahun 2023 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, OJK berwenang mengambil langkah penetapan kebijakan penanganan volatilitas, stimulus, dan/atau relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang pasar modal. Dengan segmentasi ke bisnis ritel, tantangan regulasi pun sudah di depan mata mengingat UU No. 27 Tahun 2022 terkait pelindungan data pribadi akan efektif berlaku pada Oktober 2024. Penguatan pengendalian internal dalam hal tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko akan menjadi pilar utama kesinambungan bisnis manajer investasi termasuk BRI Manajemen Investasi. Hal ini pun sejalan dengan implementasi POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan yang akan mulai diimplementasikan pada industri manajer investasi pada tahun mendatang. Untuk itu, persiapan infrastruktur bukan hanya didukung dari sisi sistem, namun juga dari sisi kesiapan sumber daya manusia.

Di tahun 2024 ini, BRI Manajemen Investasi mentargetkan pertumbuhan dana kelolaan menjadi sebesar Rp50 triliun. Fokus pada segmen ritel serta optimalisasi sinergi grup melalui *product flagship* akan menjadi strategi utama dalam upaya membangun pondasi bisnis yang kokoh dan kesinambungan bisnis yang lebih terjaga. Beberapa *strategic enabler* selain penguatan pengendalian internal sebagaimana dipaparkan di atas, adalah peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, penguatan sistem IT terintegrasi dan infrastruktur digital, serta penguatan *branding* BRI Manajemen Investasi. Adapun penguatan *branding* ini seiring dengan telah berubahnya nama Perseroan menjadi BRI Manajemen Investasi dan dilakukan baik internal maupun eksternal grup. Rangkaian implementasi strategi BRI Manajemen Investasi akan seiring dengan peningkatan aktivitas literasi dan inklusi keuangan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi

Meskipun di tengah kondisi ekonomi yang menantang baik secara global dan domestik, kondisi suku bunga yang tinggi, serta tantangan dari kondisi alam seperti El-Nino, BRI mampu melanjutkan performa yang baik di tahun 2023. Secara umum laba BRI tetap mampu mencatat pertumbuhan laba bersih konsolidasian sebesar Rp60,42 triliun atau tumbuh 17,5% secara tahunan, seluruh segmen menyumbang laba positif dan terbesar berada di segmen mikro Rp22,47 triliun hal ini sejalan dengan aspirasi BRI untuk semakin fokus tumbuh di segmen UMKM khususnya mikro yang menjadi segmen utama dalam pergerakan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan laba bersih Perseroan tidak terlepas dari optimalisasi NII yang tercatat sebesar Rp135,18 triliun atau tumbuh 8,5% yoy dan kemampuan Perseroan dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya yang tercermin pada rasio CIR 2023 sebesar 41,9% atau lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 44,9%

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	61.646.907	28.530.291	3.999.095	13.907.277	29.580.953	137.664.523
Pendapatan operasional lainnya	17.639.356	16.102.050	4.982.366	3.844.328	3.057.685	45.625.785
Total pendapatan	79.286.263	44.632.341	8.981.461	17.751.605	32.638.638	183.290.308

Uraian	2023					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Beban operasional lainnya	(31.050.020)	(22.253.560)	(2.053.648)	(1.607.462)	(19.817.601)	(76.782.291)
Beban CKPN	(20.474.879)	(13.506.061)	7.888.285	(427.517)	(3.159.108)	(29.679.280)
Total beban	(51.524.899)	(35.759.621)	5.834.637	(2.034.979)	(22.976.709)	(106.461.571)
Pendapatan (beban) non operasional – neto	(20.591)	(77.380)	(48.903)	(377.093)	124.942	(399.025)
Laba sebelum beban pajak	27.740.773	8.795.340	14.767.195	15.339.533	9.786.871	76.429.712
Beban pajak	(5.270.747)	(1.671.115)	(2.872.313)	(4.104.717)	(2.085.772)	(16.004.664)
Laba tahun berjalan	22.470.026	7.124.225	11.894.882	11.234.816	7.701.099	60.425.048
Aset segmen						
Kredit - Bruto	496.554.160	442.703.668	197.696.204	-	60.798.674	1.197.752.706
Non kredit - Bruto	-	-	74.146.859	632.429.871	133.243.664	839.820.394
Total Aset - Neto	468.573.573	418.508.640	244.435.173	632.353.605	185.530.577	1.949.401.568
Liabilitas segmen						
Pendanaan	373.473.514	488.122.102	491.087.384	-	5.645.761	1.358.328.761
Non pendanaan	-	-	16.334.296	151.222.833	122.648.998	290.206.127
Total Liabilitas	373.473.514	488.122.102	507.421.680	151.222.833	128.294.759	1.648.534.888

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2022					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	59.395.789	30.128.931	(1.777.679)	12.971.032	25.755.474	126.473.547
Pendapatan operasional lainnya	13.689.096	15.553.855	3.593.099	3.879.051	2.412.593	39.127.694
Total pendapatan	73.084.885	45.682.786	1.815.420	16.850.083	28.168.067	165.601.241
Beban operasional lainnya	(34.395.404)	(18.746.771)	(1.884.810)	(1.237.497)	(18.051.530)	(74.316.012)
Beban CKPN	(8.779.414)	(17.073.704)	1.292.897	996.230	(3.415.201)	(26.979.192)
Total beban	(43.174.818)	(35.820.475)	(591.913)	(241.267)	(21.466.731)	(101.295.204)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	30.762	179.332	78.689	(11.879)	13.760	290.664
Laba sebelum beban pajak	29.940.829	10.041.643	1.302.196	16.596.937	6.715.096	64.596.701
Beban pajak	(3.892.308)	(2.164.708)	(479.226)	(5.055.150)	(1.597.102)	(13.188.494)
Laba tahun berjalan	26.048.521	7.876.935	822.970	11.541.787	5.117.994	51.408.207

Uraian	2022					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Aset segmen						
Kredit	449.626.718	399.555.810	173.787.061	-	56.305.230	1.079.274.819
CKPN	(23.499.725)	(26.981.604)	(34.097.491)	-	(3.745.011)	(88.323.830)
Non kredit			53.908.457	688.411.805	120.305.966	862.626.228
CKPN Non Kredit			(1.775.379)	(92.364)	(4.783.458)	6.651.201
Liabilitas segmen						
Pendanaan	367.656.835	469.090.526	464.028.257	-	7.108.395	1.307.884.013
Non pendanaan			13.553.325	128.737.434	112.068.921	254.359.680
	367.656.835	469.090.526	477.581.582	128.737.434	119.177.316	1.562.243.693

Tabel Pertumbuhan Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2023-2022

(dalam %)

Uraian	Pertumbuhan 2022-2023					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	3,79%	(5,31%)	324,96%	7,22%	14,85%	8,85%
Pendapatan operasional lainnya	28,86%	3,52%	38,66%	(0,90%)	26,74%	16,61%
Total pendapatan	8,49%	(2,30%)	394,73%	5,35%	15,87%	10,68%
Beban operasional lainnya	(9,73%)	18,71%	8,96%	29,90%	9,78%	3,32%
Beban CKPN	133,21%	(20,90%)	510,12%	(142,91%)	(7,50%)	10,01%
Total beban	19,34%	(0,17%)	(1.085,73%)	743,46%	7,03%	5,10%
Pendapatan (beban) non operasional – neto	(166,94%)	(143,15%)	(162,15%)	3.074,45%	808,01%	(237,28%)
Laba sebelum beban pajak	(7,35%)	(12,41%)	1.034,02%	(7,58%)	45,74%	18,32%
Beban pajak	35,41%	(22,80%)	499,37%	(18,80%)	30,60%	21,35%
Laba tahun berjalan	(13,74%)	(9,56%)	1.345,36%	(2,66%)	50,47%	17,54%
Aset segmen						
Kredit	10,44%	10,80%	13,76%	0,00%	7,98%	10,98%
CKPN	19,07%	(10,33%)	(27,17%)	0,00%	(22,18%)	(9,51%)
Non kredit	0,00%	0,00%	37,54%	(8,13%)	10,75%	(2,64%)
CKPN Non Kredit	0,00%	0,00%	44,96%	(17,43%)	17,02%	24,00%
Liabilitas segmen						
Pendanaan	1,58%	4,06%	5,83%	0,00%	(20,58%)	3,86%
Non pendanaan	0,00%	0,00%	20,52%	17,47%	9,44%	14,09%
	1,58%	4,06%	6,25%	17,47%	7,65%	5,52%

Segmen Geografis

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taiwan.

Produktivitas, Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

Secara kinerja berdasarkan Geografis wilayah Indonesia menempati komposisi utama, memang hal ini dikarenakan fokus Perseroan untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2022 kinerja di wilayah Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan yang baik dimana aset tercatat tumbuh 5,39%, pendapatan tumbuh 10,80% dan laba sebelum pajak 18,64%. Perseroan tercatat memiliki enam unit kerja yang berada di 5 (lima) wilayah luar negeri untuk menangkap peluang bisnis yang ada, seluruh unit kerja Perseroan yang berada di luar wilayah Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan aset dan pendapatan yang positif meskipun terdapat sedikit penurunan pendapatan di beberapa unit kerja dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih di wilayah tersebut.

Tabel Produktivitas, Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
PENDAPATAN				
Indonesia	**182.635.153**	164.840.457	17.794.496	10,79%
Amerika Serikat	**203.615**	397.108	(193.493)	(48,73%)
Singapura	**230.848**	245.748	(14.900)	(6,06%)
Timor Leste	**155.785**	101.667	54.118	53,23%
Hong Kong	**20.423**	14.223	6.200	43,59%
Taiwan	**44.484**	2.038	42.446	2.082,73%
Total Pendapatan	**183.290.308**	**165.601.241**	**17.689.067**	**10,68%**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK				
Indonesia	**76.060.127**	64.111.292	11.948.834	18,64%
Amerika Serikat	**63.686**	320.147	(256.461)	(80,11%)
Singapura	**181.470**	135.024	46.446	34,40%
Timor Leste	**109.877**	54.946	54.931	99,97%
Hong Kong	**161**	122	39	31,97%
Taiwan	**14.391**	(24.830)	39.221	(157,96%)
Total Laba Sebelum Pajak	**76.429.712**	**64.596.701**	**11.833.011**	**18,32%**
ASET				
Indonesia	**1.885.581.840**	1.789.162.542	96.419.298	5,39%
Amerika Serikat	**26.087.423**	27.856.321	(1.768.898)	(6,35%)
Singapura	**28.980.347**	25.069.385	3.910.962	15,60%
Timor Leste	**6.114.107**	4.256.142	1.857.965	43,65%
Hong Kong	**24.232**	17.982	6.250	34,76%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Taiwan	2.613.619	563.644	2.049.975	363,70%
Total Aset	**1.949.401.568**	**1.846.926.016**	**102.475.552**	**5,55%**
LIABILITAS				
Indonesia	1.585.649.437	1.504.449.309	81.200.128	5,40%
Amerika Serikat	26.148.777	28.000.956	(1.852.179)	(6,61%)
Singapura	28.855.880	25.168.981	3.686.899	14,65%
Timor Leste	5.792.144	4.020.492	1.771.652	44,07%
Hong Kong	6.467	4.257	2.210	51,91%
Taiwan	2.082.183	599.698	1.482.485	247,21%
Total Liabilitas	**1.648.534.888**	**1.562.243.693**	**86.291.195**	**5,52%**

Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Penugasan Lain

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR BRI berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan No. PK.KUR/213/D.I.M.EKON/11/2023, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memutuskan untuk menyesuaikan plafon KUR BRI tetap sebesar Rp194,40 triliun dan target debitur baru KUR tahun 2023 untuk BRI sedikitnya 1.363.225 debitur. Penyaluran KUR Mikro BRI pada tahun 2023 yang telah disalurkan sebesar Rp140,2 triliun di bawah target Pemerintah yang sebesar Rp194,40 triliun, hal tersebut dikarenakan BRI fokus dalam menumbuhkan Kupedes (*shifting back to Kupedes)* di tahun 2023.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku UMK disebut dengan Program Pendanaan UMK (PUMK) atau pada tahun sebelumnya biasa disebut dengan Program Pinjaman Kemitraan. Pendanaan UMK (PUMK) ini merupakan kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh BUMN dengan maksud agar BUMN di samping menjalankan operasional bisnisnya, juga melaksanakan tugas sosial sebagai pembina usaha mikro dan kecil berupa akses permodalan dan pendampingan sehingga pada akhirnya bisa mandiri atau beralih ke pinjaman KUR atau komersial. Program Pendanaan UMK diberikan benar-benar untuk tujuan usaha produktif dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Dalam sisi internal BRI, terdapat perubahan bisnis model program pendanaan PUMK di tahun 2021 dengan pinjaman kemitraan tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2020 pinjaman kemitraan berada di bawah Direktorat Kecil dan Menengah, dengan bisnis model sebagai berikut:

- *Customer* segmen pinjaman kemitraan yaitu pelaku usaha yang *feasible* namun belum *bankable*.
- Prakarsa pinjaman dilakukan oleh RM Program.
- *Plafond* maksimal pinjaman kemitraan saat itu sebesar Rp75 juta.

Sesuai Berita Acara Serah Terima No. B.10-SSM/01/2021 Tanggal 15 Januari 2021, untuk Pinjaman Kemitraan saat ini disebut sebagai Program Pendanaan UMK (PUMK) yang direalisasikan mulai tahun 2021 menjadi tanggung jawab Direktorat Mikro, dengan bisnis model sebagai berikut:

- *Customer* segmen PUMK yaitu pelaku usaha yang *feasible* namun belum *bankable* yang memenuhi syarat PUMK.
- Program PUMK disalurkan melalui BRI Unit yang diprakarsai oleh para Mantri.
- *Plafond* maksimal Pendanaan UMK (PUMK) sebesar Rp50 juta/debitur.

Program pendanan UMK merupakan *journey* agar para mitra binaan PUMK nantinya bisa menjadi *entry level* debitur KUR sehingga ke depan dapat terus berkembang usahanya dan bisa menjadi *pipeline* potensial bagi pinjaman komersial. Penyaluran Program PUMK pada posisi 31 Desember 2022 menjangkau 15.176 mitra binaan, dengan nominal sebesar Rp259,8 miliar. Sedangkan jumlah penyaluran PUMK tahun 2023 sebesar Rp872,6 miliar dengan jumlah mitra binaan sebanyak 30.871 mitra binaan.

Bantuan Sosial (Bansos)

Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan BRI dalam penyaluran Bantuan Sosial, adapun kerjasama tersebut didasari oleh Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pada tahun 2023, terdapat 3 (tiga) jenis bantuan sosial yang disalurkan antara lain:

1. **Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH)**
   Disalurkan kepada 3,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan sebesar Rp9,12 triliun.
2. **Bansos Sembako**
   Disalurkan kepada 5,41 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total bantuan sebesar Rp12,65 triliun.
3. **Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino**
   Disalurkan kepada 5,1 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan total bantuan sebesar Rp2 triliun.

Sehingga total bantuan yang disalurkan dari ke 3 (tiga) jenis bantuan (Bansos PKH, Bansos Sembako dan BLT El Nino) yaitu sebesar Rp23,8 triliun.

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT KEUANGAN

Direktorat Keuangan memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi BRI, antara lain penyusunan strategi perusahaan dan *Key Performance Indicator* (KPI), memenuhi tanggung jawab inti fungsi keuangan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga akurasi pelaporan, pengelolaan *assets and liabilities*, serta mengelola strategi bisnis *subsidiaries* guna mendorong optimalisasi kontribusi Perusahaan Anak. Selaras dengan hal tersebut, selama tahun 2023 BRI telah mencatatkan kinerja yang positif di tengah ketidakpastian kondisi perekenomian global yang ditunjukkan dengan pencapaian kinerja keuangan yang baik dan angka kesehatan bank yang terjaga. Kinerja keuangan tersebut tercermin dari pencapaian target finansial Perusahaan seperti laba, *Pre-Provision Operating Profit/PPOP* (nominal maupun *growth* yoy), *Return on Equity* (ROE), *Loan at Risk* (LAR), dan kinerja finansial lainnya.

Di samping itu, BRI tengah mengelola 10 (sepuluh) *subsidiaries* sebagai bagian dari konglomerasi BRI *Group* yang juga menunjukkan kinerja positif. Kondisi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset Perusahaan Anak yang tumbuh sebesar 10,15% yoy atau memiliki komposisi 9,62% dari total aset konsolidasian, selain itu laba Perusahaan Anak secara agregat mampu tumbuh sebesar 39,65% yoy atau memiliki komposisi setara 12,09% dari total laba konsolidasian yang tercatat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 10,18%. Kinerja BRI Group yang membanggakan tersebut memberikan sinyal positif bagi pasar sehingga pada akhir tahun 2023, *market capitalization* BRI mencapai Rp867,7 triliun, tumbuh sebesar 15,9% yoy. Seluruh pencapaian target BRI tersebut tidak terlepas dari implementasi proses dan tata kelola *budgeting* serta *performance management* yang baik termasuk dalam penetapan *Key Performance Indicators*. Reliabilitas laporan keuangan yang terus disempurnakan, ditunjukkan dengan terjaganya sertifikasi standard ISO 9001:2015 pada *Audit Surveillance* untuk *Design of Accounting Policy and Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Management Accounting and Analysis, Tax Policy and Operation, Internal and External Reporting.*

Selain itu, penilaian *profitability* yang lebih granular hingga level *product*, membuat setiap elemen di BRI menjadi semakin fokus dalam pencapaian kinerja. Pengelolaan produk dilakukan secara adaptif dan inovatif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan penguatan *risk management* dalam proses perencanaan, *launching, monitoring*, dan evaluasi produk. Selanjutnya, Direktorat Keuangan juga berperan dalam menyusun struktur organisasi dan *job description* yang lebih *robust* sebagai *enablers* dalam pencapaian tujuan BRI. Untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab Direktorat Keuangan, selama tahun 2023 juga telah diimplementasikan inisiatif strategis internal yang berfokus pada penguatan kapabilitas *enablers* dan perbaikan bisnis proses. Antara lain implementasi beberapa modul *New Finance System* PaPM dan FPSL, BRI *Price*, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mendukung penyusunan dan implementasi strategi yang efektif, efisien dan berkualitas guna mendorong peningkatan kinerja BRI.

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of Ernst and Young Global*) yang menyatakan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BRI terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

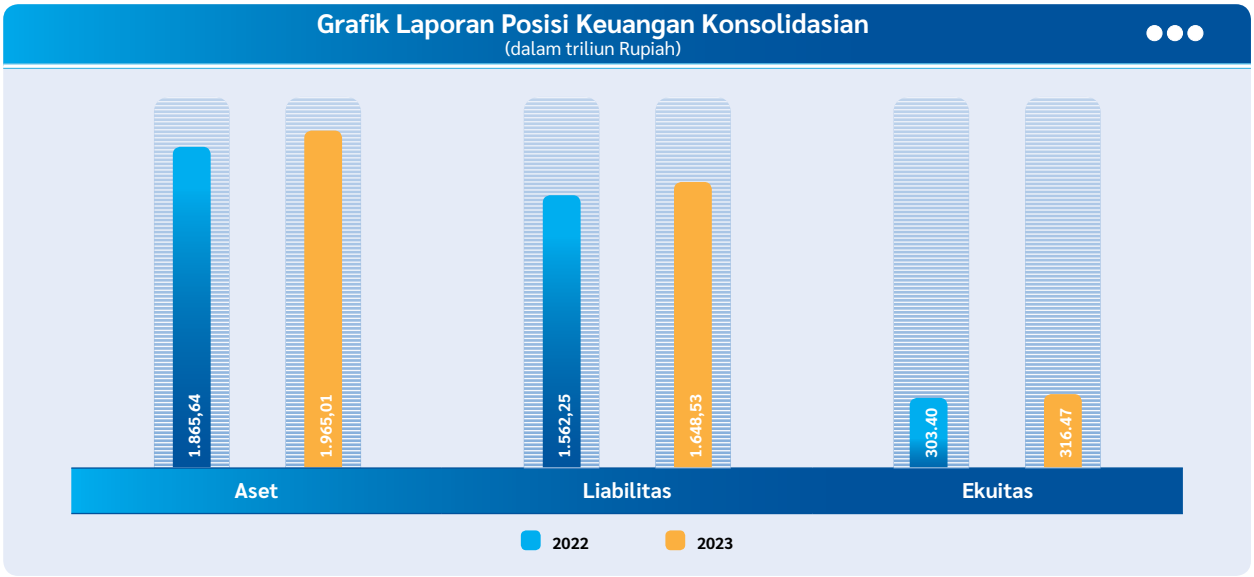
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	**31.603.784**	27.407.478	4.196.306	15,31%
Giro pada Bank Indonesia	**101.909.121**	150.935.150	(49.026.029)	(32,48%)
Giro pada Bank lain	**22.331.919**	21.488.434	843.485	3,93%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(9.984)**	(18.577)	8.593	(46,26%)
	22.321.935	21.469.857	852.078	3,97%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	**65.225.260**	70.401.901	(5.176.641)	(7,35%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(1.860)**	(1.981)	121	(6,11%)
	65.223.400	70.399.920	(5.176.520)	(7,35%)
Efek-efek	**331.091.304**	330.324.818	766.486	0,23%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(81.510)**	(82.835)	1.325	(1,60%)
	331.009.794	330.241.983	767.811	0,23%
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	**53.895.404**	39.067.375	14.828.029	37,96%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(2.323.916)**	(1.638.929)	(684.987)	41,79%
	51.571.488	37.428.446	14.143.042	37,79%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	**33.595.231**	51.014.678	(17.419.447)	(34,15%)
Tagihan Derivatif	**911.683**	911.405	278	0,03%
Kredit yang Diberikan	**1.197.752.706**	1.079.274.819	118.477.887	10,98%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(79.924.211)**	(88.323.830)	8.399.619	(9,51%)
	1.117.828.495	990.950.989	126.877.506	12,80%
Pinjaman Syariah	**13.668.220**	10.514.329	3.153.891	30,00%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(1.093.762)**	(1.286.203)	192.441	(14,96%)
	12.574.458	9.228.126	3.346.332	36,26%
Piutang Pembiayaan	**55.008.321**	49.287.917	5.720.404	11,61%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(4.483.915)**	(3.477.948)	(1.005.967)	28,92%
	50.524.406	45.809.969	4.714.437	10,29%
Tagihan Akseptasi	**10.217.408**	7.167.600	3.049.808	42,55%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(249.698)**	(136.536)	(113.162)	82,88%
	9.967.710	7.031.064	2.936.646	41,77%
Penyertaan Saham	**7.308.167**	6.515.095	793.072	12,17%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(2.676)**	(8.192)	5.516	(67,33%)
	7.305.491	6.506.903	798.588	12,27%
Aset Tetap				
Biaya perolehan	**81.463.777**	73.951.201	7.512.576	10,16%
Akumulasi penyusutan	**(21.785.658)**	(18.735.154)	(3.050.504)	16,28%
Nilai buku - neto	**59.678.119**	55.216.047	4.462.072	8,08%
Aset Pajak Tangguhan - neto	**15.605.462**	18.712.994	(3.107.532)	(16,61%)
Aset Lain-lain - neto	**53.376.453**	42.374.001	11.002.452	25,97%
TOTAL ASET	**1.965.007.030**	1.865.639.010	99.368.020	5,33%
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	**30.651.807**	24.910.579	5.741.228	23,05%
Simpanan Nasabah				
Giro	**346.124.372**	349.755.590	(3.631.218)	(1,04%)
Tabungan	**527.945.550**	522.647.920	5.297.630	1,01%
Deposito	**484.258.839**	435.480.503	48.778.336	11,20%
	1.358.328.761	1.307.884.013	50.444.748	3,86%
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	**11.958.319**	9.334.547	2.623.772	28,11%
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	**19.079.458**	9.997.592	9.081.866	90,84%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Derivatif	**925.210**	783.921	141.289	18,02%
Liabilitas Akseptasi	**10.217.408**	7.167.600	3.049.808	42,55%
Utang Pajak	**2.546.839**	3.053.782	(506.943)	(16,60%)
Surat Berharga yang Diterbitkan	**49.637.581**	63.611.761	(13.974.180)	(21,97%)
Pinjaman yang Diterima	**98.850.813**	79.371.200	19.479.613	24,54%
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	**6.117.768**	6.458.343	(340.575)	(5,27%)
Liabilitas Imbalan Kerja	**23.059.624**	21.296.487	1.763.137	8,28%
Liabilitas Lain-lain	**36.664.617**	27.871.880	8.792.737	31,55%
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	**496.683**	501.988	(5.305)	(1,06%)
TOTAL LIABILITAS	**1.648.534.888**	1.562.243.693	86.291.195	5,52%
EKUITAS				
Modal Saham	**7.577.950**	7.577.950	-	0,00%
Tambahan modal disetor	**75.853.127**	75.637.083	216.044	0,29%
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	**20.216.505**	20.267.952	(51.447)	(0,25%)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	**(253.744)**	(127.954)	(125.790)	98,31%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	**(2.221.745)**	(4.464.483)	2.242.738	(50,24%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**128.230**	139.978	(11.748)	(8,39%)
Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	**(2.134.699)**	(689.473)	(1.445.226)	209,61%
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	**(3.614.321)**	(2.202.178)	(1.412.143)	64,12%
Opsi saham	**54.769**	16.356	38.413	234,86%
Cadangan kompensasi atas saham bonus	**287.482**	210.266	77.216	36,72%
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	**1.758.580**	1.758.580	-	0,00%
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	**3.022.685**	3.022.685	-	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	**210.688.737**	198.147.249	12.541.488	6,33%
Total Saldo Laba	**213.711.422**	201.169.934	12.541.488	6,23%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	**311.363.556**	299.294.011	12.069.545	4,03%
Kepentingan non-pengendali	**5.108.586**	4.101.306	1.007.280	24,56%
TOTAL EKUITAS	**316.472.142**	303.395.317	13.076.825	4,31%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.965.007.030**	1.865.639.010	99.368.020	5,33%

Grafik Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam triliun Rupiah)



Aset

Aset tahun 2023 mencapai Rp1.965,01 triliun, meningkat 5,33% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1.865,64 triliun. Kenaikan aset ini didorong utamanya dari aktiva produktif yaitu Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang naik sebesar 11,18% yoy atau naik Rp127,35 triliun, efek-efek naik 0,23% yoy atau naik Rp766,49 miliar.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas	**31.603.784**	27.407.478	4.196.306	15,31%
Giro pada Bank Indonesia	**101.909.121**	150.935.150	(49.026.029)	(32,48%)
Giro pada Bank lain	**22.331.919**	21.488.434	843.485	3,93%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(9.984)**	(18.577)	8.593	(46,26%)
	22.321.935	21.469.857	852.078	3,97%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	**65.225.260**	70.401.901	(5.176.641)	(7,35%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(1.860)**	(1.981)	121	(6,11%)
	65.223.400	70.399.920	(5.176.520)	(7,35%)
Efek-efek	**331.091.304**	330.324.818	766.486	0,23%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(81.510)**	(82.835)	1.325	(1,60%)
	331.009.794	330.241.983	767.811	0,23%
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	**53.895.404**	39.067.375	14.828.029	37,96%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(2.323.916)**	(1.638.929)	(684.987)	41,79%
	51.571.488	37.428.446	14.143.042	37,79%
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	**33.595.231**	51.014.678	(17.419.447)	(34,15%)
Tagihan Derivatif	**911.683**	911.405	278	0,03%
Kredit yang Diberikan	**1.197.752.706**	1.079.274.819	118.477.887	10,98%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)	8.399.619	(9,51%)
	1.117.828.495	990.950.989	126.877.506	12,80%
Pinjaman Syariah	13.668.220	10.514.329	3.153.891	30,00%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.093.762)	(1.286.203)	192.441	(14,96%)
	12.574.458	9.228.126	3.346.332	36,26%
Piutang Pembiayaan	55.008.321	49.287.917	5.720.404	11,61%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)	(1.005.967)	28,92%
	50.524.406	45.809.969	4.714.437	10,29%
Tagihan Akseptasi	10.217.408	7.167.600	3.049.808	42,55%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(249.698)	(136.536)	(113.162)	82,88%
	9.967.710	7.031.064	2.936.646	41,77%
Penyertaan Saham	7.308.167	6.515.095	793.072	12,17%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.676)	(8.192)	5.516	(67,33%)
	7.305.491	6.506.903	798.588	12,27%
Aset Tetap				
Biaya perolehan	81.463.777	73.951.201	7.512.576	10,16%
Akumulasi penyusutan	(21.785.658)	(18.735.154)	(3.050.504)	16,28%
Nilai buku - neto	59.678.119	55.216.047	4.462.072	8,08%
Aset Pajak Tangguhan - neto	15.605.462	18.712.994	(3.107.532)	(16,61%)
Aset Lain-lain - neto	53.376.453	42.374.001	11.002.452	25,97%
TOTAL ASET	1.965.007.030	**1.865.639.010**	**99.368.020**	**5,33%**

Kas

Kas tahun 2023 mencapai Rp31,60 triliun, meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp27,41 triliun. Kenaikan kas secara total masih dipengaruhi oleh mata uang Rupiah yang tumbuh Rp4,20 triliun atau 15,31%, hal ini sejalan dengan kebutuhan operasional BRI.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	29.764.399	25.980.803	3.783.596	14,56%
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	1.229.799	645.965	583.834	90,38%
Dolar Singapura	181.540	206.765	(25.225)	(12,20%)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Euro Eropa	61.684	167.307	(105.623)	(63,13%)
Dolar Australia	67.749	138.796	(71.047)	(51,19%)
Ringgit Malaysia	41.489	110.447	(68.958)	(62,44%)
Riyal Arab Saudi	188.217	63.512	124.705	196,35%
Pound Sterling Inggris	11.839	25.567	(13.728)	(53,69%)
Dirham Uni Emirat Arab	11.811	22.592	(10.781)	(47,72%)
Dolar Hong kong	5.183	9.094	(3.911)	(43,01%)
Dolar Brunei Darussalam	5.270	9.355	(4.085)	(43,67%)
Dolar Selandia Baru	2.024	5.669	(3.645)	(64,30%)
Yen Jepang	9.110	5.020	4.090	81,47%
Dolar Kanada	3.183	4.042	(859)	(21,25%)
Renminbi	6.070	4.020	2.050	51,00%
Franc Swiss	10.633	4.020	6.613	26,31%
Peso Filipina	1.257	1.698	(441)	(25,97%)
Baht Thailand	838	1.477	(639)	(43,26%)
Dong Vietnam	266	593	(327)	(55,14%)
Dolar Taiwan Baru	869	292	577	197,60%
Won Korea Selatan	327	245	82	33,47%
Rupee India	135	113	22	19,47%
Kina Papua Nugini	92	86	6	6,98%
	1.839.385	1.426.675	412.710	28,93%
Total	31.603.784	**27.407.478**	**4.196.306**	**15,31%**

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia (BI) tahun 2023 mencapai Rp101,90 triliun, turun 32,48% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp150,94 triliun. Penurunan ini sejalan dengan perolehan insentif penurunan GWM sebesar 2,95% dari akhir Desember 2023 lebih tinggi dari Desember 2022 sebesar 2%, insentif ini diterima oleh Perseroan atas kontribusi positif dalam penyaluran kredit terhadap sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel Giro pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	93.630.203	141.071.603	(47.441.400)	(33,63%)
Dolar Amerika Serikat	8.278.918	9.863.547	(1.584.629)	(16,07%)
Total	101.909.121	**150.935.150**	**(49.026.029)**	**(32,48%)**

Giro Pada Bank Lain

Giro pada Bank lain tahun 2023 mencapai Rp22,33 triliun, meningkat 3,93% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp21,49 triliun. Peningkatan ini disumbang oleh mata uang asing pihak ketiga yang naik 5,63% yoy, kenaikan tersebut dalam rangka optimalisasi likuiditas serta kegiatan operasional transaksi antar bank.

Tabel Giro Pada Bank Lain Berdasarkan Mata Uang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Rupiah	**269.629**	328.752	(59.123)	(17,98%)
Mata uang asing	**21.614.031**	20.461.704	1.152.327	5,63%
Pihak berelasi				
Rupiah	**414.931**	670.798	(255.867)	(38,14%)
Mata uang asing	**33.328**	27.180	6.148	22,62%
Total	**22.331.919**	21.488.434	843.485	3,93%
Cadangan kerugian penurunan nilai	**(9.984)**	(18.577)	8.593	(46,26%)
Total - Bersih	**22.321.935**	**21.469.857**	**852.078**	**3,97%**

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2023 mencapai Rp65,22 triliun, turun sebesar 7,35% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp70,40 triliun. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan penempatan dalam bentuk Dolar Amerika Serikat ke bank sentral yang turun 46,16% yoy atau turun Rp15,84 triliun dalam rangka penyesuaian kebutuhan transaksi dalam mata uang asing yang tidak sebesar mata uang Rupiah.

Tabel Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain Berdasarkan Mata Uang dan Jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia	**30.440.561**	20.869.473	9.571.088	45,86%
Inter-bank call money	**2.030.000**	1.050.000	980.000	93,33%
Deposito Berjangka	**576.020**	637.059	(61.039)	(9,58%)
Deposit on Call	**-**	-	-	-
Dolar Amerika Serikat				
Bank Indonesia	**18.476.400**	34.319.160	(15.842.760)	(46,16%)
Inter-bank call money	**8.442.491**	8.102.368	340.123	4,20%
Deposito berjangka	**299.469**	17.089	282.380	1.652,41%
Penempatan lainnya	**1.924.625**	1.790.262	134.363	7,51%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Euro Eropa				
Inter-bank call money	-	563.778	(563.778)	(100,00%)
	62.297.819	67.349.188	(5.051.369)	(7,50%)
Pihak berelasi				
Rupiah				
Inter-bank call money	200.000	200.000	-	0,00%
Deposito berjangka	933.662	673.263	260.399	38,68%
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	1.770.655	2.179.450	(408.795)	(18,76%)
Deposito berjangka	23.124	-	23.124	100,00%
Dolar Singapura				
Inter-bank call money	-	-	-	-
	2.927.441	3.052.713	(125.272)	(4,10%)
Total	65.225.260	**70.401.901**	**(5.176.641)**	**(7,35%)**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.860)	(1.981)	121	(6,11%)
Bersih	65.223.400	**70.399.920**	**(5.176.519)**	**(7,35%)**

Efek-Efek

Efek-efek tahun 2023 mencapai Rp331,09 triliun relatif *flat* tumbuh 0,23% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp330,24 triliun. Pertumbuhan *flat* ini disumbang oleh penurunan efek-efek klasifikasi biaya perolehan diamortisasi sebesar 8,23% yoy atau turun Rp13,05 triliun, penurunan tersebut terutama dalam rangka optimalisasi *portfolio* kepada aset yang memiliki *yield* yang lebih optimal dalam hal ini kredit yang diberikan selain itu penurunan ini untuk memberikan fleksibilitas ruang bagi likuiditas karena komposisi efek-efek akan lebih ditingkatkan kepada klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif.

Tabel Efek-Efek Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga	74.551.023	44.013.526	30.537.497	69,38%
Pihak berelasi	256.540.281	286.311.292	(29.771.011)	(10,40%)
Total	331.091.304	**330.324.818**	**766.486**	**0,23%**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(81.510)	(82.835)	1.325	(1,60%)
Bersih	331.009.794	**330.241.983**	**767.811**	**0,23%**

Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya tahun 2023 mencapai Rp53,90 triliun, meningkat 37,96% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp39,06 triliun. Kenaikan wesel ekspor dan tagihan lainnya sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan terkait ekspor impor dan transaksi *trade finance* lainnya setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan akibat dampak Covid-19.

Efek-Efek yang dibeli dengan Janji dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tahun 2023 mencapai Rp33,59 triliun, menurun 34,15% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp51,01 triliun. Penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan strategi Perseroan dalam diversifikasi *income* dan optimalisasi pendapatan bunga dengan cara mengalihkan kepada aset produktif lain khususnya kredit yang diberikan.

Tagihan Derivatif

Tagihan derivatif pada tahun 2023 mencapai Rp911,68 miliar, relative *flat* hanya tumbuh tipis 0,03% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp911,40 miliar atau naik Rp278,20 miliar yang disebabkan karena transaksi IRS. Transaksi derivatif dilakukan dalam rangka lindung nilai dan juga untuk mengelola likuiditas Bank. Tagihan derivatif diakui karena adanya kenaikan nilai wajar derivatif pada saat tanggal pelaporan dibandingkan dengan nilai kontraknya.

Kredit dan Pembiayaan yang diberikan

Kredit dan pembiayaan yang diberikan BRI secara konsolidasi tahun 2023 mencapai Rp1.226,43 triliun, meningkat 11,18% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1.139,08 triliun. Peningkatan kredit ini utamanya didorong oleh kredit BRI *Only* yang tumbuh sebesar 11,29% yoy atau Rp116,29 triliun yang utamanya disumbang oleh segmen mikro yang tumbuh dengan sangat baik sebesar 10,44% yoy atau Rp46,93 triliun dari sisi Perusahaan Anak turut berkontribusi secara positif dengan pertumbuhan nominal tertinggi secara urutan disumbang oleh Pegadaian sebesar 14,43% yoy atau Rp8,52 triliun, PNM sebesar 10,58% yoy atau Rp4,51 triliun, dan BRI Finance sebesar 17,98% atau Rp1,21 triliun.

Secara segmentasi, segmen mikro dan ultra mikro tumbuh sebesar 10,88% yoy atau Rp60,00 triliun dengan komposisi sebesar 48,26% dari total *loan*. Pertumbuhan ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus tumbuh di segmen UMKM khususnya segmen mikro dan ultra mikro.

Tabel Kredit dan Pembiayaan yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit yang Diberikan	**1.197.752.706**	1.079.274.819	118.477.887	10,98%
Pinjaman Syariah	**13.668.220**	10.514.329	3.153.891	30,00%
Piutang Sewa Pembiayaan	**55.008.321**	49.287.917	5.720.404	11,61%
Total Kredit dan Pembiayaan yang Diberikan (*Gross*)	**1.266.429.247**	1.139.077.065	127.352.182	11,18%
Dikurangi cadangan	**(85.501.888)**	(93.087.981)	(7.586.093)	(8,15%)
Bersih	**1.180.927.359**	**1.045.989.084**	**134.938.275**	**12,90%**

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi tahun 2023 mencapai Rp10,22 triliun, meningkat signifikan 42,55% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp7,17 triliun. Kenaikan tagihan akesptasi ini sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan terkait ekspor impor dan transaksi *trade finance* lainnya setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan akibat dampak Covid-19.

Penyertaan Saham

Penyertaan saham tahun 2023 mencapai Rp7,31 triliun, meningkat 12,17% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp6,52 triliun. Faktor dominan kenaikan tersebut berasal dari pengakuan metode ekuitas atas laba dari entitas asosiasi sesuai dengan prosentase kepemilikan BRI yaitu PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bahana Artha Ventura.

Aset Tetap

Aset tetap tahun 2023 mencapai Rp81,46 triliun, meningkat 10,16% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp73,95 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan karena adanya penambahan bangunan sebesar Rp1,93 triliun, serta penambahan *hardware* dan *software* komputer sebesar Rp3,75 triliun.

Aset Pajak Tangguhan – Neto

Aset pajak tangguhan - neto tahun 2023 mencapai Rp15,61 triliun, mengalami penurunan 16,61% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp18,71 triliun. Penurunan ini terjadi didorong oleh pos Cadangan Kerugian Aktiva Produktif (CKPN) yang turun sebesar Rp3,00 triliun, hal ini sejalan dengan peningkatan pencadangan yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mitigasi risiko atas kemungkinan pemburukan risiko aset produktif yang dimiliki.

Aset Lain-Lain – Neto

Aset lain-lain – neto tahun 2023 mencapai Rp53,38 triliun, meningkat 25,97% yoy dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp42,37 triliun. Dari total kenaikan aset lain-lain sebesar 25,97% disebabkan oleh kenaikan biaya dibayar dimuka sebesar Rp5 triliun yang utamanya dari premi asuransi kredit Kupedes dan KUR dan adanya produk *Term Deposit* Valas Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) Bank Indonesia yang naik Rp5,8 triliun yang diluncurkan di tahun 2023.

Liabilitas

Liabilitas tahun 2023 mencapai Rp1.648,54 triliun, meningkat 5,52% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1.562,24 triliun. Kenaikan ini utamanya disumbang oleh simpanan nasabah yang naik sebesar 3,86% yoy atau naik Rp50,44 triliun, simpanan nasabah memiliki kontribusi terbesar dalam total liabilitas tercatat sebesar 82,40%.

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Segera	**30.651.807**	24.910.579	5.741.228	23,05%
Simpanan Nasabah				
Giro	**346.124.372**	349.755.590	(3.631.218)	(1,04%)
Tabungan	**527.945.550**	522.647.920	5.297.630	1,01%
Deposito	**484.258.839**	435.480.503	48.778.336	11,20%
	1.358.328.761	1.307.884.013	50.444.748	3,86%
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	**11.958.319**	9.334.547	2.623.772	28,11%
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	**19.079.458**	9.997.592	9.081.866	90,84%
Liabilitas Derivatif	**925.210**	783.921	141.289	18,02%
Liabilitas Akseptasi	**10.217.408**	7.167.600	3.049.808	42,55%
Utang Pajak	**2.546.839**	3.053.782	(506.943)	(16,60%)
Surat Berharga yang Diterbitkan	**49.637.581**	63.611.761	(13.974.180)	(21,97%)
Pinjaman yang Diterima	**98.850.813**	79.371.200	19.479.613	24,54%
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	**6.117.768**	6.458.343	(340.575)	(5,27%)
Liabilitas Imbalan Kerja	**23.059.624**	21.296.487	1.763.137	8,28%
Liabilitas Lain-lain	**36.664.617**	27.871.880	8.792.737	31,55%
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	**496.683**	501.988	(5.305)	(1,06%)
TOTAL LIABILITAS	**1.648.534.888**	**1.562.243.693**	**86.291.195**	**5,52%**

Liabilitas Segera

Liabilitas segera antara lain terdiri dari titipan *advanced payment*, titipan dividen, kewajiban BRI sebagai bank penerbit kartu ATM dan kartu kredit. kiriman uang, dana setoran cek, titipan deposito, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BRI, dan penampungan bantuan sosial. Liabilitas segera tahun 2023 mencapai Rp30,65 triliun, meningkat 23,05% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp24,91 triliun. Kenaikan terbesar disumbang oleh titipan pembayaran dividen interim yang tercatat sebesar Rp12,70 triliun hal ini sejalan dengan pengumuman pembayaran dividen interim yang dilakukan BRI pada akhir Desember 2023 yang pembayarannya dilakukan pada Januari 2024.

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah tahun 2023 mencapai Rp1.358,33 triliun, meningkat 3,86% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1.307,88 triliun. Pertumbuhan simpanan tertinggi di dorong oleh Deposito sebesar 11,20% yoy, Tabungan 1,01% yoy dan Giro tercatat turun sebesar 1,04%. *Flatnya* simpanan dikarenakan terdapat *high base effect* di tahun 2022 dimana pada akhir tahun 2022 terdapat dana kompensasi Pemerintah kepada sektor Migas yang masuk di produk giro sebesar Rp46 triliun, jika kinerja tahun 2022 di normalisasi maka pertumbuhan giro tercatat sebesar 13,95% yoy dan total simpanan sebesar 7,64% yoy. Perseroan masih mampu menjaga rasio CASA diatas 60% atau tepatnya sebesar 64,35% dan akan terus ditingkatkan kedepannya sejalan dengan strategi untuk fokus dalam perolehan CASA melalui transaksi.

Tabel Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro	**346.124.372**	349.755.590	(3.631.218)	(1,04%)
Tabungan	**527.945.550**	522.647.920	5.297.630	1,01%
Deposito Berjangka	**484.258.839**	435.480.503	48.778.336	11,20%
Total Simpanan Nasabah	**1.358.328.761**	**1.307.884.013**	**50.444.748**	**3,86%**

Simpanan Dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya tahun 2023 mencapai Rp11,96 triliun meningkat 28,11% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp9,33 triliun. Peningkatan ini sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk optimalisasi perolehan likuiditas serta upaya diversifikasi *funding* selain dari dana pihak ketiga.

Efek-Efek yang dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali tahun 2023 mencapai Rp19,08 triliun, meningkat 90,84% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp9,99 triliun. Kenaikan ini sebagai bagian dari strategi Perseroan untukk pemenuhan likuiditas khususnya jangka pendek kurang dari 1 tahun di tengah kondisi likuiditas khususnya dana pihak ketiga yang sedikit mengalami pengetatan.

Liabilitas Derivatif

Liabilitas derivatif tahun 2023 mencapai Rp925,21 miliar, meningkat 18,02% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp783,92 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada pos transaksi *swap* mata uang asing yang tumbuh Rp284,93 miliar. Kenaikan tersebut merupakan strategi *treasury* Perseroan di tengah tren pergerakan suku bunga yang fluktuatif.

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi tahun 2023 mencapai Rp10,22 triliun, meningkat 42,55% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp7,17 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan terdapatnya peningkatan beberapa akseptasi pada akhir tahun diberikan pembiayaan dalam bentuk bank garansi dan atau wesel yang tercatat pada pos komitmen dan kontinjensi, hal ini seperti diketahui Pemerintah pada akhir tahun 2023 meningkatkan belanja APBN dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi dalam level yang *sustain*.

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2023 mencapai Rp2,55 triliun, mengalami penurunan 16,60% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp3,05 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada utang pajak PPh Pasal 29 yang turun sebesar 96,94% yoy. Penurunan PPh Pasal 29 ini disebabkan oleh penurunan koreksi fiskal yang dipengaruhi dari pembentukan CKPN pinjaman yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BRI (entitas induk)				
Pajak penghasilan				
Pasal 25	**1.461.224**	1.135.923	325.301	28,64%
Pasal 29	**20.725**	678.296	(657.571)	(96,94%)
	1.481.949	1.814.219	(332.270)	(18,31%)
Entitas anak				
Pajak penghasilan	**959.642**	1.148.050	(188.408	(16,41%)
Pajak Pertambahan Nilai	**105.248**	91.513	13.735	15,01%
	1.064.890	1.239.563	(174.673)	(14,09%)
Total	**2.546.839**	**3.053.782**	**(506.943)**	**(16,60%)**

Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan tahun 2023 mencapai Rp49,64 triliun, mengalami penurunan 21,97% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp63,61 triliun. Secara denominasi, penurunan ini didorong oleh surat berharga rupiah yang turun 12,74% yoy atau turun Rp6,12 triliun dan mata uang asing yang turun 48,77% yoy atau turun Rp7,58 triliun. Penurunan ini disumbang oleh beberapa jenis surat berharga sebagai berikut:

1. Global Bond BRI Rp7,8 triliun jatuh tempo Juli 2023.
2. BRI Green Bond Seri A Rp2,5 triliun jatuh tempo Juli 2023.
3. PNM bond III Tahap III tahun 2020 Seri A Rp55 miliar jatuh tempo April 2023.
4. PNM bond IV Tahap II tahun 2020 Seri A Rp2,4 triliun jatuh tempo Mei 2023.
5. PNM Sukuk Mudharabah V Seri B Rp276 miliar.
6. Pegadaian Bond III tahun 2018 Seri C Rp2 triliun jatuh tempo Maret 2023

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima tahun 2023 mencapai Rp98,85 triliun, meningkat 24,54% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp79,37 triliun. Kenaikan ini utamanya disumbang oleh *banking acceptances* dan *bilateral loan* sebagai strategi dalam menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dengan kondisi *loan to deposit ratio* secara harian agar kebutuhan likuiditas dapat terpenuhi secara baik dan tepat alokasi.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tahun 2023 mencapai Rp6,12 triliun, turun 5,27% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp6,46 triliun. Penurunan tersebut menyesuaikan dengan penurunan eksposur dari liabilitas komitmen kontinjensi seperti bank garansi, *letter of credit* dari debitur khususnya yang bergerak di sektor konstruksi.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2023 mencapai Rp23,06 triliun mengalami kenaikan 8,28% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp21,30 triliun. Kenaikan ini disumbang oleh kenaikan cadangan atas program imbalan bagi pekerja atas beberapa program dan telah disesuaikan oleh aktuaria melihat pergerakan asumsi pembentuk seperti *discount factor*, asumsi kenaikan upah, reratan usia pekerja dan asumsi lain yang terkait.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan atas program imbalan bagi pekerja kerja	**13.111.142**	10.898.392	2.212.750	20,30%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan Bonus dan Insentif	8.496.353	8.936.362	(440.009)	(4,92%)
Cadangan Tunjangan Hari Raya	1.207.929	834.878	373.051	44,68%
Cadangan pekerja kontrak	244.200	626.855	(382.655)	(61,04%)
Total	**23.059.624**	**21.296.487**	**1.763.137**	**8,28%**

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain tahun 2023 mencapai Rp36,55 triliun, meningkat 31,55% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp27,87 triliun. Kenaikan disumbang oleh produk *Term Deposit* Valas Devisa Hasil Ekspor (TD DHE) Bank Indonesia yang baru diluncurkan pada tahun 2023.

Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi tahun 2023 mencapai Rp496,68 miliar, relatif *flat* hanya turun 1,06% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp501,99 miliar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dari pengakuan nilai perolehan pinjaman, dimana terdapat jatuh tempo pinjaman di tahun 2023 sebesar Rp500 miliar dan kemudian ditahun yang sama diterbitkan pinjaman obligasi subordinasi IV tahun 2023 sebesar Rp495 miliar.

Ekuitas

Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp316,47 triliun, meningkat 4,31% yoy atau sebesar Rp13,08 triliun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp303,40 triliun. Peningkatan bersumber dari laba tahun berjalan yang naik sebesar 17,54% atau sebesar Rp9,02 triliun, selain itu peningkatan juga disumbang oleh *others comprehensive income* efek-efek yang tercatat mengalami perbaikan sebesar Rp2,24 triliun atau membaik 50,24% yoy perbaikan ini sejalan dengan kondisi ekonomi khususnya *rate environment* yang mulai melandai yang kemudian menodorong *yield* ke arah yang relatif stabil dan bahkan sedikit mengalami penurunan dibandingkan medio tahun 2021-2022.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
EKUITAS				
Modal Saham	7.577.950	7.577.950	0	0,00%
Tambahan modal disetor	75.853.127	75.637.083	216.044	0,29%
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	20.216.505	20.267.952	(51.447)	(0,25%)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(253.744)	(127.954)	(125.790)	98,31%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	(2.221.745)	(4.464.483)	2.242.738	(50,24%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	128.230	139.978	(11.748)	(8,39%)
Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(2.134.699)	(689.473)	(1.445.226)	209,61%
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(3.614.321)	(2.202.178)	(1.412.143)	64,12%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Opsi saham	**54.769**	16.356	38.413	234,86%
Cadangan kompensasi atas saham bonus	**287.482**	210.266	77.216	36,72%
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	**1.758.580**	1.758.580	0	0,00%
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	**3.022.685**	3.022.685	0	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	**210.688.737**	198.147.249	12.541.488	6,33%
Total Saldo Laba	**213.711.422**	201.169.934	12.541.488	6,23%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	**311.363.556**	299.294.011	12.069.545	4,03%
Kepentingan non-pengendali	**5.108.586**	4.101.306	1.007.280	24,56%
TOTAL EKUITAS	**316.472.142**	**303.395.317**	**13.076.825**	**4,31%**

Modal Saham

Modal saham tahun 2023 mencapai Rp7,58 triliun, tetap dibandingkan tahun 2022, tidak mengalami perubahan dikarenakan sepanjang tahun 2023 tidak terdapat aksi korporasi terkait penerbitan saham baru.

Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Efek-Efek yang Diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih tahun 2023 tercatat minus Rp2,2 triliun, meningkat 50,24% yoy dibandingkan tahun 2022 yang tercatat minus Rp4,46 triliun. perbaikan ini sejalan dengan kondisi ekonomi khususnya *rate environment* yang mulai melandai yang kemudian menodorong *yield* ke arah yang relatif stabil dan bahkan sedikit mengalami penurunan dibandingkan medio tahun 2021-2022.

Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri) tahun 2023 mencapai Rp3,61 triliun, meningkat 64,12% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp2,20 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan dengan *buyback* saham yang dilakukan Perseroan pada tahun 2023.

Kepentingan Non-Pengendali

Kepentingan non-pengendali tahun 2023 mencapai Rp5,11 triliun, atau meningkat 24,56% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp4,10 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan kontribusi laba Perusahaan Anak sebesar 39,65% yoy atau naik Rp2,08 triliun kenaikan ini juga mengerek naik kontribusi laba Perusahaan Anak terhadap laba konsolidasi menjadi 12,09% atau naik sebesar 1,91% yoy dibandingkan Desember 2022 sebesar 10,18%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

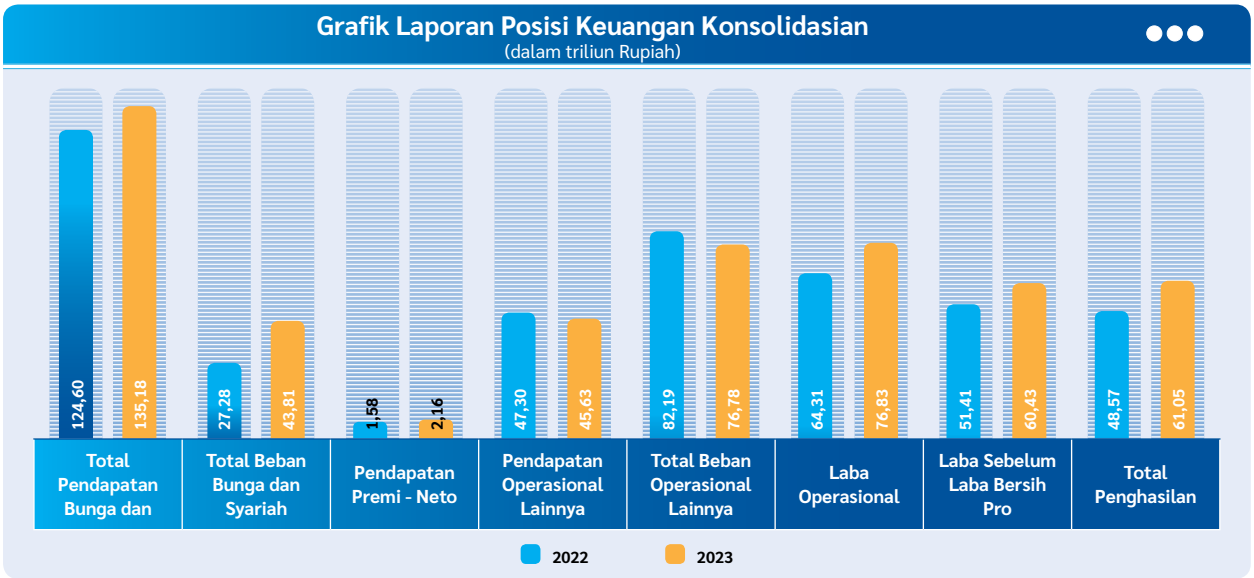
Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga dan Syariah				
Pendapatan bunga	**166.052.387**	141.756.773	24.295.614	17,14%
Pendapatan syariah	**12.943.607**	10.118.043	2.825.564	27,93%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	**178.995.994**	151.874.816	27.121.178	17,86%
Beban Bunga dan Syariah				
Beban bunga	**(42.658.864)**	(26.269.701)	(16.389.163)	62,39%
Beban syariah	**(1.153.643)**	(1.008.042)	(145.601)	14,44%
Total Beban Bunga dan Syariah	**(43.812.507)**	(27.277.743)	(16.534.764)	60,62%
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	**135.183.487**	124.597.073	10.586.414	8,50%
Pendapatan premi	**9.078.853**	8.936.995	141.858	1,59%
Beban klaim	**(6.917.461)**	(7.359.672)	442.211	(6,01%)
Pendapatan premi - neto	**2.161.392**	1.577.323	584.069	37,03%
Pendapatan Penjualan Emas	**7.982.888**	8.175.106	(192.218)	(2,35%)
Harga Pokok Penjualan Emas	**(7.663.244)**	(7.875.955)	212.711	(2,70%)
Pendapatan Penjualan Emas -Net	**319.644**	299.151	20.493	6,85%
Pendapatan Operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	**20.737.913**	18.794.964	1.942.949	10,34%
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	**16.833.578**	12.468.321	4.365.257	35,01%
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	**1.898.653**	1.518.191	380.462	25,06%
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	**402.526**	1.132.079	(729.553)	(64,44%)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	**214.435**	145.520	68.915	47,35%
Lain-lain	**5.538.680**	5.068.619	470.061	9,27%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	**45.625.785**	39.127.694	6.498.091	16,61%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	**(29.523.426)**	(27.384.906)	(2.138.520)	7,81%
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	**341.994**	543.145	(201.151)	(37,03%)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	**(497.848)**	(137.431)	(360.417)	262,25%
Beban Operasional lainnya				
Tenaga kerja dan tunjangan	**(37.850.275)**	(39.390.133)	1.539.858	(3,91%)
Umum dan administrasi	**(28.484.209)**	(25.958.686)	(2.525.523)	9,73%
Lain-lain	**(10.447.807)**	(8.967.193)	(1.480.614)	16,51%
Total Beban Operasional lainnya	**(76.782.291)**	(74.316.012)	2.466.279	3,32%
LABA OPERASIONAL	**76.828.737**	**64.306.037**	**12.522.700**	**19,47%**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	**(399.025)**	290.664	(689.689)	(237,28%)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**76.429.712**	**64.596.701**	**11.833.011**	**18,32%**

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BEBAN PAJAK	**(16.004.664)**	**(13.188.494)**	**(2.816.170)**	**21,35%**
LABA BERSIH	**60.425.048**	**51.408.207**	**9.016.841**	**17,54%**
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	**(1.787.840)**	902.754	(2.690.594)	(298,04%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	**348.975**	(176.671)	525.646	(297,53%)
Surplus revaluasi aset tetap	**(82.365)**	3.297.304	(3.379.669)	(102,50%)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	**(125.790)**	(11.979)	(113.811)	950,09%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**1.782.067**	(7.946.514)	9.728.581	(122,43%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**(9.105)**	(413.197)	404.092	(97,80%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	**502.669**	1.509.279	(1.006.610)	(66,69%)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	**628.611**	**(2.839.024)**	**3.467.635**	**(122,14%)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**61.053.659**	**48.569.183**	**12.484.476**	**25,70%**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	**60.099.863**	51.170.312	8.929.551	17,45%
Kepentingan non-pengendali	**325.185**	237.895	87.290	36,69%
TOTAL	**60.425.048**	**51.408.207**	**9.016.841**	**17,54%**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	**60.708.390**	48.333.349	12.375.041	25,60%
Kepentingan non-pengendali	**345.269**	235.834	109.435	46,40%
TOTAL	**61.053.659**	**48.569.183**	**12.484.476**	**25,70%**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)				
Dasar	**398**	338	60	17,75%
Dilusian	**398**	338	60	17,81%



Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah tahun 2023 mencapai Rp178,99 triliun, meningkat 17,86% yoy atau naik sebesar Rp27,12 triliun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp151,87 triliun. Komposisi pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan piutang pembiayaan (termasuk syariah) mendominasi sebesar 88,96% dari total pendapatan bunga mampu naik 27 bps dibandingkan komposisi tahun 2022 sebesar 88,69%. Kenaikan komposisi di tahun 2023 disumbang oleh seluruh jenis pendapatan bunga, dimana mikro naik 14,56% yoy, ritel naik 6,89% yoy, korporasi naik 89,12%, *murabahab* naik 17,28% dan *murabahah* naik 31,03%.

Segmen bisnis ultra mikro dan mikro baik secara konvensional dan syariah basis, menjadi penyumbang pertumbuhan pendapatan bunga terbesar dengan tumbuh 14,17% yoy, hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit segmen mikro yang sangat baik, dari sisi Perusahaan Anak tercatat Pegadaian mampu tumbuh sebesar 11,41% yoy atau naik Rp1,52 triliun dan PNM tumbuh sebesar 16,69% yoy atau naik Rp2,08 triliun kenaikan ini mendorong kontribusi pendapatan bunga mereka yang masing-masing menjadi 9,33% dan 9,11% dari total konsolidasi.

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah tahun 2023 mencapai Rp43,81 triliun, atau tercatat naik 60,62% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp27,28 triliun. Kenaikan ini didorong oleh seluruh pos beban bunga baik simpanan dan non simpanan, dimana beban bunga simpanan naik sebesar Rp13,45 triliun atau naik 85,65% dan beban bunga non simpanan naik sebesar Rp2,94 triliun atau naik 27,82% yoy, Kenaikan ini juga tercermin dari *cost of fund* rasio Perseroan menjadi sebesar 3,00% (konsolidasi) dan 2,91% (*bank only*), kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan suku bunga secara global dan turut berpengaruh kepada domestik.

Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

Pendapatan bunga dan syariah - neto tahun 2023 mencapai Rp135,18 triliun meningkat 8,50% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp124,60 triliun. Kenaikan ini disumbang dari kemampuan Perseroan dalam peningkatan pendapatan bunga yang naik 17,86% yoy melalui pertumbuhan yang baik pada aktiva produktif khususnya kredit yang mampu mengeliminir dampak dari kenaikan beban bunga yang cukup tinggi 60,62% sehingga secara netto Perseroan masih mampu mencatat pertumbuhan yang baik.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Bunga dan Syariah	178.995.994	151.874.816	27.121.178	17,86%
Beban Bunga dan Syariah	(43.812.507)	(27.277.743)	(16.534.764)	60,62%
Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto	135.183.487	**124.597.073**	**10.586.414**	**8,50%**

Pendapatan Premi - Neto

Pendapatan premi - neto tahun 2023 mencapai Rp2,16 triliun, meningkat 37,03% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1,58 triliun, Kenaikan ini disumbang oleh kinerja Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak di bidang asuransi yaitu BRI Life dan BRI Insurance.

Pendapatan Premi - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan premi	9.078.853	8.936.995	141.858	1,59%
Beban klaim	(6.917.461)	(7.359.672)	442.211	(6,01%)
Pendapatan premi - neto	**2.161.392**	**1.577.323**	**584.069**	**37,03%**

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya tahun 2023 mencapai Rp45,63 triliun, meningkat 16,61% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp39,13 triliun. Peningkatan ini disumbang oleh:

- Provisi dan komisi lainnya (*fee based income*) naik sebesar 10,34% yoy atau Rp1,94 triliun yang didorong utamanya oleh jasa trade finance naik 29,39% yoy atau Rp535 miliar, jasa perkreditan yang naik 21,25% yoy atau naik Rp407,7 miliar dan jasa dari transaksi *e-channel* dan *e-banking* naik 4,60% yoy atau Rp340 miliar.
- Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan (*recovery income*) naik 35,01% yoy atau Rp4,37 triliun didorong oleh peningkatan *recovery* di segmen mikro yang naik sebesar 45,67% yoy atau naik sebesar Rp2,74 triliun dan diikuti oleh segmen *small* yang naik sebesar 28,84% yoy atau naik Rp1,39 triliun.

Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Provisi dan komisi lainnya	20.737.913	18.794.964	1.942.949	10,34%
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	16.833.578	12.468.321	4.365.257	35,01%
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	1.898.653	1.518.191	380.462	25,06%
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	402.526	1.132.079	(729.553)	-64,44%
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	214.435	145.520	68.915	47,36%
Lain-lain	5.538.680	5.068.619	470.061	9,27%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	**45.625.785**	**39.127.694**	**6.498.091**	**16,61%**

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan – Neto

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (CKPN) - neto tahun 2023 mencapai Rp29,52 triliun, atau tercatat naik sebesar 7,81% yoy atau sebesar Rp2,1 triliun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp27,38 triliun. Secara *historical* sejak tahun 2015-2019 sebelum masa pandemi rasio *loan loss reserve* Perseroan berada di rerataan 4,4%, sementara di masa pandemi dan *pre* pandemi pada tahun 2022-2023 berada di level 6-7% sehingga dapat dikatakan kenaikan biaya penyisihan ini sebagai bentuk antisipatif Perseroan dalam langkah percepatan penyelesaian kredit restru covid-19. Kedepan setelah seluruh kredit yang terdampak covid-19 ini telah diselesaikan dengan baik kami proyeksikan biaya penyisihan ini akan terus menunjukkan *improvement*.

Pembalikan (Beban) Penyisihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi – Neto

Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto tahun 2023 tercatat pembalikan sebesar Rp341,99 miliar, tercatat turun 37,03% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp543,14 miliar. Penurunan ini menyesuaikan dengan perubahan besaran pencadangan *cash loan* beberapa debitur korporasi, sehingga turut mempengaruhi besaran pencadangan asset komitmen kontinjensi yang dimiliki seperti *bank guarantee, letter of credit*.

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan - Neto

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan tahun 2023 mencapai Rp497,85 miliar, tercatat naik sebesar 262,25% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp137,43 miliar. Kenaikan ini disumbang oleh pembentukan cadangan atas piutang lainnya yang dimiliki Perusahaan Anak Perseroan kepada salah satu pihak ketiga, pencadangan dibentuk dengan telah memperhatikan usia piutang dan *cashflow* dari pihak ketiga tersebut.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya (*operating expenses - opex*) tahun 2023 mencapai Rp76,78 triliun, meningkat secara terbatas 3,32% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp74,32 triliun. Dengan pertumbuhan terbatas ini semakin menunjukkan *improvement* dari sisi *cost to asset* yang menjadi 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,23%, dari rasio efisiensi lainnya turut menunjukkan perkembangan yang baik CIR *bank only* dan konsolidasi tercatat masing-masing sebesar 37,7% dan 41,9% lebih baik dari periode sebelumnya. Keberhasilan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan *operating expense* ini tidak terlepas dari optimalisasi Perseroan dalam penggunaan digitalisasi seperti salah satunya efisiensi di segmen mikro yang semakin efisien dengan optimalisasi penggunaan BRISPOT.

Tabel Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan	**(37.850.275)**	(39.390.133)	1.539.858	(3,91%)
Umum dan administrasi	**(28.484.209)**	(25.958.686)	(2.525.523)	9,73%
Lain-lain	**(10.447.807)**	(8.967.193)	(1.480.614)	16,51%
Total Beban Operasional lainnya	**(76.782.291)**	**(74.316.012)**	**(2.466.279)**	**3,32%**

Laba Operasional

Dengan kinerja *upperline* yang solid ditunjukkan dengan pertumbuhan positif di sisi NII, kenaikan *sustain* di sisi pendapatan operasional non bunga serta kemampuan Perseroan dalam efisiensi operating expenses mendorong laba operasional tahun 2023 mencapai Rp76,83 triliun, meningkat 19,47% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp64,31 triliun.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	135.183.487	124.597.073	10.586.414	8,50%
Pendapatan premi - neto	2.161.392	1.577.323	584.069	37,03%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	45.625.785	39.127.694	6.498.091	16,61%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(29.523.426)	(27.384.906)	(2.138.520)	7,81%
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	341.994	543.145	(201.151)	(37,03%)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(497.848)	(137.431)	(360.417)	262,25%
Total Beban Operasional lainnya	(76.782.291)	(74.316.012)	(2.466.279)	3,32%
Laba Operasional	76.828.737	**64.306.037**	**12.522.700**	**19,47%**

Pendapatan dan (Beban) Non Operasional - Neto

Pendapatan dan (beban) non operasional - neto merupakan pos diluar kinerja operasional Perseroan dengan nilai yang tidak terlalu material dan bukan merupakan pendapatan yang berkelanjutan. Pendapatan dan (beban) non operasional-neto tahun 2023 tercatat beban sebesar Rp399,03 triliun atau mengalami penurunan sebesar 237,3% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai pendapatan sebesar Rp290,66 miliar.

Tabel Pendapatan dan (Beban) Non Operasional - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	125.187	242.077	(116.890)	(48,29%)
Pendapatan sewa	458	6.759	(6.301)	(93,22%)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK	(341.998)	(284.912)	(57.086)	20,04%
Corporate Social Responsibility	(28.914)	(29.084)	170	(0,58%)
Sumbangan	(363)	(28.361)	27.998	(98,72%)
Lain-lain - neto	(153.395)	384.185	(537.580)	(139,93%)
Total	(399.025)	**290.664**	**(689.689**	**(237,28%)**

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak tahun 2023 mencapai Rp74,43 triliun, meningkat 18,32% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp64,60 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba operasional di tahun 2023.

Tabel Laba Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Operasional	**76.828.737**	64.306.037	12.522.700	19,47%
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	**(399.025)**	290.664	(689.689)	(237,28%)
Laba Sebelum Beban Pajak	**76.429.712**	**64.596.701**	**11.833.011**	**18,32%**

Beban Pajak

Beban pajak tahun 2023 mencapai Rp16,00 triliun, meningkat 21,35% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp13,19 triliun, kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum pajak Perseroan, *tax rate* pada tahun 2022 tercatat sebesar 20,94% secara konsolidasi dan 20,75% secara BRI *only*.

Laba Bersih

Dengan penjelasan performa Perseroan di atas, laba bersih tahun 2023 berhasil tercapai sebesar Rp60,43 triliun, meningkat 17,54% yoy jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp51,41 triliun. Pertumbuhan laba bersih konsolidasian tersebut didorong oleh pertumbuhan laba bersih Perseroan secara *bank only* yang tercatat sebesar Rp53,15 triliun atau mampu tumbuh sebesar 11,13% yoy dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp47,83 triliun, serta kontribusi positif seluruh Perusahaan Anak yang sehingga agregasi laba Perusahaan Anak naik 39,65% yoy atau naik Rp2,08 triliun.

Tabel Laba Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Sebelum Beban Pajak	**76.429.712**	64.596.701	11.833.011	18,32%
Beban Pajak	**(16.004.664)**	(13.188.494)	(2.816.170)	21,35%
Laba Bersih	**60.425.048**	**51.408.207**	**9.016.841**	**17,54%**

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2023 mencapai Rp60,10 triliun, tercatat meningkat 17,45% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp51,17 triliun. Demikian pula dengan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2023 mencapai Rp325,2 miliar, meningkat 36,69% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp237,90 miliar.

Tabel Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk	**60.099.863**	51.170.312	8.929.551	17,45%
Kepentingan non-pengendali	**325.185**	237.895	87.290	36,69%
TOTAL	**60.425.048**	**51.408.207**	**9.016.841**	**17,54%**

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan 2023 mencapai Rp61,05 triliun, meningkat 25,70% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp48,57 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan dari laba bersih setelah pajak yang naik 17,54% yoy atau naik Rp9,02 triliun serta pos *others comprehensive income* efek-efek tercatat *gain* sebesar Rp1,78 triliun atau mampu naik 122,34% yoy dibandingkan tahun 2022 yang tercatat rugi sebesar Rp7,95 triliun.

Tabel Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.787.840)	902.754	(2.690.594)	(298,04%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	348.975	(176.671)	525.646	(297,53%)
Surplus revaluasi aset tetap	(82.365)	3.297.304	(3.379.669)	(102,50%)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(125.790)	(11.979)	(113.811)	950,09%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.782.067	(7.946.514)	9.728.581	(122,43%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(9.105)	(413.197)	404.092	(97,80%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	502.669	1.509.279	(1.006.610)	(66,69%)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	628.611	**(2.839.024)**	**3.467.635**	**(122,14%)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61.053.659	**48.569.183**	**12.484.476**	**25,70%**

Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2023 mencapai Rp60,71 triliun, meningkat 25,60% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp48,33 triliun, Demikian pula dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali tahun 2023 mencapai Rp345 miliar, meningkat 46,40% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp235,83 miliar.

Tabel Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk	60.708.390	48.333.349	12.375.041	25,60%
Kepentingan non-pengendali	345.269	235.834	109.435	46,40%
TOTAL	61.053.659	**48.569.183**	**12.484.476**	**25,70%**

Laba Tahun Berjalan per Saham

Laba tahun berjalan per saham tahun 2023 mencapai Rp398, meningkat 17,75% yoy dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp338, peningkatan tersebut sejalan dengan raihan kinerja Perseroan yang baik.

Tabel Laba Per Lembar Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Dasar	**398**	338	60	17,75%
Dilusian	**398**	338	60	17,75%

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

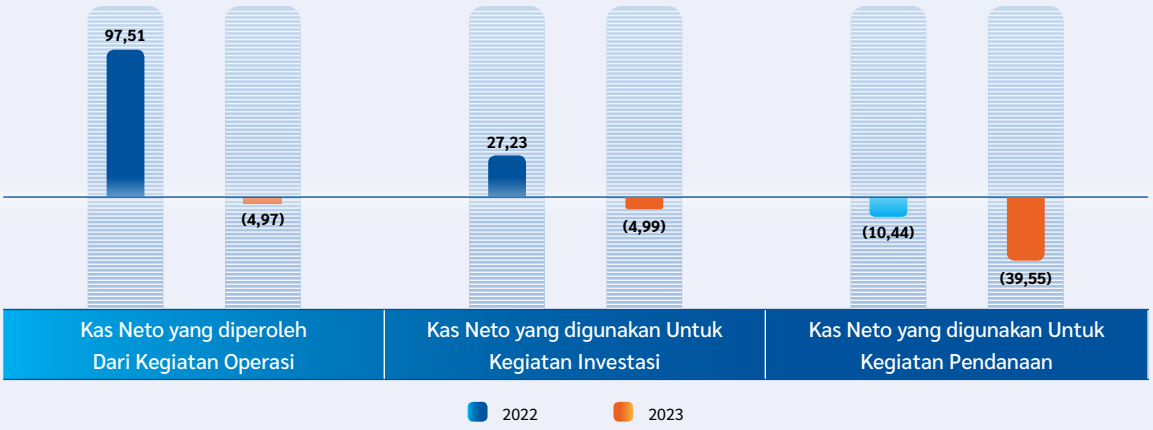
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(5) = (2)-(3)	(6) = (5)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pendapatan yang diterima				
Penerimaan bunga dan investasi	**169.068.778**	130.501.831	38.566.947	29,55%
Pendapatan syariah	**12.922.019**	10.118.043	2.803.976	27,71%
Pendapatan premi	**8.996.516**	8.936.995	59.521	0,67%
Pendapatan penjualan emas	**7.982.888**	8.175.106	(192.218)	(2,35%)
Beban yang dibayar				
Beban bunga	**(42.461.798)**	(25.762.613)	(16.699.185)	64,82%
Beban syariah	**(1.161.971)**	(1.008.042)	(153.929)	15,27%
Beban klaim	**(6.549.595)**	(7.359.672)	810.077	(11,01%)
Beban harga pokok penjualan emas	**(7.663.244)**	(7.875.955)	(212.711)	(2,70%)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	**16.833.578**	12.468.321	4.365.257	35,01%
Pendapatan operasional lainnya	**29.267.943**	27.534.502	1.733.441	6,30%
Beban operasional lainnya	**(75.776.851)**	(70.993.349)	(4.783.502)	6,74%
Pendapatan (beban) non operasional - neto	**(568.000)**	(52.531)	(515.469)	981,27%
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	**(14.279.292)**	(15.762.408)	1.483.116	(9,41%)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**96.610.971**	**68.920.228**	**27.690.743**	**40,18%**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	**(505.646)**	(195.110)	(310.536)	(159,16%)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	**(1.277.298)**	(2.114.619)	837.321	(39,60%)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	**(14.828.029)**	(9.403.150)	(5.424.879)	57,69%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(5) = (2)-(3)	(6) = (5)/(3)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.419.447	3.900.820	13.518.627	346,56%
Kredit yang diberikan	(152.128.249)	(106.917.972)	(45.210.277)	42,29%
Pinjaman syariah	(3.335.688)	(1.354.828)	(1.980.860)	146,21%
Piutang pembiayaan	(5.720.404)	(9.996.487)	4.276.083	(42,78%)
Aset lain-lain	(16.170.249)	(2.941.947)	(13.228.302)	449,64%
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	5.741.228	6.175.192	(433.964)	(7,03%)
Simpanan:				
Giro	(3.631.218)	129.165.393	(132.796.611)	(102,81%)
Giro *Wadiah*				
Tabungan	5.297.630	24.971.180	(19.673.550)	(78,79%)
Tabungan *Wadiah*				
Deposito berjangka	48.778.336	15.004.224	33.774.112	225,10%
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.623.772	(3.994.882)	6.618.654	(165,68%)
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.081.866	(19.410.916)	28.492.782	(146,79%)
Liabilitas lain-lain	7.072.077	5.698.879	1.373.198	24,10%
Kas neto yang diperoleh dari/(digunakan) untuk kegiatan operasi	(4.971.454)	**97.506.005**	**(102.477.459)**	**(105,10%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil Penjualan aset tetap	168.975	343.195	(174.220)	(50,76%)
Penyertaan saham	36.137	(145.649)	181.786	(124,81%)
Penerimaan dividen	75.572	144.069	(68.497)	(47,54%)
Perolehan aset tetap	(8.177.296)	(10.538.233)	2.360.937	(22,40%)
Penurunan/(Kenaikan) efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	2.907.520	37.424.578	(34.517.058)	(92,23%)
Kas neto yang diperoleh dari/(digunakan) untuk kegiatan investasi	(4.989.092)	**27.227.960**	**(32.217.052)**	**(118,32%)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	19.360.539	11.068.534	8.292.005	74,92%
Saham yang dibeli kembali	(1.382.284)	(2.187.544)	805.260	(36,81%)
Penambahan modal		-		
Pembagian laba untuk dividen	(43.494.766)	(26.406.603)	(17.088.163)	64,71%
Penerimaan pinjaman subordinasi	494.142	-	494.142	100,00%
Pembayaran pinjaman subordinasi	(500.000)	-	(500.000)	100,00%
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	14.112.994	21.739.525	(7.626.531)	(35,08%)
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(28.141.850)	(14.650.023)	(13.491.827)	92,09%
Kas neto yang (digunakan) untuk/diperoleh dari kegiatan pendanaan	(39.551.225)	**(10.436.111)**	**(29.115.114)**	**278,98%**
KENAIKAN/(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(49.511.771)	**114.297.854**	**(163.809.625)**	**(143,32%)**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(2.663)	**(30.287)**	**27.624**	**(91,21%)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	268.192.168	**153.924.601**	**114.267.567**	**74,24%**

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(5) = (2)-(3)	(6) = (5)/(3)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**218.677.734**	**268.192.168**	**(49.514.434)**	**(18,46%)**
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:			-	
Kas	**31.603.784**	27.407.478	4.196.306	15,31%
Giro pada Bank Indonesia	**101.909.121**	150.935.150	(49.026.029)	(32,48%)
Giro pada bank lain	**22.331.919**	21.488.434	843.485	3,93%
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	**62.678.940**	68.361.106	(5.682.166)	(8,31%)
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	**153.970**	-	153.970	100,00%
Total Kas dan Setara Kas	**218.677.734**	**268.192.168**	**(49.514.436)**	**(18,46%)**

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian
(triliun Rupiah)



Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional utama Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kas neto yang digunakan untuk kegiatan operasi mencapai (Rp4,97) triliun, mengalami penurunan sebesar sebesar (Rp102,48) triliun jika dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan arus kas yang diperoleh untuk aktivitas operasi mencapai Rp97,51 triliun. Penurunan ini disumbang oleh adanya peningkatan penyaluran kredit, tercatat secara arus kas terjadi peningkatan penyaluran kredit sebesar 42,29% yoy atau meningkatkan kas keluar sebesar Rp45,21 triliun.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait investasi Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi tercatat -Rp4,99 triliun, mengalami penurunan sebesar 118,32% yoy jika dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan kas neto diperoleh dari kegiatan investasi sebesar Rp27,23 triliun. Penurunan arus kas investasi ini digunakan Perseroan untuk mendukung aktivitas bisnis utama khususnya pada kredit dan pembiayaan, sumber optimalisasi terbesar bersumber dari efek-efek. Meskipun tercatat turun, rasio likuiditas Perseroan masih tercatat sangat baik dan di atas regulasi yang ditetapkan oleh regulator.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait pendanaan baik dari sisi likuiditas liabilitas maupun permodalan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan mencapai (Rp39,55) triliun, meningkat sebesar 278,98% yoy jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar (Rp10,44) triliun. Posisi negatif kas dari aktivitas pendanaan ini tidak terlepas dari kenaikan faktor pengurang bersumber dari beberapa aktivitas antara lain pembagian laba untuk dividen sebesar Rp43,49 triliun, naik 64,18% atau Rp17,09 triliun sejalan dengan kenaikan jumlah dividen mengikuti kenaikan laba bersih Perseroan.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga dan pemeringkatan obligasi.

Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan (*Loan to Deposit Ratio* atau LDR). Rasio LDR BRI Desember 2023 sebesar 84,73% (*bank only*), meningkat dibandingkan dengan LDR tahun 2022 yang sebesar 79,17% (*bank only*), menunjukkan kondisi likuiditas perbankan tengah mengetat seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengetat seiring pemulihan dan perbaikan ekonomi Indonesia. Disamping itu, tren LDR BRI meningkat juga disebabkan kontribusi BRI dalam menumbuhkan kredit diatas pertumbuhan industri.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, Perbankan harus menjaga rasio RIM sebesar 84% sampai 94%. Dalam perhitungan RIM, diperhitungkan surat berharga yang diterbitkan dan ditatausahakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan tidak dimiliki oleh bank minimal 2 (dua) bulan sebelum tanggal laporan dan obligasi korporasi yang dimiliki. Perhitungan RIM disempurnakan juga dengan PBI nomor 21/12/PBI/2019 yang berlaku pada 2 Desember 2019 dengan memperhitungkan *offshore loan* sebagai komponen pendanaan. Rasio RIM BRI tahun 2023 sebesar 91,36% (*bank only*), naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 83,23% (*bank only*). Kenaikan rasio RIM BRI pada tahun 2023 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan dari sisi aset yang lebih tinggi sementara terdapat penurunan dari sisi DPK.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BRI melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan rasio antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam kondisi krisis. Pada tahun 2023 LCR BRI terjaga sebesar 161,64% (*bank only*), dengan pencapaian LCR tersebut, BRI berhasil mempertahankan rasio kecukupan likuiditas jauh di atas batas minimal sebesar 100%. Sementara, dalam rangka menjaga ketahanan likuiditas jangka Panjang, BRI melakukan pengukuran terhadap *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang merupakan perbandingan antara *available stable funding* (pendanaan stabil yang tersedia) terhadap *required stable funding* (pendanaan stabil yang dibutuhkan). Pada tahun 2023 NSFR BRI berada di angka 135,17%, dengan pencapaian tersebut BRI berhasil mempertahankan kecukupan pendanaan stabil jangka panjang di atas 100%.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) mencerminkan kemampuan Bank untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam menjalani proses bisnisnya. Pada tahun 2023, CAR BRI tercatat sebesar 25,23% (*bank only*) dan 27,27% (konsolidasi). Rasio CAR tersebut masih di atas pemenuhan modal minimum BRI sesuai Profil Risiko BRI yang mengacu pada penilaian *scorecard* profil risiko yakni 9,46%. Dengan rasio kecukupan modal yang masih tinggi tersebut BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek Yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan Bank yaitu Obligasi. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Peringkat	
	2023	2022
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo

Uraian	Peringkat	
	2023	2022
Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo
Unsecured Notes due 2024	BBB- oleh Fitch dan Baa2 oleh Moody's	BBB- oleh Fitch dan Baa2 oleh Moody's
Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo
Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	idAAA oleh Pefindo	idAAA oleh Pefindo
Obligasi Subordinasi IV BRI Tahun 2023	iidAA oleh Pefindo	-
Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri A	idAAA oleh Pefindo	-
Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	idAAA oleh Pefindo	-
Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	idAAA oleh Pefindo	-

Tabel Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	idAAA	Surat utang dengan peringkat idAAA memiliki peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, lebih unggul.
	idAA	Surat utang peringkat idAA berbeda dari utang peringkat tertinggi hanya untuk tingkat kecil. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas surat utang, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, sangat kuat.
Fitch	BBB	Peringkat BBB menunjukkan bahwa ekspektasi risiko gagal bayar saat ini rendah. Kapasitas untuk pembayaran komitmen keuangan dianggap memadai, tetapi kondisi bisnis atau ekonomi yang merugikan lebih mungkin untuk mengganggu kapasitas ini.
Moody's	Baa2	Obligasi dengan peringkat Baa2 dinilai menengah dan tunduk pada risiko kredit moderat dan dengan demikian dapat memiliki karakteristik spekulatif tertentu.

Rasio Keuangan Lain

Rasio Rentabilitas

Pada industri perbankan, rasio rentabilitas umumnya diukur dengan menggunakan tingkat imbal hasil terhadap aset (*Return on Assets*/ROA), imbal hasil terhadap ekuitas (*Return on Equity*/ROE) dan marjin pendapatan bunga bersih (*Net Intereset Margin*/NIM). BRI mampu membukukan kinerja rentabilitas positif selama tahun 2023.

Tabel Rasio Rentabilitas

(Bank Only, dalam %)

Uraian	*Bank Only*		Konsolidasi	
	2023	2022	2023	2022
ROA (*before tax*)	3,93	3,76	4,10	3,79
ROE (*Tier*-1)	22,94	20,93	22,24	19,54
ROE *Balance Sheet*	18,25	16,76	19,95	17,63
NIM	6,84	6,80	7,95	7,85

***RETURN ON ASSETS* (ROA)**

ROA *before tax* BRI di tahun 2023 sebesar 3,93% (*bank only*) dan 4,10% (konsolidasi), masing masing mampu tumbuh 17 bps dan 31 bps secara tahunan. Kenaikan ROA tidak terlepas oleh kenaikan performa Perseroan yang didorong oleh kemampuan perseroan untuk terus menumbuhkan pendapatan bunga bersih, perolehan pendapatan operasional non bunga serta kemampuan menjaga pertumbuhan opex pada level yang optimal.

***RETURN ON EQUITY* (ROE)**

ROE *balance sheet* BRI di tahun 2023 sebesar 18,25% (*bank only*) dan 19,95% (konsolidasi), masing masing mampu tumbuh 149 bps dan 232 bps secara tahunan. Kenaikan ROE *balance sheet* tidak terlepas oleh kemampuan Perseroan dalam optimalisasi permodalan yang dimiliki yang dikombinasikan dengan baik pula oleh kenaikan performa kinerja Perseroan yang *sustain*, sehingga mampu memberikan ROE di level yang terus tumbuh dan disisi lain tetap mampu men-*deliver* optimal *return* kepada *shareholders.*

***NET INTEREST MARGIN* (NIM)**

Ditengah tren kenaikan suku bunga yang kurang *favorable* khususnya bagi Perseroan yang lebih cenderung *liability sensitive*, Perseroan mampu menjaga marjin pendapatan bunga bersih (NIM) BRI pada tahun 2023 sebesar 6,84% (*bank only*) dan 7,95% (konsolidasi) yang mana masing-masing bahkan tercatat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Strategi Perseroan untuk fokus tumbuh di segmen yang memiliki *yield* optimal terbukti handal dalam mengeliminir dampak kenaikan biaya bunga di tenga tren kenaikan suku bunga.

Rasio Efisiensi

BEBAN OPERASIONAL ATAS PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)

Rasio efisiensi Perseroan dapat dilihat dari BOPO BRI sebesar 64,35% (*bank only*) dan 68,21% (konsolidasi) dan CIR sebesar 37,74% (*bank only*) dan 41,89% (konsolidasi). Dari kedua rasio efisiensi tersebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari periode sebelumnya, hal ini didorong oleh keberhasilan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan *operating expense* ini tidak terlepas dari optimalisasi Perseroan dalam penggunaan digitalisasi seperti salah satunya efisiensi di segmen mikro yang semakin efisien dengan optimalisasi penggunaan BRISPOT.

Tabel Rasio Efisiensi

(Bank Only, dalam %)

Uraian	*Bank Only*		Konsolidasi	
	2023	2022	2023	2022
BOPO	**64,35**	64,20	**68,21**	69,10
CIR	**37,74**	41,95	**41,89**	44,88

Rasio Kepatuhan

PERSENTASE PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Pada tahun 2023, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

RASIO POSISI DEVISA NETO (PDN)

Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah terhadap modal.

Pada tahun 2023 rasio PDN sebesar 0,64% turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,17%. Angka PDN tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

Kolektibiltas Kredit

Kolektibilitas kredit dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau *Non-Performing Loan* (NPL), BRI masih mampu menjaga kualitas kredit dengan sangat baik hal ini terlihat dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2023 sebesar 3,12% (*bank only*) dan 2,95 (konsolidasi). Rasio NPL BRI masih berada jauh di bawah ketentuan maksimal regulasi yang sebesar 5% (NPL net) (PBI No3/25/2001), BRI akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas aset.

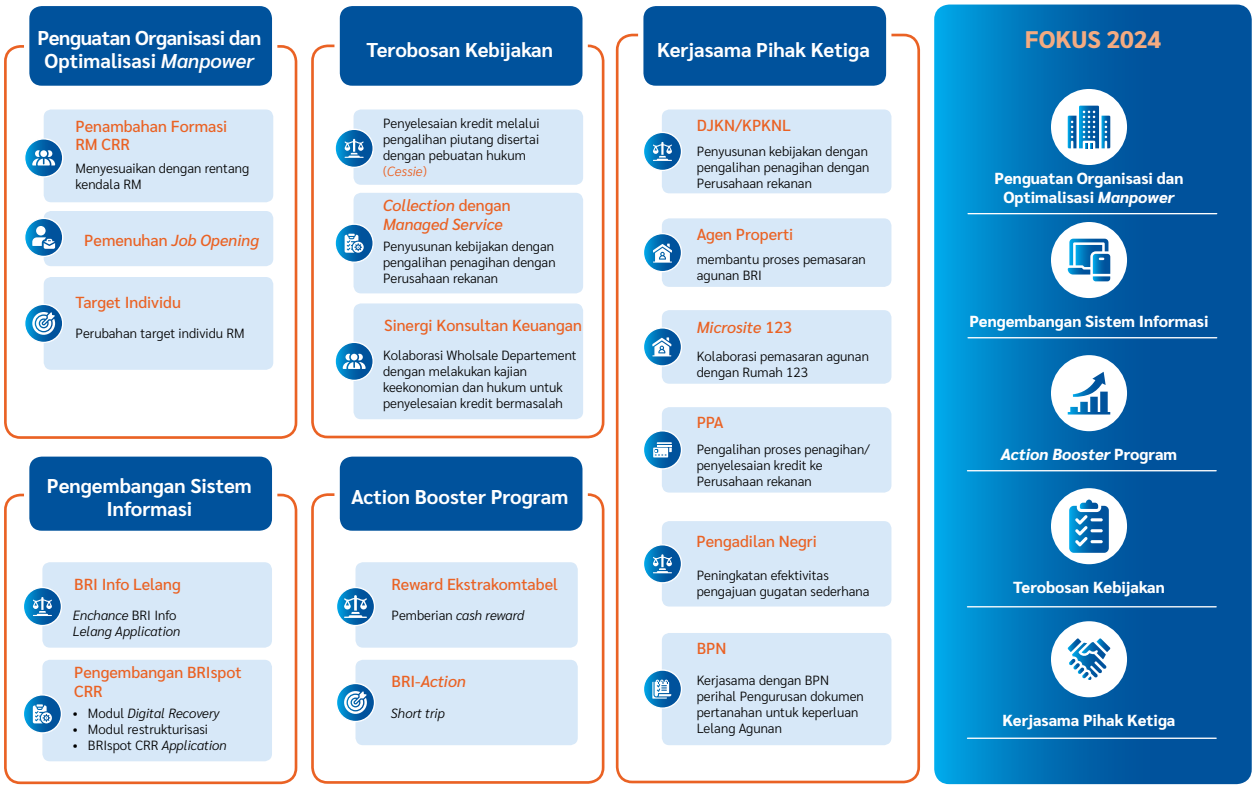
Tabel Kolektibilitas Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan (Termasuk Syariah)

(Konsolidasi, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
Kredit	**1.266.429.247**	**1.139.077.067**
Lancar	**1.167.044.003**	1.064.210.765
Dalam Perhatian Khusus	**62.062.544**	44.418.410
Kurang Lancar	**5.037.764**	3.211.471
Diragukan	**7.828.325**	5.213.650

Uraian	2023	2022
Macet	24.456.610	22.022.770
NPL	37.322.700	**30.447.891**
NPL (%)	2,95%	**2,67%**

Adapun *recovery* strategi yang akan dilakukan BRI pada tahun 2024 untuk perbaikan NPL adalah sebagai berikut:



Suku Bunga Dana

Berikut adalah informasi *bunga counter rate* produk giro, tabungan, dan deposito Bank per 31 Desember 2023

Tabel *Counter Rate* Simpanan per 31 Desember 2023

Produk Simpanan	Suku Bunga (Rp)	Suku Bunga (USD)
Giro	0,00% - 2,00%	0,05% - 0,15%
Tabungan	0,00% - 1,75%	0,08% - 0,25%
Deposito	2,25% - 4,00%	1,00% - 2,25%

Suku Bunga Dasar Kredit

Secara umum Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, serta komponen profit margin dari penyaluran kredit.

Perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung dari penilaian terhadap risiko masing-masing debitur. Untuk itu, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan Non - KPR). Dalam kredit konsumsi Non - KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Namun demikian, Bank Indonesia menyerahkan klasifikasi kredit tersebut sesuai dengan kriteria internal bank.

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non-KPR
Desember 2023	8,00%	8,25%	14,00%	7,25%	8,75%

Tabel Kualitas Aset Produktif

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2023					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
I	PIHAK TERKAIT						
1	Penempatan pada bank lain						
	a. Rupiah	450.000	-	-	-	-	
	a. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
2	Tagihan spot dan derivatif						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
3	Surat berharga						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	
7	Kredit						
	a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	
	ii. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
	b. Non UMKM						
	i. Rupiah	201.996	-	-	-	-	
	ii. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
	c. Kredit yang direstrukturisasi						
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	
	ii. Mata uang asing	-	-	-	-	-	

Analisis Kualitas Aset Produktif

Kualitas aset produktif Perseroan berada pada kondisi yang sangat baik, untuk aset produktif diluar kredit tercatat tidak terdapat satupun yang berada pada kolektabilitas macet, Sedangkan untuk aset produktif yang diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan memiliki kualitas yang sangat terjaga hal ini terlihat dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2023 sebesar 3,12% (*bank only*) dan 2,95 (konsolidasi). Rasio NPL BRI masih berada jauh di bawah ketentuan maksimal regulasi yang sebesar 5% (NPL net) (PBI No3/25/2001), BRI akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas aset.

(dalam jutaan Rupiah)

		INDIVIDUAL					
		31 Desember 2022					
	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	450.000	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	201.996	202.378					202.378
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2023					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
8	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	
9	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontinjensi						
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
II	PIHAK TIDAK TERKAIT						
1	Penempatan pada bank lain						
	a. Rupiah	2.486.626	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	34.143.977	-	-	-	-	
2	Tagihan spot dan derivatif						
	a. Rupiah	794.380	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	111.193	-	-	-	-	
3	Surat berharga						
	a. Rupiah	213.770.330	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	125.297.032	-	-	-	-	
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)						
	a. Rupiah	5.931.829	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	14.372.129	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)						
	a. Rupiah	33.350.175	-	-	-	-	
	b. Mata uang asing	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi	10.217.408	-	-	-	-	
7	Kredit						
	a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
	i. Rupiah	607.935.438	39.407.524	3.918.634	6.078.185	13.108.689	
	ii. Mata uang asing	545.186	-	-	-	3.464	
	b. Non UMKM						
	i. Rupiah	344.928.282	13.540.756	649.914	1.308.688	7.573.504	
	ii. Mata uang asing	100.903.883	2.846.303	98.396	206.290	2.827.374	
	c. Kredit yang direstrukturisasi						
	i. Rupiah	47.145.841	27.999.127	2.633.548	4.388.655	9.689.390	
	ii. Mata uang asing	4.996.856	2.702.413	-	131.408	2.820.897	
8	Penyertaan Modal	49.254.757	-	-	-	-	
9	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	
10	Komitmen dan kontinjensi						
	a. Rupiah	115.900.897	1.250.166	51.005	30.246	57.440	
	b. Mata uang asing	88.444.604	43.719	769	322	3.392	

		INDIVIDUAL					
		31 Desember 2022					
	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.486.626	1.396.525	-	-	-	-	1.396.525
	34.143.977	33.076.140	-	-	-	-	33.076.140
	794.380	876.390	-	-	-	-	876.390
	111.193	35.015	-	-	-	-	35.015
	213.770.330	216.621.868	202.628	-	-	-	216.824.496
	125.297.032	120.645.885	357.104	-	-	-	121.002.989
	5.931.829	2.619.993	-	-	-	-	2.619.993
	14.372.129	7.689.962	-	-	-	-	7.689.962
	33.350.175	51.014.678	-	-	-	-	51.014.678
	-						
	10.217.408	7.096.719	-	-	-	-	7.096.719
	670.448.470	558.334.431	26.504.019	1.762.582	2.805.563	12.686.894	602.093.489
	548.650	944.424	-	-	-	22.861	967.285
	368.001.144	313.799.370	8.386.357	320.871	1.851.023	6.880.123	331.237.744
	106.882.246	87.619.565	5.000.496	813.322	333.914	1.534.356	95.301.653
	91.856.561	101.678.107	18.802.940	1.116.772	3.239.571	10.104.868	134.942.258
	10.651.574	5.613.842	4.899.129	598.376	331.163	1.395.759	12.838.269
	49.254.757	47.936.173	-	-	-	-	47.936.173
	-						
	117.289.754	121.383.325	499.983	38.573	45.679	15.187	121.982.747
	88.492.806	52.301.229	22.531	756	642	288	52.325.446

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2023					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
III	INFORMASI LAIN						
1	Nilai aset bank yang diagunkan sebagai jaminan						
	a. Kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	
	b. Kepada Lainnya	-	-	-	-	-	
2	Aset yang Diambil Alih	-	-	-	-	-	

Strategi Peningkatan *Fee Based Income*

Selama tahun 2023, BRI mampu membukukan pendapatan *fee based income* dan *others income* (*bank only*) sebesar Rp42,7 triliun atau tumbuh 11,50% yoy. Pendapatan ini berasal dari pendapatan berbasis *fee* sebesar Rp20,3 triliun atau tumbuh 9,87% yoy, Pendapatan Ops Lainnya sebesar Rp6,16 triliun atau mengalami penurunan 22,93% yoy, Pendapatan *recovery* atas aktiva produktif yang telah dihapus buku sebesar Rp16,28 triliun atau tumbuh 37,26% yoy. Pada tahun 2023, peningkatan *fee based income* BRI diperoleh terbesar pada transaksi *e-channel* dan *e-banking*, jasa simpanan, jasa perkreditan, dan jasa *trade finance*. BRI akan terus meningkatkan *fee based income* dengan fokus pada peningkatan transaksi *e-channel* dan *e-banking* di setiap segmen, mulai dari segmen ultra mikro hingga *wholesale* dengan memberikan jasa dan layanan yang beragam sesuai dengan ciri khas segmen tersebut didukung dengan digital inisiatif yang dimiliki sehingga memudahkan tiap nasabah dalam melakukan transaksi seperti BRIMO, *digital saving, cash management system* dan *branchless banking*/bisnis keagenan BRILink. Di samping itu, peningkatan *fee based income* dilakukan melalui *cross sell* dengan melakukan kolaborasi bersama Perusahaan Anak.

Struktur Permodalan Bank

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang inheren dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Perusahaan telah memiliki Komite ALCO sebagai organ pendukung Direksi untuk mereviu secara berkala struktur permodalan Perseroan. Komite ALCO juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset* dan *liability* Perseroan untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan *potential risk*, *optimum yield generation* dan *cost efficiency*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK 11/2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (POJK 34/2016) bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) dengan rincian sebagai berikut:

1. *Capital Conservation Buffer* Sebesar 2,50% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
2. *Countercyclical Buffer* sebesar 0,00% dari ATMR
3. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik sebesar 2,50% dari ATMR

Total CAR minimum BRI berdasarkan profil risiko berada di level 9,48% maka CAR BRI pada tahun 2023 yang sebesar 25,23% (*bank only*) dan 27,27% (konsolidasi) mampu berada diatas minimum ketetentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur permodalan, hingga Desember 2023, BRI memiliki modal inti (*Tier*-1) sebesar Rp238,96 triliun (*bank only*) dan Rp283,95 triliun (konsolidasi) serta Modal Pelengkap (*Tier*-2) sebesar Rp11,61 triliun (*bank only*) dan Rp12,50 triliun (konsolidasi) dengan rasio CAR *Tier*-1 mencapai 24,06% (*bank only*) dan 26,12% (konsolidasian). Modal Inti (*Tier*-1) BRI besarnya sama dengan Modal Inti Utama (CET-1) dikarenakan BRI tidak memiliki Modal Inti Tambahan (*Additional* Tier 1).

Oleh karena itu, Rasio Modal Inti (*Tier*-1) BRI jauh di atas ketentuan minimum sebesar 6% maupun ketentuan minimum Modal Inti Utama (CET-1) sebesar 4,5% yang ditentukan oleh Regulator.

		INDIVIDUAL					
		31 Desember 2022					
	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	56.502	-	-	-	-	-	62.732

Rincian Struktur Modal

Uraian rincian struktur modal disajikan sebagai berikut.

Tabel Struktur Permodalan

(konsolidasian, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
Modal Inti (*Tier* 1)	**283.949.415**	273.812.348
Modal Inti Utama (CET 1)	**283.949.415**	273.812.348
Modal Pelengkap (*Tier* 2)	**12.499.593**	11.269.263
Total Modal Tersedia	**296.449.008**	**285.081.611**
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	**961.506.352**	896.125.781
ATMR untuk Risiko Pasar	**5.214.599**	5.165.797
ATMR untuk Risiko Operasional	**120.236.798**	214.959.103
Total ATMR	**1.086.957.749**	**1.116.250.681**
Rasio CAR	**27,27%**	25,54%
Rasio CET 1	**26,12%**	24,53%
Rasio *Tier* 1	**26,12%**	24,53%
Rasio *Tier* 2	**1,15%**	1,01%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	**9,48%**	9,47%

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 13A Bank wajib menambahkan informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi Bank pada Laporan Publikasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Risiko Kredit

I. Pengungkapan Informasi Kualitatif Terkait Risiko Kredit Secara Umum (CRA)

A. MODEL BISNIS YANG TERCERMIN DALAM KOMPONEN PROFIL RISIKO KREDIT BANK

Model bisnis untuk BRI secara individu tercermin dalam parameter/indikator yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit serta yang digunakan dalam penentuan besaran pencadangan risiko kredit, yang meliputi :

1. **Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi**
   Dalam mengukur tingkat risiko konsentrasi kredit, BRI menggunakan parameter antara lain : Komposisi kredit yang diberikan terhadap total asset, saat ini sebesar 62,45% atau pada profil risiko *Low*; komposisi kredit non-korporasi (*Micro, Consumer, Small, Medium*) terhadap total kredit sebesar 81,95% pada profil risiko *Low to Moderate*; Komposisi kredit kepada 25 debitur (*group*) terbesar bukan bank diluar pihak terkait terhadap total kredit pada 13,36% atau profil risiko *Low*, serta komposisi kredit per-sektor ekonomi
2. **Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan**
   Kualitas penyediaan dana tercermin pada indikator besarnya kredit kualitas rendah (LaR atau *Loan at Risk*) terhadap total kredit sebesar 12,54% dan terjaga pada tingkat risiko *low*. Besarnya kredit bermasalah terhadap total kredit (NPL) sebesar 3,12%. Kecukupan pencadangan tercermin pada rasio LaR *coverage* dan NPL *coverage*. Besarnya LaR *coverage* sebesar 53,59%, di atas *appetite* minimum 39,81%, sedangkan NPL *coverage* pada 215,27%.
3. **Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana**
   Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana yaitu tercermin pada target pertumbuhan kredit tahunan serta target LDR atau *Loan to Deposit Ratio*. Penetapan target pertumbuhan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi likuiditas industri perbankan.
4. **Faktor eksternal**
   Beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas kredit antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat konsumsi, pertumbuhan *export*, tingkat suku bunga dan *unemployment rate*.

Model bisnis untuk BRI secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak tercermin dalam parameter/indikator yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit mencakup:

1. **Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi**
   Dalam mengukur risiko tingkat konsentrasi, Perusahaan Anak menggunakan parameter antara lain sebagai berikut : Komposisi kredit, pembiayaan dan investasi yang diberikan terhadap total aset; Komposisi kredit UMKM; Komposisi kredit, pembiayaan dan investasi kepada debitur besar bukan bank diluar pihak terkait; serta Konsentrasi kredit per-sektor industri.
2. **Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan**
   Kualitas penyediaan dana tercermin pada indikator antara lain : Rasio kredit, pembiayaan dan investasi kualitas rendah (LaR/*Loan at Risk*) terhadap total kredit, pembiayaan dan investasi; Rasio kredit, pembiayaan dan investasi bermasalah terhadap total kredit, pembiayaan dan investasi (NPL); serta Kecukupan pencadangan tercermin pada LaR *coverage*, NPL *coverage* serta besarnya CKPN atas kredit terhadap total kredit.
3. **Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana**
   Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana yaitu tercermin pada target pertumbuhan kredit tahunan serta target LDR atau *Loan to Deposit Ratio*. Penetapan target pertumbuhan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi likuiditas industri perbankan.
4. **Faktor eksternal**
   Beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas kredit antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat konsumsi, pertumbuhan *export*, tingkat suku bunga, harga emas dan *unemployment rate*.

B. KRITERIA DAN PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN MENETAPKAN LIMIT RISIKO KREDIT

1. Kriteria dan pendekatan yang digunakan oleh BRI secara individu untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit adalah sebagai berikut:
   Penyusunan Kebijakan dan Prosedur harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
   a. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
   b. Hierarki dan kewenangan
   c. Lingkup pengaturan yang jelas
   d. Direktif, aplikatif dan mengandung unsur pengendalian.
   e. Berorientasi pada efektivitas dan bisnis yang berkelanjutan.

   Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) harus sesuai dengan organisasi, sehingga penerapan KPB adalah sebagai berikut:
   a. Wajib digunakan, diterapkan dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara konsekuen dan konsisten.
   b. Berlaku juga bagi unit kerja luar negeri, namun dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan peraturan perbankan setempat.

c. Untuk dapat mendukung penerapan dan pelaksanaan KPB, selain memahami dan mematuhi KPB dengan sebaik-baiknya, setiap pejabat kredit juga wajib:
   - Memahami dan mematuhi pedoman pelaksanaan masing-masing bidang bisnis serta peraturan perkreditan lain dibidangnya, termasuk perubahannya.
   - Memahami dan mematuhi peraturan-peraturan maupun kebijakan dari regulator, mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan serta semua masalah yang berkaitan dengan perkreditan, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun yang berlingkup internasional.

Penetapan Limit Risiko Kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Limit Risiko Kredit ditetapkan untuk suatu segmen bisnis (unit kerja dan individu pekerja), sektor industri, nasabah (debitur) atau *counterparty*, pihak terkait, sektor ekonomi atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya.
b. Limit Risiko Kredit ditetapkan pada level portofolio atau level secara keseluruhan atas seluruh produk dan aktivitas yang memiliki eksposur berisiko kredit meliputi: portofolio kredit, transaksi surat berharga, transaksi *trade finance*, dan produk-produk dan aktivitas-aktivitas lain yang mengandung Risiko Kredit.
c. Limit Risiko Kredit ditetapkan setiap tahun sesuai *risk appetite* dan ketentuan yang berlaku.
d. Penetapan limit dilakukan dengan menggunakan data historis dan memperhitungkan data rata-rata dan standar deviasi selama periode pengambilan data.
e. Adapun untuk parameter yang belum tersedia data historis sebagai penunjang, maka dapat ditetapkan secara *expert judgment* dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), data eksternal, keahlian, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh pemutus dan ketentuan regulasi yang berlaku.
f. Dalam penetapan limit risiko selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, juga dapat mempertimbangkan faktor *forward looking* seperti variabel makroekonomi, *risk issue*, dan faktor-faktor lainnya.
g. Divisi dalam SKMR yang membidangi bersama dengan Unit Kerja Operasional merumuskan dan mengusulkan obyek dan dimensi Limit Risiko Kredit kepada Direksi atau RMC untuk diputus dan ditetapkan.

2. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit
   Pengelolaan kebijakan dan prosedur harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. Prinsip keselarasan
   b. Prinsip kesesuaian kewenangan
   c. Prinsip efektivitas dan efisiensi
   d. Prinsip keberlanjutan
   e. Prinsip penatakerjaan dan aksesibilitas yang baik

Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut:
a. *Business process approach* dengan menyusun kebijakan dan prosedur didalam setiap bisnis proses pembiayaan.
b. Risk scoring approach dengan menyusun perangkat analisis berdasarkan statistical method untuk menilai profil risiko calon debitur secara individual didalam memprediksi *Probability of Default* (PD).
c. Proses pengukuran dan perhitungan risiko pembiayaan secara *corporate* dilakukan dalam bentuk pengukuran profil risiko dan pemmantauan *Risk Appetite Criteria* (RAC).

Penetapan limit risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Limit risiko kredit ditetapkan untuk suatu segmen bisnis (unit kerja dan karyawan), sektor industri, nasabah atau *counterparty*, pihak terkait, sektor ekonomi atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya.
b. Limit risiko kredit ditetapkan sesuai *risk appetite*, portofolio, RKAP dan ketentuan regulator maupun internal yang berlaku.
c. Penetapan limit dilakukan dengan menggunakan data historis dan memperhitungkan data rata-rata dan standar deviasi selama periode pengambilan data.
d. Adapun untuk parameter yang belum tersedia data historis sebagai penunjang, maka dapat ditetapkan secara *expert judgment* dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), data eksternal, keahlian, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh pemutus dan ketentuan regulasi yang berlaku.
e. Dalam penetapan limit risiko selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, juga dapat mempertimbangkan faktor *forward looking* seperti variabel makroekonomi, *risk issue* dan faktor-faktor lainnya. Direksi menandatangani besaran penetapan limit risiko dalam dokumen pernyataan limit risiko (*Risk Appetite Statement*- RAS) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
f. Limit konsenstrasi pembiayaan dikelola dengan menyusun *Financing Portfolio Guidelines*, limitasi pembiayaan *heavy equipment mining*, pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dan penetapan Putusan Delegasi Wewenagan Pembiayaan (PDWP).
g. Limit risiko kredit ditetapkan antara lain meliputi limit untuk kewenagnan pengambilan keputusan pembiayaan yang disesuaikan dengna kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada *conflict of interest* dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, penetapan Batas Wewenagn Memutus Pembiayaan (BWMP) termasuk batas wewenang penanganan pembiayaan bermasalah serta pendelegasian wewenagnan memutus pembiayaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan.

3. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Efek untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit. Kebijakan Manajemen Risiko mengatur prinsip-prinsip manajemen risiko, antara lain berisi:
   a. Kebijakan pengelolaan risiko.
   b. Tata kelola Manajemen Risiko.
   c. Framework Manajemen Risiko.
   d. Penerapan/Proses Manajemen Risiko.
   e. Kriteria Risiko.
   f. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   g. Kebijakan Kewenangan Pemberian Persetujuan.
   h. Kebijakan Transaksi Perdagangan Efek.
   i. Kebijakan Marjin.
   j. Kebijaakan *Tradable shares*.
   k. Kebijakan *Short Term Warehouse*.
   l. Kebijakan *Non-Performing Asset*.
   m. SOP Transaksi Marjin (pembukaan rekening marjin sampai penutupan rekening marjin serta perpanjangan marjin).
   n. SOP Transaksi perdagangan efek.

   Pelaksanaan penerapan manajemen risiko kredit tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:
   a. Terdapat *due diligence* dan analisa risiko atas transaksi maupun produk sebelum dijalankan oleh Divisi Bisnis. *Due Diligence* dan analisa risiko tersebut dilakukan oleh Divisi Bisnis dan Divisi Risk Management yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Evaluasi Risiko (MER) yang menjadi dasar atas pengambilan keputusan yang signifikan oleh Direksi maupun Komisaris.
   b. Pemberian limit kredit (marjin ataupun pembiayaan lainnya) kepada nasabah *brokerage* sesuai dengan latar belakang, profil keuangan nasabah dan riwayat transaksi. Persetujuan pemberian limit ini berdasarkan matriks kewenangan pemberian persetujuan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditentukan.
   c. Pembatasan saham-saham yang dapat dijaminkan dan ditransaksikan oleh nasabah brokerage. Pembatasan ini meliputi:
      - Nilai saham yang diakui sebagai nilai portofolio nasabah dengan penentuan haircut saham berdasarkan aturan regulator dan penilaian ulang oleh Risk Management.
      - Jenis-jenis saham marjin yang boleh ditransaksikan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bursa Indonesia setiap bulannya dan valuasi ulah oleh *Risk Management* sesuai *Risk Appetite* Perusahaan.
      - Investment Universe (*Bond Universe* dan *Equity Universe*) adalah daftar efek yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengelolaan Risiko (KPR) yang dapat menjadi *underlying asset* oleh Manajer Investasi dalam pengelolaan *portfolio*. Bank Universe adalah daftar Bank Counterparty yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengelolaan Risiko (KPR) yang dapat digunakan untuk penempatan time deposit. Limit penempatan *time deposit* pada *Bank Counterparty* ditetapkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) dan di-*review* setiap 2 (dua) kali dalam setahun.

4. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit. Kebijakan Manajemen Risiko mengatur prinsip-prinsip manajemen risiko, antara lain berisi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, kepatuhan terhadap hierarki dan kewenangan, lingkup pengaturan yang jelas, direktif serta berorientasi pada efektifitas dan bisnis yang berkelanjutan. Penetapan limit risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Limit risiko kredit ditetapkan untuk riisko yang berkaitan dengan reasuransi dan investasi.
   b. Limit risiko kredit ditetapkan setiap tahun sesuai *Risk Appetite* dan ketentuan yang berlaku.
   c. Penetapan limit risiko menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode *regulatory, historical, expert judgment* dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan lain-lain.

C. STRUKTUR DAN ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO KREDIT SERTA FUNGSI KONTROL

Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitam pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Perkreditan lainnya dan/atau satuan-satuan kerja, BRI serta Perusahaan Anak Bank dan Pegadaian juga memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK) yang merupakan perangkat perkreditan BRI.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat perkreditan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:
   a. Menyetujui RBB yang mencakup : rencana kredit tahunan, rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang disampaikan kepada OJK.
   b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit
   c. Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
   d. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi atas:
      - Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan
      - Langkah-langkah perbaikan atas apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang ditetapkan.
      - Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.

2. Direksi

Tugas dan tanggungjawab Direksi sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan bertanggungjawab atas:
   - Penyusunan KPB.
   - Penyusunan rencanan prekreditan yang tertuan di dalam RBB.
   - Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan oleh Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
   - Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan audit intern.
b. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan sesuai konsekuen dan konsisten.
c. Menetapkan anggota KKP dan Komite Kredit (KK).
d. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris perihal perkembangan kualitas portofolio secara keseluruhan dan Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.

3. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Tugas dan tanggungjawab KKP sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan KPB khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur dalam PPKPB OJK.
b. Mengawasi penerapan KPB dilaksanakan secara bertanggungjawab dan penuh kesinambungan.
c. Melakukan review KPB secara berkala
d. Melakukan evaluasi kebenaran atas pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana, proses pemberian kredit atau penyediaan dana, pelaksanaan ketentuan BMPK, penyisihan pencadangan, penyelesaian kredit bermasalah dan ketaatan perundang-undangan lainnya.
e. Melakukan kajian efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
f. Melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perihal Hasil pengawasan atas penerapan KPB dan Laporan hasil evaluasi.
g. Memantau perkembangan kualitas *portfolio* perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

4. Komite Kredit (KK)

Tugas dan tanggungjawab KK sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan persetujuan kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dalam permohonan kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
c. Melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan kredit

5. Satuan Kerja Perkreditan dan Pejabat kredit

Satuan Kerja Perkreditan (SKP) adalah jajaran *Relationship Management* (RM) dan jajaran *Credit Risk Management* (CRM) yang berada di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit serta Unit Kerja BRI di luar negeri. Pejabat kredit terdiri dari pekerja kredit lini dan pekerja kredit *support*.

Untuk Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan akuntabilitas perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari Bagian *Enterprise Risk Management*, Bagian Manajemen Risiko Operasional, *Modelling* dan Manajemen *Portfolio* serta Bagian Kebijakan dan Prosedur. SKMR bertanggung jawab atas tercapainya *portfolio* pembiayaan yang sehat, melakukan *review* kebijakan dan pedoman pembiayaan secara periodik, mendelegasikan wewenang memutus pembiayaan kepada pejabat jajaran Credit Risk Management sesuai dengan batas, mengesahkan *Financing Portfolio Guidelines* dan anggota Komite Pembiayaan.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pembiayaan, struktur organisasi dan manajemen pembiayaan diatur untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat dan penerapan manajemen risiko didalam proses bisnis pembiayaan melalui:

a. Unit kerja yang terkait pembiayaan yang terdiri atas Relationship Management dan Credit Risk Management.
b. Satuan Kerja Pembiayaan dan Pejabat Pembiayaan
c. Komite Pembiayaan sebagai perangkat operasional yang bersifat kolegial dalam melakukan evaliasi dan putusan pembiayaan.
d. Pejabat yang terkait dalam proses prakarsa dan putusan pembiayaan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan risiko kredit dan kompleksitas bisnis pada Perusahaan Pembiayaan dengan fokus pada pengelolaan risiko kredit, maka dilaksanakan dengan kelayakan calon nasabah ditentukan melalui *credit scoring, m*enetapkan tingkat persetujuan dan batas wewenang memutus pembiayaan oleh Komite Pembiayaan yang tertuang pada Kebijakan Pembiayaan dan Operasional ULaMM/ULaMM Syariah dan Mekaar/Mekaar Syariah serta penetapan skema tingkat persetujuan dan batas wewenang memutus pembiayaan yang berjenjang.

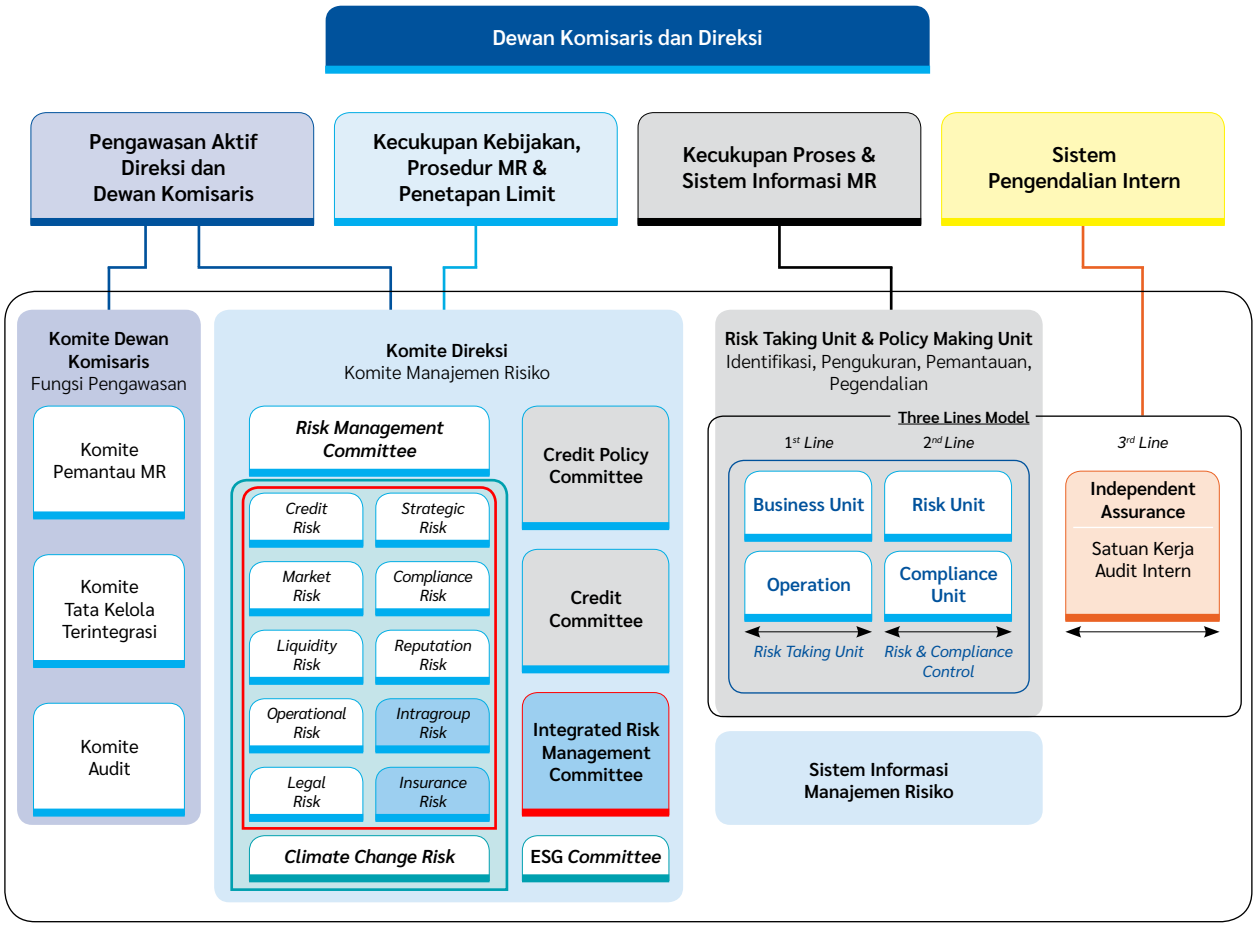
Untuk Perusahaan Ventura, pembentukan Struktur Organisasi dengan mempertimbangkan kompleksitas proses bisnis dan operasional sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Ventura membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada dibawah supervisi Direktur Portofolio & Keuangan. Unit Kerja yang bersentuhan dengan risiko investasi adalah seluruh divisi yang berada di bawah Direktorat Investasi dan Kantor Cabang Pembiayaan Kupang yang berada di bawah supervise Direktorat Portofolio & Keuangan. Untuk mewujudkan kegiatan usaha yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern, maka Perusahaan membentuk komite untuk kegiatan investasi (baik deploy/divestasi).

Untuk Perusahaan Efek, Divisi Manajemen Risiko merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko. Dalam pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis serta mengkordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan risiko, maka dibentuk Komite-Komite Eksekutif terkait, yang antara lain mencakup:

a. Komite Pengelolaan Risiko yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan penyusunan/penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan- eputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan/persetujuan Investment Universe, dan persetujuan atas limit-limit transaksi.
b. Komite Investasi yang bertugas untuk membahas, mengevaluasi, merekomendasi, dan menetapkan jangkauan investasi, batasan investasi, jenis investasi, dan strategi investasi yang harus dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi.
c. Komite Produk yang bertugas untuk melakukan persetujuan pembentukan produk, evaluasi produk yang sudah berjalan, mengusulkan pengembangan/penggabungan produk, dan mengajukan konsep pemasaran produk kepada Direksi.

Untuk Perusahaan Asuransi, untuk mengontrol pertumbuhan risiko kredit dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat dalam risiko kredit seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat-pejabat lainnya dan/atau satuan-satuan kerja, maka Perusahaan Asuransi memiliki Komite Investasi.

D. HUBUNGAN ANTARA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO KREDIT, PENGENDALIAN RISIKO, KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL



Dalam implementasi Manajemen Risiko Kredit di BRI, Direktur Manajemen Risiko membawahi fungsi Manajemen Risiko Kredit sekaligus Unit Pengendali Risiko Kredit. Fungsi Manajemen Risiko Kredit merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari:

1. Credit & Product Risk Policy Division berperan dalam penyusunan kebijakan perkreditan dan penyusunan model *Internal Risk Rating*.
2. Market, Portfolio & Enterprise Risk Division berperan dalam penyunan kebijakan portfolio kredit, penyusunan limit risiko kredit, penyusunan kebijakan dan perhitungan CKPN dan ATMR untuk risiko kredit serta *monitoring portofolio*, maupun *Stress Test* risiko kredit.

Unit Pengendali Risiko Krdit terbagi berdasarkan segmen bisnisnya yaitu:

1. Wholesale Credit Risk Analys Division berperan mengendalikan risiko kredit pada segmen korporasi secara *transactional* basis.
2. Executive Risk Officer Team berperan dalam mengendalikan risiko kredit pada segmen Menengah secara *transactional* basis.
3. Credit Risk Analysis Regional Office berperan dalam mengendalikan risiko kredit pada segmen Menengah secara *transactional* basis.

Fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Compliance Division dan Policy & Procedure Division memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyusunan *Standard Operating Procedure*, serta melaksanakan Uji Kepatuhan untuk memastikan BRI telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari peraturan perundangan.

Satuan Kerja Audit Intern sebagai *Independent Assurance* memiliki peran penting dalam menilai efektivitas implementasi manajemen risko kredit, baik pada *transactional* basis mupun secara *portfolio* basis. Selain itu, SKAI juga masuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sehingga rekomendasi hasil audit merupakan menjadi bagian dari perbaikan kebijakan kredit.

Pada Perusahaan Anak, implementasi *second line* dan *third line of defence* disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kompleksitas operasional yang terlihat dari struktur organisasi masing-masing Perusahaan Anak. Untuk Perusahaan Anak Bank, Pegadaian dan Perusahaan Pembiayaan, fungsi manajemen risiko berperan dalam memantau dan mengendalikan risiko secara agregat serta menyusun kebijakan dan metodologi risiko kredit. Pengendalian terhadap kredit bermasalah (Kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) dilakukan oleh jajaran *Credit Risk Management* (CRM) atau petugas jajaran RM (*Relationship Management*) yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah. Selain itu, fungsi kepatuhan memastikan *due dilligence* atas pemberian kredit dengan putusan komite kredit dan Satuan Kerja Audit Intern berperan memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat dan sesuai dengan Kebijakan perkreditan maupun Pedoman Pemberian Kredit.

Untuk Perusahaan Asuransi, fungsi *Risk Management* memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola penyusunan/evaluasi/penyempurnaan perencanaan dan strategi manajemen risiko serta kebijakan, metodologi, pedoman perangkat dan pengukuran manajemen risiko. Fungsi Kepatuhan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola dan evaluasi kegiatan, aktivitas operasional, kebijakan dan pedoman Perusahaan yang memadai sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi, serta mengelola seluruh kebijakan Regulator terimplementasi pada setiap Unit Kerja. Fungsi Audit Internal memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan kegiatan audit *intern* berupa jasa *Assurance* dan jasa konsultasi sebagai *Strategic Business Partner* terhadap proses bisnis perusahaan. Dalam melakukan kontrol pertumbuhan risiko kredit dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat dalam risiko kredit seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat-pejabat lainnya dan/atau divisi-divisi, juga dibentuk suatu Komite Investasi untuk menentukan *investment policy* maupun putusan investasi kepada pihak terkait dan pihak ketiga dengan nominal danjangka waktu tertentu.

Untuk Perusahaan Ventura, fungsi manajemen risiko investasi dibagi dalam dua bagian yaitu sebelum investasi dilakukan *(investment risk management)* dan setelah investasi dilakukan *(portfolio risk management)*. Pada tahap *pre-investment*, tim investasi berkoordinasi dengan bagian manajemen risiko, kepatuhan, dan legal untuk memastikan seluruh tahapan investasi sudah *comply*. Selain SKMR BRI Ventures, terdapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI Ventures yang berfungsi sebagai kontrol internal dan *third line defense* dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. SKAI BRI Ventures berkontribusi dalam memberikan support pengendalian internal dan indikasi *fraud*. SKAI BRI Ventures juga secara berkala melakukan *risk based audit*. Dalam pelaksanaannya, proses audit juga dimonitor oleh tim SKAI BRI secara *offsite*. Apabila diperlukan, tim SKAI BRI dapat melakukan *joint-audit* secara *ad-hoc.* Hal ini ditujukan untuk menjaga efisiensi operasional di BRI Ventura tanpa menurunkan kualitas hasil audit.

E. CAKUPAN DAN INFORMASI UTAMA DARI PELAPORAN TENTANG EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO KREDIT KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BRI dan seluruh Perusahaan Anak yang membidangi risiko kredit menyusun laporan manajemen risiko dalam format yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara konsolidasian maupun secara terintegrasi. Pelaporan manajemen risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komsiaris dan pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun Konsolidasi.
2. Laporan CKPN dan ATMR untuk Risiko Kredit.
3. Laporan perkembangan pertumbuhan pinjaman.
4. Laporan perkembangan kualitas kredit.
5. Laporan perkembangan kredit yang direstrukturisasi.
6. Laporan penggunaan anggaran penghapusbukuan (PH) dan realisasi pendapatan *recovery.*
7. Laporan monitoring biaya CKPN maupun rasio pencadangan, misalnya NPL *Coverage* dan LAR *Coverage.*
8. Hasil *Stress Test* Risiko Kredit baik secara portfolio maupun bagi nasabah besar.

II. Pengungkapan Kualitas Kredit Atas Aset (CR1)

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Nilai Tercatat Bruto		CKPN			CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b+c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	137.986.390	1.008.096.116	77.009.890	57.924.952	19.084.938		1.069.072.616
2	Surat Berharga	-	290.676.869	65.374	-	65.374		290.611.495
3	Transaksi Rekening Administratif	8.804.892	197.125.074	5.386.903	4.239.226	1.147.677		200.543.063
4	**Total**	146.791.282	1.495.898.059	82.462.167	62.164.178	20.297.989		1.560.227.174

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Nilai Tercatat Bruto		CKPN			CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b+c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b	c	d	e	f	g
1	Kredit	142.339.380	1.132.170.905	87.538.517	63.521.233	24.017.284		1.186.971.768
2	Surat Berharga	-	296.328.506	66.795	-	66.795		296.261.711
3	Transaksi Rekening Administratif	8.816.218	197.261.760	5.386.968	4.239.291	1.147.677		200.691.010
4	**Total**	151.155.598	1.625.761.171	92.992.280	67.760.524	25.231.756		1.683.924.489

Pengungkapan Tambahan

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi.

III. Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga Yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	157.791.847
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	36.108.904
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	17.068.875
4	Nilai hapus buku	16.204.327
5	Perubahan lain	(22.641.159)
6	**Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)**	137.986.390

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	163.823.954
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	37.486.143
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	19.101.898
4	Nilai hapus buku	16.549.471
5	Perubahan lain	(23.319.348)
6	**Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)**	142.339.380

Pengungkapan Tambahan

IV. Pengungkapan Tambahan Terkait Kualitas Kredit Atas Aset (CRB)

A. KUALITATIF

Cakupan dan Definisi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Dan Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi. Tagihan yang mengalami penurunan nilai merupakan tagihan yang mengalami suatu kondisi dimana terjadi peristiwa yang merugikan (bukti objektif) sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah kredit diberikan yang berdampak pada kesanggupan bayar debitur dimasa datang. Seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari masuk dalam tagihan yang mengalami penurunan nilai.

Input, Asumsi, dan Teknik Yang Digunakan Dalam Mengestimasi Penurunan Nilai

a. **Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)**

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih. Pandangan dasar (*base case*) digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

b. **Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif, kualitatif, dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. LGD juga diamati dengan mempertimbangkan jaminan tunai yang merupakan bagian intergral dari aset keuangan terhutang serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pemulihan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis.

B. KUANTITATIF

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

BRI secara Individu

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	
a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan kepada Pemerintah	406.510.805	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	89.613.901	749.987	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	63.815.228	2.805	-	-	
5	Tagihan kepada *Covered Bond*	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	2.682.595	-	-	-	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	5.560.175	-	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	12.238.116	21.327.795	8.235.359	4.120.161	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3.776.565	5.147.960	2.060.976	1.336.583	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	1.900.894	3.748.578	703.073	68.677	
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9.559.254	36.995.284	12.100.139	10.780.419	
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	103.055.001	54.962.483	75.417.509	32.565.302	
13	Tagihan kepada Korporasi	136.814.743	14.369.731	2.706.404	2.682.446	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	12.837.462	12.781.888	6.160.041	2.119.814	
15	Aset Lainnya	49.190.485	9.325.491	4.673.910	2.970.423	
	TOTAL	897.555.223	159.412.002	112.057.410	56.643.825	

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	
a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan kepada Pemerintah	410.961.590	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	90.208.788	749.987	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	Jawa Barat & Banten	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	g	h	i	j	k	l
	-	-	-	-	1.207.001	407.717.806
	6.631.633	1.882	666.841	1.763.030	-	99.427.274
	-	-	-	-	-	-
	5.076	2.906	2.283	-	-	63.828.298
	-	-	-	-	-	0
	-	-	-	-	-	2.682.595
	-	-	-	-	-	5.560.175
	15.235.886	18.957.698	19.385.793	24.097.718	-	123.598.526
	5.837.216	2.622.677	5.455.095	7.708.663	-	33.945.735
	152.725	2.294.804	279.555	608.508	-	9.756.815
	18.682.474	10.818.992	12.531.402	25.391.590	-	136.859.554
	13.589.473	82.304.455	86.339.094	68.684.162	7.853.317	524.770.796
	12.285.277	7.264.781	12.409.380	15.640.558	15.408.510	219.581.829
	16.458.776	10.811.566	10.364.498	10.559.118	325.037	82.418.200
	7.726.633	9.068.768	7.098.440	11.028.537	2.442.739	103.525.425
	96.605.169	144.148.530	154.532.381	165.481.884	27.236.604	1.813.673.028

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	Jawa Barat & Banten	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	g	h	i	j	k	l
	-	-	-	-	1.240.456	412.202.046
	6.631.633	1.882	666.841	1.763.030	3.380	100.025.541
	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	
a	b	c	d	e	f	
4	Tagihan kepada Bank	67.566.541	65.394	16.247	-	
5	Tagihan kepada *Covered Bond*	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	2.682.595	-	-	-	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	7.513.064	5.039	1.308	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	12.371.192	21.339.449	8.235.359	4.120.161	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.098.047	5.149.249	2.060.976	1.336.583	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	1.900.894	3.757.579	703.073	68.677	
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	10.245.686	36.996.975	12.100.139	10.780.419	
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	117.627.492	82.538.434	80.695.689	32.565.302	
13	Tagihan kepada Korporasi	140.267.309	14.569.394	2.756.655	2.682.446	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	14.972.194	13.100.146	6.234.048	2.119.814	
15	Aset Lainnya	59.533.442	14.065.397	5.904.306	2.970.423	
	TOTAL	939.948.835	192.337.042	118.707.799	56.643.825	

Pengungkapan Tambahan

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

BRI secara Individu

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	3.178.392	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	1.827.782	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	19.508.873	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	16.553.650	-	-	-	-	

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	Jawa Barat & Banten	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	g	h	i	j	k	l
	21.653	22.992	27.074	36.034	626	67.756.562
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	579.289	3.261.884
	1.335	1.617	1.996	2.901	50	7.527.310
	15.240.599	18.963.002	19.403.953	24.237.698	-	123.911.411
	5.837.640	2.622.677	5.462.613	7.756.967	-	34.324.753
	152.725	2.294.804	279.555	608.508	-	9.765.816
	18.682.989	10.819.462	12.532.515	25.502.737	-	137.660.921
	30.570.942	94.470.835	102.379.199	93.359.473	8.060.254	642.267.619
	12.340.446	7.383.467	12.491.701	15.865.202	15.623.809	223.980.430
	16.545.302	10.907.898	10.510.452	10.942.171	332.406	85.664.433
	8.982.068	10.589.908	8.976.299	13.757.421	3.028.636	127.807.899
	115.007.331	158.078.545	172.732.199	193.832.142	28.868.906	1.976.156.624

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio RItel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	13.330.853	2.891.967	21.427	70.512	129.733.902	26.062.864	9.890.490	-
	-	914.070	281.666	38.659	1.969	3.469.333	19.403.852	213.743	-
	-	8.378.200	3.409.854	1.780.503	18.327	52.657.192	33.026.652	6.284.426	-
	-	384.183	120.465	1.479.759	1.177	10.217.563	10.790.671	221.883	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	13.976.385	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	15.469.102	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	5.234.811	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	33.267	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	957.082	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	10.997.808	-	58.889.157	-	2.481.022	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	4.175	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	406.510.805	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	7.246.567	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	99	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	1.207.001	4.439.278	-	4.939.141	-	201.573	
	Total	407.717.806	99.427.272	-	63.828.298	-	2.682.595	

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio RItel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	268.412	96.131	-	576	431.816	61.883	109.711	-
	-	5.300.790	975.166	5.488.067	2.348	2.100.416	12.439.804	5.980.898	-
	-	80.293.960	21.635.326	107.300	180.166	183.156.757	23.809.261	39.021.474	-
	-	1.820.037	336.655	7.271	10.212	5.048.795	7.376.637	1.854.483	-
	-	2.845.305	1.091.871	860	22.740	13.241.424	1.927.466	2.905.647	-
	-	706.006	113.244	1.571	1.037	246.176	413.383	64.142	-
	-	103.004	96.010	-	815	254.905	2.780.823	49.436	-
	-	848.551	344.197	10.468	10.543	2.145.467	421.673	529.327	-
	-	310.515	86.298	626	288	126.032	66.681	72.786	-
	-	1.447.169	463.440	7.611	7.902	2.052.769	1.644.076	675.850	-
	-	40.620	130.598	-	310	4.824	388.275	2.605	-
	-	183.901	115.146	-	1.274	252.917	201.360	81.094	-
	-	778.305	460.408	-	5.878	877.239	545.972	262.116	-
	-	128.344	31.617	-	798	372.401	34.988	404.214	-
	-	4.776.380	1.145.387	812.694	3.237.607	50.457.135	15.544.379	5.628.601	-
	-	251.957	42.183	-	705	353.031	122.905	170.069	-
	-	-	-	-	-	213	-	-	-
	-	448.916	72.343	-	133.263.047	65.500.940	17.803.539	7.950.178	-
	-	-	-	-	1.160	486	213	-	-
	5.560.175	39.048	5.764	-	20.162	2.069.063	44.714.473	45.025	103.525.425
	5.560.175	123.598.528	33.945.736	9.756.816	136.859.553	524.770.796	219.581.829	82.418.200	103.525.425

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	**3.376.664**	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	**1.827.782**	-	-	-	-	
3	Industri Pengolahan	-	**19.508.873**	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	**16.553.650**	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	**13.976.385**	-	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	**15.469.102**	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	**5.234.811**	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	**33.267**	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	**957.082**	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	**2.729.737**	**10.997.808**	-	**59.656.683**	-	**2.481.022**	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	**4.175**	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	**406.510.805**	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	**7.246.567**	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio RItel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	13.355.302	13.693.102	21.427	70.512	130.112.101	27.127.275	10.959.449	-
	-	914.949	282.417	38.659	1.969	3.675.012	19.490.398	213.705	-
	-	8.387.069	4.497.791	1.780.503	18.327	53.802.817	33.614.130	6.284.947	-
	-	384.183	120.657	1.479.759	1.177	10.234.574	10.800.360	224.273	-
	-	268.433	96.131	-	576	431.887	61.883	110.511	-
	-	5.322.276	1.303.215	5.496.974	2.348	2.509.754	12.527.872	6.372.186	-
	-	80.359.980	6.913.167	107.300	180.166	184.584.971	24.002.941	39.220.231	-
	-	1.822.057	337.439	7.271	10.700	5.437.216	7.533.023	1.864.666	-
	-	2.848.234	1.092.332	860	22.740	13.366.944	1.927.466	2.924.606	-
	-	872.686	115.985	1.571	299.007	326.842	413.383	163.695	-
	1.949.673	106.739	97.956	-	331.892	825.360	2.816.051	52.724	188.437
	-	850.329	344.197	10.468	10.543	2.200.253	421.673	535.382	-
	-	314.633	88.420	626	288	559.437	147.507	85.510	-
	-	1.447.414	464.440	7.611	7.902	2.754.545	1.751.541	791.626	-
	-	40.620	130.598	1	310	4.824	388.275	2.605	-
	-	183.964	115.146	-	1.274	363.491	201.360	81.740	-
	-	782.744	460.865	-	5.878	1.112.062	550.373	271.205	-
	-	128.344	31.617	-	798	373.050	34.988	405.164	-
	-	4.776.558	3.041.612	812.694	3.237.607	50.528.570	15.544.379	5.628.612	-
	-	252.636	42.183	-	705	431.070	122.905	171.781	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	99	-	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	2.961.504	4.839.274	-	8.099.879	-	780.862	
	Total	412.202.046	100.025.540	-	67.756.561	-	3.261.884	

3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tahun Laporan					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		<= 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	35.487.606	65.165.251	42.987.809	58.918.211	205.158.929	407.717.806
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	29.652.067	6.869.468	1.104.147	1.564.992	60.236.598	99.427.273
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tegihan kepada Bank	1.429.277	778.878	725.808	2.730.903	58.163.432	63.828.298
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.507.634	1.137.548	36.658	754	-	2.682.594
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	5.560.175	5.560.175
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	70.462.431	29.556.138	21.229.038	2.243.116	107.802	123.598.526
9	Kredit Beragun Properti Komersial	18.677.230	6.445.734	5.945.709	2.867.050	10.014	33.945.736
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4.935.918	883.343	1.856.455	859.879	1.221.221	9.756.816
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.344.904	9.569.896	16.985.334	108.958.298	1.121	136.859.553
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio RItel	80.451.453	219.951.008	126.902.772	60.933.540	36.532.023	524.770.796
13	Tagihan kepada Korporasi	87.424.992	27.426.827	16.312.520	33.531.902	54.885.588	219.581.829
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	21.892.947	25.544.089	16.467.327	10.156.653	8.357.183	82.418.200
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	103.525.425	103.525.425
	TOTAL	353.266.459	393.328.181	250.553.578	282.765.298	533.759.512	1.813.673.027

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio RItel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	1	-	213	-	-	-
	-	448.916	75.084	-	133.263.047	65.504.560	17.803.539	8.049.732	-
	-	2.295	274	-	169.904	1.218.089	22.246	6.395	-
	5.577.636	41.051	980.128	92	23.249	111.909.977	46.676.863	1.243.686	127.619.462
	7.527.309	123.911.411	34.324.753	9.765.816	137.660.919	642.267.619	223.980.430	85.664.433	127.807.899

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tahun Laporan					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		<= 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	37.013.795	65.823.151	43.578.731	60.593.985	205.192.383	412.202.046
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	29.949.139	6.969.010	1.104.147	1.763.265	60.239.978	100.025.540
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tegihan kepada Bank	2.352.449	830.388	733.739	2.730.903	61.109.083	67.756.561
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.507.634	1.137.548	36.658	754	579.290	3.261.884
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	78	-	-	1.949.673	5.577.558	7.527.309
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	70.578.398	29.579.952	21.246.331	2.399.593	107.137	123.911.411
9	Kredit Beragun Properti Komersial	18.740.532	6.449.953	5.953.050	3.171.205	10.014	34.324.753
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4.944.918	883.343	1.856.455	859.879	1.221.221	9.765.816
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.820.336	9.763.733	17.023.637	109.052.093	1.121	137.660.919
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio RItel	81.344.500	222.379.779	130.582.942	61.614.235	146.346.163	642.267.619
13	Tagihan kepada Korporasi	88.287.185	28.143.238	17.098.071	33.802.372	56.649.565	223.980.430
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	22.398.051	25.937.649	16.617.292	11.432.391	9.279.049	85.664.433
15	Aset Lainnya	815.395	7.605	993.712	5.710	125.985.476	127.807.899
	TOTAL	359.752.410	397.905.350	256.824.766	289.376.057	672.298.040	1.976.156.622

4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

BRI secara Individu

No	Keterangan	31 Desember 2023				
		Wilayah				
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	
a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan	957.020.452	173.655.823	119.104.996	60.268.286	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	30.020.242	19.954.389	8.241.426	3.167.934	
	a. Belum Jatuh Tempo	-	-	-	-	
	b. Telah Jatuh Tempo	30.020.242	19.954.389	8.241.426	3.167.934	
3	CKPN – *Stage 1*	2.093.224	3.414.215	1.203.365	595.363	
4	CKPN – Stage 2	10.045.625	3.060.761	1.282.105	456.065	
5	CKPN – Stage 3	7.382.247	3.555.185	533.764	521.096	
6	Tagihan yang hapus buku	3.550.190	4.830.500	1.454.740	1.008.777	

*) Keterangan: Posisi Desember 2022 belum tersedia karena merupakan laporan pertama kali

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Keterangan	31 Desember 2023				
		Wilayah				
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	
a	b	c	d	e	f	
1	Tagihan	1.002.516.282	181.470.286	125.482.169	85.839.500	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai	38.717.845	20.253.892	8.386.488	4.336.552	
	a. Belum Jatuh Tempo	6.253.780	244.897	113.616	542.572	
	b. Telah Jatuh Tempo	32.464.065	20.008.995	8.272.871	3.793.980	
3	CKPN – *Stage 1*	2.856.233	3.589.729	1.318.250	1.275.672	
4	CKPN – Stage 2	12.393.401	3.221.989	1.387.157	509.064	
5	CKPN – Stage 3	7.891.438	3.601.936	561.930	624.311	
6	Tagihan yang hapus buku	4.222.631	4.966.643	1.544.059	1.103.991	

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023					
	Wilayah					
	Jawa Barat & Banten	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	g	h	i	j	k	l
	118.681.061	157.337.642	167.099.510	180.051.516	28.805.938	1.962.025.225
	33.486.056	17.657.389	15.996.958	17.671.263	619.436	146.815.093
	-	-	-	-	-	-
	33.486.056	17.657.389	15.996.958	17.671.263	619.436	146.815.093
	2.817.001	2.944.119	2.719.316	3.841.283	664.521	20.292.407
	12.554.569	2.865.633	2.050.348	2.629.077	37.003	34.981.187
	4.308.229	3.412.385	3.176.894	4.031.749	267.023	27.188.572
	7.097.888	4.318.633	5.025.546	5.804.146	-	33.090.420

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023					
	Wilayah					
	Jawa Barat & Banten	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	g	h	i	j	k	l
	138.541.896	172.203.504	184.494.742	207.054.295	32.590.895	2.130.193.568
	34.366.873	18.294.025	16.851.121	19.629.049	619.436	161.455.279
	621.661	425.939	611.595	1.461.810	-	10.275.870
	33.745.212	17.868.086	16.239.526	18.167.239	619.436	151.179.409
	3.409.040	3.338.863	3.219.040	4.682.190	664.521	24.353.536
	12.985.739	3.093.584	2.370.831	3.246.713	37.003	39.245.482
	4.477.154	3.503.617	3.300.509	4.292.706	267.023	28.520.623
	7.489.129	4.531.415	5.340.899	6.296.679	-	35.495.447

5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	202.253.310	-	19.008.964	3.781.594	3.734.647	4.470.482	140.698
2	Pertambangan dan Penggalian	29.955.212	-	2.766.070	169.684	883.331	1.607.217	18.465
3	Industri pengolahan	142.639.757	-	17.609.600	1.453.558	7.014.841	4.324.496	99.205
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41.672.822	-	236.522	213.733	46.911	13.982	19.994
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	1.056.067	-	154.673	18.224	21.525	19.942	916
6	Konstruksi	53.400.664	-	10.140.722	244.184	4.144.547	672.381	36.543
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepedea Motor	400.187.630	-	59.839.758	7.293.621	8.218.697	10.842.644	488.625
8	Pengangkutan dan Pergudangan	24.518.010	-	3.374.247	277.117	1.500.192	258.415	14.417
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	24.842.159	-	4.734.293	494.973	1.148.877	545.564	22.109
10	Informasi dan Komunikasi	2.694.991	-	141.856	31.376	11.539	62.182	1.573
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	79.178.714	-	72.179	66.782	6.292	16.949	37.806
12	Real Estat	4.740.432	-	776.198	89.879	126.753	96.996	4.522
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	728.368	-	107.270	11.567	14.665	18.705	2.432
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	6.861.793	-	953.637	112.315	133.190	126.051	6.862
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425.921.096	-	3.166	197.887	533	163	200.568
16	Pendidikan	908.670	-	115.648	18.773	15.615	17.650	445
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.186.072	-	383.012	61.310	56.559	60.251	2.064
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2.069.903	-	1.463.100	13.933	971.536	40.572	1.834
19	Aktivitas Jasa Lainnya	99.370.268	-	12.189.031	1.696.219	4.968.131	1.208.462	96.552
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.058.759	-	249.210	15.318	32.521	39.595	1.484
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	223	-	-	4	-	-	-
22	Rumah Tangga	239.827.846	-	12.437.481	3.428.389	1.686.736	2.544.446	424.380

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.945	-	-	20	-	-	1
24	Lainnya	174.950.514	-	58.459	601.948	243.549	201.425	31.468.923
	Total	1.962.025.225	-	146.815.093	20.292.407	34.981.187	27.188.572	33.090.420

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.746.966	3.217.834	19.259.934	4.688.265	4.120.763	4.595.214	483.391
2	Pertambangan dan Penggalian	30.323.168	89.535	2.767.949	176.863	911.674	1.608.588	42.080
3	Industri pengolahan	145.646.713	715.071	17.679.831	1.505.964	7.035.777	4.371.502	574.215
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41.738.324	14.702	238.553	215.171	46.978	14.715	20.134
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	1.064.760	1.560	156.175	18.564	22.326	21.127	1.229
6	Konstruksi	55.039.744	993.721	10.187.242	261.041	4.273.565	705.771	55.764
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	446.273.362	2.465.050	60.737.068	9.088.786	9.588.650	11.351.726	1.641.779
8	Pengangkutan dan Pergudangan	25.293.471	48.841	3.391.152	287.057	1.501.609	279.145	28.884
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	24.992.602	25.040	4.736.773	495.621	1.149.344	547.522	23.783
10	Informasi dan Komunikasi	2.797.735	26.144	142.004	31.759	11.758	62.440	2.064
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	100.757.495	441.732	264.504	72.946	6.656	210.806	97.254
12	Real Estat	4.804.001	14.228	776.214	90.164	127.071	97.609	27.113
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	1.265.663	57.013	109.656	13.502	15.515	22.389	7.019
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	7.814.219	141.306	973.615	117.054	137.586	150.928	15.154
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425.921.096	-	3.166	197.887	533	163	200.568
16	Pendidikan	1.020.513	1.354	116.121	19.151	15.669	18.155	568

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.681.946	51.730	393.765	71.747	85.120	67.773	9.954
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2.071.514	962	1.463.100	13.952	971.536	40.572	1.834
19	Aktivitas Jasa Lainnya	101.058.900	114.033	12.217.958	1.762.412	5.042.067	1.228.611	141.901
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.737.205	573.600	277.784	19.519	36.829	58.819	1.599
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	223	-	-	4	-	-	-
22	Rumah Tangga	239.827.846	-	12.437.481	3.428.389	1.686.736	2.544.446	424.380
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.447.067	239.352	11.626	7.251	2.637	22.903	14.136
24	Lainnya	245.869.033	1.043.063	2.837.736	1.770.468	2.455.084	499.700	31.680.645
	Total	2.130.193.568	10.275.870	151.179.409	24.353.537	39.245.482	28.520.623	35.495.447

6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan bersih berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.876.487	7.228.262	126.881.641	137.986.390
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	TOTAL	3.876.487	7.228.262	126.881.641	137.986.390

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan bersih berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.606.426	7.698.198	130.034.756	142.339.380
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	TOTAL	4.606.426	7.698.198	130.034.756	142.339.380

V. Pengungkapan Tambahan Terkait Perlakuan Terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

A. KUALITATIF

1. Kualitas Aset:

a) Aset bermasalah atau *non-performing* adalah aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Untuk kredit dengan eksposur diatas nilai tertentu, penilaian kolektibilitas dilakukan secara individu berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu ketepatan dalam membayar, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur.

b) Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo merupakan tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi. Tagihan tersebut termasuk aset yang mengalami penurunan nilai dan telah dibentuk Cadangan Penurunan Nilai (CKPN).

c) Aset *Performing* merupakan aset yang memiliki kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

d) Aset Restrukturisasi adalah aset dalam upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Aset dapat direstrukturisasi apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Suatu aset restrukturisasi dapat keluar dari kategori tersebut, apabila dalam jangka waktu restrukturisasi, kondisi usaha debitur telah kembali normal sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai kondisi normal.

2. Segmentasi kredit:

Pengkategorian segmen kredit berdasarkan jenis kredit dan besaran fasilitas kreditnya.

B. SEGMENTASI KREDIT:

1) Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	290.676.869	65.374	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	1.110.309.367	49.912.359	35.773.138	27.097.530	-	-	-	-
	a. Korporasi	195.582.404	16.332.543	7.678.995	7.678.995	-	-	-	-
	b. Ritel	421.954.125	13.930.294	15.179.926	9.932.529	-	-	-	-
	c. Mikro	492.772.838	19.649.522	12.914.217	9.486.006	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	197.125.074	1.147.677	8.804.892	4.239.226	-	-	-	-

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	296.328.506	66.795	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	1.237.758.319	58.792.813	36.751.966	28.745.704	-	-	-	-
	a. Korporasi	261.966.783	19.523.079	7.720.902	7.936.191	-	-	-	-
	b. Ritel	431.368.590	15.043.169	15.551.934	10.510.175	-	-	-	-
	c. Mikro	544.422.945	24.226.565	13.479.130	10.299.339	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	197.273.086	1.147.742	8.804.892	4.239.226	-	-	-	-

2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non-Performing*

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas L dan DPK)		*Stage 1*		*Stage 2*		*Stage 3*	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	82.844.236	26.206.689	19.663.897	16.238.600	-	-	83.780.712	27.123.416	18.727.421	15.321.872
	a. Korporasi	20.402.087	15.183.037	6.718.800	6.718.800	-	-	21.275.229	16.056.179	5.845.658	5.845.658
	b. Ritel	33.200.597	4.926.515	5.849.825	3.855.598	-	-	33.268.294	4.973.664	5.782.128	3.808.449
	c. Mikro	29.241.552	6.097.137	7.095.272	5.664.202	-	-	29.237.189	6.093.573	7.099.635	5.667.765
3	Transaksi Rekening Administratif	1.835.339	1.089.143	170.406	99.040	-	-	1.835.338	27.123.416	170.406	15.321.873

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

		Performing (Kualitas L dan DPK)		*Non Performing* (Kualitas L dan DPK)		*Stage 1*		*Stage 2*		*Stage 3*	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	85.429.359	26.881.505	19.839.043	16.346.331	-	-	86.417.172	27.798.284	18.902.515	15.429.551
	a. Korporasi	20.938.014	15.301.391	6.718.800	6.718.800	-	-	21.862.441	16.174.533	5.845.658	5.845.658

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas L dan DPK)		Stage 1		Stage 2		Stage 3	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	b. Ritel	35.209.857	5.482.101	6.010.259	3.954.527	-	-	35.277.554	5.529.250	5.942.562	3.907.378
	c. Mikro	29.281.488	6.098.013	7.109.984	5.673.004	-	-	29.277.177	6.094.501	7.114.295	5.676.515
3	Transaksi Rekening Administratif	1.835.339	1.089.143	170.406	99.040	-	-	1.835.338	27.123.416	170.406	15.321.873

VI. Pengungkapan Kualitatif Terkait Teknik MRK (CRC)

Dalam menghitung ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar, Bank mempertimbangan penggunaan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan ketentuan OJK. Teknik MRK yang digunakan Bank adalah teknik MRK-Agunan dan teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit. Teknik MRK-Agunan yang digunakan adalah agunan berupa uang tunai (*cash collateral*) yang disimpan pada Bank dan emas yang disimpan pada Entitas Anak. Sedangkan teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit digunakan untuk kredit yang dijamin oleh asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi berstatus BUMN. Kredit yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang merupakan Anak Perusahaan Bank tidak diperhitungkan sebagai penjamin dalam teknik MRK karena merupakan pihak yang terafiliasi dengan Bank.

Kriteria agunan yang dapat diterima antara lain:

1. Agunan diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan serta barang jaminan berupa emas (entitas anak).
2. Penetapan nilai agunan harus didasarkan pada pertimbangan atas penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan pemanfaatan.
3. Penilaian agunan harus dilakukan secara objektif, jujur, bertanggung jawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.
4. *Review* agunan dilakukan untuk melihat kecukupan agunan dibandingkan dengan total kewajiban debitur, antara lain meliputi:
   a. Kondisi agunan pada saat *review*
   b. Nilai agunan
   c. Pengamanan agunan (penyimpanan, pengikatan dan berlakunya agunan)
   d. Informasi lain yang relevan dengan penilaian kecukupan agunan
5. Periode *review* agunan dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam syarat dan ketentuan kredit, namun wajib dilakukan minimal sekali setahun bersamaan dengan *review* kredit sebagaimana diatur dalam masing-masing bindang bisnis. Periode *review* agunan dapat ditetapkan berbeda apabila diatur secara khusus oleh regulator (BI, OJK atau instansi terkait lainnya). Untuk kepentingan perhitungan ATMR, khusus kredit konsumtif beragun rumah tinggal maka wajib dilakukan valuasi agunan secara berkala minimal 30 (tiga puluh) bulan.

VII. Pengungkapan Kuantitatif Terkait Teknik MRK (CR3)

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	746.634.920	322.437.696	11.377.558	311.060.138	
2	Surat Berharga	290.611.495	-	-	-	
3	**Total**	1.037.246.415	322.437.696	11.377.558	311.060.138	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	75.743.441	4.317.997	27.821	4.290.176	

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	760.954.279	426.017.489	65.233.324	360.784.165	
2	Surat Berharga	296.261.711	-	-	-	
3	**Total**	1.057.215.990	426.017.489	65.233.324	360.784.165	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	78.971.860	4.331.296	39.118	4.292.179	

Pengungkapan Tambahan

VIII. Pengungkapan Penggunaan Peringkat Kredit Eksternal (CRD)

Lembaga pemeringkat yang digunakan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch Ratings dan PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Apabila terdapat Surat Berharga yang memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat, maka yang digunakan adalah peringkat yang paling buruk. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah Tagihan kepada Pemerintah, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan kepada Bank, Tagihan kepada Perusahaan Efek & Jasa Keuangan, dan Tagihan kepada Korporasi. Sedangkan tagihan yang lain menggunakan *unrated* (tanpa peringkat) karena tidak tersedianya data peringkat.

IX. Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4)

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	407.717.806	-	407.717.806	-	-	0,00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	55.373.510	91.464.928	55.303.632	44.053.763	49.143.799	49,46%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4	Tagihan kepada Bank	60.233.378	3.594.920	60.233.378	3.594.920	32.630.248	51,12%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	2.610.161	72.434	2.610.161	72.434	992.335	36,99%
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum [2)]	151.936.838	63.076.967	142.755.468	48.001.581	182.237.117	95,53%

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain[3)]	-	-	-	-	-	0,00%
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	18.847.820	1.988.976	18.004.685	795.590	21.395.443	113,80%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	5.560.175	-	5.560.175	-	13.900.438	250,00%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	515.413.419	18.691.586	295.264.021	9.357.377	248.538.179	81,59%
9	Kredit Beragun Properti	151.635.045	14.773.042	125.596.295	5.909.217	77.049.550	58,59%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	119.262.252	10.840.684	96.918.214	4.336.274	53.602.369	52,94%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	32.372.793	3.932.358	28.678.082	1.572.943	23.447.180	77,51%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	8.372.395	3.461.053	7.889.220	1.384.421	12.969.127	139,85%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	80.079.668	4.565.666	76.619.706	2.338.532	88.406.197	111,97%
11	Aset Lainnya	103.525.425	-	103.525.425	-	72.038.101	69,58%
12	**Total**	1.698.164.726	201.690.740	1.437.939.058	115.508.302	867.730.308	55,86%

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	412.202.046	-	412.202.046	-	-	0,00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	55.971.777	91.464.928	55.901.899	44.053.763	49.324.467	49,35%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0,00%
4	Tagihan kepada Bank	64.161.641	3.594.920	63.945.742	3.594.920	33.416.849	49,48%

	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	3.189.450	72.434	2.610.161	72.434	992.335	36,99%
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	0,00%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum [2)]	156.331.008	63.088.045	146.837.507	48.006.012	186.242.517	95,59%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain[3)]	-	-	-	-	-	0,00%
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	18.847.820	1.988.976	18.004.685	795.590	21.395.443	113,80%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	7.527.309	-	7.527.309	-	18.800.890	249,77%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	632.873.918	18.781.482	332.769.293	9.393.701	282.308.612	82,51%
9	Kredit Beragun Properti	152.312.674	14.808.727	126.273.924	5.923.491	77.612.869	58,71%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	119.567.415	10.859.992	97.223.377	4.343.997	53.845.417	53,01%
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	32.745.259	3.948.736	29.050.548	1.579.494	23.767.452	77,60%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0,00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	8.381.395	3.461.053	7.898.220	1.384.421	12.982.627	139,86%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	83.321.386	4.576.954	79.848.785	2.343.047	91.149.389	110,90%
11	Aset Lainnya	127.807.899	-	127.807.899	-	95.667.869	74,85%
12	**Total**	1.860.588.776	201.838.687	1.519.287.923	115.567.846	938.724.325	57,42%

Pengungkapan Tambahan

Eksposure TRA dikonversi menjadi ekuivalen eksposur kredit menggunakan FKK. FKK paling kecil yang digunakan Bank adalah sebesar 20% untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen berupa L/C, FKK 40% diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen (kelonggaran tarik) sedangkan FKK 100% diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk jaminan yang diterbitkan dalam rangka pengambilalihan risiko gagal bayar. CKPN yang diperhitungkan untuk perhitungan tagihan bersih merupakan CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada *stage* 2 dan *stage* 3. Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang digunakan oleh Bank adalah agunan dan penjaminan/asuransi kredit, agunan berupa *cash collateral*, sedangkan penjaminan/asuransi kredit merupakan perusahaan asuransi berstatus BUMN. Kredit yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang merupakan Anak Perusahaan Bank tidak diperhitungkan sebagai penjamin dalam teknik MRK karena merupakan pihak yang terafiliasi dengan Bank.

X. Pengungkapan Eksposur Berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

BRI secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	407.717.806	-	-	-	-	-	407.717.806

	Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	1.782.994	97.644.279	-	-	-	99.357.395

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan kepada Bank	-	1.087.957	-	59.733.462	2.278.998	727.881	-	-	63.828.298
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	-	2.280.159	-	174.148	28.299	199.989	-	-	2.682.595

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	30%	35%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%[5)]	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi Umum[2)]	-	3.252.649	-	81.240	-	47.385.760	149.218.770	-	-	-	190.757.049
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain[3)]	-	-	-	-		-	-		-	-	-
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	-	-		-	-		10.859.107	8.784.303	-	-	18.800.275

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%[5]	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	5.560.175	-	-	5.560.175

	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.494.984	464.584.412	47.399.994	10.291.406	-	304.621.398

	Kategori Portofolio	0%[5]	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
9	Kredit Beragun Properti	-	16.912.137	6.791.567	21.366.792	-	19.907.101	-	16.257.822	4.753.212	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	16.912.137	6.791.567	21.366.792		19.907.101		16.257.822		
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]	-	-	-	-		-		-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]		-								
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-		-		-		-		
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-		-		-	
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-		-	4.753.212	
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5]	-	-		-		-		-	-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]									-	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-		-		-		-		
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti										
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi[5]										

	Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	10.736.393	38.443.172	33.238.634	-	78.958.238

	65%[5]	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	29.046.645	25.446.144	12.147.387	-	5.607.359	-	-	-	-	131.505.512
	-	29.046.645	7.615.196	544.139		5.386.184			-	-	101.254.487
	-	-	-	-		-			-	-	-
										-	-
	-		-	-		-			-	-	-
			-				-		-	-	-
	-		17.830.948	11.519.419		221.175			-	-	30.251.025
										-	-
										-	-
	-		-	-		-			-	-	-
		-			-			-	-	-	-
						2.050.967			7.705.849	-	9.273.641

Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%[5]	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11 Aset Lainnya	31.515.575	-	71.953.348	56.502	-	-	103.525.425

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah Pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	486.951.516	6.258.676	2.503.470	478.414.463
2	40% -70%	332.754.958	98.801.832	5.488.661	370.287.868
3	75%	488.732.052	5.136.702	573.177	268.647.838
4	85%	96.089.142	26.000.197	2.080.016	104.367.114
5	90% -100%	239.871.075	62.004.401	3.092.558	279.722.376
6	105% -130%	8.521.092	658.028	263.211	8.650.557
7	150%	39.684.717	2.830.904	329.067	37.796.969
8	250%	5.560.175	-	-	5.560.175
9	400%	-	-	-	-
10	1.250%	-	-	-	-
11	**Total Tagihan Bersih**	1.698.164.726	201.690.740	14.330.159	**1.553.447.360**

BRI secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

	Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	412.202.046	-	-	-	-	-	412.202.046

	Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	2.177.881	97.847.659	-	-	-	99.955.662

	Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	0%[5)]	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
9	Kredit Beragun Properti	-	16.912.137	6.791.567	21.366.792	-	19.907.101	-	16.257.822	4.753.212	
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	16.912.137	6.791.567	21.366.792		19.907.101		16.257.822		
	tanpa pendekatan pembagian kredit[5)]	-	-	-	-		-		-		
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5)]		-								

	Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan kepada Bank	3.781.169	1.087.957	-	59.880.556	2.278.998	727.881	-	-	67.540.662
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain[1)]	579.289	2.280.159	-	174.148	28.299	199.989	-	-	2.682.595

	Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	30%	35%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kategori Portofolio	20%	50%	65%[5)]	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi Umum[2)]	23.121	3.362.292	-	112.252	-	45.877.699	145.468.156	-	-	-	194.843.520
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain[3)]	-	-	-	-		-	-		-	-	-
	Eksposur Pembiayaan Khusus[4)]	-	-		-	-		10.149.718	8.650.557	-	-	18.800.275

	Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%[5)]	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	17.384	7.509.926	-	-	7.527.309

	Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.494.984	582.081.235	47.399.994	10.291.406	-	342.164.533

	65%[5)]	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	29.046.645	25.446.144	12.147.387	-	5.607.359	-	-	-	-	132.197.415
	-	29.046.645	7.615.196	627.969		5.386.184			-	-	101.567.373
	-	-	-	-		-			-	-	-
										-	-

Kategori Portofolio	0%[5]	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-		-		-		-		
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-				-	
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-		-	4.753.212	
tanpa pendekatan pembagian kredit[5]	-	-		-		-		-	-	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]									-	
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)[5]	-	-		-		-		-		
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti										
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi[5]										

	Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	11.730.277	40.695.417	33.238.739	-	82.191.832

	Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%[5]	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11	Aset Lainnya	32.169.703	-	95.578.848	59.347	-	-	127.807.899

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah Pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	496.868.350	2.503.470	2.503.470	487.536.109
2	40% -70%	335.010.325	48.105.290	5.488.661	860.066.705
3	75%	606.470.236	3.476.692	347.669	306.469.968
4	85%	96.520.098	10.413.044	1.487.578	104.811.035
5	90% -100%	269.974.756	49.489.813	2.749.434	1.580.870.523
6	105% -130%	8.521.092	263.211	263.211	1.589.521.080
7	150%	39.713.993	1.316.326	263.265	37.826.302
8	250%	7.509.926	-	-	7.509.926
9	400%	-	-	-	-
10	1250%	-	-	-	-
11	**Total Tagihan Bersih**	1.860.588.776	115.567.846	13.103.288	**4.974.611.648**

	65%[5]	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-		-	-		-			-	-	-
			-				-		-	-	-
	-		17.830.948	11.519.419		221.175			-	-	30.630.042
										-	-
										-	-
	-		-	-		-			-	-	-
		-						-	-	-	-
						2.050.967			7.714.849	-	9.282.641

Pengungkapan Tambahan

1) Pada tabel ini, Bank membagi tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan bobot risiko sebagaimana Lampiran A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2) "Rata-Rata FKK" merupakan jumlah rata-rata tagihan bersih dikalikan dengan FKK pada masing-masing bobot risiko.
3) "Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK" merupakan tagihan bersih setelah memperhitungkan FKK dan dampak penerapan teknik MRK atas eksposur pada laporan posisi keuangan dan TRA.
4) Jumlah "Total Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)" pada tabel ini harus sama dengan total kolom c ("Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK- Laporan Posisi Keuangan") dan kolom d ("Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK- TRA") pada tabel CR4.
5) Tabel "Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak" diisi apabila Bank memiliki Perusahaan Anak yang termasuk dalam cakupan konsolidasi sesuai ketentuan kehati-hatian. Sementara itu, apabila Bank tidak memiliki Perusahaan Anak, Bank hanya mengungkapkan tabel "Bank secara Individu".
6) "Pengungkapan Tambahan" diisi dengan penjelasan mengenai perubahan signifikan (jika ada) dari periode pelaporan sebelumnya dan penyebab utama perubahan tersebut. Selain itu, Bank juga harus menjelaskan terkait urutan pengenaan FKK, CKPN, dan teknik MRK yang digunakan.
7) *Footnotes*:
   [1] Merupakan tagihan yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain sebagaimana Lampiran A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
   [2] Merupakan tagihan yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio tagihan kepada korporasi eksposur korporasi umum sebagaimana Lampiran A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini (tidak termasuk angka [3] dan angka [4]).
   [3] Merupakan tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain yang tidak tergolong dalam kategori portofolio sebagaimana angka [1].
   [4] Merupakan tagihan yang termasuk dalam cakupan kategori tagihan kepada korporasi eksposur pembiayaan khusus (dengan dan tanpa peringkat) sebagaimana Lampiran A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
   [5] Tidak *applicable* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Sebagai Bank yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34 /POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI secara berkala melakukan pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilaporkan secara triwulanan.

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik	4.142	51.773	10.667	133.342	3.696	46.204	9.774	122.180
	b. Risiko Umum	108.043	1.350.542	112.655	1.408.185	78.487	981.082	83.582	1.044.769
2	Risiko Nilai Tukar	156.540	1.956.750	249.105	3.113.812	167.272	2.090.904	284.579	3.557.241
3	Risiko Ekuitas *)			24.074	300.921	-	-	35.329	441.608
4	Risiko Komoditas *)					-	-	-	-
5	Risiko *Option*	227	2.837	227	2.837	-	-	-	-
	Total	268.952	3.361.902	396.728	4.959.097	**249.455**	**3.118.189**	**413.264**	**5.165.797**

*) Untuk Bank yang memiliki Perusahaan Anak yang memiliki eksposure risiko yang dimaksud

Perhitungan risiko pasar mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Selain metode standar di atas, saat ini BRI juga telah melakukan perhitungan risiko pasar dengan metode internal dengan perhitungan *Value at Risk* (VaR) yang menunjukkan suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Metodologi yang digunakan dalam perhitungan VaR saat ini adalah metode *historical VaR*.

Tabel Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk*/VaR) - Bank secara Individual

No	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		VaR Rata-rata	VaR Minimum	VaR Maksimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-rata	VaR Minimum	VaR Maksimum	VaR Akhir Periode
1	Suku Bunga	226.724	120.293	333.276	206.473	71.324	28.411	150.840	60.118
2	Nilai Tukar	32.180	114	67.411	22.430	19.041	121	184.177	17
	Total	258.904	120.407	400.687	228.908	**90.365**	**28.532**	**335.017**	**60.135**

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko suku bunga dalam *banking book* atau *interest rate risk in the banking book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *banking book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Dalam melakukan perhitungan risiko suku bunga, BRI menggunakan panduan sesuai dengan SEOJK nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum". Metode yang digunakan bank dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau ΔEVE, yaitu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau ΔNII, yaitu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Tabel Pengungkapan Eksposure *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) Bank Secara Individu

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	T	T - 1	T	T - 1
Parallel Up	(15.434.868)	(15.433.340)	(14.675.909)	(15.822.557)
Parallel Down	15.984.479	15.978.908	13.586.504	14.762.171
Steepener	(7.978.955)	(7.836.979)	-	-
Flattener	4.246.597	4.110.512	-	-
Short Rate Up	(3.317.921)	(3.427.258)	-	-
Short Rate Down	3.330.907	3.440.991	-	-
Nilai Maksimum Negatif (*absolut*)	15.434.868	15.433.340	14.675.909	15.822.557
Modal *Tier* 1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	240.117.433	235.188.160	102.831.737	101.016.362
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	6,43%	6,56%	14,27%	15,66%

Analisa Kualitatif

Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi *Banking Book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas. Risiko ini disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga *fixed* dan mempunyai *repricing maturities* lebih panjang.

Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite *Asset and Liability Management* (ALCO) dan *Risk Management Committee* (RMC). ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah *balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management* dan *capital management*. RMC dilakukan secara regular setiap bulan dengan pembahasan update kondisi pasar, profil risiko pasar dan *risk issue* terkini.

BRI melakukan perhitungan IRRBB secara triwulanan dengan menggunakan metode *Economic Value of Equity* (EVE) dan *Net Interest Income* (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal *Tier* 1 BRI. Metode EVE ini sesuai dengan *guideline* dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun ke depan.

Analisa Kualitatif

Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah sebagai berikut:
a. *Parallel Up* (400 bps)
b. *Parallel Down* (400 bps)
c. *Steepener* (350 bps)
d. *Flattener* (350 bps)
e. *Short Rate Up* (500 bps)
f. *Short Rate Down* (500 bps)

Dalam perhitungan IRRBB, BRI menggunakan asumsi-asumsi utama permodelan dan parametrik sebagai berikut:
a. Perhitungan arus kas, *instrument* dengan suku bunga *float* menggunakan *risk free* yang bersumber dari *Government Bonds IDR and Government Bonds USD*. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap *instrument*. Sedangkan *Instrument* dengan suku bunga *fix* menggunakan acuan *effective interest rate* sebagai dasar penentuan *cashflow*.
b. *Account Non Maturity Deposit* (NMD) yang terdiri dari giro dan tabungan ditempatkan pada *time bucket overnight, time bucket* 3 - 4 tahun dan *time bucket* 4 - 5 tahun sesuai dengan *caps* maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada *time bucket* terpanjang merupakan *core fund* BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada *non core fund* yang ditempatkan pada *time bucket overnight*.
c. Penentuan *prepayment risk* berdasarkan data historis sesuai dengan segmen dan produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan *baseline* persentase *prepayment* merupakan rata total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut pada setiap segmen. Sedangkan dalam menentukan *early redemption,* metode yang dipakai menggunakan pendekatan historis sampai dengan posisi laporan untuk menetapkan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan.
d. Selain permodelan *prepayment risk* dan *early redemption,* BRI juga menetapkan permodelan internal untuk *account-account* NPL. NPL Ritel Komersial dengan plafond maksimal Rp5 miliar rupiah ditempatkan pada *time bucket* 3,5 tahun. Sedangkan NPL Menengah Korporasi dengan *plafond* di atas Rp5 miliar rupiah ditempatkan pada *time bucket* 3 tahun. Account NPL termasuk *non rate* dimana estimasi *cashflow* nya tidak memperhitungkan *interest*.
e. Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Mata uang asing selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.

Analisa Kuantitatif

Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai *maturity overnight*. Sedangkan secara behavioural, BRI menempatkan giro dan tabungan pada *time bucket overnight, time bucket* 3 - 4 tahun dan *time bucket* 4 - 5 tahun. Penyebaran *Non Maturity Deposit* BRI sesuai jangka waktu posisi 31 Desember 2023:
a. Giro; *time bucket Overnight* (61,51%), *time bucket* 3 - 4 tahun (29,15%) dan *time bucket* 4 - 5 tahun (9,33%).
b. Tabungan; *time bucket Overnight* (18,66%) dan *time bucket* 4 - 5 tahun (81,34%).

Tabel Pengungkapan Eksposure *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) Bank Secara Konsolidasi

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	T	T - 1 (Juni)	T	T - 1 (Juni)
Parallel Up	(15.704.299)	(14.649.811)	(15.111.678)	(15.101.794)
Parallel Down	16.262.347	15.169.505	14.037.969	14.028.086
Steepener	(8.115.636)	(7.433.348)	-	-
Flattener	4.317.594	3.897.117	-	-
Short Rate Up	(3.377.911)	(3.257.837)	-	-
Short Rate Down	3.391.191	3.270.707	-	-
Nilai Maksimum Negatif (*absolut*)	15.704.299	14.649.811	15.111.678	15.101.794
Modal *Tier* 1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	243.313.025	230.762.254	99.302.625	99.213.915
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk Δ EVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	6,45%	6,35%	15,22%	15,22%

Analisa Kualitatif	
1	*Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi *Banking Book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas yang disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga *fixed* dan mempunyai *repricing maturities* lebih panjang.
2	Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite *Assets and Liability Management* (ALCO) dan *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi. ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah *balanced pricing*, *assets allocation, funding mix, gap management*, dan *capital management*. Sedangkan RMC Terintegrasi dilaksanakan secara *bank wide* dengan perusahaan anak untuk membahas *assessment* profil risiko pasar dan *risk issue* terkini.
3	BRI melakukan perhitungan IRRBB Konsolidasi secara semesteran dengan menggunakan *metode Economic Value of Equity* (EVE) dan *Net Interest Income* (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal *Tier* 1 BRI dan telah disesuaikan dengan *guideline* dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun.
4	Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB BRI adalah sebagai berikut: a. *Parallel Up* (400 bps) b. *Parallel Down* (400 bps) c. *Steepener* (350 bps) d. *Flattener* (350 bps) e. *Short Rate Up* (500 bps) f. *Short Rate Down* (500 bps)
5	a. Dalam perhitungan arus kas, *instrument* dari aset dan liabilitas dengan suku bunga *float* menggunakan *risk free* yang bersumber dari *Government Bonds* IDR dan *Government Bonds* USD. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap segmen *instrument*. Instrument aset dan liabilitas dengan suku bunga *fix* menggunakan acuan *yield* yang dibebankan pada instrument sebagai dasar penentuan *cashflow*. b. *Account Non Maturity Deposit* (NMD) yaitu giro dan tabungan ditempatkan pada jangka waktu *overnight*, skala waktu 3 - 4 tahun dan 4 - 5 tahun sesuai dengan *caps* maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada skala waktu terpanjang merupakan *core fund* BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada *non core fund* yang ditempatkan pada skala waktu *overnight*. c. Penentuan *prepayment risk* berdasarkan data historis sesuai dengan segmen dan produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan *baseline* persentase *prepayment* merupakan ratas total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut per masing-masing segmen. Sedangkan dalam menentukan *early redemption*, menggunakan pendekatan historis dengan sumber data yang memadai dan pendekatan lainnya yang relevan. Persentase *baseline* yang digunakan dalam *early redemption* merupakan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan. d. Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Semua mata uang selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.
Analisa Kuantitatif	
1	Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai *maturity overnight*. Secara *behavioural*, BRI secara konsolidasi menempatkan giro dan tabungan posisi 31 Desember 2023 pada 3 *time bucket* terpisah yaitu: a. *Overnight* (*non corefund*), Giro (61,53%) dan Tabungan (18,77%) b. 3 - 4 tahun (*corefund*), Giro (29,16%) dan Tabungan (0,03%) c. 4 - 5 tahun (*corefund*), Giro (9,31%) dan Tabungan (81,20%)

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing BRI. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan *counterparty* yang menyebabkan *open position* dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. BRI mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit risiko dan regulasi dengan posisi aktual per akhir Desember 2023 PDN absolut BRI sebesar 0,76 % dari modal.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. BRI melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang yang dihadapi Bank menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Adapun pengungkapan rasio LCR dan NSFR disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Pengungkapan Risiko Likuiditas

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Tabel LCR

No	Komponen	Individual			
		31 Desember 2023		30 September 2023	
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
1	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		92 hari		92 hari
***HIGH QUALITY LIQUID ASSET* (HQLA)**					
2	Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)		351.342.966		316.035.475
ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOW*)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	603.604.751	34.238.797	597.331.363	33.770.169
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	522.433.561	26.121.678	519.259.342	25.962.967
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	81.171.190	8.117.119	78.072.021	7.807.202
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	541.386.176	176.306.736	505.656.921	168.003.655
	a. Simpanan operasional	286.139.700	70.964.901	254.488.843	63.070.354
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	255.087.648	105.183.006	248.825.530	102.590.752
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	158.829	158.829	2.342.548	2.342.548
5	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)	6.484.306	838.982	16.710.649	1.977.271

(dalam jutaan Rupiah)

	Konsolidasi			
	31 Desember 2023		30 September 2023	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
		92 hari		92 hari
		356.403.626		320.997.995
	605.773.609	34.409.909	**599.526.286**	33.940.880
	523.349.033	26.167.452	520.234.968	26.011.748
	82.424.575	8.242.458	79.291.318	7.929.132
	545.054.594	178.033.997	**508.768.329**	169.489.916
	287.103.998	71.193.042	255.187.685	63.236.131
	257.791.767	106.682.126	251.238.096	103.911.236
	158.829	158.829	2.342.548	2.342.548
	6.668.534	838.982	**16.917.784**	1.977.271

No	Komponen	Individual				
		31 Desember 2023		30 September 2023		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	
6	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari:	**310.133.572**	**32.961.162**	296.310.182	31.386.340	
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	**16.807.160**	**16.807.160**	12.433.827	12.433.827	
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-	
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-	
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	**112.222.694**	**10.173.264**	111.997.279	10.077.859	
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-	
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	**180.539.155**	**5.416.175**	168.045.797	5.041.374	
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	**564.563**	**564.563**	3.833.280	3.833.280	
7	**TOTAL ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOW*)**		**244.345.678**		235.137.435	
ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOW*)						
8	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	**9.487.289**	-	4.404.225	-	
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*)	**13.928.134**	**6.964.175**	13.543.863	6.772.045	
10	Arus kas masuk lainnya	**20.016.159**	**20.016.159**	16.515.058	16.515.058	
11	**TOTAL ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOW*)**		**26.980.334**		23.287.103	
			***TOTAL ADJUSTED VALUE*[1]**		TOTAL ADJUSTED VALUE1	
12	**TOTAL HQLA**		**351.342.966**		316.035.475	
13	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (*NET CASH OUTFLOWS*)**		**217.365.343**		211.850.332	
14	**LCR (%)**		**161,64%**		149,18%	

Keterangan
Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

	Konsolidasi			
	31 Desember 2023		30 September 2023	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
	310.438.865	**33.136.699**	**296.481.173**	31.410.875
	16.807.160	**16.807.160**	12.433.827	12.433.827
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	112.376.628	**10.198.048**	112.167.995	10.102.387
	150.735	**150.735**	-	-
	180.539.780	**5.416.193**	168.046.071	5.041.382
	564.563	**564.563**	3.833.280	3.833.280
		246.419.587		236.818.942
	9.487.289	-	4.404.225	-
	14.025.297	**7.016.451**	13.650.064	6.828.530
	20.034.220	**20.025.190**	16.532.711	16.523.884
		27.041.641		23.352.414
		***TOTAL ADJUSTED VALUE*[1]**		TOTAL ADJUSTED VALUE1
		356.403.626		320.997.995
		219.377.946		213.466.528
		162,46%		150,37%

Analisis secara Individu

- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara Individu posisi Triwulan IV 2023 sebesar 161,64% mengalami peningkatan sebesar 12,46% terhadap posisi Triwulan III 2023 sebesar 149,18%. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh:
  a. Peningkatan HQLA sebesar Rp35,31 triliun atau sebesar 11,17%, yang didominasi antara lain:
     - Peningkatan komponen Kas dan Setara Kas sebesar Rp0,70 triliun,
     - Peningkatan komponen penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres sebesar Rp32,07 triliun, dan
     - Peningkatan komponen Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebesar Rp2,81 triliun.
  b. Peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO) sebesar Rp5,52 triliun atau sebesar 2,60% yang merupakan selisih antara Arus Kas Keluar terhadap Arus Kas Masuk.
     Jumlah Arus Kas Keluar mengalami peningkatan sebesar Rp9,21 triliun yang didominasi oleh:
     - Peningkatan Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan sebesar Rp0,33 triliun,
     - Peningkatan Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp0,14 triliun,
     - Peningkatan Jumlah Penarikan yang berasal dari Nasabah Korporasi sebesar Rp8,30 triliun,
     - Penurunan Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) sebesar Rp1,14 triliun, dan
     - Peningkatan Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*) sebesar Rp1,57 triliun.

     Jumlah Arus Kas Masuk mengalami peningkatan sebesar Rp3,69 triliun yang berasal antara lain dari:
     - Peningkatan Jumlah Arus Kas Masuk berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) sebesar Rp0,19 triliun, dan
     - Peningkatan Jumlah Arus Kas Masuk lainnya yang berasal dari transaksi derivatif sebesar Rp3,51 triliun.
- Komposisi HQLA BRI didominasi oleh aset Level 1 sebesar Rp350,77 triliun atau 99,84% yang terdiri atas komponen kas, Cadangan Likuiditas di Bank Indonesia (GWM dan Penempatan pada BI) dan Surat berharga yang tergolong aset level 1. Sedangkan komposisi aset level 2 sebesar Rp0,57 triliun atau 0,16%.
- Mayoritas sumber pendanaan BRI (*Bank Only*) selama Triwulan IV 2023 berasal dari CASA sebesar 64,56% dengan komposisi sebagai berikut:

Komponen Sumber Pendanaan	Komposisi
Giro	25,65%
Tabungan	38,91%
CASA	64,56%
Deposito	35,44%
Total	100,00%

- BRI telah memiliki strategi pengelolaan, *early warning indicator*, dan *Contingency Funding Plan* terkait risiko Likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas antara lain dilakukan dengan menggunakan perhitungan proyeksi arus kas, profil maturitas, *monitoring* limit likuiditas dan pelaksanaan *stress testing* likuiditas secara periodik.
- Pengelolaan risiko likuiditas dan simulasi *contingency funding plan* dilakukan oleh Tim Manajemen Kelangsungan Likuiditas. Penetapan dan *monitoring* limit sebagai *early warning indicator* likuiditas serta pelaksanaan *stress testing* likuiditas secara periodik dilakukan oleh unit kerja *risk management*. Selain itu, saat ini BRI telah memiliki Rencana Aksi (*Recovery Plan*), yang merupakan salah satu langkah *enhancement* dalam Penerapan *Risk Management* dan sebagai pemenuhan ketentuan Regulator.

Analisis secara Konsolidasi

- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara Konsolidasi posisi Triwulan IV 2023 sebesar 162,46% mengalami peningkatan sebesar 12,09% terhadap posisi Triwulan III 2023 sebesar 150,37%. Penurunan rasio ini disebabkan oleh:
  a. Peningkatan HQLA sebesar Rp35,41 triliun atau sebesar 11,03%, yang didominasi antara lain:
     - Peningkatan komponen Kas dan Setara Kas sebesar Rp0,70 triliun,
     - Peningkatan komponen penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres sebesar Rp32,12 triliun, dan
     - Peningkatan komponen Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebesar Rp2,88 triliun.
  b. Peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO) sebesar Rp5,91 triliun atau sebesar 2,77% yang merupakan selisih antara Arus Kas Keluar terhadap Arus Kas Masuk.
     Jumlah Arus Kas Keluar mengalami peningkatan sebesar Rp9,60 triliun yang didominasi oleh:
     - Peningkatan Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan sebesar Rp0,33 triliun,
     - Peningkatan Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp0,14 triliun,
     - Peningkatan Jumlah Penarikan yang berasal dari Nasabah Korporasi sebesar Rp8,54 triliun,
     - Penurunan Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) sebesar Rp1,14 triliun, dan
     - Peningkatan Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*) sebesar Rp1,73 triliun.

     Jumlah Arus Kas Masuk mengalami peningkatan sebesar Rp3,69 triliun yang berasal antara lain dari:
     - Peningkatan Jumlah Arus Kas Masuk berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) sebesar Rp0,19 triliun, dan
     - Peningkatan Arus Kas Masuk lainnya yang berasal dari transaksi derivatif sebesar Rp3,50 triliun.
- Komposisi HQLA BRI Konsolidasi (*Bank Only*) didominasi oleh aset Level 1 sebesar Rp355,55 triliun atau 99,76% yang terdiri atas komponen Kas, Cadangan Likuiditas di Bank Indonesia (GWM dan Penempatan pada BI) dan Surat Berharga yang tergolong aset level 1. Sedangkan komposisi aset level 2 sebesar Rp0,85 triliun atau 0,24%.
- Mayoritas sumber pendanaan BRI (Konsolidasi) selama Triwulan IV 2023 berasal dari CASA sebesar 64,34% dengan komposisi sebagai berikut:

Komponen Sumber Pendanaan	Komposisi
Giro	25,56%
Tabungan	38,78%
CASA	64,34%
Deposito	35,66%
Total	100,00%

- BRI secara konsolidasi telah menetapkan limit-limit terkait risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan monitoring terhadap limit risiko likuiditas BRI dan Anak Perusahaan serta pelaksanaan *stress testing* likuiditas secara periodik.
- BRI secara rutin berkoordinasi dengan Anak Perusahaan terkait monitoring terhadap limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan. Selain itu, BRI secara rutin melakukan pertemuan dengan Anak Perusahaan dalam forum *Risk Management Committee* Terintegrasi dimana salah satu agendanya membahas kondisi likuiditas BRI secara konsolidasi dan membahas rencana tindak lanjut atas isu-isu likuiditas yang berdampak pada BRI secara konsolidasi.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Tabel NSFR Individu

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
1	**Modal**									311.667.821
1,1	Modal Bagi Bank Umum berkantor pusat di indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Modal Inti (*Tier* 1)	299.999.117	100%	-	n.a	-	n.a	-	n.a	299.999.117
1.1.2	Modal Pelengkap (*Tier* 2)	11.668.704	100%	-	0%	-	0%	-	100%	11.668.704
1,2	Modal bagi KCBA	-	100%	-	0%	-	0%	-	100%	
1,3	Instrumen modal lainnya	-	100%	-	0%	-	0%	-	100%	
2	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan:**									610.471.048
2,1	Simpanan Stabil	-		-		-		-		
2.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	483.461.513	95%	-	n.a	-	n.a	-	n.a	459.288.437
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	-	n.a	78.275.528	95%	5.304.332	95%	869.903	100%	80.270.770
2,2	Simpanan Kurang Stabil	-		-		-		-		
2.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	23.964.169	90%	-	n.a	-	n.a	-	n.a	21.567.752
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	-	n.a	43.828.033	90%	9.967.630	90%	927.993	100%	49.344.090
3	**Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:**									46.024.881
3,1	Simpanan Stabil	-		-		-		-		
3.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	39.415.505	95%	-	n.a	-	n.a	-	n.a	37.444.729
3.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	-	n.a	2.783.209	95%	384.853	95%	83.118	100%	3.092.777
3,2	Simpanan Kurang Stabil	-		-		-		-		
3.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	4.698.516	90%	-	n.a	-	n.a	-	n.a	4.228.664
3.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	-	n.a	1.242.699	90%	128.562	90%	24.575	100%	1.258.710
4	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:**									321.819.372
4,1	Simpanan operasional	319.465.092	50%	-	50%	-	50%	-	100%	159.732.546
4,2	Simpanan non - operasional dan/atau liabilitas lainnya yang besifat non-operasional yang berasal dari:	-		-		-		-		162.086.826
4.2.1	Perusahaan non-keuangan	-	0%	169.499.577	50%	54.446.480	50%	1.919.103	100%	113.892.132
4.2.2	Pemerintah Indonesia	-	0%	140.000	50%	34.500	50%	-	100%	87.250

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
4.2.3	Pemerintah negara lain	-	0%	-	50%	-	50%	-	100%	-
4.2.4	Entitas sektor publik	-	0%	18.790.908	50%	8.314.932	50%	147.196	100%	13.700.117
4.2.5	Bank pembangunan multilateral	-	0%	28.718	50%	-	50%	-	100%	14.359
4.2.6	Bank Indonesia	-	0%	-	0%	-	50%	-	100%	-
4.2.7	Bank sentral negara lain	-	0%	-	0%	-	50%	-	100%	-
4.2.8	Lembaga keuangan	-	0%	51.510.779	0%	10.798.302	50%	9.958.301	100%	15.357.452
4.2.9	Lainnya	-	0%	7.698.500	0%	8.035.450	50%	15.017.791	100%	19.035.516
5	**Liabilitas yang memiliki hubungan ketergantungan dengan aset tertentu**	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
6	**Liabilitas dan ekuitas lainnya:**									10.720.794
6,1	NSFR Liabilitas Derivatif	-				-			0%	-
6,2	Liabilitas pajak Tangguhan	-	100%	14.196.379	0%	-	50%	-	100%	-
6,3	Kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (*Tier* 1)	-	100%	-	0%	-	50%	-	100%	-
6,4	Utang tanggal perdagangan (*trade date payable*)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
6,5	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu*)	63.747.501	0%	22.104.442	0%	2.867.894	50%	9.286.847	100%	10.720.794
7	**Total ASF**									1.300.703.916

Tabel NSFR Individu

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
Aset Pada Neraca										
1	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR**									10.174.021
1,1	HQLA Level 1	376.236.737		16.661.436		1.551.000		21.161.019		10.070.923
1.1.1	Kas dan setara kas	30.858.125	0%	-	n.a	-	n.a	-	n.a	-
1.1.2	Penempatan pada Bank Indonesia	345.378.612	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0%	-		16.661.436		1.551.000		21.161.019		

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
1.1.3.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	7.720.736	5%	-	5%	13.367.019	5%	1.054.388
1.1.3.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	-	n.a	8.940.700	5%	1.551.000	50%	7.794.000	100%	9.016.535
1,2	HQLA Level 2A	-		244.000		80.000		327.190		97.679
1.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	244.000	15%	80.000	15%	327.190	15%	97.679
1.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
1,3	HQLA Level 2B	-		-		-		10.839		5.420
1.3.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	50%	-	50%	10.839	50%	5.420
1.3.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-
2	**Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional**									11.728.574
2,1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	23.457.149	50%	-	50%	-	50%	-	100%	11.728.574
2,2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		
2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	50%	-	50%	-	50%	-	100%	-
2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	50%	-	50%	-	50%	-	100%	-
2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
3	**Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (*default*)**									821.658.979
3,1	**Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) yang diberikan kepada:**									812.521.187
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan	-		14.261.942		-		-		1.426.194
3.1.1.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	14.261.942	10%	-	50%	-	100%	1.426.194
3.1.1.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.1.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	10%	-	50%	-	100%	-
3.1.1.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-
3.1.1.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin oleh non-HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan	-		-		-		-		-
3.1.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		
3.1.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-
3.1.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional	-		-		-		-		-
3.1.3.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	15%	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.3.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.3.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.3.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-
3.1.3.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain , yang diantaranya:	-		80.298.479		90.885.636		766.507.242		737.047.496
3.1.4.1	Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	-		802.081		-		378.586		647.122
3.1.4.1.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	802.081	50%	-	50%	378.586	65%	647.122

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.4.1.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.4.1.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.4.1.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.4.1.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.4.2	Dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	-		79.496.398		90.885.636		766.128.656		736.400.374
3.1.4.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	79.496.398	50%	90.885.636	50%	766.128.656	85%	736.400.374
3.1.4.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.4.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain	-		-		-		-		-
3.1.5.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	0%	-	50%			-
3.1.5.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-				-
3.1.5.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	0%	-	50%			-
3.1.5.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%			-
3.1.5.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%			-
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)	-		-		-		-		
3.1.6.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	0%	-	5%	-	5%	-
3.1.6.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.6.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	0%	-	5%	-	5%	-
3.1.6.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	50%	-
3.1.6.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.7	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya:	-		24.851.539		31.871.744		60.040.126		74.047.497
3.1.7.1	Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	-		6.086.939		8.755.045		26.741.258		24.802.809
3.1.7.1.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	6.086.939	50%	8.755.045	50%	26.741.258	65%	24.802.809
3.1.7.1.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.7.1.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.7.1.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.7.1.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.7.2	Dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	-		18.764.600		23.116.699		33.298.868		49.244.687
3.1.7.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	18.764.600	50%	23.116.699	50%	33.298.868	85%	49.244.687
3.1.7.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.7.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.7.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.7.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3,2	**Surat berharga yang tidak mengalami gagal bayar dan non-HQLA serta saham yang diperdagangkan di bursa dan non-HQLA, dengan syarat tertentu**									9.137.792
3.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	1.673.902	50%	1.845.212	50%	8.680.277	85%	9.137.792
3.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
4	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung**									
5	**Aset lainnya**									108.249.825
5,1	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-	85%							-
5,2	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)			-	Max (85% ,faktor RSF aset)	-	Max (85% ,faktor RSF aset)	-	Max (85% ,faktor RSF aset)	-
5,3	NSFR aset derivatif			3.211.527	100%	-	100%	-	100%	3.211.527
5,4	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin			488.709	100%	-	100%	-	100%	488.709
5,5	Piutang tanggal perdagangan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5,6	Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (*Non-Performing Loan*)	-	100%	3.049.331	100%	733.204	100%	5.209.933	100%	8.992.467
5,7	Saham yang tidak diperdagangkan di bursa	-	n.a	-	100%	-	100%	3.614.321	100%	3.614.321
5,8	Aset tetap	-	n.a	-	100%	-	100%	32.987.733	100%	32.987.733
5,9	Faktor pengurang modal	-	n.a	-	100%	-	100%	49.077.211	100%	49.077.211
5,10	Surat berharga yang gagal bayar	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
5,11	Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-	mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim	-		-		-	100%	-
5,12	Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	9.877.856	100%	-	100%	-	100%	-	100%	9.877.856
6	**Total aset**	-		-		-		-		951.811.399
Transaksi Rekening Administratif										
7	Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan syarat (*conditionally revocable*)			-	5%	87.905.384	5%	120.451.746	5%	10.417.856

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
8	Fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (*unconditionally revocable*)			-	0%	-	0%	-	0%	-
9	Kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance* (termasuk garansi dan *letters of credit* (L/C))			2.427.321	3%	-	3%	-	3%	72.820
10	*Letters of credit* (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*			-	5%	-	5%	-	5%	-
11	Kewajiban non-kontraktual			-	5%	-	5%	-	5%	-
12	Total transaksi rekening administratif	-		-		-		-		10.490.676
13	Total RSF									962.302.075
14	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**									135,17%

Tabel NSFR Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
1	**Modal**									315.157.201
1.1	Modal Bagi Bank Umum berkantor pusat di indonesia							-		
1.1.1	Modal Inti (*Tier* 1)	303.419.698	100%		n.a		n.a	-	n.a	303.419.698
1.1.2	Modal Pelengkap (*Tier* 2)	11.737.503	100%	-	0%	-	0%	-	100%	11.737.503
1.2	Modal bagi KCBA	-	100%	-	0%	-	0%	-	100%	
1.3	Instrumen modal lainnya	-	100%	-	0%	-	0%	-	100%	
2	**Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan:**									611.715.107
2.1	Simpanan Stabil									
2.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (giro, tabungan)	484.077.346	95%		n.a		n.a		n.a	459.873.479
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	78.355.848	95%	5.305.830	95%	871.170	100%	80.349.764
2.2	Simpanan Kurang Stabil									
2.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (giro, tabungan)	24.304.492	90%		n.a		n.a		n.a	21.874.042

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	44.131.847	90%	9.967.630	90%	928.293	100%	49.617.822
3	**Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:**									47.631.346
3.1	Simpanan Stabil									
3.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (giro, tabungan)	39.632.609	95%		n.a		n.a		n.a	37.650.978
3.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	2.806.200	95%	386.913	95%	83.118	100%	3.116.576
3.2	Simpanan Kurang Stabil									
3.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	4.719.723	90%		n.a		n.a		n.a	4.247.751
3.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	2.733.144	90%	146.262	90%	24.575	100%	2.616.041
4	**Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:**									322.980.217
4.1	Simpanan operasional	320.508.273	50%	-	50%	-	50%	-	100%	160.254.136
4.2	Simpanan non - operasional dan/atau liabilitas lainnya yang besifat non-operasional yang berasal dari:									162.726.081
4.2.1	Perusahaan non-keuangan	-	0%	170.670.389	50%	54.446.480	50%	1.919.103	100%	114.477.538
4.2.2	Pemerintah Indonesia	-	0%	140.000	50%	34.500	50%	-	100%	87.250
4.2.3	pemerintah negara lain	-	0%	-	50%	-	50%	-	100%	-
4.2.4	Entitas sektor publik	-	0%	18.892.007	50%	8.314.932	50%	147.196	100%	13.750.666
4.2.5	Bank pembangunan multilateral	-	0%	28.718	50%	-	50%	-	100%	14.359
4.2.6	Bank Indonesia	-	0%	-	0%	-	50%	-	100%	-
4.2.7	Bank sentral negara lain	-	0%	-	0%	-	50%	-	100%	-
4.2.8	Lembaga keuangan	-	0%	52.365.900	0%	10.798.302	50%	9.958.301	100%	15.357.452
4.2.9	Lainnya	-	0%	9.593.699	0%	8.042.050	50%	15.017.791	100%	19.038.816
5	**Liabilitas yang memiliki hubungan ketergantungan dengan aset tertentu**		0%		0%		0%		0%	-
6	**Liabilitas dan ekuitas lainnya:**									10.720.794
6.1	NSFR Liabilitas Derivatif					-			0%	-
6.2	Liabilitas pajak Tangguhan	-	100%	14.196.379	0%	-	50%	-	100%	-
6.3	Kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (*Tier* 1)	-	100%	-	0%	-	50%	-	100%	-
6.4	Utang tanggal perdagangan (*trade date payable*)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
6.5	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu	64.214.340	0%	22.475.739	0%	2.867.894	50%	9.286.847	100%	10.720.794
7	**Total ASF**									1.308.204.666

ANALISIS SECARA INDIVIDU

Tabel Analisis Kualitatif *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

Rasio	Komponen	Desember 2023	September 2023
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	*Available Stable Funding* (ASF)	**1.300.703.916**	1.250.203.468
	Required Stable Funding (RSF)	**962.302.075**	940.633.464
NSFR		**135,17%**	**132,91%**

Net Stable Funding Ratio (NSFR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk posisi Desember 2023 sebesar 135,17% mengalami peningkatan sebesar 2,26% dibandingkan posisi September 2023 sebesar 132,91%. Peningkatan tersebut disebabkan persentase peningkatan komponen *Available Stable Funding* (ASF) yang lebih tinggi dibandingkan persentase peningkatan komponen *Required Stable Funding* (RSF).

Komponen *Available Stable Funding* (ASF) mengalami peningkatan sebesar Rp50,50 triliun atau sebesar 4,04% sedangkan komponen *Required Stable Funding* (RSF) mengalami peningkatan sebesar Rp21,67 triliun atau sebesar 2,30%.

Tabel NSFR Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
Aset Pada Neraca										
1	**Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR**									**10.458.776**
1.1	HQLA Level 1									**10.256.769**
1.1.1	Kas dan setara kas	**30.868.898**	**0%**		**n.a**		**n.a**		**n.a**	-
1.1.2	Penempatan pada Bank Indonesia	**345.378.612**	**0%**	**965.320**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0%									
1.1.3.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	**n.a**	**8.246.499**	**5%**	**266.563**	**5%**	**16.291.615**	**5%**	**1.240.234**
1.1.3.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	-	**n.a**	**8.940.700**	**5%**	**1.551.000**	**50%**	**7.794.000**	**100%**	**9.016.535**
1.2	HQLA Level 2A									**196.588**
1.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	**n.a**	**514.514**	**15%**	**153.980**	**15%**	**642.090**	**15%**	**196.588**
1.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	-	**n.a**	-	**15%**	-	**50%**	-	**100%**	-
1.3	HQLA Level 2B									**5.420**
1.3.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	**n.a**	-	**50%**	-	**50%**	**10.839**	**50%**	**5.420**
1.3.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	-	**n.a**	-	**50%**	-	**50%**	-	**100%**	-

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
2	**Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional**									11.802.122
2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	23.457.149	50%	147.095	50%	-	50%	-	100%	11.802.122
2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)									
2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	50%	-	50%	-	50%	-	100%	-
2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	50%	-	50%	-	50%	-	100%	-
2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
3	**Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (*default*)**									826.058.044
3.1	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) yang diberikan kepada:									816.920.252
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan									1.450.700
3.1.1.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	14.506.998	10%	-	50%	-	100%	1.450.700
3.1.1.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		
3.1.1.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	10%	-	50%	-	100%	-
3.1.1.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-
3.1.1.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin oleh non-HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan									-
3.1.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		
3.1.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional									-
3.1.3.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	15%	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.3.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.3.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	15%	-	50%	-	100%	-
3.1.3.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	100%	-
3.1.3.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain , yang diantaranya:									740.973.953
3.1.4.1	Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									775.999
3.1.4.1.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	802.081	50%	-	50%	576.859	65%	775.999
3.1.4.1.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.4.1.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.4.1.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.4.1.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.4.2	Dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									740.197.954
3.1.4.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	80.251.333	50%	91.652.038	50%	769.701.493	85%	740.197.954
3.1.4.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.4.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.4.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.4.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain									0
3.1.5.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	0%	-	50%	-		-
3.1.5.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.5.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	0%	-	50%	-		-
3.1.5.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-		-
3.1.5.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-		-
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)									
3.1.6.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	-	0%	-	5%	-	5%	-
3.1.6.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		
3.1.6.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	0%	-	5%	-	5%	-
3.1.6.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	50%	-
3.1.6.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.7	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya:									74.495.599
3.1.7.1	Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									24.802.809
3.1.7.1.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	6.086.939	50%	8.755.045	50%	26.741.258	65%	24.802.809
3.1.7.1.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.7.1.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-
3.1.7.1.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	65%	-

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.7.1.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.1.7.2	Dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									49.692.790
3.1.7.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	18.860.227	50%	23.194.327	50%	33.724.133	85%	49.692.790
3.1.7.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.1.7.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.7.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.1.7.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
3.2	Surat berharga yang tidak mengalami gagal bayar dan non-HQLA serta saham yang diperdagangkan di bursa dan non-HQLA, dengan syarat tertentu									9.137.792
3.2.1	Bebas dari segala klaim (*unencumbered*)	-	n.a	1.673.902	50%	1.845.212	50%	8.680.277	85%	9.137.792
3.2.2	Tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-		-		-		-		-
3.2.2.1	Sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.2.2.2	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan - < 1 tahun	-	n.a	-	50%	-	50%	-	85%	-
3.2.2.3	Sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
4	**Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung**									
5	**Aset lainnya**									109.059.126
5.1	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas		85%							-
5.2	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai *initial margin* untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)			-	Max (85% ,faktor RSF aset)	-	Max (85% ,faktor RSF aset)	-	Max (85% ,faktor RSF aset)	-
5.3	NSFR aset derivatif			3.211.527	100%	-	100%	-	100%	3.211.527
5.4	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation* margin			488.709	100%	-	100%	-	100%	488.709

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
5.5	Piutang tanggal perdagangan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5.6	Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (*Non-Performing Loan*)	-	100%	3.122.433	100%	736.060	100%	5.245.523	100%	9.104.016
5.7	Saham yang tidak diperdagangkan di bursa	-	n.a	-	100%	-	100%	3.614.321	100%	3.614.321
5.8	Aset tetap	-	n.a	-	100%	-	100%	33.423.445	100%	33.423.445
5.9	Faktor pengurang modal	-	n.a	-	100%	-	100%	49.080.056	100%	49.080.056
5.1	Surat berharga yang gagal bayar	-	n.a	-	100%	-	100%	-	100%	-
5.11	Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*)	-	Mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim						100%	-
5.12	Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	9.941.480	100%	195.571	100%	-	100%	-	100%	10.137.051
	Total aset	409.646.139		3.272.982		128.154.225		955.525.908		957.378.068
Transaksi Rekening Administratif										
6	Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan syarat (*conditionally revocable*)			-	5%	87.905.384	5%	120.451.746	5%	10.417.856
7	Fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (*unconditionally revocable*)			-	0%	-	0%	-	0%	-
8	Kewajiban yang berasal dari instrumen *trade finance* (termasuk garansi dan *letters of credit* (L/C))			2.431.103	3%	223	3%	-	3%	72.940
9	*Letters of credit* (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban *trade finance*			-	5%	-	5%	-	5%	-
10	Kewajiban non-kontraktual			-	5%	-	5%	-	5%	-
	Total transaksi rekening administratif			-		-		-		10.490.796
	Total RSF									967.868.864
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%)									135,16%

**) Liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain liabilitas kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan, bunga simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo, transfer, cek perjalanan (*traveller's cheques*) yang telah dijual, beban bunga yang masih harus dibayar, dividen yang belum dibayar, taksiran pajak penghasilan, pendapatan yang ditangguhkan, penyisihan kerugian untuk risiko operasional, rekening tunda (*suspense account*), liabilitas pajak penghasilan, liabilitas imbalan kerja, *electronic money, goodwill* negatif, dan liabilitas diestimasi.

ANALISIS SECARA KONSOLIDASI

Tabel Analisis Kualitatif *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Secara Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Rasio	Komponen	Desember 2023	September 2023
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	*Available Stable Funding* (ASF)	**1.308.204.666**	1.257.052.107
	Required Stable Funding (RSF)	**967.868.864**	945.294.879
NSFR		**135,16%**	**132,98%**

Net Stable Funding Ratio (NSFR) secara Konsolidasi posisi bulan Desember 2023, NSFR BRI Konsolidasi tercatat sebesar 135,16% mengalami peningkatan sebesar 2,18% dibandingkan posisi bulan September 2023 sebesar 132,98%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan komponen *Available Stable Funding* (ASF) sebesar Rp51,15 triliun atau 4,07% dan peningkatan komponen *Required Stable Funding* (RSF) sebesar Rp22,57 triliun atau 2,39%.

Risiko Likuiditas – Aset Terikat (*Encumbrance*)

Tabel Risiko Likuiditas Aset Terikat

(dalam Rupiah penuh)

	a	b	c	d
	Aset Terikat (*Encumbered*)	**Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas**	**Aset tidak terikat (*Unencumbered*)**	**Total**
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	**10.620.502.011.914**	**366.501.006.698.010**	**30.858.125.237.476**	**407.979.633.947.400**

ANALISA KUALITATIF

Sesuai SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Pada tabel di atas disajikan data terkait dengan risiko likuiditas yang dibagi atas beberapa kriteria yakni aset terikat, aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk likuiditas dan aset tidak terikat. Aset tersebut merupakan aset *liquid* yang digunakan untuk kebutuhan likuiditas.

Total aset yang memenuhi kualifikasi tabel di atas pada posisi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp407,98 Triliun. Apabila dilihat dari pembagiannya, maka nilai total aset tersebut terdiri dari:
- Aset terikat sebesar Rp10,62 triliun atau sebesar 2,60% dari total aset.
- Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas sebesar Rp366,50 Triliun atau sebesar 89,83% dari total aset.
- Aset tidak terikat sebesar Rp30,86 triliun atau sebesar 7,56% dari total aset.

Risiko Likuiditas – Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas diuraikan sebagai berikut:

1. **Tata Kelola Risiko**
   a. BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.
   b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait risiko likuiditas telah dilakukan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan.
   c. BRI secara berkala melakukan *review* terhadap *risk appetite statement* dan parameter limit terhadap risiko untuk level korporasi (*bank wide*) yang ditetapkan dalam Surat Edaran tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
   d. Strategi manajemen risiko likuiditas searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai dengan RBB 2023 – 2025 bahwa BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah ditetapkan secara tepat waktu serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.
   e. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Treasury Business Division bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas nasional, sedangkan *Market, Portfolio and Enterprise Risk Division* bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan *review* kebijakan manajemen risiko likuiditas.

2. Strategi Pendanaan

a. Diversifikasi Pendanaan
Dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sumber dan jangka waktu pendanaan serta Rencana Bisnis Bank (RBB), dengan mempertimbangkan *counterparty*, kondisi keberadaan jaminan, jenis instrumen, jenis mata uang, serta lokasi geografis pasar sumber pendanaan.

b. Stabilisasi Pertumbuhan Dana
Merupakan pemeliharaan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) agar *trend* pertumbuhan positif, antara lain melalui strategi *pricing*, penerbitan dan/atau pengembangan produk simpanan, peningkatan pemasaran berkualitas yang menunjang stabilitas pertumbuhan dana, serta melakukan *review* kebijakan pengembangan dan pemasaran produk.

c. Evaluasi dan Analisis Strategi Pendanaan
Kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam rapat ALCO/rapat terkait lainnya dengan memperhatikan perubahan factor internal maupun eksternal. Treasury Business Division, Asset and Liabilities Management Desk bersama-sama dengan divisi terkait melakukan identifikasi, pemantauan, dan evaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuan BRI dalam memperoleh pendanaan, termasuk alternatif sumber dana yang dapat memperkuat kapasitas untuk bertahan pada kondisi krisis.

d. Memelihara Akses Pasar
Pemeliharaan akses pasar rupiah dan valuta asing ini meliputi: memperluas pasar untuk penjualan aset atau meningkatkan jumlah fasilitas siaga dengan/tanpa agunan, aktif bertransaksi di pasar yang sejalan dengan strategi pendanaan, dan memelihara hubungan baik dengan penyedia dana sehingga dapat melakukan diversifikasi sumber dana dengan baik.

3. Proses Manajemen Risiko

a. Kegiatan identifikasi risiko likuiditas dilakukan oleh setiap unit kerja operasional dengan melakukan identifikasi terhadap risiko likuiditas yang berasal dari produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif serta risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas (misalnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional), baik untuk eksposur risiko saat ini maupun yang akan timbul di masa yang akan datang.

b. Pengukuran risiko likuiditas antara lain dilakukan secara berkala dengan menggunakan proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas dan *stress testing* likuiditas.

c. Pemantauan dan pengendalian hasil pengukuran risiko dilakukan oleh *Treasury Business Division* (contoh: pemantauan GWM, evaluasi pencapaian *cash ratio* nasional secara triwulanan, pelaporan LHBU dan LBBU) dan Market, Portfolio and Enterprise Risk Division (contoh: *liquidity coverage ratio, net stable funding ratio*) untuk memonitor kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan risiko likuiditas disajikan dalam bentuk laporan berkala (*dashboard* risiko likuiditas) yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BRI. Terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan indikasi risiko likuiditas berpotensi meningkat, dilakukan rekomendasi mitigasi eksposur risiko likuiditas serta putusan tindak lanjut pengendaliannya.

d. Dilakukan penyusunan *dashboard* profil risiko likuiditas secara berkala atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategi bisnis. Teknologi sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan informasi terkini dan tepat waktu mengenai likuiditas di BRI adalah BI-RTGS, BRINets, BRISIM, *Treasury and Market Risk System*, SKNBI, *Swift*, Portal LHBU dan LBBU, serta aplikasi lainnya yang dikembangkan untuk *monitoring* aset dan kewajiban BRI.

4. *Contingency Funding Plan*

a. *Contingency funding plan* (rencana pendanaan darurat) adalah rencana dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada likuiditas guna memastikan kemampuan BRI memperoleh sumber pendanaan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.

b. *Contingency funding plan* telah diatur dan disesuaikan pada Surat Keputusan Nomor PP. 11-DIR/MPE/12/2020 Bab 9 yang mengatur tentang Tujuan, Ketentuan Umum, Metodologi Serta Wewenang dan Tanggung Jawab pelaksanaan *Contingency Funding Plan*. Uji Coba CFP dilakukan secara regular minimal 1 (satu) tahun sekali yang di koordinatori oleh *Desk* ALM sebagai Sekretaris ALCO.

c. Pengujian rencana pendanaan darurat dilakukan dengan metode *walk on paper based*, dimana seluruh unit kerja terkait dengan pendanaan darurat (Tim Manajemen Krisis Likuiditas) berkumpul untuk menjalankan skenario pengujian di atas kertas tanpa melakukan transaksi di pasar keuangan.

d. Market, Portfolio and Enterprise Risk Division melakukan monitoring terhadap parameter-paramater dalam *Contingency Funding Plan* yang tertuang dalam *dashboard* likuiditas harian.

5. *Stress Testing* Risiko Likuiditas

a. Pelaksanaan *stress testing* dilakukan untuk mengukur kemampuan dan ketahanan BRI memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis (*stress condition*).

b. *Stress testing* risiko likuiditas dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan internal BRI dan/atau permintaan regulator. *Stress Testing* juga dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui *Risk Management Commite* (RMC).

c. Pelaksanaan *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario-skenario *stress test* yang dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek bisnis dan tingkat risiko yang dikelola oleh BRI.
d. Hasil *stress test* menunjukkan implikasi setiap skenario yang digunakan untuk menunjukkan daya tahan likuiditas BRI diantaranya dinyatakan sebagai jumlah hari (*liquidity surviving days*).

6. Konsentrasi Pendanaan

a. BRI menetapkan limit rasio 50 Deposan terbesar terhadap dana pihak ketiga dengan limit >21,95% - 23,28% pada profil risiko *moderate*, > 24,61% pada profil risiko *high*.
b. BRI menetapkan limit parameter *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Rupiah dengan limit 94,32% - 97,22% pada profil risiko *moderate* dan >98,67% pada profil risiko *high*.
c. BRI menetapkan limit parameter Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan limit 85,99% - 88,54% pada profil risiko *moderate* dan >91,09% pada profil risiko *high*.

7. *Maturity Profile*

a. Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *liquidity gap analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan dan kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.
b. BRI menetapkan *limit maturity profile* < 1 tahun (aset jatuh tempo < 1 tahun/ liabilitas jatuh tempo < 1 tahun) dengan limit >88,60% - 76,00% pada profil risiko *moderate to high* dan <63,40% pada profil risiko *high.*
c. *Maturity profile* dilaporkan secara berkala dengan pembagian *bucket*:
   - ≤ 1 minggu
   - >1 - 2 minggu
   - >2 minggu - 1 bulan
   - >1 - 3 bulan
   - >3 - 6 bulan
   - >6 - 12 bulan
   - >12 bulan

Risiko Operasional

ANALISIS KUALITATIF	
1	Penyusunan kerangka kerja manajemen risiko operasional BRI mengacu pada POJK Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum dan *best practices.* Dalam ketentuan internal BRI, kerangka kerja tersebut dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) yang diatur dalam SK Direksi No. KB.03-DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, mengatur prinsip-prinsip kebijakan manajemen risiko Bank. Khusus untuk manajemen risiko operasional, Bank menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (P3MRO) dengan tetap mengacu pada KMR BRI yang diatur dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 dengan cakupan: - *Framework* manajemen risiko operasional. - *Business continuity management*. - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). - Strategi *anti fraud*. - Fungsi Manajemen Risiko (Fungsi MR) di Unit Kerja. Selain itu, penerapan manajemen risiko operasional juga diatur dalam bentuk Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK), dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) lainnya, antara lain: a. Surat Edaran No. SE.17-DIR/MOP/03/2020 tentang Perangkat manajemen risiko operasional. c. Surat Edaran No. SE.04-DIR/CTR/01/2023 tentang *Corporate Culture* yang mencakup Budaya Risiko. d. Surat Edaran No. SE.40-DIR/PPM/11/2023 tentang Pengelolaan Produk yang mencakup Pengelolaan Risiko Produk. e. Surat Edaran No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang mecakup Perhitungan ATMR Operasional f. Surat Edaran No. SE.50-DIR/MPE/12/2023 tentang Manajemen Kelangsungan Usaha yang mencakup *Business Continuity Management* (BCM). g. SOP No. SO.42-ORD/07/2022 tentang SOP *Regional Risk Management*.
2	Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait risiko operasional di BRI dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan risiko operasional di perbankan dan lembaga jasa keuangan serta kompleksitas bisnis BRI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) yang fokus pada pengelolaan risiko operasional di BRI. SKMRO bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Manajemen Risiko dimana SKMRO terdiri dari Digital Risk Division dan Operational Risk Division yang merupakan pecahan dari Divisi DOR, dengan masing-masing pengesahan: 1. *Digital Risk Division* dibentuk sesuai dengan SK Direksi No. 628-DIR/PPM/10/2021 tanggal 1 September 2021. 2. *Operational Risk Division* dibentuk sesuai dengan SK Direksi No. 697-DIR/PPM/11/2021 tanggal 15 November 2021. Seiring dengan perkembangan transaksi dan layanan *digital* serta untuk mengantisipasi peningkatan ancaman *cyber*, maka Digital Risk Division memiliki tugas untuk mengelola risiko *digital*, meliputi penyusunan kebijakan, penerapan proses manajemen risiko, dan *monitoring* serta evaluasi risiko *digital* beserta pengendaliannya di seluruh aktivitas Bank. Operational Risk Division fokus terhadap pengelolaan risiko bidang operasional yang mencakup pengembangan dan implementasi *framework* manajemen risiko operasional, penyusunan kebijakan dan implementasi *Business Continuity Management* (BCM) serta SMK3, dan pengendalian *fraud*.

ANALISIS KUALITATIF

Implementasi manajemen risiko operasional diperkuat dengan pembentukan organisasi Regional Risk Management (RRM) Department sebagai bagian dari Operational Risk Division. RRM *Department* memiliki tugas utama untuk menjaga portofolio dan kualitas kredit serta memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional dan kepatuhan di tingkat *regional.* Memperhatikan hal tersebut, maka struktur organisasi RRM Department terdiri dari RRM *Head* yang mensupervisi *Risk Management and Compliance* (RMC) dan *Credit Risk Analyst* (CRA*).* Sementara itu, RMC yang berkedudukan di *regional office* mensupervisi *Branch Risk and Compliance (BRC)* dan BRI *Unit Risk and Compliance (URC)* yang berkedudukan di Kantor Cabang dan BRI Unit.

Selain itu, untuk penguatan pelaksanaan GCG dan penerapan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud*, maka sesuai SK Direksi No. 697-DIR/PPM/11/2021 tanggal 15 November 2021, Bank membentuk *Fraud Risk Management and Recovery Desk* yang mempunyai tugas menyusun kebijakan strategi *anti fraud*, memastikan penerapan strategi *anti fraud* yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan tujuan untuk mencegah risiko kejadian *fraud* dan melakukan upaya *recovery* atas kerugian *fraud*.

Adapun struktur organisasi Operasional Risk Division saat ini sebagai berikut:



Dalam rangka implementasi *three lines model*, bentuk kolaborasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selaku *third line model* mempunyai arti penting dalam penerapan manajemen risiko operasional. SKAI berfungsi sebagai *enabler* yang bertugas melakukan *assurance* dalam penerapan manajemen risiko. Selain itu, SKAI juga berkontribusi dalam memberikan *support* berupa *tools* untuk mempermudah RRM Team dalam melakukan *testing control* dan *fraud detection*. Selanjutnya, SKMRO sebagai *second line* juga diminta untuk memberikan sumber data dan informasi berupa peta risiko untuk membantu SKAI dalam melaksanakan *risk based audit*.

3 Penjelasan sistem pengukuran untuk risiko operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung risiko operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk risiko operasional). Sehubungan dengan kewajiban Bank memperkirakan beban modal untuk risiko operasional melalui perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Standar sesudai dengan SEOJK No.6/SEOJK.03/2020, BRI melaksanakan pengukuran dan perhitungan risiko operasional yang menjadi bagian dari proses manajemen risiko operasional, yaitu identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan.

Proses manajemen risiko operasional dijalankan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan dalam *framework* manajemen risiko operasional dan menggunakan perangkat sesuai dengan ketentuan regulator serta *best practices*. Proses pengukuran dan perhitungan risiko operasional dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

a. Penilaian *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk* Kantor Pusat BRI, *regional offi*ce, kantor cabang khusus, UKLN, audit intern wilayah, regional *campus*, kantor cabang yang juga mewakili BRI Unit, kantor cabang pembantu dan sentra layanan BRI Prioritas. RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan. Pengkinian *risk issue* dan *control* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

b. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB)

Penerapan proses manajemen risiko atas setiap rencana penerbitan PBB di BRI dilakukan melalui pelaksanaan *Risk Self Assessment* PBB oleh *Product Owner* dan dimintakan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PBB kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Direktur Manajemen Risiko BRI dalam rangka mendapatkan persetujuan.

c. Pencatatan Kerugian Risiko Operasional pada *Loss Event Database (LED)*
LED BRI mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss, potential loss* termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan. Berdasarkan data kejadian kerugian pada LED, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian *(event type)* dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasiskan pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi. Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI telah menerapkan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III Framework. Ketentuan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan standar diatur melalui Surat Edaran Direksi No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 Buku 2 tentang Perhitungan ATMR Operasional.

d. Pemantauan *Key Risk Indicator (KRI)*
KRI adalah perangkat Manajemen Risiko yang berupa indikator kuantitatif yang dapat memberikan informasi secara dini terhadap peningkatan atau penurunan risiko dan atau penurunan efektivitas kontrol terhadap limit *threshold* yang telah ditentukan. KRI dapat bersifat *leading* maupun *lagging*. Pemantauan risiko melalui KRI bertujuan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait pengendalian risiko sehingga dapat mencegah atau meminimalisir dampak kerugian. BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan audit internal, *risk owner* dan unit kerja terkait lainnya. KRI BRI antara lain tercermin dalam laporan profil risiko *bank wide* dan profil risiko *regional office* yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

***e. Risk Assessment Plan* (RAP)**
RAP merupakan bentuk aktivitas penyusunan *risk strategy* yang dilakukan oleh RRM dengan *output* berupa daftar risiko utama, prioritas Unit Kerja berdasarkan risiko dan rencana kegiatan pengawalan risiko.

f. Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB)
BRI melaksanakan PRAB sebagai implementasi dari *Business Continuity Management* (BCM) guna mengidentifikasi ancaman gangguan/bencana baik internal maupun eksternal berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut serta pengendalian/kontrol yang dilakukan untuk mengurangi dampak gangguan/bencana. PRAB bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan* (ER *Plan*) dan kebijakan *Business Continuity Plan* (BC *Plan*) untuk Unit Kerja Kritikal.

4

Pengelolaan risiko operasional dilaporkan secara berkala kepada manajemen, pemimpin unit kerja, dan pihak lain yang berkepentingan sebagai alat *monitoring*. ORD Division menyampaikan laporan risiko operasional baik yang bersifat *mandatory* maupun kepentingan laporan internal. Adapun ruang lingkup dan bentuk laporan pengelolaan risiko operasional, antara lain:

a. Profil Risiko Operasional Bank
Profil risiko operasional Bank disampaikan kepada Regulator, Direksi, dan Komisaris secara triwulanan yang dikoordinasikan oleh MPE Division. Profil risiko operasional tersebut mencakup parameter-parameter risiko yang menjadi fokus pemantauan eksposur risiko operasional Bank. Laporan profil risiko operasional Bank juga disampaikan pada *Risk Management Committee (RMC)* dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).

b. Profil Risiko Regional
Profil risiko regional berisi parameter dari 7 (tujuh) jenis risiko, salah satunya adalah risiko operasional. Penyusunan profil risiko operasional tersebut dikoordinasikan oleh RRM dan disampaikan kepada *Regional Chief Executive Officer (RCEO)* melalui forum *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* setiap bulan.

c. *Operational Risk News* (OPEN)
OPEN disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara bulanan. Ruang lingkup OPEN yaitu laporan profil risiko operasional, pencapaian *Risk Appetite Statement* (RAS), kejadian *human error* dan kejadian *fraud*, serta perbaikan kontrol yang dilaksanakan, kegiatan forum manajemen risiko, aktivitas BCM dan K3, aktivitas *regional risk management*, *risk assessment* atas Produk Bank Baru (PBB), RRM SMART, dan informasi kejadian eksternal.

d. Laporan Analisa Risiko BRC/URC
Laporan analisa risiko BRC/URC memuat daftar kelemahan kontrol yang masih terjadi di unit kerja sesuai hasil *verification* yang dilakukan oleh BRC/URC. Laporan ini disampaikan oleh BRC/URC kepada Pemimpin Unit Kerja yang diselenggarakan di Forum MR Unit Kerja setiap bulan. Selain itu, atas hasil *verification* BRC/URC dengan indikasi *fraud*, laporan disampaikan RCEO dan ORD Division untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

5

Proses mitigasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan dalam rangka mencegah kejadian risiko dan meminimalkan dampak risiko. Langkah-langkah mitigasi risiko disesuaikan dengan hasil analisa terhadap penyebab kejadian atau potensi risiko. Sesuai dengan hal tersebut, maka mitigasi risiko secara umum dikelompokkan dalam 3 (tiga) sub, yaitu:

a. *People*
Mitigasi pada aspek *people* dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas, antara lain:
- Menetapkan dan mereviu kebutuhan formasi pekerja untuk melaksanakan proses bisnis di Unit Kerja.
- Menetapkan persyaratan, mekanisme, serta *background checking* dalam proses rekrutmen pekerja.
- Melakukan pemenuhan formasi pekerja di Unit Kerja.
- Meningkatkan kapabilitas pekerja antara lain dengan cara:
  - Pendidikan dan pelatihan pekerja sesuai dengan *level* jabatan.
  - Mereviu kurikulum dan metode pendidikan.
  - Memberikan sertifikasi untuk pekerja dengan spesialis tertentu.
- Mendorong implementasi budaya risiko melalui program-program internalisasi budaya risiko, antara lain:
  - *Culture Activation Program* (CAP)
    Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI secara *prudent* melalui aktivitas yang telah ditetapkan pada CAP.
  - Membangun *Risk Awareness* Pekerja di Unit Kerja
    SKMR secara rutin menyampaikan media *risk awareness* baik dalam bentuk surat, media infografis, webinar, podcast, *e-learning*, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms *blast*.
  - *Empowering Risk Officer*
    Diperlukan keterlibatan Risk Officer sebagai Tim Penggerak Transformasi dalam menginternalisasi dan memastikan penerapan budaya risiko telah terlaksana. Sehingga dilakukan penguatan fungsi MR melalui penyesuaian operasional prosedur serta *upgrading* pengetahuan dan *technical skills* melalui pendidikan/sosialisasi.

ANALISIS KUALITATIF

- *Early Detection*
  Penerapan budaya risiko perlu didukung oleh *tools Early Warning System* yang dapat membantu memitigasi maupun mengkoreksi kejadian risiko secara lebih dini.
- *Business Process Review*
  Aktivitas budaya risiko tercermin melalui pelaksanaan operasional prosedur perbankan secara harian. Sehingga diperlukan reviu kecukupan kontrol atas operasional prosedur tersebut.

b. *Process*

Mitigasi risiko pada aspek *process,* yaitu:

- Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasional (SOP) untuk setiap produk dan aktivitas Bank yang didalamnya memuat *business procces*, *internal control*, dan tugas dan tanggung jawab pekerja sebagai *maker*, *checker*, *signer*. Setiap draft kebijakan dan SOP sebelum dilakukan pengesahan wajib mendapatkan penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- Mitigasi risiko juga dilakukan dengan cara transfer risiko kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang menanggung kerugian Bank atau kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja yang tentunya telah mempertimbangkan azas bonafiditas dan integritas dari penyedia jasa tersebut yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) di setiap kerjasama dengan pihak ketiga.

c. *Technology*

Pada prinsipnya pengendalian risiko *digital* erat kaitannya dengan upaya Bank untuk mengamankan aset yang dimiliki, termasuk memberikan perlindungan terhadap data/informasi nasabah. Pengelolaan risiko *digital* pada aktivitas pengelolaan TI/layanan TI meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan layanan perbankan elektronik/*digital*.
- Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan infrastruktur (*computing, network*, *satellite*) dan sekuriti TI.
- Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan layanan internal Bank.
- Pengadaan penyedia jasa TI.
- Penyedia jasa TI oleh Bank.
- Aktivitas operasional TI.
- Pengembangan dan/atau reviu *rules Fraud Detection System (FDS)*.

Selanjutnya untuk penguatan kontrol risiko digital, setiap pengembangan aplikasi didampingi oleh Digital Risk Division.

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional

Sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020, Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar per Januari 2023 telah diimplementasikan. Berikut merupakan tabel perhitungan ATMR operasional dengan Pendekatan Standar sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023						31 Desember 2022		
		Indikator Bisnis (IB)	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	ATMR Risiko Operasional	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pendekatan Standar	74.092.568	10.663.885	3.219.807	0,74	7.921.723	99.021.545	111.935.663	16.790.349	209.879.369
Total		74.092.568	10.663.885	3.219.807	0,74	7.921.723	99.021.545	**111.935.663**	**16.790.349**	**209.879.369**

Keterangan : (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11) dalam satuan (jutaan Rupiah)

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Konsolidasi

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023						31 Desember 2022		
		Indikator Bisnis (IB)	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	ATMR Risiko Operasional	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pendekatan Standar	81.866.229	11.829.934	5.433.202	0,81	9.618.943	120.236.798	114.600.256	17.190.038	214.875.481
Total		81.866.229	11.829.934	5.433.202	0,81	9.618.943	120.236.798	**114.600.256**	**17.190.038**	**214.875.481**

Keterangan : (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11) dalam satuan (jutaan Rupiah)

Ikatan Material Terkait Investasi Barang

Sepanjang tahun 2023, BRI melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak untuk investasi barang modal tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	2023	2022
	Nilai Pengadaan	Nilai Pengadaan
Pengadaan dan *Managed Service CRM RBB*	**999.926**	776.637
Sewa Saluran Komunikasi	**1.217.890**	416.940
Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 Untuk DC GTI Ragunan dan ODC Sentul	**125.000**	352.948

Tujuan Ikatan

Dalam perikatan pengadaan barang modal menggunakan anggaran investasi menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (PKS) sesuai dengan tiring nilai pengadaan dan jangka waktu pengadaan. Tujuan diadakan perikatan agar dapat terinci uraian pelaksanaan pekerjaan pengadaan kepada penyedia barang yang sifatnya mengikat, hak dan kewajiban para pihak dan memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Untuk mempercepat proses pengadaan barang utamanya dengan menggunakan metode pembelian langsung dan swakelola sesuai dengan *best practice* tidak memerlukan SPK, maka panitia pengadaan cukup menerbitkan *Purchase Order* (PO) atau surat permintaan penawaran atau cukup dibuktikan dengan kuitansi pembelian/struk pembelian.

Prinsip umum pengadaan barang dalam perusahaan harus mengacu prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, standarisasi barang, sentralisasi, desentralisasi dan telah ditentukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sumber Dana

Sumber dana menggunakan Anggaran dalam Perusahaan BRI yang telah dialokasikan (*breakdown*) sesuai mata anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Mata Uang yang Menjadi Denominasi dan Langkah yang Direncakan Untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing

Seluruh pengadaan menggunakan mata uang rupiah, dan diwajibkan seluruh pengadaan baik yang sudah disepakati dalam mata uang asing akan dilakukan penyesuaikan didalam SPK maupun PKS untuk menggunakan mata uang rupiah. Sehingga BRI tidak akan melakukan lindung nilai diakibatkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Investasi Barang Modal

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2022
Tanah dan Bangunan	**94.746**	82.810
Meubelair dan Inventaris	**14.667**	75.434
Kendaraan	**718.871**	661.002
Komputer dan Perangkat Lunak	**3.119.745**	1.411.622

Tujuan Investasi Barang Modal

Pengadaan barang selain untuk menunjang operasional Perusahaan, tujuan lainnya agar mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna barang dan/atau jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Perusahaan Anak BUMN, Perusahaan Anak BRI, dan/atau Perusahaan Anak dari badan-badan yang didirikan oleh BRI sepanjang barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN, Perusahaan Anak BUMN, Perusahaan Anak BRI dan/atau Perusahaan Anak dari badan-badan yang didirikan BRI yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan hubungan kerja sama secara wajar (*arm'length principle*).

Komitmen dan Kontinjensi

Penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti objektif, kecuali komitmen dan kontinjensi milik BRIS (Perusahaan Anak berdasarkan prinsip syariah) dilakukan dengan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Pembelian *spot* dan mata uang asing	**24.948.222**	15.046.421
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	**128.590.416**	86.290.063
Penjualan *spot* dan berjangka mata uang asing	**63.924.016**	69.751.674
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	**11.447.230**	13.658.668
Komitmen - neto	**(179.013.440)**	**(154.653.984)**
KONTINJENSI		
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk		
Garansi bank	**56.219.970**	62.487.277
Standby L/C	**9.672.955**	12.367.721
Kontinjensi - neto	**(65.892.925)**	**(74.854.998)**

Perjanjian Signifikan

Uraian perjanjian-perjanjian signifikan BRI tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Juni 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan CRM Tahun 2023 untuk Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp999.926 juta.
2. Pada tanggal 26 Mei 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Pengadaan 32.214 Unit HP Brispot Kaunit dan Mantri untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp409.762 juta.
3. Pada tanggal 22 Agustus 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Pacificagung Trijaya sehubungan dengan Pengadaan Pengadaan Mesin Self Service Banking Terminal (SSBT) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp177.286 juta.
4. Pada tanggal 13 April 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Info Solusindo Data Utama sehubungan dengan Pengadaan Penambahan Kapasitas Backup Solution Workload 2022 – 2023 DC Ragunan dan DC Tabanan untuk jangka waktu 22 (dua puluh dua) minggu dengan nilai kontrak senilai Rp146.398 juta.
5. Pada tanggal 13 Juli 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 E1080 DC Tabanan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp125.000 juta.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

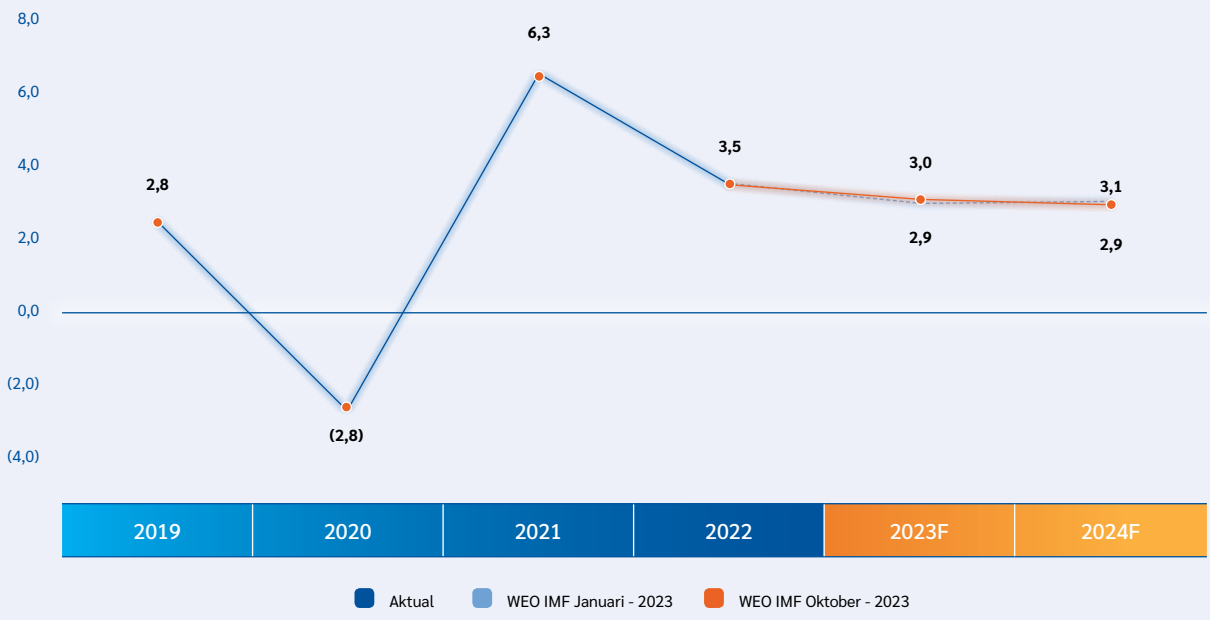
Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha BUMN

Pada tahun 2023, tidak terdapat rincian masalah signifikan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BRI.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan

Lembaga internasional *International Monetary Fund* (*IMF*) yang memproyeksikan ekonomi global melambat di 2024 deakselerasi perekonomian negara maju dan berkembang.

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh International Monetary Fund



Sumber: International Monetary Fund (IMF), Oktober 2023

Perekonomian negara maju, antara lain Amerika Serikat dan Eropa diproyeksikan melambat akibat penurunan aktivitas manufaktur dan konsumsi. Sementara itu, perekonomian China relatif melambat akibat lemahnya momentum konsumsi domestik dan industri manufaktur, serta secara khusus masih berlangsungnya krisis sektor properti. Perlambatan ini didorong oleh penurunan kinerja sisi penawaran dan permintaan di mana aktivitas industri dan konsumsi global melambat secara menyeluruh.

Terlebih lagi, terdapat beberapa faktor risiko (*downside risk*) yang diprediksikan berkontribusi pada perlambatan ekonomi global, antara lain tren inflasi global yang masih tinggi walaupun dalam tren melambat yang menyebabkan kebijakan moneter masih relatif ketat. Selain itu masih tingginya volatilitas geopolitik akan menekan kinerja pasar finansial dan sektor riil global, terutama negara berkembang.

Dinamika ekonomi global diprediksikan juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Pada tahun 2024, diprediksikan ekonomi Indonesia akan masih bertumbuh walaupun dengan laju yang relatif melambat (4,81%-5,10%). Ketidakpastian ekonomi global dan tingginya ketegangan geopolitik diprediksikan akan

menyebabkan prospek aktivitas dagang RI dan aliran modal asing (*foreign capital*) relatif terbatas dan bergejolak. Akibatnya, stabilitas nilai tukar Rupiah akan relatif masih rawan (*fragile*) dan mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan BI *7 days reverse repo* (BI 7DRR) pada tingkat yang relatif tinggi.

Prospek ekonomi domestik global dan domestik yang masih *uncertain* juga mempengaruhi industri perbankan. Volatilitas pasar keuangan global dan gejolak nilai tukar Rupiah dapat berdampak pada nilai aset finansial domestik dan kualitas kredit perbankan. Sementara itu perlambatan permintaan global dan perlambatan ekonomi domestik menyebabkan perlambatan pertumbuhan kredit perbankan. Di tahun 2024, diprediksikan pertumbuhan kredit diperkirakan berada pada kisaran 7,2%-8,6% yoy, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,4%. Sementara itu, DPK perbankan diproyeksikan tahun 2024 tumbuh sebesar 6,2%-7,0% yoy sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,8% yoy.

Situasi makro ekonomi yang menantang dikombinasikan dengan persaingan di industri perbankan yang kian ketat menyebabkan BRI perlu menyikapi dengan strategi yang tepat untuk terus meningkatkan penguasaan pasar BRI di masa mendatang. Secara internal, BRI masih menghadapi tantangan optimalisasi kinerja yang terkait dengan kapabilitas Perseroan dalam mengakselerasi bisnis ritel dan konsumer, bisnis Perusahaan Anak, serta pengendalian biaya. Kinerja BRI secara umum pun masih ditopang aktivitas kredit, sehingga kemampuan menghasilkan pendapatan non bunga masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Inovasi dan eksplorasi sumber pertumbuhan baru yang dilakukan BRI berimplikasi pada bisnis Perseroan yang kian kompleks. Dinamika internal dan lingkungan usaha menuntut BRI untuk *agile* dalam merespon tantangan agar cermat dalam mengoptimalkan peluang bisnis baik kini maupun di masa-masa mendatang. Maka dengan berorientasi pada aspirasi jangka panjang perusahaan, tahun 2024-2026 bagi BRI merupakan periode amplifikasi penguasaan pasar menuju pencapaian aspirasi jangka panjang BRI tahun 2025 dengan:

1. Menyempurnakan fundamental bisnis dan *enablers*,
2. Memperluas cakupan (*scope up*) bisnis melalui pengembangan bisnis pendukung (*beyond banking*),
3. Meningkatkan skala (*scale up*) bisnis mesin-mesin pertumbuhan baru, serta
4. Sinergi kohesif antar entitas intra Group sebagai *enabler* keberlanjutan pertumbuhan yang solid.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka BRI menetapkan bahwa pengembangan bisnis selama akan berfokus pada:

1. **Pengelolaan *Assets and Liabilities* yang lebih produktif**
   Meneruskan penghimpunan CASA yang stabil dan berkelanjutan, ekspansi selektif pada aset dengan tingkat imbal hasil tinggi, serta perbaikan kualitas aset di segmen Mikro dan *Small*.
2. **Diversifikasi sumber pertumbuhan**
   Mendorong lebih kuat perolehan pendapatan melalui penguatan kapabilitas segmen Ritel (Konsumer, SME), fokus integrasi *holding* UMI, serta penguatan bisnis Perusahaan Anak sebagai sumber pertumbuhan konsolidasian.
3. **Keandalan pendukung operasional**
   Fokus kepada penguatan kompetensi *Human Capital* dan kapabilitas digital, peningkatan *customer experience*, pengelolan risiko dan *data analytics,* serta *operational excellence*.
4. **Implementasi prinsip-prinsip ESG**
   Berkomitmen dalam pengelolaan bisnis selaras dengan prinsip tata kelola usaha yang baik agar memberi nilai positif bagi lingkungan (*deliver value beyond profit*).

Respon-respon strategis tersebut akan mendorong BRI untuk dapat terus tumbuh berkesinambungan untuk mewujudkan visi BRI sebagai "*Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion*".

Agar fokus strategi dapat berjalan dengan baik, BRI dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki seperti:

1. Jaringan kerja BRI yang tersebar dan terbesar.
2. Kapabilitas BRI dalam bisnis mikro.
3. Produk dan layanan jasa keuangan yang lengkap serta *brand positioning* yang kuat di Indonesia.
4. *Customer base* yang besar yang ditambah dengan pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru BRI.
5. Bank dengan permodalan yang kuat
6. Digitalisasi loan *processing*
7. *First mover Environmental, Social and Corporate Governance*.
8. Perkembangan teknologi, tren digital, serta revolusi gaya hidup dan perilaku masyarakat.
9. Jumlah UMKM yang belum mendapat layanan keuangan formal masih besar.
10. Peningkatan jumlah pengguna aktif internet dan media sosial.

Pencapaian Target dan Target ke Depan

Pencapaian Target 2023

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Perbandingan target dan realisasi keuangan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Keuangan

(Bank Only, dalam miliar Rupiah)

Uraian	Desember 2023		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	1.784.070	1.835.249	102,87%
Pendapatan Bunga	145.906	146.918	100,69%
Kredit yang diberikan	1.148.723	1.146.083	99,77%
Dana Pihak Ketiga	1.340.304	1.352.683	100,92%
Laba Bersih	52.209	53.153	101,81%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	65,62%	64,35%	101,97%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,74%	25,23%	102,04%
Credit Cost Nett	1,02%	0,89%	114,07%
Cost - to - Income Ratio (CIR)	40,40%	37,74%	107,06%

Di tahun 2023 BRI mampu mencetak laba bersih sebesar Rp53,15 triliun mencapai target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebesar 101,81% dari RKA. Kondisi ini didukung dengan optimalisasi portofolio BRI di segmen UMKM. Pencapaian laba bersih didukung dengan kemampuan BRI dalam mengelola kualitas aset yang telah mencapai target serta kemampuan menjaga rasio BOPO dan CIR, tercermin dari pencapaian target masing-masing tercapai sebesar 101,97% dan 107,06%. Target aset tercapai sebesar 102,87%, seiring dengan tercapainya target CAR sebesar 101,98%. Fokus strategi BRI dalam pengelolaan kualitas aset dan efisiensi biaya operasional tersebut berhasil mendukung pertumbuhan profitabilitas BRI.

Sepanjang 2023 BRI mampu menghimpun DPK dan melampaui target sebesar 100,92%, kondisi ini belum diimbangi oleh pencapaian kredit yang diberikan dengan pencapaian 99,77% dari target, yang berdampak pada pencapaian kinerja LDR belum mencapai target. Namun BRI masih mampu mencatat pertumbuhan segmen mikro yang kuat (*double digit*) dan telah mencapai target. Selain itu di segmen menengah BRI juga mampu tumbuh mencapai target sejalan dengan komitmen Perseroan untuk tumbuh di segmen UMKM.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal (*Capital Structure*)

Pada posisi 31 Desember 2023, BRI mampu menjaga struktur permodalan sesuai target maupun level minimum yang ditetapkan regulator. Total Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BRI sebesar 25,23%, mencapai 101,98% dari target 2023 sebesar 24,74%.

Selanjutnya untuk Rasio Modal Inti Pelengkap (CET 1) tercatat sebesar 24,06%, mencapai 101,86% dari target 2023 sebesar 23,62%. *Tier* 1 maupun CET 1 juga terjaga di atas minimum ketentuan regulator masing-masing 6,0% dan 4,5% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Modal Inti (*Tier* 1)	233.401.082	238.956.599	102,38%
Modal Inti Utama (CET 1)	233.401.082	238.956.599	102,38%
Modal Pelengkap (*Tier* 2)	11.067.788	11.612.168	104,92%
Total Modal Tersedia	244.468.870	250.568.767	102,50%
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	883.428.892	890.512.335	100,80%
ATMR untuk Risiko Pasar	5.533.149	3.617.404	65,38%
ATMR untuk Risiko Operasional	99.021.545	99.021.545	100,00%
Total ATMR	987.983.586	993.151.284	100,52%
Rasio CAR	24,74%	25,23%	101,98%
Rasio CET 1	23,62%	24,06%	101,86%
Rasio *Tier* 1	23,62%	24,06%	101,86%
Rasio *Tier* 2	1,12%	1,17%	104,46%

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

PROGRAM PESTA RAKYAT SIMPEDES (PRS) 2023

Rangkaian Pesta Rakyat Simpedes 2023 merupakan program akusisi dan retensi kepada nasabah tabungan Simpedes yang berfokus pada sharing wawasan, tips dan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya melalui kegiatan *workshop*, kuis interaktif, UMKM BRILiaN *Check*, serta *talkshow*. Program ini dilakukan di 20 titik di seluruh Indonesia dengan diikuti lebih dari 1.325 peserta *bazzar* UMKM. Keberhasilan program Pesta Rakyat Simpedes dapat dilihat dari peningkatan saldo simpanan sebesar Rp3,4 triliun dengan jumlah pembukaan rekening baru 167.579 rekening dan penambahan user baru BRImo 119 ribu *user* serta penambahan user baru QRIS sebesar 75 ribu *user*.

Pesta Rakyat Simpedes membawa (PRS) 6 pilar yaitu:

a. Pasar : Merupakan Bazar UMKM yang memberikan kesempatan UMKM dalam mengembangkan bisnis, serta meningkatkan ekosistem transaksi di segmen bisnis Mikro.

b. Panggung : Merupakan konten hiburan dan edukasi dalam event PRS yang dikemas dalam panggung musik serta ilmu dengan konsep *edutainment*.

c. Pawai : Merupakan rangkaian aktivitas PRS berupa Pawai Internal yaitu kegiatan grebek pasar/ Sentra bisnis lainnya dalam periode 1 minggu sebelum *event* PRS diselenggarakan sedangkan Pawal Eksternal yaitu unjuk komunitas serta cluster binaan BRI yang diparadekan di jalan utama Kota PRS.

d. Pojok X'sis : Merupakan wadah/ pojok komunitas yang memberikan kesempatan bagi suatu komunitas untuk dapat berekspresi. Tujuannya adalah membuka peluang bagi segmen bisnis mikro BRI untuk masuk dalam ekosistem komunitas.

e. Peduli : Pilar Peduli direalisasikan melalui kegiatan cek kesehatan gratis, donor darah dan aktivitas charity lainnya.

f. Panen : Seremonial penyerahan hadiah kepada pemenang Program Panen Hadiah Simpedes yang telah diundi sebelumnya. Berbagi hadiah *games* dan *doorprize* pada saat *event* PRS berlangsung.

PROGRAM BRIMO FSTVL

BRImo FSTVL merupakan loyalti program untuk nasabah setia BRIMO yang diberikan dalam bentuk *cashback* transaksi, *redeem* Poin menjadi *voucher* belanja dan kupon undian, yang dimana poin berasal dari poin akuisisi, retensi dan poin loyalti untuk setiap kegiatan perbankan yang dilakukan nasabah. Selama periode program BRImo FSTVL berhasil mendorong peningkatkan volume saldo tabungan dari Rp508,7 triliun (7/23) menjadi Rp526 triliun (12/23) dan pertumbuhan user BRImo dari 28,35 juta *user* (7/23) menjadi 31,62 juta user (12/23).

BRIPOIN

Selain Program BritAma Festival terdapat program BRIPoin, merupakan program untuk mendorong nasabah meningkatkan saldo dan transaksi simpanan nasabah baik menggunakan kartu maupun BRIMo. Semakin banyak nasabah menggunakan simpanan BRI dalam bertransaksi semakin banyak poin yang dapat dikumpulkan untuk kemudian dapat ditukarkan dengan beragam hadiah yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah. (*voucher*, *ewallet*, pulsa, *miles* dan sebagainya)

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2023		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Dana Pihak Ketiga: Tabungan	587.879	526.515	89,56%
BritAma	236.673	198.416	83,84%
Simpedes	343.139	319.192	93,02%
Lainnya	8.068	8.907	110,40%
Fee Based Income	20.962	20.292	96,80%

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Pada tahun 2023, target telah tercapai dengan baik dengan menjadikan pengembangan kompetensi pekerja menjadi hal prioritas utama bagi Perseroan melalui berbagai macam program, termasuk pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi yang dapat dilakukan secara luring maupun daring melalui *digital learning platform* (BRISMART) dan *platform learning* eksternal lainnya (*Linkedin Learning, Coursera*, dan sebagainya). Secara total pencapaian target pengembangan SDM melampaui target dengan realisasi 110,15% dari target. Pencapaian pengembangan SDM melalui pendidikan *development* mencapai 217,19%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan, untuk pendidikan *enhancement* melampaui target pada realisasi 108,44% dari target.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

(dalam orang)

Uraian	2023		
	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Development *	1.600	3.475	217,19%
*Enhancement***	100.000	108.438	108,44%
Total	101.600	111.913	110,15%

Keterangan:
* BRILiaN *Future Leader Program* (BFLP), BRILiaN *Next Leader Program* (BNLP). BRILiaN *Leadership Development Program* (BLDP), dan BRILiaN *Banking Officer Program* (BBOP).
** Pendidikan *Enhancement* mencakup, BRILiaN *Specialist Development Program* (BSDP) 0, BSDP (1,2,3), *Public Course*, Sertifikasi, BRILiaN *Leader Retirement Program* (BLRP), BRILiaN *Bright Scholarship* Program (BBSP), BRILiaN *Improvement* Forum (BIF), dan Sosialisasi.

Target Ke Depan (Proyeksi)

Manajemen BRI telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2024, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

No.	Asumsi	2024
	ASUMSI MAKRO	
1.	Pertumbuhan PDB (%)	5,03
2.	Inflasi (%)	3,27
3.	Kurs IDR/USD	15.031
4.	BI 7 *Days Rate*	5,25

No.	Asumsi	2024
	ASUMSI MIKRO	
1.	Pertumbuhan Kredit Nasional (%)	7,86
2.	Pertumbuhan Simpanan Nasional (%)	6,59

Sumber: Tim Economist BRI

Proyeksi Keuangan

Pertumbuhan aset BRI ke depan tetap didorong dari pertumbuhan pinjaman pada segmen UMKM. Segmen SME dan Konsumer didorong menjadi *engine* pertumbuhan di luar segmen Mikro seiring dengan fokus BRI 2024 untuk memperkuat kapasitas di segmen ritel *banking* dalam rangka membangun ekosistem ritel. Aset non kredit diproyeksikan tumbuh lebih rendah sebagai dampak dari peran pertumbuhan bisnis pinjaman khususnya UMKM yang akan semakin meningkat, termasuk optimalisasi *portfolio* untuk memaksimalkan profit. Di sisi liabilitas, pertumbuhan DPK terus meningkat, dengan *driver* utama yaitu pertumbuhan tabungan yang berfokus pada peningkatan CASA.

Profitabilitas BRI pada tahun 2024 akan mendapatkan tekanan dari sisi kenaikan *Cost of Fund* (CoF) serta penurunan *Net Interest Margin* (NIM). Namun, BRI optimis profitabilitas BRI akan tetap tumbuh yang bersumber dari penguatan pertumbuhan pinjaman yang memberikan *yield* yang tinggi, peningkatan CASA, pemaksimalan pendapatan operasional seperti FBI dan *Recovery,* dan efisiensi pada OHC yang didukung penurunan biaya provisi sejalan dengan perbaikan kualitas aset. Dari beberapa rasio keuangan, kualitas NPL *gross* di 2024 diarahkan untuk lebih baik sejalan dengan upaya perbaikan kualitas aset dan pemulihan ekonomi. CoF mengalami kenaikan untuk memberikan ruang atas kenaikan suku bunga yang berlanjut sampai tahun 2024 serta NIM akan dipertahankan pada level yang sama dengan memfokuskan penyaluran kredit pada produk *High Yield*. *Yield* dioptimalkan sejalan dengan kenaikan BI7DRR.

Tabel Proyeksi Keuangan (Konsolidasian)

Uraian	Proyeksi 2024
Pertumbuhan Kredit (*year or year*)	**11% - 12%**
Net Interest Margin (NIM)	**7,9% - 8,0%**
Credit Cost (CoC)	**2,2% - 2,3%**
Non Perfoming Loan (NPL) *Gross*	**2,7% - 2,9%**
Cost - to - Income Ratio (CIR)	**41% - 42%**

Proyeksi Struktur Modal (*Capital Structure*)

Modal KPMM posisi Desember 2024 diproyeksikan Rp251,10 triliun dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan selalu dijaga di atas ketentuan minimum regulator perbankan dan jasa keuangan. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan reklasifikasi cadangan tujuan dan rencana revaluasi aset dan dampak dari PSAK 71. Adapun uraian proyeksi modal dan pemenuhan KPMM BRI secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Permodalan BRI

(bank only)

Uraian	Proyeksi 2024
Capital Adequacy Ratio (CAR)	**22% - 23%**

Untuk mempertahankan rasio permodalan tetap sesuai dengan ketentuan Regulator, BRI mengupayakan pemenuhannya dari *retained earning* dan pengelolaan dividen *payout ratio* yang optimal.

Proyeksi Kebijakan Dividen

Secara historis, DPO normal BRI berada pada kisaran 50% - 60%. Ke depan, BRI dapat membagikan dividen atas laba Perseroan dengan DPO lebih tinggi maupun lebih rendah dari level dividen normal namun tetap memperhatikan beberapa faktor seperti proyeksi pertumbuhan bisnis ke depan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor *sustainability* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, sesuai ketentuan dividen juga dapat berbentuk tunai maupun non tunai.

Ke depan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti proyeksi pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, pemenuhan minimum rasio kecukupan modal dan tingkat imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham. Pembayaran Dividen juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku diantaranya POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Proyeksi Pemasaran

Uraian proyeksi pemasaran yang dilakukan BRI tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Pemasaran

Produk	Deskripsi
BRImo *E-Payment*	Merupakan salah satu layanan pembayaran daring digital instan bagi pengguna layanan BRImo di *merchant-merchant* daring yang telah bekerjasama.
Kartu Debit *Contactless*	Merupakan fitur pembayaran menggunakan kartu debit dengan metode *contactless/tap* di *merchant* yang sudah dapat menerima transaksi *contactless*.
BRI Info Lelang	Pengembangan platform digital pemasaran yang menyajikan info-info *asset* BRI debitur bermasalah yang akan dijual secara lelang dan non lelang.
Integrated Corporate Solution Platform (QLola)	Layanan yang memudahkan nasabah segmen *wholesale* dan korporasi dalam mengakses produk dan layanan BRI dalam satu *platform*.
Kartu Kredit Indonesia	Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah yang diterbitkan kepada Satker (Kementerian/Lembaga Negara/Instansi) pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBN dan/atau APBD sesuai Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Dengan rincian pengembangan sebagai berikut: Fase 1: Fitur transaksi QRIS dengan menggunakan Kartu Kredit Indonesia (Agustus 2022) Fase 2: Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Fisik (September 2023) Fase 3: Fitur Online Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah (2024)
Tokenisasi NFC Kartu Kredit	Kartu Kredit BRI dapat terintegrasi dengan *e-wallet* dan dapat digunakan transaksi dengan metode NFC.
Digitalisasi Proses Kartu Kredit	Pertumbuhan *user* baru dengan digitalisasi proses bisnis kartu kredit melalui *onboarding channel digital* pada *platform* internal dan/atau eksternal untuk meningkatkan pertumbuhan *user* baru.

Proyeksi Pengembangan SDM

Proyeksi pengembangan SDM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

(dalam orang)

Uraian	Proyeksi 2024
Development	1.700
Enhancement	101.000

Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)

Dalam rangka pemantauan terhadap realisasi Rencana Jangka Panjang (RJP), dilakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala setiap tahunnya yang disampaikan dalam forum/rapat Direksi. Untuk tahun 2023 evaluasi rencana jangka panjang dilakukan pada tanggal 10 April 2023 perihal Evaluasi *Corporate Plan* 2022. Hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan dalam penyesuaian dan perumusan strategi BRI selanjutnya.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen telah diatur secara internal dalam SE.70.a–DIR/CMG/12/2022 Buku 6 tentang Pengelolaan Dividen. Adapun kebijakan tersebut mengatur beberapa prinsip terkait Dividen antara lain pengelolaan dividen yang bertujuan untuk mengoptimalkan permodalan dan meningkatkan *shareholders value*, pembagian dividen yang mempertimbangkan historis kinerja Perseroan maupun potensi bisnis dan ekonomi kedepan, besaran rasio dividen yang ditentuan berdasarkan kewajaran kinerja profitabilitas dari kegiatan usaha maupun kontribusi kepada pemegang saham, mekanisme persetujuan pembagian dividen melalui RUPS dan memenuhi ketentuan regulator, serta ketentuan teknis terkait pembagian dividen secara lebih detail.

Kebijakan pemberian dividen BRI ini dapat di-*review* oleh Direksi dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2023, BRI telah membagikan dividen sebesar Rp43,49 triliun atau 85% dari laba tahun buku 2022 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk BRI tahun buku 2021 sebesar Rp51,17 triliun.

Jumlah dividen tunai per saham sebesar Rp288,22 dan dibayarkan pada tanggal 12 April 2023 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (*recording date*) Perseroan pada tanggal 27 Maret 2023.

Pembayaran dividen tahun buku 2022 dilakukan pada tanggal 12 April 2023, dan telah dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman 13 Maret 2023 adapun untuk kinerja keuangan tahun buku 2023 akan diputuskan pada RUPST tahun 2024.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020
Laba (miliar Rp)	51.170,31	31.066,59	18.654,75
Dividen Kas (miliar Rp)	43.494,76	26.406,60	12.125,00
Dividen Non Kas*)	-	-	-
Dividen Kas Per Saham (Rp)	288,22	174,25	98,90
Dividen Non Kas Per Saham*)	-	-	-
Rasio Pembayaran Dividen/Dividend Pay Out Ratio (%)	85% dari laba bersih tahun 2022	85% dari laba bersih tahun 2021	65% dari laba bersih tahun 2020
Tanggal Pengumuman (RUPST)	13 Maret 2023	1 Maret 2022	25 Maret 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	12 April 2023	1 April 2022	28 April 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas*)	-	-	-

*) BRI tidak Memiliki Dividen Non Kas

Secara historis, penjelasan pembayaran dividen tahun buku dari tahun 2003-2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel Historis Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian		Tanggal Pengumuman	*Cum Dividend (Reguler and Negotiation Market)*	*Cum Dividend (Cash Market)*	Tanggal Pencatatan	Tanggal Pembayaran	Rasio Pembayaran Dividen (%)	Dividen Yang Dibayarkan (miliar Rp)	Dividen Per Saham (Rp)
2022**	Final	13 Maret 2023	21 Maret 2023	27 Maret 2023	27 Maret 2023	12 April 2023	85	43.494,76	231,22
2022	Interim	30 Desember 2022	9 Januari 2023	11 Januari 2023	11 Januari 2023	27 Januari 2023	-	8.602,82	57,00
2021	Final	1 Maret 2022	10 Maret 2022	14 Maret 2022	14 Maret 2022	1 April 2022	85	26.406,60	174,25
2020	Final	25 Maret 2021	5 April 2021	7 April 2021	7 April 2021	28 April 2021	65	12.125,59	96,49
2019	Final	18 Februari 2020	26 Februari 2020	28 Februari 2020	28 Februari 2020	18 Maret 2020	60	20.623,56	164,10
2018	Final	17 Mei 2019	23 Mei 2019	27 Mei 2019	27 Mei 2019	13 Juni 2019	50	16.175,57	128,95
2017	Final	26 Maret 2018	29 Maret 2018	4 April 2018	4 April 2018	25 April 2018	45	13.048,44	104,14
2016	Final	17 Maret 2017	22 Maret 2017	27 Maret 2017	27 Maret 2017	13 April 2017	40	10.478,31	83,63
2015	Final	24 Maret 2016	31 Maret 2016	5 April 2016	5 April 2016	22 April 2016	30	7.619,32	60,81
2014	Final	23 Maret 2015	26 Maret 2015	31 Maret 2015	31 Maret 2015	22 April 2015	30	7.272,49	57,52
2013	Final	27 Maret 2014	28 April 2014	2 Mei 2014	2 Mei 2014	14 Mei 2014	30	6.348,05	50,21
2012	Final	5 Maret 2013	26 Maret 2013	1 April 2013	1 April 2013	15 April 2013	30	5.556,28	43,95
2011	Final	2 April 2012	26 April 2012	1 Mei 2012	1 Mei 2012	15 Mei2012	20	3.016,59	23,86
2010	Final	2 Mei 2011	27 Mei 2011	1 Juni 2011	1 Juni 2011	15 Juni 2011	20	2.294,48	13,67
2010	Interim	30 November 2010	19 Desember 2010	22 Desember 2010	22 Desember 2010	30 Desember 2010	-	566,53	4,48
2009	Final	24 Mei 2010	28 Juni 2010	1 Juli 2010	1 Juli 2010	15 Juli 2010	30	2.192,49	12,89
2009	Interim	4 November 2009	30 November 2009	3 Desember 2009	3 Desember 2009	16 Desember 2009	-	563,94	4,46
2008	Final	22 Mei 2009	16 Juni 2009	19 Juni 2009	19 Juni 2009	3 Juli 2009	35	2.085,43	16,50
2007	Final	28 Mei 2008	18 Juni 2008	23 Juni 2008	23 Juni 2008	7 Juli 2008	50	2.419,00	19,15
2006	Final	22 Mei 2007	13 Juni 2007	18 Juni 2007	18 Juni 2007	2 Juli 2007	50	2.128,79	16,88
2005	Final	2 Juni 2006	21 Juni 2006	26 Juni 2006	26 Juni 2006	10 Juli 2006	50	1.904,29	15,24
2004	Final	27 Mei 2005	16 Juni 2005	21 Juni 2005	21 Juni 2005	5 Juli 2005	50	1.816,61	14,92
2003	Final	1 Juni 2004	6 Juli 2004	9 Juli 2004	9 Juli 2004	23 Juli 2004	75	990,47	8,21

*) Seluruh angka dividen telah disesuaikan menjadi stock split 1:2 pada Januari 2011, stock split 1:5 pada Oktober 2017 dan right issue factor 1:0,98 pada September 2021.
**) Angka rasio pembayaran dividen telah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp57 per lembar.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, BRI telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut.

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 telah digunakan seluruhnya dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel Laporan Realisasi Penggunaaan Dana (LRPD) Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

No.	Deskripsi	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Informasi Tambahan		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Informasi Tambahan		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum (dalam Rp)	Biaya (dalam Rp)	Hasil Bersih (dalam Rp)	Penyaluran Kredit (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	Penyaluran Kredit (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	(dalam Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penawaran Umum Obligasi	12/07/2022	6.000.000.000.000	8.230.275.000	5.991.769.725.000	5.991.769.725.000	5.991.769.725.000	5.991.769.725.000	5.991.769.725.000	0
	Jumlah		**6.000.000.000.000**	**8.230.275.000**	**5.991.769.725.000**	**5.991.769.725.000**	**5.991.769.725.000**	**5.991.769.725.000**	**5.991.769.725.000**	**0**

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023

Dana hasil Penawaran Umum Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 telah digunakan seluruhnya dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel Laporan Realisasi Penggunaaan Dana (LRPD) Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023

No.	Deskripsi	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Informasi Tambahan		Realisasi Penggunaan Dana Menurut Informasi Tambahan		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum (dalam Rp)	Biaya (dalam Rp)	Hasil Bersih (dalam Rp)	Penyaluran Kredit (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	Penyaluran Kredit (dalam Rp)	Total (dalam Rp)	(dalam Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penawaran Umum Obligasi	26/06/2023	500.000.000.000	5.857.666.049	494.142.333.951	494.142.333.951	494.142.333.951	494.142.333.951	494.142.333.951	0
	Jumlah		**500.000.000.000**	**5.857 .666.049**	**494.142.333.951**	**494.142.333.951**	**494.142.333.951**	**494.142.333.951**	**494.142.333.951**	**0**

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

BRI memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.

Investasi

Efek-Efek dan Penyertaan Modal

BRI melakukan investasi pada sejumlah efek-efek, adapun rincian investasi BRI per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Investasi Efek-Efek

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
Nilai wajar melalui laba rugi	**22.393.171**	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**163.339.165**	150.802.567
Biaya perolehan diamortisasi	**145.358.968**	158.406.378
Total Efek-Efek	**331.091.304**	330.324.818

Selain investasi efek-efek, BRI melakukan investasi berupa penyertaan modal yang diuraikan sebagai berikut:

- Tambahan modal ke BVI bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BVI dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis BVI serta dengan mempertimbangkan potensi *strategic investment* termasuk rencana persiapan pembiayaan Merah Putih Fund dan tambahan penyertaan modal pada LinkAja. Tambahan modal BVI yang telah direalisasikan di tahun 2023 sebesar Rp500 miliar yang termuat pada AKta No.45 tanggal 31 Maret 2023 dengan kepemilikan saham BRI sebesar 99,9%.

Ekspansi

BRI tidak melakukan kegiatan ekspansi sepanjang tahun 2023.

Penggabungan/Peleburan Usaha

BRI tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha sepanjang tahun 2023.

Divestasi

BRI tidak melakukan kegiatan divestasi sepanjang tahun 2023.

Akuisisi

BRI tidak melakukan kegiatan akuisisi sepanjang tahun 2023.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

BRI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal sepanjang tahun 2023

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Lingkup Transaksi:

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

a. 1 (satu) kali transaksi; atau
b. Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Batasan Nilai:

(1) Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
(2) Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
    a. Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
    b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
    c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
    d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
(3) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020), yang dimaksud Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka. Dengan demikian, Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi yang mana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang di BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif.

BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertuang dalam Bank BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Penanganan Benturan Kenpentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan antara lain:

1. Menjaga integritas, mengutamakan kepentingan publik dan Perseroan serta berkomitmen dalam penanganan Benturan Kepentingan.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani Benturan Kepentingan.

Sampai dengan akhir tahun 2023, BRI tidak memiliki transaksi material yang mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan POJK 42/2020, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham utama.

Adapun Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Selama tahun 2023, terdapat Transaksi Afiliasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi

Pada tahun 2023, tidak terdapat Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi yang memenuhi Pasal 4 POJK 42/2020.

Laporan Informasi atau Fakta Material Tambahan Modal Kepada Perusahaan Anak

Pada tahun 2023, terdapat tambahan modal kepada Perusahaan Anak/Perusahaan Terelasi yang termasuk ke dalam Pasal 6 POJK 42/2020 untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi
1	2 Maret 2023	Tambahan Modal	PT BRI Ventura Investama	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali

Laporan Transaksi Afiliasi

Perseroan telah menyampaikan Laporan Transaksi Afiliasi yang memenuhi Pasal 6 POJK 42/2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan diantaranya sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi
1	25 Agustus 2023	*Akses Data Watchlist*	PT Bank Raya Indonesia Tbk	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali
2	18 Juli 2023	Pengadaan Bersama Konsultan	PT Danareksa (Persero)	Negara Republik Indonesia merupakan pemegang saham Pengendali
3	27 Juni 2023	Penggunaan Aplikasi Audit Management System Bagi BRI Life dan BRIF	PT Asuransi BRI Life dan PT BRI Multifinance Indonesia	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali
4	8 Mei 2023	Implementasi Master Data Management (MDM)	PT Pegadaian	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali
5	2 Mei 2023	Pengadaan Jasa Konsultan	PT BRI Danareksa Sekuritas	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali
6	18 April 23	*Career Mobility dalam Lingkup BRI Group*	PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Multifinance Indonesia, PT Bank Raya Indonesia Tbk	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali
7	30 Desember 2023	Referensi Fasilitas Bank Garansi, Pinang Maksima, dan Pinang Performa Kepada Rekanan (Vendor Financing)	PT Bank Raya Indonesia Tbk	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi
8	8 September 2023	Pembukaan Rekening Simpanan BRI Bagi	PT Permodalan Nasional Madani	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali
9	18 April 2023	Pembukaan Rekening Simpanan BRI Bagi Nasabah Pegadaian	PT Pegadaian	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali

Transaksi Afiliasi Sebagai Kegiatan Usaha yang Dijalankan dalam Rangka Menghasilkan Pendapatan Usaha dan Dijalankan Secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 42/2020, terdapat Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan telah melakukan pendataan atas transaksi tersebut dan tercatat pada Catatan Laporan Keuangan 44. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Hubungan Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi
1	27 Juni 2023	Referal produk dan layanan Pegadaian kepada nasabah BRI	PT Pegadaian	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali	**781.011 referal*)**
2	27 Desember 2023	Pinjaman Sindikasi	PT Bank Raya Indonesia Tbk	BRI sebagai Pemegang Saham Pengendali	**Rp600.000.000**

*) Asumsi nominal transaksi afiliasi

Selaras dengan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/ MBU/09/2017 tanggal 13 September 2021 dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara, transaksi afiliasi antara Perseroan dengan Perusahaan Anak merupakan sinergi antar kelompok usaha perbankan dalam rangka optimalisasi sumber daya, menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis serta memberikan nilai tambah bagi BRI Group. Sedangkan transaksi afiliasi dengan pihak terafiliasi lainnya, dilakukan dalam rangka sinergi bisnis yang saling menguntungkan, efisiensi/optimalisasi dalam kegiatan operasional maupun memberikan nilai tambah bagi antar pihak.

Dalam hal ini, Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai, dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum, serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dimungkinkan untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan. Transaksi pihak afiliasi tersebut tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Seluruh transaksi afiliasi telah dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 42/2020. Selanjutnya, selain transaksi di atas, terdapat Transaksi Afiliasi lainnya yang disampaikan pada Bagian Transaksi Pihak Berelasi.

Transaksi Pihak Berelasi

BRI dan Perusahaan Anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan Perusahaan Anak jika:

1) Secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan BRI dan Perusahaan Anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan Perusahaan Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan Perusahaan Anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan Perusahaan Anak;
2) Suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan Perusahaan Anak;
3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan Perusahaan Anak sebagai *venturer*;
4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan Perusahaan Anak atau induk;
5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan Perusahaan Anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan Perusahaan Anak.

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Pihak Berelasi

No	Pihak-pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
1.	Manajemen Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Program imbalan kerja.
2.	Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
3.	Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan
4.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
5.	PT Bank Mandiri Taspen	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain
6.	PT PNM Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
7.	PT BNI Asset Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
8.	PT Rajawali Nusantara Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
9.	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
10.	PT Inka Multi Solusi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
11.	PT Industri Kereta Api (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
12.	PT Wijaya Karya Realty	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset lain-lain
13.	PT PAL Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
14.	PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
15.	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	simpanan nasabah
16.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	simpanan nasabah
17.	PT Jasa Marga Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	simpanan nasabah
18.	PT Taspen (persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	simpanan nasabah
19.	PT Bukit Asam Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	simpanan nasabah
20.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
21.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain,Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
22.	PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, simpanan nasabah
23.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
24.	PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
25.	PT Bahana TCW Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, simpanan nasabah
26.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari Bank Lain
27.	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan

No	Pihak-pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
28.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain,Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
29.	PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Manajgement)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
30.	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
31.	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
32.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
33.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, simpanan nasabah
34.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, simpanan nasabah, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
35.	PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, simpanan nasabah
36.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
37.	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
38.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Garansi yang diterbitkan, Pinjaman yang diterima
39.	PT Pertamina EP Cepu	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
40.	Pusat Investasi Pemerintah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman yang diterima
41.	PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
42.	PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan dan liabilitas akseptasi
43.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
44.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
45.	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
46.	PT Hutama Karya Infrastruktur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
47.	PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
48.	PT Petrokimia Kayaku	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
49.	PT Kilang Pertamina International	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
50.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Pinjaman yang diterima
51.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program THT, simpanan nasabah
52.	Dana Pensiun BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program Pensiun Imbalan Kerja
53.	Dana Pensiun Pegadaian	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program Pensiun Imbalan Kerja
54.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program Pensiun Iuran Pasti
55.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program Pensiun Iuran Pasti
56.	PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Pinjaman yang diterima

No	Pihak-pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
57.	PT Bhirawa Steel	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
58.	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
59.	High Speed Railways Contractor Consortium	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
60.	PT Garuda Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, simpanan nasabah
61.	PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, simpanan nasabah
62.	PT Elnusa Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
63.	PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
64.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya, simpanan nasabah
65.	PT Kimia Farma Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, simpanan nasabah
66.	PT Wika Semarang Demak Seksi 2	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
67	PT Pupuk Kujang Cikampek	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, simpanan nasabah
68.	PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha BRI. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Transaction*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi diuraikan sebagai berikut

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
Aset		
Giro pada bank lain	**448.259**	697.978
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	**2.927.441**	3.052.713
Efek-efek	**256.540.281**	286.311.292
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	**5.039.044**	8.911.425
Kredit yang diberikan	**61.280.470**	63.749.756
Piutang Pembiayaan	**30.351**	7.205
Tagihan dan Liabilitas Akseptasi	**1.213.562**	1.609.971
Penyertaan saham	**6.312.323**	5.278.029
Total aset dari pihak-pihak berelasi	**334.449.197**	370.325.978

Uraian	2023	2022
Total aset konsolidasian	**1.965.007.030**	1.865.639.010
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	**17,02%**	19,85%
Liabilitas		
Giro	**174.894.844**	184.165.751
Tabungan	**446.427**	864.745
Deposito Berjangka	**156.298.259**	139.196.981
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	**462.943**	821.691
Pinjaman yang Diterima	**26.072.346**	18.847.671
Pinjaman subordinasi	**231.563**	363.095
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci	**1.616.737**	887.492
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	**366.710.645**	352.428.274
Total liabilitas konsolidasian	**1.648.534.888**	1.562.243.693
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	**22,24%**	22,58%
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan	**23.166.828**	32.400.198
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	**8.219.329**	6.268.627
Iuran Program Pensiun Imbalan Pasti	**814.934**	563,595
Iuran Program Tunjangan Hari Tua	**136.643**	128,467
Iuran Program Pensiun Iuran Pasti	**468.697**	451.679
Iuran Program Manfaat Lain Dana Manfaat Pasti	**-**	-
Total	**1.420.274**	1.143.741
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi		
Gaji dan tunjangan Direksi	**195.671**	189.966
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	**83.417**	84.369
Total	**279.088**	274.335
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci		
Tantiem Direksi	**404.423**	443.816
Tantiem Dewan Komisaris	**159.244**	131.568
Bonus dan insentif karyawan kunci	**187.258**	97.479
Total	**750.925**	672.863

Tabel Persentase Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi Terhadap Total Aset dan Liabilitas Konsolidasian BRI dan Entitas Anak

(dalam %)

Uraian	2023	2022
Aset		
Giro pada Bank lain	**0,023**	0,037
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	**0,149**	0,164
Efek-efek	**13,055**	15,347
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	**0,256**	0,478
Kredit yang diberikan	**3,119**	3,417
Piutang pembiayaan	**0,002**	0

Uraian	2023	2022
Tagihan akseptasi	0,062	0,086
Penyertaan saham	0,321	0,283
Aset lain-lain	0,036	0,038
Total	17,023	19,850
Liabilitas		
Giro	10,609	11,789
Tabungan	0,027	0,055
Deposito berjangka	9,481	8,91
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,028	0,053
Surat Berharga yang diterbitkan	0,404	0,489
Pinjaman yang diterima	1,583	1,207
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	0,014	0,023
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan kunci	0,098	0,057
Total	22,244	22,583

Kebijakan Mekanisme *Review* atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020), pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan Perusahaan Anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme reviu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang di-*review* oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Undang-Undang P2SK merupakan Omnibus Law dimana terdapat 27 bab dan 341 pasal yang terkandung di dalamnya yang mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu: 1. Penguatan Kelembagaan Otoritas Sektor Keuangan Dengan Tetap Memperhatikan Independensi; 2. Penguatan Tata Kelola Dan Peningkatan Kepercayaan Publik; 3. Mendorong Akumulasi Dana Jangka Panjang Sektor Keuangan Untuk Kesejahteraan Dan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Yang Berkesinambungan; 4. Perlindungan Konsumen; Dan 5. Literasi, Inklusi Dan Inovasi Sektor Keuangan.	1. BRI dapat menyesuaikan Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar sesuai perubahan ketentuan terkait Kegiatan Usaha Bank Umum dalam UU P2SK; 2. BRI wajib menyesuaikan ketentuan internal terkait Rahasia Bank atas diubahnya ketentuan Rahasia Bank dalam Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C UU Perbankan sebagaimana diatur dalam UU P2SK; 3. BRI wajib menyesuaikan Peraturan Dana Pensiun BRI dimana terdapat perubahan ketentuan Manfaat Pensiun, Usia Pensiun, dan Dana Tidak Aktif terkait Dana Pensiun dalam UU P2SK;	Tidak berdampak terhadap komposisi Laporan Keuangan.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
			4. BRI agar menyesuaikan ketentuan terkait penghapusbukuan untuk kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5. Mengingat terdapat pengaturan-pengaturan yang akan diperjelas dalam peraturan turunan, maka dalam melakukan penyesuaian/ menerapkan ketentuan UU P2SK, BRI agar memerhatikan peraturan turunan UU P2SK yang akan diterbitkan regulator (dhi. OJK, BI, Kemenkeu, dan sebagainya) terlebih dahulu.	
2.	Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	Bahwa dalam upaya mewujudkan Peraturan Menteri BUMN yang sinkron dan harmonis guna mendukung pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan diperlukan terobosan hukum dengan menggabungkan beberapa Peraturan BUMN terkait ke dalam 1 (satu) Peraturan Menteri yang komprehensif. Terdapat beberapa pengaturan baru dalam Peraturan BUMN ini sebagai berikut: 1. Daftar dan Rekam Jejak Calon Anggota Direksi BUMN (Bab II). 2. Talenta Muda yang Menjadi Direksi BUMN (Bab III). 3. Single Income Direksi BUMN (Bab VI). 4. Eligibilitas Tantiem/Insentif Kinerja (Bab VII) . 5. *Long Term Incentives* (LTI) (Bab VII). 6. Konsultasi Penetapan Penghasilan (Bab VII). 7. Tunjangan Perumahan dan Fasilitas Kendaraan (Bab VII).	1. BRI agar menyesuaikan ketentuan internal terkait Human Capital khususnya penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam PER BUMN 3 di antaranya: Ketentuan Pensiun pekerja yang menjadi Direksi, Single Income Direksi, Ketentuan Tantiem dan Insentif, dan Tunjangan-Tunjangan bagi Direksi. 2. BRI agar menyesuaikan ketentuan terkait Bantuan Hukum yang diberikan kepada Direksi sebagaimana pengaturan PER BUMN 3.	Tidak berdampak terhadap komposisi Laporan Keuangan.
3	Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/ MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.	Peraturan BUMN ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian BUMN sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan yang berkaitan dengan prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Negara, penerapan manajemen risiko Badan Usaha Milik Negara, penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara, perencanaan strategis Badan Usaha Milik Negara, pedoman kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara, penyelenggaraan teknologi informasi Badan Usaha Milik Negara, dan pelaporan Badan Usaha Milik Negara.	1. BRI agar melaksanakan kewajiban-kewajiban baru yang diatur dalam PER BUMN 2 dimaksud di antaranya kewajiban-kewajiban: a. Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan kepada RUPS/Menteri. b. Laporan penyelenggaraan TI yang menjadi satu kesatuan dengan laporan tahunan kepada RUPS/Menteri c. Laporan realisasi penggunaan tambahan PMN yang ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama kepada RUPS d. Penilaian Tingkat Kesehatan BRI berdasarkan peringkat korporasi (*corporate rating*). Adapun peringkat tersebut terdiri dari (*stand alone rating*) dan (*final rating*). 2. BRI agar menyesuaikan ketentuan ketentuan internal terkait Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Pedoman Kerja Sama BUMN.	Tidak berdampak terhadap komposisi Laporan Keuangan
4.	POJK 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum	POJK Tata Kelola ini menjadi ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, termasuk memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini yang berlaku bagi seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah.	1. BRI wajib menerapkan tata Kelola yang baik paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. 2. BRI wajib menyesuaikan prinsip penerapan tata Kelola sebagaimana diatur dalam POJK 17 tahun 2023 pada Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3. BRI agar memperhatikan ketentuan-ketentuan baru terkait Penggantian, pemberhentian, dan/atau pengangkatan Direksi/Dekom sesuai POJK 17 Tahun 2023.	Tidak berdampak terhadap komposisi Laporan Keuangan.
5.	PBI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	Sehubungan dengan adanya reformasi pengaturan perlindungan yang dimuat dalam UU P2SK, dan terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti G20/OECD *High Level Principles on Financial Consumer Protection*. Untuk itu Bank Indonesia perlu menyesuaikan dan mengatur kembali mengenai aspek-aspek perlindungan konsumen yang berada dalam cakupan kewenangan Bank Indonesia, agar dapat sejalan dan mendukung penerapan UU tersebut.	BRI agar melakukan penyesuaian ketentuan internal dan ketentuan produk/layanan dengan mengacu pada PBI Pelindungan Konsumen khususnya produk-produk yang berkaitan dengan Sistem Pembayaran.	Tidak berdampak terhadap komposisi Laporan Keuangan.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
		Perlindungan konsumen sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, serta mendukung tercapainya stabilitas sektor keuangan. PBI ini mengatur di antaranya ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Prinsip Perlindungan Konsumen. 2. Penanganan Pengaduan Konsumen oleh Bank Indonesia. 3. Kegiatan Pengawasan oleh BI.		
6.	Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan	Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan menyesuaikan beberapa pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK"), diperlukan peraturan tentang program penjaminan simpanan yang dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan penjaminan simpanan secara efektif. Dalam PLPS 1 Tahun 2023 mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Pengaturan Kepesertaan 2. Pengaturan Premi Penjaminan 3. Pengaturan Penjaminan Simpanan 4. Pengaturan Penanganan Keberatan 5. Pengaturan Sanksi Administratif dan Pidana	1. BRI agar melaksanakan kewajiban-kewajiban baru yang diatur oleh PLPS Nomor 1 Tahun 2023 yaitu: a. Melakukan Penilaian Sendiri atas Kewajiban Bank b. Perubahan Ketentuan Surat Pernyataan Bank 2. BRI agar menyesuaikan perhitungan premi LPS dimana terdapat penyesuaian jenis simpanan yang dijamin oleh LPS. 3. BRI agar memastikan kewajiban pembayaran premi yang dibayarkan kepada LPS, dikarenakan terdapat kewenangan LPS untuk melakukan verifikasi premi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi periode yang bersangkutan pada tanggal 31 Januari atau tanggal 31 Juli.	Tidak berdampak terhadap komposisi Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Informasi mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian Yang Dilakukan
1.	**Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".** • Berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2023. • Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 1 "*Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies*". • Amandemen ini mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material adalah material terhadap laporan keuangan.	Perubahan kebijakan akuntansi di Tahun 2023 disebabkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai bentuk adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) efektif per tanggal 01 Januari 2023. Perubahan tersebut dilatarbelakangi praktik banyaknya informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkesan berlebihan dan cenderung hanya sebagai formalitas, serta kurang jelasnya panduan dalam menentukan perubahan perlakuan akuntansi sebagai perubahan estimasi atau kebijakan akuntansi.	Amandemen PSAK No. 1 tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak memiliki dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	Melakukan pembaharuan atas kebijakan akuntansi internal BRI sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh amandemen.
2.	**Amandemen PSAK No. 16 "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan".** • Berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2023. • Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 16 "*Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*". • Amandemen ini mengklarifikasi contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sebagai biaya perolehan aset tetap.		Amandemen PSAK No. 16 tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak memiliki dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	Melakukan pembaharuan atas kebijakan akuntansi internal BRI sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh amandemen.
3.	**Amandemen PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi".** • Berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2023. • Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 8 "*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates*". • Amandemen ini menjelaskan definisi estimasi akuntansi dan mengklarifikasi perubahan dalam estimasi akuntansi.		Amandemen PSAK No. 25 tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak memiliki dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	Melakukan pembaharuan atas kebijakan akuntansi internal BRI sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh amandemen.

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian Yang Dilakukan
4.	**Amandemen PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".** • Berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2023. • Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 12 "*Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*". • Amandemen ini menjelaskan deskripsi dan pengecualian pengakuan awal untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan.		Amandemen PSAK No. 46 tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak memiliki dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	Melakukan pembaharuan atas kebijakan akuntansi internal BRI sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh amandemen.
5.	**Amandemen PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua".** • Berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2023. • Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 12 "*Income Taxes: International Tax Reform - Pillar Two Model Rules*". • Amandemen ini mengatur pengecualian sementara atas perlakuan akuntansi pajak tangguhan terkait dengan penerapan ketentuan model perpajakan Pilar Dua beserta pengungkapannya.		Amandemen PSAK No. 46 tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak memiliki dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	Melakukan pembaharuan atas kebijakan akuntansi internal BRI sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh amandemen

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank dinilai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk – Based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan pendekatan risiko *(Risk – Based Bank Rating)* dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap 4 (empat) faktor berikut:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance (GCG)*
3. Rentabilitas *(Earnings)*
4. Permodalan *(Capital)*

Tabel Tingkat Kesehatan BRI Secara Individu (*Self Assessment*)

Faktor Penilaian	Penilaian Per Semester II 2023	Penilaian Per Semester II 2022
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko	2	2
Good Corporate Governance (GCG)	2	2
Rentabilitas	2	1
Permodalan	1	2
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	2	**2**

Peringkat Tingkat Kesehatan BRI dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) – SEHAT dengan rincian untuk masing-masing faktor penilaian yaitu Profil Risiko BRI berada pada Peringkat 2 (*Low to Moderate*), GCG berada pada Peringkat 2 (Baik), Rentabilitas berada pada Peringkat 2 (Memadai) dan Permodalan berada pada Peringkat 1 (Sangat Memadai).

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Ancaman kelangsungan usaha BRI bisa bersumber dari potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam (*natural disaster*), tindakan yang disengaja, kegagalan proses bisnis maupun disrupsi teknologi. Untuk mengantisipasi dampak dari potensi gangguan tersebut, Direksi BRI mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management*

(BCM) yang sudah diatur dalam Surat Edaran No. SE.50-DIR/MPE/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 serta Standar Operasional Prosedur No. SO.05a-ORD/05/2023 tanggal 27 Juni 2023. Tujuan kebijakan BCM antara lain untuk melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja BRI, keluarga, nasabah serta *stakeholders* sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sudah dimiliki. Selain itu BCM bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI, serta memiliki respon yang memadai dalam setiap kondisi baik itu dalam kondisi normal, kondisi krisis, fase pemulihan bencana hingga kondisi kembali normal (*new normal*). Saat ini, tantangan dari BCM selain dari ke 4 (empat) faktor di atas adalah terkait digitalisasi perbankan dan sistem keuangan yang dapat menimbulkan banyak disrupsi gangguan, salah satunya adalah serangan siber.

Selain ancaman dari potensi gangguan/bencana, terdapat pula ancaman kelangsungan usaha BRI yang bersumber dari disrupsi pasar keuangan. Untuk mengantisipasi dampak atas gangguan tersebut BRI mengembangkan dan menetapkan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*/CFP) dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan CFP memuat pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada likuiditas guna memastikan kemampuan BRI memperoleh sumber pendanaan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar. Untuk kondisi yang lebih *severe* BRI akan menerapkan *Recovery Plan* agar bank mampu kembali menjalankan bisnis dalam kondisi yang layak dan berkelanjutan.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha dan Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Dalam rangka penerapan BCM yang proaktif, maka telah dilakukan pengkinian Kebijakan BCM yang terdiri dari:

1. Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB), *Business Impact Analysis* (BIA), *Business Continuity Plan* (BCP), *Emergency Response Plan* (ERP), *Crisis Management Plan* (CMP), *Disaster Recovery Plan* (DRP), dan Sosialisasi dan Uji Coba. Untuk memastikan penerapan BCM dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), telah dilakukan uji coba BCP di Divisi Kritikal BRI, serta sosialisasi dan uji coba tanggap darurat bencana (*Emergency Response*) di kantor pusat serta seluruh *regional office* dan unit kerja supervisinya. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB)/*Risk and Threat Assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman/bencana tertinggi di unit kerja serta sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana tersebut.
2. Pengkinian terhadap kebijakan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*/CFP) dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) BRI yang meliputi aspek pengkinian *early warning indicator* dan *trigger level*, strategi pendanaan darurat dan opsi pemulihan serta strategi komunikasi penanganan krisis. Secara berkala dilakukan *monitoring* terhadap *early warning indicator* dan *trigger level*. Selain itu, untuk memastikan kesiapan organisasi BRI dalam pelaksanaan prosedur CFP, dilakukan simulasi Uji Coba *contingency funding plan* untuk memastikan kelayakan CFP.

Aspek Perpajakan

Pengungkapan Kerangka *Governance*, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank BUMN yang telah *Go Public* dan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pengelolaan perpajakan yang lebih baik, BRI menerapkan prinsip perpajakan untuk mewujudkan pengelolaan perpajakan secara efektif dan efisien, serta selalu selaras dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. Selanjutnya, Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun aturan tersebut telah menetapkan antara lain penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020, 2021, 2022, dan tahun selanjutnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/1/2024-0191 Tanggal 4 Januari 2024 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2023, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah terpenuhi untuk mendapatkan insentif penurunan tarif pajak sebesar 3% berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.2 Tahun 2020, sehingga untuk tahun 2023 BRI menggunakan tarif pajak 19% dalam perhitungan PPh Badan.

BRI melakukan pendekatan pajak yang didasari oleh kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. BRI telah membangun kebijakan dan strategi pajak yang disetujui dan

ditinjau setiap tahun oleh Direktur Keuangan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Dalam pengelolaan pelaksanaan perpajakan, BRI telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Badan tata kelola (eksekutif) yang bertanggung jawab untuk menerapkan strategi pajak adalah Direktur Keuangan.
2. BRI telah memiliki pedoman perpajakan internal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dalam Surat Edaran Ketentuan Perpajakan BRI dan Standar Operasional Prosedur Perpajakan BRI yang dipergunakan dan menjadi standar bagi seluruh Unit Kerja BRI.
3. BRI melakukan identifikasi, mengelola, dan memonitor atas kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui *monitoring* dan rekonsiliasi berkesinambungan yang dilakukan oleh *Financial and Management Accounting Division* dan unit kerja terkait.
4. BRI mengungkapkan informasi pajak secara transparan mengikuti pedoman pelaporan untuk pemegang saham dan masyarakat publik.

Pemangku kepentingan yang terpenting dalam hal perpajakan adalah pemerintah melalui kantor pajak. Untuk itu, BRI senantiasa membina hubungan baik dengan otoritas perpajakan, namun tanpa terlibat dalam advokasi kebijakan publik terkait perpajakan, maupun upaya-upaya lain untuk mempengaruhi otoritas perpajakan. BRI menerapkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan. BRI hanya beroperasi di Indonesia dengan beberapa cabang di luar negeri, sehingga laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia.

Tabel Pembayaran Pajak

(*Bank Only*, dalam jutaan Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
PPh Pasal 21	**2.680.437**	2.536.394
PPh Pasal 22	**63.313**	55.064
PPh Pasal 23	**157.296**	152.727
PPh Pasal 26	**2.978.403**	1.932.182
PPh Final pasal 4 ayat (2)	**5.097.270**	3.045.296
PPN dan PPnBM	**232.240**	252.698
Bea Materai	**84.178**	23.237
Sub Jumlah Pajak Potput	**11.293.137**	7.997.599
PPh Badan (*Corporate Tax*)	**10.817.648**	12.135.836

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan BI (BI-*Rate*) sebesar 50 bps dari 5,50% pada Desember 2022 menjadi 6,00% pada Desember 2023. Kebijakan moneter BI konsisten dan fokus pada stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan menjaga inflasi tetap terkendali sesuai target sasaran 2,5±1% pada tahun 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, BI terus melakukan penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi *spot, Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
2. Penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market* untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
3. Penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus suku bunga kredit per sektor ekonomi.
4. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara untuk meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD), melalui:
   a. Perluasan implementasi QRIS dengan:
      - Menetapkan target penggunaan QRIS sebesar 55 juta pengguna di tahun 2024.
      - Menetapkan target volume transaksi QRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi pada tahun 2024.
      - Memperkuat strategi implementasi QRIS antarnegara untuk percepatan akseptasi transaksi.

b. Penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur *online payment*, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan *monitoring* yang lebih intensif.

5. Perluasan kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS antarnegara dan *Local Currency Transactions* (LCT), serta fasilitasi promosi investasi perdagangan dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Selain beberapa langkah tersebut, BI juga meningkatkan koordinasi kebijakannya dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, BI juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara BI dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas.

Berbagai langkah kebijakan yang dilakukan oleh BI sepanjang tahun 2023 telah berdampak positif terhadap perbankan nasional. Secara umum, intermediasi perbankan masih cukup baik, meskipun relatif melambat dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Pertumbuhan kredit pada Desember 2023 tercatat sebesar 10,4% yoy, relatif lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar 11,4% yoy. Sementara itu, likuiditas industri perbankan semakin terbatas dan cenderung mengetat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat ke 3,8% yoy pada tahun 2023, menurun cukup signifikan dari tahun 2022 sebesar 9,0% yoy.

Sementara itu dari sisi resiliensi, ketahanan perbankan tetap terjaga dengan baik, hal ini tercermin dari permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% pada November 2023. Risiko kredit juga tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang rendah sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto) pada Desember 2023. Hasil *stress-test* BI menunjukkan bahwa ketahanan perbankan nasional tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sebagai respon atas kenaikan suku bunga acuan BI dan juga kebijakan moneter oleh The FED, BRI secara selektif turut melakukan penyesuaian suku bunga dana maupun suku bunga kredit (khususnya Kredit Jangka Pendek). Namun untuk Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), per Desember 2023, SBDK BRI belum mengalami perubahan dengan detail sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

(dalam %)

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non-KPR
Desember 2023	8,00%	8,25%	14,00%	7,25%	8,75%

Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRI telah menetapkan kebijakan yang mencakup batasan dalam pemberian dana kepada pihak terkait sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan POJK No. 38 /POJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.03/2018 Tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*Tier* 1) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK dan Penyedia Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BRI telah memiliki kebijakan terkait Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atau Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.36-DIR/KRD/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta perubahannya.

Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk ke dalam penyediaan kepada Pihak Terkait, dan hal ini wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit BRI. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur BRI pada umumnya dan diberikan sesuai bunga pasar (*market rate*) dan wajar (*arm length basis*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Mekanisme Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

1. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank diajukan secara mandiri atau kolektif melalui Divisi Operasional Kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Pemberian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib di *review* terlebih dahulu oleh Komite Independen BRI sebelum dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
3. Pemberian Penyediaan Dana (khusus kredit) kepada Direksi dan Dewan Komisaris harus dilakukan secara adil dan wajar (*equal treatment*).

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Ketentuan tentang pengaturan limit BMPK adalah Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Ketentuan pihak lainnya yang diatur adalah:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah (aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dan/ atau telah dilakukan restrukturisasi) dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
   a. Pelunasan kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas penyediaan dana; dan/atau
   b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
   a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
   b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
   c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3.

Pihak terkait meliputi:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank.
2. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali.
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana pada poin 1 bertindak sebagai pengendali.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank.
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertical:
   i. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam poin 1; dan
   ii. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam poin 4;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/atau 3.
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank.
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3. Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9. Perusahaan yang:
   a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali; dan
   b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/ atau 3 bertindak sebagai pengendali.
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-9 memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut.
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1- 9 di atas.
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11.
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11.
14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11 kepada bank lain tersebut.

15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada:
   a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
   b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait
2. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*Tier* 1) Bank.
3. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan.
4. Penggolongan kelompok Peminjam dengan kriteria:
   a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
   a. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
   b. 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
   c. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
   d. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
5. Penggolongan Kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
   a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
   b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau pemerintah negara lain.
   c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan.
   d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma.
   e. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota.

Penyediaan Dana

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*.

1. Jenis- Jenis Penyediaan Dana yaitu:
   a. Penempatan;
   b. Transaksi derivatif;
   c. Surat berharga;
   d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);
   e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
   f. Tagihan akseptasi;
   g. Kredit;
   h. Penyertaan modal;
   i. Penyertaan modal sementara;
   j. Transaksi rekening administratif; dan
   k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
2. Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
3. Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyediaan Dana untuk:
   a. Pengadaan pangan;
   b. Pengadaan rumah sangat sederhana;
   c. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lain yang setara;
   d. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air;
   e. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik;
   f. Pengadaan dan/atau pengelolaan komoditas yang berorientasi ekspor;
   g. Pengadaan instruktur penunjang transportasi darat, laut dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau
   h. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) yang ditetapkan dan diprioritaskan pemerintah pusat.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK)

BRI wajib menerapkan teknik MRK yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal BRI mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Pengecualian Dari Perhitungan BMPK

Penempatan pada setiap *Prime* Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK dengan ketentuan:

1. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime* Bank.
2. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat.
3. Penempatan pada Bank Indonesia.
4. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
5. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Pusat dengan syarat tertentu.
6. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan dan Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

7. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu.
8. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal.

Pelampauan BMPK

Kondisi Pelampauan

Penyediaan Dana oleh BRI dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:
1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*Tier* 1)
2. Perubahan nilai tukar
3. Perubahan nilai wajar
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam;
5. Perubahan ketentuan (mengenai perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam).

Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana. Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

Selama tahun 2023, BRI tidak pernah melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Dalam hal Bank melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK, BRI wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK beserta target waktu penyelesaian.

Tabel Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

BMPK	Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Tidak Terkait (Kelompok Peminjam)	BUMN
Pelanggaran BMPK	-	-	-	-
Pelampauan BMPK	-	-	-	-

Pelaporan

Pelaporan Eksternal

BRI menyampaikan laporan Penyediaan Dana, Penyediaan Dana Besar, Pengecualian Penyediaan Dana Besar, Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK, secara individu dan secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.

Pelaporan Internal

Secara internal, BRI menyusun pelaporan BMPK yang melibatkan unit kerja terkait dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Sebagai dasar penentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*), Divisi FMA menyediakan data Modal BRI posisi terakhir kepada Divisi yang membidangi portofolio kredit.
2. Divisi Bisnis Kantor Pusat, Kanca, UKLN, Divisi/*Desk* yang membidangi Perusahaan Anak, dan unit kerja terkait melaporkan data yang diperlukan untuk pelaporan sesuai fungsinya masing-masing kepada Divisi yang membidangi portofolio kredit.
3. Divisi yang membidangi portofolio kredit melakukan konsolidasi dan membuat laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dan menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

BMPK Internal BRI

1. Sebagai bentuk penerapan kehati-hatian dan *risk appetite*, BRI menetapkan besaran BMPK internal maksimum sebesar 85% dari BMPK yang ditentukan oleh OJK per obligor.
2. Penyaluran dana pinjaman BRI difokuskan kepada segmen UMKM.

Transaksi Kepada Pihak Terkait

Pada tahun 2023, transaksi kepada pihak terkait (*related party transaction*) telah dilakukan secara adil, berlaku umum (*normal commercial terms*), wajar (*arm length basis*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan Dana	2023		2022	
	Debitur	Nominal (dalam jutaan Rupiah)	Debitur	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1. Kepada Pihak Terkait	**643**	**16.238.267**	645	13.306.100
2. Kepada Debitur Inti				
a. Individu	**50**	**130.408.842**	50	116.111.068
b. Grup	**50**	**178.925.740**	50	157.962.208

Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif

Transaksi *spot* dan transaksi derivatif mengacu pada sistem manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik. Seluruh transaksi derivatif yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan BRI maupun nasabah. Transaksi spot dan derivatif yang dilakukan BRI sebagian besar merupakan aktivitas lindung nilai atas posisi dari nasabah yang bertujuan untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Dalam hal ini, fokus BRI dalam transaksi derivatif bukan untuk tujuan perdagangan.

Sepanjang tahun 2023, BRI melakukan transaksi *spot* dan transaksi derivatif dalam bentuk *swap* mata uang dan suku bunga, *swap* suku bunga, *option*, pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing, *swap* mata uang asing, pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing. Secara rinci transaksi *spot* dan derivatif yang dilakukan BRI (Konsolidasian) termuat dalam tabel berikut.

Tabel Transaksi *Spot* dan Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

Transaksi	Tagihan Derivatif		Liabilitas Derivatif	
	2023	2022	2023	2022
Swap mata uang asing	**223.308**	194.939	**403.003**	118.076
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	**284.050**	153.074	**108.496**	134.666
Swap suku bunga	**381.607**	548.024	**369.374**	510.221
Swap mata uang dan suku bunga	**18.045**	-	**37.444**	-
Pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing	**4.673**	15.368	**6.893**	20.958
Total	**911.683**	911.405	**925.210**	783.921

Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi. Sesuai ketentuan pada Pasal 110 PER-2/MBU/03/2023:

(1) Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk:
   a. Memperbaiki struktur permodalan BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
   b. Meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau Perseroan Terbatas.

(2) Tambahan PMN kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka:
   a. Melaksanakan penugasan Pemerintah kepada BUMN;
   b. Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
   c. Melakukan pengembangan usaha BUMN

Pada tahun 2023, BRI tidak memperoleh tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga tidak terdapat informasi Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara.

Tinjauan Fungsi **Pendukung Bisnis**



Sepanjang 2023, BRI telah melakukan beberapa inisiatif dan internalisasi budaya kerja melalui pengembangan yang sesuai dengan *framework* BRI One Culture. BRI One Culture bertujuan membentuk performance driven culture (budaya perusahaan berbasis kinerja) untuk mendorong produktivitas yang berdampak terhadap kinerja bisnis yang optimal.


Qlola
BRI
mo



Sumber Daya Manusia

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT *HUMAN CAPITAL*

Sepanjang tahun 2023, *Human Capital* BRI memiliki tema strategis menjadi "*Strong Employee CAPABILITY to Boost Business Productivity in CASA & Retail Banking*", tema tersebut selaras dengan tema tahunan BRI yaitu "Memperkuat kapabilitas *Retail Banking*". Implementasi dari tema tersebut diwujudkan dalam Fokus Utama Human Capital BRI 2023 yaitu Kapabilitas, Produktivitas, Sinergi BRI Group serta Implementasi *Environmental, Social and Governance* (ESG) dan *People Analytics.*

Untuk mewujudkan fokus utama tersebut, beberapa inisiatif telah dilaksanakan, antara lain:

- Kapabilitas
  Penyempurnaan *resourcing strategy*, rejuvinasi tenaga pemasar, peningkatan kapabilitas melalui berbagai Pendidikan yang terfokus, *review* dan penyempurnaan kebijakan karir dan *corporate title*.
- Produktivitas
  Program pembekalan/*onboarding* Pinca Metropolitan, *performance bootcamp* untuk mengelola pekerja dengan kinerja kurang baik, penyempurnaan struktur upah dan program pemberian saham kepada pekerja.
- Sinergi BRI Group
  Pelaksanaan *assessment* terhadap maturitas *human capital* di BRI Group, penyusunan *roadmap* program kerja pengelolaan *human capital* di BRI Group serta Kebijakan Umum HC BRI Group (Human Capital General Policy).
- ESG, Sistem dan *People Analytics*
  Deklarasi *Respectful Workplace Policy* (RWP) sebagai bentuk dukungan *human capital* terhadap ESG, penyempurnaan aplikasi *human capital* (BRILiaN Apps & BRiSMART-Verse) serta mengoptimalkan *people analytics* sebagai kajian untuk pengambilan keputusan.

Melalui berbagai fokus dimaksud, hasil *employee engagement* Pekerja BRI meningkat, semula 3,48 dari skala 4 di tahun 2022 menjadi 3,49 di tahun 2023, serta penurunan *turn over rate* pekerja yang semula 1,49% di tahun 2022 menjadi 1,28% di tahun 2023.

Human Capital BRI berkomitmen untuk terus bertransformasi dengan selalu menyelaraskan strategi *human capital* dengan perkembangan bisnis Perusahaan serta terus berupaya untuk menyediakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi untuk mempertahankan produktivitas selama pekerja bekerja.

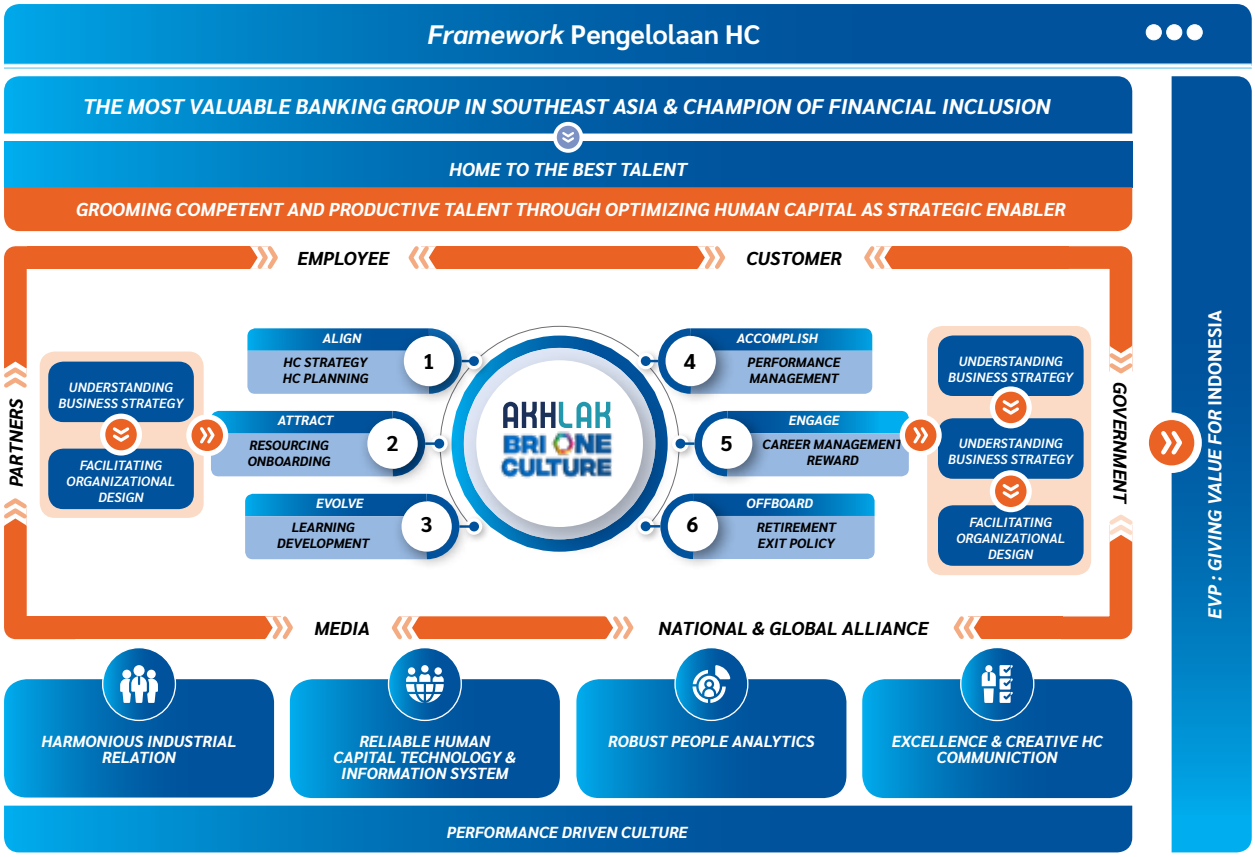
Framework Pengelolaan *Human Capital*

Dalam rangka mewujudkan aspirasi BRI menjadi *The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion*, BRI telah menyusun strategi pengelolaan HC yang selaras dengan strategi korporasi. Di tahun 2023, BRI menyusun kembali *framework* pengelolaan *human capital* yang menjadi landasan bagi pengelolaan *human capital* di masing-masing Perusahaan di BRI Group. Dengan visi "*Home To The Best Talent*", misi pengelolaan *human capital* di BRI Group adalah "Menyiapkan talenta yang kompeten dan produktif dengan mengoptimalisasi fungsi *human capital* sebagai *strategic enabler*".

Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan *human capital* (*human capital lifecycle*) diawali dengan input berupa pemahaman terhadap strategi bisnis Perusahaan baik strategi jangka pendek maupun jangka panjang dan design organisasi yang akan menjadi panduan panduan dalam menyusun dan mengimplementasikan *people process*. *Design* organisasi merupakan salah satu turunan implementasi strategi bisnis Perusahaan yang memberikan informasi mengenai struktur organisasi dan komponen turunannya (deskripsi dan uraian jabatan, kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan atribut lainnya dalam menjalankan jabatan).

People process terdiri dari 6 (enam) tahapan rangkaian pengelolaan *human capital*, yaitu ***align*** (menyelaraskan strategi *human capital* dengan strategi Perusahaan) berupa HC *Strategy* dan HC *Planning*. *Attract* adalah proses menarik kandidat tenaga kerja, berupa *resourcing* dan *onboarding*. ***Evolve*** adalah proses untuk mengembangkan tenaga kerja, berupa *development* dan *learning*. ***Accomplish*** adalah tahapan untuk menyempurnakan proses kerja tenaga kerja, berupa *performance management*. ***Engaged*** adalah proses mengikat tenaga kerja, berupa *reward* dan *career management*. ***Offboard*** yaitu mempersiapkan tenaga kerja untuk keluar dari Perusahaan. Setiap aspek implementasi *people process* harus berpedoman pada nilai-nilai AKHLAK BUMN dan BRI One Culture.

Output utama pengelolaan *human capital* yaitu *employee engagement, employee wellbeing* dan *employee productivity*. Keseluruhan proses pengelolaan *human capital* dimaksud ditopang oleh aturan ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang jelas, sistem HCIS yang memadai, hasil analisa *people analytics* yang sesuai kebutuhan dan dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan, komunikasi *human capital* yang kreatif dan handal serta berupa *Performance Driven Culture*. Keseluruhan pilar dan pondasi dalam pengelolaan HC tersebut diintegrasikan dalam ekosistem untuk menciptakan *employee value proposition* "Memberi Makna Indonesia".



Pada tahun 2023, selaras dengan tema tahunan Perseroan "Memperkuat kapabilitas *Retail Banking*", tema strategis *human capital* BRI adalah "*Strong Employee CAPABILITY to Boost Business Productivity in CASA & Retail Banking*". Untuk mewujudkan hal tersebut, fokus utama *human capital* adalah pada Kapabilitas, Produktivitas, Sinergi BRI Group serta Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *People Analytics*.

Di sisi kapabilitas, BRI berupaya mendukung pencapaian strategi *retail* Perusahaan melalui beberapa inisiatif dan program kerja antara lain penyempurnaan *resourcing strategy*, mewujudkan rejuvinasi tenaga pemasar di antara melalui Brilian Marketing Specialist Program, peningkatan kapabilitas melalui berbagai Pendidikan seperti *sales, service, product manager*, dan lainnya. Di samping itu, *human capital* BRI selalui berupaya melakukan *review* dan penyempurnaan kebijakan berupa penyesuaian *corporate title* dan kebijakan karir.

Program yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk peningkatan produktivitas terutama jajaran *retail banking* antara lain *onboarding* Pinca Metropolitan, yaitu program berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu untuk mengawal dan memastikan terdapat pemahaman ekspektasi terhadap perubahan tanggung jawab sehingga terdapat perubahan *mindset* dalam bekerja. Program lainnya adalah *performance bootcamp* yaitu program khusus untuk mengelola pekerja dengan kinerja kurang baik. Beberapa program lainnya adalah penyempurnaan struktur upah dan program pemberian saham.

Tahun 2023 juga telah dilakukan Deklarasi *Respectful Workplace Policy* (RWP) sebagai bentuk dukungan *human capital* terhadap ESG. Di samping itu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi *human capital* serta semakin mengoptimalkan *people analytics* untuk kajian pengambilan keputusan.

Dalam rangka mendukung strategi Perusahaan untuk mengoptimalkan Perusahaan Anak, *human capital* BRI melakukan *assessment* terhadap maturitas *human capital* di BRI Group serta menyusun *roadmap* program kerja pengelolaan *human capital* di BRI Group. Hasil tersebut akan digunakan sebagai panduan inisiatif dan program kerja *human capital* di masing-masing Perusahaan Anak untuk menuju pengelolaan *human capital* yang lebih baik.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Rekrutmen

Kebijakan

Perusahaan memerlukan talenta unggul dalam rangka mendukung kesuksesan eksekusi transformasi. Seluruh perusahaan dari berbagai industri senantiasa berinovasi pada era transformasi kini, dan di saat ini pula BRI tengah memasuki era *talent war* dalam rangka menjaring talenta terbaik yang terampil dan kompeten. *Talent war* menciptakan suatu keadaan di mana semua perusahaan memperebutkan talenta-talenta terbaik sebagai aset tak ternilai, yang secara empiris dapat menentukan keberhasilan perusahaan. Secara *head-to-head*, BRI melakukan berbagai Upaya dalam merekrut kandidat berkualitas, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang memiliki talenta dan *skill* yang mumpuni.

Persaingan secara global semakin ketat, yang didukung pula dengan fenomena kelangkaan talenta (*talent scarcity*) sehingga tidak mudah bagi perusahaan untuk mencari kandidat yang memiliki keahlian tertentu dengan spesifikasi khusus sesuai kriteria, tujuan, dan harapan perusahaan. Menjawab hal tersebut, BRI telah mempersiapkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan agar BRI tetap menjadi perusahaan dengan sumber daya manusia yang unggul, serta dapat menjadi *Home to The Best Talent*, di antaranya:

- ***Finding Right Size & Competency***
  Menemukan talenta dan kompetensi yang tepat di saat yang tepat dilakukan melalui proses *review workforce planning* untuk mengantisipasi kebutuhan SDM yang berkesinambungan. Era saat ini menuntut perusahaan untuk dapat menumbuhkan kompetensi-kompetensi baru bagi SDM sehingga diperlukan adanya *re-skilling* dan *up-skilling* bagi para Pekerja.
- ***Talent Attraction***
  BRI merangkul generasi muda dalam upaya mencari *talent* terbaik bagi perusahaan, dengan berbagai program *engagement* dan rekrutmen.
- ***Talent Management***
  Mengidentifikasi jenjang karir secara terukur dengan mengkategorikan Pekerja berdasarkan kinerja/*performance* dan *review* sesuai *talent pool*, kemudian memastikan proses persiapan *successor planning* agar dapat berjalan sesuai tujuan dan terarah.
- ***Building Culture System***
  Menjadikan BRI One Culture dan AKHLAK sebagai *core values* yang diterapkan dengan baik sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan.

- ***Establishing Agile & Digital Organization***
  Sistem kerja dan organisasi yang lebih *agile* dapat menciptakan *environment* yang lebih baik dan efisien terutama saat bekerja sama dengan tim terkait lainnya.

BRI mengutamakan proses penjaringan talenta unggul yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa depan, yaitu:

- ***Creativity & Innovation***
  Talenta kreatif dan inovatif untuk membangun *teamwork* yang lebih baik, berpikir *out-of-the-box* dengan sejumlah terobosan ide dan solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- ***Data Driven***
  Talenta yang memiliki kecerdasan bisnis berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
- ***Adaptability***
  Fleksibilitas talenta yang memiliki kemampuan beradaptasi pada perubahan dan lingkungan.
- ***Visionary Leadership***
  Talenta yang visioner dan mampu memprediksi tren masa yang akan datang, serta berani mengambil risiko yang terukur.
- ***Managing Diversity***
  Talenta yang mampu mengelola dan memaksimalkan berbagai keragaman untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global.
- ***Digital Literacy***
  Kemampuan talenta untuk bekerja dengan memaksimalkan potensi menggunakan teknologi *digital*.
- ***Achievement Orientation***
  Semangat talenta untuk terus berorientasi dalam mencapai prestasi terbaik dan konsisten dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjaring talenta BRILiaN yang unggul di tengah *talent war* saat ini, BRI secara konsisten melakukan inovasi untuk meningkatkan daya tarik secara lebih kreatif melalui berbagai sumber (*Multi Source*) dan berbagai jalur (*Multi Channel*).

A. *Multi Source*

1. Regular
   i. *National Recruitment*
   Rekrutmen yang dilakukan oleh Head Office BRI untuk memenuhi kebutuhan calon pimpinan di seluruh unit kerja baik di dalam maupun luar negeri. (ex. BRILiaN Future Leader Program).
   ii. *Regional Recruitment*
   Rekrutmen yang dilakukan di Regional Office, Regional Audit Office, Head Office BRI, Kantor Wilayah dan Kantor Audit Internal serta Kantor Pusat) untuk memenuhi kebutuhan Pekerja pada jabatan atau fungsi tertentu.
2. *Talent Scouting*
   i. BRILiaN Scholarship Program (BSP)
   Early recruitment program melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa S1 yang berprestasi dan ditujukan untuk mendapatkan kandidat pekerja potensial sejak dini yang dapat dimonitor performanya sejak masa kuliah dan setelah lulus akan langsung bergabung ke dalam BRILiaN Future Leader Program (BFLP).
   ii. BRILiaN Creativity Contest (BCCP)
   Perekrutan calon Pekerja yang didapat dari hasil kontes kreativitas. Penilaian tidak hanya berdasarkan nilai akademis namun juga mengedepankan inovasi.
   iii. BRILiaN Get Talent Program (BGTP)
   Pencarian talenta berprestasi sebagai kandidat *future leader* yang direkomendasikan oleh pemimpin unit kerja BRI. Talenta yang direkomendasikan memiliki prestasi yang membanggakan, baik dari segi profesionalisme, olahraga, seni, atau ajang kompetesi lainnya.

B. *Multi Channel*

Selain sumber pencarian *talent* yang beragam (*Multi Source*), BRI menyiapkan jalur masuk yang juga beragam (*Multi Channel*) melalui 5 (lima) jalur masuk, yaitu:

1. BRILiaN Future Leader Program (BFLP)
   Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat potensial serta memberikan pendidikan sebagai bekal menjadi calon pemimpin di masa depan dari sumber eksternal.
2. BRILiaN Next Leader Program (BNLP)
   Program rekrutmen dan pendidikan bagi Pekerja Internal BRI yang memiliki potensi besar menjadi pemimpin perusahaan di masa depan.
3. BRILiaN Banking Officer Program (BBOP)
   Program rekrutmen dan pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dengan *level corporate title Assisten* baik bersumber dari eksternal dan internal yang bertujuan untuk mendukung kinerja perusahaan sesuai standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
4. BRILiaN Marketing Specialist Program (BMSP)
   Program rekrutmen sekaligus pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja di jabatan pemasar pada level *Corporate Band 6* atau *officer*, agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
5. Rekrutmen Bersama BUMN (RBB)
   Rekrutmen yang diinisiasi oleh Kementrian BUMN dan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun dimulai dari tahun 2022.

Pelaksanaan Rekrutmen

Pada tahun 2023, BRI telah melaksanakan rekrutmen sebagai berikut:

a. BRILiaN Scholarship Program (BSP) sebanyak 20 kandidat dan BSP IT sebanyak 38 kandidat.
b. BRILiaN Creativity Contest (BCCP) dengan melaksanakan BRILIaN Youth Competition sebanyak 30 peserta dan terdapat 9 kandidat yang direkomendasikan pada program rekrutmen BFLP.
c. BRILiaN Future Leader Program (BFLP) dengan rincian BFLP General sebanyak 269 kandidat dan BFLP IT sebanyak 248 kandidat.
d. BRILiaN Next Leader Program (BNLP) sebanyak 72 kandidat pekerja internal.
e. BRILiaN Banking Officer Program (BBOP) sebanyak 3 batch dengan jumlah 3.160 kandidat. Adapun pada jabatan Junior Associate Mantri yang diterima sebanyak 2.086 kandidat, 751 kandidat pada jabatan RM Dana & Transaksi, 53 kandidat pada jabatan RM Konsumer Lending KPP/KPR, 92 kandidat pada jabatan RM Konsumer Lending Briguna, 11 kandidat pada jabatan Priority Banking Assistant, 100 kandidat pada jabatan Petugas Operasional Kredit, dan 67 kandidat pada jabatan Petugas IT.
f. Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) sudah melakukan rekrument sebanyak 37 kandidat.

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Pengembangan kompetensi pekerja menjadi hal prioritas utama bagi Perseroan. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui berbagai macam program, termasuk pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi yang dapat dilakukan secara luring maupun daring melalui digital learning platform (BRISMART). Pada tahun 2023, telah diselenggarakan program pendidikan yang terdiri dari kelas offline dan kelas online. BRI berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi seluruh pekerjanya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pekerja untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan tanpa memandang level jabatan, pendidikan, maupun gender dari Pekerja.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2023

Jabatan	Jumlah Pekerja	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
Senior Executive Vice President	**7**	**6**	**86%**	
BSDP 1,2,3		6		100%
E-Learning		1		17%
Public Course DN		1		17%
Public Course LN		6		100%
SER		5		83%
SOS		1		17%
SRQ		1		17%
Executive Vice President	30	30	**100%**	
BLRP		4		13%
BSDP 1,2,3		29		97%
COP		2		7%
E-Learning		12		40%
FPK&FGD		2		7%
Public Course DN		3		10%
Public Course LN		26		87%
SER		8		27%
SOS		6		20%
SRQ		9		30%

Jabatan	Jumlah Pekerja	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
Senior Vice President	77	77	**100%**	
BBSP		1		1%
BLRP		4		5%
BSDP 0/BBOP		13		17%
BSDP 1,2,3		71		92%
COP		16		21%
E-Learning		46		60%
FPK&FGD		3		4%
Public Course DN		11		14%
Public Course LN		54		70%
SER		22		29%
Sespi		2		3%
SOS		15		19%
SRQ		35		45%
Vice President	193	193	**100%**	
BLDP		2		1%
BLRP		5		3%
BSDP 0/BBOP		16		8%
BSDP 1,2,3		167		87%
COP		55		28%
E-Learning		129		67%
FPK&FGD		14		7%
Public Course DN		18		9%
Public Course LN		23		12%
SER		24		12%
Sespi		2		1%
SOS		37		19%
SRQ		83		43%
Assistant Vice President	600	600	**100%**	
BBSP		5		1%
BLDP		76		13%
BLRP		10		2%
BSDP 0/BBOP		53		9%
BSDP 1,2,3		576		96%
COP		193		32%
E-Learning		484		81%
FPK&FGD		92		15%
Public Course DN		36		6%
Public Course LN		27		5%
SER		50		8%
SOS		159		27%
SRQ		253		42%
Senior Manager	776	776	**100%**	

Jabatan	Jumlah Pekerja	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
BBSP		4		1%
BLDP		100		13%
BLRP		7		1%
BSDP 0/BBOP		54		7%
BSDP 1,2,3		740		95%
COP		223		29%
E-Learning		674		87%
FPK&FGD		70		9%
Public Course DN		33		4%
Public Course LN		9		1%
SER		33		4%
SOS		189		24%
SRQ		300		39%
Manager	2.759	2.759	**100%**	
BBSP		9		0%
BCEP		33		1%
BLDP		139		5%
BLRP		71		3%
BSDP 0/BBOP		115		4%
BSDP 1,2,3		2.612		95%
COP		1.063		39%
E-Learning		2.351		85%
FPK&FGD		307		11%
Public Course DN		97		4%
Public Course LN		25		1%
SER		311		11%
SOS		646		23%
SRQ		892		32%
Assistant Manager	4.366	4.366	**100%**	
BCEP		358		8%
BFLP		2		0%
BLDP		437		10%
BLRP		111		3%
BSDP 0/BBOP		298		7%
BSDP 1,2,3		4.149		95%
COP		2.616		60%
E-Learning		4.082		93%
FPK&FGD		890		20%
Public Course DN		34		1%
Public Course LN		3		0%
SER		1.512		35%
SOS		1.070		25%
SRQ		2.355		54%

Jabatan	Jumlah Pekerja	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
Officer	14.496	14.496	**100%**	
BFLP		715		5%
BNLP		44		0%
BLDP		995		7%
BLRP		188		1%
BSDP 0/BBOP		152		1%
BSDP 1,2,3		13.684		94%
COP		5.659		39%
E-Learning		13.625		94%
FPK&FGD		3.065		21%
Public Course DN		22		0%
Public Course LN		1		0%
SER		4.068		28%
SOS		4.036		28%
SRQ		6.039		42%
Assistant	72.162	72.162	**100%**	
BCEP		2		0%
BFLP		28		0%
BNLP		27		0%
BLDP		2		0%
BLRP		75		0%
BSDP 0/BBOP		8.702		12%
BSDP 1,2,3		64.332		89%
COP		12.818		18%
E-Learning		66.325		92%
FPK&FGD		16.678		23%
Public Course DN		30		0%
SER		6.621		9%
SOS		23.431		32%
SRQ		7.600		11%

Jenis Pengembangan Kompetensi		Tujuan Pelatihan
BCEP	**BRILian Career Enhancement Program**	Program pendidikan dalam rangka mendukung percepatan karir Pekerja.
BFLP	**BRILian Future Leader Program**	Program pendidikan untuk mempersiapkan talenta baru menjadi *leader* dalam menghadapi tantangan bisnis disaat ini dan masa mendatang.
BNLP	**BRILian Next Leader Program**	Program pendidikan untuk pengembangan karir Pekerja Tetap terbaik BRI untuk menjadi kandidat pemimpin masa depan BRI dalam menghadapi tantangan bisnis disaat ini dan masa mendatang.
BLDP	**BRILian Leadership Development Program**	Program *Human Capital Development* BRI untuk mempersiapkan Pekerja mejadi *Great Leader* melalui pengembangan *leadership* yang berkelanjutan dan komprehensif yang memberikan penekanan pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan bisnis/perbankan, serta wawasan teknologi.
BLRP	**BRILian Leader Retirement Program**	Program *Human Capital Development* BRI untuk mempersiapkan Pekerja sebelum memasuki masa pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun.

Jenis Pengembangan Kompetensi		Tujuan Pelatihan
BSDP 0	BRILian Specialist Development Program	Program pengembangan kompetensi teknis (*Technical Competency*) untuk *onboarding* yang komprehensif memberikan penekanan pada pengetahuan dan ketrampilan spesifik sesuai kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
BSDP 1,2,3	BRILian Specialist Development Program	Program pengembangan kompetensi teknis (*Technical Competency*) yang berkelanjutan dan komprehensif yang memberikan penekanan pada pengetahuan dan ketrampilan spesifik sesuai kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
BBOP	BRILian Banking Officer Program	Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di pasisi *Marketing, Frontliner* dan Administrasi (tetap, kontrak dan *outsource*) agar dapat bekerja sesuai dengan standar operasional yang berlaku di BRI.
COP	Community of Practice	Komunitas yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan aktivitas distribusi dan penggunaan aset pengetahuan
E-Learning		Metode pendidikan dengan mengoptimalkan penggunaan internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi, ujian, interaksi antara pengajar dan peserta pendidikan, interaksi sesama peserta pendidikan dan lain-lain.
FPK&FGD		Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.
Public Course DN	Public Course Dalam Negeri	Program pendidikan yang bukan diprakarsai oleh internal BRI dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja dan dilaksanakan dalam negeri.
SER	Pendidikan Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat mandatory sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan Perusahaan.
SOS	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan/atau informasi penting terkait perkembangan bisnis perusahaan melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.
SRQ	In House Training (IHT)/ Special Request	Program Pendidikan khusus yang diselenggarakan atas permintaan unit kerja dengan persetujuan dari BRI Corporate University.

Dalam melakukan evaluasi efektivitas pengembangan kompetensi, BRI Corporate University menggunakan beberapa aspek penilaian, di antaranya:

1. Evaluasi Dampak Bisnis
   - Penilaian pelaksanaan program pendidikan terhadap *performance* peserta dan organisasi terkait dengan produktivitas, profitabilitas, *employee engagement*, *contribution margin*, dan lain-lain.
   - Pada tahun 2023, hasil evaluasi untuk 15 Jabatan di tahun 2023 adalah "Berdampak Positif" terhadap bisnis. (eva 4)
2. Evaluasi Efektivitas
   - Penilaian pelaksanaan program pendidikan berdasarkan reaksi, kepuasan, dan tingkat penguasaan materi peserta pendidikan terhadap kualitas materi atau konten, kualitas pengajar, metode pembelajaran dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pendidikan.
   - Hasil evaluasi efektivitas tahun 2023 adalah sebagai berikut:
     - Pengukuran peningkatan *knowledge* dan *skill* dilakukan setelah penyelenggaraan pendidikan dengan hasil rata-rata evaluasi adalah sebesar 97,5. (eva 1 - 3).
     - Pengukuran evaluasi peserta meliputi aspek materi, akomodasi, *subject matter expert* (SME) dan fasilitator dengan nilai evaluasi sebesar 97,7. (eva 1- 2).
3. Evaluasi Efisiensi
   - Penilaian terhadap efisiensi pelaksanaan program pendidikan yang berdasarkan pada jumlah penyelesaian program pendidikan oleh peserta, biaya per peserta pendidikan, jumlah program pendidikan yang tersedia dan lain lain.
   - Persentase jumlah pekerja yang telah menyelesaikan pendidikannya:
     - In class dan atau E-learning: 100% dari total pekerja BRI yang sebanyak 77.739 pekerja.
     - In Class: 96,1% dari total pekerja BRI yang sebanyak 77.739 pekerja.

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan biaya secara signifikan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan sebagian besar sudah dilaksanakan secara *offline* termasuk pendidikan luar negeri. Selain itu, terdapat pelaksanaan rekrutmen pekerja *new entry* (BFLP) sehingga secara *massive* melaksanakan program pendidikan.

Realiasi Anggaran BRI Corporate University 2021-2023

(Dalam Miliar Rupiah)

2023	2022	2021
309	699	992

Pengembangan Karir

Kebijakan

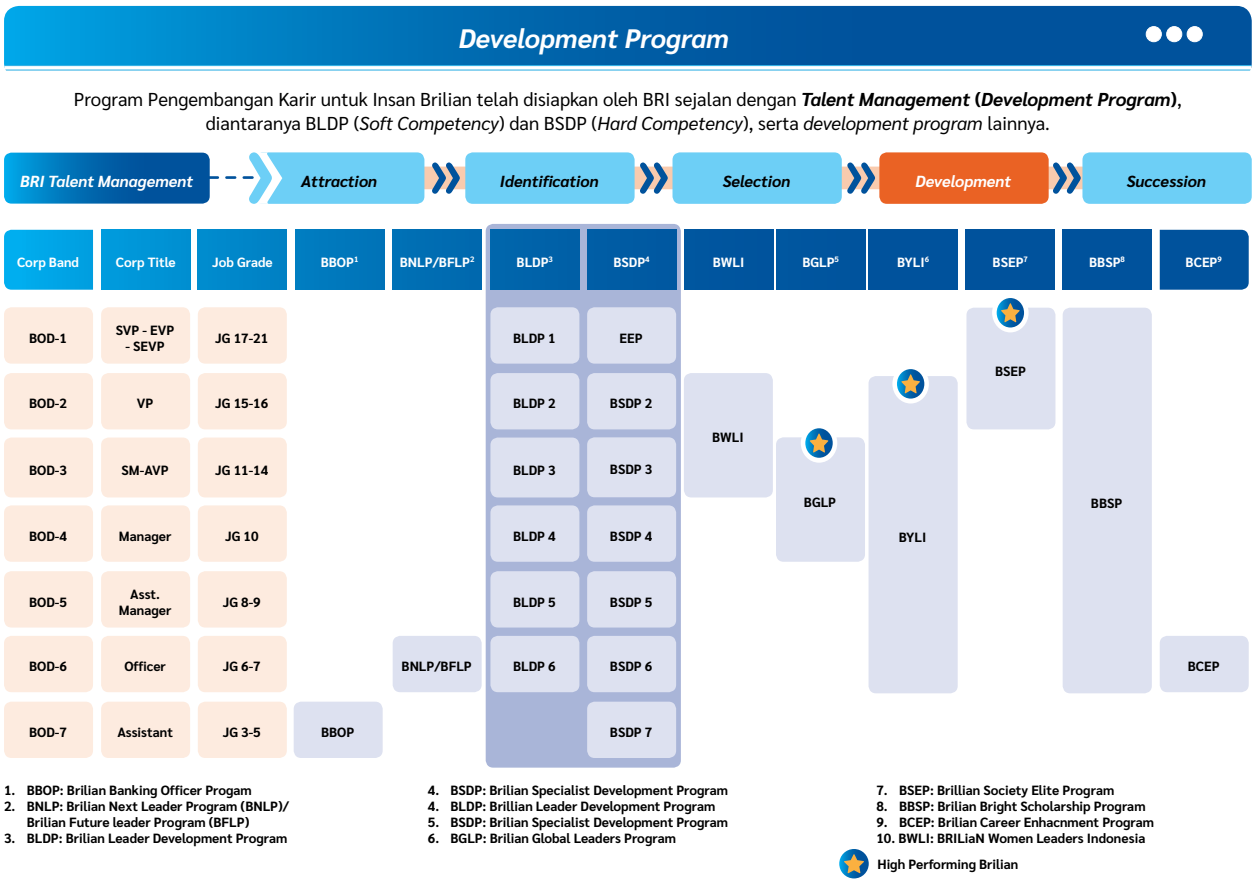
Dalam rangka mengembangkan karir Pekerja, BRI telah menerapkan *Talent Management System* sebagai *framework* pengelolaan talent BRI terintegrasi yang mencakup 5 (lima) tahapan, yaitu *Attraction, Identification, Selection*, *Development* dan *Succession*.

A. Tahapan *Attraction*, BRI telah menyiapkan *Talent Source* dan juga *Talent Channel* untuk menarik kandidat-kandidat terbaik untuk BRI. Beberapa program di antaranya adalah program rekrutmen melalui Regular *Recruitment* dan *Talent Scouting*. Adapun *Talent Channel* yang didesain oleh BRI adalah BFLP, BNLP, BBOP dan BMSP.

B. Tahapan *Identification*, merupakan pengelompokkan Pekerja BRI berdasarkan aspirasi, penilaian individu (*annual performance*) dan *competency*, dan *clustering* ke dalam *Human Asset Value Matrix* serta bidang keahlian (*talent pool*).

C. Tahapan *Selection*, Pekerja dikategorikan ke dalam *talent cluster* berdasarkan kinerja dan kompetensi. Hasil tersebut dikombinasikan dengan skor pendukung lain, antara lain kesesuaian *expertise*, poin tambahan dari award nasional maupun internasional, *endorsement, employee aspiration* dan hal lain. Hasil ini akan menentukan BRILLIANCE *Score* Pekerja dan memasukkan Pekerja dalam *talent pool* dan *list of successors*.

D. Tahapan *Development*, Pekerja akan diberikan *development* program sesuai kebutuhan baik itu berdasarkan *talent cluster, Corporate Title*, ataupun *role* Pekerja. Hal tersebut membantu dalam proses pencarian suksesi terutama untuk *Key Strategic Position*. Beberapa *development program* antara lain:
   - *Character*
   - *Professional competencies*
   - *Leadership competencies*
   - *Technical competencies*



E. Tahapan *Succession*, merupakan proses pemilihan kandidat untuk ditempatkan sebagai suksesor melalui promosi atau rotasi *talent* pada suatu jabatan, melalui perencanaan suksesor. Saat ini untuk menjadi suksesor, BRI telah mengembangkan suatu aplikasi untuk mendukung *Talent Management System* di BRI yang diberi nama BRILLIANCE.

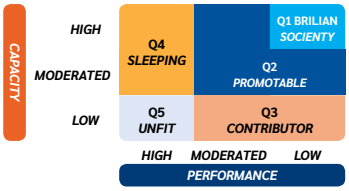
Adapun proses secara umum *talent management system* digambarkan sebagai berikut:

BRI *Talent Management System*



Development

Succession



Talent Cluster



RMA — *Risk Management Talent Available :*

COP

AMA — *Risk Management Talent Available :*

Talent Pool by Corporate Title and Expertise Field

BBOP
BFLP
BNLP
BLDP
BSDP
BGLP
BSEP
BBSP
BLRP

TALENT COMMITTEE

To Choose candidates & succesor

	Andi	Budi	Candra
	EA ME SE 5,1	ME SE 5,1	EA ME TG 5,1
Jabatan	Kepala Divisi/CLO	Kepala Divisi/CLO	Kepala Divisi/CLO
Uker	Divisi Kebijakan ...	Divisi Bisnis ...	Divisi Operasional ...
City	Executive Vice President	Executive Vice President	Executive Vice President
JG	16	16	16
JF	GM, MPO, PLA, RM	GM, RM	CRE, GM
SMK	3,05/3,13/3,00	3,00/3,00/3,00	3,20/3,15/3,01
Usia	52 tahun 7 bulan	51 tahun 6 bulan	54 tahun 2 bulan
MKCT	1 tahun 3 bulan	1 tahun 5 bulan	1 tahun 0 bulan
MKJ	1 tahun 3 bulan	1 tahun 3 bulan	1 tahun 0 bulan
MKU	1 tahun 3 bulan	1 tahun 3 bulan	1 tahun 0 bulan
ASC	*Ready Now*/2,92	*Ready Now*/3,33	*Ready Now*/2,83

EA — *Employee Aspiration*
ME — *Management Endorsement (1&2)*
SE — *Successor Endorsement*
BEA — *Award Winner*
CA — *Culture Agent*
BRILian *Society Member*
T5 — *Top* 5 BLDP *Ranking*

1-on-1 *For Critical Position*

Pool Based *For other Position*

Digitalized process with BRISMART

Digitalized process with Brilliance

Performance | *Compensation & Benefit* | *Career Management* | IR | HCIS

BRI juga memanfaatkan *assessment tools* yang dimanfaatkan sebagai alat identifikasi untuk menggali dan mengukur kompetensi seluruh Pekerja serta menilai kesesuaiannya dengan persyaratan kompetensi pada jabatan saat ini dan jabatan yang akan dituju. Serangkaian sistematis *Development program* dipersiapkan oleh BRI sehingga Insan BRILiaN dapat merancang karirnya sendiri melalui BRILiaN Development Plan, yang merupakan program perencanaan pengembangan karir dan kompetensi untuk setiap Pekerja dalam mencapai tujuan karir mereka dengan mempersiapkan rencana pengembangan pribadi sekaligus meningkatkan kinerja individu dan perusahaan.

Development Program

Sejalan dengan konsep pengembangan tersebut, Insan BRILiaN senantiasa melaksanakan serangkaian pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi diri menjadi *Great Talent & Great Leader* sesuai dengan BRILiaN *Development Journey*, yaitu:

1. BRILiaN Banking Officer Program (BBOP): Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di level Corporate Title Assistant agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
2. BRILiaN Marketing Specialist Program (BMSP): Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja di jabatan pemasar pada level *Corporate Band* 6 atau *Officer*, agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
3. BRILiaN Future Leader Program (BFLP): Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dari sumber eksternal di level *Corporate Title Officer* agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI Group.
4. BRILiaN Next Leader Program (BNLP): Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dari sumber internal di level *Corporate Title Officer* agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
5. BRILiaN Global Development Program (BGLP): Program pengembangan khusus untuk mempersiapkan para Top Talent yang tergabung dalam BRILiaN Society Member (BSM) Band 3 (Corporate Title setingkat Senior Manager/Assistant Vice President) dan Band 4 (Corporate Title setingkat Manager) sebagai calon *Global Leader* yang memiliki kompetensi dan wawasan bisnis global. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu agenda dalam program ini adalah dengan menghadirkan pembicara global yang profesional pada bidangnya.
6. BRILiaN Society Elite Program (BSEP): Program pengembangan khusus untuk mempersiapkan para Top Talent yang tergabung dalam BRILiaN Society Member (BSM) Band 2 (Corporate Title setingkat Vice President) dan Band 1 (Corporate Title setingkat Executive Vice President/Senior Vice President) dalam mempersiapkan diri untuk bertindak pada peran Leader yang lebih kompleks. Program ini bekerja sama dengan perusahaan global dalam menghadirkan narasumber berkualitas dunia.
7. BRILiaN Bright Scholarship Program (BBSP): Program pendidikan bagi Pekerja Tetap BRI untuk menempuh Pendidikan ke S2 di Luar Negeri yang dibiayai oleh Perusahaan. BBSP menyasar Insan BRILiaN yang memiliki keinginan untuk terus belajar di Top 30 Universitas terbaik dunia.
8. BRILiaN Young Leader Indonesia (BYLI): Program pengembangan bagi Insan BRILiaN muda terpilih yang memberikan kesempatan akselerasi karir dan pengembangan eksklusif agar Pekerja dapat menguasai kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi *Young Leader* Indonesia.
9. BRILiaN Leader Retirement Program (BLRP): Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja sebelum memasuki masa pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun. Persiapan yang dilakukan sudah secara menyeluruh mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis.
10. BRILiaN Women Leaders Indonesia: Program pengembangan internal yang ditujukan untuk pejabat perempuan BRI terpilih sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan perempuan dan *networking*.



Penilaian Kinerja Individu

Kebijakan

BRICORE INDIVIDU

Proses manajemen kinerja Individu di BRI dikemas dalam satu rangkaian yang dinamakan BRI Continuous Performance Management (BRICORE). BRICORE merupakan proses berkesinambungan atau berkelanjutan yang dilaksanakan selama periode kinerja dan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *managing* (pengelolaan), dan *evaluating* (evaluasi). Proses pengelolaan kinerja (*managing*) merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang periode (*continuous*) yang diwujudkan dalam *Courageous Performance Dialogue* (CPD). Adapun siklus dimaksud tergambar dalam ilustrasi berikut:



A. Tahap Perencanaan Kinerja (*Planning*)

1. Merupakan proses untuk menetapkan sasaran kinerja Pekerja yang dalam tahapan ini terjadi kesepakatan antara Pekerja dan Penilai serta memastikan keselarasan antara sasaran kinerja Pekerja dan sasaran kinerja Unit Kerja.
2. Tahap ini tidak hanya dilakukan pada awal periode kinerja (awal tahun) atau awal penugasan pekerja pada suatu jabatan/bidang tugas baru dan Unit Kerja, namun dapat dilakukan secara berkala apabila dibutuhkan sepanjang selaras dengan sasaran kinerja Unit Kerja.
3. Penetapan sasaran kinerja tersebut (*performance objective* & *behaviour objective*) tertuang dalam *performance plan* masing-masing Pekerja.

B. Tahap Evaluasi Kinerja (*Evaluating*)

1. Proses untuk mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi kinerja, termasuk melakukan *review* kembali perkembangan kinerja dan membandingkan pencapaian kinerja dengan sasaran kinerja yang ditetapkan.
2. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pekerja selama periode kinerja, baik itu triwulanan, semesteran, maupun tahunan.
3. Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka *monitoring* kinerja (*performance check-in*) dan penilaian kinerja (*performance appraisal*).
4. Penilaian kinerja masing-masing Pekerja (*Performance Appraisal)* berupa *Individual Performance Score* (IPS) yang telah mempertimbangkan pengurangan (*penalty)* akibat hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Untuk menghindari evaluasi kinerja yang kurang objektif, Pekerja agar menghindari kondisi-kondisi sebagai berikut:
   - ***Halo Effect***, evaluasi kinerja yang hanya didasarkan pada sifat-sifat positif yang menonjol dari Pekerja yang dievaluasi.
   - ***Horn Effect***, evaluasi kinerja yang hanya didasarkan pada sifat-sifat negatif yang menonjol dari Pekerja yang dievaluasi.
   - ***Leniency***, penilai cenderung mudah memberikan evaluasi yang baik kepada Pekerja.
   - ***Strictness***, penilai cenderung sulit memberikan evaluasi yang baik kepada Pekerja.
   - ***Central Tendency***, penilai cenderung memberikan evaluasi yang berada diposisi tengah (antara baik dan buruk).
   - ***Recency Error***, penilai cenderung memberikan evaluasi terhadap prestasi kerja Pekerja pada periode terakhir/ belakangan (bukan keseluruhan kinerja selama periode penilaian).

C. Courageous Performance Dialogue (CPD)

1. Merupakan kegiatan **komunikasi dua arah** antara Pekerja dan Penilai dalam bentuk *effective* dan *constructive feedback* untuk memperoleh peningkatan kinerja individu yang berkesinambungan dan proses yang melekat pada keseluruhan tahapan BRICORE.
2. Pelaksanaan CPD direncanakan dengan baik (*dedicated time*) yang bertujuan:
   - Pekerja mengetahui peran dan kontribusinya terhadap pencapaian Unit Kerja.
   - Memberikan solusi terbaik atau umpan balik yang efektif atas hambatan/masalah yang berkaitan dengan kinerja Pekerja.
   - Memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Pekerja sehingga dapat mencapai target selanjutnya yang lebih menantang.
3. CPD dilakukan berkesinambungan sepanjang periode kinerja dengan penjelasan:
   - *Mandatory* (wajib) dilakukan saat awal periode kinerja (melakukan perencanaan kinerja) dan akhir periode kinerja (melakukan evaluasi kinerja).
   - *Optional* dilakukan di luar pelaksanaan *mandatory* sesuai kebutuhan masing-masing Pekerja atau apabila Pekerja menunjukkan indikasi menurunnya kinerja yang ditunjukkan dari tanda-tanda: kualitas kerja tidak memuaskan, inisiatif rendah, menolak pekerjaan, komplain meningkat, defensif (membela diri), atau menghindari pekerjaan yang lebih menantang.

PENGELOLAAN *UNDERPERFORM*

Tahun 2023, BRI mengimplementasikan *Performance Bootcamp* yang diberikan kepada Pekerja dengan kriteria *underperform* yang bertujuan untuk memberikan pendampingan agar Pekerja mampu mencapai standar kerja minimal yang dipersyaratkan. Apabila Pekerja tidak mampu memenuhi standar kinerja, maka dilakukan proses *manage-out.* Selama proses *Performance Bootcamp*, Perseroan memberikan berbagai support sebagai berikut:

1. Pendampingan *Buddy*
2. *Training*
3. *Mentoring*
4. *Coaching*
5. *Counseling*

Adapun tahapan *Performance Bootcamp* sebagai berikut:

JAN - MAR	APR	MEI - JUL	AGT	SEP - NOV	DES
IDENTIFIKASI	PENETAPAN	*PERFORMANCE BOOTCAMP* 1	EVALUASI 1	*PERFORMANCE BOOTCAMP* 2	EVALUASI 2

Program *Performance Bootcamp* dimaksud dinilai efektif sehingga akan dilanjutkan kembali di tahun 2024.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

BRI menggunakan aplikasi MyCore sebagai tools penunjang untuk mendukung pelaksanaan BRICORE level Individu. Aplikasi tersebut digunakan oleh Pekerja dari tahap input *performance plan* sampai dengan proses evaluasi kinerja. Pencapaian kinerja Perusahaan yang baik juga ditunjukkan dengan keselarasan pada *Individual Performance Score* (IPS) Pekerja. Hasil IPS tahun 2023 masih dalam proses penilaian, namun pada tahun 2022 total Pekerja yang mendapatkan penilaian *exceed* adalah sebesar 25,08%.

Sistem Remunerasi dan Kompensasi Jangka Panjang

Kebijakan

Sistem remunerasi BRI disusun berdasarkan beberapa prinsip utama di antaranya, adil secara internal yakni pemberian remunerasi sesuai kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab jabatan, kompetitif secara eksternal (*peers*), serta memperhatikan strategi, perkembangan bisnis dan kemampuan Perseroan. Prinsip tersebut dilaksanakan sebagai landasan untuk mencapai tujuan utama sistem remunerasi yaitu menarik calon pekerja potensial (*attract talent*), mempertahankan pekerja kompeten (*retain talent*) serta menjaga motivasi pekerja untuk selalu memberikan kinerja terbaiknya (*motivate talent*). Penerapan prinsip tersebut merupakan faktor penting untuk membangun *brand image* Perseroan sebagai *The Dream Company to Work in Financial Industry* sehingga meningkatkan daya saing Perseroan dalam persaingan memenangkan talenta terbaik. Remunerasi di BRI tidak membedakan *gender* (pekerja laki-laki maupun wanita), tidak membedakan ras, agama, dan suku yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Pengupahan pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sistem Remunerasi BRI diimplementasikan melalui pemberian upah bulanan, penyesuaian besaran upah setiap tahun dengan metode *merit increase*, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), Tunjangan Cuti Tahunan, dan Tunjangan Cuti Besar yang diberikan setiap

periode masa kerja 6 (enam) tahunan. Sebagai langkah strategis untuk menjaga kompensasi pada level yang kompetitif, selama tahun 2023 Perseroan telah melakukan beberapa *improvement* pengelolaan sistem remunerasi, antara lain perubahan struktur skala upah dan melakukan simplifikasi terhadap komponen upah sejalan dengan perubahan model organisasi, yakni dual model *organization* (*team-based* dan *structural-based*).

Selain itu, BRI juga memberikan bonus kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan serta meningkatkan motivasi pekerja untuk berkinerja lebih baik di masa yang akan datang. Pada tahun 2023, Bonus diberikan dalam bentuk *Appreciation Bonus* yaitu sebesar satu kali upah kepada seluruh pekerja, serta Bonus Tahunan menggunakan konsep *Bonus Pool*. Konsep *Bonus pool* bertujuan untuk mendorong penerapan *performance driven culture* yakni dengan memastikan pemberian bonus yang selaras dengan pencapaian kinerja individu dan kinerja unit kerja, serta penanaman nilai kolaborasi antara individu dalam suatu unit kerja, mengingat pencapaian kinerja Unit Kerja akan berdampak langsung terhadap bonus individu di Unit kerja tersebut.

BRI juga memberikan Insentif Jangka Pendek khusus bagi Tenaga Pemasar yang diberikan setiap Triwulan secara otomatis melalui sistem. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga pemasar untuk memberikan kinerja terbaiknya sehingga dapat melampaui target bisnis yang telah ditetapkan perusahaan serta menjaga tingkat kompetitif dari kompensasi yang diterima tenaga pemasar jika dibandingkan *market* (*peers*).

Sebagai upaya dalam meningkatkan *value* saham BRI serta meningkatkan *sense of ownership* pekerja, BRI memberikan *long term incentive* dan *short term incentive* dalam bentuk kepemilikan saham melalui dua program, yaitu *Employee Stock Allocation Program* (ESA) dan *Employee Stock Option Program* (ESOP) yang telah diberikan sejak tahun 2016. Melalui program tersebut diharapkan pekerja dapat meningkatkan produktifitas dan menjaga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga berdampak langsung terhadap peningakatan harga saham BRI.

Sedangkan untuk menunjang kedinasan, BRI memberikan fasilitas kedinasan meliputi bantuan sewa rumah, rumah dinas, dan kendaraan dinas sewa serta program kepemilikan kendaraan. BRI juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pekerja beserta anggota keluarganya, yang mencangkup antara lain jaminan rawat jalan, persalinan, rawat gigi, *general medical check up*, tunjangan penggantian kacamata serta program kesehatan pensiunan yang dapat digunakan pasca pensiun.

Jenis Remunerasi

Remunerasi yang diberikan kepada Pekerja BRI dibedakan dalam beberapa komponen sebagai berikut, yaitu:

1. Kompensasi yang bersifat tetap (*fixed pay*), diberikan kepada Pekerja berdasarkan jabatan dan/atau sesuai perjanjian kerja yang terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan;
2. Kompensasi yang bersifat variabel (*variable pay*), diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja;
3. Benefit yang merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, yang diterima baik selama masa kerja seperti program pemeliharaan Kesehatan maupun setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri perbankan;
4. Kompensasi lainnya yang bersifat *adhoc* sebagai contoh Program kepemilikan saham yang bertujuan untuk memberikan insentif/motivasi jangka panjang kepada pekerja, menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) , dan mendorong pencapaian target kinerja perusahaan yang diberikan secara periodik, yaitu:
   a. *Employee Stock Allocation* (ESA)
      Program kepemilikan saham dalam bentuk *Stock Allocation Program* diberikan melalui 4 (empat) tahap kepada seluruh level Pekerja yang memenuhi kriteria yang terdiri dari masa kerja, kinerja individu, dan *track record* pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya.
   b. *Employee Stock Option Plan* (ESOP)
      Program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan penawaran harga khusus. Program ini diberikan khusus kepada Pekerja Level tertentu yang termasuk *Top Talent* BRI serta memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential*.

Pelaksanaan Kebijakan Sistem Remunerasi

Kenaikan Kompensasi

Sebagai komitmen dalam mewujudkan *performance driven culture* di BRI, Perseroan memberikan *cash compensation* yang ditentukan berdasarkan kinerja pekerja sehingga kompensasi yang diterima oleh Pekerja akan berbanding lurus dengan kontribusi Pekerja kepada Perseroan. Pada tahun 2023, BRI telah memberikan kenaikan upah kepada Pekerja yang ditentukan dengan metode *merit increase*. Selain itu, Perseroan juga memberikan insentif dan bonus kepada Pekerja guna mendorong produktivitas pekerja dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan Perusahaan.

Pada tahun 2023, BRI memberikan Insentif Jangka Pendek (IJP) khusus bagi Tenaga Pemasar sebanyak 16.971 Tenaga Pemasar dengan total nominal Rp269.734.324.952. Sedangkan untuk kompensasi jangka panjang berupa program kepemilikan saham Employee Stock Allocation (ESA) dan Program kepemilikan saham Employee Stock Option Plan (ESOP) dilaksanakan terakhir pada tahun 2021.

Program Pensiun

Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pekerja BRI setelah berakhirnya hubungan kerja serta meningkatkan kenyamanan bagi Pekerja selama masih aktif bekerja, BRI menyiapkan program *benefit setelah* berakhirnya hubungan kerja. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
3. Program Tunjangan Hari Tua (THT)
4. Program Jaminan Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan)
5. Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
6. Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens)
7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Pelaksanaan Program Pensiun

Selain itu dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perusahaan sebagai bekal untuk memasuki masa pensiun. Adapun jumlah pekerja BRI yang telah terdaftar dalam program pensiun hingga Desember 2023 yaitu sebanyak 1.545 Pekerja.

BRILiaN Apps

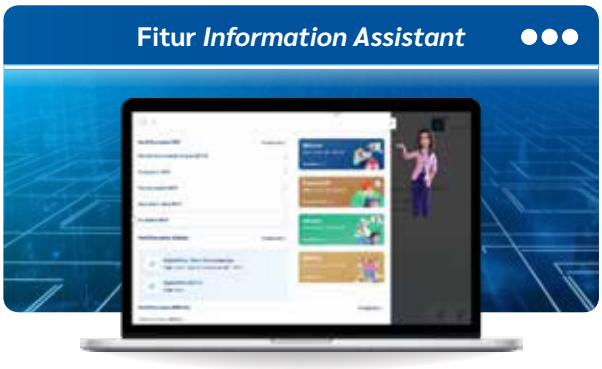
Sejalan dengan aspirasi BRIvolution 2.0 di bidang human capital (HC), untuk menjadi *Strategic Business Partner* serta sebagai Home to The Best Talent, maka pengelolaan HC pada setiap siklusnya (mulai dari *attract* hingga *retire*) di BRI saat ini didukung oleh sistem dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses serta menciptakan *employee experience* yang nyaman bagi Pekerja BRI (Insan BRILiaN) untuk memberikan kinerja terbaiknya.

BRIStars merupakan HC Super Apps yang dimiliki oleh BRI dengan didukung oleh lebih dari 30 aplikasi yang mendigitalisasikan seluruh siklus proses bisnis HC. Dalam rangka menuju transformasi di bidang HC, serta untuk meningkatkan *employee experience* berupa asistensi secara virtual bagi Insan BRILiaN, maka BRIStars bertransformasi menjadi BRILiaN Apps. Tidak hanya sebagai platform Employee Self Services segala bentuk layanan HC, BRILiaN Apps dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan (Gen AI), dan secara bertahap akan menjadi Virtual Assistant Insan BRILiaN.

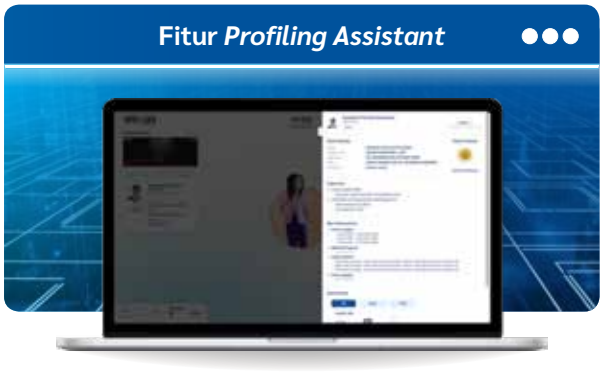
Saat ini BRILiaN Apps memiliki 6 fitur utama yakni, *Notification Assistant, Information Assistant, Profiling Assistant, Chat-bot Assistant, Performance Assistant*, dan *Service Assistant*.



Fitur pertama adalah Fitur *Notification Assistant* dirancang untuk mengumpulkan notification dari semua Aplikasi yang ada di BRI, selanjutnya BRIGita sebagai *Virtual Assistant* pada BRILiaN Apps akan merangkum serta menginfokan kepada Insan BRILiaN.

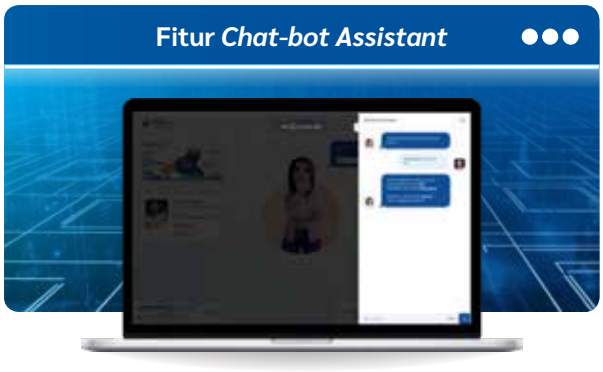


Fitur kedua adalah Fitur *Information Assistant* yang meng-asis untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan Pekerja meliputi akses kepada aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, informasi serta ketentuan yang berasal pada BRIPedia dan informasi serta ketentuan seputar HC. Tidak hanya itu informasi dan berita terkini terkait perusahaan (BRILiaN News) juga dapat diakses dan dicari melalui fitur ini.



Fitur ketiga adalah Fitur *Profiling Assistant*, fitur yang meng-asis untuk men-skrining profil Pekerja meliputi:

1. *Talent Cluster*, profil ini memberikan informasi posisi kuadran pekerja berdasarkan *index performance score* dengan hasil asesmen melalui 9-box matriks. Talent cluster team member dapat diakses oleh masing-masing team leader sebagai gambaran program pengembangan yang diperlukan.
2. *Health check-up*, profil ini memberikan gambaran hasil skrining tingkat risiko kesehatan pekerja terhadap penyakit kronis (penyakit jantung, stroke, diabetes melitus, kanker, dan paru kronik).
3. *Mental health*, profil ini memberikan gambaran hasil skrining tingkat risiko kesehatan mental pekerja seperti tingkat stres, depresi, *anxiety*, dan bipolar.
4. *Financial check-up*, profil ini memberikan gambaran hasil skrining tingkat kesehatan pengelolaan finansial pekerja seperti *saving ratio*, *asset* terhadap hutang, kemampuan membayar hutang, kemampuan membayar cicilan, dan *solvency ratio*.



Fitur keempat adalah Fitur *Chat-bot Assistant*, fitur yang dapat dimanfaatkan Insan BRILiaN untuk sarana bertanya dan menyampaikan aspirasi seputar HC. Fitur ini yang akan memperkuat BRILiaN Apps sebagai platform virtual assistant bagi Pekerja.



Fitur kelima adalah Fitur *Performance Assistant*, fitur yang akan meng-asis terkait semua pekerjaan yang harus dikerjakan Pekerja secara harian (task list management) yang bersumber dari berbagai aplikasi di BRI. Fitur ini akan membantu Pekerja untuk memberikan kinerjanya secara optimal dan memenuhi target tahunan yang diberikan. Beberapa fungsi pada fitur ini di antaranya dashboard performance, task list management, collaboration tools, dan monitoring team member.



Fitur terahir adalah fitur *service assistant*, fitur ini memberikan kemudahan kepada Insan BRILiaN untuk mengakses seluruh layanan HC. Layanan HC mulai dari rekrutmen hingga berahir pada *retirement* dapat diakses pada satu platform BRILiaN Apps.

Internalisasi Budaya

Ringkasan Kinerja Direktorat Change Management & Transformation Office

BRI Corporate Innovation Management - EMBRIO

Corporate Innovation Management memegang peranan krusial dalam mengamankan masa depan industri perbankan di tengah perubahan cepat dan dinamika pasar global. Perubahan perilaku konsumen yang cenderung beralih ke layanan perbankan digital memerlukan respons proaktif dari pihak perbankan. Melalui Embrio sebagai bagian dari *Innovation Management*, BRI dapat mengintegrasikan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengotomatisasi tugas rutin, dan merancang pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, Embrio memungkinkan perusahaan untuk terus mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan pelanggan, seperti layanan perbankan masa depan, pembayaran *digital*, dan *customer service*.

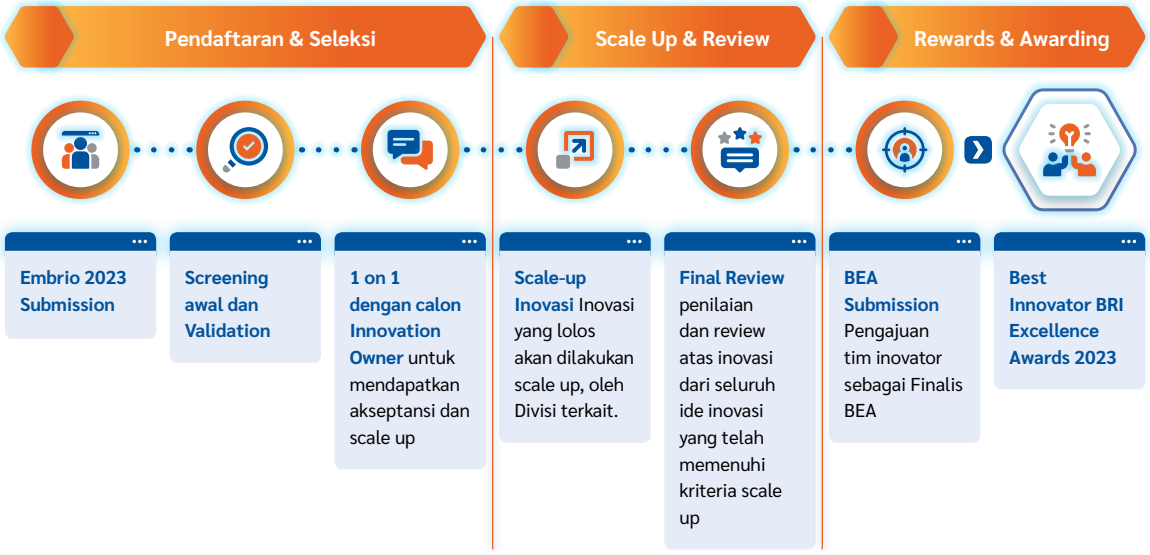
Selain aspek efisiensi operasional, Embrio ingin mengimplementasikan bisnis proses baru dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang. Didukung oleh Manajemen BRI yang berkomitmen untuk melibatkan ide-ide dari Insan BRILiaN (pekerja BRI) dalam menjalankan rencana transformasi, Embrio menjadi laboratorium inovasi BRI di mana para Insan BRILian dapat mengekspresikan ide-ide inovatif mereka untuk mendukung pembentukan mesin pertumbuhan baru di BRI.

Framework Embrio 2023

Berbeda dengan pelaksanaan Embrio sebelumnya, saat ini inovasi harus terimplementasi minimal selama 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan pengukuran terhadap *impact* yang dihasilkan. Embrio membantu innovator untuk meningkatkan kualitas inovasi serta mengawal proses *scale up* manfaat yang telah dirasakan.

Innovation Capability Building

Melalui program pelatihan dan pengembangan yang terarah, para inovator dapat diberdayakan untuk mengidentifikasi peluang inovatif, mengatasi tantangan kompleks, dan mengimplementasikan solusi kreatif. Selain itu, *Innovation Management* yang efektif mencakup budaya organisasi yang mendukung eksperimen, keberanian mengambil risiko, dan kolaborasi antar tim untuk berkontribusi pada peningkatan kemampuan inovasi secara holistik. Dengan cara ini, *capability building* dalam kerangka *innovation management* tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memupuk *mindset* inovatif yang vital untuk kesuksesan jangka panjang dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berubah.



Transformasi BRI memiliki 2 (dua) fokus utama transformasi yaitu Digital dan Culture (Budaya Perusahaan). BRI menempatkan Budaya Perusahaan sebagai salah satu pondasi tercapainya Visi, Misi Perusahaan dan menjadi bagian dari strategi. Menyadari pentingnya untuk membentuk karakter dan perilaku pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan dinamis serta dalam rangka mendukung transformasi BRI yang konsisten dan terukur, maka BRI Group melakukan berbagai upaya internalisasi dan inisiatif Budaya Kerja.

Internalisasi dan Implementasi Inisiatif Budaya Kerja

Sepanjang 2023, BRI telah melakukan beberapa inisiatif dan internalisasi budaya kerja melalui pengembangan yang sesuai dengan framework BRI One Culture. BRI One Culture bertujuan membentuk performance driven culture (budaya perusahaan berbasis kinerja) untuk mendorong produktivitas yang berdampak terhadap kinerja bisnis yang optimal. Terdapat 4 (empat) area utama dalam implementasi dan internalisasi BRI One Culture untuk menciptakan Performance Driven Culture, yang terdiri dari:



1. *Strengthening BRI Values*: Setiap Insan BRILiaN mengerti dan memahami core values perusahaan dan perilaku-perilakunya. BRI fokus terhadap internalisasi dan penguatan nilai-nilai utama serta artefak budaya kerja. Dengan adanya Internalisasi nilai-nilai utama diharapkan setiap Unit Kerja dipimpin oleh leader yang peduli terhadap aktivitas internalisasi nilai budaya kerja BRI, sehingga membentuk tindakan dan perilaku Pekerja yang sesuai dengan Core Values BRI.
2. *Promoting Role Model*: Adanya *Culture Agent* Koordinator dan *Culture Agent* yang dipimpin oleh seluruh pemimpin Unit Kerja sebagai *Culture Leader* BRI yang mampu menjadi role model serta menjadi contoh dan teladan bagi seluruh Pekerja.
3. *Competence & Skill Development*: Merupakan pengembangan skill dan kompetensi Pekerja dan materi terkait internalisasi Budaya Kerja yang terintegrasi dalam setiap Program Pengembangan Pekerja (BFLP, BLDP, BGLP, dan lainnya). BRI fokus terhadap upaya pengembangan kompetensi dan skill, untuk memastikan kompetensi pimpinan dan pekerja selaras dengan Budaya Kerja BRI (*Culture Fit*).
4. *Management System*: Perusahaan menyediakan *tools* dan sistem *monitoring* dalam hal pengelolaan Budaya Kerja agar lebih tersistematis. Fokus BRI adalah dalam upaya membangun *culture system management*, baik itu dalam sisi kebijakan, proses bisnis, sistem pengendalian, maupun sistem pengukuran kinerja. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat mendorong insan BRI ke arah perilaku yang sesuai dengan Core Values BRI.

Internalisasi Akhlak di BRI Group

Tahap Awal (*Initial*) 1

Membangun Kesadaran dan Pemahaman

Program
- Komunikasi oleh para pemimpin
- Pembentukan Agen Perubahan
- Program Pengenalan Budaya

- AKHLAK Talk (Sosialisasi onsite & online)
- BRILIAN Leadership Insight
- Pembentukan Culture Team (CL, CAK, CA) 1:10
- Culture Team Development (Online & Onsite)
- E-learning Implementasi AKHLAK
- Campaign Awarness AKHLAK (Sosmed, Bristars)

Tahap Intervensi (*Intervention*) 2

Perubahan perilaku secara Terencana, selaras dengan AKHLAK

Program
- Komitmen Pimpinan
- Penyelarasan Sistem Manajemen
- Penyelarasan Simbol

- BOM Workshop: Komitmen Implementasi AKHLAK
- AKHLAK Town Hall Meeting
- Penetapan Panduan Simbolic Act Leader dan Perilaku setiap fungsi
- MyCore: AKHLAK bagian dari Performance Management
- BRIlliance: Recognition Systems untuk seluruh Culture Agent
- Portal Budaya Kerja: System pendukung implementasi AKHLAK (GCG Online, Portal Inovasi, Monitoring CAP, database CA)
- Totem AKHLAK di Kanpus & Pemasangan Poster di seluruh uker selindo.

Tahap Penerimaan (*Acceptance*) 3

Menerima dan Mendukung AKHLAK

Program
- Internalisasi & Implementasi AKHLAK melalui media komunikasi & program budaya

- AKHLAK Campaign melalui sosmed dan BRIStars (Video, poster, quiz)
- AKHLAK Competition (Video, Foto, Cerdas Cermat, Reels, Tiktok dll)
- Culture Activation Program (CAP) Program Unit kerja Behavior mendorong pelampauan kinerja.
- CEK Implementasi AKHLAK
- Coaching Clinic AKHLAK
- Sapa Culture Agent
- Forum Culture Agent

Tahap Perubahan Perilaku (*Behavior Change*) 4

AKLHAK telah tercermin dalam perilaku positif

Program
- Penerapan AKLAK secara sadar dalam kegiatan sehari-hari

- Seruan AKHLAK oleh seluruh pekerja setiap hari di Briefing pagi di seluruh uker.
- Sharing Cerita Inspiratif AKHLAK setiap hari secara bergiliran.
- Survei Implementasi AKHLAK BUMN
- Survei Culture Barometer
- Employee Engagement Survey

Tahap Hasil dan Dampak 5

Penerimaan AKHLAK telah membuahkan hasil serta mendapat pengakuan

Program
- Dampak perubahan organisasi tercermin dalam peningkatan kinerja Perusahaan

2021
- Human Capital Management Excellence Award (Brandon Hall Group) 2021

2022
- The 1st Rank Top Five of Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022 (SWA & NBO)
- The 1st Rank Top in Banking Sector of Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2022 (SWA & NBO)
- Brandon Hall Group Excellence Award 2022
- HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2022 and HR Asia Most caring Company (We Care)

2023
- Best CEO (Sunarso) - Gold and Other Finance Asia. Asia's Best Companies 2023
- HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 and HR Asia Diversity, Equity & Indusion Award 2023
- Best in Current Accout Offering & Highly Commended - Excellence in Mass Affluent Banking 12th Infobank Digital Brand Awards 2023
- Diamond Total Service Quality Satisfaction Based on Customer Perception Survecy SQ Index Global Private Banking Innovation Award 2023



Culture Activation Program

Dalam mengimplementasikan budaya berbasis kinerja (*Performance Driven Culture*), maka sepanjang tahun 2023 seluruh Unit Kerja BRI, baik di level Divisi Kantor Pusat hingga ke Kantor Cabang telah merancang dan mengimplementasikan Culture Activation Program (CAP). Program ini merupakan program inisiatif terkait Budaya Kerja yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja di masing-masing Unit Kerja. Culture Activation Program (CAP) diinisiasi, dirancang, diimplementasi, dan dimonitor oleh masing-masing Unit Kerja dan merupakan komitmen bersama di Unit Kerja.

Culture Team

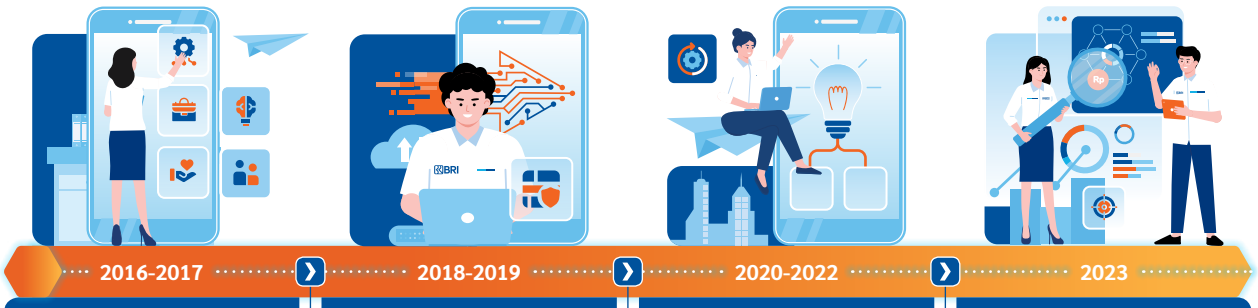
Dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan Corporate Culture BRI dan implementasi BRI One Culture di Unit Kerja, maka diperlukan peranan aktif dari *Culture Team* untuk menjadi role model dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja BRI. Culture Team terdiri atas Culture Leader (CL), Culture Agent (CA), dan Culture Agent Koordinator (CAK) yang berperan memastikan keberhasilan culture program yang mendorong *behavior* untuk peningkatan kinerja.

BRI Excellence Awards

BRI Excellence Awards merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan BRI kepada pekerja dan Unit Kerja yang secara konsisten memberikan kinerja terbaiknya. Di tahun 2023, terdapat kategori Best Culture untuk level Unit Kerja serta Best Culture Agent dan Best Culture Leader untuk level Pekerja.

Perjalanan Transformasi Budaya BRI

Perjalanan Transformasi Budaya BRI adalah sejumlah aktivitas, kegiatan maupun program yang dilakukan guna mendukung transformasi untuk mendorong pencapaian budaya perusahaan berbasis kinerja.



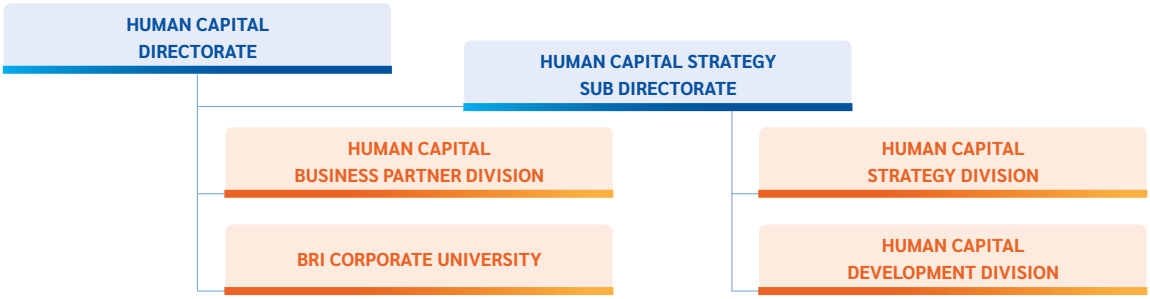
2016-2017	2018-2019	2020-2022	2023
BRILiaN (BRI Lima Nilai) Launch as Core Values	***Core Values Internalization***	**AKHLAK** ***BRI One Culture***	**Penguatan Implementasi *Culture* melalui Penajaman *Capabilty Building***
• *Integrity* • *Professionalism* • *Trust* • *Innovation* • *Customer Centric*	*Culture Transformation Movement*	*Core Values Launch*, BRILiaN Belief, dan 8 Perilaku Utama (BRILiaN Ways)	*Define guidance* perilaku di tiap fungsi, *Culture Activation Program enhancement, Leaders Capability Building program*, dan penguatan infrastuktur BRI One Culture
2016-2017	**2018-2019**	**2020-2022**	**2023**
BRI meluncurkan BRILiaN sebagai *Core Values* yang disertai dengan *artefact builder* untuk mendukung proses internalisasi dan *awareness* pekerja (BRILiaN Logo, *Gesture, Symbol, Campaign*). ***Culture Program*** BRILiaN Shine, BEA, *Sportartcular*, CA *Campaign*, *Symbolic Activation*	Internalisasi *Core Values* melalui *Culture Transfromation Movement* dan melalui pengembangan perangkat *culture (policy, wellbeing*: BRI Community, BRILiaN Center, dan *Culture Program*). ***Culture Program*** BRILiaN Shine, BEA, *Sportartcular*, CA *Campaign*, *Symbolic Activation*	*Responding* Covid yang dilanjutkan di masa awal akhir pandemi melalui implementasi *Core Values* AKHLAK, BRILiaN Belief, dan BRILiaN Ways. Penguatan internalisasi *culture* melalui HC Stream (*recruitment*, HC Dev, *Performance Management*, dan lainnya). ***Culture Program*** BRILiaN Shine, BEA, *Sportartcular*, CA *Campaign*, *Symbolic Activation*	*Enhancement* penguatan *Culture Activation Program* di unit kerja (bisnis, *support, operational risk,* dan *service excellence*), penguatan *sales culture & capability*. ***Culture Program*** BRILiaN Shine, BEA, *Sportartcular*, CA *Campaign*, *Symbolic Activation*

Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia

Organisasi pengelola *Human Capital* BRI terdiri dari 2 (dua) Divisi di bawah supervisi langsung Direktur Human Capital dan 2 (dua) Divisi di bawah supervisi SEVP Human Capital Strategy. Direktur Human Capital mensupervisi SEVP Human Capital Strategy dengan pembagian pengelolaan Divisi yaitu, Divisi Human Capital Business Partner dan BRI Corporate University di bawah Direktur Human Capital serta Divisi Human Capital Strategy & Policy dan Divisi Human Capital Development di bawah SEVP Human Capital Strategy.

Secara garis besar, Divisi Human Capital Strategy & Policy bertanggung jawab atas strategi perencanaan *human capital*, pengelolaan strategi kebijakan *reward* dan pengelolaan biaya tenaga kerja, individual *performance management, employee governance*, serta *human capital communication*. Divisi Human Capital Development bertanggung jawab atas *human capital development, talent management, recruitment* dan *assessment, human capital resourcing* dan *human capital partnership management*. Divisi Human Capital Business Partner bertanggung jawab atas pengelolaan / *human capital business partner, regional human capital business partner, carrier* dan *succession*, *talent mapping deployment, industrial relations* dan *union implementation*, *reward operation, human capital information system* dan *people analytics*. BRI juga memiliki Corporate University yang bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas pendidikan dan pelatihan termasuk sertifikasi internal BRI dengan konsep *corporate university*.

Adapun struktur organisasi Direktorat Human Capital digambarkan sebagai berikut:



Rencana Kerja Sumber Daya Manusia 2024

Pengembangan Human Capital

Kondisi Pertumbuhan Bisnis Tahun 2024 akan menghadapi tantangan signifikan akibat transformasi digital yang pesat, ketidakpastian ekonomi global serta dinamika regulasi yang terus berubah dan berbagai kondisi global maupun nasional lainnya yang akhirnya juga berdampak pada strategi pengelolaan human Capital BRI. Selaras dengan arah perkembangan bisnis, Pada Tahun 2024 pengelolaan Human Capital BRI masih berfokus untuk mendorong produktivitas pekerja terutama untuk mendukung strategi penguatan CASA antara lain melalui program peningkatan kapabilitas pekerja khususnya bagi tenaga pemasar dan jajaran mikro guna mendukung inisiatif Reengineering Human Capital Micro, penguatan *performance management*, melanjutkan upaya optimalisasi dan otomasi proses bisnis melalui implementasi *strategic workforce planning*, serta optimalisasi kontribusi perusahaan anak melalui Implementasi standarisasi pengelolaan Human Capital secara BRI Group.

Implementasi project *strategic workforce planning* BRI direncanakan masih akan berlanjut beberapa tahun kedepan salah satunya proses *Reinventing Job* yang merupakan proses rekonstruksi jabatan melalui identifikasi daftar tugas atau task list secara komprehensif guna menangkap potensi otomasi atau pengalihan ke teknologi khususnya untuk proses yang bersifat repetitif dan administratif sehingga dapat membebaskan waktu pekerja *existing* saat ini menjadi lebih efisien dan mengalihkannya ke pekerjaan lain yang lebih strategis dan bernilai tambah. Pada tahun 2024, proses tersebut masih tetap berjalan baik di unit kerja support maupun bisnis termasuk salah satunya Implementasi pada proses bisnis human capital BRI sehingga pengelolaannya diharapkan dapat lebih efektif dan efisien.

Disisi lain, Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekerja juga menjadi fokus utama yang dilaksanakan melalui penerapan program learning inovatif berbasis kompetensi dengan diiringi penguatan program coaching dan mentoring dalam proses manajemen kinerja individu yang berkelanjutan. Fokus peningkatan kapabilitas tersebut terutama diarahkan kepada tenaga pemasar dan jajaran mikro untuk mendukung implementasi inisiatif Reengineering Human Capital Micro serta peningkatan kapabilitas leadership pemimpin unit kerja sehingga mampu mengarahkan dan memimpin pencapaian tujuan bisnis Perusahaan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung aspirasi Perseroan untuk tumbuh secara anorganik dengan penguatan dan pengoptimalan kontribusi Perusahaan Anak, Perseroan akan melaksanakan Implementasi Sinergi perusahaan anak salah satunya melalui standarisasi pengelolaan human capital secara BRI Group. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan *maturity assessment* guna menangkap kondisi *existing* pengelolaan human capital di masing-masing perusahaan anak. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut selanjutnya akan dilaksanakan berbagai inisiatif strategis oleh BRI Induk maupun masing-masing perusahaan anak sesuai roadmap pengelolaan human capital yang disusun menuju kondisi ideal yang diharapkan di tahun 2025. Selain itu, Penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja yang berkelanjutan di BRI juga dilaksanakan melalui berbagai upaya yang mencangkup penyesuaian kebijakan dan ketentuan *performance management* sesuai tantangan dan kondisi terkini, pengembangan sistem pendukung yang lebih reliabel serta berbagai upaya guna menjaga keselarasan implementasi *performance management* di BRI Group.

Teknologi Informasi

RINGKASAN DIREKTORAT DIGITAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berpedoman pada *framework* "GREAT" (akronim dari ***G****rooming breakthrough innovation,* ***R****esilient IT platform,* ***E****xcellent data-driven organization,* ***A****gile 10x governance, dan* ***T****ransformation of digital talent)* sebagai bagian dari 2021-2025 *Information Technology Strategic Plan,* BRI telah mencapai beberapa hal yang membanggakan di tahun 2023. Berbagai pencapaian ini telah turut mendukung BRI untuk meraih prestasi luar biasa di tahun 2023 sembari mempersiapkan *digital platforms* yang dapat dan akan terus mendukung pertumbuhan bisnis pada periode-periode berikutnya.

Selama tahun 2023 kami mencatatkan angka yang luar biasa pada pertumbuhan transaksi *digital*, di mana sebesar 98,95% dari total transaksi kami dilakukan melalui *digital*, dan sisanya sebesar 1,05% dari total transaksi kami dilakukan di cabang atau unit kerja kami. Selain angka di atas, Direktorat Digital & TI BRI juga telah berhasil mencatatkan beberapa pencapaian untuk tahun 2023.

BRImo menjadi salah satu aplikasi dengan pertumbuhan *user* baru sebesar 32,6%, total *transaction* dan *transaction volume* yang meningkat hingga 69,2% dan 55,8% pada tahun 2023. Dari sisi infrastruktur BRImo juga dapat menjaga *availability* di angka 99,98% dan *success rate* di angka 99,96%.

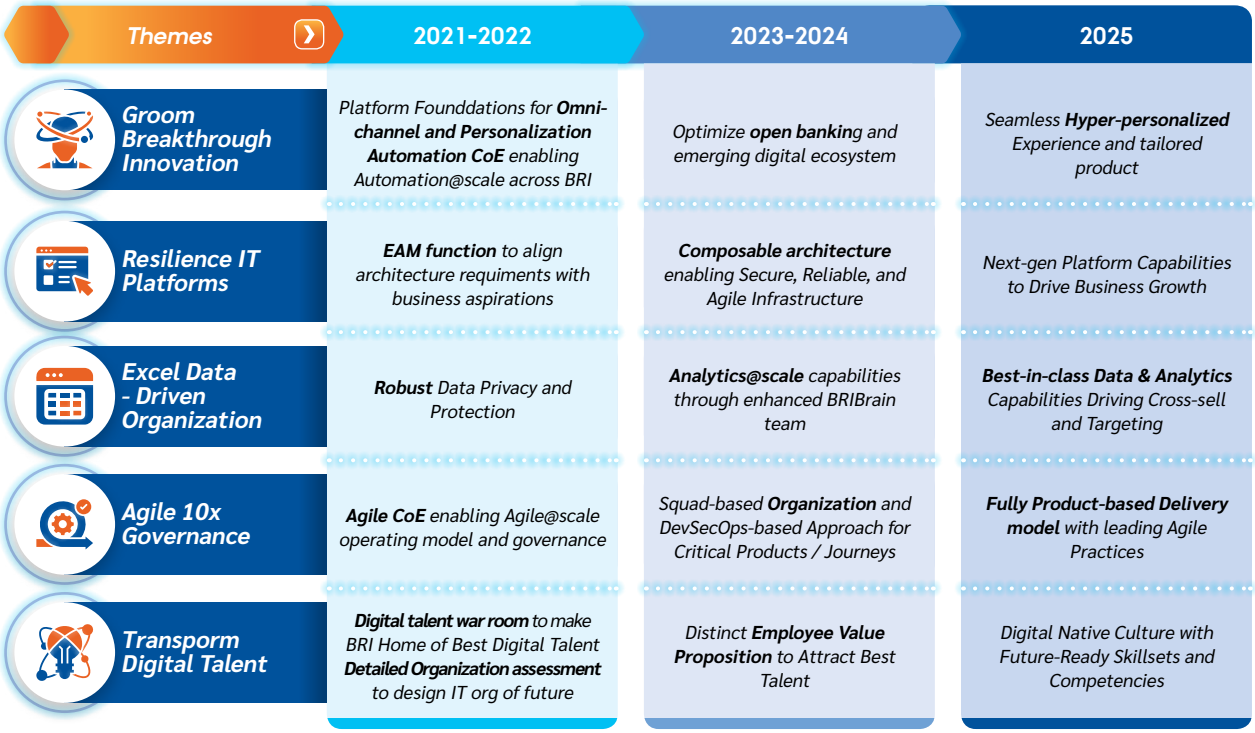
Pertumbuhan pemanfaatan open API kami, BRIAPI telah dimanfaatkan pada lebih dari 23 jenis digital ekosistem dengan lebih dari 1.000 total partner.

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), Sabrina terus menjadi garda terdepan *customer handling* dengan melayani 55,6 juta pesan yang masuk ke *contact center* BRI selama tahun 2023. Sabrina juga memiliki tingkat kepuasan layanan sebesar 69,8%, meningkat dari 57,7% di tahun 2022.

Dari sisi *operation* dan infrastruktur ketiga *data center* kami juga memberikan pondasi yang andal, dibuktikan dengan 3 (tiga) sertifikasi Tier III yang kami peroleh dari *uptime institute* yaitu *Tier Certification of Design Documents* (TCDD), *Tier Certification of Construction Facilities* (TCCF), dan *Tier Certification of Operational Sustainability* (TCOS). Dari sisi keamanan informasi, BRI telah memiliki kebijakan *cyber security* yang mengatur terkait keamanan informasi BRI secara *bank-wide*, dan fungsi pemantauan *cyber threat* secara kontinu untuk menjaga keamanan sistem BRI secara proaktif. BRI telah menyusun *Enterprise Security Architecture* dan kebijakan *cybersecurity* berdasarkan pada NIST *Cyber Security Framework* yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan *cyber security* di BRI.

Selain itu, di tahun 2023 BRI telah melakukan *IT Maturity Assessment* sesuai amanat Kementerian BUMN dengan score 4,66 dari 5,00 poin berdasarkan *best practice* COBIT 2019. BRI juga membuktikan kemampuan maturitas digital dengan capaian Tingkat 2 (skor 80,50 dari total 100), sesuai pedoman asesmen Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Strategis Teknologi Informasi



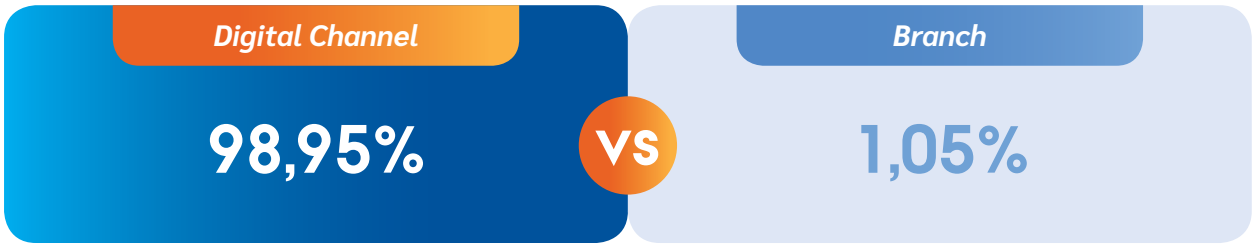
Strategi *Digital* & Teknologi Informasi BRI disusun mengacu kepada BRIvolution 2.0 dan disusun berdasarkan *framework* **GREAT** untuk periode Tahun 2021-2025 dengan detail sebagai berikut:

1. ***G**room Breakthrough Innovation*: Pada tahun 2021-2022, BRI telah membangun fondasi yang mendukung *platform omni-channel* berbasis kapabilitas bisnis dengan tujuan agar seluruh layanan dapat terintegrasi untuk selanjutnya *platform-platform* ini terus dikembangkan secara berkelanjutan. BRI juga mengadopsi *automation* pada beberapa proses bisnis. Kemudian, di tahun 2023-2024, BRI berfokus pada optimalisasi *open banking* dan membangun ekosistem *digital*, serta di tahun 2025 meningkatkan *customer experience* dengan berfokus pada *next-gen open banking*.
2. ***R**esilience IT Platform*: Di tahun 2021-2022 BRI telah mengimplementasikan *Enterprise Architecture Management* (EAM) dengan tujuan menyelaraskan arsitektur teknologi informasi (TI) dengan kebutuhan bisnis, meningkatkan IT *resilience* dengan mengimplementasikan *Active-Active Data Center* dan di tahun 2023-2024 akan berfokus pada penerapan *composable architecture* yang aman, handal, dan *agile*, serta di tahun 2025 berfokus pada *next-gen platform* yang bertujuan untuk pertumbuhan bisnis.
3. ***E**xcel Data-driven Organization*: Di tahun 2021-2022 BRI telah memiliki sistem *data privacy* dan *data protection* yang *robust*, di tahun 2023-2024 BRI akan terus meningkatkan kapabilitas AI (*Artificial Intelligence)* dalam pengembangan *platform* di BRI, serta di tahun 2025 diharapkan BRI menjadi *The Best-in-Class Data & Analytics* dalam meningkatkan BRI *Cross-selling*.
4. ***A**gile 10x Governance*: Di tahun 2021-2022 BRI telah membuat a*gile operating model and governance,* di tahun 2023-2024 BRI akan berfokus pada *DevSecOps* yang *agile* dengan pendekatan produk atau *journey* kritikal, serta di tahun 2025 harapannya BRI sudah menghasilkan produk yang *fully agile*.
5. ***T**ransform Digital Talent*: Di tahun 2021-2022 BRI telah menjadi *Home To The Best Talent* saat *Digital Talent War Room,* di tahun 2023-2024 BRI akan berfokus pada *Employee Value* (EV) sehingga dapat menarik talenta-talenta *information technology* (IT) terbaik serta di tahun 2025 BRI dapat berfokus dengan pengembangan talenta-talenta BRI menjadi *Digital Native*.

Tahun 2023, Direktorat Digital & Teknologi Informasi BRI memusatkan pengembangan pada 3 (tiga) area fokus dengan tema *Composable to the Power of X* (Composable^{X}), sebagai berikut:

1. *Composable^{X} Resilliency*: BRI berfokus dalam pengembangan Infrastruktur TI yang semakin dapat diandalkan dalam mendukung layanan dan operasional bisnis, yang dicapai melalui beberapa inisiatif lanjutan yakni strategi *Active-Active Data Center*, adopsi *Cloud Infrastructure,* adopsi *Automation* untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta penerapan *composable architecture* dalam pengembangan sistem IT.
2. *Composable^{X}* **Open** *Banking*: BRI berfokus dalam mengembangkan kapabilitas *open banking* dan ekosistem *digital* melalui BRIAPI sebagai open API BRI.
3. *Composable^{X}* **AI/ML**: BRI berfokus dalam mengembangkan AI/ML pada superapps BRI dalam beberapa fungsi *support* meliputi *customer engagement, credit underwriting, anti-fraud & risk analysis, smart services and operations.*

Pencapaian Digital & TI di Tahun 2023



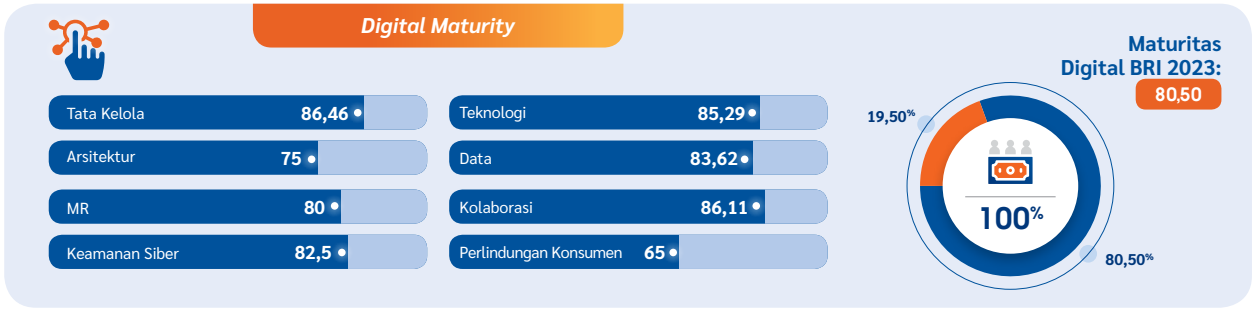
Sepanjang tahun 2023, BRI berhasil mencatatkan pencapaian di bidang pengembangan *digital* yang dibuktikan dengan 98,95% dari total transaksi dilakukan melalui *Digital Channel*. Hal ini tentu berbanding jauh dengan 1,05% transaksi yang dilakukan melalui cabang dan/atau *teller*. Angka tersebut menggambarkan pergeseran pilihan *platform* yang digunakan Nasabah dalam kegiatan transaksi sehari-hari.

Dalam hal perkembangan jumlah transaksi, BRImo berhasil meningkatkan total transaksi dan volume transaksi sebesar 69,2% dan 55,8% dibanding periode tahun sebelumnya. Pada *platform digital lending* Ceria, peningkatan jumlah nasabah dan *sales volume* sebesar 86% dan 113% dari periode tahun sebelumnya.

Selain capaian tersebut, pencapaian Direktorat Digital & Teknologi Informasi BRI di Tahun 2023 dijabarkan berdasarkan 3 (tiga) area fokus pengembangan sebagai berikut:

1. *Composable^{X}* **Resilliency**
   Selama tahun 2023, area IT *Resilience* mencatatkan capaian *availability* yaitu, tingkat *availability* BRImo 99,98% dengan *success rate* mencapai 99,96%. Sistem BRISPOT memiliki capaian *availability* 99,99% dengan *success rate* sebesar 99,99%. Sementara untuk aplikasi NDS, BRI berhasil mencatatkan *availability* sebesar 99,99% dengan *success rate* 99,98%.
2. *Composable^{X}* **Open** *Banking*
   Pengembangan *Open Banking* dan ekosistem *digital* melalui perluasan pemanfaatan BRIAPI dengan total 123 produk API telah ditawarkan serta dimanfaatkan pada lebih dari 23 jenis *digital* ekosistem dengan total lebih dari 1000 mitra kolaborasi
3. *Composable^{X}* **AI/ML**
   Pengelolaan data yang baik menjadi salah satu fokus BRI, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) melalui BRIBRAIN memberikan kontribusi terhadap bisnis melalui rekomendasi akuisisi nasabah dan *merchant* yang tepat sasaran. Hal ini ditunjukan dengan akuisisi pada sektor SME dan Mikro yang meningkat hingga 328% dan 253%.
4. *Excellence Enablers*
   Dalam hal Tata Kelola Teknologi Informasi, BRI telah melakukan asesmen Maturitas Teknologi Informasi (IT *Maturity Assessment*) dan Maturitas Digital (*Digital Maturity Assessment*). BRI berhasil mencapai tingkat Maturitas Teknologi Informasi dengan skor 4,66 dari total skor 5,00 berdasarkan *best practice* COBIT 2019.

Selain itu, BRI juga meraih capaian Tingkat 2 (skor 80,50 dari total 100) sesuai dengan pedoman asesmen yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.





Pengembangan Layanan Teknologi Informasi

Akses BRImo di Mancanegara

BRI senantiasa melakukan inovasi guna meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman pengguna yang baik bagi para nasabah, tidak hanya di dalam namun juga luar negeri. Melalui fitur pembukaan rekening BRI di luar negeri melalui BRImo, Diaspora dan/atau Tenaga Migran Indonesia dapat dengan mudah melakukan transaksi finansial menggunakan nomor *handphone*/SIM Card setempat. Sebagai tahap awal peluncuran layanan ini telah mengakomodir pembukaan rekening BRI dengan menggunakan nomor *handphone* Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, USA, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Malaysia, Taiwan, Singapura, Timor Leste dan akan terus bertambah ke depannya.

Selain itu, BRI juga memperluas layanan transaksi lintas negara melalui fitur *Transfer* Internasional dan pemanfaatan QRIS di luar negeri. Fitur *Transfer* Internasional memudahkan proses pengiriman uang dari tabungan rupiah yang akan langsung dikonversi menjadi mata uang asing sesuai kebutuhan penerima di luar negeri. Sementara pemanfaatan QRIS di luar negeri, dalam tahap awal di Singapura, memudahkan pengguna BRImo untuk melakukan pembayaran di *merchant* tanpa kerumitan konversi mata uang.

Open Ecosystem

Perluasan layanan juga dilakukan BRI melalui kolaborasi bersama pihak ketiga guna memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas perbankan tanpa terpaku pada kanal yang dimiliki BRI. Sejak 2019 melalui peluncuran BRIAPI, BRI melaksanakan perannya dalam meningkatkan ekosistem *digital* dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.

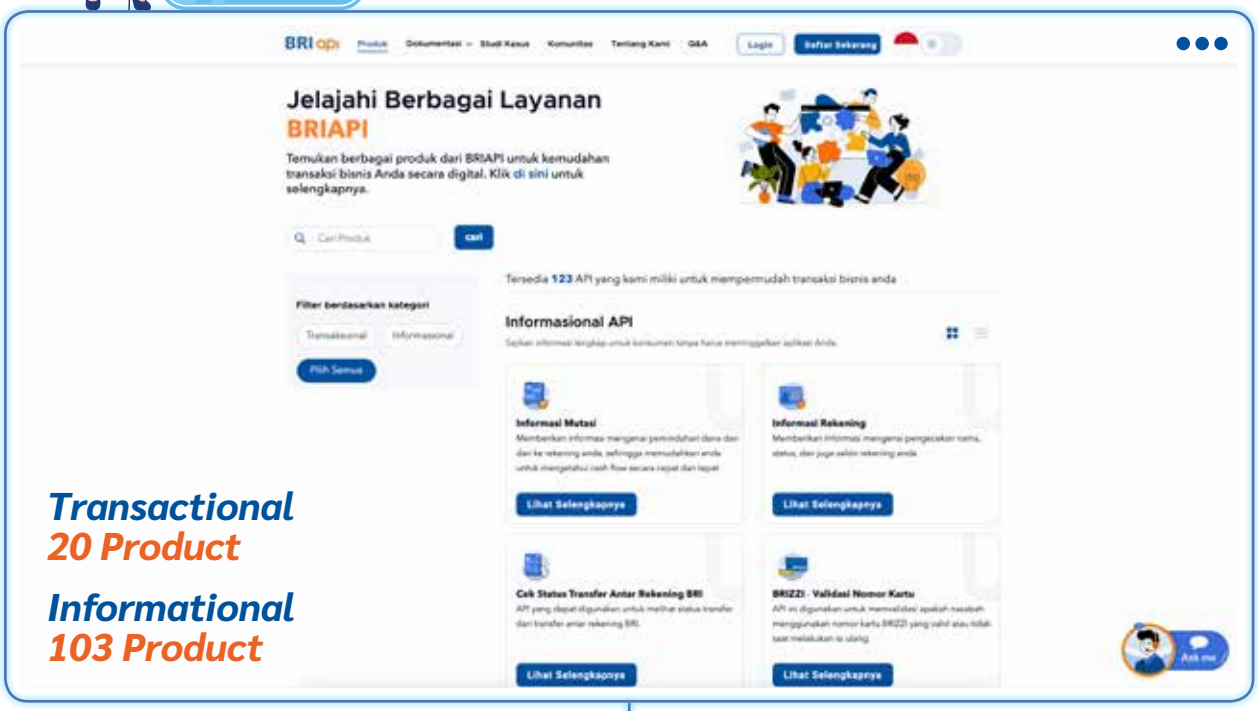
Pengembangan inovasi BRIAPI terus dilakukan dalam berbagai aspek, salah satunya pada jumlah produk API yang ditawarkan. Pada tahun 2023, sudah terdapat 123 produk Open API yang dapat diintegrasikan, bertambah 112 produk dibandingkan akhir tahun 2022. Ini menjadikan BRI menjadi penyedia produk Open API terbanyak di Indonesia, dengan detail 20 produk Open API Transaksional, dan 103 produk Open API Informasional yang telah dimanfaatkan lebih dari 23 jenis digital ekosistem dengan lebih dari 1.000 *total partner*.

Pada tahun 2023, kinerja BRIAPI mengalami peningkatan *sales volume* sebesar 43% dibandingkan tahun 2022. Sementara *fee based income* (FBI) dan jumlah transaksi yang dihasilkan oleh BRIAPI meningkat masing-masing 126% dan 112% selama tahun 2023.



BRIAPI Product

- Virtual Account
- Fund Transfer Internal
- Fund Transfer Ekternal
- BRIZZI
- Direct Debit
- BRIFAST
- Co-branding CC
- Account Information
- Account Statement
- Etc..



- Transportasi
- IT Solution
- Payments
- Fintech & E-commerce
- Pendidikan
- MSMEs
- Asuransi
- Pemerintahan
- Koperasi
- BUMN
- Logistik
- Others

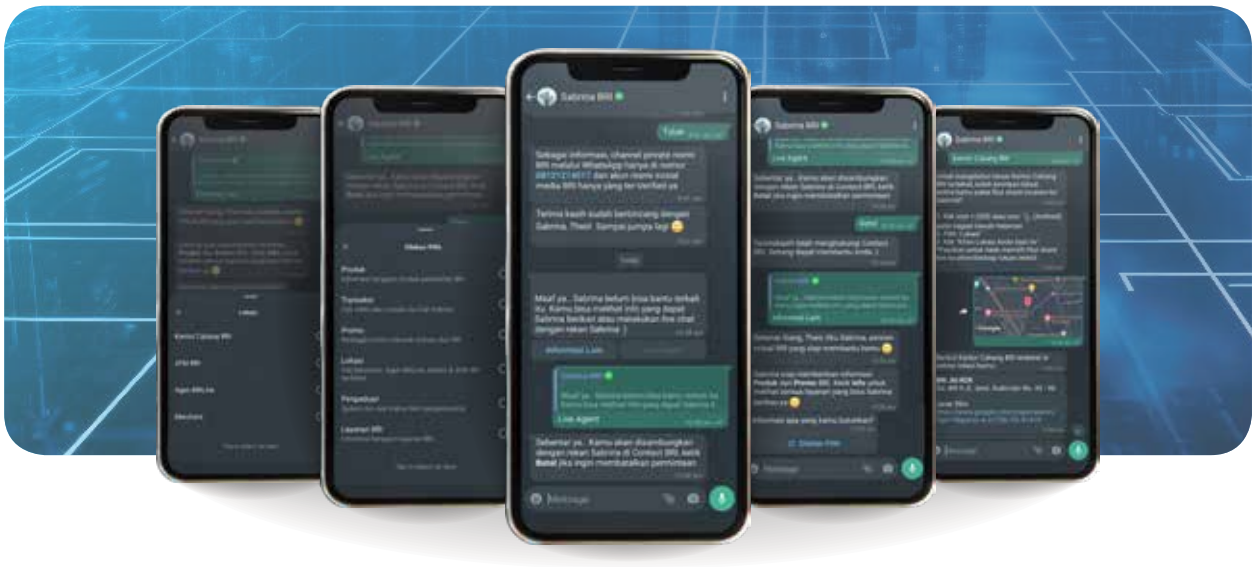
Sabrina



Sabrina merupakan asisten *virtual* berbasis teknologi kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) yang dikembangkan oleh BRI untuk memberikan kemudahan layanan dan informasi kepada nasabah maupun calon nasabah. Sabrina dapat membantu nasabah mendapatkan info produk, promo, maupun lokasi ATM/Unit Kerja BRI terdekat.

Sabrina telah terintegrasi dengan BRImo sehingga nasabah dapat mengetahui informasi saldo rekening maupun informasi mutasi rekening melalui Sabrina. Sabrina juga menjadi salah satu garda terdepan dalam memfasilitasi pertanyaan hingga keluhan nasabah seputar layanan perbankan yang diberikan BRI.

Jumlah pesan yang dikirimkan oleh pengguna ke Sabrina tercatat mencapai 55,6 Juta selama tahun 2023, meningkat dari 19,12 juta pesan di tahun 2022. Rata-rata pertanyaan pengguna yang tidak bisa dijawab (atau biasa disebut *fallback rate*) oleh asisten *virtual* ini terus menurun dari angka 29,46% pada 2022 menjadi 17,8% pada 2023. Kinerja baik ini didukung dengan survei kepuasan di mana 69,8% pengguna menyatakan puas dengan layanan yang diberikan. Angka ini mengalami peningkatan dari angka sebelumnya di 57,7% yang didapatkan tahun 2022. Hingga saat ini, Sabrina telah menjadi *channel* terfavorit dari pengguna untuk melakukan kontak ke BRI.



Infrastruktur Teknologi Informasi

Arsitektur Teknologi Informasi

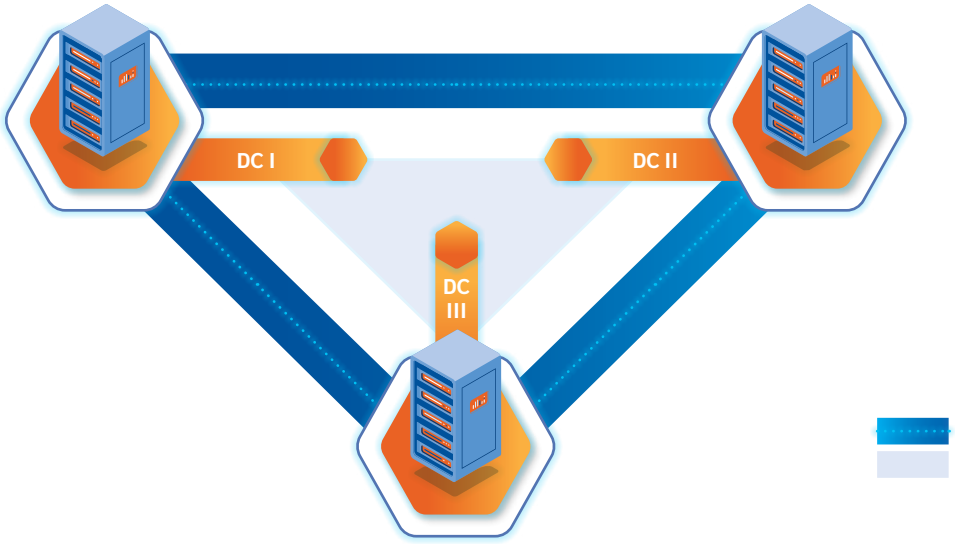
Sejalan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, BRI telah memiliki Arsitektur Teknologi Informasi sebagai landasan pengembangan layanan berbasis TI. Arsitektur TI BRI disusun dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan bisnis, data, teknologi, *security*, serta *framework* dan standar global yang berlaku. Selain itu BRI juga telah melakukan implementasi *Enterprise Architecture Management* (EAM) yang bertujuan untuk mengaktifkan resiliensi, *business agility* dan *fit-for-purpose* untuk mempercepat *time-to-market* dan *customer resilience*.

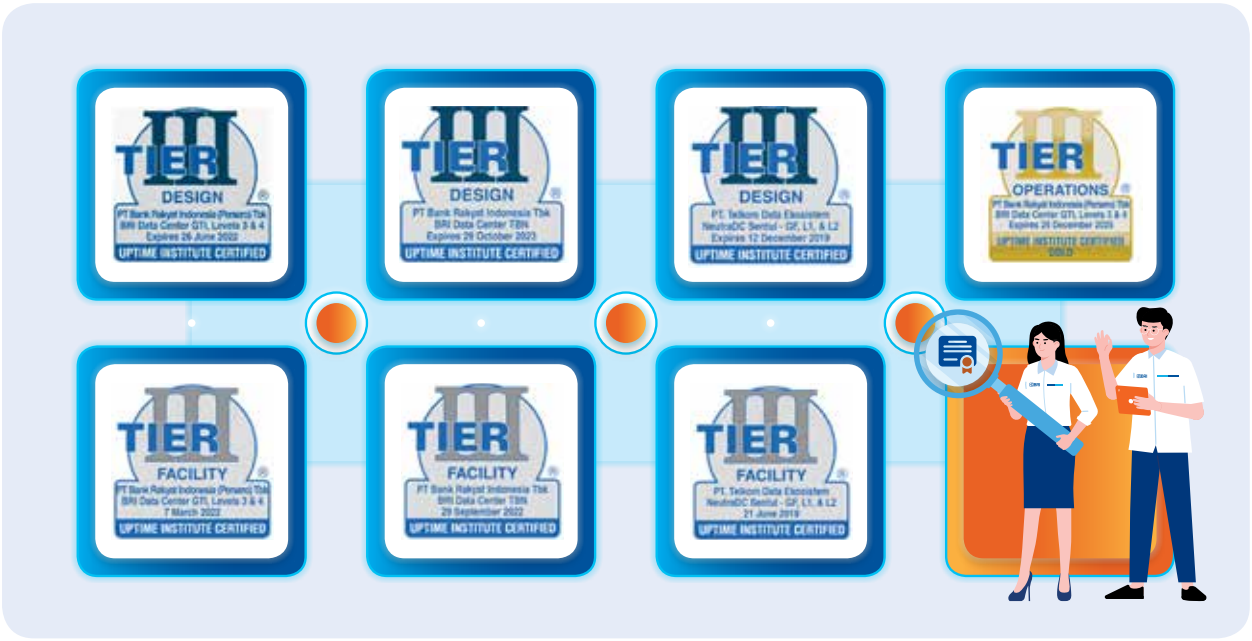
Active-active Data Center dan Adopsi *Cloud*

Infrastruktur TI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga *availability* dan *reliability* seluruh jaringan komunikasi tiga *Data Center* BRI. Ketiga lokasi *Data Center* yang dimiliki BRI tersebut saling dihubungkan melalui layanan link DWDM (*Dense wavelength-division multiplexing*). Layanan DWDM tersebut dikonfigurasi dengan topologi *Triangle* menggunakan perangkat *router* sebagai terminasi di masing-masing lokasi *Data Center*, sehingga diharapkan didapat konfigurasi optimal. Saat ini, link antar *Data Center* ini digunakan untuk berbagai macam transmisi data antar *Data Center,* antara lain trafik transaksi dari unit kerja BRI, *traffic back-*

up dan replikasi, dan juga termasuk trafik antar aplikasi yang saling berkomunikasi antar *Data Center* yang berbeda. Ketiga Data Center BRI juga telah mendapatkan 3 sertifikasi Tier III dari *Uptime Institute* yaitu *Tier Certification of Design Documents* (TCDD), *Tier Certification of Construction Facilities* (TCCF), dan *Tier Certification of Operational Sustainability* (TCOS). Sertifikat desain (TCCD) di upgrade setelah fasilitas memperoleh sertifikat TCCF. Sertifikat fasilitas (TCCF) tetap berlaku selama konfigurasi pada Data Center tidak mengalami perubahan. Perpanjangan hanya diperlukan untuk sertifikat TCOS, yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Untuk meningkatkan resiliensi aplikasi, BRI juga telah melakukan implementasi *active-active critical applications and infrastructure*, sehingga beberapa aplikasi kritikal BRI dapat berjalan secara *active-active* di minimal dua *Data Center* yang dimiliki BRI. Saat ini aplikasi yang telah live di tiga DC BRI di antaranya aplikasi BRImo, BRILink, NDS, BRIVA, ibbiz, BRIAPI, CMS, dan EDW Untuk ke depannya, akan dilanjutkan implementasi aplikasi-aplikasi lainnya.





Selain implementasi *Active-active Data Center* pada ketiga DC yang dimiliki, BRI juga berkomitmen dalam menjaga ketersediaan dan skalabilitas layanan melalui pemanfaatan *cloud*. Pemanfaatan *cloud* membantu meningkatkan fleksibilitas BRI dalam hal *partnership* maupun *time to market*. Modernisasi aplikasi dalam bentuk *container-based* juga terus dilakukan untuk mendorong adopsi *cloud* secara massif di lingkungan aplikasi BRI. Hingga saat ini, BRI telah memiliki 12 aplikasi yang sudah *live* di *cloud*.

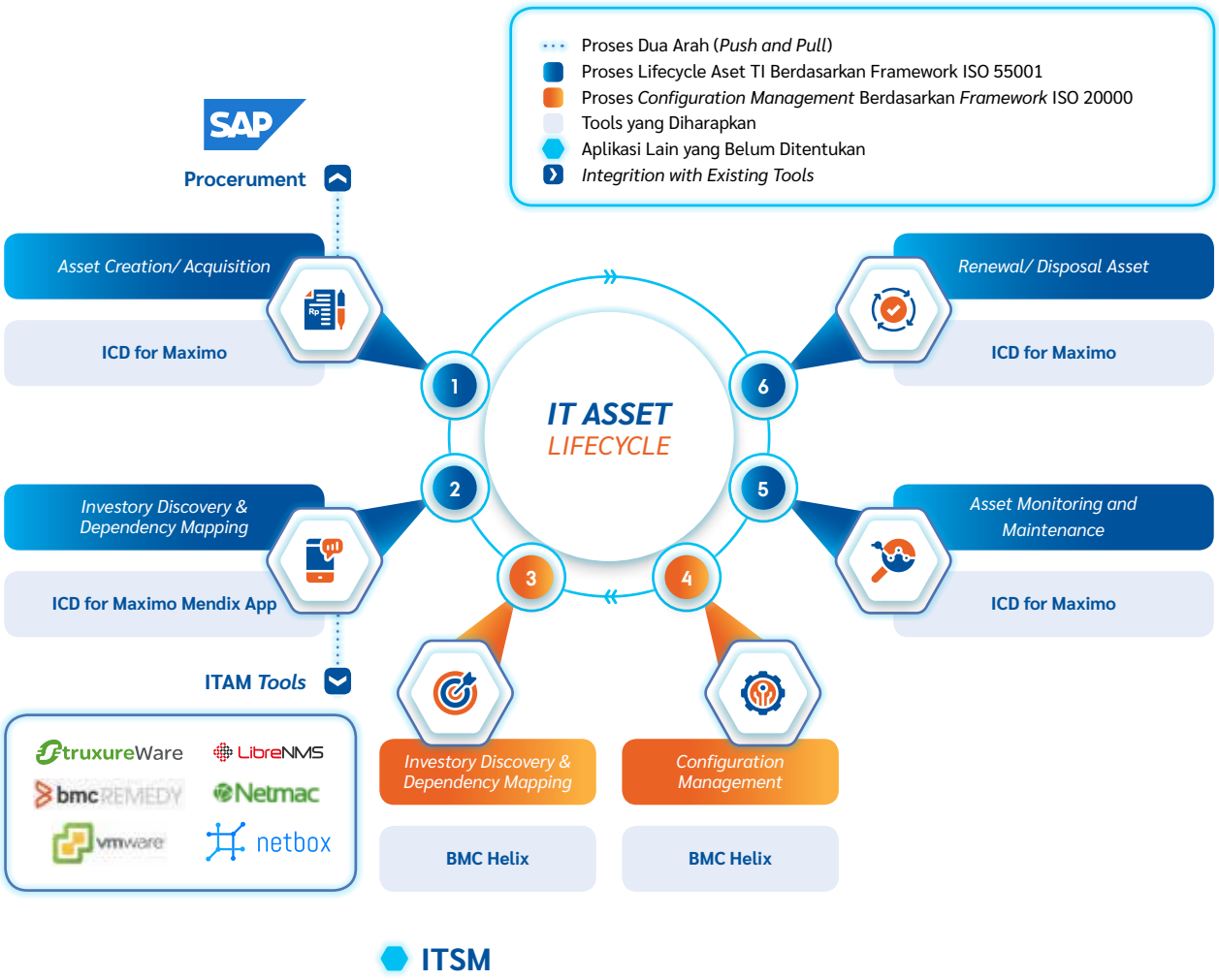
BRI juga terus mendukung komitmen keberlanjutan lingkungan melalui elemen Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan menjaga efisiensi pemanfaatan energi dalam operasional Data Center yang kami miliki. Pada Tahun 2023, BRI mencatatkan capaian *Power Usage Effectiveness* (PUE) index sebesar 1,46 dan 1,56 dari skala 3 pada level Efficient. Hal ini menunjukan bahwa operasional Data Center yang dilakukan oleh BRI telah berjalan dengan pemanfaatan energi yang efisien sehingga memberikan manfaat dalam hal operasional dan lingkungan.

IT *Asset Management* (ITAM) dan *Configuration Management Database* (CMDB)

Perkembangan teknologi memungkinkan BRI untuk melakukan transformasi kinerja lebih baik dalam melakukan aktivitas operasional di BRI. Untuk menunjang hal tersebut, baik dari sisi dukungan *governance,* operasional TI, maupun dukungan pengaman/keamanan, diperlukan manajemen aset teknologi informasi yang akurat, komprehensif dan memadai. Adapun dengan menerapkan sistem manajemen aset TI, perusahaan dapat membangun visibilitas aset TI, memelihara *physical accountability* dari aset TI, mengalokasikan aset TI secara efisien dan produktif, memberikan status konfigurasi aset TI yang akurat sesuai *standar/best practice*, dan membangun repositori informasi aset TI yang terpusat dan lengkap dalam rangka mendukung solusi "*Audit Readiness*" dan "*Data-Information Security*".

Manajemen aset yang memadai dapat digunakan dalam memitigasi risiko keamanan, risiko reputasi dan risiko finansial yang disebabkan inventarisasi yang tidak dapat diandalkan, utilitas aset yang tidak optimal, maupun potensi pelaksanaan pengadaan yang tidak tepat guna. Berdasarkan hal itu diperlukan pemanfaatan sistem manajemen aset IT yang memadai, terintegrasi secara andal dan aman, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan TI BRI sekaligus dalam rangka menerapkan manajemen risiko dan data kelola aset TI yang *accountable*, akurat dan lengkap.

Selanjutnya, penerapan sistem manajemen aset TI diperlukan dalam rangka menyiapkan *maturity* level pengelolaan aset TI BRI untuk mendapatkan pengakuan *standard best practice international* seperti ISO 55001:2018 atau ISO 19770-1:2017.



Tata Kelola Teknologi Informasi

Pengelolaan Data

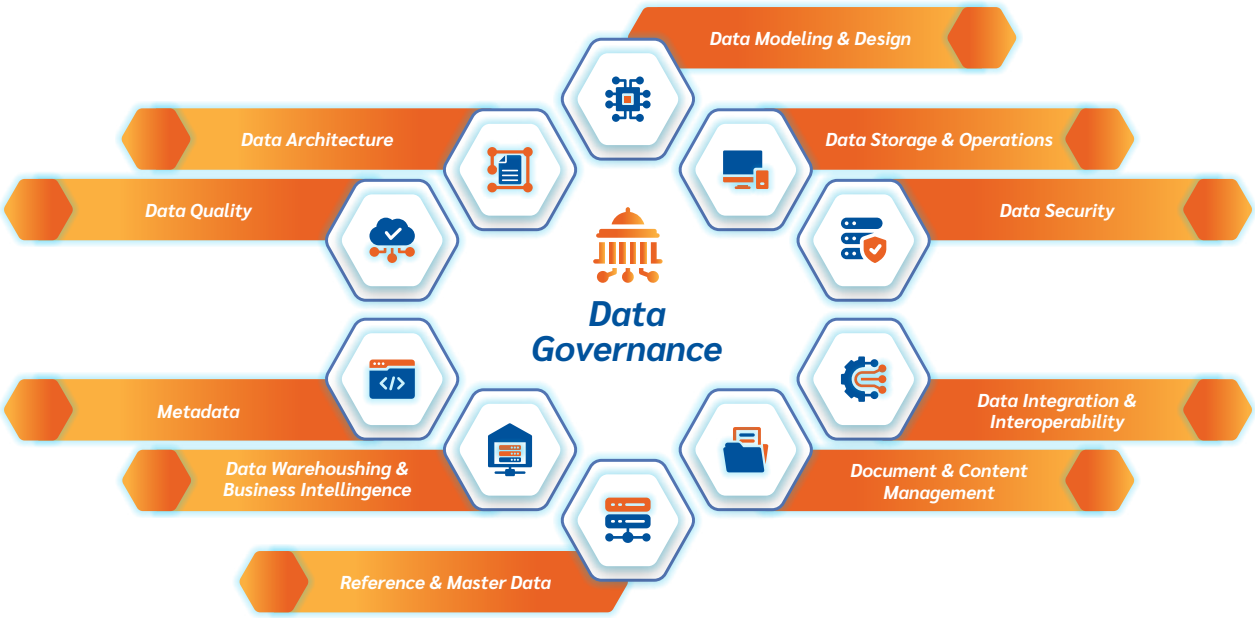
Dalam era *digital*, *data is the new oil*. Oleh sebab itu, BRI terus meningkatkan kapabilitasnya di bidang *Big Data* dan AI. Dalam hal ini, BRI menjalankan beberapa inisiatif untuk mencapai *Best-in-Class Data & Analytics*, antara lain dengan melakukan Implementasi *Master Data Management* yang tidak lain untuk memperkuat kapabilitas BRI dalam mengelola *Big Data* secara BRI Group. Selain itu, BRI juga terus memperkuat penggunaan data dengan terus membangun *Intelligent Data Analysis for Business Development* dengan memanfaatkan teknologi *Big Data* dan AI.

Dukungan penuh terhadap *Data-driven Organization* di BRI dilakukan dengan mewujudkan BRI yang dapat memiliki kapabilitas *data analytics* yang akurat dan terpercaya, serta dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan strategis dan bisnis. Peningkatan kapabilitas data tersebut harus memiliki pondasi yang kuat yaitu Platform Data yang handal. Salah satu *Platform Data* yang BRI memiliki adalah *Big Data Platform, Enterprise Data Warehouse* dan *Master Data Management* yang digunakan dalam pengelolaan Data.

Pengambilan keputusan strategis dan bisnis akan lebih optimal didukung dengan ketersediaan data yang valid dan lengkap. Melalui *Business Intelligence Dashboard and Report*, akan mempermudah *monitoring* pencapaian dan kondisi bisnis saat ini, di mana hal itu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Kebutuhan untuk memperhitungkan atau melakukan *forecasting* kondisi bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan *Self Service Analytics* baik dari aspek performansi transaksi, pinjaman, simpanan, *Fee-Based Income, profitability analytics* ataupun dari aspek lainnya.

Dukungan data *modelling* ataupun *data analytics* lainnya kepada *front-end* ataupun aplikasi bisnis BRI dipenuhi dengan *services* yang dimiliki oleh *Data Hub*, yang dapat memberikan rekomendasi produk secara *cross-selling* dan melalui *profiling* data nasabah BRI. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari sisi Tata Kelola dan Pengelolaan Data (*Data Governance and Management*) yang merupakan pilar dari terbentuknya *Data-driven Organization*. Pemanfaatan *Master Data Management* untuk melakukan kegiatan *merging data* nasabah akan menghasilkan *Golden Data CIF* (*Customer Information File*) yang menjadi *single source of truth* data nasabah yang valid di BRI. Kriteria Kualitas Data, Klasifikasi Data, Perlindungan Data Pribadi juga berperan penting dalam peningkatan Kualitas dan Keamanan Data di BRI. Meningkatnya keamanan data akan bergerak lurus dengan peningkatan loyalitas nasabah BRI, dan meningkatnya minat investor untuk menanamkan investasinya di BRI.

Data Management Book of Knowledge (DAMA-DMBOK) menjadi acuan BRI untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan tata kelola data untuk mendukung tercapainya inisiatif *Best-in-Class Data & Analytics.* Terdapat 11 *knowledge area* yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan data di BRI. Adapun 11 *knowledge area* tersebut meliputi:



Pada tahun 2023 hasil pengukuran *Data Maturity* diperoleh nilai sebesar 3,88 dari 5,00 dengan lingkup pengukuran di Divisi Enterprise Data Management.

BRI berkomitmen untuk terus melindungi data pribadi dengan melalui serangkaian teknis, prosedur, dan kebijakan organisasi untuk mencegah akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, perubahan, penghapusan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum. BRI menyadari bahwa data pribadi adalah aset berharga yang harus dijaga.

BRI berupaya menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dengan mengamankan dan melindungi data pribadi yang kami peroleh. BRI memahami pentingnya privasi sebagai hak fundamental dan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia; dan
- Peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelindungan data pribadi.

Penerapan pelindungan data pribadi untuk setiap aktivitas pemrosesan data pribadi pada siklus hidup data yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pemusnahan data pribadi. Implementasi pelindungan data pribadi dilakukan dengan pendekatan *Privacy Operational Lifecycle*:

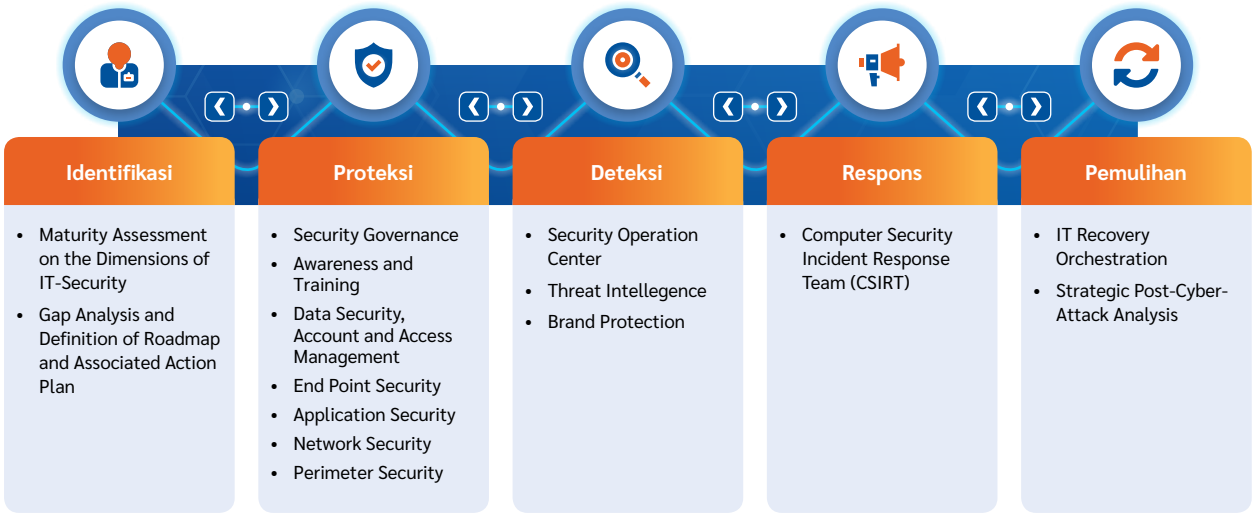
- ***Governance*:** BRI telah memiliki tim yang bertanggung jawab dalam menerapkan program-program pelindungan data pribadi. Kami melakukan pengelolaan data pribadi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan secara internal terkait dengan *Data Management*, Pelindungan Data Pribadi, dan Keamanan Informasi.
- ***Assess*:** BRI terus mengevaluasi proses manajemen privasi saat ini di organisasi dan membangun pemahaman tentang bagaimana proses dan prosedur tersebut selaras dengan praktik terbaik dan persyaratan kepatuhan yang berlaku. Dengan menerapkan Gap Analysis, penyusunan aktivitas perekaman pemrosesan data, penilaian dampak pelindungan data pribadi, dan *data inventory & mapping*.
- ***Protect*:** BRI memiliki langkah-langkah teknis dan organisasional untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan enkripsi, tokenisasi, *data loss prevention*, dan teknologi lain untuk mencegah akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, perubahan, penghapusan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum.
- ***Sustain*:** BRI berkomitmen untuk mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan terus meningkatkan praktik perlindungan data pribadi kami seiring waktu dengan terus menyelenggarakan *training* dan *awareness* kepada seluruh pekerja baik di kantor pusat dan cabang. BRI terus mengikuti perkembangan peraturan pelindungan data pribadi untuk selalu menyesuaikannya dengan kebutuhan yang berkembang.
- ***Respond*:** BRI telah memiliki prosedur penaganan insiden siber untuk menangani pelanggaran data pribadi dengan segera dan efektif. Selain itu, sebagai bentuk tranparansi terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan, BRI telah menyusun dan mempublikasi pemberitahuan privasi yang dapat diakses pada tautan berikut: *https://bri.co.id/web/guest/privacy.*

Dengan pernyataan ini, BRI menegaskan kewajiban untuk memberikan pelindungan terbaik terhadap data pribadi yang kami kelola, dan kami berkomitmen untuk terus memperbarui dan meningkatkan kebijakan dan praktik kami sejalan dengan perkembangan teknologi dan peraturan yang berlaku. Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) Perseroan yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis Perseroan, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi Perseroan.

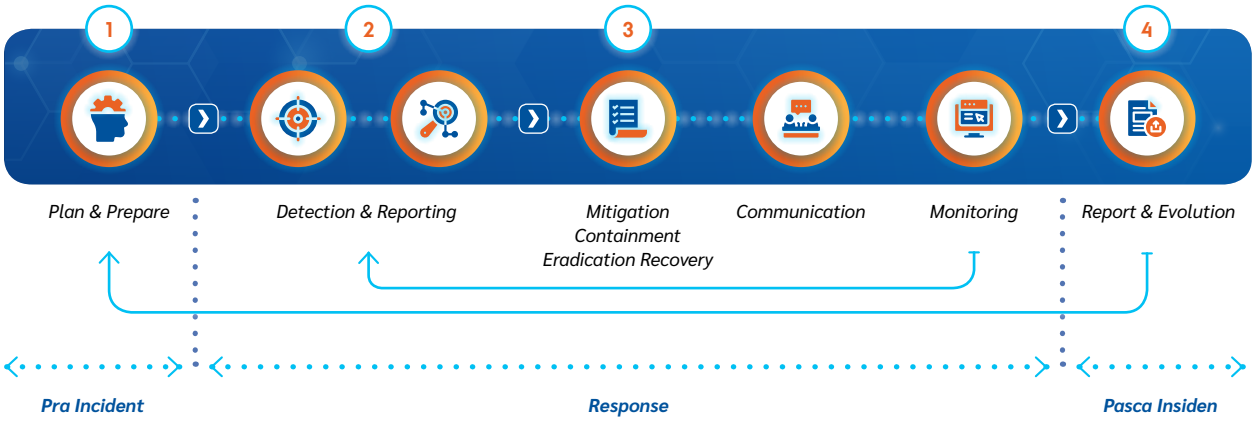
Ketahanan dan Keamanan Siber

BRI menyadari bahwa layanan dari BRI tersebut bersifat penting dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah dan pemangku kepentingan. Sehingga adanya gangguan pada layanan serta kerentanan dan kebocoran informasi/data nasabah dari layanan tersebut merupakan hal yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, BRI berkomitmen melindungi informasi/data nasabah dengan mendukung peningkatan keamanan layanan dari serangan dan gangguan siber.

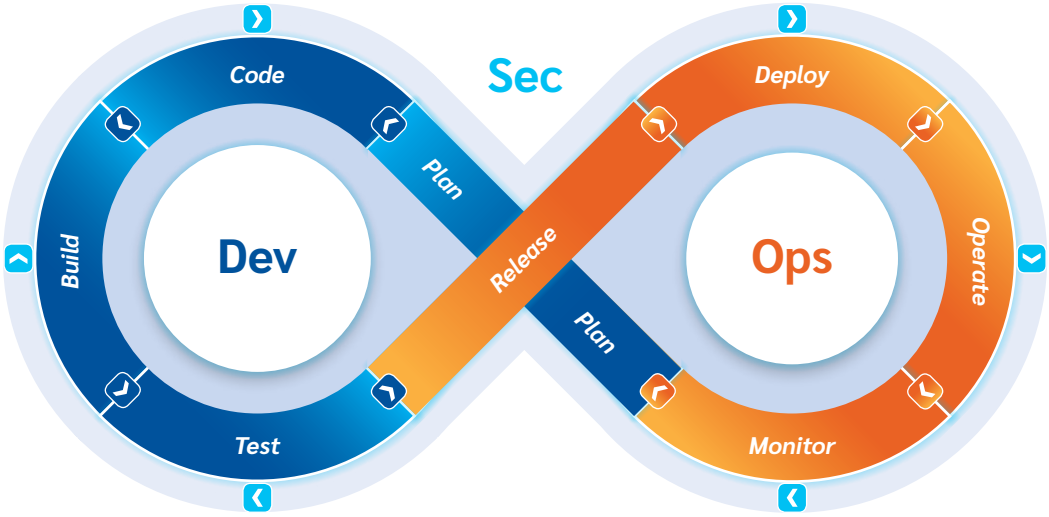
Sesuai perkembangan digitalisasi dan tren perkembangan serangan siber, BRI telah memiliki unit kerja di bawah Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi yang secara khusus menangani keamanan informasi sejak tahun 2018. Unit kerja keamanan informasi dipimpin oleh seorang *Chief Information Security Officer* (CISO) yang memiliki pengalaman terkait *security* dan sertifikasi antara lain *Certified Information System Auditor* (CISA) dan *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP). BRI telah menyusun *Enterprise Security Architecture* yang menggunakan NIST *Cyber Security Framework* yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan *cyber security* di BRI. Selaras dengan ini, BRI juga telah melakukan Security *Maturity Assessment* dengan capaian nilai 3,57 dari maksimal nilai 4.



BRI telah memiliki Kebijakan *cyber security* yang mengatur terkait keamanan informasi BRI secara bank-wide. Kebijakan *cyber security* ini disusun berdasarkan standar internasional ISO27001:2013, PCI DSS dan kebijakan regulator POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Berikut merupakan alur respons terhadap disrupsi, kerentanan, dan serangan terhadap layanan BRI yang ada di *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di BRI, mulai dari perencanaan sebelum insiden hingga evaluasi dan laporan pasca-insiden.



BRI telah menerapkan *Security Shift Left* yaitu dengan menerapkan aspek keamanan yang wajib dimasukkan dalam setiap proses pengembangan sistem/aplikasi (*Software Development Life Cycle* - SDLC) baik pada tahap desain, pengembangan, dan pengujian sistem/aplikasi. Berdasarkan SDLC tersebut, maka sistem/aplikasi BRI yang akan dirilis akan dicek kualitas keamanannya mulai dari tahap *plan* atau perencanaan, *code* & *build*, *testing*, hingga tahap *deploy* dan operasional.



BRI juga menerapkan teknologi *Mobile Apps Security* yang merupakan solusi komprehensif yang dapat melindungi aplikasi *mobile*. Penerapan teknologi ini bertujuan agar aplikasi bisa lebih resistan terhadap serangan siber. Solusi ini juga memiliki *dashboard* terpusat yang dapat memetakan serangan-serangan yang terjadi pada aplikasi sehingga BRI dapat memiliki *visibility* terhadap serangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk menekan ancaman serangan siber yang ditanggung oleh BRI.

BRI memiliki fungsi/bagian khusus terkait *Security Operation Center* (SOC) yang melakukan *monitoring* terhadap *cyber threat* secara kontinu (24 jam, setiap minggu, selama 365 hari). Dalam melakukan *monitoring* keamanan siber, BRI juga melakukan *monitoring* secara proaktif melalui layanan *threat hunting dan threat intelligence service* yang telah dikembangkan lebih lanjut dengan mengikutsertakan *provider* yang berskala internasional. Selain itu, untuk mengawasi dan memitigasi ancaman *Brand abuse,* BRI memiliki program *brand protection* yang bertugas untuk memonitor penyalahgunaan brand di sosial media. Untuk dapat mengelola berbagai macam teknologi tersebut BRI juga memiliki alat keamanan tunggal yang dapat memenuhi semua kebutuhan operasi keamanan yaitu solusi *Security Orchestration, Automation and Response* (SOAR) yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi tugas, proses, dan aplikasi keamanan yang berbeda dalam menanggapi insiden keamanan untuk memperkuat tim SOC BRI.

BRI juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten untuk melakukan identifikasi kerentanan sistem BRI dan *review* terhadap keamanan informasi BRI secara independen berupa *vulnerability assessment, penetration test dan cyber-attack simulation (red team)*. BRI menerapkan penguatan keamanan pada 3 (tiga) *Data Center* sehingga dapat memberikan pengamanan yang lebih menyeluruh dan komprehensif dalam menjalankan komitmen untuk menjaga keamanan *cyber security.* Dengan telah disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, BRI juga telah menyusun Tata Kelola *Data Security* yang menjadi acuan BRI dalam menyelenggarakan pencegahan data *digital* nasabah berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak, baik disengaja maupun tidak, saat data dalam penyimpanan, dalam perjalanan pengiriman, maupun saat digunakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan maturitas keamanan siber, mencegah terjadinya insiden keamanan, dan peningkatan keamanan secara lebih lanjut.

BRI sebagai perusahaan induk dari BRI Group juga memiliki peran penting dalam pengamanan Perusahaan Anak BRI yaitu dengan menjadi koordinator *cyber security* untuk 10 (sepuluh) perusahaan anak. Hal ini dilakukan untuk menekan probabilitas dan intensitas serangan terhadap BRI Group dengan *threat landscape* yang luas sehingga dapat menurunkan risiko digital dari BRI Group.

Budaya Keamanan Informasi

Sebagai bentuk komitmen penegakan terhadap tata kelola keamanan informasi, BRI menerapkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran keamanan informasi yang menyebabkan dampak terhadap bisnis bank. Dalam rangka meningkatkan kepedulian pekerja BRI terhadap pengamanan informasi, BRI secara rutin melakukan program peningkatan kepedulian melalui berbagai bentuk dan media antara lain:

1. Poster dan publikasi internal BRI,
2. *E-learning* kepada seluruh pekerja BRI,
3. Webinar kepada seluruh pekerja BRI, dan
4. *Email phishing campaign.*

Keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi

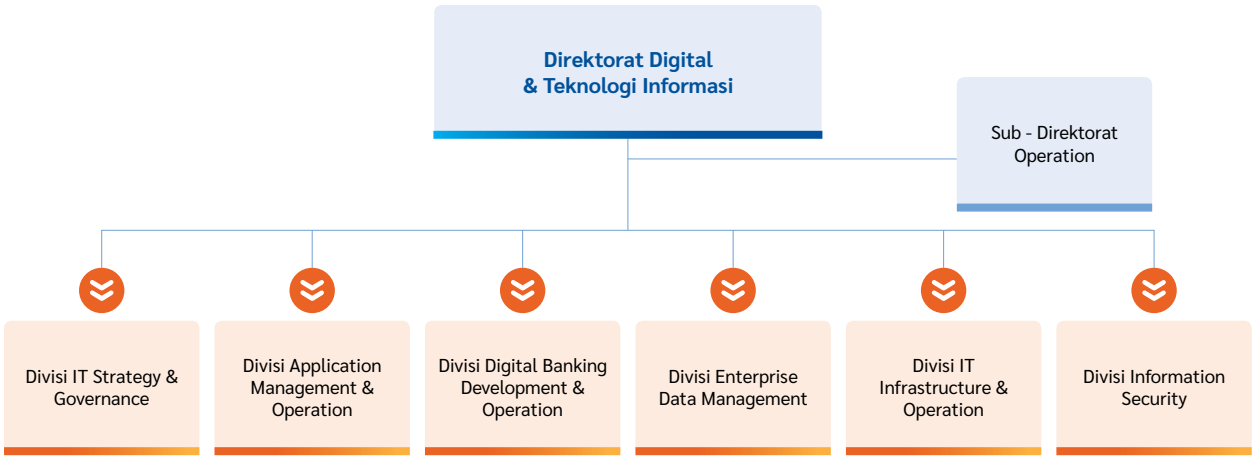
Potensi terjadinya kerusakan, gangguan atau tidak berfungsinya infrastruktur teknologi informasi dikarenakan hal-hal yang tidak dapat dihindari dan diprediksi, seperti terjadinya bencana, gangguan infrastruktur bisa terjadi kapanpun tanpa dapat diprediksi. Bencana pun ada beberapa kriteria yaitu dapat berupa bencana alam, bencana akibat ulah manusia dan bencana akibat kegagalan sistem.

Bencana yang terjadi dapat mengakibatkan infrastuktur teknologi informasi tidak dapat beroperasi atau berfungsi sehingga sangat berpengaruh pada operasional maupun kegiatan bisnis perusahaan. Dengan jumlah, ukuran, dan nilai transaksi yang sangat besar menjadikan operasional Bank menjadi sangat penting dan harus tetap dijaga kelangsungannya walaupun terjadi bencana sekalipun. Apabila tidak ditangani secara khusus, Bank akan menghadapi risiko seperti risiko operasional dan risiko reputasi yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank. Untuk mengurangi dampak terjadinya bencana ataupun gangguan maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan upaya pemulihan dari bencana.

Strategi BRI saat ini untuk meningkatkan resiliensi/ketahanan sistem TI terhadap bencana yakni dengan memiliki 3 *Data Center* yang secara terkonfigurasi secara *active-active* untuk menjaga *availability* ketika terjadi bencana. Hal ini juga mendukung implementasi *Disaster Recovery Planning* berbasis layanan yang secara konfigurasi antara DC-nya menggunakan konfigurasi aktif aktif.

Konfigurasi *Active-Active Data Center* (AADC) memerlukan komponen arsitektur jaringan, *storage*, *network*, komputasi, dan virtualisasi serta komponen aplikasi yang bekerja bersama. Ketersediaan dan pengoperasian aplikasi jika terjadi kegagalan infrastruktur di salah satu *Data Center* merupakan faktor kunci, Rencana pemulihan tersebut dibuat dan dipersiapkan dengan baik sehingga diperkuat dokumen yang menggambarkan pemetaan antara kondisi aplikasi saat ini dengan pemetaan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi arsitektur yang direncanakan serta rencana pelaksanaan pengujian yang dilakukan secara konsisten.

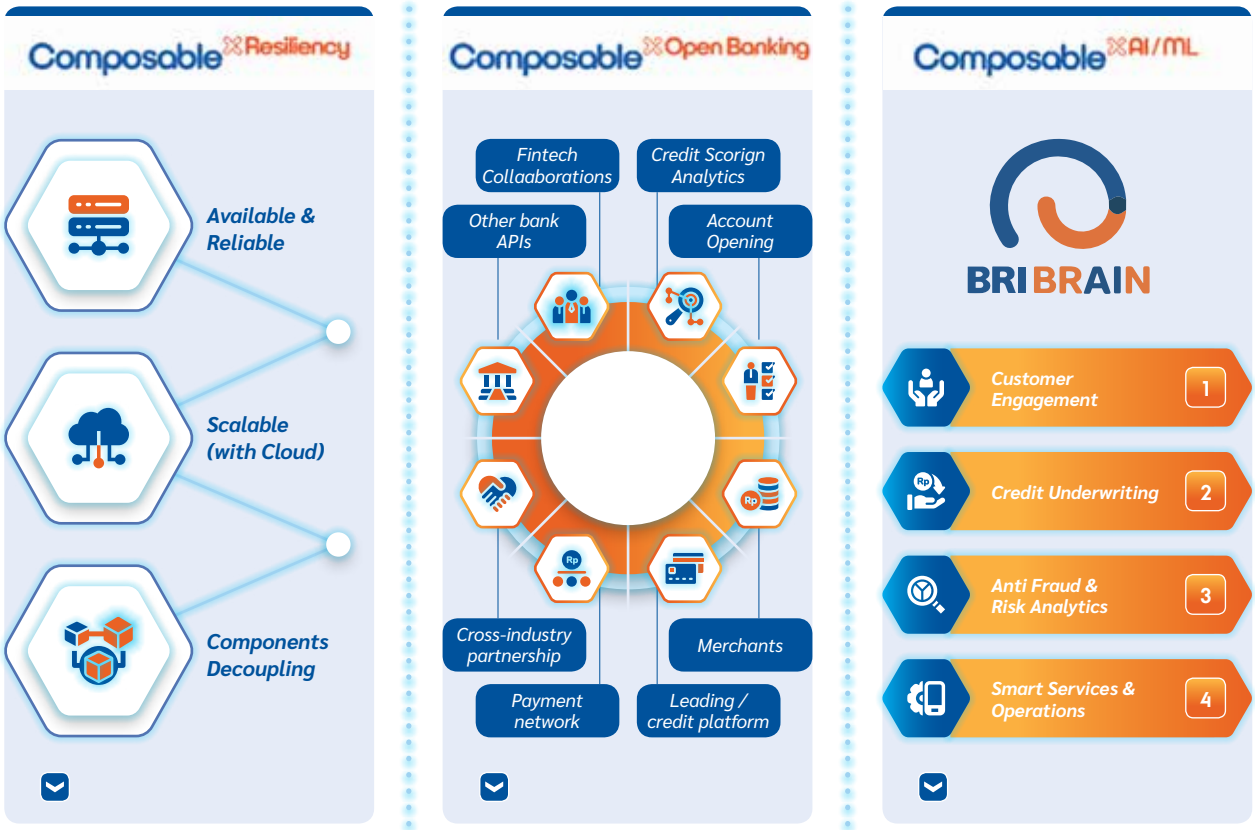
Struktur Pengelola Teknologi Informasi



Dalam menyediakan layanan Teknologi Informasi terbaik untuk mendukung sisi operasional bisnis Bank, Direktorat Digital Teknologi dan Informasi (DTI) memiliki enam divisi penunjang dengan fungsi khusus, di antaranya:

- IT Strategy and Governance Division (ISG): Merupakan divisi perencanaan dan kontrol, yang bertugas dalam merencanakan strategi IT, mengatur *enterprise architecture*, serta mengatur seluruh prosedur dan proses IT agar sesuai dengan kaidah kebijakan baik internal maupun eksternal.
- Application Management & Operation Division (APP): Merupakan divisi pengembangan, *enhancing*, dan operation seluruh aplikasi di BRI.
- Digital Banking Development & Operation Division (DDB): Merupakan divisi yang berfokus pada eksplorasi dan pengembangan inovasi berdasarkan teknologi terkini, di divisi ini juga dikembangkan pengelolaan inovasi dan data yang berbasis AI/ML.
- Enterprise Data Management (EDM): Merupakan divisi pengelolaan data secara *end-to end*, serta berfokus inisiatif-inisiatif data quality dan *data privacy*.
- IT Infrastructure & Operation Division (INF): Merupakan divisi yang berfokus pada *operation* seluruh infrastruktur yang beroperasi di tiga *data center*.
- Information Security Division (ISC): Merupakan divisi yang berfokus pada *operation information security dan data security.*

Rencana Kerja Teknologi Informasi 2024



Platforms/Apps/ Infrastructure must be highly available & consistently reliable *(i.e. capacity planning, MTTR at 1-2 Hour/Available at 99.99%, measured as total - achieved per year)*

Focus on reducing technical debt and accelerate components decoupling *(i.e. in alignment with strategic focus)*

Actively introducing new capabilities to provide end-to-end IT operational monitoring and capacity building *(i.e. Cloud Adoption, ITSM Implementation)*

Extending bank's outreach through partnerships with major ecosystems (both for retail and wholesale) *(i.e. API for wholesale, deeper integration with BVI investee)*

Explore new business model and revenue stream *(e.g. Wealth Investment, Banking-as-a-Service, White- label Mobile Banking, Integrated SME Solutions with Majoo)*

Human Centered UX, focus on daily needs through the lifecycle of customers *(e.g. Deeplink, NLP Smart Search, Voice Interaction, BRImo ID)*

Strengthening AI outcome effectiveness for select use cases *(i.e. Churn, Cross- Sell, Upsell, Scoring)*

Continuously adding useful data sources to DataHub and improve data literacy of stakeholders *(i.e. SSA adoption, BRIOne program)*

Personalized interaction with customers *(i.e. Product Bundling, Robo-Advisor for Wealth Planning)*

Peran Teknologi Informasi dalam mendukung kelancaran operasional bisnis semakin menguat baik dalam bentuk peningkatan kapabilitas maupun dukungan layanan terhadap unit kerja lain guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan/*sustain*. Seiring dengan masih relevannya 3 (tiga) area Pengembangan Tahun 2023 yaitu *Composable to the Power of X* (Composable), Direktorat Digital & Teknologi Informasi BRI melakukan penyesuaian dan penguatan pada area-area tersebut sebagaimana penjelasan berikut:

1. Composable Resiliency , yaitu menjaga serta menyelaraskan kapabilitas dan kapasitas melalui penguatan *Enterprise Architecture*, efisiensi proses, integrasi aplikasi, peningkatan keamanan siber, serta implementasi *active-active* **DC,** *High Availability* dan strategi *cloud adoption* **guna**

meningkatkan *agility, flexible resiliency,* dan bersifat *sustainability*;

2. Composable ⊠Open Banking, yaitu memperluas potensi bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan eksplorasi inovasi melalui BRIAPI, serta peningkatan peran dalam ekosistem melalui *embedded finance* **dan** *Banking-as-a-Services*;
3. Composable ⊠AI/ML, yaitu mendorong peningkatan pemanfaatan *analytical* data & produk untuk mendukung *data-driven decision and recommendation* dengan akurasi tinggi melalui pemanfaatan BRIBRAIN dan *Master Data Management* **(MDM) yang diperluas hingga BRI** *Group*.

Fixed Assets Management & Procurement (FAMP)

RINGKASAN KINERJA BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGADAAN ASET TETAP

Fixed Assets Management & Procurement (FAMP) secara konsisten melakukan implementasi Arsitektur Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan "FAMP Bluebook 1.0" yang telah memuat *framework*, *roadmap* dan arah pengembangan yang terstruktur serta sistematis untuk bidang pengelolaan aset tetap dan pengadaan periode waktu 2021-2025. Salah satu *strategic commitment* FAMP yang juga *align* dengan *Corporate Strategy* BRI adalah Digitalisasi FAMP sebagai bentuk *support* atas implementasi *Digital First* DNA BRI. Pada tahun 2023, FAMP telah melakukan digitalisasi bisnis proses dengan aplikasi atau *platform* antara lain sebagai berikut:

1. *Dashboard* FAMP: *Online Platform* yang digunakan untuk menyajikan *monitoring* proses pengadaan dan data aset tetap yang dimiliki dan dikelola oleh FAMP.
2. *E-Inventory*: *Platform* yang digunakan untuk pengelolaan *inventory* BRI.
3. E-Rudin: *Platform* yang digunakan untuk permohonan *support* layanan rumah dinas pekerja BRI Kantor Pusat.
4. *E-Vehicle*: *Platform* yang digunakan untuk pengelolaan dan layanan pengguna kendaraan operasional BRI.
5. *E*-Kas Porti: *Platform* yang digunakan untuk pengelolaan kas porti dan penggunaan *corporate card.*
6. *Estimation Data Management*: *Platform* yang digunakan untuk menatakerjakan data historis estimasi.
7. BRISurf: *Platform* yang digunakan untuk pengajuan *covering* dan klaim asuransi aset tetap.
8. *E*-Lelang: *Platform* yang digunakan untuk melakukan proses lelang (*bidding*) aset BRI yang sudah masuk masa penghapusbukuan.

Selama tahun 2023, FAMP telah melakukan 22 (dua puluh dua) optimalisasi aset dengan rincian 10 (sepuluh) aset terbengkalai dan 12 (dua belas) aset belum optimal. Selain itu, FAMP juga melanjutkan komitmen untuk mendukung program-program dari Kementerian BUMN yang terkait dengan bidang kerja FAMP antara lain mengenai penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan PaDi (Pasar Digital) UMKM. Mengacu pada Intruksi Presiden No. 2 tahun 2022, FAMP turut serta berperan aktif dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BRI. Di tahun 2023, realiasi penggunaan PDN BRI adalah sebesar Rp12.650.517.712.810 atau sebesar 95,71% dari total pengadaan BRI dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) BRI adalah sebesar Rp9.478.769.978.001 atau sebesar 71,71% dari total pengadaan BRI. Terkait dengan belanja PaDi UMKM, di tahun 2023 BRI melakukan 7.980 transaksi untuk B2B dengan volume transaksi sebesar Rp194,24 miliar dan 15.974 transaksi untuk *E-Proc* dengan *volume* transaksi sebesar Rp13.218 miliar.

FAMP juga konsisten melakukan implementasi konsep *Environment, Social and Governance* (ESG) dalam bidang kerja FAMP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Pada tahun 2023, terdapat beberapa *strategic initiatives* yang dilakukan Direktorat FAMP terkait dengan implementasi konsep ESG antara lain:

1. Rilis SE No. 31-DIR/PLM/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pengelolaan Aset Tetap dan *Procurement* Berbasis Prinsip ESG
2. Gedung *Green Building* Menara BRILiaN dan Menara Medan.
3. Penggunaan Mobil listrik sebanyak 118 unit dan Motor Listrik sebanyak 150 unit.
4. Penggunaan Panel Surya di 93 unit kerja.
5. Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Penerapan konsep waste management dalam pengelolaan sampah di BRI.

Direktorat
Jaringan & Layanan

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT JARINGAN & LAYANAN

Sejalan dengan inisiatif memperkuat kapabilitas *retail banking*, BRI senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada Nasabah dengan terus melakukan transformasi melalui berbagai *Strategic Initiative* baik pada aspek Jaringan Kerja maupun aspek kualitas layanan. Transformasi pada Jaringan Kerja berupa perluasan format kantor baru untuk meningkatkan *experience* dan kepuasan Nasabah, serta konsistensi menjaga kehandalan perangkat pendukung transaksi seperti mesin *Self Service Banking Terminal* (SSBT) dan *E-Channel* (ATM dan CRM). BRI senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan *customer centric*, di antaranya melalui penyediaan layanan pengaduan yang semakin mudah diakses oleh Nasabah.

Secara *overall* fisik Kantor, BRI telah melakukan perluasan *New Branch* Format yang terdiri dari:

1. Penambahan 4 (empat) *Flagship Branch* yaitu di Kantor Cabang BRI Bandung Asia Afrika, Kantor Cabang BRI Palembang A. Rivai, Kantor Cabang BRI Surabaya Rajawali, dan Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin. Saat ini telah terdapat 6 (enam) *Flagship Branch* di mana 2 (dua) lainnya terdapat di Kantor Cabang Khusus BRI dan Kantor Cabang BRI Menara BRILian.
2. Penambahan 4 (empat) *Smart Branch* yaitu KCP BRI Kementrian BUMN, KCP BRI Kota Kasablanka, Kantor Kas BRI Mall Kelapa Gading, dan KK Pondok Indah Mall. Saat ini, telah terdapat 14 (empat belas) *Smart Branch* di mana 10 (sepuluh) lainnya berada di Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada, Kantor Cabang BRI Bandung A.H. Nasution, Kantor Cabang BRI Jakarta Otista, Kantor Cabang BRI Bogor Dewi Sartika, Kantor Cabang BRI Bintaro, Kantor Cabang BRI Bumi Serpong Damai (BSD), Kantor Cabang BRI Tamalanrea, Kantor Cabang BRI Medan Putri Hijau, Kantor Cabang BRI Surabaya Pahlawan, serta Kantor Cabang BRI Solo Slamet Riyadi.
3. Penambahan 2 (dua) *Community Branch* yaitu BRIWork UNS dan BRICafe MD Place. Saat ini telah terdapat sebanyak 8 (delapan) *Community Branch* di mana 3 (tiga) lainnya berada di BRICafe Marina Bay, BRICAfe Smescoffee, BRICafe Jogja, serta 3 (tiga) lainnya berada di dalam Universitas antara lain BRIWork UGM, BRIWork IPB, dan BRIWork UNEJ.
4. Penambahan 5 (lima) *Co-Location outlet* SenyuM yaitu di BRI Unit Sekip Kebon Semai Palembang, BRI Unit SP Timbangan Kayuagung, BRI Unit Prambanan Sleman, BRI Unit Minasa Tene Pangkajene, dan BRI Unit Karossa Mamuju Tengah. Saat ini telah terdapat sebanyak 1.018 *outlet Co-Location* Senyum untuk melayani Nasabah khususnya segmen Ultra Mikro.

Penyediaan dan perluasan mesin pendukung transaksi juga dilakukan dalam upaya BRI dalam memperkuat *journey* Nasabah untuk bertransaksi secara baik *self service* maupun *assisted self service*, yang terdiri dari:

1. Implementasi mesin Digital CS sebanyak 267 mesin di 262 Kantor Cabang BRI. Kapabilitas mesin Digital CS juga terus dilakukan *improvement* yang sebelumnya hanya dapat melayani transaksi pembukaan rekening, cetak kartu Debit, dan cetak buku tabungan, saat ini mampu melayani tambahan transaksi berupa penerbitan Kartu Debit dan *reissue* PIN, serta cetak rekening koran.
2. Penambahan mesin *Replacement Card Machine* (RCM) dari sebelumnya sebanyak 42 mesin di 42 Kantor Cabang BRI menjadi 70 mesin di 70 Kantor Cabang BRI.
3. Penambahan sebanyak 2.000 CRM baru untuk memperluas layanan transaksi, khususnya setoran tunai Nasabah.

BRI senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas layanan seluruh jaringan kerja dan layanan pengaduan nasabah dengan mengedepankan *customer centric* guna menjaga kepercayaan nasabah. BRI terus melakukan *improvement* di sisi layanan pengaduan nasabah berbasis digital yang terdiri dari:

1. Layanan pengaduan yang dapat diakses secara *self service* melalui menu pusat bantuan di aplikasi BRImo (*Complaint in Apps*) dan *Virtual Assistant* BRI Sabrina sehingga penyelesaian pengaduan nasabah dapat dimonitor secara *realtime* oleh nasabah.
2. Virtual Assistant BRI Sabrina dengan fitur *converting conversation to selling* sehingga Sabrina dapat memberikan informasi *merchant* kerja sama BRI terdekat (radius tertentu di sekitar nasabah) yang saat ini sudah bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Selain itu, Sabrina juga memiliki fitur-fitur unggulan lainnya seperti cek saldo atau mutasi rekening serta informasi lokasi kantor BRI dan CRM/ATM BRI.

3. Layanan *Contact* BRI bebas pulsa untuk mempermudah nasabah menghubungi *Contact* BRI 1500017 melalui aplikasi BRImo yang didukung teknologi canggih berbasis jaringan internet dengan keunggulan yaitu kualitas suara yang jernih serta jangkauan jaringan yang lebih luas dan stabil.

Upaya peningkatan kualitas layanan ini dilengkapi dengan diresmikannya Gedung Contact BRI di Jakarta pada 13 Oktober 2023. Semangat melayani dihadirkan melalui desain gedung dengan nuansa dan penamaan ruang kerja yang mengacu pada konsep *customer centric* mulai dari *Emphaty, Fast, Precise,* dan *Excellent* sehingga mencerminkan komitmen dalam menjaga konsistensi layanan.

Improvement tidak hanya dilakukan pada sisi pelayanan *digital*, namun juga dari *back office* melalui otomasi dan percepatan penyelesaian pengaduan nasabah sehingga semakin meningkatkan *Customer Engagement* kepada nasabah.

Monitoring terhadap kualitas layanan juga terus dilakukan, di mana BRI bekerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengukuran secara objektif. Hasil yang diperoleh pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. The Best Contact Center Indonesia 2023 (ICCA)
   a. Platinum – Best Tehcnology Innovation
   b. Platinum – Best Employee Engagement
   c. Platinum – Best Scheduling
2. The Best Contact Center Asia Pacific (APAC), Silver – Technology Innovation Category
3. Infobank Banking Service Excellence Awards 2023
   a. The 1st Best Overall ATM
   b. The 2nd Best Opening Account via website
   c. The 2nd Best Cash Recycle Machine (CRM)
   d. The 3rd Best Contact Center in Service Excellence
   e. The 3rd Best Digital Channel in Service Excellence
   f. Golden Recognition – 5 Concecutive years in Service Excellence.
4. Indonesia WOW Brand 2023
   a. Gold - ATM
   b. Silver - Call Center
   c. Silver - Tabungan
   d. Silver - Bank Konvensional
   e. Bronze - Kartu Uang Elektronik
   f. Bronze - Mobile Banking

Sebagai *journey* memperkuat kapabilitas *retail banking*, pada tahun 2024 BRI akan semakin meningkatkan kualitas layanan di seluruh Jaringan Kerja dengan terus melakukan *improvement* pada *Complain handling* baik melalui *channel* konvensional maupun secara *self service*. Kantor dengan format baru akan terus dihadirkan untuk memberikan *experience* baru, komitmen melayani dengan lebih cepat dan akurat akan dijaga didukung *Frontliner* yang *capable*, serta kapabilitas dan kehandalan mesin pendukung transaksi akan terus ditingkatkan untuk melayani transaksi yang lebih kompleks. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan Nasabah dapat bertransaksi dengan lebih cepat, mudah, dan nyaman baik secara *self service* maupun *assisted* oleh *Frontliner* BRI.

Tata Kelola **Perusahaan**



“Di tengah pelemahan ekonomi global dan ancaman perubahaan iklim, BRI berkomitmen untuk tetap menjalankan Transformasi Berkelanjutan Untuk Tumbuh Semakin Kuat dan Hebat dalam mendukung perekonomian nasional. BRI terus bertransformasi dan berinovasi dalam menciptakan kegiatan bisnis yang berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Kami meyakini dengan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, perusahaan akan mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial serta mampu menciptakan akselerasi pertumbuhan yang tangkas di tengah ketidakpastian perekonomian global”


BRI
BRI SPOT
SenyuM
Qlola
BRI mo



Untuk menjalankan Transformasi Berkelanjutan agar dapat tumbuh semakin kuat dan hebat, BRI berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berjalan secara efektif dan berkembang sejalan dengan transformasi yang dilakukan perseroan. Tata kelola perusahaan kami tercermin dari penetapan visi dan misi yang jelas, *Tone of the Top* yang kuat, penerapan manajemen risiko dan *internal control* yang efektif, budaya perusahaan yang solid, serta keterlibatan perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip dan praktik tata kelola BRI juga mempertimbangkan harapan dari regulator dan pemangku kepentingan lainnya. BRI sebagai Bank Umum terbesar di Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diatur oleh Kementerian BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain mematuhi ketentuan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dikeluarkan oleh regulator, BRI juga menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan *best practice* yang berlaku seperti yang dikeluarkan oleh *Basel Committee*, OECD, International *Corporate Governance Network,* dan KNKG.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) secara terus menerus memperkuat komitmen untuk menerapkan, menegakkan, dan mengembangkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan di setiap lini usaha perusahaan. BRI secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dalam rangka menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta melindungi aspirasi dan hak dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai keberhasilan penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, membutuhkan partisipasi aktif dari *Top Management* perusahaan dan seluruh Insan BRILian, hingga akhirnya terbentuk budaya perusahaan yang kokoh. BRI menciptakan pedoman perilaku yang berisikan kode etik serta nilai budaya perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja. Penerapan nilai budaya perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pekerja dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dengan Kinerja Perusahaan

Melalui penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, BRI berhasil menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik yang berdampak pada tingginya risiko bagi perusahaan. Beberapa pencapaian kinerja dan tata kelola digambarkan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Perusahaan 2023

- Peningkatan Laba
- Pertumbuhan Aset
- Rasio keuangan yang optimal dan sehat
- Kenaikan harga saham

Penghargaan di Bidang Tata Kelola Perusahaan 2023

- Penghargaan *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan kategori *Top* 3 PLC in *Indonesian* dan *ASEAN Asset Class*.
- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* dengan kategori *most trusted company* di tahun 2023
- S&P *Global Corporate Sustainability Assesment* (CSA) dengan skor **63** pada tahun 2023

Tujuan Penerapan GCG

Penerapan tata kelola BRI mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan termuat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Perusahaan menyadari keberlangsungan bisnis perseroan tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga BRI meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga menjadi landasan perusahaan untuk mencapai visi BRI yaitu "Menjadi *The Most Valuable Banking Group and Champion of Financial Inclusion in South East Asia*".

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan nilai tambah berupa:

1. Menciptakan landasan bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.
2. Mengawal setiap proses bisnis perusahaan agar dalam koridor *governance*.
3. Meningkatkan reputasi BRI.
4. Mempertahankan dan menguatkan daya saing BRI.
5. Menjaga kepercayaan *stakeholders* kepada BRI.
6. Meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan.

BRI terus berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memberikan dampak positif dalam mencapai kinerja berkelanjutan perusahaan. Tujuan penerapan tata kelola yang baik adalah untuk:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional.
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mewujudkan terciptanya *good corporate citizen*.

Tahapan Penerapan GCG

Guna memastikan tercapainya GCG *Excellent* di BRI, maka implementasi GCG BRI dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu perumusan, implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tahapan Penerapan GCG



Dasar Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola BRI didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, aspirasi pemangku kepentingan dan kebutuhan Perusahaan. Disamping itu, BRI juga menerapkan tata kelola Perusahaan mengacu pada *best practice* yang berlaku di industri keuangan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BRI antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat lndonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
9. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
11. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
13. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
14. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
17. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
18. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
19. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
20. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
21. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank Umum.
22. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
23. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
24. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
25. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
26. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
27. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Umum.
28. Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
29. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
30. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
31. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
32. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
33. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tangal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
34. Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK/03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
35. Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
36. Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
37. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
38. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
39. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
40. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
41. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
42. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan *Intern*.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Kerangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Kerangka implementasi tata kelola perusahaan BRI didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola BRI terdiri dari *structure, process & outcome* yang antara lain tercermin pada penetapan visi dan misi Perusahaan, kejelasan masing-masing fungsi organ utama dan pendukung dalam pengelolaan perusahaan, proses manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan yang efektif, serta penciptaan budaya perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan Perusahaan.



Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas kinerja berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Prinsip GCG	Penjabaran
Transparansi	1. BRI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan kepentingan dan haknya. 2. BRI mempunyai kebijakan tertulis untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. 3. BRI mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi BRI, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan BRI. 4. Prinsip keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan beserta informasi rahasia BRI dan Nasabah.

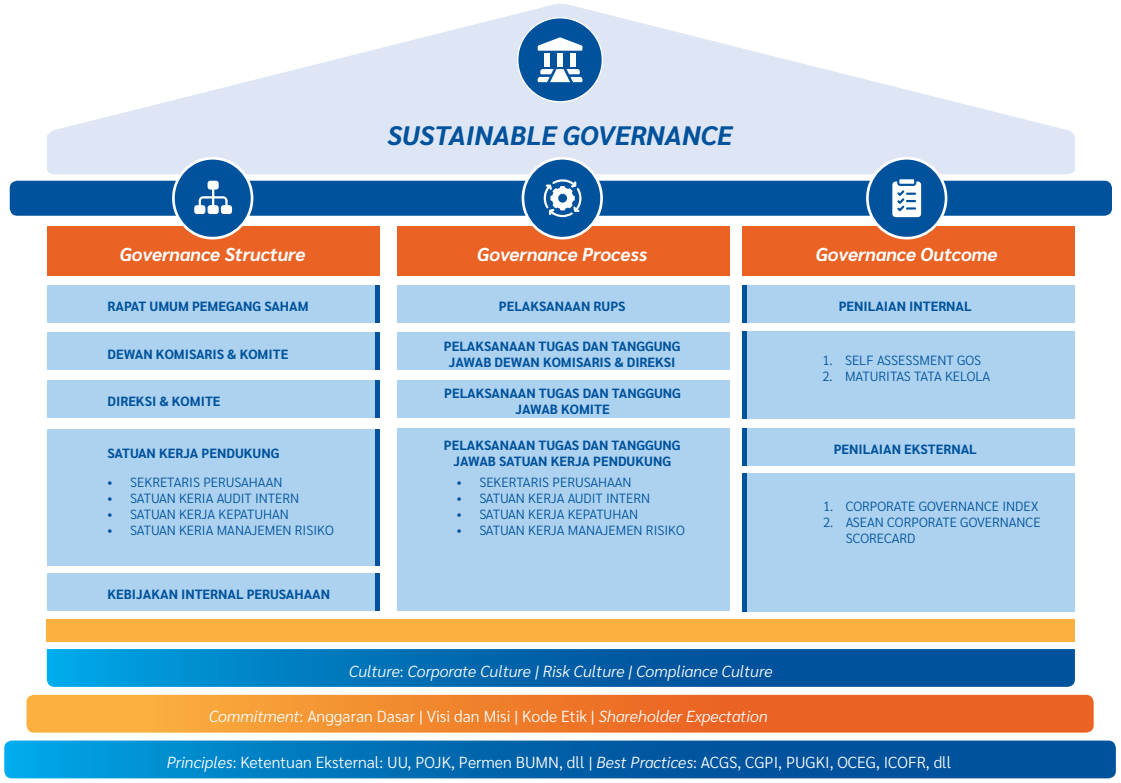
Prinsip GCG	Penjabaran
Akuntabilitas	1. BRI menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* dan *stakeholders*. 2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS. 3. BRI menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas BRI dan *stakeholders* lainnya sesuai ketentuan berlaku. 4. BRI menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi dan misi BRI. 5. BRI memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 6. BRI memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi BRI. 7. BRI memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.
Tanggung Jawab	1. BRI berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal BRI. 2. BRI turut serta dalam memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lainnya yang mendukung untuk terpeliharanya sumber daya alam. 3. BRI bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Independensi	1. BRI menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif. 2. BRI melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajaran dan Kesetaraan	1. BRI memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada *stakeholders* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BRI. 2. BRI memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BRI serta adanya akses keterbukaan informasi.

Struktur, Mekanisme dan Hubungan Tata Kelola

BRI memiliki 4 (empat) pilar Tata Kelola Perusahaan yang baik, meliputi *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Keempat pilar tersebut terwujud pada Organ Tata Kelola Bank yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam memastikan dan mengupayakan terlaksananya penerapan Tata Kelola yang baik, serta dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha mentaati Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BRI telah memiliki Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG *Policy/Charter*) yang berlaku bagi seluruh organisasi dan insan BRI, yaitu Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dirumuskan berdasarkan perkembangan bisnis BRI, evaluasi atas pedoman sebelumnya serta *best practice* GCG tersebut mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yaitu komitmen, struktur, proses dan hasil yang dijabarkan pada bagan berikut:

Framework Tata Kelola Perusahaan BRI



Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

Governance Principles

Untuk menghasilkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan maka BRI berpedoman kepada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kebijakan regulator yang berlaku dan *best practice* terkini.

Governance Commitment

Sepanjang perjalanan BRI dalam melayani jasa keuangan untuk masyarakat, BRI berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG BRI tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta strategi kebijakan bisnis Bank yang kemudian dituangkan ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Bank.

Governance Culture

BRI membangun budaya melalui *Corporate Culture*, *Risk Culture* & *Compliance Culture* dalam rangka mewujudkan aktivitas bisnis yang *prudent* dan patuh disetiap tingkatan organisasi.

Struktur Tata Kelola (*Governance Structrure*)

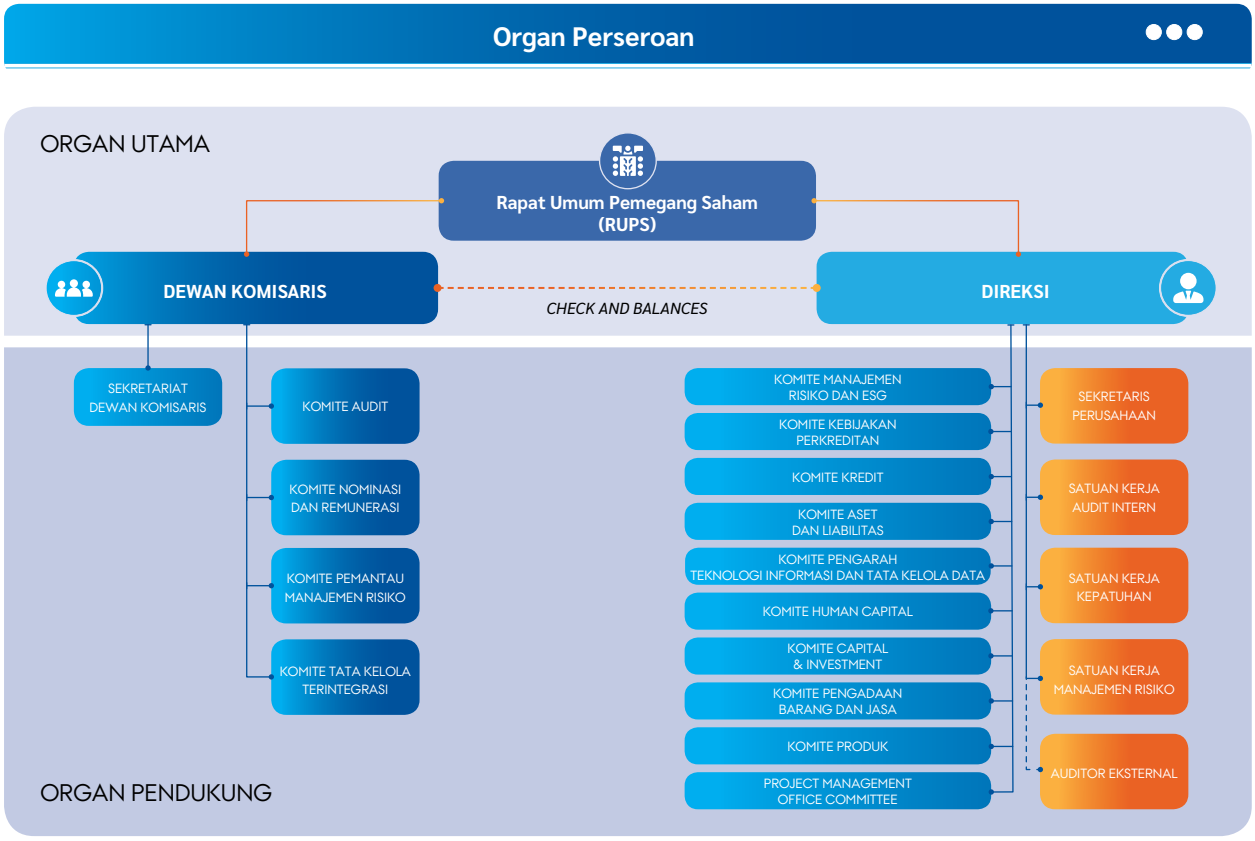
Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Organ Perseroan dan Infrastruktur.

Organ Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme *check and balance*. Struktur Tata Kelola BRI meliputi Organ Utama dan Organ Pendukung sebagai berikut:



RUPS

RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur GCG. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk pengambilan keputusan serta meminta pertanggungjawaban atas hal yang berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dengan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang diselenggarakan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi termasuk memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Direksi

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan Bank termasuk mewakili Bank dengan pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Bank dijelaskan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Organ Pendukung Struktur Tata Kelola

Komite di Bawah Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Pemantau Manajemen Risiko
- Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembahasan lebih rinci terkait Komite di bawah Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Komite di Bawah Direksi
- *Asset and Liability Committee* (ALCO)
- *Risk Management Committee* (RMC) dan *ESG Committee*
- Komite Kredit
- Komite *Capital & Investment*
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data
- Komite Pengadaan Barang & Jasa
- Komite *Human Capital*
- Komite Produk
- *Project Management Office Steering Committee*

Ketentuan lebih rinci terkait Komite di bawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Dewan Komisaris
Merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Dewan Komisaris akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Sekretariat Perusahaan
Merupakan organ pendukung yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan berperan untuk membantu Dewan Komisaris serta Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Penjelasan lebih rinci terkait Sekretariat Perusahaan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Manajemen Risiko
Penerapan Manajemen Risiko bertugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM). Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Manajemen Risiko akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan
Merupakan Unit kerja independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Kepatuhan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Satuan Kerja Audit Intern
Audit Internal merupakan unit kerja yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern bertugas sebagai penyedia *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank. Penjelasan lebih rinci terkait Satuan Kerja Audit Intern akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

Audit Ekstern
Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh Eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa keuangan (BPK), pemeriksa lain sesuai regulasi dan kantor akuntan Publik. Bank wajib menunjuk akuntan Publik dan kantor akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Infrastruktur Tata Kelola

Kebijakan dan Prosedur

Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris dan insan Perseroan, kebijakan internal Bank dievaluasi dan disempurnakan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (*policy owner*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank. Penyempurnaan dan evaluasi atas kebijakan internal Bank disusun sesuai dengan hirarki kebijakan internal Bank.

Kebijakan Penyusunan Rencana Bank

Rencana Bank meliputi:
1. Rencana Jangka Panjang (RJP/*Corporate Plan*) yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan usaha atau strategi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
2. Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target kinerja Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam Kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.
3. Rencana kerja anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

Kebijakan Usaha

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk *Standard Operating Procedure* yang mencakup surat edaran, surat keputusan, Buku Prosedur Operasional dan/atau Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan sejalan dengan kebijakan GCG. Prinsip GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen internal Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas usaha baru harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan

yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kebijakan Pengawasan

Pengawasan Bank diimplementasikan melalui konsep 3 (tiga) garis pertahanan/*Three Lines Model* yaitu:

1. *First Line Model* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kualitas *output* dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. *Second Line of Model* merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
3. *Third Line of Model* merupakan pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada *First Line* dan *Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.
4. Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari:
   a. Kebijakan pengendalian internal, yang disusun dengan memperhatikan ruang lingkup:
      i. Lingkungan pengendalian, contoh: penerapan konsep *three line of defense*.
      ii. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh: *risk assesment* terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank.
      iii. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatkan struktur bank, contoh: kebijakan pengawasan atasan langsung, *dual control* dan sebagainya.
      iv. Sistem informasi dan komunikasi, contoh: informasi yang tersedia di dalam *Data Warehouse* (DWH)
      v. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas atas aktivitas pengendalian intern, contoh: kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.
   b. Kebijakan pengawasan dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian internal, antara lain meliputi kebijakan audit intern, Strategi Anti *Fraud*, kajian hukum dan pengujian kepatuhan.
   c. Kebijakan pengawasan eskternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh auditor eskternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

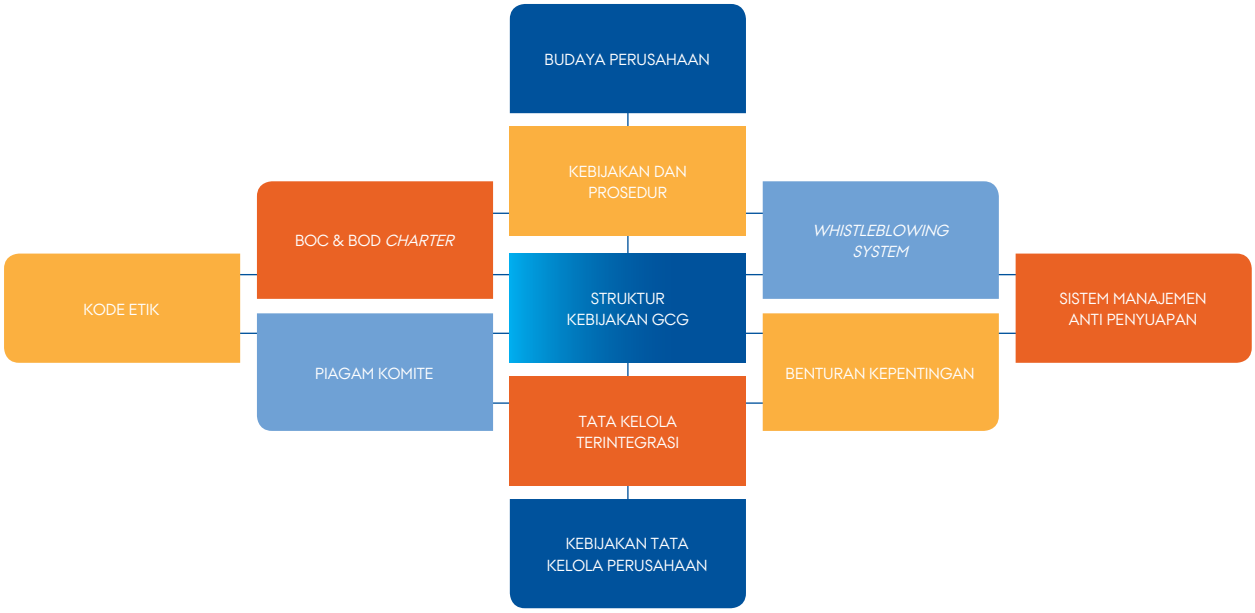
Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:

1. Panduan transparansi dan pengungkapan (*Transparency and Disclosure Guidelines*)
2. Kebijakan Rahasia Bank.
3. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.
4. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

Sebagai bentuk komitmen BRI, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik didukung dengan infrastruktur yang lengkap. BRI menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sekedar untuk memenuhi peraturan, tetapi merupakan bagian dari komitmen untuk menjalankan bisnis yang sehat, bertanggung jawab dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan dunia usaha.

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan



Secara rinci, Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Bank BRI antara lain:

1. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. No. 4 tanggal 06 Oktober 2021.
2. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 1 tentang Tata Kelola dan Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Buku 2 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan No. S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris.
6. Surat Keputusan Direksi No. B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 11-KOM/11/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi.
10. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.
11. Surat Keputusan Direksi No. KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
12. Surat Keputusan Direksi No. B.242-DIR/SKP/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Rapat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. Surat Keputusan Direksi No. B.1784-DIR/CSC/CSM/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Rapat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
14. Surat Edaran Direksi No. SE.21-DIR/KPD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur.
15. Surat Edaran Direksi No. SE.38-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang *Corporate Strategy* (Buku 1 terkait Rencana Jangka Panjang).
16. Surat Edaran Direksi No. SE.38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Strategy* (Buku 2 terkait Rencana Bisnis Bank).
17. Surat Edaran Direksi No. SE.38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Strategy* (Buku 3 terkait Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)).
18. Surat Edaran Direksi No. SE. 38a-DIR/PPM/06/2022 tanggal 23 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Strategy* (Buku 4 terkait Rencana Kerja Fungsional (RKF)).
19. Surat Edaran Direksi No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (Buku 5 Strategi Anti *Fraud*).
20. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*))
21. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 2 terkait Penanganan *Whistleblowing System*)
22. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 3 terkait Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi)
23. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 4 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016)
24. Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 5 terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN))
25. Surat Edaran Direksi No. SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas *Corporate Governance* (Buku 6 terkait Kode Etik)
26. Surat Edaran Direksi No. SE.41-DIR/KEP/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahaan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
27. Standar Operasional Prosedur (SOP) No. SO.92-KEP/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Implementasi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Proses (Mekanisme) Tata Kelola (*Governance Process*)

Proses Tata Kelola suatu perusahaan adalah cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen pencapaian kinerja yang terbaik dan mewujudkan struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip GCG. Proses Tata kelola BRI di antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Direksi

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pendukung
5. Perencanaan Stratejik & Manajemen Kinerja
6. Bisnis Proses dan Aktivitas Perusahaan
7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
8. Sistem Manajemen Kepatuhan
9. Audit Internal

Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Untuk memastikan hasil tata kelola perusahaan telah memadai, maka BRI melakukan penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan setiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas implementasi penerapan dari struktur tata kelola dan proses tata kelola di BRI. Penilaian ini dilakukan juga untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan penerapannya di masa yang akan datang. Penilaian GCG ini dilakukan secara periodik yang terdiri dari penilaian yang dilakukan sendiri (*self-assessment*) dan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai berikut:

Penilaian Internal

Self Assesment GCG

BRI melakukan *self-assessment* atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik setiap semester sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 13/POJK.03/22017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Prinsip – prinsip Tata Kelola terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan operasional Bank. Penilaian dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola perusahaan, yaitu:

1. *Governance Structure*
   Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
2. *Governance Process*
   Penilaian bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan terstruktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
3. *Governance Outcome*
   Penilaian bertujuan untuk menilai *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Berdasarkan SEOJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* tata kelola perusahaan meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Penerapan fungsi audit eksternal
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang melakukan Penilaian

Self Assessment GCG dikoordinasikan oleh Divisi Kepatuhan dan dievaluasi oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala selanjutnya dilaporkan ke OJK.

Hasil *Self Assessment*

Pada penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan pada tahun 2023, hasil *self assessment* sebagai berikut:

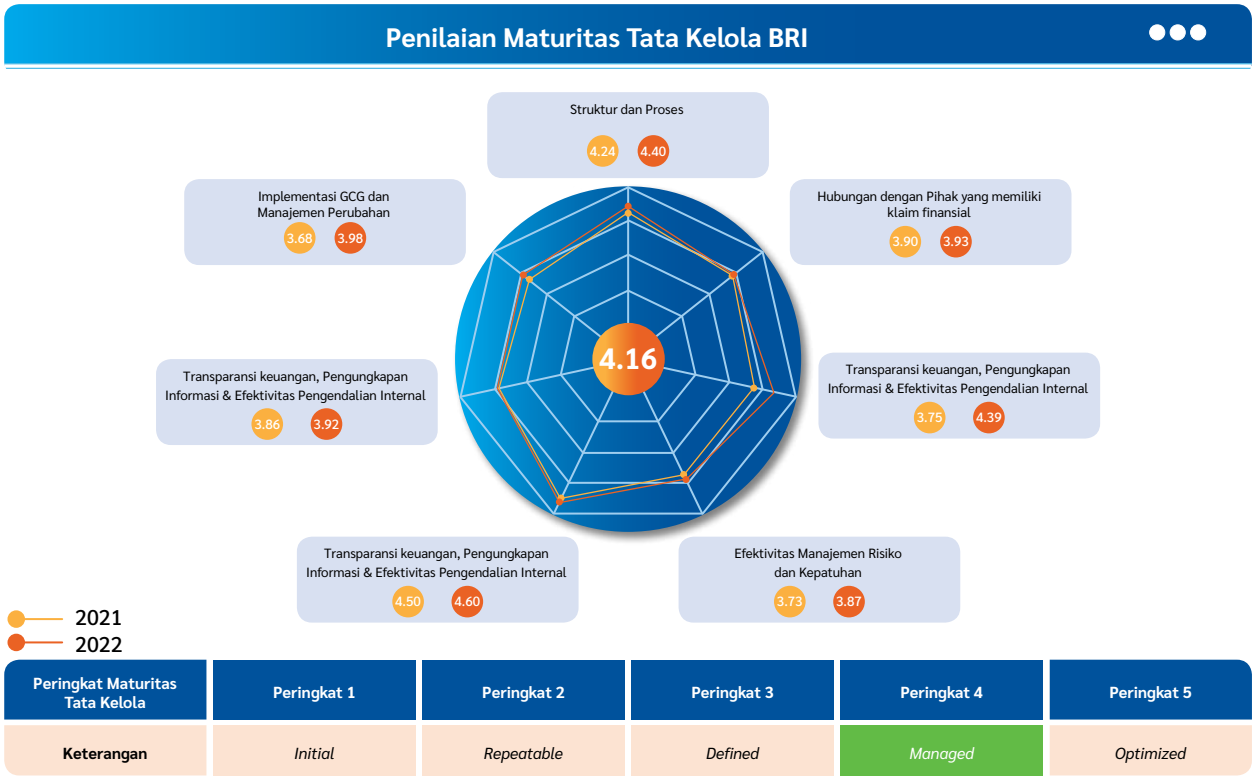
Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola		
Entitas	**Peringkat**	**Definisi Peringkat**
Individual)	2	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI.

Analisis	
Struktur Tata Kelola	Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance structure* secara umum telah memadai dengan telah dimilikinya struktur tata kelola, kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem yang terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BRI. Kelemahan yang terjadi pada *governance structure* telah ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu kinerja Perusahaan.
Proses Tata Kelola	Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance process* secara umum telah berjalan dengan baik, proses bisnis yang dijalankan mengacu pada rencana bisnis yang telah ditetapkan serta setiap organ perusahaan telah menjalankan proses bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, BRI senatiasa melakukan *review* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan *governance process* dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.
Hasil Tata Kelola	Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance outcome* secara umum telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan dan transaparansi informasi, data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas kelemahan dalam pelaporan yang dilakukan, BRI telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan memberikan kemudahan bagi para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Tingkat Maturitas Tata Kelola

Penilaian Maturitas Tata Kelola BRI dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), serta sebagai metode pengukuran yang terstruktur terkait dengan struktur, proses maupun hasil dari implementasi Tata Kelola secara berkala.

BRI telah melakukan evaluasi terhadap tingkat maturitas tata kelola BRI pada tahun 2023. Nilai tingkat tata kelola BRI adalah 4,16 dengan rincian pada diagram berikut ini:



Peringkat Maturitas Tata Kelola	Peringkat 1	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 4	Peringkat 5
Keterangan	*Initial*	*Repeatable*	*Defined*	*Managed*	*Optimized*

Corporate Governance Perception Index

Hasil penilaian CGPI selama 4 (empat) tahun terakhir telah menjadi acuan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan penerapan GCG secara terukur. Secara konsisten BRI terus melakukan perbaikan dan peningkatan GCG secara komprehensif sehingga pada tahun 2023 BRI memperoleh skor CGPI tertinggi. Hal ini merupakan komitmen manajemen BRI untuk secara terus menerus dan berkesinambungan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Most-Trusted Companies

2019	2020	2021	2022	2023
90,75	93,25	95,10	95,18	95,21
Most Trusted Companies	*Most Trusted Companies*	*Most Trusted Companies*	*Most Trusted Companies*	*Most Trusted Companies*

CGPI diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan. Pada pelaksanaan CGPI tahun 2023 dengan tema "Membangun Ketangkasan dalam Kerangka GCG", telah dilakukan penilaian terhadap 3 aspek yaitu:

- *Governance Structure* meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
- *Governance Process* meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
- *Governance Outcome* meliputi *output*, *outcome* dan *impact* dari proses implementasi GCG.

Total Index

Governance Structure	+	*Governance Process*	+	*Governance Outcome*	=	*Total Index*
31,54		31,24		32,43		95,21

Penilaian CGPI di Perusahaan Anak

PT. Pegadaian	BRI Life	PNM	BRI Insurance
88,42	84,40	83,50	82,85
Sangat Terpercaya	Terpercaya	Terpercaya	Terpercaya

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Salah satu penilaian eksternal yang dilakukan terhadap praktik tata kelola BRI selama beberapa tahun terakhir adalah penilaian berdasarkan kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) yang didukung oleh *Asian Development Bank* (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN dan mempromosikan perusahaan tercatat di ASEAN *Asset Class*. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. Pada Tahun 2023, BRI mendapatkan penghargaan sebagai Top 3 PLC (*Public Listed Company*) in Indonesia & ASEAN *Asset Class* PLCs.

ASEAN *Corporate Governance Scorecard* merupakan penilaian yang dilakukan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) dengan penilaian yang mencakup:

1. Hak-Hak Pemegang saham
2. Keberlanjutan dan Ketahanan
3. Pengungkapan dan Transparansi
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan prinsip tata kelola.

Penerapan rekomendasi tersebut dalam GCG BRI adalah sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
A.	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	**Rekomendasi 1:** Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. **Penjelasan:** Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BRI dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara satu hak suara (*one vote one share*). Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan dan petugas mengumpulkan hak suara dengan menghampiri seluruh pemegang saham yang hadir. Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
	Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	• Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diumumkan kepada pemegang saham melalui *website* perseroan. • Prosedur pengambilan suara (*voting*) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik. • Proses pengumpulan hak suara telah diatur dalam Anggaran Dasar BRI dan Tata Tertib RUPS yang dimuat pada *website* Perusahaan. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
A.1.2.	**Rekomendasi 2:** Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. **Penjelasan:** Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Sesuai ringkasan Risalah RUPS Tahunan BRI yang terselenggara pada 14 Maret 2023, seluruh Dewan Komisaris dan Anggota Direksi menghadiri RUPS Tahunan BRI. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
A.1.3.	**Rekomendasi 3:** Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. **Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs *Web* Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs *Web* Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di *Situs Web* dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Risalah rapat dipublikasikan dalam *website* perseroan 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 14 Maret 2023. Adapun RUPST diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2023. Risalah RUPST Bank tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun pada *website* BRI. (www.bri.co.id) Informasi terkait RUPS Tahunan pada tahun 2022 telah disajikan pada Sub Bab Rapat Umum Pemegang Saham pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
A.2.	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	**Rekomendasi 4:** Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. **Penjelasan:** Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini mencakup aktivitas hubungan investor diantaranya *analyst meeting*, *public expose* bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Bank BRI memiliki satu unit kerja khusus yaitu Divisi Investor Relation yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan investor. Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan ini dan juga diungkapkan melalui *Website* Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com). Keterangan: Memenuhi (*Comply)*
A.2.2.	**Rekomendasi 5:** Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. **Penjelasan:** Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di *upload* dalam situs web Perseroan yaitu www.bri.co.id dan www.ir-bri.com. Keterangan: Memenuhi (*Comply)*

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
B.	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
B.1.	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	**Rekomendasi 6:** **Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.** **Penjelasan:** Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2023 adalah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri 7 (tujuh) Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris non Independen. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
B.1.2.	**Rekomendasi 7:** Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. **Penjelasan:** Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
B.2.	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	**Rekomendasi 8:** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. **Penjelasan:** Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Charter* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta *website* Perseroan (www.bri.co.id) Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
B.2.2.	**Rekomendasi 9:** Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. **Penjelasan:** Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Manual* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta *website* Perseroan (www.bri.co.id) Keterangan: Memenuhi (*Comply*)

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
B.2.3.	**Rekomendasi 10:** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. **Penjelasan:** Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diungkapkan pada laporan tahunan BRI 2023 pada Bab Dewan Komisaris. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
B.2.4.	**Rekomendasi 11:** Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. **Penjelasan:** Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2023. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
C.	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi	
C.1.	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.	**Rekomendasi 12:** Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. **Penjelasan:** Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Direksi BRI tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) Direksi. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
C.1.2.	**Rekomendasi 13:** Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. **Penjelasan:** Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
C.1.3.	**Rekomendasi 14:** Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. **Penjelasan:** Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Direktur yang membidangi/membawahi bidang akuntansi atau keuangan di jabat oleh Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain: Pendidikan: Meraih gelar MBA, Finance & Strategy dari Simon School of Business-University of Rochester, Amerika Serikat (2010) Sarjana Peternakan, dari Institut Pertanian Bogor (2001). Pengalaman: Executive Vice President Subsidiary Management Division Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
C.2.	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	**Rekomendasi 15:** Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. **Penjelasan:** Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang tercantum dalam *Board Charter* sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta *website* Perseroan (www.bri.co.id) Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
C.2.2.	**Rekomendasi 16:** Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. **Penjelasan:** Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada laporan Tahunan BRI Tahun 2023. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
C.2.3.	**Rekomendasi 17:** Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. **Penjelasan:** Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada *Board Charter.* Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BRI. Keterangan: Memenuhi (*Comply)*
D.	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan	
D.1.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	**Rekomendasi 18:** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. **Penjelasan:** Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan BRI tentang *Insider Trading* diatur dalam: 1. Surat Edaran (SE) Nomor SE.09.a-DIR/ KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas *Corporate Governance* Buku 6 perihal Kode Etik 2. Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/ KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* Buku 1 perihal Benturan Kepentingan Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
D.1.2.	**Rekomendasi 19:** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud.* **Penjelasan:** Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan penerapan Strategi Anti Fraud di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor : SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (Buku 5 Strategi Anti *Fraud*). Untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam pencegahan *Fraud* serta memberikan respon yang cepat dalam penanganan dan penyelesaian suatu kejadian *Fraud*, maka pengelolaan risiko *Fraud* dibagi menjadi 2 aktivitas besar, yaitu pada saat Fraud masih merupakan suatu potensi risiko (*managing risk*) dan setelah insiden *Fraud* terjadi (*incident handling*). Aktivitas pengelolaan risiko *Fraud* ini diadaptasi dan dikembangkan dari 4 (empat pilar) yaitu: 1. Pencegahan 2. Deteksi 3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
		Untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) BRI telah memiliki kebijakan anti korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* Buku 3 perihal Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi. Untuk menciptakan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI telah menerapkan ISO 37001:2016 dan mengadopsi kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang tertuang pada Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* perihal Buku 4 perihal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam pencegahan korupsi. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
D.1.3.	**Rekomendasi 20:** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. **Penjelasan:** Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor*. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* yang tertuang dalam standar Pedoman *Procurement*.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait Pengelolaan *Vendor* BRI sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE.18-DIR/PLM/05/2023 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Buku 11). Saat ini BRI mengembangkan aplikasi *Vendor Management System* yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE, dimana dalam aplikasi tersebut mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon *vendor*, *monitoring*, pemeliharaan rekanan (*vendor maintenance*) sampai dengan evaluasi kinerja *vendor* sehingga BRI mempunyai *database vendor* yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BRI. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
D.1.4.	**Rekomendasi 21:** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. **Penjelasan:** Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
D.1.5.	**Rekomendasi 22:** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. **Penjelasan:** Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Kebijakan mengenai *Whistleblowing System* di BRI yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* perihal Buku 2 perihal *Whistleblowing System* mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan, perlindungan & kerahasiaan pelapor, serta unit pengelola *Whistleblowing System*. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	*Comply or Explain*
D.1.6.	**Rekomendasi 23:** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. **Penjelasan:** Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Insentif jangka panjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2023. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
E.	Aspek 5: Keterbukaan Informasi	
E.1.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	**Rekomendasi 24:** Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. **Penjelasan:** Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada *Stakeholders* melalui media teknologi informasi, selain *website* Perseroan. *Omni Channel* BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui *channel* yang tersedia yaitu: 1. Tatap muka melalui *Customer Service* di seluruh Unit kerja operasional BRI 2. *Call Centre* 1500017, (+62 577987400) 3. Media Sosial a. Facebook : BankBRI b. Instagram : @bankbri_id c. Twitter : @kontakBRI, @promo_BRI, @bankbri_id 4. Youtube : BANK BRI 5. Chatbot : Sabrina (melalui facebook messenger dan whatsapp/telegram 081-212-14017 Keterangan: Memenuhi (*Comply*)
E.1.2.	**Rekomendasi 25:** Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. **Penjelasan:** Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2023 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Keterangan: Memenuhi (*Comply*)

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BRI
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: 1. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS 2. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya memberikan arahan dan pengawasan kepada Direksi dalam kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerja perseroan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan. Hal ini terlihat dalam keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan pelaksanaan *Fit and Proper Test*. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan perbankan terkini dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan baik di dalam dan luar negeri.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank BRI memiliki fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi diantaranya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko Perusahaan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Divisi yaitu *Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division, Digital Risk Division, Operational Risk Division, Wholesale Credit Risk Analyst Division dan Credit & Product Risk Policy Division*. Dalam upaya fungsi pengawasan, Direksi mengkomunikasikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BRI
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian profil risiko Bank dilakukan dan disampaikan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Review* dan evaluasi fungsi kepatuhan dilakukan setiap semesteran.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	Struktur remunerasi BRI mengacu terhadap Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Penerapan Tata Kelola Remunerasi BRI disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI 2023 pada Bab Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Pengungkapan dan transparansi BRI kepada Pemegang saham disampaikan melalui *website* perusahaan www.bri.co.id terhadap informasi terkini. Keterbukaan informasi Bank BRI juga disampaikan pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan *Public Expose*.

Hubungan Struktur, Mekanisme dan Hasil Tata Kelola

Tata kelola perusahaan diterapkan dalam suatu rangkaian terintegrasi yang meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu *structure, process,* dan *outcome*. Ketiga aspek tersebut dijalankan oleh BRI guna menjamin tersedianya struktur dan infrastruktur tata kelola yang memadai, memaksimalkan efektivitas proses pelaksanaan tata kelola, dan meningkatkan *outcome* tata kelola untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. Saham Seri A Dwiwarna
   Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.
2. Saham Seri B.
   Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
   b. Persetujuan perubahan permodalan.
   c. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
h. Persetujuan penggunaan laba.
i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.

2. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta akses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.

Di luar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
4. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
6. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS dengan ketentuan pemegang seri A dwiwarna atau 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 jumlah saham beredar.
7. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
8. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
9. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan/aksi korporasi yang merugikan pemegang saham atau Perseroan.
10. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
11. Melalui RUPS, melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan ketentuan mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
   a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
   a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
   b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
   c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
2. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal *Investor Relations* antara lain melalui interaksi langsung pada acara *Public Expose, Non-Deal Roadshow, Press Conference*, atau 1-on-1 *Meeting, Conference Call*, dan *email*, serta dokumen yang tersedia pada *website* Perusahaan, *Investor Relations*, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan, dan sebagainya.

3. Jumlah Komisaris Independen di atas batas minimum yang ditetapkan regulator, yaitu 7 (tujuh) orang Komisaris dari total 10 (sepuluh) orang Komisaris.
4. Pemegang Saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Perseroan, di antaranya informasi kinerja Perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki juru bicara yang berwenang berkomunikasi dengan Pemegang Saham. Semua Pemegang Saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama (*equitable treatment*) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Rapat Umum Pemegang Saham

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS melalui situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Perusahaan Terbuka.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS melalui situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Perusahaan Terbuka. Saat pemanggilan RUPS mata acara berikut penjelasannya telah di unggah pada situs Perusahaan dan dapat diunduh.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui situs *web* penyedia e-RUPS, situs *web* Bursa Efek Indonesia, situs *web* Perusahaan Terbuka.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

Ketentuan Kuorum

No.	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1.	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan.	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2	Pengalihan kekayaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan.	Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3	Perubahan hak atas saham.	Dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4	Di luar dari Mata Acara 1 sampai dengan 3 tersebut di atas yang memerlukan persetujuan RUPS.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5	Mata Acara yang perlu persetujuan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen.	Dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.	disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Tata Tertib RUPS

Tata tertib dalam pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengakses atau mengunduh Tata Tertib RUPS pada *website* Perseroan.
2. Tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara RUPS.
4. Pimpinan RUPS atau pihak yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham.
5. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat selesai dijawab. Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
6. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen, yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Upaya Mengajak Pemegang Saham Hadir Dalam RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPS yang disebarkan secara tepat waktu melalui *website* Perusahaan, Bursa Efek serta Koran Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di *website* Perusahaan.
4. Menyediakan *form proxy* pada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memberikan suara dalam RUPS yang dapat diakses melalui *web* Perseroan dan/atau Bursa Efek.

Ketentuan Pemungutan Suara RUPS

Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik memberikan suara *abstain* atau tidak setuju dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya pada waktu pemungutan suara.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melakukan pemungutan suara melalui *e-voting* pada eASY. KSEI
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
5. Pimpinan RUPS akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
6. Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Pekerja Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS Melibatkan Pihak Independen

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu Notaris Fathiah Helmi S.H dan PT Datindo Entrycom.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Ketentuan kuorum, prosedur *voting* termasuk dengan tata tertib Rapat diungkapkan sebelum RUPS dimulai. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik melalui fasilitas *e-voting* eASY KSEI, hal in dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan independensi dan kerahasiaan kepada Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses pemungutan suara melalui *e-voting* pada eASY KSEI.

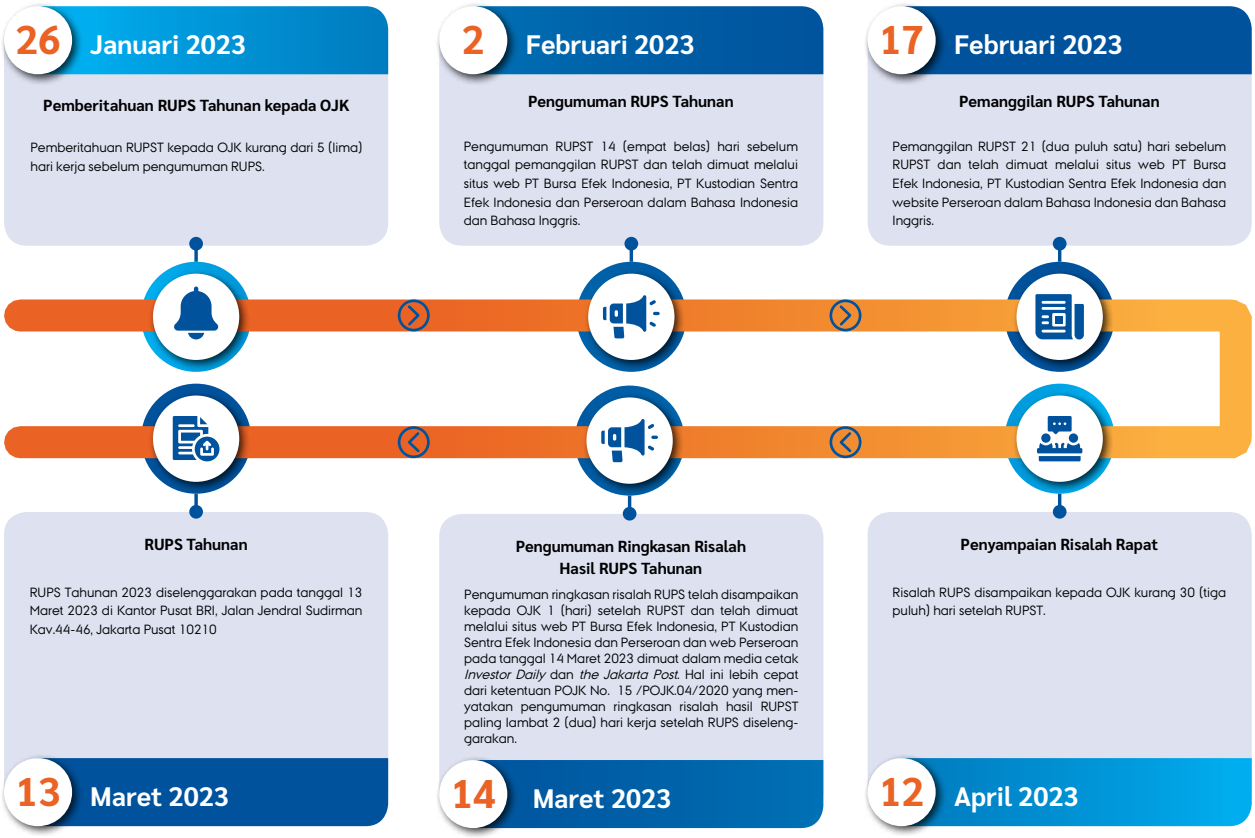
Pada mekanisme pengambilan keputusan, diawali dengan memberikan penjelasan terkait setiap agenda yang akan diputuskan oleh pemegang saham dan minimal jumlah kuorum putusan atas tiap agenda yang diusulkan. Adapun putusan dapat diberikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya. Selanjutnya, Ringkasan RUPS menjelaskan tahapan pelaksanaan RUPS, menjelaskan kepada Pemegang Saham tentang dasar pertimbangan kepada setiap agenda RUPS yang akan mendapatkan persetujuan Pemegang Saham, dan hasil tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 dan Realisasinya

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal Senin, 13 Maret 2023 sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor R.57-DIR/CSC/01/2023 tanggal 26 Januari 2023.
2. Memuat publikasi Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 2 Februari 2023.
3. Memuat publikasi Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17 Februari 2023.

Tahapan RUPS Tahunan 13 Maret 2023



Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, sesuai Sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 136.071.001.108 saham yang setara dengan 90,171% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022
Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Ketiga	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keempat	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2023.
Kelima	Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
Keenam	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.
Ketujuh	Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).
Kedelapan	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir pada RUPS Tahunan 2023. Adapun rincian kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	✓
2.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓
3.	Hadiyanto	Komisaris	✓
4.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓
5.	Hendrikus Ivo*	Komisaris Independen	✓
6.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓
7.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	✓
8.	Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	✓
9.	Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	✓
10.	Agus Riswanto	Komisaris Independen	✓
11.	Sunarso	Direktur Utama	✓
12.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓
13.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	✓
14..	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	✓
15.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	✓
16.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	✓
17.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan	✓
18.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓
19.	Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	✓
20.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	✓
21.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Direktur Keuangan	✓
22.	Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	✓

* Ybs sebagai Ketua Komite Audit

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	135.440.592.847 suara atau 99,537% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	13.477.373 suara atau 0,010% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	616.930.888 atau 0,453% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	135.639.487.467 suara atau 99,683% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.473 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	431.510.168 suara atau 0,317% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Ketiga	126.437.892.593 suara atau 92,921% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	9.323.836.566 suara atau 6,852% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	309.271.949 suara atau 0,227% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keempat	133.816.867.555 suara atau 98,343% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.862.685.797 suara atau 1,369% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	391.447.756 suara atau 0,288% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Kelima	135.749.756.080 suara atau 99,764% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.473 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	321.241.555 suara atau 0,236% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Keenam	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.			Tidak ada
Ketujuh	132.136.015.948 suara atau 97,108% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.607.432.108 suara atau 2,651% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	327.553.052 suara atau 0,241% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedelapan	92.770.309.437 suara atau 68,178% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	42.011.550.436 suara atau 30,874% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.289.141.235 suara atau 0,947% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2023

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Mata Acara Kesatu **Keputusan** 1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00060/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022. 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00079/2.1032/AU.2/10/1681-3/1/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material ('Laporan PUMK'). 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan-Laporan tersebut di atas beserta dokumen pendukungnya.	1. Laporan tahunan termasuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dipublikasikan pada tanggal 10 Februari 2023 2. RUPS telah menyetujui laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 3. RUPS telah menyetujui laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 4. RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Kedua **Keputusan** Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp51.170.312.486.481,20 (lima puluh satu triliun – seratus tujuh puluh miliar – tiga ratus dua belas juta – empat ratus delapan puluh enam ribu – empat ratus delapan puluh satu Rupiah – dua puluh sen) sebagai berikut: 1. Sebesar 85% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43.494.765.613.509,02 (empat puluh tiga triliun – empat ratus sembilan puluh empat miliar – tujuh ratus enam puluh lima juta – enam ratus tiga belas ribu – lima ratus sembilan rupiah – dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham, termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp8.602.823.028.828 (delapan triliun – enam ratus dua miliar – delapan ratus dua puluh tiga juta – dua puluh delapan ribu – delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya sebesar Rp34.891.942.584.681,02 (tiga puluh empat triliun – delapan ratus sembilan puluh satu miliar – sembilan ratus empat puluh dua juta – lima ratus delapan puluh empat ribu – enam ratus delapan puluh satu rupiah – dua sen). Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp23.153.100.328.010,20 (dua puluh tiga triliun – seratus lima puluh tiga miliar – seratus juta – tiga ratus dua puluh delapan ribu – sepuluh Rupiah dua puluh sen) termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp4.594.825.681.932 (empat triliun – lima ratus sembilan puluh empat miliar – delapan ratus dua puluh lima juta – enam ratus delapan puluh satu ribu – sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah. Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar Rp18.558.274.646.078,20 (delapan belas triliun – lima ratus lima puluh delapan miliar – dua ratus tujuh puluh empat juta – enam ratus empat puluh enam ribu – tujuh puluh delapan Rupiah dua puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. b. Dividen untuk Tahun Buku 2022 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*). c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bagian 15% atau sebesar-besarnya Rp 7.675.546.872.972,18 (tujuh triliun – enam ratus tujuh puluh lima miliar – lima ratus empat puluh enam juta – delapan ratus tujuh puluh dua ribu – sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah – delapan belas sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.	Seluruh dividen (termasuk dividen interim) telah dibayarkan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Negara Republik Indonesia sebesar Rp23.153.100.328.010,20, disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara 2. Pemegang saham publik sebesar Rp20.341.665.285.498,82 yang dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*) pada tanggal 12 April 2023 3. Sisa laba bersih 2022 yang tidak dibayarkan sebagai dividen telah dicatat sebagai saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Mata Acara Ketiga **Keputusan** 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022; dan b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2023. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022; dan b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2023.	1. Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022 bagi Dewan Komisaris telah ditetapkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan Surat No.SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023. 2. Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.SR.24-KOM/07/2023 berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan No.SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023.	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Keempat **Keputusan** 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023; 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2023, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.	Dewan Komisaris telah menunjuk, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Kelima **Keputusan** 1. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada LPS; 2. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK; 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dengan memperhatikan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, serta peraturan terkait lainnya.	RUPS telah menyetujui *Resolution Plan* Perseroan, termasuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal diperlukan tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi.	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Keenam **Keputusan** Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.	RUPS telah menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Terbatas.	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Mata Acara Ketujuh **Keputusan** 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh *buyback* sebesar-sebesarnya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang dalam pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau program lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan buyback kepada Direksi Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham *treasury* (*treasury stock*) kepada: a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau program lainnya sesuai dengan Persetujuan OJK; b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	RUPS telah menyetujui pembelian saham kembali Perseroan yang dilakukan secara bertahap oleh direksi	1. Perseroan masih dalam tahap pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan 14 September 2024. 2. Pengalihan saham hasil pembelian kembali saham masih menunggu Perseroan selesai membeli kembali seluruh saham.
Mata Acara Kedelapan **Keputusan** 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: a. Sdr. Sunarso sebagai Direktur Utama b. Sdr. Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro c. Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan d. Sdr. Hadiyanto sebagai Komisaris Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, Keputusan RUPS Tahunan Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 jo RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: a. Sdr. Sunarso sebagai Direktur Utama b. Sdr. Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro c. Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto sebagai Direktur Kepatuhan d. Sdr. Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris 3. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 2 tersebut adalah paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:	Komisaris yang diangkat pada RUPS Tahun 2023 telah melakukan dan mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-160/D.03/2023 pada tanggal 8 Desember 2023.	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Dewan Komisaris Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim Komisaris : Awan Nurmawan Nuh* Komisaris : Rabin Indrajad Hattari Komisaris Independen : Hendrikus Ivo Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa Komisaris Independen : Heri Sunaryadi Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda Komisaris Independen : Agus Riswanto Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa **Direksi** Direktur Utama : Sunarso Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto Direktur Bisnis Konsumer : Handayani Direktur Bisnis Mikro : Supari Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto Direktur Human Capital : Agus Winardono Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha Direktur Jaringan dan Layanan : Andrijanto Keterangan: *) Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.		
5. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada angka 2 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('*Fit & Proper Test*') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam *Fit & Proper Test* oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud. 6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada angka 2 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.		

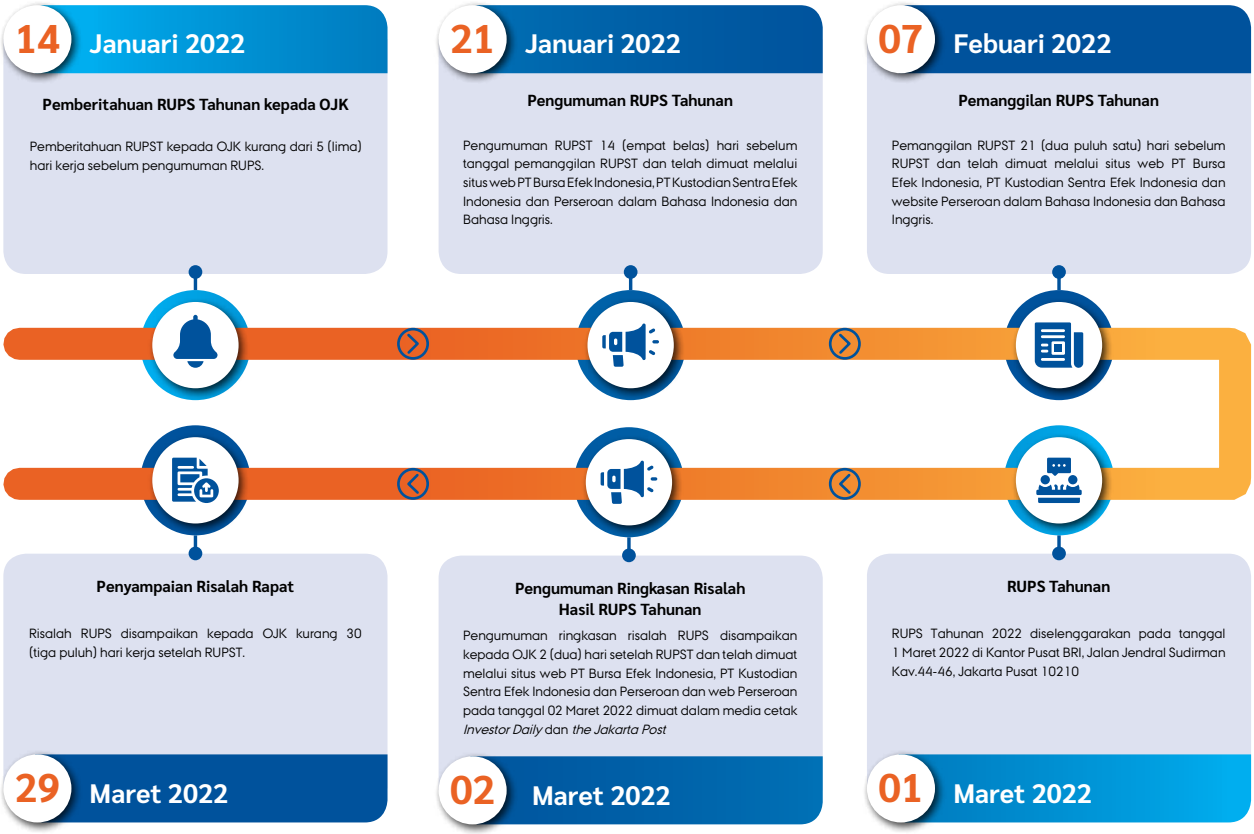
Dengan demikian seluruh keputusan RUPS Tahunan 2023 telah direalisasikan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 dan Realisasinya

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2022 sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.R.59- DIR/ CSC/01/2022 tanggal 14 Januari 2022.
2. Memuat publikasi Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs *web* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 21 Januari 2022.
3. Memuat publikasi Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2022.

Tahapan RUPS Tahunan 1 Maret 2022



Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, sesuai Sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 133.488.652.489 saham yang setara dengan 88,086% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

MATA ACARA

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Ketiga	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Keempat	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Kelima	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.
Keenam	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.
Ketujuh	Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan *(Buyback)* dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan sebagai Saham sebagai Saham Treasuri *(Treasury Stock)*.
Kedelapan	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir pada RUPS Tahunan 2022. Adapun rincian kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	✓
2.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓
3.	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	✓
4.	Hadiyanto	Komisaris	✓
5.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓
6.	Hendrikus Ivo**	Komisaris Independen	✓
7.	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	✓
8.	Zulnahar Usman	Komisaris Independen	✓
9.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓
10.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	✓
11.	Sunarso	Direktur Utama	✓
12.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓
13.	Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	✓
14.	Handayani	Direktur Bisnis dan Konsumer	✓
15.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	✓
16.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	✓
17.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan	✓
18.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓
19.	Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	✓
20.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	✓
21.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Direktur Keuangan	✓
22.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan dan Layanan	✓

Keterangan:
* Hadir secara elektronik
** Ybs sebagai Ketua Komite Audit

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Kesempatan Mengajukan Pernyataan/Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	132.794.043.027 suara atau 99,479% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	130.158.836 suara atau 0,097% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	564.450.626 atau 0,422% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	133.277.575.393 suara atau 99,841% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	115.933.692 suara atau 0,086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	95.143.404 suara atau 0,071% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	133.191.655.592 suara atau 99,777% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	241.941.192 suara atau 0,181% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	55.055.705 suara atau 0,041% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	122.280.557.105 suara atau 91,603% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	10.712.138.057 suara atau 8,024% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	495.957.327 suara atau 0,371% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	128.210.159.912 suara atau 96,045% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	5.204.304.695 suara atau 3,898% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	74.187.882 suara atau 0,055% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara	- (tidak ada)
Keenam	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.			- (tidak ada)
Ketujuh	109.932.525.101 suara atau 82,353% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	21.139.411.854 suara atau 15,836% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.416.715.534 suara atau 1,810% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedelapan	91.160.921.871 suara atau 68,291% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	39.103.585.210 suara atau 29,293% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.224.145.408 suara atau 2,415% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keterangan:
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahun 2022

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Mata Acara Kesatu **Keputusan** 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00049/2.1032/AU.1/07/1681- 2/1/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00092/2.1032/AU.2/10/1681-2/1/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut pelaksanaan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut diatas.	1 Laporan tahunan termasuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dipublikasikan pada tanggal 4 Februari 2022; 2. RUPS telah menyetujui laporan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 3. RUPS telah menyetujui laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 4. RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Kedua **Keputusan** Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 31.066.592.139.593,55 sebagai berikut: 1. Bagian 85% atau sebesar Rp 26.406.603.318.654,52 ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 14.045.104.988.588,05 disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. b. Dividen untuk Tahun Buku 2021 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*) c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2021 sesuai ketentuan yang berlaku. ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. 2. Bagian 15% atau sebesar Rp 4.659.988.820.939,03 digunakan sebagai saldo laba ditahan.	1. Seluruh dividen (termasuk dividen interim) telah dibayarkan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: a. Negara Republik Indonesia sebesar Rp14.045.104.988.588,05, disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. b. Pemegang saham publik sebesar Rp12.361.498.330.066,47 yang dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*) pada tanggal 12 April 2023. 2. Sisa laba bersih 2021 yang tidak dibayarkan sebagai dividen telah dicatat sebagai saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2022.	-	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Mata Acara Ketiga **Keputusan** 1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta perubahannya; 2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya.	RUPS telah mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-12/MBU/09/2021	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Keempat 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021; b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2022.	1. Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2022 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Dewan Komisaris telah ditetapkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan Surat No.SR-21/Wk2.MBU.A/07/2022. 2. Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2022 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.R.68-KOM/07/2022 berdasarkan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan No.SR-21/Wk2.MBU.A/07/2022.	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Kelima **Keputusan** 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022; 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.	Dewan Komisaris telah menunjuk, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.	-	Telah Terealisasi Seluruhnya
Mata Acara Keenam Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.	RUPS telah menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.	-	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
Mata Acara Ketujuh **Keputusan** 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh *buyback* sebesar-sebesarnya Rp3.000.000.000.000,- . 2. Menyetujui pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan *buyback* kepada Direksi Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada: a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja; b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	1. RUPS telah menyetujui pembelian saham kembali Perseroan yang dilakukan secara bertahap oleh direksi; 2. Perseroan telah membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah nominal seluruh buyback sebesar Rp3.000.000.000.000	Perseroan telah mengalihkan beberapa saham hasil pembelian saham kembali Perseroan	Perseroan masih dalam tahap mengalihkan saham hasil pembelian saham kembali Perseroan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 25 Januari 2026 (tidak termasuk perpanjangan)
Mata Acara Kedelapan **Keputusan** 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen b. Sdr. Nicolaus Teguh Budi Harjanto sebagai Komisaris c. Sdr. R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen d. Sdr. Zulnahar Usman sebagai Komisaris Independen e. Sdr. Indra Utoyo sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi f. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Mengalihkan penugasan Sdr. Arga Mahanana Nugraha yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2021, semula sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan. Dengan demikian, masa jabatan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: a. Sdri. Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen b. Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen c. Sdr. Agus Riswanto sebagai Komisaris Independen d. Sdri. Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen e. Sdri. Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer f. Sdr. Andrijanto sebagai Direktur Jaringan dan Layanan 4. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 3 tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:	Direksi dan Komisaris yang diangkat pada RUPS Tahun 2022 telah melakukan dan mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 15/KDK.03/2022, Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 27/KDK.03/2022, Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 28/KDK.03/2022, dan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 29/KDK.03/2022.	-	Telah Terealisasi Seluruhnya

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan

Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama
2	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim
3	Komisaris	Hadiyanto
4	Komisaris	Rabin Indrajad Hattari
5	Komisaris Independen	Hendrikus Ivo
6	Komisaris Independen	Dwi Ria Latifa
7	Komisaris Independen	Heri Sunaryadi
8	Komisaris Independen	Paripurna Poerwoko Sugarda*
9	Komisaris Independen	Agus Riswanto*
10	Komisaris Independen	Nurmaria Sarosa*

Direksi

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Sunarso
2	Wakil Direktur Utama	Catur Budi Harto
3	Direktur Bisnis Konsumer	Handayani
4	Direktur Bisnis Mikro	Supari
5	Direktur Kepatuhan	Ahmad Solichin Lutfiyanto
6	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	Agus Noorsanto
7	Direktur Manajemen Risiko	Agus Sudiarto
8	Direktur Human Capital	Agus Winardono
9	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Amam Sukriyanto
10	Direktur Keuangan	Viviana Dyah Ayu R.K.
11	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Arga Mahanana Nugraha
12	Direktur Jaringan dan Layanan	Andrijanto*

Keterangan:
*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Alasan Belum Direalisasikan
6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('*Fit & Proper Test*') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam *Fit & Proper Test* oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud. 7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.			

Dengan demikian, tidak terdapat keputusan RUPS tahunan 2022 yang belum direalisasikan pada tahun 2023.

Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
1. Melaksanakan keputusan RUPS.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
4. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain.
5. Mengkonsultasikan pemberian kredit di atas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan
1. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktek yang umum berlaku bagi perusahaan.
2. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
3. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko
1. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.

2. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
3. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki kewenangan di bawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

1. Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan mereka berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka, yang tidak boleh lebih dari lima tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Namun RUPS berhak memberhentikan mereka sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya oleh RUPS.

Kriteria Direksi

Kriteria Direksi BRI telah memenuhi persyaratan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN No.PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta ketentuan yang berlaku lainnya.

Kualifikasi Umum

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;
   b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
   d. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
   e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016

Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan Integritas

Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki:

1. Akhlak dan moral yang baik.
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board charter*) Nokep B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020. *Board charter* Direksi berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan. *Board Charter* Direksi ditinjau secara berkala.

Board charter Direksi berisi antara lain:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi
8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

Pembidangan Tugas Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP: 1633-DIR/PPM/08/2023 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Direksi dan *Senior Executive Vice President* (SEVP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2023, pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang tugas
Sunarso	Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan. b. Memimpin seluruh Direktorat dan Sub Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan. c. Pencapaian target Perusahaan. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan. b. Memimpin seluruh Direktorat dan Sub Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan. c. Pencapaian target Perusahaan. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Perusahaan & Direktorat Keuangan serta Sub Direktorat Change Management & Transformation Office. c. Pencapaian target Direktorat Keuangan dan Sub Direktorat Change Management & Transformation Office. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Nama	Jabatan	Bidang tugas
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan dan Sub Direktorat Bisnis Treasury & Global Services. c. Pencapaian target bisnis *wholesale* dan kelembagaan serta bisnis treasury dan global services. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat serta kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Supari	Direktur Bisnis Mikro	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Mikro dan Sub Direktorat Bisnis Ultra Mikro. c. Pencapaian target bisnis mikro dan bisnis ultra mikro (termasuk bisnis BRILink, inkubasi bisnis serta pelaksanaan dan penyaluran Program Pemerintah). d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Kecil & Menengah dan Sub Direktorat Bisnis Komersial. c. Pencapaian target bisnis kecil (termasuk KUR Kecil), bisnis menengah, *value chain* dan bisnis komersial. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Digital & Teknologi Informasi dan Sub Direktorat Operations. c. Pencapaian target Direktorat Digital & Teknologi Informasi dan Sub Direktorat Operations. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Nama	Jabatan	Bidang tugas
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Kepatuhan. c. Pencapaian target Direktorat Kepatuhan. d. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Konsumer. c. Pencapaian target bisnis konsumer. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Agus Winardono	Direktur Human Capital	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi dan pengembangan Direktorat Human Capital dan Sub Direktorat Strategi Human Capital. c. Pencapaian target Direktorat Human Capital dan Sub Direktorat Strategi Human Capital. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Jaringan & Layanan. c. Pencapaian target bisnis dana, bisnis *retail payment*, target jaringan dan layanan. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). f. Pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: a. Pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen. b. Penyusunan dan implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Kecil & Menengah dan Sub Direktorat Bisnis Komersial. c. Pencapaian target bisnis kecil (termasuk KUR Kecil), bisnis menengah, *value chain* dan bisnis komersial. d. Pembinaan bisnis Perusahaan Anak (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). e. Pembinaan kinerja Regional Office binaan (sesuai penugasan yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri). d. Pengelolaan Organisasi Direktorat, Sub Direktorat dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait. Sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan di luar Perseroan, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Sunarso	Direktur Utama	-	-
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	-	-
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	-	-
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan	-	-
Supari	Direktur Bisnis Mikro	-	-
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	-	-
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	-	-
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	-	-
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	-	-
Agus Winardono	Direktur Human *Capital*	-	-
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan, serta reputasi Perseroan maupun perusahaan anaknya. Selain itu, anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan Perseroan selain remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Direksi.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi yaitu:

Waktu dan Tempat

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain rapat Direksi, bersama Dewan Komisaris, Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris.

2. Rapat pada prinsipnya dilaksanakan pada hari tertentu di bulan berjalan. Rapat dapat dijadwalkan pada hari lainnya apabila:
   a. Dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
   b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
   c. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan pertimbangan tertentu, rapat dapat diselenggarakan dengan cara konferensi (melalui media elektronik, antara lain media telekonferensi, video *conference* atau sarana media elektronik lainnya).
3. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi.

Agenda dan Materi Rapat

Usulan agenda dan materi rapat Direksi disampaikan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Pemanggilan Rapat

1. Pemanggilan rapat disampaikan langsung kepada setiap peserta rapat secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau pesan digital dan/atau sarana lainnya dengan tanda terima yang memadai.
2. Pemanggilan rapat tersebut mencantumkan agenda, pemateri, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Disampaikan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau jangka waktu yang lebih singkat jika keadaan mendesak.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. Apabila hasil pemungutan suara tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), maka Rapat Direksi tidak mengambil putusan atas agenda tersebut.
4. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat.
5. Dalam hal terdapat usulan dengan lebih dari 2 (dua) alternatif keputusan dan hasil pemungutan suara belum memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) untuk 1 (satu) alternatif keputusan, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) alternatif keputusan dengan jumlah suara terbanyak, sehingga diperoleh suara setuju lebih dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
6. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir.
8. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, baik yang telah ada maupun akan ada, dengan Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat. Oleh karenanya, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Risalah Rapat

1. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang merupakan bukti sah untuk anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil.
2. Risalah rapat sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
   a. Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.
   b. Agenda yang dibahas.
   c. Daftar hadir yang ditandatangani peserta rapat.
   d. Lamanya rapat berlangsung.
   e. Keputusan yang diambil.
   f. Hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan dan/atau keberatan (*dissenting opinion*) beserta alasannya, jika ada.
3. Risalah rapat didokumentasikan oleh Perseroan.

Rencana Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Adapun jadwal Rapat Direksi diagendakan dilaksanakan setiap hari Senin. Rapat Direksi dapat dijadwalkan pada hari lainnya apabila dipandang perlu.

Agenda Rapat Direksi yang rutin ditetapkan Direksi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Agenda Rapat Tahun 2024	Waktu
1	Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Tahun Buku 2023	Minggu ke-II Januari 2024
2	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024	Minggu ke-I April 2024
3	Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Minggu ke-I Juli 2024
4	Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Minggu ke-II Oktober 2024
5	Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Minggu ke-II Januari 2025
6	Evaluasi dan Rencana Revisi Bisnis Bank 2024-2026	Minggu ke-II Juni 2024
7	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025	Minggu ke-IV Oktober 2024
8	Aktivitas Operasional dan Putusan Perusahaan yang Membutuhkan Persetujuan Melalui Dewan Komisaris	Minimal dilaksanakan 1 bulan sekali di tahun 2024

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
1	2 Januari 2023	• Kesiapan Perlindungan Data Pribadi Agenda • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
2	9 Januari 2023	• *Policy and Procedure Governance* • *Update* Angka 31 Desember 2022 dan Laporan *Progress* Audit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
3	11 Januari 2023	• *Update* Rencana *Corporate Act*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
4	16 Januari 2023	• *Update* Rencana Program Kompensasi Berbasis Saham • *Framework* Komunikasi Pekerja BRI	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11	12	91,67%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
5	25 Januari 2023	• Rencana *Buyback* • Metode *Performance Evaluation* • Perubahan Ketentuan Insentif Giro Wajib Minimum dan Devisa Hasil Ekspor • Indeks Bisnis UMKM Q-4 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	91,67%
6	30 Januari 2023	• *Update project* BRIFIRST • Rencana RUPS Tahunan Perusahaan Anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
7	6 Februari 2023	• *Analyst Meeting & Press Conference* Kinerja Keuangan TW IV • *Motivation* Bonus • *Appointed Bank Term* Deposit Valas Dana Hasil Ekspor	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
8	13 Februari 2023	• *Update* RUPST Tahun 2023 dan Dividen *Payout* Tahun Buku 2022 • Rencana Pendidikan Luar Negeri BRI • Laporan SIPK 2022 dan Usulan Ketentuan SIPK 2023	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
9	20 Februari 2023	• Kajian Alokasi OHC 2023 • Rencana Penerbitan *Sub Debt* BRI 2023 • Distribusi *Pool* Bonus RCEO dan RCA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
10	27 Februari 2023	• Portofolio Inisiatif Strategis • Rencana Penguatan *Retail Banking* • Matrix Penilaian Kinerja Unit Kerja 2023	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
11	6 Maret 2023	• *Update Ceremonial* SIPK 8 Maret 2023 • BRI *Excellence Award*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
12	20 Maret 2023	• *Update Central Counterparty* Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) • Strategi Pertumbuhan Dana Ritel • *Inquiry* Dukcapil dan Migrasi NPWP ke NIK • Rencana Pendidikan Luar Negeri BRI	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	12	83,33%
13	27 Maret 2023	• *Overview Business Wholesale* • *Progress* Transformasi Segmen SME, *Value Chain* dan *Enabler* Pertumbuhan Aset	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	10	12	83,33%
14	3 April 2023	• Strategi Dana Mikro • Program Mudik Bersama BRI • *Progress Strategic Workforce Planning*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
		a. *Review Individual Performance Evaluation Process;* b. *Employee Engagement Survey Report* 2022 • Pembahasan Premi/IJP/CNP & Subrogasi Asuransi Kredit															
15	10 April 2023	• *Overview* bisnis konsumer BRI • *Progress Transformation Network* • *Update* rencana implementasi TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosure*) • Evaluasi *Corporate Plan* 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
16	17 April 2023	• *Analyst Meeting & Press Conference* Kinerja Keuangan TW I • Penyampaian Hasil *Survey* Indeks Bisnis UMKM Q1 2023 • Rencana *Revamping Museum* BRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
17	2 Mei 2023	• Pemaparan Hasil Implementasi ICOFR Fase 1 • *New Solution for* 10T • Pelaksanaan BRI *Excellence Award* 2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
18	8 Mei 2023	• Pembahasan Kontrak *Management* BRI 2023 • Laporan Analisis Distribusi Bonus *Pool* Tahun 2022 • Kenaikan Berbasis Kompetensi Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	12	91,67%
19	15 Mei 2023	• Peran BRI dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Moneter Melalui Pendalaman Pasar Keuangan	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
		• *Journey* Sinergi Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur BRI *Group* • *Update* Pinjaman Korporasi															
20	22 Mei 2023	• Brilianpreneur Tahun 2023 • Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
21	29 Mei 2023	• Perubahan Nama Danareksa Investment *Management* • Evaluasi Pinca *Development Program*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
22	5 Juni 2023	• *Update Progress* Internal Audit *Flash Report* • *Journey Operation Risk* • Evaluasi *Corporate Title*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
23	12 Juni 2023	• *Harnessing Disruption Our IT Vision for The Future* • *Human Capital Strategic Issues & Responses* • Prognosa Tabungan (Mikro dan Ritel) sampai dengan Juni 2023 dan Desember 2023;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
24	19 Juni 2023	• *Strategic Issues* Direktorat Bisnis Mikro • *Update Corporate Secretary Division* a. *Sponsorship* BRI Liga 1 2023 - 2024 b. Desain Logo HUT BRI 128th • *Update* Revisi RKAP 2023 dan RBB 2023-2025 • *Corporate Action* Perusahaan Anak BRI • Proyeksi NPL dan CKPN 2023	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
25	26 Juni 2023	• *Strategic Issues & Respons Direktorat Compliance* • BRILIaN Group *Leadership* Forum 2023 • Logo HUT BRI 128th • *Update* Rencana *Corporate Action*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
26	3 Juli 2023	• Laporan *Switch Over Server* BRI • BRIBRAIN: *Harnessing AI for Innovation and Growth* • *Update* Implementasi *Branch Office* Metro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
27	10 Juli 2023	• Prognosa Giro Akhir Tahun 2023 • Rencana Kalender *Events* BRI 2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
28	17 Juli 2023	• *Update* Rencana *Corporate Action* Perusahaan Anak • *Update Project E-Channel Platform*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
29	24 Juli 2023	• *Strategic Issues & Respons Treasury and Global Services* • Strategi Tabungan • *Update Project* BRIFIRST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
30	31 Juli 2023	• *Final Check* Implementasi KC Metro • *Update* Likuiditas dan Usulan PUB Tahap 2 • *Update* DPLK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	10	12	83,33%
31	7 Agustus 2023	• *Progress Limited Review* Laporan Keuangan Juni 2023 • Perubahan Perhitungan ATMR risiko Pasar • Penetapan Direktur Pembina RO dan Perusahaan Anak	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	9	12	75,00%
32	14 Agustus 2023	• *Strategic Issue* and Respons Direktorat Jaringan dan Layanan • Penyampaian Hasil *Survey* Indeks Bisnis UMKM Q2 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
33	21 Agustus 2023	• *Strategic Issue* and Respons Direktorat *Institutional & Wholesale Business* • Penguatan *Strategic Planning* dalam rangka Prioritas Program Kerja • *Analyst Meeting* dan Publikasi Kinerja Keuangan BRI Triwulan II tahun 2023 • *Update* Rencana *Corporate Action* Perusahaan Anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
34	28 Agustus 2023	• *Strategic Issues & Respons Small & Medium* • Subrogasi Asuransi Kredit • *Press Conference* Kinerja Keuangan BRI Triwulan II 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
35	4 September 2023	• *Strategic Issues Change Management & Transformation Office* • *Update* Rencana *Corporate Action* • Postur RKAP 2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
36	11 September 2023	• *Update Project* Integrasi ATM	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
37	18 September 2023	• *Strategic Issue and Respons Internal Audit* • *Strategic Issue and Respons* Direktorat Konsumer • *Update* Implementasi KC Metro • Pembahasan HUT BRI ke 128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
38	25 September 2023	• *Strategic Issue and Respons* Direktorat *Consumer* • *Update* Penyempurnaan BRISURF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	12	91,67%

No .	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
39	2 Oktober 2023	• *Strategic Issue and Respons* Direktorat *Operation* • *Update* Rencana *Corporate Action* Perusahaan Anak • Pemaparan Materi *Corporate Governance Perception Index* 2023 • LTI 2023 - 2025 • *Update* Kegiatan HUT BRI • *Update* Skenario KUR 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
40	9 Oktober 2023	• Revitalisasi SME *Center* Untuk *Refocusing* Kanca Area Metro Melalui Implementasi *Small Business Head* (SBH) • *Human Capital Current Issue* • Tindak Lanjut *Corporate Governance Perception Index* 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	12	91,67%
41	16 Oktober 2023	• *Update* Kegiatan HUT BRI 128 • *Analyst Meeting* dan Publikasi Kinerja Keuangan BRI Triwulan III tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%
42	23 Oktober 2023	• *Update* Rencana *Corporate Action* Perusahaan Anak • Rencana Dividen Interim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
43	30 Oktober 2023	• Materi Perundingan PKB • *Internal Communication* • Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valas Indonesia (Apuvindo) • Nugraha Karya Desa BRILian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	12	91,67%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
44	6 November 2023	• *Update* Qlola Platform • *Update* Produk dengan *Brand* BRI • Persiapan Perundingan PKB 2023-2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
45	13 November 2023	• *Collection* Model ARCI (*Automated Real time Collection*) • *Update* Kebijakan dan Kinerja PUMK Penyaluran Tahun 2023 • *Update* Rencana Pengembangan *Business Model* Perusahaan Anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
46	20 November 2023	• RKAP RBB, RAKB 2024-2026 • *Update* Rakernas BRI • *Update* Rencana *Corporate Action* Perusahaan Anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
47	27 November 2023	• Evaluasi KC Metro • *Strategic Initiatives Progress Update* October 2023 • Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BRI 2024 • Tema dan *Design Annual Report* BRI 2023 • Rencana Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Menteri BUMN terkait fasilitas Direksi	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9	12	75,00%
48	4 Desember 2023	• *Update* Penanganan Subrogasi • *Review* Hasil Audit Eksternal 2023 • Rencana Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Menteri BUMN terkait fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons			
49	11 Desember 2023	• Rencana Dividen Interim tahun buku 2023 • *Update Vintage Analysis Credit* per-Segmen • Rencana *Motivation Bonus Corporate Band* 1 • *Update* HUT BRI ke 128 • Rencana *Corporate Action* Perusahaan Anak	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	10	12	83,33%
50	18 Desember 2023	• *Business Process Architecture* • Inisiasi Pengembangan Bisnis BRI di luar negeri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
51	27 Desember 2023	• Rencana Rapat Kerja Wilayah BRI 2024 • Proyeksi Kinerja BRI 2023	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	12	75,00%

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Bab Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sunarso	Direktur Utama	51	47	92%	10	10	100%	1	1	100%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	51	49	96%	10	9	90%	1	1	100%
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	51	48	94%	13	13	100%	1	1	100%
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan	51	49	96%	10	10	100%	1	1	100%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	51	50	98%	11	11	100%	1	1	100%
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	51	47	92%	10	9	90%	1	1	100%

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	51	48	94%	10	10	100%	1	1	100%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	51	48	94%	10	10	100%	1	1	100%
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	51	48	94%	10	9	90%	1	1	100%
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	51	47	92%	10	10	100%	1	1	100%
Agus Winardono	Direktur Human Capital	51	50	98%	13	13	100%	1	1	100%
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	51	50	98%	12	12	100%	1	1	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur pada Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pendidikan Direksi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Direksi merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan Perseroan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* Perseroan.

Program pendidikan dilaksanakan oleh anggota Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Sunarso	Direktur Utama	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	*Gartner Data & Analytics Summit*	31 Juli – 1 Agustus 2023, Sydney, Australia	Sydney, Australia
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	*Advance Executive Presence*	23 – 25 Agustus 2023, Berkeley, California	Berkeley Haas
		Communicating Data Through Storytelling	25 Oktober - 12 Desember 2023, Online	MIT
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan	*Leadership in a Technology Driven World*	19 – 23 Juni 2023, London, UK	Imperial College Business School
		Achieving Your Leadership Vision	13 - 16 November 2023, New York, US	NYU Stern School of Business
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Supari	Direktur Bisnis Mikro	*Gartner Data & Analytics Summit*	31 Juli – 1 Agustus 2023, Sydney, Australia	Sydney, Australia
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	*Leading Strategic Growth and Change*	5 – 9 Juni 2023, New York, US	Columbia Business School
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	*Exploiting Disruption in a Digital World*	07 – 12 Mei 2023, London, UK	London Business School
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	*High Performance Leadership Course*	13-17 November 2023, Chicago, USA	Chicago Booth
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	*Digital Marketing Strategy: Customers, Planning, and ROI*	13 – 15 Juni 2023, New York, US	Columbia Business School
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	C2 Montreal 2023	24 – 26 Mei 2023, Montreal, Canada	C2 Montreal
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	07 Desember 2023	BARa
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	*B2B Marketing Leaders Forum APAC 2023*	24 – 25 Mei 2023, Sydney, Australia	B2B Marketing Leaders
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	21 Desember 2023	LPPI

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Bentuk program orientasi bagi Direksi baru dapat berupa:

1. Meminta presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan unit kerja/divisi terkait.
2. Mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Komisaris/Direksi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan terkini yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan.
3. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi usaha Bank BRI.
4. Meminta data/dokumen terkait visi dan misi Perseroan, kebijakan Bank BRI, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank BRI.
5. Melakukan diskusi dengan Unit Kerja terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu serta memberikan *feedback* kepada Unit Kerja terkait.

Selama tahun 2023 tidak terdapat Direksi baru sehingga tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Sertifikasi/*Refreshment*		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun Terbit
Sunarso	Direktur Utama	LSPP	Level 5	2023
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	LSPP	Level 5	2023
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	LSPP	Level 5	2023
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan	LSPP	Level 5	2023
Supari	Direktur Bisnis Mikro	LSPP	Level 5	2023
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	LSPP	Level 5	2023
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	LSPP	Level 5	2023
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	BSMR	Level 5	2020
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	LSPP	Level 5	2023
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	LSPP	Level 5	2023
Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	LSPP	Level 5	2023
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	LSPP	Level 5	2023

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya
3. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
5. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
6. Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama Divisi terkait.
7. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Selain itu, keputusan-keputusan Direksi diputuskan melalui forum Komite yang dibentuk oleh Direksi serta Forum Rapat Direksi yang secara detail dilaporkan pada Sub-Bab Rapat Direksi tahun 2023 pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank, Direksi BRI dibantu oleh sepuluh komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Hingga 31 Desember 2023, BRI memiliki 10 (sepuluh) komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

No	Komite	Nomor Surat Keputusan (NOKEP)
1.	Komite *Capital & Investment*	B.871-DIR/PPM/06/2022
2.	IT *Steering Committee* Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data	B.870-DIR/PPM/06/2022
3.	Komite *Risk Management dan Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee*	B.872-DIR/PPM/06/2022
4	*Asset & Liability Committee (ALCO)*	B.1564-DIR/PPM/07/2023
5.	Komite Barang dan Jasa (PBJ)	B.656-DIR/PPM/10/2021
6.	Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)	B.655-DIR/PPM/10/2021
7.	Komite *Human Capital (HC)*	B.603-DIR/PPM/03/2023
8.	Komite Produk	B.213-DIR/CDS/06/2021
9.	Komite Kredit	B.469-DIR/KRD/03/2022 B.469a-DIR/KRD/03/2022
10.	*Project Management Office Steering Committee*	B.869-DIR/PPM/06/2022

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi tugasnya, Direksi BRI dapat membentuk komite-komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Pada tahun 2023, Direksi menilai bahwa seluruh Komite telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara berkala dengan membandingkan antara hasil kinerja komite dengan kriteria penilaian. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi. Secara lengkap kinerja komite penunjang Direksi dibahas pada Sub-Bab Komite Direksi.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan kepada manajemen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2023 Corporate Secretary BRI telah memiliki dan melaksanakan target pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) antara lain Penyaluran TJSL dan CSR, Profil Risiko Reputasi, *Corporate Image* index, *Share of Voices* Media, *Engagement Rate Social* Media, Pemenuhan & Kepatuhan sebagai Perusahaan Terbuka sesuai ketentuan Regulator, Pasar Modal, dan Anggaran Dasar, Efektivitas Pengelolaan Pemberitaan Negatif di media massa dan media sosial, *Customer Satisfaction* Indeks Direksi & Dewan Komisaris, *Global Reputable Awards*, Implementasi Improvement Produk/Proses, Pengukuran *Sustainability Return on Investment* (SROI) atas Program TJSL BRI. Pada tahun 2023, secara umum Corporate Secretary telah mencapai dan melampaui target KPI yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja Unit Internal Audit

Penilaian kinerja terhadap unit kerja Audit Intern baik di *level head office* maupun regional dilakukan berbasis penilaian *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian KPI unit kerja Audit Intern dilakukan menggunakan metode berdasarkan perspektif *balance scorecard* yang mencakup aspek finansial, *customer* dan internal produk dan *process*. KPI aspek finansial diukur berdasarkan pencapaian atas rasio-rasio keuangan perusahaan, serta pengendalian kerugian/denda akibat kelemahan internal *control* ataupun gangguan sistem. KPI pada aspek *customer* diukur melalui kapasitas dan kepuasan *stakeholder* (Manajemen BOD, BOC dan Auditor Eksternal) terhadap kinerja audit intern. Sedangkan KPI terhadap internal produk dan *process* diukur melalui beberapa pencapaian target antara lain pemenuhan pencapaian perencanaan audit, efektivitas penyelesaian rekomendasi auditor eksternal/pengawas, penilaian *quality assurance*, dan Tata kelola audit intern terintegrasi, serta *project* strategis.

Penilaian Kinerja Unit Manajemen Risiko

Direksi melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit Kerja di bawah Direksi termasuk unit kerja Manajemen Risiko. Penilaian dilakukan berdasarkan penetapan target Perusahaan (*Bankwide*) yang kemudian diturunkan kepada unit kerja Manajemen Risiko dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian KPI unit kerja Manajemen Risiko antara lain diukur dengan menggunakan Aspek Kuantitatif dan Kualitatif. KPI untuk Aspek Kuantitatif meliputi pencapaian atas rasio-rasio keuangan Perseroan dan atas 8 (delapan) risiko yang dikelola oleh bank. Sedangkan KPI aspek kualitatif diukur melalui beberapa pencapaian antara lain Tingkat Kesehatan Bank, Predikat Profil Risiko individu terintegrasi dengan Konglomerasi Keuangan serta penilaian atas pelaksanaan Forum MR, Komite Manajemen Risiko serta tingkat penerapan manajemen risiko Perseroan (*Risk Management Maturity Index*).

Pada tahun 2023, secara umum Unit Kerja Manajemen Risiko telah mencapai target KPI yang telah ditetapkan oleh Direksi dan juga aspirasi pemegang saham.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib untuk:

1. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan nasihat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
3. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
9. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan.
10. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
11. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
12. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali:
    a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank; dan

b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.

14. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
15. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
    a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
    b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
16. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
    a. Komite Audit;
    b. Komite Nominasi dan Remunerasi;
    c. Komite Pemantau Manajemen Risiko; dan
    d. Komite Tata Kelola Terintegrasi.
17. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris menjalankan tugas secara efektif.
18. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala.
19. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris paling sedikit wajib mencantumkan:
    a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
    b. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
    c. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
    d. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
    e. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
    f. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
    g. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
20. Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
21. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memimpin pelaksanaan rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang

merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Perseroan mengatur keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yaitu:
1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan dan aset dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan kriteria dan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, and Operate*/BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama dengan kriteria dan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang berdasarkan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan berdasarkan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis berdasarkan kriteria sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan. Berdasarkan kriteria dan nilai sesuai Batasan Kewenangan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
8. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
9. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
10. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
11. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih lagi atas:
    a. Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
    b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak.

    Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan mereka berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka, yang tidak boleh lebih dari lima tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Namun RUPS berhak memberhentikan mereka sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya oleh RUPS.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria anggota Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/03. POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ketentuan internal Dewan Komisaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Keputusan 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi.

Kualifikasi Umum	1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 2. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: a. Dinyatakan pailit. b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. 3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 4. Tidak memangku rangkap jabatan: a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank; b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila: a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya. b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank. 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Kualifikasi umum tersebut di atas antara lain dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Bakal Calon yang bersangkutan.
Persyaratan Integritas	Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki: 1. Akhlak dan moral yang baik. 2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. 4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
Pemenuhan POJK No.27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Dewan Komisaris sebagai Pengurus Bank wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Pemenuhan SE OJK Nomor 39/SEOJK.03/ 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank	Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki: 1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya. 2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. 3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018. Tata Tertib Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris. Tata Tertib Dewan Komisaris ditinjau secara berkala. Adapun isi Tata Tertib Dewan Komisaris yaitu:

Bab I	**Pendahuluan** 0.1 Pengertian Umum 0.2 Dasar Hukum
Bab II	**Pedoman dan Tata Tertib Kerja** 0.1 Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan 0.2 Pembagian Kerja 0.3 Waktu Kerja 0.4 Etika Kerja 0.5 Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) 0.6 Rapat Dewan Komisaris 0.7 Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris 0.8 Organisasi 0.9 Laporan dan Korespondensi
Bab III	**Penutup**

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Hadiyanto*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Agus Riswanto	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tercantum pada pasal 46 yang mengatur larangan Dewan Komisaris untuk merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
   a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank.
   b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
   c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
   d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
   e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila:
   a. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank.
   b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 wajib membuat pernyataan untuk:
   a. Menjaga integritas.
   b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
   c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan / Instansi Lain	Nama Perusahaan / Instansi Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Wakil Menteri BUMN	Kementerian BUMN
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Dosen dan Peneliti	Universitas Indonesia
Hadiyanto *	Komisaris	-	-
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Sekretaris Kementerian BUMN	Kementerian BUMN
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Pengacara	Kantor Pengacara Ria Latifa & Partner
		Komisaris Utama	PT Bersua Utama Indonesia
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Komisaris Independen	Tower Bersama Group
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Dosen	Universitas Gajah Mada
		Komisaris Utama	PT Kaltim Methanol Industri
Agus Riswanto	Komisaris Independen	-	-
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	-	-
Awan Nurmawan Nuh **	Komisaris	Inspektur Jenderal	Kementerian Keuangan

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komisaris Independen

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang dari 10 (sepuluh) orang Komposisi anggota Dewan Komisaris (70%). Seluruh Komisaris Independen berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada forum rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Rofikoh Rokhim	Dwi Ria Latifa	Hendrikus Ivo	Heri Sunaryadi	Agus Riswanto	Paripurna Poerwoko Sugarda	Nurmaria Sarosa
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

Pernyataan Komisaris Independen



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofikoh Rokhim
Tempat/tanggal lahir : Klaten/12 Februari 1971
No KTP :
Alamat domisili (copy KTP) :
Nomor HP :
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Jakarta, 7 Oktober 2021

Suharso
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Rofikoh Rokhim



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dwi Ria Latifa
Tempat/tanggal lahir	:	Tanjung Balai Karimun / 2 Desember 1966
No KTP	:	
Alamat domisili (copy KTP)	:	
Nomor telepon rumah	:	
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Suharso
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 08 Desember 2020

Dwi Ria Latifa



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrikus Ivo
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11/05/1958
No. KTP/Paspor :
Alamat :
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 9 April 2019

Mengetahui :

Supranoto
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Hendrikus Ivo



SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Sunaryadi
Tempat/tanggal lahir : Jember/26-06-1965
No KTP :
Alamat KTP :
Alamat domisili :
Nomor telepon rumah :
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Jakarta, 7 Oktober 2021

Suharso
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Heri Sunaryadi

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Paripurna Poerwoko Sugarda
Tempat/tanggal lahir	:	Yogyakarta / 21 September 1957
No KTP	:	[redacted]
Alamat domisili (copy KTP)	:	[redacted]
Nomor telepon rumah	:	
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	:	[redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian persyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarso
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 01 Maret 2022

Paripurna Poerwoko Sugarda

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Agus Riswanto
Tempat/tanggal lahir	:	Delanggu/16 Februari 1962
No KTP	:	[redacted]
Alamat domisili (copy KTP)	:	[redacted]
Nomor telepon rumah	:	-
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	:	[redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian persyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarso
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 01 Maret 2022

Agus Riswanto

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Numaria Sarosa
Tempat/tanggal lahir	:	Jakarta, 27 Mei 1965
No KTP	:	[redacted]
Alamat domisili (copy KTP)	:	[redacted]
Nomor telepon rumah	:	-
Jabatan	:	Komisaris Independen
Nama perusahaan	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	:	[redacted]

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian persyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

Sunarso
Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 1 Maret 2022

Numaria Sarosa

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris berlangsung secara berkesinambungan dan dapat diinisiasi dari Dewan Komisaris atau Direksi sehingga diperoleh kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan diantaranya Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat, dengan Direksi.

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam satu bulan.
2. Rapat bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama. Bila Komisaris Utama berhalangan atau tidak ada, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
4. Panggilan Rapat oleh Dewan Komisaris dengan Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat lima hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara fisik atau melalui media elektronik.
6. Panggilan rapat seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
7. Pedoman pelaksanaan rapat ditetapkan sebagai berikut:
    a. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/ Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
    b. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
    c. Agenda dan jadwal rapat merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris.
    d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.
    e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/ Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
    f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/ Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat tiga hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Materi rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Suara

1. Hak suara dalam rapat diatur sebagai berikut:
    a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
    b. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
    c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara yang terbanyak dari yang hadir.
    d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan

dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Dokumentasi

Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Rencana Rapat Dewan Komisaris

Rencana Rapat Tahun 2023

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

No	Rencana Rapat	Periode
1	Update Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Tahun 2023	Triwulan I
2	Pembahasan Isu Terkini BRI	
3	a. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 b. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan 2023	
4	Pembahasan Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2023 Triwulan III	Triwulan II
5	Pembahasan Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	
6	Pembahasan Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Nominasi Remunerasi (KNR), dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).	Triwulan III
7	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris	
8	Pemaparan *Chief Economist* BRI mengenai Update Kondisi Makro Ekonomi dan Proyeksi tahun 2024	Triwulan IV

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

No	Rencana Rapat	Periode
1	a. Evaluasi atas realisasi RBB dan RKAP Triwulan IV tahun 2022 b. Realisasi laporan keuangan *Audited* tahun buku 2022	Triwulan I
2	a. *Update* kebijakan *human capital* BRI b. *Update* program kerja BRI Corporate University	
3	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan I Tahun 2023 b. Evaluasi atas Realisasi RBB dan RKAP Triwulan I tahun 2023	Triwulan II
4	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB tahun 2023-2025 dan RKAP tahun 2023	
5	Perubahan struktur organisasi	
6	Persetujuan penyesuaian struktur organisasi dan perubahan supervisi KCK	Triwulan III
7	a. Analisa *rootcause* dan evaluasi *control system* b. Tindak lanjut (*performance management impact, reward & punishment* dan *culture program*)	
8	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan II tahun 2023 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI Kolegial (KM) Triwulan II tahun 2023	
9	a. *Update* transformasi jaringan kerja BRI b. *Mapping* tipologi *regional office* berdasarkan potensi bisnis	
10	Pembahasan tindak lanjut tanggapan OJK terkait *workload manpower* mikro	
11	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan III tahun 2023 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI (Kolegial) Triwulan III tahun 2023.	Triwulan IV
12	Riset potensi ekonomi, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit menurut wilayah.	
13	Perubahan item dan target *Key Performance Indicators* (KPI) individual Direksi BRI tahun 2023	
14	Pembahasan persetujuan atas usulan revisi RBB tahun 2024-2026 dan RKAP tahun 2024.	
15	Persetujuan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) BRI tahun 2024-2028	
16	*Closing Remarks* 2023	

Rencana Rapat Tahun 2024

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

No	Rencana Rapat	Periode
1	*Update* Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Tahun 2024	Triwulan I
2	Pembahasan Isu Terkini BRI	
3	a. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024 b. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan 2024	
4	Pembahasan Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2024 Triwulan III	Triwulan II
5	Pembahasan Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	
6	Pembahasan Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), Komite Nominasi Remunerasi (KNR), dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).	Triwulan III
7	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris	
8	Pemaparan *Chief Economist* BRI mengenai Update Kondisi Makro Ekonomi dan Proyeksi tahun 2025	Triwulan IV

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

No	Rencana Rapat	Periode
1	a. Evaluasi atas realisasi RBB dan RKAP Triwulan IV tahun 2023 b. Realisasi laporan keuangan *Audited* tahun buku 2023	Triwulan I
2	a. *Update* kebijakan *human capital* BRI b. *Update* program kerja BRI Corporate University	
3	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan I Tahun 2024 b. Evaluasi atas Realisasi RBB dan RKAP Triwulan I tahun 2024	Triwulan II
4	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB tahun 2024-2026 dan RKAP tahun 2024	
5	Perubahan struktur organisasi	
6	Persetujuan penyesuaian struktur organisasi dan perubahan supervisi KCK	Triwulan III
7	a. Analisa *rootcause* dan evaluasi *control system* b. Tindak lanjut (*performance management impact, reward & punishment* dan *culture program*)	
8	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan II tahun 2024 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI Kolegial (KM) Triwulan II tahun 2024	
9	a. *Update* transformasi jaringan kerja BRI b. *Mapping* tipologi *regional office* berdasarkan potensi bisnis	
10	Pembahasan tindak lanjut tanggapan OJK terkait *workload manpower* mikro	
11	a. Realisasi laporan keuangan Triwulan III tahun 2024 b. Evaluasi atas realisasi RBB, RKAP, dan KPI (Kolegial) Triwulan III tahun 2024.	Triwulan IV
12	Riset potensi ekonomi, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit menurut wilayah.	
13	Perubahan item dan target *Key Performance Indicators* (KPI) individual Direksi BRI tahun 2024	
14	Pembahasan persetujuan atas usulan revisi RBB tahun 2025-2027 dan RKAP tahun 2025.	
15	Persetujuan usulan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) BRI tahun 2025-2027	
16	*Closing Remarks* 2024	

Realisasi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	KW	RR	HD *)	RIH	HI	DRL	HS	PPS	AR	NS	ANN **)	Komisaris yang Hadir	Total Dewan Komisaris	Kuorum
1	Selasa, 10 Januari 2023	*Update* Kondisi Makroekonomi dan Proyeksi Tahun 2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	10	90%
2	Senin, 16 Januari 2023	Pembahasan Isu Terkini BRI	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	10	90%
3	Selasa, 28 Februari 2023	a. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 b. Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan 2023	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		9	10	90%
4	Selasa, 30 Mei 2023	Pembahasan Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2023	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100%
5	Selasa, 27 Juni 2023	Pembahasan Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100%
6	Selasa, 4 Juli 2023	Pembaharuan susunan komite pemantau manajemen risiko (KPMR), Komite Nominasi Remunerasi (KNR), dan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100%
7	Selasa, 26 September 2023	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100%
8	Selasa, 5 Desember 2023	Pemaparan *Chief Economist* BRI mengenai *Update* Kondisi Makro Ekonomi dan Proyeksi tahun 2024	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	100%

Keterangan:
*) Sdr. Hadiyanto aktif sejak periode 1 Januari 2023 - 13 Maret 2023.
**) Sdr. Awan Nurmawan Nuh, aktif sejak periode 13 Maret 2023 - Sekarang.

Catatan:

KW Kartika Wirjoatmodjo
RR Rofikoh Rokhim
HD Hadiyanto
RIH Rabin Indrajad Hattari
HI Hendrikus Ivo
DRL Dwi Ria Latifa
NS Nurmaria Sarosa
HS Heri Sunaryadi
PPS Paripurna Poerwoko Sugarda
AR Agus Riswanto
ANN Awan Nurmawan Nuh

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Realisasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

No	Hari & Tanggal	Agenda	KW	RR	RIH	HI	HS	DRL	NS	PPS	AR	HD *)	ANN **)	Direksi	SEVP
1	Selasa, 7 Februari 2023	a. Evaluasi atas realisasi RBB dan RKAP Triwulan IV Tahun 2022. b. Realisasi Laporan keuangan *Audited* Tahun Buku 2022	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1. Sunarso 2. Supari 3. Handayani 4. A Solichin L 5. Agus Noorsanto 6. Agus Winardono 7. Viviana Dyah Ayu R. K 8. Arga Mahanan N 9. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo
2	Selasa, 14 Februari 2023	a. *Update* Kebijakan *Human Capital* BRI b. *Update* Program Kerja BRI Corporate University	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Agus Winardono	
3	Senin, 17 April 2023	a. Realisasi Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2023 b. Evaluasi atas Realisasi RBB, dan RKAP Triwulan I Tahun 2023	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo
4	Selasa, 20 Juni 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2023-2025 dan RKAP Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Amam Sukriyanto 8. Agus Winardono 9. Viviana Dyah Ayu R. K 10. Arga Mahanan N 11. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo
5	Selasa, 20 Juni 2023	Perubahan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa

No	Hari & Tanggal	Agenda	KW	RR	RIH	HI	HS	DRL	NS	PPS	AR	HD *)	ANN **)	Direksi	SEVP
6	Selasa, 1 Agustus 2023	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi dan Perubahan Supervisi KCK	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	Viviana Dyah Ayu R. K	-
7	Selasa, 15 Agustus 2023	1. Analisa *rootcause* dan Evaluasi *Control System* 2. Tindak lanjut (*Performance Management impact, reward & Punishment* dan *culture program*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Agus Winardono	1. Triswahju Herlina 2. Harsya Wardhana Prasetyo
8	Selasa, 29 Agustus 2023	a. Realisasi Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 b. Evaluasi atas Realisasi RBB, RKAP dan KPI Kolegial (KM) Triwulan II Tahun 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
9	Selasa, 12 September 2023	a. *Update* Transformasi Jaringan Kerja BRI b. *Mapping* Tipologi Regional Office berdasarkan Potensi Bisnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Andrijanto	Harsya Wardhana Prasetyo
10	Selasa, 19 September 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Tanggapan OJK terkait *Workload Manpower* Mikro	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0	1. Supari 2. Agus Winardono 3. Viviana Dyah Ayu R. K 4. Andrijanto	-
11	Selasa, 24 Oktober 2023	1. Realisasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 2. Evaluasi atas Realisasi RBB, RKAP dan KPI (Kolegial) Triwulan III Tahun 2023	0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
12	Selasa, 7 November 2023	Riset Potensi Ekonomi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Menurut Wilayah.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Agus Sudiarto 2. Viviana Dyah Ayu R. K	-

No	Hari & Tanggal	Agenda	KW	RR	RIH	HI	HS	DRL	NS	PPS	AR	HD *)	ANN **)	Direksi	SEVP
13	Selasa, 21 November 2023	Perubahan *Item* dan Target *Key Performance Indicator (KPI)* Individual Direksi BRI tahun 2023	1	1	1	1	1	0	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
14	Selasa, 21 November 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP Tahun 2024.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
15	Selasa, 21 November 2023	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BRI Tahun 2024-2028.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa
16	Senin, 18 Desember 2023	*Closing Remarks* 2023	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1. Sunarso 2. Catur Budi Harto 3. Supari 4. Handayani 5. A Solichin L 6. Agus Noorsanto 7. Agus Sudiarto 8. Amam Sukriyanto 9. Agus Winardono 10. Viviana Dyah Ayu R. K 11. Arga Mahanan N 12. Andrijanto	1. Triswahju Herlina 2. Achmad Royadi 3. Harsya Wardhana Prasetyo 4. Aestika Oryza Gunarto 5. Muhammad Candra Utama 6. I Nyoman Sugiri Yasa

*) Sdr. Hadiyanto aktif sejak periode 1 Januari 2023 - 13 Maret 2023.
**) Sdr. Awan Nurmawan Nuh, aktif sejak periode 13 Maret 2023 - Sekarang.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris memastikan memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan Perseroan. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan apabila diperlukan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	8	7	88%	16	14	88%	1	1	100%
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Hadiyanto *	Komisaris	3	3	100%	2	2	100%	1	1	100%
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	8	7	88%	16	14	88%	1	1	100%
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	8	8	100%	16	14	88%	1	1	100%
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Agus Riswanto	Komisaris Independen	8	8	100%	16	15	94%	1	1	100%
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	8	8	100%	16	16	100%	1	1	100%
Awan Nurmawan Nuh **	Komisaris	5	5	100%	14	12	86%	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
** Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur pada Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pendidikan Dewan Komisaris bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memberikan pembekalan untuk mengembangkan dan memperkuat struktur serta *governance* Perseroan

Program pendidikan dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	*Refresher Program – Level 7 "Indonesian Banking in supporting Indonesia towards a Low Carbon Economy"*	Jakarta, 07-08 Desember 2023	*Bankers Association for Risk Management*
		Forum *Annual Meeting* 2023	Davos, 17 -18 January 2023	*World Economic Forum*
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Training: (1)*Negotiation Strategies: Optimizing Outcomes Through Collaboration & Conflict Resolution;* (2)*Great Leadership Series: Organizational Politics & Power Dynamics*	New York, 12-16 Juni 2023	NYU Stern School of Business
		Training - Venture Capital Executive Program	California, 25 November - 02 Desember 2023	Berkeley Executive Education
		Training - Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit *Practitioner* (IIAP)	Yogyakarta, 8 Desember 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		Training - *Refreshment* Manajemen Risiko Jenjang 6	Yogyakarta, 19 Desember 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Hadiyanto*	Komisaris	*Training - Boards That Lead: Corporate Governance That Builds Value*	Pennsylvania, 01-02 Februari 2023	Wharton Business School
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	*Training - Effective Execution of Organizational Strategy*	Pennsylvania, 09-13 Oktober 2023	Wharton Business School
		Training - Strategy: Building and Sustaining Competitive Advantage	Boston, 10-15 Desember 2023	Harvard Business School
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	*Training* - Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit *Practitioner* (IIAP)	Yogyakarta, 8 Desember 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	*Training - Disruptive Innovation: Strategies for Successful Enterprises*	Boston, 19-24 Juni 2023	Harvard Business School
		Training - Energizing People for Performance	Chicago, 13-16 November 2023	Northwestern-Kellog Executive Education School of Management
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	*Training - Leadership in Technology Driven World*	Inggris, 19-23 Juni 2023	Imperial College Business School
		Training - Digital Transformation Strategy	London, 04-08 Desember 2023	Imperial Business School
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	*Training - Leading Change & Organizational Renewal*	Boston, 19-24 Maret 2023	Harvard Business School
		Training - Leading & Building a Culture of Innovation	Boston, 3-8 Desember 2023	Harvard Business School
Agus Riswanto	Komisaris Independen	*Training - Digital Transformation Strategy*	London, 4-8 Desember 2023	Imperial Business School
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	*Training - Disruptive Innovation: Strategies for Successful Enterprises*	Boston, 19-24 Juni 2023	Harvard Business School
		Training - Energizing People for Performance	Chicago, 13-16 November 2023	Northwestern-Kellog Executive Education School of Management
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	*Training* - Program Orientasi Bagi Komisaris Baru	- 14 Maret 2023 - 11 April 2023 - 4 Mei 2023 - 9 Mei 2023 - 11 Mei 2023 - 31 Mei 2022 - 7 Juni 2023 - 8 Juni 2023	Intern Divisi BRI

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan BRI.
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI.
4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di BRI.
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di BRI; pemahaman *value creation* untuk para *stakeholders*, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak BRI.
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI.
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.

Program orientasi bagi Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Awan Nurmawan Nuh yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Materi Program Orientasi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris	Senin, 14 Maret 2023	Corporate Secretary
- Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Anggota Dewan Komisaris - Anggaran Dasar	Selasa, 11 April 2023	Sekretaris Dewan Komisaris
- *Overview* BRI *(Financial performance & business per segment)* - *Investor Concerns* - *Overview Subsidiaries*	Kamis, 4 Mei 2023	*Investor Relations Division*
- Struktur Organisasi - Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang (*Corporate Plan*) - RBB (Rencana Strategis Jangka Menengah) dan RKAP (Rencana Strategis Jangka Pendek)	Kamis, 11 Mei 2023	*Planning, Budgeting, and Performance Division*
Subsidiaries Performance	Rabu, 31 Mei 2022	*Subsidiaries Management Division*
GCG, *Integrated* GCG *Framework & Implementation*	Rabu, 7 Juni 2023	*Compliance Division*
Risk Management	Kamis, 8 Juni 2023	*Market, Portofolio & Enterprise Risk Management Division*
Pelaksanaan Fungsi Audit	Jumat, 9 Mei 2023	Satuan Kerja Audit Internal

Sertifikasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1	Komisaris	Minimal tingkat 1	4 Tahun
2	Komisaris Independen	Minimal tingkat 2	4 Tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang:

1. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, ditetapkan kriteria penyetaraan penjenjangan dan penyelarasan penjenjangan terhadap SDM pemilik Sertifikat Manajemen Risiko yang masih berlaku sesuai ketentuan di atas.

Adapun tabel sertifikasi manajemen risiko Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi/ *Refreshment*		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun Terbit*
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	BARa	Level 5	2023
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2023
Hadiyanto**	Komisaris	LSPP	Level 1	2018
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	BSMR	Level 1	2022
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	BSMR	Level 3	2020
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2021
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Agus Riswanto	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2022
Awan Nurmawan Nuh***	Komisaris	LPPI	Pembekalan MR	2023

*Beberapa Dewan Komisaris dalam proses *refreshment*
**Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
***Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester sebagai berikut:

1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT BRI Semester II Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2023.
2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2023 tanggal 30 Agustus 2023.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab dilaksanakan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan surat Dewan Komisaris kepada Direksi.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama Tahun 2023 antara lain:

1. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan selama Tahun 2023.
2. Reviu atas realisasi kinerja laporan keuangan keuangan BRI secara konsolidasi dan triwulanan.
3. Evaluasi atas usulan RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP 2024, termasuk realisasi pencapaian RKAP & RBB Tahun 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PUMK BRI Tahun 2023.
5. Konsultasi kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan SKAI Tahun 2023.
7. Evaluasi kinerja dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BRI.
8. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris BRI termasuk nominasi pengurus Perusahaan Anak.
9. Reviu dan persetujuan atas penyediaan kepada pihak terkait dan penyertaan modal yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris
10. Evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit SKAI, pemantauan atas tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal secara triwulanan.
11. Reviu atas Perkembangan Bisnis pada masing-masing Segmen Kredit.
12. Evaluasi peraturan dana pensiun termasuk reviu atas tata kelola dan kinerja dana pensiun
13. Evaluasi atas implementasi kebijakan *human capital* BRI.
14. Evaluasi tingkat kesehatan Bank, profil risiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan, strategi anti-*fraud* dan penerapan APU PPT.

15. Evaluasi kebijakan *talent pool* BRI dan SKAI.
16. Evaluasi atas usulan reorganisasi dalam rangka penyelarasan target bisnis dan kolaborasi antar segmen.
17. Evaluasi atas implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) dan penguatan tata kelola Terintegrasi.
18. Reviu atas portofolio kredit korporasi dan debitur berisiko tinggi.
19. Tata kelola, arsitektur dan *update security* strategi BRI.
20. Reviu dan persetujuan atas rencana aksi keuangan berkelanjutan, *recovery plan*, dan *resolution plan*.
21. Reviu atas kinerja keuangan dan investasi DPLK Tahun 2022 termasuk persetujuan atas rencana bisnis Bank DPLK Tahun 2023.
22. Reviu atas perkembangan bisnis pada masing-masing segmen kredit.
23. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris lainnya dalam rangka fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan surat persetujuan dan surat keputusan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Persetujuan
1	Senin, 16 Januari 2023	Perencanaan Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Tahun 2023
2	Selasa, 7 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapen BRI 2023
3	Selasa, 28 Februari 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
4	Selasa, 28 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait an. PT Permodalan Nasional Madani
5	Kamis, 13 April 2023	Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023
6	Selasa, 2 Mei 2023	Rencana Penyertaan Modal KPEI dalam rangka Pengembangan *Central Counterparty* (CPP) Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT)
7	Selasa, 30 Mei 2023	Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2023
8	Selasa, 20 Juni 2023	Usulan *Threshold* PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.
9	Selasa, 20 Juni 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2023-2025 dan RKAP Tahun 2023
10	Selasa, 20 Juni 2023	Perubahan Struktur Organisasi
11	Selasa, 4 Juli 2023	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris
12	Selasa, 1 Agustus 2023	Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi & Perubahan Supervisi KCK
13	Selasa, 26 September 2023	Pembaharuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris
14	Selasa, 21 November 2023	Perubahan *Item* dan Target *Key Performance Indicator* (KPI) Individual Direksi BRI tahun 2023
15	Selasa, 21 November 2023	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Revisi RBB Tahun 2024-2026 dan RKAP Tahun 2024.
16	Selasa, 21 November 2023	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BRI Tahun 2024-2028.
17	Selasa, 28 November 2023	Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023
18	Selasa, 5 Desember 2023	Penyediaan dana kepada pihak terkait an. PT BRI Danareksa Sekuritas

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian kinerja dilakukan atas *Key Performance Indicator* (KPI) kolegial atau KPI bersama dan KPI Direktorat (Individu).

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi



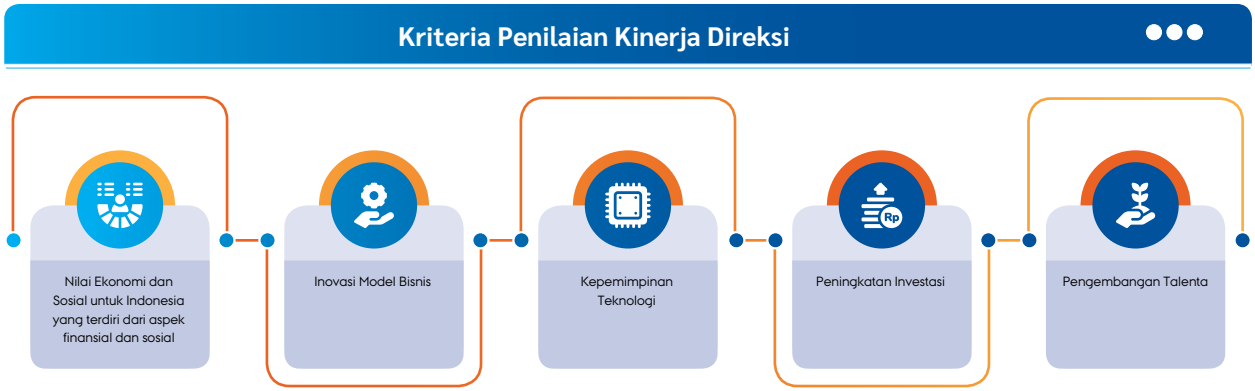
Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam agenda RUPS. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Pelaksanaan penilaian Direksi dilakukan dengan beberapa kriteria dan alat ukur yaitu berdasarkan pada pencapaian KPI dan berdasarkan penilaian GCG pada aspek Direksi.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Secara Kolegial

Adapun kriteria evaluasi kinerja yang diukur adalah sebagai berikut:



KPI individu masing-masing Direksi dapat dilihat pada bagian Kriteria Penilaian Kinerja Individu.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU

Direktur Utama
- Tingkat kesehatan Bank terjaga.
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Pelaksanaan program-program dari Pemerintah selesai tepat waktu.
- Kualitas aktiva produktif dan kecukupan cadangan kerugian terjaga.
- Capaian integrasi Ultra Mikro tercapai melebihi target.
- Pengembangan talenta muda tercapai melebihi target.

Wakil Direktur Utama
- Tingkat kesehatan Bank terjaga.
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Pelaksanaan program-program dari Pemerintah selesai tepat waktu.
- Kualitas aktiva produktif dan kecukupan cadangan kerugian terjaga.
- Capaian integrasi Ultra Mikro tercapai melebihi target.
- Pengembangan talenta muda tercapai melebihi target.

Direktorat Keuangan
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) & Rencana Bisnis Bank.
- Target kinerja kontribusi Perusahan Anak secara total tercapai.
- Target market *capitalization* & *Total Shareholder Return* tercapai.
- Kualitas Laporan Keuangan Hasil Sertifikasi/*Surveillance* ISO dengan target Layak

Direktorat Bisnis Konsumer
- Target pinjaman tercapai dengan kualitas aset tetap terjaga
- Target jumlah debitur tercapai
- Target *asset under management* tercapai
- Market *share* pinjaman konsumer mengalami peningkatan dari tahun 2022

Direktorat Bisnis Mikro
- Target laba bisnis mikro tercapai
- Target OS pinjaman mikro tercapai
- Target *Recovery Extracomptable* mikro tercapai
- Target realisasi KPI *Holding* Ultra Mikro

Direktorat Bisnis Kecil dan Menengah
- Target *fee based income* bisnis SME dan Komersial tercapai
- Target Penyaluran KUR Kecil tercapai
- Target Akuisisi Debitur baru baik Segmen Kecil dan Menengah tercapai
- Target simpanan bisnis komersial tercapai dengan biaya yang tetap efisien
- Target pinjaman bisnis komersial tercapai dengan kualitas aset tetap terjaga

Direktorat Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan
- Target laba bisnis *wholesale* dan kelembagaan tercapai
- Target *revenue* bisnis *wholesale* tercapai
- Target *fee-based income* bisnis *wholesale* dan kelembagaan tercapai
- Target simpanan tercapai dengan biaya yang tetap efisien
- Target pinjaman tercapai dengan kualitas aset tetap terjaga
- Target kontribusi UKLN tercapai.
- Target volume dan jumlah transaksi bisnis *treasury*, internasional dan *investment services* tercapai.

Direktorat Jaringan dan Layanan
- Target *Reliability* dan Produktivitas ATM dan CRM tercapai
- Target *Growth* CASA *Merchant* tercapai
- Target Penetrasi *Market Share Merchant* (MID) tercapai
- Kerugian akibat *Skimming/Fraud e-channel* oleh pihak eksternal diminimalisir dan lebih rendah dari tahun 2022

Direktorat Kepatuhan
- Target Peringkat GCG & Profil Risiko Kepatuhan dan Risiko Hukum tercapai
- Target *Score Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tercapai
- Target Peringkat Komposit Tata Kelola Terintegrasi tercapai
- Target pengendalian denda/kerugian terkait regulator tercapai
- Target pencapaian kualitas litigasi BRI tercapai

Direktorat Manajemen Risiko
- Target *Recovery Ekstrakomptabel* tercapai
- Target Kerugian akibat Risiko Operasional tercapai
- Target *zero incident* dalam IT *security* (*cybersecurity breach*) tercapai
- Target *Risk Maturity Index* tercapai

Direktorat *Human Capital*

- Target *Employee of Choice* tercapai
- Target Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko tercapai
- Target Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti tercapai
- Target Milenial dalam *nominated talent* tercapai
- Target % Keberhasilan pengisian pekerja dari *Talent Pool* tercapai
- Target Implementasi *Program* Terkait *Talent Development & Career Path System* di lingkup *Holding*/Klaster tercapai

Direktorat Digital & Teknologi Informasi

- Target IT *maturity level* tercapai
- Target *zero incident* dalam IT *security* tercapai
- Realisasi anggaran IT membaik dari tahun sebelumnya
- Target pengelolaan kas tercapai
- Target pengelolaan *user experience* atas *platform* BRIspot, BRIsurf, BRImen & NDS tercapai

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Realisasi KPI masing-masing Anggota Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilakukan *review* oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan remunerasi setiap Anggota Direksi. Kinerja individu Direksi dapat dilihat secara khusus pada KPI Individu yang terdiri dari KPI Bersama dan KPI Direktorat. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Perseroan pada periode 2023, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS.

Sebelum diungkapkan dalam RUPS, penilaian atas KPI Kolegial Direksi telah melalui proses reviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial pada tahun buku 2023 sebagai berikut:

Kategori	Bobot	Parameter KPI	Realisasi
Financial	26%	(C) PPOP (5%) & PPOP *Growth* (5%) (C) ROE *Tier* 1 (4%) (G) CAR (5%) (G) TSR (3%) (C) *Market Cap* (4%)	• Rp94,12 T & 13,80% • 22,94% • 25,23% • Peringkat 2 dari 8 Peers • Rp867,68 T
Operasional	12%	(G) LAR (3%) & LAR *Coverage* (3%) (G) COC (3%) (G) BOPO (3%)	• 12,54% & 53,59% • 2,38% • 64,36%
Sosial	7%	(S) Realisasi KUR (4%) (S) *Recovery Rate* Subrografi (3%)	• Rp163,33 T KUR Tersalurkan • 22,93%
Inovasi Model Bisnis	21%	(C) *Average* Dana Murah (7%) (C) CASA *Ratio* (5%) (G) Realisasi KPI *Holding* UMI (9%)	• Rp791,53 T • 64,55% • 105,10%
Kepemimpinan Teknologi	12%	(C) Integrasi ATM dan EDC *Payment* (3%) (G) Implementasi *Master Plan* IT (4%) (G) *Cyber Security Breach* (5%)	• Terlaksana sesuai *milestone* • Terimplementasi sesuai *milestone* • *Zero Incident*
Peningkatan Investasi	12%	(E) *Rating* ESG (4%) (G) *Risk Management Maturity Index* (3%) (C) Kontribusi Perusahaan Anak (5%)	• S&P *Global Score*: 63 & MSCI *Rating* A • *Index Score* 4,03 • Rp8,37 T
Pengembangan Talenta	10%	(S) Program *Talent Management* di Klaster (2%) (G) Penyelesaian *roadmap* penguatan Dapen BRI (2%) (G) Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (2%) (S) Rasio Perempuan di *Nominated Talent* (2%) (S) *Young Talent* di *Nominated Talent* (2%)	• Terlaksana sesuai *timeline* pelaksanaan program *Cluster Talent Committee* • *Roadmap* tersedia sesuai *timeline* • BOD & SEVP dalam fungsi organ pengelola risiko, telah memenuhi kualifikasi • 22,58% • 22,58%
PENCAPAIAN			**101.80%**

Keterangan: (C) *Commercial*; (E) *Environment*; (S) *Social*; (G) *Governance*

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja pada awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) berdasarkan pencapaian kerja Dewan Komisaris dan *Key performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan reviu atas pelaksanaan tugas komite-komite dan Sekretariat Dewan Komisaris sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hasil reviu serta *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Komite di dinyatakan bahwa seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self-assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur dari pencapaian atas program kerja/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun. Adapun program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi perspektif *Learning & Growth, Internal process, compliance* dan *financial*. Kriteria penilaian Dewan Komisaris tahun 2023 sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00
			b	Anggota Dewan Komisaris memenuhi kompetensi/ sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00
			c	Program pendidikan/*training* /seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali program pendidikan/*training* /seminar	2,00
	Sub Total					10,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
2	*Internal Process*	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50
			b	Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00
		Pelaksanaan	a	Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00
			b	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal empat bulan sekali.	10,00
			c	Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat penyampaian *nominated talent* kepada *Cluster Talent Committee* (CTC) b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50
			d	Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50
			e	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00
		Pengawasan	a	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Melakukan kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah	7,50
			b	Pelaksanaan Reviu pengendalian internal	Reviu atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50
			c	Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d	Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			E	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total				50,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)
3	*Compliance Prespective*	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai *Good Corporate Governance*	a Pelaksanaan Penilaian *self-assessment* GCG	Penilaian *self-assessment* GCG dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			b Pelaksanaan *self-assessment* Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian *self-assessment* GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			c Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5,00
			d Skor Penilaian CGPI	Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	2,50
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko.	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00
			b Pelaksanaan fungsi kepatuhan	Pelaksanaan reviu fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50
			c Pelaksanaan Reviu atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Reviu atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
			d Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total			**30,00**
4	*Financial Perspective*	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50
			b Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50
			c NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50
			d CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50
		Sub Total			10,00
TOTAL					**100,00**

Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara *self-assessment* dan disampaikan pada RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian		Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris *comply* dengan ketentuan yang berlaku	2,00	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Organisasi Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100	2,00
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00	Setiap Dewan Komisaris yang baru diangkat memperoleh program orientasi Dewan Komisaris.	Selama Tahun 2023 terdapat Anggota Dewan Komisaris baru yaitu Awan Nurmawan Nuh dan telah mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	100	2,00
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Anggota Dewan Komisaris memenuhi kewajiban kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku	2,00	Anggota Dewan Komisaris memenuhi kewajiban kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kewajiban kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.	100	2,00
			c	Program pendidikan/ *training* / seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali program pendidikan/ *training* / seminar	2,00	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan *training* minimal satu kali dalam setahun	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan *training* minimal satu kali dalam setahun	100	2,00
Sub Total						**10,00**			**10,00**	
2	*Internal Process*	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP Dewan Komisaris Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
			b Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00	Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan tanggapan atas usulan RBB ke Direksi Paling lambat tanggal 30 November 2023	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas RBB pada tanggal 28 November 2023 dan persetujuan atas Revisi RBB pada tanggal 26 Juni 2023	100	5,00
	Pelaksanaan		a Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00	Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan	Selama tahun 2023, terdapat 16 Persetujuan yang disampaikan Dewan Komisaris atas seluruh permohonan yang disampaikan Direksi	100	5,00
			b Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal empat bulan sekali.	10,00	Dewan Komisaris minimal melaksanakan rapat dengan Direksi sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris minimal 4 (empat) bulan sekali	Selama tahun 2023 terdapat 16 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan 109 Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris	100	10,00
			c Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat penyampaian Nominated *Talent* kepada *Cluster Talent Committee* (CTC). b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50	a. Dewan Komisaris menyampaikan surat *Nominated Talent* kepada *Cluster Talent Committee* (CTC). b. Kebijakan Nominasi Perseroan tersedia sesuai ketentuan	a. Dewan Komisaris telah menyampaikan surat *Nominated Talent* kepada *Cluster Talent Committee* (CTC) pada Januari 2023 b. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Juli 2015.	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
			d Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50	a. Terdapat ketentuan Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris b. Rekomendasi struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	a. Dewan Komisaris memiliki kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Kebijakan Tata Kelola Remunerasi. 3. Pelaksanaan pemberian remunerasi yang ditangguhkan. b. Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 dan tantiem atas kinerja tahun buku 2022 kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tanggal 29 Maret 2023.	100	2,50
			e Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PUMK BRI tahun buku 2023 disampaikan sebelum RUPST 2023 yaitu tanggal 21 Februari 2023	100	5,00
	Pengawasan		a Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Melakukan kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah	7,50	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke kantor wilayah BRI	Selama Tahun 2023 Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja sebanyak 17 kali ke 12 *Regional Office*	100	7,50
			b Pelaksanaan Reviu pengendalian internal	Reviu atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50	*Review* atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.	Dewan Komisaris telah melakukan *review* dan persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2023 tanggal 21 Februari 2023	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
			c	Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindaklanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target sebanyak 4 kali	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaaan audit internal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilakukan evaluasi laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit internal SKAI disampaikan setiap triwulan (TW IV '22, TW I '23, TW II'23 dan TW III '23)	100	2,50
			d	Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit eksternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaaan audit eksternal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilakukan evaluasi laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit eksternal disampaikan setiap triwulan (TW IV '22, TW I '23, TW II'23 dan TW III '23)	100	2,50
			E	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Dewan Komisaris telah melakukan reviu terhadap audit umum laporan keuangan tahun 2022, laporan keuangan TW I, TW II dan TW III tahun 2023		
	Sub Total					**50,00**			**50,00**	
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai *Good Corporate Governance*	a	Pelaksanaan Penilaian *self-assessment* GCG	Penilaian *self-assessment* GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	*Self-Assessment* GCG dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan *self-assessment* GCG SM II 2022 dan SM I 2023 dan menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi	100	2,50
			b	Pelaksanaan *self-assessment* Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian *self-assessment* GCG terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Penilaian *Self-Assessment* GCG Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Penilaian *self assessment* GCG Terintegrasi tahun 2023 dilaksanakan 2 kali yaitu SA TKT SM II 2022 dan SA TKT SM I 2023 telah dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
			c Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik wajar dalam semua hal yang material.	5,00	Opini Akuntan Publik wajar dalam semua hal yang material.	Opini Akuntan Publik wajar dalam semua hal yang material.	100	5,00
			d Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	Skor penilaian CGPI sesuai dengan target	2,50	Target Skor nilai CGPI lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2022/ 95,18)	Skor CGPI tahun 2023 dengan skor 95,21	100	2,50
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00	Terdapat rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko	Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi secara tertulis berupa pendapat dan saran kepada Direksi terhadap laporan profil risiko setiap triwulan	100	10,00
			b Pelaksanaan fungsi kepatuhan	a. Pelaksanaan reviu atas fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester. b. Nilai *self-assessment* reviu pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester.	2,50	Peringkat risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (*Low to Moderate)* menurut asesmen OJK	Risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (*Low to Moderate*)	100	2,50
			c Pelaksanaan Reviu atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Reviu atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas reviu fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank yang dilaksanakan setiap semester	Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Direksi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023	100	2,50
			d Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023	100	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai Akhir
Sub Total					30,00			30,00	
4	*Financial Perspective*	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan*	a Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50	Rp56,16 T	Rp60,43 T	107,6%	2,69
			b Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50	Rp1.911,7 T	Rp1.965,0 T	102,8%	2,57
			c NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50	2,73%	2,95%	91,9%	2,30
			d CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50	24,72%	25,24%	112,8%	2,82
Sub Total					10,00			10,38	
TOTAL					100,00			100,38	

Keterangan:
*Angka realisasi keuangan menggunakan prognosa dalam usulan RKAP/RBB.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Prosedur dan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilihat dari pencapaian KPI masing-masing Komite. Dewan Komisaris menilai bahwa selama Tahun 2023 komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing komite.

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Audit

Indikator atau kriteria kinerja Komite Audit diukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit dalam setiap rapat.

Adapun program kerja Komite Audit disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses telaah terhadap laporan keuangan, hasil audit internal dan eksternal (KAP), dan memberikan rekomendasi atas pemilihan KAP.

Secara umum seluruh KPI Komite Audit telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Audit Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit yang memenuhi ketentuan sehingga rapat Komite Audit dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap mengambil keputusan.

Penilaian Kinerja Komite Audit Tahun 2023

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	*Output*/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi Anggota Komite sesuai ketentuan.	Komposisi Anggota KA sesuai dengan POJK, Peraturan KBUMN dan Regulator.	Komposisi Anggota KA Tahun 2023 telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan.	Reviu Piagam Komite Audit	Piagam Komite Audit telah dilakukan reviu sesuai ketentuan.	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	*Output*/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan.	Anggota KA memiliki kompetensi diantaranya: 1. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi. 2. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.	Anggota KA diantaranya memiliki kompetensi bidang keuangan dan/ atau akuntansi, hukum, ekonomi, audit dan perbankan.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan.	Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.	Masa tugas Anggota KA BRI KA tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.	5	5
		Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu.	RKAP KA pada Tahun 2024 disahkan Tahun 2023	RKAP KA pada Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023.	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun.	Satu bulan sekali (12 kali).	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 23 kali Rapat KA.	5	5
			Evaluasi dan persetujuan Direksi atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT).	Setahun sekali.	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Dewan tentang Persetujuan Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023.	5	5
			Memberikan Rekomendasi terkait usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.	Setahun sekali.	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK tahun buku 2023 pada tanggal 16 Januari 2023.	5	5
			Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Dewan Komisaris.	Sesuai tugas dan arahan Dewan Komisaris.	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.	5	5
2	*Internal Process Perspective*	Pengawasan	Reviu laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Setiap Triwulan.	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui setiap Triwulan.	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	*Output*/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.	Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak dua kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI.	Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak dua kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI.	10	10
			Reviu terhadap pengelolaan *Whistleblowing System.*	Setahun sekali.	Komite Audit telah melakukan reviu terhadap efektivitas *Whistleblowing System* BRI	5	5
			Reviu pelaksanaan audit umum Laporan keuangan dan kinerja DPLK BRI.	Setahun sekali.	Komite Audit telah melakukan penelaahan komite audit atas laporan hasil audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2022	10	10
			Reviu tindak lanjut *Management Letter* dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.	Setahun sekali.	Komite Audit telah melakukan reviu atas *monitoring* tindak lanjut atas temuan auditor eksternal (*management letter*) setiap triwulan.	10	10
			Penelaahan Atas Laporan Kejadian *fraud* yang diperkirakan Berdampak Signifikan.	Setahun sekali.	Selama Tahun 2023 Komite Audit telah menyampaikan penelaahan Atas Laporan Kejadian *fraud* yang diperkirakan Berdampak Signifikan.	5	5
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Pendapat Akuntan Publik adalah wajar dalam semua hal yang material.	wajar dalam semua hal yang material	Opini hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BRI wajar dalam semua hal yang material.	10	10
Total						**100**	**100**

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Nominasi dan Remunerasi

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) di ukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan *(Key Success Factors)* pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum seluruh KPI KNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja KNR Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap pengambilan keputusan.

Adapun pencapaian indikator atau kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KNR sesuai dengan Peraturan regulator dan Kementerian BUMN	Komposisi Anggota KNR tertuang dalam SK Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan ketentuan POJK & Kementerian BUMN	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Seluruh Anggota KNR Lulus *Fit & Proper test* OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2023	Seluruh Anggota Komisaris anggota KNR dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* OJK dan mengikuti Pendidikan.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di *Update* sesuai ketentuan dan masa jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetapan Ketua dan Anggota KNR BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KNR telah sesuai ketentuan.	5	5
2	*Internal Process Perspective*	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKA KNR pada Tahun 2024 disahkan paling lambat akhir tahun 2023	RKA KNR Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	10	10
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Sesuai ketentuan, rapat Komite dilaksanakan minimal sekali dalam 4 (empat) bulan	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 20 (dua puluh) kali rapat KNR.	10	10
			Nominasi pengurus BRI	Minimal sekali dalam setahun	Nominasi Pengurus BRI telah dilakukan sesuai rincian rapat.	10	10
			Nominasi pengurus anak perusahaan	*Tentative* sesuai dengan usulan Direksi	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan nominasi pengurus anak perusahaan sesuai rincian rapat.	10	10
			Reviu dan menyusun rekomendasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Rekomendasi KNR atas usulan Remunerasi Pengurus Perseroan.	10	10
			Mereviu/ Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR telah melakukan Pembahasan Remunerasi Pengurus Perseroan sesuai rincian rapat.	10	10
		Pengawasan	Reviu/ Pembahasan Kebijakan Ketenagakerjaan dan remunerasi Pekerja secara periodik	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR melakukan pembahasan mengenai Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris pada 22 Agustus 2023	10	10
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Evaluasi kinerja Direksi	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Melaksanakan Rapat pembahasan Evaluasi Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Februari 2023	5	5
			Pelaksanaan penilaian *self assessment* GCG Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara semesteran	Hasil penilaian *self assessment* GCG di Dewan Komisaris diperoleh dengan peringkat komposit 2	5	5
			Penilaian kinerja Organ Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan evaluasi Anggota Komite telah dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI.	5	5
Total						**100**	**100**

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Pemantau Risiko

Indikator atau kriteria kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) di ukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KPMR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KPMR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan implementasi manajemen risiko perseroan dan perusahaan anak.

Secara umum seluruh KPI KPMR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja KPMR Tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KPMR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KPMR dapat dilaksanakan dengan kuorum dalam setiap pengambilan keputusan.

Adapun pencapaian indikator atau kinerja KPMR adalah sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	*Learning & Growth Perspective*	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KPMR dari Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2023	Seluruh Anggota KPMR dari Dewan Komisaris dan Pihak Independen telah lulus *fit & proper test* OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2023	5	5
			Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di Update sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5	5
2	*Internal Process Perspective*	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKA KPMR pada Tahun 2024 disahkan paling lambat akhir tahun 2023	RKA KPMR pada Tahun 2024 disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	5	5
		Perencanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 4 kali rapat.	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 45 kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	5	5
			Evaluasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Seluruh paket pemberian kredit di atas jumlah tertentu dievaluasi sesuai ketentuan	Selama Tahun 2023 KPMR melakukan *review* sebanyak 12 kali konsultasi kredit.	5	5
			Evaluasi atas penyediaan dana bagi pihak terkait	Seluruh penyediaan dana kepada Pihak terkait dievaluasi sesuai ketentuan	Selama Tahun 2023 KPMR melakukan *review* sebanyak 2 kali persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2023	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak: perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Rencana Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris di evaluasi sesuai ketentuan	Selama Tahun 2023 KPMR melakukan *review* persetujuan rencana aksi korporasi. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	10	10

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Pengawasan	*Review* kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan *Recovery Plan*	Sekali setahun	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan *review* KUMR, *Risk Appetite Statement* (RAS), *Resolution Plan*, dan *Recovery Plan*. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	10	10
			Review dan Evaluasi portofolio perkreditan/ *portfolio guideline*	Sekali setahun	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan review dan evaluasi kebijakan *portfolio* perkreditan/ *Loan portfolio guideline* masih berlaku	5	5
			Review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan *review* pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	5	5
			Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan *Review* pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023.	5	5
			Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *fraud* Perseroan	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan evaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *fraud* Perseroan. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	5	5
			Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	Sekali setahun	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023.	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/ Pencapaian Target	Bobot	Nilai
3	*Compliance Perspective*	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko Perseroan	Setiap Triwulan	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan Evaluasi profil risiko Perseroan setiap triwulan. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2023	10	10
			Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan	Setiap Semester	Pada tahun 2023 KPMR telah melakukan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR Tahun 2023	10	10
Total						**100**	**100**

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Pencapaian Bobot
I	*Learning & Growth Perspective* (25%)	Penguatan Tata Kelola Terintegrasi	Penguatan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan Konsultan Eksternal	Melakukan Penguatan Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2023	Selama tahun 2023, terdapat : Hasil *assessment* Tata Kelola Terintegrasi. Kebijakan Umum Tata Kelola dan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi	10	10
			Penyesuaian Piagam/ Pedoman Kerja KTKT sesuai ketentuan	Minimal dilakukan satu kali	Pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian piagam/ pedoman KTKT	5	5
		Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Anggota KTKT	Minimal dilakukan satu kali	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	5	5
			Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Komunikasi Anggota KTKT BRI Group	Minimal dilakukan satu kali	Telah dilaksanakan sebanyak satu kali di Jakarta	5	5
II	*Internal Process Perspective* (40%)	Perencanaan & Evaluasi	1.a. Penetapan Rencana Kerja secara Tahunan	Menetapkan Rencana Kerja KTKT	RKA KTKT tahun 2024 telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2023	10	10
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	minimal 2 kali	Selama Tahun 2023 dilaksanakan 21 kali Rapat KTKT dengan rekomendasi atas evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Manajemen Risiko Terintegrasi, Kepatuhan Terintegrasi dan Pengendalian Intern Terintegrasi)	10	10
			Rapat Teknis dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	minimal 9 kali	Selama tahun 2023 telah dilakukan Rapat Teknis dengan Perusahaan Anak dan Pihak Terkait sebanyak 12 kali.	10	10

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Pencapaian Bobot
			Rapat lain sesuai dengan Tugas KTKT	Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris	Selama Tahun 2023, KTKT menghadiri rapat terkait BRI Group sesuai dengan arahan Dewan Komisaris seperti *Exit Meeting* dengan KA & SKAI serta RMC Terintegrasi	10	10
III	*Compliance Perspective* (35%)	Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku	Komposisi dan Penyesuaian anggota Konglomerasi Keuangan Keanggotaan dan masa jabatan anggota komite sesuai perubahan yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Komite	Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris: 1. Nokep: 08-KOM/BRI/09/2022 tanggal 06 September 2022 2. Nokep: 05-KOM/BRI/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 3. Nokep: 08-KOM/BRI/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 4. Nokep : 09-KOM/BRI/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 5. Nokep : 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023	5	5
			Pelaporan Hasil *Assessment* TKT semesteran	*Self-Assessment*-setiap semester (dengan tenggat waktu 15 Februari dan 15 Agustus pada tahun berjalan)	Selama tahun 2023, KTKT telah melaksanakan pelaporan *Self-Assessment* Semester pada tanggal : a. 10 Januari 2023 b. 04 Juli 2023	5	5
			Pelaporan Hasil Laporan Pelaksanaan TKT secara tahunan	*Self-Assessment* Tahunan (dengan tenggat waktu Bulan Mei)	Selama tahun 2023, KTKT telah melaksanakan pelaporan *Self-Assessment* Tahunan melalui Surat Direksi Nomor B.06-DIR/KEP/ING/04/2023 pada tanggal 12 April 2023	5	5
			Reviu penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi	Setiap semester	Selama tahun 2023 KTKT melakukan *review* Laporan Tahunan penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. *Output* Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2023	10	10
			Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik	Setiap semester	Selama tahun 2023 KTKT melakukan Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.	5	5
			Penyampaian Laporan wajib sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Selama tahun 2023, KTKT telah melaksanakan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu	5	5
Total						**100**	**100**

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan

5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dewan Komisaris telah menetapkan Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
2. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:
   a. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
   b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
   c. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
3. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
6. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
   a. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
   b. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon.
7. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Adapun prosedur Nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

Prosedur Nominasi Calon Dewan Komisaris dan Direksi



Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diatur sebagai berikut:

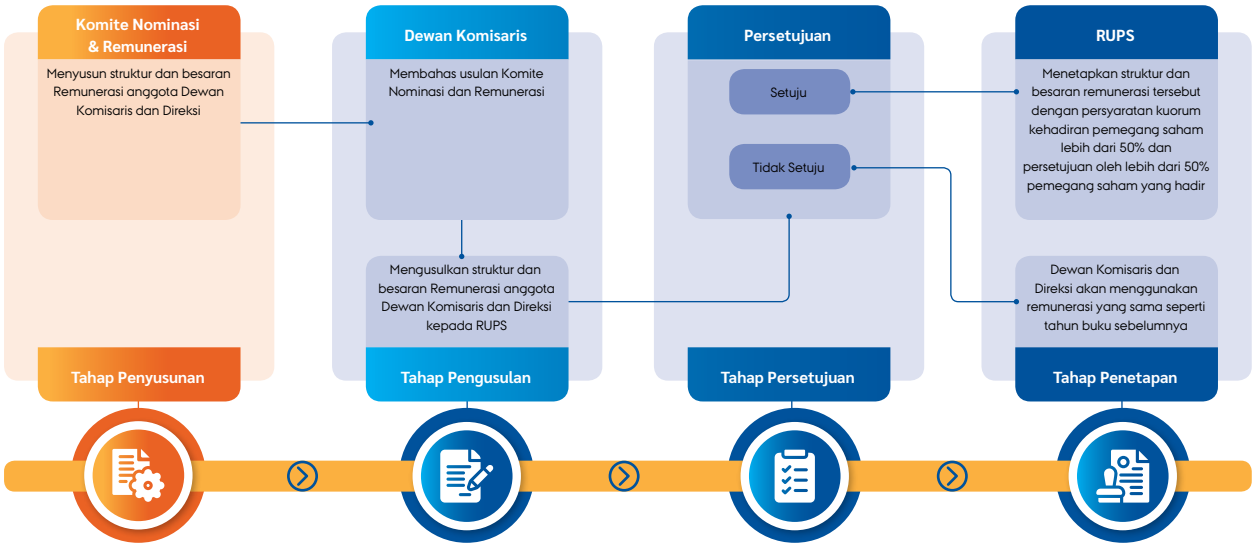
1. Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Dewan Komisaris meminta daftar *Top Talent* BRI yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Bakal Calon pengurus BRI.
2. Direksi menyampaikan daftar *Top Talent* BRI berdasarkan data *Talent Management System* BRI, hasil *assesment* oleh lembaga profesional independen serta hasil Rapat *Talent Committee* BRI.
3. Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjaring Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
5. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
   a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama.
   b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjaring bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjaringan ini melibatkan lembaga *assessment* profesional dari pihak eksternal yang independen.
   c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
      1) Melakukan *interview*/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/atau,
      2) Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
   d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
6. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
8. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Cluster Talent Committee untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS.
9. RUPS menentukan susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI, dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
10. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
11. OJK berwenang untuk memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penyusunan	**Komite Nominasi dan Remunerasi** Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.

Tahapan	Aktivitas
Tahap Pengusulan	**Dewan Komisaris** Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem dan LTI untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Tahap Penetapan	**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. Dalam hal RUPS belum menetapkan Struktur dan besaran remunerasi, maka RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

Tahapan Penetapan Remunerasi



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain hasil *benchmarking* remunerasi dengan industri sejenis (*peer group*) baik di level domestik maupun regional berdasarkan kompleksitas dan skala bisnis perusahaan, pencapaian kinerja, ukuran dan kompleksitas dari operasi Perseroan. Penetapan remunerasi Perseroan juga berorientasi pada pengembangan Perseroan yang yang mengedepankan prinsip berkelanjutan serta mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem
   Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan
   Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jenis	Uraian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh.
Tunjangan Transportasi	Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: a. Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan di atas. b. Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
Asuransi Purna Jabatan	Diikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.
Keanggotaan pada Club	Keanggotaan pada 2 (dua) perkumpulan profesi.
Pakaian Corporate	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafond anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.

3. Fasilitas

Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Jenis	Uraian
Kesehatan	1. Fasilitas kesehatan untuk anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. rawat jalan dan obat; c. rawat inap dan obat; dan d. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*); 3. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. 4. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping. 5. *Medical check up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. *medical check up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan b. *medical check up* dilakukan di dalam negeri. 6. Fasilitas kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penggantian *Frame* setiap 2 (dua) tahun, dengan besaran nilai maksimum diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. penggantian Lensa setiap 1 (satu) tahun.
Fasilitas Bantuan Hukum	1. Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. 3. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. 4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. 5. Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. 6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. 8. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. 9. Perseroan tidak diperkenan memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: a. BUMN yang bersangkutan; b. negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri.

Jenis	Uraian
	10. Anggota Dewan Komisaris yang menggunakan fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: a. bahwa kapasitas anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11 Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SR.24-KOM/07/2023 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Nomor SR-23/Wk2.MBU.A/07/2023 sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 90% dan gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
2. Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus *Fit and Proper Test* oleh OJK.
Keanggotaan Klub	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama: 2 (dua) keanggotaan Golf. 2 (dua) keanggotaan *Club Financial*. 1 (satu) keanggotaan *Club* Kebugaran (*family club*) 2 (dua) *club* profesi. Direktur: 1 (satu) keanggotaan Golf. 1 (satu) keanggotaan *club* Kebugaran (*family club*). 2 (dua) *club* profesi	Keanggotaan bersifat untuk pengembangan potensi bisnis dan relasi.
Pakaian *corporate*	Diberikan dalam bentuk pakaian seragam, jas dan/ atau pakaian kerja beserta kelengkapannya serta batik/ tenun/pakaian nasional lainnya dengan nilai sesuai plafond anggaran per tahun yang diatur oleh Keputusan Direksi.	Berupa pakaian untuk kegunaan dinas.
Komunikasi	Biaya komunikasi yang dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya pulsa dan/ atau paket data sesuai pemakaian.	

3. Fasilitas

Jenis	Uraian
Kendaraan	Fasilitas kendaraan untuk anggota Direksi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Disediakan 1 (satu) fasilitas kendaraan beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional untuk masing-masing anggota Direksi yang diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 2. Batas maksimum jenis fasilitas dan tata cara pengadaan kendaraan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Bagi Direksi yang belum memperoleh fasilitas kendaraan karena sedang dilakukan proses pengadaan oleh Perseroan, maka diberikan Tunjangan Transportasi yang besaran nilainya ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Dalam hal Direksi telah diberikan fasilitas kendaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: a. Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat 3 di atas. b. Bagi Direksi yang jabatannya berakhir dan periode sewa kendaraan belum berakhir, maka yang bersangkutan diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut dan harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perseroan setelah masa transisi selesai.

Jenis	Uraian
Kesehatan	1. Fasilitas kesehatan untuk anggota Direksi diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 2. Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. rawat jalan dan obat; c. rawat inap dan obat; dan d. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*); 3. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. 4. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping. 5. *Medical check up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. *medical check up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan b. *medical check up* dilakukan di dalam negeri. 6. Fasilitas kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penggantian *Frame* setiap 2 (dua) tahun, dengan besaran nilai maksimum diatur dalam Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan fasilitas yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak yang diberikan kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham; b. penggantian Lensa setiap 1 (satu) tahun.
Fasiltitas Bantuan Hukum	1. Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. 2. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. 3. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. 4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. 5. Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. 6. Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan. 7. Dalam hal anggota Direksi diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. 8. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. 9. Perseroan tidak diperkenan memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: a. BUMN yang bersangkutan; b. negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri. 10. Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila anggota Direksi dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi BUMN dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris

No.	Nama	Honorarium	THRK	Pengobatan	Tantiem	Tunjangan Transport	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Kartika Wirjoatmodjo	√	√	√	√	√	√	√
2	Rofikoh Rokhim	√	√	√	√	√	√	√
3	Rabin Indrajad Hatari	√	√	√	√	√	√	√
4	Hendrikus Ivo	√	√	√	√	√	√	√
5	Dwi Ria Latifa	√	√	√	√	√	√	√
6	Heri Sunaryadi	√	√	√	√	√	√	√
7	Nurmaria Sarosa	√	√	√	√	√	√	√
8	Agus Riswanto	√	√	√	√	√	√	√
9	Paripurna P. Sugarda	√	√	√	√	√	√	√
10	Awan Nurmawan Nuh*	√	√	-	-	√	-	√
11	Hadiyanto**	√	-	√	√	√	-	√
	Jumlah Total	**21.251.437.256**	**1.744.160.000**	**3.096.358.867**	**117.069.776.485**	**4.287.797.613**	**5.176.178.750**	**152.625.708.971**

* Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
** Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi

No.	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem	Tunjangan Perumahan	Pengobatan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
1	Sunarso	√	√	√	√	√	√	√
2	Catur Budi Harto	√	√	-	√	√	√	√
3	Agus Noorsanto	√	√	-	√	√	√	√
4	Handayani	√	√	√	√	√	√	√
5	Amam Sukriyanto	√	√	-	√	√	√	√
6	Arga Mahanana Nugraha	√	√	-	√	√	√	√
7	Agus Sudiarto	√	√	√	√	√	√	√
8	Viviana Dyah Ayu Retno K.	√	√	-	√	√	√	√
9	Supari	√	√	√	√	√	√	√
10	Ahmad Solichin Lutfiyanto	√	√	-	√	√	√	√
11	Agus Winardono	√	√	-	√	√	√	√
12	Andrijanto	√	√	√	√	√	√	√
	Jumlah Total	**56.160.000.000**	**4.403.050.000**	**1.017.500.000**	**1.481.589.915**	**306.949.722.785**	**14.215.450.000**	**384.227.312.700**

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris waijb mengungkapkan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BRI maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham mencapai 5% (lima persen). Adapun, kemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi yang lebih dari 5% adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Sunarso	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Supari	Direktur Bisnis Mikro	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Arga Mahanana Nugraha	Direktur *Digital* dan Teknologi Informasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Hadiyanto*	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	PT Moneti Indo Tekno (40%)
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Awan Nurmawan Nuh**	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	PT Bersua Utama Indonesia [80%]
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	PT Putra Bersama Investama (99%)	Nihil
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Riswanto	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	PT Selaras Logistik Indonesia (20%)

* Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
** Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Kebijakan Umum No. KU.02-DIR/KEP/10/2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (dhi. Divisi Sekretariat Perusahaan) mengenai kepemilikan saham dan setiap perubahannya atas saham.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilaporkan kepada Unit Kerja Sekretaris Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
3. Unit Kerja Sekretaris Perusahaan melaporkan atas kepemilikan dan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham dimaksud
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2023 transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada Perusahaan (dhi Corporate Secretary Division) dalam kurun Waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pembelian/penjualan saham Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian/ Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
1	Viviana Dyah Ayu R. K.	Direktur Keuangan	Pembelian	996.200	35.000	4.650	1.031.200	5 Januari 2023	Investasi	B.1-CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pembelian	1.031.200	15.000	4.430	1.046.200	10 Januari 2023	Investasi	B.1CSC/CSM/CGC/01/2023
			Pengalihan	1.046.200	466.600	5.450	1.512.800	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian/ Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
2	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Pembelian	1.010.154	50.000	4.650	1.060.154	5 Januari 2023	Investasi	R.1.e-CSC/BOD/ BSC/01/2023
			Pengalihan	1.060.154	466.600	5.450	1.526.754	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
3	Sunarso	Direktur Utama	Pembelian	2.398.156	287.700	4.615	2.685.856	6 Januari 2023	Investasi	B.52-CSC/CSM/ CGC/01/2023
			Pengalihan	2.685.856	549.000	5.450	3.234.856	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
4	Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	Pembelian	982.681	22.900	4.440	1.005.581	10 Januari 2023	Investasi	B.53-CSC/CSM/ CGC/01/2023
			Pembelian	1.005.581	31.300	4.860	1.036.881	16 Februari 2023	Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	B.5-CSC/CSM/ CGC/02/2023
			Pengalihan	1.036.881	466.600	5.450	1.503.481	18 Agustus 2023		B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
5	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan	Pembelian	1.401.041	200.000	4.460	1.601.041	12 Januari 2023	Investasi	B.4-CSC/CSM/ CGC/01/2023
			Pengalihan	1.601.041	4.300	4.020	1.605.341	21 Juli 2023	Pelaksanaan hak atas Program ESOP/ESA yang diperoleh saat masih berstatus Pekerja Perseroan.	B.12-CSC/CSM/ CGC/07/2023
			Pengalihan	1.605.341	466.600	5.450	2.071.941	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
6	Supari	Direktur Bisnis Mikro	Pengalihan	2.423.114	1.200	3.630	2.424.314	21 Juli 2023	Pelaksanaan hak atas Program ESOP/ESA yang diperoleh saat masih berstatus Pekerja Perseroan.	B.11-CSC/CSM/ CGC/07/2023
			Pengalihan	2.424.314	466.600	5.450	2.890.914	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian/ Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
7	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Pengalihan	1.344.957	494.100	5.450	1.839.057	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
8	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	Pengalihan	2.958.600	466.600	5.450	3.425.200	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
9	Achmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Pengalihan	3.120.870	466.600	5.450	3.587.470	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
10	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Pengalihan	1.250.800	466.600	5.450	1.717.400	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
11	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital dan Teknologi Informas	Pengalihan	847.185	466.600	5.450	1.313.785	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
12	Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	Pengalihan	734.200	388.800	5.450	1.123.000	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
13	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Pengalihan	442.800	247.000	5.450	689.800	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023
14	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Pengalihan	398.400	222.300	5.450	620.700	18 Agustus 2023	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan POJK 45/ POJK.03/2015.	B.193.e-CSC/CSM/ CGC/08/2023

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris dan Direksi yang telah memenuhi kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Sunarso	Direktur Utama	60 tahun	Laki-laki	Sarjana Agronomi Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Wholesale Banking, Corporate Banking, Micro Banking, Risk Management, Administrasi Bisnis, Manajemen*
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	60 tahun	Laki-laki	Sarjana Agronomi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Consumer Banking, Wholesale Banking, Risk Management, Manajemen*
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Kedokteran Gigi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan dan perbankan	*Consumer Banking, Wholesale Banking, Risk Management, Manajemen*
Supari	Direktur Bisnis Mikro	57 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Micro Banking, Risk Management, Manajemen*
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	53 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Wholesale Banking, Manajemen*
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Wholesale Banking, Corporate Banking, Risk Management, Akuntansi, Manajemen*
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan dan perbankan	*Risk Management, Sharia Banking, Corporate Banking, Hukum, Manajemen*
Agus Winardono	Direktur *Human Capital*	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Perusahaan Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Human Capital, Risk Management, Ekonomi, Manajemen Keuangan*
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Industri Pertanian Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Retail Banking, International Business Banking, Risk Management, Master Administrasi Bisnis Advance*
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	45 tahun	Perempuan	Sarjana Peternakan Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Risk Management, Finance & Strategic*
Arga Mahanana Nugraha	Direktur *Digital* dan Teknologi Informasi	43 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Informatika Master of Science	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*IT & Digital Banking, Risk Management, Manajemen*
Andrijanto	Direktur Jaringan dan Layanan	49 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Master Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	*Finance, Risk Management, Akuntansi, Keuangan*

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	50 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko	*Banking, Finance, Risk Management*
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	52 tahun	Perempuan	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen	*Finance, Economics, Management*
Hadiyanto*	Komisaris	61 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum ekonomi, dan manajemen	*Law, Economics, Management*
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	48 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang statistik, ekonomi dan manajemen	*Statistic, Economics, Management*
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	65 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank	*Law, Banking, Audit*
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	55 tahun	Perempuan	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen	*Capital Market, Technology, Management*
Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	66 tahun	Laki-laki	Doktorandus Manajemen Sarjana Hukum Magister Hukum Doctor Hukum	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan manajemen	*Law, Social Politics, Management*
Agus Riswanto	Komisaris Independen	61 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum dan regulasi	*Law, Intelligent, Regulation*
Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	58 tahun	Perempuan	Sarjana Arsitektur	Memiliki pengalaman dalam ESG, logistik dan manajemen	*ESG, Logistics, Management*
Awan Nurmawan Nuh **	Komisaris	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Master of Business Taxation	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, audit dan perpajakan	*Accounting, Audit, Taxation*

*Berhenti menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023
**Mulai menjabat sejak tanggal 13 Maret 2023

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Perseroan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib Sekretariat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 10- KOM/11/2018 tanggal

01 November 2018 yang memuat tugas dan tanggung jawab sekretariat Dewan Komisaris diantaranya:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan rapat-rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.
5. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan *Self Assessment* GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap semester.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Widia Jessti

Sekretaris Dewan Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Pekalongan pada tahun 1986. Usia 37 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Diploma III - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006)
- Sarjana Ekonomi (Akuntansi) - Universitas Indonesia (2009)
- Master of Business Administration (Global Banking and Finance) - University of Birmingham, UK (2016)

PENGALAMAN KERJA

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Februari 2021 - April 2022)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (April 2019 - Februari 2021)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) MIND ID (Maret 2017 - April 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (November 2011 - September 2014)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor NOKEP: 05-KOM/BRI/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

April 2022 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Jabatan Fungsional di Kementerian BUMN

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Advanced Leader Program	Bali, 10 Juli 2023	IMD/Bank Mandiri
BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
ESG for Boards - Governance of ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
GRC Integrated Information for Supervisionary Board	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

1. **Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris**
   Sekretaris Dewan Komisaris telah mengkoordinasikan pelaksanaan rapat- rapat Dewan Komisaris, yaitu:
   a. Mengkoordinasikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan Dewan Komisaris.
   b. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
   c. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, dan laporan- laporan lain yang dibutuhkan.
   d. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
   e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
   f. Menyusun konsep agenda-agenda, waktu dan tempat pelaksanaan rapat berdasarkan arahan Dewan Komisaris dan masukan dari Komite Dewan Komisaris.
   g. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memperoleh materi rapat dari sumber-sumber yang terkait dengan agenda rapat, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada Komite jika diperlukan.
   h. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
   i. Menyusun konsep risalah rapat dan menyimpan salinannya.
   j. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/ pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.

2. **Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan**
   Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris, termasuk dalam hal:
   a. Melakukan penatakelolaan persuratan, arsip dan dokumen lainnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.
   b. Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan/disposisi Dewan Komisaris atas surat dan/atau dokumen tersebut, termasuk melakukan korespondensi dengan pihak manajemen Perseroan, pihak eksternal, dan pihak-pihak lainnya, khusus hal-hal yang telah mendapatkan keputusan Dewan Komisaris yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite.
   c. Melakukan penatakelolaan kegiatan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, antara lain keikutsertaan dalam program *training/workshop*/seminar, kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan lain-lain, termasuk memastikan tersedianya sarana dan logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan/acara tersebut.

3. **Penyusunan Konsep Rencana Kerja dan Laporan Dewan Komisaris**
   Sekretaris Dewan Komisaris telah berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun:
   a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
   b. Laporan mengenai hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS, serta laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

4. **Pelaksanaan Tugas Lain yang menjadi Tugas Sekretaris Dewan Komisaris**
   Mengacu pada Piagam Sekretaris Dewan Komisaris yang disetujui oleh Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas lain, termasuk:

a. Mengkoordinasikan dan melakukan tindak lanjut atas permintaan Dewan Komisaris dalam pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penilaian mandiri atas *Good Corporate Governance* pada Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Perseroan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit telah diatur dalam:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
10. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
11. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU. MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
12. Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara.
13. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.
14. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 02-KOM/BRI/02/2020 dan Nokep: 01-DIR/KPT/02/2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
15. Surat Keputusan Direksi Nomor KU. 02 -DIR/KEP/10/2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
16. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan perubahan-perubahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan; keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perseroan berkenaan dengan:

Laporan Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan.
2. Mengevaluasi kinerja SKAI.
3. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit tahunan, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
6. Melakukan reviu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap Piagam Audit Intern.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
8. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
10. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
12. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
13. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
14. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
15. Melakukan koordinasi dan rapat teknis dengan Komite Audit dan manajemen Perusahaan Anak dalam rangka pengawasan tata kelola terintegrasi.

Auditor Independen

1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
   a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
   b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
   a. Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
   b. Ruang lingkup audit;
   c. Imbalan jasa audit;
   d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
   h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk perusahaan anak yang dikonsolidasi. KAP untuk perusahaan anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh perusahaan anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
    k. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku;
    l. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
    m. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
    n. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
    o. Hal lainnya.
10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK BRI.

Kepatuhan (*Compliance*)

1. Memonitor efektivitas kebijakan dan melakukan penelaahan serta rekomendasi perbaikan atas laporan fraud yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Pengaduan (*Whistleblowing System*)

Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

1. Menerima dan mendokumentasikan seluruh laporan indikasi pelanggaran kategori pelanggaran proses akuntansi dan laporan keuangan BRI dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BRI, Anggota Direksi BRI, SEVP dan Anggota Dewan Komisaris/Direksi Perusahaan Anak yang berasal dari aplikasi *Whistleblowing System*.
2. Menerima dan menindaklanjuti terkait laporan dari Unit Pengelola *Whistleblowing System* SKAI dengan kriteria indikasi pelanggaran proses akuntansi dan laporan keuangan BRI dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BRI, Anggota Direksi BRI, SEVP dan Anggota Dewan Komisaris/Direksi Perusahaan Anak.
3. Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit (Anggota dan Pemimpin Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit) melakukan verifikasi dan validasi bersama dengan Dewan Komisaris terkait laporan *Whistleblowing System* yang diterima, serta mengelompokkan laporan *Whistleblowing System* yang diterima, serta mengelompokkan laporan *Whistleblowing System* yang termasuk berkomunikasi dengan pelapor untuk mengumpulkan bukti/dokumen tambahan atas pelaporan.
4. Unit Pengelola *Whistleblowing System* Komite Audit mengajukan permohonan persetujuan rekapitulasi laporan *Whistleblowing System* kategori Tindak Pidana Korupsi kepada Dewan Komisaris setiap bulan untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK melalui Aplikasi *Whistleblowing System*.
5. Melakukan pengkinian informasi pada aplikasi Whistleblowing System diantaranya kategori indikasi pelanggaran dan sarana pelaporan apabila tidak sesuai dengan kriteria laporan *Whistleblowing System* serta status progress tindak lanjut laporan setiap ada perubahan status.
6. Menunjuk Unit Kerja Investigasi/Pihak Independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan indikasi pelanggaran.
7. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Unit Kerja Investigasi/Pihak Independen kepada Unit Kerja Berwenang untuk ditindaklanjuti.
8. Memastikan hasil rekomendasi Unit Kerja Investigasi/Pihak Independen telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
9. Melakukan *update* pada aplikasi *Whistleblowing System* terhadap setiap pelaporan *Whistleblowing System* yang sudah ditindaklanjuti.
10. Menyampaikan laporan rekapitulasi *Whistleblowing System* setiap bulan kepada Dewan Komisaris.
11. Menatakerjakan seluruh dokumen tindak lanjut *Whistleblowing System* pada aplikasi *Whistleblowing System*.
12. Menatakerjakan laporan hasil pemeriksaan dari Unit Kerja investasi dan pengkinian data laporan pada aplikasi *Whistleblowing System*.
13. Menjaga seluruh kerahasiaan informasi identitas Pelaporan, informasi indikasi pelanggaran dan laporan hasil investigasi.

Perusahaan Anak

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Internal BUMN induk maupun anak perusahaan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan audit intern BRI dan kebijakan audit intern perusahaan anak.
3. Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan perusahaan anak.
4. Menelaah kecukupan pengendalian internal perusahaan anak dan secara konglomerasi keuangan.

Lain-Lain

1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit Perseroan diatur dalam Surat Keputusan Nokep: 06-KOM/05/2022 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan prinsip GCG di Perseroan.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

Bab I	**Pendahuluan** Pengertian Umum Dasar Hukum
Bab II	**Pedoman dan Tata Tertib Kerja** Tujuan Tugas dan Tanggung Jawab serta Kewenangan Struktur Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Kode Etik Waktu Kerja Rapat Pelaporan Tata Cara dan Prosedur Kerja Surat/Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
Bab III	**Penutup**

Wewenang Komite Audit

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab Komite Audit untuk:

1. Memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsi komite audit sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan Pekerja, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. (jika diperlukan).
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

1. Seorang Komisaris Independen.
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Periode 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan
1	Hendrikus Ivo	Ketua	*Law, Banking, Audit*	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	*Finance, Economics, Management*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3	Heri Sunaryadi	Anggota	*Capital Market, Technology, Management*	Komisaris Independen
4	Agus Riswanto	Anggota	*Law, Intelligent, Regulation*	Komisaris Independen
5	Sahat Pardede	Anggota	*Accounting, Audit*	Pihak Independen
6	Irwanto	Anggota	*Accounting, Banking*	Pihak Independen
7	Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	*Banking, Audit*	Pihak Independen

Periode 3 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan
1	Hendrikus Ivo	Ketua	*Law, Banking, Audit*	Komisaris Independen
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	*Finance, Economics, Management*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3	Heri Sunaryadi	Anggota	*Capital Market, Technology, Management*	Komisaris Independen
4	Agus Riswanto	Anggota	*Law, Intelligent, Regulation*	Komisaris Independen
5	Sahat Pardede	Anggota	*Accounting, Audit*	Pihak Independen
6	Irwanto	Anggota	*Accounting, Banking*	Pihak Independen
7	Duma Riana Hutapea	Anggota	*Accounting, Regulation*	Pihak Independen

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Hendrikus Ivo
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rofikoh Rokhim
Anggota Komite Audit/
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Heri Sunaryadi
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Agus Riswanto
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



Sahat Pardede

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Balige pada tahun 1961. Usia 64 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989)
- Master of Business Administration, Saint Mary's University (1993)

PENGALAMAN KERJA

- Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat, dan Partners (2021 - sekarang)
- Financial Expert PT Telkom Indonesia (2014)
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006)
- Komite Pengawas SKK Migas (2020)

SERTIFIKASI

Certified Public Accountant (CPA)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 246-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PERIODE MENJABAT

Periode I

MASA JABATAN

31 Maret 2020 s.d sekarang

JABATAN RANGKAP

- Anggota Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk (2014 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (2021 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Petrosea Tbk (2022 - sekarang)
- Tenaga Ahli PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2022 - sekarang)



Irwanto

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Padang pada tahun 1962. Usia 61 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (1988)
- Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2000)

PENGALAMAN KERJA

- Anggota Komite Audit dan Pemantau Manajemen Risiko PT Bank J Trust (2020 - Februari 2021)
- Anggota Badan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (2019 - sekarang)
- Anggota Komite Audit dan Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Resona Perdania (2018 -Maret 2021)
- Bank Indonesia (1994 – 2018)

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 (BSMR) dan 4 (LSPP)
- Sertifikasi Komite Audit (IKAI)
- Sertifikasi Chartered Accountant (CA)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 195-DIR/HCB/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PERIODE MENJABAT

Periode I

MASA JABATAN

26 April 2021 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



Duma Riana Hutapea

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Balige pada tahun 1961. Usia 62 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (1986)
- Master of Science in Business Administration, University of Illinois, USA (1999)

PENGALAMAN KERJA

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi / Pihak Independen BRI (2021 – sekarang)
- Direktur Eksekutif, Unit Kerja Pendukung Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV, OJK (2020 – 2021)
- Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK, Kantor OJK Regional 1, Jakarta-Banten (2015 – 2019)
- Direktur Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan, OJK (2015 – 2015)
- Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, OJK (2013 – 2014)
- Bank Indonesia, Departemen Kredit, Departemen Keuangan, Departemen Kredit dan UMKM, Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan, Departemen Pengendalian Pengawasan Perbankan (1989-2013)

SERTIFIKASI

-

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 2351-DIR/HCB/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PERIODE MENJABAT

Periode I

MASA JABATAN

3 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kemampuan
   a. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
   b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
   c. Wajib mematuhi kode etik Perseroan dan Komite Audit.
   d. Setiap tahun wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan. Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hendrikus Ivo	Ketua	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank
Rofikoh Rokhim	Anggota	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik *Master bidang Public Finance* *Master International & Development Economics* *Doktor bidang Ekonomi*	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heri Sunaryadi	Anggota	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Agus Riswanto	Anggota	Sarjana Hukum Magister Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum dan regulasi
Sahat Pardede	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan audit
Irwanto	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan pengawasan bank
Bardiyono Wiyatmojo*)	Anggota	Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Magister Administrasi Bisnis Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dibidang audit dan pengawasan perbankan
Duma Riana Hutapea**)	Anggota	Sarjana Akuntansi *Master of Science in Business Administration*	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan regulasi

*) Efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023
**) Efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Hendrikus Ivo	Rofikoh Rokhim	Heri Sunaryadi	Agus Riswanto	Sahat Pardede	Irwanto	Bardiyono Wiyatmojo*)	Duma Riana Hutapea**)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√

*) efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023
**) efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

Pengaturan rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Komite Audit dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.
3. Rapat Komite Audit diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan, atau tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Komite Audit.
4. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan secara daring melalui telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam rapat Komite Audit.
5. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan agenda dan jadwal rapat dengan mempertimbangkan permintaan dan masukan dari Komite Audit.
6. Materi rapat Komite Audit tersedia dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan diluar jadwal materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat dilaksanakan.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Senin, 16 Januari 2023	Usulan Perencanaan Audit Tahunan SKAI 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
2	Selasa, 31 Januari 2023	*Closing Meeting Audit* Laporan Keuangan BRI Tahun 2022	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
3	Selasa, 14 Februari 2023	Evaluasi Top 50 debitur Terbesar dan/atau *Politically Exposed Person*	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
4	Selasa, 21 Maret 2023	Proses Bisnis Investigasi *Desk Fraud*	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
5	Kamis, 13 April 2023	Hasil Audit EY dan Rapat Teknis Terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
6	Kamis, 13 April 2023	Reviu SKAI atas Publikasi Laporan Keuangan Posisi 31 Maret 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
7	Kamis, 4 Mei 2023	Perspektif Independensi SEVP SKAI Tahun 2022	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Sahat Pardede 5. Irwanto 6. Bambang Harudi 7. Bardiyono Wiyatmojo
8	Kamis, 4 Mei 2023	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Triwulan I 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Sahat Pardede 5. Irwanto 6. Bambang Harudi 7. Bardiyono Wiyatmojo
9	Selasa, 27 Juni 2023	Hasil Audit SKAI atas Kejadian Fraud dan Mitigasi Risikonya	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
10	Selasa, 4 Juli 2023	Reviu Metodologi Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
11	Selasa, 4 Juli 2023	*Progress* Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR)	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
12	Selasa, 25 Juli 2023	Penelaahan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Semester I Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
13	Selasa, 1 Agustus 2023	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
14	Selasa,8 Agustus 2023	*Kick Off* dan *Progress Limited Review* Laporan Keuangan BRI dan Konsolidasi posisi 30 Juni 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
15	Selasa, 15 Agustus 2023	*Closing Meeting* Laporan Kaji Ulang SKAI Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto 5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	
16	Selasa, 22 Agustus 2023	*Progress* Audit Kepatuhan	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
17	Kamis, 24 Agustus 2023	*Closing Meeting Limited Review* Laporan Keuangan BRI Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Bardiyono Wiyatmojo
18	Kamis, 5 Oktober 2023	*Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan & Laporan Keuangan PUMK Posisi 31 Desember 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
19	Selasa, 10 Oktober 2023	*Progress Tim Task Force* Tindak lanjut Hasil Audit	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
20	Rabu, 25 Oktober 2023	Reviu SKAI atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
21	Selasa, 7 November 2023	Penelaahan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Triwulan III 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea
22	Selasa, 12 Desember 2023	*Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan DPLK Tahun 2023	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi	4. Sahat Pardede 5. Irwanto 6. Duma Riana Hutapea
23	Selasa, 12 Desember 2023	*Progress* Laporan Hasil Audit EY	1. Hendrikus Ivo 2. Rofikoh Rokhim 3. Heri Sunaryadi 4. Agus Riswanto	5. Sahat Pardede 6. Irwanto 7. Duma Riana Hutapea

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama Tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 23 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hendrikus Ivo	Ketua	23	23	100%
Rofikoh Rokhim	Anggota	23	23	100%
Heri Sunaryadi	Anggota	23	23	100%
Agus Riswanto	Anggota	23	23	100%
Sahat Pardede	Anggota	23	23	100%
Irwanto	Anggota	23	23	100%
Bardiyono Wiyatmojo *)	Anggota	17	17	100%
Duma Riana Hutapea **)	Anggota	6	6	100%

*) efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023
**) efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Penghasilan Komite Audit

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hendrikus Ivo	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Rofikoh Rokhim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Heri Sunaryadi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Agus Riswanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Sahat Pardede	Anggota	*IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant* - Internal Audit and *Risk Management Roles in* ESG - BCA *Sustainability Practices* - *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing* ESG *performance*	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		- BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC *Masterclass* – Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC *Masterclass* – Pre IPO dan Post IPO	Jakarta, 14 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		- ESG *for Boards - Governance of* ESG - BSE GRC *Masterclass* - *Introducing* to ESG & IFC *Performance Standard*	Jakarta, 27 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		GRC *Integrated Information for Supervisory Board*	Jakarta , 5 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		Joint Venture between SOE *and Private Sector*	Jakarta, 19 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Irwanto	Anggota	GRC *Masterclass* – ESG *for* Auditor	Jakarta, 13 Juli 2023	BUMN *School of Excellence*
		"IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant" 1. Internal Audit and *Risk Management Roles* in ESG 2. BCA *Sustainability* Practices 3. *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance*	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		- BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC *Masterclass* - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC *Masterclass* - Pre IPO dan Post IPO	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		- ESG *for Boards* - *Governance of* ESG - BSE GRC *Masterclass* - *Introducing to* ESG & IFC *Performance Standard*	Jakarta, 27 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		GRC Integrated Information for Supervisionary Board	Jakarta , 5 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
Bardiyono Wiyatmojo*)	Anggota	*CG Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan BUMN	Jakarta, 20 Desember 2023	BUMN *School of Excellence*
		"IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant" 1. Internal Audit and *Risk Management Roles in* ESG 2. BCA *Sustainability Practices* 3. *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing* ESG *performance*	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		- BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC *Masterclass* – Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC *Masterclass* – Pre IPO dan Post IPO	Jakarta, 14 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		State Owned Enterprises Rating	Jakarta, 20 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		Governance and Integrity of Financial Reporting	Jakarta, 26 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		- ESG *for Boards* - *Governance of* ESG - BSE GRC *Masterclass* - *Introducing to* ESG & IFC *Performance Standard*	Jakarta, 27 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		GRC *Integrated Information for Supervisionary Board*	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Duma Riana Hutapea**)	Anggota	*"IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant"* 1. Internal Audit *and Risk Management Roles in* ESG 2. BCA *Sustainability Practices* 3. *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance*	Batam, 30 - 31 Agustus 2023	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
		- BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo - BLMI GRC *Masterclass* - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) - BLMI GRC *Masterclass* - Pre IPO dan Post IPO	Jakarta, 14 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		- ESG *for Boards - Governance of* ESG - BSE GRC *Masterclass* - *Introducing* to ESG & IFC *Performance Standard*	Jakarta, 27 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		GRC Integrated Information for Supervisionary Board	Jakarta , 5 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		Joint Venture between SOE and Private Sector	Jakarta, 19 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*

*)Efektif sejak 1 Januari 2023 – 2 Oktober 2023
**)Efektif sejak 3 Oktober 2023 sampai sekarang

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Komite pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Intern

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Menelaah dan memberikan rekomendasi persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan	Rekomendasi atas Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2023	14 Februari 2023
2	Menelaah laporan pokok-pokok hasil audit (LHA) secara triwulan	1. Evaluasi laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II 2022	31 Januari 2023
		2. Penelaahan Laporan Keuangan posisi 31 Maret 2023	13 April 2023
		3. Penelaahan Laporan Keuangan BRI Triwulan III 2023	23 Oktober 2023
		4. Penelaahan atas Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2023	23 Mei 2023
		5. Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan II Tahun 2023	28 Juli 2023
		6. Penelaahan Laporan Keuangan BRI Triwulan III 2023	23 Oktober 2023
		7. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan Tahun III 2023	14 Desember 2023
3	*Top 50 Debitur dan Politically Exposed Person* (PEP)	Penelaahan *Top 50 Debitur dan Politically Exposed Person* (PEP)	28 Februari 2023

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
4	Kaji Ulang SKAI oleh Pengendali Mutu Independen	1. Rekomendasi atas Pengadaan Jasa Pengendali Mutu Independen Dari Pihak Ekstern Untuk Kaji Ulang Kinerja Satuan Kerja Audit Intern BRI Tahun 2023	24 Januari 2023
		2. Rekomendasi Konsultan Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Kaji Ulang Kinerja SKAI BRI Tahun 2023.	21 Maret 2023
		3. *Closing Meeting* Laporan Kaji Ulang Kinerja SKAI Tahun 2023	14 Agustus 2023
		4. Laporan Kaji Ulang Kinerja SKAI BRI Tahun 2023.	22 Agustus 2023
5	Tugas Komite Audit lainnya	1. Progress bisnis *Desk Fraud*	21 Maret 2023
		2. Penelaahan laporan Audit SKAI	11 Juli 2023
		3. Penelaahan laporan Audit SKAI	18 Juli 2023
		4. Permintaan Pelaksanaan Audit	21 Juli 2023
		5. Penelaahan laporan Audit SKAI	19 September 2023
		6. Penelaahan laporan Audit SKAI	29 September 2023
		7. Penelaahan *micro manpower planning*	10 Oktober 2023

2. Komite Audit dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik	1. Penunjukan Tim Pengadaan KAP dalam rangka Audit Umum Laporan Keuangan Konsolodasian dan Laporan Keuangan PUMK BRI tahun 2023	12 Januari 2023
		2. Rekomendasi Persetujuan Atas Usulan *Scope* Audit KAP Dalam Rangka Audit Umum Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PUMK BRI Tahun Buku 2023.	8 Februari 2023
		3. Rekomendasi atas Persetujuan penetapan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil BRI Tahun Buku 2023.	20 Februari 2023
		4. Persetujuan awal (*pre-concurrence*) atas pemberian jasa non asuransI	11 Mei 2023
		5. Permohonan *Limited Review* pada Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2023	27 Juni 2023
		6. Pergantian Rekan Penanggung jawab dalam rangka audit laporan keuangan kosolidasian BRI Posisi 31 Desember 2023	15 Juli 2023
		7. Persetujuan awal (*pre-concurrence*) atas pemberian jasa non asurans.	10 Oktober 2023
2	Laporan Keuangan	1. *Closing meeting* Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Konsolidasian BRI tahun buku 2022	31 Januari 2023
		2. Hasil Audit Laporan Keuangan Program PUMK BRI posisi 31 Desember 2022	23 Mei 2023
		3. *Closing Meeting Limited Review* Laporan Keuangan BRI posisi 30 Juni 2023	24 Agustus 2023
3	Laporan evaluasi Komite Audit	Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan BRI Tahun Buku 2022.	17 April 2023

3. Komite Audit dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas lainnya

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pemeriksaan Umum BRI Tahun 2023 oleh OJK	*Exit meeting* BRI tahun 2023	7 Desember 2023

4. Komite Audit dengan Manajemen

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Rekomendasi Komite Audit	1. Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Jasa Audit Umum KAP	7 Maret 2023
		2. Rekomendasi atas penilaian Independensi SEVP SKAI tahun 2022	9 Mei 2023
		3. Laporan evaluasi Implementasi ISO 370001:2016 SMAP	23 Mei 2023
		4. *Progress* Implementasi *Internal Control over Financial Report* (ICoFR)	4 Juli 2023
		5. Reviu Metodologi Perhitungan CKPN	4 Juli 2023
2	Evaluasi Komite Audit	1. Evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bulan Semester II 2022	31 Januari 2023
		2. Evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bulan Semester I 2023	1 Agustus 2023

5. Komite Audit dengan DPLK

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Laporan keuangan	1. Rekomendasi Penunjukan KAP DPLK th 2022	10 Januari 2023
		2. *Kick off meeting* Audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun 2021	19 Januari 2023
		3. Laporan *Progress* Audit KAP atas laporan Keuangan DPLK BRI Posisi 31 Desember 2023	21 Maret 2023
		4. Laporan Evaluasi Komite Audit BRI terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas laporan Keuangan DPLK BRI tahun buku 2022	27 Juni 2023
2	Pengadaan jasa audit	1. Pengadaan jasa audit KAP untuk laporan Keuangan DPLK BRI th 2023	15 Agustus 2023
		2. Rekomendasi Penetapan Akuntan Publik atau KAP atas Laporan Keuangan dan laporan Investasi DPLK BRI	17 Oktober 2023

6. Internal Komite Audit

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	RKA Komite Audit	1. Pembagian Tugas dan penanggung jawab dalam Pencapaian Rencana Kerja Komite audit Tahun 2023	10 Januari 2023
		2. RKA Komite Audit 2024	29 Desember 2023

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit menilai bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
10. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
11. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Surat keputusan Dewan Komisaris No. B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang mengatur diantaranya:

1. Pengertian Umum
2. Dasar Hukum
3. Tujuan Pembentukan Komite
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Kewajiban, Larangan dan Kewenangan
6. Kedudukan Komite
7. Keanggotaan Komite
8. Etika dan Waktu Kerja
9. Pelaksanaan Rapat dan Laporan
10. Penutup

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, jabatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan melalui Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nokep: 1505-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Surat Keputusan Direksi Nokep: 0637-DIR/HCB/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penyelarasan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk meminta informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia dari pihak internal.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi BRI adalah sebagai berikut:

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex officio*) atau seorang perwakilan pekerja Perseroan, anggota lainnya dapat berasal dari pihak luar Perseroan;
4. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
5. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
   a. Wajib memenuhi syarat:
      - tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
      - memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
      - tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
   b. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
   c. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite;
7. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
10. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Heri Sunaryadi	Ketua	Komisaris Independen	*Capital Market, Technology, Management*
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	*Finance, Economics, Management*
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	*Banking, Finance, Risk Management*
4	Hadiyanto*	Anggota	Komisaris	*Law, Economics, Management*
5	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	*Statistic, Economics, Management*

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
6	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Banking, Audit*
7	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Regulation*
8	Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	*ESG, Logistics, Management*
9	Agus Riswanto	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Intelligent, Regulation*
10	Paripurna P. Sugarda	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Management*
11	E.R.A. Taufiq	Anggota	*Ex Officio* (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	*Banking, Human Resources*

Keterangan:
*Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023

Susunan Anggota Komite Periode 14 Maret 2023 sampai dengan 3 Juli 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Heri Sunaryadi	Ketua	Komisaris Independen	*Capital Market, Technology, Management*
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	*Finance, Economics, Management*
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	*Banking, Finance, Risk Management*
4	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	*Statistic, Economics, Management*
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Banking, Audit*
6	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Regulation*
7	Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	*ESG, Logistics, Management*
8	Agus Riswanto	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Intelligent, Regulation*
9	Paripurna P. Sugarda	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Management*
10	E.R.A. Taufiq	Anggota	*Ex Officio* (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	*Banking, Human Resources*

Susunan Anggota Komite Periode 4 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Heri Sunaryadi	Ketua	Komisaris Independen	*Capital Market, Technology, Management*
2	Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	*Finance, Economics, Management*
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	*Banking, Finance, Risk Management*
4	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	*Statistic, Economics, Management*
5	Awan Nurmawan Nuh*	Anggota	Komisaris	*Accounting, Audit, Taxation*
5	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Banking, Audit*
6	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Regulation*
7	Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	*ESG, Logistics, Management*
8	Agus Riswanto	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Intelligent, Regulation*
9	Paripurna P. Sugarda	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Management*
10	M. Dadang K.F.	Anggota	*Ex Officio* (Kepala Divisi Human Capital Business Parter)	*Banking, Human Resources*

Keterangan:
*Efektif setelah lulus *fit and proper test* OJK

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Heri Sunaryadi
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Awan Nurmawan Nuh
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rofikoh Rokhim
Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi/ Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Hendrikus Ivo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Utama

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Hadiyanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Nurmaria Sarosa
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rabin Indrajad Hattari
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Agus Riswanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Paripurna P. Sugarda
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



M. Dadang Permana K.F.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Parter) Warga negara Indonesia, lahir di bandung, pada tahun 1973. Usia 50 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Nokep: 0673-DIR/HCB/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Sesuai Dasar Hukum Pengangkatan

PENGALAMAN KERJA

- Division Head Human Capital Business Partner (01/06/2023 - Sekarang)
- Regional Chief Audit Denpasar (01/08/2022 - 31/05/2023)
- Department Head Talent Management & Industrial Relations, Human Capital Business Partner Division (01/01/2020 - 31/07/2022)
- Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier & Culture, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/05/2019 - 31/12/2019)
- Kepala Bagian Pengembangan Karier, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/06/2018 – 30/04/2019)
- Kepala Bagian Human Capital, Kantor Wilayah Yogyakarta (01/10/2016 – 31/05/2018)
- Kepala Bagian Human Capital, Kantor Wilayah Denpasar (01/08/2014 – 30/09/2016)
- Kepala Bagian Human Capital, Kantor Wilayah Padang (01/09/2013 – 31/07/2014)

MASA JABATAN

4 Juli 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

- Komisaris PT Upaya Purnabakti Sejahtera (BRImedika) (01/09/2023 – Sekarang)
- Kepala Divisi Human Capital Business Partner (4 Juli 2023 – sekarang)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Pertanian, Universitas Winaya Mukti, Jatinangor (1996)
- Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)

SERTIFIKASI

Manajemen Risiko level 4 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heri Sunaryadi	Ketua	Sarjana Tekologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik *Master* bidang *Public Finance* *Master International & Development Economics* Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi *Master of Business Administration*	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hadiyanto*	Anggota	Sarjana Hukum *Master of Law* Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengawasan perbankan
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen *Ph.D. in Economics*	Memiliki pengalaman dalam bidang statistik, ekonomi dan manajemen
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Sarjana Ekonomi *Master of Business Taxation*	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, audit dan perpajakan
Hendrikus Ivo	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas *Magister of Science*	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi
Nurmaria Sarosa	Anggota	Sarjana Arsitektur	Memiliki pengalaman dalam ESG, logistik dan manajemen
Agus Riswanto	Anggota	Sarjana Hukum Magister Bidang Hukum Doktor Bidang Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum, penegakan hukum dan regulasi
Paripurna P. Sugarda	Anggota	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan manajemen
M. Dadang Permana K.F.	Anggota	Sarjana Pertanian, Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan sumber daya manusia

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	HS	RR	KW	HD*	RIH	ANN	HI	DRL	NS	AR	PPS	ERT**	MDK***
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:
* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023
** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023
*** Mulai menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023

Keterangan:

KW	Kartika Wirjoatmodjo	DRL	Dwi Ria Latifa	DRL	Dwi Ria Latifa
RR	Rofikoh Rokhim	HS	Heri Sunaryadi	NS	Nurmaria Sarosa
HD	Hadiyanto	PPS	Paripurna Poerwoko Sugarda	AR	Agus Riswanto
RIH	Rabin Indrajad Hattari	AR	Agus Riswanto	ERT	E.R.A. Taufiq
HI	Hendrikus Ivo	ANN	Awan Nurmawan Nuh	MDK	M. Dadang Permana K.F.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
5. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
6. Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite.
8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan.
10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
11. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
12. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
13. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
14. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/ Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
15. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
16. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1	Selasa, 14 Februari 2023	Evaluasi *Talent Pool* BRI	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Hadiyanto E.R.A. Taufiq	Nominasi
2	Selasa, 7 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Hadiyanto E.R.A. Taufiq	Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
3	Senin, 13 Maret 2023	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPS Tahunan Tahun 2023	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Hadiyanto E.R.A. Taufiq	Nominasi
4	Selasa, 21 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Remunerasi
5	Selasa, 21 Maret 2023	Lanjutan Evaluasi *Talent Pool* BRI (berasal dari Perusahaan Anak)	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
6	Selasa, 4 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
7	Selasa, 11 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
8	Senin, 17 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
9	Selasa, 23 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
10	Selasa, 30 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh E.R.A. Taufiq	Nominasi
11	Selasa, 25 Juli 2023	Nominasi Jabatan Corporate Secretary BRI	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
12	Selasa, 8 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
13	Selasa, 15 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
14	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembahasan Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
15	Selasa, 26 September 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
16	Selasa, 10 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
17	Selasa, 31 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
18	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi Anggaran Tantiem dengan Kementerian BUMN	Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa M. Dadang K.F.	Remunerasi
19	Selasa, 12 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi
20	Senin, 18 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak	Kartika Wirjoatmodjo Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Heri Sunaryadi Dwi Ria Latifa Nurmaria Sarosa Paripurna P. Sugarda Agus Riswanto Awan Nurmawan Nuh M. Dadang K.F.	Nominasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 20 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Heri Sunaryadi	Ketua	20	20	100%
Rofikoh Rokhim	Sekretaris	20	19	95%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	20	18	90%
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	20	18	90%
Hendrikus Ivo	Anggota	20	20	100%
Dwi Ria Latifa	Anggota	20	19	95%
Nurmaria Sarosa	Anggota	20	20	100%
Paripurna P. Sugarda	Anggota	20	19	95%
Agus Riswanto	Anggota	20	18	90%
Hadiyanto*	Anggota	3	3	100%
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	18	17	94%
E.R.A. Taufiq**	Anggota	10	10	100%
M. Dadang K.F.***	Anggota	10	10	100%

Keterangan:
* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023
** Berhenti menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023
*** Mulai menjabat sejak tanggal 4 Juli 2023

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Heri Sunaryadi	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Rofikoh Rokhim	Sekretaris	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hendrikus Ivo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Nurmaria Sarosa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Paripurna P. Sugarda	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Agus Riswanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
M. Dadang K.F.	Anggota	*Executive Education Program - High Impact Leadership*	Tanggal 18-22 September 2023 / *Columbia Business School - New York*	*Columbia Business School* & BRI *Corporate University*
		BRILiaN Specialist Development Program - Dynamic Internal Audit in Agile Business Environment "Kredit Briguna"	Tanggal 30 Mei - 7 Juni 2023 / *Online*	*Audit Standard & Quality Development Division* & BRI *Corporate University*
		BRILiaN Specialist Development Program - Teknik *Review* Penulisan Laporan Audit, *Agile* Audit Proses, *Consulting Process*	Tanggal 2-3 Maret 2023 / Jakarta	*Audit Standard & Quality Development Division* & BRI *Corporate University*

Penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Nominasi Calon Pengurus Perseroan

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 14 Februari 2023	Evaluasi *Talent Pool* BRI
2	Senin, 13 Maret 2023	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPS Tahunan Tahun 2023
3	Selasa, 21 Maret 2023	Lanjutan Evaluasi *Talent Pool* BRI (berasal dari Perusahaan Anak)

2. Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di Perusahaan Anak atau pihak terkait

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 4 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
2	Selasa, 11 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
3	Senin, 17 April 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
4	Selasa, 23 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
5	Selasa, 30 Mei 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
6	Selasa, 8 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
7	Selasa, 15 Agustus 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
8	Selasa, 26 September 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
9	Selasa, 10 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
10	Selasa, 31 Oktober 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
11	Selasa, 12 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
12	Senin, 18 Desember 2023	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak

3. Reviu Kebijakan dan Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 7 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan
2	Selasa, 21 Maret 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan
3	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembahasan Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
4	Rabu, 22 November 2023	Pembahasan Anggaran Tantiem dan LTI tahun 2024
5	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi Anggaran Tantiem dengan Kementerian BUMN

4. Nominasi dan Evaluasi Pejabat Perseroan

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 25 Juli 2023	Nominasi Jabatan Corporate Secretary BRI

5. Nominasi dan Evaluasi Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Pelaksanaan Tugas
1	Selasa, 26 September 2023	Pembaharuan Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris

Keterangan: Pembahasan dilakukan dalam rapat Dewan Komisaris

Secara umum Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada penjelasan di atas telah disampaikan rincian rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali antara lain melakukan pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi, Nominasi Calon Pengurus Perseroan, Evaluasi *Talent Pool*, Nominasi Pengurus Perusahaan Anak, Reviu Kebijakan dan Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta terkait Nominasi dan Evaluasi Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus mengikuti *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi calon Pengurus Perseroan berdasarkan data *Top Talent* BRI yang berasal dari Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau Direksi Perusahaan Anak yang selanjutnya menjalani *Fit and Proper Test* oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi saat ini dinilai telah mencukupi. Khusus bagi Direksi telah diterapkan penilaian kinerja secara individu yang dapat mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang *prudent*, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan remunerasi, Perseroan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, *benchmark* ke industri dan *peers group* baik pada level domestik dan regional serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh konsultan independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.

Kebijakan Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi Perseroan dilaksanakan berdasarkan tujuan jangka panjang Perseroan. Pelaksanaan suksesi Direksi mempertimbangkan dari berbagai aspek diantaranya:
1. Integritas
2. Latar belakang bidang pekerjaan,
3. Pengalaman kerja dan
4. Kepemimpinan.

Prinsip pelaksanaan Suksesi Direksi didasarkan pada asas Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. BRI memiliki kebijakan *talent pool candidate* untuk menyeleksi pegawai-pegawai yang potensial untuk menduduki posisi pimpinan di Perseroan maupun Perseroan BUMN lain. Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi. Selain itu Perseroan juga secara berlaka melakukan evaluasi terhadap pejabat eksekutif maupun pejabat dibawahnya untuk dapat menjadi penerus selanjutnya sehingga kepemimpinan dan karakter tetap cocok dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan diperlukan oleh perusahaan.

Kandidat yang terpilih kemudian diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya menjalani prosedur pencalonan Direksi berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Komite di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Pedoman Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 mengatur tentang:

1. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab.
2. Pembagian kerja.
3. Waktu dan etika kerja.
4. Rapat Komite.
5. Struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan. Tugas dan tanggung KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan.
4. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya Fraud Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud Perseroan.
6. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan.
7. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
8. Mengevaluasi dan menganalisis Tingkat Kesehatan Bank paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank.
9. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan.
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Masa Jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Susunan Anggota Komite Periode 1 Januari 2023 – 03 Juli 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	*Finance, Economics, Management*
Hadiyanto	Anggota	Komisaris	*Law, Economics, Management*
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	*Statistic, Economics, Management*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen	*Capital Market, Technology, Management*
Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	*ESG, Logistics, Management*
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Pihak Independen	*ESG, Logistics, Management*
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen	*Accounting, Management*
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen	*Banking, Management*

Susunan Anggota Komite Periode 04 Juli 2023 – 02 Oktober 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	*Finance, Economics, Management*
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	*Statistic, Economics, Management*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen	*Capital Market, Technology, Management*
Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	*ESG, Logistics, Management*
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Komisaris	*Accounting, Audit, Taxation*
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen	*Accounting, Management*
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen	*Banking, Management*

Susunan Anggota Komite Periode 03 Oktober 2023 - Sekarang

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	*Finance, Economics, Management*
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	*Statistic, Economics, Management*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen	*Capital Market, Technology, Management*
Nurmaria Sarosa	Anggota	Komisaris Independen	*ESG, Logistics, Management*
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Komisaris	*Accounting, Audit, Taxation*
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen	*Banking, Management*
Sandra Chalik	Anggota	Pihak Independen	*Accounting, Risk Management*

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rofikoh Rokhim
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko/Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Heri Sunaryadi
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rabin Indrajad Hattari
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Nurmaria Sarosa
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Awan Nurmawan Nuh
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



A. Sigid Sudahno

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tahun 1961. Usia 62 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Semarang.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 245-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Cabang, BRI So'E Timor - Tengah Selatan (2002 – 2005)
- *Senior Account Officer* Kantor Wilayah BRI Padang (2005 – 2006)
- Kepala Bagian Kebijakan Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (2007- 2013)
- Wakil Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (2013 – 2017)
- Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (2018 – 2019)
- Komisaris Pada Bringin Sejahtera Makmur Insurance Broker (2018 – 2019)

MASA JABATAN

31 Maret 2020 s.d Sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran, Universitas Diponegoro Semarang (1987).
- Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Universitas Padjadjaran Bandung (2000)

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, BNSP
- Sertifikasi Gelar Profesi Broker Asuransi, APARI



Sandra Chalik

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Makassar, pada tahun 1964. Usia 59 tahun Per Januari 2023. Berdomisili di Semarang.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 2349-DIR/HCB/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- *Group Head*, Manajemen Risiko, Kantor Wilayah BRI Jakarta I (2008)
- Kepala Bagian, Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Terpadu, Kantor Pusat BRI (2008-2012)
- Kepala Bagian, Laporan Keuangan Kantor Pusat BRI (2012-2013)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kebijakan dan Manajemen Keuangan, Kantor Pusat BRI (2013-2014)
- Kepala Divisi, Manajemen Risiko, Kantor Pusat BRI (2015-2017)
- Kepala Divisi, *Enterprise Risk & Portofolio Management*, Kantor Pusat BRI (2017-2018)
- Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan Kantor Pusat BRI (2018-2020)

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi, STIE Surabaya – Surabaya (1989)
- Magister MM Manajemen Risiko, Universitas Indonesia – Jakarta (2003)

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajamen Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rofikoh Rokhim	Ketua	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen
Hadiyanto	Anggota	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, pengawasan dan hukum
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang statistik, ekonomi dan manajemen

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi
Heri Sunaryadi	Anggota	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Nurmaria Sarosa	Anggota	Sarjana Arsitektur	Memiliki pengalaman dalam ESG, logistik dan manajemen
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Business Taxation	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, audit dan perpajakan
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Finance	Memiliki pengalaman dalam akuntansi dan manajemen
A. Sigid Sudahno	Anggota	Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan dan manajemen
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman dalam sosial politik dan manajemen risiko
Sandra Chalik	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister MM Manajemen Risiko	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan manajemen risiko

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR sebagai berikut:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi.
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

Tabel Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Aspek Independensi	RR	HD	RHI	DRL	HS	NS	ANN	BN	SS	RDA	SC
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

RR	Rofikoh Rokhim	**NS**	Nurmaria Sarosa	**SC**	Sandra Chalik
HD	Hadiyanto	**ANN**	Awan Nurmawan Nuh		
RIH	Rabin Indrajad Hattari	**BN**	Bintoro Nurcahyo		
DRL	Dwi Ria Latifa	**SS**	A. Sigid Sudahno		
HS	Heri Sunaryadi	**RDA**	Ridwan Darmawan Ayub		

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
3. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*email*), WA paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
4. Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
6. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
7. Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
8. Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/ Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan.
11. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
12. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
13. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
15. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
16. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.

Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Selasa, 24 Januari 2023	Evaluasi Kinerja Investasi dan Realisasi Rencana Bisnis DPLK BRI Semester II Tahun 2022	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
2	Selasa, 24 Januari 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3	Selasa, 24 Januari 2023	Profil Risiko Triwulan IV, Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2022, Strategi *Anti Fraud* Semester II/2022	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
4	Selasa, 31 Januari 2023	Laporan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan APU PPT Semester II Tahun 2022	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
5	Selasa, 21 Februari 2023	Tata Kelola *Product Management*.	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
6	Selasa, 21 Februari 2023	*Evaluasi Complaint Handling*	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
7	Selasa, 28 Februari 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
8	Selasa, 7 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapen BRI 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Hadiyanto 3. Rabin Indrajad Hattari 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Nurmaria Sarosa 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
9	Selasa, 21 Maret 2023	*Trajectory Loan At Risk* (LaR) Per Segmen	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
10	Selasa, 28 Maret 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
11	Selasa, 28 Maret 2023	Permohonan Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atas nama PT PNM	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Nurmaria Saraosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
12	Selasa, 28 Maret 2023	*Liquidity Risk Management dan Balance Sheet Management*	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Nurmaria Saraosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13	Selasa, 2 Mei 2023	Rencana Penyertaan Modal KPEI dalam rangka Pengembangan *Central Counterparty* (CPP) Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT)	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
14	Selasa, 2 Mei 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
15	Selasa, 9 Mei 2023	Update Perkembangan Restrukturisasi dan Eksposur Kredit PT Waskita Karya Grup.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
16	Selasa, 9 Mei 2023	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
17	Selasa, 23 Mei 2023	Reviu Pengelolaan Risiko dan Resiliensi IT	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
18	Selasa, 6 Juni 2023	Perkembangan Bisnis Segmen Konsumer	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
19	Selasa, 6 Juni 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
20	Selasa, 20 Juni 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
21	Selasa, 20 Juni 2023	Usulan *Threshold* PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
22	Selasa, 18 Juli 2023	Update Kinerja Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
23	Selasa, 18 Juli 2023	*Update* Kinerja Portofolio Surat Berharga	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
24	Selasa, 18 Juli 2023	Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank BRI Semester I 2023, dan Strategi *Anti Fraud* BRI Semester I Tahun 2023.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
25	Selasa, 25 Juli 2023	Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I Tahun 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
26	Selasa, 25 Juli 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
27	Selasa, 25 Juli 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
28	Selasa, 1 Agustus 2023	*Liquidity Management* Reviu	1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
29	Selasa, 1 Agustus 2023	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Semester I 2023.	1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
30	Selasa, 8 Agustus 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
31	Selasa, 8 Agustus 2023	*Update* Implementasi ESG.	1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. Bintoro Nurcahyo 7. A. Sigid Sudahno
32	Selasa, 15 Agustus 2023	*Update* Perkembangan Bisnis Segmen *Wholesale* dan Institutional.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
33	Selasa, 22 Agustus 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
34	Selasa, 19 September 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
35	Selasa, 19 September 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
36	Selasa, 26 September 2023	Pengelolaan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) - Aset Terbengkalai BRI	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
37	Selasa, 26 September 2023	Portofolio Kredit Korporasi dan Debitur *High Risk*.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Bintoro Nurcahyo 8. A. Sigid Sudahno
38	Selasa, 10 Oktober 2023	Identifikasi dan Manajemen Risiko Bidang Hukum.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
39	Selasa, 24 Oktober 2023	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Dwi Ria Latifa 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. A. Sigid Sudahno 7. Sandra Chalik

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
40	Selasa, 21 November 2023	*Risk Appetite Statement* (RAS) BRI Tahun 2024 dan *Recovery Plan* (RP) BRI Tahun 2023-2024.	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Heri Sunaryadi 4. Nurmaria Sarosa 5. Awan Nurmawan Nuh 6. A. Sigid Sudahno 7. Sandra Chalik
41	Selasa, 28 November 2023	*Credit Portfolio Update* dan *Outlook* 2023-2024	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
42	Selasa, 28 November 2023	Persetujuan Realisasi Rencana Binis DPLK Semester I 2023	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
43	Selasa, 5 Desember 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
44	Selasa, 5 Desember 2023	Penyediaan dana kepada pihak terkait atas nama Danareksa Sekuritas	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Heri Sunaryadi 4. Dwi Ria Latifa 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik
45	Selasa, 12 Desember 2023	Konsultasi Kredit	1. Rofikoh Rokhim 2. Rabin Indrajad Hattari 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Nurmaria Sarosa 6. Awan Nurmawan Nuh 7. A. Sigid Sudahno 8. Sandra Chalik

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 45 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko		
		Jumlah dan Presentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Rofikoh Rokhim	Ketua	45	45	100%
Hadiyanto	Anggota	8	7	88%
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	45	40	89%
Dwi Ria Latifa	Anggota	45	43	96%

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko		
		Jumlah dan Presentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Presentase
Heri Sunaryadi	Anggota	45	42	93%
Nurmaria Sarosa	Anggota	45	45	100%
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	36	34	94%
Bintoro Nurcahyo	Anggota	37	37	100%
A. Sigid Sudahno	Anggota	45	44	98%
Sandra Chalik	Anggota	8	7	88%

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; atau minimal dua tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rofikoh Rokhim	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Heri Sunaryadi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Nurmaria Sarosa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Bintoro Nurcahyo	Anggota	*Training*: IIA Indonesia *National Conference: Staying Relevant* 1. Internal Audit and *Risk Management Roles* in ESG 2. BCA *Sustainability Practices* 3. *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing* ESG *performance*	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		ESG *for Boards - Governance of* ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC *Integrated Information for Supervisionary Board*	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Refreshing Manajemen Risiko Jenjang 6, LPPI, Desember 2023	Jakarta, 29 Desember 2023	BARa Risk Forum - LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
A. Sigid Sudahno	Anggota	*Training*: *IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant* 1. Internal Audit and *Risk Management Roles* in ESG 2. BCA *Sustainability Practices* 3. *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance*	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		ESG *for Boards - Governance* of ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC *Integrated Information for Supervisionary Board*	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
Sandra Chalik	Anggota	*Training*: *IIA Indonesia National Conference: Staying Relevant* 1. Internal Audit and *Risk Management Roles* in ESG 2. BCA *Sustainability Practices* 3. *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance*	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		ESG *for Boards - Governance of* ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC *Integrated Information for Supervisionary Board*	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

Remunerasi bagi angota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2023

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
1	Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Lainnya	Tanggapan atas Kebijakan Umum Operasional	25 Januari 2023	Tanggapan atas Kebijakan Umum Operasional
		Update atas Perubahan Kebijakan Penerapan APU PPT	07 Maret 2023	Persetujuan Perubahan Kebijakan Penerapan APU PPT
		Reviu dan *Update* Kebijakan Umum Keuangan dan Akuntansi	07 Maret 2023	Tanggapan Kebijakan Umum Keuangan dan Akuntansi

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
		Reviu dan *Update* Kebijakan Umum Dana dan Jasa	29 September 2023	Tanggapan Kebijakan Umum Dana dan Jasa
		Reviu dan *Update* Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan MItra	17 Oktober 2023	Tanggapan Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan MItra
		Reviu dan *Update* Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan MItra	21 November 2023	Persetujuan Kebijakan Umum Kerjasama BRI dengan Mitra
		Update atas Perubahan Kebijakan APU PPT -PPPSPM	28 November 2023	Persetujuan Perubahan Kebijakan APU PPT - PPPSPM
2	Persetujuan Dekom untuk disampaikan ke OJK/LPS/ KBUMN	Laporan Persetujuan Rencana Bisnis Bank 2024-2026	28 November 2023	Rencana Bisnis Bank 2024-2026
		Laporan Persetujuan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024	28 November 2023	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024
		Laporan Persetujuan Persetujuan Penyesuaian *Risk Appetite Statement* (RAS)	28 November 2023	*Risk Appetite Statement* (RAS)
		Laporan Persetujuan Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024	29 November 2023	Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024
3	Reviu dan Evaluasi Profil Risiko	Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2022	24 Januari 2023	Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2022
		Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023	09 Mei 2023	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023
		Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2023	21 Agustus 2023	Profil Risiko Triwulan II Tahun 2023
		Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023	21 November 2023	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023
4	Reviu dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2022	24 Januari 2023	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2022
		Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2023	21 Agustus 2023	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2023
5	Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2022	24 Januari 2023	Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2022
		Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2023	28 Agustus 2023	Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2023
6	Reviu dan Evaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester II Tahun 2022	07 Februari 2023	Evaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester II Tahun 2022
		Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester I Tahun 2023	28 Agustus 2023	Evaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) - Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Semester I Tahun 2023
7	Reviu dan Evaluasi Fungsi Kepatuhan	Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2022	07 Februari 2023	Evaluasi Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2022
		Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023	21 November 2023	Evaluasi Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2023
8	Evaluasi dan Persetujuan Aksi Korporasi	Persetujuan Proposal Aksi Korporasi	11 Januari 2023	Rencana *Buyback* Saham 2023
			20 Februari 2023	Rencana *Buyback* Saham 2023
9	Pembahasan dan Reviu Agenda Thematik	Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	25 Januari 2023	Evaluasi *Complaint Handling* dan Strategi Penguatan Layanan Operasional
			21 Februari 2023	*Product Management*
			05 Mei 2023	Pengelolaan Likuiditas dan Struktur *Treasury Balance Sheets*

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
10	Reviu dan Evaluasi Perkembangan Kredit dan Restrukturisasi		20 Juni 2023	*Review* Pengelolaan Risiko dan Resiliensi IT
			28 Juli 2023	*Update* Kinerja Unit Kerja Luar Negeri
			27 Juni 2023	Pengembangan Bisnis Konsumer
			02 Agustus 2023	*Update* Kinerja Portofolio Surat Berharga
			28 Agustus 2023	*Liquidity Risk Profile* dan *Balance Sheet Management*
			04 September 2023	*Update* Perkembangan Segmen *Wholesale* dan Institutional
			23 Agustus 2023	*Update* Implementasi ESG
			03 Oktober 2023	Pengelolaan Aset Tidak Bergerak (ATTB) – Aset Terbengkalai
			04 Oktober 2023	Identifikasi dan Manajemen Risiko Bidang Hukum
			17 Oktober 2023	Update Portofolio Korporasi dan Debitur High Risk
			31 Oktober 2023	Identifikasi dan Manajemen Risiko Bidang Hukum
			27 Juni 2023	Usulan Threshold di PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani
			14 Apriil 2023	*Trajectory* LAS per Segmen
			15 Mei 2023	*Update* Restrukturisasi dan Exposure Kredit
			04 September 2023	*Update* Perkembangan Segmen Bisnis *Wholesale* dan Institusional
			06 Juni 2023	*Update* Portofolio Korporasi dan Debitur *High Risk*
			28 November 2023	Credit Portfolio *Update* dan *Outlook* 2023-2024
11	Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris	- Konsultasi Kredit Dengan Forum Rapat Konsultasi Kredit - Konsultasi Kredit Tanpa Forum Rapat Konsultasi Kredit	14 Februari 2023	Konsultasi Kredit (14 Februari 2023)
			04 April 2023	Konsultasi Kredit (04 April 2023)
			23 Mei 2023	Konsultasi Kredit (23 Mei 2023)
			27 Juni 2023	Konsultasi Kredit (27 Juni 2023)
			27 Juni 2023	Konsultasi Kredit (27 Juni 2023)
			02 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (02 Agustus 2023)
			05 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (05 Agustus 2023
			15 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (15 Agustus 2023)
			15 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (15 Agustus 2023)
			24 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (24 Agustus 2023)
			24 Agustus 2023	Konsultasi Kredit (24 Agustus 2023)
12	Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	Proposal fasilitas penyediaan dana kepada Perusahaan Anak/Pihak Terkait	05 April 2023	Penyediaan Dana dan Penyertaan Modal pada PT Permodalan Nasional Madani
			30 Mei 2023	Penyertaan Modal pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
13	Evaluasi Kinerja dan Penerapan Tata Kelola DPLK	Laporan Realisasi Rencana Bisnis DPLK BRI Semester II 2022	25 Januari 2023	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis DPLK BRI Semester II 2022
		Laporan dan Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023	28 Juli 2023	Persetujuan Realisasi Rencana Bisnis DPLK Semester I 2023
		Laporan dan Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024	21 November 2023	Persetujuan Rencana Bisnis DPLK Tahun 2024
14	Evaluasi dan Persetujuan Dana Pensiun BRI	Laporan dan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI	7 Maret 2023	Pernyataan Pendiri Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan salah satu komite yang membantu Dewan Komisaris serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran OJK Nomor 014/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
10. Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta perubahan-perubahannya.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nomor 04-KOM/BRI/01/2023 tanggal 31 Januari 2023. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi menjadi acuan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Isi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

Bab I	**Pendahuluan** Pengertian Umum Dasar Hukum
Bab II	**Pedoman dan Tata Tertib Kerja** Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan serta Wewenang Organisasi - Tujuan - Tugas dan Tanggung Jawab - Kewenangan - Etika kerja - Organisasi - Etika Kerja - Waktu Kerja - Rapat - Laporan - Mekanisme Surat Menyurat
Bab III	**Penutup**

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi tertuang dalam Surat Keputusan Nokep : 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada anak perusahaan agar selaras dengan kebijakan manajemen risiko pada Entitas Utama dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama serta memberikan arahan atau nasehat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
4. Mengevaluasi penerapan Audit Intern Anak Perusahaan agar selaras dengan Kebijakan Audit Intern Entitas Utama.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.

6. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk disampaikan kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan dan penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi Entitas Utama.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
2. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka peningkatan fungsi pengendalian intern, fungsi kepatuhan, dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
3. Mendapatkan masukan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit meliputi pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dari anggota konglomerasi keuangan melalui forum diskusi dan/atau atau rapat di level teknis.
4. Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait di Entitas Utama untuk informasi/klarifikasi terkait operasional Entitas Utama dan dengan unit yang menangani Perusahaan Anak di Entitas Utama untuk informasi/klarifikasi terkait Perusahaan Anak.
5. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Komite dapat dibantu oleh Staf dan/atau Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang dapat berasal dari kalangan intern maupun ekstern Bank.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota;
   b. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota;
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota;
   e. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Susunan Anggota Komite Periode 1 Januari 2023 – 15 Februari 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	*Finance, Economics, Management*
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	*Banking, Finance, Risk Management*
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	*Law, Economics, Management*
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Banking, Audit*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Regulation*

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Capital Market, Technology, Management*
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Management*
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Management*
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	*Accounting, Regulation*
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Finance*
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	*Economics, Management*
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	*Economics, Management*
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	*Sharia, Management*
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	*Law, Management*
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	*Law, Sharia*
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	*Accounting, Management*
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI *Multifinance* Indonesia	*Economics, Management*
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	*Scientific Computing, Management*
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	*Economics, Management*
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	*Sharia, Management*
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	*Accounting, Management*

Susunan Anggota Komite Periode 15 Februari 2023 - 14 Maret 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	*Finance, Economics, Management*
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	*Banking, Finance, Risk Management*
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	*Law, Economics, Management*
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Banking, Audit*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Capital Market, Technology, Management*
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Management*
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Management*
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	*Accounting, Regulation*
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Risk Management*
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	*Economics, Management*
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	*Economics, Management*
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	*Sharia, Management*
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	*Law, Management*
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	*Law, Sharia*
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	*Accounting, Management*
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI *Multifinance* Indonesia	*Economics, Management*

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	*Scientific Computing, Management*
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	*Economics, Management*
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	*Sharia, Management*
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	*Accounting, Management*
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	*Economics, Management*

Susunan Anggota Komite Periode 14 Maret 2023 - 04 Juli 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	*Finance, Economics, Management*
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	*Banking, Finance, Risk Management*
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Banking, Audit*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Capital Market, Technology, Management*
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Management*
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Management*
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	*Accounting, Regulation*
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Risk Management*
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	*Economics, Management*
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	*Economics, Management*
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	*Sharia, Management*
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	*Law, Management*
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	*Law, Sharia*
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	*Accounting, Management*
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI *Multifinance* Indonesia	*Economics, Management*
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	*Scientific Computing, Management*
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	*Economics, Management*
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	*Sharia, Management*
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	*Accounting, Management*
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa *Investment Management*	*Economics, Management*

Susunan Anggota Komite Periode 04 Juli 2023 – 03 Oktober 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI	*Finance, Economics, Management*

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	*Banking, Finance, Risk Management*
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Banking, Audit*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Capital Market, Technology, Management*
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Management*
Awan Nurmawan Nuh	Anggota	Komisaris	*Accounting, Audit, Taxation*
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	*Accounting, Regulation*
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Risk Management*
Sandra Chalik	Anggota	Pihak Independen BRI	*Accounting, Risk Management*
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	*Economics, Management*
Soegeng Hernowo	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	*Economics, Management*
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	*Sharia, Management*
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	*Law, Management*
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	*Law, Syaria*
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	*Accounting, Management*
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	*Economics, Management*
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	*Scientific Computing, Management*
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	*Economics, Management*
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	*Sharia, Management*
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	*Accounting, Management*
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	*Economics, Management*

Susunan Anggota Komite Periode 03 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI	*Finance, Economics, Management*
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	*Banking, Finance, Risk Management*
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Banking, Audit*
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Regulation*
Heri Sunaryadi	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Capital Market, Technology, Management*
Paripurna P Sugarda	Anggota	Komisaris Independen BRI	*Law, Social Politics, Management*
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Risk Management*
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Pihak Independen BRI	*Banking, Audit*
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen BRI	*Accounting, Management*
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	*Economics, Management*

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ayahanita K.	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	*Audit, Law*
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	*Sharia, Management*
Eko Wahyudi	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	*Banking, Management*
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	*Law, Sharia*
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	*Accounting, Management*
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	*Economics, Management*
Agoosh Yoosran	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	*Scientific Computing, Management*
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	*Economics, Management*
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	*Syaria, Management*
Nurhaida*	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	*Banking, Management*
Kahlil Rowter	Anggota	Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management	*Economics, Management*

*) Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rofikoh Rokhim
Ketua/Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo
Anggota/Komisaris Utama BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Heri Sunaryadi
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Hendrikus Ivo
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Paripurna P Sugarda
Anggota/Komisaris Independen BRI

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Periode dan Masa Jabatan melekat pada Periode dan Masa Jabatan Dewan Komisaris



Tedi Nurhikmat

Pihak Independen BRI

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1965. Usia 58 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Bekasi.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.v

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi / Pihak Independen BRI (2021 – sekarang)
- *Senior Vice President* Mandiri University Group, Bank Mandiri (2018 -2021)
- *Senior Vice President Credit Risk and Portfolio Management*, Bank Mandiri (2010-2018)
- *Vice President Enterprise Risk Management*, Bank Mandiri (2007 – 2010)
- *Vice President Consumer Risk Scoring*, Bank Mandiri (2004 – 2007)

MASA JABATAN

28 Desember 2021 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Sumber Daya, Institut Pertanian Bogor (1989)
- MBA *Banking and Finance International*, University of Japan (1998)
- MBA (*Exchange*) *International Finance & Marketing*, University of Washington, Seattle, USA (1997)
- *Executive* Program INSEAD, The Wharton School

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level V (BNSP)
- Asesor Kompetensi *Risk Management Level* V (BNSP)
- *Learning Value Chain Certification*
- *Risk Management Trainers* – BSMR GAARP



Bardiyono Wiyatmojo

Pihak Independen BRI

Warga Negara Indonesia, lahir di Gunungkidul tahun 1964. Usia 58 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bidang Audit Intern Teknologi Informasi BRI (2014 -2019)
- Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura BRI (2019)
- Kepala Divisi Audit Teknologi Informasi BRI (2019-2020)
- Anggota Komite Audit BRI (2021-2023)
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2023)

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1989)
- Magister of Business Administration, University of Kentucky (2000)
- Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2003)

SERTIFIKASI

- *Certified in the Governance of Enterprise Information Technology* (CGEIT), ISACA, 2017-2024
- Sertifikasi General Banking Level 3, BNSP, 2022-2026
- Sertifikasi Audit Manager, BNSP, 2022-2026
- Sertifikasi Manajemen Risiko level 4, BNSP, 2020-2024
- Sertifikasi Asesor Kompetensi, BNSP, 2020-2023
- Sertifikasi Metodologi Pelatihan, BNSP, 2022-2025
- *Qualified Internal Auditor* (QIA), YPIA, 2017



Bintoro Nurcahyo

Pihak Independen BRI

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1963. Usia 60 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Bekasi.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bagian Pengembangan Organisasi, Divisi Renstra, Kantor Pusat BRI (2005-2006)
- Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi (Tim PSAK 50/55), Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan Kantor Pusat BRI (2006-2013)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional, Kanwil BRI Banjarmasin (2013-2016)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional, Kanwil BRI Surabaya (2016-2017)
- Expert Lecturer 2 Corporate University BRI (2017)
- Ketua Tim Implementasi PSAK 71, Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan Kantor Pusat BRI (2017-2018)
- Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio Kantor Pusat BRI (2018-2019)

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988)
- *Master of Business Administration The Weatherhead School of Management (Finance) Case Western Reserve University*, Cleveland. USA (1998)

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV



Eko B. Supriyanto

Komisaris Independen
PT Bank Raya Indonesia, Tbk

Warga negara Indonesia, lahir di Blora, pada tahun 1964. Usia 59 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Bogor.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen Pelabuhan Maritim Learning Indonesia (Jan 2020 – Juli 2020)
- Advisor PT. Pelindo Investama Indonesia (PII) (Jan 2019 – Des 2019)
- Komisaris Utama Independen PT Bank MNC Internasional Tbk Mei 2016 – Mei 2018
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank MNC Internasional Tbk Mei 2016 – Mei 2018
- Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank) 2015 – Sekarang
- Komisaris Independen PT Bank Raya Indonesia, Tbk 2021 - Sekarang

MASA JABATAN

9 April 2021 – 8 April 2024

JABATAN RANGKAP

Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta. 1996
- Magister Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta 2014

SERTIFIKASI

Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris



Ayahanita K

Komisaris Independen
PT BRI Asuransi Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965. Usia 62 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta Pusat.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT. BRI Asuransi Indonesia (8 April 2022 – sekarang)
- *Executive Vice President* Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit Kantor Pusat BRI (Oktober 2020 – 28 Februari 2021)
- Kepala Divisi Pengembangan Standar & Kualitas Audit Kantor Pusat BRI (Juli 2020 – September 2020)
- Kepala SKAI PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk (Januari 2019 – Juni 2020)
- *Group Head* Satuan Kerja Audit Intern Kantor Pusat BRI (Februari 2016 – Desember 2018)

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 - Hukum - Universitas Indonesia
- S2 - Spesialis Hukum (Notariat) - Universitas Indonesia

SERTIFIKASI

Risk Management QRGP
Manajemen Risiko AAMAI



Abdul Ghoni

Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjungkarang, pada tahun 1977. Usia 45 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Tangerang Selatan.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia (2021-sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Reliance Indonesia (2020-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Paralomas (2019-2020)
- Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap PKN STAN Kemenkeu RI (2015 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap Universitas Thamrin (2015 – sekarang)

MASA JABATAN

06 Juli 2021 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, STIE Bhakti Pembangunan (2002)
- Magister Manajemen, Universitas Mercubuana (2015)
- Doktor Pengkajian Islam, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018)

SERTIFIKASI

Tidak Ada



Eko Wahyudi

Komisaris Independen
Asuransi BRI Life

Warga negara Indonesia, lahir di Baturaja, pada tahun 1963. Usia 60 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT. Asuransi BRI Life (25-05-2022 s/d sekarang)
- Direktur Keuangan Perum Perhutani (17-10-2019 s/d 10-02-2021)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
- Pemimpin Wilayah Surabaya (01-08-2019 s/d 17-09-2019)
- Pemimpin Wilayah Malang (01-10-2018 s/d 31-07-2019)
- Pemimpin Wilayah Palembang (01-02-2018 s/d 30-09-2018)
- Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan I (01-10-2015 s/d 31- 01-2018)
- Pemimpin Wilayah Padang (01-04-2015 s/d 30-09-2015)
- Wapincasus (01-03-2014 s/d 30-03-2015)
- Wapinwil Bandung bidang bisnis (01-02-2013 s/d 31-03-2014)
- Wakadiv Hubungan Lembaga (01-04-2011 s/d 31-01-2013)
- Pemimpin Cabang Bandung Asia Afrika (01-11-2008 s/d 31- 03-2011)
- Pemimpin Cabang Sragen (01-07-2007 s/d 31-10-2008)
- Pemimping Cabang Purwakarta (01-07-2004 s/d 30-06-2007)
- Pemimpin Cabang Bantul (01-07-2001 s/d 30-06-2004)
- Pemimpin Cabang Amlapura (01-07-1998 s/d 30-06-2001)

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2005
- Sarjana Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Tahun 1986

SERTIFIKASI

Sertifikasi Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi / CRGP LSPMR



Mohammad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Asuransi BRI Life

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1967. Usia 56 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi BRI Life (April 2021 – sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri (September 1991 – 2021)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BTN Syariah (Maret 2018 – 2021)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Manulife Syariah (April 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Allianz Syariah (Oktober 2020 – sekarang)
- Khatib tetap Masjid Istana Presiden RI (Agustus 2005 s.d. Desember 2020)
- Khatib tetap Masjid Wakil Presiden RI (Januari 2015 s.d. Desember 2021)

MASA JABATAN

06 Juli 2021 s.d sekarang

JABATAN RANGKAP

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Manulife Syariah (April 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Allianz Syariah (Oktober 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Mei 2021 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi BRI Life (April 2021 – sekarang)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Syariah, UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta 1992
- Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2004
- Magister *Islamic Economic and Finance*, Universitas Trisakti, 2014

SERTIFIKASI

- Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah
- Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perasuransian Syariah
- Ahli Syariah Pasar Modal
- Kompetensi DPS



Sumihar Manullang

Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas

Warga negara Indonesia, lahir di Bakara, pada tahun 1962. Usia 61 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas (2023)
- Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018)
- Kepala Audit Intern Wilayah Medan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017)
- Kepala Audit Intern Wilayah Manado PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016)
- Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015).

MASA JABATAN

06 Juli 2021 s.d Oktober 2023

JABATAN RANGKAP

Tidak Ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Pendidikan Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran (1987)
- Magister Manajemen Keuangan Universitas Katolik Atmajaya (2000).

SERTIFIKASI

- Wakil Perantara Pedagang Efek
- Wakil Manajer Investasi
- QIA
- Kepatuhan



Sumantri Suwarno

Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Bantul, pada tahun 1976. Usia 47 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia (Juni 2020–Oktober 2023)
- Direktur Pengembangan Bisnis PT Rukun Raharja, Tbk (April 2021– sekarang)
- Komisaris PT Sirius Surya Sentosa (2019 – sekarang)
- Komisaris PT IPC TPK (Januari 2020 – Juli 2020)
- *General Manager* PT Usahatama Mandiri Nusantara (2013 – sekarang)

MASA JABATAN

06 Juli 2021 – 3 Oktober 2023

JABATAN RANGKAP

- Direktur Pengembangan Bisnis PT Rukun Raharja, Tbk (April 2021 – sekarang)
- Komisaris PT Sirius Surya Sentosa (2019 – sekarang)
- *General Manager* PT Usahatama Mandiri Nusantara (2013 – sekarang)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2002
- Magister Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta

SERTIFIKASI

Seminar *Online* Mengelola Risiko Ditengah ketidakpastian - 2022



Agoosh Yosran

Komisaris Independen
BRI Ventura Investama

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1969. Usia 54 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris PT Republika Media Mandiri (2019 sd. 2020)
- Direktur Utama PT Republika Media Mandiri (2016 sd. 2019)
- Direktur *Corporate Affair & Corporate Secretary* PT Mahaka Media Tbk. (2013 sd. 2016)
- Direktur Utama PT Kalyanamitra Adhara Mahardika (2017 sd. 2019)
- Komisaris PT Avabanindo Perkasa (2014 sd. 2020)

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 – sekarang

JABATAN RANGKAP

Ketua *Project Management Office* (PMO) Tim Percepatan Implementasi Pertashop Tahun 2023 (Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK289/MBU/12/2022)

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Ekonomi – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan & Perbankan Indonesia (STEKPI) (1995)

SERTIFIKASI

Seminar *Online* Mengelola Risiko Ditengah ketidakpastian - 2022



Yudi Priambodo Purnomo Sidi

Komisaris Independen PT Pegadaian

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1966. Usia 56 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 08-KOM/BRI/09/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT Pegadaian (25 April 2022 – sekarang)
- Komite Audit PT Pegadaian (Oktober 2022 – sekarang)
- Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian (Mei 2022 – September 2022)
- *Senior Vice President* pada Manado Regional Audit (Kepala Audit Wilayah Manado BRI) PT BRI (Persero) Tbk (1 Oktober 2021 – 31 Maret 2022)
- *Vice President* pada Jakarta 2 Regional Audit BRI (Wakil Kepala Audit Wilayah Jakarta 2) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Januari 2020 – 30 September 2020)
- *Vice President* pada *Audit Standard and Quality Development* BRI (Wakil Kepala Divisi PSKA BRI) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Januari 2019 – 31 Desember 2020)
- Anggota Pengawas YKP BRI (8 Mei 2019 – 1 April 2022)
- *Senior Vice President* pada Manado Regional Audit (Kepala Audit Wilayah Manado BRI) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Oktober 2021 – 31 Maret 2022)
- *Vice President* pada Jakarta 2 Regional Office (Regional Risk Management *Head* Jakarta 2 BRI) PT BRI (Persero) Tbk. (1 Oktober 2020 – 20 September 2021)
- Asesor Kompetensi LSP-PM Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM) (4 September 2019 – sekarang)

MASA JABATAN

06 September 2022 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Asesor Lembaga Sertifikasi Pasar Modal (LSP PM) (2019-sekarang)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana *Business Management* Universitas Pancasila (1989)
- Magister *International Business* Universitas Gadjah Mada (2000)
- Doktor Business Management Universitas Brawijaya (2019 - saat ini)

SERTIFIKASI

- *Qualified Internal Audit* (QIA), YPIA
- *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG), ERMA
- *Governance Risk Compliance Professional* (GRCP), OCEG
- *Banking Risk Management* Level 4, LSP Perbankan
- *Training Methodology Qualification Competency Certification Scheme 3,* LSP Kepelatihan dan Instruktur Nasional
- *Banking Risk Management Level 3*, LSP Perbankan
- *Audit Intern Bank Level Audit Supervisor*, LSP Perbankan
- *Certified Risk Professional for Risk Management*, LSP Pasar Modal
- *Certified Securities Analyst for Securities Analysis*, LSP Pasar Modal
- *Certified Investment Banker for Investment banking*, LSP Pasar Modal
- *Certified Wealth Manager* (CWM), ICWMA
- *Workplace Assessment Assessor Competency*, BNSP
- *Certified Financial Planner* (CFP), FPSB
- *Bank Risk Management Level 2*, LSP Perbankan
- Manajemen Risiko Level 1, BSMR



Muhammad Cholil Nafis

Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian

Warga negara Indonesia, lahir di Sampang, pada tahun 1975. Usia 48 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Depok.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

28 Desember 2021 - sekarang

PENGALAMAN KERJA

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian (2011 - sekarang)
- Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asyki (2015-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Puskop Syariah DKI Jaya (2014-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Kresna Multi Finance (2012-Sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah ACE Life Assurance (2013-Sekarang).
- Staf Pengajar Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana Universitas Indonesia (2005-Sekarang).
- Sekretaris Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (2014-2017).
- Kelompok Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK (2013-2017).
- Dosen Sekolah Tinggi Al Qur'an Al Hikam, Depok (2011-sekarang).

MASA JABATAN

2020 – 2023

JABATAN RANGKAP

- Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asyki (2015-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Puskop Syariah DKi Jaya (2014-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Kresna Multi Finance (2012-Sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah ACE Life Assurance (2013-Sekarang).

RIWAYAT PENDIDIKAN

- LC dari *Ibnu Sa'ud Islamic University*, Jakarta (1996-2000).
- Sarjana Agama dari Sekolah Tinggi Agama Islam Az Ziyadah, Jakarta (1996-2000).
- MA dari Program Pascasarjana UIN Jakarta (2001–2003).
- Ph.D. dari University of Malaya, Malaysia (2008–2010).

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia (2012)
- Post-Doctoral di Muhammad V University, Maroko (2013)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Nasional Multifinance Syariah (2015)
- Pelatihan Asesor Kompetensi Pengawas Syariah (2016).



Nurhaida

Komisaris Independen PNM

Warga negara Indonesia, lahir di Padang Panjang, pada tahun 1959. Usia 64 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Bogor.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota (2017 – 2022).
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK merangkap anggota (2012 – 2017).
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (2011 – 2012).

MASA JABATAN

03 Oktober 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

Tidak ada

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Kimia Tekstil (Institut Teknologi Tekstil Bandung) (1985)
- Magister Business Administration (Indiana University, USA) (1955)

SERTIFIKASI

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2022)



Kahlil Rowter

Komisaris Independen
PT Danareksa Investama Management

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1964. Usia 64 tahun Per Desember 2023. Berdomisili Domisili di Jakarta.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 05-KOM/BRI/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PERIODE MENJABAT

Periode I

PENGALAMAN KERJA

- *Chief Economist* PT Danareksa (Persero) (2015 – 2018)
- *Senior Advisory Real Estate Investment Trusts,* AIPEG, Jakarta (2015)
- *Chief Economist* PT. Bakrie and Brothers, Tbk (2011 – 2013)
- *Chief Executive Officer* (CEO) Pefindo (2007 – 2010)
- *Chief Economist* Mandiri Sekuritas (2005 – 2006)

MASA JABATAN

15 Februari 2023 - sekarang

JABATAN RANGKAP

2018 – Sekarang, *Senior Advisor* - Prospera (*Australia Indonesia Partnership for Economic Development*)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia
- *Masters of Economics di Michigan State University East Lansing, MI, United States*

SERTIFIKASI

Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengalaman.
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai entitas utama dan perusahaan anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
5. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rofikoh Rokhim	Ketua	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi *Master of Business Administration*	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hendrikus Ivo	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam hukum, perbankan dan pengawasan bank
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas *Magister of Science*	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan regulasi
Heri Sunaryadi	Anggota	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam pasar modal, teknologi, dan manajemen
Paripurna P Sugarda	Anggota	Sarjana Hukum Magister Bidang Hukum Doktor Bidang Hukum	Memiliki pengalaman dalam hukum, sosial politik dan manajemen
Tedi Nurhikmat	Anggota	Sarjana Ekonomi Sumber Daya *MBA Banking and Finance International*	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen risiko
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Sarjana Ilmu Ekonomi *Master of Business Administration* Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan audit
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Sarjana Akuntansi *Master of Business Administration*	Memiliki pengalaman dalam akuntansi dan manajemen
Eko B Supriyanto	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan manajemen
Ayahanita K	Anggota	Sarjana Hukum Magister Hukum	Memiliki pengalaman dalam audit dan hukum
Abdul Ghoni	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Doktor Pengkajian Islam	Memiliki pengalaman dalam syariah dan manajemen
Eko Wahyudi	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen
Mohammad Hidayat	Anggota	Sarjana Syariah Magister Ilmu Hukum Magister *Islamic Economic and Finance*	Memiliki pengalaman dalam hukum dan syariah
Sumihar Manullang	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman dalam akuntansi dan manajemen
Sumantri Suwarno	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Bisnis	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan manajemen
Agoosh Yosran	Anggota	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan perbankan
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Management Doktor bidang Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	Sarjana Agama Magister Agama Ph.D	Memiliki pengalaman dalam syariah dan manajemen
Nurhaida*	Anggota	Sarjana Kimia Tekstil	Memiliki pengalaman dalam perbankan dan manajemen
Kahlil Rowter	Anggota	Sarjana Ekonomi *Masters of Economics*	Memiliki pengalaman dalam ekonomi dan manajemen

*) Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	RR	KW	HI	DRL	HS	PPS	TN	BW	BN	EBS
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi	AK	AG	EW	MH	SM	AY	YPPS	MCN	NH	KR
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi	HD	ANN	SY	DRH	SH	PFW	SS	OAT	MI	SC
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Catatan:
Rofikoh Rokhim (RR), Kartika Wirjoatmodjo (KW), Hendrikus Ivo (HI), Dwi Ria Latifa (DRL), Heri Sunaryadi (HS), Paripurna P Sugarda (PPS), Tedi Nurhikmat (TN), Bardiyono Wiyatmojo (BW), Bintoro Nurcahyo (BN), Eko B Supriyanto (EBS), Ayahanita K (AK), Abdul Ghoni (AG), Eko Wahyudi (EW), Mohammad Hidayat (MH), Sumihar Manullang (SM), Agoosh Yoosran (AY), Yudi Priambodo Purnomo Sidi (YPPS), Muhammad Cholil Nafis (MCN), Nurhaida (NH)[3], Kahlil Rowter (KR), Hadiyanto (HD)[1], Awan Nurmawan Nuh (ANN)[2], Suindiyo (SY)[4], Duma Riana Hutapea (DRH)[5], Soegeng Hernowo (SH)[5], Sumantri Suwarno (SS)[5], Premita Fifi Widiawati (PFW)[5], Omar Arip Tirta (OAT)[5], Meidyah Indraswari (MI)[5], Sandra Chalik (SC)[6].

Keterangan :
1. Sdr. Hadiyanto diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023.
2. Sdr. Awan Nurmawan Nuh aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
3. Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Sdr. Suindiyo aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.
5. Sdr. Duma Riana Hutapea, Sdr. Soegeng Hernowo, Sdr. Sumantri Suwarno, Sdr. Premita Fifi Widhiawati, Sdr. Omar Arip Tirta, Sdr. Meidyah Indraswari aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
6. Sdr. Sandra Chalik aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut:

1. Rapat KTKT diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan atau sesuai kebutuhan. Jenis rapat berdasarkan peserta sebagai berikut:
   a. Rapat KTKT dengan Perusahaan Utama
   b. Rapat KTKT Entitas Utama dengan seluruh Perusahaan Anak.
   c. Rapat KTKT Entitas Utama dengan Perusahaan Anak tertentu.
   d. Rapat Teknis KTKT (rapat pada level teknis)

   Rapat pada level teknis adalah rapat dengan peserta anggota Komite dari Pihak Independen dengan Kepala Divisi atau pejabat dan/atau staf pada unit kerja Entitas Utama dan/atau Perusahaan Anak tertentu.
2. Anggota Komite dapat menghadiri rapat yang diadakan oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko atau unit kerja lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Anggota Komite dapat mengahadiri rapat berdasarkan undangan dari eksternal auditor dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terkait dengan rencana dan hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan Anak dan hal lainnya.
4. Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.

5. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah terjadwal dilakukan dengan undangan secara tertulis, ditandatangani oleh ketua Komite dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama. Apabila Ketua Komite berhalangan maka undangan dapat ditandatangani oleh dua orang anggota Komite berasal dari Dewan Komisaris. Apabila tidak dimungkinkan ditanda tangani oleh dua anggota Komite maka undangan dapat ditandatangani oleh seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris.
6. Undangan dapat ditandatangani dengan menggunakan *digital signatures* dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Dewan Komisaris yang berwenang menandatangani.
7. Bagi rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang penting atau segera dan mendesak yang tidak terjadwal sebelumnya, maka undangan rapat dapat dilakukan secara lisan atau komunikasi melalui telepon atau *video call/ conference*.
8. Undangan rapat pada level teknis ditandatangani oleh Ketua Komite.
9. Undangan rapat pada level teknis dapat dilakukan oleh pihak terkait yaitu Manajemen BRI atau Perusahaan Anak.
10. Rapat pada level teknis dipimpin oleh salah satu anggota KTKT dari pihak independen pada Entitas Utama.
11. Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat serta daftar hadir.
12. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
13. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
14. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
15. Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
16. Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
17. Hasil pertemuan pada rapat yang diselenggarakan pada level teknis dituangkan dalam risalah rapat berisi poin-poin penting pembahasan dan dilaporkan dalam bentuk memo internkepada Ketua dan anggota KTKT pada Entitas Utama.
18. Apabila berdasarkan hasil pertemuan pada Rapat Teknis terdapat hal-hal penting yang yang perlu mendapatkan perhatian maka pihak Independen dapat merekomendasikan kepada Ketua Komite untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan, antara lain menyampaikan surat rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	Selasa, 28 Februari 2023	Profil Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi BRI Semester II/2022.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Suindiyo 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Eko B Supriyanto 11. Soegeng Hernowo 12. Abdul Ghoni 13. Premita Fifi Widhiawati 14. Mohammad Hidayat 15. Sumihar Manullang 16. Sumantri Suwarno 17. Omar Arip Tirta 18. Yudi Priambodo Purnomo Sidi 19. Muhammad Cholil Nafis 20. Meidyah Indreswari 21. Kahlil Rowter
2	Selasa, 21 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Ventura Investama (BVI) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BVI.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Omar Arip Tirta
3	Selasa, 28 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT Danareksa *Investment Management* (BRI MI) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI MI.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Paripurna P Sugarda 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Suindiyo 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Kahlil Rowter

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
4	Selasa, 28 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI *Finance* (BRIF) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIF.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Paripurna P Sugarda 6. Awan Nurmawan Nuh 7. Suindiyo 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Sumantri Suwarno
5	Selasa, 4 April 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIDS.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Sumihar Manullang
6	Selasa, 4 April 2023	Evaluasi Kinerja PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Raya.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Eko B Supriyanto
7	Selasa, 11 April 2023	Evaluasi Kinerja PT Asuransi BRI Life (BRI Life) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI Life.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Premita Fifi Widhiawati 12. Mohammad Hidayat
8	Selasa, 11 April 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRINS.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Soegeng Hernowo 12. Abdul Ghoni
9	Selasa, 9 Mei 2023	Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Pegadaian) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Pegadaian	1. Rofikoh Rokhim 2. Hendrikus Ivo 3. Dwi Ria Latifa 4. Heri Sunaryadi 5. Paripurna P Sugarda 6. Suindiyo 7. Duma Riana Hutapea 8. Tedi Nurhikmat 9. Yudi Priambodo Purnomo Sidi 10. Muhammad Cholil Nafis
10	Selasa, 23 Mei 2023	Evaluasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Semester II tahun 2022 dan Kuartal I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PNM	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Meidyah Indreswari
11	Selasa, 27 Juni 2023	*Progress* Integrasi Laporan Keuangan dengan *Enterprise Resource Planning System* PT PNM	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Suindiyo 9. Duma Riana Hutapea 10. Tedi Nurhikmat 11. Meidyah Indreswari

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
12	Selasa, 22 Agustus 2023	Pembahasan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan, dan Audit Terintegrasi Semester I 2023.	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Awan Nurmawan Nuh 8. Duma Riana Hutapea 9. Tedi Nurhikmat 10. Sandra Chalik 11. Eko B Supriyanto 12. Soegeng Hernowo 13. Abdul Ghoni 14. Premita Fifi Widhiawati 15. Mohammad Hidayat 16. Sumihar Manullang 17. Sumantri Suwarno 18. Omar Arip Tirta 19. Yudi Priambodo Purnomo Sidi 20. Muhammad Cholil Nafis 21. Meidyah Indreswari 22. Kahlil Rowter
13	Selasa, 03 Oktober 2023	Pembahasan Kinerja Keuangan, Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Semester I 2023 dan Tindak Lanjut Arahan Komisaris dan Direktur Pembina pada Perusahaan Anak PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS).	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Ayahanita K. 11. Abdul Ghoni
14	Selasa, 03 Oktober 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Eko Wahyudi 11. Mohammad Hidayat
15	Selasa, 10 Oktober 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan, Pelaksanana Tata Kelola dan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI Finance (BRIF).	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Sumantri Suwarno
16	Selasa, 17 Oktober 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanana Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS).	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo
17	Selasa, 17 Oktober 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanana Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management (BRI MI).	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Kahlil Rowter
18	Selasa, 31 Oktober 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (PNM).	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Nurhaida*
19	Selasa, 31 Oktober 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Pegadaian)	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Yudi Priambodo Purnomo Sidi 11. Muhammad Cholil Nafis

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
20	Selasa, 7 November 2023	*Update* Kondisi Bisnis, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola, dan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI Ventura Investama (BVI)	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Agoosh Yoosran

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
21	Selasa, 7 November 2023	*Update* Kondisi Bisnis Semester I/2023, Rencana Strategi Ke Depan dan Pelaksanaan Tata Kelola dan dan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya)	1. Rofikoh Rokhim 2. Kartika Wirjoatmodjo 3. Hendrikus Ivo 4. Dwi Ria Latifa 5. Heri Sunaryadi 6. Paripurna P Sugarda 7. Tedi Nurhikmat 8. Bardiyono Wiyatmojo 9. Bintoro Nurcahyo 10. Eko B Supriyanto

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama Tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 21 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Rofikoh Rokhim	Ketua	21	21	100%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	21	20	95%
Hendrikus Ivo	Anggota	21	21	100%
Dwi Ria Latifa	Anggota	21	21	100%
Heri Sunaryadi	Anggota	21	19	90%
Paripurna P Sugarda	Anggota	21	21	100%
Tedi Nurhikmat	Anggota	21	21	100%
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	9	9	100%
Bintoro Nurcahyo	Anggota	9	9	100%
Eko B Supriyanto	Anggota	4	4	100%
Ayahanita K.	Anggota	1	1	100%
Abdul Ghoni	Anggota	4	4	100%
Eko Wahyudi	Anggota	1	1	100%
Mohammad Hidayat	Anggota	4	4	100%
Sumihar Manullang	Anggota	4	4	100%
Agoosh Yoosran	Anggota	1	1	100%
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	4	4	100%
Muhammad Cholil Nafis	Anggota	4	4	100%
Nurhaida[3]	Anggota	1	1	100%
Kahlil Rowter	Anggota	4	4	100%
Hadiyanto[1]	Anggota	1	1	100%
Awan Nurmawan Nuh[2]	Anggota	10	10	100%

Nama	Jabatan	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Suindiyo[4]	Anggota	11	11	100%
Duma Riana Hutapea[5]	Anggota	12	12	100%
Soegeng Hernowo[5]	Anggota	3	3	100%
Premita Fifi Widhiawati[5]	Anggota	3	3	100%
Sumantri Suwarno[5]	Anggota	3	3	100%
Omar Arip Tirta[5]	Anggota	3	3	100%
Meidyah Indreswari[5]	Anggota	4	4	100%
Sandra Chalik[6]	Anggota	1	1	100%

Keterangan :
1. Sdr. Hadiyanto diberhentikan dengan hormat pada RUPS Tahunan tanggal 13 Maret 2023.
2. Sdr. Awan Nurmawan Nuh aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
3. Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Sdr. Suindiyo aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.
5. Sdr. Duma Riana Hutapea, Sdr. Soegeng Hernowo, Sdr Sumantri Suwarno, Sdr. Premita Fifi Widhiawati, Sdr. Omar Arip Tirta, Sdr. Meidyah Indraswari aktif di KTKT sejak 01 Januari 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.
6. Sdr. Sandra Chalik aktif di KTKT sejak 04 Juli 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota KTKT BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KTKT BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rofikoh Rokhim	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Hendrikus Ivo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Heri Sunaryadi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Paripurna P Sugarda	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Tedi Nurhikmat	Anggota	Audit Teknologi Informasi	*Online*, 27 Juni 2023	BUMN GRC *Masterclass Program* & FKSPI
		ESG *for Auditor*	*Online*, 13 Juli 2023	BUMN GRC *Master-class Program* & FKSPI
		IPO & Pemeringkatan Efek	*Online*, 10 Agustus 2023	BUMN GRC *Masterclass Program* & BEI
		ESG & IFC *Performance Standards*	*Online*, 16 Agustus 2023	BUMN GRC *Masterclass Program* & IFC

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Risk Management Effectiveness Evaluation	*Online*, 07 September 2023	BUMN GRC *Masterclass Program* & FKSPI
		GRC *Integrated Information For Supervisory Board*	*Online*, 05 Oktober 2023	BUMN GRC *Masterclass Program* & FKSPI
		CG *Methodology & Environmental and Social Management Systems*	*Online*, 25 Oktober 2023	BUMN GRC *Masterclass Program* & IFC
		Konferensi Nasional IIA Indonesia 2023	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	*Introduction to* ESG & IFC *Performance Standard*	*Online*, 07 Oktober 2023	Kementerian BUMN
		Governance and Integrity of Financial Reporting	*Online*, 26 September 2023	Kementerian BUMN
		State Owned Enterprises Rating	*Online*, 20 September 2023	Kementerian BUMN
		National Conference	30-31 Agustus 2023	The IIA
Bintoro Nurcahyo	Anggota	IIA Indonesia *National Conference: Staying Relevant* - *Internal Audit and Risk Management Roles in* ESG - BCA *Sustainability Practices* - *Elevating corporate sustainability: The Strategic imperative, of internal auditor in enhancing ESG performance*	Batam, 30-31 Agustus 2023	IIA Indonesia
		BSE GRS *Masterclass* 2023 - Sosialisasi pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN oleh Pefindo	Jakarta, 14 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		ESG for *Boards - Governance of* ESG	Jakarta, 27 September 2023	BUMN *School of Excellence*
		GRC *Integrated Information for Supervisionary Board*	Jakarta, 05 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems*	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN *School of Excellence*
		Refreshing Manajemen Risiko Jenjang 6, LPPI, Desember 2023	Jakarta, 29 Desember 2023	BARa *Risk* Forum - LPPI
Eko B Supriyanto	Anggota	*Navigating Country Risk for Sustainable Growth : Opportunities and Challenges "Navigating Country Risk for Sustainable Growth : Opportunities and Challenges"*	Kamis-Jum'at, 14-15 Desember 2023, Yogyakarta	LSPMR
Ayahanita K.	Anggota	Strategi Bisnis Asuransi di Era Penurunan Kapasitas Reasuransi dan Kenaikan Tarif Reasuransi	Jakarta, 20 Maret 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
		Penjaminan Asuransi dan Pemulihan Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Asuransi di Indonesia	Jakarta, 23 Juni 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar Nasional AAMAI - Implementasi Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme di Industri Perasuransian	Jakarta, 6 Juli 2023	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
		Certification in Audit Committee Practices (CACP) 2023	Jakarta, 25 - 27 Juli 2023	Indonesia Institute of Audite Committee (IKAI)
		Workshop Manajemen Risiko - Penerapan Analisis Risiko Perusahaan Perasuransian yang Sangat Kompleks untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan	Jakarta, 28 - 29 Juli 2023.	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
		GRC *Summit* 2023 (*Master Class*)	Jakarta, 24 Agustus 2023	IRMAPA
		GRC *Summit* 2023 (Seminar)	Jakarta, 25 Agustus 2023	IRMAPA

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Abdul Ghoni	Anggota	IFRS 17 *Implementation In Indonesia Sharia* (Re) *Insurance*	Jakarta, 12 Desember 2023	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
Eko Wahyudi	Anggota	*Finance and Accounting For Non Finance and Accounting Internal Auditor*	Jakarta, 13-14 Maret 2023	YPIA
		Master Class Program Series XXII	Bogor, 31 Agustus - 1 September 2023	LSPMR
		Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan	Yogyakarta, 26 September 2023	OJK
		DRIM AAJI TAHUN 2023	Yogyakarta, 18-20 Oktober 2023	AAJI
		Webinar "Cara Mudah Mengagregasikan Risiko Organisasi"	Jakarta, 03 November 2023	GRC
		Seminar Nasional Internal Audit "*Trusted Advisor: Navigating The New Frontier, Conneting Between Informasi Tecnology and Business Strategy*"	Denpasar, 6-7 Desember 2023	YPIA
		Konferensi Manajemen Profesional Manajemen Risiko IX	Yogyakarta, 14-15 Desember 2023	LSPMR
Mohammad Hidayat	Anggota	*Continuing Prefessional Development I : Enhancing Competitiveness through the integration of* ESG *and* GRC *Principles*	Bandung, 2-3 Oktober 2023	GRC Management
		Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023	Jakarta, 20 Oktober 2023	DSN - MUI
		Workshop Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XIX th 2023	Jakarta, 14 November 2023	DSN - MUI
Sumihar Manullang	Anggota	*Continuing Prefessional Development I : Enhancing Competitiveness through the integration of* ESG *and* GRC *Principles*	Bandung, 2-3 Oktober 2023	GRC Management
		Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	*Online*, 13 Oktober 2023	OJK
		Wakil Manajer Investasi (WMI)	*Online*, 13 Oktober 2023	OJK
		Asesor Kompetensi	Jakarta, 22-26 November 2023	LSPP
		Enhancing ESG *Through Best Practices in Accounting*	7 Desember 2023	OJK
Agoosh Yoosran	Anggota	-	-	-
Sumantri Suwarno	Anggota	-	-	-
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	Anggota	*Capacity Building - Qualified Internal Auditor* Kepala SPI, Tingkat Manajerial Kepala SPI/CAE	*Online*, 22-30 Mei 2023	YPIA
		Capacity Building - Perkembangan Perusahaan Melalui Akuisisi: Aspek Akuntansi, Finansial, Perpajakan, dan Hukum	Jakarta, 09 Juni 2023	Pusat Studi Akuntansi FEB Universitas Padjadjaran
		Capacity Building - Pelatihan Analisa Laporan Keuangan PT Pegadaian	Jakarta, 11 Agustus 2023	
		Capacity Building - Managing Risk and Reputation in a Complex World	USA, 20 -. 25 Agustus 2023	PT Pegadaian
		Capacity Building – Integrating Business Continuity Management (BCM): *Enhancing Resilience Through Internal Audit and Risk Management Practices*	Jakarta, 30 Oktober 2023	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Seminar Pengawasan Market Conduct dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No.6/POJK.07/2022 dan UU P2SK	*Online*, 10 November 2023	LPPI
Nurhaida *)	Anggota	-	-	-
Kahlil Rowter	Anggota	Module 2 : *Assessing Strategic Performance The Board Level View*	Singapura, 21 - 23 Juni 2023	Singapore Management University

*) Sdr. Nurhaida baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penghasilan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap angota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Implementasi	Agenda
1	Evaluasi Kinerja LJK Anak	1. Mengevaluasi kinerja finansial dan non finansial Perusahaan Anak. 2. Mengevaluasi strategi bisnis berdasarkan pencapaian kinerja berdasarkan sektor usaha (*main business*) dan *issue* strategis pada Perusahaan Anak	21 Maret 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Ventura Investama (BVI) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BVI.
			28 Maret 2023	Evaluasi kinerja PT Danareksa Investment Management (DIM) dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris DIM Semester II Tahun 2022
				Evaluasi Kinerja PT BRI Finance (BRIF) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIF.
			4 April 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIDS.
				Evaluasi Kinerja PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Raya.
			11 April 2023	Evaluasi Kinerja PT Asuransi BRI Life (BRI Life) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI Life.
			09 Mei 2023	Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Pegadaian) Semester II Tahun 2022, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Pegadaian
			23 Mei 2023	Evaluasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Semester II tahun 2022 dan Kuartal I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PNM

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Implementasi	Agenda
			27 Juni 2023	Progress Integrasi Laporan Keuangan dengan Enterprise Resource Planning System PT PNM
			3 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRINS.
				Evaluasi Kinerja PT Asuransi BRI Life (BRI Life) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI Life.
			10 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Finance (BRIF) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIF.
			17 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRIDS.
				Evaluasi Kinerja PT Danareksa Investment Management (BRI MI) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BRI MI.
			31 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PNM.
				Evaluasi Kinerja PT Pegadaian (Pegadaian) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Pegadaian.
			7 November 2023	Evaluasi Kinerja PT BRI Ventura Investama (BVI) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris BVI.
				Evaluasi Kinerja PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) Semester I Tahun 2023, Rencana Strategi, Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Raya.
2	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi	Mengevaluasi kecukupan pengendalian Intern terintegrasi, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menguji efektivitasnya	28 Februari 2023	1. Profil Risiko Terintegrasi Semester II/2022 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester II/2022 3. Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi BRI Semester II / 2022
			22 Agustus 2023	1. Profil Risiko Terintegrasi Semester I/2023 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I/2023. 3. Penilaian Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi BRI Semester I/2023
		Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap Semester	04 Juli 2023	*Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2022
				Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2023
3	Penguatan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi	Koordinasi dengan Divisi dengan memberikan masukan terhadap Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi.	24 Maret 2023	Persetujuan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Implementasi	Agenda
4	Perubahan dan penetapan anggota KTKT konglomerasi keuangan BRI	*Review* terhadap usulan anggota KTKT dari LJK dilakukan 5 kali selama Tahun 2023	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris pada tanggal: 1. 15 Februari 2023 2. 14 Maret 2023 3. 04 Juli 2023 4. 03 Oktober 2023	Perubahan Anggoa KTKT melalui SK Dewan Komisaris: 1. Nokep: 08-KOM/BRI/09/2022 tanggal 06 September 2022 2. Nokep: 05-KOM/BRI/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 3. Nokep: 08-KOM/BRI/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 4. Nokep : 09-KOM/BRI/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 5. Nokep : 11-KOM/BRI/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023

PENGUATAN FUNGSI TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pada tahun 2023, KTKT telah melakukan reviu terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Januari 2023, salah satu perubahan perubahan kategori kelompok adalah :

- *Voting Right Member* adalah anggota yang memiliki hak suara dalam menyetujui keputusan rapat. Anggota *Voting Right Member* terdiri dari Dewan Komisaris Entitas Induk dan Pihak Independen/Komite Non Dewan Komisari Entitas Induk yang memiliki hak suara.
- *Non-Voting Right Member* adalah anggota yang tidak memilik hak suara dalam menyetujui keputusan rapat. Anggota Non-*Voting Right Member* terdiri dari Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk Bank (jika ada) dan LJK Non-Bank Syariah sebagai anggota.

Bagi KTKT sebagai penguatan pemahaman terhadap masing-masing Perusahaan Anak dan Pelaksanaan Tugas Insidentil sesuai dengan arahan Dewan Komisaris seperti perlunya pemantauan terhadap kecukupan permodalan konglomerasi keuangan, manajemen likuiditas, dan transaksi intragroup. Tata Kelola Terintegrasi juga diperkuat melalui Pengkinian Kebijakan Umum BRI salah satunya melalui Persetujuan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023 untuk memastikan BRI mampu menjalankan aktivitas dengan optimal, mampu mewujudkan tujuan secara dinamis, namun tetap di dalam koridor aturan yang berlaku.

Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi mengatur tentang pelaksanaan tata Kelola kepada Entitas Utama dan seluruh Anggota Konglomerasi Keuangan BRI serta mengintegrasikan pengaturan-pengaturan di berbagai aspek utama terkait dengan hubungan BRI sebagai Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan model parenting style terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang ditetapkan oleh BRI yang dapat berubah sesuai dengan kondisi serta strategi secara Konglomerasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dipantau melalui *dashboard* atau sistem informasi manajemen yang diantaranya memuat informasi penting terkait dengan Konglomerasi Keuangan BRI. Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi disusun berdasarkan Kerangka Kerja Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yang memuat lima pilar utama yang meliputi *Principles Commitment, Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Ruang Lingkup Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BRI adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dan Kerangka Kerja atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BRI
2. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Pelaksanaan Manajemen RIsiko Terintegrasi, Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi dan pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi
3. Pengelolaan Sinergi Konglomerasi Keuangan BRI

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam *website* serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Struktur Sekretaris Perusahaan



Function

- *Media Relation & Publication*
- *Corporate Brand & Digital Communication*
- *External Corporate Event & Sponsorship*
- *Communication Analysis & Research*
- *Program Strategic & Communication TJSL & CSR*
- *Execution & Program Partnership*
- *Monitoring, Quality Control, & Reporting*
- *Capital Market Governance*
- *Public Affairs Management*
- *Strategic & Project Portofolio*
- *BOC General Affairs, Internal BOC Activity & BOC Secretary*
- *BOC Executive Assistant*
- *BOD General Affaris, dan BOD & SEVP Secretary*
- *Internal Corporate & BOD Event*
- *BOD Executive Assistant*

Sekretaris Perusahaan memimpin unit kerja *Corporate Secretary Division* dalam melaksanakan fungsinya dengan jabatan setingkat *Executive Vice President*. *Corporate Secretary Division* berada di bawah binaan Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama. Organisasi *Corporate Secretary Division* membawahkan:

1. *Corporate Communication Department* yang mengelola fungsi:
   a. Media *Relation & Publication*
   b. *Corporate Brand & Digital Communication*
   c. *External Corporate Event & Sponsorship*
   d. *Communication Analysis & Research*
2. *Corporate Social Responsibility & Community Development Department* yang mengelola fungsi:
   a. *Program Strategic* & *Communication* TJSL & CSR
   b. *Execution* & *Program Partnership*
   c. *Monitoring*, *Quality Control*, & *Reporting*
3. *Capital Market Governance & Public Affairs Management Department* yang mengelola fungsi:
   a. *Capital Market Governance*.
   b. *Public Affairs Management*.
   c. *Strategic & Project Portofolio*.
4. *Office of the Board* 1 *Department* yang mengelola fungsi:
   a. BOC *General Affairs*, *Internal* BOC *Activity* & BOC *Secretary*
   b. BOC *Executive Assistant*
5. *Office of the Board 2 Department* yang mengelola fungsi:
   a. BOD *General Affaris, dan* BOD & SEVP *Secretary*
   b. *Internal Corporate* & BOD *Event*
   c. BOD *Executive Assistant*

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

1. *Pool of Candidate* calon Corporate Secretary melalui *Talent Committee* (Komite Human Capital).
2. Pengusulan Calon *Corporate Secretary* oleh Direksi.
3. Pembahasan Calon EVP *Corporate Secretary Division*.
4. Pembahasan usulan EVP *Corporate Secretary Division*.
5. Persetujuan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi, antara lain:

Tugas dan Tanggung Jawab Umum

1. Sekretaris Perusahaan paling kurang:
   a. Memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi dan penerapan GCG.
   b. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
   c. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
   d. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
   e. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
   f. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan GCG Perusahaan yang meliputi:
      - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan.
      - Penyampaian laporan kepada regulator tepat waktu.
      - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris (dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris).
      - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
   g. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan *stakeholders*.
   h. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta RUPS.
   i. Melakukan kegiatan komunikasi Perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan *corporate image* Perusahaan, termasuk melaksanakan program *event* eksternal, pemberian *sponsorship* Perusahaan dan pengelolaan museum Perusahaan.
   j. Mengelola fungsi penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan, serta publikasi Laporan Keuangan dan informasi/laporan penting lainnya di media cetak, media elektronik dan Situs *Web* Perusahaan kepada pihak terkait/regulator sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   k. Menyelenggarakan RUPS dan *public expose*.
   l. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang diperlukan dalam rangka *corporate action*.
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk melaksanakan tugasnya, Sekertaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Komunikasi

1. Mengelola fungsi penyusunan kebijakan, implementasi dan evaluasi strategi komunikasi/publikasi Perusahaan.
2. Menyusun, mengimplementasi, dan evaluasi program *event* eksternal dan pemberian *sponsorship* Perusahaan;
3. Mengelola Museum BRI Purwokerto.

CSR dan *Community Development*

Menyusun dan menyempurnakan strategi, pemetaan sasaran penerima program, analisa usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan *website*, serta penyusunan laporan CSR dan *Community Development.*

Capital Market Governance* dan *Public Affairs Management

1. Mengelola pemenuhan dan kepatuhan/*compliance* sebagai Perusahaan Terbuka.
2. Mengelola *project portofolio Corporate Secretary Division*
3. Mengelola *stakeholder management.*
4. Mengelola aktivitas kesekretariatan, administrasi, dan dokumentasi perusahaan.

Office of The Board of Director and Commissioner

1. Mengelola fungsi komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan.
2. Mengelola fungsi pelaksanaan pemberian hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
3. Penyusunan dan *breakdown* rencana kerja anggaran (RKA) serta evaluasi realisasi anggaran pemberian hak dan fasilitas.
4. Mengelola fungsi penyusunan dan analisis materi pidato, makalah, dengar pendapat, presentasi, wawancara dan materi pendukung lainnya untuk Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
5. Penatakerjaan agenda Dewan Komisaris, Direksi, dan SEVP, kegiatan internal BRI, serta pelaksanaan dan evaluasi protokoler seluruh aktivitas Dewan Komisaris, Direksi, dan SEVP

Rapat

1. Memastikan Direksi mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Memastikan Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Memastikan Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan Rapat Direksi – Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Memastikan Rapat dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Rapat dan ketentuan lainnya.
5. Menjadi penghubung bagi Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam berkoordinasi perihal agenda Rapat rutin maupun insidentil.
6. Memastikan bahwa agenda Rapat membutuhkan pengambilan keputusan atau hal-hal yang berdampak besar bagi kesejahteraan Perusahaan.
7. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa setiap Rapat pembahasan akan difokuskan terutama pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa tingkat kewenangan untuk hal-hal yang didelegasikan benar dan dipatuhi.
9. Memastikan bahwa Risalah Rapat ditatakerjakan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Memastikan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir atau menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
2. Memastikan rangkaian penyelenggaraan dan administrasi RUPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan penunjukan Pemimpin RUPS sebelum penyelenggaraan RUPS.
4. Memastikan bahwa kegiatan RUPS telah meliputi pengambilan keputusan untuk setiap pokok pembahasan (mata acara).
5. Berkoordinasi dengan pihak independen terkait (Notaris dan Biro Administrasi Efek) untuk kelancaran pelaksanaan RUPS.
6. Berkoordinasi dengan divisi terkait perihal rumusan dan skenario dalam mata acara RUPS.
7. Memastikan pengumuman dan pemanggilan RUPS telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Pendalaman Pengetahuan

1. Memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima program pengenalan (orientasi) yang memadai pada kesempatan pertama dan selanjutnya berdasarkan kebutuhan. Sasaran program ini bertujuan untuk memberikan wawasan secara ringkas kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Perusahaan agar para anggota baru dapat sesegera mungkin memberikan kontribusi kepada Perusahaan. Khusus bagi anggota Dewan Komisaris baru, program pengenalan ditentukan oleh Komisaris Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, untuk anggota Direksi baru, program pengenalan ditentukan oleh Direktur Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Direksi. Apabila terdapat kondisi Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama adalah anggota baru, maka penentuan program orientasi ditentukan oleh Wakil Komisaris Utama atau Wakil Direktur Utama atau 2 (dua) Komisaris atau 2 (dua) Direktur sesuai ketentuan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Informasi atau pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh setiap anggota Sekretaris Perusahaan paling kurang:
   a. Informasi atau pengetahuan intern, antara lain:
      - Anggaran Dasar.
      - Tugas, tanggung jawab dan kewenangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
      - Visi, Misi dan tujuan Perusahaan.
      - Rencana strategis Perusahaan.
      - Kinerja keuangan Perusahaan.
      - Segmentasi usaha, produk dan jasa Perusahaan.
      - Manajemen risiko bank, profil risiko, penilaian dan pemantauan risiko.
      - Struktur Organisasi Perusahaan.
      - Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
      - Informasi relevan lainnya yang dapat membantu tugas dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
   b. Informasi atau pengetahuan ekstern, antara lain:
      - Perkembangan ekstern yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi, dsb.
      - Posisi Perusahaan diantara pesaing, nasabah dan *stakeholders* lainnya.
      - Peran dan hubungan dengan pihak yang berwenang di pemerintahan di bidang moneter, serta badan berwenang lainnya.
      - Peraturan perundang-undangan yang relevan.
      - Informasi ekstern lainya yang relevan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
   c. Dokumen yang perlu disiapkan atau dibagikan selama masa pengenalan/orientasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru diangkat, antara lain:
      - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
      - Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.
      - Laporan Tahunan terbaru.
      - Kontrak Manajemen dan rencana Perusahaan terakhir.
      - Struktur Organisasi Perusahaan.
      - Dokumen lainnya, sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Membahas kebutuhan pengembangan diri yang berkelanjutan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan dan membuat perencanaan untuk program pelatihan bersama dengan unit kerja terkait.
4. Mengumpulkan informasi mengenai pelatihan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan informasi dan kerjasama dengan divisi terkait.
5. Menentukan/merekomendasikan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi atau berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Program orientasi/pengenalan perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Pelaksanaan pendidikan/pelatihan mengikuti ketentuan pendidikan yang berlaku di BRI Corporate University.

Daftar Pemegang Saham dan Kepemilikan

1. Sekretaris Perusahaan membantu Direksi untuk mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan Khusus Saham (Seri A Dwiwarna).
2. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada perusahaan terbuka ≥5% dari modal disetor perusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila atas kepemilikannya pada perusahaan terbuka terdapat perubahan ≥0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam perusahaan, baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka tersebut.

Koordinasi Persiapan Laporan Tahunan

1. Laporan Tahunan diantaranya paling sedikit meliputi Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, Profil Perusahaan, Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, GCG, Informasi Keuangan dan informasi lainnya yang dianggap relevan sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice* terkini.
2. Laporan Tahunan paling lambat diselesaikan maksimal bulan ke-4 (keempat) setelah akhir tahun buku berjalan dan selambat-lambatnya diterima oleh pemegang saham sebelum RUPS.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan pada RUPS dan harus ada dalam salah satu mata acara RUPS.
4. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*).

Pasar Modal

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya mengenai peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Memberikan masukan kepada Direksi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan pasar modal dan peraturan terkait lainnya.
3. Sebagai pihak yang dapat dihubungi mewakili Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Lainnya

1. Mengelola implementasi manajemen risiko di *Corporate Secretary Division*.
2. Menyusun Rencana Kerja Fungsional (RKF) dan Renca Kerja & Anggaran (RKA) di *Corporate Secretary Division.*
3. Mengelola *Human Capital*, memenuhi kebutuhan rencana Pekerja, meningkatkan kompetensi dan mendorong kinerja agar pengelolaan *Human Capital* berjalan sesuai kebijakan yang berlaku di *Corporate Secretary Division*.
4. Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di *Corporate Secretary Division*.
5. Membuat laporan-laporan di tingkat Divisi/Department agar sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit kerja lain atau instansi terkait.
6. Mengelola logistik dan kesekretariatan di tingkat Divisi/Department, termasuk penggunaan biaya-biaya terkait logistik dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengelola pengembangan platform/sistem aplikasi berkoordinasi dengan divisi terkait.
8. Melakukan penyempurnaan kebijakan/ketentuan terkait *output* (hasil kerja) *Corporate Secretary Division* dan unit kerja lain (termasuk antara lain: *Service Level Agreement*/SLA, Buku Prosedur Operasional/BPO, dll).
9. Melakukan koordinasi dan kerja sama di tingkat Divisi/Department, serta membina hubungan baik dengan unit kerja lain, lembaga atau instansi atau instansi atau pihak ketiga, termasuk antara lain pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terkait bidang tugas *Corporate Secretary Division*.

Profil Sekretaris Perusahaan

Periode Januari – Agustus 2023



Aestika Oryza Gunarto

Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1970. Usia 53 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 2 September 2020 berdasakan Keputusan Direksi No. Nokep: 140.e-DIR/KHC/07/2019 22 Juli 2020 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.20-KOM/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.

PENGALAMAN KERJA

Beliau memulai karir BRI sejak tahun 1991 dengan berbagai posisi antara lain:

- Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara, Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Jakarta 1 (01-06- 2014 s/d 30-11-2015)
- Pj. Kepala Biro Direksi, Biro Direksi Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2015 s/d 30-11-2016)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kesekretariatan dan Protokoler Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2016 s/d 30-04- 2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Makassar, Kantor Wilayah Makassar (01- 05-2019 s/d 31-10-2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01- 11-2019 s/d 31-05-2020) Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kecil Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01-06-2020 s/d 05-08-2020)
- Pj. *Executive Vice President, Corporate Secretary Division* Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-08-2020 s/d 05-11- 2020)
- *Executive Vice President, Corporate Secretary Division* Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-11-2020 s/d 01-08-2023)

JABATAN RANGKAP

-

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1994)
- Magister Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran Bandung (2005)

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 5

Periode Agustus 2023 – Saat Ini



Agustya Hendy Bernadi

Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tahun 1979. Usia 44 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 1 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No. 1613-DIR/HCB/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris SR.26-KOM/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaa Pengangkatan Corporate Secretary BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.

PENGALAMAN KERJA

Beliau memulai karir BRI sejak tahun 2005 dengan berbagai posisi antara lain:

- *Manager*, *Investor Relations Desk*, Kantor Pusat (01-10-2012 s/d 28-02-2015)
- Kepala Bagian *Financial Institution Banks* & Manajemen Unit Kerja Luar Negeri, *International Business Division*, Kantor Pusat (01-03-2015 s/d 30-06-2018)
- *Deputy General Manager/Operations Manager*, BRI *New York Agency* (01-07-2018 s/d 08-05-2022)
- *Department Head International Business Division*, Kantor Pusat (09-05-2022 s/d 31-7-2023)
- *Division Head Corporate Secretary,* Kantor Pusat (1-8-2023 s/d sekarang)

JABATAN RANGKAP

-

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2001)
- Magister Manajemen Strategi, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2009)
- *Master of Business Administration*, University of Florida, Amerika Serikat (2012)

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko *Level* 2

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Aestika Oryza Gunarto*	*Leadership in a Technology Driven World*	Juni 2023, London	Imperial College Business School
	Risk Management Specialist - Liquidity Risk Management	Juli 2023, Jakarta	BSPD
Agustya Hendy Bernadi**	BSDP *Upskilling Department Head "Strategy Execution 4DX"* (termasuk materi akuntansi dan hukum secara umum)	2023, Jakarta	Dunamis

* Berhenti menjabat sejak Agustus 2023
** Mulai menjabat sejak Agustus 2023

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Hubungan Dengan Media Massa

	Tahun 2023	Cetak	*Online*	TV	Total	BRI Liga 1	*Grand Total*	*Quarter*
Q1	Januari	527	10.539	19	11.085	4.144	19.373	
	Februari	432	10.296	35	10.763	5.002	20.767	**63.432**
	Maret	422	13.206	32	13.660	4.816	23.292	
Q2	April	268	9.117	7	9.392	3.833	17.058	
	Mei	350	8.919	19	9.288	1.035	11.358	**42.419**
	Juni	285	10.198	30	10.513	1.745	14.003	
Q3	Juli	387	15.594	74	16.055	7.567	31.189	
	Agustus	303	13.946	39	14.288	6.626	27.540	**85.916**
	September	348	15.814	45	16.207	5.490	27.187	
Q4	Oktober	355	18.635	37	19.027	5.549	30.125	
	November	318	17.661	48	18.027	4.851	27.729	**86.401**
	Desember	383	18.669	41	19.093	4.727	28.547	
	Grand Total	**4.378**	**162.594**	**426**	**167.398**	**55.385**	**222.783**	

2023

Pelaksanaan komunikasi korporat dilakukan dengan melibatkan berbagai media sebagai *strategic partner* yang meliputi media cetak, TV, maupun *online*. Komunikasi dilakukan melalui penerbitan *press release* yang selama tahun 2023 telah mencapai sejumlah 540 siaran pers oleh Perseroan, dengan total serapan oleh media sebanyak 222.783 pemberitaan di seluruh media.

UMKM masih menjadi tema pemberitaan utama bagi BRI. UMKM sebagai fokus bisnis BRI memiliki peranan kunci dalam membangun perekonomian nasional yang secara langsung mendorong pertumbuhan kinerja BRI. Untuk itu, narasi dalam rilis BRI lebih menekankan pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, publikasi mengenai kinerja keuangan, saham dan pencapaian BRI juga menjadi tema pemberitaan utama BRI untuk meningkatkan citra positif di mata publik dan juga sebagai referensi informasi bagi investor.

Dalam kaitannya dengan BRI sebagai sponsor kasta tertinggi liga sepak bola di Indonesia yaitu BRI Liga I yang merupakan olahraga paling populer di Indonesia berkontribusi sangat besar dalam keseluruhan pemberitaan BRI. Oleh sebab itu, hingga akhir Desember 2023, total 55.385 artikel pemberitaan mengenai BRI Liga 1 menghiasi *platform* media print, TV, dan *online*.

Selain itu *Corporate Secretary* juga melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas di media sosial untuk menjaga sekaligus meningkatkan citra positif BRI. Citra positif BRI dibangun melalui konten pillar mengenai *corporate values & achievements*, *work at* BRI, dan *financial management* yang dikemas dengan *treatment* menarik yang sesuai dengan pengguna media sosial. Sehingga di kuartal IV citra positif BRI di media sosial mencapai 93 persen.

Corporate Secretary sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) BRI melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pelayanan informasi publik. Sepanjang di tahun 2023 PPID BRI menerima 12 permohonan informasi dari publik yang dapat dipenuhi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja pengelolaan informasi publik yang sangat baik membuat BRI mendapat predikat "Informatif Utama Kategori BUMN" dalam *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik 2022 oleh Komisi Informasi Pusat dengan nilai sebesar 97,19.

Corporate Secretary juga bertindak sebagai *spokesperson* untuk menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan, mendampingi jajaran Direksi BRI dalam kegiatan wawancara bersama media, menyelenggarakan kegiatan *press conference* untuk meningkatkan citra perusahaan, serta melakukan *monitoring* hingga klarifikasi terhadap pemberitaan negatif atau isu-isu yang dapat menurunkan reputasi Bank BRI.

KEGIATAN DENGAN MEDIA MASSA TAHUN 2023

Selama tahun 2023, BRI melaksanakan kegiatan dengan Media Massa, di antaranya:

No	Event	Waktu	Media/Lembaga	Pembahasan	Type
1	Meeting bersama Media Tempo	Rabu, 18 Januari 2023	Redaktur Tempo	Kerja Sama BRI & TEMPO.Co	Media Relation
2	Dinner bersama CNBC	Selasa, 31 Januari 2023	CNBC	Kinerja BRI & Isu Perbankan	Media Relation
3	Meeting bersama Media Tempo	Jumat, 2 Februari 2023	Direktur Utama TEMPO.Co	Agenda Fourfeo BRI	Media Relation
4	Meeting bersama Media Kontan	Jumat, 10 Februari 2023	Direktur Utama Kontan	Potensi Kerja Sama BRI - Kontan	Media Relation
5	Lunch bersama Emtek Group	Selasa, 14 Februari 2023	Emtek Group	Potensi Kerja Sama BRI - Emtek	Media Relation
6	Meeting Bersama Kontan	Selasa, 14 Februari 2023	Wapemred Kontan	Kerja Sama Regular BRI & Kontan	Media Relation
7	Meeting bersama Tribunnews.com	Senin, 20 Februari 2023	Wapemred Kontan, Marketing	Kerja Sama Periodik BRI	Media Relation
8	Meeting bersama MNC Group	Selasa, 21 Februari 2023	Direktur Pemberitaan MNC, Pemred MNC Group	Silaturahmi Media	Media Relation
9	Meeting bersama Suara.com	Rabu, 22 Februari 2023	Direktur Utama Suara.com	Pembahasan Konten KUR	Media Relation
10	Halal Bi Halal Pemred	Rabu, 1 Maret 2023	BOD BRI & Anak Perusahaan Pemred Media Nasional	Kinerja BRI & Optimisme BRI 2023	Pemred Gathering
11	Sepak bola FH BUMN Bersama Pemimpin Redaksi	Jumat, 3 Maret 2023	FH BUMN Pemred Media Nasional	Sepak Bola Activity	Media Relation
12	Golf bersama Infobank	Sabtu, 4 Maret 2023	CEO Infobank	Golf Activity	Media Relation
13	Fourfeo Cup 2023	Jumat, 10 Maret 2023	Tempo Media Group (TMG)	Sepak Bola Activity	Media Relation
14	Meeting bersama Republika	Selasa, 14 Maret 2023	Republika	KUR	Media Relation
15	Lunch bersama MNC Portal Indonesia (MPI)	Selasa, 9 Mei 2023	AE dan Tim Redaksi MPI	Evaluasi Kerja Sama	Media Relation

No	Event	Waktu	Media/Lembaga	Pembahasan	Type
16	Pendampingan Stakeholder dan Media	12-18 Mei 2023	Kementerian BUMN, Direksi BRI, Media MNC, Emtek, Republika	Liputan SEA Games	Media Relation
17	Meeting Bersama B-Universe Berita Satu	Selasa, 23 Mei 2023	Direktur Utama B-Universe	Pembahasan Kerja Sama Media & CSR	Media Relation
18	Meeting Bersama Media Olahraga (Sport Star, Bola Sport, Super Ball, Top Skor, Indo Sport)	Kamis, 25 Mei 2023	Pemred Media	Pembahasan Kerja Sama Publikasi BRI Liga 1	Media Relation
19	Meeting Bersama Bisnis Indonesia	Rabu, 7 Juni 2023	Pemred	Pembahasan Kerja Sama Program	Media Relation
20	Gathering Bersama Media (Republika, Idx Channel, Bisnis.com)	Senin, 19 Juni 2023	Pemred Media	Nonton Bareng FIFA Matchday Indonesia vs Argentina	Media Relation
21	Meeting Bersama Kompasiana	Kamis, 27 Juli 2023	Business Head	Content Plan Soceng	Media Relation
	Meeting bersama Trans TV	Rabu, 2 Agustus 2023	AE Trans TV	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
22	Meeting Fun Football bersama Rakyat Merdeka	Selasa, 9 Agustus 2023	Menteri BUMN, PSSI, Direksi BRI, Pemred	Pembahasan Teknis Acara Fun Football	Media Relation
23	Gathering bersama Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI)	Kamis, 24 Agustus 2023	Ketua IJTI	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
24	Lunch bersama Promedia	Jumat, 8 September 2023	CEO Promedia	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
25	Media Gathering &Trofeo Cup	Selasa, 12 September 2023	Direksi BRI, Pemred, Redaktur Media	Media Gathering & Fun Football	Media Relation
26	Media Gathering dengan TV One	Rabu, 26 September 2023	Pemred	Pembahasan Kerja Sama	Media Relation
27	Lunch Bersama Harian Kompas	Rabu, 11 Oktober 2023	GM Kompas	Pembahasan Kerja Sama jelang HUT 128	Media Relation
28	Focus Group Discussion Pemred Media	Jumat-Sabtu, 6-7 Oktober 2023	Pemred Media Nasional	Pembahasan/Insight Stakeholder	Media Gathering
29	Media Day	Rabu-Kamis, 27-28 Desember 2023	Perwakilan Media Tier 1	Program Media	Media Gathering

Selain itu, *Corporate Secretary* juga mengadakan program BRI *Fellowship Journalism* 2023 yaitu program pemberian beasiswa S2 kepada jurnalis di universitas negeri di Indonesia, pada tahun 2023 melalui program ini BRI memberikan beasiswa kepada 45 jurnalis.

Penyelenggaraan RUPS

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana dilaporkan pada sub bab RUPS pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Transparansi Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi

Selama tahun 2023, *Corporate Secretary* telah melakukan laporan keterbukaan informasi, laporan rutin, laporan insidentil dan/atau permintaan data oleh regulator. Rincian pelaporan telah disampaikan pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RINGKASAN KINERJA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Penerapan tata kelola yang baik pada industri perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko, dinamika dan kompleksitas yang semakin meningkat. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan adalah penerapan fungsi audit intern yang efektif. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab untuk menerapkan fungsi audit intern yang efektif di Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum yang paling sedikit meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki & meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Dalam rangka menilai efektivitas penerapan fungsi audit intern, telah dilakukan kaji ulang oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau PwC. Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, secara umum aktivitas yang dilakukan SKAI telah sesuai dengan ketentuan regulator dan *International Standard for The Professional Practice of Internal Auditing*. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan resertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. Sertifikasi ISO tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Audit Standard & Quality Development Division, Head Office Audit, dan 18 Regional Audit Office seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap aktivitas SKAI, sehingga dapat mewujudkan visi SKAI BRI menjadi *strategic business partner* yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penerapan fungsi audit intern yang efektif, SKAI melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. *Review* Efektivitas dan Strategi SKAI
   Peningkatan dan *review* atas kualitas kegiatan audit dan *advisory* dengan melakukan pengkinian terhadap Strategi, *New Audit Framework*, IT Audit dan *Strategic advisory* sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi *auditee*.
2. Optimalisasi Data Analitik
   Penggunaan *audit tools* dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka memprediksi dan mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul dalam suatu proses bisnis serta meningkatkan efisiensi dan kualitas audit.
3. *Audit Management System*
   SKAI melakukan *enhancement* terhadap *audit management system* SKAI BRI dan SKAI Perusahaan anak sebagai berikut:
   a. BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)
      BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA) yaitu *suite application* dalam bidang Manajemen audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai tahap perencanaan hingga *Monitoring*. Aplikasi BRISMA bersifat *web-based* dan dapat diakses secara *online* serta terintegrasi dengan aplikasi BRISTARS dan *audit tools* lainnya yang dimiliki SKAI BRI.
   b. BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA) SKAI Terintegrasi
      Aplikasi Manajemen audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern untuk Perusahaan Anak yaitu BRI Life dan BRI Finance. Aplikasi BRISMA bersifat *web-based application* dan dapat diakses secara *online*.
4. Penerapan Audit *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR)
   Pelaksanaan fungsi SKAI dalam menerapkan ICoFR di perusahaan untuk memastikan pengendalian intern atas Laporan Keuangan telah berjalan efektif di perusahaan.
5. Penerapan *Agile Audit*
   Melaksanakan kegiatan audit terhadap perubahan proses bisnis yang semakin dinamis sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.
6. Penguatan Fungsi *Advisory*
   Mengkinikan *Advisory Framework* melalui penyesuaian mekanisme kegiatan *advisory* yang efektif.
7. *Enhancement Risk Control Matrix/Risk Control Library* Teknologi Informasi
   Mengkinikan informasi risiko dan kontrol terkait IT *General Control* dan IT *Application Control* dengan melibatkan

1st *line*, 2nd *line* dengan 3rd *line*. Termasuk *enhancement mapping* data taksonomi produk dengan IT *Asset*/aplikasi pendukungnya untuk membantu proses *risk assessment* dan penentuan obyek audit.

8. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara 1st *line*, 2nd *line* dengan 3rd *line*
   Pelaksanaan komunikasi secara berkala dengan 1st *line* dan 2nd *line* melalui Forum GRC (*Governance*, *Risk Management*, dan *Compliance*), *sharing tools Early Warning System*, dan *Monitoring* berkala sebagai strategi untuk peningkatan tata kelola
9. Penerapan ISO 9001:2015
   SKAI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu terhadap proses bisnis SKAI yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya.
10. *Human Capital Development*
    SKAI melaksanakan program peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan melalui pelaksanaan sertifikasi profesi, BRILian *Specialist Development Program*, BRILian *Leadership Development Program*, *internship*, *guest auditor* dan Program *One Hour With You* (*sharing knowledge* yang melibatkan 1st *line*, 2nd *line* dengan 3rd *line*)
11. SKAI Terintegrasi
    SKAI BRI memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas SKAI Perusahaan Anak yang tercermin dalam nilai maturitas masing-masing Perusahaan Anak. Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung SKAI Terintegrasi antara lain:
    a. *Annual Audit Planning*
    b. *Individual & Joint Audit*
    c. *Quality Assurance Improvement Program*
    d. *Review* kebijakan & prosedur yang dimiliki SKAI Perusahaan Anak
    e. *Monitoring offsite financial performance* dan kinerja SKAI Perusahaan Anak.
    f. Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok hasil audit SKAI Perusahaan Anak kepada SKAI Terintegrasi dan Laporan SKAI Terintegrasi kepada Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi
    g. Penempatan auditor SKAI BRI di SKAI Perusaahan Anak, benchmark SKAI Perusahaan Anak ke SKAI BRI Induk dan program *secondment*.
    h. Pendampingan *enhancement audit tools* SKAI Perusahaan Anak dan penggunaan bersama *Audit Management System* BRISMA 2.1
    i. *Liaison Officer* dam *Monitoring* tindak lanjut hasil temuan audit eksternal.

Dasar Hukum

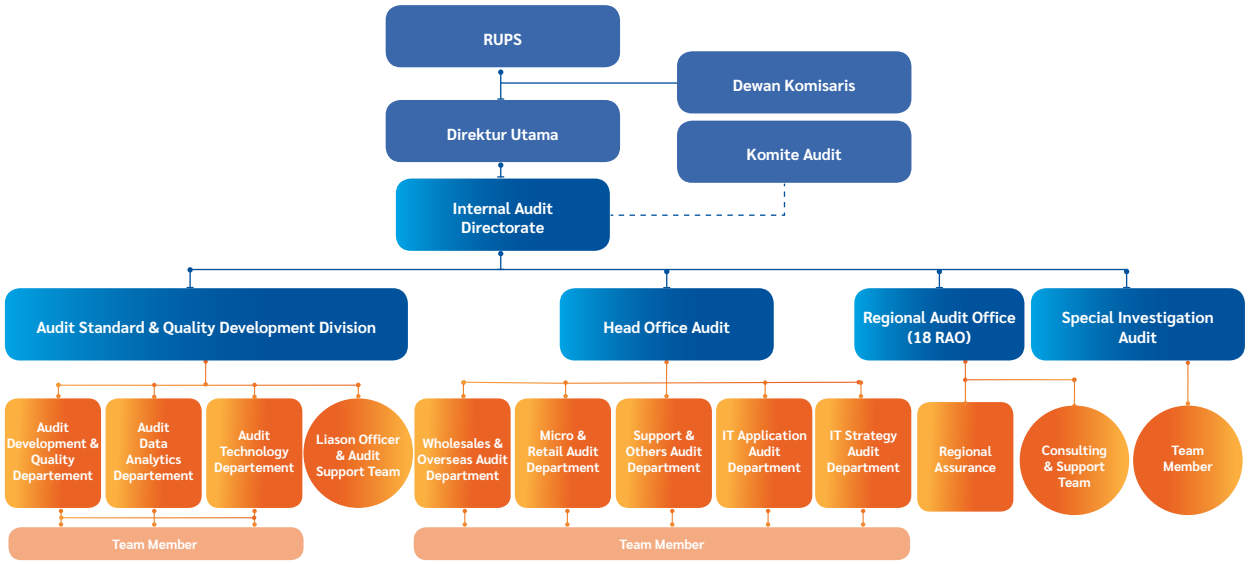
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2023 tentang Ketahan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK-03/2016 tanggal 22 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/ SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance*, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung *strategic business objective* melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang efektif dan sesuai dengan arah serta strategi perusahaan. Pelaksanaan fungsi SKAI yang efektif dapat memberikan jaminan kepada perusahaan terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko serta sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi perusahaan. Dalam rangka mendukung

aspirasi perusahaan sebagai *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion* pada tahun 2025, maka SKAI BRI menerapkan pendekatan audit yang lebih lincah (*agility*) agar dapat meningkatkan kinerja, kualitas, memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai, serta pengembangan metodologi dan *tools* audit yang *agile*. SKAI juga senantiasa meningkatkan sinergi dengan fungsi *1st line* dan *2nd line* melalui koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang teratur dan efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen dan jumlah serta kompetensi Auditor yang memadai. SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang berada di bawah Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SEVP SKAI membawahi *Audit Standard & Quality Development Division*; *Head Office Audit*, dan 18 (delapan belas) *Regional Audit Office*, dan *Special Investigation Audit*. Berikut adalah Struktur Organisasi SKAI.



SKAI secara struktural terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan unit kerja yang melaksanakan pengembangan Standar dan Kualitas Audit sebagai berikut:

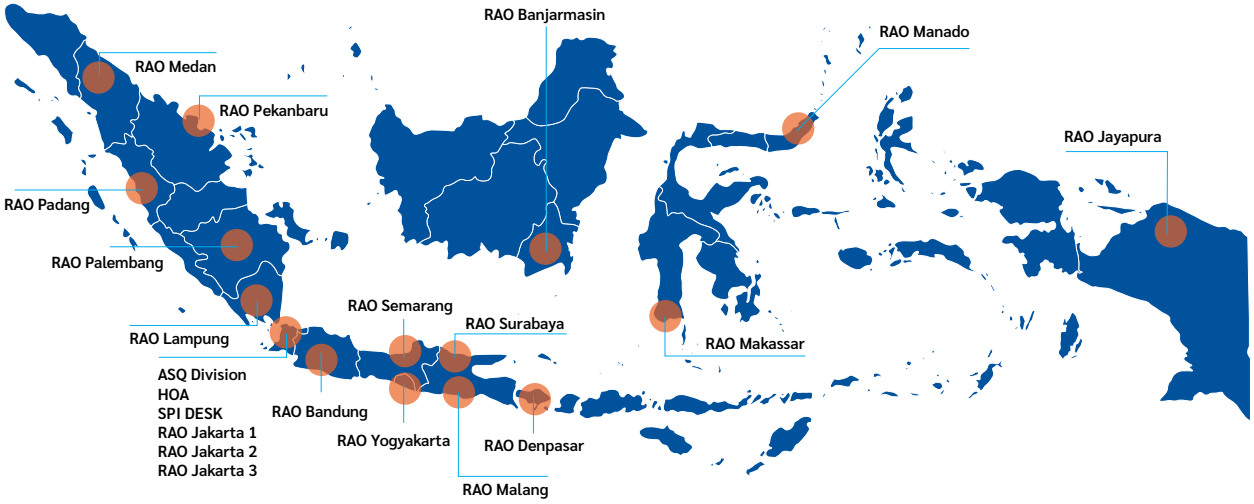
Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit

a. *Regional Audit Office*
   Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi *sebagai strategic business partner* dengan objek audit *Regional Office*, *Branch Office*, Sentra Layanan Prioritas, Sub *Branch Office*, *Cash Office*, dan BRI Unit di wilayah kerjanya. Saat ini BRI memiliki 18 (delapan Belas) Regional *Audit* merupakan salah satu strategi BRI agar peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* dan fungsi *assurance* dapat lebih efektif dan efisien mengingat struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengelolaan bisnis dan aset BRI terdesentralisasi.

b. *Head Office Audit*
   Melaksanakan seluruh kegiatan audit (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*) sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core* dan *Non Core Banking*; operasional infrastruktur TSI pada D*ata Center*, *Disaster Recovery Center* dan seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi dan kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI serta *End User Computing*, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang di miliki BRI lebih dari **50%.** *Head Office Audit* juga melaksanakan kaji ulang terhadap beberapa hal yang telah diatur oleh regulator diantaranya Strategi Anti *Fraud*, Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

c. *Special Investigation Team*
Melakukan investigasi atas indikasi *fraud* dan pengaduan *whistleblowing system* dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. *Desk Special Investigation* berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKAI BRI.

Audit *Standard & Quality Development Division* melakukan penyusunan visi, misi dan strategi SKAI BRI, melaksanakan evaluasi kualitas audit oleh jajaran SKAI BRI, pihak independen *maupun internal quality assurance* terhadap SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan, melaksanakan pengkajian dan perancangan *software* maupun *hardware* untuk mendukung pelaksanaan audit, melakukan analisis dan penyusunan laporan hasil *audit, liasion officer & support team* serta melakukan pengembangan dan pengelolaan *analytical tools* data audit. Berikut adalah posisi 18 (Delapan belas) Regional Audit *Office* BRI yang tersebar di Seluruh Indonesia:



Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern dalam Struktur Organisasi

Secara struktural, SKAI BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SKAI dipimpin oleh SEVP Satuan Kerja Audit Intern.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern

SEVP Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan SEVP SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern



Triswahju Herlina

SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Warga negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tahun 1968. Usia 55 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI sejak Maret 2022 berdasarkan Keputusan Direksi No.339-DIR/HCB/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan persetujuan Dewan Komisaris No. R.07-KOM/01/2022 tanggal 25 Januari 2022. Pengangkatan SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.

PENGALAMAN KERJA

- SEVP SKAI BRI (Maret 2022 - sekarang)
- Regional CEO BRI Surabaya (November 2019 – Maret 2022)
- *Division Head of Agribusiness* (Agustus 2019 – Oktober 2019)
- *Division Head of Medium Business* (Juli 2018 – Juli 2019)
- Wakil Pemimpin Wilayah RO Yogyakarta (Maret 2016 – Juni 2018)
- Wakil Pemimpin Wilayah RO Malang (Oktober 2012 – Februari 2016)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya, Malang (1990)
- Magister Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005)

SERTIFIKASI

- *Qualified Internal Auditor*
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4



Bangkit Ngabdianto

Division Head Audit Standard & Quality Development

Warga negara Indonesia, lahir di Tuban, pada tahun 1980. Usia 43 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi Nomor R.331-DIR/HCB/01/2022 tanggal 04 Juli 2022 *Division Head Audit Standard & Quality Development*.

PENGALAMAN KERJA

- EVP Audit Standard & Quality Development Division (Oktober 2023 - sekarang)
- SVP Audit Standard & Quality Development Division (Juni 2022 - Oktober 2023)
- VP Audit Intern Wilayah BRI Manado (Januari 2020 – September 2020)
- VP Audit Intern Wilayah BRI Denpasar (Oktober 2020 – Juni 2020)
- *Group Head* Satuan Kerja Audit Intern BRI Jakarta (Agustus 2017 – Desember 2019)

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana *Electrical Engineering* (2004)

SERTIFIKASI

- *Certified Information Systems Auditor* (CISA)
- *Certified Fraud Examiner* (CFA)
- *Qualified Internal Auditor* (QIA)



Donny Permana

Internal Audit Head
(Head Office Audit)

Warga negara Indonesia, lahir di Kaban Jahe, pada tahun 1969. Usia 54 tahun Per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Internal Audit Head (Head Office Audit) sejak Mei 2023 berdasarkan surat Mutasi Pejabat BRI No. R.473-DIR/HCB/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023 TMT 1 Mei 2023

PENGALAMAN KERJA

- *Internal Audit Head* (*Head Office Audit*) 1 Mei 2023 – Sekarang
- *Regional Chief Audit Region* Malang Januari 2022 – 30 April 2023

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Universitas Parahyangan, Bandung (1992)
- Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia (2000)

SERTIFIKASI

- *Qualified Internal Auditor* (QIA)
- *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Internal Audit *Charter*

SKAI memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sesuai Surat Keputusan Nomor BRI KU.02-DIR/ASQ/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, dan mengacu pada *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

Piagam Audit Intern BRI merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), inisiasi komunikasi SKAI dengan *auditee*, pemeriksaan aktivitas bank serta kewenangan SKAI dalam mengakses catatan, dokumen, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Dalam hal fungsi SKAI terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, SKAI memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan audit intern terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua SKAI LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit di semua level Unit Kerja BRI secara independen, objektif dan profesional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugas.
6. Menjadi *Liaison Officer* bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi audit.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.
3. Memastikan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.
4. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur audit intern, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Intern. Setiap pertentangan yang ada akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
5. Memastikan seluruh kegiatan asurans dan konsultasi dilakukan dengan mematuhi Standar Profesional Audit Intern.
6. Menyiapkan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan kinerja dan pencapaian tujuan Satuan Kerja Audit Intern.
7. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi telah diterapkan dan dijunjung tinggi.

8. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
9. Menyusun rencana audit tahunan beserta dengan pembuatan rencana tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
10. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas setiap perubahan sementara signifikan dalam Perencanaan Audit Tahunan.
11. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern, termasuk penetapan tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, serta komunikasi terkait hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak terkait.
12. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
13. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
14. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara periodik.
15. Dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern, SKAI BRI wajib memastikan bahwa:
    a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dengan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
    b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan patuh pada Piagam Audit Intern Bank.
16. SKAI BRI sebagai perusahaan induk:
    a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak
    b. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
    c. Memastikan fungsi audit intern pada Perusahaan Anak berjalan dengan efektif.
    d. Melakukan audit sesuai dengan rencana audit intern, termasuk tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian serta komunikasi hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi pihak terkait.
17. Memastikan dalam hal terdapat permintaan saksi ahli kepada jajaran SKAI, maka dapat memberikan penugasan kepada Auditor tertentu untuk menjadi saksi ahli dengan mempertimbangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapi.
18. Memastikan apabila terdapat permintaan atas dokumen audit oleh pihak ekstern (terkait litigasi), telah dilakukan koordinasi dengan atau *Legal Officer*.
19. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
20. Kepala SKAI memperoleh penilaian kerja dari Direktur Utama dan Komite Audit secara tertulis dan transparan.
21. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala SKAI wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan efektif sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Wewenang Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern memiliki kewenangan paling sedikit:
1. Mengakses seluruh informasi secara penuh, bebas, dan tidak terbatas tentang catatan, informasi, pekerja, dana, asset, lokasi/area, dan sumber daya lain BRI terkait dengan tugas dan fungsi SKAI, termasuk terhadap perusahaan anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BRI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, dan lainnya
6. Melakukan koordinasi dengan auditor ekstern terkait kegiatan pemeriksaan auditor ekstern.
7. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
8. Mendapatkan bantuan unit-unit kerja lain atau menggunaan jasa pihak ekstern (seperti jasa *advisory*) dalam pelaksanaan audit apabila diperlukan.

Komposisi Personil Satuan Kerja Audit Intern

SKAI terus berkomitmen mengembangkan kualitas, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Auditor melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Berikut disajikan data jumlah Auditor jajaran SKAI.

Jabatan	Jumlah
SEVP	1
EVP	2
VP / Dept. Head	8
Team Member ASQ	49
Team Member HOA	59
Team Member SPI	6
Regional Chief Audit	16
Regional Assurance Head	15
Team Member Regional Assurance	429
Team Leader Consulting & Support	16
Team Member Consulting & Support	78
Total	**679**

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Kerja Audit Intern

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikasi nasional maupun internasional sebagai berikut:

Nama Sertifikasi	Jumlah Peserta
Certified Fraud Examiner (CFE)	21
Certified Information System Auditor (CISA)	12
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	4
Certified Qualified Internal Auditor (QIA)	57
Certified Bank Internal Audit (CBIA)	39
Certified Forensic Auditor (CFrA)	16

Dalam meningkatkan kualitas audit dalam memberikan jasa *assurance* dan konsultasi, SKAI BRI mendukung auditor dengan memberikan sertifikasi di luar audit sebagai berikut:

No	Nama Sertifikasi	Jumlah Peserta
1.	*Certified Ethical Hacker (CEH)*	4
2.	*Certified Data Center Professional (CDCP)*	1
3.	*Certified Financial Planer (CFP)*	1
4.	*COBIT 5 Foundation Certificate (COBIT 5)*	2
5.	*Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Approved*	1

No	Nama Sertifikasi	Jumlah Peserta
6.	*Lead Auditor ISO 37001:2016*	1
7.	*Lead Auditor ISO 27001:2013 and ISO 19011:2011*	2
8.	*Certified Data Center Specialist (CDCS)*	1
9.	*Business Continuity Certified Planner (BCCP)*	1
10.	*Certified Statement Analysis (CSA)*	2
11.	*Big Data Administrator (BIG DATA)*	4
12.	*Kepatuhan*	1
13.	*Certified Governance Risk and Compliance Professional (CGRCP)*	2
14.	*General Banking*	98
15.	Manajemen Risiko Level 1	104
16.	Manajemen Risiko Level 2	30
17.	Manajemen Risiko Level 3	5
18.	Manajemen Risiko Level 4	2
19.	Sertifikasi LSP BRI Level Manager	1
20.	Sertifikasi LSP BRI Level Supervisor	45
21.	Sertifikasi LSP BRI Level Auditor	287

Kualifikasi Pendidikan Formal Jajaran SKAI

Pendidikan	Jumlah
S1	598
S2	69
Lainnya	**679**

Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Audit Intern

Selain itu dilakukan pendidikan berkelanjutan melalui *on job training*, pendidikan *development dan enhancement (Inclass, In House Training, Public Course* dan Seminar) dan sertifikasi profesional Auditor. Adapun pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Peserta
1	COP (*Community Of Practice*)	138
2	BLDP	69
3	BSDP (1,2,3)	2495
4	BLRP	10
5	SOSIALISASI	681
6	*IHT SPECIAL REQUEST*	160
7	FPK/FGD	55
8	*PUBLIC COURSE DN*	15
9	*PUBLIC COURSE LN*	9
10	PEMBEKALAN & UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI	263
11	SESPIBANK	1
	TOTAL	3896

Partisipasi dalam Asosiasi Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional audit intern, SKAI telah berpartisipasi dalam asosiasi profesi audit internal salah satunya dengan keikutsertaan SKAI BRI dalam organisasi eksternal, antara lain:

No	Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi Keanggotaan
1	Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	Wadah Komunikasi *Chief Auditor* untuk Indonesia untuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia dan untuk memperkuat pondasi ilmu Audit pada perubahan yang terjadi di Industri Indonesia	Dewan Pengawas Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)
2	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKPSI)	Asosiasi Satuan Pengawasan Intern BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, dan Anak Perusahaan BUMN yang bersifat profesional, independen, dan non-politik	Anggota

Sertifikasi Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan resertifikasi ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu dari lembaga Sertifikasi SGS Indonesia pada bulan Januari 2024 dengan hasil tidak terdapat temuan Major maupun Minor. SKAI BRI dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku hingga Desember 2023, dalam hal ini SKAI BRI telah mendapatkan Sertifikasi ISO selama 21 tahun sejak pertama kali dilakukannya sertifikasi ISO 9001:2000 pada tahun 2002. Sertifikasi ISO tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Audit Standard & Quality Development Division, Head Office Audit, dan 18 Regional Audit Office BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap pelaksanaan audit, sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI BRI menjadi *strategic business partner* yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.



Kode Etik Auditor

SKAI BRI memiliki kode etik berupa prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Integritas
   Jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern dalam melaksanakannya tugas dan tanggung jawabnya.
2. Objektivitas
   Auditor SKAI melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
   Auditor SKAI harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang objek yang diuji.
3. Kerahasiaan
   Auditor SKAI menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkap informasi tersebut (tanpa kewenangan yang sah), kecuali diwajibkan oleh hukum atau profesi.
4. Kompetensi
   Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas SKAI.

Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

Independensi dan Objektivitas SKAI BRI

SKAI BRI sebagai *3rd line* secara struktural telah independen terhadap fungsi *1st* line (Unit Kerja Operasional) dan fungsi *2nd line* (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan). Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit). Hal tersebut mendukung independensi dan objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala. Selain itu, SKAI harus di *review* oleh auditor independen sesuai kebutuhan, paling tidak setiap 3 (tiga) tahun. *Review* dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen atau pihak independen lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama atas rekomendasi Komite Audit. Apabila terdapat gangguan independensi dan objektif, maka SKAI BRI wajib mengungkapkan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Sistem Manajemen Informasi Audit

SKAI memiliki Sistem Manajemen Informasi Audit yang memadai dikenal dengan **BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)**. BRISMA merupakan sebuah *suite application* dalam bidang Manajemen Audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi hingga *Monitoring*.



Metodologi Audit

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan *metode risk based audit* (RBA) dan *agile audit* dalam melaksanakan fungsi audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan *risk based audit*, SKAI *menggunakan Computer Assissted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools audit* untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Di samping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko melalui kegiatan *Monitoring off site* yang dilaksanakan Unit Kerja Audit. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja. Pelaksanaan *Monitoring off site* didukung dengan pengembangan indikator risiko melalui teknologi *big data*. Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide dan masukan untuk penyempurnaan kebijakan, melakukan forum komunikasi antara Regional Audit Office dan Regional Office, Program Auditor Mengajar, kegiatan konsultasi, dan *sharing knowledge*, khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh level unit kerja.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2023

Audit dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama. Sampai dengan Desember 2023 SKAI melaksanakan audit reguler dan kegiatan audit non regular dengan rincian sebagai berikut:

1. *Head Office* Audit dan Regional Audit *Office* telah melaksanakan 3.115 unit kerja atau mencapai 108% dari PAT 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Total Objek Audit (Populasi)	Total PAT 2023	Realisasi Audit Reguler (Des 23)	Pencapaian PAT 2023
Division		3	3	100%
Regional Office	18	18	18	100%
KCK	1	1	1	100%
Branch Office	447	294	322	110%
Sub Branch Office	563	333	357	107%
Cash Office	519	306	314	103%
BRI Unit	5156	1903	2.077	109%
Unit Kerja Luar Negeri	5	2	2	100%
Perusahaan Anak	10	3	3	100%
Fungsi *Support & Administration* RAO	18	18	18	100%
Grand Total	**6.737**	**2.881**	**3.115**	**108%**

2. *Head Office* Audit, Regional Audit *Office*, dan *Desk Special Investigasi* Audit telah melaksanakan kegiatan di luar Reguler Audit dengan rincian *project audit* sebagai berikut:

Unit Kerja	Realisasi Audit Non Reguler (Des 23)
Audit Spesial	402
Audit Tematik	133
Audit Investigasi	216
Surprise Audit	930
Formal *Consulting*	65
Informal *Consulting*	1.369

Di samping kegiatan reguler audit tersebut di atas, SKAI melaksanakan kegiatan *regulatory audit* (dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu sesuai ketentuan regulator). Pada tahun 2023, SKAI melaksanakan 5 (lima) kegiatan *regulatory audit* yaitu:
1. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Bank Indonesia.
2. *Anti Money Laundering* & CFT BRI Timor Leste.
3. Pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia.
4. Pelaporan Data Penjaminan Nasabah (*Single Customer View*).
5. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur (SLIK).

Selanjutnya, SKAI juga melaksanakan audit tematik dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh (*end to end process*). Selama tahun 2023 SKAI dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) *project* audit tematik yang terdiri dari:
1. 16 (enam belas) tema tematik terhadap Divisi Kantor Pusat dengan Jumlah *project* audit sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) *project*.
2. 4 (empat) tema tematik terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dengan jumlah *project* audit sebanyak 60 (enam puluh) *project*.

Satuan kerja Audit Intern telah melaksanakan Audit ICoFR *Fase* II dengan ruang lingkup meliputi aspek IT *General Control* (ITGC), IT *Application Control* (ITAC) dan *Process/Transaction Level Control* (PLC) yang meliputi proses Mikro, Ritel, Konsumer, Korporasi, *Financial Reporting* dan *Customer Deposit* terhadap unit kerja *Division*, *Office*, *Sub Branch Office*, *Cash Office*, dan BRI Unit.

Rapat Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki kebijakan rapat yaitu dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Satuan Kerja Audit Intern BRI dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko dan komite lainnya.

Selama tahun 2023, SKAI telah melaksanakan rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris serta Komite di bawah Direksi sebanyak 165 kali, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Rapat
Dewan Komisaris	43
Direksi	53
Dewan Komisaris dan Direksi	19
Komite Audit	19
Komite Pemantau Manajemen Risiko	9
Komite Tata Kelola Terintegrasi	7
Komite Produk	15
Total	**165**

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap komitmen perbaikan kelemahan pengendalian intern sesuai rekomendasi SKAI, Pengawas maupun Auditor Eksternal. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan posisi Desember tahun 2023 sebagai berikut:

No	Lembaga Pemeriksa	Jumlah Komitmen			
		Total Komitmen	Selesai	Belum Selesai	
				Dalam tenggat waktu	Lewat tenggat waktu
1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	276	271	5	0
2	Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)	458	401	57	0
3	Bank Indonesia (BI)	201	150	51	0
4	KAP Ernst & Young (E&Y)	147	138	9	0
Total		**1.082**	**960**	**122**	**0**

Auditor Internal

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan Desember 2023 sebagai berikut:

No	Hasil *Monitoring* RPM	Jumlah Rekomendasi	% Rekomendasi
1	Memadai	58.335	99,468%
2	Tidak Memadai	14	0,000%
3	Dalam Pemantauan	298	0,005%
Total		**58.647**	**100%**

Sinergi dengan *Assurance Provider*

SKAI melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fungsi pengendalian lainnya terutama dalam hal pemetaan cakupan asurans (meliputi risiko signifikan, pihak yang melakukan asurans dan lainnya). Hal tersebut dilakukan untuk membantu mengidentifikasi gap dan duplikasi cakupan asurans serta membantu SKAI untuk mengevaluasi kecukupan jasa asurans di masing-masing risiko. Hasil pemetaan tersebut didiskusikan dengan fungsi pengendalian lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai koordinasi kegiatan dalam meminimalkan duplikasi pekerjaan, memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas cakupan *assurance*.

Unit Manajemen Risiko

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO 2023

Tahun 2023, Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menegaskan komitmennya dalam pengelolaan risiko yang proaktif dan adaptif. Sejalan dengan pencapaian di tahun 2022, BRI telah mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan bisnis, yang merupakan kunci untuk menjaga *sustainability* perusahaan di tengah tantangan pasar yang penuh dengan ketidakpastian.

BRI terus meningkatkan fokus pada pengelolaan risiko secara holistik yang termasuk peningkatan sistem pengawasan internal, *risk appetite* dan *risk profile* yang lebih sensitif, serta penguatan struktur organisasi dan teknologi yang mendukung.

Direktorat Manajemen Risiko terus berupaya menanamkan budaya sadar risiko yang kuat di setiap unit dan *level* pekerja, melalui program-program pelatihan dan *capacity building* yang intensif. Aspirasi '*Managing Risk for Sustainable Business, Operational Excellence & Banking Resilience*' terus menjadi pendorong utama untuk mencapai kinerja yang optimal.

BRI juga meningkatkan kapabilitas dalam mengidentifikasi dan merespons *early warning signals*, memungkinkan perusahaan untuk bereaksi lebih cepat dan efektif terhadap potensi risiko.

Integrasi teknologi informasi terbaru dalam sistem manajemen risiko kami telah meningkatkan kapasitas kami dalam analisis data

Strategy soft landing masih dilakukan mengingat kondisi pasca covid-19 masih memberikan tekanan terhadap kondisi nasabah untuk dapat pulih khususnya pada segmen UMKM. Optimalisasi pengelolaan risiko kredit terus dilakukan dan menunjukan adanya perbaikan yang signifikan. Tercatat penurunan pada *Loan at Risk* (LAR) sebesar 12,54% (turun 457 bps YTD) yang diimbangi dengan pencadangan yang memadai dengan LAR *coverage* sebesar 53,66%, yang mencerminkan efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Di sisi lain BRI berhasil mengoptimalkan *recovery income* ekstrakomptable dengan pencapaian sebesar Rp. 16,2 T (*Recovery Rate* 49,18%) yang tumbuh secara Year on Year 36,61% terhadap 2022.

Dalam menghadapi tantangan operasional dan digital yang semakin kompleks, BRI mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan risiko operasional dan digital. Keberhasilan dalam pengelolaan ini merupakan aspek kritis untuk menjaga keandalan dan keamanan layanan kami kepada nasabah. Di tahun 2023, BRI telah menerapkan serangkaian inisiatif yang dirancang untuk menekan frekuensi dan kerugian di sisi operasional serta meningkatkan mitigasi terhadap ancaman keamanan IT.

Manajemen risiko diterapkan pada seluruh aktivitas bank dengan mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Regulator. Proses manajemen risiko terdiri dari aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh *three lines* model.

First line menjalankan aktivitas operasional bank untuk memberikan jasa dan layanan kepada nasabah, termasuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. *Second line* membantu *first line* dalam mengelola risiko dengan menyediakan dukungan berupa *risk and control assessment, Monitoring,* dan evaluasi penerapan manajemen risiko. *Third line* memberikan *assurance* atas kecukupan *control* dan efektivitas pelaksanaan internal control oleh *first line* dan *second line*.

Satuan kerja manajemen risiko Bank terdiri dari *Market*, *Portfolio* & *Enterprise Risk Division, Operational Risk Division, Digital Risk Division, dan Credit & Product Risk Policy Division*.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko *enterprise*, kredit, pasar, likuiditas, operasional, digital dan Manajemen Kelangsungan Usaha, serta Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
2. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance, Risk Limit, dan Loan Portfolio Guideline* kepada Direksi dengan memperhatikan masukan dari Unit Kerja Operasional.
3. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
4. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
5. Memantau implementasi kebijakan, strategis, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi.
6. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*), maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
7. Melakukan *stress testing* setiap triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi terhadap portofolio atau kinerja secara keseluruhan.
8. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko berdasarkan temuan audit dan/atau perkembangan praktik-praktik manajemen risiko yang berlaku secara internasional.
9. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru, termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.
10. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, apabila menggunakan model untuk keperluan intern (*internal Model*) dan/atau regulator.
11. Memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja Operasional dan/atau kepada RMC sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat diterima Bank.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Komisaris setiap triwulan. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
13. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kecukupan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
14. Menyusun dan menyampaikan kewajiban-kewajiban pelaporan tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada regulator.

Profil Kepala Divisi yang Membidangi Manajemen Risiko



Dodo Marjanto

Operational Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1972. Usia 51 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro

PENGALAMAN KERJA

- *Operational Risk Division Head* (Agustus 2023-sekarang)
- *Credit Restructuring & Recovery Division Head* (Mei 2023-Juli 2023)
- Regional *Risk Management Head* RO Semarang (November 2022-April 2023)
- Regional *Risk Management Head* RO Denpasar (September 2021-Juni 2023)
- Regional *Risk Management Head* RO Bandar Lampung (Oktober 2020-Agustus 2021)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi Nomor R.697-DIR/HCB/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Mutasi Pejabat BRI.



Nugroho Pancayogo

Digital Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Pontianak pada tahun 1978. Usia 45 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 Fisika, Institut Teknologi Bandung (2001)
- S2 Mechatronics, University Fachhochschile Ravensburg - Weingarten (2003)

PENGALAMAN KERJA

- *Division Head, Digital Risk Management* (2023 - sekarang)
- *Department Head*, IT *Enterprise Architecture Department* (2021 - 2023)
- VP, *Application Management & Operation Divison* (2020 - 2021)

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai *Digital Risk Division Head* sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP 395.e-DIR/HCB/09/2023



Ety Yuniarti

Market, Portfolio & Enterprise Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Klaten pada tahun 1981. Usia 42 tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Elektro UGM (2003)
- MBA Melbourne Business School (2012)

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Divisi Market, *Portfolio & Enterprise Risk* (2021)
- Kepala Divisi Micro, SME, *Consumer Credit Risk & Policy* (2020)
- Wakil Kepala Divisi *Asset, Liabilities & Management Information System* (2019)
- Kepala Bagian *Equity Management & Strategic Investment* (2018)
- Kepala Bagian *Investor Communication* (2015)

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
- Indonesian *Professional Certification Authority*

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Market, Portfolio & Enterprise Risk Division Head berdasarkan Keputusan Direksi No. 214.e-DIR/HCB/05/2022 tanggal 01 Mei 2022.



Nugroho Ari Brawono

Credit & Product Risk Policy Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Tangerang pada tahun 1968. Usia 55 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 – Fakultas Peternakan Jurusan Produksi Ternak Universitas Diponegoro (1991)
- S2 – Magister Management Agribisnis Institut Pertanian Bogor (2004)

PENGALAMAN KERJA

- Division Head Credit & Policy Product Risk Policy Division (2023)
- Vice President Compliance Division (2020)
- Assistant Vice President Compliance Division (2020)
- Kepala Bagian Kepatuhan Bidang Perkreditan (2017)

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan Perbankan Lever Manager
- Sertifikasi Credit Officer Level 3

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai *Credit & Product Risk Policy Division Head* sejak 1 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No.S.22.e-DIR/HCB/02/2023 tanggal 6 Februari 2023

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Program Pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2023 sebagai berikut:

1. BRILiaN *Specialist Development Program (BSDP) Risk Management Specialist*
   a. *Risk Data Analytics & Modelling*
   b. *Regulatory Risk Assessment*
   c. *Liquidity Risk Management*
   d. *Cyber Risk Management*
   e. *Asset and Liability Risk Management*
   f. *Operational Risk*
   g. *CRAS (Credit Risk Analysis System)*
   h. *GRC Integrated Risk Management*
   i. *Credit Risk Analyst*
   j. *Creidt & Product Risk Policy*
   k. *Wholesale Credit Risk Analyst*
   l. *Credit Restructuring and Recovering*
   m. Modul Risk Upgrade Series tahun 2023
2. BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) Market Risk Management
   a. *Level Basic*
   b. *Level Intermediate*
   c. *Level Advance*
3. BRILiaN *Specialist Development Program (BSDP) Operational Risk Management*
   a. *Fraud Risk Management*
   b. *Business Continuity Planning*
4. BRILiaN *Specialist Development Program (BSDP) Digital Risk Management*
   a. *Cybersecurity Risk Management – Transforming Governance Security and Compliance in Cloud Era*
   b. *Emerging Technoloby Synthesis – Archer Administration I*
5. BRILiaN *Specialist Development Program (BSDP) BRC – URC*
   a. Level *Basic*
   b. Level *Intermediate*
6. Pendidikan KBBUMN – BRI *Group Boosting The Attitude Program*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pekerja yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Level Sertifikasi	Peserta
1	1	3.330
2	2	734
3	3	161
4	4	50
5	5	15
Total		**4.290**

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2023

1. ***Penetapan Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Risiko**
   Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi BRI telah melakukan pengkinian terhadap *Risk Appetite Statement* (RAS) BRI dalam bentuk pernyataan

yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*). Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan. RAS BRI dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI, perubahan kondisi lingkungan bisnis serta Aspirasi Pemegang Saham. RAS BRI digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik.

Selanjutnya RAS BRI diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja BRI untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

2. **Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bank Sistemik**
   Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang diatur dalam PLPS No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

   Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha BRI. Sementara Dokumen Rencana Resolusi memuat informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. Pada dokumen Rencana Aksi dan Rencana Resolusi, terdapat analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan scorecard materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan. Pemeringkatan dilakukan untuk menentukan tingkat materialitas atas lini bisnis, peringkat perusahaan anak dan jaringan kantor.

   Selain itu terdapat analisis keterkaitan usaha eksternal didasarkan pada beberapa aspek, yaitu (1) *Intra-financial system assets,* (2) *Intra-financial system liabilities*, dan (3) securities outstanding serta analisis counterpart signifikan (Obligor, Deposan, *Treasury Counterparties*) sesuai dengan *common practice* yang ada. Kemudian dilakukan pula analisis skenario dampak perubahan BRI dengan melakukan *Stress Testing* yang dibagi dalam 3 (tiga) skenario yaitu *Idiosyncratic*, *Market-wide* dan kombinasi dari keduanya. Untuk skenario Idiosyncratic BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Untuk skenario *Market-wide*, BRI mengembangkan skenario stress test berdasarkan proyeksi isu makroekonomi ke depan. Sedangkan skenario kombinasi merupakan skenario terburuk yang berasal dari kombinasi *idiosyncratic* dan *market wide*.

   Berdasarkan hasil *Stress-Testing* tersebut, BRI kemudian menyusun dan menetapkan opsi pemulihan berdasarkan indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Selain itu, BRI juga menetapkan *trigger level* dari setiap indikator yang digunakan untuk mengaktivasi implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*). *Trigger level* tersebut diurutkan berdasarkan level pencegahan, pemulihan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14 POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Kemudian sebagai tambahan penerapan Rencana Resolusi, BRI juga telah menyusun strategi resolusi yang akan dilakukan oleh BRI dalam hal BRI ditetapkan sebagai Bank Gagal oleh LPS. Laporan Pengungkapan Rencana Aksi dan Rencana Resolusi BRI disampaikan kepada pihak internal dan eksternal dengan tingkat pengungkapan yang disesuaikan dengan masing-masing *targeted audience*.

3. **Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB)**
   Product owner wajib melakukan *self assessment* pada setiap rencana penerbitan Produk Bank Baru (PBB). Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dikoordinasikan oleh Operational Risk Division melakukan penilaian kecukupan pengelolaan risiko terhadap rencana penerbitan PBB. Pada penilaian tersebut, SKMR memastikan setiap risiko yang melekat pada rencana penerbitan PBB dan kontrol pengendalian telah teridentifikasi serta terukur dengan baik. Proses penilaian kecukupan pengelolaan risiko melibatkan SKMR sesuai dengan bidang risiko yang menjadi kewenangannya. Penilaian kecukupan pengelolaan risiko juga dilakukan atas rencana penyelenggaraan Kegiatan untuk aktivitas Bank sendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan Manajemen Risiko Bank.

   Kebijakan pengelolaan risiko atas rencana penerbitan PBB diatur dalam Surat Edaran No. 58-/DIR/ORD/11/2022 Buku 6 tentang Pengelolan Risiko Penyelenggaraan Produk. Penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari SKMR selanjutnya dipergunakan untuk proses pengelolaan produk Bank lebih lanjut, baik proses di internal bank maupun kepada Regulator sesuai POJK No.13/POJK.03/2021 mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

4. **Peningkatan Kapabilitas Regional Risk Management (RRM)**
Pembentukan organisasi *Regional Risk Management* (RRM) dilakukan untuk memperkuat implementasi Manajemen Risiko di tingkat Regional dalam rangka mewujudkan aspirasi manajemen risiko "*Managing Risk for Sustainable Business, Operational Excellent, and Banking Resilience*".

RRM di *Regional Office* berperan sebagai *control tower* yang menjaga kualitas *portfolio* dan operasional di tingkat Regional dan dipimpin oleh Pejabat setingkat Vice President (VP) yang disebut dengan RRM Head. Struktur organisasi RRM terdiri dari RRM Head yang mensupervisi *Credit Risk Analyst* (CRA) dan *Risk Management and Compliance* (RMC).

CRA berkedudukan di *Regional Office* menjalankan fungsi *credit risk management*, RMC berkedudukan di Regional *Office* mensupervisi *Branch Risk and Compliance* (BRC) dan BRI Unit *Risk and Compliance* (URC) yang berkedudukan di Kantor Cabang dan BRI Unit.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan peran RRM, selama tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

a. Pelaksanaan Webinar *Risk Upgrade Series*
b. Pelaksanaan program BSDP untuk CRA, RMC, BRC, dan URC
c. Pelaksanaan *Refreshment Strategic Initiative* BRIvolution 2.0 untuk RRM Head, RMC *Team Leader*, dan CRA *Team Leader*
d. Pengembangan *Key Risk Indicator Dashboard* (KRID)
e. Pelaksanaan *Quality Assurance* di seluruh RRM

BRC dan URC sebagai mitra Pemimpin Unit Kerja memiliki tugas utama untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional dan kepatuhan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja, pengendalian *fraud* dan human *error*, pelaksanaan BCM dan K3, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal di masing-masing unit kerja binaan.

5. **Implementasi Budaya Sadar Risiko**
Risk & Governance Culture merupakan landasan pelaksanaan tema budaya nasional BRI *One Culture* untuk memastikan penerapan manajemen risiko pada setiap aktivitas perbankan. Pada tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan Budaya Risiko melalui SE.04-DIR/CTR/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal *Corporate Culture* Buku 2 Budaya Risiko sebagai panduan bagi insan BRILiaN dalam mengimplementasikan dan mendukung penerapan Budaya Risiko.

Program internalisasi budaya risiko yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. *Culture Activation Program* (CAP)
Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI secara *prudent* melalui aktivitas yang telah ditetapkan pada CAP.
2. Membangun *Risk Awareness* Pekerja di Unit Kerja
SKMR secara rutin menyampaikan media *risk awareness* baik dalam bentuk surat, media infografis, webinar, *podcast*, *e-learning*, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms blast.
3. *Empowering Risk Officer*
Diperlukan keterlibatan *Risk Officer* sebagai Tim Penggerak Transformasi dalam menginternalisasi dan memastikan penerapan budaya risiko telah terlaksana. Sehingga dilakukan penguatan fungsi MR melalui penyesuaian operasional prosedur serta upgrading pengetahuan dan *technical skills* melalui pendidikan/ sosialisasi.
4. *Early Detection*
Penerapan budaya risiko perlu didukung oleh *tools Early Warning System* yang dapat membantu memitigasi maupun mengoreksi kejadian risiko secara lebih dini.
5. *Business Process Review*
Aktivitas budaya risiko tercermin melalui pelaksanaan operasional prosedur perbankan secara harian. Sehingga diperlukan reviu kecukupan kontrol atas operasional prosedur tersebut.

6. **Penerapan Strategi *Anti Fraud***
Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, serta sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris BRI yang tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) atas segala bentuk kejadian *fraud* baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal Bank, BRI melakukan penguatan pengendalian *fraud* yang diwujudkan melalui penerapan strategi *anti fraud*. Strategi *anti fraud* BRI terdiri dari:

1. Pilar 1 (Pencegahan)
Merupakan tanggung jawab dari seluruh jajaran Bank untuk meminimalkan potensi terjadinya *fraud* melalui penguatan kepedulian dan budaya anti *fraud* yang diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank yang meliputi jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh Insan BRILiaN minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Program yang diterapkan dalam pilar pencegahan meliputi: edukasi dan pengembangan kompetensi anti *fraud* bagi seluruh Pekerja, peningkatan *awareness* bagi Nasabah yang dilakukan secara berkala melalui platform sosial media Bank, identifikasi kerawanan pada aktivitas operasional dan/atau proses bisnis Bank, serta kebijakan mengenal pegawai.
2. Pilar 2 (Deteksi)
Merupakan tanggung jawab dari seluruh jajaran Bank untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi di lingkungan Bank. Perangkat yang digunakan untuk melakukan deteksi *fraud* meliputi: *Whistleblowing System*, *Fraud Detection System*, kegiatan pemeriksaan insidentil yang diprioritaskan pada unit atau aktivitas bisnis yang rawan, serta penerapan sistem pengawasan.

3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi)
   Kegiatan investigasi dilakukan oleh Fungsi Investigasi *Fraud* dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta Regulator, termasuk didalamnya rekomendasi penyelesaian kasus baik berupa penerapan sanksi disiplin dan/atau proses hukum sesuai dengan ketentuan internal Bank dan peraturan hukum yang berlaku.
4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut)
   Merupakan kegiatan *Monitoring* atas tindak lanjut dari hasil investigsi *fraud* serta upaya perbaikan sistem pengendalian internal untuk mencegah kejadian *fraud* yang sama terulang kembali. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan strategi *anti fraud*.

7. Penguatan Manajemen Risiko Digital

Seiring dengan perkembangan digitalisasi bisnis Bank, eksposur risiko dalam penggunaan platform digital untuk layanan perbankan turut meningkat. Peningkatan ekspsur risiko ini menuntut adanya proses pengendalian risiko digital yang lebih adaptif dan efektif bagi Bank sesuai dengan peningkatan resiliensi infrastruktur dan keandalan layanan digital Bank. BRI telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Digital sebagai dasar pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan penilaian kecukupan penerapan risiko digital di BRI, melalui perangkat manajemen risiko digital antara lain register risiko digital, *key risk indicator*, manajemen insiden, serta forum manajemen risiko digital. Saat ini, untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis Bank serta selaras dengan paparan risiko digital yang berpotensi meningkat akibat implementasi digitalisasi, BRI melakukan *enhancement* terhadap Integrated *Risk Management* (IRMS) untuk modul *Third Party Risk* sebagai kegiatan pengelolaan risiko pihak penyedia jasa TI. BRI juga memiliki inisiatif strategis lain, yaitu pengelolaan data histori untuk kuantifikasi proses penelolaan risiko digital. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, BRI bersama Perusahaan Anak memiliki Proyek *Revamp and Scale Up Adaptive Digital Risk Management Framework* sebagai langkah peningkatan value atas pengelolaan risiko digital pada BRI dan Perusahaan Anak.

8. Penerapan *Bussiness Continuity Management* (BCM) dan Sistem Manajemen K3

BRI menyadari dan mengetahui perannya dalam menyediakan produk dan jasa perbankan serta menjaga kelangsungan usahanya, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi terjadinya gangguan atau bencana. Hal ini mendorong BRI membuat kebijakan tertentu untuk mengidentifikasi, menguji, dan mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM) yang tertuang dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 serta Standar Operasional Prosedur No. SO.05a-ORD/05/2023. BCM merupakan proses yang kritikal bagi perusahaan guna mempertahankan kelangsungan operasional bisnis dan meminimalisasi dampak yang berpotensi muncul ketika terjadi bencana/krisis.

Selain itu, komitmen utama BRI terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa Pekerja dipenuhi dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk meminimalkan risiko operasional. Implementasi SMK3 di BRI dikoordinasikan oleh Departemen BCM dan K3 di *Operational Risk Division*, di bawah Direktorat Manajemen Risiko. Kebijakan SMK3 BRI diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE.50-DIR/MPE/12/2023 Buku 1 tentang *Business Continuity Management* (BCM) dan Buku 2 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan SOP Implementasi K3 yang diatur pada ketentuan No. SO.05-ORD/05/2023.

Selama Tahun 2022, BRI melaksanakan beberapa program implementasi BCM dan SMK3 yang terdiri dari: Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB), *Business Impact Analysis* (BIA), reviu dan pengkinian *Business Continuity Plan* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP), *Emergency Response Plan* (ERP), Penilaian risiko dan bahaya K3 untuk mengidentifikasi penyebab bahaya di tempat kerja atau Indikator *Hazard Identification Risk Assessment Determining Control* (HIRADC), sosialisasi dan pelatihan untuk *floor warden*, penyusunan materi *risk awareness* BCM dan K3 (Surat, Infografis, *Video*, *Podcast*, dan lainnya) serta melaksanakan kegiatan simulasi dan uji coba tanggap darurat di seluruh Regional *Office* dan Branch *Office* untuk memastikan pemahaman pekerja dalam menghadapi gangguan/bencana.

Selain hal tersebut, dalam rangka memastikan implementasi SMK3 di BRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka telah dilakukan sertifikasi implementasi SMK3 pada Agustus 2023. Berdasarkan hasil *Assessment* PT Multi Setifikasi Indonesia (MSI), BRI mendapatkan nilai 94.26% atau kriteria MEMUASKAN sehingga BRI sudah berhak mendapatkan SERTIFIKAT EMAS.

9. Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standar

Per-1 Januari 2023, BRI telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi:

a. perubahan bobot risiko dan jumlah bucket yang lebih granular.
b. klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam.
c. keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko

dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Dalam implementasi penerapan standar perhitungan baru tersebut, BRI telah mengembangkan sistem otomasi perhitungan baru terutama untuk klasifikasi aset pinjaman dan telah dilaporkan kepada OJK setiap bulan sejak posisi Januari 2023.

10. **Implementasi Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar sesuai Basel III (*Fundamental Review of The Trading Book*)**
    Dalam rangka penerapan SEOJK No.23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar, BRI melakukan implementasi perhitungan (sistem dan metodologi) ATMR Risiko Pasar dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mulai posisi Januari 2024. Laporan uji coba terkait implementasi telah dilakukan untuk Posisi Juni, September dan Desember 2023. Pembaruan peraturan terkait ATMR Risiko Pasar bertujuan untuk memperkuat kapital yang dimiliki bank, mengatasi kelemahan yang didapat dari *global* finansial *crisis* dan meminimalisir perbedaan model kapital yang dimiliki bank.

11. **Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar**
    SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum telah diterapkan mulai Januari 2023. BRI telah mengimplementasikan perhitungan ATMR Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang dilaporkan kepada OJK pada tanggal 31 Maret 2023. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal sebuah bank terhadap besaran eksposur risiko operasional selama satu tahun.

12. ***Credit Decision Engine & Credit Risk Model for Consumer Segment***
    Produk di segmen konsumer merupakan *mass product* yang membutuhkan proses *approval* cepat dan efektif, namun membutuhkan pengukuran tingkat risiko kegagalan kredit yang akurat. Untuk itu secara berkala dilakukan *review* terhadap proses *scoring* debitur berbasis risiko yang efektif baik pada tahapan *Credit Underwriting*, *Monitoring* kredit maupun *collection*, dengan *Application scoring*, *Behavior scoring* dan *Collection scoring*, yang dikelola secara terpusat pada *Credit Decision Engine* sehingga dapat dilakukan Monitoring dan validasi secara berkelanjutan.

13. **Pengembangan *Early Warning Signal* untuk Kredit Korporasi dan SME**
    Dalam rangka peningkatan pemantauan risiko kredit, BRI mengembangkan sistem *Early Warning System* (EWS). Sistem EWS dibangun dengan menggunakan indikator risiko secara internal dan secara makro serta menerapkan analisa *forward looking.* Pengembangan Sistem EWS ini diterapkan untuk segmen Korporasi dan SME. Sistem EWS berfungsi untuk menghasilkan sinyal (*warning*) yang digunakan oleh BRI sebagai acuan dalam menentukan tindakan yang perlu diambil dalam proses pengelolaan aset.

14. **Perubahan Kebijakan Kredit yang Direstrukturisasi Terdampak Covid-19**
    Penyebaran wabah Covid-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia yang berakibat pada penurunan kinerja dan kapasitas usaha debitur. Menyikapi hal tersebut, BRI melakukan beberapa perubahan kebijakan untuk kredit yang direstrukturisasi terdampak Covid-19 antara lain terkait penetapan kualitas kredit setelah restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi ulang, jangka waktu, keringanan tunggakan bunga, dan skema restrukturisasi. Adapun dalam pemberian relaksasi tersebut, BRI tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan kriteria selektif untuk debitur yang dapat menerima relaksasi restrukturisasi Covid-19.

15. **Pengembangan Metodologi Validasi Model Pemeringkatan Internal (*Credit Risk Rating dan Credit Risk Scoring*)**
    Berdasarkan *Basel Capital Accord* dan sesuai dengan persyaratan OJK, model internal harus memenuhi serangkaian kriteria minimal. Sejalan dengan ketentuan Basel dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. OJK juga mensyaratkan agar Bank memiliki proses internal yang kuat dalam melakukan validasi seluruh komponen dari model risiko kredit yang digunakan.

16. **Pengembangan *Real Time* Basis pada Proses Valuasi (*Marked to Market*) serta pengembangan automasi *VaR* dan *Backtesting* VaR pada aplikasi Guava**
    Berdasarkan Basel II, seluruh aset Treasury yang berada pada portofolio FVOCI dan FVTPL wajib dilakukan valuasi atau proses *mark to market* secara harian sebagai langkah untuk mitigasi risiko adanya risiko suku bunga dan risiko nilai tukar yang berdampak pada modal dan pendapatan laba rugi perusahaan. Mengingat pentingnya perhitungan dan informasi atas valuasi/MTM aset *Treasury* maka dilakukan pengembangan aplikasi agar diperoleh *market rate* secara otomatis *straight through processing* ke dalam aplikasi *Guava* sehingga perhitungan MTM/valuasi dan informasi menjadi lebih akurat, lebih cepat, dan meminimalisir risiko operasional yaitu *human error*.

Komite di Bawah Direksi

Direksi telah membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank. Per 31 Desember 2023, BRI memiliki 10 (sepuluh) Komite di bawah Direksi sebagai berikut:

1. *Asset and Liability Committee (ALCO)*
2. Risk Management and ESG Committee (RMC)
3. Komite Kredit
4. Komite *Capital & Investment*
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data
7. Komite Pengadaan Barang & Jasa
8. Komite *Human Capital*
9. Komite Produk
10. *Project Management Office Steering Committee*

Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

Piagam *Asset and Liability Committee* (ALCO)

Dalam melaksanakan tugasnya ALCO mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 1564-DIR/PPM/07/2023 tentang *Asset and Liability Committee* (ALCO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Tata Kerja serta Rapat ALCO Terbatas.

Tugas dan Tanggung Jawab *Asset and Liability Committee* (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset and liability* yang optimum dengan memperhatikan *potential risk, optimum yield generation* dan *cost efficiency.*
2. Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga produk pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), metodologi dan suku bunga *fund transfer price* (FTP) termasuk *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *net interest* income (NII). ALCO dapat memberikan kewenangan kepada pihak yang ditunjuk untuk menetapkan hal-hal dimaksud sesuai putusan ALCO.
3. Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga khusus simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
4. Menentukan kebijakan *Net Open Position* (NOP).
5. Memonitor bahwa pengelolaan *asset and liability* di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.

Struktur Keanggotaan *Asset and Liability Committee* (ALCO)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti I (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti II (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	√
Desk Head, Assets & Liabilities Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap dengan hak suara)	√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
• Direktur Bisnis *Wholesale* & Kelembagaan • Direktur Bisnis Kecil & Menengah • Direktur Bisnis Konsumer • Direktur Bisnis Mikro • Direktur Jaringan & Layanan • Direktur Digital & Teknologi Informasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Human Capital • SEVP *Treasury & Global Services Business* • SEVP Bisnis Komersial • SEVP Bisnis Ultra Mikro • SEVP Operations • SEVP *Strategi Human Capital* • SEVP *Change Management & Transformation Office* • SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan • *Division Head, Agribusiness* • *Division Head, Manufacturing & Property* • *Division Head, Institutional Business* • *Division Head, Energy & Mining* • *Division Head, Infrastructure, Transportation, Oil & Gas* • *Division Head, Syndication & FI Non-Bank* • *Division Head, Transaction Banking* • *Division Head, Treasury Business* • *Division Head, Investment Services* • *Division Head, International Business & Performance Management*	Anggota Tetap Dengan Hak Suara	√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
• *Division Head, Value Chain & Assets Product Development* • *Division Head, Small & Medium Sales Management 1* • *Division Head, Small & Medium Sales Management 2* • *Division Head, Card, Digital Lending, & Assets Product Development* • *Division Head, Consumer Sales Management 1* • *Division Head, Consumer Sales Management 2* • *Division Head, Wealth Management* • *Division Head, Micro Business Development* • *Division Head, Micro Sales Management* • *Division Head, Ultra Micro Business* • *Division Head, BRILink Business* • *Division Head, Social Entrepreneurship & Incubation* • *Division Head, Funding & Retail Payment Strategy* • *Division Head, Funding & Retail Payment Sales Management 1* • *Division Head, Funding & Retail Payment Sales*		√
Management 2 • *Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk* • *Division Head, Credit & Product Risk Policy* • *Division Head, Wholesale Credit Risk Analyst* • *Division Head, Credit Restructuring & Recovery* • *Division Head, Planning, Budgeting* • *Division Head, Financial & Management Accounting* • *Division Head, Subsidiary Management* • *Division Head, Investor Relation* • *Division Head, Change Management* • *Division Head, Project Management Office* • *Division Head, Credit Operation*		√

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Kepatuhan SEVP Internal Audit	Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	-
Assets & Liabilities Management Desk	*ALCO Supporting*	-

Profil Anggota *Asset and Liability Committee* (ALCO)

Profil anggota ALCO dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi *Asset and Liability Committee* (ALCO)

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi *Asset and Liability Committee* (ALCO) Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi ALCO dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas *Asset and Liability Committee* (ALCO) Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan *Asset and Liability Committee* (ALCO) menyelenggarakan Rapat ALCO untuk membahas pengelolaan *asset and liability* Perusahaan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan dalam hal:
   a. Perkembangan kinerja bank dan perbandingan peers.
   b. Komposisi dan pertumbuhan portofolio bank.
   c. Alokasi aset produktif, diversifikasi *funding*, dan *capital management*.
   d. Pengelolaan risiko antara lain risiko pasar dan risiko likuiditas.
   e. Suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), metodologi dan suku bunga *Fund Transfer Price* (FTP) termasuk *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *net interest income* (NII).
2. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti.
3. Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO diantaranya berupa:
   a. Mempersiapkan Rapat ALCO.
   b. Menyusun dan mempresentasikan materi Rapat ALCO.
   c. Memastikan Rapat ALCO dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO untuk dapat diselenggarakan.
   d. Menyusun dan mendistribusikan notulen Rapat ALCO.
4. Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO. Dalam hal Pemimpin Unit Kerja yang menjadi Anggota ALCO berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat Department Head.
5. Untuk efisiensi administrasi terkait perubahan organisasi, atas Anggota tambahan dapat diusulkan tersendiri kepada Ketua ALCO melalui Sekretaris ALCO dimana surat persetujuan usulan keanggotaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ALCO.
6. Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota ALCO, termasuk anggota Direksi yang salah satunya adalah Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti.
7. Sekretaris ALCO dapat mengundang peserta yang relevan untuk mengikuti ALCO sesuai dengan topik pembahasan di dalam ALCO.
8. Dalam hal kondisi yang sangat mendesak (*contingency*) untuk dilaksanakannya ALCO, namun Ketua dan/atau Ketua Pengganti berhalangan untuk memimpin rapat, maka Ketua ALCO dapat melakukan pendelegasian kepada salah salah Direktur untuk memimpin ALCO yang surat keputusannya disetujui oleh Ketua ALCO dan ditatakerjakan oleh Sekretaris ALCO.
9. Pelaksanaan ALCO UKLN (Unit Kerja Luar Negeri) mengacu pada SK tersendiri yang disusun oleh masing-masing UKLN mempertimbangkan beberapa hal seperti organisasi, strategi pengelolaan asset-liabilitas,dll yang dikoordinasi oleh Unit Kerja yang membidangi UKLN. Hasil pelaksanaan ALCO UKLN dilaporkan kepada Direktur dan Unit Kerja yang membidangi.

Rapat ALCO Terbatas

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO) secara insidentil dapat menyelenggarakan Rapat ALCO Terbatas untuk membahas pengelolaan *asset and liability* yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat *issue* khusus yang harus segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.
2. Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti dan Sekretaris ALCO berwenang menetapkan Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas di dalam suatu Surat undangan tersendiri.
3. Rapat ALCO Terbatas harus dihadiri oleh seluruh Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS *ASSET AND LIABILITY COMMITTEE* (ALCO) TAHUN 2023

Selama tahun 2023, ALCO telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun pembahasan rapat ALCO adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	Senin, 9 Januari 2023	• *Economic Update:* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
2	Rabu, 8 Februari 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
3	Kamis, 09 Maret 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
4	Senin, 10 April 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi *global* & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
5	Rabu, 10 Mei 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • Market Update Perkembangan harga saham BBRI
6	Senin, 12 Juni 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
7	Senin, 10 Juli 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
8	Rabu, 9 Agustus 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
9	Senin, 21 Agustus 2023 (ALCO Terbatas)	• Kondisi *Balance Sheet* & Likuiditas Kondisi B/S, *Update* , dan limit likuiditas terkini • *Balance Sheet Management* Strategi normalisasi likuiditas & evaluasi putusan ALCO dan Rapat Direksi • Akselerasi Pelayanan DHE Potensi DHE untuk mobilisasi simpanan valas dan penguasaan transaksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat
10	Kamis, 7 September 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • Market *Update* Perkembangan harga saham BBRI
11	Rabu, 11 Oktober 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
12	Kamis, 9 November 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI
13	Senin, 11 Desember 2023	• *Economic Update* *Update* terkait makro ekonomi global & domestik • *Balance Sheet Management* *Financial Performance, Liquidity & Market Risk, Profitability, and Recommendations* • *Market Update* Perkembangan harga saham BBRI

Risk Management dan *Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee*

Piagam *Risk Management* dan *Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee*

Dalam melaksanakan tugasnya *Risk Management dan Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee* mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 872-DIR/PPM/06/2022 tentang *Risk Management dan Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee* yang mengatur terkait Organisasi, Utusan dan Kehadiran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Profil Anggota *Risk Management* dan *Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee*

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi *Risk Management* dan *Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee*

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi *Risk Management* dan *Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee* Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Risk Management Committee

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee (RMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Menetapkan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
3. Menetapkan limit dan perubahannya.
4. Menetapkan Nilai Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta tindak lanjut apabila diperlukan.

Risk Management Committee Terintegrasi (RMCT) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.

2. Menetapkan langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam bentuk:
   a. Laporan profil risiko terintegrasi.
   b. Laporan profil risiko individual Perusahaan Anak anggota konglomerasi keuangan BRI.
   c. Analisis permodalan terintegrasi.
   d. Simulasi *stress testing* terintegrasi dan/atau individual serta *contingency plan.*

STRUKTUR KEANGGOTAAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee memiliki susunan pengurus dan anggota sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap Anggota tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	-
Tim Penunjang Komite		
Market, Portfolio & Enterprise Risk Division	*Risk Coordinator* Kredit, Pasar, Likuiditas dan Stratejik/Finansial	-
Operational Risk Division	*Risk Coordinator* risiko Operasional, Hukum, Kepatuhan dan Reputasi serta sebagai risk owner atas risiko operasional	-
Credit & Product Risk Policy Division	*Risk owner* risiko kredit	-
Digital Risk	*Risk Owner* risiko digital	-
Treasury Division	*Risk Owner* Risiko Pasar	-
Asset & Liability Management Desk	*Risk Owner* Risiko Likuiditas	-
Compliance Division	*Risk Owner* Risiko Kepatuhan	-
Satuan Kerja Audit Internal Kantor Pusat	Pemberi masukan atas evaluasi kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko	-
Legal Division	*Risk Owner* risiko hukum	-
Corporate Secretary Division	*Risk Owner* risiko reputasi	-
Service & Contact Center Division	*Risk Owner* risiko reputasi	-
Planning, Budgeting & Performance Management Division	*Risk Owner* risiko stratejik/ finansial	-

Risk Management Committee Terintegrasi (RMCT) memiliki susunan pengurus dan anggota sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap Anggota Tetap)	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Bank Raya	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Ventura	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Insurance	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Pegadaian	Anggota Tetap	-
Direktur Utama PNM	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Manajemen Investasi	Anggota Tetap	-

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur/SEVP yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko di Perusahaan Anak Anggota Konglomerasi Keuangan BRI	Anggota Tetap	-
Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	-
Tim Penunjang Komite		
Subsidiary Management Division	Pengelola dalam *Monitoring* risiko Perusahaan Anak	-
Satuan Kerja Manajemen Risiko BRI	MPE, ORD, KRD dan DRD sebagai *oversight function*	-
Satuan Kerja Audit Intern	Fungsi *independent assurance*	-

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS RISK MANAGEMENT COMMITTEE TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

1. Rapat RMC diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali per Triwulan. Rapat RMCT diselenggarakan berkala sekurangnya setiap 6 (enam) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat *issue* penting dan mendesak, antara lain:

a. Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran limit risiko internal, atau faktor lain.
b. Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari organisasi.
c. Terjadi kondisi *force majeur* yang disebabkan faktor alam, faktor manusia, gangguan eksternal, faktor disruptif lain.
d. Terdapat faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat RMC atau RMCT.

3. Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan di dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi dimaksud diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.
4. Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti.
5. Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Hasil keputusan pada Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) dapat dianulir oleh Direksi melalui Rapat Direksi.
8. Koordinasi penyelenggaraan Rapat *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) menjadi tanggung jawab Sekretaris *Risk Management Committee* (RMC) dan *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT).

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS RISK MANAGEMENT COMMITTEE TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat	
1	16 Januari 2023	RMC :	Profil Risiko TW IV 2022 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
2	27 Februari 2023	RMCT :	RAS Terintegrasi 2023 *Mandatory* Report MR Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil Risiko PA & Risk Issue PA *Risk Maturity Index*
3	24 Maret 2023	RMC :	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
4	17 April 2023	RMC :	Profil Risiko TW I 2023 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
5	15 Mei 2023	RMC :	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
6	15 Juni 2023	RMC :	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
7	26 Juli 2023	RMC :	Profil Risiko TW II 2023 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
8	16 Agustus 2023	RMCT :	*Monitoring* RAS Terintegrasi Mandatory Report MR Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil Risiko PA & *Risk Issue* PA *Risk Maturity Index*
9	27 September 2023	RMC :	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
10	17 Oktober 2023	RMC :	Profil Risiko TW III 2023 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
11	22 November 2023	RMC :	*Risk Appetite Statement* 2024 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*

Environmental, Social & Governance (ESG) *Committee*

Environmental, Social & Governance (ESG) *Committee* adalah Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan, implementasi, *Monitoring* dan evaluasi strategi, kebijakan, program/inisiatif ESG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE* (ESG) *COMMITTEE*

1. Melakukan *review* dan evaluasi terkait implementasi kebijakan atau tata kelola (*governance*) parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL yang telah disusun oleh Unit Kerja terkait yang kemudian diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
2. Menetapkan dan merekomendasikan program kerja (baik eksisting maupun baru) untuk dikategorikan sebagai inisiatif ESG dan inisiatif TJSL sesuai dengan parameter yang ada kepada ESG *Committee* maupun persetujuan sirkuler.
3. Melakukan *review* dan evaluasi terkait implementasi program kerja yang masuk ke dalam parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL serta pelaporan data dan informasi terkait ESG.
4. Melakukan *review* atas laporan ESG *Rating*, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI.
5. Merekomendasikan isu material yang didapat dari hasil review atas laporan ESG *Rating*, Investor *concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI.
6. Menetapkan rencana tindak lanjut atas hasil *review* dan evaluasi untuk kemudian dapat diusulkan menjadi program kerja baru yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.
7. Memberikan informasi terkini kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai seluruh isu yang terus berkembang terkait ESG dan TJSL, termasuk peraturan perundang-undangan, inisiatif global, praktek bisnis, serta informasi penting lain terkait ESG dan TJSL.

STRUKTUR KEANGGOTAAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE* (ESG) *COMMITTEE*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Environmental, Social & Governance atau Unit Kerja Pengelola ESG	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP *Change Management & Transformation Office*	Anggota Tetap	√
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS *ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE* (ESG) *COMMITTEE* TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisis sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Rapat Komite Bidang ESG diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat Komite Bidang ESG dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat *issue* penting dan mendesak, antara lain:
   a. Terjadi perubahan ESG Rating BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran terhadap kepatuhan dan kebijakan/*governance* ESG, atau faktor penyebab lainnya.
   b. Terjadi perubahan Regulasi terkait ESG yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari Perusahaan.
   c. Terdapat faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Bidang ESG.
3. Rapat Komite Bidang ESG dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti.
4. Rapat Komite Bidang ESG dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.

Keputusan rapat Komite Bidang ESG diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite Bidang ESG dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas *Environmental, Social & Governance* (ESG) *Committee* Tahun 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	Senin, 17 Juli 2023	• *Overview* Implementasi *Sustainability* BRI Tahun 2023 • *Disclosure to* BRI's *Website* • Penerbitan TCFD *Report* • *Sustainability Indicators*

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Piagam Komite Kredit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kredit mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: S.469-DIR/KRD/03/2022 beserta perubahannya tentang Komite Kredit yang mengatur terkait Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

1. Memberikan putusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk penetapan/perubahan struktur dan syarat kredit.
2. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
3. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau di luar asas-asas perkreditan yang sehat.
4. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit (atau media lain yang ditentukan oleh Direksi dan berfungsi sebagai putusan kredit) sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit.

Struktur Keanggotaan Komite Kredit

1. Sesuai dengan jenis kewenangan yang dimilikinya, Komite Kredit terbagi menjadi:
   a. Komite Kredit Non-Restrukturisasi, yaitu komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutus prakarsa kredit baru, perpanjangan, suplesi, perubahan syarat, dan putusan kredit lainnya bukan dalam rangka restukturisasi; dan
   b. Komite Kredit Restrukturisasi, yaitu komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutus prakarsa kredit dalam rangka restrukturisasi *performing loan* maupun *non-performing loan*, penyelesaian kredit, penghapusbukuan kredit, hapus tagih.
2. Masing-masing komite kredit terdiri dari jajaran fungsi *Risk* dan fungsi Bisnis.
3. Struktur dan anggota komite kredit sesuai dengan SE Kewenangan Memutus Kredit yang berlaku.
4. Masing-masing komite kredit tersebut berkedudukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Adapun struktur keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut.

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Fungsi	Hak Suara
Direktur Utama	Anggota Tetap	*Risk*	√
Wakil Direktur Utama	Anggota Tetap	*Risk*	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	*Risk*	√
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	*Risk*	√
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Anggota Tetap	*Risk*	√
Direktur *Human Capital*	Anggota Tetap	*Risk*	√
SEVP *Change Management & Transformation Office*	Anggota Tetap	*Risk*	√
SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan	Anggota Tetap	*Risk*	√
SEVP *Operations*	Anggota Tetap	*Risk*	√
SEVP Strategi Human Capital	Anggota Tetap	*Risk*	√
Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur Bisnis Mikro	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur Bisnis Konsumer	Anggota Tetap	Bisnis	√
Direktur Jaringan dan Layanan	Anggota Tetap	Bisnis	√
SEVP Bisnis Komersial	Anggota Tetap	Bisnis	√
SEVP *Treasury & Global Services Business*	Anggota Tetap	Bisnis	√
SEVP Bisnis Ultra Mikro	Anggota Tetap	Bisnis	√

Profil Anggota Komite Kredit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Kredit

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Kredit Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Rapat Komite Kredit sah apabila dihadiri oleh sekurangnya anggota Komite Kredit sesuai susunan Komite Kredit pada ketentuan PDWK, baik dari jumlah dan komposisi dari jajaran fungsi Risk maupun fungsi Bisnis serta anggota Komite Kredit yang mandatory wajib hadir.
2. Rapat Komite Kredit dapat dilaksanakan secara fisik, maupun dengan cara konferensi melalui sarana media elektronik yang disepakati oleh setiap anggota Komite Kredit yang ikut serta.
3. Sekretaris Komite Kredit bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Rapat Komite Kredit (RKK) seperti waktu dan tempat pelaksanaan termasuk mendokumentasikan/ menyusun Berita Acara RKK dan penyediaan Risalah RKK.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2023

Bulan	Tanggal	Pelaksanaan RKK (Kali)	Jumlah Putusan	Agenda	Kuorum Kehadiran & Putusan
Januari	25, 31	2	10	Pembahasan dan pemberian putusan kredit segmen korporasi	Kuorum
Februari	7, 28	2	11		Kuorum
Maret	7, 14, 21	3	21		Kuorum
April	4, 11, 18	3	27		Kuorum
Mei	3, 9, 15, 23, 29	5	27		Kuorum
Juni	6, 13, 20, 27	4	26		Kuorum
Juli	11, 18, 25	3	16		Kuorum
Agustus	8, 9, 22, 29	4	18		Kuorum
September	5, 12, 18, 19, 26	5	14		Kuorum
Oktober	3, 4, 10, 17, 23, 30, 31	7	22		Kuorum
November	21, 28	2	18		Kuorum
Desember	5, 12, 19, 28	4	28		Kuorum
TOTAL		44	238		

Komite *Capital & Investment*

Komite Capital & Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Capital & Investment*

Tugas dan tanggung jawab *Capital & Investment Committee*, berdasarkan pada Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nokep: 871 -DIR/ PPM/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang *Capital & Investment Committee* adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan *Corporate Action*
   a. Melakukan *review* atas *Corporate Action* yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
   b. Menetapkan dan merekomendasikan langkah korporasi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui Rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.

2. Terkait Pengelolaan Perusahaan Anak:
    1. Menetapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak, termasuk *Key Performance Indicator* dan rencana dividen Perusahaan Anak;
    2. Melakukan *review* kinerja dan menetapkan langkah – langkah perbaikan kinerja bersama Direksi Perusahaan Anak;
    3. Mengevaluasi dan merekomendasikan *Corporate Action* Perusahaan Anak BRI (Initial Publik *Offering*, penawaran umum terbatas, akuisisi, merger, tambahan modal dan rencana divestasi) untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama / Wakil Direktur Utama baik melalui Rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.
    4. Menetapkan putusan apabila terjadi *deadlock* inisiatif sinergi Perusahaan Anak dengan BRI yang bersifat strategis.

Struktur Keanggotaan Komite *Capital & Investment*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
Division Head, Subsidiary Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
Direktur atau SEVP Pembina Bisnis Perusahaan Ana	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP terkait	Anggota tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	–

Profil Anggota Komite *Capital & Investment*

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite *Capital & Investment*

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite *Capital & Investment* Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite *Capital & Investment* Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
3. Komite menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali per Triwulan untuk membahas usulan, kajian dan analisa yang berasal dari Tim Penunjang Komite.
4. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti. Rapat hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti
6. Ketua Komite memimpin Rapat Komite *Capital & Investment* dan mempunyai hak suara.
7. Sekretaris Komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan Rapat Komite *Capital & Investment*, berupa antara lain:
    a. Mempersiapkan agenda, jadwal dan tempat rapat.
    b. Menyusun Risalah Rapat.
    c. memantau implementasi putusan rapat
8. Rekomendasi danlatau putusan Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua dan seluruh anggota Komite. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka rekomendasi danlatau putusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
5. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *CAPITAL & INVESTMENT* TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite *Capital & Investment* telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	Kamis, 08 Juni 2023	*Performance Review* TW I 2023 & Revisi KPI BRINS 2023
2.	Kamis, 08 Juni 2023	*Performance Review* TW I 2023 & Revisi KPI BRILIFE 2023
3.	Selasa, 27 Juni 2023	Rencana Pengalihan Portofolio New Business Model Bank Raya
4.	Senin, 24 Juli 2023	Pembahasan *Project* Blossom (Pengembangan Perusahaan Anak yang Bergerak di Bidang Multifinance).
5.	Rabu, 2 Agustus 2023	*Performance Review* Q2 2023 BRI Finance
6.	Rabu, 2 Agustus 2023	*Performance Review* Q2 2023 BRI Insurance
7.	Rabu, 20 September 2023	Penataan PA PT Pegadaian
8.	Senin,09 Oktober 2023	*Parenting Style* Tata Kelola Terintegrasi BRI Group
9	Jumat, 27 Oktober 2023	Rencana Bisnis 2024 - 2026, RKAP 2024, dan KPI BRI Finance 2024
10.	Jumat, 27 Oktober 2023	Rencana Bisnis 2024 - 2026, RKAP 2024, dan KPI BVI 2024
11.	Jumat, 27 Oktober 2023	Rencana Bisnis 2024 - 2026, RKAP 2024, dan KPI BRINS 2024

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan BRI dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Piagam Komite Kebijakan Perkreditan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 655-DIR/PPM/10/2021 tentang Komite Kebijakan Perkreditan (KPP) yang mengatur terkait Organisasi, Utusan dan Kehadiran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) OJK.
2. Mengawasi penerapan KPB dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penuh kesinambungan serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
3. Melakukan *review* berkala KPB BRI minimal 3 tahun sekali.
4. Melakukan evaluasi terhadap:
   a. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana.
   b. Kebenaran menjalankan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu.
   c. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
   d. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
   e. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
   f. Kecukupan penyisihan cadangan kerugian karena penurunan nilai kredit (CKPN) dan cadangan penghapusbukuan.
   g. Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar Kredit Dalam Perhatian Khusus.
5. Melakukan kajian penilaian efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
6. Menyampaikan laporan berkala minimal 1 tahun sekali dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan/tindasan kepada Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
   b. Hasil evaluasi pada poin 4.
7. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Credit & Product Risk Policy atau Unit Kerja yang Mengelola Fungsi Kebijakan Kredit	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-
Division Head di bawah Direktur Manajemen Risiko terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	-
Division Head/Desk Head lainnya, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	-

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Kebijakan Perkreditan

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Perubahan atau revisi KPB wajib dibahas terlebih dahulu di dalam rapat. KKP wajib melakukan rapat pembahasan final Draft perubahan atau revisi KPB sebelum diteruskan untuk mendapat putusan Direksi.
2. Rapat KKP dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan, perubahan, revisi KPB maupun terkait isu penting dan mendesak yang memerlukan tanggapan cepat dan segera dari Perusahaan.
3. Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam KKP maka Unit Kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris KKP untuk melakukan Rapat KKP.
4. Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua KKP. Dalam hal Ketua KKP berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini.
5. Rapat KKP kuorum bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti.
6. Terhadap setiap perubahan isi KPB BRI yang tidak bersifat materiil, agar dapat dilakukan secara sirkuler ke seluruh Direktur dan untuk selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota KKP.

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah bila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang hadir ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	6 April 2023	- Pemaparan Group Limit - Pemaparan Kebijakan Restrukturisasi Covid-19 pasca 31 Maret 2023
2	28 Agustus 2023	- Penambahan Jajaran *Risk* & Bisnis dalam KK Direksi - Penambahan Daftar Penerima PDWK KK Direksi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional teknologi informasi.

PIAGAM KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 870-DIR/PPM/06/2022 tentang *Information Technology Steering Committee* dan Data *Governance Committee* yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan di dalam ITSP BRI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan ITSP BRI.
4. Kesesuaian arsitektur teknologi saat ini (*baseline*) dengan target arsitektur Teknologi Informasi BRI dalam mendukung kapabilitas bisnis.
5. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
6. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
7. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
8. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja

Pengguna dan Penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Digital & Teknologi Informasi	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
Department Head, IT Governance Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
• Direktur Manajemen Risiko • SEVP, Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan • *Division Head, IT Strategy & Governance* • *Division Head, Enterprise Data Management* • *Division Head, Application Management & Operation* • *Division Head, Digital Banking Development & Operation* • *Division Head, IT Infrastructure & Operation* • *Division Head, Information Security* • *Division Head, Operational Risk* • *Division Head, Digital Risk* • *Division Head, Distribution Network* • *Division Head, Service & Contact Center*	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP BIdang Terkait; atau *Division Head* Bidang Terkait	Anggota tidak tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala setidaknya 3 (tiga) kali per tahun
2. Rapat Komite dipimpin oleh Direktur Digital & Teknologi Informasi. Dalam hal Direktur Digital & Teknologi Informasi berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 pada Surat Keputusan ini.
3. Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite
4. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite (baik tetap maupun tidak tetap) yang hadir ditambah 1 (satu) suara Anggota Komite
5. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data menjadi tanggungjawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
   a. Mempersiapkan dan mengundang rapat
   b. Mempersiapkan dan mempresentasikan materi rapat
   c. Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi
   d. Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait
6. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	03 April 2023	*Application Performance* Rencana untuk peningkatan kapasitas *host core banking system* *Collaboration tools*
2	09 Oktober 2023	Persetujuan upgrade terhadap *operating system* mesin AS/400

No.	Tanggal	Agenda Rapat
3	27 Desember 2023	IT *Strategic Plan Review* 2023 IT *Resilience Strategy* IT *Demand & Budget Posture* FY2024

Komite Tata Kelola Data

Komite Tata Kelola Data adalah suatu forum yang memberikan arahan terkait data *governance*, serta memberikan putusan terkait dengan *leading issue* pada data yang tidak dapat diselesaikan di level *Data Owners* dan Data *Stewards* maupun di level Data *Management Office*.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA DATA

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Data mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 870-DIR/PPM/06/2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) dan Komite Tata Kelola Data yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA DATA

Komite Tata Kelola Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan data seluruh *stakeholder* BRI.
2. Proteksi terhadap data sebagai aset strategis Perusahaan.
3. Pelaksanaan kebijakan dan standar data untuk menegakkan kerangka kerja proses data managemen yang baik, dan kualitas data secara *enterprise*.
4. Perlindungan aspek privasi dan kerahasiaan data Nasabah dan Perusahaan.
5. Perlindungan dari akses data yang ilegal, manipulasi data serta penggunaan data dan informasi yang tidak sesuai.
6. Penggunaan data secara efektif serta mendatangkan *value* bagi Perusahaan
7. *Leading issue* pada data yang tidak dapat diselesaikan di level *Data Owner* dan Data *Steward* maupun di level *Data Management Function.*

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA DATA

Organisasi Komite Tata Kelola Data terdiri dari:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara *Voting*
Direktur Digital & Teknologi Informasi	Ketua	√
Direktur Jaringan & Layanan	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
Department Head, Data Strategy & Governance	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
Direktur Keuangan *Division Head, Enterprise Data Management*	Anggota Tetap	√
Direksi atau SEVP Bidang terkait	Anggota tidak tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA DATA

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA DATA

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA DATA TAHUN 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA DATA TAHUN 2023

Kebijakan Rapat

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala setidaknya 3 (tiga) kali per tahun
2. Rapat Komite dipimpin oleh Direktur Digital & Teknologi Informasi. Dalam hal Direktur Digital & Teknologi Informasi berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 pada Surat Keputusan ini.
3. Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite
4. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite (baik tetap maupun tidak tetap) yang hadir ditambah 1 (satu) suara Anggota Komite

5. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
   0. Mempersiapkan dan mengundang rapat
   a. Mempersiapkan dan mempresentasikan materi rapat
   b. Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi
   c. Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait
6. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Realisasi dan Rapat Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Data Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Data telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tanggal	Agenda
1	29 November 2023	*Update* matrix *stewardship data domain party reference*

Komite *Human Capital*

Komite *Human Capital* merupakan Komite di Kantor Pusat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang *Human Capital* dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi di dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan human capital serta meningkatkan kualitas pengelolaan human capital berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Organisasi Komite Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdiri dari:
1. Bidang *Human Capital Planning & Policy*
2. Bidang *Talent*
3. Bidang *Performance Management*
4. Bidang *Ethics & Discipline*
5. Bidang *Job Evaluation*

Piagam Komite *Human Capital*

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Human Capital mengacu SK Direksi SK Direksi BRI Nokep: 603-DIR/PPM/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Human Capital Committee PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Ruang Lingkup, dan Tata Kerja.

Profil Anggota Komite *Human Capital*

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite *Human Capital*

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Human Capital Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite *Human Capital* dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Human Capital dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
2. Seluruh Anggota Komite *Human Capital* memiliki tugas dan tanggung jawab yang sarna.
3. Penyelenggaraan rapat Komite *Human Capital* menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite yaitu yang antara lain:
   - Mempersiapkan agenda rapat;
   - Mempresentasikan materi rapat;
   - Menyusun Risalah Rapat;
   - Menindaklanjuti danlatau meneruskan hasil rapat kepada Unit Kerja yang terkait sesuai kebutuhan.
4. Apabila terdapat *issue* penting dan mendesak yang membutuhkan jalan keluar dan/atau sikap dari Komite *Human Capital* maka Unit Kerja yang terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite melakukan Rapat Komite *Human Capital*.
5. Rapat memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti.
6. Keputusan Komite *Human Capital* ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Anggota yang hadir. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Komite *Human Capital* dinyatakan sah dan mengikat apabila 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite memberikan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Dalam hal Pengurus atau Anggota Komite terdapat Direksi maka Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti dan Direktur Human Capital memberikan suara setuju.
   - Dalam hal Pengurus atau Anggota Komite tidak terdapat Direksi maka Ketua Komite memberikan suara setuju
7. Persetujuan Komite dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite yang hadir.
8. Dalam hal rapat Komite Human Capital tidak dapat diselenggarakan maka Komite *Human Capital* dapat

mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
9. Apabila diperlukan maka Komite *Human Capital* dapat menghadirkan Pihak Lain yang terkait sebagai narasumber.
10. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Komite *Human Capital* Bidang *Human Capital Planning & Policy*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *HUMAN CAPITAL PLANNING & POLICY*

1. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas *human capital* BRI dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* BRI.
2. Menetapkan kebijakan strategis, manajemen karier dan *corporate culture* dibidang *human capital*.
3. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *HUMAN CAPITAL PLANNING & POLICY*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (Merangkap anggota tetap)	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
Division Head Human Capital yang membidangi Kebijakan terkait	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	√
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	√
1. Direksi atau SEVP Bidang terkait 2. *Division Head*, fungsi *Human Capital Strategy* 3. *Division Head*, fungsi *Human Capital Development* 4. *Division Head*, fungsi *Human Capital Business Partner* 5. *Division Head, Corporate Culture* 6. *Division Head*, fungsi *Learning*	Anggota tidak tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *HUMAN CAPITAL PLANNING & POLICY* TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	1 Februari 2023	Usulan Pembayaran Bonus Pool Tahun 2022
2.	3 April 2023	*Strategic Workface Planning*
3.	8 Mei 2023	Usulan *Salary Incrase* Pekerja BRI
4.	5 Juni 2023	*Evaluasi Corporate Title*
5.	12 Juni 2023	*Human Capital Strategic Issues & Responses*
6.	3 November 2023	Penetapan Remunerasi Komisaris Perusahaan Anak
7.	21 November 2023	Rejuvinasi Ketentuan Pekerja Kinerja Tidak Cakap

Komite *Human Capital* Bidang *Talent*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *TALENT*

1. Penetapan mutasi pekerja, termasuk penetapan kepengurusan Perusahaan Anak dan Terafiliasi.
2. Penetapan *Talent Cluster*, termasuk identifikasi dan penetapan *top talent*.
3. Penetapan *Succession Plan* untuk seluruh jabatan.
4. Penetapan *Talent Pool* berdasarkan bidang keahlian Pekerja.
5. Melakukan *Talent Review*.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG TALENT

Bidang *Talent* 1 (untuk Pekerja dengan *Corporate Title Senior Executive Vice President, Executive Vice President, Senior Vice President, Vice President* dan Pemimpin Cabang Kelas I termasuk Pekerja yang akan ditugaskan sebagai Direktur Perusahaan Anak)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	√
1. Seluruh Direktur (*Talent Committee* 1 untuk Pekerja *Level Senior Excecutive Vice President*) 2. Seluruh Direktur dan SEVP (*Talent Committee* 1 untuk Pekerja *Level Executive Vice President*, Senior Vice President termasuk Pekerja yang akan ditugaskan sebagai Direktur Perusahaan Anak) 3. Direktur *Human Capital* dan Direktur atau SEVP sesuai Bidang/ Pembina yang akan melepas dan yang dituju oleh talent sesuai pembahasan Komite (Talent Committee 1 untuk Pekerja *Level Vice President* dan Pemimpin Cabang Kelas I)	Anggota Tetap	√

Bidang Talent 2 (untuk Pekerja level dengan *Corporate Title Assistant Vice President* dan *Senior Manager*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur *Human Capital*	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Human Capital Business Partner	Sekretaris	√
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/ Pembina yang akan melepas dan yang dituju oleh *talent* sesuai pembahasan Komite	Anggota Tetap	√

Bidang *Talent* 3 (untuk Pekerja dengan *Corporate Title Manager*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Division Head, Human Capital Business Partner	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	√
Team Leader, Human Capital Business Partner yang membidangi Pengelolaan *Talent*	Sekretaris	√
Department Head, Human Capital Business Partner yang membidangi Pengelolaan *Talent*	Anggota Tetap	√

Bidang *Talent* 4 (untuk Pekerja level jabatan dengan *Corporate Title Assistant Manager, Officer*, dan *Assistant* di Unit Kerja Divisi/ *Regional Office*/ KCK/ *Regional Audit Office* dan Supervisinya)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Division Head/Regional CEO/ Pemimpin Cabang Khusus/Regional Audit Head	Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	√
Human Capital Business Partner Regional Kantor Pusat	Sekretaris	-
Department Head/ Regional Head/ Regional Assurance Head sesuai Bidang/ Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *TALENT* TAHUN 2023

Talent Committee	Rapat yang telah dilaksanakan
Talent Committee 1	26 kali
Talent Committee 2	40 kali
Talent Committee 3	126 kali
Talent Committee 4	740 kali

Komite *Human Capital* Bidang *Performance Management*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *PERFORMANCE MANAGEMENT*

1. Menetapkan KPI Direktorat, Unit Kerja 1 *Level* di bawah BOD (termasuk *Regional Office*), Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
2. Mengevaluasi tantangan kinerja unit kerja 1 *Level* di bawah BOD (termasuk Kantor Wilayah).
3. Mengevaluasi Orientasi *Leader* Pemimpin Unit Kerja 1 *Level* di bawah BOD (termasuk Kantor Wilayah) dan *Department Head* di Kantor Pusat.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *PERFORMANCE MANAGEMENT*

Sub Bidang *Planning* 1 (untuk KPI Direktorat, Sub-Direktorat, Regional *Office*, Kantor Cabang, KCP dan BRI Unit)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
Division Head Planning, Budgeting, & Performance Management Division	Sekretaris (Merangkap anggota Tetap)	-
Seluruh Direktur atau SEVP	Anggota Tetap	√

Sedangkan Sub Bidang *Planning* 2 (Untuk KPI Divisi/*Desk*/*Team* BOD-1) diketuai oleh Direktur Keuangan dengan Hak Suara.

Sub Bidang Evaluasi terdiri dari:
Sub Bidang *Challenge Evaluation and method Used* 1 (untuk Kinerja Regional *Office*, Regional Audit *Office* dan Divisi/*Desk*/*Team* BOD-1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (Merangkap anggota tetap)	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	-
1. *Division Head Planning, Budgeting, & Performance Management Division* 2. *Division Head Human Capital Strategy & Policy Division*	Sekretaris (Merangkap anggota Tetap)	√
Seluruh Direktur atau SEVP	Anggota Tetap	√

Sedangkan Sub Bidang *Challenge Evaluation and Method Used* 2 (Untuk Kinerja Kanca) diketuai oleh CEO.

Sub Bidang *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Individu 1 (Untuk *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Pemimpin Unit Kerja BOD-1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (Merangkap anggota tetap)	√
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	√
1. *Division Head Human Capital Strategy & Policy* 2. *Division Head, Planning, Budgeting & Performance Management*	Sekretaris (merangkap anggota Tetap tanpa Hak Suara)	-
Seluruh Direktur atau SEVP	Anggota Tetap	√

Sub Bidang *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Individu 2 (Untuk *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Pekerja *Corporate Bank* 2) Diketuai oleh Direktur atau SEVP Bidang, sedangkan Sub Bidang *leadership Orientation* & Predikat Kinerja Individu 3 (Untuk *Leadership Orientation* & Predikat Kinerja Pemimpin Cabang) diketuai oleh Regional CEO.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *PERFORMANCE MANAGEMENT* TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	6 Februari 2023	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Band 1 Tahun 2022
2.	7 – 9 Februari 2023	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Band 2 Tahun 2022
3.	7 – 10 Februari 2023	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Pembantu Tahun 2022

Komite *Human Capital* Bidang *Ethics & Discipline*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *ETHICS & DISCIPLINE*

Memutus kasus Pelanggaran Disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa menurut cara atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Disiplin yang berlaku.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *ETHICS & DISCIPLINE*

Komite *Ethics & Discipline* 1 untuk Pekerja level jabatan *Corporate Band* 1 dan *Corporate Band* 2 dengan *Corporate Title : Executive Vice President, Senior Vice President* dan *Vice President*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua (merangkap anggota tetap)	-
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (merangkap anggota tetap)	-
Division Head, Human Capital Business Partner	Sekretaris	-
Direktur *Human Capital* Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	√
Direktur atau SEVP terkait	Anggota Tidak Tetap	√

Komite *Ethics & Discipline* 2 untuk Pekerja level jabatan *Corporate Band* 3 dengan *Corporate Title Assistant Vice President* dan *Senior Manager*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Human Capital	Ketua (merangkap anggota tetap)	-
Division Head, Human Capital Business Partner atau Pejabat lain setingkat Band 1 yang di tunjuk	Ketua Pengganti	-
1. Direktur/SEVP Bidang Terkait 2. Direktur/SEVP Pembina	Anggota Tetap	√

Komite *Ethics & Discipline* 3 untuk Pekerja level jabatan *Corporate Band* 5 sampai dengan *Corporate Band* 7 dengan *Corporate Title Manager, Assistant Manager, Officer dan Assistant*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Division Head Human Capital Business Partner, Regional CEO, Pemimpin Cabang Khusus, Regional Audit Head	Ketua (merangkap anggota tetap)	-
Department Head Human Capital Business Partner Division, Department Head Regional Human capital Business Partner atau Pejabat lain yang ditunjuk/ membidangi *Human capital*	Sekretaris	-
1. *Division Head* bidang terkait, *Regional Banking Head* terkait, Wakil Audit Intern Wilayah 2. *Division Head* Pekerja Ybs, Regional *Operation Head, Department Head Human Capital Business Partner Division*	Anggota Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *ETHICS & DISCIPLINE* TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	30 Januari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
2	7 Februari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
3	15 Februari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
4	28 Februari 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
5	02 Maret 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
6	6 Maret 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
7	17 Maret 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
8	13 April 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
9	12 April 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
10	10 Mei 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
11	11 Mei 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
12	16 Mei 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
13	27 Juni 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
14	5 Juli 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
15	17 Juli 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
16	3 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
17	4 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
18	6 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
19	16 Agustus 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
20	15 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
21	21 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
22	27 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
23	29 September 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
24	2 November 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
25	13 November 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
26	23 November 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
27	14 Desember 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
28	21 Desember 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin
29	29 Desember 2023	Putusan Komite Etik & Disiplin

Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *JOB EVALUATION*

Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan Golongan Jabatan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *JOB EVALUATION*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur *Human Capital*	Ketua Pengganti	√
Department Head, Organization Development, Planning, Budgeting & Performance Management Division	Sekretaris	-
1. *Direktur Manajemen Risiko* 2. *Division Head, Planning, Budgeting & Performance Management* 3. *Division Head, Human capital Strategy & Policy*	Anggota Tetap	√

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* BIDANG *JOB EVALUATION* TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Februari 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation Transaction Banking Division*
2.	08 Maret 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation Institutional Business Division*
3.	09 Maret 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 1
4.	10 April 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 2
5.	14 April 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 3
6.	04 Mei 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* Dalam Rangka Penyesuaian Job Grade Divisi Bisnis Korporasi dan Divisi *Treasury Business*
7.	19 Mei 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* dalam rangka implementasi perubahan organisasi Desember 2022 Tahap 4
8.	16 Juni 2023	*Komite Human Capital Bidang Job Evaluation Small Business Head* dan Pemimpin Cabang Area Metro
9.	15 Agustus 2023	Komite *Human Capital Bidang Job Evaluation* dalam rangka implementasi perubahan organisasi Agustus 2023
10.	13 November 2023	Komite *Human Capital* Bidang *Job Evaluation* untuk Organisasi Regional *Micro Banking* dan Kantor Cabang Khusus

Komite Produk

Komite Produk adalah komite di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan produk dan jasa *existing*, penghentian produk dan jasa *existing*, memutus produk dan jasa *bundling* di atas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan jasa.

Piagam Komite Produk

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Produk mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 213-DIR/CDS/06/2021 tentang Komite Produk yang mengatur terkait Organisasi, dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1. Memberikan putusan atas usul pengembangan produk/jasa baru atau pengembangan produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
2. Memberikan putusan atas penghentian produk/jasa yang sudah berjalan, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
3. Memberikan putusan atas produk dan/atau jasa bundling, diatas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan/atau jasa.

Struktur Keanggotaan Komite Produk

Komite Produk 1 Segmen *Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Layanan 3. DIrektur Digital & Teknologi Informasi 3. *SEVP Operation* 4. *SEVP Change Management & Transformation Office*	Anggota Tetap	√
1. Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN* 2. *SEVP Treasury & Global Services** 3. SEVP Bisnis Korporasi	Anggota Tidak Tetap	√
Direktur Kepatuhan SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 1 Segmen Non *Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Jaringan & Layanan 3. DIrektur Digital & Teknologi Informasi 4. *SEVP Operation* 5. *SEVP Change Management & Transformation Office*	Anggota Tetap	√
1. Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN* 2. SEVP *Treasury & Global* Services* 3. SEVP Bisnis Korporasi	Anggota Tidak Tetap	√
4. Direktur Kepatuhan 5. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 2 Segmen Wholesale

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
1. Direktur Kelembagaan & BUMN* 2. Direktur Digital & Teknologi Informasi 3. Direktur Jaringan & Layanan 4. SEVP Bisnis Korporasi 5. SEVP *Treasury & Global Services** 6. SEVP *Operation* 7. SEVP *Change Management & Transformation Office*	Anggota Tidak Tetap	√
1. Direktur Kepatuhan 2. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 2 Segmen Non *Wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Keuangan	Ketua	√
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	√
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
1. Direktur Bisnis Mikro 2. Direktur Bisnis Konsumer 3. Direktur Bisnis Kecil & Menengah* 4. Direktur Jaringan dan Layanan 5. Direktur Digital & Teknologi Informasi 6. SEVP *Operation* 7. SEVP *Change Management & Transformation Office*	Anggota Tidak Tetap	√
1. Direktur Kepatuhan 2. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Profil Anggota Komite Produk

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Produk

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Produk Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Produk Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Rapat Komite Produk diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
2. Rapat di luar rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
   - Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
   - Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan respon dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
   - Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Produk.
3. Rapat Komite Produk dipimpin oleh Ketua Komite Produk.
4. Dalam hal Anggota Komite Produk berhalangan, maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Produk dimaksud digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai Surat Keputusan yang berlaku. Direktur Pengganti memiliki dua kapasitas dalam Komite Produk yakni selaku Direktur Pengganti dan selaku Anggota Komite Produk dalam melakukan keputusan.
5. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh Anggota dengan Hak Suara dengan kriteria sebagai berikut:

No	Komite Produk	Syarat Kehadiran
1	Komite Produk 1	Minimal 3 (tiga) Anggota Dengan Hak Suara
2	Komite Produk 2	Minimal 2 (dua) Anggota Dengan Hak Suara

* Dari Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur

6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang memiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Produk menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite.
8. Dalam hal rapat Komite Produk tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Produk dapat mengambil keputusan melalui

Nota Dinas Sirkuler dengan Persetujuan Ketua Komite dan Anggota Komita Lainnya. Proses pengambilan keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler ditatakerjakan oleh Sekretaris Komite Produk.

9. Risalah Rapat Komite Produk ditandatangani oleh Sekretaris Komite Produk serta Ketua Komite Produk, dan disampaikan kepada Seluruh Direksil SEVP dan Unit Kerja di Kantor Pusat BRI yang terkait dengan putusan Komite Produk dimaksud.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK TAHUN 2023

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Februari 2023	Evaluasi *Rollout* Tahap 1 dan Permohonan Rollout Selindo Kupedes s.d. Rp *500* Juta
2	2 Maret 2023	1. Usulan Integrasi Fitur Agen Gadai di BRILink Mobile 2. *Update* Penutupan Internet *Banking Web*
3	30 Maret 2023	1. *Update Progress* Tindak Lanjut Komite Produk 2. Evaluasi Produk Tabungan 3. Usulan Kredit Talangan (Fitur Talangan Hari Sama & Talangan Khusus)*
4	27 Juni 2023	Sabrina 3.0
5	24 Juli 2023	1. *Update* Progress Tindak Lanjut Komite Produk 2. Usulan Pengembangan Fitur Investasi Emas di BRImo 3. Usulan Pengembangan BRImo Epayment
6	20 November 2023	*Debit Contactless*
7	22 November 2023	1. *Review* Produk Ceria (CDD). 2. Laporan Monitoring Evaluasi Produk (LMEP) 2023 dan Daftar Rencana Pengembangan Produk Bank (RPPB) 2024.

Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pengadaan Barang dan Jasa adalah komite di Kantor Pusat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

Piagam Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 656-DIR/PPM/10/2021 tentang Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa

1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, objektif, akuntabel dan seksama.
2. Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian persetujuan pengadaan.
3. Mengevaluasi, memberi masukan atas usul pengadaan yang diajukan.
4. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya dalam hal diselenggarakan melalui rapat Komite.
5. Memberikan putusan pengadaan, melalui:
   a. Risalah Rapat Direksi, atau
   b. Risalah Rapat Komite Pengadaan, atau
   c. Nota Dinas Sirkuler.

Struktur Keanggotaan Komite Pengadaan Barang & Jasa

KOMITE PENGADAAN I (NILAI PENGADAAN > RP.200 MILIAR)

Struktur Keanggotaan[1]	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User[2]	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur/SEVP terkait[3]	Anggota Tidak Tetap	√

KOMITE PENGADAAN II (NILAI PENGADAAN > RP.100 MILIAR SD. RP.200 MILIAR)

Struktur Keanggotaan[1]	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	√
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	√

Struktur Keanggotaan[1]	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User[2]	Anggota Tetap	√
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP terkait[3]	Anggota Tidak Tetap	√

KOMITE PENGADAAN III (NILAI PENGADAAN > RP 30 MILIAR SD. RP.100 MILIAR)

Struktur Keanggotaan[1]	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Ketua	√
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP User[2]	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP terkait[3]	Anggota Tidak Tetap	√

KOMITE PENGADAAN IV (NILAI PENGADAAN > RP.7,5 MILIAR SD. RP.30 MILIAR)

Struktur Keanggotaan[1]	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Ketua	√
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur/SEVP User[2]	Anggota Tetap	√
Direktur/SEVP terkait[3]	Anggota Tidak Tetap	√

Keterangan:
1) Dalam kedudukannya sendiri maupun selaku pejabat pengganti
2) Dalam hal Direktur Kepatuhan atau SEVP yang membidangi Audit Intern bertindak sebagai User, maka pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan adalah Direktur Manajemen Risiko
3) Direktur atau SEVP Bidang/Pembina Unit Kerja terkait sesuai dengan jenis objek pengadaan.

Profil Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Pengadaan Barang & Jasa

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Keputusan Komite Pengadaan diambil dalam rapat Komite Pengadaan. Rapat Komite Pengadaan dilaksanakan di Kantor Pusat atau tempat lainnya dengan fasilitator Unit Kerja Pengadaan yang terkait.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara unanimous dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan hak suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.
3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak di dalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Dalam hal rapat Komite Pengadaan tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Pengadaan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa sudah diputus oleh Direksi melalui Rapat Direksi, maka putusan dimaksud dipersamakan dengan putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan Risalah Rapat Direksi.
6. Tugas dan tanggung jawab fasilitator untuk rapat Komite Pengadaan dilaksanakan oleh Sekretaris Komite Pengadaan antara lain:
   a. Mengkoordinasikan persiapan materi rapat Komite.
   b. Mempersiapkan agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
   c. Melaksanakan fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.

d. Membuat Risalah Rapat dan Berita Acara Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
e. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja terkait.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023

Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan (Rp,-)	Jumlah Pengadaan
Komite Pengadaan I	1.809.170.116.000	3
Komite Pengadaan II	789.692.437.000	6
Komite Pengadaan III	2.235.127.346.395	43
Komite Pengadaan IV	2.660.121.741.828	168

Project *Management Office Steering Committee*

Project *Management Office Steering Committee* adalah komite di Kantor Pusat. Unit Kerja yang bertugas melakukan kajian dan penetapan aturan serta *Monitoring* terhadap tahap tahap proyek mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi terhadap pengelolaan proyek strategi berdasarkan kriteria tertentu, serta memberikan dukungan terhadap proses,sistem dan sumber daya manusia yang menjalankan proyek strategik dimaksud.

Piagam *Project Management Office Steering Committee*

Dalam melaksanakan tugasnya *Project Management Office Steering Committee* mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: B.869-DIR/PPM/06/2022 tentang *Project Management Office Steering Committee* yang mengatur terkait Organisasi, dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab *Project Management Office Steering Committee*

1. Memberikan arahan di tingkat korporat terhadap strategi proyek-proyek di BRI.
2. Mengambil keputusan atas usul penyelesaian masalah dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputuskan oleh *Division Head, Project Management Office.*
3. Mengambil keputusan terhadap usul re-alokasi anggaran antar proyek yang tercantum di dalam Rencana Kerja Proyek dan selanjutnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Pelaksanaan *Project Management* (PP PM).
5. Menyetujui dan mengesahkan proyek yang diusulkan setelah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mendapat persetujuan.
6. Memberi arahan dan putusan terkait akselerasi penyelesaian proyek.
7. Menetapkan kriteria untuk proyek yang dimonitor *Project Management Office (PMO).*
8. Memutuskan proyek-proyek yang masuk dan yang dikeluarkan dari *Monitoring* PMO.
9. Menetapkan prioritisasi proyek untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemilik Proyek dan Unit Kerja Pendukung Proyek.
10. Memberikan keputusan terkait dengan proyek, diantaranya menyetujui, mengubah atau membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.
11. Memberikan arahan terhadap hasil *Post Implementation Review* (PIR) yang sudah dilaksanakan sebagai bagian dari *lessons learned* dalam pelaksanaan proyek selanjutnya.

Struktur Keanggotaan *Project Management Office Steering Committee*

Struktur Keanggotaan	Jabatan
Direktur Utama/Wakil Direktur	Ketua
SEVP CMT (merangkap sebagai Anggota Tetap dengan Hak Suara)	Ketua Pengganti
Division Head PMO (merangkap sebagai Anggota Tetap tanpa Hak Suara)	Sekretaris
1. Direktur Digital & Teknologi Informasi 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Jaringan & Layanan	Anggota Tetap dengan Hak Suara
1. Direktur atau SEVP bidang Pemilik Proyek 2. Direktur atau SEVP Pendukung Proyek 3. Pemimpin Unit Kerja Pemilik Proyek 4. Pemimpin Unit Kerja Pendukung Proyek	Anggota Tidak Tetap

Profil Anggota *Project Management Office Steering Committee*

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi *Project Management Office Steering Committee*

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi *Project Management Office Steering Committee* Tahun 2023

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas *Project Management Office Steering Committee* Tahun 2023

KEBIJAKAN RAPAT

1. Rapat PMO SC diadakan berkala sekurangnya 3 (tiga) kali per tahun.
2. Rapat di luar dari rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Terdapat perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan perubahan secara cepat dan segera terkait pelaksanaan proyek atau penghentian proyek.
   b. Terdapat perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan secara cepat dan segera dari organisasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek atau penghentian proyek.
   c. Terdapat kondisi yang mendorong dilakukannya Rapat PMO SC.
3. Rapat PMO SC dipimpin oleh Direktur Utama/Wakil Direktur Utama sebagai Ketua PMO SC. Apabila Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama berhalangan hadir maka posisi di rapat sebagai Ketua PMO SC dapat digantikan oleh Ketua Pengganti.
4. Kehadiran Anggota dengan Hak Suara di dalam Rapat PMO SC tidak dapat diwakilkan. Apabila Anggota dengan Hak Suara berhalangan hadir maka posisinya rapat dapat digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rapat PMO SC dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite serta dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota dengan Hak Suara. Dari 3 (tiga) Anggota Komite dengan Hak Suara yang hadir tersebut minimal terdapat 1 (satu) orang Direktur.
6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Keputusan di dalam rapat PMO SC didokumentasikan pada Risalah PMO SC.
8. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Komite antara lain:
   a. Mengkoordinasikan Persiapan materi rapat Komite.
   b. Mempersiapkan Agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
   c. Melaksanakan Fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.
   d. Membuat Risalah Rapat Komite dan Berita Acara.
   e. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindak-lanjuti Unit Kerja yang terkait.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS *PROJECT MANAGEMENT OFFICE STEERING COMMITTEE* TAHUN 2023

Selama tahun 2023, *Project Management Office Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	Kamis, 06 April 2023	1. *Portfolio Highlights* 2. *Moonshot Update* 3. *Brivolution 2.0 Value Tracking* 4. Penetapan Komitmen dan Putusan oleh seluruh Anggota PMO SC yang hadir.
2	Kamis, 23 November 2023	Pemaparan materi Preventive Action Bisnis dan Operasional Penetapan Komitmen dan Putusan oleh seluruh Anggota PMO SC yang hadir
3	Senin, 27 November 2023	1. *Strategic Initiative Portfolio - update* Oktober 2023 2. *Transformation Effectiveness Assessment* 3. *Post Implementation Review* 4. *Update Progress* : Migrasi NIK sebagai NPWP Penetapan Komitmen dan Putusan oleh seluruh Anggota PMO SC yang hadir.

Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada Sub Judul Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Lapoan Tahunan ini.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

1. Latar belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi
   Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
2. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.
   Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharuinya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan. Pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan mengenai Penyesuaian Ketentuan Internal terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana KPI Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.

   Dalam mendukung aspirasi BRI untuk membangun *Performance Driven Culture*, implementasi sistem remunerasi BRI dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasannya dengan pencapaian kinerja unit kerja dan individu yang berbasis KPI. Penyusunan KPI tersebut dilaksanakan melalui penurunan sasaran kinerja (*cascading*) baik secara penuh, parsial maupun kontributif sehingga sasaran kinerja unit kerja binaan akan berbeda namun mendukung pencapaian sasaran kinerja unit kerja kontrol. Selain itu guna memastikan objektivitas penilaian maka evaluasi kinerja unit kerja di BRI juga dilaksanakan secara berjenjang melalui *Performance Management Committee* oleh unit kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya penilaian kinerja individu akan disesuaikan dengan pencapain kinerja individu maupun unit kerja yang akhirnya akan berdampak pada besarnya remunerasi yang didapatkan.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang Yang Berlokasi di Luar Negeri

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perseroan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perseroan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak. Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan Person *Grade* dan/ atau *Job Grade* Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah *midpoint* (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menangguhkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel. Dalam pembayaran tantiem atau insentif kinerja terdapat sejumlah nominal yang ditangguhkan dan nominal tersebut dapat dilakukan malus atau *clawback* apabila terdaapt peringkat risiko pada triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran tantiem atau insentif kinerja yang ditangguhkan dengan peringkat risiko 4 (*moderate to high*) atau lebih buruk.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

1. Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja.
   Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perseroan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.
2. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.
   Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja,besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.
3. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.
   Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

1. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan
   Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/ BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/ KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
   b. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.
2. Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus)
   Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:
   a. Terbukti adanya *Individual Fraud*.
   b. *Restatement* laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variable.
   c. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perseroan adalah kompetitif secara eksternal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan *Willis Towers Watson* yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris*	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	367.512	11	140.065
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimilik	12	16.714	11	12.560
Total	**12**	**384.227**	**11**	**152.625**

* Termasuk Sdr. Hadiyanto yang diberhentikan dengan hormat sesuai keputusan RUPST BRI Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan Dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris**
Di atas Rp2 miliar	12	10
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan:
* yang diterima secara tunai
** Termasuk Sdr. Hadiyanto yang diberhentikan dengan hormat sesuai keputusan RUPST BRI Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

1. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel.
   Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
   a. Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.
   b. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:
      - Insentif Jangka Pendek.
        Insentif Jangka Pendek merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun kepada Tenaga Pemasar. Insentif Jangka Pendek bertujuan untuk mendorong motivasi Tenaga Pemasar, memberikan *reward* secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.

- Bonus.
  Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.

2. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja).
   a. BRI menerapkan konsep Kelompok Jabatan, yang terdiri dari *Support*, Bisnis, Pembina Pemasar, dan Pembina Pemasar. Pemberian remunerasi bersifat variabel akan berbeda antara kelompok jabatan, yang menyesuaikan dengan besaran konstanta per kelompok jabatan dimaksud.
   b. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
      - Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
      - Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
      - Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris*		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	12	306.949	11	117.069	77.007	5.819.797

* Termasuk Sdr. Hadiyanto yang diberhentikan dengan hormat sesuai keputusan RUPST BRI Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2023.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang ditetapkan berdasarkan jumlah manajemen pada periode tahun laporan adalah sebagai berikut:

1. Direksi (12 orang)
2. Dewan Komisaris (10 orang)
3. *Senior Executive Vice President* (SEVP) (7 orang)

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan/Nama		Jumlah Saham Yang Dimiliki (lembar saham) Yang Diberikan (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Vested
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi*		-	-	-	-	-
Dewan Komisaris*		-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	Achmad Royadi	290.400	290.400	290.400	2.240	30/11/2021
	Triswahju Herlina	290.400	290.400	290.400	2.240	30/11/2021
Total		**580.800**	**580.800**	**580.800**	**2.240**	

* Direksi dan Dewan Komisaris tidak memperoleh *share option*.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2023	2022
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	66,2	47,14
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18	1,25
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,16	2,36

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Belum terdapat pemberian kompensasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	80
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	757
Rp500 juta ke bawah	708

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan	
		Tunai (Rp Juta Nett)	Saham (lembar saham)
1	SEVP	2.405	-
2	Dewan Komisaris	12.676*	1.197.600**
3	Direksi	-	14.522.365

* Untuk Komisaris Independen
** Untuk Komisaris Non Independen

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan	
		Tunai dalam Juta Rupiah (*Unlock*) 2023	Lembar Saham (Unlock) 2023
1	SEVP	845	-
2	Dewan Komisaris	1.822*	280.400**
3	Direksi	-	4.304.601

* Untuk Komisaris Independen
** Untuk Komisaris Non Independen

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)	
1. Tunai	Rp 77.086
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp381.617	Rp7.936
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank **	-	Rp34.465

Keterangan:
*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	12.413	-	-	-

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	11.154.964 lembar saham	-	-	-
Jumlah				

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dilaksanakan dalam bentuk *Long Term Insentif* (LTI) dan kepemilikan saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen. Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan* (MSOP).

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Untuk meningkatkan engagement pekerja dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan dan untuk memberikan motivasi/ insentif jangka panjang agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI juga memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Pekerja BRI yang diberikan secara periodik, yaitu:

a. *Employee Stock Allocation* (ESA)
   Program kepemilikan saham dalam bentuk *Stock Allocation* Program diberikan pada Tahun 2016 dan 2020 melalui 4 Tahap, kepada seluruh level Pekerja yang memenuhi kriteria yang terdiri dari masa kerja, kinerja individu, dan *track record* pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya.

b. *Employee Stock Option Plan* (ESOP)
   Program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan harga khusus yang diberikan di Tahun 2020. Program ini diberikan kepada para Pekerja Level tertentu yang termasuk *Top Talent* BRI dan memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential*.

Sebagai komitmen Perusahaan untuk meningkatkan *engagement*, produktivitas, dan menciptakan *sense of ownership* Pekerja terhadap Perusahaan, maka Perusahaan akan melakukan implementasi program kepemilikan saham untuk Pekerja yang serupa di tahun depan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Program	Jumlah Lembar Saham (Tahun 2021)	Penambahan pada Tahun 2023*
ESA 1	589.800	21.100
ESA 2	1.554.300	32.300
ESA 3	268.953.200	33.900
ESA 4	283.113.000	414.300
ESA Khusus	30.720.900	-
ESOP 1	72.029.200	-
ESOP 2	76.896.900	-
Discretionary Pool	674.600	-

* Pemberian ESA atau Penambahan saham Tahun 2023 sebagai lanjutan dari Program Sebelumnya

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu *vesting period* atau periode dimana hak Pekerja atas saham masih tergantung pada persyaratan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program	Vesting Period
ESA 1	Vesting 1 1 Januari 2017 – 31 Januari 2018 (Berlaku untuk seluruh Corporate Title)
	Vesting 2 1 Januari 2019 – 31 Januari 2019 (Hanya berlaku untuk Corporate Title VP, EVP & SEVP)
ESA 2	2 Januari 2020 s.d 31 Januari 2020
ESA 3	2 Januari 2020 s.d 31 Maret 2021
ESA 4	2 Januari 2020 s.d 31 Desember 2021
ESOP 1	15 Mei 2020 – 31 Oktober 2020
ESOP 2	15 Mei 2020 – 31 Mei 2021
ESA 2023	2 Januari – 31 Desember 2024

Persyaratan Pekerja dan/atau Manajemen yang Berhak

Program pemberian sejumlah saham Perseroan berupa ESA diberikan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan *grant* dan *vesting program*, seperti salah satunya memenuhi masa kerja minimum, tercapainya kinerja Perusahaan dan kinerja Individu pada periode yang ditentukan, serta *track record* Pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya. Sementara untuk program kepemilikan saham Pekerja lainnya yang diberikan dalam bentuk pemberian hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan, yakni berupa ESOP, ditujukan kepada Pekerja yang termasuk ke dalam kategori *High Potential Talent & Value Creator* BRI yakni yang memenuhi kriteria *performance maupun Capacity/ Potential*.

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Pada program *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) yang diberikan BRI kepada Pekerja yang memenuhi syarat, akan ditetapkan harga perolehan saham pada waktu tertentu, yakni untuk program ESA 1 sebesar Rp3.630 per lembar saham, ESA 2, 3, dan 4 sebesar Rp4.410,- per lembar saham, ESOP sebesar Rp2.240,- per lembar saham.

Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik

Prosedur pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

1. Proses pengadaan jasa audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan.
2. Komite Audit bertugas sebagai Koordinator Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS ,dan Tim Pengadaan serta bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan pengadaan jasa audit KAP kepada Dewan Komisaris.
3. Metode pengadaan jasa audit KAP dilakukan dengan Metode Seleksi Langsung berpedoman kepada ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, *Fee* dan Izin KAP

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, *Fee* dan Izin KAP

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit*	Izin AP
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 8	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 4	Rp15.922.000.000	AP.1681
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 7	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 3	Rp13.925.000.000	AP.1681
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 2	Rp13.715.296.000	AP.1681
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 1	Rp15.523.800.000	AP.1681
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 3	Rp10.700.000.000	AP.1008
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 3	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 2	Rp8.200.000.000	AP.1008
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja	Periode ke 2	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 1	Rp7.300.000.000	AP.1008

* *Fee* sudah termasuk OPE, PPN 11%, dan pajak-pajak lainnya

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Fee jasa lain yang diberikan akuntan sebesar Rp950.000.000. Adapun jasa non audit yang diberikan yaitu:

a. Prosedur yang disepakati atas perhitungan pencapaian KPI Direksi (kolegial dan individual), posisi 31 Desember 2023
b. Prosedur yang disepakati atas data yang dikirim BRI untuk Kompilasi Laporan keuangan Kementerian BUMN tahun buku 2023
c. Prosedur yang disepakati atas ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk pendanaan usaha mikro kecil tahun buku 2023 (apabila diperlukan)

Opini Audit

Tahun	Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
2023	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sistem Pengendalian Internal

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain 1st *line* (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), 2nd *line* (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, Jajaran Kepatuhan, *Branch Risk Compliance* dan Unit *Risk Compliance*), dan 3rd *line* (Jajaran SKAI).

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan aktif melakukan pengawasan dan membentuk budaya pengendalian di perusahaan.

1. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
2. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun implementasi dari pengawasan oleh manajemen, diantaranya:

1. BRI telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris ikut berperan dalam menetapkan tingkat toleransi risiko perusahaan.
2. BRI memiliki struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. BRI telah memiliki arsitektur kebijakan yang di dalamnya terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional.
4. Melakukan *Monitoring* terhadap perbaikan temuan audit internal dan eksternal.
5. Melaksanakan komunikasi pada seluruh jenjang organisasi secara berkala, termasuk komunikasi antara Direksi dan Komisaris.
6. Pemantauan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
7. Pelaksanaan Kaji Ulang Sistem Pengendalian Intern.

Direksi dan Dewan Komisaris menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pengendalian intern. Adapun implementasinya meliputi:

1. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh pekerja, antara lain melalui:
   a. Aplikasi BRIPEDIA
   b. Aplikasi BRISHARE
   c. Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS
2. Kebijakan terkait Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI, Kebijakan GCG BRI, Kode Etik BRI, Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, *rekruitmen*, pengembangan & pelatihan, remunerasi, manajemen kinerja dan hukuman disiplin.
4. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

BRI secara periodik dan berkelanjutan melakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Penilaian risiko juga dilakukan oleh jajaran audit internal dalam pelaksanaan kegiatan audit melalui *risk based* audit. Identifikasi dan penilaian risiko secara lebih rinci disampaikan pada BAB Manajemen Risiko. Pengendalian intern dilaksanakan kaji ulang oleh SKAI setiap tahunnya melalui kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Pengendalian Keuangan dan Operasional)

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi BRI.

KAJI ULANG MANAJEMEN (*TOP LEVEL REVIEW*)

BRI secara berkala setiap tahunnya melaksanakan top *level review* terkait Strategi *Anti Fraud*. Hasil kaji ulang tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terkait pilar penerapan strategi *anti fraud* perusahaan sehingga dapat mendeteksi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

KAJI ULANG OPERASIONAL (*FUNCTIONAL REVIEW*)

Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan *assurance* dan pemberian jasa konsultansi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindasan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh Auditee. Selain pelaksanaan kegiatan audit, secara berkala SKAI BRI telah melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko dan penerapan Strategi *Anti Fraud*.

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik-praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:

1. Hasil penilaian risiko.
2. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penanganan risiko.
3. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
4. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
   a. Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
   b. Pengendalian intern yang efektif yang dapat memitigasi risiko dalam proses TI.
   c. Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
   d. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas Disaster Recovery Plan.
   e. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
   f. Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi.
   g. Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan melakukan alih daya (*outsourcing*) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
   h. Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

PENGENDALIAN ASET FISIK

Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik (KATALOG). KATALOG memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

DOKUMENTASI

Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut di-Update secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen juga dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

PEMISAHAN FUNGSI (*SEGREGATION OF DUTIES*)

Pemisahan dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional. Implementasinya meliputi:

1. Penerapan fungsi *Dual Control* dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
2. Penetapan kewenangan limit dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
3. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
4. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.

PENGENDALIAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Fungsi Kepatuhan. Tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, tanggung jawab Fungsi Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, Monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum termasuk melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, secara berkala Fungsi Kepatuhan memiliki program kerja penilaian efektivitas budaya kepatuhan. BRI telah memiliki parameter pengukuran efektivitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.

Penilaian terhadap kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh Direksi secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara per semester juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan memuat informasi yang cukup menyeluruh antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, program pengendalian gratifikasi, program APU-PPT, dan lainnya.

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pekerja. Implementasinya meliputi:

1. Sistem akuntansi telah didukung dengan penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi. Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perseroan dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material.
2. BRI memiliki sistem informasi yang memadai diantaranya BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), *Loan Approval System* (LAS) yang merupakan sistem informasi meliputi kegiatan usaha Bank di bidang perkreditan, aplikasi BRIOPRA yang merupakan sistem informasi terkait manajemen risiko, aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA), Sistem Informasi *Human Capital* BRISTARS, dll.
3. BRI telah memiliki *Disaster Recovery Plan* dan sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Secara berkala dilakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efektif.
4. Sistem Komunikasi dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* baik pihak ekstern maupun intern dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif.
   a. BRI telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang berisikan pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
   b. Tersedia media komunikasi untuk sosialisasi kebijakan kepada seluruh pekerja (BRISHARE, BRIPEDIA dan Pustaka SDM).
   c. Pelaksanaan forum komunikasi (informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja) terkait informasi eksposur risiko, kinerja operasional, dan strategi perusahaan seperti Forum *Risk Management Committee*, *Business Performance Review*, *Support Performance Review*, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, *Focus Group Discussion* dan Forum Peningkatan Kinerja.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

BRI secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pengendalian intern baik yang dilakukan oleh unit kerja operasional maupun jajaran Satuan Kerja Audit Intern. SKAI telah melaksanakan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern yang disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission* (COSO)

BRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan COSO Internal Control Framework *yaitu Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring.*

Internal Environment

Elemen pertama dari struktur pengendalian intern BRI mencakup komitmen, kebijakan, perilaku termasuk kepedulian Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Dewan Komisaris BRI memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern melalui pertemuan berkala secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja. Dalam melakukan pengawasan, manajemen BRI membentuk budaya pengendalian meliputi:

1. Pembentukan struktur organisasi BRI yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, *recruitment*, pengembangan dan pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam core value BRI dan Kode Etik BRI yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance.*

Risk Assessment

Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pekerja BRI terhadap budaya sadar risiko meliputi tindakan evaluasi, menilai dan memitigasi risiko. Penjelasan lebih rinci terkait Sistem pengendalian internal terhadap seluruh jenis risiko Bank disampaikan pada pilar 4 Bab Manajemen Risiko. BRI melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko kredit
   Penilaian dilakukan dengan internal model menggunakan model *standart* yaitu menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing – masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitasnya. Selain itu, serangkaian *stress test* juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi *stress*.
2. Risiko pasar
   Dilakukan penilaian secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan menghitung risiko pasar meliputi pendekatan dengan metode standar dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA dan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil *maturity* surat berharga. Pendekatan dengan metode standar dilakukan dengan melakukan perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas
   Identifikasi, pengukuran dan pemantauan dilakukan melalui *dashboard* profil likuiditas harian sedangkan pengendalian dilakukan melalui *protocol liquidity contigency plan*. Penilaian risiko likuiditas meliputi penilaian rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, NSFR dan LCR, penetapan limit risiko likuiditas dan *stress test*.
4. Risiko Operasional
   Menilai risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum
   Meliputi penilaian terhadap risiko yang disebabkan adanya kelemahan yuridis meliputi tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.
6. Risiko Stratejik
   Penilaian meliputi penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif pada bank terhadap perubahan eksternal.
7. Risiko Reputasi
   Meliputi risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Pengukuran bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan risiko reputasi yang dihadapi BRI. Penilaian meliputi parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank dan frekuensi serta materialitas pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.
8. Risiko Kepatuhan
   Merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap parameter jenis, signifikansi, nominal dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
9. Risiko Asuransi
   Menilai risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
10. Risiko Transaksi Intra Group
    Menilai risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas

lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Selain melakukan penilaian risiko secara berkala, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Control Activities

Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di BRI. Aktivitas pengendalian dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bentuk aktivitas pengendalian BRI antara lain:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja BRI di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian BRI tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur BRI seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BRI. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
   a. Penerapan fungsi MCS (*maker, checker, signer*) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
   b. Penerapan *segregation of duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
   c. Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
   d. Penerapan *three line* untuk aktivitas pertahanan berlapis.
2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
   a. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
   b. Kegiatan pengendalian pada penerapan Manajemen Risiko, meliputi:
      – Pengendalian risiko kredit meliputi prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur meminimalkan kerugian kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur penghapus bukuan kredit bermasalah.
      – Pengendalian risiko pasar meliputi penyusunan desain manajemen risiko pasar, menyusun dan menganalisa laporan berkala atas *output* yang dihasilkan model internal seperti analisa laporan harian posisi devisa netto, laporan eksposur risiko pasar, pelaksanaan forum *Market Risk Management Committee* dan forum *Asset & Liability Committe* (ALCO).
      – Pengendalian risiko likuiditas meliputi *Protocol Liquidity Contigency Plan*.
      – Pengendalian risiko operasional meliputi prosedur asesmen produk, *Protocol Liquidity Contigency Plan* untuk kejadian yang bersifat katastrofik.
      – Pengendalian risiko hukum dengan melakukan telaah terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru.
      – Pengendalian risiko strategik tertuang pada kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang, Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
      – Pengendalian risiko reputasi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI mengenai Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
      – Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap regulasi eksternal dan dilakukan analisa dampak bagi perusahaan untuk selanjutnya dituangkan pada setiap ketentuan internal perusahaan.
      – Pengendalian risiko asuransi sebagai bagian dari risiko yang melekat pada BRI sebagai entitas utama yang membawahi perusahaan anak yang bergerak pada bidang asuransi adalah melalui pelaksanaan Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak.
      – Pengendalian risiko intra grup dilaksanakan oleh *Desk Subsidiary* yang ditunjuk oleh manajemen sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Information & Communication

BRI telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Monitoring

Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. *Monitoring* sistem pengendalian intern BRI dilakukan melalui *Three line of defence*, yaitu:

1. *1st line* selaku risk owner yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (antara lain Unit Kerja Operasional).
2. *2nd line* yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (antara lain Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kebijakan & Prosedur).
3. *3rd line* yaitu Unit Kerja yang melakukan *assurance*. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas *Monitoring* sistem pengendalian intern.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan *Monitoring* SKAI terhadap sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggungjawab memastikan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) yang handal dan efektif serta berkewajiban meningkatkan dan memastikan budaya sadar risiko melekat di setiap jenjang organisasi. SKAI bertanggungjawab melaksanakan evaluasi kecukupan, efektivitas dan efisiensi SPI serta berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BRI. SKAI melaksanakan evaluasi SPI melalui kegiatan pemeriksaan dan review secara periodik di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi SKAI disampaikan kepada Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait. Dewan Komisaris khususnya Komite Audit turut berperan aktif dalam mengevaluasi SPI dengan melakukan telaah terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan SKAI. Hasil evaluasi selama tahun 2023 menunjukkan bahwa SPI di BRI telah berjalan secara memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa pada tahun 2023 sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan TELAH MEMADAI dalam mengidentifikasi risiko, sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan terjadi/dihadapi perusahaan. Ke Depan, Perusahaan agar senantiasa memperhatikan, me*review* dan melakukan penyempurnaan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan.

Manajemen Risiko

BRI melakukan pengelolaan risiko secara proaktif dan prudent pada setiap proses bisnis dan operasional untuk mencapai *profitability* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditentukan. BRI berkomitmen dalam menjalankan manajemen risiko yang baik dengan memiliki kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan teknologi pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko Bank BRI senantiasa berjalan efektif dan efisien.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

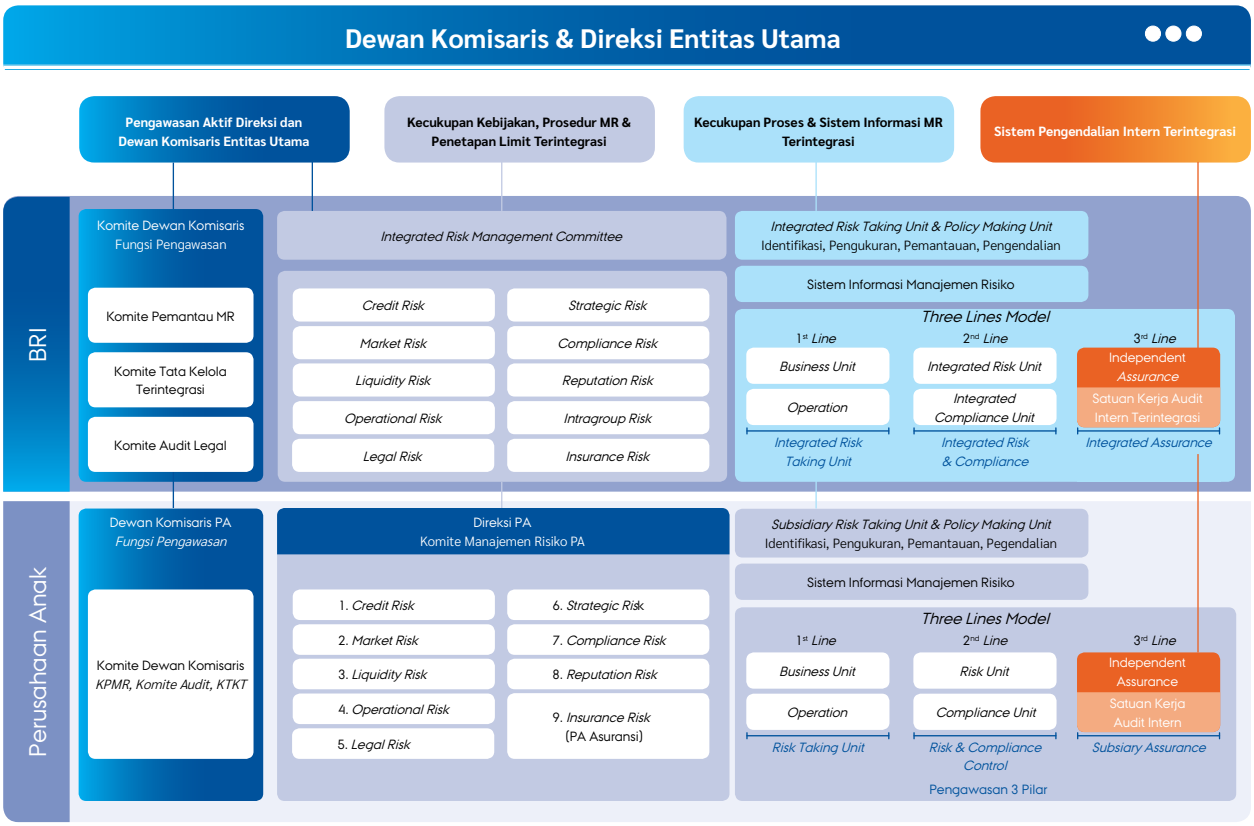
Dasar penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana diubah terkahir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.03/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK/03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.03/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko.
19. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: KB.03 DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kerangka Kerja dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko BRI yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko dalam operasional dan bisnis yang meliputi seluruh jajaran organisasi BRI dan anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Secara sederhana, kerangka kerja manajemen risiko BRI digambarkan sebagai berikut:



Dalam mendukung pengendalian risiko dan memastikan kepatuhan pelaksanaan pilar bisnis serta *support*, sehingga kinerja BRI tetap sehat dan *sustain* dengan didukung oleh *operational excellence* guna peningkatan *value*, pelaksanaan manajemen risiko BRI memiliki 4 (empat) pilar pendukung yaitu:

a. Pilar 1 : Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
b. Pilar 2 : Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit terintegrasi.

c. Pilar 3 : Kecukupan proses dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi; dan
d. Pilar 4 : Sistem pengendalian intern terintegrasi yang menyeluruh.

Terakhir, dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan sinergi antar organ pengelola risiko perusahaan anak dan organ pengelola risiko entitas utama.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan manajemen risiko antara lain meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) yang dilakukan paling sedikit secara triwulanan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, yang dimaksud dengan transaksi adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan transaksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal BRI yang berlaku.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat Dewan Komisaris, yaitu Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR). Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan BRI tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima.

Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko secara individu telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 24 Januari 2023, 28 Maret 2023, 9 Mei 2023, 23 Mei 2023, 18 Juli 2023, 1 Agustus 2023 dan 26 September 2023.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain meliputi:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Untuk itu Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, dan mengembangkan budaya risiko dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan BRI serta penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama.

Adapun untuk pertemuan membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 27 Februari 2023 dan 16 Agustus 2023.

Pengawasan Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi BRI berkaitan dengan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi BRI serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan.
2. Menetapkan KMR BRI berikut perubahannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, prosedur, dan kerangka serta penetapan limit Risiko dan ambang batas (threshold) manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR BRI termasuk laporan mengenai profil Risiko.
5. Menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
6. Memutus transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, yang antara lain meliputi transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
7. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan

yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.
8. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur, alat dan sistem informasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
9. Mengembangkan budaya risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
10. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
11. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen.
12. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
13. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha yang ditemukan oleh SKAI BRI.
14. Menyetujui usulan produk dan/atau aktivitas baru dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Divisi dalam SKMR BRI yang membidangi.
15. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.

BRI sebagai Entitas Utama menetapkan Direktur Manajemen Risiko BRI sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan dibantu oleh Direktur bidang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi BRI. Wewenang dan tanggung jawab Direksi BRI dalam manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:
1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan serta mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BRI secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, Profil Risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat Profil Risiko Konglomerasi Keuangan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada setiap anggota Konglomerasi Keuangan.
5. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.
6. Mengembangkan budaya sadar risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, antara lain dilakukan dengan memupuk kesadaran risiko (*risk awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif.
7. Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko.
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala.
9. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia di Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain dilakukan dengan cara:
   a. Penetapan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   b. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten untuk penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   c. kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit kerja bisnis, Manajemen Risiko, maupun unit kerja support yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   d. Peningkatan kompetensi SDM melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   e. Meningkatkan pemahaman seluruh SDM terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil. toleransi risiko, dan kerangka risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang dilakukan.
10. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen dan bebas dari benturan kepentingan antara Entitas Utama dengan Perusahaan Anak.
11. Mengevaluasi hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Divisi dalam SKMRT yang membidangi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
12. Menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko secara terintegrasi.
13. Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

Selama tahun 2023 Direksi BRI telah menetapkan komite-komite pengelola risiko antara lain mengenai:
1. *Risk Management Committee* dilaksanakan sekurang-kurangnya secara triwulanan mengenai pembahasan eksposur risiko secara bank wide telah dilaksanakan selama periode 2023 meliputi:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Januari 2023	Profil Risiko TW IV 2022 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
2	24 Maret 2023	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
3	17 April 2023	Profil Risiko TW I 2023 Mandatory Report & *Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
4	15 Mei 2023	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
5	15 Juni 2023	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
6	26 Juli 2023	Profil Risiko TW II 2023 *Mandatory* Report & *Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
7	27 September 2023	*Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
8	17 Oktober 2023	Profil Risiko TW III 2023 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*
9	22 November 2023	*Risk Appetite Statement* 2024 *Mandatory Report & Monitoring* Pembahasan *Risk Issue*

2. *Risk Management Committee* Terintegrasi mengenai pembahasan eksposur risiko secara Konglomerasi Keuangan dilaksanakan secara semesteran telah dilaksanakan selama periode 2023 meliputi:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	27 Februari 2023	RAS Terintegrasi 2023 Mandatory Report MR Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil *Risiko PA & Risk Issue* PA *Risk Maturity Index*
2	16 Agustus 2023	*Monitoring* RAS Terintegrasi *Mandatory Report* MR Terintegrasi Profil Risiko Terintegrasi, Profil Risiko PA & Risk Issue PA *Risk Maturity Index*

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK/2016 Direksi BRI telah menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif yang disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari proses pengukuran dan pengendalian, BRI memiliki dan melakukan *review* secara berkala atas kebijakan limit Risiko keseluruhan maupun limit risiko fungsional untuk area bisnis yang lebih spesifik misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional secara berkala. Beberapa Kebijakan yang telah dikinikan sepanjang tahun 2023 antara lain:

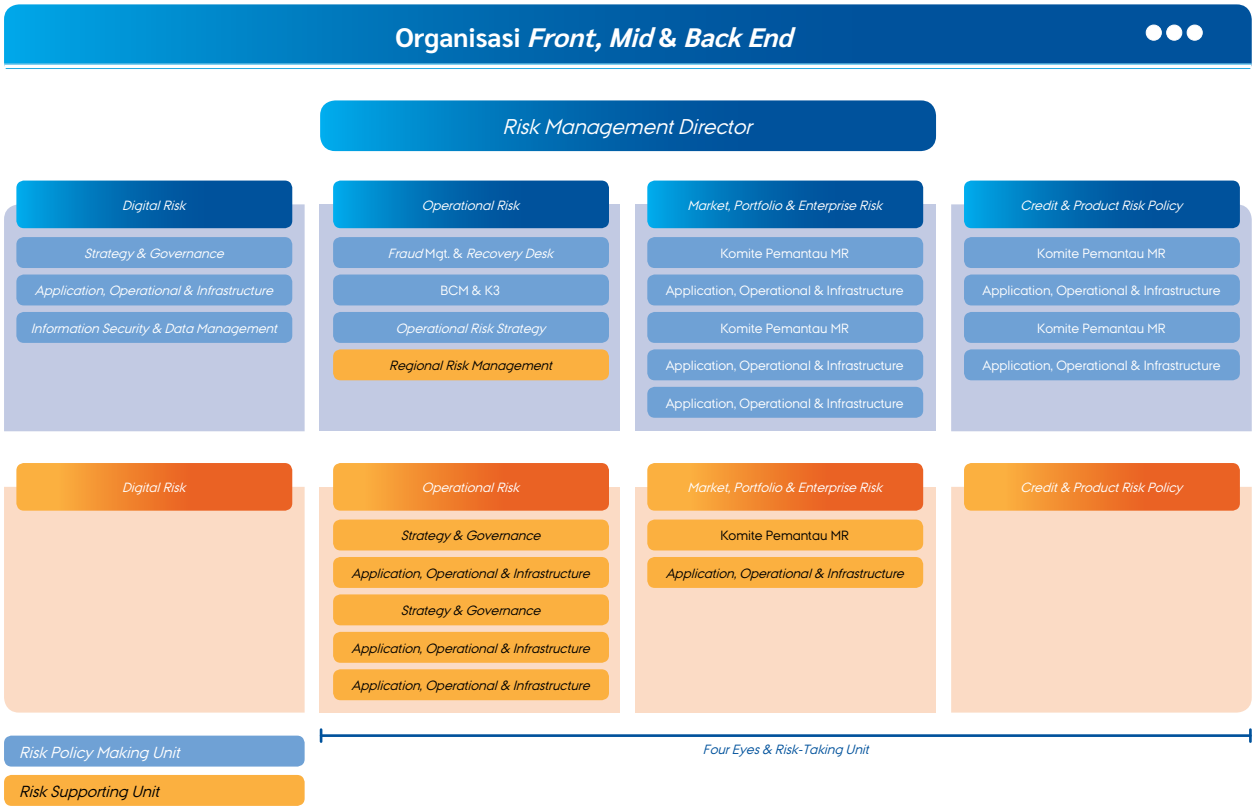
1. Pengelolaan Risiko secara *Enterprise*
   a. Pemutakhiran kebijakan Pengelolaan Risiko melalui Permodalan
   b. Pemutakhiran parameter dan limit RAS Individu dan Terintegrasi BRI serta pada masing-masing perusahaan anak
   c. Pemutakhiran parameter profil risiko, rentabilitas dan permodalan BRI
   d. Pemutakhiran kebijakan penentuan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan metodologi perhitungan profil risiko yang baru
   e. Pemutakhiran Rencana Aksi (*Recovery Plan*) BRI
   f. Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) BRI
2. Risiko Kredit
   a. Pemutakhiran Kebijakan *Value Chain Financing*
   b. Pemutakhiran Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   c. Pemutakhiran *Credit Risk Rating* (CRR) Korporasi
   d. Pemutakhiran Perlakuan khusus terhadap Kredit bagi Daerah Bencana
   e. Pemutakhiran Pelaksanaan perlakuan khusus terhadap Debitur KUR terdampak COVID-19
   f. Pemutakhiran Kebijakan Pendapatan atas Pemberian Kredit
   g. Pemutakhiran Kewenangan Memutus Kredit
   h. Pemutakhiran *Credit Risk Rating* (CRR) SME
   i. Pemutakhiran Produk KKB *Joint Financing*
   j. Pemutakhiran PPK SME
   k. Pemutakhiran Produk BRIGUNA
   l. Pemutakhiran Produk Pinjaman dengan Jaminan Resi Gudang
   m. Pemutakhiran & Harmonisasi CRS Mikro (KUR, Kupedes)
   n. Pemutakhiran & Harmonisasi CRS Konsumer (BRIGUNA, KPP, KKB, Kartu Kredit, CERIA, KMG)
3. Risiko Pasar & Likuiditas
   a. Penetapan Limit Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Aset Keuangan Terkait Aktivitas Treasury PT. BRI (Persero), Tbk.
   b. Penetapan Limit untuk Pengelolaan Likuiditas PT. BRI (Persero), Tbk.
   c. Penetapan MRCF Transaksi *Treasury* PT. BRI (Persero), Tbk.
   d. Penetapan limit SR Valas
   e. Penetapan Surat Edaran Direksi Tentang Perubahan Pertama Atas Pedoman Perhitungan *Asset* Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Buku 3 ATMR Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
   a. Pemutakhiran Kebijakan Umum Operasional dan Teknologi Informasi
   b. Penyusunan Kebijakan *Corporate Culture*
   c. Pemutakhiran Kebijakan Pengelolaan Jaringan Elektronik
   d. Pemutakhiran Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
   e. Pemutakhiran Kebijakan Pengelolaan Jaringan Elektronik (*E-channel*)
   f. Pemutakhiran Kebijakan *Human Capital Development* dan *Talent Management*

5. Risiko Hukum
   a. Penyusunan Legal Manual Kegiatan Usaha
   b. Penyusunan Legal Manual Penanganan Perkara
6. Risiko Stratejik
   a. Pemutakhiran Segmentasi Bisnis
   b. Pemutakhiran Pengelolaan Jaringan Kantor
   c. Pengkinian Kebijakan Simpedes, Britama dan Deposito BRI
7. Risiko Kepatuhan
   a. Kebijakan *Corporate Governance*
   b. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
8. Risiko Reputasi
   a. Pemutakhiran Kebijakan Pelaksanaan Program Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Pendukung

Dalam menyusun strategi pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis bank sehari-hari BRI mengacu kepada kerangka kerja *Enterprise Risk Management* dengan *Two-Prong Approach* yang mengelola risiko melalui proses bisnis dan operasional sehari-hari dan mengelola risiko melalui pencadangan modal. Dengan pendekatan tersebut, penerapan ERM BRI mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pilar pendukung dalam penerapan ERM dengan pendekatan *two-prong*, antara lain:

1. Organisasi *Front, Mid & Back End*



SKMR BRI terdiri dari *Risk Policy making Unit* dan *Risk Supporting Unit*. SKMR merupakan Divisi yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan manajemen risiko dan mengawasi jalannya proses manajemen risiko serta bersifat independen dari UKO, Satuan Kerja Audit Intern, dan Unit Kerja Kepatuhan. Struktur organisasi SKMR BRI bersifat *agile* dan dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BRI serta risiko yang melekat pada BRI. Divisi SKMR BRI yang membidangi ditetapkan oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur bidang Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab SKMR BRI meliputi:

a. Menyusun kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko;
b. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan limit risiko kepada Direksi;
c. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;

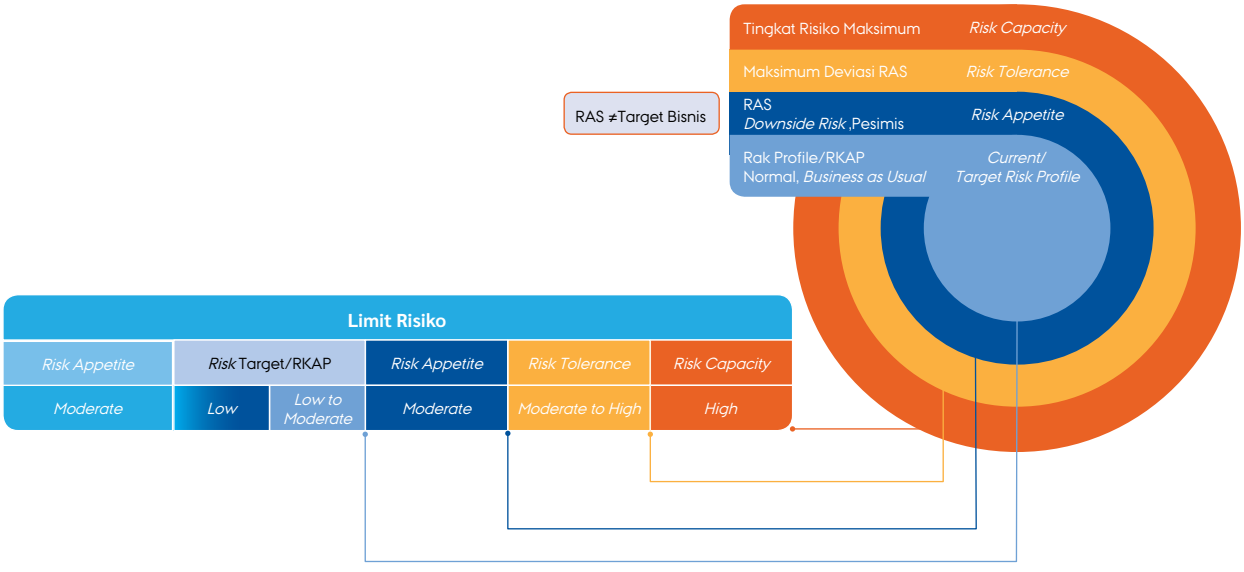
d. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMC dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi;
e. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*), maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan;
f. Melakukan *stress testing* setiap secara berkala, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi terhadap portofolio atau kinerja secara keseluruhan;
g. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko, berdasarkan temuan audit dan/atau perkembangan praktek-praktik manajemen risiko yang berlaku secara internasional (*best practice*);
h. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan BRI untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur;
i. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan mengukur risiko;
j. Memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja Operasional dan/atau kepada RMC sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara BRI;
k. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko.

Selain SKMR, untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka BRI juga meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan Unit Kerja Operasional, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko dengan cara:
a. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan risiko melalui pelatihan di *Corporate University* atau melalui program sertifikasi maupun *public course*.
b. Peningkatan *risk awareness* di seluruh UKO.
c. Sosialisasi, forum diskusi maupun forum lainnya untuk menginternalisasi budaya sadar risiko.

Khusus untuk pejabat dan staf yang ditempatkan di Satuan Kerja Manajemen Risiko harus memiliki:
a. Pemahaman mengenai risiko-risiko yang terkandung dalam setiap produk/aktivitas fungsional bank.
b. Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas fungsional BRI, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha BRI.
c. Pengalaman dan kemampuan untuk memahami dan mengomunikasikan implikasi eksposur risiko BRI kepada Direksi dan RMC secara tepat waktu.

2. Kebijakan dan Prosedur
BRI telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal yang menjadi panduan dalam:
   a. Kebijakan umum dalam penetapan jenis risiko, filosofi risiko, peranan, sasaran, dan kaji ulang penerapan manajemen risiko BRI.
   b. Kebijakan perkreditan bank, pedoman pelaksanaan perkreditan, SE dan SOP mengenai aktivitas perkreditan.
   c. Kebijakan operasional non perkreditan, pedoman pelaksanaan aktivitas operasional non perkreditan, SE dan SOP mengenai aktivitas operasional non perkreditan.
   d. Organisasi manajemen risiko, meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan unit kerja dalam proses manajemen risiko BRI.
   e. Penetapan *Risk Appetite* dan Limit Risiko.

Penetapan *Risk Appetite* dan Limit Risiko.



f. Mengatur proses manajemen risiko, meliputi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang wajib dikelola BRI serta Mengatur Manajemen Risiko Terintegrasi.
g. Mengatur *Enterprise Risk Management*, meliputi proses pengelolaan secara terintegrasi berbagai jenis risiko, validasi dan evaluasi, serta penilaian peringkat risiko.
h. Mengatur sistem informasi manajemen risiko.
i. Mengatur penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
j. Mengatur permodalan meliputi kecukupan perencanaan dan pengelolaan permodalan.
k. Mengatur pengelolaan risiko produk dan/atau aktivitas baru.
l. Mengatur Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/ *Business Continuity Management* (BCM) dan *Strategi Anti Fraud*.
m. Mengatur Penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi.

3. Sistem *Rating, Limit* dan *Database*
Sistem *rating* dan *limit* risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat akurasi serta ketepatan dalam pengambilan keputusan diantaranya meliputi:

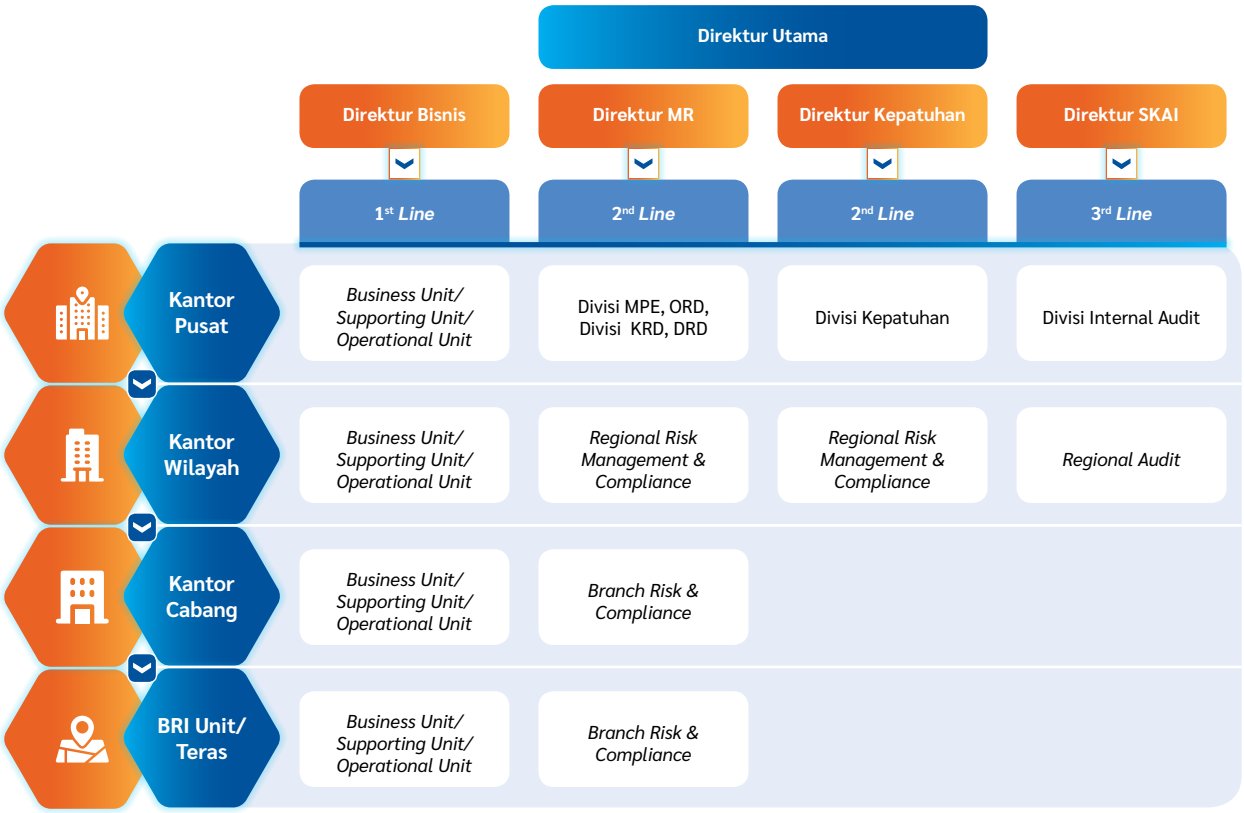
Sistem	Tujuan
Loan Portfolio Guideline	Penetapan limit kualitas portfolio kredit berdasarkan sektor industri
• *Loan Approval System* • *Consumer Loan Approval System* • *Loan Origination System* • *BRISPOT*	Efisiensi dan mitigasi proses putusan kredit
Early Warning System	Memprediksi Kemungkinan gagal bayar dari debitur eksisting
Risk Performance Analysis Dashboard	*Dealer Profitability analysis*
Overseas Branches Transaction Monitoring Dashboard	Sistem *Monitoring* aktivitas Unit Kerja Luar Negeri
Daily Market & Liquidity Risk Dashboard	*Monitoring* aktivitas *treasury* harian
Early Warning Indicator	*Liquidity early warning signal dashboard*
BRISIM *Dashboard* Pengawasan Operasional	*Monitoring* aktivitas operasional rekening *suspend*, kas, dsb
BRISIM *Dashboard* Pengawasan Kredit	*Monitoring* Kredit dengan tunggakan
BRISIM Dashboard Regional *Office Risk Profile*	*Monitoring* profil risiko per *Regional Office*

Database yang dipergunakan untuk memastikan tingkat akurasi serta ketepatan dalam pengambilan keputusan yang digunakan BRI diantaranya meliputi:

Sistem	Tujuan
Credit Risk Analysis System	*Monitoring Loan at Risk* per segmen per divisi, per provinsi, per unit kerja dan per sektor ekonomi
GUAVA System	*Market risk middle office treasury System & Database*
BRIOPRA	*Database* pencatatan human error, insiden, dan bencana
	Database Pencatatan *Fraud*
BRISIM	Database BRI

Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI mengadopsi konsep *Three Line of Model* yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian dalam *framework* COSO, dengan rincian sebagai berikut:



Dengan konsep *Three Line of Model* maka kegiatan pengendalian internal dilakukan dengan pemisahan fungsi yang jelas dalam mengelola risiko. Selain itu pemantauan atas eksposur risiko dilakukan secara berkala dan tindakan koreksi dilakukan segera sehingga risiko dapat terjaga sesuai dengan Batasan *risk appetite* dari Bank. Kaji ulang dan penilaian efektivitas terhadap sistem pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal secara berkala.

Sistem Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko

Direksi BRI menetapkan Filosofi Risiko BRI sebagai dasar dari strategi penerapan manajemen risiko BRI untuk pengembangan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi. Filosofi risiko akan mendasari kegiatan-kegiatan dalam penetapan tujuan perusahaan, pelaksanaan aktivitas bisnis bank dan pemenuhan harapan *stakeholders*. Filosofi Risiko BRI terdiri dari empat komponen, sebagai berikut:

1. Integritas
   Sesuai dengan Nilai Budaya Kerja BRI, dengan penekanan pada:
   Secara tegas membedakan yang benar dengan yang salah serta melakukan kegiatan yang diyakini kebenarannya, demi kepentingan BRI dan nasabah.
2. Profesional
   Sesuai dengan Nilai Budaya Kerja BRI, dengan penekanan pada:
   a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan serta tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan mengutamakan kepentingan BRI.
   b. Optimalisasi hubungan *risk-return*, yaitu mengoptimalkan potensi pendapatan pada suatu tingkat risiko tertentu.
3. Prinsip Kehati-hatian
   Menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam mendukung bisnis BRI dengan cara menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

4. Peningkatan Kompetensi yang Berkelanjutan
   a. Menginvestasikan waktu dan sumberdaya dalam rangka mengembangkan perangkat, sistem dan pelatihan praktis yang dapat mendukung pengelolaan risiko yang efektif.
   b. Terus menerus meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam rangka membangun kemampuan pengelolaan risiko yang sesuai dengan praktik terbaik (*best practices*).

Filosofi risiko tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam mengembangkan kemampuan manajemen risiko dengan cara:
1. Memahami dan mengelola eksposur risiko secara proaktif,
2. Mengoptimalkan hubungan *risk-return* yang konsisten dengan strategi bisnis, dan
3. Menetapkan kebijakan dan menjamin pelaksanaan *good corporate governance.*

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko BRI dilaksanakan secara lengkap yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material, yaitu faktor-faktor risiko kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BRI. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko.

1. Identifikasi Risiko
   BRI mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas BRI serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
2. Pengukuran Risiko
   Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya.

   Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BRI.
3. Pemantauan Risiko
   Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha BRI serta efektivitas proses manajemen risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan BRI antara lain dapat didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

   Penyempurnaan proses pelaporan risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

   BRI menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.
4. Pengendalian Risiko
   Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern BRI yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BRI. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatuhasil evaluasi atas eksposur risiko yang terdapat pada seluruh portofolio produk dan aktivitas fungsional BRI.

   Prosedur dan metodologi pengendalian risiko ditetapkan oleh Direksi BRI dengan memperhatikan kompleksitas usaha, kondisi implementasi dan kemampuan sistem manajemen risiko internal serta ketentuan yang berlaku.

   Penetapan prioritas dan cara pengendalian risiko harus mempertimbangkan pemetaan risiko inheren BRI melalui analisis terhadap besarnya potensi kerugian finansial dan kemungkinan kejadian risiko serta pertimbangan asas manfaat dan biaya.

Prioritas utama dalam mitigasi adalah terhadap risiko yang memiliki dampak kerugian tinggi atau frekuensi kejadian tinggi. Mitigasi dalam bentuk penyempurnaan dan pelaksanaan pengendalian risiko.

Selain melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, terdapat proses pendukung lainnya dalam proses manajemen risiko, seperti:

1. Komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko, Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.
2. Konsultasi, untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran.
3. *Monitoring* dan *review* (sistem pengendalian intern), yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

Risk Appetite Statement

Risk Appetite/tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil BRI dalam rangka mencapai sasarannya. Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis (Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank), serta mencakup seluruh jenis risiko yang bersifat material dalam operasional bisnis BRI. Direksi BRI menetapkan *Risk Appetite* dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan intoleransi (*zero tolerance*) yang terkait dengan sasaran dan tujuan bisnis BRI. *Risk Appetite* dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka pengukuran risiko secara lebih menyeluruh, BRI telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan BRI adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok dengan BRI karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. BRI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BRI. Konglomerasi Keuangan BRI memiliki struktur yang terdiri dari BRI sebagai Entitas Utama serta perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi.

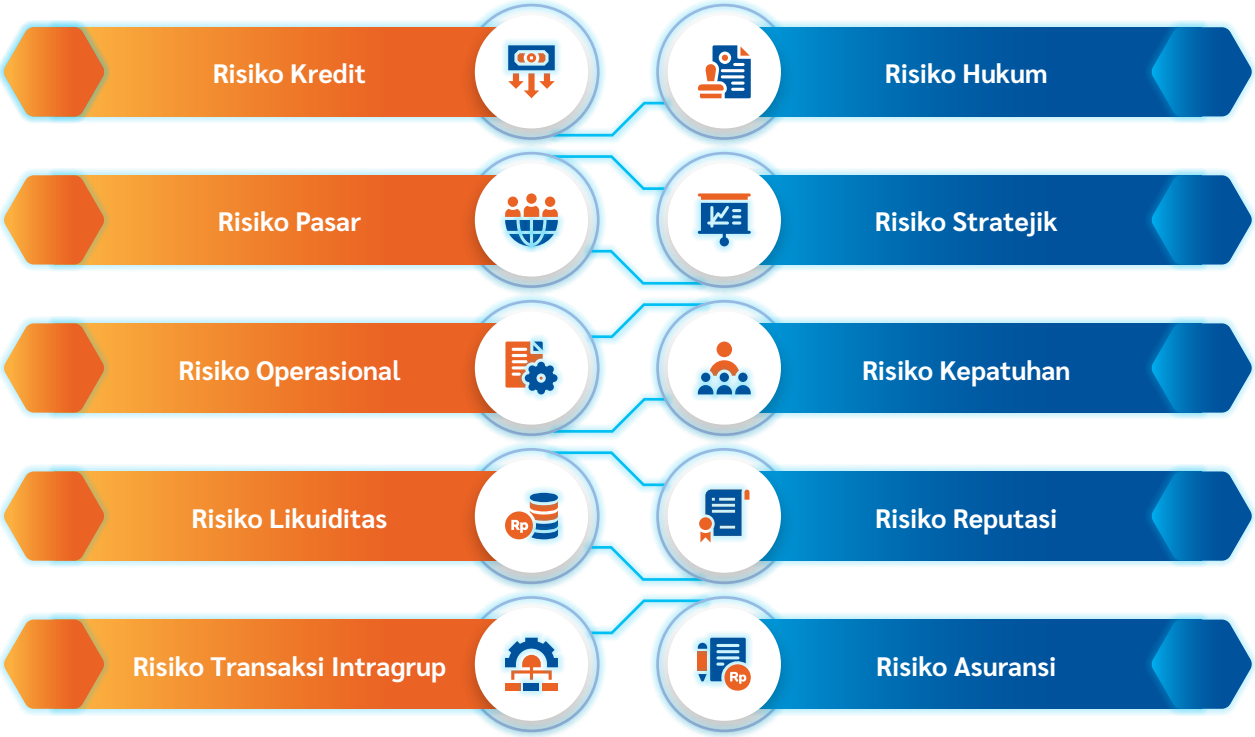
Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dalam pengelolaan risiko di BRI diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
   Direksi Entitas Utama berwenang untuk menetapkan limit risiko untuk Konglomerasi Keuangan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), toleransi risiko, dan strategi Konglomerasi Keuangan BRI secara keseluruhan. Penetapan limit risiko harus sejalan dengan strategi bisnis, Profil Risiko, kemampuan modal Konglomerasi Keuangan BRI untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, serta ketentuan regulator yang berlaku.

   Penyusunan limit dilakukan oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI yang membidangi dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup:
   a. limit secara keseluruhan (Terintegrasi)
   b. limit setiap jenis risiko
   c. limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko

Limit tersebut di*review* secara berkala oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI yang membidangi untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Limit harus dipahami oleh setiap pihak terkait dalam Konglomerasi Keuangan BRI dan dikomunikasikan dengan baik termasuk jika terjadi perubahan.

Jenis risiko-risiko yang dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:



2. Penyediaan Permodalan Modal Minimum Terintegrasi
   BRI sebagai Entitas Utama memiliki Perusahaan Anak yang berbentuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga membentuk Konglomerasi Keuangan BRI, bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, Konglomerasi Keuangan BRI perlu memiliki kecukupan permodalan yang memadai.

   Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Konglomerasi Keuangan BRI secara keseluruhan, cushion untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi Keuangan BRI. BRI selalu memastikan bahwa Konglomerasi Keuangan telah memenuhi Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi minimum sebesar 100%.

Pelaksanaan Implementasi Basel

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)
   Sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conversation Buffer, Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik, di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum *Leverage Ratio* yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.

   Selain itu dalam rangka *Supervisory review* process BRI telah melaksanakan *Bottom Up Stress Testing* dalam mendukung penerapan kerangka pengelolaan stabilitas sistem perbankan di Indonesia, yang meliputi pengujian *solvency stress test* dan *liquidity assessment.*

2. Kredit
   Perhitungan modal minimum untuk risiko kredit dilakukan dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko kredit wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021.

3. Operasional
   Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020.
4. Pasar dan Likuiditas
   a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2024 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022.
   b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan Basel III *Approach*: *Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio*, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum. Sebagai tambahan pilar Basel dalam pengukuran ketahanan likuiditas, terhitung mulai Tahun 2023 akan dilakukan implementasi *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP).
   c. Pengukuran *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) sesuai dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*).

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Terdapat 10 (sepuluh) Risiko yang dikelola BRI yaitu:

Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank yang pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*) dan dapat diakibatkan juga oleh terkonsentrasinya penyediaan dana debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Dalam penerapan manajemen risiko kredit, BRI melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemisahan pejabat kredit bidang:
   a. *Relationship Management*/RM yang bertanggung jawab melakukan asesmen *Business Feasibility* serta melakukan upaya penagihan pinjaman *performing loan*.
   b. *Credit Risk Management*/CRM yang bertanggung jawab melakukan asesmen *Business Risk* dalam proses pemberian kredit serta memantau *Early Warning System*.
   c. *Credit Restructuring and Recovery*/CRR yang bertanggung jawab mengelola kredit bermasalah dengan mengoptimalkan pengembalian pinjaman bermasalah.
2. Pengembangan *Internal Risk Rating* sebagai alat bantu pada proses identifikasi dan pengukuran tingkat risiko calon debitur.
3. Pengembangan *Early Warning System* sebagai alat bantu pada proses pemantauan tingkat risiko kredit secara portofolio.
4. Penetapan kebijakan manajemen risiko kredit, di antaranya tata kelola, pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit berdasarkan geografis dan pengelolaan limit konsentrasi per industri/sektor.

Pengembangan sistem informasi berupa *Dashboard Monitoring Credit Risk Analisis Sistem* (CRAS) untuk mengukur kualitas kredit (LAR, CL, SML, NPL) hingga level unit kerja, segmen bisnis dan sektor industri debitur untuk membantu proses pengelolaan risiko kredit secara portofolio.

Risiko Pasar

Risiko yang muncul pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari variabel pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas dan Risiko Komoditas. Untuk Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga dapat berasal dari posisi *trading book* dan *banking book.*

Pengukuran risiko pasar di BRI dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulanan) antara lain dengan:

1. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran *standardized* dan pengukuran internal model (VaR),

2. Melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar maupun *benchmark rate* serta *repricing gap* atas aset dan liabilitas.
3. Mengimplementasikan sistem terintegrasi untuk *treasury and market risk*, yang digunakan oleh fungsi *front office, middle office* dan *back office*.

Dalam manajemen risiko pasar, BRI secara rutin menyelenggarakan forum *Risk Management Committee* yang membahas profil risiko pasar, *market risk issue* baik internal maupun eksternal, dan *stress testing risiko pasar*. Selain itu BRI juga melakukan rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan untuk membahas kondisi *asset* dan *liability* antara lain *maturity profile, interest rate risk*, NII *simulation*, dan pengelolaan *PDN*.

Fungsi manajemen risiko pasar terbagi menjadi tiga fungsi yang terdiri dari unit kerja *front office* (*Treasury Business Division*), *middle office* (Market, Portfolio & *Enterprise Risk Division*), dan *back office* (*Payment Operation Division*). *Front office* memantau pergerakan harga pasar dan melakukan aktivitas Treasury, menyesuaikan portofolio sesuai dengan arah pergerakan *market*, *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar, limit transaksi dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark to market* (MTM), sedangkan *back office* melakukan *settlement* dan secara harian dan menetapkan MTM pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman pekerja.

Kebijakan, prosedur dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan *Treasury* serta Surat Edaran Manajemen Risiko Pasar dan Ketentuan Penetapan Limit atas Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Keuangan terkait aktivitas *Treasury* BRI. Adapun limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut seperti limit *open position* untuk *trading*, limit transaksi dealer, limit *cut loss* dan *stop loss*, limit *uncommitted credit line*, *counterparty* limit serta limit *value at risk* (VaR).

BRI juga melakukan simulasi stress testing risiko pasar yang bertujuan untuk mengukur potensi risiko pada portofolio yang dimiliki pada kondisi *stress*. Dalam *stress testing*, *shock* dapat berasal dari nilai tukar maupun suku bunga yang berdampak pada eksposur risiko pasar yang mencakup Posisi Devisa Neto (PDN), Surat Berharga kategori *Fair Value through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) dan *Fair Value through Profit or Loss* (FVTPL).

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Guna mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas dalam Surat Edaran Manajemen Risiko Likuiditas yang mencakup:

1. Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas
2. Limit Pengelolaan Likuiditas
3. *Liquidity Coverage Ratio*
4. *Net Stable Funding Ratio*
5. *Early Warning Indicators Liquidity*
6. *Contingency Funding Plan*

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan risiko likuiditas yang memadai antara lain kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Strategi pendanaan diutamakan berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI memiliki mekanisme sistem peringatan dini likuiditas (*Liquidity Early Warning Indicators*/EWI) yang merupakan indikator untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dan memberikan sinyal sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional yang dilakukan secara harian. Pemantauan EWI dilakukan agar BRI dapat melakukan *self assessment* terhadap kondisi likuiditas dan melakukan mitigasi atau *action plan* sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun salah satu *action plan* yang tersedia adalah menyiapkan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*/CFP). Simulasi *stress testing* risiko likuiditas dilakukan secara reguler untuk mengukur ketahanan atau kemampuan pemenuhan kebutuhan likuiditas dan permodalan selama kondisi krisis.

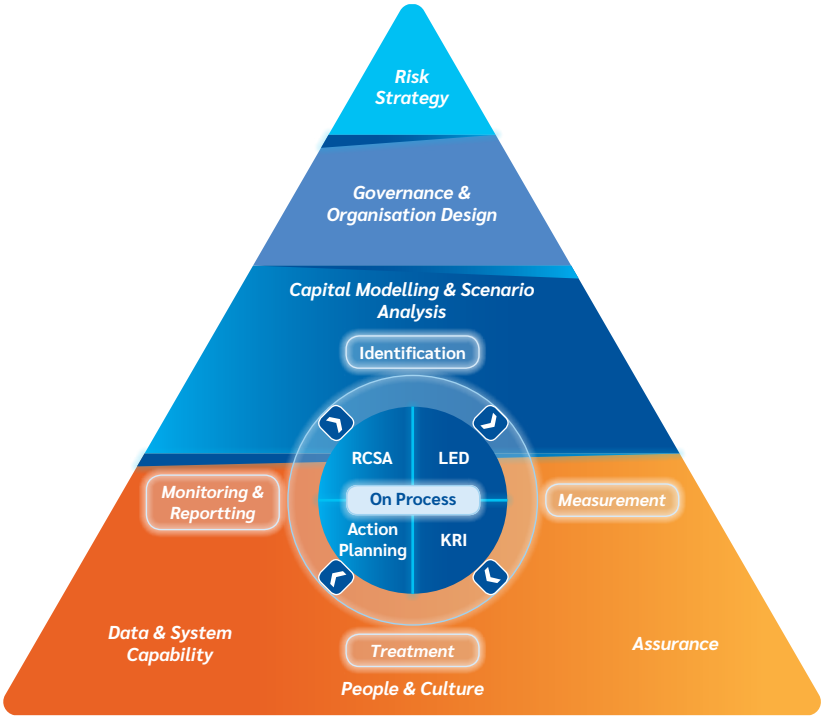
Untuk memenuhi penerapan Basel III, BRI melakukan *Monitoring* terhadap dua rasio utama likuiditas yaitu Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*/ LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*/ NSFR). Hasil *Monitoring* terhadap kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa posisi BRI berada di atas batas minimum rasio yang ditetapkan Basel III.

Risiko Operasional

Risiko Operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank sehingga Risiko Operasional seringkali disebut sebagai *mother of risk* karena dapat dapat memicu terjadinya Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, serta Risiko lainnya apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik.

Dalam rangka menunjang penerapan Manajemen Risiko Operasional (MRO), BRI menyusun *Framework* MRO yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Manajemen Risiko pada ISO

31000:2018 sebagai pedoman implementasi MRO di setiap lini. *Framework* MRO secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) komponen utama yaitu *Business Strategy, Business Management*, dan *Business Enablers* yang digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar tersebut, maka penerapan MRO harus ditunjang dengan penetapan strategi pengelolaan risiko operasional, dalam hal ini BRI menetapkan strategi MRO melalui *Risk Appetite Statement* (RAS) Risiko Operasional, *Key Performance Indicator* (KPI), Parameter dan Limit Profil Risiko Operasional, *Key Risk Indicator*, dan Daftar Risiko Utama. Selanjutnya, penerapan MRO di BRI juga ditopang dengan Struktur Organisasi MRO yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan risiko operasional yaitu dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) baik di Kantor Pusat maupun sampai di tingkat regional dan di setiap Unit Kerja BRI. Selain itu, BRI menetapkan tatakelola Manajemen Risiko yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Direksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Selanjutnya, Strategi dan Tatakelola yang telah disusun dijadikan sebagai acuan dalam implementasi proses Manajemen Risiko Operasional yaitu Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan. Pelaksanaan proses manajemen risiko operasional di setiap Unit kerja didukung dengan penggunaan Perangkat MRO. Perangkat MRO digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dan menilai eksposur risiko operasional sehingga BRI dapat menentukan mitigasi yang efektif dan melakukan perbaikan kualitas aktivitas bisnis dan operasional. Perangkat MRO terdiri dari:

a. ***Risk & Control Self Assessment*** **(RCSA)**
   RCSA merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan menggunakan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*).
b. ***Loss Event Database*** **(LED)**
   Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing Unit Kerja.
c. ***Key Risk Indicator*** **(KRI)**
   Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan/unit kerja. KRI telah disusun sampai level unit kerja operasional untuk membantu pemimpin unit kerja mengelola risiko sejak dini.

Pengendalian risiko operasional di BRI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan/atau *Signer* (MCS) dalam setiap aktivitas operasional bank sesuai dengan tingkat risiko dengan tujuan untuk memastikan kebenaran aktivitas Bank. Pemisahan fungsi MCS ditetapkan dalam ketentuan Bank dan diimplementasikan pada semua sistem Bank, antara lain: *Branch Delivery System*, *Fixed Asset Management System*, *Human Capital System* dan sebagainya. Pengendalian internal dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana aktivitas sebagai *first line*.
2. Satuan Kerja *Manajemen Risiko Operasional* (SKMRO) sebagai *second line* melakukan *continous Monitoring* untuk

memastikan pelaksaan pengendalian internal oleh first line, antara lain melalui kegiatan *control verification*, *control improvement* dan internalisasi budaya risiko dan kepatuhan guna mencapai *zero fraud*.

3. Identifikasi Risiko dilaksanakan melalui penilaian *Risk Control Self Assesment* (RCSA) yang dilakukan pada setiap awal semester dengan mempertimbangkan *Key Performance Indicator* (KPI), *Concern Management*, rencana bisnis Ke Depan, data historis kejadian risiko operasional dan kelemahan kontrol.
4. Pengukuran risiko dilakukan bersamaan dengan identifikasi risiko pada saat penyusunan RCSA.
5. Pemantauan risiko dilakukan oleh Unit Kerja selaku Risk Owner dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) dengan menggunakan *tools continuous Monitoring* yang tersedia, antara lain *Key Risk Indicator Dashboard* (KRID), dan aplikasi *reporting* lain yang tersedia di Unit Kerja.
6. Pengendalian Risiko aspek *people, process* dan *technology*. Upaya pengendalian tersebut dilakukan untuk memperbaiki desain kontrol maupun implementasi kontrol. Beberapa aktivitas pengendalian risiko antara lain:
   a. Penyusunan dan/atau pengkinian kebijakan dan SOP yang berisi penetapan *internal control* untuk setiap aktivitas Bank.
   b. Pelaksanaan *internal control* oleh pekerja yang menjalankan aktivitas Bank di Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya.
   c. Pengendalian risiko pada Produk Bank Baru (PBB) dalam bentuk *risk self assessment* oleh *Product Owner* dan penilaian kecukupan pengelolaan risiko oleh SKMRO.
   d. Pengawalan pengelolaan risiko dan internalisasi Budaya Risiko oleh (*Branch Risk and Compliance*) dan URC (BRI *Unit Risk and Compliance*) melalui pelaksanaan kegiatan *Briefing, Verification dan Coaching* (BVC) secara harian.
      - *Briefing*
        Kegiatan sosialisasi/ *sharing session* kepada seluruh atau kelompok Pekerja
      - *Verification*
        Kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kontrol dengan tujuan mengetahui kelemahan kontrol sehingga dapat menentukan upaya perbaikan untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak risiko.
      - *Coaching*:
        Kegiatan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada Pejabat MCS yang belum melaksanakan kontrol dengan baik, dengan tujuan mengajak pejabat MCS memperbaiki kelemahan dan melaksanakan kontrol sesuai ketentuan agar tidak terjadi kelemahan kontrol yang berulang.
   e. Implementasi program-program *Business Continuity Management* (BCM) dan SMK3 antara lain sosialisasi dan uji coba BCM secara berkala minimal satu tahun sekali untuk memastikan kesiapan resiliensi Bank dalam menghadapi bencana/krisis.

BRI berkomitmen mengembangkan Teknologi dan Sistem Informasi dalam penerapan manajemen risiko operasional. BRI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional yaitu:

a. Aplikasi BRIOPRA
   Pada aplikasi BRIOPRA mengakomodir beberapa perangkat MRO yaitu RCSA, LED, Forum Manajemen Risiko, dan Penilaian Maturitas
b. *Key Risk Indicator (*KRI*) Dashboard*
   Dashboard yang dikembangkan pada aplikasi BRISIM yang berisi KRI dan data *anomaly* yang berfungsi sebagai *tools continuous Monitoring* bagi *1st line* dan *2nd*.
c. Profil Risiko Regional Office
   Dashboard profil risiko untuk *regional Office* yang dikembangkan pada aplikasi BRISIM yang berfungsi sebagai *tools* pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi *1st line* dan *2nd line.*

Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran adanya potensi risiko hukum pada setiap aktivitas operasional dan bisnis BRI sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin, membantu memecahkan permasalahan hukum, dan meminimalkan potensi kerugian akibat risiko hukum.

Unit kerja Hukum beserta jajarannya merupakan unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas bidang hukum/*legal watch* untuk menyediakan analisis dan advis hukum kepada seluruh pekerja pada setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka meminimalisasi potensi kejadian risiko hukum, secara berkala dilakukan sosialisasi aspek-aspek hukum yang berlaku untuk meningkatkan *awareness* pekerja dan unit kerja operasional terhadap konsekuensi hukum yang terdapat dalam setiap aktivitas yang dijalankan.

Divisi Legal secara aktif mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional. Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

1. Divisi Legal sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Divisi Legal memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/*agreement* antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
3. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai

4. Divisi Legal bekerja sama dengan *Legal Officer* (LO) di *Regional Office* memantau risiko hukum di seluruh Unit Kerja BRI dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
5. Divisi Legal menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
6. Pembinaan staf pada Unit Kerja Operasional (UKO) di *Regional Office* dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.
7. *Legal Officer* (LO) di *Regional Office* memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Legal.
8. Divisi Legal memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
9. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Legal mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
10. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
11. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Legal berkoordinasi dengan Divisi *Operation Risk* terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui *Dashboard* Profil risiko

Implementasi perangkat manajemen risiko seperti RCSA, MI dan KRI digunakan juga untuk menunjang pelaksanaan proses manajemen risiko hukum dalam mengidentifikasi, memantau dan Monitoring atas tuntutan/gugatan hukum terhadap BRI sehingga langkah-langkah pengendalian risiko hukum dapat dilakukan sedini mungkin. Saat ini telah dilakukan pengembangan sistem untuk dapat memudahkan dalam melakukan pemantauan dan Monitoring aspek legal BRI seperti: laporan MR hukum, data perkembangan perkara, dokumen legalitas perusahaan, dan lainnya.

Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Evaluasi risiko stratejik BRI dilakukan Direksi secara berkala melalui forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko stratejik, antara lain forum *Bisnis Performance Review*, ALCO, *Risk Management Committee*, dan Rapat Direksi yang digunakan untuk menyelaraskan strategi BRI. Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk di dalamnya Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*), RBB, dan RKAP.

RBB dan RKAP di*review* kembali setiap tahun berdasarkan perubahan lingkungan usaha dan rencana perusahaan. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat di*review* apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya.

Dalam rangka memitigasi risiko stratejik, BRI telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala melalui parameter yang tercermin pada profil risiko stratejik. Pengukuran risiko stratejik antara lain dilakukan dengan menganalisis eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi pinjaman, dana pihak ketiga, BOPO dan *fee-based income*. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko stratejik didokumentasikan dalam Rapat *Risk Management Committee*.

Risiko Kepatuhan

Perbankan merupakan suatu industri yang *highly regulated,* sehingga BRI senantiasa melakukan *Monitoring* atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud bervariasi dari teguran, denda/penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas BRI sesuai ketentuan yang berlaku.

BRI menerapkan metodologi *Risk Based Approach* yang terangkum dalam kebijakan dan SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem AML (*Anti Money Laundering)* untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC).

Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Fungsi pengendalian risiko reputasi dilakukan oleh Unit kerja *Corporate Secretary* sebagai *public relations* BRI. Langkah yang dilakukan BRI dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*, serta

menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama BRI secara korporat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan atau *complain* dari *stakeholder* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap BRI.

Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek sisi publik, BRI juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. BRI segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas materialitas permasalahan dan biaya.

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan risiko reputasi yang telah dilakukan diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi.Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk *Corporate Secretary Division* untuk menangani setiap informasi negatif.

Risiko Intra-grup

Risiko Transaksi Intragrup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan Risiko Intra-grup di BRI adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Intra-grup dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk eksposur yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Direksi BRI membentuk *Risk Management Committee* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risiko Intra-grup, Kebijakan Risiko Intra-grup serta Pemantauan dan Pengendalian Risiko Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BRI untuk membahas *Risk Issue* Risiko Intra-grup dan rencana tindak lanjutnya.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
   a. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-grup.

BRI telah mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan limit risiko Intra-grup meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penetapan parameter & limit risiko intragroup konglomerasi keuangan.
3. *Risk Management Committee* Terintegrasi.

Risiko Asuransi

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Risiko Asuransi di BRI adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI terhadap Anak Perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi.
2. Direksi BRI membentuk *Risk Management Committee* Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
   a. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintergrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.
5. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan limit risiko asuransi meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penetapan parameter & limit risiko asuransi konglomerasi keuangan.
3. *Risk Management Committe* Terintegrasi.

Pelaksanaan Edukasi Manajemen Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko yang berkualitas, dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya. Untuk mendapatkan SDM yang andal dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi ketentuan regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka BRI melaksanakan edukasi manajemen risiko antara lain:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*
   Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja BRI dengan *corporate title* Senior Manager ke atas. Bagi yang telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko, maka BRI tetap melaksanakan edukasi dengan program *refreshment* agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.
2. Metode *e-learning*
   Edukasi manajemen risiko juga dilaksanakan melalui metode pembelajaran interaktif melalui *e-learning*. *E-learning* ditujukan untuk seluruh pekerja BRI sebagai media edukasi mandiri agar memahami filosofi dan penerapan manajemen risiko.
3. Sosialisasi
   Sosialisasi rutin dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko kepada seluruh jajaran pekerja BRI seluruh Indonesia. Sosialisasi terutama dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di BRI.
4. Pendidikan
   Pendidikan bagi pekerja BRI melalui seminar dan *training* yang diselenggarakan pihak eksternal maupun internal.
5. Webinar *Risk Upgrade Series*
   Webinar *Risk Upgrade Series* diselenggarakan secara rutin sekali seminggu (*weekly*) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses manajemen risiko pada aktivitas dan proses bisnis tertentu. Tema, pembicara dan peserta Webinar *Risk Upgrade Series* disesuaikan dengan kebutuhan dan *issue* yang sedang menjadi perhatian baik oleh *product owner*, Unit Kerja pembuat kebijakan, maupun SKMR.

Top Emerging Risk

Bank dihadapkan pada berbagai risiko yang diidentifikasi diperkirakan akan mempengaruhi bisnis ke depan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 5 (lima) kategori risiko yang akan dihadapi oleh BRI di jangka panjang atau dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu terkait Geopolitik, Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Teknologi yang dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. *Responsible AI* (*Artificial Intelligence*), *Blockchain Governance, Cloud Concentration Risk* : risiko terkait Teknologi.
2. Ketidakpastian Makroekonomi dan Risiko Geopolitik Global : risiko terkait Geopolitik dan Ekonomi.
3. Perubahan Preferensi Nasabah : risiko terkait Sosial.
4. Risiko Lingkungan : risiko terkait Lingkungan.
5. Risiko Politik : risiko terkait Ekonomi.

Adapun penjelasan masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

1. *Responsible AI* (*Artificial Intelligence*)
   Penggunaan AI yang diintegrasikan pada layanan perbankan, baik untuk *use case* internal maupun untuk berkomunikasi dengan nasabah. AI dapat digunakan untuk *use case* antara lain:
   a. *Chatbot* dan *virtual assistant* untuk pelayanan ke nasabah berbasis teks.
   b. *Robocall*, digunakan untuk komunikasi berbasis suara baik satu arah, maupun dua arah secara *realtime*.
   c. *Anti Money Laundering*, digunakan untuk pencegahan tindak pencucian uang berdasar *behavior* transaksi nasabah (*future plan*).
   d. Rekomendasi transaksi berdasar *behavior*, digunakan untuk menganalisa pola transaksi nasabah untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi transaksi yang kerap dilakukan (*future plan*).

   Penggunaan AI tanpa dilakukan pengelolaan dan *governance* yang sesuai maka akan memproses dan memberikan *output* yang tidak diharapkan sehingga berdampak secara finansial dan reputasi bagi bank. Untuk itu, BRI melakukan pengembangan dan penggunaan AI dengan pendekatan *responsible* AI agar dapat dipastikan proses sampai dengan *output* yang dihasilkan AI bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan risiko bagi bank maupun nasabah.

2. *Blockchain Governance*
   Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan transmisi data secara aman dan terdesentralisasi. Data yang disimpan di *blockchain* tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat dalam teknologi tersebut. Penggunaan teknologi *blockchain* di Indonesia antara lain inisiasi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) oleh Bank Indonesia, yaitu mata uang Rupiah dalam bentuk digital dan platform *Carbon Xchange* Rakyat. Jika tata kelola bank belum siap seperti *segregation of duty*, metode *role based access* dalam pengelolaan keamanan operasional *blockchain*, maka risiko siber yang mungkin bisa menyerang bank. Dalam mengantisipasi hal tersebut, BRI saat ini dalam tahap penyusunan *governance* secara internal sebagai persiapan implementasi CBDC dan regulasi *carbon credit* untuk integrasi dengan produk dan layanan perbankan termasuk sistem yang redundan sebagai verifikator dan otentifikasi pada *blockchain* untuk menghindari *single point of failure* agar transaksi yang berjalan pada *blockchain* tidak mengalami gangguan.

3. *Cloud Concentration Risk*
   Penggunaan *cloud computing* melalui *cloud service provider* sebagai solusi yang lebih modern untuk memberikan kemudahan saat konfigurasi maupun deployment dibandingkan *server on premise* yang berbentuk fisik. Saat ini telah digunakan pada aplikasi antara lain Brismartbilling, Delima, Stroberi. Apabila sudah terdapat banyak aplikasi yang berjalan di suatu platform akan muncul ketergantungan terhadap suatu *cloud service provider* tertentu. Selain itu, apabila ditemukan celah keamanan yang belum dilakukan perbaikan pada *cloud provider* yang sedang digunakan, maka muncul risiko keamanan karena kesulitan migrasi ke *cloud provider* lain. Sehingga perlunya agreement saat awal kerjasama dengan *cloud provider* untuk kepastian kemudahan migrasi antar *cloud provider* sebagai sarana *Business Continuity Plan* bagi Bank.

4. Ketidakpastian Makroekonomi dan Risiko Geopolitik Global
   Ketidakpastian makroekonomi dan risiko geopolitik merupakan penyebab terjadinya perubahan arah ekonomi global yang juga dapat mempengaruhi ekonomi domestik. Selama tahun 2023 beberapa *trigger event* berpengaruh terhadap makroekonomi yaitu kebijakan US dalam menurunkan inflasi yang menaikkan suku bunga acuan, krisis perbankan US dan Eropa, konflik Rusia vs Ukraina, konflik Israel vs Palestina dan pertumbuhan ekonomi negara maju yang stagnan di tahun 2023. BRI yang memiliki eksposur luas baik domestik maupun internasional dimungkinkan terkena dampak tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

   Ketidakpastian makroekonomi global berpengaruh terhadap kondisi ekonomi domestik, seperti penurunan ekspor, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kenaikan inflasi, *capital outflows*, penurunan harga Surat Berharga Negara, depresiasi Rupiah, penurunan IHSG serta berdampak kepada perubahan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia seperti menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR).

   Sebagai mitigasi untuk mengurangi sensitivitas dan meminimalisir risiko terhadap volatilitas makroekonomi global, BRI melakukan langkah-langkah strategis dengan mengurangi sensitivitas terhadap instrumen keuangan yang terekspos risiko suku bunga dan nilai tukar, seperti pengelolaan *interest rate risk in the banking book*, *maturity gap*, pengelolaan konsentrasi deposan dan debitur, pengelolaan posisi devisa neto, dan pengelolaan *asset trading* dan investasi yang sesuai dengan kondisi pasar. Dari sisi *governance*, BRI secara regular melakukan *assessment* portofolio melalui *stress testing* (*solvency, credit, market & liquidity*), *Monitoring risk appetite statement*, *contingency funding plan* serta pengkinian *recovery plan*.

5. Perubahan Preferensi Nasabah
   Konflik antara Israel dan Palestina menyebabkan gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) meningkat. Preferensi dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia berubah yang mempengaruhi daya beli terhadap produk-produk yang masuk ke dalam list BDS. Masyarakat mulai mencari alternatif produk dan bergeser konsumsinya ke produk lokal. Hal ini dapat mempengaruhi portofolio BRI pada nasabah yang terafiliasi pada list BDS. Sebagai mitigasi, BRI melakukan *Monitoring* terhadap debitur yang terafiliasi pada list BDS.

6. Risiko Perubahan Iklim
   Perubahan iklim sebagai ancaman bagi seluruh penduduk di Indonesia. Peningkatan intensitas dan frekuensi peristiwa cuaca buruk, misalnya El Nino, banjir dan kebakaran hutan memiliki potensi kerusakan properti dan gangguan operasional. Perubahan iklim yang ekstrim tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami debitur BRI di daerah bencana tersebut secara material maupun immaterial sehingga mempengaruhi kualitas kredit yang diberikan. Sebagai langkah antisipasi, BRI telah melakukan kajian dan evaluasi secara berkala terhadap daerah-daerah yang rawan bencana dengan pertimbangan data eksternal dan informasi dari unit kerja di daerah tersebut. Atas kajian tersebut, BRI menambahkan pencadangan atas kredit debitur yang berada di daerah rawan bencana untuk menutup potensi kerugian yang tidak diharapkan yang timbul akibat perubahan iklim.

7. Risiko Politik
   Tahun 2024 adalah tahun pemilihan umum sehingga perubahan pemerintahan berpotensi meningkatkan ketidakpastian keberlangsungan ketentuan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun regulator sektor keuangan. Hal tersebut akan meningkatkan ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis dan investor. Ketidakpastian ini dapat menghambat pengambilan keputusan investasi dan pengeluaran konsumen karena menunggu untuk melihat bagaimana kebijakan akan berkembang dimana pelaku bisnis dan investor memerlukan kepastian ketentuan dan peraturan dalam bisnis yang dijalankan. Sikap *wait and see* tersebut selalu ada saat memasuki tahun politik seperti tahun 2024 sehingga berpengaruh pada pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga bagi BRI. Selain itu, BRI juga mengoptimalkan pengelolaan likuiditas sebagai mitigasi terhadap volatilitas pasar yang terjadi selama masa transisi pemerintahan dan selektif dalam penyaluran kredit terutama bagi *high politically exposed person/entity.*

Penilaian Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of model,* yaitu seluruh risk taking unit selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan IV 2023, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *Low to Moderate*. Selain penilaian risiko secara individu, BRI sebagai Konglomerasi Keuangan juga melakukan penilaian risiko secara terintegrasi. Hasil penilaian profil risiko terintegrasi pada semester II 2023, peringkat profil risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI berada pada tingkat *Low to Moderate*. Hasil *Self Assessment* tersebut menunjukkan bahwa BRI mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Self Assessment

Profil Risiko Individu dan Konsolidasi

Profil Risiko BRI Triwulan IV – 2023 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2023. Secara komposit, Profil Risiko BRI Triwulan IV – 2023 mendapatkan peringkat *Low to Moderate*. Dari 8 (delapan) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *Low to Moderate* meliputi: Risiko Kredit, Pasar Strategis dan Kepatuhan. Adapun yang mendapatkan peringkat *Low* yaitu Risiko Hukum, dan Reputasi dan yang mendapat peringkat *Moderate* yaitu Risiko Likuiditas dan Operasional.

No	Jenis Risiko	Triwulan IV 2023		
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
1	Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
2	Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
3	Likuiditas	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
4	Operasional	*Moderate*	*Fair*	*Moderate*
5	Hukum	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
6	Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
7	Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
8	Reputasi	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
Predikat Komposit		*Low to Moderate*	***Satisfactory*** **(Peringkat 2)**	***Low to Moderate*** **(Peringkat 2)**

Profil Risiko Terintegrasi

Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester II-2023 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2023. Secara komposit, Profil Risiko Terintegrasi BRI posisi Semester II Tahun 2023 mendapatkan peringkat *Low to Moderate*. Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *Low to Moderate* meliputi: Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Stratejik, Kepatuhan, Transaksi Intra-grup, dan Asuransi. Adapun yang mendapatkan peringkat risiko *Moderate* yaitu Risiko Operasional sedangkan peringkat *Low* yaitu Risiko Hukum dan Reputasi.

No	Jenis Risiko	Semester II 2023		
		Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
1	Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
2	Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
3	Likuiditas	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
4	Operasional	*Moderate*	*Fair*	*Moderate*
5	Hukum	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
6	Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
7	Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
8	Reputasi	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
9	Transaksi Intra-grup	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to moderate*
10	Asuransi	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Predikat Komposit		*Low to Moderate*	*Satisfactory*	***Low to Moderate*** **(Peringkat 2)**

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko



Sejak terbentuk Direktorat Manajemen Risiko pada tahun 2017, secara berkala dilakukan pengujian efektivitas sistem manajemen risiko melalui kaji ulang manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan terpisah dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun pihak eksternal untuk menjaga objektivitas dan *independency* penilaian efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi penilaian tingkat maturitas Manajemen Risiko BRI pada tahun 2023 dengan skala 1-5 berada pada skor 4,03 yaitu kriteria telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko telah menjadi bagian dalam proses, budaya, struktur manajemen risiko.

Strategi Manajemen Risiko Tahun 2024

Strategi pengelolaan risiko akan berfokus pada 5 (lima) aspek yaitu peningkatan kualitas kredit, kesadaran data, keunggulan operasional, budaya sadar risiko serta implementasi regulasi baru di area *market risk*. Peningkatan pada 5 (lima) aspek tersebut diupayakan melalui langkah-langkah strategis berikut:

1. Pengelolaan risiko kredit melalui penggunaan *credit risk rating* dan *credit risk scoring*, *Monitoring portfolio risk analysis, stress test* dan *review* model *loan portfolio guideline*, analisis dan *review* kondisi keuangan debitur, *Monitoring* nasabah yang telah direstrukturisasi, *selective unflagging strategy,* pencadangan biaya CKPN, serta pengembangan *tools* pengelolaan kredit bermasalah.
2. Proyek pemetaan dan asesmen pengendalian internal atas laporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*) terus dilanjutkan untuk *scope* di luar bisnis Mikro dan Kecil, untuk mendukung integritas dan kehandalan proses pelaporan keuangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada proses bisnis yang mempengaruhi laporan keuangan.
3. Implementasi perhitungan beban risiko pasar dengan metode *Standardized Approach* untuk pengukuran yang lebih sensitif terhadap risiko, memperkuat permodalan bank serta memenuhi perubahan regulasi OJK dan Basel III.
4. Program peningkatan budaya sadar risiko, yang ditujukan untuk meningkatkan *risk based mindset*, perilaku sadar risiko yang konsisten, kolaborasi dengan akuntabilitas yang jelas, praktik tata Kelola yang baik, dan strategi komunikasi yang efektif.
5. Program pengembangan *talent* (pelatihan, sertifikasi, *e-learning*, pengembangan modul dan lainnya), serta melalui pemanfaatan teknologi.
6. Program peningkatan kesadaran akan kualitas data, antara lain pentingnya data yang baik dan berkualitas sebagai dasar analisa untuk mengeliminasi bias dan mempercepat proses dalam pengambilan Keputusan (model dan kebijakan).
7. Pemanfaatan kecerdasan buatan serta penguatan kapabilitas risiko digital melalui *review* dan implementasi tata kelola IT maupun *IT Security* secara *end-to-end*.
8. Perbaikan tata Kelola asesmen risiko untuk produk dan aktivitas baru untuk membangun layanan operasional yang unggul.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai pada tahun 2023 manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

Fungsi Kepatuhan

RINGKASAN KINERJA DIREKTORAT

Direktorat Kepatuhan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menerapkan Fungsi Kepatuhan di Perseroan sesuai dengan peraturan OJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang paling sedikit meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan;
3. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator.

Sejalan dengan itu, Direktorat Kepatuhan bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan regulator yang berlaku, pemberian advis hukum dan penanganan perkara hukum, pengelolaan dan harmonisasi Kebijakan & Prosedur Perusahaan, serta implementasi aspek *Environmental, Social & Governance* dalam aktivitas operasional dan bisnis perusahaan.

***Key Performance Indicator* Direktorat Kepatuhan**

Dalam rangka mendukung aspirasi BRI tahun 2023, Direktorat Kepatuhan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* peringkat komposit 2 (baik).
2. Pencapaian skor Profil Risiko Hukum pada peringkat Low.
3. Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022 dengan kategori "*Most Trusted Company*" dengan skor 95,21.
4. Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi peringkat komposit 2 (baik).
5. Penilaian dari Lembaga Pemeringkat ESG, yaitu MSCI dengan predikat "A" dan dari Lembaga pemeringkat S&P Global CSA (*Corporate Sustainability Assessment*) dengan ESG *score* 63 dan rank *percentile* 92nd.
6. Bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC) sejak tanggal 12 Maret 2023, sebagai bentuk komitmen BRI untuk menjalankan aktivitas bisnis dan operasional yang berkelanjutan.

7. Pencapaian skor Profil Risiko Kepatuhan pada peringkat *low to moderate*.
8. Perkara hukum yang telah *In Kracht* Menang mencapai 98.92%.
9. Jumlah temuan audit yang disebabkan ketidakpahaman Kebijakan dan Prosedur menurun 10% dari tahun sebelumnya.

Program Kerja Direktorat Kepatuhan

Selain itu, untuk mendukung pencapaian KPI di atas, Direktorat Kepatuhan memiliki beberapa Program kerja yaitu sebagai berikut:

1. Standardisasi Proses Aspek Kepatuhan
   BRI melakukan standarisasi proses terkait pengelolaan aspek kepatuhan dan tata kelola melalui sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Standar Manajemen Mutu dan ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan di *Compliance Division*, serta sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat BRI.
2. Peningkatan *Awareness*
   Direktorat Kepatuhan meningkatkan *awareness* Pekerja terhadap implementasi budaya kepatuhan, program APU PPT, pengetahuan hukum, serta kebijakan dan prosedur, antara lain melalui:
   1) Harmonisasi, penyusunan dan atau *review* terhadap ketentuan internal termasuk ketentuan terkait dengan bidang kepatuhan, tata kelola, ESG serta hukum.
   2) Update pengetahuan pekerja BRI dengan narasumber *eksternal* yang *expert* di bidangnya, melalui *Workshop*, Diskusi Taman, dan lain sebagainya.
   3) Diseminasi materi komunikasi dalam rangka peningkatan pemahaman pekerja baik melalui media digital maupun fisik.
3. Pengkinian dan penyempurnaan atas Struktur Tata Kelola BRI yang mencakup Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perusahaan.
4. Pelaksanaan pengukuran atas tingkat kematangan/ maturitas Tata Kelola dan Kepatuhan secara individu serta secara terintegrasi.
5. Sinergi Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur BRI Group yang merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan dan kecukupan Kebijakan dan Prosedur di BRI Group.
6. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahaan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
   Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, Perseroan melakukan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM secara memadai.

   Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:
   1) Penyempurnaan Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach* (RBA)
   2) Penyempurnaan Kebijakan Penerapan Program APU PPT untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Lembaga Jasa Keuangan.
   3) Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran *Regional Risk Management & Compliance* dan *Branch Risk & Compliance*.
7. *Review* terhadap Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur untuk memperkuat implementasi tata kelola yang meliputi:
   1) Hierarki Kebijakan dan Prosedur;
   2) *Framework* pembentukan dan pengelolaan Kebijakan dan Prosedur;
   3) Kewenangan dalam pengelolaan Kebijakan dan Prosedur; dan
   4) *Guidance* sinergi tata kelola Kebijakan dan Prosedur BRI Group.
8. Harmonisasi Kebijakan dan Prosedur melalui unifikasi, kodifikasi, simplifikasi, maupun bentuk lainnya dalam rangka mengatasi *overlapping* dan/atau benturan kepentingan/kewenangan dalam Kebijakan dan Prosedur.
9. *Policy & Procedure Excellence* untuk memastikan Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki Perusahaan memadai sehingga meminimalkan potensi risiko dikemudian hari serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis .
10. *Enhancement platform* pengelolaan Kebijakan dan Prosedur (BRIPEDIA) secara kontinyu untuk mendorong literasi dan aksesibilitas pekerja terhadap Kebijakan dan Prosedur.
11. Pemberian Layanan Hukum
    Dalam rangka melakukan pemberian layanan hukum, Direktorat kepatuhan melalui *Legal Division* melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pengkajian terhadap perundang-undangan dan/atau kondisi lnternal/eksternal yang mempunyai implikasi hukum terhadap BRI termasuk penyempurnaan strategi penanganan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa lainnya.
2) Penanganan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan lainnya (litigasi).
3) Pemberian advis hukum berupa konsultasi hukum, opini hukum, dan informasi hukum serta layanan hukum kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja serta seluruh Unit Kerja BRI.
4) Pendampingan dalam pelaksanaan *Corporate Project* BRI.
5) Pembinaan/penyuluhan/pengajaran Hukum kepada Unit Kerja BRI.

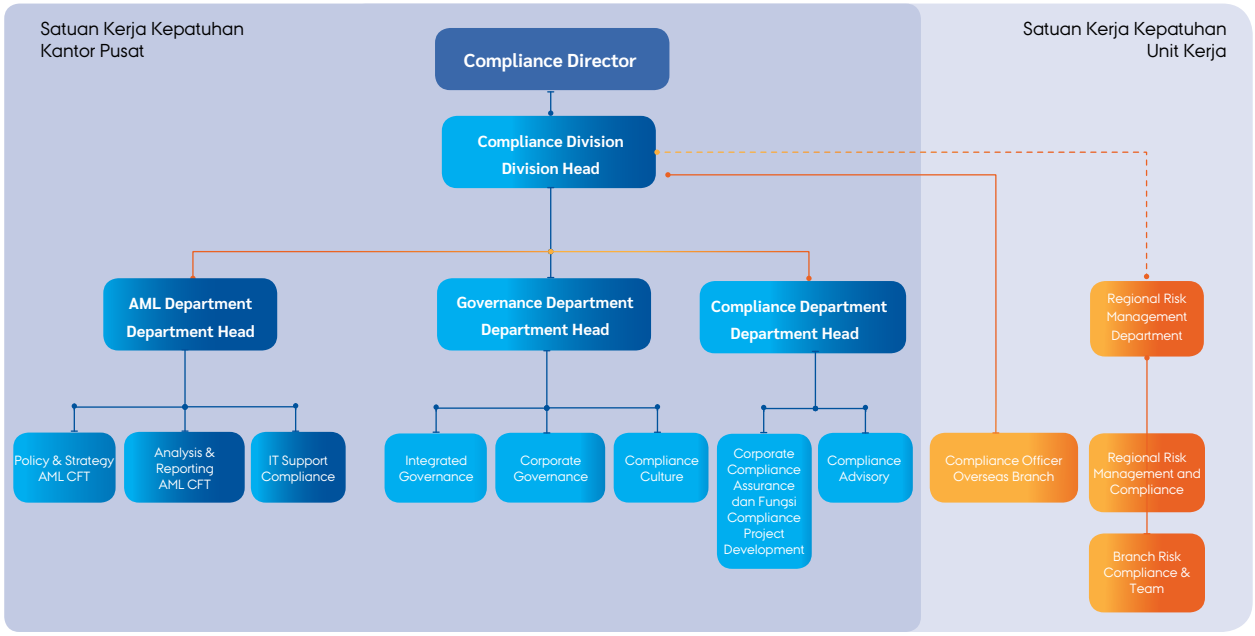
12. Mengimplementasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam aktivitas operasional dan bisnis BRI antara lain meliputi:
    1) Mengimplementasikan *environmental initiatives* melalui:
        i. Mengintegrasikan *climate-related risk* ke dalam *risk management* BRI melalui *pilot project Climate Risk Stress Testing* (CRST).
        ii. Melakukan pengelolaan emisi (*emissions management*) dalam aktivitas operasional melalui inisiatif *green network*, meliputi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, penyediaan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) di lingkungan Kantor Pusat BRI, dan melakukan instalasi solar *panel* di unit kerja BRI.
        iii. Menjalankan strategi dekarbonisasi melalui *green banking*
        iv. Berkomitmen kepada *Science Based Target Initiatives* (SBTi) untuk menetapkan target *Net Zero Emission* di tahun 2050.
    2) Menjalankan *social initiatives* melalui:
        i. Menunjukkan komitmen untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan
        ii. Menerbitkan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)
        iii. Menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
    3) Bergabung ke dalam *United Nations Global Compact* (UNGC), menunjukkan komitmen BRI terhadap Keberlanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
    4) Ketiga bentuk implementasi inisiatif ESG di atas, didukung oleh pilar *culture & communication*, melalui bentuk internalisasi *Sustainability Culture Program* (SCP), penerbitan Laporan Keberlanjutan, Laporan *Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD), Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2024-2028, serta *review* kebijakan secara berkala.

13. *Business process Reenginering*
    Melakukan penyederhanaan proses bisnis untuk mendukung efisiensi dan perkembangan bisnis melalui pengembangan sistem antara lain:
    1) *Integrated* AML CFT *Screening* (*Watchlist Screening* pada *Platform* Pembukaan Rekening & Transaksi).
    2) *AI for Monitoring Transaction System through Graph Technology*.
    3) RBA *Bankwide*.
    4) RBA *Customer*.
    5) AML CFT Sistem (Menu STR, CTR, IFTI *Reporting*).
    6) Sipesat *Reporting Tools*.
    7) Melakukan digitalisasi proses bisnis serta *digitalisasi database legal Division* untuk mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan kinerja *Legal Division*, melalui pengembangan Aplikasi DELEGASI (Data dan Informasi Legal Terintegrasi).
    8) BRIPEDIA *Mobile* agar pekerja dapat mengakses Kebijakan dan Prosedur kapanpun dan dimanapun untuk mendukung peningkatan literasi pekerja.

BRI berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan baik di tingkat korporasi maupun Unit Kerja Operasional. Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. BRI memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang terdiri dari dari Direktur Kepatuhan, Compliance Division Kantor Pusat serta fungsi kepatuhan di *Regional Office* BRI yang berada di bawah *Regional Risk Management & Compliance Team,* fungsi kepatuhan di BRI unit yang dilaksanakan oleh BRI *Unit Risk Management* & *Compliance*, serta fungsi kepatuhan Kantor Cabang Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi *Compliance Division* Kantor Pusat. Jajaran kepatuhan bersifat Independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. BRI telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Regulator dan *best practice* terkini.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Maret 2023, A. Solichin Lutfiyanto di angkat sebagai Direktur Kepatuhan dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE.56-DIR/KEP/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk sistem ketentuan dan pedoman internal BRI.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan BRI.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI atau BRI sebagai entitas tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan/atau otoritas pengawas yang berwenang beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris minimal secara triwulan.
8. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
   a. Bisnis dan operasional.
   b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
   c. *Treasury*.
   d. Keuangan dan Akuntansi.
   e. Logistik dan pengadaan barang dan jasa.
   f. Teknologi dan informasi.
   g. Audit intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak profesional dan objektif.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan



Kris Hananto

Compliance Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Surakarta pada tahun 1972. Usia 51 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Cibubur, Bogor.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Universitas Diponegoro (1995)
- Master of Laws (LLM) Melbourne University – Australia (2004)

PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bagian Dokumentasi & Administrasi Kredit, Divisi Administrasi Kredit BRI (2013 - 2017)
- *Group Head Legal Advice, Legal Division* BRI (2017 – 2018)
- *Vice President Legal Assessment & Advice, Legal Division* BRI (2019 – 2021)
- *Division Head, Compliance Division* BRI (2021 – sekarang)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. R.268-DIR/HCB/05/2021 tanggal 7 Mei 2021.

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 & Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan Level 1
- B*anking Compliance Level Manager*
- *Governance Risk Management Compliance Professional* (GRCP)
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

PELATIHAN SELAMA 2023

- *Oxford Bank Governance Programme – Oxford Said Business School, UK*
- *The Role of Governance Risk & Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance – Otoritas Jasa Keuangan*

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan BRI diantaranya:

1. Menyusun, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi dan kebijakan/ketentuan di bidang kepatuhan antara lain Uji Kepatuhan, Analisa Dampak, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
2. Menyusun, mengimplementasikan, beserta mengevaluasi program GCG, Budaya Kepatuhan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Program Pegendalian Gratifikasi, dan APU PPT.
3. Menganalisa transaksi keuangan mencurigakan, memantau dan mengevaluasi penerapan Program APU PPT secara *bank wide*.
4. Melakukan kegiatan Uji Kepatuhan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, kebijakan eksternal dan internal yang berlaku terhadap rencana kebijakan dan/atau keputusan Direksi dan/atau SEVP beserta memantau tindak lanjutnya.
5. Melakukan pemenuhan komitmen BRI terhadap regulator dan/atau otoritas pengawas yang berwenang.
6. Melakukan analisa dampak terhadap kebijakan regulator dan/atau otoritas pengawas lainnya yang memiliki dampak terhadap operasional dan bisnis BRI. Hasil Analisa dampak tersebut menjadi dasar BRI untuk melakukan pengkinian kebijakan internal BRI yang terkena dampak.
7. Melakukan pelaporan yang bersifat berkala dan/atau insidentil kepada regulator dan/atau otoritas pengawas yang berwenang yang terkait bidang kepatuhan.
8. Melaksanakan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BRI.
9. Melakukan *Monitoring* dan evaluasi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilakukan oleh *Regional Office*, Unit Kerja Luar Negeri (UKLN), dan Perusahaan Anak serta bisnis Jasa Kustodian BRI.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Satuan Kerja Kepatuhan, Perusahaan memfasilitasi dan mendorong pekerja Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengikuti Sertifikasi Kepatuhan beserta sertifikasi profesi lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan terdiri dari 60 (enam puluh) Pekerja yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Pekerja Organik dan 23 (dua puluh tiga) Pekerja Anorganik. Terhadap Pekerja *organic* Satuan Kerja Kepatuhan memfasilitasi dan mendorong pekerja untuk mengikuti Sertifikasi Kepatuhan beserta sertifikasi profesi lainnya. Adapun data pendukung pengembangan kompetensi satuan kerja kepatuhan adalah sebagai berikut

Jenis Sertifikasi	Jumlah Orang
Sertifikasi Kepatuhan	33
Sertifikasi Manajemen Risiko	17
Sertifikasi Profesi Lainnya	53

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

1. **Program Penguatan Budaya Kepatuhan.**
   Dalam rangka mewujudkan penguatan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BRI senantiasa melaksanakan upaya berkelanjutan sekaligus *improvement* dalam mewujudkan penguatan budaya kepatuhan yang dituangkan ke dalam Program Penguatan Budaya Kepatuhan BRI. Program Penguatan Budaya Kepatuhan BRI disusun berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Kepatuhan BRI (*Bankwide*) dan Hasil Penilaian Budaya Kepatuhan Regional BRI (*Regional Office, Branch Office,* dan BRI Unit). Beberapa program penguatan budaya kepatuhan yang telah dilaksanakan, antara lain:
   a. Pengkinian Kebijakan Budaya Kepatuhan sesuai dengan Buku 3 tentang Budaya Kepatuhan pada Surat Edaran Direksi BRI Nomor : SE.04-DIR/CTR/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023.
   b. Penyusunan serta pengkinian *database* kewajiban laporan kepada regulator secara berkelanjutan untuk mendukung Aplikasi *Compliance Reminder* yang digunakan untuk memberikan notifikasi atau *reminder* kepada Divisi terkait mengenai laporan yang harus dilaporkan kepada regulator melalui sarana *digital office* (aplikasi surat menyurat digital).
   c. Pengembangan Aplikasi *Compliance Reminder* (BRI *Compliance Reminder*) melalui sarana Aplikasi WhatsApp kepada Pekerja/ PIC laporan di masing-masing Divisi.
   d. Pelaksanaan sosialisasi, *workshop* serta webinar dalam rangka mendukung penguatan budaya kepatuhan kepada pekerja di seluruh Unit Kerja BRI.
   e. Peningkatan *awareness* pekerja melalui diseminasi materi komunikasi budaya kepatuhan berupa Landing Page BRISTARS, poster dan/atau banner di seluruh Unit Kerja BRI, penyusunan *Compliance Awareness of Regulatory Sanction* (CARS), *Self Learning* Budaya Kepatuhan.

2. Peningkatan Kualitas Kepatuhan Melalui Implementasi *Compliance Reminder*



Denda atas keterlambatan pelaporan kepada regulator memiliki dampak secara finansial dan reputasi bagi BRI. Untuk itu diperlukan upaya dalam menghindari keterlambatan dengan membangun sistem pengingat yang efektif. Oleh sebab itu *Compliance Division* melakukan peningkatan kapabilitas pada sistem *Compliance Reminder* yang mencakup 3 aspek yaitu:

a. **Pengelolaan** : Peningkatan pada *user interface* yang mudah digunakan dalam *input* data dan pengaturan parameter pengingat seperti periode dan jam sehingga memudahkan pekerja *Compliance Division* dalam mengelola data kewajiban pelaporan kepada regulator. Selain itu fitur lainnya yang ditambahkan adalah kapabilitas sistem dalam menyortir, menyaring, serta mengelompokkan data.

b. **Pemantauan** : Terdapat *dashboard Monitoring* yang meningkatkan kemudahan dalam melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator. *Monitoring progress* dapat dilakukan secara *realtime* terhadap suatu kewajiban berdasarkan *feedback* dari PIC. Untuk meningkatkan transparansi, *dashboard Monitoring* juga dapat diakses oleh PIC sehingga PIC dapat mengetahui apa saja kewajibannya dan status *progress*-nya.

c. **Pengingat** : Meningkatkan efektivitas fungsi pengingat kepada PIC pelaporan, sistem secara otomatis mengingatkan PIC berdasarkan *time line* (periode, jam dan pengulangan) yang ditetapkan sehingga PIC tidak akan lupa dan memiliki cukup waktu untuk melakukan pemenuhan. Sistem dapat menjangkau lebih personal kepada PIC karena telah terintegrasi dengan WA *Bussiness* sehingga sistem dapat mengirimkan pesan pengingat melalui WhatsApp ke nomor PIC. Selain itu sistem juga memiliki kapabilitas untuk membaca balasan pesan WhatsApp yang dikirim oleh PIC sehingga memudahkan PIC dalam memberikan *feedback* berupa *Update progress* dan konfirmasi pemenuhan pelaporan melalui aplikasi WhatsApp.

3. Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan

a. Analisa Dampak Kebijakan Eksternal

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan untuk mengetahui dampak atas Peraturan Perundang-undangan terbaru terhadap operasional BRI. *Compliance Division* telah melakukan Analisa Dampak terhadap 28 Peraturan Perundang-Undangan sepanjang tahun 2023.

b. Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian

Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Proses Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi. Selama tahun 2023 *Compliance Division* telah melakukan pengujian prinsip kehati-hatian sebanyak 284 dokumen pengujian, dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Kredit Wewenang Direksi	159
Perjanjian Kerjasama	36
Rencana Kebijakan	86
Corporate Action	1
Putusan Pengelolaan	2

c. Tanggapan Aspek Kepatuhan

Divisi Kepatuhan menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan kepada unit kerja terkait yang mengajukan permohonan kepada Divisi Kepatuhan. Tanggapan aspek kepatuhan dapat diberikan dalam hal terdapat rencana kebijakan/putusan Direksi, rencana perubahaan mekanisme operasional, rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta hal lain yang membutuhkan pendapat dari satuan kerja kepatuhan. Selama 2023 *Compliance Division* telah menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan sebanyak 362 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap rencana kebijakan, rencana pengambilan keputusan dan aktivitas/kegiatan lainnya yang dimintakan oleh Unit kerja BRI berjumlah 115 tanggapan.
- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap pengembangan produk BRI berjumlah 102 tanggapan
- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap rencana kerja sama BRI dan lainnya berjumlah 124 tanggapan.
- Tanggapan aspek kepatuhan terhadap *Corporate Action* berjumlah 21 tanggapan.

d. Pelaporan Produk dan/atau Aktivitas baru (PAB)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK0.3/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, Bank wajib melakukan pelaporan atas produk atau aktivitas baru yang akan dipasarkan kepada konsumen. Pelaporan rencana penerbitan PAB kepada regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam rangka mendapatkan persetujuan regulator yang di koordinasikan melalui Divisi Kepatuhan. Sepanjang tahun 2023 BRI telah mendapatkan 16 persetujuan atas pengembangan produk bank baru dan telah melaporkan realisasi produk atas 20 produk bank baru kepada Regulator.

4. Peningkatan *Awareness* Kepatuhan

a. *Compliance and Regulatory Awareness*

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan yang baik berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan perubahannya serta mendukung *corporate strategy* BRI yaitu "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*", *Compliance Division* memiliki strategi yang mengusung tema *Compliance Culture and* GCG *Through Digital Transformation*. Tujuan dari tema strategi itu antara lain adalah memperkuat kesadaran insan BRILian terhadap ketentuan eksternal yg memiliki dampak penting bagi BRI sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BRI telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Compliance Division menerbitkan "*Compliance & Regulatory Awareness* (CARE)" *Newsletter* setiap triwulan.



b. ***Compliance Awareness of Regulatory Sanction***
Dalam rangka meningkatkan *awareness* pekerja untuk mencegah adanya potensi pengenaan sanksi administratif dari regulator, serta sebagai bagian dari upaya penguatan Budaya Kepatuhan BRI maka Divisi *Compliance* menginisiasi materi komunikasi dengan judul *Compliance Awareness of Regulatory Sanction*.

c. ***ComPlayGames***
ComPlayGames merupakan salah satu program penguatan budaya kepatuhan untuk meningkatkan *awareness* seluruh Insan BRILiaN agar senantiasa patuh pada peraturan. *ComPlayGames* terdiri dari beberapa pertanyaan terkait dengan fungsi kepatuhan yang dikemas ke dalam sebuah permainan yang menarik. *ComPlayGames* dapat diikuti oleh seluruh Insan BRILiaN menggunakan *handphone* nya masing-masih dengan terlebih dahulu melakukan *scan barcode* yang terpasang dalam poster "Patuh itu Prinsip" yang terpasang di seluruh Unit Kerja BRI.



d. **Aspirasi Asistensi Diskusi Bersama *Compliance***
Aspirasi Asistensi Diskusi bersama *Compliance* merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) untuk fungsi kepatuhan di unit kerja melalui *Risk Management and Compliance* (RMC) , *Branch Risk and Compliance* (BRC) dan *Unit Risk and Compliance* (URC).

5. **Digitalisasi Proses Kepatuhan**
Untuk mendukung program *go-green* BRI, Satuan Kerja Kepatuhan mengkonversi beberapa proses kegiatan menjadi digitalisasi dengan tujuan meminimalkan penggunaan kertas, antara lain adalah sebagai berikut:

a. ***Board of Commissioners Dashboard***
Sebagai bentuk pengawasan aktif dewan komisaris dalam mengawasi aktivitas bank, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Anggota Direksi dan Manajemen Bank untuk selalu melakukan perbaikan yang efektif dan efisien. Dengan adanya *dashboard* ini, Divisi Kepatuhan dapat memantau setiap rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi atau Unit Kerja terkait secara optimal.

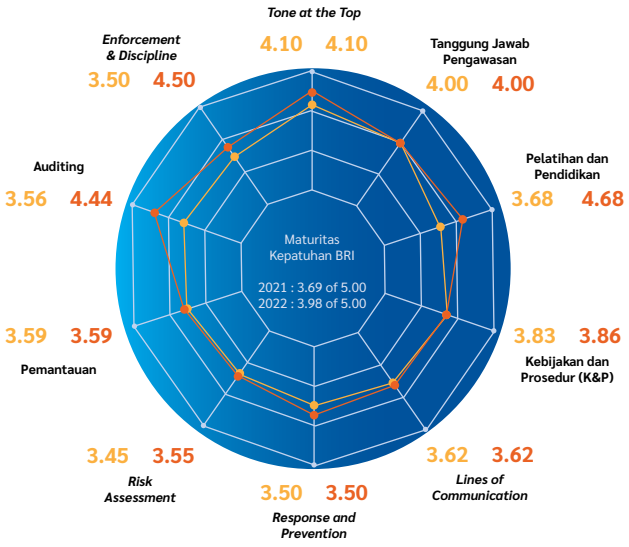
b. **Digitalisasi Uji Kepatuhan Kebijakan Internal**
Sebagaimana yang dimandatkan dalam POJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, untuk mengawal kebijakan yang dikeluarkan Direksi agar tidak bertentangan dengan ketentuan regulator, maka Satuan Kerja Kepatuhan menginisiasi aplikasi untuk mempermudah proses uji kepatuhan analisis internal.

c. **Digitalisasi Proses *Resume* dan Analisa Dampak Kebijakan Eksternal**
Untuk mendukung program *go-green* Bank BRI, satuan kerja kepatuhan mengkonversi proses kegiatan resume dan analisis dampak menjadi digitalisasi dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan kertas dalam kegiatan *resume* dan analisis dampak kebijakan *external*.

6. **Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan**
Sebagai komitmen BRI dalam memenuhi (*comply*) terhadap peraturan perundangan dan regulasi, pada tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sertifikat ISO 37301:2021 dan telah lulus sertifikasi.

7. **Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu**
   Untuk meningkatkan kualitas proses di Satuan Kerja Kepatuhan pada 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan *Surveillance* Audit ISO 90001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015
8. **Penguatan Tata Kelola Terintegrasi**
   BRI melakukan penyempurnaan *framework* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi keuangan BRI yang mencakup Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Audit Intern Terintegrasi dan *Performance Management*.
9. **Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)**
   Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kompleksitas produk, layanan jasa keuangan dan pola pemasaran (*multichannel marketing*) serta teknologi perbankan, Bank BRI senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*. Beberapa inisiatif perbaikan sistem AML CFT BRI yang telah dilakukan antara lain:
   a. ***Integrated* AML CFT *Screening* (*Watchlist Screening* pada *Platform* Pebukaan Rekening & Transaksi)**
      Integrated AML CFT *Screening* merupakan *service/* API yang berfungsi untuk melakukan proses *screening* berdasarkan *Watchlist Database* kepada nasabah, calon nasabah dan WIC dalam memitigasi risiko BRI dimanfaatkan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.
   b. ***AI for Monitoring Transaction System through Graph Technology***
      Sistem pemantauan transaksi nasabah dan *Walk in Customer* memanfaatkan *Artificial Intelligence* memanfaatkan teknologi *Graph Database*
   c. **RBA *Bankwide***
      Sistem penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSPM di Bank BRI menggunakan data *modeling* berdasarakan *historical & present data*
   d. **RBA Customer**
      Sistem penilaian Risiko Nasabah atas terjadinya TPPU, TPPT dan PPSPM pada saat *open account* dan *on-going Monitoring*
   e. **AML CFT Sistem (Menu STR, CTR, IFTI Reporting)**
      Sistem pemantauan anomali transaksi nasabah dan *reporting tools* atas laporan mandatori APU PPT (LTKL dan LTKT)
10. **Penilaian Maturitas Kepatuhan BRI (Bankwide) dan Penilaian Budaya Kepatuhan Regional.**
    Dalam rangka mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha, BRI telah melakukan penilaian Maturitas Kepatuhan BRI (*Bankwide*) dan Penilaian Budaya Kepatuhan Regional, dengan hasil sebagai berikut:

Penilaian Maturitas Kepatuhan BRI



Peringkat Maturitas Tata Kelola	Peringkat 1	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 4	Peringkat 5
Keterangan	*Forming*	*Developing*	*Standardized*	*Establish*	*Optimize*

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Penilaian terhadap kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh Direksi secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara semesteran juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan memuat informasi yang menyeluruh antara lain Penguatan Budaya Kepatuhan, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pencegahan Penyimpangan Terhadap Ketentuan Kehati-Hatian atas Kebijakan Internal, Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Kehati-Hatian Terhadap Kebijakan Eksternal, Pemantauan Terhadap Peraturan/ Ketentuan Eksternal, Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan Bank Terhadap Komitmen Eksternal, Pelaksanaan Program APU dan PPT dan lainnya.

Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, Perseroan melakukan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM secara memadai.

Dasar Hukum

Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 5 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahaan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/ SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER- 14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
15. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
16. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Tata cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person.*
17. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan.
18. Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor.
19. Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.
20. Surat Edaran PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
21. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
22. Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pedoman Pemilihan jenis Transaksi (*Transmode Code*) dan Instrumen Transaksi (*Funds Code*) dalam Aplikasi GoAML Bagi Bank Umum.
23. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme.
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

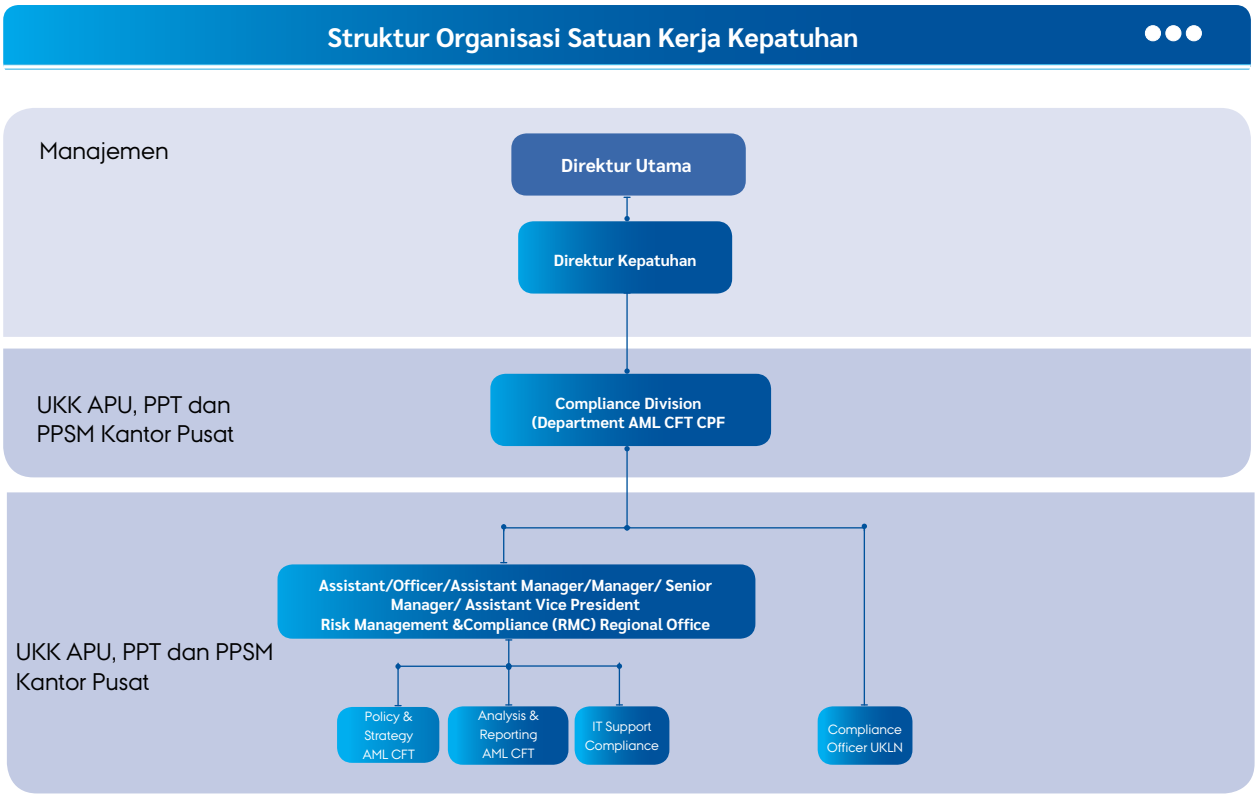
Ketentuan Internal

1. Surat Edaran Direksi BRI No:. SE.41-DIR/KEP/11/2023 Tanggal 30 November 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) No:. 92-KEP/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Implementasi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Pengelola APU, PPT dan PPPSPM

Penanggung jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh *Compliance Division* KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, *Compliance Division* KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan Penanggung jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab APU, PPT, dan PPPSPM Unit Kerja Operasional. Dalam hal ini dilaksanakan oleh *staff* Kepatuhan *Regional Office* serta BRC (*Branch Risk & Compliance*) & URC (*Unit Risk & Compliance*), dimana *staff* tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada *Compliance Division* KP BRI.

Struktur Organisasi APU, PPT dan PPPSPM



Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU, PPT dan PPPSPM

Tugas dan tanggung jawab UKK Kantor Pusat BRI cq. Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels)*, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan Direksi.
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi BRI, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
9. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah, termasuk dengan cara melakukan koordinasi dengan Unit Kerja BRI terkait untuk pengkinian data dimaksud.
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BRI serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan

program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.

12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait, termasuk mengawasi satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas untuk mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM,
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
15. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
16. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai BRI.
18. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik.
19. Memantau rekening efek serta pelaksanaan transaksi nasabah kustodian dan aktivitas hubungan usaha nasabah wali amanat.
20. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi efek.
21. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
22. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM (antara lain Bank indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Dalam hal sesuai dengan kebutuhan BRI berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional BRI, pelaksanaan analisis penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan PPPSPM, termasuk yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan tindak lanjut DTTOT dan DPPSPM sebagai berikut:

1. Peraturan bersama yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Peraturan bersama yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional terhadap Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah sebagai berikut:

1. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah di Unit Kerja Operasional.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
3. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
4. Memonitor pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
5. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
6. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional supervisi.
7. Menerima, melakukan analisis, memverifikasi dan/atau menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja supervisi.
8. Memantau secara berkala dan memonitor tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM di Unit Kerja Operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai BRI Unit Kerja Operasional supervisi.
10. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Unit Kerja Operasional terlaksana dengan baik.
11. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Sosialisasi APU, PPT dan PPPSPM

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU, PPT, dan PPPSPM di BRI, Pengelola APU, PPT, dan PPPSPM melakukan internalisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi materi APU, PPT, dan PPPSPM secara *online* melalui media Webinar dan *Zoom Meeting*, serta sosialisasi tatap muka kepada pekerja BRI dan perusahaan anak baik dari jajaran operasional maupun pemasaran.
2. Melaksanakan *self-learning* materi APU, PPT, dan PPPSPM.

Implementasi APU, PPT dan PPPSPM 2023

Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

I. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

1. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
   a. Direksi BRI harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh aktivitas operasional Bank, sehingga Direksi mampu mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang timbul sesuai dengan profil risiko Bank.
   b. Pada penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melakukan pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:
      - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
      - Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
      - Membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
      - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM.
      - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
      - Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
      - Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU, PPT, dan PPPSPM.
   c. Untuk Kantor Cabang BRI yang berkedudukan di luar negeri, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan aktif mewakili direksi adalah pimpinan kantor cabang luar negeri yakni pemimpin kantor cabang luar negeri dan/atau pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
   d. Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan BRI berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional BRI.
   e. Satuan kerja terkait antara lain satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau *Walk-In Customer* (WIC), seperti petugas pelayanan Nasabah (*frontliner*), petugas pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta *internal auditor*.
   f. Dalam hal terdapat kebutuhan BRI berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional BRI, pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
   a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
      - Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
      - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
      - Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Evaluasi dilakukan secara tertulis melalui rekomendasi forum yang dihadiri Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
      - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan

tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Frekuensi pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM BRI atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

II. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

1. Kebijakan dan Prosedur
   a. Ketentuan Kebijakan dan Prosedur terkait APU, PPT, dan PPPSPM
   b. Kebijakan Pendekatan Berdasarkan Risiko
   c. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
   d. Penetapan Toleransi Risiko
   e. Penyusunan Langkah-langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko
   f. Evaluasi Risiko Residual (*Residual Risk*)
   g. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko
   h. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko
   i. Penilaian *Customer Risk Rating*
2. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD)
   a. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah/Nasabah/*Walk-In Customer* (WIC)
   b. Permintaan Data dan Informasi pada Calon Nasabah dan *Walk-in Customer* (WIC)
   c. Permintaan Dokumen Pendukung pada Calon Nasabah dan WIC
   d. Proses Verifikasi Calon nasabah
   e. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner*
   f. Prosedur CDD Sederhana
   g. Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
   h. Bank sebagai Agen Penjual Produk Lembaga Keuangan Non-Bank
3. Prosedure *Enhanced Due Diligence* (EDD)
   a. Uji Tuntas Lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD)
   b. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)
   c. Prosedur EDD Terhadap Kategori Berisiko Tinggi
4. Pengelolaan Hubungan Usaha Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan/atau Transaksi
   a. Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi
   b. Penolakan Hubungan Usaha Calon Nasabah
   c. Penolakan Transaksi, Pembatalan Transaksi, dan/atau Penutupan Hubungan Usaha dengan Nasabah atau WIC
   d. Pengembalian Sisa Dana Nasabah
5. Pengkinian dan Pemantauan
   a. Pemantauan terhadap Profil Calon Nasabah
   b. Pemantauan terhadap Profil dan Transaksi Nasabah
   c. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM)
   d. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan
   e. LTKM atau STR Hasil Pemantauan
6. *Cross Border Correspondent Banking*
   a. Prosedur Pengelolaan *Cross Border Correspondent Banking*
   b. *Payable Through Account*
7. Transfer Dana
   a. Prosedur Transfer Dana
   b. Permintaan Informasi dan Pelaporan pada Transfer Dana

III. Pengendalian Intern

1. Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
3. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

IV. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Tahun 2023

1. *Integrated AML CFT Screening* (*Watchlist Screening* pada Platform Pembukaan Rekening & Transaksi).
2. AI *for Monitoring Transaction System through Graph Technology.*
3. RBA *Bankwide*.
4. RBA *Customer*.
5. AML CFT Sistem (Menu STR, CTR, IFTI *Reporting*).
6. Sipesat *Reporting Tools.*
7. *Tools* untuk Tanggapan dan Analisis Dampak dalam Pengujian Kepatuhan pada BRIPEDIA.

Tahun 2024

1. AI *for Monitoring Transaction System* (Integrasi Sistem AML CFT dengan Graph DB).
2. *Integrated Database* AML CFT (BRIFAST, QLOLA, MAO).
3. Pengembangan *Regulatory Technology* – INTEGRA.
4. Report Mutasi Rekening Lawan Transaksi pada BRISIM.
5. *Dashboard Monitoring* untuk *Bad data.*
6. Aplikasi RBA Tools OJK.
7. *Dashboard Reporting* CRS.

V. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI melakukan prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pekerja baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU, PPT, dan PPPSPM di BRI, Pengelola APU, PPT, dan PPPSPM melakukan pendidikan dan/atau pelatihan sebagai berikut:

1. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagai materi wajib (*Mandatory*) dalam pelaksanaan pendidikan terhadap pekerja baru di BRI maupun pendidikan regular lainnya yang diselenggarakan BRI.
2. *Compliance Division* bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan *self-learning* kepada Unit Kerja Operasional (UKO) level jajaran operasional dan petugas agen brilink, BRC/URC, *Risk Management & Compliance Team Regional Office*, pekerja audit intern wilayah serta divisi-divisi terkait seperti *Operational Risk Division*, *Investment Service Division* dan *Audit Standard & Quality Division*. Adapun tema self-learning mencakup materi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tipologi Korupsi dan *Politically Exposed Person*.
3. *Compliance Division* bekerja sama dengan BRI Corporate *University* menyelenggarakan *In House Training* (IHT) dengan rincian sebagai berikut:

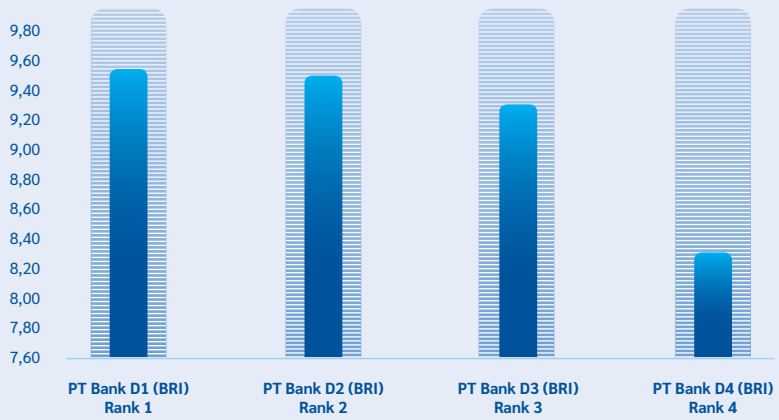
No.	*In House Training*	Peserta
1	Peningkatan Kualitas Data Nasabah BRI dan Pelaporan APU PPT	*Compliance Division, Distribution Network Division, Card & Digital Lending Division, Credit Operation Risk, Enterprise Data Management Division, International Business Division, Treasury Business Division, It Strategy & Governance Division, Invesment Services Division, Consumer Lending, Sales & Development Division, Wealth Management Division, Funding & Retail Payment Strategy Division, Application Management & Operation Division,* dan *Ultra Micro Business Division*.
2	Diskusi RBA Penerapan Program APU PPT pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Konglomerasi Keuangan (KK) BRI	*Compliance Division*, Bank Raya, BRI *Insurance*, BRI Life, BRI Danareksa Sekuritas, BRI *Multifinance*, BRI *Venture* Investama, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI *Management* Investasi.
3	Hasil *Mapping* RBA dan Penyususnan Roadmap LJK KK BRI	*Compliance Division*, Bank Raya, BRI *Insurance*, BRI *Life*, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Multifinance, BRI *Venture* Investama, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI *Management* Investasi.
4	RPOJK APU. PPT, dan PPPSPM Penilaian Risiko TPPU/TPPT	*Compliance Division*, *Invesment Services Division*, Bank Raya, BRI *Insurance*, BRI Life, BRI Danareksa Sekuritas, BRI *Multifinance*, BRI *Venture* Investama, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI *Management* Investasi.
5	Penyelarasan Strategi Penguatan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM pada LJK KK BRI	*Compliance Division*, *Invesment Services Division*, *Subsidiary Management Division*, Bank Raya, BRI *Insurance*, BRI *Life*, BRI Danareksa Sekuritas, BRI *Multifinance*, BRI *Venture* Investama, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI *Management* Investasi.
6	Modus-Modus Terkini Tindak Pidana Narkotika dan Perjudian, serta Pembahasan Ketentuan Penundaan Transaksi dan Pemutusan Hubungan Usaha	*Compliance Division, Operational Risk Division, Legal Division, Policy & Procedure Division, Application Management & Operation Division, It Strategy & Governance Division, Enterprise Data Management Division, Service & Contact Center Division, Operation Center Division, Funding & Retail Payment Strategy Division, Transaction Banking Division, Investment Services Division, International Business Division, Brilink Business Division, Card, Digital Lending & Assets Product Development, Governance Department, Bank Raya, BRI Insurance, BRI Life*, BRI Danareksa Sekuritas, BRI *Multifinance*, BRI *Venture* Investama, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan BRI *Management* Investasi.

4. *Compliance Division* Bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan Webinar tentang Sistem AML CFT 3.1 dan Pencatatan *Field* EDD dan BO pada Aplikasi NDS dalam rangka mengoptimalkan peran pekerja baru dalam penerapan *Compliance* di BRI.
5. *Compliance Division* Bekerja sama dengan BRI *Corporate University* menyelenggarakan Webinar tentang Undangan Sosialisasi dan Diskusi terkait Penerapan Prosedur CDD/EDD Transfer Dana yang Melibatkan Perusahaan *Remittance* dalam rangka mengoptimalkan peran pekerja baru dalam penerapan *Compliance* di BRI.
6. *Compliance Division* juga berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kepatuhan Level 1 maupun Level 2 kepada jajaran pekerja *Compliance* baik di Kantor Pusat maupun Regional Office dan Unit Kerja Operasional.

Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF)

FIR on ML/TF merupakan penilaian oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap integritas dan efektivitas pihak pelapor dalam menjalankan program APU, PPT, dan PPPSPM yang meliputi aspek komitmen, implementasi dan kepatuhan. Pada tahun 2023, BRI memperoleh Skor FIR on ML/TF 9,56 dengan Kategori Sangat Baik (*Highest Score* FIR on ML/TF pada KBMI 4).

Perbandingan *Score* FIR 2023



Pengawasan Transaksi untuk Menghadapi Pemilu

Dalam rangka mendukung terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil, dengan ini BRI senantiasa memberikan layanan perbankan terhadap Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memenuhi kewajiban pelaporan dan pemantauan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan PPATK. Dalam menindaklanjuti hal tersebut kami melakukan perbaikan sbb:

- Pilar *People*: Penguatan *resources* SDM.
- Pilar *Process*: Membuat kebijakan terkait mekanisme dan prosedur RKDK sesuai dengan ketentuan.
- Pilar *Platform*: *Enhancement* sistem AML CFT baik untuk pelaporan dan pemantauan.

Dengan jangkauan Unit Kerja BRI yang luas dan terpercaya sehingga jumlah RKDK paling banyak dibandingkan dengan Bank lainnya berdasarkan hasil evaluasi PPATK.

Perkara Hukum

Perkara hukum yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	92	13
Dalam proses penyelesaian	371	33
Total	**463**	**46**

Secara rinci per Perkara hukum material selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 283
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 052
3. Perkara Operasional & Jasa : 022
4. Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 013
5. Perkara *Treasury, Trade Finance* & IT : 001

Dengan rincian sebagai berikut:

2023					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	60	52	91	80	283
Kredit Non Lelang	12	11	12	17	52
Ops & Jasa	9	4	3	6	22
Support	8	2	2	1	13
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	1	1
GRAND TOTAL					371

1. Perkara *Inkracht* Menang

   Perkara *Inkracht* Menang pada tahun 2023 sebanyak 92 Perkara, yang terdiri dari:

   - Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 68 perkara
   - Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 15 perkara
   - Perkara Operasional & Jasa : 08 perkara
   - Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 01 perkara
   - Perkara *Treasury*, *Trade Finance* & IT : 00 perkara

Inkracht Menang	2023				
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	9	9	16	34	68
Kredit Non Lelang	0	3	3	9	15
Ops & Jasa	1	3	1	3	08
Support	1	0	0	0	01
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	00
GRAND TOTAL					92

Inkracht Kalah	2023				
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	0	0	0	0	0
Kredit Non Lelang	0	0	0	0	0
Operasional dan Jasa	0	0	0	0	0
Support	0	0	0	0	0
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL					0

2. Perkara *Inkracht* Kalah
   Perkara Inkrcaht Kalah pada tahun 2023 sebanyak **0 Perkara**, yang terdiri dari:
   - Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 0 perkara
   - Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 0 perkara
   - Perkara Operasional & Jasa : 0 perkara
   - Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 0 perkara
   - Perkara *Treasury*, *Trade Finance* & IT : 0 perkara

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PKPU PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO) dengan rincian proses perkara sebagai berikut: 1. Proses PKPU PT PMO: • 26 Jan 2023 – Permohonan Pencabutan PKPU; • 01 Feb 2023 – Rapat Kreditur; • 27 Feb 2023 – Rapat Kreditur Lanjutan; • 01 Mar 2023 – Putusan Perpanjangan PKPU; • 12 Jun 2023 – Rapat Proposal Perdamaian; • 06 Sep 2023 – *Voting* Proposal Perdamaian.	PKPU Berakhir dengan Perdamaian, atas Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak putusan tanggal 20 September 2023.	-	-	BRI wajib menjalankan (memberikan) restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut.

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
2. BRI telah mendaftarkan tagihan senilai Rp790.652.147.027,00 yang terdiri atas tagihan pokok Rp511.299.093.532,00, bunga Rp247.126.665.859,00 dan denda Rp32.226.387.636,00 dengan keterangan: • Pembayaran Pokok dan Bunga berjalan akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Pembayaran Pokok akan dilakukan dari hasil efisiensi Perusahaan sejak tahun 2024 bersama dengan calon mitra/ investor. Nilai pembayaran pokok diasumsikan akan meningkat secara nominal dari tahun ke tahun sampai di proyeksikan lunas pada tahun 2042; • Sehubungan dengan KSO baru akan dimulai pada tahun 2025, maka pembayaran pokok dan bunga pada periode tahun 2023 dan 2024 akan berasal dari hasil penjualan TBS Kebun Non-KSO dan Kas yang diterima dari KSO PKS dari Mitra. Sehingga Debitur berkewajiban untuk mencari Mitra lain.				
3. Ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian bagi Kreditur Bank (termasuk BRI) al: • Atas suku bunga dan denda berjalan dapat di review sewaktu-waktu oleh Kreditur Perbankan dan Perusahaan dengan memperhatikan kondisi usaha Perusahaan dan dapat dirubah dengan persetujuan Perusahaan. • Atas suku bunga dan denda berjalan yang ditangguhkan ditentukan sbb: • Pembayaran Pokok, Bunga dan Denda akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Atas bunga dan denda berjalan Yang Ditanggungkan tersebut diatas tidak dikenakan bunga/fee atau denda. • Jumlah penangguhan akan disesuaikan dengan perhitungan Kreditur pada saat pembukuan transaksi. • Bunga dan denda akan dihapuskan apabila Prestasi atau Pembayaran Pokok Kreditur Perbankan telah dilaksanakan atau dibayarkan lunas oleh Debitur.				
4. Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 20 September 2023.				

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, tidak terdapat permasalah hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT BRI Multifinance Indonesia	PT Tritama Niaga Berjaya - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	BRIF Menang, Gugatan Debitur Tidak Diterima	Rp111.210.000.000	-	-
PT Pegadaian	Penggugat Sdri. Amalia Komalasari menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu PT Pegadaian melakukan perbuatan melawan hukum pada saat melakukan pengambilan aset milik Ybs dalam rangka mengurangi Kerugian Perusahaan, oleh karena itu ybs mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri	Close	Rp186.947.891.300,00	PT Pegadaian tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terhindar dari tuntutan ganti rugi sebesar 186,9 Milyar	tidak ada
PT BRI Danareksa Sekuritas	Penggugat : PT BRIDS Tergugat : PT Evio Securities ("Evio") Pokok Perkara : Gugatan perdata wanprestasi terkait Perjanjian Pinjaman Dana Talangan.	Forum Penyelesaian Sengketa : PN Jakpus Putusan Tingkat Pertama : Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) Putusan Tingkat Banding : Menguatkan putusan PN	Nilai Tuntutan Materil : Rp 10M dan Kerugian Immateril Rp 10M	-	Tidak berdampak pada kegiatan usaha BRIDS. Penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari proses recovery piutang bermasalah sejak tahun 2019. Untuk mengoptimalkan proses penyelesaian, BRIDS sedang mengajukan permohonan bantuan hukum ke Jamdatun Kejaksaan Agung RI
PT BRI Asuransi Indonesia	Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gresik Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait ketidakpahaman nasabah atas isi polis asuransi kebakaran	Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: 12 Desember 2023 (Gugatan ditolak seluruhnya) (Belum ada upaya hukum selanjutnya)	Risiko Financial (materil & immateril) dan Reputasi Perusahaan	Tidak Ada	Tidak Signifikan
PT Permodalan Nasional Madani	Nihil	-	-	-	-
PT Asuransi BRI Life	**Perkara Perdata Wanprestasi dengan Nomor perkara 13/ Pdt.G/2023/PN Kng di PN Kuningan** **BRI Life sebagai Tergugat II** - Penggugat a.n Hj. Cicih Sutinsih sebagai ahli waris dari nasabah alm. H. Aan Heriana yang memiliki kredit di BRI - Menuntut pengembalian objek yang menjadi jaminan berupa 3 bidang tanah - Menuntut Uang Pertanggungan sebagai pelunasan dari kredit ybs	Proses Banding	Tidak terdapat risiko. Penggugat menuntut pelunasan kredit di BRI melalui cover asuransi BRI Life, tetapi Penggugat tidak memiliki asuransi di BRI Life.	Nihil	Menurunnya citra dan reputasi perusahaan

Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	Nihil	-	-	-	-
PT BRI Manajemen Investasi	Nihil	-	-	-	-
PT BRI Ventura Investama	Nihil	-	-	-	-

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material oleh Regulator yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

BRI secara transparan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi perusahaan terkini yang dapat diakses publik melalui berbagai media cetak dan elektronik termasuk diantaranya situs Perusahaan, Sosial Media, Bursa Efek Indonesia, dan portal BUMN.

Sekretaris Perusahan
Agustya Hendy Bernadi
Telepon: (+62 21) 575 1966
Faksimil: (+62 21) 570 0916
Email: humas@bri.co.id

Alamat Perusahaan
Kantor Pusat Bank BRI
Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 1210, Indonesia
Telp: (+62 21) 251 0244, 251 0254
Fax: (+62 21) 250 0065, 250 0077

Situs Perusahaan
www.bri.co.id
Call Centre
1500017, (+62 5798 7400)
Customer Care
callbri@bri.co.id
Media Sosial
Facebook: Bank BRI
Instagram: @bankbri_id
Twitter: @kontakBRI, @promo_
BRI, @bankbri_id
Youtube: BANK BRI
Chatbot: Sabrina
Melalui facebook *messenger* dan *whatsapp*/telegram: 081-212-14017

Investor Relation

Investor Relation Division BRI memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan kepada Investor. Selain itu, Investor Relation Division BRI berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

Contact Investor Relation

Siaga Ridha Hutama
Temporary Replacement of Division Head of Investor Relation
Gedung BRI II lantai 7
Jl. Jendral Sudirman No-44-46 Jakarta Pusat 10210
Telp.: +62 21 575 2019
Fax: +62 21 575 2010
Email: ir@bri.co.id
Website: www.ir-bri.com

Tugas dan Tanggung Jawab *Investor Relation*

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, *Investor Relation Division* BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

1. *Analyst Meeting*
   Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para *analyst*/ perusahaan sekuritas yang bertujuan agar *analyst*/ perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan *report* dengan data terkini kepada para investor.
2. *Analyst Gathering*
   Merupakan kegiatan pertemuan dengan para analyst maupun investor untuk memaparkan materi *current issue* atau materi khusus dengan tema tertentu, dengan tujuan untuk memberikan *update* terkait *current issue* maupun informasi perusahaan terkini.
3. *Company Visit - Field Visit*
   Menerima kunjungan dari investor/*analyst* yang ingin meng-*Update* kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.
4. *Conference Call*
   Melakukan kegiatan *teleconference* untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/*analyst* dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.

5. *Investor Newsletter*
   Update informasi terkini melalui penerbitan *newsletter* pada *website Investor Relation* BRI.
6. *Investor Conference* dan *Non-deal Roadshow*
   Melakukan kegiatan komunikasi melalui *1-on-1 meeting* maupun *group meeting* dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama di kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.
7. *Rating Review*
   Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (*Moody's, Fitch Rating*, S&P) maupun lembaga pemeringkat domestik (Pefindo).
8. Pengelolaan *Website Investor Relation* (www.ir-bri.com)
   Melakukan pengelolaan informasi pada *website Investor Relation* agar pemegang saham, pemegang surat utang, menganalisis pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. *Website* yang dikelola oleh *Investor Relation Division* tersebut juga terkoneksi dengan *website* perusahaan yaitu www.bri.co.id.
9. *Advisory Report*
   Melakukan penyusunan materi *advisory* yang berisi hasil valuasi saham BRI dan hasil identifikasi gap antara *intrinsic value* dan *target price* analis maupun hasil analisa lainnya untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.
10. *Market Update Advisory*
    Melakukan penyusunan materi berupa *Update* kondisi pasar saham, harga saham BRI dan *peers* untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.
11. *Financial Update*
    Melakukan penyusunan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para *analyst*/perusahaan sekuritas pada kegiatan *Analyst Meeting*.
12. *Financial Brief*
    Melakukan penyusunan ringkasan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka mengkomunikasikan kinerja BRI kepada para pekerja BRI.
13. BBRI *News*
    Melakukan penyusunan materi terkait *issue* terkini yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk dikomunikasikan secara internal baik kepada *Board of Management* ataupun pekerja BRI.

Profil *Head of Investor Relation*

Periode Januari – Juli 2023



Rustarti Suri Pertiwi

Investor Relation Executive

Warga negara Indonesia, lahir di Kebumen. Usia 46 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1999)
- MBA dari Monash Business School, Monash University, Melbourne – Australia (2005)

PENGALAMAN KERJA

Memulai karir di BRI pada tahun 2006 dengan beberapa jabatan yaitu:

- *Head of Internal Report, Financial and Management Accounting Division* (Oktober 2015 – Juni 2018)
- *Head of Investor Communication Department*, *Investor Relation Division* (Juli 2018 – Mei 2020)
- *Head of Asset & Liabilities Management Desk* (Juni 2020 – Januari 2021)
- *Head of Subsidiary Management Division* (Februari 2021 – September 2021)
- *Head of Investor Relation Division* (Oktober 2021 – Juli 2023))

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK No. R.509-DIR/HCB/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021

SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Periode Juli - Desember 2023



Siaga Ridha Hutama

Temporary Replacement of Division Head of Investor Relation

Warga negara Indonesia, lahir di Solo. Usia 37 Tahun per Desember 2023. Berdomisili di Jakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok (2009)
- MBA dari Alliance Manchester Business School, University of Manchester, Manchester – UK (2019)

PENGALAMAN KERJA

Memulai karir di BRI pada tahun 2010 dengan beberapa jabatan sebagai berikut :

- *Banking and Finance Team Leader, Subsidiary Management Division* (Juli 2020 – Maret 2021)
- *Head of Change Management Division*, PT. Bank Raya Indonesia, Tbk (April 2021 – Februari 2023)
- *Head of Advisory, Analytics, Valuation and Market Intelligence Department, Investor Relations Division* (Maret 2023 – Juni 2023)
- *Temporary Replacement of Head of Investor Relations Division* (Juli 2023 – sekarang)

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

S.271.e-DIR/HCB/07/2023 tanggal 24 Juli 2023

SERTIFIKASI

Tidak Ada

Kegiatan *Investor Relation* Selama Tahun 2023

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham di luar RUPS, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2023 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan.
2. Penyelenggaraan *Analyst Gathering* membahas topik-topik khusus, yaitu KUR Tahun 2022 serta Ekosistem Ultra Mikro
3. Kegiatan komunikasi berupa 27 *Non Deal Roadshow* dan 183 *meeting* baik secara *onsite* maupun virtual.
4. *Conference* sebanyak 13 kali dan *Non Deal Roadshow* sebanyak 19 kali.
5. Penyelenggaran BRI BISA (Bincang Saham) kepada pekerja BRI sebanyak 7 (tujuh) kali.
6. ESG *Rating*.
7. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* untuk *Fitch, Moodys,* S&P serta Pefindo.
8. Penyelenggaraan *Public Expose*, RUPS, RUPSLB dan Investor *Newsletter* yang telah di*publish* sebanyak 5 *newsletter*.
9. Pengelolaan informasi terkini pada *website Investor Relations* (www.ir-bri.com) meliputi:
   a. Informasi Perusahaan.
   b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan.
   c. *Corporate Governance*.
   d. Informasi Terkait RUPS.
10. *Disclosure* atas *Regulatory Filings, Events Calender, Release,* Kinerja Saham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan.

Siaran *Pers*

Selama tahun 2023, BRI telah melaksanakan siaran *pers* sebanyak 540 kali yang dapat diakses pada *website* Perseroan dengan kategori sebagai berikut.

Kategori	Total
Kinerja Keuangan	48
Aksi Korporasi & Saham	27
Pencapaian & Penghargaan	58
Pemberdayaan UMKM	53
Corporate Event & Sponsorship	45
Kerja Sama Antarlembaga	27
ESG	18
Human Capital	13
Ekonomi Kerakyatan/Program Pemerintah	14
Transformasi	24
Edukasi Perbankan	19
Layanan & Operasional Perbankan	52
Inklusi Keuangan & Agen BRILink	22
Produk & Promo	35
CSR/BRI Peduli	49
Lainnya	36
Grand Total	**540**

Transparansi Penyampaian Laporan

BRI memiliki sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat. Salah satu bentuk transparansi Perseroan yaitu menyampaikan laporan-laporan kepada regulator. BRI telah menyampaikan laporan-laporan secara tepat waktu pada regulator terkait diantaranya:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	B.280a.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	20 Desember 2023	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian Dividen Interim	OJK
2	B.280.e-CSC/CSM/CGC/12/2023	18 Desember 2023	Jadwal *Dividen* Tunai Interim	OJK
3	B.274.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	8 Desember 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
4	B.272.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	8 Desember 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
5	B.270.e-CSC/CSM/CGC/011/2023	8 Desember 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham November 2023	Bursa Efek
6	B.269.e-CSC/CSM/CGC/12/2023	5 Desember 2023	Laporan Hasil *Public Expose* - Tahunan	Bursa Efek
7	B.259.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	27 November 2023	Penyampaian Materi *Public Expose* - Tahunan	Bursa Efek
8	B.250.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	16 November 2023	Rencana Penyelenggaraan *Public Expose* - Tahunan	Bursa Efek
9	B.239.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	10 November 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Oktober 2023	Bursa Efek
10	B.241.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	10 November 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
11	B.242.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	10 November 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
12	B.237.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	8 November 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	OJK
13	B.235.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	6 November 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Permintaan Waktu Diskusi	OJK
14	B.233.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	27 Oktober 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK
15	B.231.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	24 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
16	B.225.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	11 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
17	B.224.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	10 Oktober 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham September 2023	Bursa Efek
18	B.223.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	10 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
19	B.222.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	10 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
20	B.220.e-CSC/CSM/CGC/10/2023	5 Oktober 2023	Perubahan Komite Audit	OJK
21	B.0557-DIR/FMA/03/2023	2 Oktober 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
22	B.2275-DIR/INV/TCS/CPD/09/2023	25 September 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023	OJK
23	B.2274-DIR/INV/TCS/CPD/09/2023	25 September 2023	Penyampaian Prospektus	OJK
24	B.2273-DIR/INV/TCS/CPD/09/2023	25 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
25	B.211.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	14 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Permintaan Waktu Diskusi	OJK
26	B.209.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	12 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
27	B.446.e-CSC/CSM/PAF/09/2023	10 September 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Agustus 2023	Bursa Efek
28	B.206.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	10 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
29	B.203.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	10 September 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
30	B.205.e-CSC/CSM/CGC/09/2023	7 September 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
31	B.197.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	1 September 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK
32	B.195.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	29 Agustus 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
33	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(14)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
34	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(13)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
35	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(12)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
36	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(11)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
37	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(10)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
38	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(9)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
39	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(8)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
40	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(7)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
41	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(6)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
42	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(5)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
43	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(4)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
44	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(3)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
45	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023(2)	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
46	B.193.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	25 Agustus 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
47	B.185.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	11 Agustus 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
48	B.180.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	4 Agustus 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Juli 2023	Bursa Efek
49	B.181.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	10 Agustus 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
50	B.179.e-CSC/CSM/CGC/08/2023	10 Agustus 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
51	B.13-CSC/CSM/CGC/08/2023	1 Agustus 2023	Perubahan *Corporate Secretary*	OJK
52	B.12-CSC/CSM/CGC/07/2023	28 Juli 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
53	B.11-CSC/CSM/CGC/07/2023	28 Juli 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
54	B.174.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	27 Juli 2023	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2023 Ditelaah secara terbatas	OJK
55	B.168.e.CSC/CSM/CGC/07/2023	20 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
56	B164.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	13 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
57	B.164.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	12 Juli 2023	Laporan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*)	OJK
58	B.161.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	10 Juli 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	OJK
59	B.155.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	10 Juli 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Juni 2023	Bursa Efek
60	B.335.e-CSC/CSM/PAF/07/2023	10 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
61	B.156.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	10 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
62	B.152.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	4 Juli 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	OJK
63	B.153.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	4 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
64	B.154.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	4 Juli 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
65	B.148.e-CSC/CSM/CGC/06/2023	22 Juni 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
66	B.146.e-CSC/CSM/CGC/06/2023	16 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
67	B.140/CSC/CSM/CGC/06/2023	13 Juni 2023	Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas Penawaran Umum Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	OJK
68	B.133/CSC/CSM/CGC/06/2023	9 Juni 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Mei 2023	Bursa Efek
69	B.134/CSC/CSM/CGC/06/2023	9 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
70	B.138/CSC/CSM/CGC/06/2023	9 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
71	R.0572-DIR/ALM/06/2023	5 Juni 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
72	B.125.e-CSC/CSM/CGC/05/2023	31 Mei 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	OJK
73	B.116/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
74	B.114/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham April 2023	Bursa Efek
75	B.113/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
76	B.112/CSC/CSM/CGC/05/2023	10 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
77	B.109.e-CSC/CSM/CGC/05/2023	4 Mei 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
78	B.106.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	28 April 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	OJK
79	B.104.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	26 April 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
80	B.101.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	12 April 2023	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	OJK
81	B.183/CSC/CSM/PAF/04/2023	10 April 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Maret 2023	Bursa Efek
82	B.99/CSC/CSM/CGC/04/2023	10 April 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
83	B.98/CSC/CSM/CGC/04/2023	10 April 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
84	B.93.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	3 April 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Penambahan Modal pada PT BRI Ventura Investama	OJK
85	B.90.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	28 Maret 2023	Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Tahunan	OJK
86	B-77.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	15 Maret 2023	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 15032023	OJK
87	B.77-CSC/CSM/CGC/03/2023	15 Maret 2023	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	OJK
88	B.77.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	14 Maret 2023	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	OJK
89	B.69.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Maret 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Februari 2023	Bursa Efek
90	B.73.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Maret 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
91	B.75.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Maret 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
92	B.68.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	6 Maret 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Kepemilikan Saham pada PT Asuransi BRI Life	OJK
93	B.62.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	1 Maret 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
94	B.5-CSC/CSM/CGC/02/2023	24 Februari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
95	B-58/CSC/CSM/CGC/02/2023	21 Februari 2023	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	OJK

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
96	B59e/CSC/CSM/CGC/02/2023	17 Februari 2023	Penyampaian Laporan Tahunan dan Berkelanjutan	OJK
97	B.58/CSC/CSM/CGC/02/2023	10 Februari 2023	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK
98	B.46/CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Februari 2023	Perubahan Struktur Pemegang Saham Januari 2023	Bursa Efek
99	B.48/CSC/CSM/CGC/03/2023	10 Februari 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
100	B.45/CSC/CSM/CGC/03/2023	9 Februari 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
101	B.49.e-CSC/CSM/CGC/02/2023	8 Februari 2023	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	OJK
102	B.294-DIR/FMA/02/2023	3 Februari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan	OJK
103	B.41.e/CSC/CSM/CGC/02/2023	2 Februari 2023	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	OJK
104	B.40-e.CSC/CSM/CGC/02/2023	2 Februari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Pembelian Kembali Saham	OJK
105	B.41.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	2 Februari 2023	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK
106	B.42.e-CSC/CSM/CGC/02/2023	31 Januari 2023	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	OJK
107	B.37.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	30 Januari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	OJK
108	B.36.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	26 Januari 2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengakhiran Periode Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan Perseroan (*Buyback*)	OJK
109	R.57-DIR/CSC/01/2022	17 Januari 2023	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK
110	B.4-CSC/CSM/CGC/01/2023	17 Januari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
111	B.78DIR/INV/01/2023	16 Januari 2023	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK
112	B.78-DIR/INV/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	OJK
113	B.52-CSC/CSM/CGC/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
114	B.53-CSC/CSM/CGC/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
115	B.23.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	13 Januari 2023	Laporan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*)	OJK

Kode Etik

BRI memiliki Kode Etik yang merupakan nilai dasar bagi Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh Insan BRI di seluruh jenjang organisasi perusahaan. Kode Etik dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan. Kode Etik diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi. Penerapan Kode Etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan. Kebijakan yang mengatur mengenai Kode Etik Perusahaan dan implementasinya tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09.a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama atas *Corporate Governance* Buku 6 (Kode Etik) .

Prinsip Kode Etik

1. Komitmen dan Keteladanan Pemimpin
   Komitmen dari pemimpin dicerminkan dari kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik melalui Surat Pernyataan Kode Etik. Di samping itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga menjadi teladan bagi seluruh Insan BRILiaN dalam mempedomani serta mengimplementasikan Kode Etik.
2. Transparansi
   Prinsip Transparansi tercermin dari keterbukaan dan publikasi yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan, implementasi dan pelanggaran Kode Etik yang terjadi di BRI sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban
   Tanggung jawab BRI sebagai Bank atas implementasi Kode Etik antara lain dicerminkan dari hubungan BRI dengan nasabah, pesaing, mitra kerja, regulator, *stakeholder* serta masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik bagi Insan BRI terdokumentasi dalam Surat Pernyataan Kode Etik serta penerapan perilaku yang sesuai dengan Kode Etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Pengendalian
   Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dilaporkan melalui sarana pelaporan *Whistleblowing System* (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Disiplin BRI.
5. Pengawasan
   Terhadap implementasi kebijakan Kode Etik di BRI dilakukan Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan Kode Etik di BRI telah dipahami oleh Insan BRI serta diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat selalu menjadi pedoman bagi Insan BRI. Kebijakan Kode Etik juga senantiasa dilakukan perbaikan sesuai dengan kondisi terkini

Pokok-Pokok Kode Etik

Penerapan Kode Etik Perusahaan dibagi menjadi Kode Etik Bank dan Kode Etik Insan BRI. Elemen Kode Etik Bank adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Regulator	1. Bank berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan regulator yang berlaku dalam segala aktivitas bisnis Bank. Ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis Bank adalah peraturan perundangan yang berlaku bagi Bank baik peraturan di bidang perbankan, pasar modal, perseroan terbatas, BUMN, Keuangan Negara maupun ketentuan dan kebijakan regulator lainnya. 2. Kepatuhan terhadap ketentuan a. Bank berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. b. Bank bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan, informasi dan/atau tanggapan atas permintaan penjelasan dari regulator. 3. Bank berkomitmen untuk menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hubungan Bank dengan Insan BRI	1. Perlakuan yang setara untuk seluruh pekerja a. Bank senantiasa memperlakukan setiap pekerja secara obyektif, transparan, adil dan setara. b. Bank senantiasa menyediakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja. 2. Pengembangan bakat pekerja Bank senantiasa menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan bakat pekerja dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja pekerja. 3. Mengutamakan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja Bank senantiasa menyediakan lingkungan kerja sesuai dengan nilai-nilai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4. Bank mendukung terwujudnya hubungan baik antar pekerja Bank berkomitmen memfasilitasi terbentuknya hubungan yang baik antara sesama pekerja antara lain melalui kebijakan tentang berperilaku saling menghargai di tempat kerja (*Respectful Workplace Policy*), implementasi BRI *One Culture* dan pelaksanaan BRILiaN *Improvement* Forum (BIF). 5. Bank menyediakan tempat kerja yang mendukung *Respectful Workplace Policy* Bank senantiasa menyediakan tempat kerja yang mendukung *Respectful Workplace Policy* guna mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam rangka menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan.
3. Hubungan dengan nasabah	1. Mengutamakan kebutuhan nasabah Bank berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank dengan menyediakan produk dan/atau jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Perlakuan yang adil kepada nasabah Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil kepada nasabah dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Disamping itu, dalam berhubungan dengan nasabah, bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. 3. Memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah Bank senantiasa memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah dengan memahami kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank. Di samping itu, bank menerapkan perilaku sesuai dengan market conduct yaitu menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan. 4. Keterbukaan dan transparansi informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dalam komunikasi dengan nasabah Bank berkomitmen untuk mendesain, menyusun informasi, melakukan keterbukaan serta transparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah dengan mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan dan transparansi informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 5. Perlindungan dan kerahasiaan terhadap data dan/atau informasi pribadi Bank berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi terkait data nasabah dan tidak menyebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan, baik internal maupun eksternal serta menerapkan praktik perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hubungan dengan Pesaing dan Mitra Kerja	1. Hubungan dengan pesaing a. Bank berkomitmen untuk melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan/atau jasa layanan yang berkualitas dalam menjalankan bisnis Bank. b. Bank berkomitmen senantiasa menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. c. Bank berkomitmen menjunjung tinggi praktik anti monopoli sesuai dengan perundang-undangan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. d. Dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan, Bank memperhatikan kewajaran biaya atau harga, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial serta persaingan sehat dalam melakukan usaha. 2. Hubungan dengan mitra kerja a. Bank berkomitmen bahwa dalam berhubungan dengan mitra kerja didasarkan pada praktik-praktik usaha yang sah, wajar serta memberikan manfaat yang optimal bagi bank dan mitra kerja dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. b. Bank wajib melakukan evaluasi yang objektif terhadap vendor dan menghindari adanya benturan kepentingan. c. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada Mitra Kerja yang bekerja sama dengan BRI. d. Bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia dalam berhubungan dengan Mitra Kerja.
5. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Investor	1. Memberikan kontribusi dan *value* yang optimal bagi pemegang saham dan investor Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi serta *value* yang optimal bagi pemegang saham dan investor. 2. Melindungi hak pemegang saham a. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk menggunakan hak-hak sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Bank senantiasa menghargai dan menjalankan keputusan RUPS dengan baik. c. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh kepada pemegang saham. d. Bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia dalam berhubungan dengan pemegang saham. 3. Transparansi dan keterbukaan informasi Bank berkomitmen untuk menyusun, menyampaikan laporan ataupun pengungkapan dengan jelas, akurat dan komprehensif kepada pemegang saham, nasabah dan *stakeholders*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Hubungan dengan Regulator	1. Kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan regulator Bank berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan regulator sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Integritas serta akurasi pelaporan dan informasi bank Bank berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, regulator dan pihak berwenang lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup	1. Menghormati Hak Asasi Manusia a. Dalam berhubungan dengan stakeholder, bank senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. b. Bank senantiasa memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada masyarakat. 2. Melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim Bank wajib menciptakan paradigma kinerja keuangan Perusahaan dengan tetap menyeimbangkan kepentingan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) yang baik untuk menghasilkan nilai tambah (*Value Added*) bagi *stakeholder* dalam jangka Panjang (*Sustainability*) dan kontribusi pada kemajuan bangsa dan kelestarian lingkungan. 3. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan Bank wajib memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang akan ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan a. Bank senantiasa menjalankan dan meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan Bank dengan mendukung langkah-langkah positif yang diambil oleh masyarakat setempat serta mendorong keterlibatan Insan BRI ke dalamnya. b. Bank senantiasa mendukung program-program Pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 5. Kontribusi pada bantuan amal (*Charity*) dan *sponsorship* a. Kontribusi Bank dalam bentuk apapun terhadap bantuan amal (*Charity*) dan sponsorship selalu dilakukan sesuai dengan kode etik bank serta ketentuan yang berlaku, tidak dalam kapasitas kegiatan yang mengandung politik, serta tidak dijadikan sarana suap dan korupsi. b. Kontribusi Bank pada bantuan amal (*Charity*) dan sponsorship wajib disampaikan kepada publik. 6. Larangan keterlibatan dalam aktivitas politik Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan dana, fasilitas dan sumber daya Bank untuk disumbangkan kepada dan/atau digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan politik termasuk bantuan amal (charity) dan *sponsorship* dalam kegiatan politik.
8. Etika sebagai Kelompok Usaha (BRI Group)	1. Optimalisasi nilai perusahaan dalam grup a. Bank senantiasa berusaha untuk memaksimalkan potensi BRI Group. b. Dalam hal memaksimalkan potensi bisnis BRI Group, Bank wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, ketentuan regulator dan peraturan internal. 2. Sikap saling menghormati dalam hubungan dengan BRI Group Bank senantiasa berperilaku hormat dalam menjalin hubungan dengan Entitas BRI Group. 3. Menjaga kerahasiaan informasi grup Dalam melakukan pertukaran informasi/kebijakan antara BRI Group dilakukan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan perusahaan di Bank maupun Entitas BRI Group dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 4. Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan dengan Entitas BRI Group Bank senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan baik melalui koordinasi yang efektif dan efisien.
9. Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan dan Anti Korupsi	Bank berkomitmen untuk selalu melaksanakan pengendalian gratifikasi, anti penyuapan dan anti korupsi melalui Kebijakan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi serta pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

Elemen Kode Etik Insan BRI adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Terhadap Hukum, Kebijakan Regulator dan Kebijakan Internal Bank	1. Insan BRI menjunjung tinggi kepatuhan bank terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal bank yang berlaku. 2. Kepatuhan terhadap ketentuan Insan BRI berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator dan Internal Bank. 3. Insan BRI senantiasa patuh terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kode Etik sebagai Insan BRI	1. Larangan penyalahgunaan jabatan a. Insan BRI wajib untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. b. Insan BRI berkomitmen untuk tidak melakukan segala bentuk perbuatan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan fungsi, tugas dan wewenang sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan internal Bank, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merugikan Perusahaan. 2. Mencegah benturan kepentingan a. Insan BRI wajib menghindari seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. Insan BRI wajib melaporkan apabila terdapat dalam situasi benturan kepentingan. c. Insan BRI dilarang untuk memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas seluruh fasilitas bank yang bersifat khusus dan bertujuan untuk diri sendiri, afiliasinya dan kelompoknya. d. Insan BRI dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali telah mendapatkan penugasan atau izin tertulis dari Perusahaan. 3. Larangan insider trading a. Insan BRI yang memiliki dan menerima informasi rahasia terkait perusahaan tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, afiliasi dan pihak ketiga lainnya. b. Insan BRI dilarang menyalahgunakan posisinya untuk mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan. 4. Melindungi aset bank a. Insan BRI wajib memelihara dan melindungi seluruh aset bank (termasuk data yang dimiliki oleh bank). b. Insan BRI wajib menggunakan aset Bank hanya untuk keperluan kedinasan dan tidak menggunakan untuk keperluan Pribadi. 5. Menjaga keamanan informasi Bank dan Perusahaan Anak a. Insan BRI dilarang untuk menyampaikan informasi internal Bank yang mencakup rahasia bank dan rahasia jabatan, kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Informasi internal Bank tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait rencana strategis bisnis Bank, hasil riset internal perbankan, pengembangan produk perbankan, data ketenagakerjaan, hasil audit, dokumen-dokumen internal serta informasi penting lainnya. b. Insan BRI wajib melindungi kerahasiaan informasi internal Bank, baik pada saat masih bekerja dengan Bank maupun setelah berhenti dari Bank atau setelah tidak berhubungan lagi dengan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Insan BRI wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank termasuk distribusi kebijakan/prosedur kepada pihak eksternal (termasuk BRI Group dan entitas perusahaan lain di luar BRI Group) sesuai ketentuan yang berlaku. d. Insan BRI berkomitmen untuk tidak mengungkapkan, melaporkan, menyebarluaskan, mentransfer, membocorkan maupun dengan cara lainnya yang menyebabkan data pribadi dan/atau informasi rahasia diketahui oleh pihak lain untuk tujuan apapun yang dapat merugikan bank dan atau tidak sejalan dengan kebijakan bank. 6. Kewajiban pelaporan atas pelanggaran Kode Etik Apabila mengetahui pelanggaran atas Kode Etik di lingkungan bank, Insan BRI wajib untuk melaporkan melalui sarana *whistleblowing system* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Mematuhi ketentuan dalam menggunakan media sosial Insan BRI wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di BRI dalam penggunaan media sosial. 8. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Fraud Insan BRI berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud*, salah satunya melalui *Whistleblowing System* (WBS).
3. Hubungan dengan nasabah	1. Mengutamakan kebutuhan nasabah a. Insan BRI wajib memperhatikan serta mengutamakan kebutuhan setiap nasabah melalui hubungan yang baik kepada nasabah, dengan tetap memperhatikan kewajaran dan menghindari adanya benturan kepentingan. b. Insan BRI berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank dengan menyediakan produk dan/atau jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah. 2. Menghormati nasabah Insan BRI senantiasa menghormati nasabah dalam melakukan pelayanan dan selalu memberikan pelayanan prima dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 3. Perlakuan yang adil kepada nasabah Insan BRI senantiasa memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil serta setara kepada setiap nasabah. Disamping itu, dalam berhubungan dengan nasabah, Insan BRI senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. 4. Memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah Insan BRI senantiasa memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah dengan memahami kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank. 5. Keterbukaan dan transparansi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam komunikasi dengan nasabah Insan BRI senantiasa mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. 6. Perlindungan dan kerahasiaan terhadap aset, data pribadi, dan transaksi nasabah a. Insan BRI berkomitmen untuk menjaga seluruh informasi Bank dan tidak menyebarluaskannya kepada pihak yang tidak berkepentingan. Insan BRI diperbolehkan memberikan informasi Bank, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BRI yang berlaku. b. Insan BRI wajib melakukan verifikasi terhadap informasi bank sebelum memberikannya kepada pihak berkepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BRI yang berlaku.

4. Hubungan dengan Pesaing dan Mitra Kerja	1. Hubungan dengan pesaing a. Insan BRI senantiasa melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan/atau jasa layanan yang berkualitas. b. Insan BRI senantiasa menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing. c. Insan BRI senantiasa selalu mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan bisnis Bank, baik terhadap kompetitor maupun perusahaan anak. d. Insan BRI berkomitmen menjunjung tinggi praktik anti monopoli sesuai dengan perundang-undangan terkait larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. 2. Hubungan dengan mitra kerja a. Mematuhi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang berlaku b. Insan BRI senantiasa mematuhi prosedur dan mekanisme serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. c. Insan BRI memastikan mitra kerja patuh terhadap kebijakan bank dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Hubungan Antar Sesama Pekerja termasuk dengan Pekerja BRI Group	1. Mematuhi kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (*Respectful Workplace Policy*) Insan BRI wajib mematuhi kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (Respectful *Workplace Policy*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar pekerja Insan BRI senantiasa menghindari persaingan yang tidak sehat dalam bekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 3. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam hal-hal yang positif Insan BRI senantiasa berperilaku saling membantu dan memotivasi antar pekerja serta bekerja sama dalam hal-hal yang positif.
6. Hubungan dengan Regulator	1. Kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan regulator Insan BRI berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan regulator berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Integritas serta akurasi Pelaporan dan informasi Bank a. Insan BRI berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham, nasabah dan *stakeholder*. b. Insan BRI bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan resmi mengenai kegiatan Bank secara akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu.
7. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup	1. Menghormati Hak Asasi Manusia Dalam berhubungan dengan masyarakat, Insan BRI senantiasa menghormati hak-hak asasi manusia. 2. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan Insan BRI wajib memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang akan ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan a. Insan BRI senantiasa terlibat dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan Bank dengan mendukung langkah-langkah positif yang diambil oleh masyarakat setempat. b. Insan BRI senantiasa mendukung program-program Pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Larangan keterlibatan dalam aktivitas politik Insan BRI menjunjung tinggi etika untuk tidak mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik sebagai berikut: a. Berpartisipasi terhadap pemilihan calon legislatif, calon eksekutif, anggota partai politik, ataupun berhubungan dan ikut serta di dalam suatu organisasi dan/atau individu yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada partai politik atau kandidat. b. Ikut serta dalam kampanye politik, penggalangan dana politik atau untuk tujuan partisipasi politik. c. Melakukan kegiatan partai politik atau kegiatan sejenis lainnya.
8. Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan dan Anti Korupsi	1. Insan BRI dan/atau keluarganya wajib menolak dan dilarang menerima gratifikasi dari pihak manapun yang memiliki hubungan dengan jabatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta yang bersifat menyimpang dari ketentuan BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Insan BRI dan/atau keluarganya dilarang memberi dan atau menawarkan gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai yang bersifat menyimpang dari ketentuan BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Larangan menerima hadiah a. Insan BRI menjunjung tinggi etika untuk tidak meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya. b. Insan BRI dilarang menawarkan, menjanjikan, memberikan keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), kepada Penyelenggara Negara dan atau Pegawai Negeri, baik secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, sebagai bujukan atau hadiah untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri tersebut; dan c. Insan BRI dilarang memberi atau menawarkan hadiah, kemurahan hati, donasi politik atau amal, sponsor dan keuntungan lain yang dapat dipersepsikan oleh pihak lain sebagai penyuapan meskipun pemberian atau penerimaan tidak dimaksudkan untuk tujuan penyuapan.

Komitmen Terhadap Kode Etik

Seluruh Insan BRI yaitu, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh Insan BRI wajib membuat Surat Pernyataan Kode Etik setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan. Surat Pernyataan Kode Etik merupakan syarat keberlanjutan hubungan kerja dengan Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Insan BRI akan Kode Etik Perusahaan, BRI melakukan komunikasi kebijakan Kode Etik kepada seluruh Insan BRI antara lain melalui:

1. *Website* Perseroan.
2. *Landing Page* pada aplikasi BRISTARS.
3. Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perseroan dengan Manajemen Perseroan.
4. Poster, video dan media *advertising* lain pada kantor Perseroan.

Media Konsultasi Kode Etik

Konsultasi berupa pertanyaan mengenai penerapan Kode Etik dapat dilakukan melalui sarana *E-mail* ke alamat: kode-etik@corp.bri.co.id

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. Surat Pernyataan Kode Etik
   Seluruh Insan BRI wajib mengetahui dan memahami dengan baik serta menyatakan "Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik" setiap tahun.
2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI
   Komitmen manajemen dan seluruh Pekerja untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk uang dan/atau barang yang berhubungan dengan kewajiban atau tanggung jawabnya yang dipublikasikan pada media massa dan *website* Perseroan
3. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
   Seluruh Insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan setiap tahun, serta seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap bulan.
4. Pakta Integritas
   Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh panitia pengadaan, unit kerja *user*, *vendor* atau rekanan pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa di BRI. Selain itu, setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani GCG *Statement* sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sedangkan seluruh pekerja menandatangani komitmen Anti *Fraud* dan Pengendalian Gratifikasi pada BRIILiaN *Improvement Forum* yang diselenggarakan setiap tahun.
5. *Whistleblowing System*
   Seluruh pelanggaran terhadap kode etik BRI dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pelanggaran disiplin BRI.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Kategori Sanksi
Pemutusan Hubungan Kerja
Peringatan Tertulis
Teguran Tertulis
Turun Jabatan 1 *Grade*
Turun Jabatan 2 *Grade*

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Jumlah pelanggaran internal yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Pelanggaran Internal	Jumlah Pelanggaran		
	Pekerja Tetap	Non Pekerja Tetap	
		Kontrak	*Outsourcing*
Telah Diselesaikan	1.953	124	74
Dalam Proses Penyelesaian	2.315	41	22
Total	**4.268**	**165**	**96**

Selama tahun 2023, pelanggaran internal yang telah selesai diproses sebanyak 1.209 Adapun rincian sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut.

Kategori Sanksi	Jumlah	
	Pekerja Tetap	Non Pekerja Tetap
Pemutusan Hubungan Kerja	58	198
Peringatan Tertulis	534	-
Teguran Tertulis	305	-
Turun Jabatan 1 *Grade*	241	-
Turun Jabatan 2 *Grade*	71	-
Grand Total	**1.209**	**198**

Whistleblowing System

Dalam meningkatkan implementasi penerapan *Good Corporate Governance* di BRI, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik dan *corporate culture*. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BRI, manajemen telah menyediakan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil yaitu melalui *Whistleblowing System.*

Kebijakan *Whistleblowing System* BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal *Corporate Governance* Buku 2 tentang *Whistleblowing System* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Dalam rangka mempertahankan kualitas pengelolaan *Whistleblowing System*, BRI melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan korupsi.
2. Pengkinian struktur pengelolaan serta evaluasi penerapan *Whistleblowing System* BRI sesuai dengan kondisi terkini.
3. Diseminasi materi komunikasi terkait *Whistleblowing System*, baik ke pekerja, *vendor*, maupun nasabah.
4. Evaluasi pemahaman pekerja terkait *Whistleblowing System* melalui *e-learning* atau *e-survey*.
5. Pendidikan tersertifikasi kepada pekerja yang terlibat dalam pengelolaan WBS yaitu Pelatihan Pembelajaran Interaktif Untuk Pengelolaan *Whistleblowing System* Yang Berintegritas (PELUIT INTEGRITAS)

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Sarana pelaporan *Whistleblowing System* dapat dilaporkan melalui:

1. SMS: 08118200600
2. Whatsapp: 08118200600
3. Surat Tertulis: PO BOX 1895 JKP 10900
4. *Webmail*: whistleblower@corp.bri.co.id
5. *Website*: https://whistleblowing-system.bri.co.id

Reward & Punishment

BRI menyadari secara penuh akan pentingnya implementasi *whistleblowing system* dalam pencegahan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu, BRI memberikan apresiasi kepada pekerja yang memberanikan diri untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi melalui *whistleblowing system*.

Seluruh laporan *whistleblowing system* yang diterima akan ditindaklanjuti secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam proses pengelolaan laporan *whistleblowing system*, baik berupa pembocoran identitas pelapor maupun penyampaian laporan palsu, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan, BRI berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan, pelapor dapat memilih untuk membuat laporan secara anonim. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada pelapor yang berasal dari internal perusahaan (pekerja perusahaan) dari adanya ancaman pembalasan dari pihak terlapor berupa tekanan dari atasan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan dan mutasi sepihak. Di samping itu, BRI juga memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan *Whistleblowing System*

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana *Whistleblowing System.*
2. Pelapor yang menyampaikan laporan indikasi pelanggaran memperoleh kode laporan dan kata kunci untuk melihat proses tindak lanjut laporan pada *website whistleblowing system* (www.whistleblowing-system.bri.co.id).
3. Pelapor yang menyampaikan indikasi pelanggaran melalui sarana selain *website* (SMS,Whatsapp, Surat dan Email), maka Petugas *Whistleblowing System* (WBS) memberikan kode laporan dan kata kunci kepada Pelapor yang menyampaikan identitas diri atau surel.
4. Petugas *Whistleblowing System* mencatat seluruh laporan indikasi pelanggaran pada aplikasi *whistleblowing system*.
5. Petugas WBS melakukan analisa awal (verifikasi) laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan *whistleblowing system*.
6. Apabila diperlukan, Petugas WBS dapat meminta informasi tambahan dan konfirmasi kepada Pelapor dalam memenuhi informasi dan data laporan.
7. Pemimpin Unit Pengelola WBS melakukan validasi terhadap hasil verifikasi laporan indikasi pelanggaran dan memutuskan tindak lanjut laporan yaitu:
   a. Menindaklanjuti untuk dilakukan investigasi; atau
   b. Tidak dilakukan tindak lanjut (laporan ditolak) karena tidak sesuai kriteria laporan WBS.
8. Unit Pengelola WBS menunjuk Unit Kerja Investigasi untuk melakukan investigasi laporan WBS.
9. Unit Pengelola WBS membuat surat penugasan dan menyampaikan surat tugas kepada Unit Kerja Investigasi.
10. Unit Kerja Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi (termasuk rekomendasi atas tindak lanjut perbaikan) apabila:
    a. Investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Laporan investigasi disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada Unit Kerja berwenang dengan tindasan Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Kerja Investigasi.

b. Investigasi dilakukan oleh konsultan atau pihak independen Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Pengelola WBS.

11. Laporan tindak lanjut perbaikan diantaranya memuat:
    a. Tindak lanjut terhadap pelaku indikasi pelanggaran dan perbaikan terhadap kelemahan yang terjadi serta mitigasi risiko yang dilakukan.
    b. Memberikan informasi kepada atasan terlapor dalam rangka menjaga nama baik terlapor apabila laporan WBS tidak terbukti.
12. Unit kerja berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Unit kerja berwenang menyampaikan laporan tindak lanjut perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.

Alur Penyampaian *Whistleblowing System*



Kriteria Indikasi Pelanggaran

Informasi pelaporan indikasi pelanggaran yang dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yaitu:

1. *Fraud*;
2. Gratifikasi atau menerima dan/atau pemberi suap;
3. Pelanggaran Etika;
4. Pelanggaran Kode Etik (termasuk didalamnya pelanggaran ketentuan, dll);
5. Pelanggaran terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan BRI;
6. Indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BRI, Anggota Direksi BRI, SEVP dan Anggota Dewan Komisaris/Direksi Entitas Anak.

Kelengkapan Laporan *Whistleblowing System*

Laporan indikasi pelanggaran paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang Dilaporkan
   Pokok pelaporan/informasi pelanggaran yang terjadi disertai perkiraan jumlah kerugian (apabila diketahui).
2. Pihak yang Terlibat
   BRI maupun seluruh pihak yang diketahui terlibat melakukan indikasi pelanggaran yang dilaporkan.
3. Waktu Terjadinya Pelanggaran
   Periode waktu terjadinya indikasi pelanggaran.
4. Tempat Terjadinya Pelanggaran
   Lokasi/tempat unit kerja terjadinya pelanggaran.
5. Kronologi Kejadian
   Deskripsi peristiwa/kronologi kejadian indikasi pelanggaran.
6. Bukti Pelanggaran
   Dokumentasi terjadinya indikasi pelanggaran berupa dokumen, foto, video, dan informasi pendukung lainnya.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Pengelolaan laporan *Whistleblowing System* dilakukan oleh Unit Pengelola WBS yang berada berada di bawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

Independensi Pengelolaan *Whistleblowing System*

Dalam menjaga independensi dan kerahasiaan dalam penerapan *Whistleblowing System*, Unit Kerja yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran wajib untuk:

1. Patuh terhadap kode etik BRI yang dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan kode etik dan pakta integritas.
2. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, informasi dan dokumen atas laporan indikasi pelanggaran.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam tindak lanjut terhadap seluruh laporan indikasi pelanggaran.
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam tindak lanjut laporan indikasi pelanggaran.
5. Melakukan pencatatan dan pengkinian terhadap seluruh aktivitas dalam tindak lanjut laporan indikasi pelanggaran *whistleblowing system.*
6. Menatakerjakan seluruh data dan dokumen laporan *whistleblowing system* dan disimpan ditempat yang aman.
7. Dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan maka unit kerja yang ditunjuk harus mengedepankan independensi dan kerahasiaan laporan dan pelapor WBS.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Menyampaikan materi WBS pada *program development* dan *enhancement* Pekerja BRI.
3. Sosialisasi WBS ke Unit Kerja melalui materi komunikasi yang efektif.
4. Memasang *message from* CEO pada *landing page* aplikasi Bristars (portal internal BRI).
5. Melaksanakan *e-learning* WBS untuk seluruh pekerja BRI.
6. Penyampaian informasi WBS melalui *website* Perseroan.





Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Selama tahun 2023 diterima 30 (tiga puluh) laporan pengaduan pelanggaran (WBS) yang memuat 50 (lima puluh) sub indikasi pelanggaran, adapun tren perkembangan laporan WBS 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah pengaduan	54	56	30
Sub Indikasi Pelanggaran	116	107	50

Berdasarkan data tersebut, sub indikasi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan dan terbukti pada tahun 2023 adalah pelanggaran ketentuan/prosedur dan kecurangan (*fraud*) sebagaimana data berikut:

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Status		
		Terbukti	Tidak Terbukti	Dalam Proses
Fraud	19	12	6	1
Gratifikasi atau Menerima dan/ atau Pemberi Suap	6	3	3	
Pelanggaran Etika	6	4	1	1
Pelanggaran Kode Etik (Termasuk Di dalamnya Pelanggaran Ketentuan dan lainnya)	19	9	6	4

Media pelaporan WBS yang paling banyak digunakan selama tahun 2023 adalah melalui whatsapp sejumlah 12 (dua belas) pelaporan (40%), *e-mail* sebanyak 8 (delapan) pelaporan (30%), *website* sebanyak 8 (delapan) pelaporan (27%). Tren Penggunaan media pelaporan WBS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Media Pelaporan	2021	2022	2023
Email	10	19	9
SMS	5	3	0
Surat	1	1	1
Website	30	18	8
Whatsapp	8	15	12

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2023

Keterangan/Jenis Sanksi	Jumlah
Tidak Cukup Bukti	2
Surat Pembinaan	15
Peringatan Tertulis	4
Teguran tertulis	4
Turun Jabatan 2 Golongan Jabatan	1
Pemutusan Hubungan Kerja	2
Total	**28**

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

BRI menjaga kualitas penerapan pengendalian dan pengelolaan gratifikasi melalui sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. BRI telah memiliki Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang bertugas untuk mengawal dan memastikan Sistem Anti Penyuapan berjalan sesuai standar ISO 37001:2016. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan diatur di dalam Surat Edaran Direksi Kebijakan *Corporate Governance* nomor SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 Buku 3 tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.

Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern. Penerapan strategi anti *Fraud* BRI memuat 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

PENCEGAHAN

Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

1. Kesadaran Anti *Fraud*
   Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*. Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:
   a. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
   b. Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai
   c. Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah
2. Identifikasi Kerawanan
   Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.
3. Kebijakan Mengenal Pegawai
   Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, Bank menerapkan kebijakan mengenai pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.

DETEKSI

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup:

1. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*)
2. Pemeriksaan Dadakan (*Surprised Audit*)
3. Sistem Pengawasan

INVESTIGASI, PELAPORAN, DAN SANKSI

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang mencakup:

1. Investigasi
   Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan.
2. Pelaporan
   Bank menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan.
3. Pengenaan Sanksi
   Bank menyusun kebijakan pengenaan sanksi secara intern yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, paling sedikit mencakup:

1. Pemantauan
   Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan intern Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi
   Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan secara berkala.
3. Tindak lanjut
   Bank menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*, Perseroan membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi, dalam hal ini dikelola oleh *Operational Risk Division* yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi merupakan satu-satunya Unit Kerja yang bertugas dalam melakukan pengelolaan pengendalian gratifikasi di BRI. Unit Pengendalian Gratifikasi sendiri merupakan suatu unit atau fungsi di lingkungan BRI yang menjalankan fungsi pengendalian praktik penerimaan maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi di BRI dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk pada tahun 2017 dan melekat pada Satuan Kerja Kepatuhan BRI, yaitu *Compliance Division* BRI.

Unit Pengendalian Gratifikasi di *Compliance Division* memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI.

3. Melakukan pengelolaan laporan gratifikasi berupa menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Insan BRI.
4. Menjadi admin aplikasi GCG *Online System* dan Gratifikasi *Online* KPK.
5. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui sistem gratifikasi *online*.
6. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status terhadap barang gratifikasi dimaksud.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengendalian gratifikasi.
8. Melakukan identifikasi titik rawan dan mitigasi risiko gratifikasi.
9. Menginisiasi terobosan dalam pengendalian gratifikasi di BRI
10. Menyampaikan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi kepada Direksi yang paling sedikit memuat hal-hal antara lain : Rencana dan atau hasil Diseminasi Program Pengendalian Gratifikasi serta hasil evaluasi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi.
11. Memastikan tindak lanjut atas laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi telah sesuai dengan ketentuan.
12. Memberikan persetujuan surat penetapan kepemilikan barang gratifikasi.
13. Meminta data dan informasi kepada Unit Kerja berkaitan dengan pemantauan Program Pengendalian Gratifikasi di tingkat unit kerja operasional.
14. Berkoordinasi dengan Audit Internal apabila terdapat pelanggaran kode etik atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPG
15. Memberikan konsultasi berupa saran dan rekomendasi kepada Insan BRI terkait dengan pengendalian gratifikasi di BRI.

Regional *Risk Management & Compliance* sebagai fungsi pendukung dalam aktivitas pengendalian gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menjalankan program-program pengendalian gratifikasi yang disusun oleh *Compliance Division*.
2. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan pelaporan gratifikasi di Regional Offices dan Unit Kerja Supervisinya melalui GCG *Online System* 2.0
3. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI di Regional Offices.

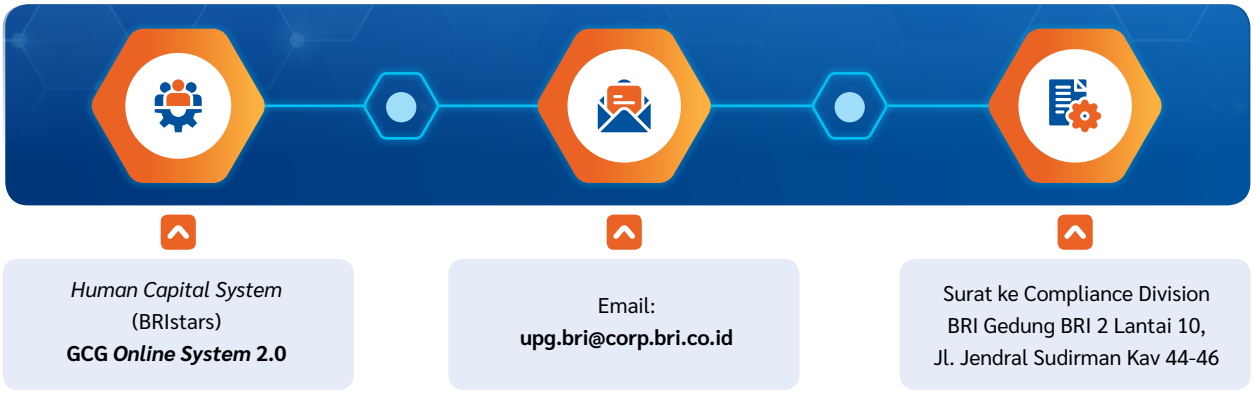
Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi di *Compliance Division* merupakan satu-satunya pengelola pelaporan gratifikasi di BRI yang untuk selanjutnya melakukan analisa dan administrasi terhadap Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh pekerja BRI. Sesuai dengan kebijakan BRI terkait dengan Gratifikasi, terdapat dua jenis gratifikasi yaitu:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
   Penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan BRI berdasarkan/terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
   Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah pemberian yang diterima oleh Insan BRI, tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

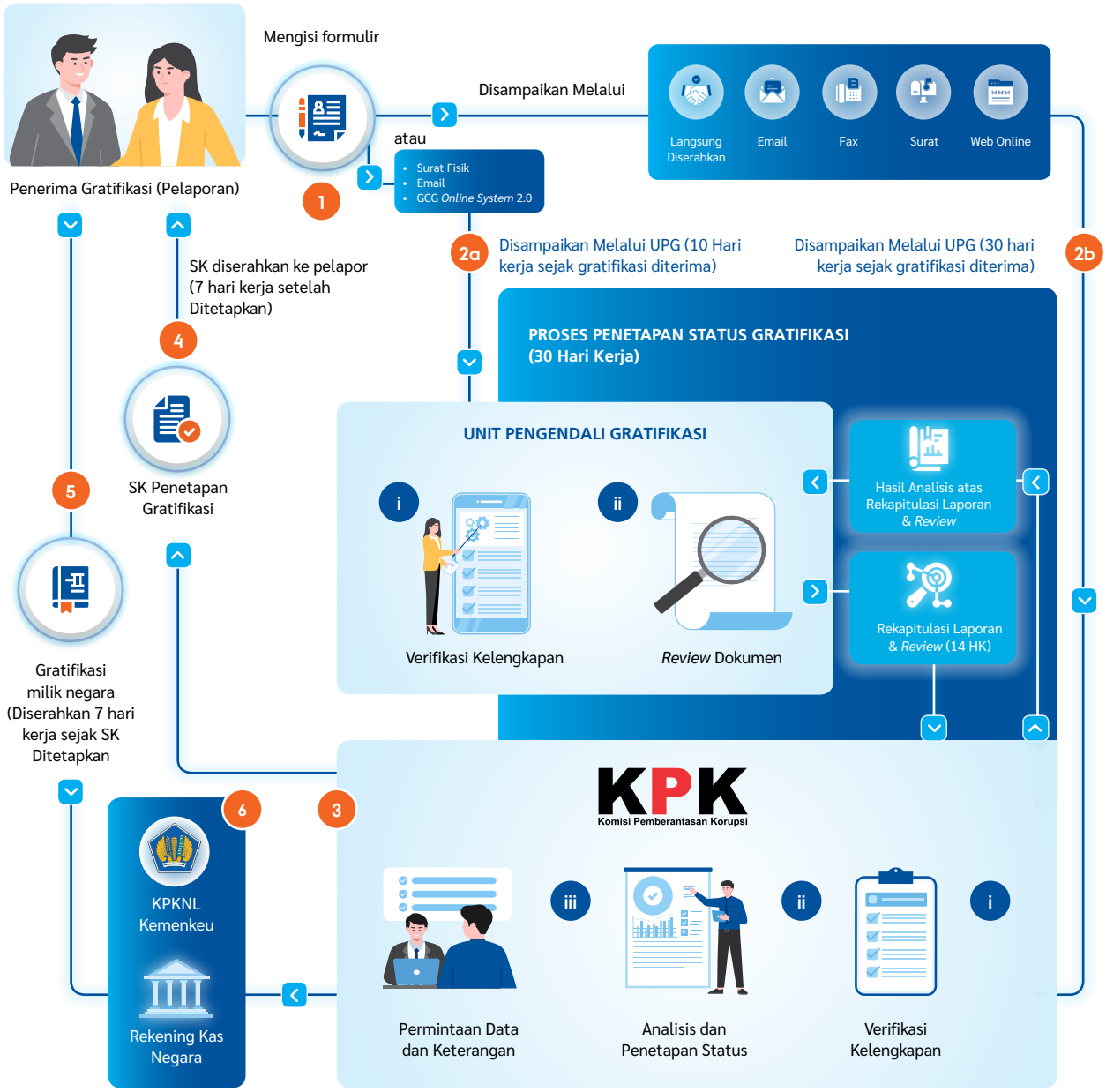
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Dalam melakukan pelaporan gratifikasi, seluruh Insan BRI wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi BRI melalui media pelaporan yang telah disediakan yaitu GCG *online system* 2.0



Penjelasan mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut.

Mekanisme Penanganan Pelaporan Gratifikasi



Penerapan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, BRI telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain yaitu:

Komitmen Pengendalian Gratifikasi

1. Penandatanganan komitmen anti gratifikasi dalam pernyataan kode etik yang dilakukan oleh Insan BRI baik Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI di seluruh Indonesia.
2. *Self Assessment* anti penyuapan yang dilakukan oleh seluruh pekerja BRI Selindo dalam rangka pemetaan titik rawan gratifikasi.
3. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa BRI serta vendor/rekanan BRI untuk menjaga integritas dan independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pengkinian Kebijakan Gratifikasi

Pada tahun 2023 BRI telah melakukan pengkinian kebijakan gratifikasi yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Direksi nomor SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diganti dengan Surat Edaran Direksi Kebijakan *Corporate Governance* nomor SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 Buku 3 tentang Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.

Laporan Gratifikasi Tahun 2023

Adapun sebagai bentuk dukungan pekerja terhadap program pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan, laporan gratifikasi yang telah disampaikan oleh pekerja BRI kepada UPG BRI selama tahun 2023 sebanyak 61 laporan. Adapun, terdapat 10 laporan yang diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai laporan gratifikasi yang wajib dilaporkan. Sedangkan, 51 laporan lainnya termasuk dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Pekerja

Beberapa bentuk aktivitas, program pendidikan, dan sosialisasi yang telah dilakukan UPG BRI selama tahun 2023, antara lain:

1. Pelaksanaan *self learning* Anti Penyuapan dan Gratifikasi bagi seluruh pekerja BRI secara *online* melalui BRISMART (Media pembelajaran *online* BRI).
2. Penyampaian materi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan melalui Program Pendidikan BRILiaN *Specialist Development Program* (BSDP) bagi jajaran *Regional Risk Management Team* seluruh unit kerja.
3. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan kepada Divisi di Kantor Pusat.
4. Penyampaian materi komunikasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan di *Landing Page* pada halaman utama BRIstars.
5. Pelaksanaan Webinar bersama dengan KPK RI bertemakan "Membangun Budaya Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BUMN".
6. Sertifikasi *awareness* ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada pekerja Divisi yang menjadi lingkup Sertifikasi ISO.



Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan

1. Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN
   Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal perusahaan yang diatur pada Surat Edaran Direksi BRI No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* Buku 5 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Koordinator Pelaporan LHKPN
   Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokoler dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan *Human Capital*. Berdasarkan struktur organisasi saat ini, terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) Wajib Lapor LHKPN yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

Pelaporan LHKPN

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN untuk periode laporan tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023 sebagai berikut.

Kewajiban	Jabatan	Satuan	2023
Wajib LHKPN	Dewan Komisaris	Orang	11
	Direksi	Orang	12
	Orang BRI	Orang	105
Wajib LKHPN yang telah melaporkan	Dewan Komisaris	Orang	11
		%	100
	Direksi	Orang	12
		%	100
	Orang BRI	Orang	105
		%	100
Wajib LKHPN yang belum melaporkan	Dewan Komisaris	Orang	0
		%	0
	Direksi	Orang	0
		%	0
	Orang BRI	Orang	0
		%	0

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total *Fraud*	-	-	468	169	16	4
Telah Diselesaikan	-	-	459	79	10	3

Internal *Fraud* dalam 1 Tahun	Jumlah *fraud* yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	16	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	4	65	-	1
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	5	9	6	8

Keterangan:
Internal Fraud dengan nilai lebih dari Rp100 Juta.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian dana kegiatan sosial BRI telah disajikan pada Laporan Keberlanjutan. Selama tahun 2023, BRI tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal kode etik BRI.

Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi

Buyback Saham

Kebijakan Dalam Pelaksanaan *Buyback*

Sebagai upaya strategi pengelolaan permodalan Perusahaan yang optimal, bentuk komitmen untuk meningkatkan *value* kepada Pemegang Saham, serta sejalan dengan strategi Perusahaan dalam meningkatkan *engagement* Pekerja melalui Program Kepemilikan Saham oleh Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris, BRI telah melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Perseroan telah melaksanakan *Buyback* pada tahun 2015 dan tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Perseroan telah mengalihkan seluruh saham yang diperoleh dari *Buyback* tahun 2015 dan sebagian saham yang diperoleh dari *Buyback* tahun 2020 melalui program kepemilikan saham Pekerja. Pada tahun 2022 Perseroan melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Saham hasil *Buyback* tahun 2022 sebagian telah dialihkan untuk program kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan bagian dari remunerasi variabel Direksi dan Dewan Komisaris (insentif tahunan, insentif jangka panjang dan/atau insentif lainnya yang dibayarkan dalam bentuk saham).

Pada tahun 2023 Perseroan melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 yang akan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham. Perseroan secara bertahap akan melaksanakan pengalihan seluruh sisa saham hasil *Buyback* (*Treasury Stock*) melalui Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris (Program Kepemilikan Saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buyback dilaksanakan oleh Perseroan sebagai (i) upaya pengelolaan permodalan yang optimal; (ii) bentuk komitmen untuk meningkatkan *value* kepada Pemegang Saham; serta (iii) upaya peningkatan *engagement* Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris untuk mencapai target kinerja jangka panjang Perseroan melalui Program Kepemilikan Saham.

Harga Pembelian Kembali dan Jumlah Lembar Saham yang Dibeli Kembali

Pada bulan September hingga Desember 2023, BRI telah melakukan *Buyback* sebanyak 118.833.600 lembar dengan rata-rata harga perolehan sebesar Rp5.264,13. Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI sebanyak 768.144.900 lembar saham.

Peningkatan Laba Per Lembar Saham

Keterangan	Jumlah Lembar Saham
Treasury Stock sampai dengan 30 Juni 2023	656,253,400
Pengalihan *Treasury Stock* sampai dengan 31 Desember 2023	(6,942,100)
Tambahan *Treasury Stock* (Hasil *Buyback*) sampai dengan 31 Desember 2023	118,833,600
Total *Treasury Stock*	768,144,900
Jumlah Saham Beredar	151,559,001,604
Jumlah Saham Beredar di luar *Treasury Stock* (Lbs) per 30 Juni 2023	**150,902,748,204**
Jumlah Saham Beredar di luar *Treasury Stock* (Lbs) per 31 Desember 2023	**150,790,856,704**

Keterangan	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Laba bersih yang Diatribusikan untuk Induk (*Audited Consolidation* Desember 2023) (Rp Miliar)	60.100	-	60.100
EPS (*Treasury Stock* 31 Desember 2023) (Rp)	398.26	0,07	398.33

Pelaksanaan *Buyback* berdampak pada kenaikan EPS dari Rp398,26 menjadi Rp398,33.

Buyback Obligasi

Selama tahun 2023, tidak terdapat *buyback* obligasi.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2023 tidak ada perselisihan internal antar pekerja yang terjadi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait	643	16.238.267
2.	Kepada debitur inti: a. Individu b. Grup	 50 50	 130.408.842 178.925.740

Informasi lebih rinci terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah disajikan pada Sub Bab Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif. Bank BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)). Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

Komitmen

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

1. Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan.

Sosialisasi

BRI senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, *In House Training* dan pembelajaran secara *online*, dan pernyataan benturan kepentingan yang dibuat oleh masing-masing pekerja BRI.

Laporan Transaksi Benturan Kepentingan 2023

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*)Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Insider Trading merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan *insider trading* bagi seluruh insan BRI. Kebijakan *insider trading* tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE.09-DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang *Corporate Governance* (Buku 1 terkait Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)) dan Surat Edaran Direksi No. SE.09a-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Pertama Atas *Corporate Governance* (Buku 6 terkait Kode Etik).

Kebijakan terkait kegiatan *insider trading* mengatur bahwa:

1. Setiap insan BRI harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak tidak terbuka untuk umum.
2. Seluruh insan BRI tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
3. Seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktivitas yang terkait dengan *insider trading* yang merujuk pada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.
4. Pelanggaran terhadap kegiatan di atas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang berlaku di BRI.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan

(*Annual Disclosure*) diantaranya pengungkapan terhadap transaksi *insider trading* yang dilakukan oleh insan BRI. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat insider *trading*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank BRI secara transparan melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi kondisi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan (www.bri.co.id/laporan) sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs perusahaan.
2. Laporan Keuangan Triwulan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
3. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
4. Informasi tata kelola perusahaan meliputi:
   a. Visi dan Misi Perusahaan
   b. Komposisi dan profil Dewan Komisaris
   c. Komposisi dan profil Direksi
   d. Penerapan Tata Kelola BRI
5. Transparansi informasi produk Bank yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan situs perusahaan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait Pengelolaan Vendor BRI sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor SE.18-DIR/PLM/05/2023 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Buku 11). Saat ini BRI mengembangkan aplikasi V*endor Management System* yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE, dimana dalam aplikasi tersebut mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon vendor, *monitoring*, pemeliharaan rekanan (vendor *maintenance*) sampai dengan evaluasi kinerja vendor sehingga BRI mempunyai *database* vendor yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BRI.

Secara rinci informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dijelaskan pada Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2023.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai salah satu bentuk dukungan BRI terhadap Keuangan Berkelanjutan, BRI telah memiliki roadmap dan strategi di bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) baik pada kegiatan operasional maupun bisnis Bank. BRI secara konsisten mempertahankan kinerja perusahaan dengan baik dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya percepatan pencapaian hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan strategi korporat, pemenuhan harapan *stakeholder* dan inisiasi LST yang mengacu pada standar nasional, regional, maupun global.

Secara rinci informasi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Laporan Keberlanjutan BRI Tahun 2023.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulator antara lain:

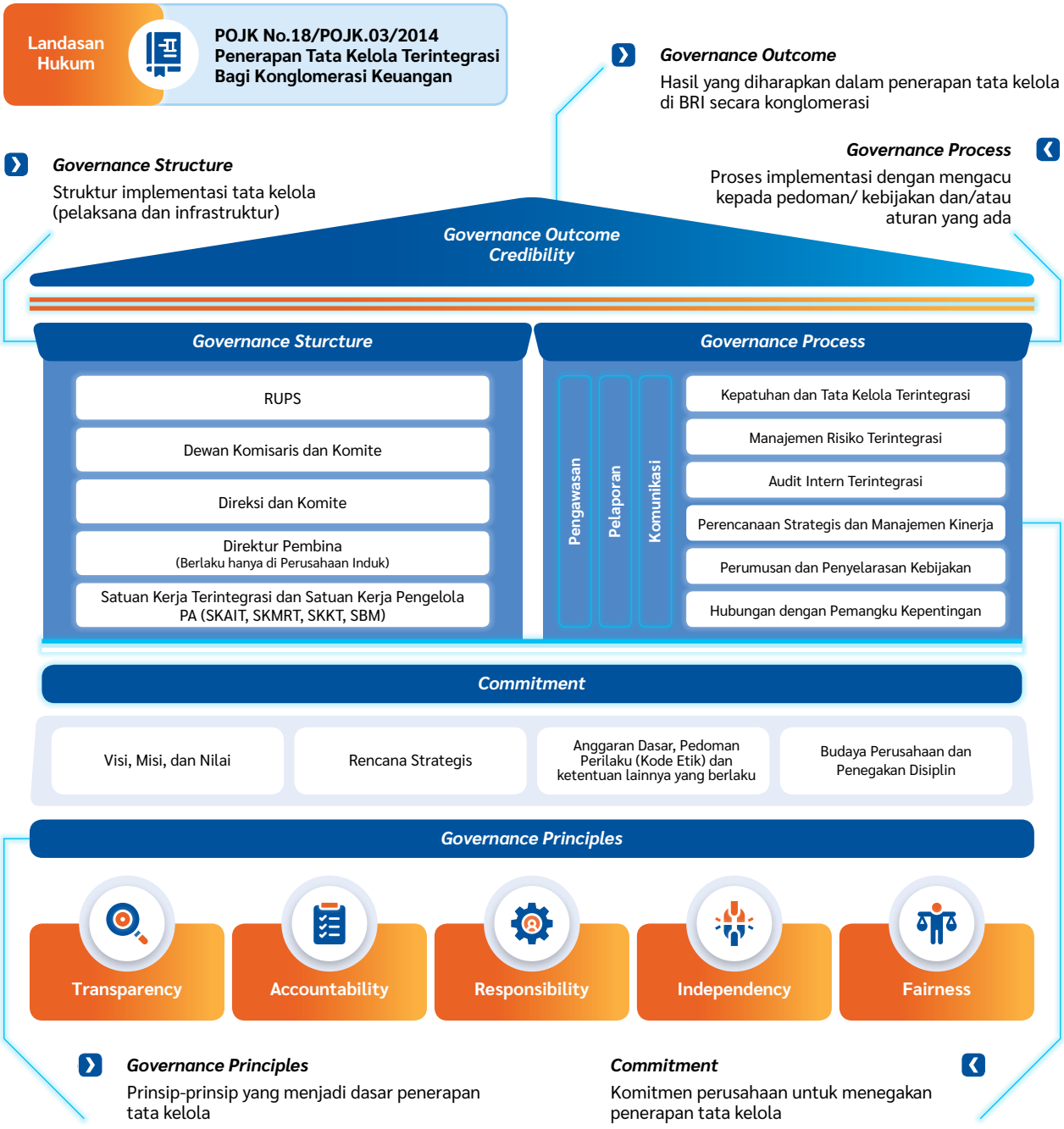
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

BRI merupakan Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BRI dengan 9 (sembilan) Entitas Anak yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BRI dan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI mengacu pada ketentuan internal berupa Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI. Selain itu, dalam implementasi Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BRI memiliki organ Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

a. Organ Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Direksi Entitas Utama (dhi. *Risk Management Committee* Terintegrasi dan *Capital and Investment Committee*), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi serta Satuan Kerja Pengelola Perusahaan Anak.
b. Organ Tata Kelola Terintegrasi Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

Secara umum, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dijelaskan dalam *framework* berikut:



Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI dilakukan pada setiap semester dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi yaitu struktur, proses dan hasil dari Tata Kelola Terintegrasi atas paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Berikut hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Periode Penilaian	Peringkat	Keterangan
Semester I Tahun 2023	Peringkat 2 (Baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK
Semester II Tahun 2023	Peringkat 2 (Baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK

Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum "Baik", tercermin dari telah terpenuhinya aspek struktur, proses dan hasil secara memadai.

Secara aspek struktur, BRI telah melakukan penyempurnaan atas Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: KU.02-DIR/KEP/10/2023 Tanggal 10 Oktober 2023. Selain itu, telah dilakukan *updating* dan penyesuaian keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Nokep: 11-KOM/BRI/10/2023 Tanggal 3 Oktober 2023.

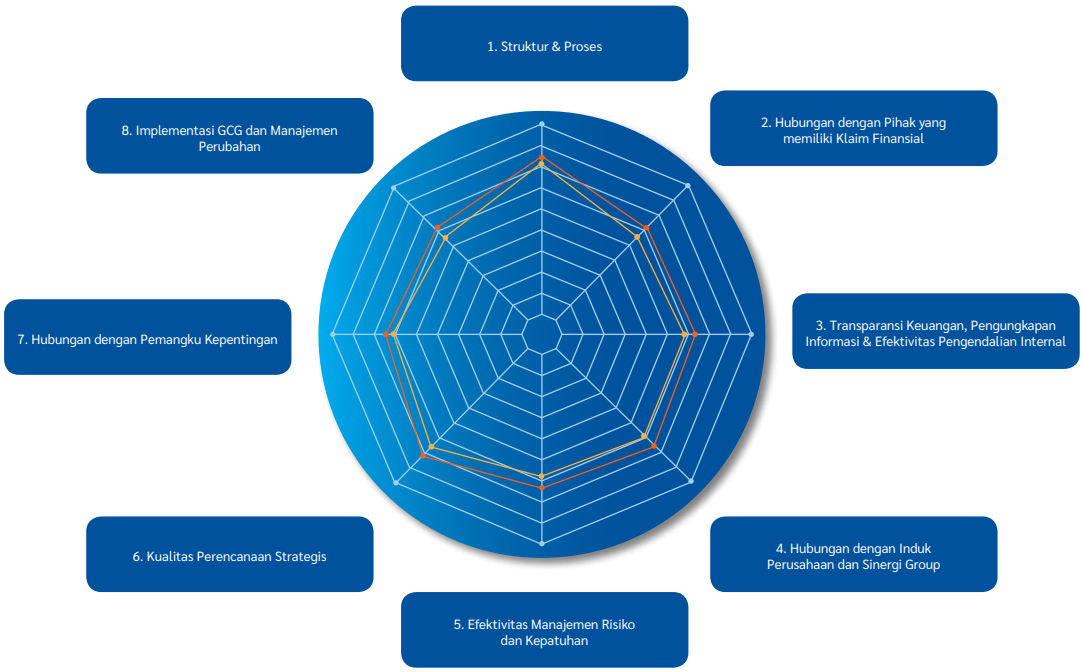
Secara aspek proses, BRI telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) secara rutin melebihi jumlah rapat yang diatur dalam ketentuan. Pembahasan rapat KTKT antara lain terkait dengan hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (termasuk Profil Risiko Terintegrasi), Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi.

Secara aspek hasil, BRI dan LJK Anggota KK BRI telah menyampaikan baik pelaporan yang bersifat triwulanan, semesteran maupun tahunan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan penerapan tata kelola terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, audit intern terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi secara tepat waktu. Selain itu, beberapa LJK dalam Konglomerasi Keuangan BRI telah mengikuti penilaian kualitas pelaksanaan GCG oleh pihak independen, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), yaitu program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan hasil 2 (dua) perusahaan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pegadaian berhasil memperoleh predikat "*Most Trusted*" dan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Asuransi BRI Life, PT BRI Asuransi Indonesia, dan PT Permodalan Nasional Madani berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "*Trusted*".

Tingkat Maturitas Tata Kelola Terintegrasi

BRI telah melakukan pengukuran atas tingkat kematangan (maturitas) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI untuk tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil tingkat kematangan (maturitas) sebesar 3.77 dari skala 5 yang menggambarkan struktur dan proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah memadai dan sesuai dengan ketentuan serta hasil pengelolaan Konglomerasi Keuangan telah efektif dijalankan.

Penilaian Maturitas Tata Kelola Integritas



Maturitas Tata Kelola BRI	Rata-rata Maturitas Tata Kelola LJK Anggota KK BRI	Maturitas Tata Kelola Terintegrasi BRI
4.16	3.69	3.77

No	*Building Block* Maturitas Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian Tahun 2021	Penilaian Tahun 2022
1	Struktur dan Proses	4.04	4.17
2	Hubungan dengan Pihak yang mempunyai Klaim Finansial	3.31	3.51
3	Transparansi Keuangan, Pengungkapan Informasi & Efektivitas Pengendalian Internal	3.46	3.61
4	Hubungan dengan Induk Perusahaan dan Sinergi Group	3.46	3.71
5	Efektivitas Manajemen Risiko dan Kepatuhan	3.35	3.60
6	Kualitas Perencanaan Strategis	3.78	4.04
7	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	3.59	3.72
	Maturitas Tata Kelola Terintegrasi	**3.57**	**3.77**

Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Kepemilikan Konglomerasi Keuangan BRI

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nokep: B.2110-DIR/SBM/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. struktur Konglomerasi Keuangan BRI pada posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Secara rinci, informasi terkait dengan struktur Konglomerasi Keuangan (KK) BRI adalah sebagai berikut:

Nama Entitas		Bidang Usaha	Tanggal Investasi (Mayoritas) BRI	% Saham	Alamat
BRI	Entitas Utama	Bank Umum	-	Pemerintah: 53,19% Publik: 46,81%	Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta
Bank Raya	Anggota Konglomerasi Keuangan BRI	Bank Umum	03/03/2011	BRI: 86,85% Publik: 13,15%	Menara BRILian Lantai 18 dan 20 Jl. Gatot Subroto No.177 A Jakarta 12870
BRI *Insurance*		Perusahaan Asuransi Umum	26/09/2019	BRI: 90% BRI YKP: 10%	Graha BRI Insurance Jl. Mampang Prapatan Raya No 18 Jakarta Selatan 12790
BRI *Life*		Perusahaan Asuransi Jiwa	29/12/2015	BRI: 54,77% FWD: 39,82% BRI YKP: 5,84%	Graha Irama Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
BRI Danareksa Sekuritas		Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek	21/12/2018	BRI: 67% Danareksa (Persero): 33%	Gedung BRI II Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
BRI *Finance*		Perusahaan Pembiayaan	30/09/2016	BRI: 99,88% BRI YKP: 0,12%	Menara BRILian Lantai GF, 21, 22 Jl. Gatot Subroto No. 177A Kav. 64 Jakarta
BRI *Ventures*		Perusahaan Modal Ventura	20/12/2018	BRI: 99,97% BRI YKP: 0,03%	District 8 Office, Prosperity Tower Lt 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190
Pegadaian		Perusahaan Gadai	13/09/2021	BRI: 99,99% Pemerintah: 0,01%	Jl. Kramat Raya No.162, RT.2/RW.2, Kel. Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
PNM		Perusahaan Pembiayaan	13/09/2021	BRI: 99,99% Pemerintah: 0,01%	Menara PNM Jl. Kuningan Mulia, Kuningan Center
BRI Manajemen Investasi		Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	30/11/2022	BRI: 65% Danareksa (Persero): 35%	Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI Posisi 31 Desember 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
	Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
	Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
	Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
	Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
	Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
	Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa
	Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
	Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Direksi	Direktur Utama	: Sunarso
	Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
	Direktur Bisnis Mikro	: Supari
	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
	Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
	Direktur Human Capital	: Agus Winardono
	Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu R. K
	Direktur Jaringan dan Layanan	: Andrijanto
	Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
	Direktur Digital and Teknologi Informasi	: Arga M. Nugraha
	Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Muhamad Sidik Heruwibowo
	Komisaris	: Achmad F.C. Barir
	Komisaris Independen	: Eko B. Supriyanto
	Komisaris Independen	: Johanes Kuntjoro Adisardjono*
	Komisaris Independen	: Retno Wahyuni Wijayanti
Direksi	Direktur Utama	: Ida Bagus Ketut Subagia
	Direktur Digital dan Operasional	: Bhimo Wikan Hantoro
	Direktur Keuangan	: Rustarti Suri Pertiwi
	Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resource	: Danar Widyantoro
	Direktur Ritel Agri dan Pendanaan	: Dedy Hendrianto

*) Dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

PT Asuransi BRI Life

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Muhammad Syafri Rozi
	Komisaris	: Lau Soon Liang*
	Komisaris Independen	: Hari Siaga Amijarso
	Komisaris Independen	: Ubaidillah Nugraha
	Komisaris Independen	: Eko Wahyudi

Direksi	Direktur Utama	: *(vacant)*
	Direktur Kepatuhan & Legal	: I Dewa Gede Agung (Plt Dirut)
	Direktur Pemasaran	: Sutadi
	Direktur Operasional	: Yosie William Iroth
	Direktur Keuangan	: Lim Chet Ming
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Mohamad Hidayat
	Anggota	: Agus Haryadi
	Anggota	: Siti Haniatunnisa

*) Dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

PT BRI Multifinance Indonesia

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Sigit Murtiyoso
	Komisaris	: Dhoni Ramadi Saharto Putra
	Komisaris Independen	: Diah Defawati Ande*
Direksi	Direktur Utama	: Wahyudi Darmawan*
	Direktur Bisnis	: Primartono Gunawan
	Direktur Manajemen Risiko	: Ari Prayuwana
	Direktur Operasional	: Willy Halim Sugiardi

*) Dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

PT BRI Asuransi Indonesia

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Kris Hananto
	Komisaris Independen	: Ayahanita Kusetyaningsih
	Komisaris Independen	: *(vacant)*
Direksi	Direktur Utama	: R. Budi Legowo
	Direktur Keuangan & Operasional	: Sony Harsono W.S
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Heri Supriyadi
	Direktur Teknik	: Ade Zulfikar
	Direktur Bisnis	: *(vacant)*
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Hj.Nilmayetty Yusri
	Anggota	: Abdul Ghoni

PT BRI Ventura Investama

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Ety Yuniarti
	Komisaris Independen	: Henri*
	Komisaris Independen	: Agoosh Yoosran
Direksi	Direktur Utama	: Nicko Widjaja
	Direktur Keuangan	: Indra Bayu Gunawan
	Direktur Venture Investment	: Markus Liman Rahardja

*) Dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

PT BRI Danareksa Sekuritas

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Ahmad Royadi
	Komisaris	: R Muhammad Irwan
	Komisaris Independen	: Donsuwan Simatupang

Direksi	Direktur Utama	: Laksono Widito Widodo
	Direktur Retail & Information Technology	: Fifi Virgantria
	Direktur Investment Banking Advisory	: Hendra Hermawan
	Direktur Investment Banking Capital Market	: Kevin Praharyawan
	Direktur Finance & Risk Management	: *(vacant)*

PT Pegadaian

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Loto Srinaita Ginting
	Komisaris	: Umiyatun Hayati T.
	Komisaris	: Sudarto
	Komisaris	: Rini Widyantini
	Komisaris Independen	: Makmur Keliat
	Komisaris Independen	: Nezar Patria
	Komisaris Independen	: Yudi Priambodo P.
	Komisaris Independen	: Muhammad Isnaini*
Direksi	Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	: Elvi Rofiqotul Hidayah
	Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan	: Eka Pebriansyah
	Direktur Teknologi Informasi dan Digital	: Teguh Wahyono
	Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan	: Udin Salahudin
	Direktur Human Capital	: Erry Rizal Achmad Taufiq
	Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
	Direktur Umum	: Gunawan Sulistyo
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Muhammad Cholil Nafis
	Anggota	: Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh

*) Dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

PT Permodalan Nasional Madani

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Arif Rahman Hakim
	Komisaris Independen	: Veronica Colondam
	Komisaris	: Parman Nataatmadja
	Komisaris	: Iwan Taufiq Purwanto
	Komisaris Independen	: Nurhaida
Direksi	Direktur Utama	: Arief Mulyadi
	Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan	: *(vacant)*
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Kindaris
	Direktur Bisnis	: Prasetya Sayekti
	Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi	: Sunar Basuki
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: *(vacant)*
	Anggota	: *(vacant)*

PT BRI Manajemen Investasi

Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Tri Hartono
	Komisaris Independen	: Rowter Kahlil
Direksi	Direktur Utama	: *(vacant)*
	Direktur Marketing	: Upik Susiyawati
	Direktur Operasional dan Keuangan	: Ira Irmalia Sjam (Plt Dirut)
Dewan Pengawas Syariah	Ketua	: Muhamad Nadratuzzaman
	Anggota	: Elsa Febiola Aryanti

Tugas dan Tanggung Jawab Organ Tata Kelola Terintegrasi BRI

Berdasarkan pada POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan serta mengacu pada Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BRI, seluruh organ Tata Kelola Terintegrasi pada Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris Entitas Utama

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anggota LJK Konglomerasi Keuangan BRI agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Entitas Utama.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh LJK Konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi maupun kebijakan turunannya.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi aspek antara lain:
   a. Kepatuhan Terintegrasi;
   b. Manajemen Risiko Terintegrasi;
   c. Audit Intern Terintegrasi;
   d. Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
   e. Perumusan dan Penyelarasan Kebijakan; dan
   f. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.

   Berdasarkan pelaporan oleh Direktur dan/atau Kepala Satuan Kerja terkait serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi setiap semester.
4. Melakukan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memberikan arahan serta rekomendasi dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Mengawasi penerapan Audit Intern pada Anggota Konglomerasi Keuangan agar selaras dengan kebijakan Audit Intern Entitas Utama.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Pemilik Modal.
7. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada setiap LJK Konglomerasi Keuangan BRI berdasarkan laporan dan evaluasi yang disampaikan oleh Direktur dan/atau Kepala Satuan Kerja terkait BRI dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi setiap semester.
8. Mengawasi, mengevaluasi dan memastikan Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan tugas secara efektif.
9. Memberikan persetujuan atas tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar BRI yang berkaitan dengan pengelolaan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi Entitas Utama

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan arahan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas dalam rangka evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi meliputi kepatuhan terintegrasi, audit intern terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, kinerja Perusahaan Anak, serta aspek terintegrasi lainnya.
5. Memberikan arahan dan rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi termasuk evaluasi kinerja.
6. Memastikan keselarasan rencana strategis antara Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
7. Menyelenggarakan RUPS dalam hal terdapat aksi korporasi atau hal lainnya terkait dengan pengelolaan Perusahaan Anak yang wajib mendapatkan putusan RUPS.
8. Menyusun RJPP dan RKAP BRI termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan atas Anggota Konglomerasi Keuangan.
9. Memastikan terlaksananya sinergi di lingkungan Konglomerasi Keuangan BRI antara BRI dan Anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau antar Anggota Konglomerasi Keuangan.
10. Memastikan temuan audit dan rekomendasi satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya ditindaklanjuti oleh Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan atas Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, serta pelaksanaan aspek terintegrasi lainnya yang relevan, termasuk pemenuhan prinsip syariah dari LJK Konglomerasi Keuangan yang memiliki bisnis syariah.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam hal diperlukan;
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk disampaikan kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self-Assessment* TKT) setiap semester kepada Direksi Entitas Utama.
5. Menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama.
6. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Terintegrasi melalui Direksi terkait yang membawahi fungsi, untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan laporan yang diperlukan.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama dalam melakukan penerapan fungsi kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Menyampaikan rekomendasi atas perbaikan penerapan fungsi kepatuhan pada LJK Konglomerasi Keuangan BRI berdasarkan hasil evaluasi laporan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan di masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
4. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi setiap semester dalam rangka pelaporan kepada OJK.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada regulator secara tepat waktu.
6. Melakukan penilaian tingkat kematangan pelaksanaan fungsi kepatuhan di LJK Konglomerasi Keuangan BRI secara periodic.
7. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
8. Menyampaikan ketentuan/regulasi terbaru yang relevan kepada anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai informasi dan untuk ditindaklanjuti.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan BRI atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
11. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal terdapat eskalasi permasalahan terkait kepatuhan yang memerlukan dukungan Entitas Utama dalam penyelesaiannya.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Memberikan masukan kepada RMCT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
5. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCT dan yang telah disetujui oleh Direksi Entitas Utama.
6. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko terintegrasi berdasarkan perkembangan praktik-praktik manajemen risiko yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas usulan *Risk Appetite Statement* (RAS) anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang memiliki *Parenting Style Active Management* untuk dibahas di dalam RMCT.
8. Melakukan evaluasi atas laporan profil risiko LJK Konglomerasi Keuangan BRI untuk anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang memiliki *Parenting Style Active Management* secara berkala atau paling kurang secara semesteran.
9. Melakukan *Monitoring* Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melakukan kajian dan analisis kecukupan permodalan terintegrasi dalam rangka pemenuhan ketentuan regulasi dan melaporkannya kepada RMCT.
11. Melaksanakan simulasi *stress testing* terintegrasi untuk mengetahui ketahanan BRI Group dalam menghadapi kondisi krisis.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko terintegrasi kepada Direktur Utama atau Direktur bidang Manajemen Risiko LJK Konglomerasi Keuangan BRI dan RMCT secara berkala atau paling kurang secara semesteran.
13. Melaporkan profil risiko dan permodalan terintegrasi kepada regulator secara tepat waktu.
14. Melakukan kajian internal dan eksternal untuk memberikan gambaran dampak terhadap bisnis dan operasional dalam rangka mengantisipasi *emerging risk*.
15. Melakukan penilaian kematangan pelaksanaan fungsi manajemen risiko di LJK Konglomerasi Keuangan BRI secara periodik.
16. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi manajemen risiko di LJK Konglomerasi Keuangan secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

17. Mendukung dan melakukan penilaian faktor Manajemen Risiko Terintegrasi yang merupakan bagian dari *Self-Assessment* Tata Kelola Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi secara semesteran.
18. Memberikan informasi kepada RMCT terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
19. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal terdapat eskalasi permasalahan terkait manajemen risiko yang memerlukan dukungan Entitas Utama dalam penyelesaiannya.
20. Melakukan kajian usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membantu tugas Direktur Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan BRI minimal meliputi:
   a. Laporan Kegiatan Audit dan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit anggota Konglomerasi Keuangan BRI;
   b. Area-area yang mengalami peningkatan risiko secara signifikan dan kejadian *fraud* signifikan yang terjadi di anggota Konglomerasi Keuangan BRI;
   c. Kualitas SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang meliputi namun tidak terbatas pada metode dan prosedur audit, *Human Capital*, dan *tools audit.*
   d. Penilaian tingkat Kematangan (maturitas) fungsi audit intern anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
   e. Pelaksanaan *Quality Assurance* dan *Monitoring* tindak lanjut perbaikannya
3. Melaksanakan audit atau joint audit dengan SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BRI Konglomerasi Keuangan BRI atau berdasarkan laporan dari internal audit anggota Konglomerasi Keuangan BRI Konglomerasi Keuangan BRI secara independen, objektif, dan profesional dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha anggota Konglomerasi Keuangan BRI setelah mendapatkan persetujuan Direktur Utama Entitas Utama.
4. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur di dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan tugas.
5. SKAI Terintegrasi berkomunikasi dengan SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BRI secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun terkait hasil audit SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BRI, isu ataupun permasalahan yang berdampak signifikan terhadap kondisi pada anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan pengembangan yang dilakukan oleh SKAI anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
6. SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menginformasikan semua temuan audit yang terkini dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama Entitas Utama melalui Komite Audit Entitas Utama pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur yang melakukan pengawasan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan Direktur Utama anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
8. SKAI Terintegrasi dapat bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, antara lain Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi pada perusahaan dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
9. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perusahaan, anggota Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak (apabila diperlukan) untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta tersedia sumber daya yang memadai.
10. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal terdapat eskalasi permasalahan terkait audit intern yang memerlukan dukungan Entitas Utama dalam penyelesaiannya.
11. SKAI Terintegrasi berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan audit dan tingkat maturitas di SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.

Dewan Komisaris LJK Anggota KK BRI

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Pedoman dan Tata Tertib Kerja pada anggota Konglomerasi Keuangan BRI, ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI lainnya, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola, kebijakan, tugas dan tanggung jawab Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI serta tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI terkait rencana pengembangan anggota Konglomerasi Keuangan BRI, RJPP, RKAP, Kebijakan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Membentuk komite dan/atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung

jawab Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang meliputi paling sedikit antara lain:
   a. Pemantauan Audit;
   b. Pemantauan Kepatuhan; dan
   c. Pemantauan Manajemen Risiko
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan/atau ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang mencakup frekuensi, kehadiran anggota Dewan Komisaris, serta tata cara pengambilan keputusan.
5. Membentuk Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
6. Memberikan persetujuan atas tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Keputusan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi LJK Anggota KK BRI

Tugas dan wewenang Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Pedoman dan Tata Tertib Kerja anggota Konglomerasi Keuangan BRI, ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan maksud dan tujuan anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Melakukan pengelolaan anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal operasional, bisnis, human capital, manajemen risiko, keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, serta aspek manajemen lainnya yang berkaitan dengan usaha anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Menyelenggarakan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.
4. Menyusun RJPP dan RKAP anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola termasuk pemenuhan prinsip syariah dari Perusahaan Anak Konglomerasi Keuangan BRI yang merupakan entitas syariah.
6. Menindaklanjuti temuan hasil audit oleh pihak intern dan ekstern.
7. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di anggota Konglomerasi Keuangan BRI;
8. Menyelaraskan strategi anggota Konglomerasi Keuangan BRI dengan strategi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9. Melaksanakan kebijakan sinergi di lingkungan anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
10. Melaksanakan kebijakan BRI yang berkaitan dengan anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
11. Membentuk komite-komite di bawah Direksi anggota Konglomerasi Keuangan BRI dalam hal diperlukan.
12. Menyelenggarakan rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan/atau ketentuan internal anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang mencakup frekuensi, kehadiran anggota Direksi, serta tata cara pengambilan keputusan.
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar anggota Konglomerasi Keuangan BRI, Keputusan RUPS anggota Konglomerasi Keuangan BRI, atau peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan prinsip syariah
2. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Transaksi Intra Group (Mengidentifikasi, Mengelola dan Memitigasi Transaksi Intra Grup)

Risiko Transaksi Intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Manajemen Risiko Intra grup

1. Identifikasi Risiko Intra grup
   a. Entitas Utama melakukan identifikasi seluruh risiko intra grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dengan metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada Konglomerasi Keuangan. Risiko transaksi intra grup antara lain dapat timbul dari :
      - Kepemilikan silang antar entitas dalam KK BRI.
      - Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
      - Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh BRI dari Perusahaan Anak.
      - Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
      - Pembelian atau penjualan aset BRI kepada Perusahaan Anak.
      - Transfer risiko melalui reasuransi.
      - Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara entitas dalam KK BRI.
   b. Proses identifikasi risiko intra grup dilakukan dengan melakukan analisis terhadap setiap jenis transaksi intra

grup dalam bisnis KK BRI, antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

2. Pengukuran Risiko Intra grup
   a. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko Intra grup, Entitas Utama melakukan:
      - evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan; dan
      - penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi risiko, antara lain apabila ada penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan.
   b. Metode dan sistem pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko KK BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
   c. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan.
   d. Metode dan sistem pengukuran paling sedikit harus dapat mengukur:
      - sensitivitas Konglomerasi Keuangan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
      - kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
      - tingkat risiko secara individual;
      - eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar jenis risiko; dan
      - seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi KK BRI yang dapat diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen.
   e. Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, sebelum suatu metodologi diaplikasikan oleh KK BRI.
3. Pemantauan Risiko Intra grup
   a. Entitas Utama melakukan pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit, dan hasil *stress test* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan.
   b. Entitas Utama menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up*.
   c. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Entitas Utama melakukan:
      - evaluasi terhadap eksposur risiko melalui pemantauan dan pelaporan eksposur risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan KK BRI; dan
      - penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang bersifat material.
4. Pengendalian Risiko Intra grup
   a. Entitas Utama menetapkan *Risk Appetite* dan limit Risiko Intragrup yang sesuai dengan filosofi risiko serta ketentuan yang berlaku. Penetapan limit risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
   b. Pengendalian risiko lainnya dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, perumusan metode perhitungan transaksi intragrup, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Posisi semester II 2022 dan semester I tahun 2023, risiko intra grup BRI berada pada peringkat risiko *low to moderate.*

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

1. **Penguatan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan**
   Di tahun 2023, dilakukan penyempurnaan dan penguatan implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI diantaranya terkait dengan:
   a. Pengkinian dan penyempurnaan Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan BRI
   b. Pengukuran tingkat kematangan (maturitas) Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI

2. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**
   Pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2023 dibahas dalam Sub Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Bank BRI Tahun 2023.

3. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**
   Selama Tahun 2023, rincian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) adalah sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan program *Compliance Exchange* yaitu kegiatan kunjungan *on-site* SKKT ke Satuan Kerja Kepatuhan di LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI dan/atau sebaliknya dalam rangka meningkatkan pemahaman pekerja terkait praktik bidang kepatuhan di masing-masing industri LJK serta mengidentifikasi peluang *improvement* yang dapat diterapkan pada masing-masing LJK KK BRI.

b. Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI ke Otoritas Jasa Keuangan
c. *Monitoring* pemenuhan struktur Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan Kebijakan/ Prosedur.
d. Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI yang dilakukan secara semesteran dan penyampaian laporan dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan
e. Penilaian *Self Assessment* GCG secara individu dan konsolidasi yang dilakukan secara semesteran.
f. Penyampaian Kebijakan Umum Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ke LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
g. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BRI yang dilaksanakan setiap triwulan dengan aspek evaluasi dan pemantauan antara lain:
   1) Penerapan *Good Corporate Governance*.
   2) Pemantauan prinsip kehati-hatian.
   3) Pengelolaan komitmen.
   4) Pengelolaan risiko kepatuhan.
   5) Pelaksanaan Program APU PPT & PPPSPM
   6) Analisa Dampak Ketentuan Eksternal.
   7) Laporan Transaksi/Putusan yang Mengandung Benturan Kepentingan
   8) Aspek lainnya
h. Penyelenggaraan *Compliance* BRI Group Forum diantaranya sosialisasi penerapan POJK yang baru diterbitkan.
i. Pengukuran tingkat kematangan (maturitas) Kepatuhan Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BRI.
j. Pelaksanaan *In House Training* BRI Group terkait penerapan APU PPT & PPPSPM

4. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

Dalam mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi *strategic business partner*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI Terintegrasi didukung struktur organisasi yang independen serta kompetensi Auditor yang memadai, maka selama Tahun 2023 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

1. Pengembangan penggunaan bersama Aplikasi *Sistem Management Audit* BRISMA Terintegrasi 2.1 (SKAI BRI Life & SKAI BRI Finance).
2. Pelaksanaan audit tematik tata kelola terintegrasi BRI Group yang dilakukan bersama antara SKAI Terintegrasi dan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan.
3. Pengembangan Dashboard SKAI Terintegrasi untuk *Monitoring* program SKAI Terintegrasi.
4. Melakukan *alignment* dan evaluasi atas fokus, strategi audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2023 SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan.
5. Melakukan *Monitoring* terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan kinerja Perusahaan Anak secara berkala yang dilakukan setiap triwulan dengan *scope Monitoring* antara lain:
   a. *Monitoring* pencapaian kinerja Anggota Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak BRI;
   b. *Monitoring* Laporan Hasil Audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan
   c. *Monitoring* tindak lanjut temuan signifikan Anggota Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak BRI.
   d. *Monitoring* pemenuhan *resource human capital* SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan.
6. Pelaksanaan Audit Individual *Head Office Audit* BRI terhadap PNM, BRI Life, BRI Insurance dan BRI Remittance.
7. Pelaksanaan *joint audit* antara SKAI BRI dengan SKAI BRI Life.
8. Melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* (QAIP) di SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka mengembangkan dan program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. Selama tahun 2023, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* terhadap SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (Bank Raya, BRILife, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Finance, BRI Insurance, PNM, Pegadaian, BRI Venture).
9. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan melalui program sebagai berikut:
   a. Pendidikan BSDP NWOL Auditor Modular *Entry Level*.
   b. *Training Internal* Audit ISO 37001: 2016 dan ISO 27001:2022
   c. *Certified Anti Fraud Manager* (CAFM)
   d. *Certified Qualified Internal Auditor* (QIA)
   e. *Certified Ethical Hacker* (CEH)
   f. *Certified Hacking Forensic Investigator* (CHFI)
   g. Sertifikasi BSMR
   h. *Certified in Risk Governance Professional* (CRGP)

i. Ajun Ahli Asuransi Jiwa (AAAIJ)
j. *Certified Forensic Auditor* (CfrA)
k. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Manager Investasi (WMI), Wakil Penjaminan Emisi Efek (WPEE)
l. *Program Secondment Quality Assurance*, Kaji ulang MR dan Strategi Anti *Fraud* yang diikuti SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (SKAI BRI Life, SKAI BRI Insurance, SKAI BRI Manajemen Investasi, SPI Pegadaian, SPI PNM dan SKAI BRI Finance).
m. *Program Secondment* penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) yang diikuti SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (SKAI BRI Ventures, SKAI BRI Finance, SKAI BRI Life, SKAI BRI Insurance, SKAI Bank Raya, SPI PNM, SPI Pegadaian, SKAI BRI Manajemen Investasi, SKAI BRI Danareksa Sekuritas).

10. Pelaksanaan *Workshop* penyusunan Pedoman Pengelolaan Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.
11. Penyusunan Laporan SKAI Terintegrasi yang dilakukan setiap semester.
12. Pelaksanaan *benchmark* SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan (SKAI Bank Raya dan SPI PNM) ke SKAI Terintegrasi (Entitas Utama).
13. Penilaian tingkat kematangan (maturitas) SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan BRI Tahun 2023.
14. *Review of Policy*, pelaksanaan review atas kebijakan dan prosedur audit intern anggota konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan piagam audit intern terintegrasi dan ketentuan terkini.
15. Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester.
16. Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Terintegrasi.
17. *Monitoring* Tindak Lanjut perbaikan atas Temuan hasil Audit Eksternal terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
18. Dalam rangka akselerasi proses *transfer knowledge* dari SKAI Terintegrasi (Entitas Utama) kepada SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:
    a. SKAI Bank Raya: Kepala *Group* Auditor (1 Pekerja), Auditor (2 Pekerja)
    b. SKAI BRILife: Kepala Bagian (1 Pekerja), Auditor (2 Pekerja)
    c. SKAI BRI Finance: Kepala SKAI (1 Pekerja), Group Head (2 Pekerja)
    d. SKAI BRI *Insurance*: Grup *Head* (2 Pekerja)
    e. SKAI BRI Venture: Kepala SKAI (1 Pekerja)

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Selama Tahun 2023, rincian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan forum *Risk Management Committee* Terintegrasi (RMCT) sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023 yaitu pada tanggal 27 Februari 2023 dan 16 Agustus 2023.
b. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) Terintegrasi dan Perusahaan Anak yang telah disesuaikan dengan *parenting style* masing-masing Entitas Perusahaan Anak.
c. Melakukan *self assessment* penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Terintegrasi dan Perusahaan Anak yang kemudian dimintakan putusan pada Forum RMCT.
d. Penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi (semesteran) dan Konsolidasi (triwulanan) ke Otoritas Jasa Keuangan.
e. Melakukan *Monitoring* Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Konglomerasi Keuangan secara periodik.
f. Melakukan analisis dan pembuatan laporan kecukupan permodalan Terintegrasi (semesteran) yang disampaikan pada forum RMCT kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
g. Melakukan simulasi *stress test* terintegrasi (semesteran) yang kemudian disampaikan pada forum RMCT.
h. Melakukan koordinasi dengan SKMRT terkait manajemen risiko terintegrasi dalam hal sbb:
    - *Modelling credit scoring* Perusahaan Anak
    - *Modelling* CKPN
    - *Project Digital risk* Perusahaan Anak dan Terintegrasi (*Revamp and Scale up Adaptive Digital Risk Management Framework*)
    - *Risk culture* Perusahaan Anak dan Terintegrasi (Penilaian *Risk Culture Maturity*)
i. Pelaksanaan *In House Training* BRI Group terkait penerapan manajemen risiko (*digital risk, stress testing, cyber risk*) yang berkoordinasi langsung dengan *Corporate University* BRI.
j. *Monitoring* perbaikan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Perusahaan Anak sesuai dengan *roadmap* Tata Kelola Terintegrasi dari Konsultan PwC.



Tanggung Jawab **Sosial Perusahaan**


BRI
SenyuM
Qlola
BRI mo
BRI SPOT

PILAR SOSIAL

Program BRI Peduli TJSL berfokus pada tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada tahun 2023 BRI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat sebesar Rp236.169.653.579 melalui pelaksanaan program-program unggulan antara lain:

1. Program Ini Sekolahku
   Program ini fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah yang sudah tidak layak untuk mendukung proses belajar mengajar sehingga melalui program ini diharapkan mampu memberikan ruang belajar yang nyaman bagi siswa dan guru.
2. Beasiswa untuk Anak-Anak Berprestasi di Desa BRILiaN dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia
   BRI memberikan bantuan besasiwa khusus untuk anak-anak berprestasi di Desa BRILiaN. Bantuan beasiswa tersebut diberikan kepada 1.800 anak-anak berprestasi di 109 Desa BRILiaN di 17 Regional Office BRI Selindo.
3. BRI Peduli Pemberdayaan Kelompok Perempuan
   BRI menyelenggarakan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan melaksanakan Program BRINITA yang merupakan program usaha pertanian di perkotaan dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia sehingga bermanfaat dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan lokasi padat penduduk menjadi lebih baik dari sisi lingkungan dan kesehatan, sehingga dapat memberdayakan masyarakatnya dan diharapkan dapat menjadikan Kawasan tersebut menjadi kawasan edukasi dan wisata. Program BRINITA terdiri dari Pembangunan Sarana & Prasarana Urban Farming, Pelatihan Penanaman dan Perawatan Tanaman dan Perikanan, Pembentukan Kelompok, serta bantuan alat usaha.





PILAR EKONOMI

Program BRI Peduli TJSL berfokus untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pada tahun 2023 BRI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat sebesar Rp21.366.015.076 melalui pelaksanaan program-program unggulan antara lain:

1. Bantuan Pembangunan Rumah Produksi dan Patung Tugu Jeruk Di Desa BRILiaN Karang Bunga, Barito Kuala. BRI memberikan bantuan berupa pembangunan rumah produksi jeruk dan pembuatan tugu jeruk sebagai simbol desa sebagai penghasil buah jeruk. BRI juga membantu peralatan yang digunakan untuk pembuatan es krim dan jus jeruk.
2. Bantuan Pembangunan Lapak Pedagang Kuliner di Halaman Parkir Pasar Manis Purwokerto. BRI memberikan bantuan berupa Pembangunan Lapak Pedagang Kuliner di Halaman Parkir Pasar Manis Purwokerto. BRI Purwokerto memberikan branding BRI di setiap lapak dan memberikan sarana pembayaran dengan *echannel* BRI.
3. Program Sertifikasi Halal dan Pelatihan Digitalisasi Marketing UMKM BRI memberikan bantuan berupa sertifikasi halal kepada 200 UMKM. UMKM yang ikut serta dalam program ini berasal dari nasabah mikro BRI dan UMKM peserta pelatihan Rumah BUMN BRI.





PILAR LINGKUNGAN

Program BRI Peduli TJSL didalam Pilar Lingkungan berfokus untuk pengelolaan penataan dan pelestarian ekosistem lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. BRI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp84.461.843.580 pada tahun 2023 melalui program-program antara lain:

1. Program BRI Menanam *Grow & Green*. BRI melakukan program penanaman pohon dan penyediaan bibit mangrove, durian, pala, kopi dan lainnya untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus pemberdayaan masyarakat di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan dan Kelompok Tani yang sudah lama berkecimpung dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
2. Bantuan Pengadaan Sarana & Prasarana Bank Sampah Induk Ciamis. BRI memberikan bantuan berupa sarana & prasarana pengelolaan sampah kepada Bank Sampah Induk Ciamis di daerah Ciamis, Jawa Barat. Bank Sampah juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah sebelum membuang ke tempat sampah sehingga dapat mengurangi residu yang dibuang ke pembuangan akhir. Bantuan yang diberikan oleh BRI berupa mesin *press* dan kendaraan pengangkut sampah.
3. BRI Peduli Bersih-Bersih Kali. Kegiatan pada program ini meliputi normalisasi sungai, pembangunan sarana fisik, dan edukasi lingkungan sehat. Di dalam program ini juga terdapat program pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan cara pengolahan sampah dan bantuan mesin pengolah sampah.





PELAKSANAAN SROI ATAS PROGRAM BRI PEDULI TJSL

Untuk mengukur dampak sosial sekaligus sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Program BRI Peduli TJSL, BRI telah melakukan perhitungan *Social Return On Investment* (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas program-program unggulan pada pilar Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Adapun untuk rincian program dan hasil perhitungan SROI serta IKM dapat dilihat pada laporan keberlanjutan perusahaan *(Sustainability Report).*

Indeks OJK



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		√	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	27	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	27	
	3. Laba Operasional.	27	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	28	
	5. Laba bersih.	28	
	6. Laba (rugi).	28	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	28	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	28	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	28	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	28	
	11. Laba (rugi) per saham.	29	SEOJK 9 SEOJK 16
	12. Jumlah aset.	26	
	13. Jumlah liabilitas.	26	
	14. Jumlah ekuitas.	27	
	15. Dana pihak ketiga.	26	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	26	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	31	SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	31	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	31	
	20. Rasio lancar.	31	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	31	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	31	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	23. Rasio KPMM.	31	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	31	
	25. Rasio *Non-performing Loans* (NPL).	31	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	31	
	27. *Cost to Income Ratio* (CIR).	31	
	28. Rasio *Net Interest Margin* (NIM).	31	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	31	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	32	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	32	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	32	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	34-35	
	a. Jumlah saham yang beredar.		
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	d. *Volume* perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	35	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	35	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	35	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	49	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	49	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	49	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	51	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	53	
	f. Struktur organisasi.	47	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	47	
	h. Teknologi informasi.	47	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	47	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	50	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	48	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	47	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	47	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	56	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	56	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	53	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	47	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	53-54	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	54-56	
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	62-64	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	64-65	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	65-69	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	71	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	62	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	74-75	SEOJK 16 POJK 29

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: 1. Alamat 2. Nomor telepon 3. Alamat surat elektronik 4. Alamat situs web	78	SEOJK 9 SEOJK 16
Nama dan alamat entitas anak dan/ atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web **Catatan**: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	79-80	SEOJK 9 SEOJK 16
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. **Catatan**: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	82-85	SEOJK 9 SEOJK 16
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi Perusahaan 2. Misi Perusahaan 3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki Perusahaan.	86-88	SEOJK 9 SEOJK 16
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir. 2. Kegiatan usaha yang dijalankan. 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	89-94	SEOJK 9 SEOJK 16
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	96-99	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	100-101	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	102-103	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat: 1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 2. Foto terbaru. 3. Usia.	104-118	SEOJK 9 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	119-131	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	132-136	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	137-139	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	140-145	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.		
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.		SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	139	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	146-153	SEOJK 9 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan: Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi: a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*. b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank. c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	155	SEOJK 9
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	156-159	SEOJK 16
Informasi pencatatan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	160-165	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 1. Nama dan alamat. 2. Periode penugasan. 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. 4. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	165	SEOJK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	166-167	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional). 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi. 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi. 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	168-182	SEOJK 9

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (*corporate plan*). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).	198-201	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	206-265	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	207-261, 264-265	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	207-261, 264-265	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	261-265	
	d. Profitabilitas.	261-265	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	267-268, 270-276	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	268-269, 276-279	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	268, 275	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	268-269, 277	
	5. Ekuitas.	269, 279-280	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	280-289	
	7. Arus kas.	289-291	
	8. Suku bunga dasar kredit.	295-296	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		296-297	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	292-294	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	294-295	
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	301	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*).	300	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	300	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	368	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut.		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.		
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	368	
	2. Tujuan investasi barang modal.	369	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	368	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	370-371	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	372	
	2. Laba (rugi).	372	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	372-373	
	4. Pemasaran.	373-374	
	5. Pengembangan SDM.	374	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	372	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	375	
	2. Laba (rugi).	375	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	375	
	4. Kebijakan dividen.	376	
	5. Pemasaran.	376	
	6. Pengembangan SDM.	376	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	375	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	201-204	SEOJK 9 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	377	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	377-378	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	377-378	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	377-378	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	379	
	2. Rencana penggunaan dana.	379	
	3. Rincian penggunaan dana.	379	
	4. Saldo dana.	379	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	-	
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	379-387	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).		
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*).		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.		
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.		SEOJK 16 SEOJK 13
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	387-389	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	387-389	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	389-390	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.		
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.		
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	301-367	SEOJK 9
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	468-483	SEOJK 16
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	485-487	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.	485	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	488-500	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	500-502	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	502	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	552-553	SEOJK 13 POJK 17
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	504-505	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.	507-508	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	513-521	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	521-523	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	526-537	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	537-544	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	544-546	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	546-551	SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.		
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.		
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:	N/A	SEOJK 16
	a. Nama.		
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.		
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	564-566	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	560-563	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	567	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	570-572	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	567-569	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	572-574	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:	578-579	
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	580	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	585-586	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	575	
	10.Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*).	575	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	581-585	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	586-587	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	590-592; 609-624	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	593; 625-626	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	600-601; 631-634	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	588; 604-605	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite.	588; 604	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	594-600; 626-631	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	601-603; 634-636	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	641-642	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	642	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	643-645	
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	650-651	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	653	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	654	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	648-649	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	651-652	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal.	651	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	656-659	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	698	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	699	
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal Control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	700-701	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	704	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	704	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	712-716	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	716-721	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	726	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	727	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	727-737	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	744-748	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		748	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	755-758	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	759	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	758	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	692	POJK 45
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	692-693	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	693	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	693	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	693	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*).	694	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	694	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	694	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	694-695	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	695	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers*.	695	
	12. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	695	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	696	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	696	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	696	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	696	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	696	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	696	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	696-697	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee Stock ownership program*/ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock Ownership program*/MSOP) dan/ atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock Ownership program*/ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	697-698	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.		
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	553-555	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	760	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	760	
	3. Penanganan pengaduan.	760-761	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	762	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	763	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.		
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	763-767	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	767	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		771	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	770-771	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		772	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		770	SEOJK 13

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	768-769	SEOJK 13
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	769-770	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	769	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		772	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	456-463	SEOJK 16
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) Penjelasan strategi keberlanjutan. b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup). c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik. d) Penjelasan Direksi. e) Tata kelola keberlanjutan. f) Kinerja keberlanjutan. g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada. h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada. i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. 2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 3. Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	790-791	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.		
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

SEOJK 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

POJK 17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
dan Entitas Anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279
Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBRI
Telex: 65293, 65456, 65459, 65461

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sunarso
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
   Alamat Domisili : Jl. At Taqwa II No. 4 Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat
   Nomor Telepon : 021 - 575 1705
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Viviana Dyah Ayu R.K.
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
   Alamat Domisili : Jl. Bumi Serpong Damai Blok L. 10/3 Serpong, Tangerang Selatan
   Nomor Telepon : 021 - 575 1751
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Januari 2024
Atas nama dan mewakili Direksi

Sunarso	Viviana Dyah Ayu R.K.
Direktur Utama	Direktur Keuangan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i - vii
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	5 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	8 - 9
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10 - 11
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	12 - 357

****

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/I/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2023, saldo cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp79.924.211 juta. Lihat informasi kebijakan akuntansi material untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang diungkapkan dalam Catatan 2e, penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan dalam Catatan 2ao, dan pengungkapan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Kami berfokus pada area ini karena saldo kredit yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir. Selain itu, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, dan penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor-faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan)

Respons audit:

Kami melakukan pengujian pengendalian utama atas pemberian kredit, penilaian kualitas kredit internal secara reguler, serta pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan. Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, serta melakukan validasi atas model pencadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Grup dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Grup untuk kredit yang diberikan. Kami menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan. Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan untuk mengevaluasi identifikasi secara tepat waktu oleh Grup atas eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus dimana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Grup atas arus kas masa depan ekspektasian, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dan internal.

Kami memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilai yang dinilai secara individual berdasarkan sampel. Kami melakukan penilaian atas asumsi utama yang digunakan dalam penyesuaian pasca model/*management overlay* yang diterapkan untuk mengantisipasi risiko yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh model. Kami menilai apakah pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 (“Laporan Tahunan”) selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini audit kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

31 Januari 2024

00035

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Kas	2a,2c,3	31.603.784	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	101.909.121	150.935.150
Giro pada Bank Lain	2a,2c,2d, 2e,2f,5,44	22.331.919	21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.984)	(18.577)
		22.321.935	21.469.857
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	2a,2c,2d, 2e,2g,6,44	65.225.260	70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.860)	(1.981)
		65.223.400	70.399.920
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h,7,44	331.091.304	330.324.818
Cadangan kerugian penurunan nilai		(81.510)	(82.835)
		331.009.794	330.241.983
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	2c,2d,2e, 2i,8,44	53.895.404	39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.323.916)	(1.638.929)
		51.571.488	37.428.446
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2u, 9	33.595.231	51.014.678
Tagihan Derivatif	2c,2aj,10	911.683	911.405
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,11,44	1.197.752.706	1.079.274.819
Cadangan kerugian penurunan nilai		(79.924.211)	(88.323.830)
		1.117.828.495	990.950.989

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET (lanjutan)			
Pinjaman Syariah	2c,2e,2k, 12	13.668.220	10.514.329
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.093.762)	(1.286.203)
		12.574.458	9.228.126
Piutang Pembiayaan	2c,2d,2e, 2l,13,44	55.008.321	49.287.917
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.483.915)	(3.477.948)
		50.524.406	45.809.969
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e, 2m,14,44	10.217.408	7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai		(249.698)	(136.536)
		9.967.710	7.031.064
Penyertaan Saham	2c,2d,2e, 2n,15,44	7.308.167	6.515.095
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.676)	(8.192)
		7.305.491	6.506.903
Aset Tetap	2d,2o,2p, 16		
Biaya perolehan		81.463.777	73.951.201
Akumulasi penyusutan		(21.785.658)	(18.735.154)
Nilai buku - neto		59.678.119	55.216.047
Aset Pajak Tangguhan - neto	2ak,38c	15.605.462	18.712.994
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 2q,2r,17	53.376.453	42.374.001
TOTAL ASET		**1.965.007.030**	**1.865.639.010**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2s,18	30.651.807	24.910.579
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,44		
Giro	19	346.124.372	349.755.590
Tabungan	20	527.945.550	522.647.920
Deposito Berjangka	21	484.258.839	435.480.503
Total Simpanan Nasabah		1.358.328.761	1.307.884.013
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	2c,2d,2t, 22,44	11.958.319	9.334.547
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u, 23,44	19.079.458	9.997.592
Liabilitas Derivatif	2c,2aj,10	925.210	783.921
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m, 14,44	10.217.408	7.167.600
Utang Pajak	2ak,38a	2.546.839	3.053.782
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,24	49.637.581	63.611.761
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w, 25,44	98.850.813	79.371.200
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e, 26,44	6.117.768	6.458.343
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2ae, 27,42,44	23.059.624	21.296.487
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2ad, 28,45b	36.664.617	27.871.880
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,29	496.683	501.988
TOTAL LIABILITAS		**1.648.534.888**	**1.562.243.693**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham			
Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B)	1,31a	7.577.950	7.577.950
Tambahan modal disetor	31b	75.853.127	75.637.083
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	2o,16	20.216.505	20.267.952
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ai,31c	(253.744)	(127.954)
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2h	(2.221.745)	(4.464.483)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h,7	128.230	139.978
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2ae	(2.134.699)	(689.473)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	(3.614.321)	(2.202.178)
Opsi saham	2af,30	54.769	16.356
Cadangan kompensasi atas saham bonus	31f	287.482	210.266
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	31g	1.758.580	1.758.580
Saldo laba	31d,31e		
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		210.688.737	198.147.249
Total Saldo Laba		213.711.422	201.169.934
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		311.363.556	299.294.011
Kepentingan non-pengendali	31h	5.108.586	4.101.306
TOTAL EKUITAS		**316.472.142**	**303.395.317**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.965.007.030**	**1.865.639.010**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	2022*)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Syariah	32		
Pendapatan bunga	2z	166.052.387	141.756.773
Pendapatan syariah	2k,2ab	12.943.607	10.118.043
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		178.995.994	151.874.816
Beban Bunga dan Syariah	33		
Beban bunga	2z	(42.658.864)	(26.269.701)
Beban syariah	2ab	(1.153.643)	(1.008.042)
Total Beban Bunga dan Syariah		(43.812.507)	(27.277.743)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		135.183.487	124.597.073
Pendapatan premi	2ac	9.078.853	8.936.995
Beban klaim	2ac	(6.917.461)	(7.359.672)
Pendapatan premi - neto		2.161.392	1.577.323
Pendapatan penjualan emas	2am	7.982.888	8.175.106
Beban harga pokok penjualan emas	2am	(7.663.244)	(7.875.955)
Pendapatan penjualan emas - neto		319.644	299.151
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2aa	20.737.913	18.794.964
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		16.833.578	12.468.321
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	2h,7	1.898.653	1.518.191
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2ah,2ai	402.526	1.132.079
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	214.435	145.520
Lain-lain		5.538.680	5.068.619
Total Pendapatan Operasional Lainnya		45.625.785	39.127.694
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,34	(29.523.426)	(27.384.906)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	26d	341.994	543.145
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(497.848)	(137.431)
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2ae,35, 42,44	(37.850.275)	(39.390.133)
Umum dan administrasi	36,16	(28.484.209)	(25.958.686)
Lain-lain		(10.447.807)	(8.967.193)
Total Beban Operasional lainnya		(76.782.291)	(74.316.012)

*) Setelah reklasifikasi (Catatan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	2022*)
LABA OPERASIONAL		**76.828.737**	**64.306.037**
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	37	(399.025)	290.664
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**76.429.712**	**64.596.701**
BEBAN PAJAK	2ak,38b	**(16.004.664)**	**(13.188.494)**
LABA BERSIH		**60.425.048**	**51.408.207**
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2ae	(1.787.840)	902.754
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		348.975	(176.671)
Surplus revaluasi aset tetap	16	(82.365)	3.297.304
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ai	(125.790)	(11.979)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	1.782.067	(7.946.514)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	(9.105)	(413.197)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		502.669	1.509.279
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		**628.611**	**(2.839.024)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**61.053.659**	**48.569.183**

*) Setelah reklasifikasi (Catatan 51)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	2022*)
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		60.099.863	51.170.312
Kepentingan non-pengendali		325.185	237.895
TOTAL		**60.425.048**	**51.408.207**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		60.708.390	48.333.349
Kepentingan non-pengendali		345.269	235.834
TOTAL		**61.053.659**	**48.569.183**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	2ag,49		
Dasar		398	338
Dilusian		398	338

*) Setelah reklasifikasi (Catatan 51)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Opsi saham dan cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus Revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali	Saldo Laba		Total Ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**7.577.950**	**76.242.898**	**547.026**	**(115.975)**	**1.949.387**	**(1.423.685)**	**(45.997)**	**229.521**	**17.006.230**	**1.758.580**	**3.022.685**	**181.986.363**	**288.734.983**	**3.051.821**	**291.786.804**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.170.312	51.170.312	237.895	51.408.207
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2ae, 2ah	-	-	(407.048)	(11.979)	(6.413.870)	734.212	-	-	3.261.722	-	-	-	(2.836.963)	(2.061)	(2.839.024)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	(407.048)	(11.979)	(6.413.870)	734.212	-	-	3.261.722	-	-	51.170.312	48.333.349	235.834	48.569.183
Pembagian laba																
- Dividen atas laba bersih tahun 2021	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.406.603)	(26.406.603)	(18.569)	(26.425.172)
- Dividen interim atas laba bersih tahun 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.602.823)	(8.602.823)	-	(8.602.823)
Saham bonus	1d	-	(1.341)	-	-	-	-	31.363	-	-	-	-	-	30.022	-	30.022
Opsi saham		-	-	-	-	-	-	-	(2.899)	-	-	-	-	(2.899)	(483)	(3.382)
Perubahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.765	153.765
Saham treasuri	1d	-	-	-	-	-	-	(2.187.544)	-	-	-	-	-	(2.187.544)	-	(2.187.544)
Tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.298	616.298
Akuisisi dengan entitas sepengendali	31b	-	(604.474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(604.474)	62.640	(541.834)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**7.577.950**	**75.637.083**	**139.978**	**(127.954)**	**(4.464.483)**	**(689.473)**	**(2.202.178)**	**226.622**	**20.267.952**	**1.758.580**	**3.022.685**	**198.147.249**	**299.294.011**	**4.101.306**	**303.395.317**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Opsi saham dan cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali	Saldo Laba		Total ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**7.577.950**	**75.637.083**	**139.978**	**(127.954)**	**(4.464.483)**	**(689.473)**	**(2.202.178)**	**226.622**	**20.267.952**	**1.758.580**	**3.022.685**	**198.147.249**	**299.294.011**	**4.101.306**	**303.395.317**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.099.863	60.099.863	325.185	60.425.048
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2ae, 2ai	-	-	(11.748)	(125.790)	2.242.738	(1.445.226)	-	-	(51.447)	-	-	-	608.527	20.084	628.611
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	(11.748)	(125.790)	2.242.738	(1.445.226)	-	-	(51.447)	-	-	60.099.863	60.708.390	345.269	61.053.659
Pembagian laba																
- Dividen atas laba bersih tahun 2022	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.891.943)	(34.891.943)	(25.861)	(34.917.804)
- Dividen interim atas laba bersih tahun 2023	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.666.432)	(12.666.432)	-	(12.666.432)
Saham bonus	31b	-	216.044	-	-	-	-	31.305	77.216	-	-	-	-	324.565	-	324.565
Opsi saham	30	-	-	-	-	-	-	-	38.413	-	-	-	-	38.413	(9)	38.404
Perubahan kepentingan non-pengendali pada entitas anak	1f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.910	133.910
Saham treasuri	1d	-	-	-	-	-	-	(1.443.448)	-	-	-	-	-	(1.443.448)	-	(1.443.448)
Tambahan modal disetor	1f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.971	553.971
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**7.577.950**	**75.853.127**	**128.230**	**(253.744)**	**(2.221.745)**	**(2.134.699)**	**(3.614.321)**	**342.251**	**20.216.505**	**1.758.580**	**3.022.685**	**210.688.737**	**311.363.556**	**5.108.586**	**316.472.142**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Pendapatan yang diterima			
Penerimaan bunga dan investasi		169.068.778	130.501.831
Pendapatan syariah		12.922.019	10.118.043
Pendapatan premi		8.996.516	8.936.995
Pendapatan penjualan emas		7.982.888	8.175.106
Beban yang dibayar			
Beban bunga		(42.461.798)	(25.762.613)
Beban syariah		(1.161.971)	(1.008.042)
Beban klaim		(6.549.595)	(7.359.672)
Beban harga pokok penjualan emas		(7.663.244)	(7.875.955)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		16.833.578	12.468.321
Pendapatan operasional lainnya		29.267.943	27.534.502
Beban operasional lainnya		(75.776.851)	(70.993.349)
Beban non-operasional - neto		(568.000)	(52.531)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(14.279.292)	(15.762.408)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**96.610.971**	**68.920.228**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain		(505.646)	(195.110)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(1.277.298)	(2.114.619)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		(14.828.029)	(9.403.150)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		17.419.447	3.900.820
Kredit yang diberikan		(152.128.249)	(106.917.972)
Pinjaman syariah		(3.335.688)	(1.354.828)
Piutang pembiayaan		(5.720.404)	(9.996.487)
Aset lain-lain		(16.170.249)	(2.941.947)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		5.741.228	6.175.192
Simpanan:			
Giro		(3.631.218)	129.165.393
Tabungan		5.297.630	24.971.180
Deposito berjangka		48.778.336	15.004.224
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		2.623.772	(3.994.882)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		9.081.866	(19.410.916)
Liabilitas lain-lain		7.072.077	5.698.879
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan operasi		**(4.971.454)**	**97.506.005**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil penjualan aset tetap		168.975	343.195
Penjualan (penambahan) penyertaan saham		36.137	(145.649)
Penerimaan dividen	15	75.572	144.069
Perolehan aset tetap		(8.177.296)	(10.538.233)
Penurunan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi		2.907.520	37.424.578
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan investasi		**(4.989.092)**	**27.227.960**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman yang diterima	50	31.573.410	20.079.547
Pembayaran pinjaman yang diterima	50	(12.212.871)	(9.011.013)
Saham yang dibeli kembali		(1.382.284)	(2.187.544)
Pembagian laba untuk dividen		(43.494.766)	(26.406.603)
Penerimaan pinjaman subordinasi	50	494.142	-
Pembayaran pinjaman subordinasi	50	(500.000)	-
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	24,50	14.112.994	21.739.525
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	24,50	(28.141.850)	(14.650.023)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		**(39.551.225)**	**(10.436.111)**
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(49.511.771)**	**114.297.854**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		**(2.663)**	**(30.287)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**268.192.168**	**153.924.601**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**218.677.734**	**268.192.168**
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:	2a		
Kas	3	31.603.784	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	4	101.909.121	150.935.150
Giro pada bank lain	5	22.331.919	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	62.678.940	68.361.106
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		153.970	-
Total Kas dan Setara Kas		**218.677.734**	**268.192.168**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI" atau "Bank") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan Akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai Bank Umum Devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta modal disetor.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000.

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana, Pemecahan Saham (*Stock Split*) dan Penawaran Umum Terbatas Saham

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering* (IPO)) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan “S”) dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (nilai penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (nilai penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 31b).

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana, Pemecahan Saham (*Stock Split*) dan Penawaran Umum Terbatas Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (nilai penuh) per lembar saham menjadi Rp250 (nilai penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (nilai penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp250 (nilai penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (nilai penuh) per saham menjadi Rp50 (nilai penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (nilai penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan sah dengan nilai nominal baru atau Rp50 (nilai penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

Dalam rangka pembentukan *Holding* Ultra Mikro, BRI meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), sesuai hasil keputusan RUPSLB tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 61 tanggal 22 Juli 2021, Notaris Fathiah Helmi S.H., serta telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Surat OJK No. S-152/D.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam PMHMETD I tersebut, BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 saham baru Seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp50 (nilai penuh) dalam bentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan harga pelaksanaan per lembar saham Rp3.400 (nilai penuh). Tanggal perdagangan dan eksekusi HMETD tersebut mulai dari 13 September 2021 sampai dengan 22 September 2021.

Dari penawaran umum terbatas ini, BRI telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 28.213.191.604 lembar saham sehingga mengakibatkan komposisi kepemilikan saham BRI adalah 56,82% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 43,18% dimiliki oleh publik.

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

Pada tanggal 5 Februari 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 84.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp184.597.481 (nilai penuh), harga wajar program diskresi saham bonus sebesar Rp3.240 (nilai penuh) atau setara Rp274.104.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp89.506.518 (nilai penuh).

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebesar 2.096.400 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp4.574.351.773 (nilai penuh), dimana implementasi ini terdiri dari ESA 1 sebanyak 831.000 lembar saham dengan harga wajar Rp3.630 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp3.016.530.000 (nilai penuh) dan ESA 2 sebanyak 1.265.400 lembar saham dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp5.580.414.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.022.592.226 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 17 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 11.613.900 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp25.341.568.431 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp26.015.136.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.680.363.069 (nilai penuh).

Pada tanggal 25 Oktober 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 590.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp1.287.381.963 (nilai penuh), harga wajar *Discretionary Pool* sebesar Rp3.750 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp2.212.500.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp925.118.037 (nilai penuh).

Pada tanggal 27 Oktober 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 263.904.800 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp575.841.151.426 (nilai penuh), harga wajar ESA 3 sebesar Rp4.020 (nilai penuh) atau setara Rp1.060.897.296.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp485.056.144.574 (nilai penuh).

Pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 124.565.200 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp271.801.680.741 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp279.026.048.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp7.224.367.259 (nilai penuh).

Pada tanggal 17 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 282.159.300 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp615.672.531.146 (nilai penuh), harga wajar ESA 4 sebesar Rp3.926 (nilai penuh) atau setara Rp1.107.757.411.800 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp492.084.880.654 (nilai penuh).

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 17 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 11.004.400 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp24.011.637.404 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp24.649.856.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.660.603.096 (nilai penuh).

Pada tanggal 27 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 6.049.800 lembar saham terdiri dari ESA 1 sebanyak 16.000 lembar saham dengan harga wajar Rp3.630 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp58.080.000 (nilai penuh), ESA 2 sebanyak 266.400 lembar saham dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp1.174.824.000 (nilai penuh), ESA 3 sebanyak 4.813.700 lembar saham dengan harga wajar Rp4.020 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp19.351.074.000 (nilai penuh), dan ESA 4 sebanyak 953.700 lembar saham dengan harga wajar Rp3.926 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp3.744.226.200 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp11.127.520.477 (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 1.742.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp3.802.358.996 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp3.903.424.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp732.402.204 (nilai penuh).

Pada tanggal 30 Desember 2021, terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 30.720.900 lembar saham dengan rincian sebanyak 30.252.500 lembar dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp66.011.055.629 (nilai penuh) dan sebanyak 468.400 lembar dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.881 (nilai penuh) atau setara Rp1.349.460.400 (nilai penuh), harga wajar ESA Khusus sebesar Rp4.080 (nilai penuh) atau setara Rp125.341.272.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp57.980.755.971 (nilai penuh). Atas transaksi yang terjadi pada tahun 2021, total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI adalah sebanyak 15.931.900 lembar saham.

BRI melalui surat No. R.0034-DIR/ALM/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp3.000.000. Pembelian kembali saham BRI tersebut telah disetujui oleh OJK melalui Surat No.S-29/PB.31/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2022. BRI juga telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000 melalui surat No.B.7-CSC/CSM/CGC/01/2022 tanggal 21 Januari 2022. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Pada bulan April hingga Juli 2022, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 184.245.400 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp818.380 dengan rata-rata harga pembelian Rp4.442 (nilai penuh) per lembar saham.

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2022 terdapat implementasi program kepemilikan saham BRI yang bersumber dari saham treasuri hasil pembelian kembali tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 7.064.100 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp4.440 (nilai penuh) atau setara Rp31.363 per lembar saham. Harga pelaksanaan program sebesar Rp4.250 (nilai penuh) atau setara Rp30.022. Selisih antara nilai perolehan saham treasuri dan biaya program berdasarkan harga wajar dicatat dalam pos agio sebesar Rp1.341 (Catatan 31b).

Pada bulan Agustus hingga Desember 2022, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 295.208.700 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp1.365.888 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp4.627 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada bulan Januari 2023, BRI melanjutkan pembelian saham sebanyak 167.931.800 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp815.732 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp4.858 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 14 Juli 2023 terdapat implementasi program kepemilikan saham kepada pekerja BRI yang bersumber dari saham treasuri hasil pembelian kembali tahun 2020. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 501.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.881 (nilai penuh) atau setara Rp1.445. Pelaksanaan program ini terdiri dari ESA 1 sebanyak 21.100 lembar saham dengan nilai wajar Rp3.630 (nilai penuh), ESA 2 sebanyak 32.300 lembar saham dengan nilai wajar Rp4.410 (nilai penuh), ESA 3 sebanyak 33.900 lembar saham dengan nilai wajar Rp4.020 (nilai penuh), dan ESA 4 sebanyak 414.300 lembar saham dengan nilai wajar Rp3.926 (nilai penuh), dimana secara total harga pelaksanaan program setara dengan Rp1.982. Selisih antara nilai perolehan saham treasuri dan biaya program berdasarkan harga wajar dicatat dalam pos agio sebesar Rp537 (Catatan 31b).

Pada tanggal 18 Agustus 2023 terdapat implementasi program kepemilikan saham BRI yang bersumber dari saham treasuri hasil pembelian kembali tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 6.440.500 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp4.636 (nilai penuh) atau setara Rp29.860. Harga pelaksanaan program sebesar Rp5.450 (nilai penuh) atau setara Rp35.101. Selisih antara nilai perolehan saham treasuri dan biaya program berdasarkan harga wajar dicatat dalam pos agio sebesar Rp5.241 (Catatan 31b).

Pada bulan September sampai dengan Desember 2023, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 118.833.600 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp625.555 dan rata-rata harga pembelian sebesar Rp5.264 (nilai penuh) per lembar saham.

Adapun harga perolehan di atas merupakan harga perolehan dan tidak termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap pembelian saham treasuri.

Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI sebanyak 768.144.900 lembar saham.

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kantor Wilayah	18	18
Kantor Audit Intern Pusat	1	1
Kantor Audit Intern Wilayah	18	18
Kantor Cabang Dalam Negeri	453	448
Kantor Cabang Khusus*)	-	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	6	6
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri**)	7.155	7.611
Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri	3	3
Teras Keliling	115	117
Teras Kapal	4	4

*) Sesuai dengan Nota Dinas B.63.e-PPM/ODV/OD2/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal Penyampaian persetujuan perubahan supervisi KCK
**) Sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum, penyajian Unit Kerja Kantor Kas, BRI Unit dan Teras Kantor dicatatkan sebagai Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 BRI memiliki 5 (lima) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di New York, Cayman Islands, Singapura, Timor-Leste dan Taipei, serta 1 (satu) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 BRI memiliki 10 (sepuluh) entitas anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk, BRI Global Financial Services Co. Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Ltd.) Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management).

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan kepala audit intern wilayah, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang.

Total pekerja BRI dan entitas anak masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.084	60.209
Entitas Anak	20.081	18.870
	80.165	79.079

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 tanggal 2 Mei 2023. Adapun Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
Komisaris Utama/Komisaris	:	Kartika Wirjoatmodjo	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Agus Riswanto	Agus Riswanto
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	:	Nurmaria Sarosa	Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi	Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Paripurna Poerwoko Sugarda	Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	:	Awan Nurmawan Nuh	Hadiyanto

Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1 tanggal 2 Mei 2023. Adapun Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
Direktur Utama	:	Sunarso	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto	Catur Budi Harto
Direktur	:	Viviana Dyah Ayu R.K	Viviana Dyah Ayu R.K
Direktur	:	Amam Sukriyanto	Amam Sukriyanto
Direktur	:	Andrijanto	Andrijanto
Direktur	:	Handayani	Handayani
Direktur	:	Supari	Supari
Direktur	:	Arga Mahanana Nugraha	Arga Mahanana Nugraha
Direktur	:	Agus Sudiarto	Agus Sudiarto
Direktur	:	Agus Noorsanto	Agus Noorsanto
Direktur	:	Agus Winardono	Agus Winardono
Direktur	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Ahmad Solichin Lutfiyanto

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 2351-DIR/HCB/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 1503-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ketua	:	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Anggota	:	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Anggota	:	Heri Sunaryadi	Heri Sunaryadi
Anggota	:	Agus Riswanto	Agus Riswanto
Anggota	:	Sahat Pardede	Sahat Pardede
Anggota	:	Irwanto	Irwanto
Anggota	:	Duma Riana Hutapea	Bardiyono Wiyatmojo

Aestika Oryza Gunarto menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep 524-DIR/HCB/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Adapun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023, Sekretaris Perusahaan BRI dijabat oleh Agustya Hendy Bernadi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 1616 DIR/HCB/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dijabat oleh Triswahju Herlina sesuai Surat Keputusan Direksi BRI No. Kep 339-DIR/HCB/03/2022 tanggal 7 Maret 2022.

f. Entitas Anak

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk ("Bank Agro") untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap Bank Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa Penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga Penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar saham atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (nilai penuh) per lembar saham. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun. Namun, khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10% dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar saham sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 (nilai penuh) per lembar saham dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 (akhir dari konversi waran), jumlah waran yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 612.937.654 lembar sehingga meningkatkan modal saham BRI Agro sebesar Rp61.294.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Pada Akta RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 51 tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana diatur dalam POJK NO. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka Program *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP), sebanyak-banyaknya 350.000.000 lembar saham dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 249.376.451 lembar saham.

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-113/D.04/2018 memberitahukan mengenai Efektifnya PUT VIII sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.889.085.049 lembar saham.

Hasil dari PUT VIII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,10%, Dapenbun 5,00% dan publik 7,90%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

Hasil dari MESOP tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 September 2021 menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 27 September 2021 dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 85,70% dan publik 14,30%. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0453530 tanggal 27 September 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 27 September 2021, Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya") yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU0052731.AH.01.02 tahun 2021, tanggal 27 September 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. Kep-65/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Raya Indonesia Tbk pada tanggal 1 November 2021. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan diterbitkan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 17 Desember 2021.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Pada Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Raya Indonesia Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., telah memberikan Persetujuan untuk Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX").

Pada tanggal 30 September 2021 melalui surat No. B.562/DIR.01/SKP/09/2021, Bank Raya menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD IX kepada Dewan Komisioner OJK sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 18 November 2021, Dewan Komisioner OJK melalui surat No.S-207/D.04/2021 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 1.054.545.185 lembar saham.

Hasil dari PMHMETD IX menyebabkan Anggaran Dasar Bank Raya mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 17 Desember 2021, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya sebesar 85,72% dan publik 14,28%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0487031 tanggal 17 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 30 September 2022, Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn., dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk tentang perubahan alamat kantor pusat Bank Raya dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Raya guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI 2020) yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-0070827.AH.01.02 Tahun 2022, tanggal 30 September 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2022 melalui surat No. B.681/DIR.03/CSC/10/2022, Bank Raya menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD X kepada Dewan Komisioner OJK sebanyak-banyaknya 2.320.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Pada tanggal 30 November 2022, Dewan Komisioner OJK melalui surat No.S-250/D.04/2022 memberitahukan mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 1.993.201.832 lembar saham.

Hasil dari PMHMETD X menyebabkan Anggaran Dasar Bank Raya mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 26 Desember 2022, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Bank Raya berubah menjadi sebanyak 24.740.107.814 lembar saham sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya meningkat menjadi 86,85% dan publik 13,15%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0410365 tanggal 26 Desember 2022.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Bank Raya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Raya Indonesia Tbk No. 14 tanggal 23 Mei 2023 telah memberikan persetujuan untuk PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK NO. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka program *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP), sebanyak-banyaknya 350.000.000 lembar saham dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Raya Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0066677 tanggal 23 Mei 2023. Atas PMTHMETD untuk program MESOP, jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Bank Raya berubah menjadi sebanyak 24.740.494.294 lembar saham sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya sebesar 86,85% dan publik 13,15%.

Total aset Bank Raya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.492.372 dan Rp13.949.884 atau 0,64% dan 0,75% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp890.959 dan Rp542.437 atau 0,50% dan 0,64% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Bank Raya adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan. Bank Raya berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Kantor pusat Bank Raya berlokasi di Menara BRILiaN, Jl. Gatot Subroto No. 177A, Jakarta, dan memiliki 5 kantor cabang, 13 *community branch*, 6 kantor cabang pembantu, 2 kantor kas dan 1 E-Buzz.

BRI Global Financial Services Co. Ltd. Hong Kong (dahulu BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance))

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 lembar saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270 (nilai penuh). Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya Certificate of Change Name No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Berdasarkan Keputusan RUPS BRIngin Remittance Company Limited tanggal 14 November 2019, serta dengan diterbitkannya Certificate of Change of Name No. 961091 tanggal 31 Oktober 2023 oleh Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region, maka nama BRI Remittance Company Limited Hong Kong secara resmi berubah menjadi BRI Global Financial Services Company Limited Hong Kong (BRI Global Financial Services).

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

BRI Global Financial Services Co. Ltd. Hong Kong (dahulu BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)) (lanjutan)

Total aset RI Global Financial Services pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.232 dan Rp17.982 atau 0,00123% dan 0,00096% dari total aset konsolidasian.

Sesuai dengan izin usaha resmi dari Regulator Hong Kong sebagai *Money Service Operator* (MSO) dan *Money Lender Business*, maka ruang lingkup kegiatan BRI Global Financial Services adalah menjalankan layanan remitansi, *money exchange*, dan *financing* (baik untuk perusahaan maupun perorangan, dalam hal ini pekerja migran Indonesia) serta lingkup layanan operasional lain terkait dengan BRI *Group* yang dimiliki oleh nasabah BRI *Group* yang berdomisili di Hong Kong sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh otoritas Hong Kong.

BRI Global Financial Services *Local Management Office* (LMO)/Kantor pusat berlokasi di RM1202, 12/F, Park Avenue Tower, No 5 Moreton Terrace, Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki 4 (empat) kantor cabang yang tersebar di wilayah Causeway Bay, Mongkok, Yuen Long dan Tsuen Wan.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BRI Life") untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.626.643. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdas arkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013073.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021, diatur mengenai perubahan nomenklatur, susunan Pengurus, dan perubahan Anggaran Dasar yang salah satunya terkait dengan adanya peningkatan modal dan perubahan struktur kepemilikan BRI Life melalui penerbitan sebanyak 936.458 lembar saham baru untuk diambil bagian oleh FWD Financial Services Pte. Ltd.. Sebagai akibat dari penerbitan saham baru tersebut, maka terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Financial Services Pte. Ltd 29,86%. Adapun Perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi BRI Life No. AHU.AH.01.03-0460422 tanggal 13 Oktober 2021, Pemegang Saham BRI Life menyetujui Pengalihan Saham FWD Financial Services Pte. Ltd. kepada FWD Management Holdings Limited. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Management Holding Limited 29,86%. Adapun perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK IKNB melalui Surat No S.93/NB.1/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Atas Perubahan Kepemilikan BRI Life.

Struktur Kepemilikan BRI Life mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi BRI Life No. AHU.AH.01.03-0033868 tanggal 2 Maret 2023, Pemegang Saham BRI Life memutuskan dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp339.200 menjadi Rp365.559, dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 263.580 lembar saham atau dalam nilai nominal yaitu sebesar Rp26.359 yang diambil seluruhnya oleh FWD Management Holdings Limited. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi BRI 54,77%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 5,42% dan FWD Management Holdings Limited 39,82%. Adapun perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK IKNB melalui Surat No. S.315/NB.02/2023 tanggal 26 Februari 2023 tentang Persetujuan Atas Perubahan Kepemilikan BRI Life.

Anggaran Dasar BRI Life telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life, yang dibuat di hadapan notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. AHU-AH.01.03-9978922 tanggal 16 Juni 2023 serta telah mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033982.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah melakukan usaha di bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Total aset BRI Life pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp23.678.043 dan Rp21.627.641 atau 1,20% dan 1,16% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga dan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.506.402 dan Rp4.488.650 atau 4,52% dan 5,27% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 26 kantor pelayanan.

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini diselesaikan pada tanggal 30 September 2016, berdasarkan akta No. 75 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun aset lain-lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan selanjutnya sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BRI Multifinance Indonesia No. 237 tanggal 23 April 2019, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023113.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 29 April 2019, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0223685 tanggal 29 April 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2019, Tambahan Berita Negara No. 35668/2019, antara lain berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan BRI Finance dari semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan tindak lanjut atas arahan dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) (lanjutan)

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 16 Juni Tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BRI Multifinance Indonesia, yang dibuat di hadapan Notaris Arry Supratno, S.H., di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0034000.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam rangka penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar BRI Finance dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.057.071 dan Rp7.321.870 atau 0,46% dan 0,39% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.168.441 dan Rp397.047 atau 0,65% dan 0,47% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Menara Brilian Lantai 22, 21 & 1, Jalan Gatot Subroto No. 177A Kav. 64 Jakarta Selatan dan memiliki 26 kantor cabang.

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

Pada tanggal 29 Juni 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura (”Sarana NTT Ventura”) dengan PT Bahana Artha Ventura (”BAV”) dalam rangka pengambilalihan seluruh kepemilikan saham BAV dalam Sarana NTT Ventura menjadi milik BRI sebanyak 97,61%, dengan harga pembelian sebesar Rp3.090, dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing dari Dewan Komisaris BRI selaku wakil dari pemegang saham lewat suratnya No. R. 67-KOM/09/2018 tanggal 26 September 2018 serta persetujuan dari OJK melalui surat No. S-112/PB.31/2018 tanggal 25 September 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana BRI memiliki 97,61% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Ventura Investama (dahulu Sarana NTT Ventura).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H., M.Kn., di Kupang, telah dilakukan perubahan nama dari PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura menjadi PT BRI Ventura Investama (“BRI Ventures”), beserta perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di kota Kupang menjadi di kota Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030398.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-189/NB.11/2019 tanggal 1 April 2019, sehubungan dengan perubahan nama tersebut, BRI Ventures telah memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan modal ventura atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) (lanjutan)

Anggaran Dasar BRI Ventures diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta No. 65 tanggal 25 April 2022 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., antara lain dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar BRI Ventures dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI 2020) dan dicatat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0030721.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 ("Anggaran Dasar").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BRI Ventures diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2023 terkait dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Keputusan ini telah dicatat dalam Akta Notaris No. 45 Tanggal 31 Maret 2023 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0048199 tanggal 31 Maret 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Ventures adalah menyelenggarakan usaha modal ventura konvensional termasuk mengelola dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK serta kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha dan atau debitur yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Total aset BRI Ventures pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.672.050 dan Rp2.176.790 atau 0,14% dan 0,12% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRI Ventures berlokasi di District 8 Office SCBD, Prosperity Tower Lantai 16 Unit F, Jalan Jenderal Sudirman No 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS)

Pada tanggal 27 September 2018, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 67%, dengan harga pembelian sebesar Rp446.888, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1496/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Saham No. 53 yang dibuat di hadapan Notaris Masjuki, S.H., pengganti dari Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., di Jakarta, dimana BRI memiliki 67% dari total saham Danareksa Sekuritas dan sebesar 33% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

Anggaran Dasar BRIDS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar BRIDS dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor BRIDS yang dituangkan dalam Akta No. 91 Notaris Imas Fatimah, S.H., tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (lanjutan)

Pada tahun 2017 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan BRIDS sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta No. 1 Notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Pada tahun 2020 terdapat perubahan nama BRIDS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., di Jakarta, yaitu perubahan nama PT Danareksa Sekuritas menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069706.AH.01.02 Tahun 2020. Sehubungan dengan perubahan nama PT BRI Danareksa Sekuritas telah dicatatkan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-1210/PM.212/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Berdasarkan Akta No. 168 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., di Jakarta, terkait dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh BRI sesuai dengan persetujuan dari OJK melalui surat OJK No. S-555/PM.21/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 27 Juni 2022 sehingga kepemilikan saham BRI menjadi 71% dari total saham BRIDS dan sebesar 29% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero). Perubahan ini diberitahukan pada Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256545 tanggal 27 Juni 2022.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BRIDS dituangkan dalam Akta No. 86 tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0024267.AH.01.02.Tahun 2023, serta pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0058587 tanggal 2 Mei 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRI Danareksa Sekuritas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRIDS adalah sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek serta kegiatan usaha penunjang lainnya yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

BRIDS memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

Sebagai bagian dari perizinan yang telah dimiliki, BRIDS juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (*Arranger*) *Medium Term Notes* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, *Global Medium Term Notes* (GMTN), *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (*Financial Advisory*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (lanjutan)

Total aset BRIDS pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.172 dan Rp1.648.173 atau 0,05% dan 0,09% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp42.065 dan Rp8.264 atau 0,02% dan 0,01% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRIDS berlokasi di Gedung BRI II Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta dan memiliki 10 cabang, 24 Gerai dan 3 kemitraan.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Pada tanggal 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJBSB") dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu bernama PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur) menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1.041.000 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 tanggal 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Notaris Dina Chozie, SH., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham PT BRI Asuransi Indonesia ("BRI Insurance") dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., di Jakarta, pada Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan dilakukan perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi PT BRI Asuransi Indonesia ("BRI Insurance"). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Anggaran Dasar BRI Insurance mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir tertuang dalam Akta No. 26 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Zun Nur Ain Fauzia, S.H., MKn, di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00388682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023, serta pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0089063 tanggal 6 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRI Asuransi Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Insurance adalah melaksanakan kegiatan usaha asuransi kerugian, membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, asuransi kerugian non-konvensional, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

BRI Insurance memperoleh izin usaha di bidang asuransi kerugian pada tanggal 26 Agustus 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.-128/KM.13/1989. Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-105/NB.11/2020 tanggal 6 Maret 2020, BRI Insurance memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang selanjutnya berubah nama menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (lanjutan)

BRI Insurance mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-006/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Insurance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.465.609 dan Rp4.891.250 atau 0,33% dan 0,26% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga, syariah, dan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.681.620 dan Rp577.558 atau 0,89% dan 0,68% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat BRI Insurance berlokasi di Graha BRI Insurance, Jl. Mampang Prapatan Raya No.18, Jakarta Selatan dan memiliki 21 kantor cabang, 2 kantor cabang syariah, 19 kantor perwakilan *marketing*, 2 kantor perwakilan *marketing* syariah, 50 *marketing channel* dan 21 *marketing office* syariah

PT Pegadaian (Pegadaian)

Pada tanggal 13 September 2021, Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN dan BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Pegadaian (Persero) (Pegadaian) dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI, yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 13 September 2021. Melalui perjanjian tersebut, Negara Republik Indonesia mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Pegadaian dengan jumlah sebanyak 6.249.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp48.670.528. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan.

Anggaran Dasar Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian No. AHU-AH.01.03-0454524, tanggal 29 September 2021.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa usaha pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis teknologi informasi/*platform digital* (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pegadaian untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Pegadaian dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Total aset Pegadaian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp82.151.803 dan Rp72.920.622 atau 4,18% dan 3,91% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga, syariah dan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.861.162 dan Rp10.197.407 atau 8,30% dan 11,98% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat Pegadaian berlokasi di Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat 10430 dan mempunyai 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 642 kantor cabang, dan 3.443 kantor unit pelayanan cabang.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Pada tanggal 13 September 2021, BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PNM dengan jumlah sebanyak 3.799.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp6.100.068. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan.

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah Nomor: 4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (“Akta No. 1”).

Akta No.1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 18 tanggal 7 Juni 2023 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan No. AHU-0037792.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani No. AHU-AH.01.09-0134474 tertanggal 5 Juli 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan PNM adalah jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) serta jasa manajemen dan kemitraan.

Total aset PNM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp51.106.905 dan Rp46.744.758 atau 2,60% dan 2,51% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.509.236 dan Rp5.548.145 atau 8,11% dan 6,52% dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

Kantor pusat PNM berlokasi di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang, 3.849 kantor unit Mekaar, 641 kantor unit ULaMM (termasuk 20 kantor unit representatif).

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM))

Pada tanggal 27 September 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("PJBS") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 10.500.000 lembar saham atau setara dengan 35% dari keseluruhan saham beredar DIM, dengan harga pembelian sebesar Rp371.959 yang telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1453/PM.21/2018 tanggal 14 Desember 2018. Transaksi jual beli saham ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., Notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.

Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2022, BRI telah menandatangani PJBS kembali dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham DIM dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 9.000.000 lembar saham atau setara dengan 30% dari keseluruhan saham beredar DIM, dengan harga pembelian sebesar Rp360.000 yang telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-889/PM.21/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Persetujuan Atas Rencana Perubahan Komposisi Kepemilikan Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management. Transaksi jual beli saham ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 30 November 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sehingga BRI memiliki 19.500.000 lembar saham atau setara dengan 65% dari total saham beredar DIM.

Perubahan secara keseluruhan anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tertanggal 1 Februari 2019 No. 01 dibuat di hadapan M. Nova Faisal S.H., M,Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Februari 2019 No. AHU-0006825.AH.01.02 Tahun 2019 serta pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 11 Februari 2019 No. AHU-AH.01.03-0079597 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 2019 No. 26, Tambahan No. 10084.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0083200.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Anggaran Dasar DIM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan tentang Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management No. 4 tanggal 4 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., di Jakarta Pusat, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan meliputi perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management menjadi bernama PT BRI Manajemen Investasi ("BRI-MI"), perubahan tempat kedudukan Perseroan, yang semula berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza BP Jamsostek Lantai 11, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Jakarta 12910, berubah menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang beralamat di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210 dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2020.

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Anggaran Dasar, maksud dan tujuan BRI-MI adalah melakukan kegiatan usaha pengelolaan portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada reksa dana, melakukan kegiatan memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi, melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh izin usaha untuk suatu reksa dana (promotor reksa dana), melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada *private equity* dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Total aset BRI-MI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp288.820 dan Rp276.520 atau 0,01% dan 0,01% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp501 dan Rp144 atau 0,0000028% dan 0,00000085%dari total pendapatan bunga, syariah, premi, dan emas konsolidasian.

BRI-MI berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”BAPEPAM-LK”) No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1, ”Penyajian Laporan Keuangan”.

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam grup kecuali entitas anak dan kantor cabang tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Hongkong dan Dolar Taiwan Baru. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian diperoleh ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:
a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 ”Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain serta pinjaman dan surat berharga subordinasi.

(i) Klasifikasi

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, BRI dan entitas anak menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual instrument terkait. Berikut klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen utang, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan/kerugian diakui pada laba rugi pada saat pelepasan;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen ekuitas, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan/kerugian tidak diakui pada laba rugi pada saat pelepasan; atau
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI dan entitas anak mengklasifikasi dan mengukur instrumen derivatif dan portofolio *trading* pada aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal BRI dan entitas anak dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, BRI dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
a. Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
b. Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
c. Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, BRI dan entitas anak mempertimbangkan:
a. Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
b. Fitur *leverage*;
c. Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
e. Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori:
a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori:
a. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.
b. Liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BRI dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
- Kontrak jaminan keuangan;
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar; atau
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal transaksi.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajarnya dan perubahan atas nilai wajar tersebut dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya dan perubahan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
2) BRI dan entitas anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass-through arrangement); dan antara (a) BRI dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI dan entitas anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI dan entitas anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI dan entitas anak yang berkelanjutan atas aset tersebut.

BRI dan entitas anak melepaskan aset keuangan, seperti kredit yang diberikan, ketika syarat dan kondisi telah direnegosiasi hingga secara substansial, kredit yang diberikan tersebut menjadi baru, dengan perbedaan akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari pelepasan, jika kerugian penurunan nilai belum dicatat. Kredit yang diberikan tersebut akan diklasifikasikan sebagai *Stage* 1 untuk penilaian *Expected Credit Losses* (ECL), kecuali kredit yang diberikan tersebut dianggap aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit-Impaired financial assets* - POCI*)*.

Jika modifikasi tidak akan menghasilkan arus kas yang secara substansi berbeda, maka modifikasi tidak akan berujung pada pelepasan aset. Berdasarkan perbedaan arus kas yang didiskonto pada *Effective Interest Rate* (EIR) awal, Bank akan mencatat keuntungan atau kerugian akibat modifikasi, sampai dengan jumlah kerugian penurunan nilai yang belum diakui.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan entitas anak dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan lainnya atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI dan entitas anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI dan entitas anak untuk tujuan pengungkapan nilai wajar telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar (Catatan 40).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110, BRI dan entitas anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK No. 110, BRI dan entitas anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai berikut (lanjutan):

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:
1) Secara langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
2) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan BRI dan entitas anak;
3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika (lanjutan):

4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E..1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

BRI dan entitas anak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI dan entitas anak mengukur cadangan kerugian penurunan nilai sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

a. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
b. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

BRI dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu nilai wajar. Cadangan kerugian penurunan nilai diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK No. 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada BRI dan entitas anak sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh BRI dan entitas anak);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh BRI dan entitas anak; dan
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi; atau
- Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage* 1, *Stage* 2, *Stage* 3, dan POCI, sebagai berikut:

- *Stage* 1 : Mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam *Stage* 1 termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari *Stage* 2.

- *Stage* 2 : Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali BRI dan entitas anak merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. *Stage* 2 juga mencakup fasilitas dimana risiko kedit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari *Stage* 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI) (lanjutan)

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage* 1, *Stage* 2, *Stage* 3, dan POCI, sebagai berikut (lanjutan):

- *Stage* 3 : Mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. BRI dan entitas anak mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.

- POCI : Aset POCI adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian risiko kredit pada saat pengakuan awal. Aset tersebut dicatat pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, dan pendapatan bunga akan diakui selanjutnya berdasarkan metode suku bunga efektif yang disesuaikan. Cadangan ECL hanya dicatat atau dilepaskan jika ada perubahan selanjutnya pada kerugian kredit ekspektasian.

Terdapat kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan aset keuangan tercakup dalam *stage* tertentu.

Perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan dan pernah mengalami gagal bayar ataupun restrukturisasi. Selain itu, perhitungan penurunan nilai akan dilakukan secara kolektif.

Penurunan nilai individual

Metode perhitungan penurunan nilai secara individual akan mempertimbangkan 3 (tiga) skenario kemungkinan pengembalian, yaitu: (i) skenario dasar (*Base*), (ii) skenario buruk (*Bad*), dan (iii) skenario terburuk (*Worst*). Pembuatan skenario dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flow* (DCF) dan mempertimbangkan *confidence level* yang menggambarkan kondisi industri dan perusahaan terkait. Nantinya ECL yang dihasilkan oleh masing-masing skenario akan dirata-ratakan secara tertimbang terhadap bobot skenario yang telah diatur.

Penurunan nilai kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

BRI dan entitas anak menggunakan model (i) *Skalar Bayesian*, (ii) *Credit Index* dan (iii) *Vasicek* maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap debitur.

BRI dan entitas anak menggunakan metode (i) *Historical*, (ii) *Diminish Balance* dan (iii) *Value to Loan* dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat di-*recover* oleh Bank terhadap debitur *default*. LGD biasa dihitung dengan 1-*Recovery Rate*. *Recovery rate* dihitung mempertimbangkan *Time Value of Money* dari pengembalian dari kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *Time Value of Money* dari *Recovery* adalah EIR awal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets* - POCI) (lanjutan)

EAD merupakan estimasi nilai buku pada saat terjadi gagal bayar, dengan mempertimbangkan arus kas instrumen keuangan terkait, serta kemungkinan penarikan tambahan dari limit kredit sampai dengan tanggal gagal bayar. EAD juga mempertimbangkan jadwal pembayaran dan amortisasi serta perubahan dalam utilisasi saldo yang belum ditarik menjelang terjadinya kegagalan bayar. Pemodelan EAD akan dilakukan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan terkait, yang dibagi ke dalam beberapa kategori: (i) kredit angsuran, (ii) kredit *revolving*, (iii) *trade finance,* dan (iv) *treasury*.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK No. 71 mewajibkan BRI dan entitas anak untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario *forward-looking* yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan BRI dan entitas anak harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal, baik/*good*, dan buruk/*bad*). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (*secured*), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi BRI dan entitas anak.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, cadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, cadangan kerugian penurunan nilai tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang nilai tercatat karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika BRI dan entitas anak menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur BRI dan entitas anak dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI dan entitas anak menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility,* dan *Term Deposit*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (*inter-bank call money*), deposito berjangka, *deposit on call*, dan *banker's acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes, U.S.Treasury Bonds, U.S Treasury Bills, Singapore Government Securities, Negotiable Certificate of Deposits, Monetary Authority of Singapore* (MAS) *bills*, Obligasi Pemerintah Taiwan, dan surat berharga komersial lainnya serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.
2) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.
3) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh bank lainnya sedangkan wesel tagih merupakan tagihan ataupun dokumen penagihan dalam bentuk wesel/*bill of exchange* kepada pihak tertagih/*drawee* atas dasar diskonto ataupun suatu pembiayaan tertentu. Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI dan entitas anak.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

k. Pinjaman syariah

Pinjaman yang diberikan terutama terdiri dari piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah,* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan entitas anak, dimana entitas anak membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pinjaman syariah (lanjutan)

Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara entitas anak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

l. Piutang pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan merupakan jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa pembiayaan dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara nilai piutang usaha bruto dan nilai tunai piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan tangguhan.

Pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa-pembiayaankan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Entitas anak sebagai *lessor*

Dalam sewa pembiayaan, entitas anak, sebagai *lessor*, mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan sewa pembiayaan neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan.

Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto entitas anak sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Dalam sewa menyewa operasi, entitas anak mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas metode garis lurus selama masa sewa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Piutang pembiayaan (lanjutan)

Entitas anak sebagai *lessor* (lanjutan)

Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah down payment.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen neto merupakan total piutang setelah dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah biaya-biaya transaksi dan dikurangi *yield enhancing income* yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara pengalihan kredit, melanjutkan kredit, mengangsur kembali, merubah jatuh tempo, merubah tenor dan/atau menambah *down payment*.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi di laporan keuangan.

Tagihan anjak piutang

Anjak piutang dicatat menggunakan PSAK terkait dan diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditangguhkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran ke konsumen diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditangguhkan, yang akan diakui sebagai pendapatan anjak piutang berdasarkan proporsi waktu selama periode kontrak menggunakan tingkat suku bunga efektif.

Anjak piutang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi L*etter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi sedangkan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investasi BRI pada entitas asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan di bawah 20% dicatat pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 71.

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:
(i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
(ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Kapal	15
Komputer dan mesin	3 - 8
Perlengkapan kantor	3 - 8
E-Channel	3 - 5
Satelit	15
Main system	5
Non main system	3

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 16).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai “surplus revaluasi aset tetap”, dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan bagi BRI dan entitas anak manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "aset tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "aset tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

BRI dan entitas anak menerapkan PSAK No. 73 tentang Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait. BRI menerapkan sewa yang termasuk PSAK No. 73 atas kelas aset tanah bangunan (*landed*) dan kendaraan roda empat dengan aset pendasar bernilai di atas Rp75.000.000 (nilai penuh) dan mempunyai jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan.

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, BRI dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BRI dan entitas anak menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian;
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
  a. BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
  b. BRI dan entitas anak mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BRI dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

a. Pembayaran lunas di muka;
b. Pembayaran angsuran tetap; dan
c. Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counterpart*.

BRI dan entitas anak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, aset hak guna diukur dengan model biaya. Aset hak guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. BRI dan entitas anak akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan diperlukan penurunan atas nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka BRI dan entitas anak akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai “rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun “aset lain-lain”) diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

BRI dan entitas anak mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method*).

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI dan entitas anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan Bank Raya. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh BRI, BRI Multifinance, Pegadaian dan PNM adalah Obligasi, *Medium Term Notes* (MTN), *Long Term Notes* (LTN) dan Sukuk *Mudharabah*. Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ab. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode *margin* efektif. *Margin* efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung *margin* efektif, entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (*approved claim*). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (*withdrawal*) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi

Liabilitas kontrak asuransi

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

b. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* (IBNR)).

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungan asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Reasuransi

BRI Life dan BRI Insurance mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life dan BRI Insurance atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life dan BRI Insurance mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life dan BRI Insurance tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi (lanjutan)

Reasuransi (lanjutan)

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life dan BRI Insurance mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Merupakan iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pekerja yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pekerja-pekerja tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain manfaat dana tambahan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pekerja yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan peraturan yang berlaku.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit.*

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

af. Opsi saham

Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (*cliff-vesting scheme*) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "opsi saham" dalam bagian ekuitas. Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes.*

ag. Laba per lembar saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk BRI dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Laba per lembar saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

ah. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1 Dolar Amerika Serikat	15.397,00	15.567,50
1 Pound Sterling Inggris	19.626,56	18.786,09
1 Yen Jepang	108,88	117,81
1 Euro Eropa	17.038,32	16.581,72
1 Dolar Hong Kong	1.970,73	1.996,55
1 Riyal Arab Saudi	4.106,00	4.139,00
1 Dolar Singapura	11.676,34	11.592,88
1 Ringgit Malaysia	3.355,20	3.533,66
1 Dolar Australia	10.520,77	10.557,88
1 Renminbi	2.170,06	2.238,91
1 Baht Thailand	449,75	450,71
1 Franc Swiss	18.299,27	16.827,00
1 Dolar Kanada	11.629,59	11.486,39
1 Dolar Brunei Darussalam	11.581,05	11.538,75
1 Kroner Denmark	2.285,87	2.229,65
1 Won Korea Selatan	11,88	12,35
1 Dolar Selandia Baru	9.765,55	9.851,12
1 Kina Papua Nugini	4.131,03	4.421,19
1 Dirham Uni Emirat Arab	4.192,40	4.238,88
1 Kroner Swedia	1.541,54	1.487,84
1 Kroner Norwegia	1.509,55	1.572,28
1 Rupee India	185,18	188,11
1 Peso Filipina	277,98	279,44
1 Dolar Taiwan Baru	503,50	506,13
1 Dong Vietnam	0,64	0,66

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ai. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 5 (lima) Kantor Cabang di New York, Cayman Islands, Singapura, Timor-Leste dan Taipei serta 1 (satu) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun entitas anak, kantor cabang dan perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

a. Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
b. Pendapatan, beban, laba dan rugi menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir periode merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
c. Modal saham dan tambahan modal disetor menggunakan kurs historis.
d. Laporan arus kas menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai “selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing”.

aj. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c).

Derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif yang merupakan aset keuangan/liabilitas keuangan, BRI dan entitas anak mengklasifikasikan aset/liabilitas keuangan secara keseluruhan berdasarkan model bisnis dan jangka waktu kontraktualnya sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2c.

ak. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika BRI dan entitas anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

al. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taipei.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

am. Pendapatan dan Beban Penjualan Emas

Pendapatan dari penjualan emas diakui pada saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi entitas anak pada waktu tertentu, yaitu pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan bisnis emas juga diakui ketika suatu produk telah diserahkan kepada pelanggan atau memenuhi skema "penjualan ketika pengiriman ditunda". Pengakuan pendapatan tersebut menerapkan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

an. Saham Treasuri

Instrumen ekuitas BRI yang diperoleh kembali (saham treasuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas BRI. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

ao. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ao. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, pinjaman syariah serta piutang pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, pinjaman syariah serta piutang pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbarui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas terkait.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk efek-efek

Manajemen BRI menentukan bahwa efek-efek memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ao. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI dan entitas anak menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Dikarenakan program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (*policies in force*). Pertimbangan manajemen BRI diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

Liabilitas manfaat polis masa depan

BRI mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ap. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

a. Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 1, "*Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies*". Amandemen ini mengklarifikasi bahwa tidak seluruh informasi kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material adalah material terhadap laporan keuangan.
b. Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 16, "*Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*". Amandemen ini mengklarifikasi contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sebagai biaya perolehan aset tetap.
c. Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 8, "*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates*". Amandemen ini menjelaskan definisi estimasi akuntansi dan mengklarifikasi perubahan dalam estimasi akuntansi.
d. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 12, "*Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*". Amandemen ini menjelaskan deskripsi dan pengecualian pengakuan awal untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan.
e. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua". Amandemen ini diadopsi dari amandemen IAS No. 12, "*Income Taxes: International Tax Reform - Pillar Two Model Rules*". Amandemen ini mengatur pengecualian sementara atas perlakuan akuntansi pajak tangguhan terkait dengan penerapan ketentuan model perpajakan Pilar Dua beserta pengungkapannya.

Penerapan PSAK di atas tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

aq. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Berdasarkan PER-05/MBU/04/2021, istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi dan diganti menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan). Alokasi dana tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

3. KAS

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		29.764.399		25.980.803
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	79.872.638	1.229.799	41.494.434	645.965
Riyal Arab Saudi	45.839.472	188.217	15.344.795	63.512
Dolar Singapura	15.547.692	181.540	17.835.516	206.765
Dolar Australia	6.439.502	67.749	13.146.160	138.796
Euro Eropa	3.620.283	61.684	10.089.844	167.307
Ringgit Malaysia	12.365.562	41.489	31.255.724	110.447
Pound Sterling Inggris	603.196	11.839	1.360.951	25.567
Dirham Uni Emirat Arab	2.817.265	11.811	5.329.735	22.592
Franc Swiss	581.040	10.633	238.930	4.020
Yen Jepang	83.669.794	9.110	42.609.961	5.020
Renminbi	2.797.142	6.070	1.795.579	4.020
Dolar Brunei Darussalam	455.095	5.270	810.707	9.355
Dolar Hong kong	2.630.075	5.183	4.555.056	9.094
Dolar Kanada	273.691	3.183	351.860	4.042
Dolar Selandia Baru	207.298	2.024	575.438	5.669
Peso Filipina	4.522.830	1.257	6.075.560	1.698
Dolar Taiwan Baru	1.725.199	869	575.978	292
Baht Thailand	1.864.080	838	3.277.430	1.477
Won Korea Selatan	27.524.387	327	19.834.591	245
Dong Vietnam	415.104.461	266	899.812.000	593
Rupee India	729.257	135	600.712	113
Kina Papua Nugini	22.277	92	19.540	86
		1.839.385		1.426.675
Total		**31.603.784**		**27.407.478**

Saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp4.208.492 dan ASD905.640 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2023 serta Rp4.554.211 dan ASD809.680 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas yang tidak dapat digunakan dan yang dijaminkan oleh BRI dan entitas anak.

Kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari Aset Lain-lain (Catatan 17).

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		93.630.203		141.071.603
Dolar Amerika Serikat	537.696.816	8.278.918	633.598.631	9.863.547
Total		**101.909.121**		**150.935.150**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, GWM dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG No. 11 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makropudensial (PADG KLM).

Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung sesuai dengan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023.

Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas masing-masing ditentukan sebesar sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
GWM Primer	6,05%	7,00%
(i) GWM secara harian	0,00	0,00
(ii) GWM secara rata-rata*)	6,05	7,00
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	5,00	6,00
Mata uang asing	4,00	4,00
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,00	2,00

*) Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga Bank mendapatkan insentif pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah pada Desember 2023 dan Desember 2022 sebesar 2,95% dan 2,00%.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio* (LFR) berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Giro RIM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Giro RIM dikenakan jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia yang sebesar 14%. Peraturan tersebut telah disempurnakan sebanyak 4 (empat) kali dengan perubahan terakhir PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022. PBI tersebut dijelaskan melalui PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023.

Rasio GWM BRI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
GWM Primer*)	8,05%	12,11%
(i) GWM secara harian	0,00	0,00
(ii) GWM secara rata-rata*)	8,05	12,11
PLM (d/h GWM Sekunder)	14,24	14,40
Mata uang asing	4,22	4,24
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,22	2,24

*) Setelah dikurangi insentif sesuai PADG No. 11 Tahun 2023.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio-rasio tersebut di atas.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah		269.629		328.752
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	1.080.512.301	16.636.648	1.057.828.412	16.467.742
Dolar Singapura	123.042.799	1.436.690	99.800.149	1.156.971
Euro Eropa	72.038.920	1.227.422	27.256.867	451.966
Yen Jepang	6.075.048.703	661.421	3.474.319.128	409.310
Renminbi	254.652.528	552.611	310.302.142	694.739
Dolar Hong Kong	158.345.706	312.057	100.637.976	200.929
Pound Sterling Inggris	14.631.778	287.171	21.217.574	398.595
Dolar Australia	23.562.642	247.897	27.828.214	293.807
Dolar Selandia Baru	13.356.004	130.429	19.893.130	195.970
Dolar Kanada	3.057.119	35.553	2.587.730	29.724
Franc Swiss	1.412.688	25.851	5.783.698	97.322
Ringgit Malaysia	5.199.682	17.446	798.540	2.822

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)				
Mata uang asing (lanjutan)				
Riyal Arab Saudi	3.102.100	12.737	6.228.883	25.781
Dirham Uni Emirat Arab	2.490.560	10.441	2.909.039	12.331
Dolar Taiwan Baru	17.082.759	8.601	8.615.531	4.361
Kroner Norwegia	3.498.713	5.281	4.024.099	6.327
Kroner Swedia	2.436.698	3.756	8.466.273	12.596
Baht Thailand	4.488.551	2.019	911.145	411
		21.614.031		20.461.704
		21.883.660		20.790.456
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah		414.931		670.798
Mata uang asing				
Dolar Hong Kong	12.002.281	23.653	5.517.809	11.017
Dolar Amerika Serikat	628.351	9.675	1.038.224	16.163
		33.328		27.180
		448.259		697.978
Total		22.331.919		21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.984)		(18.577)
Total - Bersih		**22.321.935**		**21.469.857**

b) Berdasarkan Bank:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Standard Chartered Bank	91.007	41.470
PT Bank Central Asia Tbk	56.298	64.628
PT Bank DKI	24.892	52.809
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.957	38.497
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12.962	16.861
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	8.664	16.263
PT Bank Ganesha Tbk	6.223	3.678
Lainnya	48.626	94.546
	269.629	328.752

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	10.505.921	13.015.929
Standard Chartered Bank	2.265.496	1.920.914
Citibank N.A.	2.238.494	1.141.030
Bank of America	1.953.570	930.161
Bank of China, Ltd	628.607	682.272
OCBC Bank Singapore	579.359	622.220
Banco Central de Timor Leste	578.544	91.205
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	391.992	143.644
HSBC Holdings PLC	376.078	303.490
ING Belgium NV/SA	353.682	56.071
Lainnya	1.742.288	1.554.768
	21.614.031	20.461.704
	21.883.660	20.790.456
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.538	200.538
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	118.928	205.434
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	113.847	127.372
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	57.615	137.390
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	3	49
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	15
	414.931	670.798
Mata uang asing		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.155	18.819
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.173	8.361
	33.328	27.180
	448.259	697.978
Total	22.331.919	21.488.434
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.984)	(18.577)
Bersih	**22.321.935**	**21.469.857**

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	0,08%	0,08%
Mata uang asing	3,73	2,63

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage 1*- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage 2*- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage 3*- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Giro pada Bank Lain				
Nilai tercatat awal	**21.488.434**	**-**	**-**	**21.488.434**
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	710.407	-	-	710.407
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	338.949	-	-	338.949
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(205.871)	-	-	(205.871)
Nilai tercatat akhir	22.331.919	-	-	22.331.919

	31 Desember 2022			
	***Stage 1*- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage 2*- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage 3*- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Giro pada Bank Lain				
Nilai tercatat awal	14.065.097	-	-	14.065.097
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	7.423.337	-	-	7.423.337
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	**21.488.434**	**-**	**-**	**21.488.434**

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage 1*-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage 2*-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage 3*-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Giro pada Bank Lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	18.577	-	-	18.577
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(13.558)	-	-	(13.558)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	5.016	-	-	5.016
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(51)	-	-	(51)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**9.984**	**-**	**-**	**9.984**

	31 Desember 2022			
	***Stage 1*-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage 2*-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage 3*-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Giro pada Bank Lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	29.078	-	-	29.078
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(10.722)	-	-	(10.722)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	221	-	-	221
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**18.577**	**-**	**-**	**18.577**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro pada bank lain yang dibatasi penggunaannya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, giro pada bank lain dilakukan penilaian secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia				
Deposit Facility		30.440.561		5.873.912
Term Deposit		-		14.995.561
		30.440.561		20.869.473
Inter-bank call money				
Standard Chartered Bank		400.000		-
PT Bank DKI		400.000		400.000
PT BPD Sumatera Utara		250.000		200.000
PT Bank UOB Indonesia		230.000		-
PT BPD Maluku dan Maluku Utara		150.000		-
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		150.000		-
PT BPD Sulawesi Tenggara		150.000		-
PT BPD Sulawesi Tengah		100.000		-
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo		100.000		-
PT BPD Yogyakarta		100.000		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		-		200.000
PT Bank OCBC NISP Tbk		-		250.000
		2.030.000		1.050.000
Deposito Berjangka				
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		79.700		-
PT BTPN Syariah Tbk.		56.500		-
PT BPD Jambi		54.800		-
PT Bank DKI		54.800		89.000
PT Bank Permata Tbk		40.000		40.000
PT Bukopin Syariah		28.500		13.000
PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo		25.900		20.600
PT Bank Muamalat Indonesia		22.050		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		19.500		35.800
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		16.000		195.000
PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah		11.000		10.000
PT BPD Jawa Tengah		-		18.000
PT Bank Mega Tbk		-		22.500
PT Bank MNC Internasional Tbk		-		75.000
PT Bank Mayapada Internasional Tbk		-		59.500
Lembaga Keuangan Lainnya		167.270		58.659
		576.020		637.059
		33.046.581		22.556.532

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)				
Dolar Amerika Serikat				
Bank Indonesia				
Term Deposit	1.200.000.000	18.476.400	2.204.538.946	34.319.160
		18.476.400		34.319.160
Inter-bank call money				
Federal Reserve Bank	246.470.482	3.794.906	309.356.898	4.815.913
The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd	151.800.565	2.337.273		-
Wells Fargo Bank, N.A	59.500.000	916.122	70.896.213	1.103.677
The Bank of New York Mellon Corporation	43.100.000	663.611	87.500.000	1.362.156
Standard Chartered Bank	17.225.979	265.228	22.854.648	355.790
Bangkok Bank	10.000.000	153.970		-
State Bank of India	10.000.000	153.970		-
First Commercial Bank Co., Ltd	9.500.000	146.272		-
JP Morgan Chase Bank, N.A		-	1.830.000	28.489
Lembaga Keuangan Lainnya	723.517	11.139	28.029.023	436.342
		8.442.491		8.102.367
Deposito berjangka				
U.S. Bankcorp	19.346.399	297.877	803.060	12.502
Lembaga Keuangan Lainnya	103.370	1.592	294.638	4.587
		299.469		17.089
Penempatan lainnya				
(*Banker's Acceptance*)				
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000.000	769.850		-
PT Bank Mega Tbk	30.000.000	461.910		-
PT Bank IBK Indonesia Tbk	30.000.000	461.910		-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	14.000.000	215.558	75.000	1.167.562
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk		-	40.000	622.700
(*Margin Deposit*)				
JP Morgan Chase Bank, N.A	1.000.000	15.397		-
		1.924.625		1.790.262
		29.142.985		44.228.878
Euro Eropa				
Inter-bank call money				
ING Bank N.V		-	34.000.000	563.778
		-		563.778
Dolar Taiwan Baru				
Inter-bank call money				
Sinopac Financial Holdings Co. Ltd	215.000.000	108.253		-
		108.253		-
		29.251.238		44.792.656
		62.297.819		67.349.188

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)**	**Ekuivalen Rp**
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Inter-bank call money				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		100.000		200.000
PT Bank Mandiri Taspen		100.000		-
		200.000		200.000
Deposito berjangka				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		589.084		502.857
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		331.028		125.250
Lembaga Keuangan Lainnya		13.550		45.156
		933.662		673.263
		1.133.662		873.263
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	110.000.000	1.693.670	90.000.000	1.401.075
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	5.000.000	76.985		-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		-	50.000.000	778.375
		1.770.655		2.179.450
Deposito Berjangka				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.501.851	23.124		-
		23.124		-
		1.793.779		2.179.450
		2.927.441		3.052.713
Total		65.225.260		70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.860)		(1.981)
Bersih		**65.223.400**		**70.399.920**

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	32.918.731	22.488.062
> 1 bulan - 3 bulan	73.600	51.500
> 3 bulan - 1 tahun	54.250	16.970
	33.046.581	22.556.532
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	27.418.995	43.516.829
> 1 bulan - 3 bulan	1.062.393	497.452
> 3 bulan - 1 tahun	769.850	778.375
	29.251.238	44.792.656
	62.297.819	67.349.188
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	998.612	867.707
> 1 bulan - 3 bulan	106.500	5.506
> 3 bulan - 1 tahun	28.550	50
	1.133.662	873.263
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	100.109	934.050
> 3 bulan - 1 tahun	1.693.670	1.245.400
	1.793.779	2.179.450
	2.927.441	3.052.713
Total	65.225.260	70.401.901
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.860)	(1.981)
Bersih	**65.223.400**	**70.399.920**

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain diklasifikasikan “Lancar”.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
Penempatan pada Bank Indonesia	5,25%	5,04%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	6,17	5,38
Mata Uang Asing		
Penempatan pada Bank Indonesia	5,34%	4,32%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	5,48	3,17

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Nilai tercatat awal	70.401.901	-	-	70.401.901
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	63.493.567	-	-	63.493.567
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(68.654.629)	-	-	(68.654.629)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(15.579)	-	-	(15.579)
Nilai tercatat akhir	**65.225.260**	**-**	**-**	**65.225.260**

	31 Desember 2022			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	*Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	*Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Nilai tercatat awal	58.982.842	-	-	58.982.842
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	70.395.245	-	-	70.395.245
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(58.976.186)	-	-	(58.976.186)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	**70.401.901**	**-**	**-**	**70.401.901**

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	**1.981**	**-**	**-**	**1.981**
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	994	-	-	994
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.117)	-	-	(1.117)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2	-	-	2
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.860**	**-**	**-**	**1.860**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	6.177	-	-	6.177
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.270	-	-	2.270
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.177)	-	-	(6.177)
Penghapusbukuan				
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(289)	-	-	(289)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.981**	**-**	**-**	**1.981**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya dilakukan penilaian secara kolektif.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat jumlah dana yang diblokir.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain yang dibatasi penggunaannya.

7. EFEK-EFEK

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak ketiga				
Rupiah				
Sertifikat Bank Indonesia		1.240.835		-
Reksadana		820.109		2.091.040
Obligasi		372.724		148.223
Obligasi Subordinasi		15.783		47.633
Lainnya		1.312.688		1.619.738
		3.762.139		3.906.634
Dolar Amerika Serikat				
U.S. Treasury Bonds	135.349.949	2.083.983		-
Sertifikat Bank Indonesia	14.891.839	229.290		-
Reksadana	591.432	9.106	569.718	8.869
Lainnya	982.009	15.120		-
		2.337.499		8.869
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah Indonesia		8.733.403		10.389.097
Reksadana		5.135.418		4.985.002
Obligasi		159.351		170.826
Negotiable Certificate of Deposit		-		18.554
Obligasi Subordinasi		-		2.036
Lainnya		1.311.929		1.257.373
		15.340.101		16.822.888
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah Indonesia	51.052.819	786.060	13.927.146	216.811
Obligasi	10.870.450	167.372	10.320.912	160.671
		953.432		377.482
		22.393.171		21.115.873

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak ketiga				
Rupiah				
Sertifikat Bank Indonesia		30.260.840		-
Reksadana		8.481.689		6.972.076
Obligasi		2.874.965		3.377.496
Obligasi Subordinasi		-		93.617
Lainnya		38.810		86.002
		41.656.304		10.529.191
Dolar Amerika Serikat				
U.S. Treasury Bonds	143.115.132	2.203.544	112.707.139	1.754.568
Reksadana	50.670.000	780.166	50.620.000	788.027
Obligasi	46.767.998	720.087	24.845.860	386.788
Sertifikat Bank Indonesia	9.983.699	153.719	56.127.490	873.765
U.S. Treasury Bills	2.989.945	46.036		-
		3.903.552		3.803.148
Dolar Singapura				
Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills	132.290.443	1.544.668	145.317.508	1.684.648
Singapore Government Securities (SIGB)	48.952.967	571.591	48.848.395	566.294
Obligasi	979.338	11.435	939.204	10.888
		2.127.694		2.261.830
Dolar Taiwan Baru				
Obligasi Pemerintah Taiwan	252.349.250	127.058	302.445.950	153.075
Negotiable Certificate of Deposit	100.000.000	50.350	435.000.000	220.164
		177.408		373.239

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)				
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah Indonesia		61.213.197		75.152.636
Obligasi		6.472.903		7.564.070
Reksadana		4.699.264		3.662.568
Medium-Term Note		216.023		285.543
Negotiable Certificate of Deposit		85.250		9.277
Obligasi Subordinasi		-		25.454
Lainnya		69.700		106.778
		72.756.337		86.806.326
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.492.886.098	38.382.967	2.704.497.254	42.102.261
Obligasi	248.000.904	3.818.470	263.039.300	4.094.864
Negotiable Certificate of Deposit		-	20.300.000	316.020
		42.201.437		46.513.145
Yen Jepang				
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.383.695.877	259.537	2.329.747.301	274.468
		259.537		274.468
Euro Eropa				
Obligasi Pemerintah Indonesia	15.077.525	256.896	14.547.325	241.220
		256.896		241.220
		163.339.165		150.802.567

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Biaya perolehan diamortisasi				
Pihak ketiga				
Rupiah				
Obligasi		25.130		25.161
		25.130		25.161
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah Indonesia	9.000.000	138.573	7.943.535	123.661
Obligasi	2.996.946	46.144	2.994.680	46.620
Lainnya	1.290.438.254	19.868.876	1.466.142.152	22.824.168
		20.053.593		22.994.449
Dolar Singapura				
Obligasi	9.508.394	111.023	9.575.258	111.005
		111.023		111.005
Pound Sterling Inggris				
Lainnya	20.211.422	396.681		-
		396.681		-
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah Indonesia		94.665.750		102.477.479
Obligasi		531.824		628.726
Medium-Term Note		11.000		11.000
Obligasi Subordinasi		-		7.000
		95.208.574		103.124.205
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.820.018.749	28.022.829	1.981.372.686	30.845.019
Obligasi	19.743.499	303.991	27.249.237	424.202
Lainnya	40.670.455	626.203	15.000.000	233.513
		28.953.023		31.502.734
Euro Eropa				
Obligasi Pemerintah Indonesia	35.857.084	610.944	39.128.846	648.824
		610.944		648.824
		145.358.968		158.406.378
Total		331.091.304		330.324.818
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(81.510)		(82.835)
Bersih		**331.009.794**		**330.241.983**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua efek-efek diklasifikasikan “Lancar”.

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	45.418.442	14.435.825
> 3 bulan - 1 tahun	10.000	-
> 1 tahun	15.131	25.161
	45.443.573	14.460.986
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	14.690.430	14.760.973
> 1 bulan - 3 bulan	6.122.743	6.107.782
> 3 bulan - 1 tahun	8.044.730	8.526.161
> 1 tahun	249.547	157.624
	29.107.450	29.552.540
	74.551.023	44.013.526
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	88.096.438	103.629.214
> 1 bulan - 3 bulan	2.500.656	153.953
> 3 bulan - 1 tahun	7.187.961	8.689.228
> 1 tahun	85.519.957	94.281.024
	183.305.012	206.753.419
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	46.360.125	48.032.461
> 1 bulan - 3 bulan	375.606	481.486
> 3 bulan - 1 tahun	2.928.198	1.678.235
> 1 tahun	23.571.340	29.365.691
	73.235.269	79.557.873
	256.540.281	286.311.292
Total	331.091.304	330.324.818
Dikurangi		
cadangan kerugian penurunan nilai	(81.510)	(82.835)
Bersih	**331.009.794**	**330.241.983**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds, U.S. Treasury Bill*s, *Singapore Government Securities* dan Obligasi Pemerintah Taiwan. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai wajar melalui laba rugi		
Rupiah		
Surat Perbendaharaan Negara	4.328.423	7.246.094
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	3.103.592	2.456.006
Obligasi Pemerintah Sukuk	1.196.634	488.608
Obligasi Republik Indonesia	104.754	198.389
	8.733.403	10.389.097
Mata uang asing		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*		
Dolar Amerika Serikat	417.469	111.056
Obligasi Pemerintah Sukuk	368.591	105.755
U.S. Treasury Bonds	2.083.983	-
	2.870.043	216.811
	11.603.446	10.605.908
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	45.488.821	49.232.653
Obligasi Pemerintah Sukuk	14.902.982	22.700.073
Obligasi Republik Indonesia	821.394	3.022.520
Surat Perbendaharaan Negara	-	197.390
	61.213.197	75.152.636

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds, U.S. Treasury Bills*, *Singapore Government Securities* dan Obligasi Pemerintah Taiwan. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)		
Mata uang asing		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*		
Dolar Amerika Serikat	20.348.541	22.920.721
Obligasi Pemerintah Sukuk	18.034.426	19.181.540
U.S. Treasury Bonds	2.203.544	1.754.568
Singapore Government Securities (*SIGB*)	571.591	566.294
Obligasi Pemerintah Yen Jepang	259.537	274.468
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	256.896	241.220
Obligasi Pemerintah Taiwan	127.058	153.075
U.S. Treasury Bills	46.036	-
	41.847.629	45.091.886
	103.060.826	120.244.522
Biaya perolehan diamortisasi		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*	81.493.975	83.781.068
Obligasi Pemerintah Sukuk	13.151.748	18.676.160
Obligasi Republik Indonesia	20.027	20.251
	94.665.750	102.477.479
Mata uang asing		
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*		
Dolar Amerika Serikat	15.677.291	17.863.289
Obligasi Pemerintah Sukuk	12.345.538	12.981.730
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	610.944	648.824
U.S. Treasury Bonds	138.573	123.661
	28.772.346	31.617.504
	123.438.096	134.094.983
Total	**238.102.368**	**264.945.413**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Rupiah				
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam	Beragam	Beragam
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*				
FR0070	8,38	15 Mar 2024	8,38	15 Mar 2024
FR0077	8,13	15 Mei 2024	8,13	15 Mei 2024
FR0081	6,50	15 Jun 2025	6,50	15 Jun 2025
FR0082	7,00	15 Sep 2030	7,00	15 Sep 2030
FR0084	7,25	15 Feb 2026	7,25	15 Feb 2026
FR0085	7,75	15 Apr 2031	7,75	15 Apr 2031
FR0086	5,50	15 Apr 2026	5,50	15 Apr 2026
FR0087	6,50	15 Feb 2031	6,50	15 Feb 2031
FR0090	5,13	15 Apr 2027	5,13	15 Apr 2027
FR0091	6,38	15 Apr 2032	6,38	15 Apr 2032
Obligasi Pemerintah Sukuk				
PBS003	6,00	15 Jan 2027	6,00	15 Jan 2027
PBS004	6,10	15 Feb 2037	6,10	15 Feb 2037
PBS017	6,13	15 Okt 2025	6,13	15 Okt 2025
PBS026	6,63	15 Okt 2024	6,63	15 Okt 2024
PBS029	6,38	15 Mar 2034	6,38	15 Mar 2034
PBS030	5,88	15 Jul 2028	5,88	15 Jul 2028
PBS031	4,00	15 Jul 2024	4,00	15 Jul 2024
PBS032	4,88	15 Jul 2026	4,88	15 Jul 2026
PBS036	5,38	15 Agu 2025	5,38	15 Agu 2025
SR017	5,90	10 Sep 2025	5,90	10 Sep 2025
Obligasi Republik Indonesia				
ORI019	5,57	15 Feb 2024	5,57	15 Feb 2024
ORI020	4,95	15 Okt 2024	4,95	15 Okt 2024
ORI021	4,90	15 Feb 2025	4,90	15 Feb 2025
ORI022	5,95	15 Okt 2025	5,95	15 Okt 2025
ORI023	5,90	15 Jul 2026	-	-
ORI018	-	-	5,70	15 Okt 2023
Mata uang asing				
Obligasi Pemerintah Sukuk				
INDOIS 24	4,35	10 Sep 2024	4,35	10 Sep 2024
INDOIS 24A	3,90	20 Ags 2024	3,90	20 Ags 2024
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 25A	2,30	23 Jun 2025	2,30	23 Jun 2025
INDOIS 26	4,55	29 Mar 2026	4,55	29 Mar 2026
INDOIS 27	4,15	29 Mar 2027	4,15	29 Mar 2027
INDOIS 28	4,40	1 Mar 2028	4,40	1 Mar 2028
INDOIS 29	4,45	20 Feb 2029	4,45	20 Feb 2029
INDOIS 30	2,80	23 Jun 2030	2,80	23 Jun 2023

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Mata uang asing (lanjutan)				
Obligasi Pemerintah *Fixed Rate*				
Dolar Amerika Serikat				
RI0126	4,75	8 Jan 2026	4,75	8 Jan 2026
RI0124	5,88	15 Jan 2024	5,88	15 Jan 2024
RI0125	4,13	15 Jan 2025	4,13	15 Jan 2025
RI0727	3,85	18 Jul 2027	3,85	18 Jul 2027
RI0128	3,50	11 Jan 2028	3,50	11 Jan 2028
RI0929	3,40	18 Sep 2029	3,40	18 Sep 2029
RI0127	4,35	8 Jan 2027	4,35	8 Jan 2027
RI0229	4,75	11 Feb 2029	4,75	11 Feb 2029
RI0224	4,45	11 Feb 2024	4,45	11 Feb 2024
Obligasi Pemerintah Euro Eropa				
RIEUR0725	3,38	30 Jul 2025	3,38	30 Jul 2025
RIEUR0227	0,90	14 Feb 2027	0,90	14 Feb 2027
RIEUR0729	1,00	28 Jul 2029	1,00	28 Jul 2029
RIEUR0334	1,35	23 Mar 2034	1,35	23 Mar 2034
RIEUR0623	-	-	2,63	14 Jun 2023
Obligasi Pemerintah Yen Jepang				
RIJPY0524	0,33	27 Mei 2024	0,33	27 Mei 2024
RIJPY0624	0,26	7 Jun 2024	0,26	7 Jun 2024
RIJPY0526	0,57	27 Mei 2026	0,57	27 Mei 2026
Obligasi Pemerintah Taiwan				
A08101	0,63	14 Jan 2024	0,63	14 Jan 2024
A10109	-	-	0,25	26 Agu 2023
A11106	1,00	23 Jun 2027	1,00	23 Jun 2027
A95107	2,13	10 Nov 2026	2,13	10 Nov 2026
U.S. Treasury Bonds	Beragam	Beragam	Beragam	Beragam
U.S. Treasury Bills	Beragam	Beragam	Beragam	Beragam
Singapore Government Securities				
SIGB 0625	2,38	1 Jun 2025	2,38	1 Jun 2025
SIGB 1125	0,50	1 Nov 2025	0,50	1 Nov 2025
SIGB 0626	2,13	1 Jun 2026	2,13	1 Jun 2026
SIGB 0528	2,36	1 Mei 2028	2,36	1 Mei 2028

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai “Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain” berkisar dari 95,89% sampai dengan 133,01% dan 89,19% sampai dengan 128,35% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai wajar melalui laba rugi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Merdeka Copper Gold Tbk	92.548	20.250
PT Oki Pulp & Paper	53.803	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	52.820	19.143
PT Bumi Serpong Damai Tbk	50.171	-
PT Astra Sedaya Finance	49.950	19.854
PT Federal International Finance	25.148	-
PT Indonesia Infrastructure Finance	14.179	-
PT Medco Power Indonesia	13.490	15.000
PT Indosat Tbk	10.564	10.636
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	10.051	-
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	-	59.424
PT Medco Energi Internasional Tbk	-	3.916
	372.724	148.223
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	89.095	-
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30.086	5.037
PT Waskita Beton Precast Tbk	15.900	-
PT Mandiri Tunas Finance	10.000	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9.259	150.434
PT Timah (Persero) Tbk	5.011	5.046
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	10.309
	159.351	170.826
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	167.372	160.671
	167.372	160.671
	699.447	479.720

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Astra Sedaya Finance	779.564	763.352
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	617.968	514.923
PT Federal International Finance	375.964	331.205
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	298.707	294.263
PT Maybank Indonesia Finance	191.657	183.595
PT Indosat Tbk	180.964	204.187
PT Bank CIMB Niaga Tbk	109.884	161.482
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	95.047	90.552
PT Bank BTPN Tbk	68.507	121.103
PT Bank Maybank Indonesia	51.735	153.182
Lainnya	104.968	559.652
	2.874.965	3.377.496
Dolar Amerika Serikat		
PT Indonesia Infrastructure Finance	174.963	66.500
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	145.600	-
Toronto-Dominion Bank, N.A	117.739	115.259
CIMB Bank Berhad	56.344	54.634
US Bank	44.926	-
PT Freeport Indonesia	30.375	-
Bank of America	8.825	8.529
Citigroup. Inc.	7.815	7.756
The Royal Bank of Canada	5.875	5.825
JP Morgan Chase Bank. N.A	5.796	7.303
Lainnya	121.829	120.982
	720.087	386.788
Dolar Singapura		
House and Development Board Singapore	11.435	10.888
	11.435	10.888

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)		
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.530.173	1.280.122
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.082.390	1.344.197
PT Pupuk Indonesia (Persero)	604.488	945.463
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	599.069	905.677
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	549.390	697.645
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	412.848	558.095
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	362.450	352.945
PT Mandiri Tunas Finance	334.683	159.486
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	194.477	194.446
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	185.013	226.456
Lainnya	617.922	899.538
	6.472.903	7.564.070
Dolar Amerika Serikat		
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.048.442	1.043.810
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	718.227	397.304
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	685.304	490.180
PT Pertamina (Persero)	518.981	1.233.446
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	414.489	417.438
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	197.534	196.433
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	182.835	162.883
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	38.204	139.262
PT Hutama Karya (Persero)	14.454	14.108
	3.818.470	4.094.864
	13.897.860	15.434.106

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Biaya perolehan diamortisasi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Indosat Tbk	10.000	15.161
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15.130	10.000
	25.130	25.161
Dolar Amerika Serikat		
United Overseas Bank	46.144	46.620
	46.144	46.620
Dolar Singapura		
House and Development Board Singapore	111.023	111.005
	111.023	111.005
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	276.891	294.662
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	79.287	79.681
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	75.000	75.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35.000	35.000
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30.000	30.000
PT Bank Mandiri Taspen	17.331	17.677
PT Industri Kereta Api (Persero)	10.000	10.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5.160	5.161
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	3.155	3.511
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	5.123
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	72.911
	531.824	628.726
Dolar Amerika Serikat		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	176.091	177.877
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	61.972	62.466
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	41.813	41.904
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	24.115	24.501
PT Pertamina (Persero)	-	117.454
	303.991	424.202
	1.018.112	1.235.714
Total	**15.615.419**	**17.149.540**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Astra Sedaya Finance				
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2019				
Seri C	7,95	23 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021				
Seri B	6,35	15 April 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2021				
Seri B	5,30	22 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2022				
Seri B	5,70	22 Maret 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2022				
Seri B	6,35	26 Agustus 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023				
Seri B	6,00	6 Juli 2026	idAAA	-
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023				
Seri B	6,40	26 Oktober 2026	idAAA	-
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk				
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018				
Seri E	9,25	16 Agustus 2023	-	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019				
Seri C	9,50	23 Januari 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019				
Seri C	9,15	16 April 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019				
Seri C	8,10	4 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020				
Seri B	7,90	7 Juli 2023	-	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021				
Seri B	5,50	23 Juli 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022				
Seri B	5,60	22 Maret 2025	idAAA	idAAA
Seri C	6,25	22 Maret 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023				
Seri B	6,50	9 November 2026	idAAA	-
PT Federal International Finance				
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020				
Seri B	7,25	7 Oktober 2023	-	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021				
Seri B	6,25	8 Juni 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021				
Seri B	5,30	27 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V Tahun 2023				
Seri B	6,80	24 Februari 2026	idAAA	-
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018				
Seri C	9,00	1 Maret 2025	-	idAA-
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2021				
Seri B	8,50	15 April 2026	idAA-	idAA-
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022				
Seri A	7,20	8 Maret 2027	idAA-	idAA-
Seri B	8,10	8 Maret 2029	idAA-	idAA-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022				
Seri A	8,00	9 Agustus 2027	idAA-	idAA-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023				
Seri A	8,40	28 Februari 2028	idAA-	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Indosat Tbk				
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20	8 Desember 2025	idAAA	idAAA(sy)
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	11,20	8 Desember 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri E	9,25	31 Mei 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	8,65	9 November 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,70	3 Mei 2028	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Seri D	10,00	23 Juli 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 Seri A	7,00	26 Oktober 2025	idAAA	idAAA
Seri B	7,70	26 Oktober 2027	idAAA	idAA
PT Maybank Indonesia Finance				
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021	6,30	23 Juni 2024	AAA(idn)	AA+(idn)
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022	5,80	30 Maret 2025	AAA(idn)	AA+(idn)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk				
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri C	10,00	5 Agustus 2027	idA	-
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2022 Seri B	8,75	24 Februari 2025	idA+	idA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri A	6,00	21 Oktober 2023	-	idA+
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 Seri A	7,00	26 Desember 2023	-	idA+
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Seri A	6,00	21 Oktober 2023	-	idA+(sy)
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 Seri A	7,00	26 Desember 2023	-	idA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B	10,25	11 Juli 2026	idA+	-
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 Seri B	10,25	25 Agustus 2026	idA+	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2022 Seri B	8,75	24 Februari 2025	idA+(sy)	idA+(sy)
PT Merdeka Copper Gold Tbk				
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri B	10,25	9 September 2023	-	idA+
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022 Seri A	5,50	8 September 2023	-	idA+
Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2022	10,30	13 Desember 2025	idA+	idA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022 Seri A	7,80	28 April 2025	idA+	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C	8,25	21 Agustus 2024	idAAA(sy)	idAAA(sy)
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C	7,80	19 Desember 2024	idAAA	idAAA
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 Seri C	7,25	27 Maret 2025	idAAA	idAAA
PT Bank BTPN Tbk				
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Seri B	7,75	26 November 2024	idAAA	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga (lanjutan)				
Dolar Amerika Serikat				
PT Indonesia Infrastructure Finance				
Tahun 2026	1,50	27 Januari 2026	BBB***)	BBB***)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk				
Tahun 2031	3,40	9 Juni 2031	BBB-***)	-
Toronto-Dominion Bank, N.A.				
Tahun 2024	1,25	13 Desember 2024	A1**)	A1**)
Tahun 2027	2,80	10 Maret 2027	A**)	A**)
CIMB Bank Berhad				
Tahun 2027	2,13	20 Juli 2027	A3**)	A3**)
United Overseas Bank				
Tahun 2025	3,06	7 April 2025	AA-	AA-
Bank of America				
Tahun 2026	1,32	19 Juni 2026	A1**)	A2**)
Tahun 2026	3,50	19 April 2026	A1**)	A2**)
Tahun 2031	2,50	13 Februari 2031	A1**)	A2**)
Tahun 2031	1,92	24 Oktober 2031	A1**)	A2**)
Citigroup, Inc.				
Tahun 2024	3,75	16 Juni 2024	A3**)	A3**)
Tahun 2028	3,52	27 Oktober 2028	A3**)	A3**)
Tahun 2031	2,67	29 Januari 2031	A3**)	A3**)
The Royal Bank of Canada				
Tahun 2024	2,55	16 Juli 2024	A1**)	A2**)
Tahun 2025	1,15	10 Juni 2025	A1**)	A2**)
Tahun 2026	4,65	27 Januari 2026	A3**)	Baa1**)
JP Morgan Chase Bank, N.A				
Tahun 2026	2,01	13 Maret 2026	A1**)	A2**)
Tahun 2029	4,45	5 Desember 2029	A1**)	A2**)
The Bank of Nova Scotia				
Tahun 2024	0,70	15 April 2024	A2**)	A2**)
Tahun 2025	1,30	11 Juni 2025	A2**)	A2**)
Tahun 2025	4,50	16 Desember 2025	Baa1**)	Baa1**)
Dolar Singapura				
Housing and Development Board Singapore				
Tahun 2025	2,63	17 September 2025	AAA***)	AAA***)
Tahun 2028	2,32	24 Januari 2028	AAA***)	AAA***)
Tahun 2028	1,54	12 Oktober 2028	AAA***)	AAA***)
Tahun 2029	1,97	25 Januari 2029	AAA***)	AAA***)
Tahun 2029	3,95	29 Januari 2029	AAA***)	AAA***)
Tahun 2029	3,44	13 September 2028	AAA***)	AAA***)
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)				
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019				
Seri C	9,25	12 Februari 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019				
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020				
Seri B	7,50	18 Februari 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2020				
Seri B	8,10	14 Juli 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap I tahun 2021				
Seri B	5,75	10 Februari 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V tahun 2021				
Seri B	6,40	8 Juli 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VII Tahap I tahun 2023				
Seri B	5,95	12 Juli 2026	idAAA	-
Berkelanjutan VII Tahap II tahun 2023				
Seri C	6,75	20 Oktober 2028	idAAA	-
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2021	6,00	17 November 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2022	6,95	21 September 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023	6,85	22 Februari 2028	idAAA	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (lanjutan)				
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021	5,60	8 Juli 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023	6,90	22 Desember 2028	idAAA	-
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,65	18 November 2026	idAAA	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Seri D	8,50	28 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019 Seri C	7,95	30 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Seri D	8,30	30 Oktober 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019 Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Sukuk Mudharabah I Tahap II Tahun 2019 Seri D	8,55	28 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2020 Seri B	7,60	21 Juli 2023	-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2020 Seri A	6,30	11 Desember 2023	-	idAAA
Seri B	6,70	11 Desember 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022	6,98	8 November 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri B	5,75	5 Agustus 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2023 Seri B	6,70	17 Mei 2026	idAAA	-
Seri C	6,80	17 Mei 2027	idAAA	-
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2023 Seri B	6,70	14 Desember 2026	idAAA	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri C	8,50	11 Juli 2027	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri D	8,70	3 November 2032	idAAA	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,25	22 Februari 2028	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019 Seri B	9,10	19 Februari 2024	idAAA	idAAA
Seri D	9,60	19 Februari 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A	8,00	1 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Seri C	8,70	1 Agustus 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Seri B	8,40	1 Oktober 2026	idAAA	idAAA
Seri D	9,40	1 Oktober 2034	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri A	7,20	18 Februari 2025	idAAA	idAAA
Seri B	7,70	18 Februari 2027	idAAA	idAAA
Seri C	8,00	18 Februari 2030	idAAA	idAAA
Seri D	8,70	18 Februari 2035	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2020 Seri D	9,10	6 Mei 2030	idAAA	-
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 Seri A	6,70	8 September 2025	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	10 Desember 2023	-	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	11 Juli 2027	idAAA	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)				
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,70	3 November 2032	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri B	7,25	22 Februari 2028	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA	idAAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri C	8,75	18 Februari 2035	idAAA	idAAA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016				
Seri B	8,50	30 September 2023	-	idAAA
Seri C	8,65	30 September 2026	idBBB-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017				
Seri B	8,50	15 Juni 2024	idBBB-	idAAA
Seri C	8,65	15 Juni 2027	idBBB-	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018	8,50	21 September 2023	-	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020				
Seri A	7,75	12 Mei 2025	idBBB-	idAAA
Seri B	8,30	12 Mei 2027	idBBB-	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017				
Seri B	8,60	12 Juli 2024	AAA***)	AAA***)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020				
Seri A	7,00	3 September 2023	-	AAA(idn)
Seri B	7,70	3 September 2025	AAA(idn)	AAA(idn)
Seri C	8,30	3 September 2027	AAA(idn)	-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021				
Seri A	5,60	10 Maret 2024	AAA(idn)	AAA(idn)
Seri B	6,20	10 Maret 2026	AAA(idn)	AAA(idn)
Seri C	7,20	10 Maret 2028	AAA(idn)	AAA(idn)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015				
Seri D	10,50	8 Juli 2025	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017				
Seri C	8,70	13 Juli 2024	idAA+	idAA+
Seri D	8,90	13 Juli 2027	idAA+	idAA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019				
Seri C	9,00	28 Juni 2024	idAA+	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020				
Seri B	7,80	19 Agustus 2023	-	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2022				
Seri A	5,50	24 Mei 2025	idAA+	idAA+
PT Kereta Api Indonesia (Persero)				
Berkelanjutan II Tahun 2017				
Seri B	8,25	21 November 2024	idAAA+	idAA+
Berkelanjutan II Tahun 2019				
Seri A	7,75	13 Desember 2024	idAAA+	idAA+
Seri B	8,20	13 Desember 2026	idAAA+	idAA+
Berkelanjutan I Tahun 2022				
Seri A	7,10	5 Agustus 2027	idAA+	idAA+
PT Mandiri Tunas Finance				
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019				
Seri B	9,50	26 Juli 2024	idAAA+	idAAA+
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022				
Seri A	5,90	23 Februari 2025	idAAA+	idAAA+
Seri B	6,75	23 Februari 2027	idAAA+	idAAA+

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT Mandiri Tunas Finance (lanjutan)				
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2023				
Seri A	6,50	27 September 2026	idAAA+	idAAA+
Seri B	6,75	27 September 2029	idAAA+	idAAA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)				
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019				
Seri C	8,70	9 Juli 2024	idAAA	idAAA
Seri D	9,20	9 Juli 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017				
Seri C	8,25	15 Agustus 2024	idAAA	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018				
Seri C	6,90	14 Februari 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018				
Seri C	8,30	6 Juni 2025	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019				
Seri D	8,50	29 Oktober 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019				
Seri C	8,20	6 Desember 2026	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019				
Seri E	9,50	23 April 2029	idAAA	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019				
Seri E	8,75	29 Oktober 2029	idAAA	idAAA
PT Bank Mandiri Taspen				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019				
Seri B	8,20	26 November 2024	idAAA	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021				
Seri A	6,50	28 April 2024	idAAA	idAA+
Seri B	7,25	28 April 2026	idAAA	idAA+
Mata uang asing				
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)				
Tahun 2023	5,71	15 November 2023	-	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	15 Mei 2025	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2028	3,02	15 November 2028	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2030	5,45	15 Mei 2030	BBB-***)	BBB-***)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Tahun 2024	3,75	11 April 2024	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	13 Mei 2025	BBB-***)	BBB-***)
Tahun 2026	2,00	19 April 2026	BBB-***)	BBB-***)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)				
Tahun 2027	4,13	15 Mei 2027	BBB***)	BBB***)
Tahun 2028	5,45	21 Mei 2028	BBB***)	BBB***)
Tahun 2029	5,38	25 Januari 2029	BBB***)	BBB***)
Tahun 2030	3,38	5 Februari 2030	BBB***)	BBB***)
PT Pertamina (Persero)				
Tahun 2029	3,65	30 Juli 2029	BBB***)	BBB***)
Tahun 2030	3,10	21 Januari 2030	BBB***)	BBB***)
Tahun 2031	2,30	9 Februari 2031	BBB***)	BBB***)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk				
Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024	BBB-***)	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)				
Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025	BBB***)	BBB-***)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)				
Tahun 2026	2,05	11 Mei 2026	BBB***)	BBB***)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)				
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024	BBB***)	BBB-***)
PT Hutama Karya (Persero) Tbk				
Tahun 2030	3,75	11 Mei 2030	BBB-***)	BBB-***)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar melalui laba rugi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	603.060	-
PT Trimegah Asset Management	208.569	701.222
PT BNP Paribas Investment Partners	8.480	11.686
PT Syailendra Capital	-	750.803
PT Schroder Investment Management Indonesia	-	604.108
PT Sucorinvest Asset Management	-	12.880
PT Avrist Asset Management	-	10.341
	820.109	2.091.040
Dolar Amerika Serikat		
PT Schroder Investment Management Indonesia	9.106	8.869
	9.106	8.869
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	2.413.552	3.527.388
PT PNM Investment Management	1.757.635	570.178
PT Bahana TCW Investment Management	964.231	635.716
PT Mandiri Manajemen Investasi	-	251.720
	5.135.418	4.985.002
	5.964.633	7.084.911
Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Trimegah Asset Management	2.683.934	2.254.051
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	2.278.298	1.515.150
PT Syailendra Capital	2.369.004	2.116.666
PT Berdikari Manajemen Investasi	577.171	577.330
PT Sinarmas Asset Management	165.927	169.610
PT Sucorinvest Asset Management	85.826	318.540
PT Mega Asset Management	20.160	20.729
PT Bank Central Asia	100.217	-
PT BNP Paribas Investment Management	201.152	-
	8.481.689	6.972.076
Dolar Amerika Serikat		
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	780.166	788.027
	780.166	788.027

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)		
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PR BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	2.458.668	1.875.482
PT Bahana TCW Investment Management	1.331.873	878.835
PT BNI Asset Management	759.176	756.788
PT PNM Investment Management	149.547	149.382
PT Mandiri Manajemen Investasi	-	2.081
	4.699.264	3.662.568
	13.961.119	11.422.671
Total	**19.925.752**	**18.507.582**

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)

	Nilai/Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/Nilai tercatat 31 Desember 2023	Nilai wajar/Nilai tercatat 31 Desember 2022
Nilai wajar melalui laba rugi					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Tahun 2022 Seri A	20.000	5,90	6 Jun 2023	-	18.554
				-	18.554
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
Pihak ketiga					
Mata Uang Asing					
Central Bank Of China					
111121602811N	130	0,97	13 Jan 2023	-	65.796
111122102811N	100	0,97	18 Jan 2023	-	50.613
111122801411N	95	0,71	11 Jan 2023	-	48.082
111123002811N	100	0,97	30 Jan 2023	-	50.613
111123000711N	10	0,58	6 Jan 2023	-	5.060
112121302811N	100	1,09	10 Jan 2024	50.350	-
				50.350	220.164
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.					
Tahun 2022 Seri C	10.000	6,20	8 Des 2023	-	9.277
Tahun 2023 Tahap I Seri C	90.000	6,53	21 Okt 2024	85.250	-
				85.250	9.277

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan)

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) (lanjutan)

	Nilai/Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/Nilai tercatat 31 Desember 2023	Nilai wajar/Nilai tercatat 31 Desember 2022
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)					
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)					
Mata uang asing					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2022 Seri A	20	5,90	6 Juni 2023	-	316.020
				-	316.020
Total				**135.600**	**564.015**

d.5. Obligasi Subordinasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember 2023	Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember 2022
Nilai wajar melalui laba rugi		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	-	32.001
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	15.783	15.632
	15.783	47.633
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016	-	2.036
	15.783	49.669
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Pan Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	-	40.304
PT Bank UOB Indonesia Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	-	20.740
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	-	9.290
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	-	18.283
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	-	5.000
	-	93.617

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)		
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016	-	25.454
	-	119.071
Biaya perolehan diamortisasi		
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016	-	7.000
	-	7.000
Total	**15.783**	**175.740**

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank KEB Hana Indonesia				
Seri I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	-	AA(idn)***)
PT Bank Central Asia Tbk				
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018				
Seri A	7,75	5 Jul 2025	-	idAA
Seri B	8,00	5 Jul 2030	idAA	idAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Jun 2023	-	AA(idn)***)
PT Bank Pan Indonesia Tbk				
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Mar 2024	-	idA+
PT Bank UOB Indonesia				
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Okt 2024	-	AA(idn)***)
Pihak berelasi				
Rupiah				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk				
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016	9,25	16 Nov 2023	-	idA+

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. *Medium-Term Note* (MTN)

	Nilai/Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/Nilai tercatat 31 Desember 2023	Nilai wajar/Nilai tercatat 31 Desember 2022
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)					
MTN I Tahun 2022*)	200.000	9,00	2 Nov 2027	153.503	223.023
Perum Perumnas					
Tahap III Tahun 2018 Seri A*)	60.000	11,25	10 Des 2023	-	62.520
Tahap III Tahun 2018 Seri B*)	65.000	11,85	10 Des 2026	62.520	-
				216.023	285.543
Biaya perolehan diamortisasi					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
Rupiah					
PT Perkebunan Nusantara II					
VIII Seri A*)	10.000	11,00	26 Jun 2024	10.000	10.000
VIII Seri B*)	1.000	11,00	31 Okt 2024	1.000	1.000
				11.000	11.000
Total				**227.023**	**296.543**

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

e) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	6,61%	6,82%
Dolar Amerika Serikat	3,80	3,54
Euro Eropa	2,31	1,67
Dolar Singapura	2,67	2,87
Dolar Taiwan Baru	1,39	1,03
Yen Jepang	0,61	0,61

f) BRI mengakui kerugian yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam "nilai wajar melalui laba rugi" sebesar Rp214.435 dan Rp145.520 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang dilaporkan dalam akun "keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek sebesar Rp1.898.653 dan Rp1.518.191 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang dilaporkan dalam akun "keuntungan dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

h) Efek-efek sejumlah nominal Rp20.563.516 dan Rp10.867.140 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23).

i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Nilai tercatat awal	150.802.567	-	-	150.802.567
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	15.393.453	-	-	15.393.453
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.682.747	-	-	9.682.747
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.201.857)	-	-	(12.201.857)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(337.745)	-	-	(337.745)
Nilai tercatat akhir	**163.339.165**	**-**	**-**	**163.339.165**

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Nilai tercatat awal	158.406.378	-	-	158.406.378
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.763.236)	-	-	(1.763.236)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.247.397	-	-	6.247.397
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.664.875)	-	-	(9.664.875)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(7.866.696)	-	-	(7.866.696)
Nilai tercatat akhir	**145.358.968**	**-**	**-**	**145.358.968**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Nilai tercatat awal	201.526.369	-	-	201.526.369
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(14.482.901)	-	-	(14.482.901)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	20.265.482	-	-	20.265.482
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(59.349.780)	-	-	(59.349.780)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2.843.397	-	-	2.843.397
Nilai tercatat akhir	**150.802.567**	**-**	**-**	**150.802.567**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Nilai tercatat awal	151.521.026	-	-	151.521.026
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	1.467.824	-	-	1.467.824
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.879.708	-	-	10.879.708
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(7.860.448)	-	-	(7.860.448)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2.398.268	-	-	2.398.268
Nilai tercatat akhir	**158.406.378**	**-**	**-**	**158.406.378**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	**141.559**	**-**	**-**	**141.559**
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.464)	-	-	(2.464)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	12.050	-	-	12.050
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.764)	-	-	(18.764)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(4.151)	-	-	(4.151)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir*)	**128.230**	**-**	**-**	**128.230**

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	82.835	-	-	82.835
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(5.757)	-	-	(5.757)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.365	-	-	3.365
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(7.235)	-	-	(7.235)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	8.302	-	-	8.302
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**81.510**	**-**	**-**	**81.510**

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

i) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	554.756	-	-	554.756
Pengalihan ke	-	-	-	-
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(282.698)	-	-	(282.698)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.722	-	-	23.722
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(154.223)	-	-	(154.223)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2	-	-	2
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir*)	**141.559**	**-**	**-**	**141.559**

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	311.120	-	-	311.120
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(161.213)	-	-	(161.213)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	21.444	-	-	21.444
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(90.586)	-	-	(90.586)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	2.070	-	-	2.070
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**82.835**	**-**	**-**	**82.835**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Wesel Tagih		6.366.822		5.575.972
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		5.225.499		4.286.069
Wesel Ekspor		948.474		3.355.392
Tagihan Lainnya		355.533		506.167
		12.896.328		13.723.600
Mata uang asing				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)				
Dolar Amerika Serikat	1.920.785	29.574		-
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	569.043.299	8.761.560	400.745.904	6.238.612
Renminbi	347.287.381	753.635	36.117.545	80.864
Euro Eropa		-	194.897	3.232
		9.515.195		6.322.708
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	1.671.338.459	25.733.598	603.556.630	9.395.868
Euro Eropa	2.643.272	45.037	11.562.854	191.732
Renminbi	4.837.899	10.499	2.759.864	6.179
Yen Jepang	5.707.955	621		-
		25.789.755		9.593.779
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	38.072.991	586.210	29.212.471	454.765
Renminbi	14.353.420	31.148	24.531.085	54.923
Yen Jepang	64.121.200	6.981	52.414.886	6.175
Euro Eropa	68.625	1.169		-
		625.508		515.863
		35.960.032		16.432.350
		48.856.360		30.155.950
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Wesel Tagih		2.909.367		4.552.374
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		359.966		951.749
Tagihan Lainnya		340.411		158.541
Wesel Ekspor		38.666		89.703
		3.648.410		5.752.367
Mata uang asing				
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	69.242.781	1.066.131	150.101.816	2.336.710
Pound Sterling Inggris	4.541	89		-
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	96.636	1.488	113.946	1.774
		1.067.708		2.338.484

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Mata uang asing (lanjutan)				
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	14.993.050	230.848	51.501.356	801.747
Euro Eropa	5.002.350	85.232	637.745	10.575
Yen Jepang	62.880.000	6.846	62.880.000	7.408
Pound Sterling Inggris		-	44.900	844
		322.926		820.574
		1.390.634		3.159.058
		5.039.044		8.911.425
Total		53.895.404		39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.323.916)		(1.638.929)
Bersih		**51.571.488**		**37.428.446**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 semua wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan “Lancar”, kecuali senilai Rp599.732 dengan kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus” pada tanggal 31 Desember 2022.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
≤ 1 bulan	26.851.284	9.363.195
> 1 bulan - 3 bulan	15.250.996	11.037.276
> 3 bulan - 1 tahun	6.754.080	9.755.479
	48.856.360	30.155.950
Pihak berelasi (Catatan 44)		
≤ 1 bulan	2.221.008	2.480.729
> 1 bulan - 3 bulan	798.625	3.792.441
> 3 bulan - 1 tahun	2.019.411	2.638.255
	5.039.044	8.911.425
	53.895.404	39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.323.916)	(1.638.929)
Bersih	**51.571.488**	**37.428.446**

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya				
Nilai tercatat awal	38.376.387	690.988	-	39.067.375
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	(945.043)	945.043	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	43.385.603	1.074.429	-	44.460.032
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(28.406.723)	(1.197.707)	-	(29.604.430)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(27.522)	(51)	-	(27.573)
Nilai tercatat akhir	**52.382.702**	**1.512.702**	**-**	**53.895.404**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya				
Nilai tercatat awal	29.338.221	325.350	654	29.664.225
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	38.193.005	692.648	-	38.885.653
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(29.338.221)	(325.350)	(654)	(29.664.225)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	183.382	(1.660)	-	181.722
Nilai tercatat akhir	**38.376.387**	**690.988**	**-**	**39.067.375**

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya				
Cadangan atas kerugian kredit kredit ekspektasian akhir	1.108.792	530.137	-	1.638.929
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	(58.346)	58.346	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	734.771	-	734.771
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.067.552	463.664	-	1.531.216
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.050.447)	(530.546)	-	(1.580.993)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1	(8)	-	(7)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.067.552**	**1.256.364**	**-**	**2.323.916**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya				
Cadangan atas kerugian kredit kredit ekspektasian akhir	979.763	161.932	654	1.142.349
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.109.971	530.137	-	1.640.108
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(979.763)	(161.932)	(654)	(1.142.349)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.179)	-	-	(1.179)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.108.792**	**530.137**	**-**	**1.638.929**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

	31 Desember 2023				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
VR0054	6,00%	28 Des 2023	04 Jan 2024	9.546.172	9.552.536
VR0036	6,16	04 Okt 2023	03 Jan 2024	2.876.476	2.920.281
VR0052	6,16	11 Okt 2023	10 Jan 2024	1.925.750	1.952.770
VR0064	6,43	15 Nov 2023	15 Feb 2024	1.920.082	1.936.200
VR0044	6,46	29 Nov 2023	28 Feb 2024	1.920.096	1.931.466
VR0056	6,16	18 Okt 2023	17 Jan 2024	480.157	486.319
VR0082	6,40	04 Agu 2023	03 Mei 2024	144.282	148.130
VR0094	6,67	13 Jan 2023	12 Jan 2024	92.694	98.757
VR0061	6,50	28 Apr 2023	26 Jan 2024	93.600	97.791
VR0049	6,45	09 Jun 2023	08 Mar 2024	93.476	96.926
VR0037	6,41	16 Jun 2023	14 Jun 2024	93.069	96.367
PT Bank OCBC NISP Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0070	5,85	29 Des 2023	02 Jan 2024	2.016.348	2.017.331
FR0077	5,85	29 Des 2023	02 Jan 2024	996.165	996.651
PT Bank UOB Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
IDSR041224364S	6,50	22 Des 2023	05 Jan 2024	1.405.969	1.408.508
FR0095	6,70	20 Des 2023	19 Jan 2024	483.251	484.330
IDSR131124364S	6,27	28 Des 2023	04 Jan 2024	94.173	94.239
PT Bank Central Asia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0095	5,85	29 Des 2023	02 Jan 2024	972.060	972.534
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0086	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	942.176	942.825
FR0090	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	924.632	925.269
FR0065	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	467.930	468.252
FR0091	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	463.996	464.315
PT Bank Mega Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0086	6,20	28 Des 2023	02 Jan 2024	942.176	942.825
PT BPD Jawa Timur					
Obligasi Pemerintah					
FR0090	6,30	22 Des 2023	02 Jan 2024	739.365	740.659
FR0081	6,50	21 Des 2023	04 Jan 2024	570.879	572.013
FR0086	6,30	22 Des 2023	02 Jan 2024	188.444	188.774
PT Bank Pan Indonesia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	6,70	20 Des 2023	19 Jan 2024	470.212	471.262
FR0086	6,67	13 Des 2023	12 Jan 2024	469.383	471.035
PT Bank Permata Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0090	6,15	28 Des 2023	02 Jan 2024	462.316	462.632
PT Bank DKI					
Obligasi Pemerintah					
FR0095	6,15	28 Des 2023	02 Jan 2024	291.517	291.716
FR0091	6,53	21 Des 2023	04 Jan 2024	277.645	278.199
FR0088	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	272.478	272.666
FR0095	6,15	28 Des 2023	02 Jan 2024	194.345	194.477
FR0091	6,53	21 Des 2023	04 Jan 2024	92.548	92.733
FR0090	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	92.463	92.527
FR0088	6,20	28 Des 2023	03 Jan 2024	90.826	90.889

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari (lanjutan):

	31 Desember 2023				
	Tingkat Suku Bunga (%)	**Tanggal Beli**	**Tanggal Jual Kembali**	**Nilai Beli**	**Nilai Tercatat**
Pihak ketiga (lanjutan)					
Rupiah (lanjutan)					
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung					
Obligasi Pemerintah					
FR0096	6,27	28 Des 2023	04 Jan 2024	246.560	246.732
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
IDSR081124364S	6,70	20 Des 2023	19 Jan 2024	94.085	94.295
Total				**33.447.796**	**33.595.231**

	31 Desember 2022				
	Tingkat Suku Bunga (%)	**Tanggal Beli**	**Tanggal Jual Kembali**	**Nilai Beli**	**Nilai Tercatat**
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
VR0046	5,50	30 Des 2022	06 Jan 2023	9.583.874	9.585.338
VR0058	5,50	27 Des 2022	03 Jan 2023	9.521.920	9.527.739
VR0062	5,50	28 Des 2022	04 Jan 2023	7.609.509	7.612.996
VR0036	5,75	30 Des 2022	13 Jan 2023	4.782.695	4.783.459
VR0035	5,50	29 Des 2022	05 Jan 2023	4.781.733	4.783.195
FR0057	6,05	18 Nov 2022	17 Feb 2023	3.276.051	3.299.725
VR0038	5,50	26 Des 2022	02 Jan 2023	2.878.666	2.880.865
VR0044	6,26	23 Des 2022	24 Mar 2023	961.918	963.256
VR0068	5,79	07 Des 2022	04 Jan 2023	462.705	464.490
VR0068	5,78	07 Des 2022	04 Jan 2023	462.704	464.487
FR0088	3,28	07 Jan 2022	06 Jan 2023	215.997	223.042
FR0052	4,05	29 Jul 2022	28 Jul 2023	116.041	118.064
FR0052	4,20	26 Agu 2022	24 Feb 2023	112.814	114.486
FR0079	4,30	26 Agu 2022	26 Mei 2023	106.312	107.925
FR0058	3,95	29 Jul 2022	27 Jan 2023	99.311	101.000
VR0042	6,48	23 Des 2022	23 Jun 2023	96.192	96.330
VR0052	6,62	23 Des 2022	22 Sep 2023	95.826	95.967
VR0085	6,34	18 Nov 2022	19 Mei 2023	93.416	94.123
VR0053	6,70	23 Des 2022	22 Des 2023	93.326	93.465
FR0065	4,35	26 Agu 2022	25 Agu 2023	91.478	92.882
FR0065	4,00	29 Jul 2022	28 Apr 2023	88.270	89.790
FR0073	5,35	23 Sep 2022	24 Mar 2023	52.702	53.477
FR0073	5,35	23 Sep 2022	24 Mar 2023	52.702	53.476
FR0058	5,54	23 Sep 2022	23 Jun 2023	50.540	51.310
FR0058	5,53	23 Sep 2022	23 Jun 2023	50.540	51.309
FR0070	6,23	01 Des 2022	02 Mar 2023	49.742	50.001
FR0074	6,65	18 Nov 2022	17 Nov 2023	48.194	48.577
VR0057	6,04	21 Okt 2022	21 Jul 2023	46.561	47.116
VR0085	5,85	21 Okt 2022	27 Apr 2023	46.516	47.053
VR0076	6,16	21 Okt 2022	20 Okt 2023	46.382	46.945
FR0096	6,53	18 Nov 2022	18 Agu 2023	46.456	46.818
FR0088	5,65	23 Sep 2022	22 Sep 2023	43.008	43.678
FR0088	5,65	23 Sep 2022	22 Sep 2023	43.008	43.677

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari (lanjutan):

	31 Desember 2022				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
Pihak ketiga (lanjutan)					
Rupiah (lanjutan)					
PT Bank OCBC NISP Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0077	5,35	29 Des 2022	02 Jan 2023	1.984.142	1.984.732
FR0081	5,35	29 Des 2022	02 Jan 2023	1.924.557	1.925.129
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	5,75	28 Des 2022	04 Jan 2023	462.887	463.108
PT Bank Nationalnobu Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0088	5,73	08 Nov 2022	07 Feb 2023	213.388	215.188
PT BPD Jawa Timur					
Obligasi Pemerintah					
FR0070	6,23	29 Nov 2022	28 Feb 2023	199.031	200.133
PT BPD Sulawesi Tengah					
Obligasi Pemerintah					
FR0070	5,80	27 Des 2022	03 Jan 2023	50.294	50.327
Total				**50.941.408**	**51.014.678**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua kolektibilitas atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan “Lancar”.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, karena Manajemen berkeyakinan bahwa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dapat ditagih.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	
Transaksi	**Tagihan derivatif**	**Liabilitas derivatif**
Swap suku bunga	381.607	369.374
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	284.050	108.496
Swap mata uang asing	223.308	403.003
Swap mata uang dan suku bunga	18.045	37.444
Pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing	4.673	6.893
Total	**911.683**	**925.210**

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut (lanjutan):

Transaksi	31 Desember 2022	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap suku bunga	548.024	510.221
Swap mata uang asing	194.939	118.076
Pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing	153.074	134.666
Pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing	15.368	20.958
Total	**911.405**	**783.921**

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif:

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Swap mata uang dan suku bunga		
Rupiah	1.596.707	-
Dolar Amerika Serikat	38.849.458	-
Swap suku bunga		
Dolar Amerika Serikat	836.544.325	991.572.073
Option mata uang		
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	70.337.283	316.378.967
Spot mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	134.500.000	190.550.000
Pound Sterling Inggris	20.000.000	1.000.000
Euro Eropa	23.500.000	-
Dolar Australia	6.000.000	-
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	103.000.000	201.300.000
Renminbi	34.380.488	-
Pound Sterling Inggris	16.000.000	-
Euro Eropa	14.500.000	-
Dolar Australia	2.000.000	-
Forward mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Yen Jepang	2.157.313.167	-
Dolar Amerika Serikat	483.866.974	205.870.175
Renminbi	19.250.000	-
Euro Eropa	15.268.092	7.262.813
Dolar Australia	-	1.000.000
Rupiah	-	260.860
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	2.003.452.579	1.509.881.189
Dolar Australia	10.004.640	1.000.000
Euro Eropa	1.683.154	2.000.000
Yen Jepang	-	357.794.464

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif (lanjutan):

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Swap mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	883.785.000	607.013.305
Euro Eropa	21.700.000	11.000.000
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	1.666.985.952	2.305.422.839
Euro Eropa	136.500.000	119.000.000
Pound Sterling Inggris	30.400.000	13.000.000
Dolar New Zealand	15.000.000	20.000.000
Renminbi	16.500.000	16.500.000

Para pihak yang melakukan kontrak derivatif dalam bentuk *swap* suku bunga ataupun *swap* mata uang dan suku bunga dengan BRI berkewajiban membayar bunga tetap (*fixed rate*) atau bunga mengambang (*floating rate*) antara lain SOFR 3 (tiga) bulanan atau 6 (enam) bulanan ditambah dengan marjin tertentu.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Pihak ketiga		
Rupiah		
Modal kerja	665.301.670	584.022.730
Konsumsi	291.855.160	272.227.246
Investasi	84.839.826	77.766.122
Cash Collateral	120.980	134.783
	1.042.117.636	934.150.881
Mata uang asing		
Investasi	60.649.004	47.253.484
Modal kerja	32.456.813	33.128.457
Konsumsi	1.248.783	992.241
	94.354.600	81.374.182
	1.136.472.236	1.015.525.063

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
Investasi	25.328.993	29.109.589
Modal kerja	22.570.722	19.006.439
Konsumsi	202.992	198.703
	48.102.707	48.314.731
Mata uang asing		
Modal kerja	8.246.770	11.569.451
Investasi	4.930.993	3.865.574
	13.177.763	15.435.025
	61.280.470	63.749.756
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	**1.117.828.495**	**990.950.989**

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		1.090.220.343		982.465.612
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	6.983.904.314	107.531.174	6.214.866.162	96.749.930
Euro Eropa	62.891	1.072	125.228	2.076
Dolar Singapura	9.992	117	4.011.742	46.508
Yen Jepang	-	-	90.763.955	10.693
		107.532.363		96.809.207
Total		1.197.752.706		1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(79.924.211)		(88.323.830)
Bersih		**1.117.828.495**		**990.950.989**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	380.541.641	348.689.024
Pertanian	170.821.987	147.030.128
Perindustrian	68.538.993	64.764.099
Jasa dunia usaha	62.285.323	54.625.353
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	19.005.972	11.478.168
Konstruksi	13.822.884	12.543.433
Pertambangan	12.039.085	2.522.711
Jasa pelayanan sosial	6.492.786	5.634.752
Listrik, gas dan air	3.515.414	4.825.989
Lain-lain	305.053.551	282.037.224
	1.042.117.636	934.150.881
Mata uang asing		
Perindustrian	28.886.861	28.295.501
Pertambangan	18.668.806	8.222.920
Listrik, gas dan air	16.010.011	17.416.378
Pertanian	10.209.149	8.482.101
Perdagangan, perhotelan dan restoran	7.101.727	6.651.811
Jasa dunia usaha	5.777.586	5.676.005
Konstruksi	5.144.603	4.594.455
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.206.064	800.905
Jasa pelayanan sosial	240	233.280
Lain-lain	1.349.553	1.000.826
	94.354.600	81.374.182
	1.136.472.236	1.015.525.063
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
Konstruksi	15.844.765	15.002.419
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.660.446	3.476.021
Listrik, gas dan air	7.226.951	9.346.356
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	6.758.265	7.202.288
Pertanian	3.432.207	4.430.088
Perindustrian	3.375.970	5.217.969
Jasa dunia usaha	1.792.749	2.008.930
Jasa pelayanan sosial	500.000	275.117
Pertambangan	306.903	1.156.277
Lain-lain	204.451	199.266
	48.102.707	48.314.731

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)		
Mata uang asing		
Listrik, gas dan air	3.669.593	4.784.350
Perindustrian	3.462.758	3.633.650
Jasa dunia usaha	2.690.443	2.773.946
Jasa pelayanan sosial	1.207.001	305.304
Perdagangan, perhotelan dan restoran	855.325	891.584
Pertambangan	826.582	2.578.518
Pertanian	462.551	467.673
Konstruksi	3.510	-
	13.177.763	15.435.025
	61.280.470	63.749.756
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	**1.117.828.495**	**990.950.989**

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	26.794.841	21.581.736
> 1 bulan - 3 bulan	44.774.886	33.795.541
> 3 bulan - 1 tahun	220.564.802	201.388.156
> 1 tahun - 2 tahun	135.697.545	139.063.100
> 2 tahun - 5 tahun	371.132.518	322.623.148
> 5 tahun	243.153.044	215.699.200
	1.042.117.636	934.150.881
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	1.405.710	5.295.404
> 1 bulan - 3 bulan	2.596.463	2.774.762
> 3 bulan - 1 tahun	18.457.013	18.556.620
> 1 tahun - 2 tahun	14.169.802	10.803.847
> 2 tahun - 5 tahun	33.109.853	8.526.613
> 5 tahun	24.615.759	35.416.936
	94.354.600	81.374.182
	1.136.472.236	1.015.525.063

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	1.172.046	2.739.614
> 1 bulan - 3 bulan	2.599.116	1.136.900
> 3 bulan - 1 tahun	11.375.557	4.187.901
> 1 tahun - 2 tahun	1.864.276	3.609.695
> 2 tahun - 5 tahun	10.933.850	12.147.069
> 5 tahun	20.157.862	24.493.552
	48.102.707	48.314.731
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	887.427	3.938.414
> 1 bulan - 3 bulan	772.182	8.930
> 3 bulan - 1 tahun	-	552.530
> 1 tahun - 2 tahun	462.551	220.447
> 2 tahun - 5 tahun	4.254.138	-
> 5 tahun	6.801.465	10.714.704
	13.177.763	15.435.025
	61.280.470	63.749.756
Total	1.197.752.706	1.079.274.819
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	**1.117.828.495**	**990.950.989**

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

Kolektibilitas BRI, Bank Raya, dan Pegadaian di luar usaha gadai:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Individual	33.829.500	50.799.698
Kolektif		
Lancar	1.042.712.719	931.823.518
Dalam perhatian khusus	46.754.108	32.629.744
Kurang lancar	4.605.023	2.350.338
Diragukan	7.049.578	3.371.555
Macet	15.921.659	14.916.272
	1.117.043.087	985.091.427
Total	1.150.872.587	1.035.891.125

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d) Berdasarkan Kolektibilitas (lanjutan):

Kolektibilitas BRI, Bank Raya, dan Pegadaian di luar usaha gadai (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(25.415.117)	(33.601.412)
Kolektif	(53.072.775)	(53.385.883)
	(78.487.892)	(86.987.295)
Bersih	**1.072.384.695**	**948.903.830**

Kolektibilitas usaha gadai Pegadaian (entitas anak):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kolektif		
Lancar	44.856.257	42.241.998
Dalam perhatian khusus	1.827.385	898.268
Kurang lancar	20.712	30.905
Diragukan	10.115	23.817
Macet	165.650	188.706
Total	46.880.119	43.383.694
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kolektif	(1.436.319)	(1.336.535)
Bersih	**45.443.800**	**42.047.159**

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Mikro	504.116.776	502.967.076
Ritel	491.361.723	397.589.654
Korporasi	46.639.137	33.594.151
	1.042.117.636	934.150.881
Mata uang asing		
Korporasi	91.341.135	78.277.579
Ritel	3.013.465	3.096.603
	94.354.600	81.374.182
	1.136.472.236	1.015.525.063

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
Korporasi	46.538.169	46.480.305
Ritel	1.564.538	1.834.426
	48.102.707	48.314.731
Mata uang asing		
Korporasi	13.177.763	15.435.025
	13.177.763	15.435.025
	61.280.470	63.749.756
Total	**1.197.752.706**	**1.079.274.819**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(79.924.211)	(88.323.830)
Bersih	**1.117.828.495**	**990.950.989**

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bunga Kontrak		
Rupiah	11,01%	10,01%
Mata uang asing	4,80	3,87
Bunga Efektif		
Rupiah	11,79%	11,37%
Mata uang asing	5,07	4,28

2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 19, 20 dan 21), serta barang jaminan berupa emas (entitas anak).

3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.

4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pekerja dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.

5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit dengan sasaran usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp69.273.881 dan Rp64.091.492 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 5% sampai dengan 68% dan 2% sampai dengan 77% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 1% sampai dengan 69% dan 1% sampai dengan 68% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

8) Pinjaman pekerja adalah pinjaman yang diberikan kepada pekerja dengan tingkat bunga berkisar 4,5% sampai dengan 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman pekerja dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman pekerja, bagian dari Aset Lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman pekerja sebesar Rp5.190.672 dan Rp4.785.093 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 17).

9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi di luar kredit yang diberikan kepada manajemen kunci (Catatan 44) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perusahaan Umum BULOG	8.050.411	2.806.206
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.223.106	9.346.356
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.493.912	4.526.884
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.176.593	3.069.554
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.270.033	1.332.717
PT Pertamina EP Cepu	2.263.613	2.573.381
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.033.162	2.119.335
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	2.025.180	2.140.183
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.773.059	2.217.674
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.719.923	1.761.099
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.008.656	945.183
Lain-lain	25.038.474	30.711.916
Total	**61.076.122**	**63.550.488**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

10) Informasi mengenai restrukturisasi yang dilakukan BRI dan entitas anak

Tabel berikut merupakan informasi atas kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (termasuk restrukturisasi dampak Covid-19) sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BRI (Entitas Induk)	102.508.133	147.780.529
Bank Raya	2.688.077	3.978.156
Pegadaian	72.192	308.266
Total	**105.268.402**	**152.066.951**

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI dan Bank Raya, sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp53.498.210 dan Rp45.290.460. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (BRI Entitas Induk, Bank Raya dan Pegadaian) akibat *Covid-19* berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, serta Siaran Pers OJK No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan secara *Targeted* dan Sektoral Atasi Dampak Lanjutan Pandemi *Covid-19*, pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp51.770.192 dan Rp106.776.491 dengan skema perpanjangan jangka waktu.

Tabel berikut merupakan informasi atas kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI berdasarkan jenis dan kolektibilitas:

	31 Desember 2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jenis						
Modal kerja	36.346.567	24.980.213	2.139.015	3.439.273	6.417.016	73.322.084
Investasi	13.785.578	4.224.453	329.997	837.300	5.635.785	24.813.113
Konsumsi	4.586.499	1.498.244	186.617	275.195	586.650	7.133.205
Total	**54.718.644**	**30.702.910**	**2.655.629**	**4.551.768**	**12.639.451**	**105.268.402**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

10) Informasi mengenai restrukturisasi yang dilakukan BRI dan entitas anak (lanjutan)

Tabel berikut merupakan informasi atas kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI berdasarkan jenis dan kolektibilitas (lanjutan):

	31 Desember 2022					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Jenis						
Modal kerja	71.894.781	18.066.488	926.618	2.439.008	4.669.392	97.996.287
Investasi	29.105.543	5.006.592	774.133	1.008.727	6.232.052	42.127.047
Konsumsi	9.494.384	1.461.144	98.274	208.012	681.803	11.943.617
Total	**110.494.708**	**24.534.224**	**1.799.025**	**3.655.747**	**11.583.247**	**152.066.951**

Pada tanggal 27 Juni 2022, putusan homologasi terkait dengan restrukturisasi atas kredit yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (”Garuda”) telah disepakati bersama dengan seluruh kreditur. Putusan homologasi tersebut baru efektif tanggal 28 Desember 2022 setelah Garuda telah memenuhi seluruh persyaratan homologasi. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tercatat kredit yang diberikan kepada Garuda setelah memperhitungkan kerugian modifikasi akibat restrukturisasi adalah sebesar Rp945.183, dimana nilai ini akan terpulihkan secara bertahap sesuai dengan konsep akuntansi setelah tanggal restrukturisasi hingga tanggal jatuh tempo. Kerugian modifikasi sebesar Rp3.258.079 dicatat pada akun pendapatan bunga. BRI tetap memiliki nilai tagih atas kredit yang diberikan kepada Garuda sebesar Rp4.613.060 sesuai nilai kontraktual pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tidak terdapat penghapusan *(haircut)* jumlah tagihan pokok dan bunga yang ditangguhkan oleh BRI terhadap Garuda.

11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.

12) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perdagangan, perhotelan dan restoran	18.396.123	16.223.885
Perindustrian	11.150.487	12.180.672
Pertanian	9.537.399	14.347.105
Konstruksi	6.755.177	7.449.492
Jasa dunia usaha	6.233.964	5.943.884
Pertambangan	2.314.227	2.854.041
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2.027.334	6.361.874

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

12) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jasa pelayanan sosial	408.163	548.657
Listrik, gas dan air	143.026	2.186.265
Lain-lain	4.636.337	3.585.416
Total	**61.602.237**	**71.681.291**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(44.332.414)	(46.969.837)
Bersih	**17.269.823**	**24.711.454**

13) Rasio-rasio

a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI (entitas induk) berdasarkan peraturan terkait adalah sebesar 3,12% dan 2,82% masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Sedangkan rasio NPL neto BRI (entitas induk) adalah sebesar 0,76% dan 0,73% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah sebesar 58,55% dan 58,56% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Kredit yang Diberikan				
Nilai tercatat awal	886.345.387	163.185.724	29.743.708	1.079.274.819
Pengalihan ke				
Stage 1	21.040.875	(20.820.091)	(220.784)	-
Stage 2	(34.436.838)	35.656.368	(1.219.530)	-
Stage 3	(10.274.806)	(16.090.208)	26.365.014	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(97.260.723)	(15.756.199)	306.176	(112.710.746)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	519.987.258	9.842.164	2.180.123	532.009.545
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(225.427.993)	(38.514.125)	(2.296.006)	(266.238.124)
Penghapusbukuan	(4.529.486)	(11.339.217)	(18.013.542)	(33.882.245)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(562.369)	(94.062)	(44.112)	(700.543)
Nilai tercatat akhir	**1.054.881.305**	**106.070.354**	**36.801.047**	**1.197.752.706**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Kredit yang Diberikan				
Nilai tercatat awal	857.473.265	106.378.838	30.564.420	994.416.523
Pengalihan ke				
Stage 1	6.952.548	(6.816.563)	(135.985)	-
Stage 2	(27.178.139)	28.253.113	(1.074.974)	-
Stage 3	(3.885.398)	(6.699.257)	10.584.655	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(78.848.410)	(19.148.330)	(637.130)	(98.633.870)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	277.978.012	98.615.584	7.670.730	384.264.326
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(142.543.459)	(32.245.292)	(5.078.026)	(179.866.777)
Penghapusbukuan	(3.615.157)	(6.136.117)	(12.308.402)	(22.059.676)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	12.125	983.748	158.420	1.154.293
Nilai tercatat akhir	**886.345.387**	**163.185.724**	**29.743.708**	**1.079.274.819**

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Kredit yang Diberikan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	24.926.263	41.732.088	21.665.479	88.323.830
Pengalihan ke				
Stage 1	2.457.102	(2.299.325)	(157.777)	-
Stage 2	(1.168.243)	2.187.739	(1.019.496)	-
Stage 3	(403.480)	(3.058.759)	3.462.239	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(3.950.058)	12.992.963	20.819.240	29.862.145
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.871.230	2.237.589	1.409.324	13.518.143
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(5.690.458)	(9.927.728)	(1.519.801)	(17.137.987)
Penghapusbukuan	(4.529.486)	(11.339.217)	(18.013.542)	(33.882.245)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(578.523)	(223.964)	42.812	(759.675)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**20.934.347**	**32.301.386**	**26.688.478**	**79.924.211**

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Kredit yang Diberikan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	19.874.035	41.476.057	23.483.642	84.833.734
Pengalihan ke				
Stage 1	738.878	(654.994)	(83.884)	-
Stage 2	(1.167.188)	1.925.755	(758.567)	-
Stage 3	(252.936)	(1.118.719)	1.371.655	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.617.817)	918.977	6.460.113	5.761.273
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	15.379.150	10.501.753	8.073.317	33.954.220
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.380.375)	(5.109.088)	(4.495.955)	(13.985.418)
Penghapusbukuan	(3.615.157)	(6.136.117)	(12.308.402)	(22.059.676)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(32.327)	(71.536)	(76.440)	(180.303)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**24.926.263**	**41.732.088**	**21.665.479**	**88.323.830**

Termasuk dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (entitas induk) adalah cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana sebesar Rp108.286 dan Rp2.018.000 dengan nilai tercatat sebesar Rp1.130.368 dan Rp15.688.470 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Jumlah minimum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Catatan 2e) adalah sebesar Rp43.526.965 dan Rp34.522.709 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat kredit entitas anak (PT Pegadaian) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp29.600.000 dan Rp48.538.586 (Catatan 25).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

12. PINJAMAN SYARIAH

a) Pinjaman syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Lancar	12.454.636	9.632.737
Dalam perhatian khusus	966.673	602.297
Kurang lancar	47.774	28.781
Diragukan	55.172	35.639
Macet	143.965	214.875
Total	**13.668.220**	**10.514.329**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.093.762)	(1.286.203)
Bersih	**12.574.458**	**9.228.126**

b) Pinjaman syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	17.091	15.365
> 1 bulan - 3 bulan	84.009	22.165
> 3 bulan - 1 tahun	8.227.108	7.379.222
> 1 tahun - 2 tahun	2.388.081	1.087.575
> 2 tahun - 5 tahun	2.799.958	1.821.751
> 5 tahun	151.973	188.251
Total	**13.668.220**	**10.514.329**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.093.762)	(1.286.203)
Bersih	**12.574.458**	**9.228.126**

Pinjaman syariah terdiri dari *arrum* haji, *amanah*, *arrum*, *arrum* emas baru, dan *rhan tasjily* tanah.

Jumlah pinjaman syariah yang telah direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 serta Siaran Pers OJK No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Secara *Targeted* dan Sektoral Atasi Dampak Lanjutan Pandemi Covid sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp234.507 dan Rp530.846.

12. PINJAMAN SYARIAH (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian pinjaman syariah:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	1.286.203	1.410.907
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	(192.441)	(124.704)
Saldo akhir	**1.093.762**	**1.286.203**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman syariah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas pinjaman syariah antara lain berupa emas, fidusia dan barang jaminan non-emas lainnya.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh pinjaman syariah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman Bank (Catatan 25).

13. PIUTANG PEMBIAYAAN

a) Piutang Pembiayaan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 tahun	31.552.191	33.630.939
> 1 tahun - 2 tahun	16.332.478	8.398.988
> 2 tahun - 5 tahun	7.037.409	7.034.845
> 5 tahun	22.257	100.625
	54.944.335	49.165.397
Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 tahun	28.304	95.363
> 1 tahun - 2 tahun	5.331	15.868
> 2 tahun - 5 tahun	-	4.084
	33.635	115.315
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
≤ 1 tahun	5.872	7.205
> 1 tahun - 2 tahun	12.812	-
> 2 tahun - 5 tahun	11.667	-
	30.351	7.205
Total	**55.008.321**	**49.287.917**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)
Bersih	**50.524.406**	**45.809.969**

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

b) Piutang Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembiayaan Pola Angsuran Mingguan		
Kolektibilitas		
Lancar	40.351.215	35.244.605
Dalam perhatian khusus	1.221.134	512.184
Kurang lancar	168.592	20.909
Diragukan	60.028	8.224
Macet	100.932	26.018
	41.901.901	35.811.940
Pembiayaan Pola Angsuran Non Mingguan		
Kolektibilitas		
Lancar	11.746.901	11.985.624
Dalam perhatian khusus	1.013.319	1.044.244
Kurang lancar	43.498	122.894
Diragukan	39.335	31.746
Macet	263.367	291.469
	13.106.420	13.475.977
Total	**55.008.321**	**49.287.917**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)
Bersih	**50.524.406**	**45.809.969**

c) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Piutang Pembiayaan				
Nilai tercatat awal	47.142.455	367.725	1.777.737	49.287.917
Pengalihan ke				
Stage 1	728.092	(721.325)	(6.767)	-
Stage 2	(1.960.800)	1.977.343	(16.543)	-
Stage 3	(1.485.014)	(1.002.216)	2.487.230	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	5.347.188	70.962	5.633	5.423.783
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	71.899.653	522.836	50.369	72.472.858
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(69.613.543)	(153.986)	(746.273)	(70.513.802)
Penghapusbukuan	(57.431)	(13.291)	(1.589.853)	(1.660.575)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.860)	-	-	(1.860)
Nilai tercatat akhir	**51.998.740**	**1.048.048**	**1.961.533**	**55.008.321**

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

c. Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Piutang Pembiayaan				
Nilai tercatat awal	37.766.589	1.057.696	467.144	39.291.429
Pengalihan ke				
Stage 1	303.644	(291.046)	(12.598)	-
Stage 2	(1.208.342)	1.208.650	(308)	-
Stage 3	(819.253)	(1.778.506)	2.597.759	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.798.297	1.063.840	454.048	25.316.185
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.569.790)	(887.969)	(1.409.336)	(14.867.095)
Penghapusbukuan	(19.290)	(4.940)	(318.972)	(343.202)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(109.400)	-	-	(109.400)
Nilai tercatat akhir	**47.142.455**	**367.725**	**1.777.737**	**49.287.917**

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Piutang Pembiayaan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	1.376.178	1.223.654	878.116	3.477.948
Pengalihan ke				
Stage 1	167.035	(162.293)	(4.742)	-
Stage 2	(940.187)	951.545	(11.358)	-
Stage 3	(551.475)	(619.661)	1.171.136	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	1.942.679	25.781	2.046	1.970.506
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4.424.581	3.676	3.525	4.431.782
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.645.464)	(9.540)	(46.235)	(3.701.239)
Penghapusbukuan	(57.431)	(13.291)	(1.589.853)	(1.660.575)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(34.507)	-	-	(34.507)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**2.681.409**	**1.399.871**	**402.635**	**4.483.915**

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

c. Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Piutang Pembiayaan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	643.221	534.404	407.151	1.584.776
Pengalihan ke				
Stage 1	1.530.567	(1.518.317)	(12.250)	-
Stage 2	(432.484)	432.738	(254)	-
Stage 3	(121.748)	(185.447)	307.195	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(2.124.829)	1.963.144	(302.110)	(463.795)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2.496.271	28.620	846.856	3.371.747
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(540.846)	(26.548)	(49.500)	(616.894)
Penghapusbukuan	(19.290)	(4.940)	(318.972)	(343.202)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(54.684)	-	-	(54.684)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.376.178**	**1.223.654**	**878.116**	**3.477.948**

d) Dalam piutang pembiayaan, termasuk informasi terkait piutang sewa pembiayaan (BRI Finance) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Pihak ketiga		
Piutang pembiayaan-bruto	9.855.031	8.270.596
Nilai sisa yang terjamin	1.582.769	1.713.964
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(1.971.918)	(1.578.276)
Simpanan jaminan	(1.582.769)	(1.713.964)
	7.883.113	6.692.320
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Piutang pembiayaan-bruto	37.460	7.503
Nilai sisa yang terjamin	7.427	4
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(7.109)	(298)
Simpanan jaminan	(7.427)	(4)
	30.351	7.205
Total	**7.913.464**	**6.699.525**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(215.309)	(236.874)
Bersih	**7.698.155**	**6.462.651**

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat piutang pembiayaan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang Bank masing-masing sebesar Rp31.789.102 dan Rp16.523.795.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat piutang pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah masing-masing sebesar Rp31.668.616 dan Rp27.585.665.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	**Ekuivalen Rp**	**Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)**	**Ekuivalen Rp**
Pihak ketiga				
Rupiah				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		7.394.694		4.399.391
Mata uang asing				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	94.495.087	1.454.941	68.880.542	1.072.298
Yen Jepang	762.730.478	83.046	176.722.210	20.820
Euro Eropa	2.447.950	41.709	1.799.292	29.835
Renminbi	13.304.733	28.872	15.404.713	34.490
Pound Sterling Inggris	29.751	584	42.325	795
		1.609.152		1.158.238
		9.003.846		5.557.629
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
L/C Impor dan SKBDN		1.167.584		1.599.368
Mata uang asing				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	2.986.171	45.978	681.080	10.603
		1.213.562		1.609.971
Total		10.217.408		7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai		(249.698)		(136.536)
Bersih		**9.967.710**		**7.031.064**

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan "Lancar".

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
≤ 1 bulan	2.419.023	1.844.875
> 1 bulan - 3 bulan	4.288.211	2.282.625
> 3 bulan - 1 tahun	2.296.612	1.430.129
	9.003.846	5.557.629
Pihak berelasi (Catatan 44)		
≤ 1 bulan	66.652	305.002
> 1 bulan - 3 bulan	444.464	534.165
> 3 bulan - 1 tahun	702.446	770.804
	1.213.562	1.609.971
Total	10.217.408	7.167.600
Cadangan kerugian penurunan nilai	(249.698)	(136.536)
Bersih	**9.967.710**	**7.031.064**

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Tagihan Akseptasi				
Nilai tercatat awal	7.145.070	22.530	-	7.167.600
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.301.960	23.811	-	10.325.771
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(7.250.703)	(22.530)	-	(7.273.233)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(2.730)	-	-	(2.730)
Nilai tercatat akhir	**10.193.597**	**23.811**	**-**	**10.217.408**

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Tagihan Akseptasi				
Nilai tercatat awal	8.956.013	598.225	-	9.554.238
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.119.924	22.530		7.142.454
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(8.956.013)	(598.225)	-	(9.554.238)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	25.146	-	-	25.146
Nilai tercatat akhir	**7.145.070**	**22.530**	**-**	**7.167.600**

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Tagihan Akseptasi				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	123.052	13.484	-	136.536
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	244.269	5.581	-	249.850
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(121.373)	(13.484)	-	(134.857)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.831)	-	-	(1.831)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**244.117**	**5.581**	**-**	**249.698**

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Tagihan Akseptasi				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	134.047	354.186	-	488.233
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	123.650	13.484	-	137.134
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(134.047)	(354.186)	-	(488.233)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(598)	-	-	(598)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**123.052**	**13.484**	**-**	**136.536**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

15. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2023			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	15,38	3.546.381	1.933.244	5.479.625
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	15,10	71.325	8.115	79.440
			3.617.706	1.941.359	5.559.065

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

		31 Desember 2023			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Nilai Wajar					
Pihak ketiga					
Grab Holding	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,05			111.355
PT Bukalapak.com	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,18			39.106
PT Pefindo Biro Kredit	Perusahaan informasi pengkreditan	13,88			20.060
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	0,18			32.278
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	3,00			4.650
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Lembaga *Services* Pembayaran	17,50			3.500
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	1,92			1.340
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			783.555
Pihak berelasi (Catatan 44)					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	12,57			753.258
Total					1.749.102
					7.308.167
Cadangan kerugian penurunan nilai					(2.676)
Bersih					**7.305.491**

		31 Desember 2022			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	15,38	3.546.381	1.116.254	4.662.635
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	15,10	71.325	6.521	77.846
			3.617.706	1.122.775	4.740.481

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

		31 Desember 2022			
Nama Perusahaan	**Jenis Usaha**	**Persentase Pemilikan (%)**	**Biaya Perolehan**	**Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi**	**Nilai Tercatat**
Metode Nilai Wajar					
Pihak ketiga					
Grab Holding	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,07			108.572
PT Bukalapak.com	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,18			47.434
PT Pefindo Biro Kredit	Perusahaan informasi pengkreditan	16,09			20.060
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	7,97			38.261
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,25			4.650
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Lembaga *Services* Pembayaran	17,50			3.500
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	1,92			2.868
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			1.011.721
Pihak berelasi (Catatan 44)					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	12,57			537.548
					1.774.614
Total					6.515.095
Cadangan kerugian penurunan nilai					(8.192)
Bersih					**6.506.903**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua penyertaan diklasifikasikan “Lancar”.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan laba tahun berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total aset	353.624.125	305.727.438
Total liabilitas	87.222.910	73.655.791
Total dana *syirkah* temporer	227.662.092	198.566.037
PT Bahana Artha Ventura		
Total aset	1.642.983	1.723.887
Total liabilitas	838.813	926.497

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan laba tahun berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit) (lanjutan):

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total pendapatan	22.251.743	19.622.865
Total laba bersih	5.703.743	4.260.182
PT Bahana Artha Ventura		
Total pendapatan	145.401	154.768
Total laba bersih	10.553	4.212

Rincian penerimaan dividen adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
BRI		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	65.504	130.554
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	-	7.088
	65.504	137.642
Entitas Anak		
PT BRI Danareksa Sekuritas	9.693	-
PT Bank Raya Indonesia Tbk	202	44
PT BRI Asuransi Indonesia	127	19
PT Permodalan Nasional Madani	46	-
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	-	6.364
	10.068	6.427
Total	**75.572**	**144.069**

16. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

	31 Desember 2023					
Keterangan	**Saldo Awal**	**Revaluasi**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan						
Hak atas tanah	33.406.372	-	1.086.300	1.134.834	(40.411)	33.317.427
Bangunan	12.219.677	-	1.522.462	699.119	2.084.832	15.127.852
Kendaraan bermotor	3.900.285	-	2.015.071	706.759	12.801	5.221.398
Komputer dan mesin*)	12.175.552	-	2.588.752	435.387	2.534.962	16.863.879
Perlengkapan kantor	3.357.863	-	677.264	102.384	45.608	3.978.351
Aset tetap museum	184	-	-	-	-	184
Satelit	3.284.668	-	25	-	4.185	3.288.878
Aset dalam penyelesaian	5.606.600	-	2.719.584	18.399	(4.641.977)	3.665.808
	73.951.201	-	10.609.458	3.096.882	-	81.463.777
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	4.158.159	-	1.302.878	224.927	(10.318)	5.225.792
Kendaraan bermotor	1.846.266	-	243.852	161.713	429	1.928.834
Komputer dan mesin	9.276.125	-	1.514.294	194.805	(882)	10.594.732
Perlengkapan kantor	2.247.030	-	444.481	94.342	10.771	2.607.940
Satelit	1.207.574	-	220.786	-	-	1.428.360
	18.735.154	-	3.726.291	675.787	-	21.785.658
Nilai buku - Bersih	**55.216.047**					**59.678.119**

*) Termasuk *software*

	31 Desember 2022					
Keterangan	**Saldo Awal**	**Revaluasi**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan						
Hak atas tanah	30.014.425	3.296.712	337.950	206.667	(36.048)	33.406.372
Bangunan	9.420.713	-	3.747.043	1.745.445	797.366	12.219.677
Kendaraan bermotor	3.612.022	-	1.153.328	915.890	50.825	3.900.285
Komputer dan mesin*)	10.595.357	-	1.296.684	434.729	718.240	12.175.552
Perlengkapan kantor	3.908.928	-	707.388	571.618	(686.835)	3.357.863
Aset tetap museum	184	-	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	250	-	(246)	3.284.668
Aset dalam penyelesaian	4.202.191	-	3.295.590	1.047.879	(843.302)	5.606.600
	65.038.484	3.296.712	10.538.233	4.922.228	-	73.951.201
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	3.313.244	-	1.094.220	262.287	12.982	4.158.159
Kendaraan bermotor	2.120.861	-	572.000	855.688	9.093	1.846.266
Komputer dan mesin	7.666.009	-	1.344.986	275.523	540.653	9.276.125
Perlengkapan kantor	2.981.185	-	383.015	554.450	(562.720)	2.247.030
Satelit	986.998	-	220.584	-	(8)	1.207.574
	17.068.297	-	3.614.805	1.947.948	-	18.735.154
Nilai buku - Bersih	**47.970.187**					**55.216.047**

*) Termasuk *software*

16. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 pada tabel di atas termasuk juga nilai Aset Hak Guna (AHG) BRI dan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2023
Biaya Perolehan Aset Hak Guna				
Bangunan	1.840.211	1.124.412	498.447	2.466.176
Kendaraan bermotor	331.406	437.631	128.139	640.898
Perlengkapan kantor	13.246	119.100	226	132.120
	2.184.863	1.681.143	626.812	3.239.194
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna				
Bangunan	794.664	752.694	396.904	1.150.454
Kendaraan bermotor	169.110	169.784	124.782	214.112
Perlengkapan kantor	1.780	19.139	141	20.778
	965.554	941.617	521.827	1.385.344
Nilai buku - Bersih	**1.219.309**			**1.853.850**

	Saldo awal 1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2022
Biaya Perolehan Aset Hak Guna				
Bangunan	1.411.229	1.135.501	706.519	1.840.211
Kendaraan bermotor	372.382	99.740	140.716	331.406
Perlengkapan kantor	20.856	12.686	20.296	13.246
	1.804.467	1.247.927	867.531	2.184.863
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna				
Bangunan	457.367	552.101	214.804	794.664
Kendaraan bermotor	62.545	190.007	83.442	169.110
Perlengkapan kantor	20.304	2.460	20.984	1.780
	540.216	744.568	319.230	965.554
Nilai buku - Bersih	**1.264.251**			**1.219.309**

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	
	Beban penyusutan aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa
Bangunan	752.694	8.883
Kendaraan bermotor	169.784	17.981
Perlengkapan kantor	19.139	369
Total	**941.617**	**27.233**

16. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian (lanjutan):

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	
	Beban penyusutan aset hak guna	**Beban bunga atas liabilitas sewa**
Bangunan	552.101	6.986
Kendaraan bermotor	190.007	21.188
Perlengkapan kantor	2.460	116
Total	**744.568**	**28.290**

Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki BRI adalah lebih dari 2 (dua) tahun.

BRI dan entitas anak memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah, dimana dikecualikan dari pengakuan sewa berdasarkan PSAK No. 73.

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebesar Rp3.726.291 dan Rp3.614.805 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 36).

BRI dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalisme, *force majeur*, dan lain-lain kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (Entitas Anak), PT Askrindo (Pihak Berelasi), dan Maritme Mutual Insurance New Zealand dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp22.124.061 dan Rp20.269.005 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

BRI telah mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (Entitas Anak) dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar ASD130.736.666 (nilai penuh) dan ASD160.000.000 (nilai penuh), masing-masing polis asuransi tersebut berakhir pada tanggal 19 Juni 2024 dan 2023.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI adalah masing-masing sebesar Rp9.986.999 dan Rp9.019.619 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2016, BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran hak atas tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" bagian 27 huruf e, dengan mempertimbangkan nilai buku tanah yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2016. Selanjutnya, BRI dan entitas anak telah melakukan penilaian kembali atas tanah hanya untuk memenuhi ketentuan Bapepam-LK tersebut dan bukan untuk tujuan perpajakan, dimana berdasarkan penilaian terakhir menggunakan nilai wajar pada tanggal 1 April 2022.

Penilaian dilakukan berdasarkan POJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang "Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal" dan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

1. KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, dengan laporan No. 01042/2.0131-00/PI/07/0375/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.679.046 ditandatangani oleh Budi Prasodjo.
2. KJPP Dino Farid dan Rekan, dengan laporan No. 00526/2.0164-00/PI/07/0447/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp2.006.196 ditandatangani oleh Dino Suharianto.
3. KJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan, dengan laporan No. 01957/2.0084-00/PI/07/0274/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp9.866.380 ditandatangani oleh Sapto Haji.
4. KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan, dengan laporan No. 00522/2.0018-00/PI/07/0496/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.429.569 ditandatangani oleh Budi Muhammad Haikal.
5. KJPP Susan Widjojo dan Rekan, dengan laporan No. 00400/2.0068-00/PI/07/0198/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp2.865.437 ditandatangani oleh Susan Widjojo.
6. KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, dengan laporan No. 00121/2.0014-00/PI/07/0080/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.152.233 ditandatangani oleh Okky Danuza.
7. KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, dengan laporan No. 00282/2.0051-00/PI/07/0152/1/IX/2022 tanggal 1 September 2022 sebesar Rp1.056.302 dan Rp654.858 ditandatangani oleh Abdullah Fitriantoro.
8. KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, dengan laporan No. 01155/2.0027-00/PI/07/0196/1/IX/2022 tanggal 19 September 2022 sebesar Rp1.524.861 ditandatangani oleh Muhammad A. Muttaqin.
9. KJPP Iwan Bachron dan Rekan, dengan laporan No. 00066/2.0047-00/PI/07/0108/1/IX/2022 tanggal 14 September 2022 sebesar Rp730.970 ditandatangani oleh Iwan Bachron.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali atas hak atas tanah BRI (Entitas induk) pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp2.963.485 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.984.488, sedangkan penurunan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali sebesar Rp21.003 diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hierarki nilai wajar level 2.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing adalah sebesar Rp14.489.235 dan Rp13.402.935.

BRI dan entitas anak tidak memiliki aset tetap yang tidak terpakai sementara, tidak memiliki aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif, dan aset tetap yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

16. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
	Akumulasi biaya	**Persentase penyelesaian**	**Estimasi penyelesaian**
Bangunan dalam penyelesaian:			
Bangunan *Tier* 3 *Uptime Institute* DC GTI	89.930	85,00%	Maret 2024
Renovasi Menara BRI Medan	44.017	85,00%	Maret 2024
Kontraktor *Contact Center* Kebayoran Baru	26.439	95,00%	Januari 2024
Main Campus BRI Corporate University	28.738	95,00%	Januari 2024
Lain-lain	1.525.702	Beragam	Beragam
	1.714.826		
Software dalam penyelesaian:			
Pengadaan Konsultan IT-Fase Implementasi *Product*	302.176	85,00%	Juni 2024
Pengadaan *Secure Branch* Fase II	161.441	95,00%	Maret 2024
Switch DC Workload ODC Tahun 2022-2024	47.548	95,00%	Desember 2024
Pengadaan Implementasi Integrasi *New Finance System*	39.964	95,00%	Maret 2024
Lain-lain	966.662	Beragam	Beragam
	1.517.791		
Hardware dalam penyelesaian	433.191	Beragam	Beragam
	433.191		
Total	**3.665.808**		

	31 Desember 2022		
	Akumulasi biaya	**Persentase penyelesaian**	**Estimasi penyelesaian**
Bangunan dalam penyelesaian:			
Menara BRI Medan	287.349	93,40%	Februari 2023
Gedung BRI Kanwil Malang	118.892	95,05%	Februari 2023
Lain-lain	2.037.598	Beragam	Beragam
	2.443.839		
Software dalam penyelesaian:			
Pengadaan *Software* BRIFIRST	236.670	84,53%	Desember 2023
Pengadaan Infrastruktur BRIFIRST	168.337	71,40%	Desember 2023
Pengadaan Konsultan *System Integrator*	141.409	78,13%	Februari 2023
Aplikasi *Desktop* BRIBox	62.599	90,57%	Mei 2023
Lain-lain	2.549.547	Beragam	Beragam
	3.158.562		
Hardware dalam penyelesaian	4.199	Beragam	Beragam
	4.199		
Total	**5.606.600**		

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selain yang disebutkan di atas dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

17. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR	9.710.595	12.458.257
Biaya dibayar di muka	9.618.292	5.089.056
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman pekerja (Catatan 11f)	5.190.672	4.785.093
Piutang bunga:		
Efek-efek	2.579.374	2.740.624
Usaha gadai	2.099.520	2.290.259
Lain-lain	336.005	281.084
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	4.713.968	1.938.258
Aset reasuransi	2.697.126	2.242.873
Uang muka pajak (Catatan 38)	2.089.356	-
Piutang lain-lain	1.764.184	1.461.712
Aset atas sewa operasi - net	952.001	517.238
Kas yang dibatasi penggunaannya	534.474	1.268.339
Persediaan emas	508.699	439.088
Piutang premi	286.622	204.285
Properti investasi	199.635	195.526
Persekot intern	112.588	184.386
Aset tetap belum didistribusikan	52.939	1.014.197
Agunan yang diambil alih	52.230	67.569
Uang muka pengadaan	50.240	338.967
Setoran jaminan	33.437	82.403
Lain-lain	3.629.617	3.640.890
	47.211.574	41.240.104
Mata uang asing		
Term deposit valas devisa hasil ekspor (TD Valas DHE) Bank Indonesia	5.839.312	-
Piutang Bunga:		
Efek-efek	1.280.545	1.257.503
Lain-lain	184.708	157.823
Lain-lain	542.340	489.742
	7.846.905	1.905.068
Total	**55.058.479**	**43.145.172**
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(1.682.026)	(771.171)
Bersih	**53.376.453**	**42.374.001**

18. LIABILITAS SEGERA

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
Titipan pembayaran dividen (Catatan 31d)	12.666.432	8.602.823
Titipan *advance payment*	7.114.058	8.921.299
Titipan kerja sama pihak ketiga	1.121.776	520.966
Titipan setoran pajak	792.368	716.779
Titipan ATM dan kartu kredit	788.468	638.305
Titipan biaya operasional	696.501	-
Titipan uang elektronik	518.049	456.179
Titipan dana pihak ketiga	751.038	778.838
Titipan pinjaman kelolaan	289.945	121.539
Titipan *recovery claim* asuransi	279.530	-
Titipan asuransi	252.718	264.235
Utang kepada nasabah	232.719	170.138
Titipan setoran kliring	33.687	28.053
Titipan pengiriman uang	30.767	20.042
Lain-lain	3.496.949	3.331.158
	29.065.005	24.570.354
Mata uang asing		
Titipan setoran kliring	538.895	-
Titipan setoran pajak	140.178	51.182
Titipan dana pihak ketiga	139.955	21.935
Titipan *advance payment*	36.911	65.926
Titipan ATM dan kartu kredit	4.958	5.205
Lain-lain	725.905	195.977
	1.586.802	340.225
Total	**30.651.807**	**24.910.579**

19. GIRO

Giro terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah		116.731.749		111.967.188
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	3.455.537.572	53.204.912	3.290.805.117	51.229.608
Euro Eropa	36.944.483	629.472	27.522.824	456.376
Renminbi	165.406.408	358.942	156.774.479	351.004
Dolar Singapura	10.534.380	123.003	131.638.705	1.526.072
Dolar Australia	7.821.325	82.286	1.887.328	19.926
Yen Jepang	402.507.348	43.825	239.441.887	28.209
Dolar Hong Kong	10.897.029	21.475	1.569.861	3.134
Dolar Taiwan Baru	31.426.075	15.823	7.820.781	3.958
Pound Sterling Inggris	484.595	9.511	169.333	3.181
Dirham Uni Emirat Arab	1.537.723	6.447	267.241	1.133
Riyal Arab Saudi	503.509	2.067	8.615	36
Ringgit Malaysia	4.894	16	3.894	14
		54.497.779		53.622.651
		171.229.528		165.589.839

19. GIRO (lanjutan)

Giro terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah		80.392.091		112.553.235
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	6.124.984.673	94.306.389	4.593.131.861	71.503.580
Euro Eropa	10.413.081	177.421	5.485.114	90.953
Yen Jepang	168.148.421	18.308	151.956.054	17.902
Pound Sterling Inggris	29.196	573		-
Dolar Singapura	5.331	62	6.986	81
		94.502.753		71.612.516
		174.894.844		184.165.751
Total		**346.124.372**		**349.755.590**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	2,72%	2,07%
Mata uang asing	2,62	0,61

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp850.977 dan Rp551.325 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

20. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Simpedes		319.178.769		318.984.036
Britama		192.007.308		188.378.315
Lain-lain		10.278.739		9.528.215
		521.464.816		516.890.566
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	225.570.890	3.473.115	252.725.208	3.934.300
Yen Jepang	19.294.792.433	2.100.817	4.384.269.662	516.511
Euro Eropa	13.837.154	235.762	9.012.989	149.451
Dolar Singapura	13.100.685	152.968	14.646.981	169.801
Pound Sterling Inggris	1.350.486	26.505	3.445.779	64.733
Dolar Australia	1.879.683	19.776	1.872.993	19.775
Renminbi	6.809.463	14.777	2.911.422	6.518
Dolar Taiwan Baru	10.713.878	5.394	14.962.922	7.555
Riyal Arab Saudi	1.078.598	4.429	142.770	591
Dirham Uni Emirat Arab	93.443	392	11.629	49
Dolar Hong Kong	139.868	276	267.651	534
Won Korea Selatan	8.094.523	96		-
		6.034.307		4.869.818

20. TABUNGAN (lanjutan)

Tabungan terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)				
Mata uang asing (lanjutan)				
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat		-	1.463.998	22.791
		6.034.307		4.892.609
		527.499.123		521.783.175
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Britama		348.734		728.459
Simpedes		10.421		14.265
Lain-lain		64.826		100.691
		423.981		843.415
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	1.432.215	22.052	1.307.634	20.357
Pound Sterling Inggris	7.255	142	8.924	168
Euro Eropa	6.094	104	14.380	238
Yen Jepang	589.677	64	603.841	71
Dolar Singapura	4.679	55	37.678	437
Riyal Arab Saudi	6.880	28	6.226	26
Renminbi	417	1	14.546	33
		22.446		21.330
		446.427		864.745
Total		**527.945.550**		**522.647.920**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	0,26%	0,22%
Mata uang asing	0,19	0,12

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp157.317 dan Rp114.649 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

21. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah		294.911.189		258.965.235
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	1.981.751.726	30.513.031	2.241.433.076	34.893.509
Yen Jepang	18.089.520.575	1.969.587	682.150.000	80.364
Renminbi	147.108.266	319.234	145.122.178	324.915
Dolar Singapura	12.215.745	142.635	146.313.062	1.696.190
Dolar Australia	7.264.028	76.423	27.247.937	287.680
Pound Sterling Inggris	926.345	18.181	74.572	1.401
Euro Eropa	424.354	7.230	1.874.588	31.084
Dolar Taiwan Baru	6.056.320	3.049	6.170.038	3.123
Riyal Arab Saudi	5.010	21	5.007	21
		33.049.391		37.318.287
		327.960.580		296.283.522
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah		132.688.743		121.105.033
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	1.532.609.511	23.597.589	1.159.818.087	18.055.468
Euro Eropa	700.000	11.927	2.200.000	36.480
		23.609.516		18.091.948
		156.298.259		139.196.981
Total		**484.258.839**		**435.480.503**

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Deposits on call	12.472.551	11.198.794
Deposito		
1 bulan	59.222.509	87.324.795
3 bulan	130.209.788	98.169.540
6 bulan	73.085.816	32.731.596
12 bulan	18.908.368	28.145.069
Lebih dari 12 bulan	1.012.157	1.395.441
	294.911.189	258.965.235

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
Deposits on call	79.599	418.420
Deposito		
1 bulan	11.626.617	13.903.695
3 bulan	9.093.651	4.184.207
6 bulan	6.322.343	7.211.600
12 bulan	5.487.363	10.706.367
Lebih dari 12 bulan	439.818	893.998
	33.049.391	37.318.287
	327.960.580	296.283.522
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
Deposits on call	2.960.717	7.839.292
Deposito		
1 bulan	19.903.738	23.511.996
3 bulan	39.290.928	32.628.975
6 bulan	49.502.287	14.064.025
12 bulan	21.030.281	43.030.745
Lebih dari 12 bulan	792	30.000
	132.688.743	121.105.033
Mata uang asing		
Deposits on call	1.593.312	1.871.945
Deposito		
1 bulan	8.637.377	11.545.591
3 bulan	10.618.440	1.837.484
6 bulan	2.195.315	2.328.533
12 bulan	565.072	469.476
Lebih dari 12 bulan	-	38.919
	23.609.516	18.091.948
	156.298.259	139.196.981
Total	**484.258.839**	**435.480.503**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah	4,71%	3,06%
Mata uang asing	3,18	0,93

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah sebesar Rp261.350 dan Rp262.798 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposito *on call*		4.268.250		145.200
Giro		1.263.075		1.406.913
Deposito berjangka		302.655		750.521
Tabungan		9.052		9.787
		5.843.032		2.312.421
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Deposito berjangka	180.000.000	2.771.460	161.000.000	2.506.368
Inter-bank call money	56.671.033	872.564	117.000.000	1.821.398
Giro	21.435.803	330.047	29.643.680	461.478
Deposito on call	10.000.000	153.970		-
		4.128.041		4.789.244
Dolar Singapura				
Inter-bank call money	130.546.301	1.524.303	121.729.108	1.411.191
		5.652.344		1.411.191
		11.495.376		8.512.856
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Giro		15.755		42.617
Deposito berjangka		41		40
		15.796		42.657
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	29.000.000	446.513	50.000.000	778.375
Giro	41.162	634	42.334	659
		447.147		779.034
		462.943		821.691
Total		**11.958.319**		**9.334.547**

Tingkat suku bunga rata-rata:

	Rupiah		Mata Uang Asing	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Deposits on call	4,25%	3,12%	4,07%	-%
Deposito berjangka	2,66	2,50	1,50	1,50
Giro	1,22	1,34	0,11	0,06
Tabungan	0,66	0,47	-	-
Inter-bank call money	-	-	5,07	3,83

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023			
	≤ 1 bulan	**> 1 - 3 bulan**	**> 3 bulan - 1 tahun**	**Total**
Pihak ketiga				
Rupiah				
Deposits on call	4.268.250	-	-	4.268.250
Giro	1.263.075	-	-	1.263.075
Deposito berjangka	80.455	218.200	4.000	302.655
Tabungan	9.052	-	-	9.052
	5.620.832	218.200	4.000	5.843.032
Mata Uang Asing				
Dolar Amerika Serikat				
Deposito berjangka	307.940	1.616.685	846.835	2.771.460
Inter-bank call money	195.096	-	677.468	872.564
Giro	330.047	-	-	330.047
Deposito *on call*	153.970	-	-	153.970
	987.053	1.616.685	1.524.303	4.128.041
Dolar Singapura				
Inter-bank call money	1.524.303	-	-	1.524.303
	8.132.188	1.834.885	1.528.303	11.495.376
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Giro	15.755	-	-	15.755
Deposito berjangka	41	-	-	41
	15.796	-	-	15.796
Mata Uang Asing				
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	446.513	-	-	446.513
Giro	634	-	-	634
	447.147	-	-	447.147
	462.943	-	-	462.943
Total	**8.595.131**	**1.834.885**	**1.528.303**	**11.958.319**

	31 Desember 2022			
	≤ 1 bulan	**> 1 - 3 bulan**	**> 3 bulan - 1 tahun**	**Total**
Pihak ketiga				
Rupiah				
Giro	1.406.913	-	-	1.406.913
Deposito berjangka	230.204	407.217	113.100	750.521
Deposits on call	145.200	-	-	145.200
Tabungan	9.787	-	-	9.787
	1.792.104	407.217	113.100	2.312.421

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga (lanjutan)				
Mata Uang Asing				
Dolar Amerika Serikat				
Deposito berjangka	311.350	1.572.318	622.700	2.506.368
Inter-bank call money	980.753	560.430	280.215	1.821.398
Giro	461.478	-	-	461.478
	1.753.581	2.132.748	902.915	4.789.244
Dolar Singapura				
Inter-bank call money	1.411.191	-	-	1.411.191
	4.956.876	2.539.965	1.016.015	8.512.856
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Giro	42.617	-	-	42.617
Deposito berjangka	40	-	-	40
	42.657	-	-	42.657
Mata Uang Asing				
Dolar Amerika Serikat				
Inter-bank call money	778.375	-	-	778.375
Giro	659	-	-	659
	779.034	-	-	779.034
	821.691	-	-	821.691
Total	**5.778.567**	**2.539.965**	**1.016.015**	**9.334.547**

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

	31 Desember 2023				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0081	10 Jul 2023	13 Jun 2025	1.500.000	1.322.032	1.325.902
FR0086	18 Jul 2023	15 Apr 2026	1.150.000	1.001.549	1.014.938
FR0081	11 Jul 2023	13 Jun 2025	1.098.000	999.680	1.002.630
FR0081	04 Apr 2023	12 Jun 2025	1.000.000	887.065	894.118
FR0081	12 Jul 2023	13 Jun 2025	600.000	547.677	549.293
FR0081	14 Des 2023	13 Jun 2025	500.000	491.298	492.876
FR0086	06 Des 2023	05 Jan 2024	100.000	93.789	94.235
			5.948.000	5.343.090	5.373.992

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2023				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga (lanjutan)					
Mata uang asing					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	09 Nov 2023	09 Mei 2024	1.539.700	1.473.269	1.486.066
RI0125	20 Des 2023	18 Jan 2024	1.539.700	1.475.895	1.478.714
RI0126	06 Des 2023	04 Jun 2024	1.539.700	1.433.947	1.439.840
RI1129	20 Des 2023	18 Jan 2024	923.820	896.902	898.616
FR0086	22 Jun 2023	15 Apr 2026	900.000	836.356	845.855
FR0086	21 Jun 2023	15 Apr 2026	900.000	810.493	819.698
FR0086	16 Des 2021	15 Apr 2026	815.000	770.448	779.199
FR0081	16 Des 2021	13 Jun 2025	791.500	769.460	771.389
RI0731	29 Nov 2023	29 Mei 2024	846.835	643.612	646.993
RI0827	29 Nov 2023	29 Mei 2024	692.865	641.695	645.066
RI0929	20 Des 2023	18 Jan 2024	615.880	551.706	552.760
RI0126	16 Jun 2023	18 Mar 2024	461.910	425.946	438.896
RI0124	02 Nov 2023	02 Jan 2024	292.543	297.651	300.454
RI0126	02 Nov 2023	02 Feb 2024	307.940	292.921	295.694
RI0229	30 Nov 2023	29 Feb 2024	292.543	276.355	277.765
RI0727	27 Okt 2023	29 Jan 2024	230.955	208.840	211.015
RI0125	27 Okt 2023	29 Jan 2024	200.161	189.761	191.737
RI0428	30 Nov 2023	29 Feb 2024	138.573	140.728	141.446
RI0727	30 Agu 2023	26 Feb 2024	76.985	67.957	69.331
RI0927	30 Agu 2023	26 Feb 2024	61.588	55.652	56.777
			13.168.198	12.259.594	12.347.311
Suku Berharga Syariah Negara					
INDOIS 27	21 Agu 2023	20 Feb 2024	423.418	396.764	405.192
INDOIS 25	30 Nov 2023	29 Feb 2024	207.860	195.144	196.140
INDOIS 26	08 Nov 2023	07 Feb 2024	184.764	173.319	174.791
INDOIS 24	30 Nov 2023	29 Feb 2024	153.970	146.808	147.557
INDOIS 28	30 Nov 2023	26 Feb 2024	92.382	84.514	86.222
INDOIS 24	30 Nov 2023	26 Feb 2024	61.587	55.943	57.074
			1.123.981	1.052.492	1.066.976
Obligasi Korporasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Tahun 2024	23 Okt 2023	23 Jan 2024	107.779	96.032	97.097
Tahun 2025	23 Okt 2023	23 Jan 2024	76.985	69.363	70.134
PT Pertamina (Persero)					
Tahun 2029	23 Okt 2023	23 Jan 2024	76.985	65.432	66.158
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)					
Tahun 2029	23 Okt 2023	23 Jan 2024	61.588	57.156	57.790
			323.337	287.983	291.179
Total			**20.563.516**	**18.943.159**	**19.079.458**

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2022				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
Pihak ketiga					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0088	08 Nov 2022	07 Feb 2023	250.000	213.388	215.176
FR0070	01 Des 2022	02 Mar 2023	50.000	49.742	49.999
			300.000	263.130	265.175
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0063	08 Mar 2021	15 Mei 2023	1.593.000	1.424.873	1.424.873
FR0063	07 Nov 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090	446.090
FR0095	28 Des 2022	02 Jan 2023	208.061	223.777	223.604
FR0090	26 Des 2022	09 Jan 2023	115.000	105.977	106.050
FR0093	01 Des 2022	03 Jan 2023	60.000	54.253	54.253
FR0070	01 Des 2022	02 Mar 2023	51.284	50.526	49.741
FR0093	13 Des 2022	13 Jan 2023	50.000	45.418	45.537
FR0092	07 Des 2022	06 Jan 2023	30.000	28.907	29.008
			2.607.345	2.379.821	2.379.156
Mata uang asing					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0086	16 Des 2021	15 Apr 2026	815.000	778.980	778.980
FR0091	21 Jun 2022	21 Jun 2023	900.000	778.466	778.466
FR0081	16 Des 2021	13 Jun 2025	791.500	777.980	777.980
RI0731	25 Feb 2022	17 Feb 2023	622.700	497.961	504.158
RI0727	25 Feb 2022	17 Feb 2023	467.025	421.385	426.629
RI0127	16 Nov 2022	13 Jan 2023	342.485	332.615	334.461
RI0727	29 Nov 2022	28 Feb 2023	311.350	288.835	290.080
RI0128	16 Des 2022	16 Mar 2023	311.350	272.509	273.073
RI0229	29 Nov 2022	28 Feb 2023	249.080	236.301	237.320
RI0126	16 Nov 2022	16 Feb 2023	233.512	223.168	224.535
RI0124	25 Feb 2022	17 Feb 2023	233.513	214.305	216.972
RI0423	25 Feb 2022	17 Feb 2023	233.513	204.619	207.166
RI0125	16 Nov 2022	16 Feb 2023	202.377	192.066	193.243
RI1030	25 Feb 2022	17 Feb 2023	155.675	143.955	145.747
RI1023	25 Feb 2022	17 Feb 2023	155.675	142.751	144.527
US TREASURY 0523	16 Des 2022	16 Mar 2023	108.973	105.956	106.166
RI0126	21 Nov 2022	21 Feb 2023	90.291	86.853	87.312
US TREASURY 0526	16 Des 2022	16 Mar 2023	77.837	71.772	71.914
RI0127	21 Nov 2022	21 Feb 2023	73.167	69.149	69.514
			6.375.023	5.839.626	5.868.243
Sukuk Berharga Syariah Negara					
INDOIS 25	16 Nov 2022	16 Feb 2023	264.647	253.678	255.232
INDOIS 27	16 Nov 2022	13 Jan 2023	249.080	236.775	238.090
INDOIS 27	21 Nov 2022	21 Feb 2023	202.378	187.643	188.634
INDOIS 24	16 Nov 2022	13 Jan 2023	186.810	183.257	184.274
INDOIS 26	23 Des 2022	23 Mar 2023	186.810	170.298	170.488
INDOIS 24	23 Des 2022	23 Mar 2023	124.540	113.353	113.479
INDOIS 25	23 Des 2022	23 Mar 2023	101.189	91.288	91.390
INDOIS 28	23 Des 2022	23 Mar 2023	93.405	84.552	84.646
INDOIS 24	23 Des 2022	23 Mar 2023	62.270	56.267	56.330
			1.471.129	1.377.111	1.382.563
Obligasi Korporasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Tahun 2025	29 Nov 2022	28 Feb 2023	82.508	75.976	76.303
Tahun 2026	29 Nov 2022	28 Feb 2023	31.135	26.039	26.152
			113.643	102.015	102.455
Total			**10.867.140**	**9.961.703**	**9.997.592**

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.052 dan Rp1.443 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	896.601	1.034.049
Pihak berelasi (Catatan 44)	1.316.647	1.630.725
Tahap II Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp372 dan Rp466 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	799.145	776.924
Pihak berelasi (Catatan 44)	459.835	480.561
Tahap III Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp204 dan Rp493 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.452.730	1.420.027
Pihak berelasi (Catatan 44)	1.065.535	1.075.928
Tahap IV Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp118 dan Rp272 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	285.333	2.110.455
Pihak berelasi (Catatan 44)	309.930	316.201
Obligasi Berkelanjutan III BRI		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp704 dan Rp1.471 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.616.903	2.136.693
Pihak berelasi (Catatan 44)	523.599	984
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI		
Tahap I Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.201 dan Rp8.126 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	2.031.414	4.274.286
Pihak berelasi (Catatan 44)	349.102	610.612

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI (lanjutan)		
Tahap II Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp7.273 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	5.506.549	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	489.677	-
MTN BRI Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.531 dan Rp3.719 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	4.994.194	4.996.281
LTN BRI Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.852 dan Rp148 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	48.564	52.184
LTN BRI Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp203 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	59.377	-
MTN II BRI Finance Tahun 2021		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp261 dan Rp354 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	186.644	186.489
Pihak berelasi (Catatan 44)	137.955	137.839
Obligasi I BRI Finance Tahun 2022		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.268 dan Rp1.277 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	338.969	425.001
Pihak berelasi (Catatan 44)	210.922	124.400
Obligasi II BRI Finance Tahun 2023		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.889 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022		
Pihak ketiga	415.962	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	57.067	-

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Berkelanjutan II PNM		
Tahap II Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp137 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	1.207.067
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	38.796
Obligasi Berkelanjutan III PNM		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp152 dan Rp491 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	598.848	388.681
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	209.828
Tahap II Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp110 dan Rp220 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	705.399	646.314
PIhak berelasi (Catatan 44)	57.991	116.966
Tahap III Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp164 dan Rp302 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	179.749	234.719
Pihak berelasi (Catatan 44)	14.987	14.979
Tahap IV Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp91 dan Rp454 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	281.912	818.551
Pihak berelasi (Catatan 44)	9.997	9.995
Tahap V Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp279 dan Rp631 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	458.448	473.096
Pihak berelasi (Catatan 44)	39.473	24.473

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Berkelanjutan IV PNM		
Tahap I Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.783 dan Rp4.172 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.979.241	1.976.383
Pihak berelasi (Catatan 44)	17.976	-
Obligasi Berkelanjutan IV PNM (lanjutan)		
Tahap II Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp966 dan Rp3.481 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	420.060	2.540.992
Pihak berelasi (Catatan 44)	165.408	299.597
Obligasi Berkelanjutan V PNM		
Tahap I Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp267 dan Rp2.779 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	115.733	987.248
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	9.973
MTN III PNM Venture Capital		
Pihak ketiga	339.900	-
Sukuk *Mudharabah* III PNM		
Tahun 2019		
Pihak ketiga	300.000	1.000.000
Sukuk *Mudharabah* IV PNM		
Tahun 2020		
Pihak ketiga	-	200.000
Tahun 2021		
Pihak ketiga	1.800.000	2.000.000
Sukuk *Mudharabah* V PNM		
Tahun 2022		
Pihak ketiga	466.000	492.500
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I		
Tahun 2021		
Pihak ketiga	801.000	842.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	41.000	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II		
Tahun 2023		
Pihak ketiga	1.441.274	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	280.626	-

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian		
Tahap II Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp72 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	1.118.213
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	644.974
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian		
Tahap I Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp49 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	69.951
Tahap II Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp50 dan Rp166 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	121.950	364.866
Pihak berelasi (Catatan 44)	19.992	79.968
Tahap III Tahun 2020		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp296 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	895.332
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	149.958
Tahap IV Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp96 dan Rp459 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	735.439	868.427
Pihak berelasi (Catatan 44)	204.005	74.964
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian		
Tahap I Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp499 dan Rp2.463 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	349.580	2.373.345
Pihak berelasi (Catatan 44)	227.903	604.425
Tahap II Tahun 2022		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp217 dan Rp1.805 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	199.243	1.083.732
Pihak berelasi (Catatan 44)	76.540	771.432

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian (lanjutan)		
Tahap III Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.712 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	1.622.766	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	315.803	-
Tahap IV Tahun 2023		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.364 dan RpNihil pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022		
Pihak ketiga	2.390.840	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	39.956	-
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian		
Tahap I Tahun 2020		
Pihak ketiga	-	49.000
Tahap II Tahun 2020		
Pihak ketiga	70.500	166.500
Pihak berelasi (Catatan 44)	10.000	17.000
Tahap III Tahun 2020		
Pihak ketiga	-	121.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	-	10.000
Tahap IV Tahun 2021		
Pihak ketiga	127.800	130.800
Pihak berelasi (Catatan 44)	38.000	35.000
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian		
Tahap I Tahun 2022		
Pihak ketiga	284.000	969.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	36.000	22.000
Tahap II Tahun 2022		
Pihak ketiga	115.100	992.000
Pihak berelasi (Catatan 44)	49.288	131.000
Tahap III Tahun 2023		
Pihak ketiga	533.000	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	72.000	-
Tahap IV Tahun 2023		
Pihak ketiga	215.040	-
Pihak berelasi (Catatan 44)	20.000	-
	41.942.421	48.064.684

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dolar Amerika Serikat		
Senior Unsecured Notes Due 2023 (*Global Bond* BRI) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.834 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	-	7.776.915
Senior Unsecured Notes Due 2024 (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.670 dan Rp13.588 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
Pihak ketiga	7.695.160	7.770.162
	7.695.160	15.547.077
Total	**49.637.581**	**63.611.761**

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp35.358 dan Rp56.168.

Manajemen BRI dan entitas anak telah melakukan pembayaran bunga dan obligasi sesuai ketentuan dan berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam penerbitan surat berharga di atas telah dipenuhi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 22 November 2016, Obligasi Berkelanjutan II BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp20.000.000 telah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-678/D.04/2016 tanggal 22 November 2016.

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:
- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:
- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:
- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan II BRI adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan II BRI tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri C, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri D, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II seri C, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp616.000, Rp964.000, Rp193.000, Rp477.000, Rp1.131.000, Rp1.743.500, Rp925.000, Rp980.500, Rp1.652.500 dan Rp1.837.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan III BRI

Pada tanggal 30 Oktober 2019, Obligasi Berkelanjutan III BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp20.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-159/D.04/2019 Tanggal 30 Oktober 2019.

Pada tanggal 7 November 2019, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp737.850 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.089.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.172.800 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan III BRI (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Februari 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BRI memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III BRI tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri B dengan nilai Rp737.850 dan Rp2.089.350 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 12 Juli 2022, Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp15.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-122/D.04/2022 Tanggal 12 Juli 2022.

Pada tanggal 20 Juli 2022, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,70% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2025.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2027.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 20 Oktober 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

c) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berwawasan Lingkungan I BRI Tahap I memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai Rp2.500.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

d) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

Pada tanggal 12 Juli 2022, Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI dengan jumlah pokok sebesar Rp15.000.000 telah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan S-122/D.04/2022 Tanggal 12 Juli 2022.

Pada tanggal 17 Oktober 2023, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp6.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.345.650 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp4.154.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2025.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2026.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 17 Januari 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 (lanjutan)

Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

e) *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022

Pada tanggal 24 November 2022, BRI menerbitkan *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,68% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2025.

Bunga *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Februari 2023. Pada saat diterbitkan, *Medium-Term Notes* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Tidak ada persyaratan penting dalam perjanjian Penerbitan *Medium-Term Note* Bank BRI Tahun 2022.

Penerimaan neto dari penerbitan *Medium-Term Note* BRI tersebut dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas Rupiah.

f) *Long-Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022

Pada tanggal 27 Desember 2022, BRI menerbitkan *Long-Term Notes* Bank BRI Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp52.332.

Bunga sebesar 0,55% per tahun dan Pokok *Long Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Februari 2023 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2036.

Pada saat diterbitkan, *Long-Term Notes* ini tidak dilakukan pemeringkatan dan tidak menggunakan Jasa Agen Pemantau.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

f) *Long-Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 (lanjutan)

Tidak ada persyaratan penting dalam perjanjian Penerbitan *Long-Term Notes* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022.

Penerimaan neto dari penerbitan *Long-Term Notes* BRI tersebut dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas Rupiah.

g) *Long-Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023

Pada tanggal 25 Oktober 2023, BRI menerbitkan *Long-Term Notes* Bank BRI II Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp59.485.

Bunga sebesar 0,55% per tahun dan Pokok *Long Term Notes* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Januari 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2037.

Pada saat diterbitkan, *Long-Term Notes* ini tidak dilakukan pemeringkatan dan tidak menggunakan Jasa Agen Pemantau.

Tidak ada persyaratan penting dalam perjanjian Penerbitan *Long-Term Notes* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023.

Penerimaan neto dari penerbitan *Long-Term Notes* BRI tersebut dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas Rupiah.

h) *Senior Unsecured Notes Due* 2023 (*Global Bond* BRI)

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% atau setara dengan ASD498.480.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Baa2 dan BBB-.

Senior Unsecured Notes Due 2023 (*Global Bond* BRI) tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 *Senior Unsecured Notes Due 2023* (*Global Bond* BRI) Tahun 2018 memperoleh peringkat Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

h) *Senior Unsecured Notes Due* 2023 (*Global Bond* BRI) (lanjutan)

Senior Unsecured Notes Due 2023 (*Global Bond* BRI) menggunakan Jasa *Paying Agent* dan *Trustee* The Bank Of New York Mellon.

Senior Unsecured Notes Due 2023 (*Global Bond* BRI) dengan nilai ASD500.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

i) *Senior Unsecured Notes Due* 2024 (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019)

Pada tanggal 28 Maret 2019, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2019 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tingkat bunga tetap 3,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,713% atau setara dengan ASD498.565.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2019.

Senior Unsecured Notes Due 2024 (*Sustainability Bond* BRI) tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, *Senior Unsecured Notes Due 2024* (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019) memperoleh peringkat BAA2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

Senior Unsecured Notes Due 2024 (*Sustainability Bond* BRI Tahun 2019) menggunakan Jasa *Paying Agent* dan *Trustee* The Bank Of New York Mellon.

j) MTN II BRI Finance Tahun 2021

Pada tanggal 17 September 2021, BRI Finance menerbitkan MTN II BRI Finance Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024 dengan tingkat suku bunga tetap 6,40% per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 17 Desember 2021. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAA. Penerbitan MTN ini tidak melalui penawaran umum.

Agen pemantau untuk penerbitan MTN adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BRI Finance telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (''KSEI'').

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

j) MTN II BRI Finance Tahun 2021 (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, MTN II BRI Finance Tahun 2021 memperoleh peringkat AA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI Finance tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing ratio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

k) Obligasi I BRI Finance Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp700.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-152/D.04/2022 tanggal 29 Juli 2022.

Pada tanggal 9 Agustus 2022, BRI Finance menerbitkan Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp700.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan tingkat suku bunga tetap 6,95% per tahun. Bunga Obligasi I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 9 November 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAA.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BRI Finance telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘‘KSEI‘‘).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 memperoleh peringkat AA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk ekpansi bisnis perusahaan, dalam hal ini adalah pembayaran pembiayaan baru.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing ratio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok Obligasi dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

l) Obligasi II BRI Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2022, Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-152/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Pada tanggal 11 Juli 2023, BRI Finance menerbitkan Obligasi II BRI Finance 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp197.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp303.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2026.

Bunga Obligasi I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 11 Oktober 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAA.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. BRI Finance telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘‘KSEI‘‘).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 memperoleh peringkat idAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk ekpansi bisnis perusahaan, dalam hal ini adalah ekspansi pembiayaan di segmen konsumer (multiguna).

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan menjaga rasio-rasio keuangan berada dalam batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2018.

m) Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-345/D.04/2014 tanggal 21 Juni 2017**.** Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018 adalah sebesar Rp2.500.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.254.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2021.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.246.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2023.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan II PNM memperoleh peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan II PNM memperoleh peringkat idAA (Double AA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.254.000 dan Rp1.246.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

m) Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:
1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal disetor.

n) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019 yang terdiri dari:
- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.401.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp599.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.401.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

n) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:
1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

o) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II tahun 2019 adalah sebesar Rp1.350.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:
- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp586.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp763.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat penerbitan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II tahun 2019 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp586.500 telah dilunasi oleh PNM pada saat jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:
1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

p) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap III tahun 2020 adalah sebesar Rp250.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp55.100, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp194.900, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp55.100 telah dilunasi oleh PNM pada saat jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

q) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap IV tahun 2020 adalah sebesar Rp1.733.800.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2021.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk obligasi Seri C.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal-tanggal Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp904.800 dan Rp537.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

r) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019. Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap V tahun 2021 adalah sebesar Rp666.200.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idA+.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp168.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

s) Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 30 November 2021, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021. Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.000.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2021 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

t) Obligasi Berkelanjutan IV PNM tahap II tahun 2022

Pada tanggal 22 April 2022, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM tahap II tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Obligasi Berkelanjutan IV tahap II tahun 2022 adalah sebesar Rp3.000.000.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2022 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp2.373.500, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal Rp2.373.500 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

u) Obligasi Berkelanjutan V PNM tahap I tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp884.000, tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal Rp884.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aset tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

v) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahun 2021 pada tanggal 8 Juli 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.000.000 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.158.000, nisbah sebesar 37,740% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000, nisbah sebesar 18,025% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah sebesar 13,080% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2026.

Pembayaran nisbah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Juli 2021.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 memperoleh peringkat $idAA_{(sy)}$ dari Pefindo.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 memperoleh peringkat $idAA+_{(sy)}$ dari Pefindo.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2022 untuk Sukuk Seri A dan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan.
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi perusahaan.
3. Melakukan akuisisi saham atau aset.
4. Mengubah bidang usaha perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah.
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material.
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nominal Rp1.158.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

w) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 17 Maret 2023. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.721.900 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 memperoleh peringkat $idAA_{(sy)}$ dari Pefindo.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 memperoleh peringkat $idAA+_{(sy)}$ dari Pefindo.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. PNM telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh Wali Amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan.
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi perusahaan.
3. Melakukan akuisisi saham atau aset.
4. Mengubah bidang usaha perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah.
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material.
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

x) Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap I : Nilai pokok sebesar Rp300.000 dengan nisbah sebesar 19,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.
- Tahun 2019 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp435.000 dengan nisbah sebesar 25,48% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
- Tahun 2019 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp65.000 dengan nisbah sebesar 3,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahun 2019 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp322.000 dengan nisbah sebesar 17,94% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp350.000 dengan nisbah sebesar 20,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan 24 (dua puluh empat) hari dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

x) Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 (lanjutan)

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2019 Seri E: Nilai pokok sebesar Rp100.000 dengan nisbah sebesar 6,00% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan 10 (sepuluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahap II Seri E: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan 25 (dua puluh lima) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahun 2019 Seri F: Nilai pokok sebesar Rp120.000 dengan nisbah sebesar 6,69% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri H: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
- Tahun 2021 Tahap II Seri F: Nilai pokok sebesar Rp208.000 dengan nisbah sebesar 11,59% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan 16 (enam belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk *Mudharabah* III dan Wali Amanat untuk penerbitan Sukuk *Mudharabah* III adalah Bank Syariah Mandiri. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan dan tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* III PT PNM Tahun 2019 memperoleh peringkat $idA_{(sy)}$ dari Pefindo.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* III PNM Tahun 2019 memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) $idAA+_{(sy)}$.

Sukuk *Mudharabah* III PNM Tahun 2019 Seri A, B, C, D, dan E dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp435.000, Rp65.000, Rp322.000, Rp350.000, dan Rp100.000 serta Tahap II Seri E, F dan H sebesar Rp50.000, Rp120.000 dan Rp50.000 dan Tahap II Tahun 2021 Seri F dengan nominal sebesar Rp208.000 telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

y) Sukuk Mudharabah IV PNM

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2020 Tahap I Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Tahun 2021 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp712.000 dengan nisbah sebesar 37,38% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.
- Tahun 2021 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp780.000 dengan nisbah sebesar 40,95% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2021 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023.
- Tahun 2021 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp308.000 dengan nisbah sebesar 16,17% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* IV memperoleh peringkat $idAA+_{(sy)}$) dari Pefindo.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

y) Sukuk Mudharabah IV PNM (lanjutan)

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk *Mudharabah* IV. Wali Amanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Indonesia dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA+ (Double A Plus). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan Wali Amanat dengan usaha entitas anak. Penerbitan sukuk tercatat di Bursa KSEI.

Sukuk *Mudharabah* IV PNM Tahun 2020 Tahap I Seri A dengan nilai nominal Rp200.000 dan Sukuk *Mudharabah* IV PNM Tahun 2021 Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp200.000 telah dilunasi masing-masing oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

z) Sukuk Mudharabah V PNM

PNM menerbitkan Sukuk *Mudharabah* V PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:
- Tahun 2022 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp216.000 dengan *nisbah* sebesar 45% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2024.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.500 dengan *nisbah* sebesar 39,375% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.
- Tahun 2022 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan bunga sebesar 48,75%, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2024.

Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* V memperoleh peringkat $idAA_{(sy)}$ dari Pefindo.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* V memperoleh peringkat $idAA_{(sy)}$ dari Pefindo.

Sukuk *Mudharabah* V PNM Tahun 2022 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp276.500, telah dilunasi oleh PNM pada tanggal jatuh temponya.

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk *Mudharabah* V. Wali Amanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) peringkat idAA+.

aa) Medium Term Notes III PNM Venture Capital

Pada tanggal 16 November 2022, Medium Term Notes III PNM Venture Capital dengan jumlah pokok sebesar Rp339.900 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-990/PM.21/2022.

PNM menerbitkan *Medium Term Notes* III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:
- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp189.900 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2026.
- Tahun 2022 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tahun) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2026.

Pada saat diterbitkan, Medium Term Notes III PNM Venture Capital memperoleh peringkat idA- dari Pefindo.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Medium Term Notes III PNM Venture Capital memperoleh peringkat idA- dari Pefindo.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ab) Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian

Pada tanggal 16 Maret 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp3.500.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-415/D.04/2017 tanggal 20 September 2017.

Pada tanggal 16 Maret 2018, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp3.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp450.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2019.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.050.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2021.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2017 Seri A, B dan C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp450.000, Rp1.050.000, dan Rp2.000.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. Pegadaian telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘‘KSEI‘‘).

ac) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian

Pada tanggal 13 Mei 2020, Obligasi Berkelanjutan IV tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-135/D.04/2020 tanggal 04 Mei 2020. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II tahun 2020 adalah sebesar Rp1.055.000. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III tahun 2020 adalah sebesar Rp2.420.000. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV tahun 2021 adalah sebesar Rp3.280.000.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp400.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp330.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp70.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 13 Agustus 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ac) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp330.000 dan Rp70.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.055.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp303.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp142.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 18 Oktober 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A, Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.055.000 dan Rp303.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 22 September 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp2.420.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.125.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 22 Desember 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.295.000 dan Rp1.125.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 6 April 2021, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp3.280.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.172.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.107.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 April 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 6 Juli 2021. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ac) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.172.500 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk. Pegadaian telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nilai pokok obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (''KSEI'').

ad) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian

Pada tanggal 26 April 2022, Obligasi Berkelanjutan V tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp3.029.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-67/D.04/2022 tanggal 19 April 2022. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II tahun 2022 adalah sebesar Rp1.877.000. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III tahun 2023 adalah sebesar Rp1.995.000.

Pada tanggal 26 April 2022, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp3.029.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.431.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp598.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,35% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 26 Juli 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp2.431.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 16 Agustus 2022, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp1.877.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.601.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,95% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp276.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 November 2022. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.601.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ad) Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian (lanjutan)

Pada tanggal 16 Juni 2023, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp1.995.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.595.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp400.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 September 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp2.433.160 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.205.135 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 04 September 2024.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp228.025 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Bunga Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

ae) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian

Pada tanggal 08 Juli 2020, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-135/D.04/2020 tanggal 04 Mei 2020. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Pegadaian tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp316.500. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Pegadaian tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp835.000. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Pegadaian tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp765.000.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp100.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp51.000 dengan bagi hasil sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp49.000 dengan bagi hasil sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2023.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 13 Agustus 2020. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ae) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp51.000 dan Rp49.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp316.500 dengan bagi hasil sebesar 6,75% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp103.000 dengan bagi hasil sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp80.500 dengan bagi hasil sebesar 7,95% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2025.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp316.500 dan Rp103.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Oktober 2020. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 memperoleh peringkat idAA dari Pefindo

Pada tanggal 22 September 2020, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp835.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp704.000 dengan bagi hasil sebesar 5,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp131.000 dengan bagi hasil sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp704.000 dan Rp131.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 22 Desember 2020. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 6 April 2021, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp765.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp599.200 dengan bagi hasil sebesar 4,85% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp165.800 dengan bagi hasil sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 April 2024.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2020 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp599.200 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

ae) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian (lanjutan)

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 6 Juli 2021. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2020 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

af) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian

Pada tanggal 26 April 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Pegadaian dengan jumlah pokok sebesar Rp991.000 telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-67/D.04/2022 tanggal 19 April 2022. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Pegadaian tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.123.000. Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Pegadaian tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp605.000.

Pada tanggal 26 April 2022, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp991.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp671.000 dengan bagi hasil sebesar 3,60% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 6 Mei 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp320.000 dengan bagi hasil sebesar 3,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 April 2025.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 26 Juli 2022. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp671.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 16 Agustus 2022, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp1.123.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp878.000 dengan bagi hasil sebesar 3,95% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp245.000 dengan bagi hasil sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2025.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 November 2022. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

af) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp878.000 telah dilunasi oleh Pegadaian pada tanggal jatuh temponya.

Pada tanggal 16 Juni 2023, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp605.000 sebagai berikut:

- Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan bagi hasil sebesar 3,95% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2024.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 September 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Pegadaian menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp235.040 sebagai berikut:

- Nilai pokok sebesar Rp235.040 dengan bagi hasil sebesar 5,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2026.

Bagi hasil atas Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan peringkat idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2023 memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.

Wali Amanat untuk penerbitan obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.589	15.596
Pinjaman lainnya	4.293	4.274
Pinjaman lainnya	30.494.075	21.635.785
	30.513.957	21.655.655
Mata uang asing		
Pinjaman *sustainability linked loan* setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	12.240.042	15.415.980
Pinjaman sindikasi *club loan* setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	4.600.226	4.641.098
Pinjaman dari BNP Paribas setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	173.416	299.122
Pinjaman lainnya	25.220.514	18.510.309
	42.234.198	38.866.509
	72.748.155	60.522.164
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
Pinjaman dari		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.287.085	7.805.029
Pusat Investasi Pemerintah	7.300.588	6.051.154
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.518.885	2.804.614
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	914.403	1.063.029
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	718.026	918.812
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	337.724	94.906
PT Danareksa Finance	25.000	-
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	947	1.365
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	110.127
	26.102.658	18.849.036
Total	**98.850.813**	**79.371.200**

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	20.340.495	12.487.103
> 1 bulan - 3 bulan	1.822.112	925.834
> 3 bulan - 1 tahun	5.877.585	3.726.208
> 1 tahun - 5 tahun	2.468.152	4.510.916
> 5 tahun	5.613	5.594
	30.513.957	21.655.655
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	5.551.192	704.408
> 1 bulan - 3 bulan	19.358.816	17.378.730
> 3 bulan - 1 tahun	-	3.510.990
> 1 tahun - 5 tahun	17.318.975	17.266.283
> 5 tahun	5.215	6.098
	42.234.198	38.866.509
	72.748.155	60.522.164
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	15.530.752	9.084.202
> 1 bulan - 3 bulan	420.371	277.398
> 3 bulan - 1 tahun	2.180.139	1.480.314
> 1 tahun - 5 tahun	7.956.760	7.991.522
> 5 tahun	14.636	15.600
	26.102.658	18.849.036
Total	**98.850.813**	**79.371.200**

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

Pinjaman lainnya

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia				
Lainnya		4.293		4.274
Lainnya				
PT Bank Central Asia Tbk		12.890.155		8.319.015
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		2.387.528		653.974
PT Bank BTPN Tbk		2.000.000		-
PT Bank Permata Tbk		1.504.000		883.333
PT Bank HSBC Indonesia		1.299.992		299.950
PT Bank DKI		1.228.127		2.395.009
PT Bank DKI - unit usaha syariah		750.000		750.000
PT Bank of India Indonesia Tbk		742.761		149.585
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		720.508		989.943
PT Bank Victoria International Tbk		662.222		518.160
Citibank N.A.		649.995		-
PT Bank CIMB Niaga Tbk		506.028		703.219
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		500.000		650.000
PT Bank SBI Indonesia		399.670		149.696
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta		391.215		377.032
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk		374.115		118.689
PT Bank Permata Tbk - unit usaha syariah		350.000		496.858
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		304.167		608.333
PT Bank CIMB Niaga Tbk - unit usaha syariah		300.000		200.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk		274.659		417.103
PT Bank Oke Indonesia Tbk		257.399		418.407
PT Bank Pan Indonesia Tbk		203.969		628.868
PT Bank of China		200.000		-
Bank Mizuho		200.000		-
PT Bank ICBC Indonesia		200.000		-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		198.911		256.315
PT Bank Resona Perdania		162.328		-
PT Bank BCA Syariah		152.446		68.311
PT Bank JTrust Indonesia Tbk		110.541		51.084
PT Bank NationalNobu Tbk		150.000		150.000
PT Bank QNB Indonesia Tbk		100.000		349.467
PT Bank Aladin Syariah Tbk		100.000		-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan		74.871		-
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		74.596		34.112
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		47.473		79.128
PT Bank Ina Perdana Tbk		13.662		23.363
Lembaga Pengelola Dana Bergulir		7.937		16.937
PT Bank Danamon Indonesia - unit usaha syariah		4.800		500.000
PT Bank Mega Syariah		-		128.222
PT Bank UOB Indonesia		-		249.991
Lainnya		-		1.681
		30.494.075		21.635.785
		30.498.368		21.640.059

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman lainnya (lanjutan)

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak Ketiga (lanjutan)				
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Standard Chartered Bank, Jakarta	392.186.984	6.038.503	195.868.180	3.049.178
MUFG Bank Ltd.	314.000.000	4.834.658		-
DBS Bank, Ltd.	200.000.000	3.079.400	225.000.000	3.502.688
The Bank of New York Mellon Corporation	150.000.000	2.309.550		-
OCBC Ltd.	115.000.000	1.770.655		-
United Overseas Bank Limited	100.000.000	1.539.700	225.000.000	3.502.688
Emirates NBD	86.284.991	1.328.530		-
CTBC Bank Co, Ltd.	86.263.883	1.328.205		-
Citibank N.A	50.000.000	769.850	75.000.000	1.167.563
Mashreq Bank	50.000.000	769.850		-
Wells Fargo Bank, N.A.	30.000.000	461.910	80.000.000	1.245.400
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	27.627.395	425.379	4.900.915	76.295
BNP Paribas	19.675.000	302.936	144.018.885	2.242.014
Bank Pembangunan Asia	338.702	5.215	391.714	6.098
JP Morgan Chase Bank N.A.	38.839	598	487.554	7.590
CoBank USA		-	75.000.000	1.167.563
Bank of America		-	80.000.000	1.245.400
PT Bank HSBC Indonesia		-	80.000.000	1.245.400
PT Bank Shinhan Indonesia		-	2.989.112	46.533
		24.964.939		18.504.410
Euro Eropa				
PT Bank HSBC Indonesia	15.000.000	255.575		-
JP Morgan SE		-	354.141	5.852
JP Morgan Chase Bank N.A.		-	1.171	20
		255.575		5.872
Pound Sterling Inggris				
JP Morgan Chase Bank N.A.		-	1.531	27
		-		27
		25.220.514		18.510.309
Total		**55.718.882**		**40.150.368**

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Pinjaman ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman sindikasi *club loan*

Pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilakukan penarikan untuk sisa fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* sebesar ASD300.000.000 (nilai penuh) yang difasilitasi oleh Citicorp International Limited (*agent*), sebagai berikut:

Fasilitas C sebesar ASD300.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025. Bank yang berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- China Development Bank, sebesar ASD150.000.000 (nilai penuh);
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD25.000.000 (nilai penuh);
- MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
- Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebesar ASD50.000.000 (nilai penuh);
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000 (nilai penuh); dan
- United Overseas Bank Limited, sebesar ASD5.000.000 (nilai penuh).

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

c) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECF) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh *Arianespace* Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:
- Fasilitas *Tranche Banque Publique d'Investissement* (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (nilai penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas *Tranche Hermes* senilai ASD9.901.308,77 (nilai penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

c) Pinjaman dari BNP Paribas (lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche* BPI, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (nilai penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche Hermes*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD660.087 (nilai penuh) sampai dengan jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

d) Pinjaman sindikasi *Sustainability Linked Loan*

Pada tanggal 30 Agustus 2022, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Sustainability-Linked Loan* dengan total pinjaman sebesar ASD1.000.000.000 (nilai penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh PT Bank HSBC Indonesia (*agent*), penarikan yang telah dilakukan terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga *Compounded* SOFR ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 15 September 2022 dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 September 2023. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - BNP Paribas, cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
   - DBS Bank Ltd, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
   - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
   - The Korea Development Bank, cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
   - The Korea Development Bank, cabang Tokyo, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
   - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
   - MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh);
   - Oversea-Chinese Banking Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh); dan
   - United Overseas Bank Limited, sebesar, ASD50.000.000 (nilai penuh).

b. Fasilitas B sebesar ASD300.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga *Compounded* SOFR ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 15 September 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2025. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
   - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
   - DBS Bank Ltd, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
   - The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
   - The Korea Development Bank, cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000 (nilai penuh);
   - The Korea Development Bank, cabang Tokyo, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
   - MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
   - Oversea-Chinese Banking Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
   - Standard Chartered Bank (Singapura) Limited, sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh); dan
   - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh).

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman sindikasi *Sustainability Linked Loan* (lanjutan)

c. Fasilitas C sebesar ASD500.000.000 (nilai penuh), dengan suku bunga *Compounded* SOFR ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 30 Desember 2022 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2026. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- BNP Paribas, cabang Singapura, sebesar ASD90.000.000 (nilai penuh);
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- DBS Bank Ltd, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- The Hongkong and Shanghai Banking Co., Ltd., sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- The Korea Development Bank, cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000 (nilai penuh);
- The Korea Development Bank, cabang Tokyo, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh);
- PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD80.000.000 (nilai penuh);
- MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- PT Bank OCBC NISP Tbk, sebesar ASD40.000.000 (nilai penuh);
- Standard Chartered Bank (Singapura) Limited, sebesar ASD80.000.000 (nilai penuh); dan
- United Overseas Bank Limited, sebesar ASD10.000.000 (nilai penuh).

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI telah memenuhi persyaratan penting, dalam perjanjian yang diterima.

Pinjaman Diterima Pegadaian

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 24 Juli 2020, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas IV Tahap I, II & III (Konvensional) dari Pusat Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut "PIP") dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas IV Tahap I, II & III (Syariah) dari PIP dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 28 Januari 2021, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas V Tahap I, II & III (Konvensional) dari PIP dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2021, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas V Tahap I dan II (Syariah) dari PIP dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2024.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas VI Tahap I (Konvensional) dari PIP dengan plafon sebesar Rp225.000 dengan suku bunga 3,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2024.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 23 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Fasilitas VI Tahap I (Syariah) dari PIP dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 3,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2024.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi Pemda Luwu Utara dari PIP dengan plafon sebesar Rp1.000 dengan suku bunga 2,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 29 (dua puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2025.

Pada tanggal 8 Desember 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas UMi PT SMI dari PIP dengan plafon sebesar Rp1.000 dengan suku bunga 2,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2023.

Persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian adalah Pegadaian wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) dan wajib menyerahkan daftar piutang lancar yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 1 (satu) bulan dengan nilai dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 11 Mei 2022, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") dengan masing-masing plafon sebesar Rp5.500.000 dan Rp6.500.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp1.250.000 dan Rp250.000 dengan suku bunga 6,50%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2024.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp100.000 dan Rp75.000 dengan suku bunga 7,75%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2024.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 4 (empat) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp350.000, Rp350.000, Rp450.000, dan Rp350.000 dengan suku bunga 5,75%. Keempat fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 18 (delapan belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2023.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 3 (tiga) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp500.000, Rp500.000, dan Rp400.000 dengan suku bunga 5,75%. Ketiga fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 14 (empat belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023.

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan 14 (empat belas) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan masing-masing plafon sebesar Rp400.000, Rp400.000, Rp300.000, Rp600.000, Rp550.000, Rp500.000, Rp450.000, Rp400.000, Rp400.000, Rp350.000, Rp400.000, Rp350.000, Rp300.000, dan Rp300.000 dengan suku bunga 5,75%. Seluruh fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 17 (tujuh belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 14 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 15 (lima belas) hari dan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2023.

Pada tanggal 28 Desember 2023 telah dilakukan penandatanganan penambahan plafon fasilitas jangka pendek Bank Mandiri dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. dari sebelumnya plafon sebesar Rp10.500.000 menjadi sebesar Rp12.500.000 sehingga total plafon dari Bank Mandiri sebesar Rp14.000.000 dengan rincian plafon KMK sebesar Rp1.500.000 dan plafon jangka pendek sebesar Rp12.500.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,50%. Jangka waktu terhitung sejak penandatanganan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total penggunaan fasilitas jangka pendek Bank Mandiri adalah sebesar Rp10.500.000 dengan suku bunga sebesar 5,98%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut:

- Jaminan piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar minimum 100% dari OSL pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan laporan piutang serta laporan omset dan hasil usaha setiap bulannya dan paling lambat telah diterima Bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Memelihara *Current Ratio* di atas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri, dan total nilai pinjaman gadai yang tergolong macet dan pinjaman non-gadai yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet (*Non-Performing Loan*) maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan.
- Menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 (seratus depalan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Menyampaikan laporan posisi jaminan fidusia (daftar Objek jaminan fidusia) setiap triwulan.
- Melaporkan kepada Bank, perubahan anggaran dasar, perubahan status perusahaan, perubahan susunan pengurus (Direksi) dan Dewan komisaris, pembagian dividen, dan memindahtangankan agunan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 13 April 2022, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank BNI") dengan masing-masing plafon sebesar Rp5.100.000 dan Rp1.000.000 dengan suku bunga 5,50%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 14 April 2023.

Pada tanggal 13 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan masing-masing plafon sebesar Rp750.000 dan Rp250.000 dengan suku bunga 7,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023.

Pada tanggal 15 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 15 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 28 (dua puluh delapan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2023.

Pada tanggal 15 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 29 (dua puluh sembilan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023.

Pada tanggal 12 Juli 2023 telah dilakukan penandatanganan fasilitas Bank BNI dibawahtangan dengan total plafon sebesar Rp5.100.000 dari total plafon sebesar Rp6.100.000. Adapun penurunan ini adalah penurunan plafon fasilitas KMK Promes dari sebesar Rp5.100.000 menjadi sebesar Rp4.100.000, sedangkan plafon KMK adalah tetap sebesar Rp1.000.000. Jangka waktu terhitung sejak penandatanganan sampai dengan tanggal 14 Januari 2024.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total penggunaan fasilitas KMK Promes Bank BNI adalah sebesar Rp3.200.000 dengan rincian sebagai berikut :
1. Total nominal Rp500.000 suku bunga sebesar 5,75%.
2. Total nominal Rp1.200.000 suku bunga 6,00%.
3. Total nominal Rp1.500.000 suku bunga 5,80%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut:
- Jaminan Piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada bank sebesar 100% dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan setiap kali terjadi perubahan terbaru atas dokumen-dokumen sebagai berikut:
  a. Akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
  b. Perizinan yang telah diperpanjang masa berlakunya.
- Dalam rangka pemantauan aktivitas usaha, Bank BNI diperkenankan untuk sewaktu-waktu melakukan peninjauan ke lokasi usaha dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- Menyampaikan secara rutin laporan keuangan (*home statement*) per triwulan sudah diterima bank paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Menyampaikan laporan keuangan *audited* yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 9 Februari 2022, Pegadaian telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Musyarakah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Bank BSI”) dengan masing-masing plafon sebesar Rp300.000 dan Rp800.000 dengan suku bunga 5,35%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2023.

Pada tanggal 9 Februari 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BSI dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2024.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 9 Februari 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BSI dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2023.

Pada tanggal 9 Februari 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BSI dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas *Line Facility* Bank BSI adalah sebesar Rp700.000 dengan nisbah setara 5,90%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut:

- Menggunakan fasilitas pembiayaan untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam akad pembiayaan.
- Mengizinkan petugas dan/atau kuasa/wakil Bank BSI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank BSI untuk sewaktu-waktu memeriksa pembukuan Pegadaian dan bukti-bukti yang terkait langsung dengan akad pembiayaan, oleh Bank BSI sepanjang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan ini, dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja terlebih dahulu dari Bank BSI dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Bank BSI.
- Pegadaian dan bukti-bukti yang terkait langsung dengan akad pembiayaan, oleh Bank BSI sepanjang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan ini, dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja terlebih dahulu dari Bank BSI dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Bank BSI.
- Selama pembiayaan ini masih berlangsung, Pegadaian harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank BSI paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam hal telah dilakukan sebagai berikut:
  a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham.
  b. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak lain.
  c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain.
  d. Mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
  e. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- Melakukan pembaharuan daftar piutang syariah yang dijaminkan:
  a. Menyerahkan rincian daftar piutang syariah posisi akhir bulan yang disampaikan triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan, sebagai dasar pembaharuan daftar piutang syariah tidak kurang dari 100% dari pokok yang terhutang.
  b. Menyerahkan surat pernyataan daftar piutang syariah yang menyatakan bahwa:
     1. Benar milik Pegadaian serta tidak ada pihak lain yang memiliki atau turut serta memiliki.
     2. Tidak sedang dan tidak akan dijaminkan kepada pihak ketiga.
     3. Tidak dalam keadaan sengketa serta tidak tersangkut suatu masalah Perdata atau keadaan yang dapat menimbulkan suatu sengketa dengan pihak ketiga.
     4. Tidak dalam keadaan sita jaminan.
  c. Pembaharuan sertifikat jaminan fidusia secara notaril atas agunan piutang dilakukan maksimal setiap 1 (satu) tahun sekali dengan nilai piutang lancar syariah minimal sebesar limit pembiayaan.
- Nasabah agar mengupayakan penggunaan fasilitas di atas 80% dari total fasilitas pembiayaan Bank BSI.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* 3 (tiga) bulanan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan *audited* paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah periode pelaporan.
- Menyampaikan laporan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih konsolidasi dan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih syariah yang disampaikan triwulanan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 13 April 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* (PBMM) dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "Bank BCA") dengan plafon sebesar Rp9.400.000 dengan suku bunga 5,79%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 April 2023.

Pada tanggal 17 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BCA dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024.

Pada tanggal 17 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan 4 (empat) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BCA dengan masing-masing plafon sebesar Rp350.000, Rp1.500.000, Rp2.000.000, dan Rp1.000.000 dengan suku bunga 5,80%. Keempat fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2023.

Pada tanggal 17 April 2023, Pegadaian telah mendapatkan 9 (sembilan) fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BCA dengan masing-masing plafon sebesar Rp450.000, Rp720.000, Rp200.000, Rp1.300.000, Rp300.000, Rp500.000, Rp480.000, Rp1.200.000, dan Rp1.100.000 dengan suku bunga 5,80%. Seluruh fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas PBMM Bank BCA adalah sebesar Rp10.000.000 dengan suku bunga sebesar 6,00%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:
- Agunan yang dijaminkan adalah sebesar 100% dari plafon.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk mendanai penyaluran pinjaman modal kerja Pegadaian.
- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku.
- Memberitahukan secara tertulis apabila terjadi perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanggal efektifnya terjadi perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung atas perubahan tersebut.
- Menyerahkan kepada Bank Daftar Piutang (AR) setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya periode laporan 6 (enam) bulan tersebut.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 10 Agustus 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Konvensional dan Pinjaman Transaksi Khusus *Musyarakah* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "Bank CIMB Niaga") dengan masing-masing plafon sebesar Rp550.000 dan Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2023.

Pada tanggal 6 Juni 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank CIMB Niaga dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023.

Pada tanggal 6 Juni 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank CIMB Niaga dengan plafon sebesar Rp450.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2023.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas Bank CIMB Niaga adalah sebesar Rp750.000 dengan suku bunga sebesar 5,95%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:
- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar 60% dari jumlah pembiayaan.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pegadaian.
- Memberikan informasi kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tindakan dilakukan, dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Pegadaian dan/atau Pemberi Agunan.
- Daftar tagihan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan harus diperbarui setiap 3 (tiga) bulan (batas waktu pengiriman daftar piutang maksimum adalah 45 (empat puluh lima) hari setiap akhir 3 (tiga) bulan).

PT Bank DKI

Pada tanggal 18 Mei 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit *Money Market Line* dari PT Bank DKI (selanjutnya disebut "Bank DKI") dengan plafon sebesar Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2023.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp750.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2023.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 28 (dua puluh delapan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2023.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank DKI unit usaha syariah dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Pada tanggal 17 Mei 2023 telah dilakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama pembiayaan modal kerja fasilitas Bank DKI dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH. di Jakarta plafon fasilitas kredit *Money Market Line* sebesar Rp200.000,- dan plafon fasilitas pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp750.000 dengan jangka waktu dari 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2024.

Sampai dengan Per 31 Desember 2023, total pemakaian fasilitas kredit *Money Market Line* sebesar Rp200.000 dengan suku bunga sebesar 5,98% serta pemakaian fasilitas pembiayaan *musyarakh* sebesar Rp750.000 dengan nisbah setara 5,98%.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Jaminan piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar minimum 60% dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan secara tertulis kepada Bank, perubahan pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan, status hukum dan lingkup usaha serta penerbitan obligasi/surat berharga/Pinjaman/pembiayaan dari Bank/lembaga keuangan lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian perubahan.
- Daftar piutang diikat dengan Fidusia Notarial dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat penandatanganan perpanjangan fasilitas kredit. Daftar piutang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.
- Menyampaikan Laporan *Non-Performing Loan* (NPL) setiap triwulan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir laporan.

PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 29 November 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut “Bank DKI – Unit Usaha Syariah”) dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 5,98%. Fasilitas ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2024.

Pada tanggal 30 November 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank DKI – Unit Usaha Syariah dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 5,98%. Fasilitas ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2024.

Pada tanggal 7 Desember 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank DKI – Unit Usaha Syariah dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 5,98%. Fasilitas ini memiliki tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2024.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Bank Muamalat”) dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,20%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 2 Juni 2023, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Muamalat dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023.

Pada tanggal 25 Juli 2023 telah dilakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama pembiayaan fasilitas Bank Mumalat plafon sebesar Rp200.000 dibawahtangan dengan jangka waktu dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 2 Juni 2024.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, tidak ada pemakaian fasilitas dari Bank Muamalat.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Menyalurkan pembiayaan yang dananya bersumber dari Bank Muamalat dengan prinsip syariah (penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah).
- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Muamalat atas hal-hal di bawah ini:
  a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya Perubahan Pemegang Saham, pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), Permodalan dan Nilai Nominal Saham.
  b. Memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank/lembaga pembiayaan lainnya.
- Melakukan pengikatan jaminan yang diberikan oleh *end user* kepada Pegadaian sesuai ketentuan Pegadaian yang berlaku dan diamankan dengan baik serta tidak dapat diagunkan ke pihak lain.
- Mengizinkan Bank Muamalat atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Pegadaian, serta pemeriksaan terhadap seluruh jaminan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pegadaian berdasarkan pemberitahuan dari Bank Muamalat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak ada balasan maka Pegadaian dianggap menyetujui pemberitahuan Bank Muamalat.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Permata (selanjutnya disebut "Bank Permata") dengan plafon sebesar Rp450.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2023.

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Permata unit usaha syariah dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 30 November 2022, Pegadaian telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari Bank Permata unit usaha syariah dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 5,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2023.

Pada tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan penandatanganan perubahan dan penambahan plafon fasilitas pembiayaan Bank Permata di hadapan Notaris Yumna Shabrina, SH. dari Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH. di Jakarta dengan total plafon sebesar Rp1.750.000 dengan jangka waktu sejak penandatanganan sampai dengan 25 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitas *Money Market Line* dari plafon sebesar Rp650.000 menjadi sebesar Rp1.150.000
2. Fasilitas Musyarakah *Mutanaqisah* (MMQ) dari plafon sebesar Rp400.000 menjadi sebesar Rp600.000
3. Fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* plafon sebesar Rp200.000 dialihkan ke fasilitas MMQ.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, pemakaian fasilitas adalah dari fasilitas MMQ dengan rincian nominal Rp300.000 nisbah 5,90% dan Rp50.000 nisbah 6,00%

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh Pegadaian antara lain, adalah sebagai berikut:

- Fidusia atas *Account Receivable* nasabah (A/R), dengan jumlah minimum sebesar 100% dari *outstanding* fasilitas.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai usaha pembiayaan modal kerja Pegadaian.
- Selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender, Pegadaian melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam hal menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas *leasing* dari pihak lain, perubahan anggaran dasar.
- Laporan A/R setiap triwulan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Pegadaian telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang diterima.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Plafon fasilitas *musyarakah* ini turun dari plafon sebesar Rp1.200.000 menjadi sebesar Rp800.000 dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2023.

Pada tanggal 30 Agustus 2023, telah dilakukan penandatanganan di bawah tangan Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* iB (Badan Usaha) antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank Maybank”) dan PT Pegadaian (“Pegadaian”).

Plafon fasilitas *musyarakah* ini adalah sebesar Rp800.000 dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 20 Agustus 2024.

Per 31 Desember 2023 suku bunga/*nisbah* yang didapatkan dari Bank Maybank adalah sebesar 5,75% dengan tenor selama maksimal 1 (satu) minggu. Penentuan besarnya suku bunga/*nisbah* dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Sampai dengan per 31 Desember 2023, total fasilitas Bank Maybank yang digunakan adalah sebesar Rp800.000, dengan suku bunga 6,01%.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut:
- Jaminan piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar 100% dari plafon pembiayaan dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan laporan keuangan *in-house* tiga bulanan untuk tahun buku berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak akhir periode pelaporan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk laporan keuangan kuartal I (pertama) sampai kuartal III (ketiga)
- Menyerahkan daftar jaminan Bank berupa Piutang Pembiayaan Nasabah dengan status lancar, yang disampaikan setiap tiga bulan/triwulanan, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah akhir periode pelaporan.
- Mengizinkan Bank sewaktu-waktu melakukan *Random Sampling* minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap Piutang Pembiayaan (*Account Receivables*) yang dijaminkan, dengan minimum *sampling* 100 (seratus) *end user* dengan nominal terbesar. Data *sampling* harus berbeda dengan data *sampling* yang digunakan sebelumnya dan dipilih oleh Bank.

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 22 September 2023, telah dilakukan penandatanganan kerjasama modal kerja secara dibawahtangan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Kredit antara PT Pegadaian dengan PT Bank BTPN Tbk tanggal 26 Agustus 2022. Dengan penambahan Plafon yang diberikan dari sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp1.500.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Agustus 2024.

Per 30 September 2023, suku bunga yang didapatkan dari Bank BTPN adalah sebesar 5,65% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/*nisbah* dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Sampai dengan per 31 Desember 2023, pemakaian fasilitas dari Bank BTPN total sebesar Rp1.500.000 dengan rincian suku bunga sebesar Rp200.000, suku bunga 5,80% dan Rp1.300.000 suku bunga 5,85%.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut:
- Segera setelah tersedia, namun dalam hal apa pun dalam 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku, laporan keuangan konsolidasian Peminjam yang diaudit untuk tahun buku tersebut.
- Setelah diminta oleh Pemberi Pinjaman dan dalam 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan, laporan keuangan konsolidasian Peminjam untuk triwulan tahun buku tersebut.
- Salinan dari semua dokumen yang diserahkan oleh Peminjam kepada para krediturnya secara umum (atau setiap kelasnya) pada saat yang sama dengan saat dikirimkannya dokumen-dokumen tersebut.
- Segera setelah mengetahuinya, rincian mengenai setiap litigasi, arbitrase atau proses administrasi yang ada saat ini, terancam akan diajukan atau sedang menunggu putusan terhadap Peminjam, yang apabila dijatuhi putusan yang merugikan, akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

Segera setelah diminta, informasi lain mengenai kondisi keuangan, bisnis, dan kegiatan usaha Peminjam sebagaimana mungkin diminta secara wajar oleh Pemberi Pinjaman.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 16 November 2021, PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya disebut "PNM") telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank BNI") dengan plafon sebesar Rp1.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2023.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp305.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2023.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2024.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2025.

Pada tanggal 14 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BNI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 14 September 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 20 Oktober 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BTN") dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 7,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 September 2024.

Pada tanggal 30 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 September 2024.

Pada tanggal 30 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 7,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 32 (tiga puluh dua) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 September 2024.

Pada tanggal 28 September 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2024.

Pada tanggal 28 September 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BTN dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dari BTN dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 23 Februari 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") dengan plafon sebesar Rp1.000.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2023.

Pada tanggal 2 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2024.

Pada tanggal 2 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Jangka Pendek dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 (lima) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp20.800 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp33.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp20.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp20.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp75.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2024.

Pada tanggal 9 Juni 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan plafon sebesar Rp31.200 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* (NPL) *Ratio* maksimal 3,5%.
- Entitas anak wajib menjaga rasio piutang *end-user* (kolektibilitas 1) terhadap baki debet minimal 100%.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik.
- Entitas anak wajib menyerahkan kualitas pembiayaan triwulan.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan triwulan.

Atas seluruh fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah dilakukan pelunasan awal pada tanggal 25 Agustus 2023.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan sebanyak 2 (dua) fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (selanjutnya disebut "SMF") dengan plafon masing-masing sebesar Rp25.671 dan Rp24.372 dengan suku bunga 6,15%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2025.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan masing-masing plafon sebesar Rp11.572 dan Rp10.070 dengan suku bunga 4,60%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2023.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Facility Line* dari SMF dengan plafon sebesar Rp16.166 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan plafon sebesar Rp18.946 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Facility Line* dari SMF dengan plafon sebesar Rp139.884 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan plafon sebesar Rp232.100 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Facility Line* dari SMF dengan plafon sebesar Rp69.475 dengan suku bunga 6,55%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2024.

Pada tanggal 21 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah Muqayyadah* dari SMF dengan plafon sebesar Rp67.604 dengan suku bunga 6,55%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain sebelum memperoleh persetujuan tertulis, PNM tidak diperkenankan untuk:

- Mengajukan permohonan pailit.
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan harta kekayaan Bank.
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 14 Agustus 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Pusat Investasi Pemerintah (selanjutnya disebut “PIP”) dengan plafon sebesar Rp647.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp600.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp600.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 4,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 20 April 2021, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp300.000 dan Rp200.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 (tiga puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 28 April 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp500.000 dan Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada tanggal 28 April 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp500.000 dan Rp500.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada tanggal 28 April 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp250.000 dan Rp250.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 33 (tiga puluh tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025.

Pada tanggal 2 November 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp450.000 dan Rp1.050.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2025.

Pada tanggal 2 November 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp350.000 dan Rp150.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Juli 2023, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp850.000 dan Rp360.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2026.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2023, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp850.000 dan Rp360.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 34 (tiga puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2026.

Pada tanggal 22 Desember 2023, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas Kredit Modal Kerja dari PIP dengan masing-masing plafon sebesar Rp560.000 dan Rp240.000 dengan suku bunga 4,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 December 2026.

Persyaratan-persyaratan penting *(covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk pelaku usaha Ultra Mikro (UMi).
- Perusahaan wajib menyerahkan daftar piutang lancar yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 1 (satu) bulan dengan nilai dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Pada tanggal 12 Maret 2021, PNM telah mendapatkan 3 (tiga) fasilitas Kredit Modal Kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan plafon sebesar Rp15.000, Rp4.000, dan Rp4.000 dengan suku bunga 6,75%. Ketiga fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 47 (empat puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2024.

Pada tanggal 12 Maret 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan plafon sebesar Rp15.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 47 (empat puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar.
- Perusahaan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 (enam) bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Asian Development Bank

Pada tanggal 25 Januari 2005, PNM telah mendapatkan fasilitas kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman dari Asian Development Bank dengan plafon sebesar ASD364.782 (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 0,35% per tahun. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 228 (dua ratus dua puluh delapan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2028.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 11 Juli 2022, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Installment Loan* 1 dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut “BCA”) dengan plafon sebesar Rp450.000 dan Rp50.000 dengan suku bunga 5,35%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 11 Juli 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* 2 dari BCA dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada tanggal 11 Juli 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* 2 dari BCA dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2023.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA dengan plafon sebesar Rp30.000 dengan suku bunga 9,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2025.

Pada tanggal 3 Oktober 2023 Addendum, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* 2 dari BCA dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2024.

Pada tanggal 3 Oktober 2023 Addendum, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* 2 dari BCA dengan plafon sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 6,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *Gearing Ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT BCA Syariah

Pada tanggal 3 Oktober 2019, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari PT BCA Syariah (selanjutnya disebut "BCA Syariah") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Mudharabah* dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp10.000 dan Rp30.000 dengan suku bunga 7,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 46 (empat puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya

Pada tanggal 24 Maret 2021, PNM telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas *Mudharabah* dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp9.100 dan Rp60.000 dengan suku bunga 7,00%. Kedua fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2025.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp5.000 dengan suku bunga 10,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 45 (empat puluh lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2025.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT BCA Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp10.900, dengan suku bunga 10,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 47 (empat puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2025.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari BCA Syariah dengan plafon sebesar Rp14.100 dengan suku bunga 10,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 57 (lima puluh tujuh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2027.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga tunggakan *Non-Perfoming Loan* maksimal 5%.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut "Bank BJB") dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2023.

Pada tanggal 22 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp750.000 dengan suku bunga 6,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2024.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank BJB dengan plafon sebesar Rp130.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan triwulan.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan *unaudited*.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY)

Pada tanggal 9 Juli 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya

Pada tanggal 16 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2024.

Pada tanggal 5 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya

Pada tanggal 21 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari BPD DIY dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Financing to Asset ratio* 65%
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 120%
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* (NPL) *Ratio* neto maksimal 5%.

PT Bank of China

Pada tanggal 6 Februari 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank of China dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,13%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga Utang Total Terkonsolidasi Terhadap Total Modal maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%.

Citibank N.A.

Pada tanggal 13 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Citibank N.A. dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 13 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Citibank N.A. dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,70%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2024.

Pada tanggal 13 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Citibank N.A. dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 2 (dua) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM adalah entitas anak wajib melaporkan DER, FAR, *Micro financing ratio*, NPL neto, *Current ratio*, ROA net, ROE neto, dan BOPO.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia - unit usaha syariah

Pada tanggal 20 Oktober 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Musyarakah dari PT Bank Danamon Indonesia - unit usaha syariah (selanjutnya disebut "Danamon Syariah") dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 8 (delapan) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2023.

Pada tanggal 21 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari Danamon Syariah dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 6,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 15 (lima belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2024.

Pada tanggal 21 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari Danamon Syariah dengan plafon sebesar Rp600.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 10 (sepuluh) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* (NPL) *Ratio* neto maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.

PT Bank DKI

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank DKI (selanjutnya disebut dengan "Bank DKI") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2023.

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2023.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp653.165 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp136.076 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp136.076 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2025.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2024.

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 19 November 2020, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp546.835 dengan suku bunga 7,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2024.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp113.924 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025.

Pada tanggal 2 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Sindikasi *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp113.924 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2025.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2024.

Pada tanggal 12 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari Bank DKI dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2024.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank DKI (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Perfoming Loan gross* maksimal 5%.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 6 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank HSBC Indonesia dengan plafon sebesar Rp1.000.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2024.

Persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM yaitu entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio pinjaman terhadap modal maksimum 10 (sepuluh) kali.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Pada Tanggal 10 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank JTrust") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2023.

Pada tanggal 27 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank JTrust dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2024.

Pada tanggal 10 April 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank JTrust dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.
- Entitas anak wajib menjaga *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Pada tanggal 19 Desember 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 November 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Maybank") dengan plafon sebesar Rp390.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2024.

Pada tanggal 29 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 29 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 29 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp110.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2024.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 (lima) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah line* dari Maybank dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 4 (empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Current Ratio* minimum 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan Gross* keseluruhan maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 8 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Muamalat") dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2023.

Pada tanggal 8 November 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah* dari Bank Muamalat dengan plafon sebesar Rp350.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9 (sembilan) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank National Nobu Tbk

Pada tanggal 1 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank NationalNobu Tbk dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 17 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant)* dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Bank Panin”) dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2025.

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari Bank Panin dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2024.

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari Bank Panin dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Mudharabah* dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dengan plafon sebesar Rp291.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:

- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank Permata Tbk (selanjutnya disebut ”Bank Permata”) dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Pada tanggal 21 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2023.

Pada tanggal 21 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2023.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp800.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp512.000 dengan suku bunga 6,75%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,2%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,4%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,4%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,1%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Musyarakah Mutanaqisah* dari Bank Permata dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,1%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* neto maksimal 5%.

PT Bank Resona Perdania

Pada tanggal 9 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank Resona Perdania dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* neto maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga Rasio lancar minimal 100%.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga *Debt-Service Coverage Ratio* (DSCR) maksimal 100%.

PT Bank SBI Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas PRK *on demand* dari PT Bank SBI Indonesia (selanjutnya disebut "Bank SBI") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2024.

Pada tanggal 16 Desember 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas PRK *on demand* dari Bank SBI dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* neto maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.
- Entitas anak wajib menjaga *Micro Financing Asset* minimal 50%.
- Entitas anak wajib menjaga *Interest Coverage Ratio* minimal 1,1 (satu koma satu) kali.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Shinhan Indonesia

Pada tanggal 21 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Shinhan Indonesia dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* net maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga rasio cakupan bunga 1,00.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Pada tanggal 28 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (selanjutnya disebut "Bank Sulselbar") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025.

Pada tanggal 28 September 2021, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Sulselbar dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *current ratio* maksimal 100%.
- Entitas anak wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga/memaksimalkan *Return on Assets* (ROA).
- Entitas anak wajib menjaga/memaksimalkan *Return on Equity* (ROE).

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 20 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut "Bank Victoria") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2023.

Pada tanggal 20 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Money Market Line* dari Bank Victoria dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 21 September 2023.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Victoria dengan plafon sebesar Rp10.000 dengan suku bunga 10,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2025.

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Victoria dengan plafon sebesar Rp10.000 dengan suku bunga 10,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2025.

Persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM adalah entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal tidak lebih dari 5%.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank CCB Indonesia") dengan plafon sebesar Rp270.000. Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.

Pada tanggal 30 Mei 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp315.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2024.

Pada tanggal 4 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp215.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2024.

Pada tanggal 23 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp195.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

Pada tanggal 23 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp45.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2024.

Pada tanggal 4 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank CCB Indonesia dengan plafon sebesar Rp315.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Collateral Coverage Ratio* minimal 100%.
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 8 (delapan) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 3%.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank of India Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank of India") dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Pada tanggal 26 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari Bank of India dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,05%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2024.

Pada tanggal 26 Juni 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari Bank of India dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 1,2 (satu koma dua) kali.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Working Capital Executing* dari PT Bank IBK Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank IBK") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Pada tanggal 30 Mei 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Working Capital Executing* dari Bank IBK dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Asset Ratio* minimum 65%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Micro Financing* Ratio 50%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Current Ratio* minimum 120%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas nilai *Non-Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Oke") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2025.

Pada tanggal 1 April 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari Bank Oke dengan plafon sebesar Rp150.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio piutang lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% terhadap *gross* piutang.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada tanggal 19 Desember 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas *Term Loan* dari PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank QNB") dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. Telah dilunasi sesuai dengan jatuh temponya.

Pada tanggal 7 November 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Revolving Credit Facility* dari Bank QNB dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 2 (dua) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2024.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut "Bank Kalsel") dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 11,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 60 (enam puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2025.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp10.000 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 59 (lima puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2027.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp40.000 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 59 (lima puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2027.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp14.000 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 59 (lima puluh sembilan) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2027.

Pada tanggal 3 Juni 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Kalsel dengan plafon sebesar Rp10.770 dengan suku bunga 10,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 31 (tiga puluh satu) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan Ratio* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga *Current Ratio* minimal 150%.
- Entitas anak wajib menjaga Solvabilitas minimal 200%.
- Entitas anak wajib menjaga *Profit Margin* lebih besar dari suku bunga kredit.

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Pada tanggal 13 December 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas *Al Musyarakah* dari PT Bank Aladin Syariah Indonesia dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Current Ratio minimal 120%.*
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Debt to equity ratio* maksimal 10X
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio *Non Performing Loan Ratio* Maksimal 5%.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Pada tanggal 24 Oktober 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari PT Bank ICBC Indonesia dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Financing to Total Asset* minimal *40%*.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Micro Financing Ratio 50%*.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Capital* minimal 10%.
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio *Non Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 20 Maret 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Modal Kerja dari Bank Mizuho Indonesia dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan *Current Ratio* minimal 1.2x
- Entitas anak wajib menjaga kualitas rasio keuangan DER maksimal 10x.

PT Bank Hibank Indonesia (sebelumnya PT Bank Mayora) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 11 Desember 2015, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mayora dengan plafon sebesar Rp3.000 dengan suku bunga 13,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 120 (seratus dua puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan Ratio (NPL) neto maksimal 8%.
- Entitas anak wajib menyampaikan laporan keuangan tiap akhir tahun.
- Entitas anak wajib membuka rekening pada bank.
- Entitas anak wajib memelihara pembukuan dan catatan mengenai usaha bank.
- Entitas anak wajib mengizinkan pekerja atau wakil bank sewaktu-waktu untuk memeriksa usaha bank.
- Entitas anak wajib mengasuransikan barang yang dijaminkan oleh bank.

PT Bank CIMB Niaga - Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 25 Maret 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank CIMB Niaga - Unit Usaha Syariah dengan plafon sebesar Rp6.000 dengan suku bunga 3,40%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 23 (dua puluh tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Financing Ratio (NPF) maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga tingkat kesehatan perseroan minimal kriteria sehat.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (PNM) (lanjutan)

PT Danareksa Finance (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 3 Januari 2023, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Danareksa Finance (selanjutnya disebut "Danareksa Finance") dengan plafon sebesar Rp25.000 dengan suku bunga 9,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 11 (sebelas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga total debt atau equity ratio di bawah 3,5 (tiga koma lima) kali.
- Entitas anak wajib menjaga EBITDA atau Interest Expense Ratio di atas 2 (dua) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Financing Ratio (NPF) maksimal 5%.
- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimal 10 (sepuluh) kali.

PT Bank Ina Perdana Tbk

Pada tanggal 28 Februari 2022, PNM telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Ina Perdana Tbk dengan plafon sebesar Rp30.000 dengan suku bunga 10,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan Audited setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode laporan berakhir.
- Entitas anak wajib menyerahkan laporan keuangan internal per 3 (tiga) bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode.
- Entitas anak wajib menjaga sinking fund 2 (dua) kali angsuran.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Permodalan Nasional Madani (PNM) telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang diterima.

Pinjaman Diterima Bank Raya

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank Raya telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk penyaluran KPR Sejahtera bagi masyarakat dengan berpenghasilan rendah dengan plafon sebesar Rp17.319 dengan suku bunga 4,45%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 184 (seratus delapan puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2036.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh PNM antara lain adalah sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan pailit.
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan harta kekayaan Bank.
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari PT Bank BTPN Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank BTPN") dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp134.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp70.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Loan On Note* dari Bank BTPN dengan plafon sebesar Rp96.000.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak melebihi rasio 8,5 (delapan koma lima) kali.
- Entitas anak wajib menjaga *Non-Performing Loan* (NPL) *Ratio* di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

MUFG Bank, Ltd

Pada tanggal 8 Agustus 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Pendek tanpa komitmen dari MUFG Bank, Ltd dengan plafon sebesar ASD60.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 6,14%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 9 (sembilan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Debt to Equity Ratio tidak melebihi rasio 8,5 (delapan koma lima) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Credit Line* dari PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "Bank BCA") dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,30%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 31 (tiga puluh satu) hari dan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2023.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank BCA dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2024.

Pada tanggal 11 Oktober 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Installment Loan* dari Bank BCA dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 6 Agustus 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Credit Line* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,00% - 6,45%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp270.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024.

Pada tanggal 6 Desember 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp90.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2024.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp90.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2024.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Demand Loan* dari PT Bank Victoria International Tbk dengan plafon sebesar Rp50.000 dengan suku bunga 6,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimum sebesar 8 (delapan) kali.
- Entitas anak wajib menajaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio diatas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 21 Januari 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Committed* Kredit Modal Kerja dari PT Bank HSBC Indonesia (selanjutnya disebut "Bank HSBC") dengan plafon sebesar Rp300.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 12 April 2023.

Pada tanggal 12 April 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Corporate Facility Agreement* dari Bank HSBC dengan plafon sebesar Rp300.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Gearing Ratio maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menajga Non-Performing Loan (NPL) Ratio maksimal 5%.

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 26 Desember 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF) dari PT Bank UOB Indonesia dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak wajib menjaga Debt to Equity Ratio maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak wajib menjaga Non-Performing Loan (NPL) Ratio maksimal 5%.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 27 Januari 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Comitted Credit Line* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,50% - 7,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio pinjaman terhadap modal maksimum 7 (tujuh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga rasio *Non-Performing Financing* (NPF) maksimum 5%.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Desember 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Credit Line* dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Maybank") dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2025.

Pada tanggal 1 September 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted* Kredit Modal Kerja dari Bank Maybank dengan plafon sebesar Rp400.000 dengan suku bunga 7,20%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2026.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenant*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *Gearing Ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Juni 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8 (delapan) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Pada tanggal 16 November 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Working Capital Executing* dari PT Bank IBK Indonesia Tbk dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,25%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 5%.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 21 Desember 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Berjangka dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank Danamon") dengan plafon sebesar Rp100.000 dengan suku bunga 6,10%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 30 hari dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2023.

Pada tanggal 21 Desember 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari Bank Danamon dengan plafon sebesar Rp900.000 dengan suku bunga 6,65%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 7%.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Pihak Berelasi)

Pada tanggal 24 Mei 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Credit Line* dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan plafon sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 6,50%-6,75%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, fasilitas pinjaman BRI Multifinance masih tersedia Rp200.000.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimal 5%.

CTBC Bank Co. Ltd.

Pada tanggal 5 Juli 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Credit Line* dari CTBC Bank Co. Ltd. dengan plafon sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,15%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2026.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8,5 kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

PT Bank Mandiri (Persero) (Pihak Berelasi) Tbk

Pada tanggal 10 Juli 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas *Uncomitted Credit Line* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Bank Mandiri") dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,75%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, fasilitas pinjaman BRI Multifinance masih tersedia Rp500.000.

Pada tanggal 23 November 2020, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 8,00%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2024.

Pada tanggal 7 Juli 2021, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp250.000 dengan suku bunga 6,50%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 November 2024.

Pada tanggal 16 Maret 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,25 - 6,35%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Pada tanggal 2 Agustus 2022, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,50 - 6,90%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2024.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) (lanjutan)

Pada tanggal 8 Maret 2023, BRI Multifinance telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri dengan plafon sebesar Rp500.000 dengan suku bunga 6,95%. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2025.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian kredit yang diperoleh BRI Multifinance antara lain adalah sebagai berikut:
- Entitas anak diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali.
- Entitas anak diwajibkan untuk mempertahankan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5%.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI Multifinance telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang diterima.

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
Garansi yang diterbitkan	2.990.195	3.341.794
Fasilitas kredit yang belum ditarik	1.225.100	1.393.074
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	29.082	202.884
Mata uang asing		
Garansi yang diterbitkan	1.824.001	1.121.139
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	41.499	340.248
Fasilitas kredit yang belum ditarik	7.891	59.204
Total	**6.117.768**	**6.458.343**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (di luar fasilitas kredit yang belum ditarik):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Garansi yang diterbitkan		28.646.881		29.244.037
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.011.622		1.317.462
		29.658.503		30.561.499
Mata uang asing				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	845.182.743	13.013.279	756.287.351	11.773.503
Euro Eropa	52.468.464	893.974	62.685.706	1.039.437
Dolar Singapura	2.120.000	24.754	1.950.000	22.606
Yen Jepang	78.741.216	8.573	986.141.173	107.371
Ringgit Malaysia	41.319.804	138.636	54.016.500	190.876
Dolar Hongkong		-	38.551.400	76.970
		14.079.216		13.210.763
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	87.738.087	1.350.903	236.779.396	3.686.063
Euro Eropa	33.329.859	567.885	79.491.351	1.318.103
Renminbi	129.211.733	280.397	467.867.907	1.047.514
Yen Jepang	112.235.500	12.220	117.655.254	13.861
Pound Sterling Inggris		-	181.829	3.416
Dolar Singapura	409.439	4.781	312.465	3.622
Malaysian Ringgit	27.840	93		-
		2.216.279		6.072.579
		16.295.495		19.283.342
		45.953.998		49.844.841
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Rupiah				
Garansi yang diterbitkan		13.065.353		18.552.065
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.216.989		1.256.668
		14.282.342		19.808.733
Mata uang asing				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	630.194.774	9.703.109	839.463.479	13.068.348
Yen Jepang	2.846.332.038	309.909	4.143.224.059	488.113
Won Korea Selatan	6.682.601.241	79.389		-
Euro Eropa	532.192	9.068	15.778.583	261.636
Ringgit Malaysia		-	8.500.000	30.036
		10.101.475		13.848.133

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (di luar fasilitas kredit yang belum ditarik) (lanjutan):

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (nilai penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)				
Mata uang asing (lanjutan)				
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	439.602.923	6.768.566	279.153.129	4.345.716
Euro Eropa	9.860.486	168.006	34.688.694	575.198
Yen Jepang	579.192.803	63.062	541.503.453	63.795
Franc Swiss	80.288	1.469		-
Renmibi	361.481	784		-
Pound Sterling Inggris	23.100	453	591.751	11.117
Dolar Singapura		-	1.391.667	16.133
		7.002.340		5.011.959
		17.103.815		18.860.092
		31.386.157		38.668.825
Total		77.340.155		88.513.666
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(4.884.777)		(5.006.065)
Bersih		**72.455.378**		**83.507.601**

c) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lancar	204.493.512	174.180.091
Dalam perhatian khusus	1.293.884	522.513
Kurang lancar	51.774	39.329
Diragukan	30.568	46.322
Macet	60.833	15.474
Total	205.930.571	174.803.729
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.117.768)	(6.458.343)
Bersih	**199.812.803**	**168.345.386**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
L/C yang tidak dapat dibatalkan				
Nilai tercatat awal	**12.410.787**	**1.247.881**	**-**	**13.658.668**
Pengalihan ke				
Stage 1	618.137	(618.137)	-	-
Stage 2	(1.144)	1.144	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2.151.326)	(480.440)	-	(2.631.766)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	10.146.607	554.295	2.091	10.702.993
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(9.665.885)	(563.523)	-	(10.229.408)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(53.697)	440	-	(53.257)
Nilai tercatat akhir	**11.303.479**	**141.660**	**2.091**	**11.447.230**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
L/C yang tidak dapat dibatalkan				
Nilai tercatat awal	9.677.550	10.094	153	9.687.797
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.921.778)	2.064.851	-	143.073
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	12.138.336	513.151	-	12.651.487
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(7.454.600)	(1.360.440)	(153)	(8.815.193)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(28.721)	20.225	-	(8.496)
Nilai tercatat akhir	**12.410.787**	**1.247.881**	**-**	**13.658.668**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
L/C yang tidak dapat dibatalkan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	**53.122**	**490.010**	**-**	**543.132**
Pengalihan ke				
Stage 1	134.157	(134.157)	-	-
Stage 2	(1)	1	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(20.120)	(124.715)	-	(144.835)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	25.018	32.358	2.091	59.467
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(166.412)	(220.768)	-	(387.180)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(4)	1	-	(3)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**25.760**	**42.730**	**2.091**	**70.581**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
L/C yang tidak dapat dibatalkan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	72.098	691.174	153	763.425
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(47.409)	15.456	-	(31.953)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	94.231	202.771	-	297.002
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(65.797)	(419.393)	(153)	(485.343)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1)	2	-	1
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**53.122**	**490.010**	**-**	**543.132**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Garansi yang diterbitkan				
Nilai tercatat awal	**69.738.900**	**5.116.098**	**-**	**74.854.998**
Pengalihan ke				
Stage 1	76.231	(76.231)	-	-
Stage 2	(1.904.391)	1.904.391	-	-
Stage 3	(9.968)	(11.387)	21.355	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	49.461	88.650	-	138.111
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	43.995.410	2.191.578	195	46.187.183
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(51.304.879)	(4.040.515)	-	(55.345.394)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	81.627	(23.600)	-	58.027
Nilai tercatat akhir	**60.722.391**	**5.148.984**	**21.550**	**65.892.925**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Garansi yang diterbitkan				
Nilai tercatat awal	51.761.062	8.184	83.365	51.852.611
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	(868)	(868)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	69.323.928	5.116.097	-	74.440.025
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(51.347.987)	(8.183)	(82.497)	(51.438.667)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.897	-	-	1.897
Nilai tercatat akhir	**69.738.900**	**5.116.098**	**-**	**74.854.998**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Bank Garansi yang diterbitkan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	**1.272.632**	**3.190.301**	**-**	**4.462.933**
Pengalihan ke				
Stage 1	28.379	(28.379)	-	-
Stage 2	(2.317)	2.317	-	-
Stage 3	(16)	(2.762)	2.778	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(270.692)	1.740.509	11.277	1.481.094
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	556.886	1.552.582	195	2.109.663
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(808.854)	(2.430.995)	-	(3.239.849)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	5	350	-	355
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**776.023**	**4.023.923**	**14.250**	**4.814.196**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Bank Garansi yang diterbitkan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	622.732	2.260.233	82.957	2.965.922
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	260	-	(459)	(199)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	1.272.370	3.190.301	-	4.462.671
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(622.469)	(2.260.233)	(82.498)	(2.965.200)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(261)	-	-	(261)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**1.272.632**	**3.190.301**	**-**	**4.462.933**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Fasilitas kredit yang belum ditarik				
Nilai tercatat awal	**85.704.365**	**476.350**	**109.348**	**86.290.063**
Pengalihan ke				
Stage 1	997.604	(981.421)	(16.183)	-
Stage 2	(456.310)	464.852	(8.542)	-
Stage 3	(229.962)	(137.843)	367.805	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	5.084.318	530.277	(266.729)	5.347.866
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	46.105.345	3.861.346	21.059	49.987.750
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(11.446.815)	(1.423.817)	(197.693)	(13.068.325)
Penghapusbukuan	(3.714)	(8.929)	(9.065)	(21.708)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	54.770	-	-	54.770
Nilai tercatat akhir	**125.809.601**	**2.780.815**	**-**	**128.590.416**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1-** **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3-** **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Fasilitas kredit yang belum ditarik				
Nilai tercatat awal	125.007.122	15.073.824	161.360	140.242.306
Pengalihan ke				
Stage 1	2.299.967	(2.158.820)	(141.147)	-
Stage 2	(267.035)	269.370	(2.335)	-
Stage 3	(99.561)	(21.342)	120.903	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	(24.346.829)	(123.464)	(70.662)	(24.540.955)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	37.120.613	2.711.217	182.333	40.014.163
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(54.603.173)	(15.273.219)	(133.808)	(70.010.200)
Penghapusbukuan	(46)	(1.216)	(7.296)	(8.558)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	593.307	-	-	593.307
Nilai tercatat akhir	**85.704.365**	**476.350**	**109.348**	**86.290.063**

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Fasilitas kredit yang belum ditarik				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	302.788	1.135.992	13.498	1.452.278
Pengalihan ke				
Stage 1	52.184	(52.141)	(43)	-
Stage 2	(2.678)	2.815	(137)	-
Stage 3	(1.321)	(10.985)	12.306	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan Kerugian	59.497	51.087	(12.714)	97.870
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	103.715	10.173	-	113.888
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(186.539)	(241.729)	(3.844)	(432.112)
Penghapusbukuan	(3.714)	(8.929)	(9.066)	(21.709)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	22.776	-	-	22.776
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**346.708**	**886.283**	**-**	**1.232.991**

	31 Desember 2022			
	***Stage* 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	***Stage* 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk**	***Stage* 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk**	**Total**
Fasilitas kredit yang belum ditarik				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	843.872	2.413.109	13.940	3.270.921
Pengalihan ke				
Stage 1	61.578	(61.426)	(152)	-
Stage 2	(6.157)	6.705	(548)	-
Stage 3	(2.284)	(2.233)	4.517	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(572.847)	10.971	7.341	(554.535)
Komitmen dan kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	182.870	241.100	138	424.108
Komitmen dan kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(191.219)	(1.494.037)	(4.442)	(1.689.698)
Penghapusbukuan	(46)	(1.216)	(7.296)	(8.558)
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(12.979)	23.019	-	10.040
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	**302.788**	**1.135.992**	**13.498**	**1.452.278**

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara kolektif dan individual dengan menggunakan bukti objektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah memadai.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja (Catatan 42)	13.111.142	10.898.392
Cadangan Bonus dan Insentif	8.496.353	8.936.362
Cadangan Tunjangan Hari Raya	1.207.929	834.878
Cadangan pekerja kontrak	244.200	626.855
Total	**23.059.624**	**21.296.487**

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja meliputi program pensiun imbalan pasti, program pemutusan hubungan kerja, program masa persiapan pensiun dan program imbalan jangka panjang lain (Program penghargaan tanda jasa, cuti besar, BPJS kesehatan pasca kerja dan manfaat lain dana manfaat tambahan) sesuai dengan kebijakan BRI dan entitas anak yang dihitung sesuai dengan perhitungan aktuaria independen.

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Liabilitas manfaat polis masa depan	9.255.256	7.774.936
Liabilitas kontrak investasi	3.286.965	3.742.547
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.634.906	2.236.037
Estimasi liabilitas klaim	2.073.134	1.705.268
Utang akrual	1.141.169	1.482.067
Utang bunga	1.479.174	1.418.172
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 45b)	1.361.894	1.634.654
Liabilitas sewa	542.630	347.016
Utang reasuransi	317.014	423.494
Liabilitas kartu kredit	278.797	125.857
Pendapatan diterima di muka	170.130	149.159
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu	82.201	90.057
Cadangan pajak hadiah simpedes	15.691	16.790
Setoran jaminan	12.345	11.867
Lain-lain	5.773.478	4.862.302
	28.424.784	26.020.223
Pihak ketiga		
Mata uang asing		
Term deposit valas devisa hasil ekspor (TD Valas DHE) Bank Indonesia	5.839.397	-
Utang bunga	398.793	481.503
Pendapatan diterima di muka	416.639	261.018
Liabilitas sewa	108.611	130.830
Lain-lain	1.476.393	978.306
	8.239.833	1.851.657
Total	**36.664.617**	**27.871.880**

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pihak Ketiga		
Rupiah		
Obligasi Subordinasi IV	265.120	-
Obligasi Subordinasi III	-	138.893
	265.120	138.893
Pihak Berelasi (Catatan 44)		
Rupiah		
Obligasi Subordinasi IV	229.507	-
Pinjaman *two-step loan*	2.056	2.374
Obligasi Subordinasi III	-	360.721
	231.563	363.095
Total	**496.683**	**501.988**

a. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari *Asian Development Bank* (ADB), *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *United States Agency for International Development* (USAID) dan *Islamic Development Bank* (IDB). Tingkat suku bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,28% dan 2,15% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

b. Obligasi Subordinasi III Tahun 2018

Pada tanggal 26 Juni 2018, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dibayarkan 3 (tiga) bulanan sejak tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 ini mendapat peringkat AA dari Pefindo.

Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

c. Obligasi Subordinasi IV Tahun 2023

Pada tanggal 6 Juli 2023, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2028. Bunga Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 6 Juli 2023. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 ini mendapat peringkat AA dari Pefindo.

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

c. Obligasi Subordinasi IV Tahun 2023 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Subordinasi IV tahun 2023 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

Obligasi Subordinasi IV tahun 2023 tidak dijamin dengan jaminan apapun. Adapun persyaratan-persyaratan penting (*covenants*) adalah sebagai berikut:

c. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.
d. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas EMITEN kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
> 3 bulan – 1 tahun	-	499.614
> 1 tahun – 5 tahun	496.683	2.374
Total	**496.683**	**501.988**

30. OPSI SAHAM

Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan motivasi bagi talent terbaik, Direksi BRI memutuskan untuk memberikan program kepemilikan saham bagi pekerja dalam bentuk Employee Stock Option Plan (ESOP)

Sesuai surat Direksi No. B.0017-DIR/HCS/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, BRI menerbitkan program ESOP pada tanggal 2 Januari 2023 (tanggal grant) sejumlah 131.357.200 lembar saham dimana tanggal pemberiaan alokasi hak saham atau tanggal grant pada 2 Januari 2023, dengan akhir periode vesting pada 31 Desember 2025. Masa berlaku dari exercise opsi untuk ESOP 2023 mulai tanggal 2 januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh hak opsi yang tidak digunakan akan menjadi gugur.

Perhitungan, metode dan asumsi mengenai ESOP diperoleh dari laporan aktuaris independen, Willis Towers Watson pada November 2023.

Nilai wajar dari ESOP sebesar Rp122.030. Nilai wajar ESOP diamortisasi selama masa vesting dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode vesting diakui dalam ekuitas.

Biaya ESOP yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.454.

30. OPSI SAHAM (lanjutan)

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model "*Black-scholes*", dengan asumsi utama sebagai berikut:

Periode *vesting* (dalam bulan)	36
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	4.870
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	4.870
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	929
Volatilitas harga saham	32,419%
Suku bunga bebas risiko	6,103
Tingkat dividen	5,834

31. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023			
	Total Lembar Saham	**Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)**	**Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)**	**Persentase Kepemilikan Saham**
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	**300.000.000.000**		**15.000.000.000.000**	**100,00%**
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	50	4.030.548.843.750	53,20
Dewan Komisaris:				
- Kartika Wirjoatmodjo	689.800	50	34.490.000	0,00
- Rabin Indrajad Hattari	620.700	50	31.035.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	3.234.856	50	161.742.800	0,00
- Catur Budi Harto	1.839.057	50	91.952.850	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	3.587.470	50	179.373.500	0,00
- Handayani	3.425.200	50	171.260.000	0,00
- Supari	2.890.914	50	144.545.700	0,00
- Agus Noorsanto	2.071.941	50	103.597.050	0,00
- Agus Sudiarto	1.717.400	50	85.870.000	0,00
- Amam Sukriyanto	1.526.754	50	76.337.700	0,00
- Viviana Dyah Ayu R.K	1.512.800	50	75.640.000	0,00
- Agus Winardono	1.503.481	50	75.174.050	0,00
- Arga Mahanana Nugraha	1.313.785	50	65.689.250	0,00
- Andrijanto	1.123.000	50	56.150.000	0,00
Masyarakat	70.152.822.670	50	3.507.641.133.500	46,29
	150.790.856.704		**7.539.542.835.200**	**99,49%**
Saham treasuri (Catatan 1d)	768.144.900		38.407.245.000	0,51
Total	**151.559.001.604**		**7.577.950.080.200**	**100,00%**

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	Total Lembar Saham	**Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)**	**Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)**	**Persentase Kepemilikan Saham**
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	**300.000.000.000**		**15.000.000.000.000**	**100,00%**
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	50	4.030.548.843.750	53,19
Dewan Komisaris:				
- Kartika Wirjoatmodjo	442.800	50	22.140.000	0,00
- Hadiyanto	1.048.700	50	52.435.000	0,00
- Rabin Indrajad Hattari	398.400	50	19.920.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	2.398.156	50	119.907.800	0,00
- Catur Budi Harto	1.344.957	50	67.247.850	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	3.120.870	50	156.043.500	0,00
- Handayani	2.958.600	50	147.930.000	0,00
- Supari	2.423.114	50	121.155.700	0,00
- Agus Noorsanto	1.401.041	50	70.052.050	0,00
- Agus Sudiarto	1.250.800	50	62.540.000	0,00
- Andrijanto	734.200	50	36.710.000	0,00
- Amam Sukriyanto	1.010.154	50	50.507.700	0,00
- Agus Winardono	982.681	50	49.134.050	0,00
- Viviana Dyah Ayu R.K	996.200	50	49.810.000	0,00
- Arga Mahanana Nugraha	847.185	50	42.359.250	0,00
Masyarakat	70.438.345.270	50	3.521.917.263.500	46,49%
	151.070.680.004		**7.553.534.000.200**	**99,68%**
Saham treasuri (Catatan 1d)	488.321.600		24.416.080.000	0,32
Total	**151.559.001.604**		**7.577.950.080.200**	**100,00%**

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5	5
Agio saham dari IPO	589.762	589.762
Eksekusi atas opsi saham		
Tahun 2004	49.514	49.514
Tahun 2005	184.859	184.859
Tahun 2006	619.376	619.376
Tahun 2007	140.960	140.960
Tahun 2008	29.013	29.013
Tahun 2009	14.367	14.367
Tahun 2010	43.062	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447	8.447
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2018	(81.195)	(81.195)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2019	208.331	208.331
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2020	510.819	510.819
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2021	1.154.211	1.154.211
Opsi saham MSOP tahap keempat yang telah jatuh tempo	62.862	62.862
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	565.209	565.209
Tambahan modal atas transaksi PMHMETD	94.419.142	94.419.142
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2021	(23.370.339)	(23.370.339)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2022	(1.341)	(1.341)
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2022	(604.474)	(604.474)
Cadangan saham bonusyang telah jatuh tempo	210.266	-
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2023	5.778	-
	75.853.127	**75.637.083**

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang “Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah”, Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun “Tambahan Modal Disetor” bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasikan ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (nilai penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (nilai penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	**589.762**

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan* (MSOP)).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pekerja BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Transaksi entitas sepengendali

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan kepemilikan saham PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f), dan berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Sekuritas), sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f).

Transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Transaksi entitas sepengendali (lanjutan)

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventures	3.090	2.424	666
Jumlah	**449.978**	**368.783**	**81.195**

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., Notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") sebanyak 10.500.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f). Atas transaksi ini BRI memiliki pengaruh signifikan terhadap DIM sehingga transaksi ini dicatat sesuai PSAK No.15 "Investasi pada Entitas Asosiasi", dimana dalam metode ekuitas pengakuan awal diakui sesuai dengan harga perolehan yang kemudian ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi DIM setelah tanggal perolehan.

Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 32 tanggal 30 November 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Investment Management ("DIM") sebanyak 9.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f), sehingga BRI memiliki 19.500.000 lembar saham atau setara dengan 65% dari total saham beredar DIM. Atas transaksi ini BRI memperoleh pengendalian terhadap DIM sehingga atas transaksi ini merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dan dicatat sesuai PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas. Pada tanggal akuisisi di tahun 2022 selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi adalah sebesar Rp604.474.

Kehilangan pengendalian atas entitas anak (BRIS)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Berdasarkan rasio penggabungan kepemilikan BRI atas BSI adalah sebesar 17,29% atau sebanyak 7.092.761.655 lembar saham senilai Rp3.546.381.

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Kehilangan pengendalian atas entitas anak (BRIS) (lanjutan)

Sejak tanggal 1 Februari 2021 BRI telah kehilangan pengendalian atas BRIS yang mengakibatkan BRI harus menghentikan pengakuannya terhadap aset bersih BRIS pada nilai tercatatnya sebesar Rp909.707 dan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali terdahulu kepada BRIS ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali) senilai Rp1.452.824. Setelah itu BRI mengakui investasi pada BSI sesuai dengan rasio penggabungan dimana selisih antara net aset BRIS dengan investasi BSI dicatat sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp565.209.

Transaksi penggabungan ini merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, BNI, Mandiri, BSM, BRIS dan BNIS adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah tercatat investasi sebelumnya dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah tercatat investasi sebelumnya	Jumlah tercatat investasi akibat merger	Tambahan modal disetor
Kepemilikan BRI atas BSI	2.981.172	3.546.381	565.209

Penerbitan Saham Baru

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Juli 2021, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 61 Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui BRI menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).

PMHMETD I tersebut telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 30 Agustus 2021. Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham pengendali Perseroan mengambil bagian atas seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dengan melakukan *Inbreng* atas saham milik Pemerintah pada Pegadaian dan PNM kepada BRI adalah sebagai berikut:

a) 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
b) 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Transaksi *inbreng* tersebut sesuai Akta Pengalihan Hak Atas Saham Republik Indonesia atas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani untuk dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, Notaris Fathiah Helmi, S.H., atas Transaksi *inbreng* tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
PNM	6.100.068	6.073.819	26.249
Pegadaian	48.670.528	25.326.438	23.344.090
Jumlah	**54.770.596**	**31.400.257**	**23.370.339**

Jumlah imbalan yang dialihkan sesuai dengan hasil nilai wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan, sesuai dengan laporan No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/202 tanggal 30 Juni 2021.

Atas PMHMETD I meningkatkan modal dan disetor penuh sebanyak 28.213.191.604 lembar saham atau sebesar Rp1.410.659, yang terdiri dari *inbreng* Pemerintah sebanyak 16.108.998.710 lembar saham atau sebesar Rp805.450 dan publik sebanyak 12.104.192.894 lembar saham atau sebesar Rp605.210, yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp94.419.142 (setelah dikurangi oleh biaya emisi).

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taipei) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura dan Dolar Taiwan Baru ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ai). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 13 Maret 2023 dan 1 Maret 2022 pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Konsolidasian	43.494.766	26.406.603

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. SR-602/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023, ditetapkan pembagian dividen interim atas tahun buku 2023, yang kemudian telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Rapat Direksi tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp12.666.432 (Catatan18).

31. EKUITAS (lanjutan)

d. Pembagian Laba (lanjutan)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-820/MBU/12/2022 tanggal 19 Desember 2022, ditetapkan pembagian dividen interim atas tahun buku 2022, yang kemudian telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Rapat Direksi tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp8.602.823.

e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056 pada tahun 2016. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang ”Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum”.

f. Saham bonus BRI

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menciptakan *sense of belonging* terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang kepada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Manajemen BRI memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi pekerja dalam program *Employee Stock Allocation* (ESA) . Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Sesuai surat Direksi No. B.0016-DIR/HCS/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, BRI kembali melaksanakan program ESA dimana tanggal pemberiaan alokasi hak saham atau tanggal *grant* pada 2 Januari 2023, dengan akhir periode *vesting* pada 31 Desember 2024.

Nilai wajar dari ESA pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp406.008. Nilai wajar ESA diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp216.763.

Cadangan saham bonus dari program sebelumnya yang telah jatuh tempo sebesar Rp210.266 yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp203.004.

Selain program ESA bagi karyawan, terdapat juga program *Long Term Incentives* yang ditujukan kepada direksi dan komisaris non independen BRI dimana tanggal pemberiaan alokasi hak saham atau tanggal *grant* pada 23 Desember 2022, dengan akhir periode *vesting* pada 31 Maret 2025.

Nilai wajar dari ESA pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp141.438. Nilai wajar ESA diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp63.630.

Biaya ESA yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp70.719.

31. EKUITAS (lanjutan)

g. Perubahan proporsi kepemilikan oleh kepentingan non-pengendali di PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana para Pemegang Saham menyetujui untuk menerbitkan saham baru sehingga modal dasar BRI Life menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) (Catatan 1f).

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 Maret 2021, FWD Financial Services Pte. Ltd akan mengambil alih sebanyak 936.458 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham sebagai kelanjutan dari kerjasama strategis jangka panjang sehingga komposisi kepemilikan saham BRI Life adalah BRI sebesar 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 6,31% dan FWD Financial Services Pte. Ltd sebesar 29,86% (Catatan 1f).

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Maret 2023, Pemegang Saham BRI Life memutuskan dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp339.200 menjadi Rp365.559, dengan mengeluarkan saham baru 263.580 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) lembar saham atau dalam nilai nominal yaitu sebesar Rp26.358 yang diambil seluruhnya oleh FWD Management Holdings Limited. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 54,77%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 5,42% dan FWD Management Holdings Limited 39,82% (Catatan 1f).

Dikarenakan proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, BRI menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendalian dan kepentingan non-pengendalian untuk mencerminkan perubahan kepemilikan dalam BRI Life. Perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima BRI diakui secara langsung dalam ekuitas yaitu pada akun ''Dampak Transaksi Pengendalian Non-Pengendali'' sebesar Rp1.758.580.

h. Kepentingan non-pengendali

Berikut di bawah ini adalah rincian dari kepentingan non-pengendali:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kepentingan non-pengendali		
Entitas induk		
PT Asuransi BRI Life	4.162.054	3.223.619
PT Bank Raya Indonesia Tbk	454.832	451.221
PT BRI Asuransi Indonesia	201.041	162.216
PT BRI Danareksa Sekuritas	171.415	156.079
PT Danareksa Investment Management	79.261	79.610
Entitas anak	39.983	28.561
Total	**5.108.586**	**4.101.306**

i. Pengalihan Sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada Indonesia *Investment Authority*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi telah ditetapkan penambahan penyertaan modal negara kepada Lembaga Pengelola Investasi (dalam hal ini Indonesia *Investment Authority*). Penambahan penyertaan modal tersebut berasal dari pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI.

31. EKUITAS (lanjutan)

i. Pengalihan Sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada Indonesia *Investment Authority* (lanjutan)

Selanjutnya sesuai dengan Akta Notaris No. 33 Tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada dan Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pengalihan Sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI kepada Indonesia *Investment Authority* telah efektif setelah ditandatanganinya Akta tersebut pada tanggal 23 Desember 2021.

Pengalihan sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI kepada Indonesia *Investment Authority* sejumlah 5.498.021.834 lembar saham atau sebesar 3,63%, sehingga saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada BRI menjadi sejumlah 80.610.976.875 lembar saham atau 53,19%.

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Rupiah		
Kredit yang diberikan		
Mikro	78.421.645	68.456.601
Ritel	53.918.613	50.441.719
Korporasi	2.416.635	(1.278.984)
Piutang Pembiayaan	5.391.369	5.430.057
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	270.644	222.135
Obligasi	62.666	22.819
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	3.034.842	3.959.578
Obligasi	798.664	784.794
Negotiable Certificate of Deposit	1.613	2.874
Medium-Term Note	27.498	15.893
Sertifikat Bank Indonesia	318.783	-
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	6.181.050	6.428.279
Obligasi	117.789	89.665
Medium-Term Note	1.210	5.530
Negotiable Certificate of Deposit	-	3.324
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.916.308	1.058.843
Penempatan pada Bank Indonesia		
dan lembaga keuangan lain		
Deposit Facility/Term Deposit	287.304	464.903
Inter-bank call money	62.443	6.096
Lain-lain	979.344	639.957
Giro pada Bank Indonesia	5.679	11.202
Lain-lain	1.118.747	654.742
	155.332.846	137.420.027

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Mata uang asing		
Kredit yang diberikan		
Korporasi	5.867.864	1.339.841
Ritel	274.070	180.661
Piutang pembiayaan	4.466	9.101
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	22.765	6.073
Obligasi	1.998	1.134
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	1.027.700	1.007.129
Obligasi	283.604	84.018
Sertifikat Bank Indonesia	106.273	12.544
Negotiable Certificate of Deposit	6.366	1.965
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	670.571	736.801
Obligasi	18.138	18.049
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	379	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
Deposit Facility/Term Deposit	879.372	271.833
Inter-bank call money	376.852	325.502
Lain-lain	390.216	124.466
Giro pada Bank Indonesia	37	27
Lain-lain	788.870	217.602
	10.719.541	4.336.746
Total Pendapatan Bunga	166.052.387	141.756.773
Pendapatan syariah diperoleh dari:		
Rupiah		
Murabahah	10.245.474	7.819.097
Mudharabah	2.693.765	2.296.645
Ujrah	4.368	2.301
Total Pendapatan Syariah	12.943.607	10.118.043
Total	**178.995.994**	**151.874.816**

Dalam pendapatan bunga kredit yang diberikan segmen korporasi termasuk juga kerugian modifikasi sebesar Rp6.636.709 akibat restrukturisasi debitur signifikan di tahun 2022. Dimana nilai tercatat debitur sebelum restrukturisasi sebesar Rp10.355.605 dan setelah restrukturisasi menjadi Rp3.718.896.

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Rupiah		
Deposito berjangka	18.796.685	10.529.033
Giro	4.339.643	2.946.557
Pinjaman yang diterima	2.836.395	1.495.161
Surat berharga yang diterbitkan	2.455.463	3.042.773
Tabungan	1.339.742	1.160.765
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	617.032	8.548
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	264.514	94.016
Pinjaman Subordinasi	35.310	39.432
Sertifikat Deposito	-	14.633
Lain-lain	3.989.035	3.697.558
	34.673.819	23.028.476
Mata uang asing		
Giro	3.095.269	483.614
Pinjaman yang diterima	1.812.804	691.111
Deposito berjangka	1.575.165	579.772
Surat berharga yang diterbitkan	513.444	690.081
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	412.641	364.637
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	341.089	171.648
Tabungan	8.832	4.603
Lain-lain	225.801	255.759
	7.985.045	3.241.225
	42.658.864	26.269.701
Beban syariah	1.153.643	1.008.042
Total Beban Syariah	1.153.643	1.008.042
Total	**43.812.507**	**27.277.743**

34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Kredit yang diberikan (Catatan 11f)	26.242.301	25.730.075
Piutang pembiayaan (Catatan 13c)	2.701.049	2.291.058
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya (Catatan 8d)	684.994	497.759
Tagihan Akseptasi (Catatan 14d)	114.993	(351.099)
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6e)	(123)	(3.907)
Giro pada Bank lain (Catatan 5e)	(8.542)	(10.722)
Efek-efek (Catatan 7i)	(18.805)	(643.554)
Pinjaman Syariah (Catatan 12)	(192.441)	(124.704)
Total	**29.523.426**	**27.384.906**

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Gaji, upah dan tunjangan	21.811.379	20.058.197
Bonus, insentif dan tantiem	8.644.647	9.896.459
Program bagi pekerja (Catatan 42)	2.306.592	3.325.725
Pendidikan dan pelatihan	1.243.074	1.153.346
Tunjangan kesehatan	747.928	1.476.937
Iuran Jamsostek	979.670	962.339
Biaya kompensasi saham	257.314	-
Lain-lain	1.859.671	2.517.130
Total	**37.850.275**	**39.390.133**

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp195.671 dan Rp189.966 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sedangkan jumlah gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp83.417 dan Rp84.369 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 44).

Jumlah tantiem, bonus dan insentif Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen kunci BRI yang dibayarkan adalah sebesar Rp750.925 dan Rp672.863 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 44).

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Jasa *outsourcing*	4.774.261	4.452.691
Barang dan jasa pihak ketiga	4.166.991	3.277.794
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 16)	3.726.291	3.614.805
Perbaikan dan pemeliharaan	2.880.929	2.686.849
E-Channel	1.863.958	1.891.867
Sewa	1.811.534	2.071.605
Transportasi	1.579.211	1.404.568
Jasa profesional	820.808	834.173
Listrik dan air	774.227	693.924
Komunikasi	522.559	405.604
Peralatan kantor	458.565	486.775
Percetakan dan benda pos	349.349	380.011
Penelitian dan pengembangan produk	215.980	279.262
Instalasi komputer	101.399	82.586
Lain-lain	4.438.147	3.396.172
Total	**28.484.209**	**25.958.686**

37. (BEBAN) PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Laba penjualan aset tetap	125.187	242.077
Pendapatan sewa	458	6.759
Sumbangan	(363)	(28.361)
Corporate Social Responsibility	(28.914)	(29.084)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK	(341.998)	(284.912)
Lain-lain - neto	(153.395)	384.185
Total	**(399.025)**	**290.664**

38. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BRI (entitas induk)		
Pajak Penghasilan		
Pasal 25	1.461.224	1.135.923
Pasal 29	20.725	678.296
	1.481.949	1.814.219
Entitas anak		
Pajak Penghasilan	959.642	1.148.050
Pajak Pertambahan Nilai	105.248	91.513
	1.064.890	1.239.563
Total	**2.546.839**	**3.053.782**

b) Beban Pajak

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
BRI (entitas induk)		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	10.817.648	12.135.836
Beban (Manfaat) pajak penghasilan tangguhan	3.101.244	(544.446)
	13.918.892	11.591.390

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Entitas anak		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	2.241.079	2.178.688
Beban (Manfaat) pajak penghasilan tangguhan	(155.307)	(581.584)
	2.085.772	1.597.104
Total	**16.004.664**	**13.188.494**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	76.429.712	64.596.701
Bagian laba entitas anak	(9.357.562)	(5.177.391)
Laba sebelum beban pajak BRI (entitas induk)	67.072.150	59.419.310
Perbedaan temporer:		
Benefit pekerja berbasis saham	115.688	-
Penyusutan aset tetap	64.402	(70.504)
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(39.388)	(84.240)
Pembentukan penyisihan beban pekerja	(221.789)	3.510.840
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(339.718)	(516.872)
Cadangan kerugian aset produktif	(15.807.615)	26.279
	(16.228.420)	2.865.503

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Perbedaan permanen:		
Promosi	2.188.093	1.845.752
Humas	860.662	84.507
Representasi dan sumbangan	176.675	217.004
Perjalanan dan santunan	45.459	43.112
Pendapatan dividen yang dibebaskan dari pajak	(95.133)	(1.540.279)
Laba dari Unit Kerja Luar Negeri	(353.604)	(510.122)
Bagian laba entitas asosiasi	(884.087)	(749.580)
Pendapatan yang merupakan bukan objek pajak	(1.187.800)	(599.931)
Lain-lain	5.340.996	2.797.546
	6.091.261	1.588.009
Taksiran penghasilan kena pajak	**56.934.991**	**63.872.822**
Entitas induk		
Beban pajak-kini	(10.817.648)	(12.135.836)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	10.796.923	11.457.540
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29	**(20.725)**	**(678.296)**
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama catatan tahun berjalan (Catatan 17)	2.089.356	-
Entitas anak		
Beban pajak-kini	(2.241.079)	(2.178.688)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	1.520.080	1.225.579
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29 - neto	**(720.999)**	**(953.109)**

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagaimana disebutkan di atas akan dilaporkan oleh BRI dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh Badan) tahun 2023 ke kantor pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	76.429.712	64.596.701
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	14.810.004	12.792.030
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan		
BRI	1.157.340	301.722
Entitas anak	37.320	94.742
	16.004.664	**13.188.494**

c) Aset Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023			
	Saldo awal	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi**	**Dibebankan ke ekuitas**	**Saldo akhir**
Entitas Induk				
Cadangan kerugian aset produktif	9.891.617	(3.003.447)	-	6.888.170
Penyisihan beban pekerja	3.147.827	(42.140)	-	3.105.687
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.226.755	(64.546)	-	1.162.209
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.046.955	-	(469.741)	577.214
Pengukuran kembali program imbalan pasti	162.159	-	295.628	457.787
Benefit pekerja berbasis saham	43.047	21.981	-	65.028
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(9.456)	(7.484)	-	(16.940)
Penyusutan aset tetap	(93.585)	(5.608)	-	(99.193)
Aset pajak tangguhan neto - entitas induk	15.415.319	(3.101.244)	(174.113)	12.139.962
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	3.297.675			3.465.500
Total aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	**18.712.994**			**15.605.462**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	Saldo awal	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi	Dibebankan ke ekuitas	Saldo akhir
Entitas Induk				
Cadangan kerugian aset produktif	9.886.624	4.993	-	9.891.617
Penyisihan beban pekerja	2.480.767	667.060	-	3.147.827
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.324.961	(98.206)	-	1.226.755
Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(438.445)	-	1.485.400	1.046.955
Pengukuran kembali program imbalan pasti	301.080	-	(138.921)	162.159
Benefit pekerja berbasis saham	43.047	-	-	43.047
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.549	(16.005)	-	(9.456)
Penyusutan aset tetap	(80.189)	(13.396)	-	(93.585)
Aset pajak tangguhan neto - entitas induk	13.524.394	544.446	1.346.479	15.415.319
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	2.760.504			3.297.675
Total aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	**16.284.898**			**18.712.994**

Manajemen BRI berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun aturan tersebut telah menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020, 2021, 2022, dan tahun selanjutnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan surat keterangan dari Datindo Entrycom No. DE/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang berkaitan dengan kepemilikan saham BRI dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut telah terpenuhi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan surat keterangan dari Datindo Entrycom No. DE/I/2023-0187 tanggal 4 Januari 2023 yang berkaitan dengan kepemilikan saham BRI dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut telah terpenuhi.

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 20 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2023 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya pembentukan cadangan pajak untuk tahun pajak yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

39. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu, Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan entitas anak) sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan *Internal Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap menperhatikan prinsip kehati-hatian.

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

   Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

   Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

	31 Desember 2023		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	35.000.000	1.404.769

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

   Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2022		
	Eksposur Maksimum	**Agunan**	**Net Eksposur**
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	52.833.334	1.818.656

   Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:
   1. *Secured loans*
   2. *Unsecured loans*

   Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

   a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
   b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
   c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

   Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

   Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit pembiayaan Mekaar dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

   Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans*, tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans,* tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

   Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pekerja dan surat keterangan pensiun.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	31 Desember 2023							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	101.829.850	3.217	506	9.400	4.117	7.537	54.494	101.909.121
Giro pada Bank lain	19.927.489	14.651	9.518	23.468	20.313	28.942	2.307.538	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	53.257.077	30.500	455.000	-	284.500	654.300	10.543.883	65.225.260
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	22.241.263	-	-	-	-	-	151.908	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	152.358.665	-	-	-	-	-	10.980.500	163.339.165
Biaya perolehan di amortisasi	144.234.988	-	-	-	-	-	1.123.980	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	36.130.139	479.057	237.311	2.480.045	3.174.169	2.225.356	9.169.327	53.895.404
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	-	-	-	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	911.683	-	-	-	-	-	-	911.683
Kredit yang diberikan								
Mikro	40.158.787	52.072.126	88.364.744	76.424.151	100.872.300	146.224.668	-	504.116.776
Ritel	112.912.806	32.565.692	54.879.538	65.124.492	85.315.694	143.876.696	1.264.808	495.939.726
Korporasi	160.688.906	8.266.139	2.163.276	185.601	5.740.485	5.401.406	15.250.391	197.696.204
Pinjaman syariah	2.102.106	1.147.451	924.377	2.350.532	2.780.464	4.363.290	-	13.668.220
Piutang pembiayaan	3.484.098	12.817.167	6.408.672	8.951.008	14.544.931	8.791.558	10.887	55.008.321
Tagihan akseptasi	9.270.656	12.151	48.994	236.494	13.296	47.942	587.875	10.217.408
Aset lain-lain*)	28.371.173	279.981	311.488	433.251	606.988	1.205.464	324.927	31.533.272
Total	**921.474.917**	**107.688.132**	**153.803.424**	**156.218.442**	**213.357.257**	**312.827.159**	**51.770.518**	**1.917.139.849**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(88.168.856)
Bersih								**1.828.970.993**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.865.216	633.214	44.272	566.310	902.962	435.256	-	11.447.230
Garansi yang diterbitkan	46.379.671	5.000.214	2.588.992	2.877.476	3.209.606	5.836.966	-	65.892.925
Total	**55.244.887**	**5.633.428**	**2.633.264**	**3.443.786**	**4.112.568**	**6.272.222**	**-**	**77.340.155**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(4.884.777)
Bersih								**72.455.378**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan *term deposit valas DHE*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

	31 Desember 2022							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	150.880.482	3.044	729	9.163	479	51	41.202	150.935.150
Giro pada Bank lain	19.745.303	41.579	12.547	13.105	29.945	45.043	1.600.912	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	59.483.459	229.000	16.800	-	202.000	38.600	10.432.042	70.401.901
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	20.965.114	-	-	-	-	-	150.759	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	133.584.217	-	-	-	-	-	17.218.350	150.802.567
Biaya perolehan di amortisasi	154.852.243	-	-	-	-	-	3.554.135	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	25.486.991	212.781	135.450	2.501.971	2.112.522	1.500.095	7.117.565	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	-	-	-	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	911.405	-	-	-	-	-	-	911.405
Kredit yang diberikan								
Mikro	41.326.001	53.878.956	86.808.067	76.283.493	99.502.660	145.167.899	-	502.967.076
Ritel	95.071.388	27.608.453	44.433.267	51.895.813	64.973.907	117.527.679	1.010.176	402.520.683
Korporasi	127.742.427	9.770.411	2.182.753	3.003.544	10.247.441	7.001.584	13.838.900	173.787.060
Pinjaman syariah	1.621.953	879.618	704.180	1.894.283	2.189.561	3.224.734	-	10.514.329
Piutang pembiayaan	3.387.076	11.590.101	5.707.570	8.170.095	12.180.484	8.252.591	-	49.287.917
Tagihan akseptasi	6.635.986	12.689	26.780	377.830	48.047	66.268	-	7.167.600
Aset lain-lain*)	22.065.538	327.579	287.280	346.133	450.080	1.061.174	749.163	25.286.947
Total	**914.774.261**	**104.554.211**	**140.315.423**	**144.495.430**	**191.937.126**	**283.885.718**	**55.713.204**	**1.835.675.373**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(94.966.839)
Bersih								**1.740.708.534**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	9.187.432	1.685.436	26.922	911.091	1.662.614	185.173	-	13.658.668
Garansi yang diterbitkan	54.041.372	6.131.558	3.195.108	2.770.756	3.299.117	5.417.087	-	74.854.998
Total	**63.228.804**	**7.816.994**	**3.222.030**	**3.681.847**	**4.961.731**	**5.602.260**	**-**	**88.513.666**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(5.006.065)
Bersih								**83.507.601**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023							
	Pemerintah (Termasuk BI)	**Bank dan lembaga keuangan lainnya**	**Pertanian**	**Perindustrian**	**Perdagangan, hotel dan restoran**	**Jasa dunia usaha**	**Lain-lain**	**Total**
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	-	-	-	-	-	-	101.909.121
Giro pada bank lain	-	22.331.919	-	-	-	-	-	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	48.916.961	16.308.299	-	-	-	-	-	65.225.260
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	11.603.446	9.057.989	8.651	873.111	2	573.417	276.555	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	131.245.386	26.253.605	27	4.591.790	1.716	1.240.605	6.036	163.339.165
Biaya perolehan di amortisasi	123.438.096	21.263.702	11.000	473.431	-	172.739	-	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1.718.917	-	-	1.266.396	106.919	1.489.692	49.313.480	53.895.404
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	19.317.543	14.277.688	-	-	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	-	911.683	-	-	-	-	-	911.683
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	119.599.123	37.707.275	202.897.491	43.433.532	100.479.355	504.116.776
Ritel	-	136.426	35.061.191	21.196.205	177.194.758	18.148.165	244.202.981	495.939.726
Korporasi	1.207.000	-	30.265.580	45.361.102	17.066.890	10.964.404	92.831.228	197.696.204
Pinjaman syariah	-	-	887.084	299.970	5.319.974	808.641	6.352.551	13.668.220
Piutang pembiayaan	-	579.021	10.797.567	3.592.020	33.679.628	4.008.258	2.351.827	55.008.321
Tagihan akseptasi	-	-	-	313.613	-	918.308	8.985.487	10.217.408
Aset lain-lain*)	18.675.355	6.525.822	751	42.255	434.940	327.108	5.527.041	31.533.272
Total	**458.031.825**	**117.646.154**	**196.630.974**	**115.717.168**	**436.702.318**	**82.084.869**	**510.326.541**	**1.917.139.849**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(88.168.856)
Bersih								**1.828.970.993**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	30.889	3.853.331	2.566.169	40.770	626.549	4.329.522	11.447.230
Garansi yang diterbitkan	-	3.685.723	554.292	11.964.097	147.438	13.372.299	36.169.076	65.892.925
Total	**-**	**3.716.612**	**4.407.623**	**14.530.266**	**188.208**	**13.998.848**	**40.498.598**	**77.340.155**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(4.884.777)
Bersih								**72.455.378**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan *term deposit valas DHE*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

   b. Sektor industri (lanjutan)

   Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2022							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	-	-	-	-	-	-	150.935.150
Giro pada bank lain	-	21.488.434	-	-	-	-	-	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	55.188.633	15.213.268	-	-	-	-	-	70.401.901
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	10.605.908	3.572.717	-	181.539	-	40.886	6.714.823	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	120.244.522	22.231.398	-	4.244.793	-	1.405.012	2.676.842	150.802.567
Biaya perolehan di amortisasi	134.094.983	23.630.150	11.000	250.344	-	419.901	-	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	2.477.321	-	8.928.592	2.680.436	100.631	106.981	24.773.414	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.176.061	4.838.617	-	-	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	-	911.405	-	-	-	-	-	911.405
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	113.826.272	39.702.962	211.046.231	38.626.285	99.765.326	502.967.076
Ritel	-	226.633	21.067.550	14.653.665	136.799.791	14.305.470	215.467.574	402.520.683
Korporasi	305.303		25.515.870	47.533.803	11.785.946	12.048.710	76.597.428	173.787.060
Pinjaman syariah	-	-	747.434	214.341	3.375.200	69.154	6.108.200	10.514.329
Piutang pembiayaan	-	425.045	5.118.615	3.103.897	28.625.489	5.372.731	6.642.140	49.287.917
Tagihan akseptasi	6.635.986	12.689	26.780	377.830	48.047	66.268	-	7.167.600
Aset lain-lain*)	15.911.136	496.711	-	1.487.612	-	399.700	6.991.788	25.286.947
Total	**542.575.003**	**93.047.067**	**175.242.113**	**114.431.222**	**391.781.335**	**72.861.098**	**445.737.535**	**1.835.675.373**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(94.966.839)
Bersih								**1.740.708.534**
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	-	-	7.666.832	77.049	1.479.426	4.435.361	13.658.668
Garansi yang diterbitkan	-	2.443.425	622.700	27.229.128	662.063	608.496	43.289.186	74.854.998
Total	**-**	**2.443.425**	**622.700**	**34.895.960**	**739.112**	**2.087.922**	**47.724.547**	**88.513.666**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(5.006.065)
Bersih								**83.507.601**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

   a. Giro pada bank lain

   Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

   b. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

   Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

c. Efek-efek

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek-efek diklasifikasikan “Lancar”.

d. Piutang pembiayaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Mengalami penurunan nilai	675.752	501.260
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	2.234.453	1.556.428
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	52.098.116	47.230.229
	55.008.321	49.287.917
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.483.915)	(3.477.948)
Total	**50.524.406**	**45.809.969**

e. Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai*)	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	324.845.469	23.235.384	24.040.612	17.380.592	389.502.057
Pertanian	159.291.356	4.158.707	6.945.516	9.178.589	179.574.168
Perindustrian	59.888.517	2.497.974	3.857.594	6.557.963	72.802.048
Jasa dunia usaha	54.030.724	2.726.593	3.779.057	3.543.519	64.079.893
Listrik, gas dan air	11.190.010	90.535	74.665	145.921	11.501.131
Konstruksi	21.942.392	616.255	485.233	6.623.769	29.667.649
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	22.083.188	910.144	848.650	1.922.255	25.764.237
Jasa pelayanan sosial	5.902.571	399.620	332.307	408.163	7.042.661
Pertambangan	11.582.453	179.354	93.206	500.152	12.355.165
Lain-lain	292.865.061	5.061.289	8.947.437	4.725.767	311.599.554
	963.621.741	39.875.855	49.404.277	50.986.690	1.103.888.563

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai*)	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Mata uang asing					
Perindustrian	27.711.170	463	33.951	4.604.035	32.349.619
Pertanian	10.183.322	-	-	488.378	10.671.700
Listrik. gas dan air	19.679.604	-	-	-	19.679.604
Perdagangan. perhotelan dan restoran	6.902.186	2.669	-	1.052.197	7.957.052
Pengangkutan. pergudangan dan komunikasi	1.131.779	-	-	74.285	1.206.064
Pertambangan	17.681.313	-	-	1.814.075	19.495.388
Jasa pelayanan sosial	1.207.241	-	-	-	1.207.241
Jasa dunia usaha	5.670.372	-	107.213	2.690.444	8.468.029
Konstruksi	5.016.705	-	-	131.408	5.148.113
Lain-lain	1.339.192	-	2.725	7.636	1.349.553
	96.522.884	3.132	143.889	10.862.458	107.532.363
Total	**1.060.144.625**	**39.878.987**	**49.548.166**	**61.849.148**	**1.211.420.926**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(81.017.973)
Bersih					**1.130.402.953**

	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai*)	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	270.598.277	51.737.757	17.390.013	15.148.331	354.874.378
Pertanian	131.013.202	6.934.234	3.603.995	12.316.969	153.868.400
Perindustrian	57.399.888	5.515.252	2.699.971	7.076.290	72.691.401
Jasa dunia usaha	45.021.262	6.155.829	2.420.618	3.036.574	56.634.283
Konstruksi	18.298.376	1.355.957	444.312	7.586.856	27.685.501
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.142.311	1.923.318	518.692	6.096.134	18.680.455
Listrik, gas dan air	13.149.691	158.508	48.924	815.222	14.172.345
Jasa pelayanan sosial	4.312.624	836.998	211.589	548.658	5.909.869
Pertambangan	2.766.125	282.380	74.720	695.413	3.818.638
Lain-lain	261.933.718	12.515.405	6.616.108	3.579.440	284.644.671
	814.635.474	87.415.638	34.028.942	56.899.887	992.979.941

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai*)	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Mata uang asing					
Perindustrian	26.726.014	570	98.184	5.104.382	31.929.150
Listrik, gas dan air	20.829.686	-	-	1.371.043	22.200.729
Pertanian	6.919.636	-	-	2.030.138	8.949.774
Jasa dunia usaha	5.536.793	5.848	-	2.907.310	8.449.951
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.467.842	-	-	1.075.554	7.543.396
Pertambangan	8.503.161	-	-	2.298.276	10.801.437
Konstruksi	4.592.170	-	-	2.285	4.594.455
Jasa pelayanan sosial	538.584	-	-	-	538.584
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	535.165	-	-	265.740	800.905
Lain-lain	991.672	-	3.183	5.971	1.000.826
	81.640.723	6.418	101.367	15.060.699	96.809.207
Total	**896.276.197**	**87.422.056**	**34.130.309**	**71.960.586**	**1.089.789.148**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(89.610.033)
Bersih					**1.000.179.115**

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 aset keuangan ini mengalami penurunan nilai baik secara individu dan kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif dan individual.

h. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

i. Aset lain-lain

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan)

j. Rekening administratif

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rupiah		
Garansi yang diterbitkan	41.712.234	47.796.102
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	2.228.611	2.571.824
	43.940.845	50.367.926
Mata uang asing		
Garansi yang diterbitkan	24.180.691	27.058.896
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	9.218.619	11.086.844
	33.399.310	38.145.740
	77.340.155	88.513.666
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.884.777)	(5.006.065)
Total	**72.455.378**	**83.507.601**

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai**)	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	-	-	-	101.909.121
Giro pada bank lain	22.262.708	69.211	-	-	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	65.225.260	-	-	-	65.225.260
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	13.728.657	8.664.514	-	-	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	144.895.186	18.443.979	-	-	163.339.165
Biaya perolehan diamortisasi	124.204.129	21.154.839	-	-	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	53.895.404	-	-	-	53.895.404
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	911.683	-	-	-	911.683
Kredit yang diberikan					
Mikro	448.121.725	14.430.771	29.148.737	12.415.543	504.116.776
Ritel	431.464.628	25.409.037	19.291.593	19.774.468	495.939.726
Korporasi	168.142.815	-	141.163	29.412.226	197.696.204
Pinjaman syariah	12.415.457	39.179	966.673	246.911	13.668.220
Piutang pembiayaan	47.716.681	4.381.435	2.234.453	675.752	55.008.321
Tagihan akseptasi	10.217.408	-	-	-	10.217.408
Aset lain-lain*)	29.531.651	652.136	1.252.273	97.212	31.533.272
Total	**1.708.237.744**	**93.245.101**	**53.034.892**	**62.622.112**	**1.917.139.849**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan *term deposit valas DHE*
**) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*. (lanjutan)

	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai**)	Total
	High Grade	*Standard Grade*			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	-	-	-	150.935.150
Giro pada bank lain	21.129.710	358.724	-	-	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	70.401.901	-	-	-	70.401.901
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	20.955.201	160.672	-	-	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	136.399.669	14.402.898	-	-	150.802.567
Biaya perolehan diamortisasi	156.934.530	1.471.848	-	-	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	38.467.643	-	599.732	-	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	911.405	-	-	-	911.405
Kredit yang diberikan					
Mikro	437.807.487	36.937.719	19.838.554	8.383.316	502.967.076
Ritel	323.608.890	45.667.970	13.591.274	19.652.549	402.520.683
Korporasi	130.043.450	-	98.184	43.645.426	173.787.060
Pinjaman syariah	9.409.869	222.868	602.297	279.295	10.514.329
Piutang pembiayaan	45.068.685	2.161.544	1.556.428	501.260	49.287.917
Tagihan akseptasi	7.167.600	-	-	-	7.167.600
Aset lain-lain*)	18.497.543	6.181.814	607.590	-	25.286.947
Total	**1.618.753.411**	**107.566.057**	**36.894.059**	**72.461.846**	**1.835.675.373**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
**) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (*High Grade*)

   a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.

   b) Kredit yang diberikan, piutang pembiayaan dan pinjaman syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.

   c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.

   d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), atau A3 (Moody's).

   e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

2. Tingkat Standar (*Standard Grade*)

a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.

b) Kredit yang diberikan, piutang pembiayaan dan pinjaman syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.

c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.

d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).

e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

Analisis Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:
1. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
2. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank juga menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:
1. Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD)
2. Indikator kualitatif
3. Tertunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

b. *Credit Risk Grades*

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, dan estimasi kondisi ekonomi.

c. Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (seperti restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), Tingkat Konsumsi, dan Tingkat Investasi. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan bervariasi untuk setiap portofolio dan termasuk perubahan kuantitatif pada PD dan faktor kualitatif, termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan.

Risiko kredit dari eksposur tertentu dianggap telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika, berdasarkan permodelan kuantitatif Bank, *probability of default* (PD) atas umur tersisa telah meningkat signifikan.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank juga dapat menggunakan penilaian dari analis kredit dan, jika mungkin, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa mungkin eksposur telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasi hal tersebut dan pengaruhnya mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam analisis kuantitatif secara tepat waktu.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

e. Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

f. Definisi Gagal Bayar (*Default*)

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh tanpa bantuan (*recourse*) dari kelompok usahanya; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada kelompok usahanya.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif - seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif - seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2023	**2024**
Pertumbuhan PDB	dasar 5,17% Kisaran antara 4,94 hingga 5,04%	dasar 5,37% Kisaran antara 3,16 hingga 5,59%
Tingkat Konsumsi	dasar 5,06% Kisaran antara 4,54 hingga 5,22%	dasar 5,11% Kisaran antara 2,70% hingga 5,32%
Tingkat Investasi	dasar 4,63% Kisaran antara 2,11 hingga 5,77%	dasar 6,79% Kisaran antara 4,56 hingga 7,00%

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut*:*

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif, kualitatif, dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. LGD juga diamati dengan mempertimbangkan jaminan tunai yang merupakan bagian intergral dari aset keuangan terhutang serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pemulihan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis.

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- Jenis instrumen;
- Peringkat risiko kredit;
- Jenis agunan;
- Tanggal pengakuan awal;
- Sisa waktu jatuh tempo.

5. Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, pinjaman syariah, dan piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2023			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	11.816.893	7.622.524	9.709.320	29.148.737
Ritel	9.468.675	4.877.863	4.945.055	19.291.593
Korporasi	141.163	-	-	141.163
Pinjaman syariah	620.753	345.920	-	966.673
Piutang pembiayaan	65.996	1.466.403	702.054	2.234.453
Total	**22.113.480**	**14.312.710**	**15.356.429**	**51.782.619**

	31 Desember 2022			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	8.249.936	5.197.796	6.390.822	19.838.554
Ritel	6.615.854	3.522.177	3.453.243	13.591.274
Korporasi	98.184	-	-	98.184
Pinjaman syariah	342.181	167.438	92.678	602.297
Piutang pembiayaan	1.556.428	-	-	1.556.428
Total	**16.862.583**	**8.887.411**	**9.936.743**	**35.686.737**

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BRI.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (*maturity gap*), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (*stress*). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*), dan limit risiko likuiditas.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi *mismatch* likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset						
Kas	31.603.784	31.603.784	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	101.909.121	-	-	-	-
Giro pada bank lain	22.331.919	22.331.919	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(9.984)	-	-	-	-	(9.984)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	65.225.260	61.436.447	1.242.493	2.546.320	-	-
Cadangan kerugian	(1.860)	-	-	-	-	(1.860)
Efek-efek	331.091.304	194.565.435	8.999.005	18.170.889	109.355.975	-
Cadangan kerugian	(81.510)	-	-	-	-	(81.510)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	53.895.404	29.072.292	16.049.621	8.773.491	-	-
Cadangan kerugian	(2.323.916)	-	-	-	-	(2.323.916)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	23.830.224	-	9.569.883	195.124	-

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2023					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset (lanjutan)						
Tagihan Derivatif	911.683	143.622	156.256	227.894	383.911	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	504.116.776	6.385.698	11.020.678	62.977.195	423.733.205	-
Ritel	495.939.726	18.207.749	29.158.883	158.827.704	289.745.390	-
Korporasi	197.696.204	5.666.577	10.563.086	28.592.473	152.874.068	-
Cadangan kerugian	(79.924.211)	-	-	-	-	(79.924.211)
Pinjaman syariah	13.668.220	17.091	84.009	8.227.108	5.340.012	-
Cadangan kerugian	(1.093.762)	-	-	-	-	(1.093.762)
Piutang pembiayaan	55.008.321	629.914	1.818.246	29.138.207	23.421.954	-
Cadangan kerugian	(4.483.915)	-	-	-	-	(4.483.915)
Tagihan akseptasi	10.217.408	2.485.675	4.732.675	2.999.058	-	-
Cadangan kerugian	(249.698)	-	-	-	-	(249.698)
Aset lain-lain*)	31.533.272	2.427.759	6.876.823	9.212.645	1.331.761	11.684.284
	1.860.574.777	**500.713.307**	**90.701.775**	**339.262.867**	**1.006.381.400**	**(76.484.572)**
Liabilitas						
Liabilitas segera	30.651.807	14.808.230	1.591.242	14.252.335	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	346.124.372	-	-	-	-	346.124.372
Tabungan	527.945.550	-	-	-	-	527.945.550
Deposito berjangka	484.258.839	116.496.420	189.212.807	177.096.845	1.452.767	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	11.958.319	8.595.131	1.834.885	1.528.303	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.079.458	3.024.325	300.454	7.258.781	8.495.898	-
Liabilitas derivatif	925.210	274.872	200.232	66.126	383.980	-
Liabilitas akseptasi	10.217.408	2.485.675	4.732.675	2.999.058	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	49.637.581	1.020.000	8.634.126	18.223.255	21.760.200	-
Pinjaman yang diterima	98.850.813	41.422.439	21.601.299	8.057.724	27.769.351	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	496.683	-	-	-	496.683	-
Liabilitas lain-lain**)	14.052.073	4.264.064	5.637.757	174.704	3.898.932	76.616
	1.594.198.113	**192.391.156**	**233.745.477**	**229.657.131**	**64.257.811**	**874.146.538**
Perbedaan Jatuh Tempo	**266.376.664**	**308.322.151**	**(143.043.702)**	**109.605.736**	**942.123.589**	**(950.631.110)**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah dan *term deposit valas DHE*
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru',* dan *term deposit valas DHE*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2022					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Aset						
Kas	27.407.478	27.407.478	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	150.935.150	-	-	-	-
Giro pada bank lain	21.488.434	21.488.434	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(18.577)	-	-	-	-	(18.577)
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	70.401.901	67.806.648	554.458	2.040.795	-	-
Cadangan kerugian	(1.981)	-	-	-	-	(1.981)
Efek-efek	330.324.818	180.858.473	6.743.221	18.893.624	123.829.500	-
Cadangan kerugian	(82.835)	-	-	-	-	(82.835)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	39.067.375	11.843.924	14.829.717	12.393.734	-	-
Cadangan kerugian	(1.638.929)	-	-	-	-	(1.638.929)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	51.014.678	44.525.866	4.678.302	1.810.510	-	-
Tagihan Derivatif	911.405	222.094	82.911	78.715	527.685	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	502.967.076	6.013.367	11.184.966	60.345.250	425.423.493	-
Ritel	402.520.682	15.337.476	21.482.703	137.258.265	228.442.238	-
Korporasi	173.787.061	12.204.324	5.048.464	27.081.692	129.452.581	-
Cadangan kerugian	(88.323.830)	-	-	-	-	(88.323.830)
Pinjaman syariah	10.514.329	15.365	22.165	7.379.222	3.097.577	-
Cadangan kerugian	(1.286.203)	-	-	-	-	(1.286.203)
Piutang pembiayaan	49.287.917	7.085.480	1.873.852	24.774.175	15.554.410	-
Cadangan kerugian	(3.477.948)	-	-	-	-	(3.477.948)
Tagihan akseptasi	7.167.600	2.149.877	2.816.790	2.200.933	-	-
Cadangan kerugian	(136.536)	-	-	-	-	(136.536)
Aset lain-lain*)	25.286.947	587.031	3.293.586	2.460.394	4.140.171	14.805.765
	1.768.116.012	**548.480.987**	**72.611.135**	**296.717.309**	**930.467.655**	**(80.161.074)**
Liabilitas						
Liabilitas segera	24.910.579	-	-	-	-	24.910.579
Simpanan nasabah						
Giro	349.755.590	349.755.590	-	-	-	-
Tabungan	522.647.920	522.647.920	-	-	-	-
Deposito berjangka	435.480.503	157.614.528	136.820.206	138.687.411	2.358.358	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	9.334.547	5.778.567	2.539.965	1.016.015	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.997.592	508.193	3.687.552	1.710.879	4.090.968	-
Liabilitas derivatif	783.921	163.536	82.129	28.035	510.221	-

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dan dana *tabarru'*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	31 Desember 2022					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Liabilitas (lanjutan)						
Liabilitas akseptasi	7.167.600	2.149.877	2.816.790	2.200.933	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	63.611.761	1.836.939	650.000	17.565.933	43.558.889	-
Pinjaman yang diterima	79.371.200	22.275.713	18.581.962	8.717.512	29.796.013	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.988	-	-	499.614	2.374	-
Liabilitas lain-lain**)	13.285.936	1.133.947	2.187.168	4.448.482	4.674.026	842.313
	1.516.849.137	**1.063.864.810**	**167.365.772**	**174.874.814**	**84.990.849**	**25.752.892**
Perbedaan Jatuh Tempo	**251.266.875**	**(515.383.823)**	**(94.754.637)**	**121.842.495**	**845.476.806**	**(105.913.966)**

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dan dana *tabarru'*

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas keuangan sesuai kontrak berdasarkan arus kas *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Liabilitas						
Liabilitas segera	30.651.807	14.808.230	1.591.242	14.252.335	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	346.124.372	-	-	-	-	346.124.372
Tabungan	527.945.550	-	-	-	-	527.945.550
Deposito berjangka	489.862.004	4.935.530	2.205.417	2.004.786	480.716.271	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	12.007.709	9.498.503	1.348.574	1.160.632	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	20.054.639	391.556	5.954.035	4.289.283	9.419.765	-
Liabilitas derivatif	925.210	279.313	195.791	66.125	383.981	-
Liabilitas akseptasi	10.217.408	2.485.675	4.732.675	2.999.058	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	44.260.590	106.809	7.865.719	15.218.800	21.069.262	-
Pinjaman yang diterima	98.850.813	36.495.657	22.874.547	9.674.121	29.806.488	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	647.723	-	-	-	647.723	-
Liabilitas lain-lain***)	14.052.073	4.264.064	5.637.757	174.704	3.898.932	76.616
	1.595.599.898	**73.265.337**	**52.405.757**	**49.839.844**	**545.942.422**	**874.146.538**

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas keuangan sesuai kontrak berdasarkan arus kas *undiscounted* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2022					
Keterangan	**Total**	**Sampai dengan 1 bulan**	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan**	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun**	**Lebih dari 1 tahun**	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo**
Liabilitas						
Liabilitas segera	24.910.579	10.157.504	944.115	13.808.960	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	349.755.590	-	-	-	-	349.755.590
Tabungan	522.647.920	-	-	-	-	522.647.920
Deposito berjangka	441.437.271	188.024.029	125.706.609	125.579.069	2.127.564	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	9.359.227	6.710.638	1.712.778	935.811	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.108.796	988.674	4.520.854	2.819.012	1.780.256	-
Liabilitas derivatif	783.921	163.536	82.129	28.035	510.221	-
Liabilitas akseptasi	7.167.600	2.149.877	2.816.790	2.200.933	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	71.406.463	-	4.567.127	24.899.759	41.939.577	-
Pinjaman yang diterima	79.371.190	22.275.713	18.581.952	8.717.512	29.796.013	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	518.929	-	-	518.929	-	-
Liabilitas lain-lain***)	13.285.936	1.133.947	2.187.168	4.448.482	4.674.026	842.313
	1.530.753.422	**231.603.918**	**161.119.522**	**183.956.502**	**80.827.657**	**873.245.823**

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (*Value-at-Risk*) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar.

1. *Value-at-Risk* (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model *internal* untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

2. Asumsi *Value-at-Risk* (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Historical VaR.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:

	31 Desember 2023	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	32.180,53	226.723,86
Tertinggi	67.411,01	333.276,04
Terendah	113,78	120.292,93

	31 Desember 2022	
	Nilai Tukar*)	**Suku Bunga**
Rata-rata Harian	19.040,59	71.324,38
Tertinggi	184.176,64	150.840,24
Terendah	121,14	28.410,52

*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

3. *Back Testing*

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book*

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

BRI telah mengembangkan metodologi pengukuran dampak pengaruh pergerakan suku bunga dalam *banking book* melalui *Interest Rate Risk in The Banking Book* sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Posisi Desember 2023, secara individu BRI mempunyai nilai *delta* EVE (*Economic Value of Equity*) sebesar 6,43% (perbandingan terhadap modal Tier 1). Delta EVE BRI di bawah RAS BRI (7,43%) dan di bawah batas regulator (15,00%). Secara konsolidasi, BRI mempunyai nilai *delta* EVE (*Economic Value of Equity*) sebesar 6,45% (perbandingan terhadap modal Tier 1).

Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	Rupiah (%)	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Aset		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	5,45	5,21
Efek-efek	6,61	6,82
Kredit yang diberikan	11,79	11,37
Piutang pembiayaan	16,86	17,40
Liabilitas		
Simpanan nasabah		
Giro	2,72	2,07
Tabungan	0,26	0,22
Deposito berjangka	4,71	3,06
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	1,76	1,89
Pinjaman yang diterima	0,02	0,02
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	4,37	2,15
Surat berharga yang diterbitkan	7,04	5,69

	Valas (%)	
	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Aset		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	2,68	3,75
Efek-efek	3,52	3,50
Kredit yang diberikan	5,07	4,28
Piutang pembiayaan	6,53	6,29
Liabilitas		
Simpanan nasabah		
Giro	2,62	0,61
Tabungan	0,19	0,12
Deposito berjangka	3,18	0,93
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	2,15	1,80
Pinjaman yang diterima	0,00	3,07
Surat berharga yang diterbitkan	3,95	4,29

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas pendapatan bunga - neto Bank BRI untuk satu tahun ke depan terhadap pergerakan suku bunga dari portofolio aset dan liabilitas yang memiliki suku bunga pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Bank BRI saja) yaitu:

	Peningkatan 400 bps	Penurunan 400 bps
31 Desember 2023	(15.434.868)	15.984.479
31 Desember 2022	(13.192.513)	12.121.776

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book* dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

31 Desember 2023

Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 2.317.803

31 Desember 2022

Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 1.144.881

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*):

31 Desember 2023

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	31.603.784	-	-	-	-	31.603.784
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	-	-	-	-	101.909.121
Giro pada Bank lain	22.331.919	-	-	-	-	22.331.919
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	62.753.990	2.471.270	-	-	-	65.225.260
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	22.393.171	-	22.393.171
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	163.339.165	-	163.339.165
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	145.358.968	-	145.358.968
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	45.121.913	8.773.491	-	-	-	53.895.404

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

	31 Desember 2023					
	Suku bunga mengambang					
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset (lanjutan)						
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.350.734	244.497	-	-	-	33.595.231
Tagihan derivatif	-	-	-	-	911.683	911.683
Kredit yang diberikan						
Mikro	385.330	61.751	92.656	503.577.039	-	504.116.776
Ritel	46.736.868	110.497.963	169.044.202	169.660.693	-	495.939.726
Korporasi	16.229.661	31.128.033	150.338.510	-	-	197.696.204
Pinjaman syariah	-	-	-	13.668.220	-	13.668.220
Piutang pembiayaan	13.694	8.947	418	54.985.262	-	55.008.321
Tagihan akseptasi	7.218.350	2.999.058	-	-	-	10.217.408
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.749.102	1.749.102
Aset lain-lain**)	969	-	-	7.189.322	24.342.981	31.533.272
	367.656.333	**156.185.010**	**319.475.786**	**1.080.171.840**	**27.003.766**	**1.950.492.735**
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	30.651.807	30.651.807
Simpanan nasabah						
Giro	239.203.910	-	-	106.920.462	-	346.124.372
Tabungan	176.757.401	-	-	351.188.149	-	527.945.550
Deposito berjangka	116.496.420	189.209.612	177.102.416	1.450.391	-	484.258.839
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	10.430.018	1.528.301	-	-	-	11.958.319
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6.365.596	12.713.862	-	-	-	19.079.458
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	925.210	925.210
Liabilitas akseptasi	7.218.350	2.999.058	-	-	-	10.217.408
Surat berharga yang Diterbitkan	-	-	-	49.637.581	-	49.637.581
Pinjaman yang diterima	59.331.954	9.712.371	29.806.488	-	-	98.850.813
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	496.683	-	496.683
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	5.839.397	8.212.676	14.052.073
	615.803.649	**216.163.204**	**206.908.904**	**515.532.663**	**39.789.693**	**1.594.198.113**
Perbedaan (*gap*) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(248.147.316)**	**(59.978.194)**	**112.566.882**	**564.639.177**	**(12.785.927)**	**356.294.622**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah, dan *term deposit valas DHE*
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'*, dan *term deposit valas DHE*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2022

Keterangan	Suku bunga mengambang: Tidak lebih dari 3 bulan	Suku bunga mengambang: Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Suku bunga mengambang: Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	27.407.478	-	-	-	-	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	150.935.150	-	-	-	-	150.935.150
Giro pada Bank lain	21.488.434	-	-	-	-	21.488.434
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	68.361.106	2.040.795	-	-	-	70.401.901
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	21.115.873	-	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	150.802.567	-	150.802.567
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	158.406.378	-	158.406.378
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	26.673.641	12.393.734	-	-	-	39.067.375
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	49.204.168	1.810.510	-	-	-	51.014.678
Tagihan derivatif	-	-	-	-	911.405	911.405
Kredit yang diberikan						
Mikro	529.458	2.247.924	45.408.082	454.781.612	-	502.967.076
Ritel	36.034.322	93.739.042	118.254.236	154.493.082	-	402.520.682
Korporasi	17.544.255	26.756.901	129.485.905	-	-	173.787.061
Pinjaman Syariah	-	-	-	10.514.329	-	10.514.329
Piutang pembiayaan	17.764	48.051	58.501	49.163.601	-	49.287.917
Tagihan akseptasi	4.966.667	2.200.933	-	-	-	7.167.600
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.774.614	1.774.614
Aset lain-lain**)	2.202.856	-	-	-	23.084.090	25.286.946
	405.365.299	**141.237.890**	**293.206.724**	**999.277.442**	**25.770.109**	**1.864.857.464**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dan dana *tabarru'*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2022

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	24.910.579	24.910.579
Simpanan nasabah						
Giro	250.015.590	-	-	99.740.000	-	349.755.590
Tabungan	202.651.752	-	-	319.996.168	-	522.647.920
Deposito berjangka	41.032.273	121.411.897	1.945.786	271.090.547	-	435.480.503
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	8.318.532	1.016.015	-	-	-	9.334.547
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.195.745	1.710.879	4.090.968	-	-	9.997.592
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	783.921	783.921
Liabilitas akseptasi	4.966.667	2.200.933	-	-	-	7.167.600
Surat berharga yang Diterbitkan	-	-	-	63.611.761	-	63.611.761
Pinjaman yang diterima	40.857.675	8.717.512	29.796.013	-	-	79.371.200
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	501.988	-	501.988
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	13.285.936	13.285.936
	552.038.234	**135.057.236**	**35.832.767**	**754.940.464**	**38.980.436**	**1.516.849.137**
Perbedaan (*gap*) *repricing* suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	**(146.672.935)**	**6.180.654**	**257.373.957**	**244.336.978**	**(13.210.327)**	**348.008.327**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dan dana *tabarru'*

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, per mata uang, sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
Mata Uang	**Aset**	**Liabilitas**	**PDN**
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	331.100.472	331.199.191	98.719
Dolar Kanada	38.691	24.303	14.388
Renminbi	1.230.517	1.176.670	53.847
Yen Jepang	5.574.573	4.698.897	875.676
Dolar Singapura	3.769.803	3.802.661	32.858
Euro Eropa	3.700.437	3.724.175	23.738
Dolar Australia	372.328	305.103	67.225
Pound Sterling Inggris	1.085.793	968.132	117.660
Lain-lain	858.490	617.292	241.198
			1.525.309
Modal (Catatan 48a)			250.568.767
Rasio PDN			**0,62%**

	31 Desember 2022		
Mata Uang	**Aset**	**Liabilitas**	**PDN**
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	286.822.033	285.848.495	973.538
Dolar Kanada	41.197	80.446	39.249
Renminbi	858.626	801.073	57.553
Yen Jepang	1.318.247	1.267.972	50.275
Dolar Singapura	3.805.263	4.180.177	374.914
Euro Eropa	2.934.476	2.815.341	119.135
Dolar Australia	410.625	341.148	69.477
Pound Sterling Inggris	439.996	316.310	123.686
Lain-lain	790.615	507.540	283.075
			2.090.902
Modal (Catatan 48a)			245.292.175
Rasio PDN			**0,85%**

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan manajemen risiko mencakup pilar Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan Sistem pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksudkan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penerapan proses manajemen risiko dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (Divisi/*Desk/ Team*), *Regional Office*, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Kantor Kas, Sentra Layanan BRI Prioritas dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Di samping itu, SKMRO juga berperan dalam penyusunan dan implementasi tata kelola manajemen risiko operasional, penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk bank baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi *anti fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko. Pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional dilaksanakan dalam kegiatan Forum Manajemen Risiko (FMR) maupun *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan secara rutin bersama dengan SKMR dan Divisi/Desk lainnya.

Audit Intern selaku *third line* dalam *3 lines of model* yang meliputi Audit Intern Kantor Pusat dan Audit Intern Regional BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa BRI *Operational Risk Assessor* (OPRA), *Integrated Risk Management System* (IRMS) maupun BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), yang mencakup modul *Risk and Control Library (RCL), Risk and Control Self Assessment* (RCSA/CSA), *Key Risk Indicator* (KRI), *Loss Even Database* (LED), *Risk Maturity Self Assessment* (RMSA), dan fungsi *Briefing, Verification, dan Coaching* (BVC). Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional telah dikinikan dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022.

Upaya pemahaman manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya risiko. Budaya risiko merupakan nilai-nilai dan perilaku individu yang akan terefleksi dalam keputusan-keputusan yang diambil dan cara melakukan pekerjaan dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan manajemen risiko. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI, serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional, baik dalam melakukan percepatan deteksi kejadian risiko, maupun monitoring penyelesaian rencana tindak lanjut perbaikan kontrol. Budaya risiko telah diatur dalam Surat Edaran Direksi No. SE.04-DIR/CTR/01/2023 Buku 2 tentang Budaya Risiko tanggal 31 Januari 2023.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

1. *Risk Control and Self Assessment* (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk/Team* Kantor Pusat BRI, *Regional Office*, Kantor Cabang Khusus, UKLN, Audit Intern Wilayah, *Regional Campus,* Kantor Cabang yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu dan Sentra Layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI) maupun Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

2. *Loss Event Database* (LED)

Loss Event Database (LED) BRI merupakan proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian non finansial maupun finansial yang meliputi *actual loss* dan *potential loss* termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul LED, analisa kejadian kerugian dapat dilakukan berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasiskan pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI telah menerapkan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III *Framework.* Ketentuan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan standar diatur melalui Surat Edaran Direksi No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 Buku 2 tentang Perhitungan ATMR Operasional.

3. *Key Risk Indicator* (KRI)

KRI adalah perangkat Manajemen Risiko yang berupa indikator kuantitatif yang dapat memberikan informasi secara dini terhadap peningkatan atau penurunan risiko dan atau penurunan efektivitas kontrol terhadap limit *threshold* yang telah ditentukan. KRI dapat bersifat *leading* maupun *lagging.* Pemantauan risiko melalui KRI bertujuan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait pengendalian risiko sehingga dapat mencegah atau meminimalisir dampak kerugian.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

3. *Key Risk Indicator* (KRI) (lanjutan)

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan Unit Kerja terkait lainnya. KRI BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko *Regional Office* yang di-*monitor* secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI. Implementasi Forum MR di level Regional dilaksanakan dalam bentuk Forum *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*, yang dihadiri oleh anggota tetap yaitu Regional CEO, Regional Risk Management Head, dan Kepala Audit Intern Wilayah.

5. *Risk Maturity Self Assessment (RMSA)*

Risk Maturity Self Assessment (RMSA) merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemapanan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

6. *Business Continuity Management* (BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI, mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, dan menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana. Kebijakan BCM diatur melalui Surat Edaran No.58-DIR/ORD/11/2022 Buku 3 tentang BCM dan Standar Operasional Prosedur No.SO.05-ORD/05/2023 tentang Pengelolaan Kelangsungan Usaha.

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*, serta berbagai pengujian rencana kelangsungan usaha. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan* (ER Plan) dan kebijakan *Business Continuity Plan* (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritikal. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba ER *Plan* dan BC *Plan* dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. *Business Continuity Management* (BCM) (lanjutan)

Dalam periode satu tahun ke belakang telah terjadi berbagai kejadian-kejadian bencana yang telah mengaktifkan prosedur kelangsungan usaha Unit Kerja BRI, dimana hal tersebut menjadi bukti kesiapan organisasi BRI untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Ketentuan mengenai tanggap darurat bencana di tempat kerja telah dirumuskan melalui Surat Edaran No. 58-/DIR/ORD/11/2022 Buku 4 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan SOP No. SO.05-ORD/05/2023 tentang Pengelolaan Kelangsungan Usaha.

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB)

Dalam rangka mengefektifkan pengeloaan risiko produk bank, maka setiap rencana penerbitan produk bank baru (PBB) di BRI, dilakukan proses validasi peningkatan materialitas risiko dan proses penilaian manajemen risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PBB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko yang dimaksud.

Selanjutnya, SKMR yang dikoordinasikan oleh SKMRO melakukan penilaian kecukupan pengelolaan risiko PBB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PBB diatur dalam Surat Edaran No. 58-/DIR/ORD/11/2022 Buku 6 tentang Pengelolan Risiko Penyelenggaraan Produk.

8. Penerapan Strategi Anti *Fraud* BRI

Semua kegiatan usaha Bank dapat terpapar risiko operasional salah satunya *fraud*. Untuk meminimalkan dampak kerugian akibat *fraud* maka BRI menerapkan Strategi *Anti Fraud* yang merupakan wujud komitmen BRI untuk tidak memberikan toleransi (zero tolerance) atas *fraud* melalui sistem pengendalian *fraud* yang efektif dan berkesinambungan. Penerapan Strategi *Anti Fraud* di BRI didukung dengan peningkatan kapabilitas deteksi *fraud* melalui pengembangan *Fraud Detection System*, serta peningkatan kompetensi dan *awareness* dari Pekerja BRI untuk mencegah, mendeteksi dan menangani *fraud* sebagai bagian dari pencegahan dan meminimalisir kerugian bank dan/atau nasabah. Sebagai bentuk komitmen seluruh Insan BRILian dalam mencegah *fraud* maka Jajaran Direksi dan Komisaris, serta jajaran Manajemen dan seluruh Pekerja BRI secara berkala menandatangani Komitmen *Anti Fraud* sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 Buku 5 tentang Strategi Anti Fraud.

Perkembangan Pemulihan Ekonomi Terkini

Perekonomian global terus menghadapi tekanan karena masih tingginya inflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dampak negatif dari pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi tingginya inflasi semakin terasa. Kenaikan bunga acuan yang sangat signifikan pada banyak negara menyebabkan kondisi keuangan semakin mengetat, sehingga berdampak pada melemahnya perdagangan global serta menurunnya keyakinan konsumen dan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi global ke depan. Proyeksi Lembaga internasional, seperti: International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Hingga Triwulan-IV 2023, paling tidak terdapat empat indikator yang mencerminkan laju perlambatan ekonomi global, yaitu: (1) Pergerakan *Purchasing Manager Index* (PMI) yang melambat sejak Mei 2023, khususnya PMI manufaktur, (2) Penurunan laju ekspor berbagai negara utama seperti China dan AS, yang mengimplikasikan penurunan permintaan dunia, (3) Penurunan lowongan kerja aktif pada berbagai negara, yang mengimplikasikan penurunan aktivitas produksi, dan (4) Laju penurunan *Leading Economic Indicator* (LEI) pada berbagai negara utama di dunia. Dari keempat faktor tersebut, penurunan LEI pada berbagai negara utama di dunia menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa laju perekonomian global ke depan akan semakin tertekan dan melambat.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Perkembangan Pemulihan Ekonomi Terkini (lanjutan)

Paling tidak terdapat tiga tantangan utama yang perlu diwaspadai ke depan, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang masih dinamis dan berfluktuasi. Pertama, tren inflasi global yang secara historis masih cukup tinggi. Laju inflasi pada berbagai negara saat ini memang dalam tren yang menurun, namun nilainya diperkirakan masih akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal (pre-pandemi tahun 2019). Tekanan inflasi yang diperkirakan masih tinggi tahun 2024 disebabkan oleh dorongan biaya suplai (*cost push inflation*) karena proyeksi harga komoditas global yang masih cukup tinggi, baik komoditas energi dan pangan.

Kedua, kondisi geopolitik yang tidak pasti, di mana belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina dan memanasnya konflik Timur Tengah dapat memicu kembali disrupsi rantai pasok barang kebutuhan primer dan komoditas energi, sehingga dapat berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketiga, pemulihan ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat aktivitas industri dan permintaan konsumen yang melambat. Hal itu disebabkan oleh masih berlangsungnya krisis properti, lemahnya keyakinan konsumen, dan tingginya angka pengangguran umur produktif. Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut diperkirakan akan berdampak negatif terhadap laju pemulihan ekonomi global tahun 2023 dan 2024.

Perekonomian global yang melambat mulai berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Triwulan-III 2023, perekonomian nasional tercatat tumbuh sebesar 4,94% *year-on-year/*yoy, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,17%yoy. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi partner dagang utama Indonesia pada periode yang sama, khususnya China dan India. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi China tercatat sebesar 4,9%yoy, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 6,3%yoy. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi India juga mengalami penurunan dari 7,8%yoy pada Triwulan-II 2023 menjadi 6,5%yoy pada Triwulan-III 2023.

Berdasarkan permintaan agregat, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun pada Triwulan-III 2023 karena melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga (Q3-2023 = 5,06%yoy; Q2-2023 = 5,22%yoy) dan kontraksi pertumbuhan pengeluaran pemerintah (Q3-2023 = -3,76%yoy; Q2-2023 = 10,57%yoy). Begitu juga, laju pertumbuhan ekspor juga semakin menurun dan kontraktif (Q3-2023 = -4,26%yoy; Q2-2023 = -2,97%yoy), seiring dengan tren penurunan harga komoditas dan perlambatan permintaan global. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh industri pengolahan dengan proporsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan-III 2023 sebesar 20,40%. Pertumbuhan industri pengolahan dalam tren yang meningkat. Sedangkan, beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan yang melambat, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi-gudang.

Dari sisi perbankan, laju pertumbuhan kredit industri secara tahunan mulai mengalami peningkatan pada seluruh sektor ekonomi, namun tetap perlu disikapi secara hati-hati. Pertumbuhan kredit pada November 2023 tercatat mengalami peningkatan ke 9,74%yoy dari 8,99%yoy pada bulan sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 sebesar 11,35%YoY. Secara *year-to-date* (YTD), pertumbuhan kredit industri juga hanya tumbuh sebesar 8,34% hingga November 2023, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9,93%. Walaupun, pertumbuhan kredit yang masih dalam fase melambat, kualitas kredit masih relatif terjaga dan stabil. Pada November 2023, nilai *gross non-performing loan* (NPL) tercatat bergerak stabil dan masih di bawah 3%, yaitu sebesar 2,36%. Sementara itu, likuiditas industri perbankan semakin terbatas dan cenderung mengetat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat ke 3,04%yoy pada November 2023, dari 3,43%yoy pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK diperkirakan akan semakin terbatas karena masih ketatnya kebijakan moneter BI dan kemampuan menabung masyarakat yang cenderung melemah.

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Perkembangan Pemulihan Ekonomi Terkini (lanjutan)

Sementara itu dalam menghadapi peluang sekaligus tantangan di era pemulihan ekonomi yang saat ini terjadi, BRI mengupayakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

1. *Asset Initiatives*
   Dalam meningkatkan pertumbuhan aset, BRI akan fokus pada beberapa hal yaitu:
   a. Fokus pada penyaluran kredit di segmen UMKM.
   b. Mengoptimalkan *New Source of Growth* yang berasal dari pembentukan holding ultra mikro dan entitas anak.
   c. Menjaga kualitas aset dengan tumbuh selektif pada sektor-sektor potensial dan tahan terhadap guncangan krisis.

2. *Liability & Equity Initiatives*
   Sebagai sumber pertumbuhan aset, dibutuhkan pertumbuhan di sisi liabilitas dan permodalan yang berkelanjutan. BRI akan fokus pada likuiditas yang bersumber dari dana murah melalui peningkatan rasio CASA serta menjaga level permodalan (CAR) yang cukup sesuai ketentuan regulator dan akselerasi pertumbuhan aset.

3. *Digital Initiatives*
   Sebagai upaya efisiensi dalam operasional perusahaan, peningkatan produktivitas pekerja, dan peningkatan pelayanan kepada nasabah, BRI akan terus melakukan digitalisasi dan mengembangkan tools dan aplikasi pendukung yang berkualitas bagi nasabah dan pekerja.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset				
Kas	31.603.784	31.603.784	27.407.478	27.407.478
Giro pada Bank Indonesia	101.909.121	101.909.121	150.935.150	150.935.150
Giro pada bank lain	22.321.935	22.321.935	21.469.857	21.469.857
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	65.223.400	65.223.400	70.399.920	70.399.920
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi	22.393.171	22.393.171	21.115.873	21.115.873
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	163.339.165	163.339.165	150.802.567	150.802.567
Biaya perolehan diamortisasi	145.277.458	144.137.459	158.323.543	154.579.632
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	51.571.488	51.571.488	37.428.446	37.428.446
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	33.595.231	33.595.231	51.014.678	51.014.678
Tagihan derivatif	911.683	911.683	911.405	911.405
Kredit yang diberikan dan pinjaman syariah	1.130.402.953	1.072.919.881	1.000.179.115	973.483.631
Piutang pembiayaan	50.524.406	49.953.587	45.809.969	43.880.120
Tagihan akseptasi	9.967.710	9.967.710	7.031.064	7.031.064
Penyertaan saham *)	1.749.102	1.749.102	1.774.614	1.774.614
Aset lain-lain **)	31.533.272	31.533.272	25.286.947	25.286.947
Total	**1.862.323.879**	**1.803.129.989**	**1.769.890.626**	**1.737.521.382**

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.
**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas				
Liabilitas segera	30.651.807	30.651.807	24.910.579	24.910.579
Simpanan nasabah				
Giro	346.124.372	346.124.372	349.755.590	349.755.590
Tabungan	527.945.550	527.945.550	522.647.920	522.647.920
Deposito berjangka	484.258.839	484.258.839	435.480.503	435.480.503
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	1.609.511	1.609.511	1.911.667	1.911.667
Tabungan	9.052	9.052	9.787	9.787
Deposito berjangka dan *deposit on call*	7.496.376	7.496.376	3.402.129	3.402.129
Inter-bank call money	2.843.380	2.843.380	4.010.964	4.010.964
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.079.458	19.079.458	9.997.592	9.997.592
Liabilitas derivatif	925.210	925.210	783.921	783.921
Liabilitas akseptasi	10.217.408	10.217.408	7.167.600	7.167.600
Surat berharga yang diterbitkan	49.637.581	49.856.444	63.611.761	63.816.479
Pinjaman yang diterima	98.850.813	98.850.813	79.371.200	79.371.200
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	496.683	505.878	501.988	505.258
Liabilitas lain-lain *)	14.052.073	14.052.073	13.285.936	13.285.936
Total	**1.594.198.113**	**1.594.426.171**	**1.516.849.137**	**1.517.057.125**

*) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi, liabilitas sewa, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

a) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu, kecuali efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi, kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang pembiayaan, surat berharga yang diterbitkan serta pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

   Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

   Estimasi nilai wajar terhadap liabilitas keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b) Efek-efek

   Nilai wajar untuk efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut (lanjutan):

c) Kredit yang diberikan dan Pinjaman syariah

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Portofolio pinjaman syariah secara umum memiliki tingkat margin mengambang dan pinjaman syariah yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap.

d) Piutang pembiayaan

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

e) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	31 Desember 2023			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	9.519.463	9.519.463	-	-
Reksadana	5.964.633	5.964.633	-	-
U.S. Treasury Bonds	2.083.983	2.083.983	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	1.470.125	1.470.125	-	-
Tagihan derivatif	911.683	-	911.683	-
Obligasi	699.447	699.447	-	-
Obligasi Subordinasi	15.783	15.783	-	-
Lainnya	2.639.737	2.639.737	-	-
	23.304.854	22.393.171	911.683	-

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2023			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset keuangan (lanjutan)				
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	100.239.655	100.239.655	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	30.414.559	30.414.559	-	-
Reksadana	13.961.119	13.961.119	-	-
Obligasi	13.897.860	13.897.860	-	-
U.S. Treasury Bonds	2.203.544	2.203.544	-	-
Monetary Authority of Singapore (MAS) *Bills*	1.544.668	1.544.668	-	-
Singapore Government Securities	571.591	571.591	-	-
Medium-Term Note	216.023	216.023	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	135.600	135.600	-	-
U.S. Treasury Bills	46.036	46.036	-	-
Lainnya	108.514	108.514	-	-
	163.339.169	163.339.169	-	-
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	122.410.214	122.410.214	-	-
Tagihan Risk Participation	20.891.761	20.891.761	-	-
Obligasi	824.352	824.352	-	-
Medium-Term Note	11.132	11.132	-	-
	144.137.459	144.137.459	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang Pembiayaan				
Kredit yang diberikan	1.072.919.881	-	985.242.035	87.677.846
Piutang pembiayaan	49.953.587	-	49.953.587	-
	1.122.873.468	-	1.035.195.622	87.677.846
Total aset keuangan	**1.453.654.950**	**329.869.799**	**1.036.107.305**	**87.677.846**
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	925.210	-	925.210	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	49.856.444	49.856.444	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	505.878	505.878	-	-
	50.362.322	50.362.322	-	-
Total liabilitas keuangan	**51.287.532**	**50.362.322**	**925.210**	**-**

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2022			
	Nilai wajar	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	10.605.908	10.605.908	-	-
Reksadana	7.084.911	7.084.911	-	-
Tagihan derivatif	911.405	-	911.405	-
Obligasi	479.720	479.720	-	-
Obligasi Subordinasi	49.669	49.669	-	-
Negotiable Certificate Of Deposits	18.554	18.554	-	-
Lainnya	2.877.111	2.877.111	-	-
	22.027.278	21.115.873	911.405	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	117.770.585	117.770.585	-	-
Obligasi	15.434.106	15.434.106	-	-
Reksadana	11.422.671	11.422.671	-	-
U.S. Treasury Bonds	1.754.568	1.754.568	-	-
Monetary Authority of Singapore (MAS) *Bills*	1.684.648	1.684.648	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	873.765	873.765	-	-
Singapore Government Securities	566.294	566.294	-	-
Negotiable Certificate of Deposit	545.461	545.461	-	-
Medium-Term Note	285.543	285.543	-	-
Obligasi Pemerintah Taiwan	153.075	153.075	-	-
Obligasi Subordinasi	119.071	119.071	-	-
Lainnya	192.780	192.780	-	-
	150.802.567	150.802.567	-	-
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	130.205.667	130.205.667	-	-
Tagihan Risk Participation	23.057.681	23.057.681	-	-
Obligasi	1.173.284	1.173.284	-	-
Medium-Term Note	136.000	136.000	-	-
Obligasi Subordinasi	7.000	7.000	-	-
	154.579.632	154.579.632	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang Pembiayaan				
Kredit yang diberikan	973.483.631	-	923.081.388	50.402.243
Piutang pembiayaan	43.880.120	-	-	43.880.120
	1.017.363.751	-	923.081.388	94.282.363
Total aset keuangan	**1.344.773.228**	**326.498.072**	**923.992.793**	**94.282.363**
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	783.921	-	783.921	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	63.816.479	63.816.479	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	505.258	505.258	-	-
	64.321.737	64.321.737	-	-
Total liabilitas keuangan	**65.105.658**	**64.321.737**	**783.921**	**-**

41. SEGMEN OPERASI

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a.

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan Perbankan Konvensional
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Perusahaan Perbankan Konvensional
BRI Global Financial Services Co. Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong)	Perusahaan Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Sekuritas
PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura
PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi
PT Pegadaian	Perusahaan Pembiayaan
PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	Perusahaan Investasi

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segmen operasi:

	Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga, premi, dan emas - neto	61.646.907	28.530.291	3.999.095	13.907.277	29.580.953	137.664.523
Pendapatan operasional lainnya	17.639.356	16.102.050	4.982.366	3.844.328	3.057.685	45.625.785
Total pendapatan	79.286.263	44.632.341	8.981.461	17.751.605	32.638.638	183.290.308
Beban operasional lainnya	(31.050.020)	(22.253.560)	(2.053.648)	(1.607.462)	(19.817.601)	(76.782.291)
Beban CKPN	(20.474.879)	(13.506.061)	7.888.285	(427.517)	(3.159.108)	(29.679.280)
Total beban	(51.524.899)	(35.759.621)	5.834.637	(2.034.979)	(22.976.709)	(106.461.571)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(20.591)	(77.380)	(48.903)	(377.093)	124.942	(399.025)
Laba sebelum beban pajak	27.740.773	8.795.340	14.767.195	15.339.533	9.786.871	76.429.712
Beban pajak	(5.270.747)	(1.671.115)	(2.872.313)	(4.104.717)	(2.085.772)	(16.004.664)
Laba Bersih	22.470.026	7.124.225	11.894.882	11.234.816	7.701.099	60.425.048
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	496.554.160	442.703.668	197.696.204	-	60.798.674	1.197.752.706
Total aset	468.573.573	418.508.640	244.435.173	632.353.605	185.530.577	1.949.401.568
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	373.473.514	488.122.102	491.087.385	-	5.645.760	1.358.328.761
Total liabilitas	373.473.514	488.122.102	507.421.680	151.222.833	128.294.759	1.648.534.888

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segmen operasi:

	Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					
Keterangan	**Mikro**	**Ritel**	**Korporasi**	**Lainnya**	**Entitas Anak**	**Total**
Pendapatan bunga, premi, dan emas - neto	59.395.789	30.128.931	(1.777.679)	12.971.032	25.755.474	126.473.547
Pendapatan operasional lainnya	13.689.096	15.553.855	3.593.099	3.879.051	2.412.593	39.127.694
Total pendapatan	73.084.885	45.682.786	1.815.420	16.850.083	28.168.067	165.601.241
Beban operasional lainnya	(34.395.404)	(18.746.771)	(1.884.810)	(1.237.497)	(18.051.530)	(74.316.012)
Beban CKPN	(8.779.414)	(17.073.704)	1.292.897	996.230	(3.415.201)	(26.979.192)
Total beban	(43.174.818)	(35.820.475)	(591.913)	(241.267)	(21.466.731)	(101.295.204)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	30.762	179.332	78.689	(11.879)	13.760	290.664
Laba sebelum beban pajak	29.940.829	10.041.643	1.302.196	16.596.937	6.715.096	64.596.701
Beban pajak	(3.892.308)	(2.164.708)	(479.226)	(5.055.150)	(1.597.102)	(13.188.494)
Laba Bersih	**26.048.521**	**7.876.935**	**822.970**	**11.541.787**	**5.117.994**	**51.408.207**
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	449.626.718	399.555.810	173.787.061	-	56.305.230	1.079.274.819
Total aset	426.126.994	372.574.207	191.822.648	688.319.441	168.082.726	1.846.926.016
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	367.656.835	469.090.526	464.028.257	-	7.108.395	1.307.884.013
Total liabilitas	367.656.835	469.090.526	477.581.582	128.737.434	119.177.316	1.562.243.693

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

c. Segmen Geografis

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografis:

	Total Pendapatan	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
Keterangan	**2023**	**2022**
Indonesia	182.635.153	164.840.457
Amerika Serikat	203.615	397.108
Singapura	230.848	245.748
Timor-Leste	155.785	101.667
Hong Kong	20.423	14.223
Taiwan	44.484	2.038
Total	**183.290.308**	**165.601.241**

	Laba sebelum beban pajak	
	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
Keterangan	**2023**	**2022**
Indonesia	76.060.127	64.111.292
Amerika Serikat	63.686	320.147
Singapura	181.470	135.024
Timor-Leste	109.877	54.946
Hong Kong	161	122
Taiwan	14.391	(24.830)
Total	**76.429.712**	**64.596.701**

	Total Aset	
Keterangan	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
Indonesia	1.885.581.840	1.789.162.542
Amerika Serikat	26.087.423	27.856.321
Singapura	28.980.347	25.069.385
Timor-Leste	6.114.107	4.256.142
Hong Kong	24.232	17.982
Taiwan	2.613.619	563.644
Total	**1.949.401.568**	**1.846.926.016**

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

c. Segmen Geografis (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografis (lanjutan):

	Total Liabilitas	
Keterangan	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
Indonesia	1.585.649.437	1.504.449.309
Amerika Serikat	26.148.777	28.000.956
Singapura	28.855.880	25.168.981
Timor-Leste	5.792.144	4.020.492
Hong Kong	6.467	4.257
Taiwan	2.082.183	599.698
Total	**1.648.534.888**	**1.562.243.693**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja terdiri atas:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Program cuti besar	3.679.294	3.207.290
Program pemutusan hubungan kerja	3.527.486	2.841.015
Program penghargaan tanda jasa	2.492.175	1.900.980
Program pensiun imbalan pasti	2.367.561	2.082.356
Program kesehatan pasca kerja BPJS	1.023.643	646.240
Program masa persiapan pensiun	20.983	17.996
Program manfaat lain dana manfaat tambahan	-	202.515
Total (Catatan 27)	**13.111.142**	**10.898.392**

Penilaian aktuaria atas program imbalan kerja masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh aktuaris independen sebagai berikut:

		Tanggal Laporan	
Entitas	**Aktuaris Independen**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
Entitas induk	KKA Enny Diah Awal	12 Januari 2024	5 Januari 2023
Entitas anak			
PT Bank Raya Indonesia Tbk	KKA Enny Diah Awal	2 Januari 2024	30 Desember 2022
PT Asuransi BRI Life	KKA Riana & Rekan	23 Januari 2024	6 Januari 2023
PT BRI Multifinance Indonesia	KKA Enny Diah Awal	27 Desember 2023	3 Januari 2023
PT BRI Danareksa Sekuritas	KKA Enny Diah Awal	8 Januari 2024	27 Januari 2023
PT BRI Ventura Investama	KKA Enny Diah Awal	21 Desember 2023	3 Januari 2023
PT BRI Asuransi Indonesia	KKA Steven & Mourits	4 Januari 2024	5 Januari 2023
PT Pegadaian	KKA Agus Susanto	21 Desember 2023	5 Januari 2023
PT Permodalan Nasional Madani	KKA Riana & Rekan	3 Januari 2024	3 Januari 2023
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	KKA Nandi & Sutama	2 Januari 2024	13 Januari 2023

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Maret 2023 adalah sebesar 42,86% dari penghasilan dasar pensiun.

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun Pegadaian dikelola oleh Dana Pensiun Pegadaian. Keputusan Direksi Pegadaian, Kontribusi Pekerja Pegadaian untuk iuran pensiun adalah sebesar 6,50% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun Pegadaian merupakan kontribusi Pegadaian, dimana kontribusi Pegadaian sejak tanggal 29 Desember 2020 adalah sebesar 16% dari penghasilan dasar pensiun.

Penilaian aktuaria atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,70%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	sesuai tabel PhDP	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,7-6,9%	7,00%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00	5,00
Tingkat kematian	GAM 1971	GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01% dari tingkat kematian	0,01% dari tingkat kematian
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti awal tahun	26.896.251	25.618.746
Beban bunga	1.927.502	1.837.112
Biaya jasa kini	413.663	386.314
Biaya jasa lalu	211.138	1.013.104
Beban pesangon	(1.012.889)	-
Pembayaran imbalan kerja (*benefit paid*)	(1.490.223)	(1.391.441)
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	1.471.670	(567.584)
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti akhir tahun	**28.417.112**	**26.896.251**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar aset program awal tahun	24.813.852	23.458.521
Hasil pengembangan riil	1.939.611	2.122.700
Pembayaran iuran-iuran (*contributions*) pemberi kerja (Catatan 44)	814.934	563.595
Pembayaran iuran-iuran (*contributions*) peserta program	58.691	60.992
Rugi aktuaria pada aset	(87.314)	(515)
Pembayaran imbalan kerja (*benefit paid*)	(1.490.223)	(1.391.441)
Total aset program	**26.049.551**	**24.813.852**

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	2.082.356	2.160.113
Beban pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 35)	(310.689)	1.452.579
Pembayaran iuran tahun berjalan (Catatan 44)	(814.934)	(563.595)
Pembayaran imbalan	(75)	-
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti - neto	1.410.903	(966.741)
Saldo akhir (Catatan 27)	**2.367.561**	**2.082.356**

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	2.422.737	3.389.477
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	1.471.670	(567.584)
Imbal hasil atas aset program	(60.767)	(399.156)
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	**3.833.640**	**2.422.737**

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Biaya jasa kini	413.663	386.314
Iuran peserta program	(58.691)	(60.922)
Beban bunga - neto	136.090	114.083
Biaya jasa lalu	211.138	-
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	(1.012.889)	1.013.104
(Pendapatan)/beban pensiun imbalan pasti (Catatan 35)	**(310.689)**	**1.452.579**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua

Pekerja BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuaria atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	6,70%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar aset	6.150.654	5.539.252
Nilai kini liabilitas THT	(3.823.023)	(3.446.233)
Surplus	**2.327.631**	**2.093.019**

Mutasi atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	-	-
Beban THT	221.233	662.321
Pengukuran kembali liabilitas THT - neto	(84.590)	(533.854)
Pembayaran iuran tahun berjalan (Catatan 44)	(136.643)	(128.467)
Saldo akhir liabilitas	**-**	**-**

Pengukuran kembali atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	(809.240)	(275.386)
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	42.498	(437.452)
Imbal hasil atas liabilitas (aset) program	(206.817)	3.537
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	79.729	(99.939)
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas THT - neto	**(893.830)**	**(809.240)**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Biaya jasa kini	293.882	246.918
Iuran peserta program	(65.181)	(61.281)
Beban bunga - neto	(7.468)	(7.116)
Biaya jasa lalu	-	483.800
Beban THT (Catatan 35)	**221.233**	**662.321**

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar di muka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (*benefit*) atas aset tersebut dan BRI tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (entitas induk)

Pekerja BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp467.623 dan Rp428.961 masing-masing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 35). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh DPBRI.

(ii) Bank Raya (entitas anak)

Bank Raya Indonesia menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pekerja tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi Bank Raya untuk dana pensiun adalah sebesar 84,97% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing pekerja yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp1.074 dan Rp977 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 35).

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perhitungan PHK dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuaria atas kewajiban perseroan yang berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon. Uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,90%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,70 – 7,10%	7,20 - 8,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 – 8,50	7,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019 GAM 1971	TMI IV 2019 GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 – 10,00% dari tingkat kematian	0,01 – 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi atas liabilitas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	2.841.015	1.972.177*)
Beban PHK (Catatan 35)	756.697	433.557
Pembayaran manfaat aktual	(123.483)	(210.157)
Pengukuran kembali liabilitas PHK - neto	58.299	648.373
Biaya terminasi	(4.086)	(2.826)
Dampak batas aset	(363)	355
Kontribusi perusahaan	(593)	(464)
Saldo akhir (Catatan 27)	**3.527.486**	**2.841.015**

*) Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp9.875.

Pengukuran kembali atas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	(126.778)	(775.151)*)
Kerugian aktuaria	58.299	648.373
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas PHK - neto	**(68.479)**	**(126.778)**

*) Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp2.067.

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Perhitungan beban program PHK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Biaya jasa kini	559.016	241.014
Beban bunga	204.278	133.610
Biaya pesangon	8.281	7.298
Biaya jasa lalu	(17.531)	115.288
Pembayaran biaya terminasi	2.299	1.252
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	354	(2.138)
Dampak atas perubahan metode atribusi pada laba rugi	-	(62.767)
Beban PHK (Catatan 35)	**756.697**	**433.557**

e. Program Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Perhitungan aktuaria (PT Pegadaian) atas masa persiapan pensiun (MPP) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Tingkat diskonto	7,00%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	GAM 1971	GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01% dari TMI tingkat kematian	0,01% dari TMI tingkat kematian
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Mutasi atas liabilitas (aset) program masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Saldo awal	17.996	20.028
Beban MPP (Catatan 35)	2.629	2.622
Pembayaran imbalan	(18.935)	(15.166)
Pengukuran kembali liabilitas MPP - neto	19.293	10.512
Saldo akhir (Catatan 27)	**20.983**	**17.996**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Program Masa Persiapan Pensiun (MPP) (lanjutan)

Perhitungan beban program Masa Persiapan Pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Biaya jasa kini	1.315	1.120
Beban bunga	1.314	1.502
Beban MPP (Catatan 35)	**2.629**	**2.622**

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI dan entitas anak juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS, dan program manfaat lain dana manfaat tambahan.

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,80%	7,40%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI	10,00% dari TMI
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,75 - 7,00%	4,40 - 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 9,00	7,00 - 10,00
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019 dan GAM 1971	TMI IV 2019 dan GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 - 10,00% dari tingkat kematian	0,01 - 10,00% dari tingkat kematian

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

Mutasi untuk liabilitas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal liabilitas	1.900.980	1.754.761*)
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	651.143	238.393
Pembayaran manfaat aktual	(75.541)	(93.160)
Rugi aktuaria pada kewajiban	15.593	986
Liabilitas penghargaan tanda jasa (Catatan 27)	**2.492.175**	**1.900.980**

*) Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp1.101.

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	187.471	158.443
Beban bunga	138.241	130.384
Biaya jasa lalu	34	125.303
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui	325.397	(175.737)
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	**651.143**	**238.393**

(ii) Cuti besar

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Entitas induk		
Tingkat diskonto	6,60%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,60 - 6,80%	4,70 - 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 9,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI IV 2019 GAM 1971	TMI IV 2019 GAM 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,10 - 10,00% dari tingkat kematian	0,10 - 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi liabilitas atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal liabilitas	3.207.290	2.950.109*)
Beban cuti besar (Catatan 35)	731.080	592.529
Pembayaran manfaat aktual	(259.076)	(335.348)
Liabilitas cuti besar (Catatan 27)	**3.679.294**	**3.207.290**

*) Saldo awal periode 31 Desember 2022 termasuk saldo awal PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM)) sebesar Rp1.241.

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Biaya jasa kini	419.424	366.897
Beban bunga	226.507	205.768
Kerugian/(keuntungan) aktuaria yang diakui	84.525	(329.267)
Biaya jasa lalu	624	349.131
Beban cuti besar (Catatan 35)	**731.080**	**592.529**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

Perhitungan aktuaria atas program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi (entitas induk) sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,00%	7,40%
Tingkat kenaikan iuran BPJS Kesehatan	4,88	4,88
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status program kesehatan pasca kerja BPJS sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai kini liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	2.526.313	2.121.676
Nilai wajar aset	(1.502.670)	(1.475.436)
Surplus (Defisit)	**1.023.643**	**646.240**

Mutasi liabilitas atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal liabilitas	646.240	598.635
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	171.575	129.362
Pengukuran kembali aset program kesehatan pasca kerja BPJS	205.828	(81.757)
Liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 27)	**1.023.643**	**646.240**

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	(10.926)	70.831
Keuntungan aktuaria	172.708	(125.510)
Imbal hasil atas aset program	33.119	43.753
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto	**194.901**	**(10.926)**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Beban program kesehatan pasca kerja BPJS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Biaya jasa kini	123.753	84.465
Beban bunga - neto	47.822	44.897
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	**171.575**	**129.362**

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan

Penilaian aktuaria atas program manfaat lain dana manfaat tambahan BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Tingkat diskonto	6,70%	7,50%
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI 2019	10% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Nilai kini liabilitas awal tahun	2.165.701	2.127.731
Biaya bunga	155.339	156.733
Biaya jasa kini	15.282	16.972
Biaya jasa lalu	(416.041)	-
Pembayaran imbalan kerja (*benefit paid*)	(133.039)	(130.910)
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	76.491	(4.825)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**1.863.733**	**2.165.701**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai wajar aset program awal tahun	1.963.186	1.974.114
Pembayaran imbalan kerja (*benefit paid*)	(133.039)	(130.910)
Hasil pengembangan riil	153.820	119.982
Total aset program	**1.983.967**	**1.963.186**

Mutasi atas kewajiban program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	202.515	153.617
Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan - neto (Catatan 35)	(385.773)	28.647
Pengukuran kembali liabilitas - neto	183.258	20.251
Saldo akhir (Catatan 27)	**-**	**202.515**

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal	88.994	68.743
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	76.492	(4.825)
Imbal hasil atas aset program	(13.467)	25.076
Perubahan atas dampak aset diluar bunga neto liabilitas (aset)	120.233	-
Jumlah pengukuran kembali atas (aset) liabilitas imbalan pasti - neto	**272.252**	**88.994**

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Biaya jasa lalu	(416.041)	-
Biaya jasa kini	15.282	16.972
Bunga - neto	14.986	11.675
Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan (Catatan 35)	**(385.773)**	**28.647**

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit):

(i) Program pemutusan hubungan kerja (PHK)

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(287.595)
Penurunan	-1,00	341.387

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(290.048)
Penurunan	-1,00	438.151

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Jatuh Tempo		
< 1 tahun	44.679	45.925
1 - < 2 tahun	42.715	43.887
2 - < 3 tahun	42.755	40.757
3 - < 4 tahun	39.919	40.217
4 - < 5 tahun	42.214	36.843
> 5 tahun	2.005.978	1.502.562

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(ii) Program pensiun imbalan pasti

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(2.899.376)
Penurunan	-1,00	3.559.760

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(3.217.521)
Penurunan	-1,00	2.885.038

Iuran Jatuh Tempo

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Jatuh Tempo		
< 1 tahun	272.064	323.921
1 - < 2 tahun	240.698	295.589
2 - < 3 tahun	229.567	291.267
3 - < 4 tahun	219.183	285.858
4 - < 5 tahun	209.947	280.142
> 5 tahun	610.435	856.816

(iii) Program tunjangan hari tua

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(338.634)
Penurunan	-1,00	390.893

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(301.300)
Penurunan	-1,00	347.790

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(iii) Program tunjangan hari tua (lanjutan)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jatuh Tempo		
< 1 tahun	142.759	156.804
1 - < 2 tahun	139.786	133.868
2 - < 3 tahun	130.677	130.058
3 - < 4 tahun	123.810	122.970
4 - < 5 tahun	109.409	115.815
> 5 tahun	3.176.581	2.786.719

(iv) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(413.143)
Penurunan	-1,00	547.176

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(197.389)
Penurunan	-1,00	320.033

Iuran Jatuh Tempo

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jatuh Tempo		
< 1 tahun	123.753	86.509
1 - < 2 tahun	127.334	91.048
2 - < 3 tahun	131.662	95.798
3 - < 4 tahun	136.652	100.893
4 - < 5 tahun	142.168	106.453
> 5 tahun	3.332.579	2.944.261

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuaria dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(v) Cadangan penghargaan tanda jasa

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(222.666)
Penurunan	-1,00	257.962

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(163.880)
Penurunan	-1,00	189.468

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Jatuh Tempo		
< 1 tahun	73.040	69.730
1 - < 2 tahun	103.118	67.471
2 - < 3 tahun	107.707	92.982
3 - < 4 tahun	119.264	94.345
4 - < 5 tahun	87.647	103.083
> 5 tahun	1.793.147	1.317.680

(vi) Cuti besar

	31 Desember 2023	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(219.152)
Penurunan	-1,00	247.239

	31 Desember 2022	
	Asumsi tingkat diskonto	**Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja**
Kenaikan	+1,00%	(188.310)
Penurunan	-1,00	211.966

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Jatuh Tempo		
< 1 tahun	269.305	227.948
1 - < 2 tahun	312.512	241.756
2 - < 3 tahun	311.458	282.296
3 - < 4 tahun	308.038	272.297
4 - < 5 tahun	194.598	266.133
> 5 tahun	1.890.135	1.596.796

43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Komitmen		
Tagihan komitmen		
Pembelian *spot* dan berjangka mata uang asing	24.948.222	15.046.421
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 26d)	128.590.416	86.290.063
Penjualan *spot* dan berjangka mata uang asing	63.924.016	69.751.674
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26d)	11.447.230	13.658.668
	203.961.662	169.700.405
Komitmen - neto	**(179.013.440)**	**(154.653.984)**
Kontinjensi		
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26d) dalam bentuk:		
Garansi bank	56.219.970	62.487.277
Stand by L/C	9.672.955	12.367.721
	65.892.925	74.854.998
Kontinjensi - neto	**(65.892.925)**	**(74.854.998)**

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Manajemen Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Program imbalan kerja
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
Perusahaan Umum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri Taspen	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain
PT PNM Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT BNI Asset Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT INKA Multi Solusi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Industri Kereta Api (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wijaya Karya Realty	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Aset lain-lain
PT PAL Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Jasa Marga Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Taspen (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bukit Asam Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Simpanan nasabah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain, Simpanan nasabah
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Bahana TCW Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Pinjaman yang diterima, Simpanan dari bank lain
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Simpanan dari bank lain, Pinjaman yang diterima
PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Simpanan nasabah

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Simpanan nasabah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan dan liabilitas akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya,
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor,
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Garansi yang diterbitkan, Pinjaman yang diterima
PT Pertamina EP Cepu	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Pusat Investasi Pemerintah	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman yang diterima
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Hutama Karya Infrastruktur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Petrokimia Kayaku	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Kilang Pertamina Internasional	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Pinjaman yang diterima
Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program THT

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Dana Pensiun BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun imbalan kerja
Dana Pensiun Pegadaian	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun imbalan kerja
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun iuran pasti
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI	Hubungan Program Imbalan Pasca Kerja	Program pensiun iuran pasti
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Pinjaman yang diterima
PT Bhirawa Steel	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
High Speed Railways Contractor Consortium	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Garuda Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Elnusa Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan dan liabilitas akseptasi
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya,
PT Kimia Farma Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wika Semarang Demak Seksi 2	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Pupuk Kujang Cikampek	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Danareksa Finance	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman yang diterima

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	154.693	219.357
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122.101	213.795
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	113.847	127.372
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	57.615	137.390
PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)	3	49
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	15
	448.259	697.978
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.700.170	1.402.075
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	612.208	502.857
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	508.013	325.250
PT Bank Mandiri Taspen	100.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.050	822.531
	2.927.441	3.052.713
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	233.011.046	262.347.815
PT BRI Manajamen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)	4.872.220	5.402.870
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.515.732	1.260.743
PT PNM Investment Management	1.907.182	719.559
PT Bahana TCW Investment Management	1.758.031	1.514.551
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.746.614	2.018.830
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.605.173	1.355.122
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.325.311	1.542.117
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.048.442	1.043.810
PT BNI Asset Management	759.176	756.788
Lainnya	5.991.354	8.349.087
	256.540.281	286.311.292
Wesel ekspor dan tagihan lainnya (Catatan 8)		
High Speed Railway Contractor Consortium	1.441.374	911.412
PT Pupuk Kalimantan Timur	935.126	105.910
PT Bhirawa Steel	515.002	415.641
PP WIKA Semarang Demak Seksi 2	500.000	567.168
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	434.070	432.832
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	230.000	446.250
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	183.076	933.726
PT PP Presisi Tbk	159.644	285.091
PT Pupuk Kujang Cikampek	143.762	-
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	60.028	218.658
Lainnya	436.962	4.594.737
	5.039.044	8.911.425

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset (lanjutan)		
Kredit yang diberikan (Catatan 11)		
Perusahaan Umum BULOG	8.050.411	2.806.206
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.223.106	9.346.356
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.493.912	4.526.884
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.176.593	3.069.554
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2.270.033	1.332.717
PT Pertamina EP Cepu	2.263.613	2.573.381
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.033.162	2.119.335
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	2.025.180	2.140.183
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1.773.059	2.217.674
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.719.923	1.761.099
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.008.656	945.183
Manajemen Kunci	204.348	199.268
Lain-lain	25.038.474	30.711.916
Total	**61.280.470**	**63.749.756**
Piutang Pembiayaan (Catatan 13)		
PT Prima Armada Raya	30.351	-
PT Hutama Karya Infrastruktur	-	7.205
	30.351	7.205
Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (Catatan 14)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	837.353	1.112.455
PT PP Presisi Tbk	156.230	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	100.038	70.618
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	52.350	133.693
PT INKA Multi Solusi	50.260	-
PT Wijaya Karya Industri Energi	14.687	2.070
PT Industri Kereta Api (Persero)	1.973	-
PT Petrokimia Kayaku	554	2.089
PT Elnusa Tbk	117	-
PT Petrokimia Gresik	-	176.581
Lainnya	-	112.465
	1.213.562	1.609.971
Penyertaan saham (Catatan 15)		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.479.625	4.662.635
PT Fintek Karya Nusantara	753.258	537.548
PT Bahana Artha Ventura	79.440	77.846
	6.312.323	5.278.029
Aset lain-lain (Catatan 17)		
PT Wijaya Karya Realty	707.466	707.609
	707.466	707.609
Total aset dari pihak-pihak berelasi	**334.499.197**	**370.325.978**
Total aset konsolidasian	**1.965.007.030**	**1.865.639.010**
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	17,02%	19,85%

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Liabilitas		
Giro (Catatan 19)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	174.787.869	183.945.607
Manajemen Kunci	3.672	3.547
Lain-lain	103.303	216.597
	174.894.844	184.165.751
Tabungan (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	259.230	646.598
Manajemen Kunci	166.445	183.727
Lain-lain	20.752	34.420
	446.427	864.745
Deposito Berjangka (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	156.006.956	138.644.688
Manajemen Kunci	60.153	74.991
Lain-lain	231.150	477.302
	156.298.259	139.196.981
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 22)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	462.943	821.691
Surat Berharga yang Diterbitkan (Catatan 24)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	6.657.214	7.642.578
Pinjaman yang Diterima (Catatan 25)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	26.102.658	18.849.036
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi (Catatan 29)	231.563	363.095
Kompensasi kepada manajemen manajemen kunci (Catatan 42)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	801.974	488.989
Nilai kini kewajiban PHK	352.673	93.386
Nilai kini kewajiban THT	170.036	136.523
Nilai kini kewajiban cuti besar	145.896	80.502
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	115.505	60.890
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	9.158	11.577
Nilai kini kewajiban BPJS	21.495	15.625
	1.616.737	887.492
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	**366.710.645**	**352.428.274**
Total liabilitas konsolidasian	**1.648.534.888**	**1.562.243.693**
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	22,24%	22,58%

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26b)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.562.647	4.590.082
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.518.752	2.872.589
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.912.039	8.077.346
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.662.592	1.003.627
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.596.645	1.613.163
PT Pertamina (Persero)	1.308.967	3.182.709
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	978.687	3.284.232
PT Pertamina Hulu Rokan	769.850	982.231
PT PAL Indonesia	646.210	280.863
PT Telekomunikasi Selular	620.889	23.460
Lain-lain	5.589.550	6.489.896
	23.166.828	**32.400.198**
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26b)		
Perum BULOG	3.827.742	576.595
PT Kilang Pertamina International	1.694.273	1.741.143
PT Industri Kereta Api (Persero)	580.158	1.011.007
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	384.473	450.243
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	375.744	649.498
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	255.051	279.764
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	195.499	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	191.032	42.387
PT Bhirawa Steel	190.796	151.966
PT Kimia Farma Tbk	107.040	-
Lain-lain	417.521	1.366.024
	8.219.329	**6.268.627**

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Iuran Program Pensiun Imbalan Pasti (Catatan 42a)	814.934	563.595
Iuran Program Tunjangan Hari Tua (Catatan 42b)	136.643	128.467
Iuran Program Pensiun Iuran Pasti (Catatan 42c)	468.697	451.679
Total	**1.420.274**	**1.143.741**
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 35)		
Gaji dan tunjangan Direksi	195.671	189.966
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	83.417	84.369
Total	**279.088**	**274.335**

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Tantiem, bonus dan insentif		
Dewan Komisaris, Direksi		
dan manajemen kunci (Catatan 35)		
Tantiem Direksi	404.423	443.816
Tantiem Dewan Komisaris	159.244	131.568
Bonus dan insentif Manajemen Kunci	187.258	97.479
Total	**750.925**	**672.863**

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Aset		
Giro pada Bank lain	0,023%	0,037%
Penempatan pada Bank Indonesia dan		
lembaga keuangan lain	0,149	0,164
Efek-efek	13,055	15,347
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0,256	0,478
Kredit yang diberikan	3,119	3,417
Piutang pembiayaan	0,002	0,000
Tagihan akseptasi	0,062	0,086
Penyertaan saham	0,321	0,283
Aset lain-lain	0,036	0,038
Total	**17,023%**	**19,850%**

	31 Desember 2023	**31 Desember 2022**
Liabilitas		
Giro	10,609%	11,789%
Tabungan	0,027	0,055
Deposito berjangka	9,481	8,910
Simpanan dari Bank lain dan		
lembaga keuangan lainnya	0,028	0,053
Surat berharga yang diterbitkan	0,404	0,489
Pinjaman yang diterima	1,583	1,207
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	0,014	0,023
Kompensasi kepada manajemen Manajemen Kunci	0,098	0,057
Total	**22,244%**	**22,583%**

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

1) Pada tanggal 5 Juni 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan CRM Tahun 2023 untuk Zona 1, Zona 2 dan Zona 3 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp999.926.

2) Pada tanggal 26 Mei 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Pengadaan 32.214 Unit HP Brispot Kaunit dan Mantri untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp409.762.

3) Pada tanggal 22 Agustus 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Pacificagung Trijaya sehubungan dengan Pengadaan Pengadaan Mesin Self Service Banking Terminal (SSBT) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp177.286.

4) Pada tanggal 13 April 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Info Solusindo Data Utama sehubungan dengan Pengadaan Penambahan Kapasitas *Backup Solution Workload* 2022 - 2023 DC Ragunan dan DC Tabanan untuk jangka waktu 22 (dua puluh dua) minggu dengan nilai kontrak senilai Rp146.398.

5) Pada tanggal 13 Juli 2023, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 E1080 DC Tabanan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp125.000

6) Pada tanggal 20 Desember 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Perpanjangan Sewa Layanan *Simcard* Telkomsel untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp258.590.

7) Pada tanggal 13 Juni 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan CRM RBB Tahun 2022 (Zona 1 dan Zona 2) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp504.023.

8) Pada tanggal 13 Juni 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan CRM RBB Tahun 2022 (Zona 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp272.614.

9) Pada tanggal 21 Februari 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Deloitte Consulting sehubungan dengan Pengadaan Konsultan *System Integrator* Fase Implementasi *Product* untuk jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp348.500.

10) Pada tanggal 17 Januari 2022, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 untuk DC GTI Ragunan dan ODC Sentul untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp350.400.

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp1.361.894 dan Rp1.634.654 (Catatan 28). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh Bank Umum yang berbadan hukum di Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebankan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum", Program Penjaminan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) telah berakhir pada tanggal 22 September 2005 untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan" yang terakhir kali diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK"), LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" yang disempurnakan melalui PLPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (nilai penuh).

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 2,25% dan 1,75%.

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024:

a. Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan". Entitas menerapkan amandemen tersebut pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK No. 25. Penerapan lebih dini diperkenankan. Apabila entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih awal, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" pada periode tersebut.
b. Amandemen PSAK No. 73 "Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik". Penerapan lebih dini diperkenankan.
c. Amandemen PSAK No. 2 "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

a. PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS No. 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 72.
b. Amandemen PSAK No. 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Saat ini BRI dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan dan direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

48. INFORMASI TAMBAHAN

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

CAR pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan POJK No. 27/POJK.03.2022 tentang Perubahan kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, BRI wajib membentuk tambahan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge*, yang wajib dibentuk secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pembentukan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* yang wajib dibentuk oleh BRI berdasarkan persentase tertentu dari ATMR adalah masing-masing 2,5%, 0% dan 2,5%.

Berdasarkan profil risiko BRI pada semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2022, yaitu *low to moderate*, maka CAR minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Modal Inti (Tier 1)		
Modal Inti Utama (CET 1)	238.956.599	234.727.964
Modal Pelengkap (Tier 2)	11.612.168	10.564.211
Total Modal	**250.568.767**	**245.292.175**
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko Kredit*)	890.512.335	839.721.640
ATMR untuk Risiko Pasar**)	3.617.404	3.118.189
ATMR untuk Risiko Operasional***)	99.021.545	209.879.369
Total ATMR	**993.151.284**	**1.052.719.198**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio CAR		
Rasio CET 1	24,06%	22,30%
Rasio Tier 1	24,06	22,30
Rasio Tier 2	1,17	1,00
Rasio Total	25,23	23,30
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00	9,00

*) Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
**) Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.
***) Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020.

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio NPL BRI konsolidasian (kredit yang diberikan, pinjaman syariah dan piutang pembiayaan) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio NPL - bruto	2,95%	2,67%
Rasio NPL - neto	0,72%	0,69

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan, piutang pembiayaan dan pinjaman syariah.

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (*safe keeping services*) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement handling*);
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI adalah sebesar Rp Rp1.288.847.232 dan Rp555.527.157 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Aset yang disimpan dalam kegiatan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa Wali Amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai Wali Amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa Wali Amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali Amanat;
- Agen jaminan; dan
- Agen pemantau.

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa *Trust* BRI meliputi:

- Layanan Jasa Agen Pembayar;
- Layanan Jasa Agen Peminjaman;
- Layanan Jasa Agen Investasi; dan
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan.

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

e. Jasa *Trust* (lanjutan)

BRI saat ini telah memberikan pelayanan Jasa *Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di bawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan Jasa *Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (non-Trust) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, Jasa *Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

f. Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) didirikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 26 Maret 2004 berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B. 140- DIR/KUI/TRY/03/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-97/KM.6/2004 tanggal 24 Mei 2004.

DPLK BRI menyelenggarakan Program antara lain:
- *Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP);*
- *Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca Kerja (PPDKP); dan*
- *Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK).*

g. Agen Sindikasi

BRI saat ini memberikan pelayanan Jasa Agen Sindikasi untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan sindikasi yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*;
- Agen Fasilitas;
- Agen Jaminan; dan
- Agen Penampungan.

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek adalah sebesar Rp661.755.070 dan Rp509.525.513, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

49. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba per lembar saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	60.099.863	150.880.994.955	398
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	33.812.185	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	**60.099.863**	**150.914.807.140**	**398**

	31 Desember 2022		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	51.170.312	151.386.393.314	338
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	22.542.123	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	**51.170.312**	**151.408.935.437**	**338**

50. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

		Arus Kas			
	31 Desember 2022	Penerimaan	Pembayaran	Perubahan Non Kas	31 Desember 2023
Pinjaman yang diterima	79.371.200	31.573.410	(12.212.871)	119.074	98.850.813
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.988	494.142	(500.000)	553	496.683
Surat berharga yang diterbitkan	63.611.761	14.112.994	(28.141.850)	54.676	49.637.581
Total	**143.484.949**	**46.180.546**	**(40.854.721)**	**174.303**	**148.985.077**

		Arus Kas			
	31 Desember 2021	Penerimaan	Pembayaran	Perubahan Non Kas	31 Desember 2022
Pinjaman yang diterima	68.458.547	20.079.547	(9.011.013)	(155.881)	79.371.200
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.375	-	-	613	501.988
Surat berharga yang diterbitkan	55.306.697	21.739.525	(14.650.023)	1.215.562	63.611.761
Total	**124.266.619**	**41.819.072**	**(23.661.036)**	**1.060.294**	**143.484.949**

51. REKLASIFIKASI DAN PENYESUAIAN AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi sehingga sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Ringkasan dari akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	**Sebelum Reklasifikasi**	**Reklasifikasi**	**Sesudah Reklasifikasi**
Pendapatan operasional lainnya			
Lain-lain	13.243.725	(8.175.106)	5.068.619
Beban operasional lainnya			
Lain-lain	(16.843.148)	7.875.955	(8.967.193)
Pendapatan penjualan emas	-	8.175.106	8.175.106
Beban harga pokok penjualan emas	-	(7.875.955)	(7.875.955)

52. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi BRI pada tanggal 31 Januari 2024.

53. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk hanya menyajikan informasi laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas investasi pada entitas anak disajikan dengan metode biaya.

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan pada halaman 348 - 357.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
Kas	31.515.572	27.320.384
Giro pada Bank Indonesia	101.388.737	149.961.985
Giro pada Bank Lain	21.669.212	20.449.914
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.815)	(17.791)
	21.659.397	20.432.123
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	63.886.042	68.259.629
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(990)
	63.884.965	68.258.639
Efek-efek	305.475.916	309.070.065
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65.374)	(73.583)
	305.410.542	308.996.482
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	53.895.404	39.067.375
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.323.916)	(1.638.929)
	51.571.488	37.428.446
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	33.350.175	51.014.678
Tagihan Derivatif	905.573	911.405
Kredit yang Diberikan	1.146.082.506	1.029.802.549
Cadangan kerugian penurunan nilai	(77.009.890)	(84.578.819)
	1.069.072.616	945.223.730
Tagihan Akseptasi	10.217.408	7.096.719
Cadangan kerugian penurunan nilai	(249.698)	(136.450)
	9.967.710	6.960.269
Penyertaan Saham	49.254.757	47.936.173
Aset Tetap		
Biaya perolehan	59.583.105	54.097.275
Akumulasi penyusutan	(16.550.584)	(14.582.523)
Nilai buku – neto	43.032.521	39.514.752
Aset Pajak Tangguhan – neto	12.139.962	15.415.319
Aset Lain-lain – neto	42.094.716	31.620.288
TOTAL ASET	**1.835.248.731**	**1.750.994.673**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	26.106.970	18.988.424
Simpanan Nasabah		
Giro	346.654.593	349.491.946
Tabungan	526.514.556	521.039.799
Deposito Berjangka	479.513.851	430.243.873
Total Simpanan Nasabah	1.352.683.000	1.300.775.618
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	12.066.959	9.480.779
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	19.079.458	9.724.245
Liabilitas Derivatif	918.194	783.921
Liabilitas Akseptasi	10.217.408	7.096.719
Utang Pajak	1.481.949	1.814.219
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.239.610	36.841.620
Pinjaman yang Diterima	41.650.054	38.803.987
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	6.116.888	6.456.606
Liabilitas Imbalan Kerja	18.880.915	17.419.000
Liabilitas Lain-lain	16.573.484	8.685.593
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	496.683	501.988
TOTAL LIABILITAS	**1.536.511.572**	**1.457.372.719**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)		
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B)	7.577.950	7.577.950
Tambahan modal disetor	76.245.954	76.029.910
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	19.848.571	19.848.571
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(253.585)	(128.611)
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	(2.460.750)	(4.463.331)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	120.722	137.288
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.951.615)	(691.307)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(3.614.321)	(2.202.178)
Opsi Saham	54.769	16.297
Cadangan kompensasi atas saham bonus	287.482	210.266
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	199.859.297	194.264.414
Total Saldo Laba	202.881.982	197.287.099
TOTAL EKUITAS	**298.737.159**	**293.621.954**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.835.248.731**	**1.750.994.673**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	146.917.842	123.834.560
Beban Bunga	(38.484.029)	(22.829.991)
Pendapatan Bunga - neto	108.433.813	101.004.569
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	20.292.184	18.469.908
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	16.275.168	11.856.901
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	428.531	992.890
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	1.792.940	1.430.867
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	89.152	49.764
Lain-lain	3.850.285	5.519.975
Total Pendapatan Operasional lainnya	42.728.260	38.320.305
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(26.860.060)	(24.076.699)
Beban penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	340.065	516.611
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan	(177)	(3.904)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(26.519.496)	(29.316.409)
Umum dan administrasi	(21.019.914)	(19.038.743)
Lain-lain	(9.506.374)	(8.263.325)
Total Beban Operasional lainnya	(57.045.784)	(56.618.477)
LABA OPERASIONAL	**67.596.117**	**59.142.405**
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	**(523.967)**	**276.905**
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**67.072.150**	**59.419.310**
BEBAN PAJAK	**(13.918.892)**	**(11.591.390)**
LABA TAHUN BERJALAN	**53.153.258**	**47.827.920**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
Penghasilan komprehensif lainnya:		
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.555.936)	731.161
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	295.628	(138.921)
Surplus atas revaluasi aset tetap	-	2.984.488
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(124.974)	(12.089)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	2.472.322	(7.817.894)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(16.566)	(395.950)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(469.741)	1.485.400
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan - Setelah Pajak	600.733	(3.163.805)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**53.753.991**	**44.664.115**
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
Dasar (dalam Rupiah penuh)	352	316
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	352	316

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	(Kerugian) Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi saham kepada pekerja	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	**7.577.950**	**76.324.093**	**533.238**	**(116.522)**	**1.869.163**	**(1.283.547)**	**(45.997)**	**226.563**	**16.864.083**	**3.022.685**	**181.445.920**	**286.417.629**
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.827.920	47.827.920
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(395.950)	(12.089)	(6.332.494)	592.240	-	-	2.984.488	-	-	(3.163.805)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(395.950)	(12.089)	(6.332.494)	592.240	-	-	2.984.488	-	47.827.920	44.664.115
Pembagian laba												
- dividen atas laba tahun 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.406.603)	(26.406.603)
- dividen interim atas laba tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.602.823)	(8.602.823)
Akuisisi atas entitas sepengendali	-	(292.842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(292.842)
Saham bonus	-	(1.341)	-	-	-	-	31.363	-	-	-	-	30.022
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	(2.187.544)	-	-	-	-	(2.187.544)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**7.577.950**	**76.029.910**	**137.288**	**(128.611)**	**(4.463.331)**	**(691.307)**	**(2.202.178)**	**226.563**	**19.848.571**	**3.022.685**	**194.264.414**	**293.621.954**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasuri	Cadangan kompensasi saham dan opsi saham kepada pekerja	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**7.577.950**	**76.029.910**	**137.288**	**(128.611)**	**(4.463.331)**	**(691.307)**	**(2.202.178)**	**226.563**	**19.848.571**	**3.022.685**	**194.264.414**	**293.621.954**
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.153.258	53.153.258
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(16.566)	(124.974)	2.002.581	(1.260.308)	-	-	-	-	-	600.733
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(16.566)	(124.974)	2.002.581	(1.260.308)	-	-	-	-	53.153.258	53.753.991
Pembagian laba												
- dividen atas laba tahun 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.891.943)	(34.891.943)
- dividen interim atas laba tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.666.432)	(12.666.432)
Opsi saham	-	-	-	-	-	-	-	38.472	-	-	-	38.472
Saham bonus	-	216.044	-	-	-	-	31.305	77.216	-	-	-	324.565
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	(1.443.448)	-	-	-	-	(1.443.448)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**7.577.950**	**76.245.954**	**120.722**	**(253.585)**	**(2.460.750)**	**(1.951.615)**	**(3.614.321)**	**342.251**	**19.848.571**	**3.022.685**	**199.859.297**	**298.737.159**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan bunga	149.446.983	115.644.034
Pembayaran bunga	(38.291.956)	(22.293.240)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	16.275.168	11.856.901
Pendapatan operasional lainnya	26.200.640	24.755.197
Beban operasional lainnya	(43.435.228)	(53.494.619)
Beban non-operasional - neto	(641.374)	(55.705)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(13.239.274)	(13.811.923)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**96.314.959**	**62.600.645**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	(885.657)	(108.840)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(24.024)	(2.151.584)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(14.828.029)	(9.403.150)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.664.503	3.250.442
Kredit yang diberikan	(149.370.377)	(107.005.428)
Aset lain-lain	(9.039.269)	(3.665.791)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	(7.348.880)	5.549.002
Simpanan:		
Giro	(2.837.353)	130.094.794
Tabungan	5.474.757	26.464.054
Deposito berjangka	49.269.978	16.368.054
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	2.586.180	(3.644.982)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.355.213	(19.684.263)
Liabilitas lain-lain	5.076.952	(1.795.767)
Kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi	**1.408.953**	**96.867.186**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	**2022**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Penerimaan dividen	160.637	1.677.920
Perolehan aset tetap	(6.767.307)	(6.050.463)
Hasil penjualan aset tetap	117.407	332.609
Penambahan penyertaan saham	(500.000)	(1.566.343)
Kenaikan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	5.749.949	40.130.319
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan investasi	**(1.239.314)**	**34.524.042**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	7.929.634	10.321.637
Pembayaran pinjaman yang diterima	(5.168.396)	(1.554.001)
Saham yang dibeli kembali	(1.443.448)	(2.187.544)
Pembagian laba untuk dividen	(43.494.766)	(26.406.603)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	6.059.485	10.036.163
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(12.307.750)	(4.666.850)
Penerimaan pinjaman subordinasi	494.142	-
Pembayaran pinjaman subordinasi	(500.000)	-
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(48.431.099)	(14.457.198)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(48.261.460)**	**116.934.030**
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	**(2.663)**	**(30.287)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**263.964.137**	**147.060.394**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**215.700.014**	**263.964.137**
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	31.515.572	27.320.384
Giro pada Bank Indonesia	101.388.737	149.961.985
Giro pada bank lain	21.669.212	20.449.914
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	60.972.523	66.231.854
Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	153.970	-
Total Kas dan Setara Kas	**215.700.014**	**263.964.137**

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK - ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS INVESTASI PADA ENTITAS ANAK
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak yang disajikan dengan metode biaya sebagai berikut:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.448.979	86,85%	5.448.979	86,85%
BRI Global Financial Services Co. Ltd. (dahulu BRI Remittance Co. Limited)	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI Life	1.626.643	54,77	1.626.643	59,02
PT BRI Multifinance Indonesia	1.055.003	99,88	1.055.003	99,88
PT BRI Danareksa Sekuritas	513.888	67,00	513.888	67,00
PT BRI Ventura Investama	2.148.090	99,97	1.648.090	99,97
PT BRI Asuransi Indonesia	1.041.000	90,00	1.041.000	90,00
PT Pegadaian	25.326.438	99,99	25.326.438	99,99
PT Permodalan Nasional Madani	6.073.819	99,99	6.073.819	99,99
PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) (dahulu PT Danareksa Investment Management (DIM))	458.433	65,00	458.433	65,00

Laporan Tahunan
2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Head Office
Jl Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254,
251-0264, 251-0269, 251-0279
Fax. : (62-21) 250-0077

www.bri.co.id

Corporate Secretary
Gedung BRI 1 lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. : (62-21) 575 1966
Fax. : (62-21) 570 0916